BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan;
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan; dan
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 Dinas Pendidikan dalam prosesnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang berisi tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Selain berpedoman pada peraturan tersebut, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 berpedoman pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun Dinas Pendidikan adalah rencana kerja tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan potret kebutuhan pembangunan pendidikan serta indikator sasaran program yang akan dilaksanakan secara terencana dan merupakan program kegiatan prioritas melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan sumber anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, dalam perjalanan mengimplementasikan Rencana Kerja

Tahun 2025, Dinas Pendidikan mengalami beberapa kendala, baik berkaitan dengan kekurangan anggaran, kebutuhan mendesak untuk dianggarkan, dan beberapa tambahan Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, oleh karena itu Rencana Kerja Tahun 2025 perlu diadakan perubahan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, menindaklanjuti Surat Edaran SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui tahapan penyusunan secara sistematis, yakni persiapan penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Pendidikan melalui proses sebagai berikut:

(a) analisis gambaran pelayanan Dinas Pendidikan;
(b) *mereview* hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026;
(c) penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
(d) penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten;
(e) perumusan tujuan dan sasaran;
(f) penelaahan usulan masyarakat; dan
(g) perumusan kegiatan prioritas. Namun demikian dengan adanya kebutuhan mendesak, hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh setiap bidang terhadap realisasi anggaran dari triwulan kesatu hingga triwulan kedua, terdapat beberapa kendala baik terkait anggaran pelaksanaan maupun adanya program/ kegiatan, sehingga Renja Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan maksud dapat dipahami oleh berbagai pihak tentang adanya sejumlah perubahan baik penambahan anggaran maupun pengurangan Anggaran dari rencana kerja 2025 awal. Perubahan dan/atau tambahan anggaran selain dari upaya efisiensi anggaran yang tersedia untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak, pokok pikiran dewan, aspirasi masyarakat dan memperhatikan arahan Kepala Daerah (*Top Down*) gun mempercepat capaian target/ peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Instimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
    serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengadaptasikan dan menyesuaikan adanya perubahan anggaran dan judul kegiatan, meliputi pengurangan anggaran, penambahan Anggaran, penambahan judul kegiatan baru dari sumber Anggaran Bantuan Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Maksud lain dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk menjadikan pedoman bagi para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memudahkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu tiga bulan pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Memberikan gambaran tentang evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2025 dibandingkan dengan capain kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.
b. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan selama lima tahun yakni Tahun 2021-2026 dan merumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani Tahun 2025.

c. Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dijadikan pedoman para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada akhir Tahun 2025.

d. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan yang menjadi dasar penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025 oleh setiap bidang/sekretariat, setiap seksi dan subbag di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

e. Memberikan pedoman kepada setiap Bidang, Sekretariat, serta Kasi dan Kasubbag untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya serta mengarahkan untuk dapat merealisasikan Anggaran sesuai perubahan sejumlah kegiatan yang mengalami pengurangan/pengalihan, penambahan, dan judul-judul kegiatan baru dari sumber Anggaran Bantuan Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ll Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3 Reviu terhadap Rancangan RKPD
- 2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap laporan realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 khususnya mengenai pencapain target kinerja dan keuangan. Dalam Penyusunan Perubahan Renja Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tahun 2025, perlu kiranya berpedoman pada Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang secara umum dapat digambarkan/ terbagi dalam beberapa program dan kegiatan antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 738.610.965.423,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 271.726.006.783,00 dengan output dari rencana jumlah 83,5 poin terealisasi 0 poin, yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu :
   I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 331.944.452,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 83.109.439,00 dengan output dari rencana jumlah 8 dokumen terealisasi 2 dokumen, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 98.485.039,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.531.500,00 dengan output dari rencana jumlah 3 dokumen terealisasi 2 dokumen
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD rencana anggaran sebesar Rp. 116.884.933,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 56.362.597,00 dengan output dari rencana jumlah 4 Laporan terealisasi 2 Laporan
      3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 116.574.480,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.215.342,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 0 Laporan
   II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 753.188.561.418,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 269.037.092.366,00 dengan output dari rencana jumlah 15 dokumen terealisasi 4 dokumen, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 752.650.366.942,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 268.962.068.866,00 dengan output dari rencana jumlah 6911 Orang/bulan terealisasi 6180 Orang/bulan
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 499.584.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 57.796.000,00 dengan output dari rencana jumlah 2 dokumen terealisasi 1 dokumen
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 13.017.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.698.000,00 dengan output dari rencana jumlah 2 dokumen terealisasi 1 dokumen
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 21.950.476,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 10.529.500,00 dengan output dari rencana jumlah 5 Laporan terealisasi 0 laporan
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.643.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 2 dokumen terealisasi 2 dokumen

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.925.732,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.647.000,00 dengan output dari rencana jumlah 7886 orang terealisasi 0 orang, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.455.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.647.000,00 dengan output dari rencana jumlah 4 dokumen terealisasi 1 dokumen
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.470.732,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 4 dokumen terealisasi 0 dokumen

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 629.437.574,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 83.243.117,00 dengan output dari rencana jumlah dengan output dari rencana jumlah 211 jenis terealisasi 4 jenis, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 29.006.189,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi 0 paket
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 119.766.260,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi 0 paket
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 166.687.140,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 43.729.000,00 dengan output dari rencana jumlah 4 paket terealisasi 2 paket
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 216.486.325,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 9.412.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi 1 paket
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.974.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 4 dokumen terealisasi 0 dokumen
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 62.517.660,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 30.102.117,00 dengan output dari rencana jumlah 4 laporan terealisasi 2 laporan

V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.423.060.490,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 33 unit terealisasi 0 unit, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.025.283.090,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 18 Unit terealisasi 0 unit

VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.333.095.344,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.004.827.871,00 dengan output dari rencana jumlah 13 Laporan terealisasi 5 laporan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.651.904,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.330.000,00 dengan output dari rencana jumlah 4 laporan terealisasi 3 laporan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari rencana anggaran sebesar Rp. 651.750.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 222.773.929,00 dengan output dari rencana jumlah 36 laporan terealisasi 18 laporan
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.642.693.440,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 765.723.942,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 1 laporan

VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran anggaran sebesar Rp. 3.714.526.277,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.516.086.990 dengan output dari rencana jumlah 252 unit terealisasi 8 unit, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 225.225.836,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 34.231.040,00 dengan output dari rencana jumlah 176 unit terealisasi 4 unit
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.410.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.690.000,00 dengan output dari rencana jumlah 116 Unit terealisasi 2 unit
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.461.890.441,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.477.165.950,00 dengan output dari rencana jumlah 26 Unit terealisasi 3 unit

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN dari rencana anggaran sebesar Rp. 193.941.253.726,97 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.783.927.100,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 0, yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu

I. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 90.640.627.868,97 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.442.747.000,00 dengan output dari rencana jumlah 541 satuan pendidikan terealisasi 541 satuan pendidikan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah dari rencana anggaran sebesar Rp. 989.864.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 3 ruang terealisasi 0 ruang
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 13 Unit terealisasi 0 unit

3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dari rencana anggaran sebesar Rp. 404.002.305,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 153.359.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3120 Peserta Didik terealisasi 3120 Peserta Didik
4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.377.033.380,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.153.000.000,00 dengan output dari rencana jumlah 605 orang terealisasi 354 orang
5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 26.616.350,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 200 Orang terealisasi 0 orang
6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dari rencana anggaran sebesar Rp. 213.303.471,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 95 satuan pendidikan terealisasi 0 satuan pendiikan
7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 61.037.920.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 567 Satuan Pendidikan terealisasi 0 satuan pendidikan
8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 184.526.152,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 58.564.500,00 dengan output dari rencana jumlah 1134 Orang terealisasi 1134 orang
9. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK untuk Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 83.232.319,97 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 53.370.000,00 dengan output dari rencana jumlah 40 Orang terealisasi 40 orang
10. Pengembangan konten digital untuk pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.327.295,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 85 Konten Digital terealisasi 0 Konten Digital
11. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.836.800,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 10.505.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi 4 dokumen

12. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 58.577.356,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 85 Komunitas terealisasi 0 Komunitas
13. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dari rencana anggaran sebesar Rp. 29.792.992,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 20 Kegiatan terealisasi 20 Kegiatan
14. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dari rencana anggaran sebesar Rp. 490.786.560,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1000 Paket terealisasi 0 Paket
15. Pembangunan Ruang Kelas Baru dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.984.656.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 6 Ruang terealisasi 0 Ruang
16. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.688.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 70 Unit terealisasi 0 Unit
17. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.020.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 13.948.500,00 dengan output dari rencana jumlah 40 Orang terealisasi 0 Unit
18. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik dari rencana anggaran sebesar Rp. 75.267.296,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 567 Satuan Pendidikan terealisasi 0 Satuan Pendidikan
19. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.832.014.392,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 54 Ruang terealisasi 0 Ruang
20. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.951.851.200,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 462 Paket terealisasi 0 Paket

II. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.173.113.640,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.085.655.100,00 dengan output dari rencana jumlah 52 lembaga terealisasi 52 lembaga, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dari rencana anggaran sebesar Rp. 201.048.108,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Ruang terealisasi 0 Ruang
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dari rencana anggaran sebesar Rp. 989.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 4 Ruang terealisasi 0 Ruang
3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dari rencana anggaran sebesar Rp. 494.413.576, terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 61.893.100,00 dengan output dari rencana jumlah 15381 Peserta Didik terealisasi 60 Peserta Didik
4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.638.729.180,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.909.475.000,00 dengan output dari rencana jumlah 383 Orang terealisasi 312 Orang
5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dari rencana anggaran sebesar Rp. 24.252.800,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 200 Orang terealisasi 0 Orang
6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dari rencana anggaran sebesar Rp. 80.994.600,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 15.480.500,00 dengan output dari rencana jumlah 95 Satuan Pendidikan terealisasi 92 Satuan Pendidikan
7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dari rencana anggaran sebesar Rp. 37.419.900.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 100 Satuan Pendidikan terealisasi 0 Satuan Pendidikan
8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dari rencana anggaran sebesar Rp. 43.190.100,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 15.685.000,00 dengan output dari rencana jumlah 200 Orang terealisasi 0 Orang
9. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.484.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 18.135.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100 Orang terealisasi 0 Orang
10. Pengembangan konten digital untuk pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 46.111.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 100 Konten Digital terealisasi 0 Konten Digital

11. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 21.034.856,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Dokumen terealisasi 0 Dokumen
12. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.896.650,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.368.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Dokumen terealisasi 0 Dokumen
13. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 53.012.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 25 Komunitas terealisasi 0 Komunitas
14. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.600.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 3 Kegiatan terealisasi 0 Kegiatan
15. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik dari rencana anggaran sebesar Rp. 371.166.850,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 57.618.500,00 dengan output dari rencana jumlah 100 Satuan Pendidikan terealisasi 100 Satuan Pendidikan
16. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 74.387.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 200 Orang terealisasi 0 Orang
17. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dari rencana anggaran sebesar Rp. 299.925.120,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 600 Paket terealisasi 0 Paket
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.099.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Ruang terealisasi 0 Ruang
19. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.243.966.800,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 3 Paket terealisasi 0 Paket

III. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari rencana anggaran sebesar Rp. 37.357.177.696,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 235.812.500,00 dengan output dari rencana jumlah 1155 lembaga terealisasi 1155 lembaga, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Mebel PAUD dari rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 20 Paket terealisasi 0 Paket
2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dari rencana anggaran sebesar Rp. 397.701.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 132.810.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1200 Peserta Didik terealisasi 1200 Peserta Didik
3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.897.711.800,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.460.000,00 dengan output dari rencana jumlah 2080 Orang terealisasi 0 Orang
4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dari rencana anggaran sebesar Rp. 40.825.300,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 100 Orang terealisasi 0 Orang
5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dari rencana anggaran sebesar Rp. 33.700.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 32.250.000,00 dengan output dari rencana jumlah 80 Satuan Pendidikan terealisasi 0 Orang
6. Pengelolaan Dana BOP PAUD dari rencana anggaran sebesar Rp. 24.689.420.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1183 Satuan Pendidikan terealisasi 0 Satuan Pendidikan
7. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD dari rencana anggaran sebesar Rp. 46.854.240,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 25.065.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1183 Orang terealisasi 0 Orang
8. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.894.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 32.020.000,00 dengan output dari rencana jumlah 80 Orang terealisasi 80 Orang
9. Pengembangan konten digital untuk pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.894.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 80 Konten Digital terealisasi 0 Orang
10. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 29.994.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 80 Orang terealisasi 0 Orang

11. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.413.304,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Dokumen terealisasi 0 Dokumen
12. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 74.049.800,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 35 Dokumen terealisasi 0 Dokumen
13. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 95.969.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 24 Komunitas terealisasi 0 Komunitas
14. Pembangunan Ruang Kelas Baru dari rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 3 Ruang terealisasi 0 Ruang
15. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik dari rencana anggaran sebesar Rp. 31.966.252,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 11.207.500,00 dengan output dari rencana jumlah 200 Peserta didik terealisasi 200 Peserta didik
16. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dari rencana anggaran sebesar Rp. 199.965.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1560 Paket terealisasi 0 Paket
17. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dari rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 5 Unit terealisasi 0 Unit
18. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.419.820.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 80 Paket terealisasi 0 Paket

IV. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.770.334.522,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 19.712.500,00 dengan output dari rencana jumlah 35 Satuan Pendidikan terealisasi 35 Satuan Pendidikan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.947.379.832,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 370 Orang terealisasi 0 Orang

2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.295.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 18.160.000,00 dengan output dari rencana jumlah 252 Orang terealisasi 0 Orang
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan dari rencana anggaran sebesar Rp. 69.684.242,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.552.500,00 dengan output dari rencana jumlah 35 Satuan Pendidikan terealisasi 35 Satuan Pendidikan
4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.325.080.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 35 Satuan Pendidikan terealisasi 0 Satuan Pendidikan
5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.490.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 35 Orang terealisasi 0 orang
6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.905.448,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Dokumen terealisasi 0 Dokumen
7. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.354.500.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 35 Satuan Pendidikan terealisasi 0 Satuan Pendidikan

C. Program Pengembangan Kurikulum dari rencana anggaran sebesar Rp. 441.183.275,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 90.813.000,00 dengan output dari rencana jumlah 90 % terealisasi 80 %, yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

I. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 319.795.890,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 65.084.000,00 dengan output dari rencana jumlah 678 lembaga terealisasi 40 lembaga, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 66.129.950,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 46.877.000,00 dengan output dari rencana jumlah 50 Dokumen terealisasi 25 Dokumen

2. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 63.006.700,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 100 Orang terealisasi 0 Orang
3. Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 126.071.540,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 8.400.000,00 dengan output dari rencana jumlah 50 Dokumen terealisasi 0 Dokumen
4. Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar dari rencana anggaran sebesar Rp. 64.587.700,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 18.207.000,00 dengan output dari rencana jumlah 50 Dokumen terealisasi 66 Dokumen

II. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Din dan Pendidikan Nonformal dari rencana anggaran sebesar Rp. 121.387.385,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 25.729.000,00 dengan output dari rencana jumlah 536 Lembaga terealisasi 40 lembaga, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.566.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 25.729.000,00 dengan output dari rencana jumlah 50 Dokumen terealisasi 40 Dokumen
2. Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dari rencana anggaran sebesar Rp. 52.208.385,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 50 Dokumen terealisasi 0 Dokumen
3. Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.612.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 50 Dokumen terealisasi 0 Dokumen

D. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 67.973.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.920.000,00 dengan output dari rencana jumlah 99,35 % terealisasi 0 %, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

I. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dari rencana anggaran sebesar Rp. 67.973.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.920.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9935 orang terealisasi 0 orang, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dari rencana anggaran sebesar Rp. 33.986.750,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 4 Dokumen terealisasi 0 Dokumen
2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dari rencana anggaran sebesar Rp. 33.986.750,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.920.000,00 dengan output dari rencana jumlah 4 Laporan terealisasi 1 Laporan

E. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp. 19.680.875,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 100 % terealisasi 0 %, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

I. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen dari rencana anggaran sebesar Rp. 19.680.875,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 4 Dokumen terealisasi 0 Dokumen

1. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp. 19.680.875,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 39 lembaga terealisasi 0 lembaga

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Periode Pelaksanaan: Triwulan ll Tahun 2025

Indikator dan target kinerja

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rata-Rata Lama Sekolah	0 (%)	0	0 (%)	0	7.66 (%)	926.390.225.035	0 (%)	124.823.380.859	0 (%)	151.782.286.024	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	276.605.666.883	0 (%)	311.551.731.053	0%	0%	Dinas Pendidikan
			Harapan lama sekolah	0 (%)	0	0 (%)	0	12.33 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Dinas Pendidikan
A	Terwujudnya aksesibilitas Pendidikan Dasar, Informal dan Non-formal yang bermutu dan Profesional		APM SMP	0 (%)	0	0 (%)	0	92.5 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Dinas Pendidikan
			Angka Melanjutkan Sekolah ke SMP	0 (%)	0	0 (%)	0	98.8 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Dinas Pendidikan

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Angka Kelulusan SMP	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Dinas Pendidikan
			Angka Kelulusan SD	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Dinas Pendidikan
			APK SD	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Dinas Pendidikan
			APK SMP	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Dinas Pendidikan
			APK PAUD	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	926.390.225.035	0 (%)	124.823.380.859	0 (%)	151.782.286.024	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	276.605.666.883	0 (%)	311.551.731.053	0%	0%	Dinas Pendidikan
			APM SD	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Dinas Pendidikan
			Angka Melanjutkan Sekolah Ke SD	89 (%)	0	96.77 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (%)	3.283.643.172.008	82.8 (%)	1.207.747.184.611	83.1 (%)	738.610.965.423	0 (%)	122.164.786.759	0 (%)	149.561.220.024	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	271.726.006.783	0 (%)	1.513.234.265.024	0%	46.08 %	Sekretaris

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	8 (Dokumen)	457.423.800	0 (Dokumen)	46.226.517	2 (Dokumen)	36.882.922	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	83.109.439	2 (Dokumen)	91.509.439	0%	0%	JF Perencana Ahli Muda
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 (Dokumen)	138.404.850	4 (Dokumen)	135.736.000	3 (Dokumen)	134.148.850	1 (Dokumen)	4.770.000	1 (Dokumen)	15.761.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	20.531.500	6 (Dokumen)	156.267.500	40 %	112.91 %	Perencana Ahli Muda
	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	20 (Laporan)	670.094.000	7 (Laporan)	310.750.745	4 (Laporan)	175.132.290	1 (Laporan)	41.456.517	1 (Laporan)	14.906.080	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	56.362.597	9 (Laporan)	367.113.342	45 %	54.79 %	JF Perencana Ahli Muda

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Realisasi Kinerja SKPD																					
	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 (Dokumen)	109.485.937	8 (Dokumen)	84.590.232	1 (Dokumen)	148.142.660	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	6.215.342	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	6.215.342	8 (Dokumen)	99.205.574	160%	90.61 %	JF Perencana Ahli Muda
	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	75 (Dokumen)	3.256.023.148.469	27 (Dokumen)	1.191.583.708.757	15 (Dokumen)	725.748.810.182	1 (Dokumen)	121.564.766.449	3 (Dokumen)	147.472.325.917	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	269.037.092.366	31 (Dokumen)	1.493.394.077.028	41.33 %	45.87 %	Perencana Ahli Muda
	Tersedianya Gaji dan Tunnjangan asn	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6911 (Orang/Bulan)	3.252.377.990.469	6317 (Orang/Bulan)	1.190.608.407.807	6911 (Orang/Bulan)	725.154.613.942	6272 (Orang/Bulan)	121.550.336.949	6180 (Orang/Bulan)	147.411.731.917	0 (Orang/Bulan)	0	0 (Orang/Bulan)	0	6180 (Orang/Bulan)	268.962.068.866	12497 (Orang/Bulan)	1.492.343.752.578	180.83 %	45.88 %	Perencana Ahli Muda
	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	45 (Dokumen)	3.523.370.000	7 (Dokumen)	887.678.000	2 (Dokumen)	518.114.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	57.796.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	57.796.000	8 (Dokumen)	945.474.000	17.78 %	26.83 %	Perencana Ahli Muda

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 (Dokumen)	42.645.500	6 (Dokumen)	34.055.000	2 (Dokumen)	32.187.000	0 (Dokumen)	3.900.000	1 (Dokumen)	2.798.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	6.698.000	7 (Dokumen)	40.753.000	35 %	95.56 %	Perencana Ahli Muda
	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 (Laporan)	70.035.000	20 (Laporan)	47.980.450	5 (Laporan)	36.609.240	0 (Laporan)	10.529.500	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	10.529.500	20 (Laporan)	58.509.950	80 %	83.54 %	Perencana Ahli Muda
	Tersusunnya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 (Dokumen)	9.107.500	4 (Dokumen)	5.587.500	2 (Dokumen)	3.643.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	5.587.500	80 %	61.35 %	Perencana Ahli Muda

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tesusunnya Dokumen Kepegawaian Daerah	6. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	3.643.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0%	0%	
	Tesusunnya Dokumen Kepegawaian Daerah	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	23778 (Orang)	7.395.530.000	7887 (Orang)	5.513.803.900	0 (Orang)	3.983.764.996	0 (Orang)	0	1 (Orang)	1.647.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1 (Orang)	1.647.000	1 (Orang)	5.515.450.900	0%	74.58 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	10.947.668	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0%	0%	
	Tesedianya Pakaian Dinas beserta atribu kelengkapannya	2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	7886 (Paket)	3.895.528.328	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Sisten Informasi Kepegawaian	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	10.949.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.647.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.647.000	1 (Dokumen)	1.647.000	0%	0%	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	66.340.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0%	0%	
	Tersedianya Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	275 (Jenis)	3.916.206.452	110 (Jenis)	1.773.699.991	211 (Jenis)	868.548.770	3 (Jenis)	43.420.000	4 (Jenis)	39.823.117	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	4 (Jenis)	83.243.117	4 (Jenis)	1.862.403.108	1.45 %	47.56 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 (Paket)	119.468.000	1 (Paket)	23.359.023	1 (Paket)	29.006.189	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	23.359.023	0%	19.55 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 (Paket)	1.109.774.852	1 (Paket)	471.857.150	1 (Paket)	221.602.322	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	471.857.150	0%	42.52 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 (Paket)	671.497.600	1 (Paket)	378.481.546	4 (Paket)	177.495.140	1 (Paket)	23.534.000	1 (Paket)	20.195.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	43.729.000	3 (Paket)	422.210.546	60 %	62.88 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 (Paket)	1.415.156.000	1 (Paket)	532.271.250	1 (Paket)	280.390.375	0 (Paket)	0	1 (Paket)	9.412.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	9.412.000	1 (Paket)	541.683.250	20 %	38.28 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 (Dokumen)	228.700.000	1 (Dokumen)	75.855.000	4 (Dokumen)	34.974.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	81.315.000	20 %	35.56 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 (Laporan)	371.610.000	100 (Laporan)	268.471.695	4 (Laporan)	125.080.744	1 (Laporan)	19.886.000	1 (Laporan)	10.216.117	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	30.102.117	102 (Laporan)	298.573.812	40.8 %	80.35 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint	Jumlah Pengadaan BMD	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	33 (Unit)	1.423.060.490	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0%	0%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		ah Daerah																						
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	376.363.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0%	0%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	18 (Unit)	1.025.283.090	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0%	0%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel SKPD	3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	16 (Unit)	21.414.400	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0%	0%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	52 (Laporan)	10.820.126.700	61 (Laporan)	13.137.632.313	13 (Laporan)	2.377.580.908	3 (Laporan)	503.658.793	2 (Laporan)	501.169.078	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	5 (Laporan)	1.004.827.871	66 (Laporan)	14.269.178.909	126.92 %	131.88 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 (Laporan)	200.633.500	21 (Laporan)	108.067.500	4 (Laporan)	75.722.468	1 (Laporan)	6.060.000	2 (Laporan)	10.270.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	16.330.000	24 (Laporan)	124.397.500	120%	62%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 (Laporan)	2.726.179.200	3 (Laporan)	1.136.140.340	36 (Laporan)	651.750.000	9 (Laporan)	112.576.219	9 (Laporan)	110.197.710	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	18 (Laporan)	222.773.929	21 (Laporan)	1.396.163.058	175%	51.21 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 (Laporan)	7.893.314.000	6 (Laporan)	3.108.153.751	1 (Laporan)	1.650.108.440	1 (Laporan)	385.022.574	1 (Laporan)	380.701.368	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	765.723.942	1 (Laporan)	3.963.347.629	3.33 %	50.21 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	1240 (Unit)	2.401.175.600	496 (Unit)	2.070.255.595	252 (Unit)	3.751.776.277	1 (Unit)	6.715.000	7 (Unit)	1.509.371.990	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	8 (Unit)	1.516.086.990	504 (Unit)	4.433.561.585	40.65 %	184.64 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Meningkatnya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharа dan dibayarkan Pajaknya	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	880 (Unit)	801.613.600	356 (Unit)	374.446.483	176 (Unit)	225.225.836	1 (Unit)	6.715.000	3 (Unit)	27.516.040	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	4 (Unit)	34.231.040	360 (Unit)	425.696.523	40.91 %	53.1 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		n Dinas Jabatan																						
	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 (Unit)	194.200.000	106 (Unit)	129.055.000	116 (Unit)	27.410.000	0 (Unit)	0	2 (Unit)	4.690.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	4.690.000	108 (Unit)	138.945.000	54 %	71.55 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	130 (Unit)	1.345.362.000	71 (Unit)	1.566.754.112	26 (Unit)	3.499.140.441	0 (Unit)	0	3 (Unit)	1.477.165.950	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	1.477.165.950	74 (Unit)	3.868.920.062	56.92 %	287.57 %	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
2	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Kabid Pengelolaan Pendidikan SMP

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	68.21 (%)	0	94.16 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Kabid Pengelolaan Pendidikan PAUD dan PNF
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100 (%)	557.083.445.831	100 (%)	507.640.398.045	100 (%)	186.920.229.822	0 (%)	2.653.674.100	0 (%)	2.130.253.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	4.783.927.100	0 (%)	513.523.724.685	0%	92.18 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100 (%)	0	99.16 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Kabid Pengelolaan Pendidikan PAUD dan PNF

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	541 (Satuan Pendidikan)	557.083.445.831	541 (Satuan Pendidikan)	267.689.598.648	541 (Satuan Pendidikan)	91.392.550.407	541 (Satuan Pendidikan)	1.387.391.500	541 (Satuan Pendidikan)	1.055.355.500	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	541 (Satuan Pendidikan)	2.442.747.000	541 (Satuan Pendidikan)	270.583.512.888	100%	48.57 %	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 (Dokumen)	0	80 (Dokumen)	12.893.000	1 (Dokumen)	61.587.010	1 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	10.505.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	10.505.000	84 (Dokumen)	23.398.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU (SD)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 ()	0	11 ()	812.740.500	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	11 ()	812.740.500	0%	0%	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksanya Pembangunan Ruang Kelas Baru	3. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	66 (Ruang)	11.482.398.011	56 (Ruang)	14.199.307.280	6 (Ruang)	1.984.656.000	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	56 (Ruang)	14.199.307.280	84.85 %	123.66 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
	Terlaksanya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	185 (Ruang)	12.312.540.000	61 (Ruang)	11.385.616.750	3 (Ruang)	989.864.000	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	61 (Ruang)	11.385.616.750	32.97 %	92.47 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
	Terlaksanya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	48 (Unit)	14.753.466.000	31 (Unit)	4.183.175.080	13 (Unit)	1.150.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	31 (Unit)	4.183.175.080	64.58 %	28.35 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
	Terlaksanya Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	6. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas (SD)	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	316 (Ruang)	43.774.886.243	402 (Ruang)	51.504.201.930	54 (Ruang)	8.886.975.837	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	402 (Ruang)	51.504.201.930	127.22 %	117.66 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	7. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rehab Berat/Sedang Perpustakaan (SD)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0%	0%	
	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 (Unit)	866.409.000	15 (Unit)	1.986.190.200	70 (Unit)	2.688.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	15 (Unit)	1.986.190.200	78.95 %	229.24 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
	Tersedianya Mebel Sekolah	9. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15 ()	417.956.878	53 ()	3.261.131.800	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	53 ()	3.261.131.800	353.33 %	780.26 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	10. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SD)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1000 (Paket)	500.000.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	11. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	95 (Paket)	7.016.755.000	61 (Paket)	2.214.244.451	462 (Paket)	4.108.851.200	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	61 (Paket)	2.214.244.451	64.21 %	31.56 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
	Meningkatnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	12. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	146 (Peserta Didik)	1.035.907.950	440 (Peserta Didik)	1.029.430.345	3120 (Peserta Didik)	826.705.828	3120 (Peserta Didik)	0	3120 (Peserta Didik)	153.359.000	0 (Peserta Didik)	0	0 (Peserta Didik)	0	3120 (Peserta Didik)	153.359.000	3120 (Peserta Didik)	1.182.789.345	2136.99 %	114.18 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	13. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9950 (Orang)	98.715.000.000	895 (Orang)	11.337.697.600	605 (Orang)	8.019.208.230	0 (Orang)	1.291.800.000	354 (Orang)	861.200.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	354 (Orang)	2.153.000.000	1249 (Orang)	13.929.758.040	12.55 %	14.11 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	14. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2256 (Orang)	1.033.366.527	2554 (Orang)	367.282.700	200 (Orang)	88.999.800	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	2554 (Orang)	367.282.700	113.21 %	35.54 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD)	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	95 (Satuan Pendidikan)	311.038.420	95 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	380 (Satuan Pendidikan)	0	380 (Satuan Pendidikan)	0	0%	0%	

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	2705 (Satuan Pendidikan)	306.383.850.000	567 (Satuan Pendidikan)	128.812.702.513	567 (Satuan Pendidikan)	61.037.920.000	567 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	567 (Satuan Pendidikan)	0	567 (Satuan Pendidikan)	128.812.702.513	20.96 %	42.04 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2910 (Orang)	2.332.288.000	2216 (Orang)	679.403.240	1134 (Orang)	300.279.400	1134 (Orang)	49.821.500	1134 (Orang)	8.743.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1134 (Orang)	58.564.500	3350 (Orang)	737.967.740	115.12 %	31.64 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	18. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4 ()	720.000.000	123 ()	11.754.078.000	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	123 ()	11.754.078.000	3075 %	1632.51 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	19. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU (SD)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 ()	720.000.000	13 ()	2.189.069.900	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	13 ()	2.189.069.900	325%	304.04 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	20. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (SD)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 ()	720.000.000	42 ()	3.691.454.100	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	42 ()	3.691.454.100	1050 %	512.7 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	21. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (SD)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	40 (Orang)	143.852.966	40 (Orang)	45.770.000	120 (Orang)	7.600.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	160 (Orang)	53.370.000	160 (Orang)	53.370.000	0%	0%	
	Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	22. Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan (SD)	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 (konten)	0	0 (konten)	0	85 (konten)	36.709.968	85 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	340 (konten)	0	340 (konten)	0	0%	0%	

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD)	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	85 (komunitas)	85.022.010	85 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	340 (komunitas)	0	340 (komunitas)	0	0%	0%	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	24. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (SD)	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	20 (Kegiatan)	56.695.514	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	20 (Kegiatan)	0	20 (Kegiatan)	0	0%	0%	

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	25. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SD)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	36.323.023	0 (Orang)	0	0 (Orang)	13.948.500	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	13.948.500	0 (Orang)	13.948.500	0%	0%	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	26. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SD)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	567 (Satuan Pendidikan)	79.861.200	567 (Satuan Pendidikan)	0	1134 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	1701 (Satuan Pendidikan)	0	1701 (Satuan Pendidikan)	0	0%	0%	
	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	260 (Lembaga)	222.105.080.118	52 (Lembaga)	129.401.683.916	52 (Lembaga)	47.435.214.307	0 (Lembaga)	1.238.757.600	52 (Lembaga)	846.897.500	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	52 (Lembaga)	2.085.655.100	52 (Lembaga)	131.945.695.816	20 %	59.41 %	Kabid Pengelolaan Pendidikan SMP

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMP)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 (Dokumen)	0	80 (Dokumen)	12.893.000	1 (Dokumen)	44.997.688	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	80 (Dokumen)	12.893.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	455 (Orang)	101.700.000	380 (Orang)	26.585.000	200 (Orang)	114.669.300	0 (Orang)	15.685.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	15.685.000	0 (Orang)	46.590.000	0%	45.81 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	100 (Satuan Pendidikan)	37.419.900.000	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP)	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	208 (Satuan Pendidikan)	200.000.000	99 (Satuan Pendidikan)	266.970.650	95 (Satuan Pendidikan)	163.798.800	0 (Satuan Pendidikan)	14.430.500	92 (Satuan Pendidikan)	1.050.000	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	92 (Satuan Pendidikan)	15.480.500	92 (Satuan Pendidikan)	282.451.150	44.23 %	141.23 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP
	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2256 (Orang)	1.033.366.527	2554 (Orang)	367.282.700	200 (Orang)	88.999.800	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	367.282.700	0%	35.54 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1875 (Orang)	20.567.360.000	284 (Orang)	7.582.370.940	383 (Orang)	4.783.267.885	0 (Orang)	1.147.400.000	312 (Orang)	762.075.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	312 (Orang)	1.909.475.000	312 (Orang)	9.880.838.740	16.64 %	48.04 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP
	Meningkatnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	146 (Peserta Didik)	1.035.907.950	440 (Peserta Didik)	1.029.430.345	1538 1 (Peserta Didik)	979.291.714	0 (Peserta Didik)	13.156.100	60 (Peserta Didik)	44.737.000	0 (Peserta Didik)	0	0 (Peserta Didik)	0	60 (Peserta Didik)	57.893.100	60 (Peserta Didik)	1.101.467.445	41.1 %	106.33 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	8. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (SMP)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4000 (Satuan Pendidikan)	1.625.075.224	3164 (Satuan Pendidikan)	2.200.600.000	100 (Satuan Pendidikan)	465.280.584	0 (Satuan Pendidikan)	22.583.000	100 (Satuan Pendidikan)	35.035.500	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	100 (Satuan Pendidikan)	57.618.500	100 (Satuan Pendidikan)	2.258.218.500	2.5 %	138.96 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
	Tersedianya Alat Praktik dan	9. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	1.243.966.800	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	Kasi Sarana dan Prasarana

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peraga Siswa	dan Peraga Siswa (SMP)	Peserta Didik yang Tersedia																					Pendidikan SMP
	Tersedianya Mebel Sekolah	10. Sub Kegiatan Perlengkapan Belajar Peserta Didik (SMP)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	600 (Paket)	300.000.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 (Unit)	866.409.000	15 (Unit)	1.986.190.200	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	15 (Unit)	1.986.190.200	78.95 %	229.24 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	12. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium (SMP)	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	95 (Ruang)	2.353.869.000	25 (Ruang)	3.019.598.550	4 (Ruang)	680.000.000	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	25 (Ruang)	3.019.598.550	26.32 %	128.28 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	13. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah (SMP)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	1 (Ruang)	201.048.108	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0%	0%	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	14. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP)	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	187 (Ruang)	15.977.789.388	155 (Ruang)	18.646.391.140	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	155 (Ruang)	18.646.391.140	82.89 %	116.7 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	48 (Unit)	14.753.466.000	31 (Unit)	4.183.175.080	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	31 (Unit)	4.183.175.080	64.58 %	28.35 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah	16. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium (SMP)	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0%	0%	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	17. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU (SMP)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 (Ruang)	0	11 (Ruang)	812.740.500	1 (Ruang)	400.000.000	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	11 (Ruang)	812.740.500	0%	0%	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	18. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMP)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	66 (Ruang)	11.482.398.011	56 (Ruang)	14.199.307.280	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	56 (Ruang)	14.199.307.280	84.85 %	123.66 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	19. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (SMP)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	100 (Orang)	88.256.600	0 (Orang)	18.135.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	18.135.000	0 (Orang)	18.135.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20. Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan (SMP)	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 (konten)	0	0 (konten)	0	100 (konten)	189.969.028	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP
	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	21. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (SMP)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 (Dokumen)	0	100 (Dokumen)	45.591.000	100 (Dokumen)	23.074.400	0 (Dokumen)	7.368.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	7.368.000	100 (Dokumen)	52.959.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	25 (komunitas)	70.364.000	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	23. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (SMP)	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	3 (Kegiatan)	69.768.000	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	13.684.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	24. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMP)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	200 (Orang)	108.561.600	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	4665 (Lembaga)	177.485.363.015	1187 (Lembaga)	77.970.622.326	1155 (Lembaga)	37.365.570.328	0 (Lembaga)	27.525.000	1155 (Lembaga)	208.287.500	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	1155 (Lembaga)	235.812.500	1155 (Lembaga)	78.386.097.826	24.76 %	44.16 %	Kabid Pengelolaan Pendidikan PAUD dan PNF
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (PAUD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 (Dokumen)	0	80 (Dokumen)	12.893.000	1 (Dokumen)	43.036.800	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	18.653.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (PAUD)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 (Dokumen)	0	100 (Dokumen)	45.591.000	35 (Dokumen)	156.219.326	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	100 (Dokumen)	45.591.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	48 (Unit)	897.941.950	25 (Unit)	2.674.050.900	10 (Unit)	1.690.478.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	25 (Unit)	2.674.050.900	52.08 %	297.8 %	Kabid Pengelolaan Pendidikan PAUD dan PNF
	Tersedianya Mebel PAUD	4. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1440 (Pakt)	720.000.000	303 (Pakt)	198.974.000	20 (Pakt)	15.000.000	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	303 (Pakt)	198.974.000	21.04 %	27.64 %	Kabid Pengelolaan Pendidikan PAUD dan PNF
	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD	5. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 (Peserta Didik)	0	0 (Peserta Didik)	0	1200 (Peserta Didik)	398.680.000	0 (Peserta Didik)	0	1200 (Peserta Didik)	132.810.000	0 (Peserta Didik)	0	0 (Peserta Didik)	0	1200 (Peserta Didik)	132.810.000	1200 (Peserta Didik)	198.330.000	0%	0%	Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan
	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	6. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	80 (Pakt)	1.729.342.000	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	0 (Pakt)	0	0%	0%	Kabid Pengelolaan Pendidikan PAUD dan PNF

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	11400 (Orang)	37.516.875.000	2080 (Orang)	15.689.367.500	2080 (Orang)	7.496.736.800	60 (Orang)	2.460.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	2.460.000	0 (Orang)	15.691.827.500	0%	41.83 %	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	8. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2256 (Orang)	1.033.366.527	2554 (Orang)	367.282.700	100 (Orang)	88.999.800	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	367.282.700	0%	35.54 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	9. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembag	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	80 (Satuan Pendidikan)	60.491.000	0 (Satuan Pendidikan)	0	40 (Satuan Pendidikan)	32.250.000	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	40 (Satuan Pendidikan)	32.250.000	40 (Satuan Pendidikan)	32.250.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			aan dan Manajemen																					
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	10. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	5975 (Satuan Pendidikan)	131.105.200.000	2371 (Satuan Pendidikan)	26.297.660.000	1183 (Satuan Pendidikan)	24.689.420.000	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	26.297.660.000	0%	20.06 %	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	11. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1183 (Orang)	84.377.100	0 (Orang)	25.065.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	25.065.000	0 (Orang)	25.065.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	12. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (PAUD)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	80 (Orang)	60.491.000	0 (Orang)	0	80 (Orang)	32.020.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	80 (Orang)	32.020.000	80 (Orang)	32.020.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13. Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan (PAUD)	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 (konten)	0	0 (konten)	0	80 (konten)	60.491.000	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0 (konten)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	14. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (PAUD)	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	80 (Orang)	56.677.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	26.220.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	24 (komunitas)	187.136.000	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	0	0 (komunitas)	82.163.000	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	16. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (PAUD)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	66 (Ruang)	11.482.398.011	56 (Ruang)	14.199.307.280	3 (Ruang)	150.000.000	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	0 (Ruang)	0	56 (Ruang)	14.199.307.280	84.85 %	123.66 %	Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	17. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik (PAUD)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	0 (Peserta Didik)	0	0 (Peserta Didik)	0	200 (Peserta Didik)	48.029.502	0 (Peserta Didik)	0	200 (Peserta Didik)	11.207.500	0 (Peserta Didik)	0	0 (Peserta Didik)	0	200 (Peserta Didik)	11.207.500	200 (Peserta Didik)	11.207.500	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	18. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (PAUD)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1560 (Paket)	199.965.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD
	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	19. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	5 (Unit)	150.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan PAUD

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan Terakreditasi (negeri dan swasta)	30 (Satuan Pendidikan)	27.441.960.417	6 (Satuan Pendidikan)	32.578.493.155	35 (Satuan Pendidikan)	10.726.894.780	0 (Satuan Pendidikan)	0	35 (Satuan Pendidikan)	19.712.500	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	35 (Satuan Pendidikan)	19.712.500	35 (Satuan Pendidikan)	32.608.418.155	116.67 %	118.83 %	KABID PAUD dan PNF
	Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Nonformal/Kesetaraan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	35 (Satuan Pendidikan)	900.000.000	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	370 (Orang)	3.252.580.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Nonformal/Ketaraan)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 (Dokumen)	0	80 (Dokumen)	12.893.000	1 (Dokumen)	49.237.080	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	12.893.000	0%	0%	kasi penyelenggaraan PNF
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal	4. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Ketaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Ketaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	35 (Satuan Pendidikan)	119.997.700	0 (Satuan Pendidikan)	0	35 (Satuan Pendidikan)	1.552.500	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	35 (Satuan Pendidikan)	1.552.500	35 (Satuan Pendidikan)	1.552.500	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Ketaraan	5. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Ketaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Ketaraan yang Mengelola Dana BOP	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	35 (Satuan Pendidikan)	6.325.080.000	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2256 (Orang)	1.033.366.527	2554 (Orang)	367.282.700	252 (Orang)	50.000.000	0 (Orang)	0	252 (Orang)	18.160.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	252 (Orang)	18.160.000	252 (Orang)	385.442.700	11.17 %	37.3 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	35 (Orang)	30.000.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	10.212.500	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Meningkatnya Kualitas Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase peningkatan pengembagan Kurikulum Muatan Lokal	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	688.445.100	0 (%)	0	80 (%)	90.813.000	0 (%)	0	0 (%)	0	80 (%)	90.813.000	80 (%)	176.404.000	0%	0%	Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan GTK
	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Sekolah yang Melakukan Pengembagan Kurikulum Muatan Lokal	3300 (Lembaga)	1.010.345.377	495 (Lembaga)	293.052.250	678 (Lembaga)	501.263.000	0 (Lembaga)	0	40 (Lembaga)	65.084.000	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	40 (Lembaga)	65.084.000	40 (Lembaga)	421.073.250	1.21 %	41.68 %	Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra
	Terlaksananya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	8 (Dokumen)	25.000.000	10 (Dokumen)	147.425.000	50 (Dokumen)	102.415.600	0 (Dokumen)	0	25 (Dokumen)	46.877.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	25 (Dokumen)	46.877.000	35 (Dokumen)	194.302.000	437.5 %	777.21 %	Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2. Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	2820 (Orang)	885.345.377	617 (Orang)	145.627.250	100 (Orang)	102.415.600	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	189.054.250	0%	21.35 %	Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra
	Terlaksananya Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	3. Sub Kegiatan Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	50 (Dokumen)	192.259.200	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	8.400.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	8.400.000	0 (Dokumen)	8.400.000	0%	0%	Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra
	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	4. Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	50 (Dokumen)	104.172.600	0 (Dokumen)	0	66 (Dokumen)	18.207.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	66 (Dokumen)	18.207.000	66 (Dokumen)	37.717.000	0%	0%	Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Melakukan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	536 (Lembaga)	187.182.100	0 (Lembaga)	0	40 (Lembaga)	25.729.000	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	40 (Lembaga)	25.729.000	40 (Lembaga)	48.383.000	0%	0%	Kasi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra
	Terlaksananya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1. Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	50 (Dokumen)	54.540.200	0 (Dokumen)	0	40 (Dokumen)	25.729.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	40 (Dokumen)	25.729.000	40 (Dokumen)	25.729.000	0%	0%	Kasi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2. Sub Kegiatan Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	50 (Dokumen)	76.331.700	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0%	0%	Kasi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra
	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3. Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	50 (Dokumen)	56.310.200	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	22.654.000	0%	0%	Kasi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Pelayanan Perijinan Operasional Pendidikan	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	42.584.690	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga yang mendapatkan ijin operasional	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	42.584.690	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0%	0%	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	65 (Lembaga)	115.818.319	127 (Lembaga)	42.379.150	39 (Lembaga)	42.584.690	39 (Lembaga)	0	39 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	78 (Lembaga)	0	205 (Lembaga)	42.379.150	315.38 %	36.59 %	Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
5		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%)	0 (%)	0	0 (%)	0	99.35 (%)	128.000.000	0 (%)	4.920.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	4.920.000	0 (%)	4.920.000	0%	0%	Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan GTK

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	9935 (Orang)	128.000.000	0 (Orang)	4.920.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	4.920.000	0 (Orang)	4.920.000	0%	0%	Kasi GTK
		1. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonforma	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidika	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	64.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0%	0%	Kasi GTK

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		l/Kesetaraan	n Nonformal /Kesetaraan																					
		2. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	64.000.000	1 (Laporan)	4.920.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	4.920.000	1 (Laporan)	4.920.000	0%	0%	Kasi GTK

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban secara kinerja bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban. Dalam pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM), SDGs, maupun NSPK.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

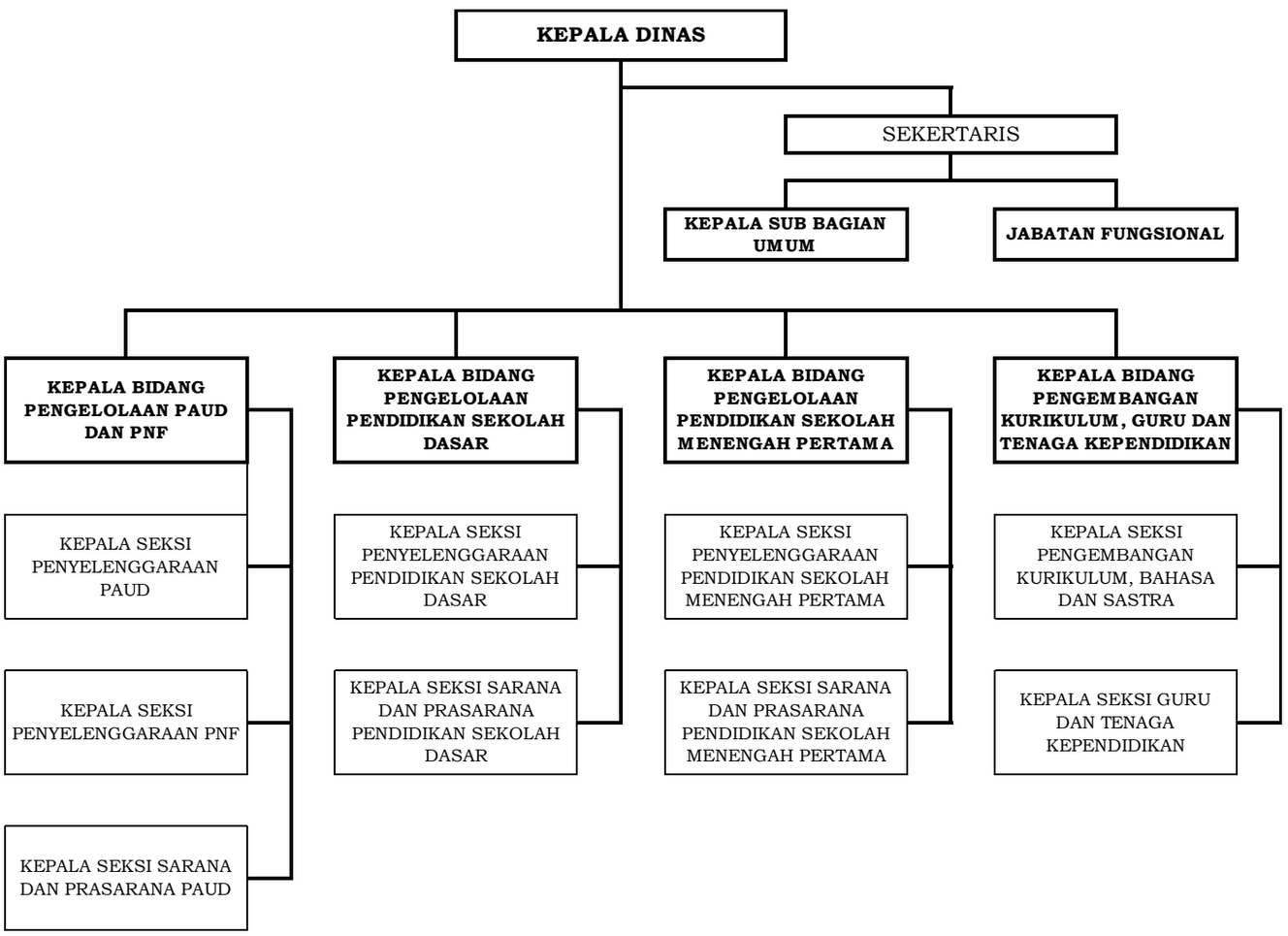

Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah yang dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban teriri atas sekretariat dan 4 bidang, unit pelayanan teknis serta kelompok jabatan fungsional, yaitu :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
d. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
f. Bidang Pengembangan Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan;
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sebagaimana tersebut diatas dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi bidang :

1. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
    a. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
    b. Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
    c. Pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
    d. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
    e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
    f. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
    g. Pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
    h. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
    i. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
    j. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
    k. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
    l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
    - Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
        a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;
        b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;
        c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;
        d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;

e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;

f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;

g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

h. di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;

i. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksana kebijakan dan penilaian kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan termasuk peserta didik dan pembangunan karakter;

j. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi penerbitan ijin, penataan dan penutupan Sekolah Dasar;

k. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;

l. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria peserta didik, tata kelola dan penilaian pada Sekolah Dasar dan layanan Khusus;

m. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar;

n. penyiapan dan penyediaan bahan pengadaan alat praktik dan peraga siswa;

o. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;

p. penyiapan dan penyediaan bahan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar;

q. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa;

r. penyiapan dan penyediaan bahan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar;

s. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dasar;

t. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Pada Sekolah Dasar;

u. penyiapan dan penyediaan bahan peningkatan kapasitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Pada Sekolah Dasar;

v. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

- Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;

b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;

c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;

d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;

e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;

f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;

g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;

h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pemeliharaan prasarana pendidikan dan penunjang pembelajaran;

i. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan permasalahan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana Sekolah Dasar;

j. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional;

k. penyiapan dan penyediaan bahan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah dasar;

l. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

m. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :

- Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

h. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksana kebijakan dan penilaian kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan termasuk peserta didik dan pembangunan karakter;

i. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi penerbitan ijin, penataan dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;

j. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

k. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria peserta didik, tata kelola dan penilaian pada Sekolah Menengah Pertama dan layanan Khusus;

l. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

m. penyiapan dan penyediaan bahan pengadaan alat praktik dan peraga siswa;

n. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;

o. penyiapan dan penyediaan bahan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

p. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa;

q. penyiapan dan penyediaan bahan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

r. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah Menengah Pertama;

s. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama;

t. penyiapan dan penyediaan bahan peningkatan kapasitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama;

u. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

- Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pemeliharaan prasarana pendidikan dan penunjang pembelajaran;

i. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan permasalahan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;

j. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional;

k. penyiapan dan penyediaan bahan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;

l. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

m. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terkait dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Pengelolaan PAUD DAN PNF menyelenggarakan fungsi :

- Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

h. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksana kebijakan dan penilaian

i. kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan termasuk peserta didik dan pembangunan karakter;

j. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi penerbitan ijin, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;

k. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter pada satuan pendidikan anak usia dini;

l. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria peserta didik, tata kelola dan penilaian pada satuan pendidikan anak usia dini dan layanan khusus;

m. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan biaya personil peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini;

n. penyiapan dan penyediaan bahan pengadaan alat praktik dan peraga siswa;

o. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;

p. penyiapan dan penyediaan bahan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan anak usia dini;

q. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa;

r. penyiapan dan penyediaan bahan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini;

s. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan kelembagaan dan manajemen satuan pendidikan anak usia dini;

t. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini;

u. penyiapan dan penyediaan bahan peningkatan kapasitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan sekolah pendidikan anak usia dini;

v. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

- Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

  a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan non formal;

  b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang penyelenggaraan pendidikan non formal;

  c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penyelenggaraan pendidikan non formal;

  d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendidikan non formal;

  e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan non formal;

  f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan non formal;

  g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan pendidikan non formal;

  h. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksana kebijakan dan penilaian kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan termasuk peserta didik dan pembangunan karakter;

  i. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi penerbitan ijin, penataan dan penutupan sekolah pendidikan non formal;

  j. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter pada satuan pendidikan non formal;

  k. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria peserta didik, tata kelola dan penilaian pada satuan pendidikan non formal dan layanan khusus;

  l. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan biaya personil peserta didik pada satuan pendidikan non formal;

  m. penyiapan dan penyediaan bahan pengadaan alat praktik dan peraga siswa;

  n. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;

o. penyiapan dan penyediaan bahan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan non formal;

p. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa;

q. penyiapan dan penyediaan bahan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal;

r. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan kelembagaan dan manajemen pada satuan pendidikan non formal;

s. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan pada satuan pendidikan non formal;

t. penyiapan dan penyediaan bahan peningkatan kapasitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan pada satuan pendidikan non formal;

u. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

v. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan

w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

   - Seksi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra

     a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

     b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

     c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasandi bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

     d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

     e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

h. penyiapan dan penyediaan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;

i. penyiapan dan penyediaan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

j. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten;

k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan

a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang guru dan tenaga kependidikan;

b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang guru dan tenaga kependidikan;

c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang guru dan tenaga kependidikan;

d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang guru dan tenaga kependidikan;

e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang guru dan tenaga kependidikan;

f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang guru dan tenaga kependidikan;

g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang guru dan tenaga kependidikan;

h. penyiapan dan penyediaan bahan pemerataan kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal;

i. penyiapan dan penyediaan bahan perhitungan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal;

j. penyiapan dan penyediaan bahan penataan pendistribusian guru dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal;

k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban memiliki 8 ruang kerja, 2 ruang rapat, 1 Aula, 1 gudang, 13 kamar mandi, 1 ruang lobby, dan 1 mushola. Luasan gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban seluruhnya seluas + 946 m2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Selain bangunan gedung tersebut, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, didukung pula dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	2	3	4
I	Dinas Pendidikan		
	Alat-Alat Angkutan		
	- Kendaraan Roda 4	7	
	- Sepeda Motor	150	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	378	
	• Lemari Besi	4	
	• Rak Besi/Metal	2	
	• Rak Kayu	10	
	• Filling Besi/Metal	20	
	• Brandkas	1	
	• Mesin Absensi	1	
	• LCD Proyektor/Infocus	5	
	• Alat Kantor Lainnya	3	
	• Kursi Kayu	3	
	• Meja Rapat	25	
	• Meja Resepsionis	1	
	• Meja ½ Biro	10	
	• Kursi Rapat	189	
	• Kursi Tamu	7	
	• Kursi Putar	9	
	• Mesin Pemotong Rumput	1	
	• Lemari Es	1	
	• AC Split	45	
	• Ac Stand	2	
	• Televisi	2	
	• Wireless	8	
	• Unit Power Supply	5	
	• Camera Video	2	
	• Lambang Garuda Pancasila	1	
	• Dispenser	2	
	• Gordyin/Kray	3	
	• Alat Rumah Tangga Lain-Lain	7	
	• Alat Pembantu Kebakaran	1	
	• Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	2	3	4
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	
	• - Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10	
	• - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20	
	• - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	50	
	• - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselom II	2	
	• - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	4	
	• - Lemari Arsip	6	
	• - Buffet Kayu	8	
	• Alat Studio dan Alat Komunikasi	12	
	• - Microphone/Wireless MIC	8	
	• - Power Supply Microphone	1	
	• - Professional Sound System	6	
	• - Video Monitor	3	
	• - Layar Film/Projector	2	
	• Alat-alat Persenjataan/Keamanan	3	
	• - Alat Keamanan lain-lain	1	
	• - Kamera Digital	2	

2.2.2 Sistem Informasi Kepegawaian

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh. Dalam mendukung digitasilasi manajemen ASN, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban telah menerapkan penggunaan aplikasi SITEMAN.

SITEMAN merupakan sebuah aplikasi sitem informasi manajemen ASN yang diterapkan di Kabupaten Tuban. Dimana didalam aplikasi ini selain terdapat data informasi Kepegawaian juga merupakan alat untuk mengukur kinerja individu ASN, baik secara harian melelui e-Kinerja maupun bulanan dan tahunan melui e-SKP. Pemberian Reward and Punishment juga didasarkan

2.2.3 Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Tuban, khusus untuk Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 957.309.877.040,97.

2.2.4 Administrasi Kepegawaian

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan pada Januari 2025 total sebanyak 95 Orang, dengan rincian sebagimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

No	Bidang Tugas	Eselon						JF / Staf Pelaksana		PPPK		Non PNS		Jumlah	
		II		III		IV									
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	SEKRETARIAT	1					1	10	3	12	1	9	5	32	10
3	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAUD DAN PNF					1	1	5	2	2		1		9	3
4	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR			1		2		4	2	1	2	1	2	9	6
5	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			1			1	4	1	2		3	3	10	5
6	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KURIKULUM, GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1		1	1	2	4		2	1		5	7
JUMLAH		1	0	3	0	4	4	25	12	17	5	15	10	65	31

Dari 96 pegawai Dinas Pendidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) 71 orang dan Non ASN 25 orang Adapun komposisi Pendidikan yang dimiliki adalah sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Kondisi ASN Menurut Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SLTA	26	8	34
2	D-III/D-IV	2	4	6
3	S-1	17	9	26
4	S-2	5		5
5	S-3			
	Jumlah	50	21	71

Adapun rincian latar belakang pendidikan formal Non ASN sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kondisi Non ASN Menurut Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Sekolah Dasar	1	0	1
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	5	2	7
4	D-I/D-II	2	1	3
5	D-III/D-IV	0	1	1
6	S-1	7	6	13
7	S-2	0	0	0
8	S-3	0	0	0
	Jumlah	15	10	25

Kondisi jenjang kepangkatan dan golongan pegawai ASN Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kondisi Pegawai ASN Menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian

No	Golongan	Kondisi Pegawai								Jumlah	
		a		b		c		d			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Golongan IV			4						4	0
2	Golongan III	8	5	1	2	2	4	3	1	14	12
3	Golongan II			1		2	1	11	4	14	5
4	Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13		8		9		19		49	

Target kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan) Kabupaten Tuban.

No	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Skor Literasi Jenjang SD	pendidikan dasar	Skor Literasi Jenjang SD	63,6	64,28	66,78	69,28	63,6	64,28	66,78	69,28
2	Skor Literasi Jenjang SMP	pendidikan dasar	Skor Literasi Jenjang SMP	74,87	74,53	75,63	76,73	74,87	74,53	75,63	76,73
3	Skor Numerasi Jenjang SD	pendidikan dasar	Skor Numerasi Jenjang SD	49,92	55,46	58,36	61,26	49,92	55,46	58,36	61,26
4	Skor Numerasi Jenjang SMP	pendidikan dasar	Skor Numerasi Jenjang SMP	65,7	65,21	66,71	68,21	65,7	65,21	66,71	68,21
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	pendidikan dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	99,51	99,65	99,7	99,75	99,51	99,65	99,7	99,75
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	pendidikan dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	98,24	96,98	97,41	97,84	98,24	96,98	97,41	97,84

No	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	90,99	87,29	88,31	89,33	90,99	87,29	88,31	89,33
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan	pendidikan non formal/ kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan	17,20	21,34	26,34	32,34	17,20	21,34	26,34	32,34
9	Skor Literasi Paket C	pendidikan non formal/ kesetaraan	Skor Literasi Paket C	57,02	55,9	57,31	58,72	57,02	55,9	57,31	58,72
10	Skor Numerasi Paket C	pendidikan non formal/ kesetaraan	Skor Numerasi Paket C	55,90	51,09	53,14	55,19	55,90	51,09	53,14	55,19

Menunjukkan rencana dan hasil kinerja untuk 10 indikator penting di bidang pendidikan:

1. kinerja Skor Literasi Jenjang SD menunjukkan realisasi capaian yang selalu memenuhi target Renstra. Hal ini mencerminkan keberhasilan dan efektivitas intervensi program literasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di jenjang SD. Tantangan ke depan adalah memastikan proyeksi ini benar-benar terwujud dan menjaga kualitas program agar kenaikan skor literasi dapat terus dipertahankan menuju target 69,28 di akhir periode Renstra (Tahun 2026).
2. Pada Indikator Skor Literasi Jenjang SMP capaian kinerja pada tahun 2024 menunjukkan hasil peningkatan. Semua target utama berhasil dipenuhi, terutama dalam memastikan kelulusan siswa dan meningkatkan jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP/MTs.
3. Pada Indikator Skor Numerasi pada Jenang SD Secara ringkas, hasil kinerja pendidikan pada tahun 2024 sesuai target. Semua target utama, baik yang terkait dengan lama masyarakat bersekolah maupun kualitas lembaga PAUD, berhasil dicapai 100%. Ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan di sektor pendidikan berjalan efektif sesuai rencana.
4. Pada Indikator Skor Numerasi Jenjang SMP kinerja sektor PAUD dan Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2024 memenuhi target. Target untuk kualitas lembaga (akreditasi B) dan jumlah peserta didik (APK) terpenuhi, bahkan APK PAUD berhasil melampaui target.
5. Pada Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2024 sesuai target. Target untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) di jenjang SD/MI dan SMP/MTs, serta target kualitas sekolah (Akreditasi B), terpenuhi target 100%.
6. Pada Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 kinerja sektor Pendidikan Kesetaraan (Non Formal) dan kualitas SMP/MTs pada tahun 2024 memenuhi target. Semua target yang diukur, baik untuk kualitas lembaga (Akreditasi B) maupun jumlah peserta didik (APK) di pendidikan kesetaraan dan kualitas SMP/MTs, semuanya terpenuhi 100%.
7. Pada Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Secara ringkas, kinerja sektor pendidikan pada tahun 2024 telah memenuhi target. Semua target yang diukur, termasuk kualitas pendidikan kesetaraan (Akreditasi B), partisipasi sekolah di jenjang SMP/MTs, dan tingkat kelulusan, semuanya terpenuhi 100%

8. Pada Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan kinerja sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD/MI) pada tahun 2024 memenuhi target. Semua target yang diukur, baik untuk kualitas lembaga (Akreditasi B) maupun jumlah anak yang bersekolah (APK dan APS), semuanya terpenuhi 100%.
9. Pada Indikator Skor Literasi Paket C kinerja sektor Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dan Kelulusan SD/MI pada tahun 2024 memenuhi target. Semua target yang diukur, termasuk kualitas lembaga (Akreditasi B) dan jumlah peserta (APK) di pendidikan kesetaraan, serta tingkat kelulusan siswa SD/MI, semuanya terpenuhi 100%.
10. Pada Indikator Skor Numerasi Paket C kinerja sektor pendidikan pada tahun 2024 sangat sukses. Target-target utama terkait kualitas SMP/MTs (Akreditasi B), partisipasi sekolah di jenjang SMP/MTs, dan tingkat kelulusan siswa SD/MI, semuanya terpenuhi 100%. Ini menunjukkan bahwa program peningkatan akses dan mutu pendidikan berjalan efektif di berbagai jenjang.

Tabel 2.8
Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Tuban

NO	INDIKATOR	JENJANG	CAPAIAN 2024
1	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SD	64,28
2	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	74,53
3	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	55,46
4	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	65,21
5	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	87,30
6	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	98,70
7	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Kesetaraan	21,34
8	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	77,16
9	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kuali kasi S1/D4	PAUD	82,99
10	D.10 Iklim Inklusivitas	SD	58,65
11	D.10 Iklim Inklusivitas	SMP	58,13
12	D.4 Iklim Keamanan	SD	74,85
13	D.4 Iklim Keamanan	SMP	70,26
14	D.8 Iklim Kebinekaan	SD	72,76
15	D.8 Iklim Kebinekaan	SMP	71,25

Dari capaian diatas masih ada beberapa akar masalah diantaranya :

- Data Peta Kebutuhan PTK yang masih perlu diolah

  Data Peta Kebutuhan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) pada umumnya masih berupa data mentah hasil dari dapodik, usulan sekolah, maupun proyeksi kebutuhan. Data ini perlu diolah agar benar-benar bermanfaat untuk perencanaan, rekrutmen, mutasi, maupun pemenuhan formasi.
- Indeks Distribusi Guru yang masih kurang

  Indeks Distribusi Guru yang masih kurang artinya Kondisi pemerataan guru di suatu wilayah belum sesuai standar, Berikut penjabaran aspek yang menyebabkan indeks distribusi guru masih rendah antara lain : Kuantitas Guru Tidak Seimbang, Kualifikasi dan Kompetensi Belum Sesuai, Sebaran Geografis Tidak Merata, Aspek Kepegawaian, Proyeksi Pensiun & Regenerasi,
- Kualitas Pembelajaran

  Kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan proses belajar mengajar dalam menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakter peserta didik sesuai tujuan pendidikan. Kualitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari guru, siswa, sarana, maupun lingkungan sekolah, tantangan untuk kualitas pembelajaran Masih ada guru mengajar tidak sesuai bidangnya, Sarana TIK belum merata, Variasi metode pembelajaran masih terbatas, Siswa kurang motivasi belajar, Evaluasi lebih fokus pada kognitif, belum seimbang dengan karakter dan keterampilan.
- Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru

  Refleksi pembelajaran adalah proses guru mengevaluasi pengalaman mengajar yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan. Hasil refleksi menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan berikutnya. Perbaikan pembelajaran adalah tindak lanjut nyata dari hasil refleksi berupa perubahan strategi, metode, media, atau pendekatan agar pembelajaran lebih efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik.
- Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemda Sesuai dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru

  kecukupan formasi guru ASN merupakan faktor kunci untuk meningkatkan Indeks Distribusi Guru. Tanpa perencanaan berbasis data yang akurat, penambahan formasi tidak akan otomatis menyelesaikan masalah pemerataan guru

- Proporsi PTK Bersertifikat

  Proporsi PTK bersertifikat adalah persentase jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah memiliki sertifikat pendidik (profesi guru) atau sertifikasi kompetensi tertentu dibandingkan dengan total PTK yang ada di sekolah/wilayah. Indikator ini penting untuk menilai kualitas, profesionalisme, dan kesiapan PTK dalam memberikan layanan pendidikan sesuai standar nasional.
- Jumlah PTK yang Mengikuti Pelatihan TIK

  Jumlah PTK yang mengikuti pelatihan TIK adalah data yang menunjukkan berapa banyak pendidik dan tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, operator sekolah) yang telah berpartisipasi dalam pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Kecukupan Buku Teks dan Non Teks yang Berkualitas

  kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas adalah indikator penting untuk mendukung pembelajaran bermutu. Tidak hanya cukup jumlahnya, tetapi juga harus terjamin kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatannya
- Indeks Fasilitas TIK

  Indeks Fasilitas TIK adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kecukupan, kualitas, dan pemerataan sarana-prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah atau lembaga pendidikan. Indeks ini menunjukkan sejauh mana sekolah siap melaksanakan pembelajaran digital, asesmen berbasis komputer, dan pengelolaan data pendidikan.
- Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi

  Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan bahan bacaan serta fasilitas pendukung literasi di satuan pendidikan. Indeks ini mencerminkan bagaimana sekolah menyediakan lingkungan belajar yang mendukung penguatan budaya literasi pada siswa.

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, terdapat berbagai akar masalah yang timbul antara lain :

1. Pemenuhan sarana prasarana pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
2. Peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi
3. Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan Standar Kompetensi
4. Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Ketrampilan Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
5. Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Kecil (siswa < 60)
6. Akses dan Layanan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
7. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
8. implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
9. SDGs (suistanable development Goals)

Dari berbagai analisa terhadap akar masalah yang ditimbul tersebut, maka diperbolehkan isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.9

Isu – isu Strategis

Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

No	Aspek	Isu Strategis	Solusi	Upaya
1.		Pemenuhan sarana prasarana pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	• Penguatan Perencanaan dan Penganggaran • Peningkatan Efektivitas Pengadaan dan Pemanfaatan	• Membuat rencana kerja tahunan dan jangka menengah yang berfokus pada pemenuhan sarana prasarana yang paling kritis dan mendesak (misalnya, ruang kelas rusak berat, laboratorium IPA/komputer yang tidak layak, atau sanitasi/toilet). • Memprioritaskan pengadaan perangkat TIK dan akses internet

No	Aspek	Isu Strategis	Solusi	Upaya
				yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital dan Mengoptimalkan penggunaan ruang/sarana prasarana yang ada untuk berbagai kegiatan, misalnya, perpustakaan sebagai ruang literasi dan TIK, atau laboratorium yang dapat digunakan bersama.
2.		Peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi	• Peningkatan Kapasitas Guru	• Mengaktifkan kelompok kerja guru (KKG/MGMP) untuk berbagi praktik baik (best practices) dalam mengajar literasi dan numerasi yang terintegrasi di semua mata pelajaran
			• Ketersediaan Sumber Belajar dan Ekosistem	• Mengaktifkan program wajib membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan memastikan ketersediaan buku bacaan berjenjang yang beragam dan menarik (non-teks pelajaran) di setiap kelas dan perpustakaan.

No	Aspek	Isu Strategis	Solusi	Upaya
3.		Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan Standar Kompetensi	• Analisis Kebutuhan Guru Berbasis Data (Dapodik) • Pengangkatan Guru PPPK yang Tepat Sasaran	• Melakukan pemetaan kebutuhan guru secara akurat berdasarkan jumlah rombel, jam mengajar wajib, dan kualifikasi melalui data Dapodik, untuk mengidentifikasi kelebihan/kekurangan di setiap sekolah. • Mengutamakan perekrutan Calon Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki latar belakang pendidikan
4.		Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Ketrampilan Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	• Pendataan ATS Berbasis Kewilayahan • Pemasaran Sosial Program Kesetaraan	• Melakukan pendataan ATS secara *real-time* dan berbasis nama (*by name by address*) yang terintegrasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan aparat desa/kelurahan untuk mengetahui alasan putus sekolah yang spesifik. • program Kesetaraan (Paket A, B, C) menjadi program yang

No	Aspek	Isu Strategis	Solusi	Upaya
				menarik, bukan sekadar pilihan terakhir, dengan mempromosikan manfaatnya dalam perolehan ijazah dan kesempatan kerja.
5.		Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Kecil (siswa < 60)	• Skema BOS Afirmasi Khusus Sekolah Kecil • Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Daerah	• Menerapkan skema BOS baru atau dana afirmasi tambahan yang menjamin bagi sekolah dengan siswa di bawah batas minimum (<60 siswa). Dana ini dihitung berdasarkan biaya operasional tetap minimum, bukan hanya per siswa. • Mengalokasikan Dana Bantuan Operasional dari APBD (selain BOS Pusat) yang secara spesifik menargetkan kekurangan biaya operasional pada sekolah kecil, terutama yang berada di daerah terpencil atau terdepan.
6.		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	• Bimbingan Teknis Berjenjang	• Membentuk tim yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan

No	Aspek	Isu Strategis	Solusi	Upaya
			• Standarisasi Sistem Informasi	Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, dan instansi pengawas untuk menghapus ego sektoral. Tim ini bertugas memastikan target pendidikan (Literasi/Numerasi) terintegrasi dengan isu lain (gizi, kesehatan) yang memengaruhi capaian NSPK. • Peningkatan Kompetensi Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan
7.		implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	• Penyederhanaan Indikator Kunci • Penyaluran Dana Transfer Khusus SPM	• Mendorong integrasi sistem pelaporan SPM menjadi platform tunggal di tingkat Pusat. • Mengubah formula DAK menjadi lebih ketat, di mana alokasi dana untuk pelayanan dasar (seperti pendidikan) diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan SPM tahun sebelumnya dan rencana aksi tahun berjalan. •
8.		SDGs (suistanable	• Fokus pada Kelompok	• Mengintegrasikan target SDGs secara

No	Aspek	Isu Strategis	Solusi	Upaya
		development Goals)	Rentan dan Kesenjangan Geografis • Integrasi Perencanaan dan Penganggaran SDGs	eksplisit dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN) dan daerah (RPJMD/Renstra) sehingga setiap program dan anggaran OPD/Kementerian harus memiliki kontribusi yang jelas terhadap minimal satu target SDGs. • Mengalokasikan sumber daya dan program secara proporsional kepada daerah yang memiliki capaian terendah

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan program kegiatan prioritas yang mendorong terpenuhinya target renstra tahun berikutnya.

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2025, dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu pada RKPD tahun 2025 dan Renstra Dinas Pendidikan kabupaten Tuban Tahun 2025-2030 dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu aspek dalam menunjang pencapaian yang tinggi pada kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2025-2030. Beberapa hal yang perlu di perhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketetapan jenis output yang kegiatan serta ketetapan output jenis yang dihasilkan.

2.4 *Review* terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Penelaahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yang tercantum di dalam Rancangan Perubahan RKPD 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan análisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban hasil review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi,indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Dalam proses rancangan Perubahan RKPD 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban membandingkan rancangan awal RKPD tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Hal ini dimaksud untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas guna mencapai target renstra tahun berjalan. Adapun rancangan program kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dapat dilihat dalam lampiran tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat											
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,10%	
A		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83 Poin	678.662.093.725,00	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,3 Poin	758.289.056.053,00
I		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	8 dokumen	457.423.950,00	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	8 dokumen	429.987.769,00
1		Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	134.149.000,00	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	97.997.556,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2		Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	175.132.290,00	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	196.886.933,00
3		Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	148.142.660,00	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	135.103.280,00
II		Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	15 dokumen	665.799.991.835,00	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	15 dokumen	750.036.632.185,00
1		Tersedianya Gaji dan Tunjangan asn	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6911 Orang/bulan	665.205.795.595,00	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6911 Orang/bulan	749.498.437.709,00
2		Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	518.114.000,00	1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	499.584.000,00
3		Tersusunnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	32.187.000,00	1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	13.017.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	36.609.240,00	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	21.950.476,00
5		Tersusunnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	3.643.000,00	1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0
6		Tersusunnya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.643.000,00	1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.643.000,00
III		Tesusunnya Dokumen Kepegawaian Daerah	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah layanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah layanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	74.992.480,00
1		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0	1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	74.992.480,00
IV		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	7886 orang	3.983.789.996,00	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	7886 orang	3.983.764.996,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1		Tesediannya Pakaian Dinas beserta atribu kelengkapannya	1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7886 Paket	3.895.553.328,00	1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	976.000,00
2		terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Sisten Informasi Kepegawaian	1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	10.949.000,00	1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.455.000,00
3		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	10.947.668,00	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5.470.732,00
4		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	66.340.000,00	1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0
V		Tersedianya Layanan Pengadaan Administrasi Umum	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	211 jenis	868.557.770,00	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	211 jenis	645.099.850,00
1		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.006.189,00	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.006.189,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	221.611.322,00	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.766.260,00
3		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	177.495.140,00	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	166.687.140,00
4		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	280.390.375,00	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	216.486.325,00
5		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	34.974.000,00	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	34.974.000,00
6		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	125.080.744,00	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	78.179.936,00
VI		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	33 unit	1.422.932.989,00	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	33 unit	1.017.820.416,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	376.363.000,00	1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0
2		Tersedianya Mebel SKPD	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	21.414.400,00	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	20.065.000,00
3		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	1.025.155.589,00	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	997.755.416,00
VII		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	13 Laporan	2.377.580.908,00	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	13 Laporan	2.333.095.344,00
1		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	75.722.468,00	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	38.651.904,00
2		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	651.750.000,00	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	651.750.000,00
3		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.650.108.440,00	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.642.693.440,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
VIII		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD	252 unit	3.751.816.277,00	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD	252 unit	3.739.526.277,00
1		Meningkatnya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	176 Unit	225.225.836,00	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	176 Unit	225.225.836,00
2		Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	27.450.000,00	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	27.410.000,00
3		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	3.499.140.441,00	1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	3.486.890.441,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
		Terwujudnya aksesibilitas Pendidikan Dasar, Informal dan Non-formal yang bermutu dan Profesional										
B		Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100%	223.469.346.380,00	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				198.489.327.097,97
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95%						
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100%						
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100%						
										APK PAUD/Sederajat	82,95%	
										APK SD/Sederajat	100%	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
										APK SMP/Sederajat	100%	
										APM SD/Sederajat	95,93%	
										APM SMP/Sederajat	87,59%	
										Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97,3%	
										Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72%	
										Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Tahun	3%	
										Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	%2	
I		Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah SD Negeri Terakreditasi	559 lembaga	105.734.020.135,00	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				93.515.566.085,97
										Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang terakreditasi minimal "B"	511 Satuan Pendidikan	
										Iklim Keamanan SD	75,75	
										Iklim Kebinekaan SD	73,76	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
										Iklim Inklusivitas SD	61,15	
1		Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	223.522.000,00	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0
2		Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tuban, Jatirogo, Sadang Kab. Tuban, Jatirogo, Dingil Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Soko, Jegulo Kab. Tuban, Jenu, Sugihwaras Kab. Tuban, Merakurak, Tahulu Kab. Tuban, Merakurak, Sumber Kab. Tuban, Semanding, Prunggaha	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	11 Ruang	1.726.655.997,00	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tuban, Jatirogo, Sadang Kab. Tuban, Jatirogo, Dingil Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Soko, Jegulo Kab. Tuban, Jenu, Sugihwaras Kab. Tuban, Merakurak, Tahulu Kab. Tuban, Merakurak, Sumber Kab. Tuban, Semanding, Prunggaha	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
				n Kulon Kab. Tuban, Tuban, Kingking Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo					n Kulon Kab. Tuban, Tuban, Kingking Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo			
3		Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Tuban, Jatirogo, Sadang Kab. Tuban, Jatirogo, Dingil Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Soko, Jegulo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.264.577.485,00	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Tuban, Jatirogo, Sadang Kab. Tuban, Jatirogo, Dingil Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Soko, Jegulo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	672.718.450,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4		Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Singgahan, Mulyorejo Kab. Tuban, Kerek, Sidonganti Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin Kab. Tuban, Jenu, Sugihwaras Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Plumpang, Trutup Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1.150.000.000,00	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Singgahan, Mulyorejo Kab. Tuban, Kerek, Sidonganti Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin Kab. Tuban, Jenu, Sugihwaras Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Plumpang, Trutup Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	1.296.200.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tuban, Bangilan, Bate Kab. Tuban, Bancar, Banjarjo Kab. Tuban, Bancar, Kayen Kab. Tuban, Soko, Klumpit Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	819.967.485,00	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tuban, Bangilan, Bate Kab. Tuban, Bancar, Banjarjo Kab. Tuban, Bancar, Kayen Kab. Tuban, Soko, Klumpit Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	69.000.000,00
6		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	100.500.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
7		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Tuban, Parengan, Mojomalang Kab. Tuban, Soko, Sokosari Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	604.980.000,00	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Tuban, Parengan, Mojomalang Kab. Tuban, Soko, Sokosari Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	586.884.022,00
8		Tersedianya Mebel Sekolah	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	2.433.500.000,00	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	843.900.000,00
9		Meningkatnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Tuban, Semanding, Bektiharjo Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3120 Peserta Didik	826.733.328,00	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Tuban, Semanding, Bektiharjo Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3120 Peserta Didik	415.802.645,00
10		Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	605 Orang	8.019.208.480,00	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	605 Orang	5.254.633.380,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
11		Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	89.000.000,00	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	106.616.350,00
12		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	95 Satuan Pendidikan	311.039.568,00	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	95 Satuan Pendidikan	213.303.471,00
13		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	567 Satuan Pendidikan	63.570.570.000,00	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	567 Satuan Pendidikan	61.037.920.000,00
14		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1134 Orang	300.279.400,00	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1134 Orang	194.859.152,00

15		Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Tuban, Kenduruan, Jamprong Kab. Tuban, Tambakboyo, Mander Kab. Tuban, Tambakboyo, Glodonggede Kab. Tuban, Kerek, Trantang Kab. Tuban, Parengan, Wukirharjo Kab. Tuban, Soko, Jegulo Kab. Tuban, Jenu, Wadung Kab. Tuban, Rengel, Rengel Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo Kab. Tuban, Rengel, Karangtinoto Kab. Tuban, Rengel, Banjaragung	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	18 Ruang	4.106.318.000,00	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 Ruang	0

				Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Semanding, Jadi Kab. Tuban, Semanding, Bejagung Kab. Tuban, Tuban, Kembangbilo Kab. Tuban, Plumpang, Kepohagung Kab. Tuban, Grabagan, Gesikan							

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
16		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0	1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	255.000.000,00
17		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 Orang	143.852.974,00	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 Orang	83.232.319,97
18		Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	85 Konten Digital	36.709.968,00	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	85 Konten Digital	13.569.255,00
19		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	61.587.600,00	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	34.090.952,00
20		Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	85 Komunitas	85.022.600,00	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	85 Komunitas	55.902.176,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
21		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20 Kegiatan	56.695.950,00	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20 Kegiatan	30.842.500,00
22		Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	500.000.000,00	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	442 Paket	490.786.560,00
23		Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tuban, Kenduruan, Jamprong Kab. Tuban, Bancar, Banjarjo Kab. Tuban, Parengan, Wukirharjo Kab. Tuban, Montong, Manjung Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.984.656.000,00	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tuban, Kenduruan, Jamprong Kab. Tuban, Bancar, Banjarjo Kab. Tuban, Parengan, Wukirharjo Kab. Tuban, Montong, Manjung Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.323.104.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
24		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tuban, Jatirogo, Sadang Kab. Tuban, Jatirogo, Dingil Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Soko, Klumpit Kab. Tuban, Merakurak, Tahulu Kab. Tuban, Merakurak, Sumber Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Widang, Bunut Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	967.930.000,00	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tuban, Jatirogo, Sadang Kab. Tuban, Jatirogo, Dingil Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Soko, Klumpit Kab. Tuban, Merakurak, Tahulu Kab. Tuban, Merakurak, Sumber Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Widang, Bunut Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	75 Unit	3.046.939.520,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
25		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	36.323.030,00	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	14.020.000,00
26		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	567 Satuan Pendidikan	79.861.200,00	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	567 Satuan Pendidikan	73.407.296,00
27		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	54 Ruang	10.736.801.870,00	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	112 Ruang	13.193.482.837,00
28		Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	5.598.227.200,00	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	463 Paket	4.108.851.200,00
II		Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	52 lembaga	61.659.108.937,00	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				49.545.067.374,00
										Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang terakreditasi "A"	41 Satuan Pendidikan	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
										Iklim Inklusivitas SMP	60,53	
										Iklim Keamanan SMP	71,76	
										Iklim Kebinekaan SMP	72,25	
1		Terlaksananya Pembangunan Laboratorium	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Kab. Tuban, Jatirogo, Kedungmakam Kab. Tuban, Tambakboyo, Mander	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000,00	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2		Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Bancar, Bancar Kab. Tuban, Senori, Sidoharjo Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Lor Kab. Tuban, Singgahan, Mulyorejo Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	4.450.000.000,00	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
3		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo Kab. Tuban, Bangilan, Ngrojo Kab. Tuban, Tambakboyo, Sobontoro Kab. Tuban, Parengan, Suciharjo Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Jenu, Sumurgeneng Kab. Tuban, Rengel, Rengel Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban,	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	27 Ruang	5.400.000.000,00	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo Kab. Tuban, Bangilan, Ngrojo Kab. Tuban, Tambakboyo, Sobontoro Kab. Tuban, Parengan, Suciharjo Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Jenu, Sumurgeneng Kab. Tuban, Rengel, Rengel Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban,	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	1.740.000.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
				Plumpang, Ngrayung Kab. Tuban, Plumpang, Klotok					Plumpang, Ngrayung Kab. Tuban, Plumpang, Klotok			
4		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	201.048.108,00	1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	201.048.108,00
5		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Merakurak, Tuwiri Kulon Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	900.000.000,00	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Merakurak, Tuwiri Kulon Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1.317.000.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
6		Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tuban, Bancar, Sukoharjo Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung Kab. Tuban, Singgahan, Mulyorejo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	967.502.000,00	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tuban, Bancar, Sukoharjo Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung Kab. Tuban, Singgahan, Mulyorejo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	183.950.200,00
7		Meningkatnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15381 Peserta Didik	979.803.714,00	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15381 Peserta Didik	394.426.224,00
8		Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	383 Orang	4.783.268.140,00	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	383 Orang	4.638.729.180,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
9		Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	89.000.000,00	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	44.252.800,00
10		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95 Satuan Pendidikan	163.798.800,00	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95 Satuan Pendidikan	85.903.000,00
11		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	100 Satuan Pendidikan	35.983.780.000,00	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	100 Satuan Pendidikan	37.419.900.000,00
12		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	114.669.300,00	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	43.190.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
13		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	88.256.600,00	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	41.484.000,00
14		Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	189.969.028,00	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	46.111.000,00
15		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	44.997.688,00	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	25.488.232,00
16		Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	23.074.525,00	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	10.896.650,00
17		Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	25 Komunitas	70.364.000,00	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	25 Komunitas	53.012.500,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
18		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	69.768.050,00	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	20.600.000,00
19		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan	465.280.584,00	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan	457.796.060,00
20		Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tuban, Merakurak, Tuwiri Kulon Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	750.000.000,00	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tuban, Merakurak, Tuwiri Kulon Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	300.000.000,00
21		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	108.561.600,00	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	74.387.500,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
22		Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600 Paket	300.000.000,00	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600 Paket	299.925.120,00
23		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tuban, Bancar, Ngujuran Kab. Tuban, Montong, Montongsekar Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Plumpang, Klotok Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	4.000.000.000,00	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tuban, Bancar, Ngujuran Kab. Tuban, Montong, Montongsekar Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Plumpang, Klotok Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	903.000.000,00
24		Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	1.015.966.800,00	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	1.243.966.800,00
III		Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	1155 lembaga	43.170.932.528,00	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		37.506.752.696,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
										Jumlah Sekolah Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Minimal "B"	902 Satuan Pendidikan	
1		Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	5.863.771.000,00	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	0
2		Tersedianya Mebel PAUD	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	20 Paket	15.000.000,00	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	20 Paket	15.000.000,00

3		Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Jatirogo, Sekaran Kab. Tuban, Bangilan, Ngrojo Kab. Tuban, Bancar, Karangrejo Kab. Tuban, Senori, Wonosari Kab. Tuban, Tambakboyo, Cokrowati Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Kerek, Trantang Kab. Tuban, Parengan, Brangkal Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Soko, Sandingrowo Kab. Tuban,	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1200 Peserta Didik	398.680.000,00	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Jatirogo, Sekaran Kab. Tuban, Bangilan, Ngrojo Kab. Tuban, Bancar, Karangrejo Kab. Tuban, Senori, Wonosari Kab. Tuban, Tambakboyo, Cokrowati Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Kerek, Trantang Kab. Tuban, Parengan, Brangkal Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Soko, Sandingrowo Kab. Tuban,	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1200 Peserta Didik	397.701.000,00

				Merakurak, Pongpongan Kab. Tuban, Rengel, Campurejo Kab. Tuban, Semanding, Ngino Kab. Tuban, Plumpang, Jatimulyo Kab. Tuban, Palang, Ketambul Kab. Tuban, Widang, Simorejo Kab. Tuban, Grabagan, Banyubang					Merakurak, Pongpongan Kab. Tuban, Rengel, Campurejo Kab. Tuban, Semanding, Ngino Kab. Tuban, Plumpang, Jatimulyo Kab. Tuban, Palang, Ketambul Kab. Tuban, Widang, Simorejo Kab. Tuban, Grabagan, Banyubang			

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4		Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2080 Orang	7.496.736.800,00	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2080 Orang	7.897.711.800,00
5		Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	89.000.000,00	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	40.825.300,00
6		Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	80 Satuan Pendidikan	60.491.000,00	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	80 Satuan Pendidikan	33.700.000,00
7		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1183 Satuan Pendidikan	25.384.220.000,00	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1183 Satuan Pendidikan	24.689.420.000,00
8		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1183 Orang	84.384.100,00	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1183 Orang	46.854.240,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
9		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80 Orang	60.491.000,00	1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80 Orang	34.894.000,00
10		Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	60.491.000,00	1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	34.894.000,00
11		Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	56.677.000,00	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	29.994.000,00
12		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	43.036.800,00	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	14.413.304,00
13		Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	35 Dokumen	156.219.326,00	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	35 Dokumen	74.049.800,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
14		Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	24 Komunitas	187.136.000,00	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	24 Komunitas	95.969.000,00
15		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	150.000.000,00	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	150.000.000,00
16		Meningkatnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta didik	48.029.502,00	1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta didik	31.966.252,00
17		Tersedianya Perlengkapan PAUD	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1560 Paket	199.965.000,00	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1560 Paket	199.965.000,00
18		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1.150.000.000,00	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	299.575.000,00
19		Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	80 Paket	1.666.604.000,00	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	80 Paket	3.419.820.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
IV		Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	35 Satuan Pendidikan	12.905.284.780,00	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi		17.921.940.942,00
										Jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi Minimal "B"	16 Satuan Pendidikan	
1		Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	581 Orang	6.048.100.000,00	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	370 Orang	9.947.379.832,00
2		Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	252 Orang	50.000.000,00	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	252 Orang	28.695.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
3		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	119.997.700,00	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	69.684.242,00
4		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	35 Satuan Pendidikan	5.707.950.000,00	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	35 Satuan Pendidikan	6.325.080.000,00
5		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35 Orang	30.000.000,00	1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35 Orang	20.490.000,00
6		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	49.237.080,00	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	176.111.868,00
7		Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3510 Peserta Didik	900.000.000,00	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Peserta Didik	1.354.500.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
C		Meningkatnya Kualitas Kurikulum	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	90 %	688.445.100,00	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				441.183.275,00
										Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01%	
										Persentase Satuan pendidikan yang memiliki Guru Muatan Lokal Sesuai Standar Kompetensi	93,01%	
I		Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Lembaga Sekolah yang Melakukan Pengembagan Kurikulum Muatan Lokal	678 lembaga	501.263.000,00	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				319.795.890,00
										Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	152 Satuan Pendidikan	
										Jumlah Satuan pendidikan Dasar yang memiliki Guru Muatan Lokal Sesuai Standar Kompetensi	242 Satuan Pendidikan	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1		Terlaksananya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	50 Dokumen	102.415.600,00	1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	50 Dokumen	66.129.950,00
2		Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	102.415.600,00	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	63.006.700,00
3		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	50 Dokumen	192.259.200,00	1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	50 Dokumen	126.071.540,00
4		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	50 Dokumen	104.172.600,00	1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	50 Dokumen	64.587.700,00
II		Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Melakukan Pengembagan Kurikulum Muatan Lokal	536 Lembaga	187.182.100,00	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				121.387.385,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
					Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal					Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	280 Satuan Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Guru Muatan Lokal Sesuai Standar Kompetensi					Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Guru Muatan Lokal Sesuai Standar Kompetensi	280 Satuan Pendidikan	
1		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	50 Dokumen	54.540.200,00	1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	50 Dokumen	34.566.500,00
2		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	50 Dokumen	76.331.700,00	1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	50 Dokumen	52.208.385,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
3		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	50 Dokumen	56.310.200,00	1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	50 Dokumen	34.612.500,00
D		Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%) Persentase Pendidik Telah Memiliki Kualifikasi Akademik Sesuai Ketentuan Persentase Pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik	99,35% 100 % 86,41 %	128.000.000,00	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				67.973.500,00
										Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86,41%	
										Indeks Distribusi Guru SD	0,48	
										Indeks Distribusi Guru SMP	0,40	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
										Proporsi guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D4	93,48%	
I		Meningkatnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraa	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	12396 orang	128.000.000,00	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	9935 orang	128.000.000,00
1		Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	64.000.000,00	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	33.986.750,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	4 Laporan	64.000.000,00	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	33.986.750,00
E		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perizinan Pendidikan	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki perijinan operasional pendidikan Persentase Pelayanan Perijinan Operasional Pendidikan	100 % 100 %	42.584.690,00	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				22.337.115,00
										Persentase Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Perijinan Operasional Pendidikan	100%	
I		Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Lembaga yang mendapatkan ijin operasional	39 lembaga	42.584.690,00	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Lembaga yang mendapatkan ijin operasional		42.584.690,00

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana
					Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang mendapatkan ijin operasional					Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang mendapatkan ijin operasional	1 Satuan Pendidikan	
1		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	42.584.690,00	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	22.337.115,00
			J U M L A H				902.990.469.895,00	J U M L A H				957.309.877.040,97

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tidak terdapat program dan kegiatan yang merupakan usulan dari Masyarakat seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.11

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tuban

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /volume	Catatan
I	**1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**				
1	PGRI KABUPATEN TUBAN	JL. GEDONGOMBO RT 08 RW 07 KELURAHAN GEDONGOMBO SEMANDING TUBAN	Hibah untuk operasional	75.000.000	
2	DEWAN PENDIDIKAN	JL. BASUKI RAHMAD	Hibah untuk operasional	75.000.000	
II	**1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**				
1	SMP DWI SAKTI BANGILAN	BANGILAN	Hibah Komputer	30.000.000	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada analisis layanan pendidikan maupun kegiatan yang dirumuskan berdasarkan pada tujuan-tujuan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan, dan semua kegiatan dirumuskan dan diharapkan mencakup :

(1) Permasalahan yang ditemukan atau muncul di lapangan,

Permasalahan yang ditemukan atau muncul di lapangan antara lain :

- Ketidakseimbangan distribusi guru (ada sekolah kelebihan guru, ada yang kekurangan)
- Terbatasnya kesempatan peningkatan kompetensi
- Masih ada sekolah dengan kondisi gedung rusak ringan–berat
- Ketersediaan buku teks dan nonteks yang belum mencukupi
- Proses pembelajaran belum sepenuhnya berbasis student centered

(2) Upaya untuk mencapai visi dan misi terakhir 5 tahun sebelumnya dari Dinas Pendidikan

(3) Isu layanan pendidikan yang diangkat para pemangku kepentingan Pendidikan di Kabupaten Tuban.

Tabel 3.1

Program, Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan: Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata							Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun		8,49				8,69	
								Harapan Lama Sekolah		12,64				12,74	
								Indeks SPM Pendidikan		81,17				82,67	
	Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		87,8				88,5	
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah		83,3 Poin	758.289.056.053,00			83,8 Poin	678.769.222.445,00
I	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)		8 dokumen	457.423.800,00			8 dokumen	444.923.950,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	3 Dokumen	97.997.556,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			134.149.000,00
2	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	4 Laporan	196.886.933,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)			175.132.290,00
3	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Laporan	135.103.280,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			135.642.660,00
II	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)		15 dokumen	725.748.810.182,00				665.791.395.555,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan asn	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	6911 Orang/bulan	749.498.437.709,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD			665.205.795.595,00
2	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	2 Dokumen	499.584.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			518.114.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pelaksanaan Tugas ASN							
3	Tersusunnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	2 Dokumen	13.017.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			32.187.000,00
4	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	5 Laporan	21.950.476,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			28.012.960,00
5	Tersusunnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	0 Dokumen	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			3.643.000,00
6	Tersusunnya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	2 Dokumen	3.643.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			3.643.000,00
III	Tesusunnya Dokumen Kepegawaian Daerah	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	74.992.480,00				75.000.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	74.992.480,00	Dana Alokasi Umum (DAU)			75.000.000,00
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)		7886 orang	3.983.764.996,00				3.983.789.996,00
3	Tesediannya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	976.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			3.895.553.328,00
4	terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Sisten Informasi Kepegawaian	1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	5.455.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			10.949.000,00
5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	5.470.732,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			10.947.668,00
6	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	0 Orang	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			66.340.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Tersedianya Layanan Pengadaan Administrasi Umum	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)		211 jenis	868.548.770,00				868.557.770,00
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Paket	29.006.189,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			29.006.189,00
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Paket	119.766.260,00	Dana Alokasi Umum (DAU)			221.611.322,00
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	4 Paket	166.687.140,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			177.495.140,00
4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Paket	216.486.325,00	Dana Alokasi Umum (DAU)			280.390.375,00
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	4 Dokumen	34.974.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			34.974.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	4 Laporan	78.179.936,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			125.080.744,00
V	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)		33 unit	1.423.060.490,00				1.422.932.989,00
1	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	0 Unit	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			376.363.000,00
2	Tersedianya Mebel SKPD	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	0 Unit	20.065.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			21.414.400,00
3	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	18 Unit	997.755.416,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			1.025.155.589,00
VI	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)		13 Laporan	2.377.580.908,00				2.408.905.908,00
1	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	4 Laporan	38.651.904,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			75.722.468,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	36 Laporan	651.750.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			651.750.000,00
3	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Laporan	1.642.693.440,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			1.681.433.440,00
VII	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaa n BMD		252 unit	3.751.776.277,00				3.773.716.277,00
1	Meningkatnya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	176 Unit	225.225.836,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			225.225.836,00
2	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	116 Unit	27.410.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			49.350.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	3.486.890.441,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			3.499.140.441,00
	Sasaran: Terwujudnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang Berkualitas							Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD		66,78				69,28	
								Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP		75,63				76,73	
								Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD		58,36				61,26	
								Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP		66,71				68,21	
								Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12		99,70				99,75	
								Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15		97,41				97,84	
								Angka Partisipasi Sekolah		89,1				90,9	

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								(APS) 5-6							
								Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan		25,44				29,54	
								Skor Literasi Paket C		57,31				58,72	
								Skor Numerasi Paket C		53,14				55,19	
B	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD/Sederajat		82,95%	198.489.327.097,97				220.986.685.218,00
								APK SD/Sederajat		100%					
								APK SMP/Sederajat		100%					
								APM SD/Sederajat		95,93%					
								APM SMP/Sederajat		87,59%					
								Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat		97,3%					
								Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat		72%					
								Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia		3%					

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								diatas 25 Tahun							
								Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun		2%					
I	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang terakreditasi minimal "B"		511 Satuan Pendidikan	91.392.550.406,84				102.307.858.751,00
								Iklim Keamanan SD		75,75					
								Iklim Kebinekaan SD		73,76					
								Iklim Inklusivitas SD		61,15					
1	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	0 Ruang	0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			223.522.000,00
2	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Tuban, Jatirogo, Sadang Kab. Tuban, Jatirogo, Dingil Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Soko, Jegulo Kab. Tuban, Jenu, Sugihwaras Kab. Tuban, Merakurak,	0 Ruang	0				1.726.655.997,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Tahulu Kab. Tuban, Merakurak, Sumber Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Tuban, Kingking Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo						
3	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Tuban, Jatirogo, Sadang Kab. Tuban, Jatirogo, Dingil Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Soko, Jegulo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon	3 Ruang	672.718.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			1.264.577.485,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Singgahan, Mulyorejo Kab. Tuban, Kerek, Sidonganti Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin Kab. Tuban, Jenu, Sugihwaras Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Plumpang, Trutup Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo	14 Unit	1.296.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			1.000.000.000,00
5	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Bangilan, Bate Kab. Tuban, Bancar, Banjarjo Kab. Tuban, Bancar, Kayen Kab. Tuban, Soko, Klumpit Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo	1 Ruang	69.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			819.967.485,00
6	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Ruang	100.500.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			0

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Sedang/Berat							
7	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Parengan, Mojomalang Kab. Tuban, Soko, Sokosari Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Ruang	586.884.022,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			604.980.000,00
8	Tersedianya Mebel Sekolah	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	843.900.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			2.433.500.000,00
9	Meningkatnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Tuban, Semanding, Bektiharjo Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	3120 Peserta Didik	415.802.645,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			826.733.328,00
10	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	605 Orang	5.254.633.380,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			8.136.208.480,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Sekolah Dasar							
11	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	200 Orang	106.616.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			89.000.000,00
12	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	95 Satuan Pendidikan	213.303.471,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			311.039.568,00
13	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567 Satuan Pendidikan	61.037.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler			63.570.570.000,00
14	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1134 Orang	194.859.152,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			300.279.400,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Sekolah Dasar							
15	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		0 Ruang	0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			4.106.318.000,00
16	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	255.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			0
17	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	83.232.319,97	Dana Bagi Hasil (DBH)			52.009.174,00
18	Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	85 Konten Digital	13.569.255,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			36.709.968,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	34.090.952,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			61.587.600,00
20	Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Komunitas	55.902.176,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			85.022.600,00
21	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kegiatan	30.842.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			56.695.950,00
22	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	442 Paket	490.786.560,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			500.000.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Tuban, Kenduruan, Jamprong Kab. Tuban, Bancar, Banjarjo Kab. Tuban, Parengan, Wukirharjo Kab. Tuban, Montong, Manjung Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo	6 Ruang	1.323.104.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			1.984.656.000,00
24	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Jatirogo, Sadang Kab. Tuban, Jatirogo, Dingil Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Soko, Klumpit Kab. Tuban, Merakurak, Tahulu Kab. Tuban, Merakurak, Sumber Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Widang, Bunut Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo	75 Unit	3.046.939.520,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			967.930.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	40 Orang	14.020.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			36.323.030,00
26	Terselenggarannya Proses Belajar bagi Peserta Didik	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567 Satuan Pendidikan	73.407.296,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			79.861.200,00
27	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Ruang	13.193.482.837,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			10.526.211.486,00
28	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	463 Paket	4.108.851.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			2.507.500.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang terakreditasi "A"		41 Satuan Pendidikan	47.435.214.307,00				61.360.038.159,00
								Iklim Inklusivitas SMP		60,53					
								Iklim Keamanan SMP		71,76					
								Iklim Kebinekaan SMP		72,25					
1	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kab. Tuban, Jatirogo, Kedungmakam Kab. Tuban, Tambakboyo, Mander	0 Ruang	0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			500.000.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Bancar, Bancar Kab. Tuban, Senori, Sidoharjo Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Lor Kab. Tuban, Singgahan, Mulyorejo Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	0 Unit	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			4.450.000.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo Kab. Tuban, Bangilan, Ngrojo Kab. Tuban, Tambakboyo, Sobontoro Kab. Tuban, Parengan, Suciharjo Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Jenu, Sumurgeneng Kab. Tuban, Rengel, Rengel Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Plumpang, Ngrayung Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	11 Ruang	1.740.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			5.400.000.000,00
4	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	201.048.108,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			0

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Merakurak, Tuwiri Kulon Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng	7 Ruang	1.317.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			900.000.000,00
6	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Bancar, Sukoharjo Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung Kab. Tuban, Singgahan, Mulyorejo	6 Unit	183.950.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			967.502.000,00
7	Meningkatnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15381 Peserta Didik	394.426.224,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			979.803.714,00
8	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383 Orang	4.638.729.180,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			5.701.997.980,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan Sekolah Dasar						Sekolah Menengah Pertama	Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
9	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	44.252.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			89.000.000,00
10	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Satuan Pendidikan	85.903.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			163.798.800,00
11	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Satuan Pendidikan	37.419.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler			35.983.780.000,00
12	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	43.190.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			114.669.300,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Menengah Pertama							
13	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	41.484.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			87.470.890,00
14	Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Konten Digital	46.111.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			189.969.028,00
15	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.488.232,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			44.997.688,00
16	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	10.896.650,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			23.074.525,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Komunitas	53.012.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			70.364.000,00
18	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kegiatan	20.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			69.768.050,00
19	Terselenggarakannya Proses Belajar bagi Peserta Didik	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Satuan Pendidikan	457.796.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)			465.280.584,00
20	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Tuban, Merakurak, Tuwiri Kulon Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo	1 Ruang	300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			750.000.000,00
21	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	74.387.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			108.561.600,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dilaksanakan							
22	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Paket	299.925.120,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			300.000.000,00
23	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tuban, Bancar, Ngujuran Kab. Tuban, Montong, Montongsekar Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Plumpang, Klotok Kab. Tuban, Widang, Compreng	3 Ruang	903.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			4.000.000.000,00
24	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	1.243.966.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			0
III	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sekolah Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Minimal "B"		902 Satuan Pendidikan	37.365.570.328,00				43.747.903.528,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			5.863.771.000,00
2	Tersedianya Mebel PAUD	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			200.000.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Jatirogo, Sekaran Kab. Tuban, Bangilan, Ngrojo Kab. Tuban, Bancar, Karangrejo Kab. Tuban, Senori, Wonosari Kab. Tuban, Tambakboyo, Cokrowati Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Kerek, Trantang Kab. Tuban, Parengan, Brangkal Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Soko, Sandingrowo Kab. Tuban, Merakurak, Pongpongan Kab. Tuban, Rengel, Campurejo Kab. Tuban, Semanding, Ngino Kab. Tuban, Plumpang, Jatimulyo Kab. Tuban, Palang, Ketambul	1200 Peserta Didik	397.701.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			398.680.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Kab. Tuban, Widang, Simorejo Kab. Tuban, Grabagan, Banyubang						

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2080 Orang	7.897.711.800,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			7.496.736.800,00
5	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	40.825.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			89.000.000,00
6	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	80 Satuan Pendidikan	33.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			60.491.000,00
7	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1183 Satuan Pendidikan	24.689.420.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD			25.384.220.000,00
8	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1183 Orang	46.854.240,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			84.384.100,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Dana BOP PAUD							
9	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	80 Orang	34.894.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			60.491.000,00
10	Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	80 Konten Digital	34.894.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			60.491.000,00
11	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	80 Orang	29.994.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			56.677.000,00
12	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.413.304,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			43.036.800,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	74.049.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			156.219.326,00
14	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Komunitas	95.969.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			187.136.000,00
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	150.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			495.000.000,00
16	Meningkatnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	200 Peserta didik	31.966.252,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			48.029.502,00
17	Tersedianya Perlengkapan PAUD	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1560 Paket	199.965.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			200.000.000,00
18	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	299.575.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			1.101.000.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Sedang/Berat							
19	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Paket	3.419.820.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			1.762.540.000,00
IV	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi Minimal "B"		16 Satuan Pendidikan	10.726.894.780,00				13.570.884.780,00
1	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370 Orang	9.947.379.832,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			6.713.700.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252 Orang	28.695.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			50.000.000,00
3	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Satuan Pendidikan	69.684.242,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			119.997.700,00
4	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Satuan Pendidikan	6.325.080.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan			5.707.950.000,00
5	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	20.490.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			30.000.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Sekolah Nonformal/ Kesetaraan							
6	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	176.111.868,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			49.237.080,00
7	Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Peserta Didik	1.354.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			900.000.000,00
C	Meningkatnya Kualitas Kurikulum	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		93,01%	441.183.275,00				688.445.100,00
								Persentase Satuan pendidikan yang memiliki Guru Muatan Lokal Sesuai Standar Kompetensi		93,01%					

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Sekolah yang Melakukan Pengembagan Kurikulum Muatan Lokal		678 lembaga	501.263.000,00				501.263.000,00
1	Terlaksananya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	66.129.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			102.415.600,00
2	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	63.006.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			102.415.600,00
3	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	126.071.540,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			192.259.200,00
4	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	64.587.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			104.172.600,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal		280 Satuan Pendidikan	187.182.100,00				187.182.100,00
								Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Guru Muatan Lokal Sesuai Standar Kompetensi		280 Satuan Pendidikan					
1	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	34.566.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			54.540.200,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	52.208.385,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			76.331.700,00
3	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	34.612.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			56.310.200,00
D	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik		86,41%	67.973.500,00				128.000.000,00
I	Meningkatnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru SD		0,48	128.000.000,00			0.52	128.000.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nonformal/ Kesetaraa														
								Indeks Distribusi Guru SMP		0,40				0.44	
								Proporsi guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D4		93,48%				93.98	
1	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	33.986.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			64.000.000,00
2	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	33.986.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			64.000.000,00

No	Tujuan /Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana/ Pagu Indiktif			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perizinan Pendidikan	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Perijinan Operasional Pendidikan		100%	22.337.115,00				42.584.690,00
I	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang mendapatkan ijin operasional		1 Satuan Pendidikan	42.584.690,00				42.584.690,00
1	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	22.337.115,00	Dana Bagi Hasil (DBH)			42.584.690,00
		J U M L A H									**957.309.877.040,97**				**900.614.937.453,00**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester berikutnya di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yang memiliki empat bidang beserta Sekretariat dalam menangani urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, guna mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yang sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Tuban. Keterlakasanaan Program dan Kegiatan pada suatu Perangkat Daerah terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban pada tahun 2025 dapat terwujud dengan baik bilamana :

1. Perencanaan disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan dinamika regulasi terkait pada suatu Instansi Pemerintah;
2. Menganalisa secara menyeluruh baik dari segi strenghs, weakneses, opportunities, dan treats yang ada pada Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban;
3. Dukungan baik dari segi sumber daya manusia yang tersedia maupun sumber pembiayaan adalah faktor penting terlaksananya program dan kegiatan yang sudah direncanakan;

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program maupun kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun anggaran 2025 sangat diharapkan peran aktif, komitmen dan tanggungjawab stakeholder serta seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban untuk mencermati isi dokumen Perubahan Rencana Kerja menjadi pedoman dalam melakukan kolaborasi dan bersinergi dalam mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaannya guna dapat mewujudkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Demikian gambaran singkat tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025, dengan berdasarkan asas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ABDUL RAKHMAT, S.T., M.T

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

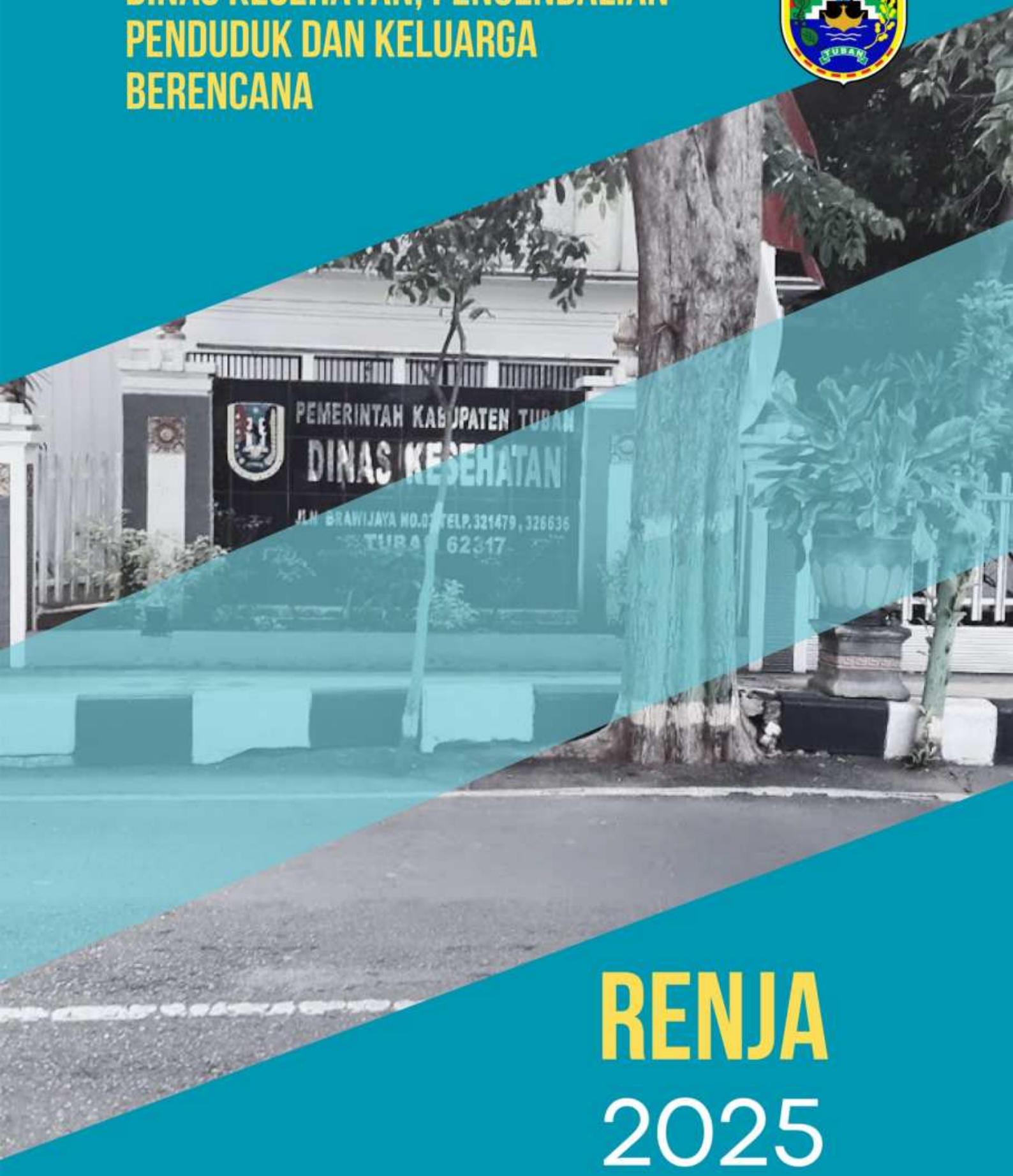

RENJA

2025

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

c

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.

b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.

d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah yang diselenggarakan untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan di daerah, setiap tahunnya pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja tahunan perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam perkembangannya yang mengikuti perubahan arah kebijakan baik dipusat dan di daerah serta dinamika kondisi perekonomian, keuangan daerah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Rencana kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan. Lokasi kegiatan,

kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. Setelah perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di tetapkan, maka Perangkat Daerah akan menindaklanjuti dengan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan simultan dengan hal tersebut ditingkat Kabupaten akan dilanjutkan dengan tahapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan tahapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, perubahan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dengan tugas pokok dan fungsinya seperti:

1. Perubahan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2025 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib kesehatan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tuban yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib urusan kesehatan dan Keluarga Berencana. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja ini dapat diketahui pencapaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah hingga tahun berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Peubahan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3. Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan teknis tahunan yang memuat kebijakan, program-program, sasaran-sasaran yang akan dicapai serta indikasi kegiatan pembangunan dalam tahun anggaran 2025.

B. Tujuan

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah semester 1 Tahun 2025 dan capaian indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Melakukan analisis terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban terhadap Indikator Kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan dinamika pembangunan kesehatan yang berlangsung serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban pada Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2025
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.4. *Review* terhadap Rancangan RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.1.1 Capaian Indikator Utama Triwulan II Tahun 2025

Berikut capaian Indikator Utama triwulan II Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Tuban Tahun 2025

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
1	Indeks Kesehatan		IKK	0,805	0,81	0,81	0,81	0,845	0,845	0,81	0,81	
2	Angka Harapan Hidup		IKK	72,17	75	75,25	72,4	74,95	74,95	75,25	72,4	
3	Persentase keluarga sehat		IKK	28%	29,00%	29,10%	28,00%	29,42	29,4	29,10%	28,00%	
4	Angka Kematian Ibu (AKI)		IKK	186,88/100.000 KH (28) JIWA	180,20/100.000 KH (27) JIWA	173,53/100.000 KH (26) JIWA	166,86/100.000 KH (25) JIWA	152,19/100.000 KH 24 jiwa	38,54/100.000 (6 jiwa)	173,53/100.000 KH (26) JIWA	166,86/100.000 KH (25) JIWA	
5	Angka Kematian Bayi (AKB)		IKK	7,34/1000 KH (110) JIWA	6,74/1000KH (101) JIWA	6,67/1000KH (100) JIWA	6,6/1000KH (99) JIWA	6,97/1000KH 110 jiwa	3,4/1.000 (53 jiwa)	6,67/1000KH (100) JIWA	6,6/1000KH (99) JIWA	
6	Persentase Fasyankes yang terakreditasi		IKK	65,50%	70,10%	75,60%	80,60%	87,06	88,24	75,60%	80,60%	
7	Persentase desa ODF		IKK	60	70	80	90	100	100	80	90	
8	Persentase balita stunting		IKK	17	14	12	10	11,3	11,3	12	10	
9	Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar		IKK	74,36	74,36	92,31	100	84,71	83,53	92,31	100	
10	Persentase peningkatan pendapatan retribusi Laboratorium kesehatan		IKK	10%	10%	10%	10%	10	0	10%	10%	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
11	Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah-Laboratorium		IKK	10%	10%	10%	10%	10	0	10%	10%	
13	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat		IKK	93,50%	95,00%	96,00%	85,03%	98,48	86	96,00%	85,03%	
14	Persentase desa siaga aktif purnama mandiri		IKK	49,70%	58,84%	67,99%	77,13%	58,84%	58,84	67,99%	77,13%	
15	Angka kelahiran TFR (total fertility rate)		IKK	2	2	2	2	1,83	0	2	2	
16	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)		IKK	10,50%	7%	7,0%	9,0%	4,5	4,6	7,0%	9,0%	
17	Median usia kawin petama perempuan (MUKP) seluruh wanita 25-49 tahun		IKK	21	21	21	21	22	0	21	21	
18	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	SPM/Standar Nasional		0.077	0.081	0.081	0.08	0,071	0,07	0.081	0.08	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	98,22%	39,09	100%	100%	
20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	99,99%	39,45	100%	100%	
21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	99,31%	34,32	100%	100%	
22	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	38,7	100%	100%	
23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	97	100%	100%	
24	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	99,34%	49,4	100%	100%	
25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	47,93	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	98,41%	47	100%	100%	
27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	55	100%	100%	
28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	97%	63,3	100%	100%	
29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	121%	53,14%	100%	100%	
30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	159%	81,72%	100%	100%	
31	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	80%	100	100%	100%	
32	Nilai Evaluasi AKIP perangkat Daerah			83%	83%	83,1	82	82 ,75	82,75	83,1	82	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
33	Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik		IKK	76%	100%	100,0%	100,0%	96,97	100	100,0%	100,0%	
34	Persentase Indokator Mutu Nasional RS dr. R. Koesma		IKK	76,9%	84,60%	92,3%	100%	84,6	84,62	92,3%	100%	
35	Persentase Indokator Mutu Nasional RSUD Ali Manshur		IKK	69%	76,9%	92,3%	100%	84,62	84,62	92,3%	100%	
36	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (RSUD Dr, R. Koesma)		IKK	83%	83,50%	85%	86,5%	100	88,49	85%	86,5%	
37	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (RSUD Ali MAnshur)		IKK	57%	70%	72%	78%	714,45	71,53	72%	78%	

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa pencapaian Indek Kesehatan dan AHH masih di sesuaikan dengan capaian tahun 2024 karena belum dilakukan perhitungan, perhitungan dilakukan awal tahun 2026. Demikian juga induikator TFR, MUKP, Unmeet Need, Angka kematian ibu dan Bayi, Rasio Daya Tampung RS terhadap Penduduk. Sedangkan pencapaian 12 indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang meliputi pelayanan ibu hami, ibu bersalin, balita, bayi baru lahir, usua pendidian dasar, usia produktif , lansia, pelayana penyakit diabeter, hipertensi, TBC, HIV dan ODGJ baru dilakukan pelaksanaan kegiatannya pada bulan Januari sd Juni sehingga belum mencapai 100 % rata –rata capaian pada triwulan II ini adalah < 50% . Capaian indikator rumah sakit yaitu INM pada triwulan II ini sudah tercapai >84% dan sudah mencapai target walaupun belum dilakukan selama 1 tahun.

Capaian Indikator sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan Indikator Utama Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat dengan indikator angka harapan hidup belum tercapai dari target 75 dengan realisasi 74,95 karena didukung oleh program:

1. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum tercapai sesuai target 83 realisasi 82,75 meski lebih rendah tetapi capaian lebih besar dari tahun 2023 karena ada pengisian rencana aksi yan belum optimal dan perubahan target indikator program sehingga tidak tercapai dengan target yang baru. Sedangkan capaian triwulan II disamakan dengan capaian tahun 2024 karena belum dilakukan evaluasi.
2. Capaian Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula indikatornya Persentase Keluarga Sehat dengan target 29 dan sudah tercapai dengan realisasi 29,4 Persentase desa ODF sudah tercapai dari target 100 % dari target 70%. Persentase fasyankes terakreditasi tercapai 84,71 karena pada dari target 74,36%, Angka Kematian Ibu (AKI) sudah tercapai dengan target 180,20/100.000 KH / (27 jiwa) dengan realisasi 152,19/100.000KH/(24 jiwa) , Angka Kematian Bayi (AKB) sudah tercapai dengan target 6,74/1000KH (101 jiwa) dan realisasi 6,97/1000KH (110 jiwa), Persentase balita stunting Tercapai sesuai dengan hasil Bulan timbang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan target 14 sesuai hasil SGI dan realisasi hasil bulan

timbang 8,38 dengan hasil SSGI tahun 2021 25,1, tahun 2022 24,9 dan tahun 2023 17,8 terjadi penurunan 7,1. Sedangkan capaian tahun 2024 11,3. Untuk capaian triwulan II disamakan dengan capaian tahun 2024 karena belum dilakukan survey gizi ditahun berjala.

3. Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar mempunyai target 74,36% sudah tercapai dengan capaian kinerja juga 84,71%.Capain triwulan II mencapai 83,53 dmana belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan kegiatan belum selesai sampai dengan 1 tahun.
4. Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan indikator Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Yang Memenuhi Syarat sudah tercapai dengan target 95% dengan realisasi kegiatan 98,5%. Capain sampai dengan triwulan II mencapai 86,2 % dikarenakan baru berjalan 6 bulan kegiatan.
5. Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri mempunyai target 58,84% dengan capaian kegiatan 58,84% sudah mencapai target hal ini dikarenakan semua puskesmas melaksanakan pembinaan /sarasehan desa siaga dan peningkatan strata UKBM. Capaian sampai dengan triwulan II belum dilakukan pengukuran. Pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun.
6. Capaian Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Angka Kelahiran TFR (*Total Fertility Rate*) mempunyai target 2 dengan capaian 1,83 sudah tercapai karena Pelaksanaan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disusun.

   Target TFR capaian/realisasi lebih rendah dari target justru akan lebih baik dikarenakan rata2 anak yang akan dilahirkan oleh perempuan pada masa reproduksinya dibawah target, mempertahankan capaian dibawah target. Capaian tahun 2025 belum ada karena pegukuran ada di januari Tahun 2026.
7. Capaian Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) mempunyai target 7,1% dengan capaian 4,5% sudah melebihi target, capaian ini dipengaruhi karena kepesertaan ber KB dengan MKJP dibiayai oleh BKB. Pus yang tidak mau hamil tidak mau punya anak tidak mau/belum ber kb. Semakin banyak *unmet need* semakin tinggi

kehamilan yang tidak diinginkan sehingga cenderung kejadian stunting tinggi. Capaian Unmeed Need 4,6 dimana capaian lebih tinggi dari target.

8. Capaian Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Median Usia Kawin Petama Perempuan (MUKP) mempunyai target 21 sudah tercapai dengan capaian kegiatan 22.Tahun 2025 belum dilakukan pengukuran indikator.
9. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik dengan target 100% tercapai 96,97 % hal ini dikarenakan 1 Puskesmas yang capaian kinerjanya dengan nilai C. Capaian sampai dengan triwulan II belum selesai sehingga capaian disamakan dengan tahun 2024.
10. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase indikator Mutu Nasional RSUD Ali Manshur dengan target 76,9 terealiasi 84,62 karena ada indikator yang belum tercapai yaitu pemakaian APD, kebersihan tangan dan waktu tunggu rawat jalan. Sedangkan untuk RSUD Dr. R. Koesmas dengan target 84,6 tercapai 84,5 belum tercapai karena ada indikator yang belum 100% yaitu waktu tunggu rawat jalan dan pemakaian APD.Capaian INM Rumah sakit belum mencapai target karena kegiatan baru dilaksanakan 6 bulan.
11. Capaian Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat untuk RSUD dengan indikator presentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rsud koesmas dengan target 83,5 tercapai 100 % karena pada tahun 2024 mendapat tambahan sumber dana DAK fisik dan pajak rokok untuk pengadaan alat kesehatan dan adanya pembangunan ruang IPID. Target untuk RSUD Ali Manshur 70% dengan capaian 71,42 % hal ini sudah mencapai target karena adanya tambahan anggaran dbhcht. Capaian triwulan II ini belum sesuai target karena pengadaan pemenuhan sarana akan dilakukan pada triwulan III dan IV.

Capaian kinerja secara rinci sesuai dengan sasaran, tujuan ,program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**MENINGKATNYA HARAPAN HIDUP MASYARAKAT**		Angka Harapan Hidup	72.4 (Tahun)	40.254.897.400	74.77 (Tahun)	871.439.752.698	75.25 (Tahun)	514.692.979.576	0 (Tahun)	69.669.422.785	0 (Tahun)	87.228.324.856	0 (Tahun)	0	0 (Tahun)	0	0 (Tahun)	156.897.747.640	0 (Tahun)	1.179.525.070.226	0 %	2930.14 %	KEPALA DINAS
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinkes)**	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	83.1 (Poin)	217.669.542.177	0 (Poin)	39.801.345.230	0 (Poin)	44.603.963.012	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	84.405.308.242	0 (Poin)	120.992.346.804	0 %	0 %	DINKES P2KB
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangk	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang	18 (Dokumen)	890.302.455	18 (Dokumen)	546.918.284	18 (Dokumen)	387.110.000	8 (Dokumen)	23.359.200	8 (Dokumen)	40.338.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	16 (Dokumen)	63.697.200	16 (Dokumen)	697.586.464	88.89 %	78.35 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		at Daerah	tersusun (Dokumen)																					
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	200.000.000	1 (Dokumen)	6.354.200	1 (Dokumen)	24.913.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	31.267.200	2 (Dokumen)	54.541.180	0 %	0 %	JF
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 (Laporan)	210.000.000	5 (Laporan)	330.808.560	5 (Laporan)	144.000.000	2 (Laporan)	13.725.000	0 (Laporan)	12.750.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	26.475.000	2 (Laporan)	414.618.560	40 %	197.44 %	JF PERENCANA
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 (Laporan)	0	9 (Laporan)	32.252.800	9 (Laporan)	43.110.000	5 (Laporan)	3.280.000	1 (Laporan)	2.675.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	5.955.000	6 (Laporan)	44.569.800	0 %	0 %	JF PERENCANA

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**52,22**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Yang tersusun (Dokumen)	1 (Laporan)	379.332.949.061	1 (Laporan)	177.317.833.710	1 (Laporan)	151.305.992.181	0 (Laporan)	34.405.934.893	0 (Laporan)	35.310.197.090	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	69.716.131.983	0 (Laporan)	274.245.510.361	0 %	72.3 %	KASUBBAG KEUANGAN
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	2600 (Orang)	150.991.938.381	1308 (Orang)	34.363.993.893	1297 (Orang)	35.265.078.090	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1297 (Orang)	69.629.071.983	1297 (Orang)	96.810.002.351	0 %	0 %	JF
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 (Dokumen)	89.790.931.695	9 (Dokumen)	614.672.327	9 (Dokumen)	241.818.400	5 (Dokumen)	35.791.000	2 (Dokumen)	45.119.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	80.910.000	7 (Dokumen)	717.360.827	77.78 %	0.8 %	KASUBBAG KEUANGAN
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/ Ve rifikasi Keuangan SKPD	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	72.235.400	3 (Dokumen)	6.150.000	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	6.150.000	6 (Dokumen)	14.985.800	0 %	0 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**59,22**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	6 (Layanan)	2.904.285.700	6 (Layanan)	3.161.463.370	6 (Layanan)	399.665.450	6 (Layanan)	9.264.000	6 (Layanan)	39.391.800	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	6 (Layanan)	48.655.800	6 (Layanan)	3.296.073.221	100 %	113.49 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 (Paket)	2.904.285.700	6 (Paket)	12.624.100	2 (Paket)	5.909.860	0 (Paket)	0	2 (Paket)	2.696.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	2.696.000	2 (Paket)	15.320.100	100 %	0.53 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 (Paket)	739.016.728	2 (Paket)	783.590.228	2 (Paket)	98.344.919	1 (Paket)	0	2 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	0	2 (Paket)	820.835.279	100 %	111.07 %	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 (Paket)	739.016.728	3 (Paket)	228.449.540	3 (Paket)	110.119.850	1 (Paket)	4.108.000	3 (Paket)	15.035.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	19.143.000	3 (Paket)	282.589.040	100 %	38.24 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	3 (Paket)	525.869.572	3 (Paket)	85.943.000	3 (Paket)	87.437.975	1 (Paket)	5.156.000	3 (Paket)	7.202.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	12.358.000	3 (Paket)	103.541.000	100 %	19.69 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 (Dokumen)	36.782.000	13 (Dokumen)	9.900.000	5 (Dokumen)	7.753.920	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.100.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.100.000	0 (Dokumen)	12.000.000	0 %	32.62 %	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 (Laporan)	809.996.300	4 (Laporan)	220.077.799	2 (Laporan)	90.098.926	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	12.358.800	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	12.358.800	2 (Laporan)	240.909.099	100 %	29.74 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**83,33**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**														
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	1 (Layanan)	374.003.000	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	0 %	0 %	JF
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	707 (Paket)	374.003.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 (Paket)	2.109.000.802	4 (Paket)	873.410.334	4 (Paket)	830.928.450	4 (Paket)	65.337.138	4 (Paket)	146.221.624	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	4 (Paket)	211.558.762	4 (Paket)	1.193.620.931	100 %	56.66 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 (Paket)	1.054.505.292	3 (Paket)	387.069.575	12 (Paket)	482.571.000	3 (Paket)	34.013.482	3 (Paket)	68.441.282	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	6 (Paket)	102.454.764	6 (Paket)	549.537.786	200 %	52.11 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 (Laporan)	76.972.800	3 (Laporan)	50.721.350	3 (Laporan)	46.771.450	3 (Laporan)	16.528.500	3 (Laporan)	14.044.770	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	30.573.270	3 (Laporan)	81.294.620	100 %	105.61 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 (Laporan)	976.822.710	19 (Laporan)	435.619.409	7 (Laporan)	301.586.000	7 (Laporan)	14.795.156	7 (Laporan)	63.735.572	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	7 (Laporan)	78.530.728	7 (Laporan)	562.788.525	100 %	57.61 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**83,33**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**														
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 (Unit)	847.221.173	4 (Unit)	533.554.432	4 (Unit)	229.385.300	4 (Unit)	7.947.870	4 (Unit)	79.180.104	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	4 (Unit)	87.127.974	4 (Unit)	688.002.496	100 %	81.21 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 (Unit)	440.052.200	21 (Unit)	242.268.238	50 (Unit)	100.000.000	28 (Unit)	7.947.870	0 (Unit)	42.991.954	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	28 (Unit)	50.939.824	28 (Unit)	309.937.862	116.67 %	70.43 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
		2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 (Unit)	29.000.000	16 (Unit)	3.990.450	3 (Unit)	6.600.000	3 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	0	3 (Unit)	6.440.450	100 %	22.21 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 (Unit)	72.837.973	5 (Unit)	57.351.744	5 (Unit)	22.825.000	5 (Unit)	0	0 (Unit)	4.605.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	4.605.000	0 (Unit)	64.569.744	0 %	88.65 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
		4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 (Unit)	305.331.000	5 (Unit)	185.234.000	2 (Unit)	99.960.300	2 (Unit)	0	0 (Unit)	31.583.150	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	31.583.150	0 (Unit)	262.344.440	0 %	85.92 %	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**39**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		7. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Bulu)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	89.45 (%)	241.193.163.288	143.15 (%)	324.413.233.511	90 (%)	2.483.870.000	0 (%)	259.057.031	0 (%)	672.985.216	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	932.042.247	0 (%)	325.703.148.325	0 %	135.04 %	KEPALA PUSKESMAS
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Bulu)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	2.483.870.000	1 (Unit)	259.057.031	1 (Unit)	672.985.216	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	932.042.247	1 (Unit)	1.289.914.814	0 %	0 %	KEPALA PUSKESMAS

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		8. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Kenduruan)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.286.420.000	0 (%)	192.897.107	0 (%)	371.922.739	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	564.819.846	0 (%)	874.455.011	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kenduruan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.286.420.000	1 (Unit)	192.897.107	1 (Unit)	371.922.739	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	564.819.846	1 (Unit)	874.455.011	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		9. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Bangilan)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	3.169.920.000	0 (%)	307.710.573	0 (%)	726.274.601	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.033.985.174	0 (%)	2.164.490.838	0 %	0 %	Puskesmas Bangilan

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangilan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	3.169.920.000	1 (Unit)	307.710.573	1 (Unit)	726.274.601	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.033.985.174	1 (Unit)	2.164.490.838	0 %	0 %	Puskesmas Bangilan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		10. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Senori)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	2.612.710.000	0 (%)	165.598.352	0 (%)	705.777.150	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	871.375.502	0 (%)	1.569.989.801	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Senori	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	2.612.710.000	1 (Unit)	165.598.352	1 (Unit)	705.777.150	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	871.375.502	1 (Unit)	1.569.989.801	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		11. Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	2.878.800.000	17.67 (%)	508.585.240	7.03 (%)	646.006.546	0 (%)	0	0 (%)	0	7.03 (%)	1.154.591.786	7.03 (%)	2.022.113.150	0 %	0 %	Puskesmas Singgahan

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Singgahan)																						
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Singgahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	2.878.800.000	1 (Unit)	508.585.240	1 (Unit)	646.006.546	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.154.591.786	1 (Unit)	2.022.113.150	0 %	0 %	Puskesmas Singgahan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		12. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Monton g)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	0	8.65 (%)	0	9.87 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	9.87 (%)	0	9.87 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS MONTONG
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Montong	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	1.824.248.000	1 (Unit)	363.510.005	1 (Unit)	554.341.038	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	917.851.043	1 (Unit)	1.242.203.856	0 %	0 %	PUSKESMAS MONTONG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		13. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Jetak)	Presentasi Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.368.856.000	201486435 (%)	0	486492248 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	486492248 (%)	0	486492248 (%)	0	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jetak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.368.856.000	1 (Unit)	201.666.435	1 (Unit)	284.025.813	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	485.692.248	1 (Unit)	964.734.289	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		14. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Parengan)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.465.235.000	233931778 (%)	0	333090831 (%)	289.062.081	0 (%)	0	0 (%)	0	333090831 (%)	289.062.081	333090831 (%)	289.062.081	0 %	0 %	Puskesmas Parengan
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayana	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.465.235.000	1 (Unit)	233.931.778	1 (Unit)	376.621.134	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	610.552.912	1 (Unit)	992.599.951	0 %	0 %	Puskesmas Parengan

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		n BLUD Puskesmas Parengan	Penunjang Pelayanan																					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		15. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Ponco)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.549.848.000	264394440 (%)	0	658657230 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	658657230 (%)	0	658657230 (%)	0	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Ponco
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponco	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 (Unit)	0	1 (Unit)	0	1 (Unit)	1.549.848.000	1 (Unit)	251.250.140	1 (Unit)	386.024.370	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	637.274.510	1 (Unit)	955.989.667	100 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		16. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Soko)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	10 (%)	3.963.638.000	954506257 (%)	951.866.257	198970 9552 (%)	1.033.843.303	0 (%)	0	0 (%)	0	198970 9552 (%)	1.985.709.560	198970 9552 (%)	3.026.039.704	0 %	0 %	PUSKESMAS SOKO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Soko	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	3.963.638.000	1 (Unit)	943.616.257	1 (Unit)	1.031.093.303	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.974.709.560	1 (Unit)	3.015.039.704	0 %	0 %	PUSKESMAS SOKO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		17. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Prambontergayang)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.929.175.000	7.76 (%)	0	6.76 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	6.76 (%)	0	6.76 (%)	0	0 %	0 %	Puskesmas Prambontergayang
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Prambon Tergayang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 (Unit)	0	1 (Unit)	0	1 (Unit)	1.929.175.000	1 (Unit)	284.420.554	1 (Unit)	401.670.039	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	686.090.593	1 (Unit)	1.215.315.847	100 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		18. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Rengel)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	10 (%)	3.259.100.000	8.37 (%)	287.795.308	6.28 (%)	590.750.849	0 (%)	0	0 (%)	0	6.28 (%)	878.546.157	6.28 (%)	1.217.493.318	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rengel	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	3.259.100.000	1 (Unit)	287.795.308	1 (Unit)	590.750.849	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	878.546.157	1 (Unit)	1.059.103.710	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		19. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Prambon wetan)	Peresentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	892.664.000	135555907 (%)	0	347639554 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	347639554 (%)	0	347639554 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Prambon Wetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	892.664.000	1 (Unit)	135.555.907	1 (Unit)	212.083.647	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	347.639.554	1 (Unit)	592.628.535	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		20. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Grabagan)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	2.031.603.000	123728672 (%)	114.065.970	592384940 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	592384940 (%)	114.065.970	592384940 (%)	114.065.970	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Grabagan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (UNIT)	0	0 (UNIT)	0	1 (UNIT)	2.031.603.000	1 (UNIT)	237.797.542	1 (UNIT)	336.156.798	0 (UNIT)	0	0 (UNIT)	0	1 (UNIT)	573.954.340	1 (UNIT)	1.008.535.229	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		21. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Plumpang)	Peresentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	3.230.486.000	384100376 (%)	384.100.376	109971 1123 (%)	715.610.747	0 (%)	0	0 (%)	0	109971 1123 (%)	1.099.711.123	109971 1123 (%)	1.794.165.360	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Plumpang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	3.230.486.000	1 (Unit)	384.100.376	1 (Unit)	713.660.747	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.097.761.123	1 (Unit)	1.790.065.360	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		22. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Klotok)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.382.337.000	210338004 (%)	0	0 (%)	318.864.197	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	318.864.197	0 (%)	500.051.241	0 %	0 %	PUSKESMAS KLOTOK
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Klotok	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.382.337.000	1 (Unit)	210.338.004	1 (Unit)	318.864.197	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	529.202.201	1 (Unit)	931.255.193	0 %	0 %	PUSKESMAS KLOTOK
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		23. Peningkatan Pelayan	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.723.447.000	0 (%)	228.468.244	0 (%)	183.743.858	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	412.212.102	0 (%)	599.829.174	0 %	0 %	Puskesmas Widang

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		BLUD (Puskesmas Widang)																						
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Widang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.723.447.000	1 (Unit)	228.468.244	1 (Unit)	310.385.422	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	538.853.666	1 (Unit)	1.056.248.539	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Widang
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		24. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskemas Compreng)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	0	113979132 (%)	113.439.132	318541578 (%)	204.562.446	0 (%)	0	0 (%)	0	318541578 (%)	318.001.578	318541578 (%)	383.153.990	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Compreng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit Kerja)	0	0 (Unit Kerja)	0	0 (Unit Kerja)	797.953.000	1 (Unit Kerja)	113.439.132	1 (Unit Kerja)	204.562.446	0 (Unit Kerja)	0	0 (Unit Kerja)	0	1 (Unit Kerja)	318.001.578	1 (Unit Kerja)	383.153.990	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		25. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Palang)	persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	2.692.337.000	138.2 (%)	304.045.417	374.19 (%)	512.883.967	0 (%)	0	0 (%)	0	374.19 (%)	816.929.384	374.19 (%)	1.255.807.638	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Palang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (unit)	0	0 (unit)	0	1 (unit)	2.692.337.000	1 (unit)	304.045.417	1 (unit)	512.883.967	0 (unit)	0	0 (unit)	0	1 (unit)	816.929.384	1 (unit)	1.255.807.638	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		26. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Sumurgung)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.582.791.000	0 (%)	226.147.928	0 (%)	292.050.724	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	518.198.652	0 (%)	518.198.652	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayana	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	0 (unit)	0	0 (unit)	0	1 (unit)	1.582.791.000	1 (unit)	226.147.928	1 (unit)	292.050.724	0 (unit)	0	0 (unit)	0	1 (unit)	518.198.652	1 (unit)	1.041.213.497	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		n BLUD Puskesmas Sumurgung	Penunjang Pelayanan																					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		27. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Semanding)	Nama Indikator K1171THN25	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	0	13.29 (%)	0	9.01 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	9.01 (%)	0	9.01 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Semanding	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 (UNIT)	0	1 (UNIT)	0	0 (UNIT)	2.374.613.000	1 (UNIT)	224.966.019	1 (UNIT)	392.059.046	0 (UNIT)	0	0 (UNIT)	0	1 (UNIT)	617.025.065	1 (UNIT)	796.421.260	100 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		28. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Wire)	Presentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.841.360.000	233423 35 (%)	292.863.283	720503 273 (%)	125.542.965	0 (%)	0	0 (%)	0	720503 273 (%)	418.406.248	720503 273 (%)	801.487 .068	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wire	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.841.360.000	1 (Unit)	316.205.618	1 (Unit)	401.604.735	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	717.810.353	1 (Unit)	1.283.597.158	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		29. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Tuban)	Persentase realisasi anggaran BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	2.257.570.795	271202 155 (%)	0	612251 886 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	612251 886 (%)	0	612251 886 (%)	177.898 .381	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tuban	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 (UNIT)	0	0 (UNIT)	0	1 (UNIT)	2.257.570.795	1 (UNIT)	271.102.155	1 (UNIT)	341.149.731	0 (UNIT)	0	0 (UNIT)	0	1 (UNIT)	612.251.886	1 (UNIT)	1.068.440.367	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		30. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Kebonsari)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	1.013.906.000	126156311 (%)	8,7	465453402 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	465453402 (%)	8,7	465453402 (%)	2.708.700	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kebonsari	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kebonsari	1 (UNIT)	0	1 (UNIT)	0	1 (UNIT)	1.013.906.000	1 (UNIT)	123.764.711	1 (UNIT)	338.915.091	0 (UNIT)	0	0 (UNIT)	0	1 (UNIT)	462.679.802	1 (UNIT)	677.176.073	100 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		31. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Jenu)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	5.83 (%)	0	5.62 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	5.62 (%)	0	5.62 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS JENU

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jenu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Jenu)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	2.952.627.000	1 (Unit)	290.009.074	1 (Unit)	536.665.396	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	826.674.470	1 (Unit)	1.705.019.998	0 %	0 %	PUSKESMAS JENU
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		32. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Merakurak)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.763.876.000	214237873 (%)	0	592299249 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	592299249 (%)	0	592299249 (%)	174.457.003	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas merakurak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Merakurak)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.763.876.000	1 (Unit)	214.571.580	1 (Unit)	380.747.083	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	595.318.663	1 (Unit)	1.121.101.019	0 %	0 %	KEPALA PUSKESMAS
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		33. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Temandang)	Prosentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.152.902.000	8.28 (%)	160.748.647	6.07 (%)	195.512.679	0 (%)	0	0 (%)	0	6.07 (%)	356.261.326	6.07 (%)	728.113.477	0 %	0 %	puskesmas Temandang
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Temandang	Prosentase Realisasi Belanja BLUD	0 (unit kerja)	0	0 (unit kerja)	0	1 (unit kerja)	1.152.902.000	1 (unit kerja)	162.356.147	1 (unit kerja)	194.762.679	0 (unit kerja)	0	0 (unit kerja)	0	1 (unit kerja)	357.118.826	1 (unit kerja)	728.970.977	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		34. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Kerek)	Peresentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	2.218.386.000	164560304 (%)	0	133205933 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	133205933 (%)	0	133205933 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kerek	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Kerek)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	2.218.386.000	1 (Unit)	283.653.048	1 (Unit)	436.844.077	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	720.497.125	1 (Unit)	1.295.028.974	0 %	0 %	KEPALA PUSKESMAS

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		35. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Gaji)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1	440490 (%)	440,49	6.04 (%)	236.163.261	0 (%)	0	0 (%)	0	6.04 (%)	236.603.751	6.04 (%)	561.984.024	0 %	0 %	KEPALA PUSKESMAS GAJI
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gaji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Gaji)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	1	1 (Unit)	169.707.955	1 (Unit)	321.043.152	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	490.751.107	1 (Unit)	816.131.380	0 %	0 %	KEPALA PUSKESMAS
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		36. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Tambakboyo)	Peresentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	2.822.032.000	528461591 (%)	211.757.280	1490024119 (%)	512.157.357	0 (%)	0	0 (%)	0	1490024119 (%)	723.914.637	1490024119 (%)	1.645.916.146	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakboyo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Tambakboyo)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	2.822.032.000	1 (Unit)	528.461.591	1 (Unit)	961.562.528	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.490.024.119	1 (Unit)	2.412.025.628	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		37. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Jatirogo)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.471.577.000	211291695 (%)	0	670972226 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	670972226 (%)	0	670972226 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS JATIROGO
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jatirogo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Jatirogo)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.471.577.000	1 (Unit)	207.601.696	1 (Unit)	460.380.530	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	667.982.226	1 (Unit)	977.195.248	0 %	0 %	KAPUS
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		38. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Kebonharjo)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	0	164306269 (%)	0	353606360 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	353606360 (%)	0	353606360 (%)	0	0 %	0 %	Puskesmas Kebonharjo
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kebonharjo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Kebonharjo)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	941.071.000	1 (Unit)	157.709.269	1 (Unit)	178.434.564	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	336.143.833	1 (Unit)	692.557.470	0 %	0 %	KEPALA PUSKESMAS KEBONHARJO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		39. Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas Bancar)	Persentase Realisasi Belanja BLUD	0 (%)	0	0 (%)	0	90 (%)	1.207.099.000	0 (%)	137.673.652	11.41 (%)	202.925.885	0 (%)	0	0 (%)	0	11.41 (%)	340.599.537	11.41 (%)	663.786.509	0 %	0 %	PUSEKSMAS BANCAR
		1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Puskes	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.207.099.000	1 (Unit)	137.673.652	1 (Unit)	202.925.885	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	340.599.537	1 (Unit)	663.786.509	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Bancar	Pelayanan (Bancar)																					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**54,18**														
Predikat kinerja kegiatan										**Rendah**														
2		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD Ali Manshur)**	Persentase indikator Mutu Nasional RS (RS Ali Manshur)	0 (%)	0	0 (%)	0	92.3 (%)	18.400.000.000	92.31 (%)	3.293.637.569	76.92 (%)	2.650.313.869	0 (%)	0	0 (%)	0	76.92 (%)	5.943.951.438	76.92 (%)	9.232.885.465	0 %	0 %	DIREKTUR RSUD
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	0 (%)	0	0 (%)	0	10 (%)	0	-67.67 (%)	0	-43.18 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	-43.18 (%)	0	-43.18 (%)	0	0 %	0 %	DIREKTUR RSUD

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Peningkatan Pelayanan BLUD (RSUD Ali Manshur)	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	0 (%)	0	0 (%)	0	10 (%)	0	-67.67 (%)	0	-43.18 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	-43.18 (%)	0	-43.18 (%)	0	0 %	0 %	RSUD R ALI MANSHUR
			Persentase pertumbuhan kunjungan (RSUD Ali Manshur)	20 (%)	0	45.46 (%)	13.540.127.767	20 (%)	18.400.000.000	-70.89 (%)	3.293.637.569	-42.77 (%)	2.650.313.869	0 (%)	0	0 (%)	0	-42.77 (%)	5.943.951.438	-42.77 (%)	22.773.013.232	-213.85 %	0 %	RSUD R ALI MANSHUR
		1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD Ali Manshur)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD Ali Manshur)	0 (Unit)	0	1 (Unit)	13.540.127.767	1 (Unit)	18.400.000.000	1 (Unit)	3.293.637.569	1 (Unit)	2.650.313.869	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	5.943.951.438	1 (Unit)	22.773.013.232	0 %	0 %	RSUD R ALI MANSHUR
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**														
3		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERI**	Prosentase Indikator Mutu Nasional RS (RSUD Koesma)	0 (%)	0	0 (%)	0	92.3 (%)	128.488.598.090	76.92 (%)	25.427.181.439	84.62 (%)	28.315.118.722	0 (%)	0	0 (%)	0	84.62 (%)	53.742.300.160	84.62 (%)	149.957.369.115	0 %	0 %	RSUD dr. R. Koesma

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		NTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD Koesma)																						
		1. Peningkatan Pelayanan BLUD (RSUD Koesma)	Prosentase Pertumbuhan Kunjungan (RSUD Koesma)	9 (%)	0	0 (%)	0	8.5 (%)	128.114.595.090	-81.21 (%)	25.427.181.439	-57.69 (%)	28.315.118.722	0 (%)	0	0 (%)	0	-57.69 (%)	53.742.300.160	-57.69 (%)	149.957.369.115	-641 %	0 %	RSUD dr. R. Koesma
		1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD Koesma)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD Koesma)	1 (Unit)	0	1 (Unit)	245.029.051.185	1 (Unit)	128.114.595.090	1 (Unit)	25.427.181.439	1 (Unit)	28.315.118.722	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	53.742.300.160	1 (Unit)	394.986.420.300	100 %	0 %	RSUD DR R KOESMA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RSUD Koesma)	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (RSUD Koesma)	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	707 (Orang)	374.003.000	707 (Orang)	0	707 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	707 (Orang)	0	707 (Orang)	0	0 %	0 %	RSUD dr. R. Koesma

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (RSUD Koesma)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (RSUD Koesma)	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	707 (Paket)	374.003.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	RSUD dr. R. Koesma
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**50**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**														
4		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar	0 (%)	0	0 (%)	0	92.31 (%)	717.997.000	84.71 (%)	3.298.500	83.53 (%)	462.925.467	0 (%)	0	0 (%)	0	83.53 (%)	466.223.967	83.53 (%)	534.407.967	0 %	0 %	JF
		1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	Persentase tenaga kesehatan di fasyankes dasar dan rujukan yang	82.87 (%)	4.700.172.400	92.29 (%)	39.379.531	83 (%)	10.000.000	90.21 (%)	0	0 (%)	6.257.467	0 (%)	0	0 (%)	0	90.21 (%)	6.257.467	90.21 (%)	45.636.998	108.86 %	0.97 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kabupaten	memiliki izin praktik																					
		1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 (Dokumen/Tahun)	470.017.240	2 (Dokumen/Tahun)	39.379.531	2 (Dokumen/Tahun)	10.000.000	0 (Dokumen/Tahun)	0	1 (Dokumen/Tahun)	6.257.467	0 (Dokumen/Tahun)	0	0 (Dokumen/Tahun)	0	1 (Dokumen/Tahun)	6.257.467	1 (Dokumen/Tahun)	45.636.998	50 %	9.71 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan terhadap dokumen perencanaan	29.46 (%)	25.970.257.097	69.2 (%)	1.228.430.551	28 (%)	167.069.000	0 (%)	3.298.500	59.43 (%)	25.536.000	0 (%)	0	0 (%)	0	59.43 (%)	28.834.500	59.43 (%)	1.285.772.051	201.73 %	4.95 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																						
		1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 (Dokumen)	394.177.754	1 (Dokumen)	52.042.000	1 (Dokumen)	16.000.000	0 (Dokumen)	2.055.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.055.000	0 (Dokumen)	55.614.000	0 %	14.11 %	JF
		2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	40 (Orang)	25.576.079.343	64 (Orang)	752.173.744	40 (Orang)	49.000.000	6 (Orang)	1.243.500	6 (Orang)	25.536.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	6 (Orang)	26.779.500	6 (Orang)	791.663.244	15 %	3.1 %	JF
		3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 (Dokumen)	391.267.500	2 (Dokumen)	424.214.807	2 (Dokumen)	102.069.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	431.454.807	0 %	110.27 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**5**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknisnya	7.88 (%)	1.616.941.651	10.11 (%)	2.823.803.808	8 (%)	540.928.000	2.78 (%)	0	6.31 (%)	430.857.000	0 (%)	0	0 (%)	0	6.31 (%)	430.857.000	6.31 (%)	3.294.337.808	80.08 %	20.374 %	JF
		1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	300 (Orang)	540.928.000	30 (Orang)	0	8 (Orang)	430.857.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	8 (Orang)	430.857.000	8 (Orang)	470.534.000	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**2,67**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**92,96**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Tinggi**														
5		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Dinkes)**	Persentase fasyankes terakreditasi	80.65 (%)	0	87.06 (%)	27.644.379.645	75.56 (%)	0	83.72 (%)	0	88.24 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	88.24 (%)	0	88.24 (%)	27.644.379.645	109.41 %	0 %	KABID
			Angka Kematian Ibu (AKI)	158.52 (Per 100000 KH)	0	180.2 (Per 100000 KH)	3.656.471.132	173.53 (Per 100000 KH)	0	3 (Per 100000 KH)	0	3 (Per 100000 KH)	0	0 (Per 100000 KH)	0	0 (Per 100000 KH)	0	6 (Per 100000 KH)	0	6 (Per 100000 KH)	3.656.471.132	3.79 %	0 %	KABID
			Angka Kematian Bayi (AKB)	6.27 (Per 1000 KH)	0	6.74 (Per 1000 KH)	0	7.21 (Per 1000 KH)	0	0 (Per 1000 KH)	0	0 (Per 1000 KH)	0	0 (Per 1000 KH)	0	0 (Per 1000 KH)	0	0 (Per 1000 KH)	0	0 (Per 1000 KH)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang
			Persentase balita stunting	10 (%)	0	14 (%)	3.656.471.132	12 (%)	0	11.3 (%)	0	11.3 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	11.3 (%)	0	11.3 (%)	3.656.471.132	113 %	0 %	Kepala Bidang

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
			Persentase Keluarga Sehat	28 (%)	0	29 (%)	0	29 (%)	103.106.771.375	29.4 (%)	574.583.840	29.4 (%)	5.881.143.496	0 (%)	0	0 (%)	0	29.4 (%)	6.455.727.336	29.4 (%)	15.943.426.248	105 %	0 %	KABID
			Persentase desa ODF	89.94 (%)	0	100 (%)	1.844.867.121	80 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	1.844.867.121	111.19 %	0 %	KABID
		1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dinkes)	Presentase Kelengkapan Alkes sesuai standar	62.99 (%)	177.233.484.982	61.43 (%)	197.497.920.962	62 (%)	31.716.166.050	61.43 (%)	0	61.52 (%)	2.792.888.722	0 (%)	0	0 (%)	0	61.52 (%)	2.792.888.722	61.52 (%)	204.547.761.287	97.67 %	115.41 %	JF
		1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 (Unit)	0	1 (Unit)	2.018.550.700	1 (Unit)	251.293.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	2.018.550.700	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	7.189.200.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	1.098.825.900	0 %	0 %	JF
		3. Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	5 (Unit)	4.901.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	JF
		4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1280 (Unit)	568.247.073	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	135 (Paket)	18.806.425.977	0 (Paket)	0	45 (Paket)	2.792.888.722	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	45 (Paket)	2.792.888.722	45 (Paket)	5.951.014.425	0 %	0 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**6,67**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinkes)	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	0 (%)	0	0 (%)	0	42 (%)	48.688.411.060	100 (%)	5.895.777.200	100 (%)	5.694.238.940	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	11.590.016.140	100 (%)	19.828.903.978	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	48.688.411.060	18.84 (%)	5.895.777.200	39.09 (%)	5.694.238.940	0 (%)	0	0 (%)	0	39.09 (%)	11.590.016.140	39.09 (%)	19.828.903.978	0 %	0 %	JF
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan sesuai standar	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	18.94 (%)	0	39.45 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	39.45 (%)	0	39.45 (%)	0	0 %	0 %	JF
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	8.000.000	2 (Dokumen)	160	0 (Dokumen)	320	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	480	2 (Dokumen)	480	0 %	0 %	JF
		2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	23 (Dokumen)	39.624.208.760	3 (Dokumen)	138.670.000	2 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	138.670.000	2 (Dokumen)	138.670.000	0 %	0 %	JF ADMINKES

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	44 (Unit)	200.000.000	42 (Unit)	20.330.000	42 (Unit)	22.705.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	42 (Unit)	43.035.000	42 (Unit)	47.135.000	0 %	0 %	JF
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (Dinkes)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	766687 (Orang)	1.506.025.792	785012 (Orang)	212.136.560	790148 (Orang)	31.700.000	190830 (Orang)	0	390221 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	390221 (Orang)	0	390221 (Orang)	212.136.560	50.9 %	14.09 %	JF
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza (Dinkes)	Jumlah Penyalahgunan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	23 (Orang)	10.000.000	2 (Orang)	0	8 (Orang)	1.120.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	8 (Orang)	1.120.000	8 (Orang)	1.592.500	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		6. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinkes)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	141.506.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	JF
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	310289 (Orang)	907.916.471	60174 (Orang)	66.850.100	79254 (Orang)	35.000.000	17970 (Orang)	6.675.000	31795 (Orang)	6.675.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	31795 (Orang)	13.350.000	31795 (Orang)	82.045.100	10.25 %	9.04 %	JF
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	17832 (Orang)	37.520.000	5162 (Orang)	0	9330 (Orang)	800	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	9330 (Orang)	800	9330 (Orang)	5.310.000	0 %	0 %	JF
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	2340 (Orang)	10.000.000	704 (Orang)	0	1465 (Orang)	1.565.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1465 (Orang)	1.565.000	1465 (Orang)	3.944.500	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Berat (Dinkes)	Sesuai Standar																					
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinkes)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14360 (Orang)	1.935.305.377	17694 (Orang)	984.661.430	14781 (Orang)	50.000.000	4149 (Orang)	3.510.000	7832 (Orang)	7.825.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	7832 (Orang)	11.335.000	7832 (Orang)	998.436.430	54.54 %	51.59 %	JF
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) (Dinkes)	jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	100 (Orang)	10.000.000	67 (Orang)	0	85 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	152 (Orang)	0	152 (Orang)	0	0 %	0 %	JF
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkun	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 (Dokumen)	14.689.809.866	15 (Dokumen)	4.212.567.500	12 (Dokumen)	100.000.000	1 (Dokumen)	3.846.000	1 (Dokumen)	3.162.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.008.500	1 (Dokumen)	4.223.371.000	20 %	28.75 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		gan (Dinkes)																						
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinkes)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	19.434.650	3 (Dokumen)	820	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	820	6 (Dokumen)	820	0 %	0 %	JF
		14. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	92.879.350	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	0	0 %	0 %	JF
		15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	30.000.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	1.200.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	1.200.000	6 (Dokumen)	3.332.000	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumentasi)	0	0 (Dokumentasi)	0	12 (Dokumentasi)	80.162.000	3 (Dokumentasi)	0	6 (Dokumentasi)	8.263.000	0 (Dokumentasi)	0	0 (Dokumentasi)	0	6 (Dokumentasi)	8.263.000	6 (Dokumentasi)	12.023.000	0 %	0 %	JF
		17. Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	100.000.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	5.232.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	5.232.500	3 (Dokumen)	5.232.500	0 %	0 %	JF
		18. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinkes)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	30.000.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	3.641.860	0 %	0 %	JF
		19. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspada n Dini dan Respon Wabah	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	185 (Dokumen)	200.700.000	254 (Dokumen)	41.655.000	547 (Dokumen)	18.845.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	547 (Dokumen)	60.500.000	547 (Dokumen)	125.138.000	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinkes)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	5.795.013.100	1 (Dokumen)	1.845.000	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.845.000	1 (Dokumen)	2.452.500	0 %	0 %	JF
		21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinkes)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Bumil)	0	0 (Bumil)	0	16485 (Bumil)	487.467.500	963 (Bumil)	0	1100 (Bumil)	0	0 (Bumil)	0	0 (Bumil)	0	1100 (Bumil)	0	1100 (Bumil)	1.466.000	0 %	0 %	JF
		22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15295 (Bayi)	564.042.177	12342 (Bayi)	341.683.555	15570 (Bayi)	465.175.000	953 (Bayi)	0	1065 (Bayi)	0	0 (Bayi)	0	0 (Bayi)	0	1065 (Bayi)	0	1065 (Bayi)	458.979.245	6.96 %	81.37 %	JF
		23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinkes)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15240 (Orang)	4.747.879.521	13434 (Orang)	50.184.200	16392 (Orang)	108.923.200	3104 (Orang)	0	3364 (Orang)	5.482.500	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	6468 (Orang)	5.482.500	6468 (Orang)	60.736.700	42.44 %	1.28 %	JF
		24. Pengelolaan Pelayanan Kesehat	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	55133 (Orang)	6.000.175.287	59060 (Orang)	7.168.612	15779 (Orang)	10.000.000	0 (Orang)	0	4621 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4621 (Orang)	0	4621 (Orang)	7.168.612	8.38 %	0.12 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		an Balita (Dinkes)	Sesuai Standar																					
		25. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (Dinkes)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	146538 (Orang)	20.000.000	146538 (Orang)	0	146538 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	146538 (Orang)	0	146538 (Orang)	0	0 %	0 %	JF
		26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	200524 (orang)	112.514.000	0 (orang)	0	90254 (orang)	3.007.500	0 (orang)	0	0 (orang)	0	90254 (orang)	3.007.500	90254 (orang)	3.007.500	0 %	0 %	JF
		27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria (Dinkes)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1 (Orang)	10.000.000	0 (Orang)	0	4 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4 (Orang)	0	4 (Orang)	0	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		28. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	184.130.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	982,7	0 %	0 %	JF
		29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinkes)	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) HIV Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	18492 (Orang)	40.000.000	7220 (Orang)	0	15090 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	15090 (Orang)	0	15090 (Orang)	0	0 %	0 %	JF
		30. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan tuberculosis yang mendapatkan pelayanan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	1650 (orang)	10.000.000	514 (orang)	0	1059 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	1059 (orang)	0	1059 (orang)	0	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Tuberkulosis	kesehatan sesuai standar																					
		31. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	634.077.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	125.681.740	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	125.681.740	1 (Dokumen)	125.681.740	0 %	0 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**49,5**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (Dinkes)	Persentase Fasyankes Dasar dan Rujukan yang dibina SIKnya (Sistem Informasi Kesehatan)	100 (%)	3.232.066.300	100 (%)	90.694.530	100 (%)	10.000.000	0 (%)	0	99.5 (%)	4.800.000	0 (%)	0	0 (%)	0	99.5 (%)	4.800.000	99.5 (%)	95.494.530	99.5 %	2.95 %	JF
		1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	35 (Dokumen)	597.208.300	35 (Dokumen)	62.148.530	35 (Dokumen)	10.000.000	21 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	4.800.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	25 (Dokumen)	4.800.000	25 (Dokumen)	66.948.530	71.43 %	11.21 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**71,43**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**														
		4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase RS, Puskesmas dan Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD yang memiliki izin	100 (%)	3.018.571.104	100 (%)	62.442.440	100 (%)	159.317.850	100 (%)	16.731.000	100 (%)	19.799.420	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	36.530.420	100 (%)	98.972.860	100 %	3.28 %	JF
		1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	88 (Unit)	204.870.600	85 (Unit)	14.612.750	86 (Unit)	15.941.850	255 (Unit)	0	85 (Unit)	350	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	340 (Unit)	350	340 (Unit)	14.962.750	386.36 %	7.3 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	39 (Unit)	16.676.000	49 (Unit)	1.200.000	37 (Unit)	820	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	37 (Unit)	2.020.000	37 (Unit)	2.020.000	0 %	0 %	JF
		3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39 (Unit)	2.383.297.400	243 (Unit)	19.792.000	37 (Unit)	126.700.000	37 (Unit)	15.531.000	37 (Unit)	17.084.420	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	37 (Unit)	32.615.420	37 (Unit)	52.407.420	94.87 %	2.2 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**98,29**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		5. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	742.202.008	95 (%)	0	0 (%)	183.876.460	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	183.876.460	0 (%)	447.541.039	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Bulu)																						
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Bulu)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	494 (Orang)	115.907.232	111 (Orang)	0	220 (Orang)	39.107.500	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	220 (Orang)	39.107.500	220 (Orang)	78.443.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Bulu)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4000 (Orang)	28.735.808	4000 (Orang)	0	4000 (Orang)	1.083.600	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4000 (Orang)	1.083.600	4000 (Orang)	11.798.400	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskes	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4388 (Orang)	6.720.000	1455 (Orang)	0	3358 (Orang)	2.240.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3358 (Orang)	2.240.000	3358 (Orang)	4.480.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Bulu)																						
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Bulu)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	74 (Orang)	3.284.064	25 (Orang)	0	36 (Orang)	1.587.600	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	36 (Orang)	1.587.600	36 (Orang)	1.587.600	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Bulu)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	471 (Orang)	13.127.400	125 (Orang)	0	247 (Orang)	6.456.300	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	247 (Orang)	6.456.300	247 (Orang)	10.237.500	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	240.200.000	3 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	10.240.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	10.240.000	6 (Dokumen)	61.484.400	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Bulu)	Masyarakat																					
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Bulu)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	1.720.224	6 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	672	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	672	12 (Dokumen)	1.035.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bulu)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	72 (Dokumen)	14.720.000	18 (Dokumen)	0	36 (Dokumen)	2.880.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	36 (Dokumen)	2.880.000	36 (Dokumen)	4.800.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Bulu)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	132 (Dokumen)	15.750.000	33 (Dokumen)	0	66 (Dokumen)	15.750.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	66 (Dokumen)	15.750.000	66 (Dokumen)	15.750.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Bulu)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1523 (Orang)	2.189.376	332 (Orang)	0	573 (Orang)	525	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	573 (Orang)	525	573 (Orang)	2.070.600	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Bulu)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	72 (Dokumen)	122.816.600	18 (Dokumen)	0	36 (Dokumen)	60.200.700	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	36 (Dokumen)	60.200.700	36 (Dokumen)	86.068.300	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Bulu)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	12.895.536	6 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	5.040.200	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	5.040.200	12 (Dokumen)	8.053.500	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Bulu)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	87 (Dokumen)	703,728	21 (Dokumen)	0	42 (Dokumen)	152,4	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	42 (Dokumen)	152,4	42 (Dokumen)	264,9	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Bulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	40 (Dokumen)	163.432.040	10 (Dokumen)	0	20 (Dokumen)	37.941.160	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	20 (Dokumen)	37.941.160	20 (Dokumen)	80.524.939	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**54,15**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		6. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kenduruan)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	121.964.600	18 (Orang)	0	28 (Orang)	68.798.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	28 (Orang)	68.798.000	28 (Orang)	68.798.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	35.033.664	1983 (Orang)	0	725 (Orang)	702	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	725 (Orang)	702	725 (Orang)	3.588.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	2.814.912	313 (Orang)	0	430 (Orang)	702	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	430 (Orang)	702	430 (Orang)	702	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		4. Operasional Pelayanan Puskesmas Kenduruan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	153.050.066	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	18.922.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	18.922.000	2 (Dokumen)	18.922.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	81 (orang)	16.420.320	1 (orang)	0	2 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	2 (orang)	0	2 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	517 (Orang)	9.774.000	35 (Orang)	0	7 (Orang)	3.432.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	7 (Orang)	3.432.000	7 (Orang)	3.432.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	209.718.736	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	10.116.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	10.116.000	0 (Dokumen)	12.924.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.720.224	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.053.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.053.000	0 (Dokumen)	1.716.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	31.040.244	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	9.280.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	9.280.000	2 (Dokumen)	19.520.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	8.111.184	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	370 (Orang)	703,728	0 (Orang)	0	0 (Orang)	312	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	312	0 (Orang)	624	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		12. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	111.569.572	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	3.772.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	3.772.000	5 (Dokumen)	3.772.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	13.484.952	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.789.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.789.000	1 (Dokumen)	4.023.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Kenduruan)	Jumlah dokumen pengelolaan kesehatan ibu dan anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	351,864	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**28,84**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		7. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Presentasi ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	748.024.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kabupaten/Kota (Puskesmas Bangilan)																						
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	659 (Orang)	131.980.912	45 (Orang)	1.794.000	41 (Orang)	31.992.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	41 (Orang)	33.786.000	41 (Orang)	88.542.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	6666 (Orang)	38.582.592	6525 (Orang)	0	6525 (Orang)	312	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	6525 (Orang)	312	6525 (Orang)	624	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	7491 (Orang)	4.480.000	465 (Orang)	0	520 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	520 (Orang)	0	520 (Orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Bangilan)	sesuai Standart																					
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	77 (Orang)	10.321.344	9 (Orang)	0	9 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	9 (Orang)	0	9 (Orang)	3.432.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	647 (Orang)	6.947.904	64 (Orang)	0	50 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	50 (Orang)	0	50 (Orang)	3.702.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	207.634.752	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	77.025.900	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	77.025.900	1 (Dokumen)	188.864.900	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Masyarakat (Puskesmas Bangilan)	Gizi Masyarakat																					
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.127.680	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.964.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.964.000	0 (Dokumen)	3.042.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	15.680.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.680.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.680.000	1 (Dokumen)	10.880.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	38.939.376	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	19.467.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	19.467.000	0 (Dokumen)	19.467.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1450 (Orang)	938,304	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	468	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	104.325.720	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	19.767.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	19.767.500	1 (Dokumen)	55.207.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Bangilan)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	18.536.840	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	4.904.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	4.904.000	0 (Dokumen)	12.073.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu ndan anak	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	234,576	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Bangilan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	166.294.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	26.701.290	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	26.701.290	1 (Dokumen)	88.452.708	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**20,27**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		8. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Senori)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	654.732.000	95 (%)	0	0 (%)	147.609.542	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	147.609.542	0 (%)	416.151.413	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Senori)	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	593 (Orang)	62.820.000	40 (Orang)	0	40 (Orang)	6.054.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	40 (Orang)	6.054.000	40 (Orang)	40.392.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Senori)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yg mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5723 (orang)	71.910.280	5530 (orang)	0	5530 (orang)	31.600.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5530 (orang)	31.600.000	5530 (orang)	47.380.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Senori)	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	6556 (orang)	34.560.000	523 (orang)	0	527 (orang)	15.360.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	527 (orang)	15.360.000	527 (orang)	23.040.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Senori)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	76 (orang)	3.753.216	100 (orang)	0	8 (orang)	1.120.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	8 (orang)	1.120.000	8 (orang)	1.680.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Senori)	Jumlah orang terduga menderita Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	98 (orang)	390,96	88.1 (orang)	0	44 (orang)	70	0 (orang)	0	0 (orang)	0	44 (orang)	70	44 (orang)	245	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Senori)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	187.992.000	1 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	27.261.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	27.261.000	3 (Dokumen)	140.886.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Senori)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.720.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	800	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	800	1 (Dokumen)	1.760.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Senori)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	7.656.944	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	2.450.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	2.450.000	2 (Dokumen)	3.990.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Senori)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	44.363.328	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	20.785.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	20.785.000	1 (Dokumen)	21.135.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah puskesmas yg menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	507 (Orang)	938,304	0 (Orang)	0	8 (Orang)	490	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	8 (Orang)	490	8 (Orang)	490	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Senori)																						
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Senori)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	94.394.768	1 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	16.790.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	16.790.000	2 (Dokumen)	37.109.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Senori)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.583.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	861	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	861	1 (Dokumen)	1.722.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Senori)	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	703,2	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	320	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	320	1 (Dokumen)	320	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Senori	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	139.946.000	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	23.648.542	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	23.648.542	2 (Dokumen)	81.062.413	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**69,17**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**														
		9. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Singgahan)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	910.462.790	95 (%)	0	0 (%)	154.720.905	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	154.720.905	0 (%)	593.490.692	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	498 (Orang)	150.267.168	92 (Orang)	0	208 (Orang)	54.337.824	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	208 (Orang)	54.337.824	208 (Orang)	106.215.648	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5016 (Orang)	20.564.496	5016 (Orang)	0	5016 (Orang)	3.987.792	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5016 (Orang)	3.987.792	5016 (Orang)	7.154.568	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	7599 (Orang)	31.902.336	1773 (Orang)	0	3205 (Orang)	10.399.536	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3205 (Orang)	10.399.536	3205 (Orang)	18.375.120	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	78 (Orang)	4.691.520	25 (Orang)	0	50 (Orang)	781,92	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	50 (Orang)	781,92	50 (Orang)	3.127.680	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	477 (Orang)	1.251.072	92 (Orang)	0	188 (Orang)	156,384	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	188 (Orang)	156,384	188 (Orang)	938,304	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	261.300.152	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	6.568.128	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	6.568.128	1 (Dokumen)	217.930.160	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.251.072	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	703,728	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	703,728	1 (Dokumen)	1.251.072	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	16.960.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	6.720.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	6.720.000	1 (Dokumen)	10.560.000	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		9. Operasional Pelayanan Puskesmas Singgahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	201.488.790	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	37.867.155	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	37.867.155	1 (Dokumen)	94.256.706	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	26.430.018	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	78,192	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	78,192	1 (Dokumen)	234,576	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehat	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1783 (Orang)	938,304	447 (Orang)	0	894 (Orang)	312,768	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	894 (Orang)	312,768	894 (Orang)	781,92	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		an Jiwa (ODMK) (Puskesmas Singgahan)																						
		12. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Singgahan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	157.531.910	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	26.180.710	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	26.180.710	1 (Dokumen)	77.690.182	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Singgahan)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	35.523.184	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	6.626.768	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	6.626.768	1 (Dokumen)	29.623.072	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskes	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	362,768	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	78,192	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Singgahan)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**69,35**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**														
		10. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Montong)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS MONTONG
		1. Operasional Pelayanan Puskesmas Montong	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	242.820.000	0 (dokumen)	28.200.000	0 (dokumen)	55.159.643	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	83.359.643	0 (dokumen)	105.634.643	0 %	0 %	puskesmas montong
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	108.750.768	0 (orang)	0	0 (orang)	20.688.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	20.688.000	0 (orang)	31.360.000	0 %	0 %	puskesmas montong

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		an Ibu Hamil (Puskesmas Montong)	Kesehatan Sesuai Standar																					
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Montong)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	27.520.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	3.840.000	0 %	0 %	puskesmas montong
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Montong)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	9.600.000	0 (orang)	0	0 (orang)	1.920.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	1.920.000	0 (orang)	7.680.000	0 %	0 %	puskesmas montong
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Ganggua	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	2.345.760	0 (orang)	0	0 (orang)	362,5	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	362,5	0 (orang)	1.087.500	0 %	0 %	puskesmas montong

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		n Jiwa Berat (Puskesmas Montong)																						
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Montong)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	7.680.000	0 (orang)	0	0 (orang)	1.920.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	1.920.000	0 (orang)	1.920.000	0 %	0 %	puskesmas montong
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Montong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	100 (dokumen)	174.687.600	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	1.740.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	1.740.000	0 (dokumen)	135.084.000	0 %	0 %	puskesmas montong
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	100 (dokumen)	2.463.048	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	108,75	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	108,75	0 (dokumen)	108,75	0 %	0 %	puskesmas montong

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Montong)																						
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Montong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	100 (dokumen)	9.920.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 %	0 %	puskesmas montong
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Montong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	100 (DOKUMEN)	6.273.384	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	2.820.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	2.820.000	0 (DOKUMEN)	2.820.000	0 %	0 %	puskesmas montong
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskes	jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) Yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	390,96	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	puskesmas montong

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Montong)																						
		12. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Montong)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	100 (dokumen)	112.796.616	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	16.520.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	16.520.000	0 (dokumen)	16.520.000	0 %	0 %	puskesmas montong
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Montong)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	100 (dokumen)	16.186.096	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 %	0 %	puskesmas montong
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskes	jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	100 (dokumen)	320	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 %	0 %	puskesmas montong

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Montong)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		11. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Labkes)	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	0 (%)	0	0 (%)	0	42 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	UPTD LABKESDA
		1. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Labkes)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Labkes	6 (Dokumen)	347.718.406	6 (Dokumen)	333.394.207	6 (Dokumen)	648.889.815	6 (Dokumen)	66.511.488	6 (Dokumen)	107.356.753	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	173.868.241	6 (Dokumen)	702.880.725	100 %	202.14 %	UPTD LABKESDA
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		12. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Instalasi Farmasi)	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	0 %	0 %	UPTD IFK
		1. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Instalasi Farmasi)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IFK)	24 (Dokumen)	351.600.000	24 (Dokumen)	248.904.764	24 (Dokumen)	300.000.000	6 (Dokumen)	48.206.718	12 (Dokumen)	58.336.816	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	106.543.534	12 (Dokumen)	388.760.194	50 %	11 0.57 %	UPTD IFK
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Jetak)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	676.786.000	95 (%)	0	0 (%)	92.083.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	92.083.000	0 (%)	314.410.500	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		1. Operasional Pelayanan Puskesmas jetak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	141.093.000	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	11.656.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	11.656.000	2 (Dokumen)	72.787.257	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jetak)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	419 (Orang)	96.892.096	419 (Orang)	0	419 (Orang)	20.336.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	419 (Orang)	20.336.000	419 (Orang)	51.410.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Jetak)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3401 (Orang)	52.480.000	3401 (Orang)	0	3401 (Orang)	11.520.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3401 (Orang)	11.520.000	3401 (Orang)	11.520.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Jetak)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5238 (Orang)	4.480.000	5238 (Orang)	0	5238 (Orang)	2.560.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5238 (Orang)	2.560.000	5238 (Orang)	3.840.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Jetak)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	50 (Orang)	4.691.520	50 (Orang)	0	50 (Orang)	1.555.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	50 (Orang)	1.555.000	50 (Orang)	2.335.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Jetak)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	491 (Orang)	10.768.128	491 (Orang)	0	491 (Orang)	5.922.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	491 (Orang)	5.922.000	491 (Orang)	10.752.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jetak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	194.817.344	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	5.026.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	5.026.000	3 (Dokumen)	167.184.500	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Jetak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.251.072	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	312	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	312	1 (Dokumen)	312	0 %	0 %	Puskesmas Jetak

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jetak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	15.680.000	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	6.720.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	6.720.000	2 (Dokumen)	11.200.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Jetak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	33.756.384	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	11.628.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	11.628.000	1 (Dokumen)	18.978.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Jetak)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	210 (Orang)	1.094.688	210 (Orang)	0	210 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	210 (Orang)	0	210 (Orang)	0	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		12. Pelayanan Kesehatan Penyakit	umlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	93.200.488	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	14.770.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	14.770.000	4 (Dokumen)	42.770.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Jetak)	Menular dan Tidak Menular																					
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Jetak)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standart	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	26.424.896	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	16.610.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Jetak)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	156,384	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	78	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	78	1 (Dokumen)	156	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		14. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	presentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	743.939.680	95 (%)	0	0 (%)	124.863.849	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	124.863.849	0 (%)	391.878.949	0 %	0 %	puskesmas parengan

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Parengan)																						
		1. Operasional Pelayanan Puskesmas Parengan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	162.746.520	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	14.117.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	14.117.500	2 (Dokumen)	19.152.000	0 %	0 %	Puskesmas Parengan
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Parengan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	364 (Orang)	119.470.320	40 (Orang)	0	27 (Orang)	29.880.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	27 (Orang)	29.880.000	27 (Orang)	78.570.000	0 %	0 %	Puskesmas Parengan
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0 (siswa/siswi)	0	0 (siswa/siswi)	0	2852 (siswa/siswi)	12.706.200	2877 (siswa/siswi)	0	2877 (siswa/siswi)	705	0 (siswa/siswi)	0	0 (siswa/siswi)	0	2877 (siswa/siswi)	705	2877 (siswa/siswi)	705	0 %	0 %	puskesmas parengan

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Parengan)																						
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Parengan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4697 (Orang)	12.800.000	285 (Orang)	0	220 (Orang)	6.400.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	220 (Orang)	6.400.000	220 (Orang)	12.800.000	0 %	0 %	Puskesmas Parengan
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Parengan)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0 (orang)	0	0 (orang)	0	78 (orang)	3.284.064	2 (orang)	0	5 (orang)	846	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5 (orang)	846	5 (orang)	1.692.000	0 %	0 %	puskesmas parengan
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	0 (orang)	0	0 (orang)	0	497 (orang)	17.601.120	59 (orang)	0	40 (orang)	5.820.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	40 (orang)	5.820.000	40 (orang)	10.230.000	0 %	0 %	puskesmas parengan

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Parengan)	Tuberkulosis																					
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Parengan)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	226.980.360	2 (dokumen)	0	2 (dokumen)	7.810.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	7.810.000	2 (dokumen)	169.524.100	0 %	0 %	puskesmas parengan
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Parengan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	781,92	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	564	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	564	1 (dokumen)	705	0 %	0 %	puskesmas parengan
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	16.640.000	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	3.840.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	3.840.000	1 (dokumen)	3.840.000	0 %	0 %	puskesmas parengan

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Parengan)																						
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Parengan)	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	19.453.728	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	7.500.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	7.500.000	1 (dokumen)	15.000.000	0 %	0 %	puskesmas parengan
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Parengan)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0 (orang)	0	0 (orang)	0	1520 (orang)	1.563.840	12 (orang)	0	56 (orang)	705	0 (orang)	0	0 (orang)	0	56 (orang)	705	56 (orang)	705	0 %	0 %	puskesmas parengan
		12. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	4 (dokumen)	112.491.152	2 (dokumen)	0	3 (dokumen)	34.901.349	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	34.901.349	3 (dokumen)	65.868.849	0 %	0 %	puskesmas parengan

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Parengan)																						
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Parengan)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	36.873.112	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	11.775.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	11.775.000	1 (dokumen)	13.087.000	0 %	0 %	puskesmas parengan
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Parengan)	pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	547,344	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	0 %	0 %	puskesmas parengan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**58,71**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		15. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Presentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	611.389.000	95 (%)	0	0 (%)	94.446.055	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	94.446.055	0 (%)	369.491.748	0 %	0 %	Puskesmas Ponco

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Ponco)																						
		1. Operasional Pelayanan Puskesmas Ponco	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	137.161.000	3 (dokumen)	0	3 (dokumen)	22.514.055	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	22.514.055	3 (dokumen)	69.065.498	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ponco)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	346 (orang)	90.135.648	22 (orang)	0	0 (orang)	12.968.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	12.968.000	0 (orang)	53.654.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Ponco)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	2641 (orang)	13.527.216	2641 (orang)	0	2641 (orang)	1.160.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	2641 (orang)	1.160.000	2641 (orang)	1.740.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Ponco)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	4283 (orang)	10.240.000	215 (orang)	0	0 (orang)	2.560.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	2.560.000	0 (orang)	5.120.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Ponco)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	50 (orang)	3.753.216	6 (orang)	0	0 (orang)	1.160.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	1.160.000	0 (orang)	1.740.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Ponco)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	316 (orang)	16.270.272	33 (orang)	0	0 (orang)	6.480.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	6.480.000	0 (orang)	9.710.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ponco)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	190.661.608	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	13.201.500	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	13.201.500	1 (dokumen)	128.088.500	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Ponco)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	2.032.992	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	435	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	435	1 (dokumen)	797,5	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ponco)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	5 (dokumen)	15.680.000	5 (dokumen)	0	5 (dokumen)	6.080.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	5 (dokumen)	6.080.000	5 (dokumen)	9.280.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	13.772.464	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	6.540.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	6.540.000	1 (dokumen)	6.685.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Ponco)																						
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Ponco)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	301 (orang)	2.502.144	19 (orang)	0	0 (orang)	580	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	580	0 (orang)	1.160.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
		12. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ponco)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	93.168.264	5 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	20.767.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	20.767.500	5 (Dokumen)	54.559.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	22.086.688	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.576.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Ponco)																						
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Ponco)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	397,488	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	145	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**52,38**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		16. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Soko)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	783.964.528	95 (%)	0	95 (%)	82.488.918	0 (%)	0	0 (%)	0	95 (%)	82.488.918	95 (%)	262.410.233	0 %	0 %	Puskesmas Soko

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Operasional Pelayanan Puskesmas Soko	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	173.009.000	2 (dokumen)	0	1 (dokumen)	12.938.718	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	12.938.718	1 (dokumen)	23.507.796	0 %	0 %	Puskesmas Soko
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Soko)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	683 (orang)	146.102.424	47 (orang)	0	45 (orang)	34.358.200	0 (orang)	0	0 (orang)	0	45 (orang)	34.358.200	45 (orang)	34.358.200	0 %	0 %	Puskesmas Soko
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Soko)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5337 (orang)	26.634.321	5361 (orang)	0	5361 (orang)	2.995.200	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5361 (orang)	2.995.200	5361 (orang)	7.320.897	0 %	0 %	Puskesmas Soko
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskes	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	8198 (orang)	12.197.952	426 (orang)	0	482 (orang)	2.995.200	0 (orang)	0	0 (orang)	0	482 (orang)	2.995.200	482 (orang)	4.992.000	0 %	0 %	Puskesmas Soko

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Soko)																						
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Soko)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	89 (orang)	4.691.520	6 (orang)	0	13 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	13 (orang)	0	13 (orang)	809,76	0 %	0 %	Puskesmas Soko
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Soko)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	625 (orang)	23.992.080	61 (orang)	0	65 (orang)	4.766.400	0 (orang)	0	0 (orang)	0	65 (orang)	4.766.400	65 (orang)	14.395.000	0 %	0 %	Puskesmas Soko
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	225.356.864	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	2.995.200	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	2.995.200	1 (dokumen)	113.512.555	0 %	0 %	Puskesmas Soko

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Soko)	Masyarakat																					
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Soko)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	3.362.256	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	0 %	0 %	Puskesmas Soko
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Soko)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	15.680.000	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	2.240.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	2.240.000	1 (dokumen)	4.480.000	0 %	0 %	Puskesmas Soko
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Soko)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	24.346.191	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	6.498.400	0 %	0 %	Puskesmas Soko

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Soko)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	328 (orang)	4.691.520	0 (orang)	0	20 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	20 (orang)	0	20 (orang)	0	0 %	0 %	Puskesmas Soko
		12. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Soko)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	7 (dokumen)	112.236.729	2 (dokumen)	0	2 (dokumen)	19.123.200	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	19.123.200	2 (dokumen)	43.621.825	0 %	0 %	Puskesmas Soko
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Soko)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	11.429.095	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	4.997.000	0 %	0 %	Puskesmas Soko

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Soko)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	234,576	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	76,8	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	76,8	1 (dokumen)	76,8	0 %	0 %	Puskesmas Soko
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50,39**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		17. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Prambontergayang)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	618.620.000	95 (%)	562,5	0 (%)	125.960.700	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	126.523.200	0 (%)	126.635.700	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
		1. Operasional Pelayanan Puskesmas Prambon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	136.272.000	0 (dokumen)	562,5	0 (dokumen)	30.303.200	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	30.865.700	0 (dokumen)	30.978.200	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Tergayang																						
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Prambontergayang)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	430 (ORANG)	63.617.616	0 (ORANG)	0	430 (ORANG)	4.590.000	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	430 (ORANG)	4.590.000	430 (ORANG)	4.590.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Prambontergayang)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	2708 (Orang)	31.745.952	0 (Orang)	0	2708 (Orang)	14.210.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	2708 (Orang)	14.210.000	2708 (Orang)	14.210.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	5301 (ORANG)	28.200.000	0 (ORANG)	0	5301 (ORANG)	14.100.000	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	5301 (ORANG)	14.100.000	5301 (ORANG)	14.100.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Prambontergayang)																						
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Prambontergayang)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	72 (ORANG)	10.477.728	0 (ORANG)	0	72 (ORANG)	2.100.000	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	72 (ORANG)	2.100.000	72 (ORANG)	2.100.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Prambontergayang)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	72 (ORANG)	2.032.992	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	700	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	700	0 (ORANG)	700	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Prambontergayang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	5 (dokumen)	190.985.600	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	29.820.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	29.820.000	0 (dokumen)	29.820.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Prambontergayang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	15.853.912	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	5.886.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	5.886.000	0 (dokumen)	5.886.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Prambontergayang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	5 (dokumen)	30.080.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	10.240.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	10.240.000	0 (dokumen)	10.240.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Prambontergayang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	4.561.500	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	2.311.500	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	2.311.500	0 (dokumen)	2.311.500	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Prambontergayang)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	5 (dokumen)	100.882.508	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	11.700.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	11.700.000	0 (dokumen)	11.700.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Prambontergayang)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	3.910.192	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**33,33**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		18. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Rengel)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		1. Operasional Pelayanan Puskesmas Rengel	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	139.819.000	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Rengel)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	464 (Orang)	73.282.616	0 (Orang)	0	93 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	93 (Orang)	0	93 (Orang)	0	0 %	0 %	Puskesmas Rengel

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Rengel)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5094 (Orang)	54.051 .520	0 (Orang)	0	815 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	815 (Orang)	0	815 (Orang)	0	0 %	0 %	Puskesmas Rengel
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Rengel)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Rengel)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Rengel)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Rengel)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Rengel)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Rengel)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Rengel)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Rengel)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		12. Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Rengel)	Menular dan Tidak Menular																					
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Rengel)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Reproduksi	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Rengel)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**9,72**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		19. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Prambon wetan)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	573.656.000	95 (%)	19.200.000	0 (%)	76.432.684	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	95.632.684	0 (%)	326.949.734	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBON WETAN
		1. Operasional Pelayanan Puskesmas Prambon Wetan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	185.611.000	3 (Dokumen)	19.200.000	3 (Dokumen)	37.164.684	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	56.364.684	3 (Dokumen)	83.136.684	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBON WETAN
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Prambon wetan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	274 (Orang)	86.649.000	15 (Orang)	0	17 (Orang)	13.340.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	17 (Orang)	13.340.000	17 (Orang)	42.379.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBON WETAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3333 (Orang)	31.109.600	3333 (Orang)	0	3333 (Orang)	1.087.500	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3333 (Orang)	1.087.500	3333 (Orang)	10.815.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	2932 (Orang)	4.800.000	177 (Orang)	0	204 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	204 (Orang)	0	204 (Orang)	3.200.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	47 (Orang)	4.691.520	3 (Orang)	0	5 (Orang)	2.175.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5 (Orang)	2.175.000	5 (Orang)	4.350.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	371 (Orang)	3.100.000	27 (Orang)	0	19 (Orang)	930	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	19 (Orang)	930	19 (Orang)	1.700.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	135.965.600	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	362,5	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	362,5	3 (Dokumen)	106.440.300	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	860,112	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	362,5	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	11.840.000	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	1.920.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	1.920.000	2 (Dokumen)	4.480.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN
		10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.050.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.350.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.350.000	1 (Dokumen)	4.700.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	88.679.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	17.103.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	17.103.000	1 (Dokumen)	58.722.250	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	13.300.168	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.064.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		an Reproduksi (Puskesmas Prambonwetan)	Kesehatan Reproduksi																					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**69,08**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**														
		20. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Grabagan)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	710.986.000	95 (%)	0	0 (%)	187.543.030	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	187.543.030	0 (%)	484.191.955	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	466 (Orang)	88.323.904	21 (Orang)	0	33 (Orang)	29.458.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	33 (Orang)	29.458.000	33 (Orang)	70.499.000	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3868 (Orang)	35.179.116	3565 (Orang)	0	3565 (Orang)	10.290.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3565 (Orang)	10.290.000	3565 (Orang)	14.315.000	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	6257 (Orang)	25.850.000	438 (Orang)	0	624 (Orang)	5.170.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	624 (Orang)	5.170.000	624 (Orang)	10.340.000	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	54 (Orang)	5.160.672	2 (Orang)	0	4 (Orang)	1.650.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4 (Orang)	1.650.000	4 (Orang)	3.300.000	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	469 (Orang)	7.040.000	24 (Orang)	0	42 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	42 (Orang)	0	42 (Orang)	3.520.000	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	216.656.000	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	14.896.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	14.896.000	2 (Dokumen)	147.075.600	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	4.233.216	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.042.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.042.500	1 (Dokumen)	2.167.500	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	13.760.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.120.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.120.000	1 (Dokumen)	5.120.000	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	15.120.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	10.540.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	10.540.000	1 (Dokumen)	10.540.000	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		10. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Grabagan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	124.444.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	70.375.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	70.375.000	1 (Dokumen)	81.131.000	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	26.336.516	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.505.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.505.000	1 (Dokumen)	15.522.500	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		an Reproduksi (Puskesmas Grabagan)	kesehatan reproduksi																					
		12. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Grabagan)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	234,576	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		13. Operasional Pelayanan Puskesmas Grabagan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	148.648.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	33.151.530	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	33.151.530	1 (Dokumen)	81.204.355	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**60,94**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		21. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	733.052.000	0 (%)	5.197.500	14.87 (%)	111.688.650	0 (%)	0	0 (%)	0	14.87 (%)	116.886.150	14.87 (%)	218.820.150	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Plumpang)																						
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	765 (orang)	98.657.304	50 (orang)	0	53 (orang)	24.956.400	0 (orang)	0	0 (orang)	0	53 (orang)	24.956.400	53 (orang)	64.230.400	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4492 (Orang)	24.143.712	6445 (Orang)	0	6445 (Orang)	8.430.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	6445 (Orang)	8.430.000	6445 (Orang)	8.430.000	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	8317 (Orang)	3.520.000	504 (Orang)	0	577 (Orang)	960	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	577 (Orang)	960	577 (Orang)	2.560.000	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Plumpang)	Sesuai Standar																					
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	86 (Orang)	10.321.344	8 (Orang)	0	16 (Orang)	2.266.800	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	16 (Orang)	2.266.800	16 (Orang)	4.066.800	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	115 (Orang)	981,384	39 (Orang)	0	115 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	115 (Orang)	0	115 (Orang)	0	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	205.877.848	1 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	3.819.600	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	3.819.600	3 (Dokumen)	3.819.600	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Masyarakat (Puskesmas Plumpang)	Gizi Masyarakat																					
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	19.987.792	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.072.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.072.500	1 (Dokumen)	7.632.500	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	41.221.032	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	7.852.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	7.852.500	2 (Dokumen)	17.897.500	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	312,768	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	849 (Orang)	13.605.408	7 (Orang)	0	7 (Orang)	2.133.600	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	7 (Orang)	2.133.600	7 (Orang)	3.183.600	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	122.201.816	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.561.450	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.561.450	1 (Dokumen)	7.561.450	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Plumpang)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	36.776.592	0 (Dokumen)	5.197.500	1 (Dokumen)	18.713.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	23.911.000	1 (Dokumen)	31.828.000	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Operasional Pelayanan Puskesmas Plumpang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	155.445.000	1 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	17.449.600	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	17.449.600	2 (Dokumen)	32.838.600	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**64,1**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		22. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Klotok)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	515.814.040	95 (%)	0	0 (%)	101.814.540	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	101.814.540	0 (%)	341.223.667	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Klotok)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	392 (orang)	78.233.952	20 (orang)	0	40 (orang)	26.152.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	40 (orang)	26.152.000	40 (orang)	59.724.500	0 %	0 %	Puskesmas Klotok

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Klotok)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	3171 (orang)	27.520.000	3138 (orang)	0	3138 (orang)	1.280.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	3138 (orang)	1.280.000	3138 (orang)	9.920.000	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Klotok)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	2754 (orang)	2.240.000	421 (orang)	0	420 (orang)	640	0 (orang)	0	0 (orang)	0	420 (orang)	640	420 (orang)	1.600.000	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Klotok)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	67 (orang)	15.012.864	2 (orang)	0	20 (orang)	4.640.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	20 (orang)	4.640.000	20 (orang)	8.120.000	0 %	0 %	Puskesmas Klotok

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Klotok)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	425 (orang)	2.541.240	10 (orang)	0	22 (orang)	435	0 (orang)	0	0 (orang)	0	22 (orang)	435	22 (orang)	1.015.000	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Klotok)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	157.679.448	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	25.641.300	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	25.641.300	3 (Dokumen)	132.344.300	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Klotok)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	4.480.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	640	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	640	1 (Dokumen)	2.560.000	0 %	0 %	Puskesmas Klotok

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Klotok)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	12.480.440	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	4.160.000	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Klotok)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.670.960	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
		10. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskemas Klotok)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	97.937.360	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	23.200.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	23.200.000	1 (Dokumen)	59.942.000	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.141.736	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	948,75	0 %	0 %	Puskesmas Klotok

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Klotok)																						
		12. Operasional Pelayanan Puskesmas klotok	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	113.876.040	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	19.186.240	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	19.186.240	2 (Dokumen)	49.924.117	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**54,95**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		23. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Widang)	Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di Puskesmas / Jumlah obat indikator sesuai standar	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	648.390.536	95 (%)	11.400.000	0 (%)	138.164.600	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	149.564.600	0 (%)	395.423.600	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	439 (orang)	68.490.000	0 (orang)	0	0 (orang)	29.540.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	29.540.000	0 (orang)	62.090.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Hamil (Puskesmas Widang)	Sesuai Standar																					
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Widang)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	3218 (orang)	36.320.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Widang)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5328 (orang)	25.600.000	0 (orang)	0	0 (orang)	6.400.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	6.400.000	0 (orang)	12.800.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	20 (orang)	9.383.040	0 (orang)	0	0 (orang)	4.350.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	4.350.000	0 (orang)	7.250.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Widang)																						
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Widang)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	396 (orang)	3.950.000	0 (orang)	0	0 (orang)	3.950.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	3.950.000	0 (orang)	3.950.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Widang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	175.563.760	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	18.092.600	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	18.092.600	0 (dokumen)	143.126.600	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	7.520.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	7.520.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	7.520.000	0 (dokumen)	7.520.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		dan Olahraga (Puskesmas Widang)	Kerja dan olahraga																					
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Widang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	11.200.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	3.200.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Widang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	19.850.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	17.930.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	17.930.000	0 (dokumen)	18.570.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Widang)	Jumlah Orang dengan masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	1082 (orang)	1.563.840	0 (orang)	0	0 (orang)	725	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	725	0 (orang)	1.450.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Widang)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	99.429.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	23.742.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	23.742.000	0 (dokumen)	36.122.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Widang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Reproduksi	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	10.634.688	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	10.620.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Widang)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	273,672	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Widang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	178.612.536	0 (Dokumen)	11.400.000	0 (Dokumen)	25.915.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	37.315.000	0 (Dokumen)	57.675.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		24. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Compreng)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	711.458.000	95 (%)	14.400.000	0 (%)	148.344.214	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	162.744.214	0 (%)	353.776.512	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Compreng)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	249 (Orang)	57.433.800	50 (Orang)	0	90 (Orang)	18.414.300	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	90 (Orang)	18.414.300	90 (Orang)	36.763.800	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Compreng)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1881 (Orang)	21.288.128	1881 (Orang)	0	1881 (Orang)	2.700.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1881 (Orang)	2.700.000	1881 (Orang)	3.600.000	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Compreng)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	2957 (Orang)	15.360.000	591 (Orang)	0	1182 (Orang)	7.680.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1182 (Orang)	7.680.000	1182 (Orang)	9.600.000	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Compreng)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	34 (Orang)	2.814.912	12 (Orang)	0	26 (Orang)	1.364.400	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	26 (Orang)	1.364.400	26 (Orang)	1.364.400	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Compreng)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	218 (Orang)	5.760.000	80 (Orang)	0	126 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	126 (Orang)	0	126 (Orang)	3.840.000	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Compreng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	178.400.000	12 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	34.514.600	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	34.514.600	12 (Dokumen)	135.106.600	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Compreng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	2.111.184	24 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	1.575.000	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Compreng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	44 (Dokumen)	16.320.000	44 (Dokumen)	0	44 (Dokumen)	4.480.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	44 (Dokumen)	4.480.000	44 (Dokumen)	8.320.000	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Compreng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	96 (Dokumen)	10.280.000	96 (Dokumen)	0	96 (Dokumen)	4.500.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	96 (Dokumen)	4.500.000	96 (Dokumen)	6.750.000	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Compreng)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	34 (Orang)	938,304	12 (Orang)	0	26 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	26 (Orang)	0	26 (Orang)	450	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Compreng)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	72 (Dokumen)	92.872.000	72 (Dokumen)	0	72 (Dokumen)	20.845.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	72 (Dokumen)	20.845.500	72 (Dokumen)	37.793.500	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Compreng)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	35.543.672	12 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	11.499.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	11.499.000	12 (Dokumen)	19.062.000	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
		13. Operasional Pelayanan Puskesmas Compreng	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	272.336.000	4 (Dokumen)	14.400.000	4 (Dokumen)	42.346.414	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	56.746.414	4 (Dokumen)	90.351.212	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**83,6**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		25. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Palang)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Palang)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	708 (orang)	116.240.720	109 (orang)	0	260 (orang)	36.422.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	260 (orang)	36.422.000	260 (orang)	64.685.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Palang)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5783 (orang)	21.120.000	5755 (orang)	0	5755 (orang)	320	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5755 (orang)	320	5755 (orang)	640	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Palang)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	7382 (orang)	4.700.000	2023 (orang)	0	3949 (orang)	2.350.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	3949 (orang)	2.350.000	3949 (orang)	2.350.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Palang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	55 (orang)	1.876.608	38 (orang)	0	55 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	55 (orang)	0	55 (orang)	1.200.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Palang)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	552 (orang)	5.120.000	191 (orang)	0	385 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	385 (orang)	0	385 (orang)	1.920.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Palang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	173.195.984	3 (dokumen)	0	3 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	0	3 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Palang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	1.094.688	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Palang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	6.240.000	2 (dokumen)	0	2 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	0	2 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	10.647.676	2 (dokumen)	0	2 (dokumen)	470	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	470	2 (dokumen)	470	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Palang)																						
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Palang)	Jumlah Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	696 (orang)	938,304	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Palang)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	5 (dokumen)	115.430.324	5 (dokumen)	0	5 (dokumen)	22.200.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	5 (dokumen)	22.200.000	5 (dokumen)	22.200.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	23.072.000	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	1.632.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	1.632.000	1 (dokumen)	1.632.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Palang)																						
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Palang)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	655,696	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	75	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	75	1 (dokumen)	75	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Palang	Jumlah Dokumen Operasional pelayanan puskesmas	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	133.411.000	2 (dokumen)	0	2 (dokumen)	10.958.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	10.958.000	2 (dokumen)	10.958.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**82,82**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**														
		26. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupat	Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	544.189.000	95 (%)	0	0 (%)	43.282.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	43.282.000	0 (%)	271.500.750	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		en/Kota (Puskesmas Sumurgung)																						
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	372 (Orang)	71.979.516	19 (Orang)	0	0 (Orang)	2.926.500	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	2.926.500	0 (Orang)	39.138.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5692 (Orang)	40.447.456	4254 (Orang)	0	0 (Orang)	585	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	585	0 (Orang)	14.610.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5902 (Orang)	5.760.000	697 (Orang)	0	0 (Orang)	2.880.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	2.880.000	0 (Orang)	5.760.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Sumurgung)																						
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	69 (Orang)	1.407.456	10 (Orang)	0	0 (Orang)	585	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	585	0 (Orang)	1.170.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	440 (Orang)	11.007.456	40 (Orang)	0	0 (Orang)	2.340.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	2.340.000	0 (Orang)	2.340.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	158.221.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	6.435.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	6.435.000	0 (Dokumen)	81.088.500	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Masyarakat (Puskesmas Sumurgung)	Gizi Masyarakat																					
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.183.728	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	195	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	195	0 (Dokumen)	292,5	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	9.058.528	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	715	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	715	0 (Dokumen)	1.300.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.387.456	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.260.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.260.000	0 (Dokumen)	1.900.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	461 (Orang)	2.111.184	10 (Orang)	0	0 (Orang)	585	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	585	0 (Orang)	1.170.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	96.021.560	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	14.877.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	14.877.500	0 (Dokumen)	54.937.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	19.204.276	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	16.389.750	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Sumurgung)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	156,384	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Sumurgung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	118.243.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	9.898.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	9.898.000	0 (Dokumen)	51.405.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		27. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	0 %	0 %	Puskesmas Semanding

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Semanding)																						
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Semanding)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	691 (orang)	105.477.648	43 (orang)	0	41 (orang)	48.483.800	0 (orang)	0	0 (orang)	0	41 (orang)	48.483.800	41 (orang)	80.410.200	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Semanding)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	7240 (ORANG)	35.520.000	7076 (ORANG)	0	7076 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	7076 (ORANG)	0	7076 (ORANG)	6.720.000	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	9727 (ORANG)	14.400.000	649 (ORANG)	0	649 (ORANG)	5.760.000	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	649 (ORANG)	5.760.000	649 (ORANG)	5.760.000	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Semanding)																						
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Semanding)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	84 (ORANG)	3.127.680	11 (ORANG)	0	19 (ORANG)	38,7	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	19 (ORANG)	38,7	19 (ORANG)	329,1	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Semanding)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	697 (ORANG)	8.214.912	63 (ORANG)	0	53 (ORANG)	1.969.200	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	53 (ORANG)	1.969.200	53 (ORANG)	1.969.200	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Semanding)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	12 (DOKUMEN)	237.150.368	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	16.119.600	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	16.119.600	1 (DOKUMEN)	188.868.400	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Semanding)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	36 (DOKUMEN)	1.251.072	3 (DOKUMEN)	0	3 (DOKUMEN)	309,6	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	3 (DOKUMEN)	309,6	3 (DOKUMEN)	309,6	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Semanding)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	18 (DOKUMEN)	14.080.000	2 (DOKUMEN)	0	2 (DOKUMEN)	384	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	2 (DOKUMEN)	384	2 (DOKUMEN)	384	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Semanding)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	108 (DOKUMEN)	8.939.376	9 (DOKUMEN)	0	9 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	9 (DOKUMEN)	0	9 (DOKUMEN)	435,6	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
		10. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Semanding)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	84 (DOKUMEN)	139.812.712	7 (DOKUMEN)	0	7 (DOKUMEN)	51.876.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	7 (DOKUMEN)	51.876.000	7 (DOKUMEN)	78.236.000	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Semanding)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	31.519.464	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	1.559.700	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	1.559.700	0 (DOKUMEN)	17.973.900	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		12. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Semanding)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	24 (DOKUMEN)	312,768	2 (DOKUMEN)	0	2 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	2 (DOKUMEN)	0	2 (DOKUMEN)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
		13. Operasional Pelayanan Puskesmas Semanding	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	28 (DOKUMEN)	164.313.000	2 (DOKUMEN)	0	2 (DOKUMEN)	35.466.303	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	2 (DOKUMEN)	35.466.303	2 (DOKUMEN)	85.267.897	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**15,42**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		28. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskes	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Wire)																						
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Wire)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	756 (Orang)	159.400.896	0 (Orang)	0	0 (Orang)	34.992.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	34.992.000	0 (Orang)	106.339.200	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Wire)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4622 (Orang)	25.682.704	0 (Orang)	0	0 (Orang)	1.200.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	1.200.000	0 (Orang)	2.244.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskes	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	8186 (Orang)	5.004.288	0 (Orang)	0	709 (Orang)	1.800.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	709 (Orang)	1.800.000	709 (Orang)	2.844.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Wire)																						
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Wire)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	78 (Orang)	5.004.288	0 (Orang)	0	0 (Orang)	2.400.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	2.400.000	0 (Orang)	3.590.400	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Wire)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	628 (Orang)	7.040.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	3.200.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	3.200.000	0 (Orang)	5.120.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	220.086.704	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	12.500.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	12.500.000	0 (Dokumen)	183.231.200	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Wire)	Masyarakat																					
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Wire)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	5.414.008	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	297,6	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wire)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	25.280.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	8.320.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	8.320.000	0 (Dokumen)	8.320.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Wire)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	11.370.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	5.490.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	5.490.000	0 (Dokumen)	5.490.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Wire)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang medapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	10022 (Orang)	938,304	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Wire)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	130.202.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	72.367.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	72.367.000	0 (Dokumen)	89.937.400	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Wire)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	12.796.968	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	9.266.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	9.266.000	0 (Dokumen)	10.086.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Wire)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	312,768	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	187,5	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	187,5	0 (Dokumen)	187,5	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Wire	Jumlah Dokumen Operasional Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	170.843.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	40.431.560	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	40.431.560	0 (Dokumen)	48.109.560	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0,62**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		29. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tuban)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tuban)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	15410 (orang)	83.340.000	65 (orang)	0	81 (orang)	19.008.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	81 (orang)	19.008.000	81 (orang)	33.678.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Tuban)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	114322 (ORANG)	43.040.000	11519 (ORANG)	0	11519 (ORANG)	800	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	11519 (ORANG)	800	11519 (ORANG)	1.600.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Tuban)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (UNIT)	0	0 (UNIT)	0	132360 (UNIT)	4.378.752	846 (UNIT)	0	763 (UNIT)	1.204.800	0 (UNIT)	0	0 (UNIT)	0	763 (UNIT)	1.204.800	763 (UNIT)	2.385.600	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Tuban)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	2625 (ORANG)	7.037.280	11 (ORANG)	0	11 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	11 (ORANG)	0	11 (ORANG)	2.214.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Tuban)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	14808 (orang)	3.127.680	80 (orang)	0	80 (orang)	600	0 (orang)	0	0 (orang)	0	80 (orang)	600	80 (orang)	1.780.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tuban)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	2 (DOKUMEN)	183.800.848	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	8.662.200	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	8.662.200	0 (DOKUMEN)	137.210.100	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Tuban)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	2.825.760	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	518,7	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	518,7	1 (dokumen)	518,7	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tuban)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	5 (DOKUMEN)	14.400.000	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	9.600.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	9.600.000	1 (DOKUMEN)	14.400.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tuban)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	12.442.032	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	6.048.300	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	6.048.300	1 (DOKUMEN)	6.665.400	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	6234 (ORANG)	1.485.648	0 (ORANG)	0	15 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	15 (ORANG)	0	15 (ORANG)	0	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Tuban)	Pelayanan Kesehatan																					
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tuban)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	106.858.288	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	19.282.200	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	19.282.200	1 (DOKUMEN)	19.282.200	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		12. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Tuban)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	8.229.000	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	2.743.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	2.743.000	1 (DOKUMEN)	5.486.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskes	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	14.006.224	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	13.991.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Tuban)																						
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Tuban)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	3 (DOKUMEN)	234,576	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		15. Operasional Pelayanan Puskesmas Tuban	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	2 (DOKUMEN)	136.701.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	14.440.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	14.440.000	0 (DOKUMEN)	16.800.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**34,38**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		30. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kebonsari)																						
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	476 (orang)	70.768.256	17 (orang)	0	21 (orang)	11.388.608	0 (orang)	0	0 (orang)	0	21 (orang)	11.388.608	21 (orang)	11.388.608	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskemas Kebonsari)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	7215 (ORANG)	38.885.192	7215 (ORANG)	0	7215 (ORANG)	1.819.000	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	7215 (ORANG)	1.819.000	7215 (ORANG)	1.819.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	4884 (orang)	1.172.880	380 (orang)	0	379 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	379 (orang)	0	379 (orang)	1.172.800	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Lanjut (Puskesmas Kenbonsari)																						
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	60 (orang)	2.345.760	7 (orang)	0	11 (orang)	1.137.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	11 (orang)	1.137.000	11 (orang)	1.875.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	410 (orang)	6.568.128	35 (orang)	0	35 (orang)	2.724.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	35 (orang)	2.724.000	35 (orang)	2.724.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	3 (DOKUMEN)	123.742.600	0 (DOKUMEN)	0	3 (DOKUMEN)	24.296.700	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	3 (DOKUMEN)	24.296.700	3 (DOKUMEN)	116.114.500	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	4.042.032	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	1.920.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	1.920.000	1 (DOKUMEN)	1.920.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	5 (DOKUMEN)	13.831.108	0 (DOKUMEN)	0	5 (DOKUMEN)	4.227.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	5 (DOKUMEN)	4.227.000	5 (DOKUMEN)	10.627.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	3.631.500	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	2.400.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	2.400.000	1 (DOKUMEN)	3.600.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	2694 (ORANG)	781,92	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	76.385.264	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	26.414.400	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	26.414.400	1 (DOKUMEN)	35.320.800	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		12. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	4.862.000	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	3.230.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	9.087.248	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	7.216.000	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	234,576	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		15. Operasional Pelayanan Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	4 (DOKUMEN)	295.223.000	0 (DOKUMEN)	44.152.347	0 (DOKUMEN)	67.172.124	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	111.324.471	0 (DOKUMEN)	143.374.001	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**62,6**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		31. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Jenu)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS JENU
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		32. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Merakurak)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	720.994.000	95 (%)	0	95 (%)	61.849.046	0 (%)	0	0 (%)	0	95 (%)	61.849.046	95 (%)	400.001.416	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	469 (ORANG)	136.050.720	31 (ORANG)	0	31 (ORANG)	18.220.608	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	31 (ORANG)	18.220.608	31 (ORANG)	94.597.200	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	3355 (orang)	39.465.760	3297 (orang)	0	3297 (orang)	1.563.840	0 (orang)	0	0 (orang)	0	3297 (orang)	1.563.840	3297 (orang)	2.345.760	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Merakurak)																						
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5387 (Orang)	3.919.704	389 (Orang)	0	389 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	389 (Orang)	0	389 (Orang)	1.563.840	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	77 (Orang)	2.814.912	6 (Orang)	0	6 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	6 (Orang)	0	6 (Orang)	860,112	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	451 (Orang)	5.120.000	36 (Orang)	0	36 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	36 (Orang)	0	36 (Orang)	2.560.000	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	193.939.760	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	469,152	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	469,152	1 (Dokumen)	67.818.224	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.720.224	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.094.688	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	11.040.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.520.000	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.954.800	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.016.496	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.016.496	1 (Dokumen)	1.563.840	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		10. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	142.431.200	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	15.784.392	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	15.784.392	1 (Dokumen)	83.585.180	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	24.365.536	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	10.300.768	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		an Reproduksi (Puskesmas Merakurak)	kesehatan Reproduksi																					
		12. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Ibu dan anak yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	156,384	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
		13. Operasional Pelayanan Puskesmas Merakurak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	158.015.000	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	18.907.102	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	18.907.102	1 (dokumen)	48.943.932	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**54,96**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		33. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	664.024.000	95 (%)	8.100.000	0 (%)	74.519.497	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	82.619.497	0 (%)	319.068.353	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Temandang)																						
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Temandang)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	304 (orang)	110.161.800	304 (orang)	110.161.800	38 (orang)	9.707.500	0 (orang)	40.196.600	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	49.904.100	0 (orang)	216.727.900	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Temandang)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	2540 (orang)	35.874.800	95 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (0rang)	0	0 (0rang)	0	3754 (0rang)	2.880.000	95 (0rang)	0	0 (0rang)	0	0 (0rang)	0	0 (0rang)	0	0 (0rang)	0	0 (0rang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Temandang)	Sesuai Standar																					
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Temandang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	48 (orang)	2.345.760	95 (orang)	154,8	0 (orang)	154,8	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	309,6	0 (orang)	309,6	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Temandang)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	303 (orang)	3.520.000	95 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	171.653.000	38 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	126.370.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Masyarakat (Puskesmas Temandang)	Gizi Masyarakat																					
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Temandang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	2.384.856	95 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Temandang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	8.000.000	95 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Temandang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	9.700.000	38 (Dokumen)	8.100.000	0 (Dokumen)	960	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	9.060.000	0 (Dokumen)	9.060.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Temandang)	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	737 (orang)	469,152	95 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Temandang)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	114.847.000	38 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	19.780.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	19.780.000	0 (Dokumen)	39.137.500	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Temandang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	10.666.728	38 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Temandang)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	299,904	38 (Dokumen)	77,4	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	77,4	0 (Dokumen)	77,4	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Temandang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	191.221.000	38 (Dokumen)	320	0 (Dokumen)	27.932.758	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	28.252.758	0 (Dokumen)	56.767.043	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		34. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskes	Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	501.603.028	0 (%)	0	0 (%)	91.596.013	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	91.596.013	0 (%)	239.367.613	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Kerek)																						
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kerek)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	83.750.000	0 (orang)	0	89 (orang)	25.700.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	89 (orang)	25.700.000	89 (orang)	52.675.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Kerek)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	65.920.000	0 (orang)	0	100 (orang)	2.560.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	2.560.000	100 (orang)	14.720.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskes	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (0rang)	0	0 (0rang)	0	100 (0rang)	6.255.360	0 (0rang)	0	100 (0rang)	0	0 (0rang)	0	0 (0rang)	0	100 (0rang)	0	100 (0rang)	1.176.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Kerek)																						
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kerek)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	2632 (Orang)	7.037.280	0 (Orang)	0	28 (Orang)	1.186.800	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	28 (Orang)	1.186.800	28 (Orang)	2.313.200	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kerek)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	2.560.000	0 (orang)	0	132 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	132 (orang)	0	132 (orang)	640	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	176.636.992	0 (orang)	0	4 (orang)	154,8	0 (orang)	0	0 (orang)	0	4 (orang)	154,8	4 (orang)	69.341.900	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Kerek)	Masyarakat																					
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kerek)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	3.583.728	0 (orang)	0	5 (orang)	480	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5 (orang)	480	5 (orang)	1.592.400	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kerek)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	15.353.320	0 (orang)	0	5 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5 (orang)	0	5 (orang)	1.673.200	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kerek)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	10.400.000	0 (orang)	0	5 (orang)	2.400.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5 (orang)	2.400.000	5 (orang)	4.400.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Kerek)	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	1.251.072	0 (orang)	0	5 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5 (orang)	0	5 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kerek)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	113.877.680	0 (orang)	0	5 (orang)	37.485.800	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5 (orang)	37.485.800	5 (orang)	61.587.500	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Kerek)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Reproduksi	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	14.325.666	0 (orang)	0	5 (orang)	2.870.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5 (orang)	2.870.000	5 (orang)	7.752.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Kerek)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0 (orang)	0	0 (orang)	0	100 (orang)	651,902	0 (orang)	0	5 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	5 (orang)	0	5 (orang)	224,8	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Kerek	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	28 (Dokumen)	28	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	25.174.913	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	25.174.913	0 (Dokumen)	35.047.913	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**30,65**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		35. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Gaji)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	95 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	KEPALA PUSKESMAS GAJI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Gaji)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	142.753.632	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Gaji)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	100 (ORANG)	8.800.000	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Gaji)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	100 (ORANG)	640	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Gaji)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	100 (ORANG)	3.284.064	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Gaji)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	350 (ORANG)	2.240.000	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gaji)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	179.893.688	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Gaji)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	1.329.264	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gaji)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	60 (Dokumen)	14.470.960	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Gaji)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	64 (Dokumen)	5.250.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Gaji)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	3442 (orang)	312,768	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 (orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Gaji)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	120.360.040	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Gaji)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	19.567.200	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Gaji)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	156,384	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Gaji	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	28 (Dokumen)	138.070.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GAJI
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		36. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tambakboyo)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesui Standart	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	597 (Orang)	117.445.584	31 (Orang)	0	31 (Orang)	2.808.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	31 (Orang)	2.808.000	31 (Orang)	2.808.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5267 (Orang)	40.934.224	5212 (Orang)	0	5212 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5212 (Orang)	0	5212 (Orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	6665 (Orang)	11.520.000	566 (Orang)	0	683 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	683 (Orang)	0	683 (Orang)	5.760.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	64 (Orang)	7.680.000	7 (Orang)	0	3 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3 (Orang)	0	3 (Orang)	2.520.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	404 (Orang)	20.125.000	60 (Orang)	0	12 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	12 (Orang)	0	12 (Orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	232.733.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	1	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	1	3 (Dokumen)	1	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.216.720	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	320	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	320	1 (Dokumen)	1.280.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.680.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	32.400.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.400.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.400.000	1 (Dokumen)	5.400.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
		10. Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	118.975.000	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	12.000.010	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	12.000.010	2 (Dokumen)	12.000.010	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tambakboyo)	menular dan Tidak Menular																					
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	21.350.896	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
		12. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	234,576	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	30	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	30	1 (Dokumen)	30	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
		13. Operasional Pelayanan Puskesmas Tambakboyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	172.348.000	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	9.512.504	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	9.512.504	2 (Dokumen)	9.512.504	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**70,93**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**														
		37. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Jatirogo)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	738.081.536	95 (%)	14.400.000	95 (%)	217.881.100	0 (%)	0	0 (%)	0	95 (%)	232.281.100	95 (%)	415.793.100	0 %	0 %	PUSKESMAS JATIROGO
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Jatirogo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	451 (orang)	107.268.192	19 (orang)	0	451 (orang)	49.956.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	451 (orang)	49.956.000	451 (orang)	76.380.000	0 %	0 %	PUSKESMAS JATIROGO
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskes	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4335 (Orang)	41.328.800	259 (Orang)	0	4335 (Orang)	3.510.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4335 (Orang)	3.510.000	4335 (Orang)	4.914.000	0 %	0 %	KAPUS

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Jatirogo)																						
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Jatirogo)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5120 (Orang)	2.880.000	359 (Orang)	0	5120 (Orang)	2.880.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5120 (Orang)	2.880.000	5120 (Orang)	2.880.000	0 %	0 %	KAPUS
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Jatirogo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	43 (orang)	19.704.384	6 (orang)	0	43 (orang)	3.120.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	43 (orang)	3.120.000	43 (orang)	6.396.000	0 %	0 %	KAPUS
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	0 (orang)	0	0 (orang)	0	249 (orang)	3.518.640	22 (orang)	0	53 (orang)	1.755.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	53 (orang)	1.755.000	53 (orang)	2.457.000	0 %	0 %	KAPUS

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
		Tuberkulosis (Puskesmas Jatirogo)	Sesuai Standar																				
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jatirogo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	191.631.360	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	18.425.850	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	18.425.850	3 (Dokumen)	136.625.850	0 %	0 %	KAPUS
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Jatirogo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.518.640	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	KAPUS
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	36.480.000	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	15.680.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	15.680.000	2 (Dokumen)	17.280.000	0 %	0 %	KAPUS

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Jatirogo)																						
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Jatirogo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.237.456	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.532.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.532.000	1 (Dokumen)	2.532.000	0 %	0 %	KAPUS
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Jatirogo)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1166 (Orang)	1.290.168	0 (Orang)	0	1166 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1166 (Orang)	0	1166 (Orang)	0	0 %	0 %	KAPUS
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	108.173.904	5 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	47.481.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	47.481.000	5 (Dokumen)	69.726.000	0 %	0 %	KAPUS

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Jatirogo)																						
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Jatirogo)	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	11.668.880	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	9.540.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	9.540.000	1 (Dokumen)	11.666.000	0 %	0 %	KAPUS
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Jatirogo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya kesehatan ibu dan anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	234,576	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	KAPUS
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Jatirogo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	207.146.536	4800000 (Dokumen)	14.400.000	3 (Dokumen)	58.438.250	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	72.838.250	3 (Dokumen)	83.573.250	0 %	0 %	PUSKESMAS JATIROGO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**94,38**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		38. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kebonharjo)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	736.313.000	95 (%)	23.553.340	95 (%)	178.362.867	0 (%)	0	0 (%)	0	95 (%)	201.916.207	95 (%)	217.513.207	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	337 (Orang)	100.330.688	14 (Orang)	0	19 (Orang)	31.410.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	19 (Orang)	31.410.000	19 (Orang)	31.410.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yg mendapat pelayanan kesehatan	0 (Anak)	0	0 (Anak)	0	1938 (Anak)	25.440.000	1938 (Anak)	0	1938 (Anak)	4.640.000	0 (Anak)	0	0 (Anak)	0	1938 (Anak)	4.640.000	1938 (Anak)	4.640.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kebonharjo)																						
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	4118 (Orang)	5.760.000	279 (Orang)	0	274 (Orang)	2.880.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	274 (Orang)	2.880.000	274 (Orang)	2.880.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	48 (Orang)	3.127.680	4 (Orang)	0	5 (Orang)	1.560.001	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5 (Orang)	1.560.001	5 (Orang)	1.560.001	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	304 (Orang)	320	31 (Orang)	0	24 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	24 (Orang)	0	24 (Orang)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Tuberkulosis (Puskesmas Kebonharjo)	Sesuai Standar																					
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	176.462.728	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	8.640.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	8.640.000	3 (Dokumen)	8.640.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	1.440.000	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	6.080.000	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	4.800.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	4.800.000	1 (DOKUMEN)	4.800.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
		(Puskesmas Kebonharjo)																					
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	10.410.000	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	7.710.000	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	7.710.000	1 (DOKUMEN)	7.710.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Kebonharjo)	JUMLAH ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	2975 (ORANG)	2.240.000	20 (ORANG)	0	20 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	0 (ORANG)	0	20 (ORANG)	0	20 (ORANG)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	118.407.000	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	53.151.750	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	53.151.750	1 (DOKUMEN)	53.151.750	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	23.935.032	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	11.485.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	11.485.000	1 (Dokumen)	11.485.000	0 %	0 %	puskesmas kebonharjo
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	188,872	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Puskesmas kebonharjo

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Kebonharjo	Jumlah dokumen operasional Puskesmas	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	262.171.000	3 (Dokumen)	23.553.340	4 (Dokumen)	40.552.244	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	64.105.584	4 (Dokumen)	64.105.584	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**66,52**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**														
		39. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Bancar)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	736.162.040	95 (%)	26.100.000	0 (%)	122.443.540	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	148.543.540	0 (%)	481.811.950	0 %	0 %	puskesmas bancar
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Bancar)	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	264 (orang)	35.061.120	9 (orang)	0	16 (orang)	6.968.400	0 (orang)	0	0 (orang)	0	16 (orang)	6.968.400	16 (orang)	24.491.700	0 %	0 %	puskesmas bancar

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Bancar)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (orang)	0	0 (orang)	0	2279 (orang)	60.800.000	2305 (orang)	0	2305 (orang)	22.400.000	0 (orang)	0	0 (orang)	0	2305 (orang)	22.400.000	2305 (orang)	32.000.000	0 %	0 %	puskesmas bancar
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Bancar)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3981 (Orang)	9.600.000	566 (Orang)	0	600 (Orang)	3.200.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	600 (Orang)	3.200.000	600 (Orang)	3.200.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Bancar)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	38 (Orang)	14.074.560	38 (Orang)	0	38 (Orang)	4.572.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	38 (Orang)	4.572.000	38 (Orang)	6.804.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Bancar)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	244 (Orang)	8.540.000	6 (Orang)	0	20 (Orang)	2.935.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	20 (Orang)	2.935.000	20 (Orang)	5.870.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Bancar)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	203.316.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	9.280.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	9.280.000	3 (Dokumen)	88.111.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Bancar)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.680.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.840.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.840.000	1 (Dokumen)	3.840.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bancar)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	8.800.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.920.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.920.000	1 (Dokumen)	4.960.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR
		9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Bancar)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.590.960	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.431.100	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.431.100	1 (Dokumen)	3.589.850	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Bancar)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	961 (Orang)	7.037.280	736 (Orang)	0	700 (Orang)	3.096.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	700 (Orang)	3.096.000	700 (Orang)	3.430.800	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR
		11. Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	122.091.040	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	26.166.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	26.166.500	1 (Dokumen)	58.852.500	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Bancar)	Menular dan Tidak Menular																					
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Bancar)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	12.636.080	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	8.960.330	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR
		13. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Bancar)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	390,96	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	148,8	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR
		14. Operasional Pelayanan Puskesmas Bancar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	242.544.040	3 (dokumen)	26.100.000	3 (dokumen)	35.634.540	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	3 (dokumen)	61.734.540	3 (dokumen)	88.762.540	0 %	0 %	puskesmas bancar
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**78,73**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**24,93**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**														
6		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang memenuhi syarat	0 (%)	0	0 (%)	0	96 (%)	187.963.000	24 (%)	0	48 (%)	29.379.000	0 (%)	0	0 (%)	0	48 (%)	29.379.000	48 (%)	60.797.900	0 %	0 %	KABID
		1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	10.000.000	0 (%)	0	8.57 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	8.57 (%)	0	8.57 (%)	0	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	35 (Dokumen)	10.000.000	20 (Dokumen)	0	25 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	25 (Dokumen)	0	25 (Dokumen)	0	0 %	0 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**71,43**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**														
		2. Penerbitan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor	Presentase sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diterbitkan	100 (%)	837.864.000	100 (%)	301.398.410	100 (%)	167.963.000	0 (%)	0	100 (%)	29.379.000	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	29.379.000	100 (%)	360.632.410	100 %	43.04 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri RT																						
		1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	124 (Dokumen)	837.864.000	121 (Dokumen)	301.398.410	123 (Dokumen)	167.963.000	0 (Dokumen)	0	34 (Dokumen)	29.379.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	34 (Dokumen)	29.379.000	34 (Dokumen)	360.632.410	27.42 %	43.04 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		n Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**27,64**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		3. Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makana	Presentase sarana yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dan disampling Produknya	41.03 (%)	584.919.200	36.84 (%)	258.702.410	39 (%)	10.000.000	0 (%)	0	120 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	120 (%)	0	120 (%)	260.266.310	292.47 %	44.5 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		n Minuman Industri Rumah Tangga																						
		1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 (produk)	584.919.200	33 (produk)	230.382.410	50 (produk)	10.000.000	0 (produk)	0	12 (produk)	0	0 (produk)	0	0 (produk)	0	12 (produk)	0	12 (produk)	231.946.310	30 %	39.65 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**24**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**66,67**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sedang**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
7		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (Dinkes)**	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	77.13 (%)	13.829.214.809	59.14 (%)	951.075.841	67.99 (%)	2.486.966.134	0 (%)	1.510.000	0 (%)	12.817.600	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	14.327.600	0 (%)	1.032.662.091	0 %	7.47 %	KABID
		1. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan preventif dan promotif yang dilaksanakan	100 (%)	1.079.859.949	100 (%)	110.581.000	100 (%)	36.100.000	0 (%)	0	50 (%)	1.565.000	0 (%)	0	0 (%)	0	50 (%)	1.565.000	50 (%)	112.823.200	50 %	10.45 %	JF
		1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	23 (Dokumen)	619.790.000	43 (Dokumen)	19.450.000	12 (Dokumen)	36.100.000	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	1.565.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	1.565.000	6 (Dokumen)	21.692.200	26.09 %	3.5 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Dinkes)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	72.55 (%)	11.749.000.000	72.55 (%)	476.425.200	72.55 (%)	486.672.750	0 (%)	1.510.000	72.03 (%)	755	0 (%)	0	0 (%)	0	72.03 (%)	2.265.000	72.03 (%)	492.451.200	99.28 %	4.19 %	JF ADMINKES
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dinkes)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 (Dokumen)	1.174.900.000	3 (Dokumen)	422.592.200	12 (Dokumen)	486.672.750	3 (Dokumen)	1.510.000	3 (Dokumen)	755	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	2.265.000	6 (Dokumen)	438.618.200	600 %	37.33 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kenduruan)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	89.91 (%)	9.808.934	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	9.808.934	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KENDURUAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kenduruan)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		4. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Bangilan)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	89.91 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bangilan)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.075.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS BANGILAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		5. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Senori)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Senori)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	9.041.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	4.587.000	0 %	0 %	UOBF Puskesmas Senori
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		6. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Singgahan)	presentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang di bina	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	73.69 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	72.85 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	72.85 (Dokumen)	0	72.85 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.718.210	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.718.210	0 %	0 %	PUSKESMAS SINGGAHAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Singgahan)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		7. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Monton g)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS MONTONG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Montong)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	11.392.768	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS MONTONG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		8. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	16.835.000	0 (%)	0	72.85 (%)	2.240.000	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	2.240.000	72.85 (%)	8.495.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Jetak)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Jetak)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	16.835.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.240.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.240.000	1 (Dokumen)	8.495.000	0 %	0 %	Puskesmas Jetak
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		9. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Parengan)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Puskesmas Parengan
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.483.320	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Puskesmas Parengan

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Parenga n)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		10. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Ponco)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	Puskesmas Ponco

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ponco)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Nama Indikator SK3535THN25	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	16.589.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.120.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.120.000	1 (Dokumen)	9.505.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PONCO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		11. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	1.996.800	0 %	0 %	Puskesmas Soko

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kabupaten/Kota (Puskesmas Soko)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Soko)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaa n Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyaraka t (UKBM)	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	12.995.472	1 (dokumen)	0	1 (dokumen)	998,4	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	998,4	1 (dokumen)	2.995.200	0 %	0 %	Puskesmas Soko
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		12. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Prambontergayang)	presentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang di bina	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	73.69 (dokumen)	3.325.000	0 (dokumen)	0	72.85 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	72.85 (dokumen)	0	72.85 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	3.325.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(Puskesmas Prambontergayang)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		13. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Rengel)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	0	387 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Rengel)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	4.238.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS RENGEL
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		14. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	3.483.000	387 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	1.863.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Prambonwetan)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Prambonwetan)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.483.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.863.000	0 %	0 %	PUSKESMAS PRAMBONWETAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		15. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Grabagan)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	14.108.000	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	14.108.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS GRABAGAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Grabagan)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		16. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Plumpang)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	11.730.000	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Plumpang)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	11.730.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Puskesmas Plumpang
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		17. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	2.440.960	387 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	2.412.500	0 %	0 %	PUSKESMAS KLOTOK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Klotok)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Klotok)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.440.960	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.412.500	0 %	0 %	Puskesmas Klotok
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		18. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Widang)	presentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang di bina	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	73.69 (Dokumen)	5.008.464	0 (Dokumen)	0	72.85 (Dokumen)	1.600.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	72.85 (Dokumen)	1.600.000	72.85 (Dokumen)	1.600.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskes	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.008.464	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.600.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.600.000	0 (Dokumen)	1.600.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Widang)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		19. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Compreng)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	4.746.000	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Compreng)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	4.746.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS COMPRENG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		20. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	7.666.000	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Palang)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Palang)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	7.666.000	2 (dokumen)	0	2 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	2 (dokumen)	0	2 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS PALANG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		21. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Sumurgung)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	5.026.000	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	5.026.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.026.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	5.026.000	0 %	0 %	Puskesmas Sumurgung

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Sumurgung)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		22. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Semanding)	presentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang di bina	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	73.69 (DOKUMEN)	9.289.000	0 (DOKUMEN)	0	72.85 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	72.85 (DOKUMEN)	0	72.85 (DOKUMEN)	0	0 %	0 %	Puskesmas Semanding

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Semanding)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	9.289.000	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS SEMANDING
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		23. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Wire)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Wire)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	6.899.072	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	4.162.000	0 %	0 %	PUSKESMAS WIRE
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		24. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tuban)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	4.970.912	0 (%)	0	72.85 (%)	914	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	914	72.85 (%)	914	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	4.970.912	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	914	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	1 (DOKUMEN)	914	1 (DOKUMEN)	914	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS TUBAN

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Tuban)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		25. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kebonsari)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	73.69 (DOKUMEN)	6.286.536	0 (DOKUMEN)	0	72.85 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	0 (DOKUMEN)	0	72.85 (DOKUMEN)	0	72.85 (DOKUMEN)	0	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kebonsari)	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina/Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang ada x100%	0 (%)	0	0 (%)	0	1 (%)	6.286.536	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	UOBF PUSKESMAS KEBONSARI
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		26. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	3.783.000	387 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS JENU

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Jenu)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		27. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Merakurak)	presentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang di bina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	4.926.000	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Merakurak)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)tor SK17410THN25	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	4.926.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS MERAKURAK
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		28. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	8.784.000	0 (%)	0	16.39 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	16.39 (%)	0	16.39 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Temandang)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Temandang)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	1 (dokumen)	8.784.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	2.880.000	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	0	0 (dokumen)	2.880.000	0 (dokumen)	3.030.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TEMANDANG
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		29. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kerek)	presentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang di bina	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.590.320	0 (Dokumen)	0	100 (Dokumen)	2.460.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	100 (Dokumen)	2.460.000	100 (Dokumen)	2.460.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.590.320	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.460.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2.460.000	1 (Dokumen)	2.460.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEREK

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Kerek)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		30. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Gaji)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	KEPALA PUSKESMAS GAJI

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gaji)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.405.571.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	KEPALA PUSKESMAS GAJI
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		31. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	5.452.000	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	5.452.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Tambakboyo)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tambakboyo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.452.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.452.000	0 %	0 %	PUSKESMAS TAMBAKBOYO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		32. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Jatirogo)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	4.117.464	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS JATIROGO
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	4.117.464	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	KAPUS

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Jatirogo)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		33. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Kebonharjo)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	0	72.85 (%)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kebonharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (0)	13.481.000	0 (0)	0	1 (0)	12.201.000	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (0)	12.201.000	1 (0)	12.201.000	0 %	0 %	PUSKESMAS KEBONHARJO
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
		34. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	73.69 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	72.85 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	72.85 (Dokumen)	0	72.85 (Dokumen)	0	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Bancar)																						
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bancar)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	14.902.960	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.950.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.950.000	1 (Dokumen)	3.950.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BANCAR
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		35. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Puskesmas Bulu)	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	0 (%)	0	0 (%)	0	73.69 (%)	10.258.992	0 (%)	0	72.85 (%)	3.162.600	0 (%)	0	0 (%)	0	72.85 (%)	3.162.600	72.85 (%)	4.725.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU
		1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskes	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	13 (Dokumen)	10.258.992	3 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	3.162.600	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	3.162.600	6 (Dokumen)	4.725.000	0 %	0 %	PUSKESMAS BULU

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		mas Bulu)																						
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**46,15**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		36. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader kesehatan yang aktif	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	314.954.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	28.252.750	0 %	0 %	JF
		1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberday	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	314.954.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	28.252.750	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	aa n Masyarakat																					
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**88,93**														
Predikat kinerja kegiatan										**Tinggi**														
8		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Angka Kelahiran TFR (Total Fertility Rate)	2.01 (Angka)	2.052.977.000	2 (Angka)	838.611.945	2.01 (Angka)	459.400.000	0 (Angka)	0	0 (Angka)	96.175.492	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 (Angka)	96.175.492	0 (Angka)	958.790.060	0 %	46.7 %	KABID
		1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka	Persentase pilar yang terdokumentasi grand design pembangunan kependudukan (GDPK)	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	30.000.000	300 (%)	0	200 (%)	14.557.000	0 (%)	0	0 (%)	0	500 (%)	14.557.000	500 (%)	15.873.500	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Pengendalian Kuantitas Penduduk																						
		1. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	1 (Satuan Pendidikan)	510.827.000	1 (Satuan Pendidikan)	71.899.000	1 (Satuan Pendidikan)	30.000.000	1 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	14.557.000	0 (Satuan Pendidikan)	0	0 (Satuan Pendidikan)	0	1 (Satuan Pendidikan)	14.557.000	1 (Satuan Pendidikan)	87.772.500	100 %	17.18 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan penduduk yang tersusun	0 (%)	0	1 (%)	372.157.570	1 (%)	429.400.000	0 (%)	0	0 (%)	81.618.492	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	81.618.492	0 (%)	476.462.185	0 %	0 %	jf
		1. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	10.000.000	0 (Unit)	0	1 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	0	1 (Unit)	456,5	0 %	0 %	JF
		2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Jumlah laporan pembinaan dan penyelenggaran sistem	1 (Laporan)	88.400.000	1 (Laporan)	59.040.000	1 (Laporan)	100.000.000	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	6.799.400	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	6.799.400	1 (Laporan)	67.519.400	100 %	76.38 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		sistem informasi keluarga	informasi keluarga																					
		3. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga yang Terlapor	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	159.400.000	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	0 %	0 %	JF
		4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 (Dokumen)	125.400.000	1 (Dokumen)	211.321.495	1 (Dokumen)	160.000.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	63.627.692	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	63.627.692	1 (Dokumen)	274.949.187	100 %	219.26 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**50**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**														
9		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BEREN**	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (UNMEET NEED)	0 (%)	0	0 (%)	0	7 (%)	7.627.705.000	0 (%)	132.215.026	4.6 (%)	2.885.888.366	0 (%)	0	0 (%)	0	4.6 (%)	3.018.103.392	4.6 (%)	4.088.026.489	0 %	0 %	KABID

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
		CANA (KB)																					
		1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	21.09 (%)	7.744.357.200	95.45 (%)	3.672.670.389	17.9 (%)	1.547.250.000	4.5 (%)	132.215.026	9.2 (%)	347.007.366	0 (%)	0	0 (%)	0	9.2 (%)	479.222.392	9.2 (%)	4.320.045.878	43.62 %	55.78 %	JF Analis Kebiakan Ahli Muda
		1. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	40 (Organisasi)	459.390.000	40 (Organisasi)	306.718.668	1 (Organisasi)	250.000.000	0 (Organisasi)	0	1 (Organisasi)	0	0 (Organisasi)	0	0 (Organisasi)	0	1 (Organisasi)	0	1 (Organisasi)	373.324.668	2.5 %	81.27 %	JF Analis Kebiakan Ahli Muda

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
			Stakeholders dan Mitra Kerja																					
		2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0 (Dokumen)	0	140 (Dokumen)	50.756.050	20 (Dokumen)	22.950.000	10 (Dokumen)	18.275.000	10 (Dokumen)	3.475.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	20 (Dokumen)	21.750.000	20 (Dokumen)	72.506.050	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20 (Dokumen)	215.000.000	120 (Dokumen)	185.519.365	0 (Dokumen)	84.300.000	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	8.471.100	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	8.471.100	3 (Dokumen)	198.402.565	15 %	92.28 %	JF
		4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakorde	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	20 (Laporan)	707.000.000	140 (Laporan)	483.922.000	20 (Laporan)	300.000.000	0 (Laporan)	0	10 (Laporan)	4.323.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	10 (Laporan)	4.323.000	10 (Laporan)	531.326.000	50 %	75.15 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		s), dan Mini Lokakarya (Minilok)	(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																					
		5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasinal dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukaan, dan Keluarga Berencana)	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	880.000.000	60 (Laporan)	113.940.026	60 (Laporan)	344.371.766	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	120 (Laporan)	458.311.792	120 (Laporan)	486.065.789	0 %	0 %	JF
		6. Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	20 (Laporan)	200.000.000	120 (Laporan)	181.950.500	1 (Laporan)	10.000.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	1.845.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	1.845.000	0 (Laporan)	183.795.500	0 %	91.9 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**41,67**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	0 (%)	0	75.4 (%)	974.670.000	75 (%)	1.796.700.000	72.95 (%)	0	224.96 (%)	461.100.000	0 (%)	0	0 (%)	0	297.91 (%)	461.100.000	297.91 (%)	1.534.170.000	0 %	0 %	JF
		1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2028 (Puskesmas)	7.342.640.000	2028 (Puskesmas)	1.624.070.000	33 (Puskesmas)	1.796.700.000	3 (Puskesmas)	0	5 (Puskesmas)	461.100.000	0 (Puskesmas)	0	0 (Puskesmas)	0	5 (Puskesmas)	461.100.000	5 (Puskesmas)	2.183.570.000	0.25 %	29.74 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**15,15**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang melayani KB MKJP	100 (%)	5.307.037.000	100 (%)	3.408.889.978	0 (%)	2.114.155.000	0 (%)	0	0 (%)	1.182.272.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.182.272.000	0 (%)	5.276.731.978	0 %	99.43 %	JF
		1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 (Puskesmas)	0	0 (Puskesmas)	0	33 (Puskesmas)	14.100.000	4 (Puskesmas)	0	3 (Puskesmas)	1.840.000	0 (Puskesmas)	0	0 (Puskesmas)	0	3 (Puskesmas)	1.840.000	3 (Puskesmas)	1.840.000	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6000 (Orang)	3.205.837.000	6000 (Orang)	2.992.488.040	0 (Orang)	2.100.055.000	375 (Orang)	0	7639 (Orang)	1.180.432.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	8014 (Orang)	1.180.432.000	8014 (Orang)	4.858.490.040	133.57 %	15 1.55 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**4,55**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Persentase stakeholder / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakat an) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	2.169.600.000	0 (%)	0	0 (%)	861.349.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	861.349.000	0 (%)	979.149.000	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kesertaan Ber-KB																						
		1. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0 (%)	0	0 (%)	0	1 (%)	1.413.600.000	0 (%)	0	0 (%)	706.800.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	706.800.000	0 (%)	824.600.000	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	0 (Desa)	0	0 (Desa)	0	135 (Desa)	756.000.000	0 (Desa)	0	35 (Desa)	154.549.000	0 (Desa)	0	0 (Desa)	0	35 (Desa)	154.549.000	35 (Desa)	154.549.000	0 %	0 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**12,96**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**37,85**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**														
10		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHT**	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	0 (%)	0	0 (%)	0	21 (%)	6.288.300.000	0 (%)	5.475.000	0 (%)	995.314.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.000.789.000	0 (%)	1.360.058.121	0 %	0 %	KABID

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		ERA (KS)																						
		1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase keluarga yang terpapar binaan	15 (%)	20.846.685.326	16 (%)	10.751.354.459	15 (%)	196.500.000	62.39 (%)	5.475.000	73.9 (%)	7.954.000	0 (%)	0	0 (%)	0	73.9 (%)	13.429.000	73.9 (%)	10.764.783.459	492.67 %	51.64 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	0 (Kelompok)	0	0 (Kelompok)	0	15 (Kelompok)	31.900.000	0 (Kelompok)	5.475.000	5 (Kelompok)	5.475.000	0 (Kelompok)	0	0 (Kelompok)	0	5 (Kelompok)	10.950.000	5 (Kelompok)	10.950.000	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	20 (Unit)	130.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	JF
		3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday	35 (%)	104.922.500	30 (%)	27.597.000	35 (%)	15.000.000	0 (%)	0	30 (%)	1.110.000	0 (%)	0	0 (%)	0	30 (%)	1.110.000	30 (%)	28.707.000	85.71 %	27.36 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKA)	aan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)																					
		4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	328 (Orang)	10.000 .000	328 (Orang)	0	328 (Orang)	1.369. 000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	328 (Orang)	1.369. 000	328 (Orang)	1.369.0 00	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusia an serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 %	0 %	JF
		6. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	20 (Laporan)	9.600.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 %	0 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**36,51**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	28 (Angka)	6.091.800.000	0 (Angka)	0	0 (Angka)	658.240.000	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 (Angka)	658.240.000	0 (Angka)	1.017.509.121	0 %	0 %	JF

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	2.769.000.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	359.269.121	0 %	0 %	JF
		2. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	3.322.800.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	987.360.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	987.360.000	0 (Laporan)	987.360.000	0 %	0 %	JF
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														

6	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II		III		IV								
Predikat kinerja sub kegiatan							**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)							**50**														
Predikat kinerja kegiatan							**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja program(%)							**77,88**														
Predikat kinerja program							**Tinggi**														
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)							**0**														
Predikat kinerja sasaran							**Sangat Rendah**														

Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi triwulan II Dinas Kesehatan Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana triwulan II Tahun 2025 belum sesuai target yang direncanakan hal ini dikarenakan pada tahun 2025 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami kendala karena rencana pelaksanaan kegiatan ada ditriwulan III dan IV. Adanya perubahan pagu anggaran karena juknis yang baru keluar dan penambahan anggaran dana transfer untuk kegiatan. Analisis capaian kinerja triwulan II sebagai berikut:

Tabel 2.3 (TC.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
1	Indeks Kesehatan		IKK	0,805	0,81	0,81	0,81	0,845	0,845	0,81	0,81	
2	Angka Harapan Hidup		IKK	72,17	75	75,25	72,4	74,95	74,95	75,25	72,4	
3	Persentase keluarga sehat		IKK	28%	29,00%	29,10%	28,00%	29,42	29,4	29,10%	28,00%	
4	Angka Kematian Ibu (AKI)		IKK	186,88/100.000 KH (28) JIWA	180,20/100.000 KH (27) JIWA	173,53/100.000 KH (26) JIWA	166,86/100.000 KH (25) JIWA	152,19/100.000 KH 24 jiwa	38,54/100.000 (6 jiwa)	173,53/100.000 KH (26) JIWA	166,86/100.000 KH (25) JIWA	
5	Angka Kematian Bayi (AKB)		IKK	7,34/1000 KH (110) JIWA	6,74/1000KH (101) JIWA	6,67/1000KH (100) JIWA	6,6/1000KH (99) JIWA	6,97/1000KH 110 jiwa	3,4/1.000 (53 jiwa)	6,67/1000KH (100) JIWA	6,6/1000KH (99) JIWA	
6	Persentase Fasyankes yang terakreditasi		IKK	65,50%	70,10%	75,60%	80,60%	87,06	88,24	75,60%	80,60%	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
7	Persentase desa ODF		IKK	60	70	80	90	100	100	80	90	
8	Persentase balita stunting		IKK	17	14	12	10	11,3	11,3	12	10	
9	Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar		IKK	74,36	74,36	92,31	100	84,71	83,53	92,31	100	
10	Persentase peningkatan pendapatan retribusi Laboratorium kesehatan		IKK	10%	10%	10%	10%	10	0	10%	10%	
11	Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah-Laboratorium		IKK	10%	10%	10%	10%	10	0	10%	10%	
13	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat		IKK	93,50%	95,00%	96,00%	85,03%	98,48	86	96,00%	85,03%	
14	Persentase desa siaga aktif purnama mandiri		IKK	49,70%	58,84%	67,99%	77,13%	58,84%	58,84	67,99%	77,13%	
15	Angka kelahiran TFR (total fertility rate)		IKK	2	2	2	2	1,83	0	2	2	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
16	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)		IKK	10,50%	7%	7,0%	9,0%	4,5	4,6	7,0%	9,0%	
17	Median usia kawin petama perempuan (MUKP) seluruh wanita 25-49 tahun		IKK	21	21	21	21	22	0	21	21	
18	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	SPM/Standar Nasional		0.077	0.081	0.081	0.08	0,071	0,07	0.081	0.08	
19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	98,22%	39,09	100%	100%	
20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	99,99%	39,45	100%	100%	
21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	99,31%	34,32	100%	100%	
22	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	38,7	100%	100%	
23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	97	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
	pelayanan sesuai standar											
24	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	99,34%	49,4	100%	100%	
25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	47,93	100%	100%	
26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	98,41%	47	100%	100%	
27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	55	100%	100%	
28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	97%	63,3	100%	100%	
29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	121%	53,14%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
	pelayanan TBC sesuai standar											
30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	159%	81,72%	100%	100%	
31	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	80%	100	100%	100%	
32	Nilai Evaluasi AKIP perangkat Daerah			83%	83%	83,1	82	82 ,75	82,75	83,1	82	
33	Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik		IKK	76%	100%	100,0%	100,0%	96,97	100	100,0%	100,0%	
34	Persentase Indokator Mutu Nasional RS dr. R. Koesma		IKK	76,9%	84,60%	92,3%	100%	84,6	84,62	92,3%	100%	
35	Persentase Indokator Mutu Nasional RSUD Ali Manshur		IKK	69%	76,9%	92,3%	100%	84,62	84,62	92,3%	100%	
36	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (RSUD Dr, R. Koesma)		IKK	83%	83,50%	85%	86,5%	100	88,49	85%	86,5%	
37	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		IKK	57%	70%	72%	78%	714,45	71,53	72%	78%	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
									tw 2			
	sesuai standar (RSUD Ali MAnshur)											

Tabel 2.4

Berdasarkan tebel diatas beberapa indikator yang belum tercapai pada tahun 2024-2025 sesuai Renstra 2021-2026:

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Analisis Kinerja
				2024	2025	2024	2025 tw 2	
1	Indeks Kesehatan		IKK	0,81	0,81	0,845	0,845	belum dilakukan perhitungan untuk capaian th 2025
2	Angka Harapan Hidup		IKK	75	75,25	74,95	74,95	belum dilakukan perhitungan untuk capaian th 2025
3	Persentase keluarga sehat		IKK	29,00%	29,10%	29,42	29,4	belum dilakukan perhitungan untuk capaian th 2025
4	Angka Kematian Ibu (AKI)		IKK	180,20/100.000 KH (27) JIWA	173,53/100.000 KH (26) JIWA	152,19/100.000 KH 24 jiwa	38,54/100.000 (6 jiwa)	tercapai
5	Angka Kematian Bayi (AKB)		IKK	6,74/1000 KH (101) JIWA	6,67/1000 KH (100) JIWA	6,97/1000KH 110 jiwa	3,4/1.000 (53 jiwa)	Masih adanya kasus bayi baru lahir dengan BBLR,Asfiksia dan kelainan bawaan
6	Persentase Fasyankes yang terakreditasi		IKK	70,10%	75,60%	87,06	88,24	puskesmas: 33 (33) klinik: 42 (33) RS : 6 (6) Labkes: 3 (2) UTD: 1 (1) jml fasyankes 85 (75)
7	Persentase desa ODF		IKK	70	80	100	100	tercapai
8	Persentase balita stunting		IKK	14	12	11,3	11,3	Hasil dari SSGI 2024 : 11,3 % , Hasil Bulan timbang : 8,6 % Hasil bulan timbang digunakan sebagai monitoring dan evaluasi dalam pemantauan status gizi balita
9	Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar		IKK	74,36	92,31	84,71	83,53	dari 85 fasyankes pemerintah yang ada (33 Puskesmas, 6 RS, 42 klinik, 3 labkes dan 1 PMI) terdapat 12 Puskesmas dan 1 RS yg nakesnya belum sesuai standar
10	Persentase peningkatan pendapatan retribusi Laboratorium kesehatan		IKK	10%	10%	10	0	belum dilakukan perhitungan untukcapaian th 2025
11	Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah-Laboratorium		IKK	10%	10%	10	0	belum dilakukan perhitungan untukcapaian th 2025
13	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat		IKK	95,00%	96,00%	98,48	86	Sampel makmin yang diperiksa : 70 yang memenuhi syarat : 70 Sediaan farmasi apotek yang diperiksa : 70 Sediaan farmasi memenuhi syarat : 50
14	Persentase desa siaga aktif purnama mandiri		IKK	58,84%	67,99%	58,84%	58,84	belum tercapai karena belum semua desa melakukan sarasegan DESI, sumber pendanaan hanya dari dana desa. Upayanya melakukan kegiatan evaluasi ke desa
15	Angka kelahiran TFR (total fertility rate)		IKK	2	2	1,83	0	Perhitungan Capaian dilakukan 1 tahun sekali berdasarkan hasil survay yang dilakukan oleh BKKBN perwakilan provinsi jawa timur yang di rilis melalui aplikasi siperindu
16	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)		IKK	7%	7,0%	4,5	4,6	Perhitungan Capaian dilakukan 1 tahun sekali berdasarkan hasil survay yang dilakukan oleh BKKBN perwakilan provinsi jawa timur yang di rilis melalui aplikasi siperindu
17	Median usia kawin petama perempuan (MUKP) seluruh wanita 25-49 tahun		IKK	21	21	22	0	Perhitungan Capaian dilakukan 1 tahun sekali berdasarkan hasil survay yang dilakukan oleh BKKBN perwakilan provinsi jawa timur yang di rilis melalui aplikasi siperindu
18	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	SPM/Standar Nasional		0.081	0.081	0,071	0,07	Perhitunagn dilakukan akhir tahun
19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	SPM/Standar Nasional		100%	100%	98,22%	39,09	Masih adanya ibu hamil ANC pertama di UK >12 mgg

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Analisis Kinerja
				2024	2025	2024	2025 tw 2	
20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	SPM/Standar Nasional		100%	100%	99,99%	39,45	Masih adanya persalinan tidak Fasyankes (di Polindes karena persalinan spontan), berapa jumlah kejadian.....
21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	SPM/Standar Nasional		100%	100%	99,31%	34,32	Masih tinggi kasus kematian neonatal (0-28 hari)
22	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100,00 %	38,7	Masih adanya Balita yang tidak hadir di Posyandu untuk melakukan penimbangan secara berkala setelah IDL selesai. J
23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100,00 %	97	sasaran yang dipakai adalah sasaran proyeksi anak usia 7-15 tahun (sasaran proyeksi : 151390, riil : 146538) Hasil Skrining Penilaian Status gizi, kurus : 4998 ; gemuk : 3130; obesitas : 1116; sangat kurus : 1295; normal : 135999
24	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	99,34%	49,4	pelayanan baru dilakukan selama 6 bulan
25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100,00 %	47,93	pelayanan baru dilakukan selama 6 bulan
26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	98,41%	47	pelayanan baru dilakukan selama 6 bulan
27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	100,00 %	55	pelayanan baru dilakukan selama 6 bulan
28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	97%	63,3	pelayanan baru dilakukan selama 6 bulan
29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	121%	53,14%	pelayanan baru dilakukan selama 6 bulan
30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	SPM/Standar Nasional		100%	100%	159%	81,72%	pelayanan baru dilakukan selama 6 bulan
31	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	SPM/Standar Nasional		100%	100%	80%	100	pelayanan baru dilakukan selama 6 bulan
32	Nilai Evaluasi AKIP perangkat Daerah			83%	83,1	82 ,75	82,75	nilai sakip 2024 belum ada
33	Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik		IKK	100%	100,0%	96,97	100	belum dilakukan perhitungan untuk capaian th 2025
34	Persentase Indokator Mutu Nasional RS dr. R. Koesma		IKK	84,60%	92,3%	84,6	84,62	Dari 13 indikator pada Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah sakit, hanya tercapai 11 indikator. Sedangkan target indikator yang tercapai pada tahun 2025 adalah 12 indikator. Indikator yang belum tercapai adalah kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kepatuhan asesmen risiko pasien jatuh. Penyebab ketidaktercapaian adalah, ketidak patuhan petugas terhadap prosedur
35	Persentase Indokator Mutu Nasional RSUD Ali Manshur		IKK	76,9%	92,3%	84,62	84,62	Kepatuhan setiap unit dalam menerapkan INM belum optimal
36	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (RSUD Dr, R. Koesma)		IKK	83,50%	85%	100	88,49	pengadaan sarana prasarana belum realisasi
37	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (RSUD Ali MAnshur)		IKK	70%	72%	714,45	71,53	masih dalam proses penyelesaian pembangunan prasaran dan pengadaan sarana

Capaian Indikator sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan Indikator Utama Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat dengan indikator angka

harapan hidup belum tercapai dari target 75 dengan realisasi 74,95. Capaian program yang mendukung indikator angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

12. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum tercapai sesuai target 83 realisasi 82,75 meski lebih rendah tetapi capaian lebih besar dari tahun 2023 karena ada pengisian rencana aksi yan belum optimal dan perubahan target indikator program sehingga tidak tercapai dengan target yang baru. Sedangkan capai triwulan II disamakan dnegna capaian tahun 2024 karena belum dilakukan evaluasi.
13. Capaian Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula indikatornya Persentase Keluarga Sehat dengan target 29 dan sudah tercapai dengan realisasi 29,4 Persentase desa ODF sudah tercapai dari target 100 % dari target 70%. Persentase fasyankes terakreditasi tercapai 84,71 karena pada dari target 74,36%, Angka Kematian Ibu (AKI) sudah tercapai dengan target 180,20/100.000 KH / (27 jiwa) dengan realisasi 152,19/100.000KH/(24 jiwa) , Angka Kematian Bayi (AKB) sudah tercapai dengan target 6,74/1000KH (101 jiwa) dan realisasi 6,97/1000KH (110 jiwa), Persentase balita stunting Tercapai sesuai dengan hasil Bulan timbang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan target 14 sesuai hasil SGI dan realisasi hasil bulan timbang 8,38 dengan hasil SSGI tahun 2021 25,1, tahun 2022 24,9 dan tahun 2023 17,8 terjadi penurunan 7,1. Sedangkan capaian tahun 2024 11,3. Untuk capaian triwulan II disamakan dengan capaian tahun 2024 karena belum dilakukan survey gizi ditahun berjala.
14. Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar mempunyai target 74,36% sudah tercapai dengan capaian kinerja juga 84,71%.Capain triwulan II mencapai 83,53 dmana belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan kegiatan belum selesai sampai dengan 1 tahun.
15. Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan indikator Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Yang Memenuhi Syarat sudah tercapai dengan

target 95% dengan realisasi kegiatan 98,5%. Capain sampai dengan triwulan II mencapai 86,2 % dikarenakan baru berjalan 6 bulan kegiatan.

16. Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri mempunyai target 58,84% dengan capaian kegiatan 58,84% sudah mencapai target hal ini dikarenakan semua puskesmas melaksanakan pembinaan /sarasehan desa siaga dan peningkatan strata UKBM.Capaian sampai dengan triwulan II belum dilakukan pengukuran. Pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun.
17. Capaian Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Angka Kelahiran *Total Fertility Rat (TFR)* mempunyai target 2 dengan capaian 1,83 sudah tercapai karena Pelaksanaan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disusun.

    Target TFR capaian/realisasi lebih rendah dari target justru akan lebih baik dikarenakan rata2 anak yang akan dilahirkan oleh perempuan pada masa reprpduksinya dibawah target, mempertahankan capaian dibawah target. Capain tahun 2025 belum ada karena pegukuran ada di januari Tahun 2026.
18. Capaian Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) mempunyai target 7,1% dengan capaian 4,5% sudah melebihi target, capaian ini dipengaruhi karena kepesertaan ber KB dengan MKJP dibiayai oleh BKB. Pus yang tidak mau hamil tidak mau punya anak tidak mau/belum ber kb. Semakin banyak unmeed need semakin tinggi kehamilan yang tidak diinginkan sehingga cenderung kejadian stunting tinggi. Capaian Unmeed Need 4,6 dimana capaian lebih tinggi dari target.
19. Capaian Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) mempunyai target 21 sudah tercapai dengan capaian kegiatan 22.Tahun 2025 belum dilakukan pengukuran indikator.
20. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik dengan target 100% tercapai 96,97 % hal ini dikarenakan 1 Puskesmas yang capaian kinerjanya dengan nilai C. Capaian sampai dengan triwulan II belum selesai sehingga capaian disamakan dengan tahun 2024.
21. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase indikator Mutu Nasional RSUD Ali Manshur

dengan target 76,9 terealiasi 84,62 karena ada indikator yangb elum tercapai yaitu pemakaian APD, kebersihan tangan dan waktu tunggu rawat jalan. Sedanga untuk RSUD Dr. R. Koesmas dengan target 84,6 tercapai 84,5 belum tercapai karena ada indikator yang belum 100% yaitu waktu tunggu rawat jalan dan pemakaian APD.Capaian INM Rumah sakit belum mencapai target karena kegiatan baru dilaksanakan 6 bulan.

22. Capaian Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat untuk RSUD dengan indikator presentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rsud koesmas dengan target 83,5 tercapai 100 % karena pada tahun 2024 mendapat tambahan sumber dana DAK fisik dan pajak rokok untuk pengadaan alat kesehatan dan adanya pembangunan ruang IPID. Target untuk RSUD Ali Manshur 70% dengan capaian 71,42 % hal ini sudah mencapai target karena adanya tambahan anggaran dbhcht. Capaian triwulan II ini belum sesuai target karena pengadaan pemenuhan sarana akan dilakukan pada triwulan III dan IV.

2.2.1 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025

Realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

2.5 Tabel Realisasi Anggaran Triwulan II tahun 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1	2		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	598.901.034.761,64	225.035.744.742,25
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	598.901.034.761,64	225.035.744.742,25
1.02	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	233.993.607.530,83	88.122.734.098,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.945.080.308,00	70.128.229.459,00
1.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.452.684,00	63.697.200,00
1.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.518.704,00	31.267.200,00
1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.962.400,00	26.475.000,00
1.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.971.580,00	5.955.000,00
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	151.283.802.527,00	69.716.131.983,00
1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	150.991.938.381,00	69.629.071.983,00
1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	224.866.400,00	80.910.000,00
1.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.997.746,00	6.150.000,00
1.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.249.847,00	48.655.800,00
1.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.909.860,00	2.696.000,00
1.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.317.719,00	-
1.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.703.350,00	19.143.000,00
1.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.338.375,00	12.358.000,00
1.02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.753.920,00	2.100.000,00
1.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.226.623,00	12.358.800,00
1.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.189.950,00	212.616.502,00
1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	482.571.000,00	102.454.764,00
1.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.771.450,00	30.573.270,00
1.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	298.847.500,00	79.860.468,00
1.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.385.300,00	87.127.974,00
1.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	50.939.824,00
1.02	Pemeliharaan Mebel	6.600.000,00	-
1.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.825.000,00	4.605.000,00
1.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.960.300,00	31.583.150,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	79.648.081.129,83	20.247.318.394,00
1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.289.068.439,50	2.792.888.722,00
1.02	Pembangunan Puskesmas	11.381.950.000,00	-
1.02	Pengembangan Puskesmas	701.000.000,00	-
1.02	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	140.000.000,00	-
1.02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	651.293.260,00	-
1.02	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	568.247.073,00	-
1.02	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	17.833.378.106,50	2.792.888.722,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	13.200.000,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.265.274.265,33	17.415.179.252,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	471.721.700,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	102.176.700,00	5.482.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	439.586.333,33	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.044.800,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.656.100,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21.929.500,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	110.468.100,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	35.000.000,00	13.350.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.739.000,00	800.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.616.500,00	1.565.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	29.710.000,00	11.335.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21.574.500,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7.970.000,00	1.200.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.718.420.100,00	1.845.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.434.650,00	820.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	55.958.550,00	7.008.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	72.879.350,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.719.760,00	435.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	80.162.000,00	8.423.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.621.500,00	1.120.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132.009.500,00	-
1.02	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	39.624.208.760,00	14.260.807.421,00
1.02	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	184.130.000,00	590.240,00
1.02	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	52.093.412,00	5.232.500,00
1.02	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	22.797.450,00	6.149.629,00
1.02	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	173.575.000,00	59.680.000,00
1.02	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	200.000.000,00	95.995.000,00
1.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000,00	-
1.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.000.000,00	-
1.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	5.000.000,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	634.071.000,00	125.681.740,00
1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.217.500,00	2.400.000,00
1.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.217.500,00	2.400.000,00
1.02	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.520.925,00	36.850.420,00
1.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	5.010.925,00	760.000,00
1.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.870.600,00	3.475.000,00
1.02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	72.639.400,00	32.615.420,00
1.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	813.571.967,00	518.303.967,00
1.02	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	6.532.467,00	6.532.467,00
1.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6.532.467,00	6.532.467,00
1.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	310.901.500,00	78.034.500,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.427.000,00	2.055.000,00
1.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	199.405.500,00	75.979.500,00
1.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	102.069.000,00	-
1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	496.138.000,00	433.737.000,00
1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	496.138.000,00	433.737.000,00
1.02	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	169.680.076,00	32.439.000,00
1.02	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4.654.576,00	3.060.000,00
1.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4.654.576,00	3.060.000,00
1.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	158.238.000,00	29.379.000,00
1.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	158.238.000,00	29.379.000,00
1.02	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	6.787.500,00	-
1.02	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	6.787.500,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	417.194.050,00	3.830.000,00
1.02	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	314.954.000,00	-
1.02	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	314.954.000,00	-
1.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.100.000,00	1.565.000,00
1.02	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	36.100.000,00	1.565.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.140.050,00	2.265.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	66.140.050,00	2.265.000,00
1.02	RSUD dr. R. KOESMA	231.358.391.730,81	99.995.031.961,49
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	230.069.287.930,81	99.995.031.961,49
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	230.069.287.930,81	99.995.031.961,49
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	230.069.287.930,81	99.995.031.961,49
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.289.103.800,00	-
1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.289.103.800,00	-
1.02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.036.800,00	-
1.02	Pengembangan Rumah Sakit	289.067.000,00	-
1.02	RSUD R. ALI MANSHUR	44.120.353.710,00	7.681.697.472,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.400.000.000,00	5.943.951.438,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	18.400.000.000,00	5.943.951.438,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.400.000.000,00	5.943.951.438,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.720.353.710,00	1.737.746.034,00
1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.774.353.710,00	1.312.007.665,00
1.02	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.283.088.960,00	-
1.02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.918.581.250,00	-
1.02	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.572.683.500,00	1.312.007.665,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.946.000.000,00	425.738.369,00
1.02	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.946.000.000,00	425.738.369,00
1.02	PUSKESMAS KENDURUAN	2.011.987.000,00	769.290.609,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.286.420.000,00	572.529.870,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.286.420.000,00	572.529.870,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.286.420.000,00	572.529.870,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	715.758.066,00	196.760.739,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	715.758.066,00	196.760.739,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	121.964.600,00	85.321.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.033.664,00	702.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.814.912,00	702.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.420.320,00	5.460.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.774.000,00	3.432.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	209.718.736,00	10.313.600,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.720.224,00	1.053.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.040.244,00	9.280.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.111.184,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	703.728,00	312.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	111.569.572,00	47.544.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	153.050.066,00	25.531.139,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.484.952,00	7.110.000,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	351.864,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.808.934,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.808.934,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.808.934,00	-
1.02	PUSKESMAS BANGILAN	3.920.019.000,00	1.230.994.864,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.169.920.000,00	1.033.985.174,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.169.920.000,00	1.033.985.174,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.169.920.000,00	1.033.985.174,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	748.024.000,00	197.009.690,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	748.024.000,00	197.009.690,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	131.980.912,00	31.992.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.582.592,00	312.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.480.000,00	4.480.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.321.344,00	1.716.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.947.904,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	207.634.752,00	77.025.900,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.127.680,00	2.964.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.680.000,00	7.680.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.939.376,00	19.467.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	938.304,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104.325.720,00	19.767.500,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	166.294.000,00	26.701.290,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.536.840,00	4.904.000,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	234.576,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.075.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.075.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.075.000,00	-
1.02	PUSKESMAS SENORI	3.276.483.000,00	1.116.114.135,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.612.710.000,00	968.504.593,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.612.710.000,00	968.504.593,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.612.710.000,00	968.504.593,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	654.732.000,00	147.609.542,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	654.732.000,00	147.609.542,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.820.000,00	6.054.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	71.910.280,00	31.600.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.560.000,00	15.360.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.753.216,00	1.120.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	390.960,00	70.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	187.992.000,00	27.261.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.720.000,00	800.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.656.944,00	2.450.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44.363.328,00	20.785.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	938.304,00	490.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.394.768,00	16.790.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	139.946.000,00	23.648.542,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.583.000,00	861.000,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	703.200,00	320.000,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.041.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.041.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.041.000,00	-
1.02	PUSKESMAS SINGGAHAN	3.792.981.000,00	1.309.312.691,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.878.800.000,00	1.154.591.786,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.878.800.000,00	1.154.591.786,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.878.800.000,00	1.154.591.786,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	910.462.790,00	154.720.905,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	910.462.790,00	154.720.905,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	150.267.168,00	54.337.824,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.564.496,00	3.987.792,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31.902.336,00	10.399.536,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.691.520,00	781.920,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.251.072,00	156.384,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	261.300.152,00	6.568.128,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.251.072,00	703.728,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.960.000,00	6.720.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.430.018,00	78.192,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	938.304,00	312.768,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	157.531.910,00	26.180.710,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	201.488.790,00	37.867.155,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	35.523.184,00	6.626.768,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	362.768,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.718.210,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.718.210,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.718.210,00	-
1.02	PUSKESMAS MONTONG	2.586.198.000,00	1.075.107.816,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.853.048.000,00	944.768.923,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.853.048.000,00	944.768.923,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.853.048.000,00	944.768.923,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	721.757.232,00	124.974.893,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	721.757.232,00	124.974.893,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	108.750.768,00	20.688.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.520.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.600.000,00	1.920.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.345.760,00	362.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.680.000,00	1.920.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174.687.600,00	3.225.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.463.048,00	108.750,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.920.000,00	-
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.276.384,00	2.820.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	390.960,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.796.616,00	15.560.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	242.820.000,00	78.370.643,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.186.096,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	320.000,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.392.768,00	5.364.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.392.768,00	5.364.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.392.768,00	5.364.000,00
1.02	PUSKESMAS JETAK	2.062.477.000,00	592.151.565,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.368.856.000,00	486.492.248,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.368.856.000,00	486.492.248,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.368.856.000,00	486.492.248,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	676.786.000,00	103.419.317,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	676.786.000,00	103.419.317,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.892.096,00	20.336.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.480.000,00	11.520.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.480.000,00	2.560.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.691.520,00	1.555.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.768.128,00	5.922.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	194.817.344,00	5.026.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.251.072,00	312.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.680.000,00	6.720.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.756.384,00	11.628.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.094.688,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.200.488,00	14.770.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	141.093.000,00	22.992.317,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.424.896,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	156.384,00	78.000,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.835.000,00	2.240.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.835.000,00	2.240.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.835.000,00	2.240.000,00
1.02	PUSKESMAS PARENGAN	2.216.658.000,00	789.636.370,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.465.235.000,00	649.934.912,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.465.235.000,00	649.934.912,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.465.235.000,00	649.934.912,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	743.939.680,00	136.105.458,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	743.939.680,00	136.105.458,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.470.320,00	29.880.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.706.200,00	705.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.800.000,00	6.400.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.284.064,00	846.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.601.120,00	5.820.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	226.980.360,00	7.810.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	781.920,00	564.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.640.000,00	3.840.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.453.728,00	7.500.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.563.840,00	705.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.491.152,00	34.901.250,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	162.746.520,00	25.359.208,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	36.873.112,00	11.775.000,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	547.344,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.483.320,00	3.596.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.483.320,00	3.596.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.483.320,00	3.596.000,00
1.02	PUSKESMAS PONCO	2.177.826.000,00	752.074.284,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.549.848.000,00	658.657.230,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.549.848.000,00	658.657.230,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.549.848.000,00	658.657.230,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	611.389.000,00	88.297.054,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	611.389.000,00	88.297.054,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.135.648,00	12.968.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.527.216,00	1.160.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.240.000,00	2.560.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.753.216,00	1.160.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.270.272,00	6.480.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	190.661.608,00	7.052.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.032.992,00	435.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.680.000,00	6.080.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.772.464,00	6.540.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.502.144,00	580.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.168.264,00	20.767.500,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	137.161.000,00	22.514.054,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	22.086.688,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	397.488,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.589.000,00	5.120.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.589.000,00	5.120.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.589.000,00	5.120.000,00
1.02	PUSKESMAS SOKO	4.760.598.000,00	2.089.464.278,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.963.638.000,00	1.989.709.552,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.963.638.000,00	1.989.709.552,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.963.638.000,00	1.989.709.552,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	783.964.528,00	98.755.918,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	783.964.528,00	98.755.918,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	146.102.424,00	34.358.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.634.321,00	2.995.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.197.952,00	2.995.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.691.520,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.992.080,00	4.766.400,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	225.356.864,00	2.995.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.362.256,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.680.000,00	2.240.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.346.191,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.691.520,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.236.729,00	19.123.200,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	173.009.000,00	29.204.326,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.429.095,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	234.576,00	78.192,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.995.472,00	998.808,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.995.472,00	998.808,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.995.472,00	998.808,00
1.02	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG	2.551.120.000,00	864.022.793,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.929.175.000,00	688.390.593,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.929.175.000,00	688.390.593,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.929.175.000,00	688.390.593,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	618.620.000,00	175.632.200,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	618.620.000,00	175.632.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.617.616,00	5.990.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.745.952,00	14.210.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.200.000,00	14.100.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.477.728,00	2.100.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.032.992,00	700.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	190.985.600,00	33.895.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.853.912,00	5.886.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.080.000,00	16.640.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.561.500,00	2.311.500,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.882.508,00	47.892.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	136.272.000,00	31.907.700,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.910.192,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.325.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.325.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.325.000,00	-
1.02	PUSKESMAS RENGEL	3.900.914.000,00	1.174.823.209,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.259.100.000,00	1.075.538.500,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.259.100.000,00	1.075.538.500,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.259.100.000,00	1.075.538.500,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	637.576.000,00	99.284.709,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	637.576.000,00	99.284.709,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73.282.616,00	14.256.100,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.051.520,00	8.430.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.885.000,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.383.040,00	2.322.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.960.392,00	4.370.400,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	179.956.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.540.336,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.680.022,00	1.280.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.517.190,00	1.330.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	860.112,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	95.792.396,00	41.708.300,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	139.819.000,00	25.587.209,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	28.457.416,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	390.960,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.238.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.238.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.238.000,00	-
1.02	PUSKESMAS PRAMBON WETAN	1.469.803.000,00	442.489.238,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	892.664.000,00	347.639.554,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	892.664.000,00	347.639.554,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	892.664.000,00	347.639.554,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	573.656.000,00	94.849.684,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	573.656.000,00	94.849.684,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.649.000,00	13.340.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.109.600,00	1.087.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.800.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.691.520,00	2.175.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.100.000,00	930.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	135.965.600,00	362.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	860.112,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.840.000,00	1.920.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.050.000,00	2.350.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.679.000,00	17.103.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	185.611.000,00	55.581.684,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.300.168,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.483.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.483.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.483.000,00	-
1.02	PUSKESMAS GRABAGAN	2.756.697.000,00	779.801.970,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.031.603.000,00	592.384.940,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.031.603.000,00	592.384.940,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.031.603.000,00	592.384.940,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	710.986.000,00	187.417.030,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	710.986.000,00	187.417.030,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.660.232,00	29.458.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.740.560,00	10.290.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.850.000,00	5.170.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.160.672,00	2.475.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.040.000,00	3.520.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	227.216.000,00	14.080.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.233.216,00	1.042.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.760.000,00	5.120.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.120.000,00	10.540.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124.444.000,00	70.375.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	148.648.000,00	33.031.530,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	28.140.336,00	1.505.000,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	972.984,00	810.000,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.108.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.108.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.108.000,00	-
1.02	PUSKESMAS PLUMPANG	3.975.268.000,00	1.312.339.773,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.230.486.000,00	1.099.711.123,00
1.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	
1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.230.486.000,00	1.099.711.123,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.230.486.000,00	1.099.711.123,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	733.052.000,00	212.628.650,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	733.052.000,00	212.628.650,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98.657.304,00	24.801.600,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.143.712,00	8.430.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.520.000,00	1.920.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.321.344,00	3.091.800,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	981.384,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	205.877.848,00	74.371.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.987.792,00	5.392.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	41.221.032,00	12.652.500,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	312.768,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.605.408,00	2.658.600,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.201.816,00	25.253.950,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	155.445.000,00	30.145.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	36.776.592,00	23.911.000,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.730.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.730.000,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.730.000,00	-
1.02	PUSKESMAS KLOTOK	1.900.592.000,00	632.866.441,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.382.337.000,00	529.515.901,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.382.337.000,00	529.515.901,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.382.337.000,00	529.515.901,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	515.814.040,00	103.350.540,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	515.814.040,00	103.350.540,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	78.233.952,00	26.152.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.520.000,00	1.280.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.240.000,00	640.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.012.864,00	4.640.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.541.240,00	435.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	157.679.448,00	25.701.300,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.480.000,00	640.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.480.440,00	-
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.670.960,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	97.937.360,00	23.200.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	113.876.040,00	20.662.240,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.141.736,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.440.960,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.440.960,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.440.960,00	-
1.02	PUSKESMAS WIDANG	2.410.446.000,00	721.811.576,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.757.047.000,00	549.992.666,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.757.047.000,00	549.992.666,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.757.047.000,00	549.992.666,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	648.390.536,00	170.218.910,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648.390.536,00	170.218.910,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.490.000,00	29.540.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.320.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.600.000,00	6.400.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.383.040,00	4.350.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.950.000,00	3.950.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	175.563.760,00	19.492.600,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.520.000,00	7.520.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.200.000,00	-
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.850.000,00	17.930.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.563.840,00	725.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.429.000,00	23.742.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	178.612.536,00	56.569.310,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.634.688,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	273.672,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.008.464,00	1.600.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.008.464,00	1.600.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.008.464,00	1.600.000,00
1.02	PUSKESMAS COMPRENG	1.505.157.000,00	477.754.676,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	797.953.000,00	318.541.578,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	797.953.000,00	318.541.578,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	797.953.000,00	318.541.578,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	702.458.000,00	159.213.098,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	702.458.000,00	159.213.098,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.433.800,00	18.414.300,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.288.128,00	2.700.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.360.000,00	7.680.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.814.912,00	1.364.400,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.760.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	178.400.000,00	21.074.600,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.111.184,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.320.000,00	4.480.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.280.000,00	4.500.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	938.304,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.872.000,00	20.845.500,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	263.336.000,00	66.655.298,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	35.543.672,00	11.499.000,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.746.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.746.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.746.000,00	-
1.02	PUSKESMAS PALANG	3.313.746.000,00	888.642.465,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.692.337.000,00	823.213.884,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.692.337.000,00	823.213.884,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.692.337.000,00	823.213.884,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	613.743.000,00	65.428.581,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	613.743.000,00	65.428.581,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	116.240.720,00	18.746.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.120.000,00	320.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.700.000,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.876.608,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.120.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	173.195.984,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.094.688,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.240.000,00	-
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.647.676,00	470.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	938.304,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115.430.324,00	22.200.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	133.411.000,00	21.985.581,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	23.072.000,00	1.632.000,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	655.696,00	75.000,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.666.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.666.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.666.000,00	-
1.02	PUSKESMAS SUMURGUNG	2.132.006.000,00	572.014.644,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.582.791.000,00	518.198.652,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.582.791.000,00	518.198.652,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.582.791.000,00	518.198.652,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	544.189.000,00	53.815.992,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	544.189.000,00	53.815.992,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.979.516,00	2.926.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.447.456,00	585.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.760.000,00	2.880.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.407.456,00	585.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.007.456,00	1.170.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.221.000,00	6.435.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.183.728,00	195.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.058.528,00	715.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.387.456,00	1.260.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.111.184,00	1.170.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96.021.560,00	16.752.500,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	118.243.000,00	18.293.742,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.204.276,00	848.250,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	156.384,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.026.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.026.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.026.000,00	-
1.02	PUSKESMAS SEMANDING	3.148.021.000,00	965.940.258,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.374.613.000,00	775.157.792,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.374.613.000,00	775.157.792,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.374.613.000,00	775.157.792,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	764.119.000,00	190.782.466,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	764.119.000,00	190.782.466,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.477.648,00	11.775.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.520.000,00	4.800.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.400.000,00	11.520.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.127.680,00	1.216.800,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.214.912,00	3.916.800,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	237.150.368,00	21.879.600,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.251.072,00	907.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.080.000,00	3.840.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.939.376,00	4.824.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	139.812.712,00	53.226.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	164.313.000,00	34.369.966,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	31.519.464,00	1.788.300,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	312.768,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.289.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.289.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.289.000,00	-
1.02	PUSKESMAS WIRE	2.627.635.000,00	910.353.333,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.841.360.000,00	720.503.273,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.841.360.000,00	720.503.273,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.841.360.000,00	720.503.273,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	779.375.928,00	189.850.060,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	779.375.928,00	189.850.060,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	159.400.896,00	32.688.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.682.704,00	1.200.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.004.288,00	1.800.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.004.288,00	2.400.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.040.000,00	3.200.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	220.086.704,00	12.500.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.414.008,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.280.000,00	8.320.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.370.000,00	5.490.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	938.304,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	130.202.000,00	72.367.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	170.843.000,00	40.431.560,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.796.968,00	9.266.000,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	312.768,00	187.500,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.899.072,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.899.072,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.899.072,00	-
1.02	PUSKESMAS TUBAN	2.613.618.000,00	692.739.486,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.986.740.000,00	612.251.886,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.986.740.000,00	612.251.886,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.986.740.000,00	612.251.886,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	621.907.088,00	79.573.200,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	621.907.088,00	79.573.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83.340.000,00	19.008.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.040.000,00	800.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.378.752,00	1.141.800,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.037.280,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.127.680,00	600.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	183.800.848,00	8.662.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.825.760,00	518.700,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	6.400.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.442.032,00	6.048.300,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.407.456,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	106.858.288,00	19.211.200,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	136.701.000,00	14.440.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.229.000,00	2.743.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.084.416,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	234.576,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.970.912,00	914.400,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.970.912,00	914.400,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.970.912,00	914.400,00
1.02	PUSKESMAS KEBONSARI	1.671.754.000,00	649.059.111,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.013.906.000,00	465.453.402,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.013.906.000,00	465.453.402,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.013.906.000,00	465.453.402,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	651.561.464,00	183.605.709,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	651.561.464,00	183.605.709,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.768.256,00	11.388.608,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.885.192,00	4.141.200,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.172.880,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.345.760,00	1.137.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.568.128,00	2.724.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	123.742.600,00	23.480.700,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.042.032,00	960.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.831.108,00	387.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.631.500,00	2.400.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	781.920,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	76.385.264,00	25.254.400,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	295.223.000,00	111.578.001,00
1.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.862.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.087.248,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	234.576,00	154.800,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.286.536,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.286.536,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.286.536,00	-
1.02	PUSKESMAS JENU	3.699.815.000,00	976.632.706,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.952.627.000,00	853.794.726,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.952.627.000,00	853.794.726,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.952.627.000,00	853.794.726,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	743.405.000,00	122.837.980,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	743.405.000,00	122.837.980,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	118.797.948,00	9.855.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.969.260,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.317.056,00	1.248.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.864.400,00	1.560.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.569.264,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	223.899.400,00	11.934.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.435.024,00	5.280.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.760.000,00	3.520.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.672.344,00	6.921.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.345.760,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128.247.392,00	54.819.500,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.933.000,00	27.466.480,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.125.000,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	469.152,00	234.000,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.783.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.783.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.783.000,00	-
1.02	PUSKESMAS MERAKURAK	2.566.596.000,00	692.548.295,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.763.876.000,00	592.299.249,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.763.876.000,00	592.299.249,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.763.876.000,00	592.299.249,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	797.794.000,00	100.249.046,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	797.794.000,00	100.249.046,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	136.050.720,00	18.220.608,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.465.760,00	1.563.840,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.919.704,00	781.920,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.814.912,00	312.768,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.120.000,00	960.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	193.939.760,00	469.152,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.720.224,00	156.384,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.040.000,00	3.520.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.954.800,00	1.016.496,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.431.200,00	15.784.392,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	234.815.000,00	57.307.102,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.365.536,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	156.384,00	156.384,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.926.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.926.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.926.000,00	-
1.02	PUSKESMAS TEMANDANG	1.825.710.000,00	462.888.023,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.152.902.000,00	359.230.226,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.152.902.000,00	359.230.226,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.152.902.000,00	359.230.226,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	664.024.000,00	99.337.797,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.024.000,00	99.337.797,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.161.800,00	15.556.600,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.874.800,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.880.000,00	1.440.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.345.760,00	154.800,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.520.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	171.653.000,00	480.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.384.856,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.000.000,00	-
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.700.000,00	9.060.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	469.152,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	114.847.000,00	20.128.300,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	191.221.000,00	52.440.697,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.666.728,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	299.904,00	77.400,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.784.000,00	4.320.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.784.000,00	4.320.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.784.000,00	4.320.000,00
1.02	PUSKESMAS KEREK	2.861.292.000,00	815.864.338,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.218.386.000,00	727.182.125,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.218.386.000,00	727.182.125,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.218.386.000,00	727.182.125,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	640.315.680,00	88.682.213,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	640.315.680,00	88.682.213,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83.750.000,00	14.500.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	65.920.000,00	5.760.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.255.360,00	1.838.400,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.037.280,00	1.186.800,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.560.000,00	640.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	173.636.992,00	891.800,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.583.728,00	480.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.353.320,00	-
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.400.000,00	4.400.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.251.072,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.877.680,00	32.508.300,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	141.712.680,00	23.419.413,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.325.666,00	3.057.500,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	651.902,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.590.320,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.590.320,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.590.320,00	-
1.02	PUSKESMAS GAJI	2.049.065.000,00	550.799.296,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.405.571.000,00	490.707.907,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.405.571.000,00	490.707.907,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.405.571.000,00	490.707.907,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	637.128.500,00	60.091.389,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	637.128.500,00	60.091.389,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	142.753.632,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.800.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	640.000,00	640.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.284.064,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.240.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	179.893.688,00	10.847.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.329.264,00	306.384,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.470.960,00	2.295.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.250.000,00	1.050.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	312.768,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	120.360.040,00	22.642.500,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	138.070.500,00	22.310.505,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.567.200,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	156.384,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.365.500,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.365.500,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.365.500,00	-
1.02	PUSKESMAS TAMBAKBOYO	3.614.127.000,00	1.579.226.119,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.822.032.000,00	1.490.024.119,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.822.032.000,00	1.490.024.119,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.822.032.000,00	1.490.024.119,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	786.643.000,00	89.202.000,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	786.643.000,00	89.202.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	117.445.584,00	18.905.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.934.224,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.520.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.506.432,00	840.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.125.000,00	7.305.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	232.733.000,00	1.280.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.216.720,00	320.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.680.000,00	480.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.400.000,00	5.400.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	118.975.000,00	38.017.000,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	172.348.000,00	16.595.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21.350.896,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	408.144,00	60.000,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.452.000,00	-
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.452.000,00	-
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.452.000,00	-
1.02	PUSKESMAS JATIROGO	2.213.776.000,00	899.608.826,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.471.577.000,00	670.972.226,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.471.577.000,00	670.972.226,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.471.577.000,00	670.972.226,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	738.081.536,00	224.519.600,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	738.081.536,00	224.519.600,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	107.268.192,00	49.956.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.328.800,00	3.510.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.880.000,00	2.880.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.704.384,00	6.396.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.518.640,00	2.808.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	191.631.360,00	18.425.850,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.518.640,00	234.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.480.000,00	15.680.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.237.456,00	2.532.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.290.168,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	108.173.904,00	47.481.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	207.146.536,00	65.076.750,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.668.880,00	9.540.000,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	234.576,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.117.464,00	4.117.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.117.464,00	4.117.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.117.464,00	4.117.000,00
1.02	PUSKESMAS KEBONHARJO	1.672.911.975,00	554.730.567,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	941.071.000,00	353.606.360,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	941.071.000,00	353.606.360,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	941.071.000,00	353.606.360,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	718.359.975,00	188.923.207,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	718.359.975,00	188.923.207,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.330.688,00	31.410.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.440.000,00	4.640.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.760.000,00	2.880.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.127.680,00	780.001,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	320.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	176.462.728,00	8.640.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.440.000,00	-
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.080.000,00	4.800.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.410.000,00	7.710.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.240.000,00	-
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	118.407.000,00	40.938.750,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	244.217.975,00	75.639.456,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	23.935.032,00	11.485.000,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	188.872,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.481.000,00	12.201.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.481.000,00	12.201.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.481.000,00	12.201.000,00
1.02	PUSKESMAS BANCAR	1.958.164.000,00	516.914.767,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.207.099.000,00	348.471.228,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.207.099.000,00	348.471.228,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.207.099.000,00	348.471.228,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	736.162.040,00	164.493.539,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	736.162.040,00	164.493.539,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.061.120,00	6.968.400,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.800.000,00	22.400.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.600.000,00	3.200.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.074.560,00	4.572.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.540.000,00	2.935.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	203.316.000,00	9.280.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.680.000,00	3.840.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.800.000,00	1.920.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.590.960,00	2.431.100,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.037.280,00	3.096.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.091.040,00	26.166.500,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	242.544.040,00	77.684.539,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.636.080,00	-
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	390.960,00	-
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.902.960,00	3.950.000,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.902.960,00	3.950.000,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.902.960,00	3.950.000,00
1.02	PUSKESMAS BULU	3.236.331.000,00	1.118.971.307,00
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.483.870.000,00	931.932.247,00
1.02	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.483.870.000,00	931.932.247,00
1.02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.483.870.000,00	931.932.247,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	742.202.008,00	183.876.460,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	742.202.008,00	183.876.460,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	115.907.232,00	39.107.500,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.735.808,00	1.083.600,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.720.000,00	2.240.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.284.064,00	1.587.600,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.127.400,00	6.456.300,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	240.200.000,00	10.240.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.720.224,00	672.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.720.000,00	2.880.000,00
1.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.750.000,00	15.750.000,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.189.376,00	525.000,00
1.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.816.600,00	60.200.700,00
1.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.432.040,00	37.941.160,00
1.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.895.536,00	5.040.200,00
1.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	703.728,00	152.400,00
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.258.992,00	3.162.600,00
1.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.258.992,00	3.162.600,00
1.02	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.258.992,00	3.162.600,00
1.02	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	648.889.815,00	173.709.341,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	648.889.815,00	173.709.341,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648.889.815,00	173.709.341,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
1.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	648.889.815,00	173.709.341,00
1.02	UPTD INSTALASI FARMASI	300.000.000,00	109.002.534,00
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	300.000.000,00	109.002.534,00
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	109.002.534,00
1.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000,00	109.002.534,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.364.147.839,00	3.831.877.432,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.364.147.839,00	3.831.877.432,00
2.14	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.364.147.839,00	3.795.158.832,00
2.14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	442.711.150,00	69.820.071,00
2.14	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	17.921.000,00	14.557.000,00
2.14	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	17.921.000,00	14.557.000,00
2.14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	424.790.150,00	55.263.071,00
2.14	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100.000.000,00	6.799.400,00
2.14	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	159.400.000,00	-
2.14	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	160.000.000,00	48.463.671,00
2.14	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	5.390.150,00	-
2.14	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.824.155.000,00	2.395.894.011,00
2.14	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.530.850.000,00	420.867.011,00
2.14	Pengendalian Program KKBPK	4.100.000,00	1.845.000,00
2.14	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	880.000.000,00	344.371.911,00
2.14	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.000.000,00	30.123.000,00
2.14	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	75.000.000,00	8.471.100,00
2.14	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	21.750.000,00	21.750.000,00
2.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	14.306.000,00
2.14	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	984.000.000,00	398.700.000,00
2.14	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	984.000.000,00	398.700.000,00
2.14	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.139.705.000,00	833.778.000,00
2.14	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000,00	-
2.14	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.100.055.000,00	830.216.000,00
2.14	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.550.000,00	3.562.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi sd tw 2 th 2025
2.14	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.169.600.000,00	742.549.000,00
2.14	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.413.600.000,00	589.000.000,00
2.14	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	756.000.000,00	153.549.000,00
2.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.097.281.689,00	1.329.444.750,00
2.14	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.005.481.689,00	246.954.500,00
2.14	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.600.000,00	-
2.14	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	822.000.000,00	233.525.500,00
2.14	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	-
2.14	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	10.300.000,00	1.110.000,00
2.14	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4.496.689,00	1.369.000,00
2.14	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	29.085.000,00	10.950.000,00
2.14	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.091.800.000,00	1.082.490.250,00
2.14	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.769.000.000,00	95.130.250,00
2.14	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3.322.800.000,00	987.360.000,00
	Jumlah	613.265.182.600,64	228.854.324.067,49

Sumber: Laporan realisasi anggaran triwulan II Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dari pagu anggaran Rp. 613.265.182.600,64 terrealisasi 228.854.324.067,49 (37,32%) sampai dengan bulan Juni 2025 , penyerapan yang kurang dari 50 % ini dikarenakan adanya dana alokasi Khusus DAK, DBHCHT yang baru bisa dilaksanakan pada triwulan 2-4 dan menyesuaikan dengan rencana kegiatan bulanan. Berikut rekapitulasi realisasi anggaran sampai dengan bukan Juni 2025:

Tabel 2.6 Realisasi anggaran semester 1 tahun 2025

NO	UNIT	PAGU 2025	PAGU PERGESESAN 2025	REALISASI SD JUNI	%	SISA ANGGARAN
1	DINKES	250.607.597.531,00	248.357.755.369,83	91.917.892.930	37,01	156.439.862.439,83
2	IFK	300.000.000,00	300.000.000,00	109.002.534	36,33	190.997.466,00
3	LABKES	648.889.815,00	648.889.815,00	173.709.341	26,77	475.180.474,00
4	RSUD dr. R. KOESMA	210.860.213.890,00	231.358.391.730,81	99.995.031.961,49	43,22	131.363.359.769,32
5	RSUD R. ALI MANSHUR	43.959.700.000,00	44.120.353.710,00	7.681.697.472	17,41	36.438.656.238,00
6	PUSKESMAS	88.507.745.000,00	88.479.791.975,00	28.976.989.829	32,75	59.502.802.146,00
	total	594.884.146.236,00	613.265.182.600,64	228.854.324.067,49	37,32	384.410.858.533,15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.3.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tuban sampai dengan 2025 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanan pembangunan kesehatan itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada indikator utama yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan.

Namun berbagai capaian yang sudah diperoleh, tentunya bukan suatu hal yang membuat Dinas Kesehatan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban harus berpuas diri tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang ada.

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara pembobotan dan penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Sterategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Prov/Kab	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap Public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungklinan atau kemudahan untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, tahun 2025

Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor di atas maka nilai skala dari masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Nilai Skala Isu Strategis/Prioritas Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana

No.	Isu Strategis	Nilai skala kriteria ke-						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya jumlah kematian ibu	20	10	20	10	10	25	100
2	Meningkatnya jumlah kematian bayi	20	10	20	10	10	25	95
3	Kurang optimalnya Penanganan Gizi Buruk dan pencegahan Stunting	20	10	20	10	10	25	95
4	Kurangnya Kualitas pelayanan standar pelayanan minimal (SPM)	20	10	20	10	10	25	95
5	Kurang optimalnya peran serta masyarakat, lintas sektor dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Sehat	20	9	20	10	10	25	94
6	Belum semua masyarakat Tuban mempunyai kepesertaan Jaminan kesehatan dengan mewujudkan Kabupaten Tuban UHC	20	10	19	10	10	24	93
7	Makin banyaknya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular sebagai dampak dari pola hidup masyarakat yang tidak sehat	20	9	20	10	10	21	92
8	Kurangnya akses layanan kesehatan dasar melalui Integrasi Layanan Primer dan rujukan dengan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (KJSU)	18	10	17	9	9	20	83
9	Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta peningkatan profesionalisme dengan kompetensi yang terstandarisasi.	18	10	16	10	9	19	82
10	Kurangnya mutu dan kualitas Puskesmas, klinik dan Rumah Sakit dengan akreditasi secara berkala	18	10	15	9	9	20	81
11	Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)	17	10	15	9	9	20	80

Sumber : Data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, tahun 2025

Berdasarkan skoring diatas maka Isu Strategi Prioritas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1 Meningkatnya jumlah kematian ibu;

Berdasarkan isu kenaikan kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Tuban kematian Ibu masih menjadi permasalahan utama sehingga membutuhkan penanganan dan pencegahan yang lebih efektif dan dapat mencegah terjadinya kematian ibu

2 Meningkatnya jumlah kematian bayi;

Jumlah kematian bayi meningkat walaupun masih dibawah target tetapi perlu penanganan yang lebih efektif untuk mengurangi kejadian kematian bayi

3 Kurang optimalnya Penanganan Gizi Buruk dan Pencegahan Stunting;

Meskipun prevalensi stunting tahun 2024 menurun tetapi masih di atas capaian nasional dan perlu penanganan agar tidak terjadi stunting dan gizi buruk pada balita

4 Kurangnya Kualitas pelayanan standar pelayanan minimal (SPM);
Indikator SPM merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah untuk dapat mencapai 100% setiap tahunnya, diperlukan kegiatan yang dapat meningkatkan cakupan SPM sehingga dapat mencapai 100%

5 Kurang optimalnya peran serta masyarakat, lintas sektor dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Sehat;
Peran serta masyarakat, lintas sektor dan dunia usaha sangat diperlukan dalam pelaksanaan program-program bidang kesehatan dan keluarga berencana sehingga dapat terlaksana secara sinergi dan berkesinambungan

6 Belum semua masyarakat Tuban mempunyai kepesertaan Jaminan kesehatan dengan mewujudkan Kabupaten Tuban UHC;
Capaian UHC tahun 2025 bulan Juli adalah 93%, capaian ini masih belum mencapai target nasional yaitu 98%. Hal ini membutuhkan data dan anggaran yang besar untuk mencapai target yang sudah ditentukan

7 Makin banyaknya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular sebagai dampak dari pola hidup masyarakat yang tidak sehat;
Dengan meningkatnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular di masyarakat dikeranakan perubahan pola hidup dan makanan yang dikonsumsi memerlukan perhatian khusus agar masyarakat dapat secara mandiri untuk hidup sehat dan memelihara kesehataannya

8 Kurangnya akses layanan kesehatan dasar melalui Integrasi Layanan Primer dan rujukan dengan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (KJSU);
Program ILP yang merupakan perubahan layanan primer kepada masyarakat harus dilakukan mulai tahun 2024. Hal ini memerlukan kerjasama semua pihak untuk dapat disosialisasi kan dan dllaksanakan

9 Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta peningkatan profesionalisme dengan kompetensi yang terstandarisasi.;

Dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang prima mka tenaga kesehatan harus ditingkatkan kompetensinya sehingga dapat melakukan pelayana sesuai SOP

10 Kurangnya mutu dan kualitas Puskesmas, klinik dan Rumah Sakit dengan akreditasi secara berkala.

Akreditasi merupakan hal wajib dilakukan baik Puskesmas, klinik dan rumah sakit untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga di butuhkan perencanaan dan penangaran untuk persiapan dan pelaksanaan akreditasi.

11 Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Program ini merupakan program prioritas Presiden Tahun 2025-2029 yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan MBG.

2.3.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. R. Koesma

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr.R. Koesma Tahun 2025 untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat adalah penguatan pelayanan rujukan maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu dirumuskan dengan baik, seraya memperhatikan segala potensi serta peluang yang ada. Beberapa isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. R. Koesma dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Isu Prioritas Utama

a. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan gedung IPIT
b. Pembangunan gedung Casemix
c. Pengembangan pelayanan Onkologi Bedah
d. Pengadaan sarana prasarana dan alkes onkologi dan chemoterapy (ruang sitotoxic)
e. Rehabilitasi ruang rawat inap standar KRIS
f. Penambahan tenaga kesehatan operasional pelayanan intensive (Gedung IPIT)

Dari beberapa isu penting tersebut untuk menentukan urutan prioritas perencanaan pada perubahan rencana kerja tahun 2026 dapat dilakukan *scoring* sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Nilai Skala Kriteria Penentuan Isu Prioritas Rencana Kerja RSUD dr. R Koesma Tahun 2025

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pemenuhan sarana dan prasarana dan pralatan Kesehatan Gedung IPIT	20	20	20	15	20	20	20	135
2	Pembangunan Gedung Casemix	20	15	15	15	15	15	15	110
3	Pengembangan Pelayanan Onkologii Bedah	20	15	15	15	15	15	10	100
4	Pengadaan sarana prasarana dan alat Kesehatan onkologi dan chemoterapi (ruang sitotosix)	20	20	20	15	20	15	15	125
5	Rehabiliatasi ruang rawat inap standart KRIS	20	20	20	20	15	15	5	120
6	Penambahan Tenaga Kesehatan operasional pelayanan intensif (Gedung IPIT)	20	20	15	20	20	15	20	130

Tabel 2.10 Rata-rata Skor Isu –isu prioritas

No	Isu Strategis	Total Skor
(1)	(2)	(3)
1	Pemenuhan sarana dan prasarana dan pralatan Kesehatan Gedung IPIT	135
2	Penambahan Tenaga Kesehatan operasional pelayanan intensif(Gedung IPIT)	130
3	Pengadaan sarana prasarana dan alat Kesehatan onkologi dan chemoterapi (ruang sitotosix)	125
4	Rehabiliatasi ruang rawat inap standart KRIS	120
5	Pembangunan Gedung Casemix	110
6	Pengembangan Pelayanan Onkologii Bedah	100

Dari hasil perhitungan pembobotan Isu-isu tersebut maka prioritasnya sbb :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana dan peralatan Kesehatan Gedung IPIT

   Gedung IPIT merupakan Gedung baru yang ada di RSUD dr. R. Koesma yang mana masih membutuhkan sarana dan prasarana . Sarana dan prasarana Kesehatan merupakan salah satu factor penentu kualitas pelayanan Kesehatan bagi masyarakat.

2. Penambahan Tenaga Kesehatan operasional pelayanan intensif (Gedung IPIT)

   Seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, jumlah pasien yang dilayani juga

meningkat menyebabkan beban kerja tenaga Kesehatan bertambah sehingga diperlukan penambahan tenaga untuk menjaga kualitas pelayanan di gedung IPIT RSUD dr. R Koesma nantinya.

3. Pengadaan sarana prasarana dan alat Kesehatan onkologi dan chemoterapi (ruang sitotosix)

   Saat ini RSUD dr. R. Koesma sedang merehabilitasi ruang citotosix yang merupakan ruangan khusus yang dirancang untuk menangani obat – obatan citotosix yang digunakan dalam pengobatan kanker, dengan tujuan utama melindungi petugas Kesehatan, pasien dan lingkungan dari paparan zat berbahaya maka diperlukan sarana prasarana dan alat kesehatan (onkologi, chemoterapi) sesuai standart.

4. Rehabiliatasi ruang rawat inap standart KRIS

   Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan sistem baru yang ditujukan untuk meratakan sistem palayanan terutama bagi pengguna BPJS Kesehatan. KRIS diterapkan disetiap rumah sakit yang akan menggantikan kelasa rawat inap 1, 2, dan 3. Seluruh rumah sakit diharuskan untuk menerapkan sistem KRIS untuk mendukung pemerataan dan keadilan layanan yang diterima oleh pasien.

5. Pembangunan Gedung Casemix

   RSUD dr. R Koesma saat ini sedang mengerjakan pembangunan gedung casmix yang bertujuan untuk meningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan Rumah Sakit melalui penerapan system casmix yang mengelompokan pasien berdasarkan diagnosis dan kebutuhan sumber daya untuk memberikan perawatan yang lebih tepat sasaran.

6. Pengembangan Pelayanan Onkologi Bedah

   Pengembangan pelayanan onkologi bedah di RSUD dr. R. Koesma sangat diperlukan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendiagnosis, mengobati dan mengelola kanker melalui prosedur pembedahan dengan focus pada hasil yang optimal bagi pasien. Terlepas dari itu selain dari segi kuantitas, aspek skill dan kompetensi tenaga kesehatan juga harus ditingkatkan melalui pelatihan. seiring perkembangan dunia kesehatan dan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;

2.3.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD R. Ali Manshur tahun 2025.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD R. Ali Manshur Tahun 2026 sesuai dengan arahan Bupati Tuban terpilih menghendaki sebagai fasilitas kesehatan rujukan maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara baik dengan memperhatikan segala potensi serta peluang yang ada.

Beberapa isu penting yang terkait dengan penyelenggaran tugas dan fungsi RSUD R. Ali Manshur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih belum terpenuhinya standarisasi Rumah Sakit Rujukan;
2. Masih belum terpenuhinya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai dengan kemenkes
3. Masih belum terpenuhinya 24 Kompetensi rumah sakit sesuai kemenkes baik secara SPA dan SDM
4. Kurangnya luasan lahan rumah sakit guna pengembangan rumah sakit ;
5. Kurangnya pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan trasformasi digital dalam pelayanan;
6. Masih kurangnya Pelayanan Kegiatan Promotif baik internal maupun eksternal;
7. Masih kurangnya jenis pelayanan Medis Spesialisdan Pelayanan Penunjang;
8. Masih belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit;
9. Masih belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai standar dan Peningkatan kompetensi Petugas.
10. Belum optimalnya Remunerasi untuk tercapainya kesejahteraan karyawan

Dari beberapa isu penting tersebut untuk menentukan urutan prioritas perencanaan pada perubahan rencana kerja tahun 2025 dapat dilakukan *scoring* sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.11 Nilai Skala Kriteria Penentuan Isu Prioritas Rencana Kerja RSUD R. Ali Manshur Tahun 2025

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Masih belum terpenuhinya standarisasi Rumah Sakit Rujukan;	20	20	20	15	20	5	5	105
2	Masih belum terpenuhinya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai dengan kemenkes	20	5	15	15	15	15	15	100
3	Masih belum terpenuhinya 24 Kompetensi rumah sakit sesuai kemenkes baik secara SPA dan SDM	20	20	20	20	20	20	10	130
4	Kurangnya luasan lahan rumah sakit guna pengembangan rumah sakit ;	20	20	20	15	15	15	15	120
5	Kurangnya pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan trasformasi digital dalam pelayanan;	20	20	20	20	15	5	5	115
6	Masih kurangnya Pelayanan Kegiatan Promotif baik internal maupun eksternal;	20	5	15	15	15	15	15	100
7	Masih kurangnya jenis pelayanan Medis spesialis dan penunjang	20	20	20	20	20	20	15	135
8	Masih belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit;	20	20	20	20	20	5	5	110
9	Masih belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai standar dan Peningkatan kompetensi Petugas.	20	20	20	20	20	20	20	140
10	Belum optimalnya Remunerasi untuk tercapainya kesejahteraan karyawan	20	20	20	20	20	10	15	125

Tabel 2.12 Skor Isu-isu Prioritas

No	Isu Strategis	Total Skor
(1)	(2)	(3)
1	Masih belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai standar dan Peningkatan kompetensi Petugas.	140
2	Masih kurangnya jenis pelayanan Medis spesialis dan penunjang	135
3	Masih belum terpenuhinya 24 Kompetensi rumah sakit sesuai kemenkes baik secara SPA dan SDM	130
4	Belum optimalnya Remunerasi untuk tercapainya kesejahteraan karyawan	125
5	Kurangnya luasan lahan rumah sakit guna pengembangan rumah sakit ;	120
6	Kurangnya pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan trasformasi digital dalam pelayanan;	115

No	Isu Strategis	Total Skor
7	Masih belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit;	110
8	Masih belum terpenuhinya standarisasi Rumah Sakit Rujukan;	105
9	Masih belum terpenuhinya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai dengan kemenkes	100
10	Masih kurangnya Pelayanan Kegiatan Promotif baik internal maupun eksternal;	100

Dari hasil perhitungan pembobotan Isu-isu tersebut maka prioritasnya sbb :

1. Masih belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai standar dan Peningkatan kompetensi Petugas;

   Salah satu unsur terpenting dalam sistem penyelenggaraan rumah sakit adalah terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang memadai. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan harus menjadi fokus perhatian rumah sakit agar visi dan misi yang ditetapkan menjadi tepat guna. Terlepas dari itu selain dari segi kuantitas, aspek skill dan kompetensi tenaga kesehatan juga harus ditingkatkan melalui pelatihan. seiring perkembangan dunia kesehatan dan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih kurangnya jenis pelayanan Medis Spesialis dan Pelayanan Penunjang;.

   Keterpenuhan tenaga medis spesialis menjadi hal yang sangat krusial bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah sakit, kekurangan tenaga dokter spesialis di RSUD R. Ali Manshur yang masih belum terpenuhi tentu menjadi prioritas utama bagi manajemen RSUD R. Ali Manshur guna meningkatkan pelayanan yang berdampak pada kunjungan pasien dan pendapatan RSUD, hal ini juga harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas pelayanan penunjang;
3. Masih belum terpenuhinya 24 Kompetensi rumah sakit sesuai kemenkes baik secara SPA dan SDM;

   Pemberlakuan kebijakan baru terkait standar kompetensi rumah sakit oleh kementerian kesehatan, menuntut rumah sakit untuk dapat memenuhi 24 pelayanan dan kompetensi yang dimiliki dengan minimal pada tingkatan dasar.
4. Belum optimalnya Remunerasi untuk tercapainya kesejahteraan karyawan;

   RSUD R. Ali Manshur tetap berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan sistem remunerasi yang bisa diterima semua pihak. Saat ini telah dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan remunerasi di RSUD R. Ali Manshur. Remunerasi

diupayakan dengan pelaksanaannya berbasis pada kinerja pegawai, sehingga akan berdampak pada peningkatatan kualitas kerja pegawai di RSUD R. Ali Manshur.

5. Kurangnya luasan lahan rumah sakit guna pengembangan rumah sakit;

   Berdasarkan dengan tujuan RSUD R. Ali Manshur yakni meningkatkan jumlah layanan, maka diperlukan juga luasan lahan yang lebih luas dari kondisi saat ini. Perluasan lahan memiliki tujuan untuk menambah gedung untuk penambahan layanan.

6. Kurangnya pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dan transformasi digital dalam pelayanan;

   Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD R. Ali Manshur, khususnya untuk peningkatan rekam medik sehingga bisa diwujudkan integrasi data base rekam medik pasien yang bisa diakses oleh dokter. Penerapan Elektronik Rekam medis (ERM) di RSUD R. Ali Manshur telah dilaksanakan, namun dalam penerapannya masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem penggunaannya. Perlu koordinasi antara rekam medik dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia di instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkannya;

7. Masih belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit; Dengan berlakunya RSUD R. Ali Manshur sebagai BLUD, maka RSUD R. Ali Manshur diharapkan dapat secara bertahap mandiri memenuhi kebutuhan operasionalnya. Oleh karena itu Pengelolaan pendapatan rumah sakit perlu dilakukan secara efektif dan efisien.

8. Masih belum terpenuhinya standarisasi Rumah Sakit Rujukan;

   Sebagai salah satu fasilitas umum yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan kesehatan tingkat lanjut Rumah Sakit harus melakukan standarisasi rumah sakit rujukan. Standarisasi rumah sakit rujukan bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dapat dilayani dan menyelesaikan masalah kesehatnnya pada rumah sakit dengan paripurna yang mana hal tersebut sejalan dengan regulasi BPJS dalam rujukan berjenjang. Standarisasi rumah sakit yang dimaksud adalah meningkatkan pelayanan medis, sarana, prasarana dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan;

9. Masih belum terpenuhinya Kelas Rawat Inap Stadar (KRIS) sesuai dengan kemenkes;

   Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan sistem baru yang

ditujukan untuk meratakan sistem palayanan terutama bagi pengguna BPJS Kesehatan. KRIS diterapkan disetiap rumah sakit yang akan menggantikan kelasa rawat inap 1, 2, dan 3. Seluruh rumah sakit diharuskan untuk menerapkan sistem KRIS untuk mendukung pemrataan dan keadilan layanan yang diterima oleh pasien. RSUD R. Ali Manshur masih belum mampu menerapkan 100% sistem KRIS dalam layanan rawat inap, sehingga perlu dilakukan optimalisasi guna mewujudkan sistem KRIS;

10. Masih kurangnya Pelayanan Kegiatan Promotif baik internal maupun eksternal;
11. Kegiatan promotif rumah sakit merupakan kegiatan yang perlu dilakukan peningkatan dalam pelaksanaannya. Kegiatan promotif pelayanan kesehatan terus digencarkan dalam upaya promosi kesehatan oleh Tim PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) baik melalui media social (Instagram, Tiktok, Facebook, Wa) dan melalui kegiatan Jangkar yang secara langsung terjun ke lapangan. Diharapkan melalui kegiatan promotif baik eksternal maupun internal dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan rumah sakit.

Dengan uraian isu-isu penting baik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD R. Ali Manshur dan RSUD dr.R.Koesma di atas selaras dengan program prioritas nasional, internasional maupun daerah, sehingga rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti penurunan AKI dan KB, Tuberculosis dan UHC, 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan Dinas Kesehatan beserta unit jajaran dibawahnya dan dilakukan evaluasi dan monitoring setiap bulan, dan Suistanabel Development Goals (SDGs) dimana didalamnya terdapat tujuan pembangunan salah satunya pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, hidup sehat dan layak serta air bersih dan sanitasi yang layak telah menjadi program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026.Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Kesehatan beserta unit dibawahnya adalah dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia pelayanan kesehatan akan di tingkatkan kualitasnya dan dilaksanakan seiring dengan perubahan transformasi digital dan perubahan kebijakan terhadap program kegiatan sesuai program nasional.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD

2.4.1 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Dalam melakukan telaah terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dilakukan berdasarkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Tuban dan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban dan juga tingkat Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Reviuw terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja Program /kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban berdasarakan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tuban berupa rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Reviuw ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandigan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan keuangan negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam pendejatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar merupakan alternatif terbaik yang ,mencakup kegiatan-kegiatan yang mencermikan alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian rencana program,

Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya kebutuhan konseptual.

Tabel 2.13

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban (Tabel TC 31)

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	387.110.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	387.110.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	121.838.704,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	121.838.704,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	109.962.400,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	109.962.400,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	22.971.580,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	22.971.580,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	151.305.992.181,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	151.305.992.181,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2600 Orang/bulan	143.215.781.198,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2600 Orang/bulan	143.215.781.198,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	187.147.834,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	187.147.834,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.313.885,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.313.885,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian (Layanan)	2 Layanan	915.699.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian (Layanan)	2 Layanan	915.699.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	6 layanan	399.665.450,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	6 layanan	399.665.450,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.909.860,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.909.860,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	116.317.719,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	116.317.719,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	102.703.350,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	102.703.350,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.399.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.399.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.300.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.300.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	46.226.623,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	46.226.623,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang Milik Daerah	4 Jenis	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang Milik Daerah	4 Jenis	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	205.978.427,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	205.978.427,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 paket	830.928.450,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 paket	830.928.450,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	390.671.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	390.671.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	46.771.450,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	46.771.450,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	243.857.252,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	243.857.252,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 jenis	229.385.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 jenis	229.385.300,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	139.662.543,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	139.662.543,00	
	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	6.600.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	6.600.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	17.635.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	17.635.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	121.875.300,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	121.875.300,00	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Prosentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10.08 13.41 183.23 7 89.70 89.9 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Prosentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10.08 13.41 183.23 7 89.70 89.9 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin dan bmhp sesuai standar Persentase puskesmas dengan SPA kesehatan sesuai standar Proporsi Faskes dengan Perbekalan Kesehatan sesuai standar Proporsi Faskes sesuai standar	27 % 39.39 % 83 % 85 %	31.816.166.050,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin dan bmhp sesuai standar Persentase puskesmas dengan SPA kesehatan sesuai standar Proporsi Faskes dengan Perbekalan Kesehatan sesuai standar Proporsi Faskes sesuai standar	27 % 39.39 % 83 % 85 %	31.816.166.050,00	
	Pembangunan Puskesmas					Pembangunan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Bangilan, Ngrojo Kab. Tuban, Parengan, Wukirharjo Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo Kab. Tuban, Semanding, Bejagung Kab. Tuban, Palang, Payuran Kab. Tuban, Palang, Kradenan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	6 Unit	11.496.950.000,00		Kab. Tuban, Bangilan, Ngrojo Kab. Tuban, Parengan, Wukirharjo Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo Kab. Tuban, Semanding, Bejagung Kab. Tuban, Palang, Payuran	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	6 Unit	11.496.950.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							Kab. Tuban, Palang, Kradenan				
	Pengembangan Puskesmas					Pengembangan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	701.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	701.000.000,00	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	499.951.275,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	499.951.275,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	2.836.851.044,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	2.836.851.044,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	960 Unit	568.247.073,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	960 Unit	568.247.073,00	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	135 Paket	17.743.628.106,50		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	135 Paket	17.743.628.106,50	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	240 Keluarga	13.200.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	240 Keluarga	13.200.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Angka Stil Birth Jumlah Peserta JKN yang dibiayai Pemda Persentase anak usia 6-23 bln mendapatkan MP ASI Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan Persentase Fasyankes terakreditasi Paripurna Persentase Kualitas Udara dalam Rumah tangga yang memenuhi syarat Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentasepelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan orangdengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar Persentase Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Persentase Tempat Fasilits Umum Prioritas yang memenuhi syarat Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tingkat Kepuasan Pasien di Faskes	100 % 1,93 (30 JIWA/15570* per 1.000 Kelahiran 30 % 65 % 71542 Jiwa 73 % 79 % 83.73 % 90.60 %	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Angka Stil Birth Jumlah Peserta JKN yang dibiayai Pemda Persentase anak usia 6-23 bln mendapatkan MP ASI Persentase Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan Persentase Fasyankes terakreditasi Paripurna Persentase Kualitas Udara dalam Rumah tangga yang memenuhi syarat Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentasepelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan orangdengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar Persentase Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Persentase Tempat Fasilits Umum Prioritas yang memenuhi syarat Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tingkat Kepuasan Pasien di Faskes	100 % 1,93 (30 JIWA/15570* per 1.000 Kelahiran 30 % 65 % 71542 Jiwa 73 % 79 % 83.73 % 90.60 %	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16392 Orang	471.721.700,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16392 Orang	471.721.700,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16392 Orang	102.176.700,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16392 Orang	102.176.700,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15570 Orang	439.586.333,33		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15570 Orang	439.586.333,33	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63116 Orang	2.044.800,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63116 Orang	2.044.800,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146532 Orang	7.656.100,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146532 Orang	7.656.100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	790148 Orang	5.619.500,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	790148 Orang	5.619.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	192160 Orang	110.468.100,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	192160 Orang	110.468.100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79254 Orang	29.160.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79254 Orang	29.160.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17832 Orang	12.739.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17832 Orang	12.739.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2340 Orang	6.616.500,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2340 Orang	6.616.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14781 Orang	18.477.500,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14781 Orang	18.477.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18492 Orang	18.280.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18492 Orang	18.280.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	7.970.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	7.970.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	5.718.420.100,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	5.718.420.100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	19.434.650,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	19.434.650,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	52.994.320,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	52.994.320,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	72.879.350,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	72.879.350,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10 Dokumen	3.897.080,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10 Dokumen	3.897.080,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	80.162.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	80.162.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	5.621.500,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	5.621.500,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24 Dokumen	39.624.208.760,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24 Dokumen	39.624.208.760,00	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	184.130.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	184.130.000,00	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	39.187.550,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	39.187.550,00	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	22.797.450,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	22.797.450,00	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	185 Dokumen	243.031.942,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	185 Dokumen	243.031.942,00	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	43 Unit	268.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	43 Unit	268.000.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2737 Orang	2.600.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2737 Orang	2.600.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	2.600.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	2.600.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	3.280.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	3.280.000,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	634.071.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	634.071.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase SIK yang di-integrasikan dengan SIKN Proporsi Fasyankes Terintegrasi SIKN	33,30 % 54,96 %	10.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase SIK yang di-integrasikan dengan SIKN Proporsi Fasyankes Terintegrasi SIKN	33,30 % 54,96 %	10.000.000,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	35 Dokumen	8.040.180,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	35 Dokumen	8.040.180,00	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase RS dengan kompetensi penanganan 10 penyakit prioritas	50 %	159.317.850,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase RS dengan kompetensi penanganan 10 penyakit prioritas	50 %	159.317.850,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	54 Unit	5.010.925,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	54 Unit	5.010.925,00	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	54 Unit	9.870.600,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	54 Unit	9.870.600,00	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	85 Unit	72.639.400,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	85 Unit	72.639.400,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Bidang Kesehatan yang meningkat kompetensinya	10 %	813.571.967,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Bidang Kesehatan yang meningkat kompetensinya	10 %	813.571.967,00	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	100 %	10.000.000,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	100 %	10.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	6.532.467,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	6.532.467,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi SDM kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	100 % 1.55 per 1000 penduduk 52 %	167.069.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi SDM kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	100 % 1.55 per 1000 penduduk 52 %	167.069.000,00	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	9.427.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	9.427.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	6 Orang	199.405.500,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	6 Orang	199.405.500,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	102.069.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	102.069.000,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	16.36 %	540.928.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	16.36 %	540.928.000,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	74 Orang	496.138.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	74 Orang	496.138.000,00	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	100 43,5 % %	169.680.076,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	100 43,5 % %	169.680.076,00	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase pelayanan kefarmasian sesuai standar	100 % 45 %	10.000.000,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase pelayanan kefarmasian sesuai standar	100 % 45 %	10.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40 Dokumen	4.654.576,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40 Dokumen	4.654.576,00	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase sertifikat industri rumah tangga pangan yang diterbitkan	88.89 %	167.963.000,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase sertifikat industri rumah tangga pangan yang diterbitkan	88.89 %	167.963.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	132 Dokumen	158.238.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	132 Dokumen	158.238.000,00	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Presentase sarana yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dan disampling Produknya	39 %	10.000.000,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Presentase sarana yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dan disampling Produknya	39 %	10.000.000,00	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit	6.787.500,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit	6.787.500,00	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Posyandu Aktif	67,99 %	0,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Posyandu Aktif	67,99 %	0,00	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	314.954.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	314.954.000,00	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan preventif dan promotif yang dilaksanakan Persentase promosi kesehatan yang dilaksanakan	100 %	50.000.000,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan preventif dan promotif yang dilaksanakan Persentase promosi kesehatan yang dilaksanakan	100 %	50.000.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	168.109.500,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	168.109.500,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase UKBM yang dibina	89,91 %	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase UKBM yang dibina	89,91 %	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	55.750.200,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	55.750.200,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Total Fertility Rate	1,9 orang	442.711.150,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Total Fertility Rate	1,9 orang	442.711.150,00	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (ASFR 15-19) Prosentase Pendidikan formal non formal Yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan (SSK)	1 % 15,50 %	30.000.000,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (ASFR 15-19) Prosentase Pendidikan formal non formal Yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan (SSK)	1 % 15,50 %	30.000.000,00	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal					Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	17.921.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	17.921.000,00	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan	5 pilar	429.400.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan	5 pilar	429.400.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	100.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	100.000.000,00	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	159.400.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	159.400.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semua Kel/Desa				
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	160.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	160.000.000,00	
	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain					Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	328 Unit	5.390.150,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	328 Unit	5.390.150,00	
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	75,50 %	6.845.905.000,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	75,50 %	6.845.905.000,00	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Prosentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK	17 %	1.547.250.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Prosentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK	17 %	1.547.250.000,00	
	Pengendalian Program KKBPK					Pengendalian Program KKBPK					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	4.100.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	4.100.000,00	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20 Laporan	880.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20 Laporan	880.000.000,00	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 Laporan	300.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 Laporan	300.000.000,00	
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	75.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	75.000.000,00	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	43.500.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	43.500.000,00	
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40 Organisasi	250.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40 Organisasi	250.000.000,00	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Prevalensi Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	7 %	1.796.700.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Prevalensi Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	7 %	1.796.700.000,00	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2028 Orang	984.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2028 Orang	984.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47 unit	2.144.705.000,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47 unit	2.144.705.000,00	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47 Laporan	14.100.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47 Laporan	14.100.000,00	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4500 Orang	2.100.055.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4500 Orang	2.100.055.000,00	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33 Laporan	25.550.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33 Laporan	25.550.000,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Prosentase Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	40 %	2.169.600.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Prosentase Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	40 %	2.169.600.000,00	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	1.413.600.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	1.413.600.000,00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	135 Kampung	756.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	135 Kampung	756.000.000,00	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)	21 tahun	7.097.281.689,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)	21 tahun	7.097.281.689,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	60 %	196.500.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	60 %	196.500.000,00	
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan / Dokumen	9.600.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan / Dokumen	9.600.000,00	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	822.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	822.000.000,00	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130.000.000,00	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	35 Orang	10.300.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	35 Orang	10.300.000,00	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	328 Orang	4.496.689,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	328 Orang	4.496.689,00	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	15 Kelompok	29.085.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	15 Kelompok	29.085.000,00	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan		Persentase Calon Pengantin yang mendapat edukasi pra nikah Persentase Keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 HPK	82 % 93 %	6.091.800.000,00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah		Persentase Calon Pengantin yang mendapat edukasi pra nikah Persentase Keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 HPK	82 % 93 %	6.091.800.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	2.769.000.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	2.769.000.000,00	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	3.322.800.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	3.322.800.000,00	
	RSUD dr. R. KOESMA					RSUD dr. R. KOESMA					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (RSUD Dr.R.Koesma)	83.5 poin	247.596.987.664,81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (RSUD Dr.R.Koesma)	83.5 poin	247.596.987.664,81	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang Sesuai Standar	14 Dokumen	0,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang Sesuai Standar	14 Dokumen	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	641 Orang/bulan	0,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	641 Orang/bulan	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	707 Orang	374.003.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	707 Orang	374.003.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	707 Paket	0,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	707 Paket	0,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Capaian Indikator mutu prioritas rumah sakit Capaian indikator nasional mutu	81.81 poin 92.30 poin	206.786.174.090,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Capaian Indikator mutu prioritas rumah sakit Capaian indikator nasional mutu	81.81 poin 92.30 poin	206.786.174.090,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 0	247.596.987.664,81		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 0	247.596.987.664,81	
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase faskes lanjutan dengan SPA (Service Provision Assessment) kesehatan sesuai Standart	89,1 %	1.289.103.800,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase faskes lanjutan dengan SPA (Service Provision Assessment) kesehatan sesuai Standart	89,1 %	1.289.103.800,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	3.700.036.800,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	3.700.036.800,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	28 Unit	1.000.036.800,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	28 Unit	1.000.036.800,00	
	Pengembangan Rumah Sakit					Pengembangan Rumah Sakit					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	289.067.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	289.067.000,00	
	RSUD R. ALI MANSHUR					RSUD R. ALI MANSHUR					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Maysarakat Persentase indikator Mutu Nasional RS	86.1 92.3 Nilai %	18.950.059.080,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Maysarakat Persentase indikator Mutu Nasional RS	86.1 92.3 Nilai %	18.950.059.080,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Capaian indikator mutu pelayanan medis Persentase Capaian indikator mutu pelayanan penunjang	75 % 76.67 %	18.400.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Capaian indikator mutu pelayanan medis Persentase Capaian indikator mutu pelayanan penunjang	75 % 76.67 %	18.400.000.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	18.950.059.080,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	18.950.059.080,00	
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase faskes lanjutan dengan SPA (Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan) kesehatan sesuai Standart	69,57 %	34.535.858.216,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase faskes lanjutan dengan SPA (Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan) kesehatan sesuai Standart	69,57 %	34.535.858.216,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cost Recovery Rate (CRR)	105.14 %	21.330.288.960,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cost Recovery Rate (CRR)	105.14 %	21.330.288.960,00	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	8.283.088.960,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	8.283.088.960,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	33 Unit	19.733.109.756,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	33 Unit	19.733.109.756,00	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	19 Paket	2.572.683.500,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	19 Paket	2.572.683.500,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kecukupan SDM Terhadap ABK	72 %	4.229.411.040,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kecukupan SDM Terhadap ABK	72 %	4.229.411.040,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					Operasional Pelayanan Rumah Sakit					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	22 Dokumen	3.946.976.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	22 Dokumen	3.946.976.000,00	
	PUSKESMAS KENDURUAN					PUSKESMAS KENDURUAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Point	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Point	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Realisasi Belanja BLUD	99.63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Realisasi Belanja BLUD	99.63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.436.407.201,55		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.436.407.201,55	
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Insiden HIV Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	0.17 10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 per 1000 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Insiden HIV Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	0.17 10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 per 1000 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	85,97 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		Nilai IKM Puskesmas External	85,97 Nilai	72.567.965.431,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	385 Orang	121.964.600,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	385 Orang	121.964.600,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2735 Orang	35.033.664,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2735 Orang	35.033.664,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4548 Orang	2.814.912,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4548 Orang	2.814.912,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	16.420.320,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	16.420.320,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	522 Orang	9.774.000,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	522 Orang	9.774.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	209.718.736,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	209.718.736,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.720.224,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.720.224,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	31.040.244,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	31.040.244,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	8.111.184,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	8.111.184,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	370 Orang	703.728,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	370 Orang	703.728,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	111.569.572,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	111.569.572,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	153.050.066,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	153.050.066,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	13.484.952,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	13.484.952,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	84 Dokumen	351.864,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	84 Dokumen	351.864,00	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	60 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	60 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	9.808.934,00		Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	9.808.934,00	
	PUSKESMAS BANGILAN					PUSKESMAS BANGILAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Point	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Point	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.579.349.685,33		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.579.349.685,33	
17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89.90 % Jiwa per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89.90 % Jiwa per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	88,72 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	88,72 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	646 Orang	131.980.912,00		Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	646 Orang	131.980.912,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6525 Orang	38.582.592,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6525 Orang	38.582.592,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7791 Orang	4.480.000,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7791 Orang	4.480.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	10.321.344,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	10.321.344,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	574 Orang	6.947.904,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	574 Orang	6.947.904,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	207.634.752,00		Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	207.634.752,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.127.680,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.127.680,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	15.680.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	15.680.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	38.939.376,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	38.939.376,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1450 Orang	938.304,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1450 Orang	938.304,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	104.325.720,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	104.325.720,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	166.294.000,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	166.294.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	18.536.840,00		Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	18.536.840,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	234.576,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	234.576,00	
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	207 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	207 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.075.000,00		Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.075.000,00	
	PUSKESMAS SENORI					PUSKESMAS SENORI					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KABUPATEN/KOTA					KABUPATEN/KOTA					
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.953.298.938,37		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.953.298.938,37	
20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 5 % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 5 % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86,40 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86,40 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang	62.820.000,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang	62.820.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5530 Orang	71.910.280,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5530 Orang	71.910.280,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6824 Orang	34.560.000,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6824 Orang	34.560.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79 Orang	3.753.216,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79 Orang	3.753.216,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	503 Orang	390.960,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	503 Orang	390.960,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	187.992.000,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	187.992.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.720.000,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.720.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.656.944,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.656.944,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	118 Dokumen	44.363.328,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	118 Dokumen	44.363.328,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	91 Orang	938.304,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	91 Orang	938.304,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48 Dokumen	94.394.768,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48 Dokumen	94.394.768,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	139.946.000,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	139.946.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	2.583.000,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	2.583.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	703.200,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	703.200,00	
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	24 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	24 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	9.041.000,00		Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	9.041.000,00	
	PUSKESMAS SINGGAHAN					PUSKESMAS SINGGAHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.800.497.917,99		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.800.497.917,99	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	89,51 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	89,51 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	150.267.168,00		Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	150.267.168,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5976 Orang	20.564.496,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5976 Orang	20.564.496,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7019 Orang	31.902.336,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7019 Orang	31.902.336,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	4.691.520,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	4.691.520,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	518 Orang	1.251.072,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	518 Orang	1.251.072,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	261.300.152,00		Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	261.300.152,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.251.072,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.251.072,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	16.960.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	16.960.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	26.430.018,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	26.430.018,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	82 Orang	938.304,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	82 Orang	938.304,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	157.531.910,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	157.531.910,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	201.488.790,00		Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	201.488.790,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	35.523.184,00		Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	35.523.184,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	362.768,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	362.768,00	
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	25 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	25 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3.718.210,00		Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3.718.210,00	
	PUSKESMAS MONTONG					PUSKESMAS MONTONG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.436.620.604,39		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.436.620.604,39	
26	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	90,52 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	90,52 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287 Orang	108.750.768,00		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287 Orang	108.750.768,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2753 Orang	27.520.000,00		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2753 Orang	27.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3712 Orang	9.600.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3712 Orang	9.600.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 Orang	2.345.760,00		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 Orang	2.345.760,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	274 Orang	7.680.000,00		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	274 Orang	7.680.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	174.687.600,00		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	174.687.600,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.463.048,00		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.463.048,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56 Dokumen	9.920.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56 Dokumen	9.920.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	6.276.384,00		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	6.276.384,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	84 Orang	390.960,00		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	84 Orang	390.960,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	112.796.616,00		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	112.796.616,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	242.820.000,00		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	242.820.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	16.186.096,00		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	16.186.096,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	320.000,00		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	320.000,00	
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	72 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	72 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	11.392.768,00		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	11.392.768,00	
	PUSKESMAS JETAK					PUSKESMAS JETAK					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.574.464.376,83		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.574.464.376,83	
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	90.03 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	90.03 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	423 Orang	96.892.096,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	423 Orang	96.892.096,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3435 Orang	52.480.000,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3435 Orang	52.480.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5290 Orang	4.480.000,00		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5290 Orang	4.480.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang	4.691.520,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang	4.691.520,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang	10.768.128,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang	10.768.128,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	194.817.344,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	194.817.344,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.251.072,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.251.072,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	15.680.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	15.680.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	33.756.384,00		Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	33.756.384,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	77 Orang	1.094.688,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	77 Orang	1.094.688,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	93.200.488,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	93.200.488,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	141.093.000,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	141.093.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	26.424.896,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	26.424.896,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	156.384,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	156.384,00	
30	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	60 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	60 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	16.835.000,00		Kab. Tuban, Montong, Jetak	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	16.835.000,00	
	PUSKESMAS PARENGAN					PUSKESMAS PARENGAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.844.275.605,88		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.844.275.605,88	
32	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89.90 % % per 100.000 per 1000 % Jiwa	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89.90 % % per 100.000 per 1000 % Jiwa	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	88,90 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	88,90 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	392 Orang	119.470.320,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	392 Orang	119.470.320,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2860 Orang	12.706.200,00		Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2860 Orang	12.706.200,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4710 Orang	12.800.000,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4710 Orang	12.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	51 Orang	3.284.064,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	51 Orang	3.284.064,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	503 Orang	17.601.120,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	503 Orang	17.601.120,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	226.980.360,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	226.980.360,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	781.920,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	781.920,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	16.640.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	16.640.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	19.453.728,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	19.453.728,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	65 Orang	1.563.840,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	65 Orang	1.563.840,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	112.491.152,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	112.491.152,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	162.746.520,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	162.746.520,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	36.873.112,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	36.873.112,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	120 Dokumen	547.344,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	120 Dokumen	547.344,00	
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	102 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	102 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	7.483.320,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	7.483.320,00	
	PUSKESMAS PONCO					PUSKESMAS PONCO					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.649.746.522,05		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.649.746.522,05	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
35	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89.90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89.90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	346 Orang	90.135.648,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	346 Orang	90.135.648,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2641 Orang	13.527.216,00		Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2641 Orang	13.527.216,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4283 Orang	10.240.000,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4283 Orang	10.240.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	3.753.216,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	3.753.216,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	316 Orang	16.270.272,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	316 Orang	16.270.272,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	190.661.608,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	190.661.608,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.032.992,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.032.992,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	15.680.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	15.680.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	13.772.464,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	13.772.464,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	2.502.144,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	2.502.144,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	93.168.264,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	93.168.264,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	137.161.000,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	137.161.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	22.086.688,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	22.086.688,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	120 Dokumen	397.488,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	120 Dokumen	397.488,00	
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BIDANG KESEHATAN					BIDANG KESEHATAN					
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	20 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	20 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8 Dokumen	16.589.000,00		Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8 Dokumen	16.589.000,00	
	PUSKESMAS SOKO					PUSKESMAS SOKO					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.375.135.179,99		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.375.135.179,99	
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	85 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	85 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	683 Orang	146.102.424,00		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	683 Orang	146.102.424,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5337 Orang	26.634.321,00		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5337 Orang	26.634.321,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8198 Orang	12.197.952,00		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8198 Orang	12.197.952,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	4.691.520,00		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	4.691.520,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	625 Orang	23.992.080,00		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	625 Orang	23.992.080,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	225.356.864,00		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	225.356.864,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.362.256,00		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.362.256,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	15.680.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	15.680.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.346.191,00		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.346.191,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	328 Orang	4.691.520,00		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	328 Orang	4.691.520,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	112.236.729,00		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	112.236.729,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	173.009.000,00		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	173.009.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11.429.095,00		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11.429.095,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	234.576,00		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	234.576,00	
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	0 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	0 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	12.995.472,00		Kab. Tuban, Soko, Sokosari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	12.995.472,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG					PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.058.169.972,89		Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.058.169.972,89	
41	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	91,50 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	91,50 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	63.617.616,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	63.617.616,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4038 Orang	31.745.952,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4038 Orang	31.745.952,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5354 Orang	28.200.000,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5354 Orang	28.200.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	10.477.728,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	10.477.728,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	468 Orang	2.032.992,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	468 Orang	2.032.992,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	190.985.600,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	190.985.600,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13 Dokumen	15.853.912,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13 Dokumen	15.853.912,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	30.080.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	30.080.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	4.561.500,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	4.561.500,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	100.882.508,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	100.882.508,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	136.272.000,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	136.272.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	3.910.192,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	3.910.192,00	
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	10 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	10 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3.325.000,00		Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3.325.000,00	
	PUSKESMAS RENGEL					PUSKESMAS RENGEL					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Realisasi Belanja BLUD	90 % 99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Realisasi Belanja BLUD	90 % 99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Rengel, Sumberejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.597.345.695,66		Kab. Tuban, Rengel, Sumberejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.597.345.695,66	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
44	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	89,90 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	89,90 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang	73.282.616,00		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang	73.282.616,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4920 Orang	54.051.520,00		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4920 Orang	54.051.520,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6716 Orang	5.885.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6716 Orang	5.885.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	9.383.040,00		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	9.383.040,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang	13.960.392,00		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang	13.960.392,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179.956.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179.956.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	3.540.336,00		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	3.540.336,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44 Dokumen	7.680.022,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44 Dokumen	7.680.022,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	24.517.190,00		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	24.517.190,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	860.112,00		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	860.112,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	95.792.396,00		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	95.792.396,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Rengel, Sumberejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	139.819.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Sumberejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	139.819.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	28.457.416,00		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	28.457.416,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	74 Dokumen	390.960,00		Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	74 Dokumen	390.960,00	
45	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	62 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	62 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.238.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.238.000,00	
	PUSKESMAS PRAMBON WETAN					PUSKESMAS PRAMBON WETAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.062.088.895,62		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.062.088.895,62	
47	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk		Nilai IKM Puskesmas External	94 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan		Nilai IKM Puskesmas External	94 Nilai	72.567.965.431,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	86.649.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	86.649.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3333 Orang	31.109.600,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3333 Orang	31.109.600,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3050 Orang	4.800.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3050 Orang	4.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	4.691.520,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	4.691.520,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	225 Orang	3.100.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	225 Orang	3.100.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	135.965.600,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	135.965.600,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	860.112,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	860.112,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 Dokumen	11.840.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 Dokumen	11.840.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.050.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.050.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	88.679.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	88.679.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	185.611.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	185.611.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13.300.168,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13.300.168,00	
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	33 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	33 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.483.000,00		Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.483.000,00	
	PUSKESMAS GRABAGAN					PUSKESMAS GRABAGAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.307.435.601,94		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.307.435.601,94	
50	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 7 89,70 89,90 Jiwa % per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 7 89,70 89,90 Jiwa % per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86,21 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86,21 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458 Orang	76.660.232,00		Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458 Orang	76.660.232,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3565 Orang	33.740.560,00		Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3565 Orang	33.740.560,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6505 Orang	25.850.000,00		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6505 Orang	25.850.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	76 Orang	5.160.672,00		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	76 Orang	5.160.672,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	480 Orang	7.040.000,00		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	480 Orang	7.040.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	227.216.000,00		Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	227.216.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	4.233.216,00		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	4.233.216,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56 Dokumen	13.760.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56 Dokumen	13.760.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	15.120.000,00		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	15.120.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	124.444.000,00		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36 Dokumen	124.444.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	148.648.000,00		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	148.648.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	28.140.336,00		Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	28.140.336,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	972.984,00		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	972.984,00	
51	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						BIDANG KESEHATAN					
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	80 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	80 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	14.108.000,00		Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	14.108.000,00	
	PUSKESMAS PLUMPANG					PUSKESMAS PLUMPANG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.604.096.925,69		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.604.096.925,69	
53	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	88,30 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	88,30 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang	98.657.304,00		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang	98.657.304,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4283 Orang	24.143.712,00		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4283 Orang	24.143.712,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8648 Orang	3.520.000,00		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8648 Orang	3.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	10.321.344,00		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	10.321.344,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	981.384,00		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	981.384,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	205.877.848,00		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	205.877.848,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	19.987.792,00		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	19.987.792,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	41.221.032,00		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	41.221.032,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	312.768,00		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	312.768,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	132 Orang	13.605.408,00		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	132 Orang	13.605.408,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	122.201.816,00		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	122.201.816,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	155.445.000,00		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	155.445.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	36.776.592,00		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	36.776.592,00	
54	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	0 orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	0 orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	11.730.000,00		Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	11.730.000,00	
	PUSKESMAS KLOTOK					PUSKESMAS KLOTOK					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.675.666.895,96		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.675.666.895,96	
56	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	88,50 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	88,50 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	396 Orang	78.233.952,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	396 Orang	78.233.952,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3203 Orang	27.520.000,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3203 Orang	27.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4477 Orang	2.240.000,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4477 Orang	2.240.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	15.012.864,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	15.012.864,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	483 Orang	2.541.240,00		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	483 Orang	2.541.240,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157.679.448,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157.679.448,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13 Dokumen	4.480.000,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13 Dokumen	4.480.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12.480.440,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12.480.440,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen	1.670.960,00		Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen	1.670.960,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	97.937.360,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	97.937.360,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	113.876.040,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	113.876.040,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36 Dokumen	2.141.736,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36 Dokumen	2.141.736,00	
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						BIDANG KESEHATAN					
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	25 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	25 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.440.960,00		Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.440.960,00	
	PUSKESMAS WIDANG					PUSKESMAS WIDANG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.998.445.962,28		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.998.445.962,28	
59	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	90,85 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	90,85 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	443 Orang	68.490.000,00		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	443 Orang	68.490.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3197 Orang	36.320.000,00		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3197 Orang	36.320.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5543 Orang	25.600.000,00		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5543 Orang	25.600.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	9.383.040,00		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	9.383.040,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	408 Orang	3.950.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	408 Orang	3.950.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	175.563.760,00		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	175.563.760,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	7.520.000,00		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	7.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	11.200.000,00		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	11.200.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.850.000,00		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.850.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	65 Orang	1.563.840,00		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	65 Orang	1.563.840,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	99.429.000,00		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	99.429.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	178.612.536,00		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	178.612.536,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10.634.688,00		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10.634.688,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	273.672,00		Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	273.672,00	
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	30 orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	30 orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.008.464,00		Kab. Tuban, Widang, Widang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.008.464,00	
	PUSKESMAS COMPRENG					PUSKESMAS COMPRENG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	856.895.873,94		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	856.895.873,94	
62	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	87,15 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	87,15 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	249 Orang	57.433.800,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	249 Orang	57.433.800,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1881 Orang	21.288.128,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1881 Orang	21.288.128,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2957 Orang	15.360.000,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2957 Orang	15.360.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	2.814.912,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	2.814.912,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	218 Orang	5.760.000,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	218 Orang	5.760.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	178.400.000,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	178.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.111.184,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.111.184,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44 Dokumen	16.320.000,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44 Dokumen	16.320.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	10.280.000,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	10.280.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	938.304,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	938.304,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	92.872.000,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	92.872.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	263.336.000,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	263.336.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	35.543.672,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	35.543.672,00	
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	59 orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	59 orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.746.000,00		Kab. Tuban, Widang, Compreng	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.746.000,00	
	PUSKESMAS PALANG					PUSKESMAS PALANG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.038.279.991,90		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.038.279.991,90	
65	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	85,60 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	85,60 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	711 Orang	116.240.720,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	711 Orang	116.240.720,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5795 Orang	21.120.000,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5795 Orang	21.120.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7672 Orang	4.700.000,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7672 Orang	4.700.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	1.876.608,00		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	1.876.608,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	565 Orang	5.120.000,00		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	565 Orang	5.120.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	173.195.984,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	173.195.984,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.094.688,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.094.688,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	6.240.000,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	6.240.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	10.647.676,00		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	10.647.676,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	696 Orang	938.304,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	696 Orang	938.304,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	115.430.324,00		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	115.430.324,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	133.411.000,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	133.411.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	23.072.000,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	23.072.000,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	655.696,00		Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	655.696,00	
66	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	96 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	96 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	7.666.000,00		Kab. Tuban, Palang, Palang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	7.666.000,00	
	PUSKESMAS SUMURGUNG					PUSKESMAS SUMURGUNG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
67	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.730.342.562,39		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.730.342.562,39	
68	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk		Nilai IKM Puskesmas External	88 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan		Nilai IKM Puskesmas External	88 Nilai	72.567.965.431,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	549 Orang	71.979.516,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	549 Orang	71.979.516,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4254 Orang	40.447.456,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4254 Orang	40.447.456,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6134 Orang	5.760.000,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6134 Orang	5.760.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang	1.407.456,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang	1.407.456,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	542 Orang	11.007.456,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	542 Orang	11.007.456,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	158.221.000,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	158.221.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13 Dokumen	5.183.728,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13 Dokumen	5.183.728,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	9.058.528,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	9.058.528,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	5.387.456,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	5.387.456,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	72 Orang	2.111.184,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	72 Orang	2.111.184,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	96.021.560,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	96.021.560,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	118.243.000,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	118.243.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	19.204.276,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	19.204.276,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	72 Dokumen	156.384,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	72 Dokumen	156.384,00	
69	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	10 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	10 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.026.000,00		Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.026.000,00	
	PUSKESMAS SEMANDING					PUSKESMAS SEMANDING					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.886.827.408,98		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.886.827.408,98	
71	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	91,60 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	91,60 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	804 Orang	105.477.648,00		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	804 Orang	105.477.648,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7076 Orang	35.520.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7076 Orang	35.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9727 Orang	14.400.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9727 Orang	14.400.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	113 Orang	3.127.680,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	113 Orang	3.127.680,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	717 Orang	8.214.912,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	717 Orang	8.214.912,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	237.150.368,00		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	237.150.368,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36 Dokumen	1.251.072,00		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36 Dokumen	1.251.072,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Dokumen	14.080.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Dokumen	14.080.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	108 Dokumen	8.939.376,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	108 Dokumen	8.939.376,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	139.812.712,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	139.812.712,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	164.313.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	164.313.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	31.519.464,00		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	31.519.464,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	312.768,00		Kab. Tuban, Semanding,	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	312.768,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							Semua Kel/Desa				
72	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	120 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	120 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.289.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.289.000,00	
	PUSKESMAS WIRE					PUSKESMAS WIRE					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.117.321.378,75		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.117.321.378,75	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
74	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	85,70 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	85,70 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	743 Orang	159.400.896,00		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	743 Orang	159.400.896,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4571 Orang	25.682.704,00		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4571 Orang	25.682.704,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8508 Orang	5.004.288,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8508 Orang	5.004.288,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	99 Orang	5.004.288,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	99 Orang	5.004.288,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	626 Orang	7.040.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	626 Orang	7.040.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	220.086.704,00		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	220.086.704,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	5.414.008,00		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	5.414.008,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44 Dokumen	25.280.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44 Dokumen	25.280.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	11.370.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	11.370.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10022 Orang	938.304,00		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10022 Orang	938.304,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	130.202.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	130.202.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	170.843.000,00		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	170.843.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12.796.968,00		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12.796.968,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	74 Dokumen	312.768,00		Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	74 Dokumen	312.768,00	
75	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	86 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	86 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	6.899.072,00		Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	6.899.072,00	
	PUSKESMAS TUBAN					PUSKESMAS TUBAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.257.570.795,40		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.257.570.795,40	
77	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk		Nilai IKM Puskesmas External	90,37 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan		Nilai IKM Puskesmas External	90,37 Nilai	72.567.965.431,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	851 Orang	83.340.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	851 Orang	83.340.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidomulyo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10334 Orang	43.040.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidomulyo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10334 Orang	43.040.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8886 Orang	4.378.752,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8886 Orang	4.378.752,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	7.037.280,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	7.037.280,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	541 Orang	3.127.680,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	541 Orang	3.127.680,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	183.800.848,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	183.800.848,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.825.760,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	2.825.760,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	14.400.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	14.400.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	12.442.032,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	12.442.032,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidomulyo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6234 Orang	1.407.456,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidomulyo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6234 Orang	1.407.456,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	106.858.288,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	106.858.288,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	136.701.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	136.701.000,00	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	8.229.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	8.229.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	14.084.416,00		Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	14.084.416,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	72 Dokumen	234.576,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	72 Dokumen	234.576,00	
78	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	45 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	45 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.970.912,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.970.912,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PUSKESMAS KEBONSARI					PUSKESMAS KEBONSARI					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
79	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.114.583.275,16		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.114.583.275,16	
80	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	87,50 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	87,50 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	480 Orang	70.768.256,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	480 Orang	70.768.256,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7215 Orang	38.885.192,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7215 Orang	38.885.192,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5690 Orang	1.172.880,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5690 Orang	1.172.880,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	2.345.760,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	2.345.760,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	419 Orang	6.568.128,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	419 Orang	6.568.128,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	123.742.600,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	123.742.600,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Dokumen	4.042.032,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Dokumen	4.042.032,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56 Dokumen	13.831.108,00		Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56 Dokumen	13.831.108,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	3.631.500,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	3.631.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2694 Orang	781.920,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2694 Orang	781.920,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	76.385.264,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	76.385.264,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	295.223.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	295.223.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	4.862.000,00		Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	4.862.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36 Dokumen	9.087.248,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36 Dokumen	9.087.248,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	234.576,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	234.576,00	
81	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51.61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	46 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	46 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13 Dokumen	6.286.536,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13 Dokumen	6.286.536,00	
	PUSKESMAS JENU					PUSKESMAS JENU					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.247.392.227,39		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.247.392.227,39	
83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	98 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	98 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	810 Orang	118.797.948,00		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	810 Orang	118.797.948,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7150 Orang	42.969.260,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7150 Orang	42.969.260,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8633 Orang	5.317.056,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8633 Orang	5.317.056,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79 Orang	5.864.400,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79 Orang	5.864.400,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	500 Orang	3.569.264,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	500 Orang	3.569.264,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	223.899.400,00		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	223.899.400,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	9.435.024,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	9.435.024,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	13.760.000,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	13.760.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.672.344,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.672.344,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1058 Orang	2.345.760,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1058 Orang	2.345.760,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	128.247.392,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	128.247.392,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	163.933.000,00		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	163.933.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5.125.000,00		Kab. Tuban, Jenu, Jenu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5.125.000,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	469.152,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	469.152,00	
84	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase Rumah Tangga ber-PHB	51.61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase Rumah Tangga ber-PHB	51.61 %	792.630.584,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BIDANG KESEHATAN					BIDANG KESEHATAN					
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	310 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	310 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3.783.000,00		Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3.783.000,00	
	PUSKESMAS MERAKURAK					PUSKESMAS MERAKURAK					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.859.415.568,93		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.859.415.568,93	
86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	87 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	87 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	460 Orang	136.050.720,00		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	460 Orang	136.050.720,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3297 Orang	39.465.760,00		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3297 Orang	39.465.760,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5836 Orang	3.919.704,00		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5836 Orang	3.919.704,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	2.814.912,00		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	2.814.912,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	430 Orang	5.120.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	430 Orang	5.120.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	193.939.760,00		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	193.939.760,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.720.224,00		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.720.224,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	11.040.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	11.040.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	1.954.800,00		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	1.954.800,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	142.431.200,00		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	142.431.200,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	234.815.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	234.815.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	24.365.536,00		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	24.365.536,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	156.384,00		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	156.384,00	
87	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	45 orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	45 orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4.926.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4.926.000,00	
	PUSKESMAS TEMANDANG					PUSKESMAS TEMANDANG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.264.448.457,32		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.264.448.457,32	
89	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	89 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	89 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	303 Orang	110.161.800,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	303 Orang	110.161.800,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3529 Orang	35.874.800,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3529 Orang	35.874.800,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2558 Orang	2.880.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2558 Orang	2.880.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	2.345.760,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	2.345.760,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	288 Orang	3.520.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	288 Orang	3.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	171.653.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	171.653.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2.384.856,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2.384.856,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.000.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.000.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.700.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.700.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	737 Orang	469.152,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	737 Orang	469.152,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33 Dokumen	114.847.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33 Dokumen	114.847.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	191.221.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	191.221.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10.666.728,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10.666.728,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	299.904,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	299.904,00	
90	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	46 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	46 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.784.000,00		Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.784.000,00	
	PUSKESMAS KEREK					PUSKESMAS KEREK					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 %	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 %	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.545.305.238,66		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.545.305.238,66	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
92	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	91 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	91 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	478 Orang	83.750.000,00		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	478 Orang	83.750.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4229 Orang	65.920.000,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4229 Orang	65.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6568 Orang	6.255.360,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6568 Orang	6.255.360,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	7.037.280,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	7.037.280,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	426 Orang	2.560.000,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	426 Orang	2.560.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen	173.636.992,00		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen	173.636.992,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	3.583.728,00		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	3.583.728,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	15.353.320,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	15.353.320,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	10.400.000,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	10.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	370 Orang	1.251.072,00		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	370 Orang	1.251.072,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	113.877.680,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	113.877.680,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	141.712.680,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	141.712.680,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	28 Dokumen	14.325.666,00		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	28 Dokumen	14.325.666,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	651.902,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	651.902,00	
93	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	75 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	75 Orang	740.489.634,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2.590.320,00		Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2.590.320,00	
	PUSKESMAS GAJI					PUSKESMAS GAJI					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99.63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99.63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.631.662.411,44		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.631.662.411,44	
95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	87,34 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		Nilai IKM Puskesmas External	87,34 Nilai	72.567.965.431,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	142.753.632,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	142.753.632,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2225 Orang	8.800.000,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2225 Orang	8.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4749 Orang	640.000,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4749 Orang	640.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	3.284.064,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	3.284.064,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 Orang	2.240.000,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 Orang	2.240.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179.893.688,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179.893.688,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.329.264,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.329.264,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	14.470.960,00		Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	14.470.960,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	5.250.000,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	5.250.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3442 Orang	312.768,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3442 Orang	312.768,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	120.360.040,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	120.360.040,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	138.070.500,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	138.070.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	19.567.200,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	19.567.200,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	156.384,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	156.384,00	
96	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	41 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	41 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.365.500,00		Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.365.500,00	
	PUSKESMAS TAMBAKBOYO					PUSKESMAS TAMBAKBOYO					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.865.746.296,81		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.865.746.296,81	
98	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	90,50 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	90,50 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585 Orang	117.445.584,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585 Orang	117.445.584,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5212 Orang	40.934.224,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5212 Orang	40.934.224,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6930 Orang	11.520.000,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6930 Orang	11.520.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	7.506.432,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	7.506.432,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	511 Orang	20.125.000,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	511 Orang	20.125.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	232.733.000,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	232.733.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	7.216.720,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	7.216.720,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44 Dokumen	3.680.000,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44 Dokumen	3.680.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	32.400.000,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	32.400.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	118.975.000,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	118.975.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	172.348.000,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	172.348.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	21.350.896,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	21.350.896,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	74 Dokumen	408.144,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	74 Dokumen	408.144,00	
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	15 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	15 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	53 Dokumen	5.452.000,00		Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	53 Dokumen	5.452.000,00	
	PUSKESMAS JATIROGO					PUSKESMAS JATIROGO					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.725.585.695,42		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.725.585.695,42	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
101	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	456 Orang	107.268.192,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	456 Orang	107.268.192,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5474 Orang	41.328.800,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5474 Orang	41.328.800,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5171 Orang	2.880.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5171 Orang	2.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54 Orang	19.704.384,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54 Orang	19.704.384,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	335 Orang	3.518.640,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	335 Orang	3.518.640,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	191.631.360,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	191.631.360,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	3.518.640,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	3.518.640,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	36.480.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	36.480.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	3.237.456,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	3.237.456,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1166 Orang	1.290.168,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1166 Orang	1.290.168,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	108.173.904,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	108.173.904,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	207.146.536,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	207.146.536,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	11.668.880,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	11.668.880,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	72 Dokumen	234.576,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	72 Dokumen	234.576,00	
102	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	42 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	42 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	42 Dokumen	4.117.464,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	42 Dokumen	4.117.464,00	
	PUSKESMAS KEBONHARJO					PUSKESMAS KEBONHARJO					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	983.811.629,75		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	983.811.629,75	
104	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk		Nilai IKM Puskesmas External	91,55 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan		Nilai IKM Puskesmas External	91,55 Nilai	72.567.965.431,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	100.330.688,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	100.330.688,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1938 Orang	25.440.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1938 Orang	25.440.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4118 Orang	5.760.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4118 Orang	5.760.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	3.127.680,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	3.127.680,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	304 Orang	320.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	304 Orang	320.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	176.462.728,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	176.462.728,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.440.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.440.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	6.080.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	6.080.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	88 Dokumen	10.410.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	88 Dokumen	10.410.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	102 Orang	2.240.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	102 Orang	2.240.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	118.407.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	118.407.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	244.217.975,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	244.217.975,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	23.935.032,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	23.935.032,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	60 Dokumen	188.872,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	60 Dokumen	188.872,00	
105	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	42 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	42 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	13.481.000,00		Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	13.481.000,00	
	PUSKESMAS BANCAR					PUSKESMAS BANCAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.263.278.447,05		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.263.278.447,05	
107	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	92 %	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	92 %	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	35.061.120,00		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	35.061.120,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2302 Orang	60.800.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2302 Orang	60.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3483 Orang	9.600.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3483 Orang	9.600.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	14.074.560,00		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	14.074.560,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	346 Orang	8.540.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	346 Orang	8.540.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	203.316.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	203.316.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	7.680.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	7.680.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen	8.800.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen	8.800.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	3.590.960,00		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	96 Dokumen	3.590.960,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	961 Orang	7.037.280,00		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	961 Orang	7.037.280,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	122.091.040,00		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	122.091.040,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	242.544.040,00		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	242.544.040,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	12.636.080,00		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	12.636.080,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	87 Dokumen	390.960,00		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	87 Dokumen	390.960,00	
108	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	50 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	50 Orang	740.489.634,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	14.902.960,00		Kab. Tuban, Bancar, Bancar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	14.902.960,00	
	PUSKESMAS BULU					PUSKESMAS BULU					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
109	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25 Poin	220.262.560.494,87	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	99,63 %	65.339.598.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.751.148.128,16		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.751.148.128,16	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
110	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10,08 13,41 183.23 7 89,70 89,90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86,11 Nilai	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Puskesmas External	86,11 Nilai	72.567.965.431,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	494 Orang	115.907.232,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	494 Orang	115.907.232,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	28.735.808,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	28.735.808,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6388 Orang	6.720.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6388 Orang	6.720.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	3.284.064,00		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	3.284.064,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	471 Orang	13.127.400,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	471 Orang	13.127.400,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	240.200.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	240.200.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.720.224,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	1.720.224,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	72 Dokumen	14.720.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	72 Dokumen	14.720.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	132 Dokumen	15.750.000,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	132 Dokumen	15.750.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1523 Orang	2.189.376,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1523 Orang	2.189.376,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	122.816.600,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72 Dokumen	122.816.600,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	163.432.040,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	163.432.040,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	12.895.536,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	12.895.536,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	87 Dokumen	703.728,00		Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	87 Dokumen	703.728,00	
111	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61 %	792.630.584,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	63 Orang	740.489.634,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya		Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)	63 Orang	740.489.634,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13 Dokumen	10.258.992,00		Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13 Dokumen	10.258.992,00	
	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN					UPTD LABORATORIUM KESEHATAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
112	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Prosentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10.08 13.41 183.23 7 89.70 89.9 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Prosentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10.08 13.41 183.23 7 89.70 89.9 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		% Labkesmas sesuai standar	0.52 Labkesmas	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		% Labkesmas sesuai standar	0.52 Labkesmas	72.567.965.431,00	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	54 Dokumen	648.889.815,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	54 Dokumen	648.889.815,00	
	UPTD INSTALASI FARMASI					UPTD INSTALASI FARMASI					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
113	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Prosentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10.08 13.41 183.23 7 89.70 89.90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita) Prosentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Insiden TBC AKBa (Angka Kematian Balita) Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN	10.08 13.41 183.23 7 89.70 89.90 % % per 100.000 per 1000 % %	106.000.487.444,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IFK)	24 Dokumen	72.567.965.431,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IFK)	24 Dokumen	72.567.965.431,00	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	300.000.000,00		Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	300.000.000,00	

Tabel 2.14

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 RSUD dr. R Koesma (TC 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				231.358.391.730,81	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				250.287.265.264,81	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				231.358.391.730,81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				250.287.265.264,81	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.289.103.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.690.277.600	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.289.103.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.690.277.600	
1.02.0202.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tuban, Kec. Tuban Kel. Sidorejo	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 Unit	1.036.800.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tuban, Kec. Tuban Kel. Sidorejo	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan umlah	13 Unit	2.366.210.600	
1.02.0202.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Tuban, Kec. Tuban Kel. Sidorejo	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	289.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan		1 Unit	324.067.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo				230.069.287.930,81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAKab. Tuban, Jatirogo, Sugihan				247.596.987.664,81	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				230.069.287.930,81	Peningkatan Pelayanan BLUD				247.596.987.664,81	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	230.069.287.930,81	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	247.596.987.664,81	

Tabel 2.15

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 RSUD Ali Mansyur (Tabel TC 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				43.959.700.000	PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				54.277.178.096	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				43.959.700.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				54.277.178.096	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				25.559.700.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				35.327.119.016	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				21.330.288.960	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.380.143.016	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	8.283.088.960	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	8.283.088.960	
1.02.0202.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit	10.747.516.500	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	53 Unit	15.412.675.556	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 Paket	2.572.683.500	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 Paket	2.572.683.500	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	0 Unit	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1 Unit	5.111.695.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.946.976.000	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	22 Dokumen	4.229.411.040	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	22 Dokumen	3.946.976.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan				18.400.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAKab. Tuban, Jatirogo, Sugihan				18.950.059.080	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				18.400.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD				18.950.059.080	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	18.400.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	18.950.059.080	

Penambahan anggaran untuk tahun 2025 dilakukan dari hasil koordinasi bersama struktural dan jajaran dibawahnya untuk melakukan efisiensi anggaran dan memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas seperti fogging.

Rancangan awal perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan, Pengendaliam Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan untuk efisiensi anggaran, penyesuaian silpa BLUD Puskesmas dan rumah sakit, penyesuaian anggaran DBHCHT, BOKB dan penyesuaian yang tidak terserap dan dialihkan untuk kegiatan fogging dan pemenuhan sarana prasarana kantor seperti Laptop dan printer tetapi dalam rancangan P APBD Dinas Kesehatan juga mendapatkan silpa DAK bidang kesehatan sebesar 2 milyar yang harus digunakan kembali pada saat perubahan anggaran tahun 2025 digunakan untuk pembelian alat kesehatan untuk Puskesmas dan sarana prasarana Laboratorium dan Instalasi Farmasi Kesehehatan. Kebutuhan untuk Pembangunan Pagar gedung baru Labkesda, pembayaran SKTM dan premi PBID telah tercukupi sesuai kebutuhan tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang. Pokok pikiran DPRD dan usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarakan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Pada Tahun 2025 tidak ada usulan yang datang dari masyarakat.

Tabel 2.16

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan

Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaeran Volume	Catatan
1	NIHIL				

Dari berbagai usulan masyarakat yang masuk sebagian besar usulan tentang pendaftara JKN yang merupakan usulan ke Dinas Sosial P3K. Jadi tahun 2025 tidak ada usulan masyarakat yang direkomendasikan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Target indikator kinerja utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terjadi perubahan sesuai dengan selesainya Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadi RPJMD 2025-2029 dan periode Renstra menyesuaika RPJMD terbaru. Indikator mengalami perubahan pada P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun 2025 sampai dengan 2029. Berikut target indikator tahun 2025 :

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Tuban 2025-2029

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	FORMULASI INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DATA TAHUN 2024	TARGET SASARAN OUTPUT					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,31	72,56	72,71	73,06	73,4	73,75	74,2
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Nilai Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,95	75,10	75,36	75,61	75,87	76,13	76,39
Tujuan: Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata		Usia Harapan Hidup (UHH)	Nilai Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,95	75,10	75,36	75,61	75,87	76,13	76,39
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Kematian Ibu / Jumlah Lahir Hidup X 100.000 Keterangan: JKI: Jumlah Kematian Ibu yang Berkaitan dengan Kehamilan, Persalinan, dan Masa Nifas yang Tercatat atau Hasil Estimasi pada Tahun Tertentu JLH: Jumlah Kelahiran Hidup Pada Periode Yang Sama	Per 100.000 Kelahiran Hirdup	152,19	142,19	132,09	121,89	111,59	101,19	90,69
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Jumlah Anak Balita Pendek dan Sangat Pendek pada Tahun N / Jumlah Anak	%	11,3	10,3	9,4	8,6	7,9	7,3	6,8

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	FORMULASI INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DATA TAHUN 2024	TARGET SASARAN OUTPUT					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Balita Pada Tahun N X 100%								
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Pembangunan Penduduk		lndeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	60,42	62,42	64,42	66,42	68,42	70,42	72,42
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	66,6	67,2	67,8	68,4	69	69,6	70,2
Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	92,62	92,82	93,02	93,22	93,42	93,62	93,82

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan, P2KB Tahun 2025-2029

3.2 Program Dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2025, selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya, Kepala Daerah bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memfokuskan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan 33 Puskesmas di Kabupaten Tuban. Berikut adalah prioritas pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Prioritas Rencana Pembangunan Dinas Kesehatan,P2KB Tahun 2025

No	Subkegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Sumber anggaran
1	Pengembangan Puskesmas	Pengadaan Water treatmen	Puskesmas Jenu, Widang (2 unit)	DAK
		IPAL	Tambakboyo (1 unit)	DAK
2	PengembanganFaskes lainnya	Sarana Prasarana , pagar,penangkal petir Laboratorium	Laboratorium	Silpa DAK
		Sarana prasarana, Vacine Refigrator, pagar, AC Frezer Box, IFK,	IFK	Silpa DAK dan DAK
3	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Panyuran Palang, bejagung Semanding, Wukiharjo Parengan, Ngrejo Bangilan, Keradenan Palang (5 unit)	DAK
		Pegadaan Tanah Puskesmas Plumpang	Plumpang	DAU
		DED Puskesmas Widang	Widang	DAU
		DED Puskesmas Jenu	Jenu	DAU
		Pembangunan Puskesmas Merakurak	merakurak	DAU
4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran premi PBID untuk Masyarakat Tuban	Tuban	Pajak Rokok, dbhcht
		Pembayaran SKTM	Tuban	DAU
5	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Pengadaan PMT Bumil KEK, Balita Gizi Buruk, Balita Stunting	Tuban	Dau Bidang Kesehatan dan DAK NF Puskesmas

Tabel 3.3 Prioritas Rencana Pembangunan RSUD Ali Manshur Tahun 2025

No	Subkegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	RSUD Jatirogo
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Modal Mebel	RSUD Jatirogo
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Modal Alat kedokteran Umum	RSUD Jatirogo
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kedokteran Mata	RSUD Jatirogo
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	RSUD Jatirogo
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Modal Alat Kedokteran Bedah	RSUD Jatirogo
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	RSUD Jatirogo
8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	RSUD Jatirogo
9	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Modal Alat Kedokteran Lainnya	
10	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Gedung IBS dan Gudang Farmasi	RSUD Jatirogo
11	Oprasional Rumah Sakit	Pengadaan Modal Alat Kantor Lainnya	RSUD Jatirogo

No	Subkegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi
12	Oprasional Rumah Sakit	Pengadaan Modal Mebel	RSUD Jatirogo
13	Oprasional Rumah Sakit	Pengadaan Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	

Tabel 3.4 Rencana Pembangunan Fisik RSUD Dr. R. Koesma Tahun 2025

No	**Subkegiatan**	**Nama Paket Pekerjaan**	**Lokasi**
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Modal Alat kedokteran Umum	RSUD dr. R. Koesma
2	Pengembangan Rumah Sakit	Rehabilitasi ruang citotosix	RSUD dr. R. Koesma

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Tuban tersebut dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Secara umum Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Tuban dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Program, kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	14	9	12	15			20
			DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.01	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun*		9 Dokumen	277.172.684,00				374.610.000,00
	1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Sasaran Sub keg ;Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2 Dokumen	121.838.704,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			200.000.000,00
	1.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Keg :Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	5 Laporan	109.962.400,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			144.000.000,00
	1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	7 Laporan	45.371.580,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			30.610.000,00
	1.02.01.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun*		9 Dokumen	143.438.242.917,00				124.948.162.410,00
	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Sasaran Sub Keg: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2600 Orang /bulan	143.215.781.198,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			124.634.108.610,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Sasaran Sub Keg: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	9 Dokumen	187.147.834,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			241.818.400,00
	1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Sasaran Sub Keg :Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	12 Dokumen	35.313.885,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			72.235.400,00
	1.02.01.2.05	Sasaran Kegiatan: Meningakatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian (Layanan)*		2 Layanan	976.000,00				915.699.000,00
	1.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Sasaran Sub Keg: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	1 Paket	976.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			915.699.000,00
	1.02.01.2.06	Sasaran Kegiatan: "Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah"	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)*		6 layanan	302.856.552,00				399.605.199,00
	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Sasaran Sub Keg: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2 Paket	10.909.860,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			5.909.860,00
	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Keg; Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2 Paket	116.317.719,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			98.344.919,00
	1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Sasaran Sub Keg: Tersedianya Bahan Logistik Kantor		*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	3 Paket	102.703.350,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			110.121.693,00
	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Sasaran Sub Keg: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	3 Paket	20.399.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			87.438.032,00
	1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2 Dokumen	6.300.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			7.790.695,00
	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Sasaran Kegiatan: "Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2 Laporan	46.226.623,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			90.000.000,00
	1.02.01.2.07	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang Milik Daerah*		4 Jenis	205.978.427,00				0
	1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Keg: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	11 Unit	205.978.427,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			0
	1.02.01.2.08	Sasaran Kegiatan: "Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang*		4 paket	681.299.702,00				830.949.001,00
	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Sasaran Sub Keg: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	3 Laporan	390.671.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			482.571.000,00
	1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Sasaran Sub Keg :Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	3 Laporan	46.771.450,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			46.771.450,00
	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Sasaran Sub Keg :Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	7 Laporan	243.857.252,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			301.606.551,00
	1.02.01.2.09	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		4 jenis	285.772.843,00				229.425.000,00
	1.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Keg : Tersedianya Jasa pemeliharaan Biaya Pemelharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	24 Unit	139.662.543,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			100.000.000,00
	1.02.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel								
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	22 Unit	6.600.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			6.600.000,00
	1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Sasaran Sub Keg :Terlaksananya pemeliharaan Mebel		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	9 Unit	17.635.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			22.825.000,00
	1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Sasaran Sub Keg :Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2 Unit	121.875.300,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			100.000.000,00
2	**1.02.02**	Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**AKBa (Angka Kematian Balita)**		**7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**10.08**					
				Insiden TBC Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase fasyankes		**183.23**					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				dengan SPA sesuai standar Prosentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**89.9**					
	1.02.02.2.01	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin dan bmhp sesuai standar Persentase puskesmas dengan SPA kesehatan sesuai standar*		27%	33.859.827.498,50				17.325.848.050,00
				Proporsi Faskes dengan Perbekalan Kesehatan sesuai standar		39.39 %					
				Proporsi Faskes sesuai standar		83%					
						85%					
	1.02.02.2.01.0002		Pembangunan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		*Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun*	Kab. Tuban, Bangilan, Ngrojo Kab. Tuban, Parengan, Wukirharjo	6 Unit	11.496.950.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK			7.189.200.000,00
					Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo Kab. Tuban, Semanding, Bejagung Kab. Tuban,			FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
					Palang, Payuran Kab. Tuban,						

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Palang, Kradenan						
	1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan:Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar"		*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	701.000.000,00	DAK			1.000.000.000,00
								FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN			
	1.02.02.2.01.0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar		*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	499.951.275,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK			100.000.000,00
								FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
								DAK			
								FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN			
	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Unit	2.836.851.044,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			100.000.000,00
								DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN DAK			
								FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
								DAK			
								FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KEFARMASIA N			
	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	960 Unit	568.247.073,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			568.247.073,00
	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,		*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135 Paket	17.743.628.106,50	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			8.368.400.977,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		*Kesehatan yang disediakan*				DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			
								DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			
	1.02.02.2.01.0024		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya kunjungan keluarga dan intervensi masalah kesehatan oleh tenaga kesehatan		*Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240	13.200.000,00	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			0
						Keluarga					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Stil Birth*		100%	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
				Jumlah Peserta JKN yang dibiayai Pemda Persentase anak usia 6-23 bln mendapatkan MP ASI Persentase Balita Gizi		1,93 (30 JIWA/15570 *					
				Kurang mendapat makanan tambahan		per 1.000 Kelahiran 30 %					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Persentase Fasyankes terakreditasi Paripurna Persentase Kualitas Udara dalam Rumah tangga yang memenuhi syarat Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		65%					
				Persentase Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Persentasepelayanan		71542 Jiwa					
				kesehatan Ibu Hamil sesuai standar		73%					
				Persentase Pelayanan Kesehatan orangdengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar		79%					
				Persentase pelayanan kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar Persentase Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Persentase Tempat Fasilits Umum Prioritas yang memenuhi syarat Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tingkat Kepuasan Pasien di Faskes		83.73 %					
						90.60 %					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16392 Orang	471.721.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			487.467.500,00
	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16392 Orang	102.176.700,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			10.000.000,00
	1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15570 Orang	439.586.333,33	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			465.175.000,00
	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63116 Orang	2.044.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			10.000.000,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146532 Orang	7.656.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			20.000.000,00
	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan		*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,	790148 Orang	5.619.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			31.700.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar		*Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Semua Kel/Desa			PAJAK ROKOK			
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192160 Orang	110.468.100,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			100.000.000,00
	1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar		*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79254 Orang	29.160.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			35.000.000,00
	1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar		*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17832 Orang	12.739.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			12.670.687.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2340 Orang	6.616.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			10.000.000,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	14781 Orang	18.477.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			50.000.000,00
	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
		Sasaran SUb Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Orang beresiko terinfeksi HIV Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	18492 Orang	18.280.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			40.000.000,00
	1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	12 Dokumen	7.970.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			10.000.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5.718.420.100,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			751.515.350,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	19.434.650,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			30.000.000,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	52.994.320,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			100.000.000,00
	1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	72.879.350,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			20.000.000,00
	1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	3.897.080,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			8.000.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	12 Dokumen	80.162.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			20.000.000,00
	1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA"		*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	5.621.500,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			10.000.000,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			141.506.500,00
	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	39.624.208.760,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			39.096.235.800,00
	1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian		*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,	12 Paket	184.130.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			184.130.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional		*(KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan*	Semua Kel/Desa			DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			
	1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	39.187.550,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			100.000.000,00
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	12 Laporan	22.797.450,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			30.000.000,00
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	185 Dokumen	243.031.942,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			200.700.000,00
	1.02.02.2.02.0038		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Unit	268.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			200.000.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis		*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2737 Orang	2.600.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			10.000.000,00
	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	100 Orang	2.600.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			10.000.000,00
	1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
		Sasaran Sub Kegitan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	1 Orang	3.280.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			10.000.000,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	634.071.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			100.000.000,00
	1.02.02.2.03	Sasaran Kegiatan: Terlaksannya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase SIK yang di-integrasikan dengan SIKN Proporsi Fasyankes Terintegrasi SIKN*		33,30% 54,96%	8.040.180,00				10.000.000,00
	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	8.040.180,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			10.000.000,00
	1.02.02.2.04	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penerbitan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	*Persentase RS dengan kompetensi*		50%	87.520.925,00				159.317.850,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*penanganan 10 penyakit prioritas*							
	1.02.02.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 Unit	5.010.925,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			15.941.850,00
	1.02.02.2.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Sasaran Sub Kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar		*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 Unit	9.870.600,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			16.676.000,00
	1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)"		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Unit	72.639.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			126.700.000,00
3	**1.02.03**	Outcome: Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM Bidang Kesehatan yang meningkat kompetensinya**		**10%**	**819.571.967,00**				**222.134.000,00**
	1.02.03.2.01	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik*		100%	6.532.467,00				10.000.000,00
	1.02.03.2.01.0002		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan		*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan*	Kab. Tuban, Semua	12	6.532.467,00	DAU YANG DITENTUKAN			10.000.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		*Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen		P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			
	1.02.03.2.02	Sasaran Kegiatan: "Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota"	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi SDM kesehatan sesuai standar*		100%	316.901.500,00				167.069.000,00
				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar		1.55 per					
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi		1000					
						penduduk 52 %					
	1.02.03.2.02.0001		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegaiatan: Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan"		*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2 Dokumen	15.427.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			16.000.000,00
	1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
		Sasaran Su Kegiatan: Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	199.405.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			49.000.000,00
	1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	102.069.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			102.069.000,00
	1.02.03.2.03	Sasaran Kegiatan: "Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan*		16.36 %	496.138.000,00				45.065.000,00
	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 Orang	496.138.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			45.065.000,00
4	**1.02.04**	Outcome: meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar** **Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu**		**100** **43,50%** **%**	**169.680.076,00**				**395.344.000,00**
	1.02.04.2.01	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman* *Persentase pelayanan kefarmasian sesuai standar*		100% 45%	4.654.576,00				10.000.000,00
	1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Dokumen	4.654.576,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			10.000.000,00
	1.02.04.2.03	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase sertifikat industri rumah tangga pangan yang diterbitkan*		88.89 %	158.238.000,00				10.000.000,00
	1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132 Dokumen	158.238.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			10.000.000,00
	1.02.04.2.06	Sasaran Kegatan: Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Presentase sarana yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dan disampling Produknya*		39%	6.787.500,00				375.344.000,00
	1.02.04.2.06.0001		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	6.787.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			375.344.000,00
5	**1.02.05**	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.01	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu Aktif*		67,99%	314.954.000,00				314.954.000,00
	1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	314.954.000,00	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			314.954.000,00
	1.02.05.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase promosi kesehatan yang dilaksanakan*		100%	168.109.500,00				50.000.000,00
	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Peenyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	168.109.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL			50.000.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		berdasarkan Jenis Media Promosi Kesehatan dalam satutahun		*dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*				TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang dibina*		89,91%	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	55.750.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK			486.672.750,00
	2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**14.387.297.839,00**				**27.071.277.000,00**
	2.14		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**14.387.297.839,00**				**27.071.277.000,00**
1	**2.14.02**	Outcome: Terkendalinya Pertambahan Jumlah penduduk	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate**		**1,9 orang**	**442.711.150,00**				**459.400.000,00**
	2.14.02.2.01	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)*		1%	17.921.000,00				30.000.000,00
				Prosentase Pendidikan formal non formal Yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan (SSK)		15,50%					
	2.14.02.2.01.0009		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Kegiatan: "Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota"		*Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Satuan Pendidikan	17.921.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000,00
	2.14.02.2.02	Sasaran Kegiatan: "Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota"	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan*		5 pilar	424.790.150,00				429.400.000,00
	2.14.02.2.02.0009		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			100.000.000,00
	2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	159.400.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			159.400.000,00
	2.14.02.2.02.0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	160.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			160.000.000,00
	2.14.02.2.02.0015		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: "Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain"		*Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328 Unit	5.390.150,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
2	**2.14.03**	Outcome : meningkatnya PUS yang Menggunakan Kontrasepsi Modern	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)**		**75,50%**	**6.845.905.000,00**				**7.636.505.000,00**
	2.14.03.2.01	Sasaran Kegiatan: "Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal"	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Prosentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK*		17%	1.552.600.000,00				1.546.050.000,00
	2.14.03.2.01.0008		Pengendalian Program KKBPK								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK		*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.100.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			10.000.000,00
	2.14.03.2.01.0010		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	880.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			880.000.000,00
	2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	300.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			300.000.000,00
	2.14.03.2.01.0012		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			84.300.000,00
	2.14.03.2.01.0013		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal"		*Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	43.500.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			21.750.000,00
	2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Organisasi	250.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			250.000.000,00
	2.14.03.2.02	Sasaran Kegiatan: "Meninmgkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)"	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Prevalensi Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)*		7%	984.000.000,00				1.796.700.000,00
	2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2028 Orang	984.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			1.796.700.000,00
	2.14.03.2.03	Terlaksannya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*		47 unit	2.139.705.000,00				2.124.155.000,00
	2.14.03.2.03.0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh		*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Laporan	14.100.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			14.100.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)"									
	2.14.03.2.03.0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)"		*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4500 Orang	2.100.055.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			2.100.055.000,00
	2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33 Laporan	25.550.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			10.000.000,00
	2.14.03.2.04	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Prosentase Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas*		40%	2.169.600.000,00				2.169.600.000,00
	2.14.03.2.04.0001		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB"		*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	1.413.600.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			1.413.600.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas		*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135 Kampung	756.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			756.000.000,00
3	**2.14.04**	Outcome : meningkatnya keluarga Sejahtera	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)**		**21 tahun**	**7.098.681.689,00**				**18.975.372.000,00**
	2.14.04.2.01	Sasaran Kegiatan: "Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga*		60%	1.006.881.689,00				12.883.572.000,00
	2.14.04.2.01.0016		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan / Dokumen	9.600.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			9.600.000,00
	2.14.04.2.01.0017		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	12 Laporan	823.400.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			822.000.000,00
	2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)"		*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,* *PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	130.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			130.000.000,00
	2.14.04.2.01.0019		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)"		*Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,* *PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	10.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
	2.14.04.2.01.0024		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,		*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328 Orang	4.496.689,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.875.072.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)"		*PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*							
	2.14.04.2.01.0028		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		*Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Kelompok	29.085.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			31.900.000,00
	2.14.04.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase Calon Pengantin yang mendapat edukasi pra nikah*		82%	6.091.800.000,00				6.091.800.000,00
				Persentase Keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 HPK		93%					
	2.14.04.2.02.0005		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca		*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	2.769.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			2.769.000.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		salin/kelahiran, Baduta/Balita)		*salin/kelahiran, Baduta/Balita)*							
	2.14.04.2.02.0006		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)"		*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	3.322.800.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			3.322.800.000,00
			PUSKESMAS KENDURUAN				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Point**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	1 Unit Kerja	1.436.407.201,55	PENDAPATAN DARI BLUD			1.436.407.201,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden HIV Persentase** **Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**0.17** **13,41**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**10,08**					
				Insiden TBC		**183.23**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**7**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar		**89,9**					
						89,70 per					
						1000					
						%					
						%					
						per 100.000					
						per 1000					
						%					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		85,97 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	385 Orang	121.964.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			121.964.600,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	2735 Orang	35.033.664,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			35.033.664,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	4548 Orang	2.814.912,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.814.912,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	82 Orang	16.420.320,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.420.320,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	522 Orang	9.774.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.774.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	12	209.718.736,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			209.718.736,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	24	1.720.224,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.720.224,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	60	31.040.244,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			31.040.244,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	64	8.111.184,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.111.184,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	370 Orang	703.728,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			703.728,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	72	111.569.572,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			111.569.572,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	12	153.050.066,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			926.408.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	24	13.484.952,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.484.952,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	84	351.864,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			361.864,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		60 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	12 Dokumen	9.808.934,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.808.934,00
			PUSKESMAS BANGILAN				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Point**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		80%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	1 Unit Kerja	3.579.349.685,33	PENDAPATAN DARI BLUD			3.579.349.685,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)**		**10,08**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**89.90**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**89,7**					
				Insiden TBC		**13,41**					
						7					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						183.23 %					
						%					
						%					
						Jiwa					
						per 1000 per 100.000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		88,72 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	646 Orang	131.980.912,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			131.980.912,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	6525 Orang	38.582.592,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			38.582.592,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	7791 Orang	4.480.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.480.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	91 Orang	10.321.344,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	574 Orang	6.947.904,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.947.904,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	12	207.634.752,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			207.634.752,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	12	3.127.680,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.127.680,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	60 Dokumen	15.680.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.680.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	60	38.939.376,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			38.939.376,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	1450 Orang	938.304,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			938.304,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	84	104.325.720,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			104.325.720,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	12	166.294.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			765.606.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Bangilan)		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	12	18.536.840,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			18.536.840,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	12	234.576,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			234.576,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		207 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	1 Dokumen	2.075.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.075.000,00
			PUSKESMAS SENORI				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		80%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	1 Unit Kerja	2.953.298.938,37	PENDAPATAN DARI BLUD			2.953.298.938,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**13,41**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**89,7**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**89,9**					
				Insiden TBC		**10,08**					
						7					
						183.23 %					
						%					
						5%					
						per 1000 per 100.000					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02	Sasarana Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		86,40 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Saasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	595 Orang	62.820.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			62.820.000,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	5530 Orang	71.910.280,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			71.910.280,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	6824 Orang	34.560.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			34.560.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	79 Orang	3.753.216,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.753.216,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	503 Orang	390.960,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			390.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	12 Dokumen	187.992.000,00	DAK NON FISIK-DANA			187.992.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	24 Dokumen	2.720.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.720.000,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	12 Dokumen	7.656.944,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.656.944,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	118 Dokumen	44.363.328,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			44.363.328,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	91 Orang	938.304,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			938.304,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	48 Dokumen	94.394.768,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			94.394.768,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	28 Dokumen	139.946.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			595.578.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						12	2.583.000,00				2.583.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	Dokumen		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	12 Dokumen	703.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			703.200,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		24 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon	12 Dokumen	9.041.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.041.000,00
			PUSKESMAS SINGGAHAN				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		80%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	1 Unit Kerja	3.800.497.917,99	PENDAPATAN DARI BLUD			3.800.497.917,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)**		**10,08**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**7**					
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**13,41**					
				Insiden TBC Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase fasyankes		**183.23**					
				dengan SPA sesuai standar		**89,9**					
						89,70%					
						per 1000					
						%					
						per 100.000					
						%					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		89,51 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	576 Orang	150.267.168,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			150.267.168,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	5976 Orang	20.564.496,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.564.496,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	7019 Orang	31.902.336,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			31.902.336,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	82 Orang	4.691.520,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.691.520,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	518 Orang	1.251.072,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.251.072,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	12	261.300.152,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			261.300.152,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	24	1.251.072,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.251.072,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	60 Dokumen	16.960.000,00	DAK NON FISIK-DANA			16.960.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	60	26.430.018,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			26.430.018,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	82 Orang	938.304,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			938.304,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	84 Dokumen	157.531.910,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.731.910,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	12	201.488.790,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			936.005.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	12 Dokumen	35.523.184,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			35.523.184,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	12 Dokumen	362.768,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			362.768,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		25 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.00 01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	12 Dokumen	3.718.210,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.718.210,00
			PUSKESMAS MONTONG				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.00 01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	1 Unit Kerja	2.436.620.604,39	PENDAPATAN DARI BLUD			2.436.620.604,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**89,7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**13,41**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Insiden TBC Prevalensi Wasting		**7**					
				Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**89,9**					
						183.23					
						10,08%					
						%					
						per 1000					
						%					
						per 100.000					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		90,52 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	287 Orang	108.750.768,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			108.750.768,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	2753 Orang	27.520.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			27.520.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	3712 Orang	9.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.600.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	43 Orang	2.345.760,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.345.760,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	274 Orang	7.680.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.680.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran SUb Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	12 Dokumen	174.687.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			174.687.600,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	24 Dokumen	2.463.048,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.463.048,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	56 Dokumen	9.920.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.920.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	100 Dokumen	6.276.384,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.276.384,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang*	Kab. Tuban, Montong,	84 Orang	390.960,00	DAK NON FISIK-DANA			390.960,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Montongsekar			BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	12 Dokumen	112.796.616,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			112.796.616,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	28 Dokumen	242.820.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			723.924.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	12 Dokumen	16.186.096,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.186.096,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	12 Dokumen	320.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			320.000,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		72 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan*	Kab. Tuban, Montong, Montongsekar	12 Dokumen	11.392.768,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.392.768,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*							
			PUSKESMAS JETAK				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	1 Unit Kerja	1.574.464.376,83	PENDAPATAN DARI BLUD			1.574.464.376,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Insiden TBC Persentase**		**89,9**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**183.23**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**13,41**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**7**					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	*Nilai IKM Puskesmas External*		90.03 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	423 Orang	96.892.096,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			96.892.096,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	3435 Orang	52.480.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			52.480.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	5290 Orang	4.480.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.480.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	78 Orang	4.691.520,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.691.520,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	496 Orang	10.768.128,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.768.128,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	12 Dokumen	194.817.344,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			194.817.344,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	24 Dokumen	1.251.072,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.251.072,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	60	15.680.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.680.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	64	33.756.384,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			33.756.384,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	77 Orang	1.094.688,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.094.688,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	4 Dokumen	93.200.488,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			93.200.488,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Jetak)		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	12 Dokumen	141.093.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			653.153.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	24	26.424.896,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			26.424.896,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	1 Dokumen	156.384,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			156.384,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		60 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Montong, Jetak	12 Dokumen	16.835.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.835.000,00
			PUSKESMAS PARENGAN				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	1 Unit Kerja	1.844.275.605,88	PENDAPATAN DARI BLUD			1.844.275.605,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden TBC Persentase fasyankes**		**183.23**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**89,7**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**89.90**					
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**7**					
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**10,08**					
						13,41 per					
						100.000					
						%					
						Jiwa					
						per 1000					
						%					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		88,90 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	392 Orang	119.470.320,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			119.470.320,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	2860 Orang	12.706.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.706.200,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	4710 Orang	12.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.800.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	51 Orang	3.284.064,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.284.064,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatann : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	503 Orang	17.601.120,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			17.601.120,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	12 Dokumen	226.980.360,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			226.980.360,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	24 Dokumen	781.920,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			781.920,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	15 Dokumen	16.640.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.640.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	60 Dokumen	19.453.728,00	DAK NON FISIK-DANA			19.453.728,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan						BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	65 Orang	1.563.840,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.563.840,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	36	112.491.152,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			112.491.152,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	28	162.746.520,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			732.763.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	12 Dokumen	36.873.112,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			36.873.112,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	120 Dokumen	547.344,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			547.344,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		102 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu	10 Dokumen	7.483.320,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.483.320,00
			PUSKESMAS PONCO				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kesehatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	1 Unit Kerja	1.649.746.522,05	PENDAPATAN DARI BLUD			1.649.746.522,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**AKBa (Angka Kematian Balita)**		**7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Insiden TBC Persentase fasyankes		**183.23**					
				dengan SPA sesuai standar Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**89,7**					
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang		**13,41**					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				dan Gizi Buruk Balita)							
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**10,08**					
						89.90 per					
						1000					
						per 100.000					
						%					
						%					
						%					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		86 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatann : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	346 Orang	90.135.648,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			90.135.648,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	2641 Orang	13.527.216,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.527.216,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	4283 Orang	10.240.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.240.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	50 Orang	3.753.216,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.753.216,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	316 Orang	16.270.272,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.270.272,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	12 Dokumen	190.661.608,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			190.661.608,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	24 Dokumen	2.032.992,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.032.992,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	15 Dokumen	15.680.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.680.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	60 Dokumen	13.772.464,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.772.464,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	12 Orang	2.502.144,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.502.144,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	36 Dokumen	93.168.264,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			93.168.264,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	28 Dokumen	137.161.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			522.542.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Su Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	1 Dokumen	22.086.688,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			22.086.688,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	120 Dokumen	397.488,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			387.488,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		20 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Parengan, Selogabus	8 Dokumen	16.589.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.589.000,00
			PUSKESMAS SOKO				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	1 Unit Kerja	4.375.135.179,99	PENDAPATAN DARI BLUD			4.375.135.179,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase Cakupan Kepesertaan JKN**		**89,9**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar							
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)							
				Insiden TBC		**89,7**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**13,41**					
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**183.23**					
						7					
						10,08%					
						%					
						%					
						per 100.000					
						per 1000					
						%					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		85 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	683 Orang	146.102.424,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			146.102.424,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	5337 Orang	26.634.321,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			26.634.321,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	8198 Orang	12.197.952,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.197.952,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	89 Orang	4.691.520,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.691.520,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	625 Orang	23.992.080,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			23.992.080,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	12 Dokumen	225.356.864,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			225.356.864,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	1 Dokumen	3.362.256,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.362.256,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan :Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	12 Dokumen	15.680.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.680.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	1 Dokumen	24.346.191,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			24.346.191,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	328 Orang	4.691.520,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.691.520,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	7 Dokumen	112.236.729,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			112.236.729,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	28 Dokumen	173.009.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			949.390.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	1 Dokumen	11.429.095,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.429.095,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	1 Dokumen	234.576,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			234.576,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		0 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Soko, Sokosari	1 Dokumen	12.995.472,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.995.472,00
			PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	1 Unit Kerja	2.058.169.972,89	PENDAPATAN DARI BLUD			2.058.169.972,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**13,41**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**89,7**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Insiden TBC		**10,08**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**89,9**					
						183.23					
						7%					
						%					
						%					
						%					
						per 100.000					
						per 1000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		91,50 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	420 Orang	63.617.616,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			63.617.616,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	4038 Orang	31.745.952,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			31.745.952,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	5354 Orang	28.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			28.200.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	75 Orang	10.477.728,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.477.728,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	468 Orang	2.032.992,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.032.992,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	12 Dokumen	190.985.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			190.985.600,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang	13 Dokumen	15.853.912,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.853.912,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	Kab. Tuban, Soko,	60 Dokumen	30.080.000,00	DAK NON FISIK-DANA			30.080.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Prambonte rgayang			BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Soko, Prambonte rgayang	60 Dokumen	4.561.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.561.500,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan ; Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Soko, Prambonte rgayang	84 Dokumen	100.882.508,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			100.882.508,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasara Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Soko, Prambonte rgayang	28 Dokumen	136.272.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			743.944.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Soko, Prambonte rgayang	24 Dokumen	3.910.192,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.910.192,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		10 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Soko, Prambonte rgayang	12 Dokumen	3.325.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.325.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			PUSKESMAS RENGEL								
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	1 Unit Kerja	3.597.345.695,66	PENDAPATAN DARI BLUD			3.597.345.695,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**AKBa (Angka Kematian Balita)**		**7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Insiden TBC Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase		**183.23**					
				Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**89,9**					
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**13,41**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar		**10,08**					
						89,70 per					
						1000					
						per 100.000					
						%					
						%					
						%					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		89,90 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	577 Orang	73.282.616,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			73.282.616,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	4920 Orang	54.051.520,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			54.051.520,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	6716 Orang	5.885.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.885.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasara Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	67 Orang	9.383.040,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.383.040,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	42 Orang	13.960.392,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.960.392,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	12 Dokumen	179.956.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			179.956.000,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	24 Dokumen	3.540.336,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.540.336,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	44 Dokumen	7.680.022,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.680.022,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	96 Dokumen	24.517.190,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			24.517.190,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	34 Orang	860.112,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			860.112,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	72 Dokumen	95.792.396,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			95.792.396,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	40 Dokumen	139.819.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			773.014.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	12 Dokumen	28.457.416,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			28.457.416,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	74 Dokumen	390.960,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			390.960,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		62 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	1 Dokumen	4.238.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.238.000,00
			PUSKESMAS PRAMBON WETAN				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	1 Unit Kerja	1.062.088.895,62	PENDAPATAN DARI BLUD			1.062.088.895,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase Cakupan Kepesertaan JKN**		**89,9**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				AKBa (Angka Kematian Balita)							
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**7**					
				Insiden TBC Persentase fasyankes		**13,41**					
				dengan SPA sesuai standar Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**183.23**					
						89,7					
						10,08%					
						per 1000					
						%					
						per 100.000					
						%					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		94 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	267 Orang	86.649.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			86.649.000,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	3333 Orang	31.109.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			31.109.600,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	3050 Orang	4.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.800.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	36 Orang	4.691.520,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.691.520,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	225 Orang	3.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.100.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	12 Dokumen	135.965.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			135.965.600,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	12 Dokumen	860.112,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			860.112,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	16 Dokumen	11.840.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.840.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	12 Dokumen	7.050.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.050.000,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	36 Dokumen	88.679.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			95.792.396,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	28 Dokumen	185.611.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			589.577.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	12 Dokumen	13.300.168,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.300.168,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Prambon Wetan)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		33 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Rengel, Prambonwetan	1 Dokumen	3.483.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.483.000,00
			PUSKESMAS GRABAGAN				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	1 Unit Kerja	2.307.435.601,94	PENDAPATAN DARI BLUD			2.307.435.601,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**89,9**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**89,7**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**13,41**					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						10,08					
						7%					
						%					
						%					
						Jiwa					
						per 1000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		86,21 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	458 Orang	76.660.232,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			88.323.904,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasarab Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	3565 Orang	33.740.560,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			35.179.116,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	6505 Orang	25.850.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.850.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	76 Orang	5.160.672,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.160.572,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	480 Orang	7.040.000,00	DAK NON FISIK-DANA			7.040.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	12 Dokumen	227.216.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			216.656.000,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	24 Dokumen	4.233.216,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.233.216,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	56 Dokumen	13.760.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.760.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	64 Dokumen	15.120.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.120.000,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	36 Dokumen	124.444.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			124.444.000,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	28 Dokumen	148.648.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			545.789.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						12	28.140.336,00				26.336.516,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Dokumen		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	12 Dokumen	972.984,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			234.576,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		80 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	12 Dokumen	14.108.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.108.000,00
			PUSKESMAS PLUMPANG				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Peningkatan Pelayanan BLUD*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	1 Unit Kerja	3.604.096.925,69	PENDAPATAN DARI BLUD			3.604.096.925,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**13,41**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Insiden TBC Persentase fasyankes		**89,9**					
				dengan SPA sesuai standar Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**183.23**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**89,7**					
						10,08					
						7%					
						%					
						per 100.000					
						%					
						%					
						per 1000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		88,30 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	755 Orang	98.657.304,00	DAK NON FISIK-DANA			98.657.304,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	4283 Orang	24.143.712,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			24.143.712,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	8648 Orang	3.520.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.520.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : PengelolaanTerlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	68 Orang	10.321.344,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.321.344,00
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	683 Orang	981.384,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			981.384,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	12 Dokumen	205.877.848,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			205.877.848,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	24 Dokumen	19.987.792,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.987.792,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	60 Dokumen	41.221.032,00	DAK NON FISIK-DANA			41.221.032,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	64 Dokumen	312.768,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			312.768,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	132 Orang	13.605.408,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.605.408,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	84 Dokumen	122.201.816,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			124.444.000,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	28 Dokumen	155.445.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			692.107.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	24 Dokumen	36.776.592,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			36.776.592,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		0 orang	309.567.084,00				740.489.634,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	1 Dokumen	11.730.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.730.000,00
			PUSKESMAS KLOTOK				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	1 Unit Kerja	1.675.666.895,96	PENDAPATAN DARI BLUD			1.675.666.895,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**AKBa (Angka Kematian Balita)**		**7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**13,41**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**89,9**					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Insiden TBC		**10,08** **89,7** **183.23 per 1000** **%** **%** **%** **%** **per 100.000**					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		88,50 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	396 Orang	78.233.952,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			78.233.952,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran SubKegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	3203 Orang	27.520.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			27.520.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	4477 Orang	2.240.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.240.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	68 Orang	15.012.864,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.012.864,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*							
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	483 Orang	2.541.240,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.541.240,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	12 Dokumen	157.679.448,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			157.679.448,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	13 Dokumen	4.480.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.480.000,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	5 Dokumen	12.480.440,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.480.440,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	116 Dokumen	1.670.960,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.670.960,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	84 Dokumen	97.937.360,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			97.937.360,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan		*Jumlah Dokumen Operasional*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	28 Dokumen	113.876.040,00	DAK NON FISIK-DANA			605.036.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Fasilitas Kesehatan Lainnya		*Pelayanan Puskesmas*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	36 Dokumen	2.141.736,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.141.736,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		25 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Plumpang, Klotok	1 Dokumen	2.440.960,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.440.960,00
			PUSKESMAS WIDANG				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Widang, Widang	1 Unit Kerja	1.998.445.962,28	PENDAPATAN DARI BLUD			1.998.445.962,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**89,7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**13,41**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**10,08**					
				Insiden TBC Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**7**					
						183.23					
						89,90%					
						%					
						%					
						per 1000 per 100.000					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegitan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		90,85 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Widang, Widang	443 Orang	68.490.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			68.490.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Widang, Widang	3197 Orang	36.320.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			36.320.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Widang)		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Widang, Widang	5543 Orang	25.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.600.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Widang, Widang	65 Orang	9.383.040,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.383.040,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Widang, Widang	408 Orang	3.950.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.950.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Widang, Widang	12 Dokumen	175.563.760,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			175.563.760,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Widang, Widang	24 Dokumen	7.520.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.520.000,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Widang, Widang	15	11.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.200.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Widang, Widang	12	19.850.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.850.000,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Ssaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Widang, Widang	65 Orang	1.563.840,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.563.840,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Widang, Widang	12 Dokumen	99.429.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			99.429.000,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Widang, Widang	28 Dokumen	178.612.536,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			783.139.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Widang, Widang	12 Dokumen	10.634.688,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.634.688,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Widang, Widang	12	273.672,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			273.672,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		30 orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.00 01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Widang, Widang	12 Dokumen	5.008.464,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.008.464,00
			PUSKESMAS COMPRENG				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		20%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.00 01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	1 Unit Kerja	856.895.873,94	PENDAPATAN DARI BLUD			856.895.873,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)**		**10,08**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**89,7**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**13,41**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Insiden TBC		**7**					
						89,9					
						183.23 %					
						%					
						%					
						per 1000					
						%					
						per 100.000					
	1.02.02.2.02	Sasarana Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		87,15 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	249 Orang	57.433.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			57.433.800,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	1881 Orang	21.288.128,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			21.288.128,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	2957 Orang	15.360.000,00	DAK NON FISIK-DANA			15.360.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	34 Orang	2.814.912,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.814.912,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	218 Orang	5.760.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.760.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	12 Dokumen	178.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			178.400.000,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	24 Dokumen	2.111.184,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.111.184,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	44 Dokumen	16.320.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.320.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	96 Dokumen	10.280.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.280.000,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	34 Orang	938.304,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			938.304,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatn: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	72 Dokumen	92.872.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			92.872.000,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	40 Dokumen	263.336.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			690.528.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	12 Dokumen	35.543.672,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			35.543.672,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		59 orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Widang, Compreng	1 Dokumen	4.746.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.746.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			PUSKESMAS PALANG				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		80%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Palang, Palang	1 Unit Kerja	3.038.279.991,90	PENDAPATAN DARI BLUD			3.038.279.991,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden TBC Persentase fasyankes**		**183.23**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				dengan SPA sesuai standar Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**89,7**					
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**10,08**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN AKBa (Angka Kematian Balita)		**13,41**					
						89,9					
						7 per					
						100.000					
						%					
						%					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						%					
						%					
						per 1000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		85,60 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Palang	711 Orang	116.240.720,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			116.240.720,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Palang	5795 Orang	21.120.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			21.120.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Palang	7672 Orang	4.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.700.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Palang	90 Orang	1.876.608,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.876.608,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Palang	565 Orang	5.120.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.120.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Palang, Palang	12 Dokumen	173.195.984,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			173.195.984,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Palang, Palang	24 Dokumen	1.094.688,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.094.688,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Palang, Palang	60 Dokumen	6.240.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.240.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Palang, Palang	60 Dokumen	10.647.676,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.647.676,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Palang, Palang	696 Orang	938.304,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			938.304,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Palang, Palang	84 Dokumen	115.430.324,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			115.430.324,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Palang, Palang	16 Dokumen	133.411.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			891.457.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						12	23.072.000,00				23.072.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Palang, Palang	Dokumen		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Palang, Palang	12 Dokumen	655.696,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			655.696,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan:Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		96 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Palang, Palang	12 Dokumen	7.666.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.666.000,00
			PUSKESMAS SUMURGUNG				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	1 Unit Kerja	1.730.342.562,39	PENDAPATAN DARI BLUD			1.730.342.562,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**AKBa (Angka Kematian Balita)**		**7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**10,08**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**89,7**					
				Insiden TBC Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**13,41**					
						183.23					
						89,90 per					
						1000					
						%					
						%					
						%					
						per 100.000					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		88 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	549 Orang	71.979.516,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			71.979.516,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	4254 Orang	40.447.456,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			40.447.456,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasarn Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	6134 Orang	5.760.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.760.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	72 Orang	1.407.456,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.407.456,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	542 Orang	11.007.456,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.007.456,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	12 Dokumen	158.221.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			158.221.000,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	13 Dokumen	5.183.728,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.183.728,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	60 Dokumen	9.058.528,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.058.528,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	60 Dokumen	5.387.456,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.387.456,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	72 Orang	2.111.184,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.111.184,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	84 Dokumen	96.021.560,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			96.021.560,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	28 Dokumen	118.243.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			810.277.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	24 Dokumen	19.204.276,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.204.276,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	72 Dokumen	156.384,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			156.384,00
3	**1.02.05**	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		10 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Palang, Sumurgung	1 Dokumen	5.026.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.026.000,00
			PUSKESMAS SEMANDING				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		80%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegaiatn: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	1 Unit Kerja	2.886.827.408,98	PENDAPATAN DARI BLUD			2.886.827.408,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden TBC**		**183.23**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**7**					
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**10,08**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**89,7**					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)							
						89,9					
						13,41 per					
						100.000					
						per 1000					
						%					
						%					
						%					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		91,60 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	804 Orang	105.477.648,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			105.477.648,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kesehatan; Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	7076 Orang	35.520.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			35.520.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	9727 Orang	14.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.400.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	113 Orang	3.127.680,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.127.680,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	717 Orang	8.214.912,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.214.912,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	12 Dokumen	237.150.368,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			237.150.368,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	36 Dokumen	1.251.072,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.251.072,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	18 Dokumen	14.080.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.080.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	108 Dokumen	8.939.376,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.939.376,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	84 Dokumen	139.812.712,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			139.812.712,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	28 Dokumen	164.313.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			854.659.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	1 Dokumen	31.519.464,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			31.519.464,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	24 Dokumen	312.768,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			312.768,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		120 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Semanding, Semanding	1 Dokumen	9.289.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.289.000,00
			PUSKESMAS WIRE				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Unit Kerja	2.117.321.378,75	PENDAPATAN DARI BLUD			2.117.321.378,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**89,9**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**89,7**					
				Insiden TBC		**13,41**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**10,08**					
						183.23					
						7%					
						%					
						%					
						%					
						per 100.000					
						per 1000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		85,70 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	743 Orang	159.400.896,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			159.400.896,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	4571 Orang	25.682.704,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.682.704,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	8508 Orang	5.004.288,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.004.288,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	99 Orang	5.004.288,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.004.288,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	626 Orang	7.040.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.040.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	12 Dokumen	220.086.704,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			220.086.704,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	24 Dokumen	5.414.008,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.414.008,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	44 Dokumen	25.280.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.280.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	96 Dokumen	11.370.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.370.000,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	10022 Orang	938.304,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			938.304,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	72 Dokumen	130.202.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			130.202.000,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	40 Dokumen	170.843.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			893.373.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	12 Dokumen	12.796.968,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.796.968,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	74 Dokumen	312.768,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			312.768,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		86 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.00 01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	2 Dokumen	6.899.072,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.899.072,00
			PUSKESMAS TUBAN				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.00 01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Unit Kerja	2.257.570.795,40	PENDAPATAN DARI BLUD			2.257.570.795,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	**Presentase Cakupan Kepesertaan JKN**		**89,9**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		perorangan dan Masyarakat	**PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**AKBa (Angka Kematian Balita)**							
				Insiden TBC Prevalensi Wasting		**7**					
				Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**183.23**					
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**10,08**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar		**13,41**					
						89,70%					
						per 1000 per 100.000					
						%					
						%					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		90,37 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	851 Orang	83.340.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			83.340.000,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	10334 Orang	43.040.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			43.040.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	8886 Orang	4.378.752,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.378.752,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Tuban)		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	85 Orang	7.037.280,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.037.280,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	541 Orang	3.127.680,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.127.680,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	12 Dokumen	183.800.848,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			183.800.848,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	24 Dokumen	2.825.760,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.825.760,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	60 Dokumen	14.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.400.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	60 Dokumen	12.442.032,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.442.032,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	6234 Orang	1.407.456,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.485.648,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	84 Dokumen	106.858.288,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			106.858.288,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	28 Dokumen	136.701.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.067.563.000,00
	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	12 Dokumen	8.229.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.229.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	24 Dokumen	14.084.416,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.006.224,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	72 Dokumen	234.576,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			234.576,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		45 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	4.970.912,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.970.912,00
			PUSKESMAS KEBONSARI				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		20%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	1 Unit Kerja	1.114.583.275,16	PENDAPATAN DARI BLUD			1.114.583.275,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)**		**10,08**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**89,9**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**13,41**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Insiden TBC		**7**					
						89,7					
						183.23 %					
						%					
						%					
						per 1000					
						%					
						per 100.000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		87,50 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	480 Orang	70.768.256,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			70.768.256,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	7215 Orang	38.885.192,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			38.885.192,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	5690 Orang	1.172.880,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.172.880,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	6 Orang	2.345.760,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.345.760,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	419 Orang	6.568.128,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.568.128,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	12 Dokumen	123.742.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			123.742.600,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	15 Dokumen	4.042.032,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.042.032,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	56 Dokumen	13.831.108,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.831.108,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	100 Dokumen	3.631.500,00	DAK NON FISIK-DANA			3.631.500,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan						BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	2694 Orang	781.920,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			781.920,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	84 Dokumen	76.385.264,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			76.385.264,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiaatn: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	28 Dokumen	295.223.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			296.223.000,00
	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	1 Dokumen	4.862.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.100.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	36 Dokumen	9.087.248,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.087.248,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	24 Dokumen	234.576,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			234.576,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								
	1.02.05.2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Kebonsari)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		46 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	13 Dokumen	6.286.536,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.286.536,00
			PUSKESMAS JENU				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		80%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	1 Unit Kerja	3.247.392.227,39	PENDAPATAN DARI BLUD			3.247.392.227,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**13,41**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Insiden TBC Prevalensi Wasting		**183.23**					
				Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**10,08**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar AKBa (Angka Kematian Balita)		**89,9**					
						89,7					
						7%					
						per 100.000					
						%					
						%					
						%					
						per 1000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		98 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	810 Orang	118.797.948,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			118.797.948,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	7150 Orang	42.969.260,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			42.969.260,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiaatn: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	8633 Orang	5.317.056,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.317.056,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*							
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	79 Orang	5.864.400,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.864.400,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	500 Orang	3.569.264,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.569.264,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	12 Dokumen	223.899.400,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			223.899.400,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	12 Dokumen	9.435.024,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.435.024,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	60 Dokumen	13.760.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.760.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	12 Dokumen	19.672.344,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.672.344,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	1058 Orang	2.345.760,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.345.760,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	12 Dokumen	128.247.392,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			128.247.392,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	28 Dokumen	163.933.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.043.203.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	12 Dokumen	5.125.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.125.000,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatn: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	12 Dokumen	469.152,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			469.152,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHB**		**51.61 %**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		310 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub kegiatan: Terlaksananya Bimbingan		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan*	Kab. Tuban, Jenu, Jenu	12 Dokumen	3.783.000,00	DAK NON FISIK-DANA			3.783.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				BOK-BOK PUSKESMAS			
			PUSKESMAS MERAKURAK				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongedge	1 Unit Kerja	1.859.415.568,93	PENDAPATAN DARI BLUD			1.859.415.568,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)**		**89,7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**10,08**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Insiden TBC Persentase		**7**					
				Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**89,9**					
						183.23					
						13,41%					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						%					
						per 1000					
						%					
						per 100.000					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		87 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	460 Orang	136.050.720,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			136.050.720,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	3297 Orang	39.465.760,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			39.465.760,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar"		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	5836 Orang	3.919.704,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.919.704,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	68 Orang	2.814.912,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.814.912,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	430 Orang	5.120.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.120.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Pelayanan Sesuai Standar*							
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	12 Dokumen	193.939.760,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			193.939.760,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	12 Dokumen	1.720.224,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.720.224,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	60 Dokumen	11.040.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.040.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	60 Dokumen	1.954.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.954.800,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	12 Dokumen	142.431.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			142.431.200,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	28 Dokumen	234.815.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			784.552.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub kegiatan: Terlaksananya		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan*	Kab. Tuban, Merakurak,	12 Dokumen	24.365.536,00	DAK NON FISIK-DANA			24.365.536,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*pelayanan kesehatan reproduksi*	Sambongge			BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	12 Dokumen	156.384,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			156.384,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		45 orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Merakurak, Sambongge	12 Dokumen	4.926.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.926.000,00
			PUSKESMAS TEMANDANG				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	1 Unit Kerja	1.264.448.457,32	PENDAPATAN DARI BLUD			1.264.448.457,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**AKBa (Angka Kematian Balita)**		**7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**10,08**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**89,7**					
				Insiden TBC Persentase		**89,9**					
				Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**183.23**					
						13,41 per 1000					
						%					
						%					
						%					
						per 100.000					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		89 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiaatn: Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	303 Orang	110.161.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			110.161.800,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	3529 Orang	35.874.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			35.874.800,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	2558 Orang	2.880.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.880.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasarn Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	48 Orang	2.345.760,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.345.760,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	288 Orang	3.520.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.520.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakatv		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	12 Dokumen	171.653.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			171.653.000,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	12 Dokumen	2.384.856,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.384.856,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	12 Dokumen	8.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.000.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Survleins Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	12 Dokumen	9.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.700.000,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	737 Orang	469.152,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			469.152,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	33 Dokumen	114.847.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			114.847.000,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	28 Dokumen	191.221.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			696.572.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	1 Dokumen	10.666.728,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.666.728,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Iby dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	1 Dokumen	299.904,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			299.904,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		46 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.00 01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Merakurak, Temandang	1 Dokumen	8.784.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.784.000,00
			PUSKESMAS KEREK				**342.454.628.405, 70**				**346.595.706.728, 00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566, 70**				**319.524.429.728, 00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566, 70**				**319.524.429.728, 00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25%**	**220.284.960.494, 87**				**202.791.111.960, 00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		80%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.00 01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasarn Kegiatan : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	1 Unit Kerja	2.545.305.238,66	PENDAPATAN DARI BLUD			2.545.305.238,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN**		**89,7**	**106.000.487.444, 83**				**115.010.396.134, 00**
				Insiden TBC		**89,9**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**183.23**					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**7**					
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**10,08**					
						13,41%					
						%					
						per 100.000					
						per 1000					
						%					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		91 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	478 Orang	83.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			83.750.000,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	4229 Orang	65.920.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			65.920.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	6568 Orang	6.255.360,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.255.360,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	67 Orang	7.037.280,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.037.280,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	426 Orang	2.560.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.560.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	24 Dokumen	173.636.992,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			173.636.992,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	24 Dokumen	3.583.728,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.583.728,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	60 Dokumen	15.353.320,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.353.320,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Survleins Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	64 Dokumen	10.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.400.000,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	370 Orang	1.251.072,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.251.072,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	84 Dokumen	113.877.680,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			113.877.680,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	28 Dokumen	141.712.680,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			695.309.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	28 Dokumen	14.325.666,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.325.666,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	6 Dokumen	651.902,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			651.902,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		75 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo	12 Dokumen	2.590.320,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.590.320,00
			PUSKESMAS GAJI				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Kegiatan : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	1 Unit Kerja	1.631.662.411,44	PENDAPATAN DARI BLUD			1.631.662.411,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN**		**89,7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Insiden TBC Persentase		**89,9**					
				Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**183.23**					
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**13,41**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**10,08**					
						7%					
						%					
						per 100.000					
						%					
						%					
						per 1000					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		87,34 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	323 Orang	142.753.632,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			142.753.632,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	2225 Orang	8.800 s.kemkes.go.id /PersiapanMonevTuntasLP.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.800.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	4749 Orang	640.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			640.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	56 Orang	3.284.064,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.284.064,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	350 Orang	2.240.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.240.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						12	179.893.688,00				179.893.688,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	Dokumen		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	24 Dokumen	1.329.264,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.329.264,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	60 Dokumen	14.470.960,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.470.960,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	64 Dokumen	5.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.250.000,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	3442 Orang	312.768,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			234.576,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	24 Dokumen	120.360.040,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			120.360.040,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	28 Dokumen	138.070.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			510.652.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	12 Dokumen	19.567.200,00	DAK NON FISIK-DANA			19.567.200,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*pelayanan kesehatan reproduksi*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	24 Dokumen	156.384,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			234.576,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		41 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Kerek, Gaji	12 Dokumen	6.365.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.365.500,00
			PUSKESMAS TAMBAKBOYO				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		80%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Kegiatan : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	1 Unit Kerja	3.865.746.296,81	PENDAPATAN DARI BLUD			3.865.746.296,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**89,7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Insiden TBC		**13,41**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**89,9**					
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**183.23**					
						7					
						10,08%					
						%					
						%					
						per 100.000					
						per 1000					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		90,50 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	585 Orang	117.445.584,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			117.445.584,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan ; Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	5212 Orang	40.934.224,00	DAK NON FISIK-DANA			40.934.224,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	6930 Orang	11.520.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.520.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	81 Orang	7.506.432,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.680.000,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	511 Orang	20.125.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.125.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	12 Dokumen	232.733.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			232.733.000,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : TerlaksananyaPengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olaharaga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	24 Dokumen	7.216.720,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.216.720,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	44 Dokumen	3.680.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.680.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						96	32.400.000,00				32.400.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kesehatan : Terlaksananya Pengelolaan Survleins Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	Dokumen		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	1 Dokumen	118.975.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			118.975.000,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	40 Dokumen	172.348.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			960.589.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	1 Dokumen	21.350.896,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			21.350.896,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	74 Dokumen	408.144,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			234.576,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		15 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan*	Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo	53 Dokumen	5.452.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.452.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
			PUSKESMAS JATIROGO				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	1 Unit Kerja	1.725.585.695,42	PENDAPATAN DARI BLUD			1.725.585.695,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar**		**89,7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)							
				Insiden TBC Persentase		**10,08**					
				Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**183.23**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**89,9**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**13,41**					
						7%					
						%					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						per 100.000					
						%					
						%					
						per 1000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		86 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	456 Orang	107.268.192,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			107.268.192,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	5474 Orang	41.328.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			41.328.800,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	5171 Orang	2.880.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.880.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	54 Orang	19.704.384,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.704.384,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	335 Orang	3.518.640,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.518.640,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Pelayanan Sesuai Standar*							
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	12 Dokumen	191.631.360,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			191.631.360,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	24 Dokumen	3.518.640,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.518.640,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	5 Dokumen	36.480.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.600.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	64 Dokumen	3.237.456,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.237.456,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	1166 Orang	1.290.168,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.290.168,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	84 Dokumen	108.173.904,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			108.173.904,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya		*Jumlah Dokumen Operasional*		28	207.146.536,00	DANA ALOKASI			789.873.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Operasional Pelayanan Puskesmas		*Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	Dokumen		UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	24 Dokumen	11.668.880,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.668.880,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	72 Dokumen	234.576,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			234.576,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		42 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Jatirogo, Sidomulyo	42 Dokumen	4.117.464,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.117.464,00
			PUSKESMAS KEBONHARJO				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		20%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Kegiatan: Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	1 Unit Kerja	983.811.629,75	PENDAPATAN DARI BLUD			983.811.629,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar**		**89,7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)							
				Insiden TBC		**10,08**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN							
				AKBa (Angka Kematian Balita)							
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**183.23**					
						89,9					
						7					
						13,41%					
						%					
						per 100.000					
						%					
						per 1000					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	*Nilai IKM Puskesmas External*		91,55 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	332 Orang	100.330.688,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			100.330.688,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	1938 Orang	25.440.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.440.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	4118 Orang	5.760.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.760.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	48 Orang	3.127.680,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.127.680,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	304 Orang	320.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			320.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	12 Dokumen	176.462.728,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			176.462.728,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	24 Dokumen	1.440.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.440.000,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan ; Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	20 Dokumen	6.080.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.080.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	88 Dokumen	10.410.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.410.000,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan " Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	102 Orang	2.240.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.240.000,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	12 Dokumen	118.407.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			118.407.000,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	4 Dokumen	244.217.975,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			823.957.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	12 Dokumen	23.935.032,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			23.935.032,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	60 Dokumen	188.872,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			188.872,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kebonharjo)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		42 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo	12 Dokumen	13.481.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.481.000,00
			PUSKESMAS BANCAR				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Sasaran Kegiatab: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran sub Kegiatan : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	1 Unit Kerja	1.263.278.447,05	PENDAPATAN DARI BLUD			1.263.278.447,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden TBC**		**183.23**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**89,9**					
				Prevalensi Wasting		**10,08**					
				Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**13,41**					
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**7**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**89,70 per 100.000**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar		**%**					
						%					
						%					
						per 1000					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Bulu)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		92%	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	267 Orang	35.061.120,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			35.061.120,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	2302 Orang	60.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			60.800.000,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	3483 Orang	9.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.600.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	39 Orang	14.074.560,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.074.560,00
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	346 Orang	8.540.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.540.000,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	12 Dokumen	203.316.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			203.316.000,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	24 Dokumen	7.680.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.680.000,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	80 Dokumen	8.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.800.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	96 Dokumen	3.590.960,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.590.960,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	961 Orang	7.037.280,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.037.280,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	84 Dokumen	122.091.040,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			122.091.040,00
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	40 Dokumen	242.544.040,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			781.994.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	24 Dokumen	12.636.080,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.636.080,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	87 Dokumen	390.960,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			390.960,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		50 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Bancar, Bancar	1 Dokumen	14.902.960,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.902.960,00
			PUSKESMAS BULU				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.01**	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Prangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**83,25 Poin**	**220.284.960.494,87**				**202.791.111.960,00**
	1.02.01.2.10	Ssasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Kemandirian Puskesmas*		40%	75.092.661.369,87				75.092.661.350,00
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Sasaran Kegiatan : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	1 Unit Kerja	2.751.148.128,16	PENDAPATAN DARI BLUD			2.751.148.128,00
2	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden TBC** **AKBa (Angka Kematian Balita)** **Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**		**183.23** **7** **13,41**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**10,08**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**89,7**					
						89,90 per					
						100.000					
						per 1000					
						%					
						%					
						%					
						%					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Bancar)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai IKM Puskesmas External*		86,11 Nilai	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	494 Orang	115.907.232,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			115.907.232,00
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	4000 Orang	28.735.808,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			28.735.808,00
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	6388 Orang	6.720.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.720.000,00
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	74 Orang	3.284.064,00	DAK NON FISIK-DANA			3.284.604,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		*Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	471 Orang	13.127.400,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.127.400,00
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	12 Dokumen	240.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			240.200.000,00
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
		Sasaran Sub kegiatan :Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	24 Dokumen	1.720.224,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.720.224,00
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	72 Dokumen	14.720.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.720.000,00
	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
		Sasaran sub kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	132 Dokumen	15.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.750.000,00
	1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	1523 Orang	2.189.376,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.189.376,00
	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						72	122.816.600,00				122.816.600,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	Dokumen		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	40 Dokumen	163.432.040,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			871.791.000,00
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	24 Dokumen	12.895.536,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.895.536,00
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
		Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	87 Dokumen	703.728,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			703.728,00
3	**1.02.05**	Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber-PHBS**		**51,61%**	**792.630.584,00**				**1.105.443.634,00**
	1.02.05.2.03	Sasaran Kegiatan:Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader yang dilakukan Asesment (ILP)*		63 Orang	309.567.084,00				740.489.634,00
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	Kab. Tuban, Bancar, Bulujowo	13 Dokumen	10.258.992,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.258.992,00
			UPTD LABORATORIUM KESEHATAN				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**AKBa (Angka Kematian Balita)**		**7**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)		**89.9**					
				Prosentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**89.70**					
				Insiden TBC		**10.08**					
						13.41					
						183.23 per					
						1000					
						%					
						%					
						%					
						%					
						per 100.000					
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Labkesda Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% Labkesmas sesuai standar*		0.52 Labkesmas	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	54	648.889.815,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG			300.000.000,00

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								KESEHATAN DAK NON			
						Dokumen		FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA			
			UPTD INSTALASI FARMASI				**342.454.628.405,70**				**346.595.706.728,00**
	1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
	1.02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**328.067.330.566,70**				**319.524.429.728,00**
1	**1.02.02**	**Outcome: Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan Masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Wasting Balita(Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita)**		**10.08**	**106.000.487.444,83**				**115.010.396.134,00**
				Prosentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		**13.41**					
				AKBa (Angka Kematian Balita)		**7**					
				Persentase fasyankes dengan SPA sesuai standar Insiden TBC		**89.70**					
				Presentase Cakupan Kepesertaan JKN		**183.23**					
						89.90 %					
						%					
						per 1000					
						%					
						per 100.000					
						%					

No	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.02.02.2.02	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyediaan Layanan Labkesda Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IFK)*		24 Dokumen	72.045.098.841,33				97.515.230.234,00
	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		Sasaran Sub Kegiatan: "Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari	24 Dokumen	300.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN			300.000.000,00
	J U M L A H						**644.861.637.166,51**				**687.352.278.581,00**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang telah disusun ini merupakan komitmen dari Kepala Dinas dan seluruh staf pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban untuk dilaksanakan demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang kesehatan dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan supaya terwujud komunikasi antara para pihak sehingga nantinya dapat terbangun dengan baik sehingga dapat terbangun dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Tuban.

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Tuban yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Perencanaan kinerja pembangunan bidang kesehatan yang telah dibentuk ini diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi segala kegiatan yang dilakukan sehingga nantinya diharapkan agenda pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik.

Selain itu, perubahan rencana kerja ini juga harus mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Hal ini termasuk dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, baik dari segi kebijakan, teknologi, maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban dapat merespon secara adaptif dan proaktif terhadap setiap perubahan yang terjadi.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara dinas kesehatan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah,

sektor swasta, dan masyarakat, sangat dibutuhkan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat upaya yang telah dilakukan, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Catatan penting dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini menyesuaikan Rencana Stategis periode 2025-2029 sehingga indikator kinerja mengalami perubahan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran menyesuaikan target kinerja yang ditetapkan dan efisiensi anggaran dan belanja APBD sesuai dengan inpres nomor 1 tahun 2025. Kegiatan akan tetap dilaksanakan walaupun tanpa anggaran dari APBD karena merupakan kegiatan program rutin yang dilakukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai pelayanan primer dan rujukan.

Rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tahun 2025 akan disesuaikan dan ditingkatkan sesuai target kinerja yang sudah di tetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029.

Pada akhirnya, keberhasilan dari perubahan rencana kerja ini sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama seluruh pihak yang terlDCibat. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban berharap bahwa dengan adanya perubahan ini, kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan, dan tujuan pembangunan di bidang kesehatan dapat tercapai dengan lebih baik. Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mencapai tujuan ini tidaklah mudah dan memerlukan kerja keras serta dedikasi yang tinggi. Namun, dengan semangat dan komitmen yang kuat, kami yakin bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Dra. ESTI SURAHMI, Apt.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.

b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.

d. Bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rebncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan dalam pasal 343 ayat 1 (Satu) yaitu Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2025 Kabupaten Tuban merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah selama lima tahun, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah diharapkan untuk menyesuaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan hal tersebut. Untuk dokumen Perubahan Rencana Kerja paling sedikit memuat tentang analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai triwulan II tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah. Rencana kerja dan pendanaan tersebut mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

Penyusunan perubahan rencana kerja untuk sasaran perangkat daerah disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerah. Selanjutnya perubahan rencana kerja digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum PAPBD, KUPA PPAS, RKAP Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan. Apabila Perubahan rencana kerja tidak disusun, maka capaian target dari program dan kegiatan serta anggaran akan terlambat dan tidak maksimal. Di dalam penyelenggaraan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tuban sesuai Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja disebutkan bahwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan prasarana bidang sumber daya air, bidang cipta karya, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang tata ruang, pertanahan dan jasa konstruksi serta bidang bina marga.

Penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e) Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f) Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
g) Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h) Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sumber Daya Air;
d. Bidang Cipta Karya;

e. Bidang Bina Marga;
f. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi;
g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor136);
16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeflkasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 nomor 1447);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1447);
24) Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62);
30) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 245-17/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 278-18/2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 161);

34) Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Sen E Nomor 6);
35) Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Sen E Nomor 67); dan
36) Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan perubahan Rencana Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban bertujuan untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dengan dinamika perubahan yang terjadi selama tahun berjalan. Hal ini mencakup penyesuaian target, program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan perkembangan kebutuhan, kebijakan baru, atau kondisi aktual di lapangan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini adalah:

1. Menyesuaikan dengan perubahan kebijakan serta memastikan perubahan renja selaras dengan perubahan regulasi Pemerintah Daerah yaitu RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Merevisi alokasi anggaran dan fisik kegiatan agar lebih efisien, termasuk penyerapan anggaran dan realisasi proyek infrastruktur;
3. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan II Tahun 2025 khususnya mengenai pencapaian target kinerja dan keuangan menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian target indikator karena perkembangan situasi dan kondisi saat ini beberapa diantaranya belum selaras dengan perencanaan yang telah disusun diawal tahun perencanaan. Dari evaluasi terhadap realisasi anggaran maupun evaluasi terhadap realisasi pencapaian target kinerja maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2025. Selain berdasarkan hasil evaluasi, secara lebih rinci dapat disampaikan pula bahwa perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan alasan:

1. Rencana pelaksanaan diawal tahun perencanaan, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan utamanya terhadap asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

Pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah : Dinas PUPR, PRKP
Kabupaten/Kota : Tuban
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

Lembar 1

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Konektivitas antar wilayah		Cakupan konektivitas wilayah jalan dan jembatan	100 (%)	968.648.294.670	85.25 (%)	887.681.201.121	98,25 (%)	208.688.780.000	0 (%)	0	0 (%)	255.167.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	257.740.000	0 (%)	887.938.941.121	0 %	91.67%	Kepala Dinas PUPR, PRKP
1		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten /kota	100 (%)	968.648.294.670	85.25 (%)	887.681.201.121	98.25 (%)	208.688.780.000	0 (%)	0	0 (%)	255.167.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	257.740.000	0 (%)	887.938.941.121	0 %	91.67 %	KEPALA BIDANG BINA MARGA
		1. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100 (%)	968.648.294.670	85.25 (%)	887.681.201.121	98.25 (%)	208.688.780.000	0 (%)	0	0 (%)	255.167.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	257.740.000	0 (%)	887.938.941.121	0 %	91.67 %	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	29.79 (km)	149.389.447.263	17.5 (km)	25.227.663.800	6.02 (km)	9.800.885.000	0 (km)	0	0 (km)	1.837.885.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	1.837.885.000	17.5 (km)	25.227.663.800	58.75 %	16.89 %	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		2. Pemeliharaan berkala jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	403.29 (km)	228.027.735.000	337.56 (km)	226.677.411.189	71.17 (km)	48.285.252.000	0 (km)	0	0 (km)	12.514.821.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	12.514.821.000	337.56 (km)	226.677.411.189	83.7 %	99.41 %	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		3. Pemeliharaan rutin jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	211.1 (km)	165.755.000.000	119.44 (km)	92.280.240.942	21.2 (km)	19.100.000.000	0 (km)	0	0 (km)	255.167.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	257.740.000	119.44 (km)	92.537.980.942	56.58 %	55.83 %	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		4. Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	24 (Jembatan)	1.155.000.000	0 (Jembatan)	0	1 (Jembatan)	400.000.000	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 %	0 %	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		5. Penggantian jembatan	Jumlah jembatan yang diganti	171 (Jembatan)	12.697.500.000	13 (Jembatan)	24.403.223.850	5 (Jembatan)	24.380.265.000	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	13 (Jembatan)	24.403.223.850	7.6 %	192.19 %	JF Teknik Jalan dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																								Jembatan Ahli Muda
		6. Rehabilitasi jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	163 (Jembatan)	723.000.000	3 (Jembatan)	27.783.199.750	5 (Jembatan)	2.335.000.000	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	0 (Jembatan)	0	3 (Jembatan)	27.783.199.750	1.84 %	384 2.77 %	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		7. Pelebaran jalan menuju standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	57.25 (km)	131.101.000.000	62.34 (km)	119.624.572.372	27.04 (km)	49.530.263.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	62.34 (km)	119.624.572.372	108.9 %	91.25 %	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		8. Rekonstruksi jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	69.03 (km)	271.229.607.907	124.73 (km)	362.392.111.408	18.15 (km)	60.813.000.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	124.73 (km)	362.392.111.408	180.69 %	133.61 %	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
B	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA		Cakupan infrastruktur pengelolaan SDA	100 (%)	80.285.171.842	73.58 (%)	275.195.986.135	76 (%)	65.348.100.000	0 (%)	0	0 (%)	361.669.100	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	367.402.100	0 (%)	275.563.388.235	0%	343.23 %	KEPALA DINAS PUPR, PRKP

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas derah irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	85 (%)	35.018.343.283	53.71 (%)	275.195.986.135	72.15 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0 (%)	275.195.986.135	0%	785.86 %	0 (%)	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di wilayah Kabupaten / Kota	88.9 (%)	45.266.828.559	87.25 (%)	153.991.429.324	88.75 (%)	65.348.100.000	0 (%)	0	0 (%)	361.669.100	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	367.402.100	0 (%)	154.358.831.424	0%	341 %	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana irigasi dalam kondisi baik	85 (%)	35.018.343.283	53.71 (%)	80.354.815.364	72.15 (%)	20.009.100.000	0 (%)	0	0 (%)	361.669.100	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	367.402.100	0 (%)	80.722.217.464	0%	230.51 %	JF Teknik Pengairan Ahli Muda
		1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	3.1 (km)	5.192.350.890	12.77 (km)	27.736.209.050	6.25 (km)	7.200.000.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	27.736.209.050	0%	534.17 %	JF Teknik Pengairan Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4.41 (km)	17.250.467.114	0 (km)	0	7.17 (km)	8.809.100.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0%	0%	JF Teknik Pengairan Ahli Muda
		3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.18 (km)	1.580.000.000	0 (km)	0	0 (km)	4.000.000.000	0 (km)	0	0 (km)	361.669.100	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	367.402.100	0 (km)	367.402.100	0%	0%	JF Teknik Pengairan Ahli Muda
		2. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah	Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	88.9 (%)	45.266.828.559	87.25 (%)	194.841.170.771	88.2 (%)	45.339.000.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	194.841.170.771	0%	430.43 %	JF Teknik Pengairan Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kabupaten/Kota																						
		1. Pembangunan tanggul sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	50 (km)	8.000.000.000	0.31 (km)	2.103.939.000	5 (km)	10.000.000.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	2.103.939.000	0%	26.3 %	JF Teknik Pengairan Ahli Muda
		2. Pembangunan bangunan perkuatan tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	4.38 (km)	13.052.328.559	4.51 (km)	25.385.277.105	4.32 (km)	10.000.000.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	4.51 (km)	25.385.277.105	102.98 %	194.49 %	JF Teknik Pengairan Ahli Muda
		3. Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	2 (Unit)	10.300.000.000	2 (Unit)	2.094.244.000	1 (Unit)	2.500.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	2.094.244.000	100 %	20.33 %	JF Teknik Pengairan Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4. Revitalisasi danau	Jumlah danau dan penampung air alami lainnya yang direvitalisasi	10 (Unit)	6.950.000.000	0	0	5 (Unit)	3.750.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0	0	0	0	JF Teknik Pengairan Ahli Muda
		5. Normalisasi/Restorasi sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi	9.45 (km)	1.350.000.000	55.97 (km)	129.798.450.600	35.1 (km)	21.289.000.000	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	0 (km)	0	55.97 (km)	129.798.450.600	592.27 %	9614.7 %	JF Teknik Pengairan Ahli Muda
C	Optimalisasi penataan ruang		Tingkat kemanfaatan ruang sesuai rencana	96 (%)	124.970.320.558	91.14 (%)	110.538.939.857	94.5 (%)	124.273.858.732	0 (%)	252.923.697	0 (%)	1.518.347.956	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.636.197.956	0 (%)	112.175.137.813	0%	89.76 %	Kepala Dinas
1		Program penataan bangunan gedung	1. Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100 (%)	1.377.271.353	0 (%)	0	100 (%)	3.291.570.000	0 (%)	0	0 (%)	86.157.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	108.957.000	0 (%)	108.957.000	0%	0%	Kepala Bidang Taruna Jaskon
			Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan	10 (%)	0	0 (%)	0	10 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Taruna Jaskon

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota,Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10 (Dokumen)	1.377.271.353	41 (Dokumen)	14.711.280.430	10 (Dokumen)	3.291.570.000	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	86.157.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	108.957.000	2 (Dokumen)	14.820.237.430	20%	107 6.06 %	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	5 (Dokumen)	500.000.000	74 (Dokumen)	531.756.120	5 (Dokumen)	591.570.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	28.017.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	50.817.000	75 (Dokumen)	582.573.120	1500%	116.51%	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	5 (Dokumen)	850.000.000	11 (Dokumen)	14.179.524.310	1 (Dokumen)	2.700.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	58.140.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	58.140.000	0 (Dokumen)	14.237.664.310	0%	1675.02 %	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
2		Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pembangunan bangunan yang sesuai dengan Perencanaan/Ketentuan RTH	10 (%)	0	10 (%)	91.418.445.057	10 (%)	118.509.369.932	0 (%)	0	0 (%)	897.055.795	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	949.510.295	0 (%)	92.367.955.352	0%	80.52 %	Kepala Bidang Taruna Jaskon

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bnagunan dan liangkungan Kabupaten / Kota	1 (Dokumen)	114.707.330.063	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	33.209.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	33.209.500	0 (Dokumen)	33.209.500	0%	0%	Kepala Bidang Taruna Jaskon
		1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan wilayah Kabupaten / Kota	6 (Dokumen)	114.707.330.063	9 (Dokumen)	91.418.445.057	6 (Dokumen)	118.509.369.932	0 (Dokumen)	252.923.697	1 (Dokumen)	930.265.295	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	982.719.795	1 (Dokumen)	92.401.164.852	16.67 %	80.55 %	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	6 (Dokumen)	3.081.685.867	0 (Dokumen)	29.269.887.501	1 (Dokumen)	100.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	29.269.887.501	0%	949.8 %	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
		2. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis	5 (Kawasan)	106.380.498.080	10 (Kawasan)	81.909.303.539	6 (Kawasan)	118.409.369.932	0 (Kawasan)	252.923.697	0 (Kawasan)	930.265.295	0 (Kawasan)	0	0 (Kawasan)	0	0 (Kawasan)	982.719.795	0 (Kawasan)	82.892.023.334	0%	77.92 %	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Lainnya yang Ditata																					
3		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang	100 (%)	8.191.497.865	62.77 (%)	4.406.754.370	82.98 (%)	2.472.918.800	0 (%)	0	0 (%)	15.870.160	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	58.465.660	0 (%)	4.465.220.030	0%	54.51 %	Kepala Bidang Taruna Jaskon
		1. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	10 (Dokumen)	500.000.000	36 (Dokumen)	739.336.035	25 (Dokumen)	493.250.000	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	15.870.160	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	58.465.660	5 (Dokumen)	797.801.695	50%	159.56 %	Penata Ruang Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	24 (Dokumen)	500.000.000	6 (Dokumen)	125.512.665	1 (Dokumen)	152.515.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	10.487.660	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	15.262.660	0 (Dokumen)	140.775.325	0%	28.16 %	Penata Ruang Ahli Muda
		2. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	30 (Layanan)	500.000.000	30 (Layanan)	231.314.800	24 (Layanan)	340.735.000	0 (Layanan)	0	6 (Layanan)	5.382.500	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	6 (Layanan)	43.203.000	6 (Layanan)	274.517.800	20%	54.9 %	Penata Ruang Ahli Muda
		2. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab./ kota	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	3 (Dokumen)	1.518.000.000	6 (Dokumen)	1.041.761.488	6 (Dokumen)	641.258.800	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.041.761.488	0%	68.63 %	Penata Ruang Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 (Dokumen)	1.248.000.000	6 (Dokumen)	1.041.761.488	5 (Dokumen)	535.940.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.041.761.488	0%	83.47 %	Penata Ruang Ahli Muda
		2. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	105.318.800	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0					0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0%	0%	Penata Ruang Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun	4 (Dokumen)	300.000.000	4 (Dokumen)	296.641.100	6 (Dokumen)	878.293.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	296.641.100	0%	98.88 %	Penata Ruang Ahli Muda
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota	4 (Dokumen)	300.000.000	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	428.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Penata Ruang Ahli Muda
		4. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	25 (Dokumen)	5.873.497.865	1 (Dokumen)	2.329.015.747	6 (Dokumen)	460.117.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.329.015.747	0%	39.65 %	Penata Ruang Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																						
		1. Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	17 (Dokumen)	4.500.623.352	0 (Dokumen)	2.093.840.747	1 (Dokumen)	311.380.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.093.840.747	0%	46.52 %	JF Penata Ruang Ahli Muda
		2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undanga	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	80 (Orang)	422.874.513	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	148.737.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Penata Ruang Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		n dan pedoman Bidang Penataan ruang																						
D	Meningkatnya kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman		Persentase permukiman yang terfasilitasi PSU	70 (%)	636.340.302.359	49.59 (%)	413.088.701.140	50 (%)	121.665.870.361	0 (%)	0	0 (%)	6.335.169.522	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	12.590.731.769	0 (%)	425.679.432.909	0%	66.89 %	Kepala Dinas PUPR, PRKP
			Persentase kawasan permukiman yang tertata	70 (%)	636.340.302.359	49.59 (%)	178.312.449.333	50 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	178.312.449.333	0%	28.02 %	KEPALA DINAS

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten /kota	87.28 (%)	39.024.378.111	0 (%)	0	92.35 (%)	14.513.908.500	0 (%)	0	0 (%)	202.500	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.432.500	0 (%)	1.432.500	0%	0%	Kepala Bidang Cipta Karya

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	1400 (KK)	39.024.378.111	0 (KK)	0	2141 (KK)	14.513.908.500	0 (KK)	0	0 (KK)	202.500	0 (KK)	0	0 (KK)	0	0 (KK)	1.432.500	0 (KK)	1.432.500	0%	0%	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
		1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1400 (SR)	37.124.378.111	3708 (SR)	22.191.599.532	2141 (SR)	14.513.908.500	0 (SR)	0	0 (SR)	202.500	0 (SR)	0	0 (SR)	0	0 (SR)	1.432.500	0 (SR)	22.193.032.032	0%	59.78 %	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88.29 (%)	27.538.466.223	87.52 (%)	29.006.859.784	86.23 (%)	9.700.190.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.075.000	0 (%)	29.007.934.784	0%	105.34 %	Kepala Bidang Cipta Karya
		1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga OD/PHBS yang memiliki system air limbah domestic (SPALD)	0.42 (%)	27.538.466.223	2.24 (%)	21.598.454.797	0.41 (%)	9.700.190.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.075.000	0 (%)	21.599.529.797	0%	78.43 %	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
		1. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	900 (Rumah Tangga)	15.460.000.000	2402 (Rumah Tangga)	23.480.490.005	872 (Rumah Tangga)	9.200.190.000	0 (Rumah Tangga)	0	0 (Rumah Tangga)	0	0 (Rumah Tangga)	0	0 (Rumah Tangga)	0	0 (Rumah Tangga)	1.075.000	2402 (Rumah Tangga)	23.481.565.005	266.89 %	151.89 %	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(SPALD) Setempat																						
		2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	20 (Meter)	500.000.000	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0%	0%	
3		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik	34.64 (%)	28.679.017.133	40.13 (%)	212.625.768.544	30.64 (%)	39.900.000.000	0 (%)	0	0 (%)	7.912.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	19.527.000	0 (%)	212.645.295.544	0%	741.47 %	Kepala Bidang Cipta Karya

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	9024 (Meter)	28.679.017.133	79392.9 (Meter)	212.625.768.544	7112 (Meter)	39.900.000.000	0 (Meter)	0	0 (Meter)	7.912.000	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	19.527.000	0 (Meter)	212.645.295.544	0%	741.47 %	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
		1. Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	994 (Meter)	3.022.548.741	814.6 (Meter)	1.254.430.494	408 (Meter)	650.000.000	0 (Meter)	0	0 (Meter)	7.912.000	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	19.527.000	814.6 (Meter)	1.273.957.494	81.95 %	42.15 %	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
		2. Pembangunan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3201 (Meter)	8.398.641.957	61379.4 (Meter)	125.266.684.700	6704 (Meter)	23.777.500.000	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	0	0 (Meter)	125.266.684.700	0%	1491.51 %	JF Teknik Penyehatan Lingkung

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Lingkungan																						an Ahli Muda
		3. Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	21 (Sistem Drainase Lingkungan)	17.257.826.435	11 (Sistem Drainase Lingkungan)	81.738.866.350	12 (Sistem Drainase Lingkungan)	15.472.500.000	0 (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0 (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0 (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0 (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0 (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0 (Sistem Drainase Lingkungan)	81.738.866.350	0%	473.63 %	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
4		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan Regional untuk menunjang tingkat layanan yang telah direncanakan	0 (%)	0	0 (%)	0	76 (%)	500.000.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0%	0%	Kepala Bidang Cipta Karya

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	0 (KK)	0	0 (KK)	0	200 (KK)	500.000.000	0 (KK)	0	0 (KK)	0	0 (KK)	0	0 (KK)	0	0 (KK)	0	0 (KK)	0	0%	0%	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
		1. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	50 (Ton)	500.000.000	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0%	0%	
5.		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi korban bencana yang tepat sasaran	1.79 (%)	500.000.000	0 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	100 (%)	5.778.521.300	0 (%)	0	0 (%)	30.000.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase masyarakat yang membutuhkan rumah, termasuk rumah komersil.	1.79 (%)	500.000.000	0 (%)	0	1.64 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	119 (Unit)	5.778.521.300	0 (unit)	0	0 (unit)	30.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota yang Terbangun	119 (unit rumah)	5.778.521.300	0 (unit rumah)	0	1 (unit rumah)	30.000.000	0 (unit rumah)	0	0 (unit rumah)	0	0 (unit rumah)	0	0 (unit rumah)	0	0 (unit rumah)	0	0 (unit rumah)	0	0 %	0 %	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
6		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani infrastrukturnya	21.9 (%)	30.939.004.084	0 (%)	0	27 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13.3 (%)	49.663.434.600	4.35 (%)	18.570.759.916	12.1 (%)	4.982.500.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	4.560.000	0 (%)	18.575.319.916	0%	37.4 %	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	82.2 (ha)	80.146.954.707	168.02 (Hektar)	22.406.901.972	338.92 (Hektar)	4.982.500.000	0 (ha)	0	0 (ha)	0	0 (ha)	0	0 (ha)	0	0 (ha)	4.560.000	0 (Hektar)	22.411.461.972	0%	27.96 %	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
		1. Perbaikan rumah tidak layak huni	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	36 (unit rumah)	545.644.110	151 (unit rumah)	8.722.662.972	75 (unit rumah)	3.460.000.000	0 (unit rumah)	0	0 (unit rumah)	0	0 (unit rumah)	0	0 (unit rumah)	0	0 (unit rumah)	0	4.560.000	151 (unit rumah)	8.727.222.972	419.44 %	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
		2. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	82.2 (ha)	30.469.004.084	85.82 (Hektar)	4.567.812.000	246.6 (Hektar)	1.522.500.000	0 (ha)	0	0 (ha)	0	0 (ha)	0	0 (ha)	0	0 (ha)	0	85.82 (Hektar)	4.567.812.000	104.4 %	14.99 %	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. sarana dan utilitas)	70 (%)	476.474.675.974	82.51 (%)	414.653.509.947	84 (%)	21.000.000.000	0 (%)	0	0 (%)	300.000.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	981.750.000	0 (%)	415.635.259.947	0%	87.23 %	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	1946 (blok)	476.474.675.974	672 (blok)	414.653.509.947	100 (blok)	21.000.000.000	0 (blok)	0	0 (blok)	300.000.000	0 (blok)	0	0 (blok)	0	0 (blok)	981.750.000	0 (blok)	415.635.259.947	0%	87.23 %	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	70 (lokasi)	475.574.675.974	0 (lokasi)	0	12 (lokasi)	21.000.000.000	0 (lokasi)	0	0 (lokasi)	300.000.000	0 (lokasi)	0	0 (lokasi)	0	0 (lokasi)	981.750.000	0 (lokasi)	981.750.000	0%	0%	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (Poin)	127.445.546.612	83.1 (Poin)	68.596.098.743	83.2 (Poin)	31.039.271.861	0 (Poin)	5.555.332.247	0 (Poin)	6.027.055.022	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	11.582.387.269	0 (Poin)	80.178.486.012	0%	62.91 %	Sekretaris Dinas
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 (Dokumen)	911.631.440	27 (Dokumen)	533.267.780	9 (Dokumen)	266.022.256	0 (Dokumen)	31.843.000	3 (Dokumen)	10.831.450	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	42.674.450	3 (Dokumen)	575.942.230	33.33 %	63.18 %	Perencana Ahli Muda
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 (Dokumen)	290.301.114	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	144.623.256	0 (Dokumen)	15.497.000	2 (Dokumen)	5.045.875	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	20.542.875	2 (Dokumen)	20.542.875	0%	0%	Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 (Laporan)	67.637.137	22 (Laporan)	107.135.000	22 (Laporan)	68.945.000	0 (Laporan)	5.640.000	5 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	5 (Laporan)	5.640.000	5 (Laporan)	112.775.000	22.73 %	166.74 %	Perencana Ahli Muda
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 (Laporan)	553.693.189	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	52.454.000	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	5.785.575	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	16.491.575	2 (Laporan)	16.491.575	0%	0%	Perencana Ahli Muda
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	12 (Dokumen)	109.019.466.453	24 (Dokumen)	53.802.100.864	12 (Dokumen)	26.205.961.349	0 (Dokumen)	4.418.821.627	3 (Dokumen)	5.288.605.725	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	10.242.268.103	6 (Dokumen)	64.044.368.967	50%	58.75 %	Kasubbag Keuangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	346 (Orang/Bulan)	3.270.603.023	0 (Orang)	0	211 (Orang)	25.518.677.349	221 (Orang/Bulan)	4.381.922.275	211 (Orang)	5.227.097.818	0 (Orang/Bulan)	0	0 (Orang/Bulan)	0	211 (Orang)	10.084.487.589	211 (Orang)	10.084.487.589	0%	0%	Kasubbag Keuangan
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 (Dokumen)	105.748.863.430	10 (Dokumen)	1.851.424.489	5 (Dokumen)	687.284.000	1 (Dokumen)	36.899.352	2 (Dokumen)	61.507.907	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	157.780.514	2 (Dokumen)	2.009.205.003	40%	1.9%	Kasubbag Keuangan
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	1 (Layanan)	2.800.821.350	0 (Orang)	0	192 (Orang)	135.424.000	0 (Layanan)	0	1 (Layanan)	109.352.700	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0%	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	192 (Paket)	135.424.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum	1 (Layanan)	2.800.821.350	1 (Layanan)	5.876.786.786	1 (Layanan)	605.010.650	1 (Layanan)	12.579.000	1 (Layanan)	77.161.819	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	2 (Layanan)	89.740.819	2 (Layanan)	5.966.527.605	200 %	213.03 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 (Paket)	34.935.373	0 (Paket)	0	1 (Paket)	7.189.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 (Paket)	605.124.185	0 (Paket)	0	4 (Paket)	125.873.400	4 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	4 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	32 (Paket)	962.924.126	0 (Paket)	0	1 (Paket)	198.150.500	0 (Paket)	0	1 (Paket)	55.280.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	55.280.000	1 (Paket)	55.280.000	0%	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			yang Disediakan																					
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	260 (Paket)	302.107.053	1 (Paket)	150.175.925	1 (Paket)	63.477.750	0 (Paket)	0	1 (Paket)	4.449.500	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	5.504.500	2 (Paket)	155.680.425	0.77 %	51.53 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 (Dokumen)	91.561.323	24 (Dokumen)	50.640.000	24 (Dokumen)	19.320.000	24 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	5.700.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	7.225.000	12 (Dokumen)	57.865.000	400 %	63.2 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 (Laporan)	804.169.290	60 (Laporan)	492.087.711	60 (Laporan)	191.000.000	0 (Laporan)	8.683.000	15 (Laporan)	11.732.319	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	15 (Laporan)	20.415.319	15 (Laporan)	512.503.030	150 0%	47 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang	16 (Jasa)	10.655.125.447	16 (Jasa)	4.332.357.442	16 (Jasa)	2.515.357.040	4 (Jasa)	505.699.669	4 (Jasa)	514.213.078	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	0	8 (Jasa)	1.019.912.747	8 (Jasa)	5.352.270.189	50%	50.23 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 (Laporan)	26.610.124	0 (Laporan)	1.130.757	16 (Laporan)	3.653.136	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0%	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 (Laporan)	2.110.128.011	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	447.496.000	1 (Laporan)	92.581.942	1 (Laporan)	101.971.351	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	194.553.293	2 (Laporan)	194.553.293	0%	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 (Laporan)	109.333.319	1 (Laporan)	117.328.000	4 (Laporan)	84.231.700	1 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	117.328.000	100 %	107.31 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			yang Disediakan																					
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 (Laporan)	8.409.053.993	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	1.979.976.340	3 (Laporan)	413.117.727	3 (Laporan)	412.241.727	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	825.359.454	6 (Laporan)	825.359.454	0%	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan bmd	158 (Unit)	392 (Unit)	3.835.300.871	234 (Unit)	1.311.496.566	0 (Unit)	51.548.200	67 (Unit)	136.242.950	392 (Unit)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	67 (Unit)	187.791.150	67 (Unit)	4.023.092.021	42.41 %	116.15 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 (Unit)	1.921.362.122	105 (Unit)	1.147.585.140	98 (Unit)	760.610.370	0 (Unit)	41.418.200	48 (Unit)	98.765.200	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	48 (Unit)	140.183.400	48 (Unit)	1.287.768.540	96%	67.02 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 (Unit)	97.592.389	250 (Unit)	59.924.500	100 (Unit)	20.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	59.924.500	0%	61.4 %	Kasubbag Umum dan Kepegawain
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 (Unit)	642.846.815	0 (Unit)	0	31 (Unit)	207.590.500	0 (Unit)	10.130.000	6 (Unit)	37.477.750	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	6 (Unit)	47.607.750	6 (Unit)	47.607.750	0%	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 (Unit)	801.778.705	0 (Unit)	0	5 (Unit)	323.295.696	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0%	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Dukungan kebijakan Kepala Daerah terkait program prioritas
- Memiliki unit pelaksana teknis kegiatan yang membantu pelaksanaan pekerjaan
- Partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Survey dan Perencanaan yang masih belum matang
- Tuntutan terhadap infrastruktur yang cukup besar

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

- Mengoptimalkan realisasi kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya
- Melakukan percepatan pekerjaan yang terkait dengan target kinerja yang belum berjalan

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Cakupan konektivitas wilayah

Sampai dengan akhir tahun 2025 Triwulan II panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi (dalam kondisi baik) mencapai 1610,611 km dari total keseluruhan Panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi (di Kabupaten Tuban) yaitu 1889,354 km. Pencapaian indikator cakupan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, serta aksesibilitas masyarakat. Namun, tidak tercapainya target indikator tersebut sering kali disebabkan oleh berbagai kendala, baik teknis, anggaran, maupun non-teknis.

Berikut beberapa faktor tidak tercapainya indikator cakupan konektivitas wilayah jalan dan jembatan antara lain:

1. Banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan sebelum waktunya karena tidak mampu menahan beban kendaraan berat (melebihi tonase), terutama di jalur yang sering dilalui angkutan barang;
2. Pada Tahun 2024, terdapat penambahan Panjang jalan sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/92/KPTS/414.012/2024 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten sehingga hal itu juga mempengaruhi tidak tercapainya indikator tersebut;
3. Anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan mengalami penurunan dari tahun 2023, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Hal ini mengakibatkan tertundanya beberapa proyek strategis, baik pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur yang rusak;
4. Wilayah Kabupaten Tuban memiliki karakteristik geografis yang cukup kompleks, dengan adanya daerah perbukitan, sungai, dan kawasan terpencil. Hal ini menyulitkan proses pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertentu karena memerlukan biaya dan waktu lebih besar dibandingkan wilayah datar;
5. Beberapa proyek mengalami kendala teknis seperti kualitas bahan yang tidak sesuai spesifikasi, cuaca ekstrem yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, atau kurangnya tenaga ahli di lapangan;

6. Kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran dalam menjaga dan merawat infrastruktur jalan yang sudah ada turut mempengaruhi keberlanjutan cakupan konektivitas.

Dalam upaya mencapai indikator cakupan konektivitas wilayah jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Namun, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian target kinerja tersebut. Berikut adalah uraian upaya nyata yang telah dilakukan dan hambatan yang dihadapi:

- Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jalan yang optimal sebagai pendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, perbaikan jalan rusak, rehabilitasi jembatan, dan pengaspalan ulang di jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan kawasan permukiman;
- Melakukan survei dan pemetaan kondisi jalan serta jembatan secara berkala untuk menyusun perencanaan yang lebih akurat dan prioritas yang tepat sasaran;
- Pemerintah daerah berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur melalui APBD, serta mengupayakan dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun dan memelihara jalan serta jembatan.

Untuk mengatasi ketidaktercapaian indikator cakupan konektivitas wilayah, diperlukan langkah-langkah strategis yang berupa alternatif solusi yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Peningkatan regulasi penggunaan jalan, yaitu menerapkan kebijakan yang ketat untuk mengatur penggunaan jalan oleh kendaraan berat, termasuk pembatasan muatan dan rute khusus;
2. Memastikan alokasi anggaran lebih fokus pada pekerjaan yang perlu segera dilakukan penanganan (rusak berat dan sedang) yang mendukung konektivitas utama antar wilayah;
3. Optimalisasi perencanaan dan prioritas pembangunan, menggunakan pendekatan berbasis data untuk menentukan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat;

4. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, melakukan audit tahunan terhadap proyek jalan dan jembatan untuk mengevaluasi progres, kendala, dan dampak pembangunan;
5. Meningkatkan pemeliharaan jalan/jembatan melalui UPTD Teknis di masing-masing kecamatan.

Dengan langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Keberhasilan dalam meningkatkan cakupan konektivitas jalan dan jembatan di Kabupaten Tuban tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

b. Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air

Pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur SDA dengan indicator cakupan infrastruktur pengelolaan SDA dengan target 75% dan mendapatkan realisasi sebesar 73,58%. Realisasi tersebut sampai dengan tahun 2024 diperoleh dari Panjang bangunan SDA yang dikelola sebesar 173.811 m dibandingkan dengan total Panjang bangunan SDA dalam satu daerah yaitu 236.225,65 m. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, salah satu indikator strategis adalah cakupan infrastruktur pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Infrastruktur ini meliputi jaringan irigasi, pengelolaan air baku, pengendalian banjir, dan perlindungan sumber daya air lainnya. Pencapaian indikator ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, karena:

1. Kurangnya tenaga ahli di bidang pengelolaan SDA menjadi hambatan dalam merancang, mengelola, dan mengawasi proyek secara optimal;
2. Infrastruktur pengelolaan SDA yang ada, seperti bendungan, saluran irigasi, dan embung, banyak yang telah mengalami kerusakan akibat usia, kurangnya perawatan rutin, atau dampak cuaca ekstrem. Kondisi ini menurunkan kapasitas dan efisiensi dalam mendistribusikan dan mengelola air;
3. Fenomena perubahan iklim menyebabkan musim hujan yang lebih ekstrem dan musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi ini memengaruhi ketersediaan air baku serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan, yang mengakibatkan terganggunya pengelolaan SDA;

4. Hambatan teknis seperti sulitnya akses ke lokasi pembangunan, masalah dalam pengadaan material, dan kendala perizinan lahan menjadi faktor yang memperlambat penyelesaian proyek infrastruktur SDA;
5. Kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai potensi, kebutuhan, serta masalah terkait SDA di Kabupaten Tuban menyulitkan perencanaan yang komprehensif dan berbasis bukti.

Berbagai faktor yang menyebabkan penurunan kinerja pengelolaan SDA di Kabupaten Tuban telah memicu langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan berdasarkan penyebab penurunan kinerja:

1. Bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA;
2. Melaksanakan pemeliharaan rutin saluran irigasi, (embung), dan lainnya untuk memastikan fungsi infrastruktur berjalan optimal;
3. Mengajukan peningkatan alokasi anggaran melalui APBD atau APBN untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur SDA;
4. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Untuk meningkatkan kinerja indikator cakupan infrastruktur pengelolaan SDA, langkah-langkah alternatif Solusi ke depan yang perlu dilakukan:

1. Peningkatan anggaran dan sumber daya, yaitu dengan mengoptimalkan alokasi anggaran dan mendatangkan tenaga ahli untuk mendukung pembangunan serta perawatan infrastruktur SDA;
2. Adaptasi terhadap perubahan iklim**,** mengintegrasikan pendekatan berbasis mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan SDA, seperti pembangunan tanggul atau bendungan yang lebih tangguh terhadap cuaca ekstrem;
3. Membangun sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) untuk memantau kondisi infrastruktur, distribusi air, dan prediksi kebutuhan secara real-time;
4. Pengelolaan wilayah berbasis Daerah Aliran Sungai;
5. Pengembangan Sistem Informasi SDA, Membuat database yang terintegrasi untuk memetakan potensi, kebutuhan, dan kendala dalam pengelolaan SDA;

6. Agar pelaksanaan pekerjaan lapangan dilakukan secara tepat waktu, diperlukan perencanaan teknis yang matang. Ketika perencanaan sudah matang dan tepat, makan tahap penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan pekerjaan dapat dilakukan secara baik.

Dengan menerapkan alternatif solusi ini secara strategis dan berkelanjutan, diharapkan cakupan infrastruktur pengelolaan SDA di Kabupaten Tuban dapat meningkat, mendukung kebutuhan masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya air di masa depan.

c. Optimalisasi penataan ruang

Optimalisasi penataan ruang dengan indikator tingkat kemanfaatan ruang sesuai rencana pada tahun 2024, memiliki target 92,5%. Realisasi yang diperoleh yaitu 91,14%. Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana pada tahun 2024 sebesar 179.743,52 ha, sedangkan luas wilayah di Kabupaten Tuban mencapai 197.217 ha.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, indikator Tingkat Kemanfaatan Ruang Sesuai Rencana merupakan salah satu parameter penting dalam pelaksanaan tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam realisasinya, indikator ini belum mencapai target yang diharapkan, berikut beberapa factor yang mempengaruhi yaitu:

1. Karena target dokumen RDTR belum dapat terealisasi sehingga kepastian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di lapangan berkurang;
2. Kurangnya Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang (RTRW), Banyak kegiatan pembangunan, baik oleh pihak swasta maupun masyarakat, yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Misalnya, pembangunan di zona hijau atau konservasi yang seharusnya dilindungi;
3. Konversi lahan pertanian atau ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman, industri, atau komersial sering kali dilakukan tanpa memperhatikan rencana tata ruang yang ada;
4. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Tuban menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang, sehingga memicu penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana;
5. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mematuhi tata ruang, sehingga pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku;

6. Beberapa kebijakan pembangunan antar-sektor atau lintas lembaga tidak selaras dengan RTRW, sehingga menimbulkan konflik dalam implementasi pemanfaatan ruang.

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka alternatif solusi ke depan yang dapat diberikan yaitu:

1. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum:
   - Membentuk tim pengawas tata ruang untuk memantau pemanfaatan ruang di lapangan secara berkala.
   - Menindak tegas pelanggaran tata ruang dengan memberikan sanksi administratif, denda, atau pembongkaran bangunan yang melanggar.
2. Peningkatan kapasitas data dan sistem informasi:
   - Mengembangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis digital untuk memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang.
   - Melakukan pemutakhiran data geospasial secara rutin.
3. Sosialisasi dan edukasi tata ruang:
   - Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan ruang sesuai rencana melalui kampanye, seminar, dan penyuluhan.
   - Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan.
4. Penyelarasan kebijakan antar-sektor:
   - Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan kebijakan pembangunan dari sektor lain, seperti industri, pertanian, dan pariwisata, untuk menghindari konflik kepentingan.
5. Optimalisasi pemanfaatan ruang eksisting:
   - Mendorong penggunaan ruang yang sudah tersedia secara maksimal sebelum membuka lahan baru.
   - Revitalisasi kawasan yang tidak produktif agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
6. Penguatan regulasi dan perencanaan tata ruang:
   - Melakukan revisi RTRW dan RDTR secara periodik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan wilayah.
   - Meningkatkan harmonisasi antara perencanaan tingkat kabupaten dengan Provinsi dan Nasional.

   Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kemanfaatan ruang sesuai rencana dapat meningkat secara signifikan.

Hal ini tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Tuban.

d. Meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman

Sasaran meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas Kawasan permukiman dengan indikator persentase permukiman yang terfasilitasi PSU dengan target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 39.5%. Realisasi pada tahun 2024 yaitu 49,59%. Luas permukiman yang terfasilitasi prasarana, sarana dan utilitas di tahun 2024 mencapai 7410.23 ha sedangkan luas Kawasan permukiman di Kabupaten Tuban yaitu 14941,89 ha. Keberhasilan kinerja dalam meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kawasan permukiman di Kabupaten Tuban, yang dicerminkan melalui indikator persentase permukiman yang terfasilitasi PSU, dapat dianalisis dari beberapa faktor utama berikut:

1. Peningkatan PSU di kawasan permukiman dijalankan secara konsisten melalui kegiatan seperti:
   - Pembangunan jaringan jalan lingkungan di kelurahan;
   - Penyediaan saluran drainase, instalasi pengelolaan air limbah, dan sistem penyediaan air bersih di kelurahan dan wilayah kumuh;
2. Keberhasilan ini juga didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.
3. Efisiensi dalam alokasi anggaran serta sumber daya manusia dan material yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Pemanfaatan dana APBD dan dukungan dari pemerintah pusat juga memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan proyek PSU.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban telah melakukan berbagai upaya nyata dalam mewujudkan sasaran "Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kawasan permukiman." Berikut adalah langkah-langkah konkrit yang telah diambil:

1. Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Permukiman, meliputi Pembangunan jaringan jalan lingkungan di kelurahan dan wilayah kumuh untuk memperlancar aksesibilitas warga;
2. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh meliputi perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh

3. Dinas juga menggandeng pihak swasta, seperti pengembang properti, untuk mendukung penyediaan PSU di kawasan perumahan baru. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat melalui program seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur permukiman.

Dalam upaya meningkatkan persentase kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta mencapai target Renstra sebesar 70%, beberapa alternatif solusi dapat diimplementasikan:

1. Pemetaan wilayah prioritas:

   Memetakan wilayah permukiman yang memiliki kondisi paling membutuhkan pembangunan PSU berdasarkan data terkini, seperti kawasan kumuh, wilayah dengan tingkat infrastruktur rendah, dan daerah rawan bencana;
2. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan secara terpadu;
3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi.

Berdasarkan seluruh analisa di atas, maka implikasi yang timbul terhadap capaian sasaran/program yaitu:

1. Risiko tidak tercapainya target jangka menengah;
2. Hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi karena konektivitas yang rendah menghambat distribusi barang dan jasa, sementara infrastruktur SDA yang buruk mengancam ketahanan pangan dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir/kekeringan;
3. Terjadi ketimpangan Pembangunan antar wilayah sehingga dapat memicu masalah sosial dan ekonomi.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dan memastikan pencapaian target Renstra 2026, rekomendasi kebijakan dan tindakan yang perlu diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran (RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS) dengan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dan membuat kebijakan yang mewajibkan semua perencanaan program dan alokasi anggaran didasarkan pada data dan analisis yang robust (seperti data GIS, hasil survei, dan prediksi iklim).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik melalui peningkatan infrastruktur dasar sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

menjadi fokus utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman sebagai indikator kinerja pelayanan. Dalam menyusun program pembangunan infrastruktur, diperlukan proses berkelanjutan yang melibatkan pengambilan keputusan dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah di masa depan. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan program-program dinas ini sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, baik yang bersifat *bottom-up* (dari bawah) maupun *top-down* (dari atas).

Partisipasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga *stakeholders*, sangat memengaruhi kesuksesan program. Diperlukan kerja sama yang komunikatif dan inisiatif guna menciptakan pelaksanaan pembangunan yang kondusif. Untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2025, ditetapkan beberapa indikator keberhasilan sebagai tolak ukur efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban 2025-2045.
2. Ketersediaan dokumen P-RKPD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025.
3. Penjabaran program dan kegiatan RPJMD 2025-2029 ke dalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran yang ingin dicapai pada 2025 dalam P-RKPD.
4. Ketersediaan data dan informasi terkait jalan, jembatan, drainase, serta infrastruktur pendukung lainnya di seluruh Kabupaten Tuban.
5. Sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisa
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Indikator Kinerja Daerah											
1	Nilai Komponen Layanan Infrastruktur Jalan pada IKLI			n/a	n/a	78,18	79,68	62,9	76,68	78,18	79,68	
2	Nilai Komponen Jaringan Irigasi pada IKLI			n/a	n/a	83,53	84,33	86,53	82,73	83,53	84,33	
3	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RRTR			n/a	n/a	91,5	92,06	90,03	91,14	91,5	92,06	
4	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan			n/a	n/a	74	74,22	70,11	71,93	74	74,22	
		Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		84,98	92,25	92,61	92,84	91,52	91,84	92,61	92,84	
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		80,74	83,49	88,42	89,33	75,5	83,54	88,42	89,33	
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena		100	100	100	100	100	n/a	100	100	

		relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota										
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100	n/a	100	100	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas untuk Indikator Nilai Komponen Layanan Infrastruktur Jalan pada IKLI terjadi peningkatan realisasi yang sangat signifikan dari 62,9 di tahun 2023 menjadi 76,68 di tahun 2024. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, karena tidak hanya memenuhi target tetapi bahkan hampir menyamai target untuk tahun 2025 (78,18%). Tren ini menunjukkan komitmen dan kinerja yang sangat kuat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Pada indikator Nilai Komponen Jaringan Irigasi pada IKLI realisasi 2023 86,53 sedangkan Realisasi 2024 82,73. Hal ini mengalami penurunan realisasi sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang terjadi peningkatan kinerja yang baik.

Untuk indikator Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RRTR, realisasi dari tahun ke tahun selalu mendekati atau memenuhi target. Pada tahun 2023, realisasi yang didapatkan yaitu 90,03% dan Realisasi 2024 91,14% sehingga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan konsistensi dan pengendalian yang baik dalam memastikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pada indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan terjadi peningkatan realisasi yang signifikan dari 70,11% (2023) menjadi 71,93% (2024). Ini menunjukkan program perumahan rakyat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Target pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota terdiri atas:

a. Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, maka ditetapkan tema RKPD Kabupaten Tuban yaitu Mewujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui pemantapan daya saing daerah berbasis sumber daya manusia unggul serta potensi sektor strategis. Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah Sarana prasarana pelayanan dasar publik serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah belum merata. Kemudian untuk permasalahan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 yaitu Pemenuhan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang pada akhirnya berdampak pada program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban. Berikut beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Kondisi jalan yang belum mantap di beberapa wilayah;
2. Masih sering terjadi genangan/banjir di beberapa titik wilayah;
3. Pengelolaan jaringan irigasi yang belum optimal, mengurangi efektivitas distribusi air ke lahan pertanian;
4. Penataan ruang yang belum berjalan maksimal, menghambat pembangunan terstruktur;
5. Kinerja TPS 3R yang kurang efektif;
6. Sanitasi yang belum memadai, terutama di kawasan kumuh;
7. Ketersediaan air bersih yang terbatas di beberapa wilayah, disebabkan oleh:
    - Tidak tersedianya sumber air bersih,
    - Sumber air yang tidak layak konsumsi,
    - Kurangnya infrastruktur penyediaan air bersih.

Dengan demikian, berbagai isu ini perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan pelayanan wajib urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang kemudian diturunkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (pertanian dan industri) dengan pusat distribusi;
2. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain, akses air minum yang layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi dan penanganan persampahan serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak;
3. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir/genangan;
4. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh meliputi perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh serta pelaksanaan peremajaan kawasan kumuh;
5. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas untuk memastikan standar pelayanan minimal bagi masyarakat.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Bupati yang telah tertuang didalam RPJMD 2025-2029, yaitu:

1. Terganggunya pencapaian target RPJMD akibat berbagai hambatan operasional;
2. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak merata dan kurang kompetitif;
3. Penyediaan infrastruktur dasar yang belum optimal baik kualitas maupun aspek lingkungan;
4. Keterlambatan penyediaan data pendukung perencanaan infrastruktur yang berdampak pada terhambatnya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tantangan dan peluang serta isu–isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tuban, yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang partisipatif;

3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan *bottom-up* sampai pada *top-down*, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
5. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala;
6. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
7. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur menuju kawasan sentra-sentra perekonomian.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan pembangunan yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan tentunya harus melalui proses perencanaan secara partisipatif, teknokratik, *bottom-up/top-down* serta unsur politis.

Perubahan alokasi anggaran dalam P-APBD 2025 diharapkan menjadi katalisator positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Alokasi anggaran yang tepat sasaran ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan investasi daerah, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Namun demikian, pembangunan daerah tahun 2025 tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur semata. Terdapat beberapa prioritas pembangunan yang saling terkait, termasuk percepatan pembangunan desa melalui mekanisme Pagu Indikatif Desa (PID), peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kawasan strategis untuk meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan PID khususnya dirancang sebagai wadah aspirasi masyarakat desa sekaligus instrumen untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.

Keberhasilan implementasi berbagai program pembangunan ini sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi yang solid antara masyarakat, instansi vertikal, pemerintah daerah, dan legislatif menjadi kunci utama untuk memastikan hasil

perencanaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antardaerah. Dalam konteks daya saing daerah, peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban menjadi sangat strategis melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan strategis tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal. Jaringan jalan yang baik akan membuka akses ke daerah-daerah terisolir, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap maksimal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Proses *review* terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan dokumen perencanaan dengan hasil analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur, termasuk data lapangan, masukan masyarakat, serta evaluasi capaian tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dengan kebutuhan riil di lapangan, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya agar tepat sasaran. Hasil *review* menunjukkan beberapa temuan penting, di antaranya: (1) munculnya program baru yang belum tercantum dalam rancangan awal; (2) penyesuaian besarannya kegiatan akibat kenaikan harga material konstruksi; serta (3) realokasi anggaran untuk mendukung kegiatan.

Hasil *review* terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tuban

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Lembar 1 dari 46

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,2 Poin	29.296.279.612,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,6 Poin	26.526.629.963,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	266.022.256,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	173.886.378,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	144.623.256,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	103.283.878,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	68.945.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	39.485.500,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	52.454.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan E valuasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	31.117.000,00	
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang	12 dokumen	24.462.913.672,00	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 Jenis	22.011.745.721,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tersusun (Dokumen)								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/ bulan	23.501.901.039	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ bulan	21.517.869.721,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	687.284.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	493.876.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	192 orang	135.424.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1 Jenis	976.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	192 Paket	135.424.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	1 Layanan	605.010.650,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum	6 Jenis	411.211.988,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.189.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.189.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	125.873.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	65.587.138,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.150.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	187.208.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	63.477.750,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.365.350,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	24 Dokumen	19.320.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	24 Dokumen	17.362.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	191.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	95.500.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	0	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenus	135.155.148,00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0,00	Pengadaan Mebel	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	30.427.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Unit Peralatan dan	0	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit	104.728.148,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Mesin Lainnya yang Disediakan					Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	16 jasa	2.515.412.468,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jenis	2.552.094.162,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan	3.653.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.496.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	447.496.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	603.466.970,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Laporan	84.231.700,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	62.230.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.980.031.768,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.884.901.092,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	234 unit	1.311.496.566,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	1.241.560.566,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	98 Unit	760.610.370,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	133 Unit	760.610.370,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	207.590.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	157.654.500,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	323.295.696,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	323.295.696,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase daerah irigasi yang berfungsi Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	88,75 %	89.754.818.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase daerah irigasi yang berfungsi Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	55,71 % 87,25 %	94.972.501.619,17	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah		Luas genangan air yang tertangani	88,2 %	65.973.735.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam		Luas genangan air yang tertangani	173328,34 ha	71.960.340.493,17	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,2 KM	300.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,2 KM	545.632.000,00	
	Revitalisasi Danau	Kab. Tuban, Kerek, Kasiman Kab. Tuban, Kerek, Padasan Kab. Tuban, Merakurak, Tlogowaru Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	5 Danau	3.750.000.000,00	Revitalisasi Danau	Kab. Tuban, Kerek, Kasiman Kab. Tuban, Kerek, Padasan Kab. Tuban, Merakurak, Tlogowaru Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang Kab. Tuban, Grabagan, Dermawuharjo	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	5 Danau	1.941.000.000,00	
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan Kab. Tuban, Senori, Wangluwetan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	35,1 KM	21.289.000.000,00	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan Kab. Tuban, Senori, Wangluwetan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	35,1 KM	24.312.970.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tuban, Montong, Montongsekar Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang Kab. Tuban, Soko, Nguruan Kab. Tuban, Soko, Rahayu Kab. Tuban, Merakurak, Sumber Kab. Tuban, Merakurak, Bogorejo Kab. Tuban, Rengel, Pekuwon Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo Kab. Tuban, Rengel, Ngadirejo Kab. Tuban, Semanding, Karang Kab. Tuban,					Kab. Tuban, Montong, Montongsekar Kab. Tuban, Soko, Prambontergayang Kab. Tuban, Soko, Nguruan Kab. Tuban, Soko, Rahayu Kab. Tuban, Merakurak, Sumber Kab. Tuban, Merakurak, Bogorejo Kab. Tuban, Rengel, Pekuwon Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo Kab. Tuban, Rengel, Ngadirejo Kab. Tuban, Semanding, Karang				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang Kab. Tuban, Palang, Sumurgung Kab. Tuban, Palang, Palang Kab. Tuban, Widang, Minohorejo					Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang Kab. Tuban, Palang, Sumurgung Kab. Tuban, Palang, Palang Kab. Tuban, Widang, Minohorejo				
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Kenduruan, Jamprong Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	4,32 KM	10.000.000.000,00	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Kenduruan, Jamprong Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	5,07 KM	26.973.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Kenduruan, Sidorejo Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo Kab. Tuban, Jatirogo, Paseyan Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan Kab. Tuban, Senori, Wonosari Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Singgahan, Mergosari Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Montong,					Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Kenduruan, Sidorejo Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo Kab. Tuban, Jatirogo, Paseyan Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan Kab. Tuban, Senori, Wonosari Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Singgahan, Mergosari Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban,				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nguluhan Kab. Tuban, Rengel, Kebonagung Kab. Tuban, Semanding, Karang Kab. Tuban, Palang, Cendoro					Montong, Nguluhan Kab. Tuban, Rengel, Kebonagung Kab. Tuban, Semanding, Karang Kab. Tuban, Palang, Cendoro				
	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	5 KM	30.634.735.000,00	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	5 KM	18.187.237.993,17	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Daerah irigasi dalam kondisi baik	72,15 %	23.781.083.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Daerah irigasi dalam kondisi baik	5000 ha	23.012.161.126,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti Kab. Tuban, Jatirogo, Karangtengah Kab. Tuban, Tambakboyo, Belikanget Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo Kab. Tuban, Soko, Bangunrejo Kab. Tuban, Soko, Sumurcinde Kab. Tuban, Rengel, Kanorejo Kab. Tuban, Rengel, Tambakrejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Wetan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	6,25 KM	7.200.000.000,00	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti Kab. Tuban, Jatirogo, Karangtengah Kab. Tuban, Tambakboyo, Belikanget Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo Kab. Tuban, Soko, Bangunrejo Kab. Tuban, Soko, Sumurcinde Kab. Tuban, Rengel, Kanorejo Kab. Tuban, Rengel, Tambakrejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Wetan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	6,25 KM	7.258.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Palang, Glodog Kab. Tuban, Widang, Ngadipuro Kab. Tuban, Widang, Tegalrejo					Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Palang, Glodog Kab. Tuban, Widang, Ngadipuro Kab. Tuban, Widang, Tegalrejo				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tuban, Bangilan, Sidotentrem Kab. Tuban, Tambakboyo, Ngulahan Kab. Tuban, Tambakboyo, Klutuk Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu Kab. Tuban,	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7,17 KM	12.581.083.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tuban, Bangilan, Sidotentrem Kab. Tuban, Tambakboyo, Ngulahan Kab. Tuban, Tambakboyo, Klutuk Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu Kab. Tuban,	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10,07 KM	12.400.214.325,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Soko, Kendalrejo Kab. Tuban, Jenu, Suwalan Kab. Tuban, Jenu, Wadung Kab. Tuban, Rengel, Maibit Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Tuban, Sugiharjo Kab. Tuban, Plumpang, Sembungrejo Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo					Soko, Kendalrejo Kab. Tuban, Jenu, Suwalan Kab. Tuban, Jenu, Wadung Kab. Tuban, Rengel, Maibit Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Tuban, Sugiharjo Kab. Tuban, Plumpang, Sembungrejo Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo				
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tuban, Bancar, Sumberan Kab. Tuban, Kerek, Padasan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	0,027 KM	4.000.000.000 ,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tuban, Bancar, Sumberan Kab. Tuban, Kerek, Padasan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,027 KM	3.353.946.801 ,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tuban, Soko, Mojoagung Kab. Tuban, Jenu, Sekardadi Kab. Tuban, Widang, Banjar	Dioperasikan dan Dipelihara				Kab. Tuban, Soko, Mojoagung Kab. Tuban, Jenu, Sekardadi Kab. Tuban, Widang, Banjar				
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	92,35 %	22.354.434.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	92,61 %	14.458.210.680,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	2141 KK	22.354.434.500,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	1324 RT	14.458.210.680,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Tuban, Kenduruan, Tawaran Kab. Tuban, Kenduruan, Sidorejo Kab. Tuban, Bancar, Karangrejo Kab. Tuban, Bancar, Sidomulyo Kab. Tuban, Tambakboyo, Cokrowati Kab. Tuban, Singgahan, Tanjungrejo Kab. Tuban, Singgahan, Tunggulrejo Kab. Tuban, Parengan, Kumpulrejo Kab. Tuban, Parengan, Selogabus Kab. Tuban, Montong, Sumurgung Kab. Tuban, Soko, Tluwe	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2141 SR	22.354.434.500,00	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Tuban, Kenduruan, Tawaran Kab. Tuban, Kenduruan, Sidorejo Kab. Tuban, Bancar, Karangrejo Kab. Tuban, Bancar, Sidomulyo Kab. Tuban, Tambakboyo, Cokrowati Kab. Tuban, Singgahan, Tanjungrejo Kab. Tuban, Singgahan, Tunggulrejo Kab. Tuban, Parengan, Kumpulrejo Kab. Tuban, Parengan, Selogabus Kab. Tuban, Montong, Sumurgung Kab. Tuban, Soko, Tluwe	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1324 SR	14.458.210.680,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tuban, Soko, Jati Kab. Tuban, Semanding, Sambongrejo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Grabagan, Banyubang					Kab. Tuban, Soko, Jati Kab. Tuban, Semanding, Sambongrejo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Grabagan, Banyubang				
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	76 %	500.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	80 %	3.834.750.000,00	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	200 KK	500.000.000,00	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	250 KK	3.834.750.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Singgahan, Tingkis Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo Kab. Tuban, Jenu, Beji Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo Kab. Tuban, Widang, Banjar	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	50 Ton/hari	500.000.000,00	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Singgahan, Tingkis Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo Kab. Tuban, Jenu, Beji Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo Kab. Tuban, Widang, Banjar	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	50 Ton/hari	3.834.750.000,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga dengan akses pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	10 % 86,25 %	13.474.681.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga dengan akses pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	88,42 %	6.610.409.300,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan	0,41 %	13.474.681.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan	450 RT	6.610.409.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		pengelolaan air limbah domestik			Daerah Kabupaten/Kota		pengelolaan air limbah domestik			
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Tuban, Tuban, Mondokan	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	20 M³/Hari	500.000.000,00	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Tuban, Tuban, Mondokan	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	20 M³/Hari	600.000.000,00	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Bangilan, Bate Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban, Tambakboyo, Mander Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Kidul Kab. Tuban, Singgahan,	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	872 Rumah Tangga	12.974.681.000,00	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Bangilan, Bate Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban, Tambakboyo, Mander Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Kidul Kab. Tuban, Singgahan,	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	450 Rumah Tangga	6.010.409.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tanjungrejo Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Kerek, Gaji Kab. Tuban, Kerek, Hargoretno Kab. Tuban, Kerek, Kedungrejo Kab. Tuban, Soko, Simo Kab. Tuban, Merakurak, Tahulu Kab. Tuban, Merakurak, Tegalrejo Kab. Tuban, Merakurak, Sendanghaji Kab. Tuban, Semanding, Ngino					Tanjungrejo Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Kerek, Gaji Kab. Tuban, Kerek, Hargoretno Kab. Tuban, Kerek, Kedungrejo Kab. Tuban, Soko, Simo Kab. Tuban, Merakurak, Tahulu Kab. Tuban, Merakurak, Tegalrejo Kab. Tuban, Merakurak, Sendanghaji Kab. Tuban, Semanding, Ngino				
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN		Prosentase saluran drainase lingkungan	45 %	39.400.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Prosentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi	45,13 %	62.587.468.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SISTEM DRAINASE		permukiman dalam konsisi baik					baik			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		jumlah Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	7112 m	39.400.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		jumlah Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	15252 m	62.587.468.000,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Bendonglateng Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban,	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6704 M	23.277.500.000,00	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Bendonglateng Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban,	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10393 M	37.556.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bancar, Latsari Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Lor Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Kerek, Gemulung Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Bringin Kab. Tuban, Soko, Rahayu Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Bejagung Kab. Tuban, Tuban, Perbon Kab. Tuban,					Bancar, Latsari Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Lor Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Kerek, Gemulung Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Bringin Kab. Tuban, Soko, Rahayu Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Bejagung Kab. Tuban,				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tuban, Sidorejo Kab. Tuban, Tuban, Sugiharjo Kab. Tuban, Tuban, Kembangbilo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Palang, Glodog Kab. Tuban, Widang, Kujung Kab. Tuban, Grabagan, Waleran					Tuban, Perbon Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo Kab. Tuban, Tuban, Sugiharjo Kab. Tuban, Tuban, Kembangbilo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Palang, Glodog Kab. Tuban, Widang, Kujung Kab. Tuban, Grabagan, Waleran				
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	408 Meter	650.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	408 Meter	638.468.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Plumpang, Sumberagung Kab. Tuban, Palang, Payuran	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	12 Sistem Drainase Lingkungan	15.472.500.000,00	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Plumpang, Sumberagung Kab. Tuban, Palang, Payuran	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	14 Sistem Drainase Lingkungan	24.392.500.000,00	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase penataan gedung sesuai standar teknis dan tata ruang	10 % 100 %	3.291.570.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase penataan gedung sesuai standar teknis dan tata ruang	80 %	12.924.635.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen PBG/SLF yang terbit	10 Dokumen	3.291.570.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen PBG/SLF yang terbit	36 Dokumen	12.924.635.900,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	1 Dokumen	2.700.000.000,00	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	12.500.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah Kabupaten/Kota								
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	5 Dokumen	591.570.000,00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	36 Dokumen	424.635.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			melalui SIMBG								
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase luasan kawasan perkotaan yang tertata	2 Dokumen 10 %	72.309.765.560,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase luasan kawasan perkotaan yang tertata	30 %	114.140.849.199,99	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis	6 Dokumen	72.309.765.560,00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis	34 %	114.140.849.199,99	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis	6 kawasan	72.209.765.560,00	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	7 kawasan	114.140.849.199,99	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Lainnya yang Ditata								
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Panjang jalan dalam kondisi mantap	98,25 %	200.000.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Panjang jalan dalam kondisi mantap	86,05 %	281.993.149.162,00	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang jalan dalam kondisi mantap	98,25 %	200.000.000.000,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang jalan dalam kondisi mantap	1625,79 km	281.993.149.162,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Bangilan, Banjarworo	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	0	0,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Bangilan, Banjarworo	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	28 Dokumen	1.555.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Tuban, Bancar, Bancar Kab. Tuban, Semanding, Semanding Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Tuban, Bancar, Bancar Kab. Tuban, Semanding, Semanding Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan	Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			
	Penggantian Jembatan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Tawaran Kab. Tuban, Kenduruan, Sokogrenjeng Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban,	Jumlah Jembatan yang Diganti	10 Jembatan	24.380.265.000,00	Penggantian Jembatan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Tawaran Kab. Tuban, Kenduruan, Sokogrenjeng Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban,	Jumlah Jembatan yang Diganti	11 Jembatan	27.610.015.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Singgahan, Mulyoagung Kab. Tuban, Parengan, Dagangan Kab. Tuban, Widang, Sumberjo					Singgahan, Mulyoagung Kab. Tuban, Parengan, Dagangan Kab. Tuban, Widang, Sumberjo				
	Rekonstruksi Jalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Senori, Sidoharjo Kab. Tuban, Singgahan, Tunggulrejo Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Parengan, Sembung Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo Kab. Tuban,	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	11,055 KM	38.625.000.000,00	Rekonstruksi Jalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Senori, Sidoharjo Kab. Tuban, Singgahan, Tunggulrejo Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Parengan, Sembung Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	17,21 KM	87.201.520.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semanding, Sambongrejo Kab. Tuban, Semanding, Tunah Kab. Tuban, Plumpang, Jatimulyo Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan					Kab. Tuban, Semanding, Sambongrejo Kab. Tuban, Semanding, Tunah Kab. Tuban, Plumpang, Jatimulyo Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan				
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung Kab. Tuban, Kerek, Wolutengah Kab. Tuban,	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	71,17 KM	48.285.252.000,00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung Kab. Tuban, Kerek, Wolutengah Kab. Tuban,	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	71,94 KM	76.057.515.997,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Soko, Klumpit Kab. Tuban, Soko, Pandanwangi Kab. Tuban, Jenu, Beji Kab. Tuban, Rengel, Banjararum Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Semanding, Jadi Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Mondokan Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo Kab. Tuban, Tuban,					Soko, Klumpit Kab. Tuban, Soko, Pandanwangi Kab. Tuban, Jenu, Beji Kab. Tuban, Rengel, Banjararum Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Semanding, Jadi Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Mondokan Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo Kab. Tuban, Tuban,				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sumurgung Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Plumpang, Kedungsoko Kab. Tuban, Palang, Cendoro Kab. Tuban, Widang, Simorejo					Sumurgung Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Plumpang, Kedungsoko Kab. Tuban, Palang, Cendoro Kab. Tuban, Widang, Simorejo				
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo Kab. Tuban, Jatirogo, Karangtengah Kab. Tuban, Bangilan, Banjarworo Kab. Tuban, Bangilan, Kedungmulyo	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	34,095 KM	63.029.483.000,00	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo Kab. Tuban, Jatirogo, Karangtengah Kab. Tuban, Bangilan, Banjarworo Kab. Tuban, Bangilan,	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	23,53 KM	47.226.927.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tuban, Senori, Wonosari Kab. Tuban, Soko, Glagahsari Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo Kab. Tuban, Merakurak, Bogorejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Semanding, Penambangan					Kedungmulyo Kab. Tuban, Senori, Wonosari Kab. Tuban, Soko, Glagahsari Kab. Tuban, Merakurak, Mandirejo Kab. Tuban, Merakurak, Bogorejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Kulon Kab. Tuban, Semanding, Penambangan				
	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti Kab. Tuban, Kenduruan, Sidorejo Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban,	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	5 Jembatan	2.335.000.000,00	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti Kab. Tuban, Kenduruan, Sidorejo Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban,	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	10 Jembatan	6.920.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Parengan, Kemlaten					Parengan, Kemlaten				
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0	0,00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2000 KM	200.000.000,00	
	Rehabilitasi Jalan	Kab. Tuban, Bancar, Tlogoagung Kab. Tuban, Bancar, Pugoh Kab. Tuban, Singgahan, Tanjungrejo Kab. Tuban, Singgahan, Mergosari Kab. Tuban, Kerek, Padasan Kab. Tuban, Parengan, Margorejo Kab. Tuban, Parengan, Pacing Kab. Tuban, Montong, Nguluhan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,56 KM	4.245.000.000,00	Rehabilitasi Jalan	Kab. Tuban, Bancar, Tlogoagung Kab. Tuban, Bancar, Pugoh Kab. Tuban, Singgahan, Tanjungrejo Kab. Tuban, Singgahan, Mergosari Kab. Tuban, Kerek, Padasan Kab. Tuban, Parengan, Margorejo Kab. Tuban, Parengan, Pacing Kab. Tuban, Montong, Nguluhan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,02 KM	11.194.700.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin Kab. Tuban, Montong, Bringin Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo Kab. Tuban, Semanding, Ngino Kab. Tuban, Semanding, Kowang Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Palang, Tasikmadu Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng Kab. Tuban, Grabagan, Ngandong Kab. Tuban,					Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin Kab. Tuban, Montong, Bringin Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo Kab. Tuban, Semanding, Ngino Kab. Tuban, Semanding, Kowang Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Palang, Tasikmadu Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng Kab. Tuban, Grabagan, Ngandong Kab. Tuban,				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Grabagan, Dahor					Grabagan, Dahor				
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban,	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	21,2 KM	19.100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban,	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	21,2 KM	24.027.470.565,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua					Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa					Kel/Desa Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa				
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase ketidaksesuaian KKPR yang ditindaklanjuti	82,98 %	2.472.918.800,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase ketidaksesuaian KKPR yang ditindaklanjuti	100 %	1.503.116.930,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten	6 Dokume	460.117.000,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten	1 Dokumen	218.546.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen	311.380.000,00	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen	218.546.200,00	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	148.737.000,00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0 Laporan	0,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang yang tersusun	5 Dokumen	878.293.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang yang tersusun	1 Dokumen	539.904.000,00	
	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data SHP Peta Dasar	4 Peta	495.888.000,00	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data SHP Peta Dasar	4 Peta	419.904.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0	0,00	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000,00	
	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	382.405.000,00	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0	0,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	25 Dokumen	493.250.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	29 Dokumen	235.479.230,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	152.515.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	31.601.280,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	24 Layanan	340.735.000,00	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	24 Layanan	203.877.950,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	6 dokumen	641.258.800,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	5 Dokumen	509.187.500,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	535.940.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	509.187.500,00	
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	105.318.800,00	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0 Dokumen	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	mandiri pelaku UMK										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.982.500.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				26.052.241.116,80	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase pembangunan/ pengembangan perumahan yang sesuai ketentuan	0	0,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase pembangunan/ pengembangan perumahan yang sesuai ketentuan	80 %	104.100.000,00	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	0	0,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	1 unit	104.100.000,00	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana	0	0,00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana	1 Unit Rumah	104.100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kel/Desa	Kabupaten/Kota yang Terbangun				Semua Kel/Desa	Kabupaten/Kota yang Terbangun			
12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	12,1 % 27 %	4.982.500.000 ,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	39,78 %	4.121.365.152 ,80	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	338,92 Ha	4.982.500.000 ,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	39,78 %	4.121.365.152 ,80	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Tuban, Bancar, Karangrejo Kab. Tuban, Bancar, Sukoharjo Kab. Tuban, Kerek, Kasiman Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Semanding, Ngino	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	51 Unit Rumah	3.460.000.000 ,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Tuban, Bancar, Karangrejo Kab. Tuban, Bancar, Sukoharjo Kab. Tuban, Kerek, Kasiman Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Semanding, Ngino	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	48 Unit Rumah	2.601.865.152 ,80	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Semanding, Genaharjo Kab. Tuban, Widang, Patihan Kab. Tuban, Widang, Mrutuk Kab. Tuban, Widang, Ngadipuro Kab. Tuban, Widang, Widang					Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Semanding, Genaharjo Kab. Tuban, Widang, Patihan Kab. Tuban, Widang, Mrutuk Kab. Tuban, Widang, Ngadipuro Kab. Tuban, Widang, Widang				
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Tuban, Kembangbilo	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	246,6 Ha	1.522.500.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Tuban, Kembangbilo	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	24,15 Ha	1.519.500.000,00	
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA		Persentase luas permukiman yang sudah	84 %	36.000.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA		Persentase luas permukiman yang sudah	89,14 %	21.826.775.964,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DAN UTILITAS UMUM (PSU)		terdapat PSU dengan kondisi layak			DAN UTILITAS UMUM (PSU)		terdapat PSU dengan kondisi layak			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase PSU dalam kondisi layak	100 Blok	36.000.000.000,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase PSU dalam kondisi layak	89,14 %	21.826.775.964,00	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Tuban, Bangilan, Kumpulrejo Kab. Tuban, Semanding, Karang Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Tuban, Mondokan Kab. Tuban, Tuban, Perbon Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Tuban, Kingking Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo Kab. Tuban,	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	12 lokasi	36.000.000.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Tuban, Bangilan, Kumpulrejo Kab. Tuban, Semanding, Karang Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Tuban, Mondokan Kab. Tuban, Tuban, Perbon Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Tuban, Kingking Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo Kab. Tuban,	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	27 lokasi	21.826.775.964,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tuban, Kutorejo Kab. Tuban, Palang, Payuran					Tuban, Kutorejo Kab. Tuban, Palang, Payuran				
TOTAL					513.836.967.472,00	TOTAL				645.603.961.870,96	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban untuk tahun 2025 merupakan hasil dari serangkaian proses perencanaan yang melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hingga Musrenbang Kabupaten. Proses ini telah melalui tahapan perencanaan yang bersifat teknokratis, politis, dan partisipatif, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban 2025-2029 serta target pembangunan Nasional dan Provinsi. Perubahan Rencana Kerja ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun melalui partisipasi aktif masyarakat. Seluruh usulan program dan kegiatan, baik yang berasal dari Pagu Indikatif Desa (PID) maupun dari perangkat daerah, diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, prioritas pembangunan, serta isu-isu strategis yang tengah dihadapi masyarakat. Proses ini memastikan bahwa setiap program yang diajukan memiliki dampak nyata terhadap pembangunan wilayah. Hasil Musrenbang kemudian dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, yang selanjutnya dibahas dalam forum koordinasi yang dipimpin oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Untuk memastikan partisipasi masyarakat terakomodasi dengan baik, seluruh usulan program dan kegiatan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat seluas mungkin sekaligus mempermudah proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap usulan dapat dikelola secara transparan dan efektif, mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				
	Keg.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Dusun morosemo sampai jembatan di lingk galbong Desa sumberagung kec.plumpang , Kab. Tuban	Jumlah sistem drainase lingkungan yang ditingkatkan	300m	Usulan Pokir
2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	JALAN DELIMA KELURAHAN PERBON KECAMATAN TUBAN KAB. TUBAN TITIK KOORDINAT -6.878095890545786, 112.03612501052314 , Kab. Tuban	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	546m	Usulan Pokir
3	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	dsn Dalwo desa prambon Tergayang kec soko. -7.077293917427118, 111.9243679807926, Kab. Tuban	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	500m	Usulan Pokir
4	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Dusun Krajan, Desa Boto, Kec. Semanding, Kab. Tuban , Kab. Tuban	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	250m	Usulan Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dusun Bedrek RT 04 RW 04 Desa Selogabus Kecamatan Parengan, Kab. Tuban	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	500m	Usulan Pokir
6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	DESA GENAHARJO KEC SEMANDING, Kab. Tuban	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	500m	Usulan Pokir
7	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	DESA GEMULUNG KEC KEREK , Kab. Tuban	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	300m	Usulan Pokir
8	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	GESING DESA GESING KEC. SEMANDING , Kab. Tuban	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	420m	Usulan Pokir
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	Revitalisasi Danau	Dusun Winong Desa Margomulyo Kecamatan Kerek Koordinat : -6.894845,111.907894, Kab. Tuban	Jumlah danau dan penampung air alami lainnya yang direvitalisasi	100m	Usulan Pokir
2	Normalisasi / Restorasi Sungai	Perbatasan antara Desa Montongsekar dan Desa Pakel Kecamatan Montong Titik Koordinat : -6.954661374825273, 111.881909999967986, Kab. Tuban	Panjang sungai yang di normalisasi/ restorasi	200m	Usulan Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Normalisasi / Restorasi Sungai	Dusun Singkil, Desa Mentoro RT 02 RW 04 Kecamatan Soko, Kab. Tuban	Panjang sungai yang di normalisasi/ restorasi	500m	Usulan Pokir
4	Normalisasi / Restorasi Sungai	Desa Cendoro Kecamatan Palang Koordinat : -6.931789,112.121483, Kab. Tuban	Panjang sungai yang di normalisasi/ restorasi	500m	Usulan Pokir
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
5	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Desa Kebomlati Kecamatan Plumpang	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun		Usulan Pokir
6	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Desa Prunggahan Wetan Kecamatan Semanding	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun		Usulan Pokir
III	Program Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DUSUN GAMBOR RT 28 RW 04 DESA JEGULO KECAMATAN SOKO, Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DUSUN JEGULO RT 17 RW 03 DESA JEGULO KECAMATAN SOKO , Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DUSUN GAMBOR RT 25 RW 04 DESA	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JEGULO KECAMATAN SOKO , Kab. Tuban			
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DUSUN DRINGU RT 36 RW 05 DESA JEGULO KECAMATAN SOKO , Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DUSUN GAMBOR RT 32 RW 04 DESA JEGULO KECAMATAN SOKO, Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DUSUN JEGULO RT 17 RGW 03 DESA JEGULO KECAMATAN SOKO , Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(RUKINTEN) RT 02 RW 07 DUSUN SEJUWET DS. LERAN KULON KEC. PALANG KAB. TUBAN , Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
8	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(ITALI) RT 01 RW 02 DUSUN KRADENAN DS. KRADENAN KEC. PALANG KAB. TUBAN , Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(KUSNO) RT 04 RW 03 DUSUN LERAN DS. LERAN	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		KULON KEC. PALANG KAB. TUBAN , Kab. Tuban			
10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(TARJI) RT 01 RW 03 DUSUN LERAN DS. LERAN KULON KEC, PALANG KAB. TUBAN , Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(KHOLIFAH) RT 01 RW 01DUSUN PUCANGAN DESA PUCANGAN KEC. PALANG KAB.TUBAN , Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
12	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(SUHENDA) RT 01 RW 04 DUSUN LERAN DESA LERAN KULON KECAMATAN PALANG KAB. TUBAN , Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
13	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(NGATIJAH) RT 03 RW 03 DUSUN SINGGET DESA PUCANGAN KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN , Kab. Tuban	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 Paket	Usulan Pokir
IV	Program Penyelenggaraan Jalan				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Desa Leran Wetan-Leran Kulon	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	750 m	Usulan Pokir

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sekaligus menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja pembangunan daerah. Dokumen ini memuat program dan kegiatan prioritas yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat infrastruktur, serta mendukung target RPJMD Kabupaten Tuban. Penyusunannya mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi, kapasitas keuangan daerah, serta regulasi terbaru.

Dalam konteks pendanaan, Perubahan Rencana Kerja ini dilengkapi dengan pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan APBD serta sumber pembiayaan lainnya, seperti dana transfer pusat, kerjasama swasta, atau bantuan luar negeri. Alokasi anggaran diprioritaskan pada program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan penataan kawasan permukiman kumuh. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui mekanisme monitoring berkala, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat mengidentifikasi tantangan, mengevaluasi progres fisik dan keuangan, serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Dengan demikian, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tuban.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur		Indeks kualitas layanan infrastruktur	85,35
		Meningkatnya Layanan Infrastruktur Jalan	Nilai komponen layanan infrastruktur jalan pada IKLI	78,18

		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur SDA	Nilai komponen jaringan irigasi pada IKLI	83,53
		Meningkatnya Ketaatan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan RRTR	91,5%
		Meningkatnya Akses Hunian Layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	74
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,77

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Jalan	
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program penyelenggaraan jalan
	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kabupaten/Kota dan Desa	Keg. Penyelenggaraan jalan Kab/Kota
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembang an Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
	Tergantinya Jembatan	Penggantian Jembatan
	Terekonstruksinya Jalan	Rekonstruksi Jalan
	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Pemeliharaan berkala jalan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	Meningkatnya lebar jalan menuju standar	Pelebaran Jalan menuju standar
	Terehabilitasinya Jembatan	Rehabilitasi Jembatan
	Terehabilitasinya Jalan	Rehabilitasi jalan
	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Pemeliharaan rutin jalan
	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	
	Meningkatnya kualitas irigasi	Program Pengeloaan Sumber Daya Air (SDA)
	Meningkatnya ketersedian air baku pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan rawan banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	Terbangunnya Tanggul Sungai	Pembangunan Tanggul Sungai
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
	Terehabilitasinya checkdam	Rehabilitasi Check Dam
	Terlaksananya Revitalisasi Danau	Revitalisasi Danau

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai
	Meningkatnya ketaatan penataan ruang	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Meningkatnya jumlah penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
	Meningkatnya jumlah data SHP Peta Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Tersedianya orthor ektifikasi citra dari raw citra keformat ECW dan tersedianya data SHP Peta DasarPenyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
	Tersedianya materi teknis dan ranperda RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
	Meningkatnya jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan jumlah layanan persetujuan KKPR sesuai	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	dengan ketentuan waktu yang berlaku	
	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	Meningkatnya jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang serta jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Penilaian perwujudan RTR	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Terlaksananya kegiatan dalam peningkatan penyelenggaraan bangunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	gedung yang sesuai dengan rencana	Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya penataan kawasan perkotaan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan RTBL	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Akses Hunian Layak	
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan permukiman yang layak	Urusan Pemyelenggaraan PSU Perumahan
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
	Meningkatnya kualitas pembangunan/ pengembangan perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten dan masyarakat terdampak relokasi program Kabupaten	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Tersedianya kawasan permukiman yang layak huni	Program Kawasan Permukiman
	Terlaksananya peningkatan kualitas dan penanganan kawasan permukiman kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Tersedianya akses air bersih yang aman melalui system jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap sistem pengelolaan air limbah yang layak dan aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
	Terpenuhinya pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Terlayaninya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pengembangan system dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota
	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Program Pengelolaan dan Pengem-bangan Sistem Drainase

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	Meningkatnya saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	Pengelolaan dan Pengem-bangan Sistem Drainase yang Terhu-bung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Terwujudnya dokumen perencanaan dan laporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terwujudnya pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya pengadaan mebel	Pengadaan mebel
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memuat serangkaian kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan alokasi anggaran. Selain itu, program ini juga mencakup kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh dinas terkait. Sementara itu, kegiatan merupakan turunan dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di bawah pimpinan Kepala Dinas setingkat Eselon II. Kegiatan ini melibatkan pengelolaan berbagai sumber daya, seperti SDM, peralatan, teknologi, dan anggaran, yang kemudian diolah menjadi output berupa barang atau jasa.

Perumusan kegiatan dan subkegiatan dilakukan dengan berpedoman pada analisis layanan pekerjaan umum serta diselaraskan dengan visi dan misi dinas. Harapannya, seluruh kegiatan yang dirancang dapat menjawab tiga aspek utama: (1) permasalahan yang muncul di lapangan, (2) upaya pencapaian visi dan misi dinas dalam lima tahun terakhir, serta (3) isu-isu strategis seputar pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman yang diangkat oleh para pemangku kepentingan.

Untuk memastikan tercapainya target program, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) serta pendanaan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tuban

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban

Lembar 1

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
1	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		83,2 Poin	26.526.629.963,00			84,1 poin	26.303.414.875,00
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)		9 Dokumen	173.886.378,00			9 Dokumen	176.146.928,00
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	2 Dokumen	103.283.878,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Dokumen	65.153.428,00
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	22 Laporan	39.485.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		0	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Sebelumnya			
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	7 Laporan	31.117.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7 Laporan	110.993.500,00
	1.03.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)		9 Jenis	22.011.745.721,00			9 Jenis	22.740.834.139,00
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	182 Orang/bulan	21.517.869.721,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		184 Orang/bulan	22.424.668.139,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
							Tahun Sebelumnya			
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	5 Dokumen	493.876.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Dokumen	274.827.800,00
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Jenis	976.000,00			1 Layanan	6.370.000,00
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Paket	976.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	0,00
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum		6 Jenis	411.211.988,00			4 Jenis	393.851.250,00
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Paket	7.189.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		0	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
							Sebelumnya			
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	2 Paket	65.587.138,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Paket	72.776.250,00
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Paket	187.208.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Paket	187.208.500,00
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Paket	38.365.350,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Paket	38.366.500,00
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	24 Dokumen	17.362.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		0	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
							Sebelumnya			
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	60 Laporan	95.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		50 Laporan	95.500.000,00
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah		2 Jenis	135.155.148,00			2 Jenis	319.560.900,00
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	13 Unit	30.427.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	0,00
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	10 Unit	104.728.148,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		10 Unit	106.952.900,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang		4 Jenis	2.552.094.162,00			2 Jenis	1.379.316.840,00
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Laporan	1.496.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	0,00
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	12 Laporan	603.466.970,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Laporan	836.296.500,00
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Laporan	62.230.100,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	0,00
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	12 Laporan	1.884.901.092,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		12 Laporan	543.020.340,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
			Kantor yang Disediakan				Tahun Sebelumnya			
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah		3 Jenis	1.241.560.566,00			3 Jenis	1.269.120.618,00
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	133 Unit	760.610.370,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	0,00
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	0	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	0,00
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	86 unit	157.654.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		140 unit	184.924.100,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
							Sebelumnya			
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	5 unit	323.295.696,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Unit	323.213.168,00
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase daerah irigasi yang berfungsi Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir		55,71 % 87,25 %	94.972.501.619,17			57,71 % 87,80 %	128.253.942.814,00
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik;		87,01 %	71.960.340.493,17			0	119.015.942.814,00
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	0,2 KM	545.632.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		6 KM	300.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
	1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	Kab. Tuban, Merakurak, Tlogowaru Kab. Tuban, Kerek, Karanglo	5 Danau	1.941.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		4 Danau	2.100.000.000,00
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan Kab. Tuban, Senori, Wangluweta n Kab. Tuban, Montong, Montongseka r Kab. Tuban, Soko, Prambonte rgayang Kab. Tuban, Soko, Nguruan Kab. Tuban, Soko, Rahayu Kab. Tuban, Merakurak,	35,1 KM	24.312.970.500,00	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaika N Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		11,5 KM	7.500.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Sumber Kab. Tuban, Merakurak, Bogorejo Kab. Tuban, Rengel, Pekuwon Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo Kab. Tuban, Rengel, Ngadirejo Kab. Tuban, Semanding, Karang Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo Kab. Tuban, Plumpang,						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Plumpang Kab. Tuban, Palang, Sumurgung Kab. Tuban, Palang, Palang Kab. Tuban, Widang, Minohorejo						
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Kenduruan, Jamprong Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Kenduruan, Sidorejo Kab. Tuban, Jatirogo, Kebonharjo Kab. Tuban,	5,07 KM	26.973.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		0	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Jatirogo, Paseyan Kab. Tuban, Jatirogo, Sugihan Kab. Tuban, Senori, Wonosari Kab. Tuban, Senori, Wanglukulon Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Singgahan, Mergosari Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Montong, Nguluhan Kab. Tuban, Rengel, Kebonagung Kab. Tuban, Semanding,						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Karang Kab. Tuban, Palang, Cendoro						
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Kab. Tuban, Rengel, Rengel	5 KM	18.187.237.993,17	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		5 KM	37.088.942.814,00
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah irigasi dalam kondisi baik		5000 ha	23.012.161.126,00			5100 ha	9.238.000.000,00
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti Kab. Tuban, Jatirogo, Karangtengah Kab. Tuban,	6,25 KM	7.258.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		3 KM	3.000.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Tambakboyo, Belikanget Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo Kab. Tuban, Soko, Bangunrejo Kab. Tuban, Soko, Sumurcinde Kab. Tuban, Rengel, Kanorejo Kab. Tuban, Rengel, Tambakrejo Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan Wetan Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Kab. Tuban, Palang, Glodog Kab. Tuban, Widang, Ngadipuro Kab. Tuban, Widang, Tegalrejo						
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Tuban, Bangilan, Sidotentrem Kab. Tuban, Tambakboyo, Ngulahan Kab. Tuban, Tambakboyo, Klutuk Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Parengan, Parangbatu Kab. Tuban,	10,07 KM	12.400.214.325,00	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang IRigasi-Penugasan		3 KM	3.000.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Soko, Kendalrejo Kab. Tuban, Jenu, Suwalan Kab. Tuban, Jenu, Wadung Kab. Tuban, Rengel, Maibit Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Tuban, Sugiharjo Kab. Tuban, Plumpang, Sembungrejo Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo						
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	Kab. Tuban, Rengel, Semua	0,027 KM	3.353.946.801,00	Dana Transfer Umum-		2,85 KM	3.238.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
		Jaringan Irigasi Permukaan	Dioperasikan dan Dipelihar	Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa			Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khsus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum		92,61 %	14.458.210.680,00			92,84%	10.781.884.050,00
	1.03.03.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan		1324 RT	14.458.210.680,00			1517 Rumah Tangga	10.781.884.050,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
			jaringan perpipaan terlindungi							
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Tuban, Kenduruan, Tawaran Kab. Tuban, Kenduruan, Sidorejo Kab. Tuban, Bancar, Karangrejo Kab. Tuban, Bancar, Sidomulyo Kab. Tuban, Tambakboyo, Cokrowati Kab. Tuban, Singgahan, Tanjungrejo Kab. Tuban, Singgahan, Tunggulrejo Kab. Tuban, Parengan, Kumpulrejo Kab. Tuban, Parengan,	1324 SR	14.458.210.680,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)		1517 SR	10.120.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Selogabus Kab. Tuban, Montong, Sumurgung Kab. Tuban, Soko, Tluwe Kab. Tuban, Soko, Jati Kab. Tuban, Semanding, Sambongrejo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Grabagan, Banyubang						
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan		80 %	3.834.750.000,00			82 %	6.000.000.000,00
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		250 KK	3.834.750.000,00			250 KK	6.000.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Singgahan, Tingkis Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo Kab. Tuban, Jenu, Beji Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo Kab. Tuban, Widang, Banjar	50 Ton/hari	3.834.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dak Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		0,75 Ton/hari	6.000.000.000,00
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman		88,42 %	6.610.409.300,00			89,33 %	14.875.190.000,00
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik		450 RT	6.610.409.300,00			250 Rumah Tangga	14.875.190.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
		Daerah Kabupaten/Kota								
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kab. Tuban, Tuban, Mondokan	20 M³/Hari	600.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		3000 M³/Hari	6.000.000.000,00
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro Kab. Tuban, Bangilan, Bate Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban, Tambakboyo, Mander Kab. Tuban, Tambakboyo, Tambakboyo Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Kidul Kab. Tuban,	450 Rumah Tangga	6.010.409.300,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		0	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Singgahan, Tanjungrejo Kab. Tuban, Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Kerek, Gaji Kab. Tuban, Kerek, Hargoretno Kab. Tuban, Kerek, Kedungrejo Kab. Tuban, Soko, Simo Kab. Tuban, Merakurak, Tahulu Kab. Tuban, Merakurak, Tegalrejo Kab. Tuban, Merakurak, Sendanghaji Kab. Tuban, Semanding, Ngino						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik		45,13 %	62.587.468.000,00			50,13 %	17.102.000.000,00
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik		15252 m	62.587.468.000,00			4518 meter	17.102.000.000,00
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Bendonglateng Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban,	10393 M	37.556.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		2156 M	6.452.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Singgahan, Lajo Lor Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe Kab. Tuban, Kerek, Gemulung Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Bringin Kab. Tuban, Soko, Rahayu Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Bejagung Kab. Tuban, Tuban, Perbon						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo Kab. Tuban, Tuban, Sugiharjo Kab. Tuban, Tuban, Kembangbilo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Palang, Glodog Kab. Tuban, Widang, Kujung Kab. Tuban, Grabagan, Waleran						
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408 Meter	638.468.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		500 Meter	650.000.000,00
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Kab. Tuban, Kenduruan, Jlodro	14 Sistem Drainase	24.392.500.000,00	Pendapatan		3 Sistem Drainase	10.000.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Jarorejo Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Plumpang, Sumberagung Kab. Tuban, Palang, Payuran	Lingkungan		Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		Lingkungan	
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan gedung sesuai standar teknis dan tata ruang		80 %	12.924.635.900,00			82 %	465.797.500,00
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	Jumlah Dokumen PBG/SLF yang terbit		36 Dokumen	12.924.635.900,00			40 Dokumen	465.797.500,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
		Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	12.500.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		0	0,00
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	36 Dokumen	424.635.900,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		40 Dokumen	465.797.500,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
		Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG							
8	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase luasan kawasan perkotaan yang tertata		30 %	114.140.849.199,99			55 %	152.145.978.300,00
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis		34 %	114.140.849.199,99			41 %	152.145.978.300,00
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kawasan	114.140.849.199,99	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai		0	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
							Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan Dana Bagi Hasil (DBH)			
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH		0	0,00
9	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik		86,05 %	281.993.149.162,00			86,85 %	302.900.000.000,00
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi mantap		1625,79 km	281.993.149.162,00			1640,905 km	302.900.000.000,00
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Bangilan, Banjarworo	28 Dokumen	1.555.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	118.860.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
		Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kab. Tuban, Bancar, Bancar Kab. Tuban, Semanding, Semanding Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan						
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Tawaran Kab. Tuban, Kenduruan, Sokogrenjeng Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban,	11 Jembatan	27.610.015.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		75 Meter	7.630.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Singgahan, Binangun Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung Kab. Tuban, Parengan, Dagangan Kab. Tuban, Widang, Sumberjo						
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Latsari Kab. Tuban, Senori, Sidoharjo Kab. Tuban, Singgahan, Tunggulrejo Kab. Tuban, Singgahan, Kedungjambe	17,21 KM	87.201.520.400,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		16,54 KM	78.450.200.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Kab. Tuban, Parengan, Sembung Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo Kab. Tuban, Semanding, Sambongrejo Kab. Tuban, Semanding, Tunah Kab. Tuban, Plumpang, Jatimulyo Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng Kab. Tuban, Grabagan, Grabagan						
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo,	71,94 KM	76.057.515.997,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU		0	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung Kab. Tuban, Kerek, Wolutengah Kab. Tuban, Soko, Klumpit Kab. Tuban, Soko, Pandanwangi Kab. Tuban, Jenu, Beji Kab. Tuban, Rengel, Banjararum Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Semanding, Jadi Kab. Tuban, Semanding, Prunggahan						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Kulon Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Mondokan Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Plumpang, Kebomlati Kab. Tuban, Plumpang, Kedungsoko Kab. Tuban, Palang, Cendoro Kab. Tuban, Widang,						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Simorejo						
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,53 KM	47.226.927.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dak Fisik-Bidang JalanReguler-Jalan Opsen PKB		8,7 KM	95.337.200.000,00
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidomukti Kab. Tuban, Kenduruan, Sidorejo Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban, Parengan, Kemlaten	10 Jembatan	6.920.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		20 Meter	40.742.500.000,00
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kab. Tuban, Tuban, Semua	2000 KM	200.000.000,00	Dana Alokasi		1044,850 KM	300.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Kel/Desa			Umum (DAU)			
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Tuban, Bancar, Tlogoagung Kab. Tuban, Bancar, Pugoh Kab. Tuban, Singgahan, Tanjungrejo Kab. Tuban, Singgahan, Mergosari Kab. Tuban, Kerek, Padasan Kab. Tuban, Parengan, Margorejo Kab. Tuban, Parengan, Pacing Kab. Tuban, Montong, Nguluhan Kab. Tuban, Montong,	4,02 KM	11.194.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		3,35 KM	5.880.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Tanggulangin Kab. Tuban, Montong, Bringin Kab. Tuban, Montong, Maindu Kab. Tuban, Rengel, Bulurejo Kab. Tuban, Semanding, Ngino Kab. Tuban, Semanding, Kowang Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Palang, Tasikmadu Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng Kab. Tuban, Grabagan, Ngandong						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Kab. Tuban, Grabagan, Dahor						
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban,	21,2 KM	24.027.470.565,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		13,58 KM	65.521.240.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
10	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketidaksesuaian KKPR yang ditindaklanjuti		100 %	1.503.116.930,00			100 %	2.432.975.400,00
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten		1 Dokumen	218.546.200,00			2 Dokumen	150.022.400,00
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	218.546.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		0	0,00
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	0 Laporan	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Laporan	17.022.400,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi rencana tata ruang Kabupaten		1 Dokumen	539.904.000,00			8 Dokumen	1.538.975.000,00
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Jenu Kab. Tuban, Rengel, Rengel	4 Peta	419.904.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		5 Peta	524.875.000,00
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Plumpang, Plumpang	1 Dokumen	120.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	240.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	0	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	774.100.000,00
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		29 Dokumen	235.479.230,00			29 Dokumen	235.478.000,00
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	31.601.280,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	31.601.000,00
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Layanan	203.877.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		28 Layanan	203.877.000,00
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang		5 dokumen	509.187.500,00			5 dokumen	508.500.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
		Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota							
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	509.187.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		5 Dokumen	508.500.000,00
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		0	0,00
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				26.052.241.116,80				23.739.000.000,00
11	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pembangunan/ Pengembangan perumahan yang sesuai ketentuan		80 %	104.100.000,00			82 %	25.000.000,00
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali		1 Unit	104.100.000,00			0	25.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
		Relokasi Program Kabupaten/Kota								
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Rumah	104.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit Rumah	25.000.000,00
12	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39,78 %	4.121.365.152,80			44,78 %	1.100.000.000,00
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,78 %	4.121.365.152,80			33,32 %	1.100.000.000,00
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Tuban, Bancar, Karangrejo Kab. Tuban, Bancar, Sukoharjo	48 Unit Rumah	2.601.865.152,80	Dana Bagi Hasil (DBH)		0	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
				Kab. Tuban, Kerek, Kasiman Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Semanding, Ngino Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Semanding, Genaharjo Kab. Tuban, Widang, Patihan Kab. Tuban, Widang, Mrutuk Kab. Tuban, Widang, Ngadipuro Kab. Tuban, Widang, Widang						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Tuban, Kembangbilo	24,15 Ha	1.519.500.000,00	Pajak Rokok Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		48,3 Ha	1.100.000.000,00
13	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase luas permukiman yang sudah terdapat PSU dengan kondisi layak		89,14 %	21.826.775.964,00			89,14 %	20.394.000.000,00
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU dalam kondisi layak		89,14 %	21.826.775.964,00			89,14 %	20.394.000.000,00
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Tuban, Bangilan, Kumpulrejo Kab. Tuban, Semanding, Karang Kab. Tuban,	27 Lokasi	21.826.775.964,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		18 Lokais	20.394.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						645.603.961.870,96				685.000.182.939,00
			yang Menunjang Fungsi Hunian	Semanding, Gedongombo Kab. Tuban, Tuban, Mondokan Kab. Tuban, Tuban, Perbon Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Tuban, Kingking Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo Kab. Tuban, Palang, Payuran			Pajak Rokok			
TOTAL						645.603.961.870,96				685.000.182.939

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini mencerminkan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Dengan melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan anggaran, diharapkan seluruh rencana pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk responsif terhadap berbagai perubahan kebijakan, tantangan di lapangan, serta masukan dari para pemangku kepentingan.

Perubahan Rencana Kerja ini juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas, sekaligus memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya penyesuaian target dan prioritas, diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, permukiman layak huni, dan penyediaan air bersih dapat berjalan lebih efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Tuban.

Apabila dalam rangka pelaksanaannya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka:

1. Menerapkan skala prioritas yang ketat berdasarkan tingkat urgensinya;
2. Eksplorasi skema pendanaan dan pelaksanaan kemitraan dengan tidak bergantung secara lebih terhadap APBD;
3. Jika sebuah proyek besar tidak dapat dibiayai sekaligus, maka dapat dilaksanakan secara bertahap.

Rencana yang matang ditunjukkan bukan hanya ketika segala sumber daya mencukupi, tetapi justru ketika dihadapkan pada keterbatasan. Dengan memperhatikan catatan-catatan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban dapat memitigasi risiko dalam pelaksanaan dan menyiapkan "*Plan B*" yang efektif, sehingga momentum menuju Tuban yang mandiri pangan dan berekonomi inklusif dapat tetap berjalan, sekalipun dengan sumber daya yang terbatas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban berharap bahwa perubahan

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi panduan operasional yang hidup dan adaptif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu juga, diharapkan dapat memperkuat kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kemajuan Kabupaten Tuban menuju wilayah yang lebih maju, sejahtera, dan layak huni bagi seluruh masyarakat.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TUBAN

ttd.

AGUNG SUPRIYADI

BUPATI TUBAN,

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

satpolpp-damkar.tubankab.go.id

satpolppdamkarkabtuban

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P- RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Tuban merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah selama lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah Aditya Halindra Faridzky, SE, sebagai Bupati dan Drs. Joko Sarwono sebagai Wakil Bupati terpilih pada Pilkada serentak Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan dokumen RKPD dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan karena disebabkan oleh (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) Adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban melakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan tahapan penyusunan rancangan awal perubahan Renja, verifikasi, penyempurnaan, hingga penyusunan rancangan akhir perubahan Renja untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tuban.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban tahun 2025 dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan dinamika perkembangan dan kondisi aktual yang terjadi.

Mekanisme dan waktu penyusunan perubahan Renja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), karena pada dasarnya P-RKPD merupakan rangkuman dari perubahan Renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan. Selanjutnya, perubahan Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat ll Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomoe 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang sesuai visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta program asta cita Presiden dan Wakil Presiden terpiluh yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Selain itu Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat menjadi pedoman dalam:

1) Penetapan Prioritas Program dan Kegiatan:
   Menyusun prioritas yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis daerah.

2) Pengendalian dan Evaluasi:
   Menyediakan dasar untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sehingga memungkinkan perbaikan yang diperlukan.
3) Pengalokasian Sumber Daya:
   Membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang teridentifikasi.
4) Koordinasi dan Integrasi:
   Memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara berbagai unit atau bagian dalam perangkat daerah untuk mencapai hasil yang diinginkan secara bersama-sama.
5) Perbaikan Kinerja:
   Meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan memastikan rencana dan anggaran yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif.

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan program Perangkat Daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD 2025-2029, yang meliputi:

1) Sinkronisasi Program dan Kegiatan: Menyesuaikan program dan kegiatan perangkat daerah dengan perubahan kebijakan, prioritas pembangunan, dan dinamika kebutuhan masyarakat yang terjadi setelah Renja awal disusun.
2) Penyesuaian Anggaran: Mengakomodasi perubahan anggaran yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh, alokasi dana dari pemerintah pusat atau provinsi, dan prioritas pengeluaran yang baru.
3) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi: Memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
4) Kepatuhan Terhadap Peraturan: Memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah.

5) Pengendalian dan Evaluasi: Menyediakan landasan yang jelas untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, sekaligus sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra 2025-2029 yang saat ini secara simultan dalam tahap penyusunan rancangan akhir.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun pertama (2021) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2026) dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama 5 tahun dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan target akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Triwulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Tingkat Capaian TW II 2025	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	3%	58,68%	1956 %	3%

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Tingkat Capaian TW II 2025	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Tingkat Capaian TW II 2025	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya Resiko Bencana Akibat Kebakaran	Persentase Penurunan Tingkat Kasus/Kejadian Kebakaran	5%	77,67 %	1553,40 %	5%

Dari kedua indikator sasaran diatas maka pencapaian triwulan II tahun 2025 adalah:

1. Persentase penurunan pelanggaran perundang-undangan daerah sampai triwulan II mencapai 58,68%. Angka penurunan kasus pelanggaran perundang-undangan daerah tersebut diperoleh dari perbandingan kasus selama triwulan II Tahun 2025 yaitu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kasus dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2024 yaitu 167 (seratus enam puluh tujuh) kasus. Capaian tersebut memberikan perkembangan yang positif terhadap target akhir renstra tahun 2026, yaitu sebesar 3%.
2. Persentase penurunan tingkat kasus/kejadian kebakaran sebesar 77,67%. Capaian tersebut dihitung dari angka kasus kejadian kebakaran sampai Triwulan II Tahun 2025 yang mencapai 23 (dua puluh tiga) kejadian kebakaran di Kabupaten Tuban dibandingkan dengan jumlah kasus kasus/kejadian kebakaran pada yang terjadi selama Tahun 2024 yaitu 103 kasus. Capaian tersebut memberikan perkembangan positif terhadap target akhir renstra sebesar 5%.

Berdasarkan laporan Dalev triwulan II, Capaian Kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dari indikator sasaran diatas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 21.888.224.265 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.827.514.988, terdiri dari 1 program Penunjang dan 2 program teknis, dengan rincian program teknis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program ini merupakan program teknis untuk mendukung capaian kinerja sasaran OPD persentase penurunan pelanggaran perundang-

undangan daerah, yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dan diampu oleh 3 bidang dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban yang bersinergi dalam menurunkan angka pelanggaran perundang-undangan daerah, baik dalam hal pencegahan, sosialisasi, pengawasan, penanganan dan penindakan pelanggaran, serta pemberdayaan Satlinmas dan peningkatan kapasitas aparatur, yaitu :

a. Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum,
   Melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa serta Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan
   Melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
c. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
   Melaksanakan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program ini merupakan program teknis untuk mendukung capaian kinerja sasaran OPD persentase penurunan kasus/kejadian kebakaran yang diampu oleh Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, sebagai dukungan untuk melaksanakan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran, serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

Meskipun realisasi kinerja sasaran sampai dengan triwulan 2 tercapai, realisasi anggaran dan kinerja banyak yang berkisar pada kegiatan yang bersifat kebutuhan rutin dan belanja operasional pelayanan rutin kepada masyarakat. Beberapa sub kegiatan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan TW IV sehingga realisasi anggaran dan kinerja masih 0. Salah satu sub kegiatan yang hingga triwulan 2 belum ada realisasi anggaran dan kinerja serta diproyeksikan tidak ada realisasi hingga akhir tahun anggaran yaitu sub kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada yang merupakan amanah dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas. Anggaran pada sub kegiatan tersebut dialokasikan sebagai bentuk bantuan kepada warga masyarakat yang terkena dampak pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kabupaten Tuban, tidak ada serapan anggaran karena sampai sampai Triwulan II tidak ada warga negara yang terdampak dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada. Tidak adanya warga negara yang terdampak dalam penegakan Perda dan Perkada ini menunjukkan bahwa proses penegakan Perda dan Perkada berlangsung secara BERSAHABAT (Berwibawa, Santun, Humanis, Beretika dan Tegas) dengan tidak mengedepankan sikap represif. Dengan demikian, meskipun tidak ada realisasi anggaran, target kinerja dalam pemenuhan SPM dalam melayani warga masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada tetap terpenuhi.

Adapun hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan secara lengkap sampai triwulan II tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tuban

Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan s.d. Triwulan II Tahun 2025

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**Tingkat Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah**		Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah	3 (%)	28.948.363.808	4.02 (%)	30.928.836.568	3 (%)	21.013.482.355	75.45 (%)	3.686.255.696	58.68 (%)	3.850.316.663	0 (%)	0	0 (%)	0	58.68 (%)	7.536.572.359	58.68 (%)	39.850.818.176	1956 %	137.66 %	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (Poin)	38.527.412.288	81.4 (Poin)	14.105.315.015	0 (Poin)	15.686.394.145	0 (Poin)	2.770.477.246	0 (Poin)	2.995.133.173	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	5.765.610.419	0 (Poin)	20.741.024.883	0 %	53.83 %	Sekretaris
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	45 (Dokumen)	410.332.049	18 (Dokumen)	214.473.891	9 (Dokumen)	179.563.307	7 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	13.519.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	13.519.000	25 (Dokumen)	227.992.891	55.56 %	55.56 %	Kasubag Prolap
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 (Dokumen)	223.616.680	12 (Dokumen)	133.663.891	6 (Dokumen)	121.069.307	4 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	7.724.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	7.724.000	4 (Dokumen)	141.387.891	13.33 %	63.23 %	Kasubag Prolap

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5 (Laporan)	186.715.369	6 (Laporan)	80.810.000	3 (Laporan)	58.494.000	3 (Laporan)	0	0 (Laporan)	5.795.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	5.795.000	3 (Laporan)	86.605.000	60 %	46.38 %	Kasubag Prolap
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**83,33**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**														
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Aparat Satpol PP dan Damkar	60 (Orang)	33.481.780.285	91 (Orang)	18.301.736.591	92 (Orang)	13.983.322.385	91 (Orang)	2.607.442.275	88 (Orang)	2.848.878.631	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	88 (Orang)	5.456.320.906	88 (Orang)	24.513.923.525	146.67 %	73.22 %	Kasubag Keuangan
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 (Orang /Bulan)	0	0 (Orang/Bulan)	0	92 (Orang/Bulan)	13.867.993.885	91 (Orang/Bulan)	2.601.283.775	88 (Orang/Bulan)	2.816.392.631	0 (Orang/ Bulan)	0	0 (Orang/ Bulan)	0	88 (Orang/Bulan)	5.417.676.406	88 (Orang/ Bulan)	6.167.317.434	0 %	0 %	Kasubag Keuangan
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 (Dokumen)	669.271.738	9 (Dokumen)	129.505.000	9 (Dokumen)	70.500.000	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	25.050.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	25.050.000	7 (Dokumen)	154.555.000	15.56 %	23.09 %	Kasubag Keuangan

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 (Laporan)	26.505.811	2 (Laporan)	12.010.500	1 (Laporan)	6.233.000	1 (Laporan)	2.934.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	2.934.000	3 (Laporan)	14.944.500	60 %	56.38 %	Kasubag Keuangan
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semseteran SKPD	30 (Laporan)	21.626.332	12 (Laporan)	66.548.000	6 (Laporan)	28.000.000	1 (Laporan)	3.224.500	2 (Laporan)	7.436.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	10.660.500	15 (Laporan)	79.235.500	50 %	366.38 %	Kasubag Keuangan
		5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 (Dokumen)	21.626.332	8 (Dokumen)	19.247.500	4 (Dokumen)	10.595.500	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	23.445.500	10 %	108.41 %	Kasubag Keuangan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**74,69**														

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**														
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kapasitas	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	220 (Orang)	143.581.600	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Kasubag Umpeg
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	143.581.600	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubag Umpeg
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum	6 (Jenis)	1.063.497.915	6 (Jenis)	787.243.595	6 (Jenis)	325.796.317	6 (Jenis)	23.813.000	6 (Jenis)	45.672.500	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	6 (Jenis)	69.485.500	6 (Jenis)	880.855.336	100 %	82.83 %	Kasubag Umpeg
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	25.062.048	1 (Paket)	9.658.000	1 (Paket)	4.989.273	1 (Paket)	0	1 (Paket)	851	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	851	1 (Paket)	11.522.558	100 %	45.98 %	Kasubag Umpeg
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 (Paket)	12.646.700	1 (Paket)	71.425.815	3 (Paket)	35.728.740	3 (Paket)	0	3 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	0	3 (Paket)	81.830.702	100 %	647.05 %	Kasubag Umpeg

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 (Paket)	506.900.213	1 (Paket)	477.783.650	3 (Paket)	180.975.904	3 (Paket)	13.880.000	3 (Paket)	42.092.500	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	55.972.500	3 (Paket)	544.622.150	100 %	107.44 %	Kasubag Umpeg
		4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 (Paket)	165.786.367	1 (Paket)	60.465.575	3 (Paket)	37.665.400	3 (Paket)	0	3 (Paket)	500	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	500	3 (Paket)	62.437.371	100 %	37.66 %	Kasubag Umpeg
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 (Dokumen)	35.403.832	1 (Dokumen)	8.912.000	1 (Dokumen)	4.437.000	1 (Dokumen)	640	1 (Dokumen)	1.210.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.850.000	1 (Dokumen)	11.132.000	100 %	31.44 %	Kasubag Umpeg
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 (Laporan)	203.878.451	1 (Laporan)	159.030.555	50 (Laporan)	62.000.000	11 (Laporan)	9.293.000	14 (Laporan)	1.019.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	25 (Laporan)	10.312.000	26 (Laporan)	169.342.555	10.4 %	83.06 %	Kasubag Umpeg
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**91,67**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan	8 (Jenis)	60.060.000	8 (Jenis)	922.146.600	4 (Jenis)	277.020.000	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	958.554.600	0 %	1596 %	Kasubag Umpeg
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 (Unit)	60.060.000	8 (Unit)	338.146.600	6 (Unit)	277.020.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	374.554.600	0 %	623.63 %	Kasubag Umpeg
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	4 (Jenis)	323.949.800	4 (Jenis)	76.715.243	4 (Jenis)	52.946.612	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	4 (Jenis)	129.661.855	4 (Jenis)	168.778.435	0 %	0 %	Kasubag Umpeg
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik yang Disediakan	2 (Laporan)	304.214.426	1 (Laporan)	117.446.597	2 (Laporan)	72.280.000	2 (Laporan)	23.089.740	2 (Laporan)	16.385.094	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	39.474.834	2 (Laporan)	162.025.095	100 %	53.26 %	Kasubag Umpeg

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 (Laporan)	126.467.004	1 (Laporan)	52.215.215	2 (Laporan)	9.123.000	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	100	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	100	1 (Laporan)	53.931.819	50 %	42.64 %	Kasubag Umpeg
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 (Laporan)	1.216.718.557	1 (Laporan)	467.126.390	6 (Laporan)	242.546.800	6 (Laporan)	53.625.503	6 (Laporan)	39.327.218	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	92.952.721	7 (Laporan)	591.164.123	116.67 %	48.59 %	Kasubag Umpeg
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**83,33**													
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Tinggi**													
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 (Jenis)	1.067.811.391	4 (Jenis)	951.677.251	4 (Jenis)	453.160.736	4 (Jenis)	62.506.728	4 (Jenis)	34.116.430	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	4 (Jenis)	96.623.158	4 (Jenis)	1.062.883.009	100 %	99.54 %	Kasubag Umpeg
		1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	4 (Unit)	149.897.500	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubag Umpeg

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 (Unit)	911.768.306	42 (Unit)	648.128.450	26 (Unit)	286.203.236	8 (Unit)	62.135.800	6 (Unit)	28.802.870	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	14 (Unit)	90.938.670	14 (Unit)	752.334.720	53.85 %	82.51 %	Kasubag Umpeg
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 (Unit)	35.642.284	11 (Unit)	55.053.801	11 (Unit)	17.060.000	11 (Unit)	370,928	11 (Unit)	5.908.560	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	11 (Unit)	6.279.488	11 (Unit)	61.748.289	100 %	173.24 %	Kasubag Umpeg
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**51,28**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**67,63**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sedang**														
2		**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100 (%)	4.831.947.382	100 (%)	3.942.612.479	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	3.942.612.479	100 %	81.59 %	Kabid PPUD
			Persentase pelanggaran gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 (%)	28.948.363.808	100 (%)	15.006.287.261	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	15.006.287.261	100 %	51.84 %	Kabid Trantibum

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Petugas Satlinmas yang mengikuti pelatihan	200 (%)	3.054.935.348	751 (%)	5.167.753.330	2.7 (%)	5.327.088.210	0 (%)	915.778.450	0 (%)	855.183.490	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.770.961.940	0 (%)	7.454.025.070	0 %	244 %	Kabid SDA dan Linmas
		1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Satlinmas yang mengikuti pelatihan	200 (Orang)	3.054.935.348	751 (Orang)	5.167.753.330	200 (Orang)	620.286.286	0 (Orang)	3.085.000	0 (Orang)	12.458.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	15.543.000	0 (Orang)	5.189.637.330	0 %	169.88 %	Kabid SDA dan Linmas
		1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 (Dokumen)	121.812.030	6 (Dokumen)	4.858.216.980	2 (Dokumen)	138.451.780	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	4.858.216.980	70 %	3988.29 %	Kasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
		2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi PamongPraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah petugas Satlinmas Desa/Kelurahan yang mengikuti Upacara HUT Satlinmas	165 (Orang)	2.689.499.258	10 (Orang)	819.293.093	33 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	10 (Orang)	819.293.093	6.06 %	30.46 %	Kasi Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Linmas

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah petugas Satlinmas (yang terlatih dan terkukuhkan) Desa/Kelurahan yang mendapatkan pelatihan	500 (Orang)	0	851 (Orang)	0	100 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	851 (Orang)	0	170.2 %	0 %	Kasi Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Linmas
			Pengamanan Pemilihan Umum (Pilkades, Pilkada, Pileg, Pilpres)	1 (Tahap)	0	2 (Tahap)	417.375.990	1 (Tahap)	0	0 (Tahap)	0	0 (Tahap)	0	0 (Tahap)	0	0 (Tahap)	0	0 (Tahap)	0	2 (Tahap)	417.375.990	200 %	0 %	Kasi Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Linmas
			Jumlah SDM Satuan Polisi PamongPraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1060 (Orang)	0	999 (Orang)	0	212 (Orang)	481.834.506	0 (Orang)	3.085.000	0 (Orang)	12.458.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	15.543.000	999 (Orang)	21.884.000	94.25 %	0 %	Kasi Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Linmas
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**25**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 (Laporan)	46.446.660	1 (Laporan)	8.284.000	1 (Laporan)	16.057.714	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	8.284.000	33.33 %	17.84 %	Kabid SDA dan Linmas
		1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 (Laporan)	46.446.660	1 (Laporan)	8.284.000	1 (Laporan)	16.057.714	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	8.284.000	33.33 %	17.84 %	Kabid SDA dan Linmas
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		3. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kasus Gangguan Trantibum yang Terselesaikan	100 (%)	24.131.898.647	200 (%)	9.134.498.440	100 (%)	3.701.005.640	100 (%)	910.943.450	100 (%)	772.836.490	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	1.683.779.940	100 (%)	11.278.633.680	100 %	46.74 %	Kabid Trantibum

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah tenaga pendukung pengamanan, pemantauan dan/atau penertiban	148 (Orang)	0	123 (Orang)	0	123 (Orang)	0	123 (Orang)	0	123 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	123 (Orang)	0	123 (Orang)	0	83.11 %	0 %	Kasi Kerjasama
			Persentase kegiatan pemkab dan sosial kemasyarakatan yang diamankan	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	100 %	0 %	Kasi Kerjasama
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	604 (Laporan)	0	255 (Laporan)	0	113 (Laporan)	0	30 (Laporan)	0	31 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	61 (Laporan)	0	316 (Laporan)	0	52.32 %	0 %	Kasi Kerjasama

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Lokasi Pengamanan Aset Vital Tertentu Milik Pemkab yang diamankan	5 (lokasi)	0	6 (lokasi)	0	5 (lokasi)	0	6 (lokasi)	0	5 (lokasi)	0	0 (lokasi)	0	0 (lokasi)	0	5 (lokasi)	0	5 (lokasi)	0	100 %	0 %	Kasi Kerjasama
			Persentase pelanggaran Tibumtranmas yang ditemukan	74 (%)	0	85.71 (%)	3.804.942.527	76 (%)	3.393.154.840	75 (%)	832.595.950	75 (%)	724.967.390	0 (%)	0	0 (%)	0	75 (%)	1.557.563.340	75 (%)	5.805.998.167	101.35 %	0 %	Kasi Kerjasama
		2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 (Dokumen)	20.302.005	4 (Dokumen)	42.011.500	1 (Dokumen)	10.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	42.011.500	100 %	206.93 %	Kasi Kerjasama

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	25 (Laporan)	2.693.741.529	137 (Laporan)	653.756.840	4 (Laporan)	292.850.800	1 (Laporan)	78.347.500	1 (Laporan)	47.869.100	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	126.216.600	139 (Laporan)	796.836.440	556 %	29.58 %	Kasi Operasional dan Pengendalian
		4. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 (Laporan)	102.525.125	1 (Laporan)	0	4 (Laporan)	5.000.000	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	66.67 %	0 %	Kasi Operasional dan Pengendalian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kasus Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah Yang Terselesaikan Secara Yustisia	201 (Kasus)	4.816.465.161	0 (Kasus)	3.767.434.645	38 (Kasus)	989.738.570	0 (Kasus)	1.750.000	0 (Kasus)	69.889.000	0 (Kasus)	0	0 (Kasus)	0	0 (Kasus)	71.639.000	0 (Kasus)	3.887.687.145	0 %	80.72 %	Kabid PPUD
			Jumlah Kasus Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah Yang Terselesaikan Secara Non Yustisia	604 (Kasus)	0	341 (Kasus)	1.749.862.455	113 (Kasus)	0	41 (Kasus)	0	28 (Kasus)	0	0 (Kasus)	0	0 (Kasus)	0	69 (Kasus)	0	410 (Kasus)	1.749.862.455	67.88 %	0 %	Kabid PPUD
		1. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	650.977.180	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	63.739.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	63.739.000	2 (Laporan)	73.743.000	0 %	0 %	Kasi Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 (Laporan)	381.299.869	1 (Laporan)	116.961.871	4 (Laporan)	64.948.520	1 (Laporan)	1.750.000	1 (Laporan)	6.150.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	7.900.000	3 (Laporan)	134.834.871	5 %	35.36 %	Kasi Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan
		3. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	30 (Laporan)	273.812.870	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	28.636.500	0 %	0 %	Kasi Sosialisasi
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**33,33**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**40,27**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**100**														

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja program										Sangat Tinggi														
B	**Tingkat Penurunan kasus/kejadian kebakaran**		Persentase Penurunan Tingkat Kasus/Kejadian Kebakaran	5 (%)	1.449.686.240	-83.93 (%)	3.442.767.566	5 (%)	874.741.910	86.41 (%)	42.342.500	77.67 (%)	248.600.129	0 (%)	0	0 (%)	0	77.67 (%)	290.942.629	77.67 (%)	3.795.859.761	1553.4 %	261.84 %	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran (Menit)	15 (Menit)	1.449.686.240	15 (Menit)	3.442.767.566	15 (Menit)	874.741.910	15 (Menit)	42.342.500	15 (Menit)	248.600.129	0 (Menit)	0	0 (Menit)	0	15 (Menit)	290.942.629	15 (Menit)	3.795.859.761	100 %	261.84 %	Kabid Pemadam Kebakaran
		1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 (%)	1.449.686.240	100 (%)	3.442.767.566	100 (%)	874.741.910	100 (%)	42.342.500	100 (%)	248.600.129	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	290.942.629	100 (%)	3.795.859.761	100 %	261.84 %	Kabid Damkar

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 (Laporan)	534.771.512	1 (Laporan)	735.407.090	12 (Laporan)	571.043.750	3 (Laporan)	32.722.870	3 (Laporan)	113.400.530	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	146.123.400	7 (Laporan)	908.830.350	7 %	169.95 %	Kasi Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 (Unit)	914.914.728	1 (Unit)	2.701.405.476	16 (Unit)	248.456.690	0 (Unit)	5.183.090	2 (Unit)	97.559.599	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	102.742.689	2 (Unit)	2.838.997.871	40 %	310.3 %	Analis Kebakaran Ahli Muda

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 (Orang)	22.815.000	46 (Orang)	5.955.000	53 (Orang)	55.241.470	0 (Orang)	5.740.000	46 (Orang)	1.800.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	46 (Orang)	7.540.000	46 (Orang)	13.495.000	92 %	59.15 %	Kasi Pembinaan Aparatur dan Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**49,76**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Tinggi**														
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**100**														
Predikat kinerja program										**Sangat Tinggi**														
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)										**100**														
Predikat kinerja sasaran										**Sangat Tinggi**														

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi–fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
g. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dibantu oleh :

1. Sekretariat;
    1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.;
    2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan;
    3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
        a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
        b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
        c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
        d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
        e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
        f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
        g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
        h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
        i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja;
        j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
        k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan; dan
        l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
    1) Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

2) Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. pelaksanaan pengelolaan operasional dan pengendalian;
   d. pelaksanaan kerja sama;
   e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
   g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
   1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
   2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan

administratif di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
   b. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
   c. pelaksanaan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
   d. pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
   e. pelaksanaan pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional Lainnya;
   f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
   g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
   h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan; dan
   i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah

1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
   b. pelaksanaan koordinasi di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
   c. pelaksanaan pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan;
   d. pelaksanaan sosialisasi dan penyediaan layanan;
   e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah;
   f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
   g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pemadam Kebakaran
   1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
   2) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pemadam kebakaran.
   3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
      a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
      b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
      c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;

d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pemadam kebakaran sedini mungkin dengan mengutamakan penyelamatan jiwa sesuai Standar Operasional Prosedur yang ada;
i. penyiapan dan penyediaan bahan pengendalian sistem dan metode penanggulangan kebakaran bagi gedung-gedung tinggi dan rumah yang tidak memiliki akses jalan masuk;
j. penyiapan dan penyediaan bahan penyelamatan kepada masyarakat dan lingkungan;
k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
l. pelaksanaa laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
   1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil/ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok terkait dengan bidang keahliannya.
   2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
   3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

4) Kelompok Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban terdiri atas:

1. Kepala Satuan :
2. Sekretariat :
   1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Subbagian Keuangan; dan
   3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
   1) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
   2) Seksi Kerja Sama.
4. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat :
   1) Seksi Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Satuan Linmas;
   2) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional Lainnya.
   3) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah :
   1) Seksi Pengawasan, Penyelidikan dan Penyidikan;
   2) Seksi Sosialisasi dan Penyediaan Layanan.
6. Bidang Pemadam Kebakaran :
   1) Seksi Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
   2) Seksi Pembinaan Aparatur dan Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran;
   3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban diarahkan untuk memaksimalkan kinerja Satuan dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta meningkatnya koordinasi dan penanggulangan darurat kebakaran secara cepat dan tepat. Salah satu tolak ukur keberhasilan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026.

Upaya dalam pencapaian kinerja tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Tuban, khususnya misi 1 yaitu membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal melalui pencapaian tujuan OPD yaitu terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis dan berkurangnya resiko bencana.

Capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 dan rancangan akhir Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase pelanggaran gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-	IKK Outcome	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	IKK Outcome	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	IKK Outcome	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Waktu Tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	SPM	IKK Outcome	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Persentase penurunan pelanggaran perundang-undangan daerah	-	-	3%	3%	3%	3%	8,42 %	4,02 %	3%	3%	IKU Renstra 2021-2026
6	Persentase Penurunan tingkat Kasus/ Kejadian kebakaran	-	-	3%	3%	5%	5%	3.45 %	-83,93 %	5%	5%	IKU Renstra 2021-2026
7	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	-	-	n/a	n/a	85	87	n/a	n/a	85	87	IKU Renstra 2025-2029
8.	Persentase Kasus/Kejadian Kebakaran yang Memenuhi Respon Time	-	-	n/a	n/a	80%	85%	n/a	n/a	80%	85%	IKU Renstra 2025-2029
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	n/a	n/a	89,31	89,96	n/a	88,66	89,31	89,96	IKU Renstra 2025-2029

Tercapainya target indikator kinerja pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana yang disajikan dalam tabel 2.3, baik indikator dalam pemenuhan SPM, IKU maupun IKK outcome menjadi bukti konkret dari upaya kolektif yang melibatkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dari seluruh elemen, baik internal antar bidang dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, koordinasi dan kerja sinergis dengan OPD terkait, partisipasi aktif masyarakat serta didukung oleh inovasi perangkat daerah. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban berupa Regu On Call sebagai Unit Reaksi Cepat (URC) berperan aktif secara cepat dan tanggap dalam hal penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat baik yang berasal dari laporan aduan masyarakat maupun gangguan masyarakat yang ditemukan dari kegiatan patroli secara bergiliran dalam 24 jam. Melalui kegiatan patroli, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dapat lebih efektif memantau dan mengawasi keadaan di berbagai wilayah, memberikan keberlanjutan dalam pemeliharaan ketertiban dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat serta ketertiban dan kenyamanan di ruang publik sebagai pusat kegiatan masyarakat, yang rentan terhadap terjadinya gangguan/pelanggaran, tentu tidak bisa lepas dari terlaksananya kerja sama dan kolaborasi yang baik dengan instansi samping (TNI dan Polri) dan perangkat daerah terkait melalui pelaksanaan patroli gabungan dalam rangka pencegahan gangguan trantibum dan menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang publik. Operasi gabungan dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta pengamanan unjuk rasa kerusuhan massa juga merupakan kegiatan kolaboratif yang berperan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

Namun demikian, kinerja pelayanan di bidang pemadam kebakaran pada tahun 2024 mengalami penurunan dimana kasus/kejadian kebakaran tahun 2024 mengalami kenaikan dari 56 kasus pada tahun 2024 menjadi 103 kasus pada tahun 2024 sehingga indikator kinerja sasaran persentase penurunan kasus / kejadian kebakaran tidak tercapai. Salah satu hal yang mempengaruhi kenaikan tersebut adalah kemudahan dalam pelaporan kejadian kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran melalui *call*

center/aplikasi PENDEKAR (Panggilan Cepat dan Darurat Pemadam Kebakaran), sehingga kasus kebakaran yang sebenarnya kecil dan bisa dipadamkan, tetap dilaporkan dan ditangani oleh petugas Pemadam Kebakaran yang berakibat pada penambahan rekapitulasi jumlah total kasus/kejadian kebakaran.

Inovasi ”PENDEKAR” sendiri merupakan aplikasi berbasis web dan bisa diakses melalui smartphone merupakan aplikasi yang menyajikan daftar nomor telepon seluruh anggota damkar di pos terdekat, memudahkan masyarakat untuk dengan mudah dan cepat melaporkan kejadian kebakaran yang terjadi di wilayahnya. Di dalam aplikasi tersebut juga memuat berbagai informasi terkait pencegahan dan penanganan kebakaran serta non kebakaran yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan kebakaran serta penyelamatan kepada masyarakat. Upaya sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran yang intensif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam bertujuan untuk menurunkan tingkat kasus/kejadian kebakaran.

Meskipun kasus kebakaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk kejadian kebakaran pada pemukiman mengalami penurunan sebanyak 11 kasus yang sebelumnya 35 kasus menjadi 24 kasus. Penurunan jumlah kasus kebakaran tersebut merupakan dampak positif dari kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dengan sasaran Desa, Kecamatan, Sekolah dan ibu-ibu rumah tangga.

Pada kasus kebakaran tempat usaha mengalami kenaikan sebanyak 4 kasus dari kejadian tahun sebelumnya sebanyak 11 kasus dimana tempat usaha tersebut belum memiliki alat proteksi kebakaran. Kenaikan kasus kebakaran lain terjadi pada kebakaran kandang, lahan kosong dan kasus kebakaran lainnya. Jika dianalisa dari penyebab kebakaran, terjadi penurunan penyebab kebakaran akibat kelalaian pemilik namun terjadi peningkatan penyebab dari konsleting listrik, bediang/sisa pembakaran dan adanya indikasi kesengajaan oleh oknum.

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), Persentase Kasus/Kejadian Kebakaran yang Memenuhi Respon Time, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tuban

2025-2029 dan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 yang akan mulai diukur dan dilaksanakan pada tahun 2025.

Disamping hal-hal yang disebutkan diatas, di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban kedepan, selain indikator kinerja utama baru sebagaimana uraian diatas, tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada tidak lagi hanya seputar penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketertiban ruang publik saja, tapi perlu dilakukan kegiatan yang lebih nyata sebagai wujud intervensi penegakan Perda dan Perkada dalam pengawasan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berdampak dalam upaya meningkatkan PAD.

PAD sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD dengan menegakkan peraturan-peraturan tersebut, termasuk yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyelenggaraan usaha. Selain berperan dalam penegakan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Perda dan Perkada tersebut dan menjelaskan konsekuensi dan sanksi yang akan dikenakan jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut.

Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, pendekatan yang terlalu keras dan represif juga dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan peraturan. Oleh karena itu, Dengan menggunakan slogan BERSAHABAT (Berwibawa, Santun, Humanis, Beretika dan Tegas), Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan pendekatan yang lebih humanis dan penuh integritas, baik dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum maupun pelindungan masyarakat dengan sikap yang tegas namun tetap menghormati hak asasi manusia dan etika profesionalisme.

Peningkatan PAD bukan tugas yang mudah, diperlukan perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari perencanaan dan kebijakan, sosialisasi dan edukasi serta pengawasan dan penegakan hukum. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, seharusnya memiliki peran kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, termasuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyelengaraan usaha (Perizinan) dan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Tuban.

Dalam upaya mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang BERSAHABAT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban, diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah pengampu pengelolaan PAD, mulai dari tahap pendataan melalui inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah beserta OPD pengampunya yang dilanjutkan dengan inventarisasi dan identifikasi para wajib bayar dan data tunggakan atau pelanggaran perda dari masing-masing OPD pengampu, diperlukan juga tindakan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada yang diiringi dengan edukasi dan himbauan untuk mematuhi peraturan yang ada.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan, dengan kewenangan yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja juga bisa melakukan tindakan penertiban non yustisia maupun melakukan penyelidikan dan tindakan yustisia untuk para pelanggar Pearturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Tindakan ini diperlukam untuk memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Implementasi Peraturan Daerah yang efektif, baik perencanaan, edukasi, pengawasan maupun penegakannya tidak hanya akan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tetapi akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat ada beberapa permasalahan dan isu penting yang dihadapi, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara efektif;
2. Belum efektifnya pelaksanaan penegakan Perda/Perkada sebagai instrumen ketertiban dan ketentraman masyarakat;
3. Masih rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban ruang publik, penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Belum optimalnya pelaksanaan Penegakan Perda Perkada untuk mencegah potensi Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Belum optimalnya sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan kebakaran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan dan isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban untuk memastikan dukungan terhadap tercapainya visi misi Bupati Tuban serta terpenuhinya standar pelayanan minimal.

Dari isu strategis tersebut, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan meningkatnya pelayanan, penyelamatan, penanggulangan dan evakuasi kebakaran dengan kinerja strategis dalam penyelesaian permasalahan di atas sekaligus sebagai peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah aparatur Satpol PP yang kompeten dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasan dan penanganan pelanggaran Perda / Perkada;
2. Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas dan pemberdayaan Satlinmas dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
3. Meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda/Perkada;

4. Meningkatnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap penegakan Perda/ Perkada, ketertiban ruang publik dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Meningkatnya pengawasan perijinan usaha dan penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Pengadaan sarana prasarana penanggulangan darurat kebakaran, pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan darurat kebakaran melalui sosialisasi;
8. Terlaksananya inspeksi proteksi kebakaran minimal bagi pelaku usaha dan perkantoran;
9. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan darurat kebakaran melalui penjaringan relawan pemadam kebakaran (Redkar).

Untuk mewujudkan kinerja strategis dalam menghadapi isu-isu penting tersebut, diperlukan dukungan alokasi anggaran dalam program / kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung target kinerja yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dukungan anggaran terhadap program prioritas peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta program pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran menjadi hal yang penting dalam mewujudkan kinerja Perangkat Daerah serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018.

Kegiatan utama yang menjadi bagian penting dari program prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban adalah Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah yang meliputi sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; pencegahan gangguan gangguan keterntraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan; penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Untuk meningkatkan kualitas SDM, kegiatan dalam Pemberdayaan

dan peningkatan kapasitas aparatur dan Satlinmas, pengembangan kapasitas dan karir PPNS juga menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan.

Untuk mendukung penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlu dilakukan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada, Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada. Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada juga menjadi kegiatan yang wajib dilakukan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan dalam upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan perlu didukung dengan kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran, pembinaan aparatur pemadam kebakaran serta pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.

Dalam perkembangannya, upaya pencegahan dan penanggulangan darurat kebakaran tidak bisa hanya menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh aparatur pemadam kebakaran saja, tapi perlu melibatkan pemberdayaan masyarakat juga. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan darurat kebakaran menjadi hal yang penting dan terus ditingkatkan. Upaya yang perlu dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dalam hal ini adalah penjaringan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran (Redkar). Saat ini belum ada dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut, sehingga pada perlu disesuaikan pada perubahan Renja 2025, khususnya pada Sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah/kota untuk mendukung tercapainya *response time*, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam rangka pengurangan resiko kebakaran. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan meningkatkan keterampilan Redkar melalui pelatihan dengan materi pencegahan dan penanggulangan kebakaran (penanganan kebakaran akibat kebocoran LPG, penanganan kebakaran secara manual dengan menggunakan karung goni yang dibasahi atau selimut api dan penanganan kebakaran dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) serta materi terkait penyelamatan (evakuasi satwa/ular piton).

2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada awal P-RKPD Tahun 2025 sudah menuangkan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Review terhadap rancangan awal P-RKPD Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban disajikan dalam tabel T-C.31 berikut ini:

Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				**19.355.290.129**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**				**19.355.290.129**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**81.90 Poin**	**13.237.082.841**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**81.90 Poin**	**13.237.082.841**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen, Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**9 Dokumen**	**121.516.307**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen, Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**9 Dokumen**	**121.516.307**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	77.480.307	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	77.480.307	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 Laporan	44.036.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 Laporan	44.036.000	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun**	**9 Jenis**	**11.803.036.680**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun**	**9 Jenis**	**11.803.036.680**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	11.720.746.180	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	11.720.746.180	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	50.100.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	50.100.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.107.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.107.500	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	23.786.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	23.786.000	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.297.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	5.297.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah jenis Layanan Kepegawaian**	**2 Jenis**	**81.399.550**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah jenis Layanan Kepegawaian**	**2 Jenis**	**81.399.550**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	123 Paket	81.399.550	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	123 Paket	81.399.550	
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum**	**6 Jenis**	**265.592.013**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum**	**6 Jenis**	**265.592.013**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.989.273,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.989.273,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.728.740,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.728.740,00	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	163.369.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	163.369.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.068.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.068.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.437.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.437.000,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	31.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	31.000.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan**	**4 Jenis**	**265.205.275**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan**	**4 Jenis**	**265.205.275**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	265.205.275	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	265.205.275	
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jenis**	**316.796.680**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jenis**	**316.796.680**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.580.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.580.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.123.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.123.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.093.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.093.680	
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Jenis**	**383.536.336**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Jenis**	**383.536.336**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	261.550.461	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	261.550.461	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	
1	***2***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	17.060.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	17.060.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	104.925.875	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	104.925.875	
II	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Jenis Pelanggaran dalam Perda dan Perkada yang Ditegakkan**	**100%**	**5.295.279.378**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Jenis Pelanggaran dalam Perda dan Perkada yang Ditegakkan**	**100%**	**5.295.279.378**	
			Persentase Pelanggaran Trantibum yang Terselesaikan	**100%**				**Persentase Pelanggaran Trantibum yang Terselesaikan**	**100%**		
			Persentase Satlinmas yang Aktif	**50%**				**Persentase Satlinmas yang Aktif**	**50%**		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	
1	***2***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
A	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penanganan Gangguan Trantibum**	**100%**	**4.701.931.751**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penanganan Gangguan Trantibum**	**100%**	**4.701.931.751**	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten / Kota	**100 %**							
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3.110.122	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3.110.122	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	151.357.784	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	151.357.784	
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	212 Orang	186.719.505	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	212 Orang	186.719.505	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	4.023.227.340	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	4.023.227.340	
5	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	332.517.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	332.517.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	
1	***2***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
6	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	5.000.000,00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	5.000.000,00	
B	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada**	**165 Kegiatan**	**989.738.570,00**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada**	**165 Kegiatan**	**989.738.570,00**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	105.594.300	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	105.594.300	
2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan	412.221.080	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan	412.221.080	
3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	68.421.390	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	68.421.390	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	
1	***2***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
C	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota**	**1 Kegiatan**	**7.110.857**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota**	**1 Kegiatan**	**7.110.857**	
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	7.110.857	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	7.110.857	
III	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran (\menit)**	**15 Menit**	**822.927.910**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran (\menit)**	**15 Menit**	**822.927.910**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
A	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100%**	**822.927.910**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100%**	**822.927.910**	
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	549.088.915	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	549.088.915	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	51 Orang	33.305.470	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	51 Orang	33.305.470	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	28 Unit	240.533.525	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	28 Unit	240.533.525	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Musrenbang yang telah dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Tuban, tidak didapati usulan dari masyarakat yang mengarah pada Program dan Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban. Dengan demikian hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah nihil.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			NIHIL -		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah perlu mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya, salah satunya harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah, mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban berpedoman pada arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Provinsi serta memperhatikan kondisi lokal. Keselarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu dijaga agar setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Tuban turut berkontribusi terhadap capaian pembangunan nasional dan wilayah. Sedangkan kondisi lokal dimaksud adalah isu strategis mengenai perekonomian di Kabupaten Tuban yang dikaitkan dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan dilakukan ke depan.

Selain itu dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD berdampak langsung pada ekonomi daerah, karena pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran mereka dengan instruksi penghematan yang ditetapkan. Terbitnya inpres ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, serta memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan prioritas pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan tahunan terhadap RPJMD 2025–2029, yang sekaligus mencerminkan implementasi tahap awal dari RPJPD 2025– 2045. Perubahan RKPD ini juga memperhatikan dinamika aktual dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan strategis nasional dan provinsi. Perubahan RKPD juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah selama lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih Aditya Halindra Faridzky, SE, sebagai Bupati dan Drs. Joko Sarwono sebagai Wakil Bupati. Maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 perlu diselaraskan agar konsisten dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Di sisi lain perumusan prioritas juga memperhatikan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, maka pada bagian ini menyajikan tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Rumusan Visi dan Misi daerah berdasarkan pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dan selanjutnya diimplementasikan secara gradual tahunan dalam RKPD dan P-RKPD.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Tujuan dan Sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Tuban. Proses perumusan ini melibatkan analisis mendalam terhadap tantangan dan kebutuhan daerah, sehingga setiap kebijakan yang disusun dapat memberikan solusi yang relevan dan efektif. Elaborasi antara gagasan dan komitmen Bupati serta Wakil Bupati terpilih dengan kondisi faktual permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis daerah menjadi aspek krusial dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban 2025–2029.

RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024. Dalam dokumen tersebut, ditetapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tuban,

yaitu: "***Tuban Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.***" Sedangkan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban tahun 2025- 2029 adalah: ***"Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan".***

Dalam rangka mengimplementasikan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 secara nyata dan terarah, diperlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan ke dalam bentuk misi pembangunan yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima tahun mendatang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap rumusan misi Kepala Daerah yang ditetapkan perlu dijabarkan secara lebih operasional ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan dan sasaran berfungsi sebagai tahapan strategis yang memberikan arah pencapaian misi secara sistematis dan terukur selama periode perencanaan lima tahunan. Sehingga setiap misi yang telah dirumuskan akan memiliki serangkaian tujuan sebagai capaian antara serta sasaran sebagai indikator spesifik yang ingin diwujudkan dalam pembangunan. Misi Pembangunan berdasarkan Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 beserta penjabaran tujuan dan sasaran misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Misi 1 dijabarkan kedalam satu tujuan dan dua sasaran. Tujuan pada misi ini adalah mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak huni yang didukung infrastruktur terpadu dan berkelanjutan berbasis kewilayahan.

Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

2. Misi 2 dijabarkan kedalam satu tujuan dan tiga sasaran. Tujuan pada misi ini adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan.

Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

3. Misi 3 terkait dengan pembangunan SDM, dijabarkan menjadi satu tujuan dan empat sasaran

Gambar 3.3 Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

4. Misi 4 difokuskan pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik, dijabarkan dalam satu tujuan dan tiga sasaran

Gambar 3.4 Tujuan dan Sasaran pada Misi 4

Dari uraian Misi, tujuan dan sasaran misi berdasarkan rancangan akhir RPJMD 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mendukung pencapaian misi 3, yaitu: mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang bertumpu pada Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal. Dengan tujuan mewujudkan sumber daya manusia unggul dan sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Untuk menentukan Tema P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025, perlu mempertimbangkan isu strategis, hasil telaah prioritas pembangunan

Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025, sasaran dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tuban Tahap I (2025-2029), tema RKP tahun 2025, dan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, serta memperhatikan visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Rancangan isu strategis Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah;
2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan;
3. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup danketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan;
6. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Sedangkan rancangan isu strategis Kabupaten Tuban yang tercantum dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fundamental ekonomi dengan transformasi strutural ekonomi, yaitu hilirisasi sektor pertanian (dalam arti luas) menuju sektor yang memberikan nilai tambah tinggi yang disertai dengan pengendalian penduduk;
2. Peningkatan produktifitas sektor ekonomi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah, khususnya yang berbasis potensi lokal/pertanian, baik on farm maupun off farm;
3. Peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi, khususnya yang berpendapatan rendah - petani, nelayan, pembudidaya;
4. Transformasi struktural perekonomian yang seimbang: pergeseran

kontribusi produksi per sektor disertai/seiring dengan kontribusi tenaga kerja per sektor;

5. Pengembangan usaha bernilai tambah tinggi (industri, perdagangan dan jasa) berbasis sektor pertanian dan penyediaan infrastruktur wilayah pendukungnya; Percepatan pembangunan desa/implementasi pembangunan kewilayahan dengan prioritas wilayah "terbelakang";
6. Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan layanan sosial lainnya) dan penyediaan infrastruktur dasar pendukungnya;
7. Peningkatan ketahanan sosial (ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perlindungan anak, pembangunan kebudayaan);
8. Penguatan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk dengan melibatkan masyarakat;
9. Urgensi Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan aman bencana;
10. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan TIK kerjasama antar stakeholder;
11. Penguatan pengelolaan keuangan daerah: optimalisasi peningkatan PAD; kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntable dengan memanfaatkan TIK dan kerjasama antar stakeholder pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan pada masa awal implementasi agenda pembangunan Indonesia Emas 2045, sehingga tema RKP Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, kerangka ekonomi makro, isu strategis, dan agenda Pembangunan panjang tahap 1 (RPJPN 2025-2029). Adapun tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 program prioritas nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 3.5 Prioritas Nasional

Untuk menjaga implementasi Tema RKP Tahun 2025, maka ditetapkan sasaran Pembangunan Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 melalui kerangka ekonomi makro antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,5-5,0%;
3. Rasio Gini : 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan : 7,8-8,0%; dan
6. Penurunan Emisi GRK : 38,6%

Perumusan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi yang menjadi keunggulan dan keunikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu kebijakan pembangunan Jawa Timur juga memperhatikan hasil dari evaluasi pembangunan yang terangkum dalam permasalahan dan isu strategis Provinsi Jawa Timur.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,10-5,41%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 3,9-4,49%;
3. Rasio Gini : 0,381-0,386;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,61;
5. Tingkat Kemiskinan : 7,58-8,08%; dan
6. % Intensitas Emisi GRK : 38,6%

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
2. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi *(unique & high-value economy).*
3. Peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
5. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
6. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
8. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
9. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
10. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
11. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.

12. Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan intensifikasi produk unggulan.
13. Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
14. Peningkatan kualitas kelembagaan dan produktivitas lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatkan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa.

Arah kebijakan tersebut dituangkan ke dalam 9 (sembilan) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 3.6. Program Prioritas Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 prioritas pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik.
2. Program Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman,

sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik.

3. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana
4. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
5. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah.
6. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan.
7. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan berkarakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat.
8. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat.
9. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia.
10. Program Pemantapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
11. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital.
12. Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan.

Dengan mendasarkan pada isu strategis, hasil telaah prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025, sasaran dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tuban Tahap I

(2025-2029), tema RKP tahun 2025, dan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, serta memperhatikan visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 masih sangat relevan untuk diterapkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025, yaitu; “Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Manusia Unggul serta Potensi Sektor Strategis”

Gambar 3.7. Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025

Selanjutnya, mengacu pada pendekatan penyusunan RKPD yang tematik, holistik, integratif, dan spasial, maka Tema RKPD tahun Kabupaten Tuban tahun 2025 harus selaras dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dan Tema RKP tahun 2025.

Gambar 3.8 Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025

Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan tahun Pertama dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sehingga arah strategi, kebijakan pembangunan, program dan kegiatannya diarahkan pada terciptanya akselerasi ekonomi.

Tabel 3.1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Tuban Tahun 2025

Asta Cita	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (Asta Cita 3)	1. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan (PP13)	1. Jatim Akses Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan (PP3)	1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik (PP1) 2. Program Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik (PP2)
	1. Menjamin pelestarian lingkungan hidup (PP11)	1. Jatim Lestari Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan (PP9)	1. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana (PP3)

Asta Cita	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
1. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (Asta Cita 5) 2. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita 6)	1. Pemberantasan kemiskinan (PP5)	1. Jatim Sejahtera Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas Sektoral-Spasial berbasis Data Terpadu (PP1)	1. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha (PP4)
1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Asta Cita 2) 2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (Asta Cita 3)	1. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota- kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya (PP14) 2. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi (PP15) 3. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga (PP17)	1. Jatim Kerja Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi. (PP2)	1. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah (PP5)

Asta Cita	Prioritas Nasional	Priortas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
1. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (Asta Cita 8)	1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air (PP1) 2. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani (PP12)	1. Jatim Argo Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan	1. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan (PP6)
1. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (Asta Cita 4)	1. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi (PP8)	1. Jatim Cerdas Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. (PP4)	1. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan karakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat (PP7)
	1. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. (PP7)	1. Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan universal health coverage (UHC). (PP5)	1. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat. (PP8)

	1. Pencegahan dan pemberantasan narkoba (PP6) 2. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas (PP10) 3. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga (PP17)	1. Jatim Sejahtera Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas Sektoral-Spasial berbasis Data Terpadu (PP1)	2. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia (PP9)
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Asta Cita 1) 2. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (Asta Cita 7)	1. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif (PP9) 2. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah (PP16)	1. Jatim Harmoni Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga (PP8)	1. Program Pemantapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (PP10)
1. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (Asta Cita 7)	1. Penyempurnaan sistem penerimaan Negara (PP2) 2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi (PP3) 3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi (PP4)	1. Jatim Berkah – Amanah Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif (PP6)	1. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital P11)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban yang memiliki tugas membantu Bupati dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat harus selaras dengan prioritas pembangunan Nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur 2025 serta prioritas pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2025. Penyelenggaraan urusan trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mendukung mewujudkan asta cita, prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Propinsi Jawa Timur serta Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban dengan uraian sebagai berikut:

1. Asta Cita (1 dan 7):

   Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

   Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
2. Prioritas Nasional (PP-9 dan PP-16):

   PP 9: Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif

   PP16: Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
3. Prioritas Propinsi Jawa Timur (PP-8):

   Jatim Harmoni Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila Pengarusutamaan Gender, serta memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga
4. Prioritas Kabupaten Tuban (PP-10):

   Program Pemantapan Nilai- Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Sehubungan dengan optimalisasi penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata

kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kombinasi strategi penegakan hukum yang humanis, edukatif dan persuasif, serta partisipasi masyarakat, dan reformasi tata kelola pemerintahan merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang berkelanjutan. Kombinasi strategis dimaksudkan untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan strategis dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi, pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan sehingga penanganan gangguan Trantibumlinmas dapat dioptimalkan.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran menjadi program prioritas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban dalam menyelenggarakan urusan trantibumlinmas. Terselenggaranya urusan trantibumlinmas dengan baik di Kabupaten Tuban tentu akan berpengaruh positif terhadap kondusivitas daerah sehingga bisa mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya sektor strategis (usaha mikro, koperasi, industri kreatif, pariwisata, dll). Dan tentu ikut mendukung capaian SDG's XVI, yaitu menguatkan masayarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar

Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM khususnya sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum memiliki 2 (dua) indikator yaitu: persentase pencapaian penerima layanan dasar (bobot 80%) dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%). Penerima layanan dasar dalam hal ini merupakan warga negara yang berada pada radius 0- 50 meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada, sedangkan mutu layanan dasar merupakan hal-hal pendukung pelayanan dasar seperti kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan dan lainnya.

Sedangkan Penerapan SPM sub urusan kebakaran juga memiliki 2 (dua) indikator yaitu: Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (bobot 80%) dan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%). Penerima layanan dasar adalah setiap warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran, sedangkan mutu layanan dasar merupakan hal-hal pendukung pelayanan dasar seperti tingkat waktu tanggap, prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, serta kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/SDM.

Tugas pokok dan fungsi Satpol PP adalah menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sementara Pemadam Kebakaran bertugas dalam pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran serta memberikan layanan penyelamatan non-kebakaran. Arah kebijakan nasional yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM berkaitan langsung dengan tugas Satpol PP dalam memastikan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan dan aktivitas ekonomi. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP mendukung kebijakan nasional dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang baik termasuk sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan darurat. Indikator waktu tanggap *(response time)* untuk penanganan kebakaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tuban sesuai dengan prioritas pembangunan infrastruktur

yang mendukung respons cepat terhadap bencana. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi di tingkat nasional membantu Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah secara lebih efektif. Dengan regulasi yang lebih sederhana, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, mendukung target penegakan Perda dan Perkada yang ditetapkan mencapai 100% setiap tahun. Kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional secara langsung terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Upaya peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi semuanya membutuhkan dukungan dari lingkungan yang aman dan tertib, yang merupakan tugas pokok dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Dengan demikian, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sinergis dengan program dan indikator kinerja yang ditetapkan untuk Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam RPJMD Kabupaten Tuban 2025-2029.

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah masih tingginya pelanggaran perundang-undangan daerah serta kurangnya jangkauan pelayanan dan penanggulangan darurat kebakaran. Berdasarkan isu strategis tersebut serta dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dalam mendukung tercapainya Misi 3, dengan sasaran Misi pada poin ke-4. Berdasarkan hal tersebut, maka Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran OPD
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
1.	Terwujudnya Masyarakat Harmoni	Indeks Harmoni Indonesia	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPPKU)

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan, Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran	Persentase Kasus/ Kejadian Kebakaran yang Memenuhi Respon Time

Dalam merumuskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025, perlu mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya, salah satunya harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Mengacu pada Rancangan akhir RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Secara keseluruhan jumlah program pada P-RKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025 ada 3 (tiga) program terdiri dari 2 program teknis dan 1 (satu) program penunjang yang meliputi 11 (sebelas) kegiatan dengan total jumlah sub kegiatan sebanyak 34 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu indikatif P-RKPD 2025 sebesar Rp. 19.355.290.129 (Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh serratus dua puluh Sembilan rupiah) dari anggaran APBD 2025 sebelumnya sebesar Rp. 21.888.224.265 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan P-RKPD Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban

No	Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.686.394.145**	**13.237.082.841**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.563.307	121.516.307
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.983.322.385	11.803.036.680
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.581.600	81.399.550
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.796.317	265.592.013
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.020.000	265.205.275
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.949.800	316.796.680
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.160.736	383.536.336

II	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.327.088.210**	**5.295.279.378**
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.321.291.926	4.701.931.751
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	989.738.570	586.236.770
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	16.057.714	7.110.857
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**874.741.910**	**822.927.910**
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	874.741.910	822.927.910
	Jumlah	**21.888.224.265**	**19.355.290.129**

Dalam merumuskan rencana kerja dan pendanaan dalam perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, mempertimbangkan beberapa hal yang menyebabkan atau mendasari perlunya dilakukan perubahan, diantaranya:

1. Sub kegiatan yang didalam rekening belanjanya perlu dilakukan penggeseran antar rekening belanja karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya;
2. Sub Kegiatan yang penting untuk segera dilaksanakan namun anggarannya tidak mencukupi / tidak tersedia sehingga memerlukan penambahan anggaran;
3. Kegiatan yang perlu pengurangan atau penambahan jumlah anggaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya penyesuaian dengan kebutuhan;

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025 disajikan dalam tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				19.355.290.129				21.855.246.961
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.355.290.129				21.855.246.961
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.355.290.129				21.855.246.961
1	05	01			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		81,9 Poin	13.237.082.841			82,4 Poin	13.294.180.721
1	05	01	2.01		Tersusunnya Dokumen Penganggaran, Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun		9 Dokumen	121.516.307			9 Dokumen	153.881.300

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
1	05	01	2.01	0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	6 Dokumen	77.480.307	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Dokumen	95.387.300
1	05	01	2.01	0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	3 Laporan	44.036.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7 Laporan	58.494.000
1	05	01	2.02		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun		9 Jenis	11.803.036.680			9 Jenis	11.737.757.841
1	05	01	2.02	0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	91 Orang	11.720.746.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan		111 Orang	11.622.429.341

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
											Perjanjian Kerja			
1	05	01	2.02	0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	9 Dokumen	50.100.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Dokumen	70.500.000
1	05	01	2.02	0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	3.107.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			6.233.000

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
1	05	01	2.02	0007	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	18 Laporan	23.786.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		23 Laporan	28.000.000
1	05	01	2.02	0008	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	5.297.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			10.595.500
1	05	01	2.05		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian		2 Jenis	81.399.550			2 Jenis	143.581.600
1	05	01	2.05	0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	123 Paket	81.399.550	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		208 Paket	143.581.600
1	05	01	2.06		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum		6 Jenis	265.592.013			4 Jenis	326.069.444

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
1	05	01	2.06	0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Paket	4.989.273	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Paket	4.992.400
1	05	01	2.06	0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	3 Paket	35.728.740	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Paket	32.998.740
1	05	01	2.06	0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	3 Paket	163.369.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Paket	180.975.904
1	05	01	2.06	0005	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	3 Paket	26.068.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Paket	37.665.400
1	05	01	2.06	0006	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	4.437.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Dokumen	4.437.000
1	05	01	2.06	0009	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	31.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		20 Laporan	65.000.000

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
1	05	01	2.07		Tersedianya Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah		4 Jenis	265.205.275			4 Jenis	99.380.000
1	05	01	2.07	0006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	32 Unit	265.205.275	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)		20 Unit	99.380.000
1	05	01	2.08		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Jenis	316.796.680			2 Jenis	345.249.800
1	05	01	2.08	0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	12 Laporan	80.580.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Laporan	72.280.000
1	05	01	2.08	0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	12 Laporan	9.123.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Laporan	9.123.000

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
1	05	01	2.08	0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	12 Laporan	227.093.680	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Laporan	263.846.800
1	05	01	2.09		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Jenis	383.536.336			3 Jenis	488.260.736
1	05	01	2.09	0001	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	42 Unit	261.550.461	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		42 Unit	321.303.236
1	05	01	2.09	0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	11 Unit	17.060.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		11 Unit	17.060.000
1	05	01	2.09	0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Unit	104.925.875	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Unit	149.897.500
1	05	02			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jenis Pelanggaran dalam Perda		100 %	5.295.279.378			100 %	7.686.324.330

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
					serta perlindungan masyarakat		dan Perkada yang Ditegakkan							
							Persentase Pelanggaran Trantibum yang Terselesaikan		100 %				100 %	
							Persentase Satlinmas yang Aktif		50 %				55 %	
1	05	02	2.01		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan trantibum		100 %	4.701.931.751			100 %	4.439.791.926
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten / Kota		100 %				100 %	
1	05	02	2.01	0003	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	3.110.122	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	10.000.000

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
							Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							
1	05	02	2.01	0004	Tersedianya Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	151.357.784	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	138.451.780
1	05	02	2.01	0005	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212 Orang	186.719.505	Dana Alokasi Umum (DAU)		200 Orang	481.834.506

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
1	05	02	2.01	0015	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.023.227.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	3.511.654.840
1	05	02	2.01	0016	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	332.517.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	292.850.800

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
1	05	02	2.01	0017	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	5.000.000
1	05	02	2.02		Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada		165 Kegiatan	989.738.570			165 Kegiatan	3.230.474.690
1	05	02	2.02	0010	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	105.594.300	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		2 Laporan	2.474.739.170
1	05	02	2.02	0011	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	412.221.080	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		2 Laporan	690.787.000

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
1	05	02	2.02	0012	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	68.421.390	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	64.948.520
1	05	02	2.03		Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	7.110.857			1 Kegiatan	16.057.714
1	05	02	2.03	0006	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.110.857	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	16.057.714
1	05	04			Meningkatnya koordinasi dan penanggulangan darurat kebakaran secara cepat dan tepat	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran		15 Menit	822.927.910			15 Menit	874.741.910
1	05	04	2.01		Meningkatnya Pencegahan,	Pencegahan, Pengendalian,	Persentase Penanganan		100 %	874.741.910			100 %	874.741.910

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
					Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran dan Non Kebakaran							
1	05	04	2.01	0002	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	549.088.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	571.043.750
1	05	04	2.01	0007	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	51 Orang	33.305.470	Dana Alokasi Umum (DAU)		51 Orang	64.166.070

Kode					Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2						3	4	13	9	12	14	17	18	19
1	05	04	2.01	0017	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	28 Unit	240.533.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		15 Unit	239.532.090

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja diharapkan mampu menjadi pedoman dan sarana untuk mewujudkan sasaran dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya misi 3 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal’ yang bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul dengan sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini akan dapat berjalan efektif dan efisien apabila didukung oleh semua pihak, baik internal yakni seluruh komponen dalam OPD itu sendiri dengan bentuk kerjasama yang solid, maupun pihak eksternal, berbasis kinerja yang berdampak. Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah pelaksanaan bahwa Sekretariat dan seluruh Bidang Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

Meskipun Ketersediaan anggaran sangat menentukan dalam pencapaian target–target kinerja yang telah ditentukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Namun, dengan adanya instruksi penghematan yang ditetapkan pemerintah, diperlukan upaya dan komitmen dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan anggaran yang tersedia serta tetap memastikan anggaran dikelola dengan baik untuk pelaksanaan tugas fungsi agar kinerja pelayanan ke masyarakat tetap bisa terpenuhi sesuai target tang direncanakan.

Sangat disadari bahwa Perubahan Rencana Kerja diatas bukanlah dokumen yang sangat sempurna, namun dengan acuan dan panduan ini

diharapkan dapat mampu mengimplementasikan kebutuhan dan harapan masyarakat lewat pelayanan maupun penyediaan fasilitas dalam rangka menunjang dan mendukung terciptanya masyarakat Tuban yang kondusif, aman, tentram dan memperkecil gejolak akibat penyakit sosial yang timbul akibat perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan gambaran yang konkrit bagi para pihak yang berkepentingan.

Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini untuk digunakan sebagai pedoman operasional dalam menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Drs. GUNADI, M.M.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi secara efektif. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan yang terakhir Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan di tingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk

pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Perubahan Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat ll Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2730);
2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 68 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban;
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulanan Bencana Daerah Kabupaten Tuban;
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tenlang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Sen E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri E Nomor 67);
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 3).

22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 14);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban tahun 2025 adalah :

1. Menyesuaikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan.

Adapun tujuan dari disusunnya perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
2. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
3. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana;
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025;
6. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II: EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan tiwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Reviu terhadap Rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV: PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada Tahun 2025 pada perencanaan pembangunan Kabupaten Tuban, adapun evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra berjalan adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lembar 1 dari 4

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2004	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82 Poin	81,1 Poin	81,45 Poin	81,45 Poin	100%	81,5 Poin	0 Poin	0,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2004	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	30 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	6 Dokumen	2 Dokumen	6,67%
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	45 Dokumen	9 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	9 Dokumen	2 Dokumen	4,44%
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	100%	57 Orang	0 Orang	0%
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	25 Layanan	5 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	100%	5 Layanan	1 Layanan	4%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2004	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0 Unit	0%
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	25 Jasa	5 Jasa	7 Jasa	7 Jasa	100%	5 Jasa	2 Jasa	8%
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	3 Unit	50%
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Ketepatan waktu tanggap pasca bencana	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	100%	15 Menit	15 Menit	100%
					Prosentase Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0,06%	0,00%	0,05%	0,05%	100%	100%	0,13%	216,67%
					Presentase wilayah dengan kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar	2,44%	12,2%	18,29%	18,29%	100%	24,39%	30,77%	1261,07%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2004	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Prosentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Prosentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	100%	0,08%	0,13%	163%
1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase jumlah penduduk yang telah mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	0,06%	0,05%	0,15%	0,15%	100%	0,54%	0,2%	333,33%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2004	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase keberhasilan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban belum sepenuhnya 100%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tuban sering terjadi bencana dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten Tuban yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tuban diarahkan untuk kegiatan pencegahan, peringatan dini, serta mitigasi (upaya untuk mengurangi resiko bencana) sebagai upaya kesiapsiagaan pada tahap prabencana. Pada saat terjadi bencana dilakukan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana serta pemberian bantuan darurat secara bersama-sama oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap pasca bencana dilaksanakan kegiatan rehabilitasi baik mental maupun sarana dan prasarana serta kegiatan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Untuk menunjang optimalisasi kebijakan pencegahan dan penanggulanan bencana di Kabupaten Tuban pada tahun 2012 telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui PERDA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga lain di Kabupaten Tuban. Dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Tuban berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Timur.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, Pemerintah Kabupaten Tuban telah membentuk beberapa organisasi pelaksana kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh steakholder yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana antara lain :

1. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Tuban berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/68/KPTS/414.012/2009;

2. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penangulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (RUPUSDALOPS), berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/69/KPTS/414.012/2009;
3. Tim Reaksi Cepat Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (TRC SATLAK PBP) Kabupaten Tuban, berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/70/KPTS/414.012/2009.

Namun demikian, pada dasarnya pembentukan Satlak PBP adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan, serta meminimalisasi dampak bencana dan mengurangi kerentanan.

Terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban bersama-sama dengan komponen masyarakat adalah :

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban dan Unit Operasi penanggulangan Bencana baik di wilayah bencana maupun di lingkup Pemerintah Daerah;
2. Membentuk posko–posko bencana baik di wilayah bencana maupun di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Mengumpulkan dan menyalurkan bantuan dari masyarakat kepada warga yang terkena banjir secara baik dan menyeluruh;
4. Menangani pasca banjir dilaksanakan dengan *recovery* yang meliputi pemukiman penduduk, sarana prasarana umum/sosial (sekolah, sarana kesehatan dan perhubungan darat).

Evaluasi pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahannya. Evaluasi dimaksudkan disusun untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana organisasi berjalan sesuai pada tugasnya.

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun

Sasaran	Indikator sasaran	Target 2025	Realisasi	Tingkat Capaian 2025	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Kapasitas daerah dalam rangka penurunan Indek Risiko Bencana	Indek kapasitas Daerah	0,55 poin	(terhitung diawal bulan tahun berikutnya}	0 poin	0,56 poin

Pada pencapaian indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai Triwulan II Tahun 2025, dari target yang telah ditetapkan 0,55 Poin. Capaian kinerja indikator utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperhitungkan pada akhir tahun.

Pada triwulan II sebagai dasar tingkat capaian berikut:

1. Koordinasi dilakukan dengan pihak – pihak terkait diantaranya Pemerintah Desa, Kecamatan dan juga Organisasi Masyarakat;
2. Pemantauan monitoring evaluasi dilakukan berkala guna pencegahan serta kesiapsiagaan bencana dengan BBWS, BNPB, BPBD Provinsi Jatim serta BMKG.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tuban

NO	Indikator	Spm / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Meningkatnya Kapasitas daerah dalam rangka penurunan Indek Risiko Bencana	• Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana • Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana • Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		0,48	0,50	0,53	0,56	0.51	0.51	0,55	0,56	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pencapaian target kinerja merupakan hal yang krusial mengingat peran perangkat daerah sebagai pemegang kewenangan teknis roda pemerintahan bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan konsep negara demokrasi, rakyat atau warga negara adalah pemegang saham dari negara sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan optimal yang terbaik dari pemerintah selaku pihak yang diberikan mandatory untuk melaksanakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Untuk itu telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewajiban pemerintah dan hak rakyat akan pelayanan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sub urusan bencana terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ketiga standar tersebut adalah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan target capaian 100%;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target capaian 100%;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan target capaian 100%.

Dari ketiga Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana tersebut realisasi capaian targetnya pada tahun 2024 pada BPBD Kabupaten Tuban telah mencapai target yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tercapainya target dimaksud masih diperlukannya dukungan anggaran serta penambahan kapasitas sumber daya manusia pelaksananya. Dukungan anggaran, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, menjadi krusial mengingat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan SPM dimaksud membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai contoh, untuk mewujudkan indikator pencapaian bagi

Pelayanan Informasi Rawan Bencana diperlukan dana untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana meliputi anggaran untuk tenaga ahli, rapat-rapat, dan diskusi publik sampai dokumen KRB tersebut menjadi sah/legal. Kemudian untuk melakukan aktivitas penyampaian hasil kajian risiko bencana tersebut perlu dana untuk sosialisasi baik secara tatap muka *(offline)* maupun secara *online* melalui media sosial dan media massa. Selain itu juga diperlukan pemasangan rambu-rambu rawan bencana, rambu evakuasi, dan papan informasi publik. Semua aktifitas tersebut haruslah dapat mencakup seluruh warga negara yang bermukim di wilayah rawan bencana. Semakin besar wilayah rawan bencana maka semakin besar pula anggaran yang harus disediakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut. Persoalan yang kedua adalah menyangkut kapasitas sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban yang sampai saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas masih jauh dari harapan karena belum ada standar kompetensi yang ditetapkan bagi aparatur pelaksana perangkat daerah yang mengampu sub urusan bencana, padahal penanggulangan bencana adalah hal yang kompleks yang membutuhkan multi disiplin ilmu, minat yang tinggi, dan pengalaman yang memadai untuk dapat optimal dalam melaksanakan manajemen penanggulangan bencana.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja yang dihadapi BPBD Kabupaten Tuban berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya desa tangguh bencana di seluruh daerah rawan bencana akan berdampak ketidakmampuan desa dan Masyarakat dalam menghadapi bencana secara terencana dan terkoordinasi;
2. Belum tersedianya sistem peringatan dini / *Early Warning System* (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi akan berdampak keterlambatan deteksi dini bencana, respon masyarakat dalam menghadapi bencana yang lambat sehingga meningkatkan potensi kerugian dan korban jiwa.;
3. Belum dimilikinya gudang pengelolaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar akan berdampak penanganan bencana terlambat dan tidak efisien, kerusakan barang dan kehilangan logistik akan sistem peralatan yang tidak optimal, serta dapat meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan barang.

Belum tersedianya rencana kontingensi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan komprehensif.

Adapun isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tuban saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kontingensi, dan dokumen penunjang lainnya;
2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program kegiatan;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat serta aparatur mengenai berbagai kebijakan dan program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban dalam rangka Penanggulangan Bencana;
4. Kejadian bencana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga mempengaruhi realisasi kegiatan yang telah dianggarkan;
5. Kurangnya jumlah dan tingkat kompetensi Aparatur dalam penangganan penanggulangan bencana baik secara administratif dan teknis dilapangan.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini

perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efesien.

2. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelengggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Selanjutnya perlu juga untuk disampaikan bahwa dalam upaya manajemen bencana ke depan perlu dilakukan penyesuaian dalam kebijakan dan strategi penanggulangan bencana merujuk kepada Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang ditelah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 dan penjabarannya melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 – 2044. Adapun kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Tuban dalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan	a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
	Bencana yang efektif dan efisien	penanggulangan bencana b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2.	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan Penerapan riset inovasi dan teknologi dalam penanggulangan bencana	Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3.	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan bencana risiko kebencanaan melalui integrase kolaboratif multi pihak	a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif *(collaborative social engineering)* d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
4.	Peningkatan kapabilitas kapasitas dan penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Darurat Bencana
5.	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik Penanganan	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor Peraturan Bupati Tuban Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022; serta Peraturan Bupati Tuban Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141), sehingga perlu dilakukan reviu terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
2. Melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Rasionalisasi Anggaran dalam rangka pencegahan bencana alam antara lain sebagai berikut:
    a. Program dan kegiatan operasional masih dipertahankan dan tidak banyak dilaksanakan rasionalisasi dikarenakan sebagai pendukung operasional kegiatan pencegahan bencana alam;
    b. Melaksanakan penyesuaian pagu anggaran prioritas terhadap program dan kegiatan penanggulangan bencana alam;
    c. Melaksanakan pergeseran pagu anggaran program dan kegiatan yang tidak mencukupi ke program dan kegiatan penanggulangan bencana alam.
3. Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk program dan kegiatan bencana alam antara lain sebagai berikut :
    a. Pengembangan sistem penanggulangan bencana;
    b. Pemenuhan kebutuhan dasar logistik dan peralatan bencana bencana;
    c. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana;

d. Pengurangan resiko bencana;
e. Desa tangguh bencana;
f. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
g. Mitigasi struktural;
h. Pendampingan psikososial;
i. Rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi.

Adapun evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, sebagaimana tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lembar 1 dari 5

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	8.022.291.448	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82,2 poin	8.342.230.420	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	6 Dokumen	277.745.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	277.745.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	4.441.888.569	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	5 Dokumen	5.800.474.380	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	57 orang	28.633.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	57 orang	28.633.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	5 Layanan	323.466.679	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	5 Layanan	323.610.868	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pengadaan BMD	1 Unit	2.054.150.679	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pengadaan BMD	4 Unit	2.054.150.679	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	5 Jasa	323.495.930	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	5 Jasa	323.495.930	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	6 Unit	572.911.091	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	6 Unit	572.766.902	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Tuban	Persentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana	100 %	3.751.889.321	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Tuban	Persentase wilayah dengan kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar	24,39%	3.925.599.694	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
		Kab. Tuban	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	77 %			Kab. Tuban	Nilai Komponen Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	0,50 Poin		
							Kab. Tuban	Nilai Komponenen Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	0,55 Poin		
							Kab. Tuban	Nilai Komponen Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	0,42 Poin		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Prosentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0.0000770 %	86.098.200	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Prosentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0.00046% %	86.098.200	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Tuban	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	600 Orang	61.098.200	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana	Kab. Tuban	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	600 Orang	13.192.500	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	10.288.500	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tuban	Prosentase jumlah penduduk yang telah mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	0.054 %	1.652.358.371	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tuban	Prosentase jumlah penduduk yang telah mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	0.054 %	2.452.358.371	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tuban	Prosentase keberhasilan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	851.007.500	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tuban	Prosentase keberhasilan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	851.007.500	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tuban	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	0.0000770 %	1.162.425.250	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tuban	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	50 Kegiatan	1.162.425.250	
JUMLAH					**11.774.180.769**	**JUMLAH**				**12.267.830.114**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban tidak terdapat program dan kegiatan yang merupakan usulan dari Masyarakat seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	---------NIHIL ---------				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan:
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor stategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Tujuan : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Bencana.

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang–undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Terwujudnya keandalan sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan *realtime*.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
2. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
3. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
4. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Melakukan percepatan pelaksaaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian *Post Disaster Needs Assessments* (PDNA) bersama instansi terkait.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

1. Program Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana dengan kegiatan :
   a. Mitigasi Struktural;
   b. Mitigasi Non Struktural;
   c. Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
   d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

2. Program Penanganan Darurat Bencana dengan kegiatan :
   a. Tanggap darurat di daerah terkena bencana;
   b. Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana;
   c. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana;
   d. Penanganan pengungsi akibat bencana.
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan kegiatan :
   a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;
   b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana;
   c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana.
4. Program Peralatan dan logistik dengan kegiatan :
   a. Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana;
   b. Penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana.
5. Program Data, Informasi dan Humas dengan kegiatan :
   a. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam.

Program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2025 sejumlah 2 (dua) program dengan 11 (sebelas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban. Sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari PAPBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.

Adapun program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Tuban

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kab. Tuban	82,2 Poin	8.342.230.420	APBD		82,95 Poin	9.503.245.500
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	Kab. Tuban	9 Dokumen	188.504.800	APBD		9 Dokumen	277.745.500
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	Kab. Tuban	5 Dokumen	4.907.623.171	APBD		9 Dokumen	5.499.000.000
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	Kab. Tuban	57 orang	3.280.500	APBD		2 Layanan	29.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	Kab. Tuban	5 Layanan	275.772.368	APBD		4 Layanan	304.500.000
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	Kab. Tuban	4 Unit	2.153.516.358	APBD		4 Unit	2.520.000.000
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	Kab. Tuban	5 Jasa	212.825.680	APBD		2 Jasa	206.000.000
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	Kab. Tuban	6 Unit	600.707.543	APBD		6 Unit	667.000.000
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Sesuai Standar (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Nilai Komponenen Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	Kab. Tuban	0,55 Poin	3.925.599.694	APBD		0,59 Poin	5.015.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Meningkatnya Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Nilai Komponen Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah		0,42 Poin		APBD		0,47 Poin	
					Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Sesuai Ketentuan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Persentase wilayah dengan kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar		24,39%		APBD		30,49%	
						Nilai Komponen Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah		0,50 Poin		APBD		0,55 Poin	
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Kab. Tuban	0.00046 %	23.481.000	APBD		0.00077 %	100.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya mitigasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sesuai ketentuan	Prosentase jumlah penduduk yang telah mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Tuban	0.054 %	1.743.625.960	APBD		0.056 %	2.230.000.000
1	05	03	2.30	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase keberhasilan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tuban	100 %	914.159.334	APBD		100 %	900.000.000
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Dasar rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	Kab. Tuban	50 Kegiatan	1.244.333.400	APBD		50 Kegiatan	1.785.000.000
				TOTAL ANGGARAN					**12.267.830.114**				**14.518.245.500**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada perubahan APBD Tahun 2025 mengalami penambahan sebesar Rp 493.649.345 yakni dari anggaran semula berjumlah Rp 11.774.180.769

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan satuan kerja. Dengan Perubahan Renja ini diharapkan Pimpinan Perangkat Daerah akan menentukan langkah kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban akan lebih terarah. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja Perubahan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban. Rencana Kerja perubahan ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.

Demikian penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TUBAN,

ttd.

SUDARMAJI

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185)
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, terjadi perubahan kebijakan yang memerlukan penyesuaian pada Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam perkembangannya terdapat pula beberapa hal yang mengharuskan untuk dilakukannya perubahan terhadap Rencana Kerja Tahun 2025, diantaranya karena terjadinya untuk penyesuaian terhadap pergeseran, pengurangan dan penambahan terhadap program/kegiatan sesuai dengan perkembangan dan skala prioritas serta penyesuaian alokasi angggaran dan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ditetapkan, maka Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dan selanjutnya menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban;
36. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

   Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan.

   a. Menjabarkan perubahan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban tahun 2025;
   b. Menyediakan arahan dan pedoman bagi aparatur sipil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
   c. Sebagai alat ukur kinerja penyelenggaraan fingsi dan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.
- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV PENUTUP.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2022 tentang tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mencermati rumusan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2021-2026, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban mempunyai tanggung jawab pokok mengemban misi yang kedua dan ketiga, yaitu:

Misi 2, “Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”.

Misi 3, “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal”

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial	0.83	0.82	0.83	0.83	100.00	0.84	0	0.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial**	94	91.71	91.50	91.74	100.26	93	0	0.00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PSKS yang Terbina**	4	4	4	4	100.00	4	0	0.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	328	328	328	328	100.00	656	656	100.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	20	20	100.00	20	20	100.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000	0	0	0	0	15	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	1	1	1	100.00	26	4	15.38
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100.00	1	0	0.00
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengajuan rekomendasi yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	100	0	0.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	0	0	0	0	5	0	0.00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar**	100	98.8	99	98.85	99.85	99.2	25.1	25.30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	100	94.3	100	97.73	97.73	100	25.1	25.10
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3750	713	1169	155	13.26	1195	239	20.00
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1250	409	250	250	100.00	250	0	0.00
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	112	30	25	17	68.00	25	0	0.00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	500	89	50	130	260.00	50	25	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1316	3181	3 850	376	158.55	3 850	150	17.65
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	750	65	100	20	20.00	100	14	14.00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	250	90	360	360	100.00	360	54	15.00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500	289	150	65	43.33	150	40	26.67
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	400	40	100	27	27.00	100	15	15.00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400	64	100	58	58.00	100	25	25.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	750	72	100	13	13.00	100	34	34.00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0.00	25	0	0.00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase pengaduan PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial yang ditindaklanjuti**	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75	1331	25	15	60.00	0	0	0.00
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	2	2	2	100.00	2	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	750	353	150	71	47.33	150	0	0.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	93	92.46	93.56	93.59	100.03	93.66	0	0.00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemutakhiran Data untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial**	100	100	100	100	100.00	100	0	0.00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	642372	642372	642372	559648	87.12	498281	498281	100.00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	142774	193919	193919	227264	117.20	40209	0	0.00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32421	7193	7266	6249	86.00	7837	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	510	0	0	0	0.00	20	0	0.00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota**	100	100	100	100	100.00	100	0	0.00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pangan harian pasca bencana**	100	0	100	100	100.00	100	0	0.00
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	175000	0	35000	0	0.00	1500	0	0.00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Pilar Sosial yang Terlatih**	2	1	1	1	100.00	2	2	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	68	68	68	68	100.00	68	0	0.00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang Terpelihara**	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Besaran Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara**	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Desa Mandiri	16.68	40	40	59.8	149.50	50	0	0.00
	PROGRAM PENATAAN DESA	**Prosentase desa yang statusnya meningkat**	9.97	16.72	18	19.61	108.88	20	0.00	0.00
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah desa maju**	207	180	186	125	67.20	187	0	0.00
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	207	180	186	122	65.59	311	311	100.00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Peningkatan Kerjasama Desa**	50	16.67	10	16.67	166.70	10	0	0.00
	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja**	76	20	15	14	93.33	20	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	9	12	10	10	100.00	1	1	100.00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel**	90.03	69.77	77.17	70.74	91.67	83.60	0	0.00
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Prosentase Desa dengan administrasi baik (%)**	100	82.96	90.03	93.25	103.58	96.46	0	0.00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	311	311	311	311	100.00	311	311	100.00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	311	311	311	311	100.00	311	311	100.00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	311	311	311	311	100.00	311	311	100.00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	900	227	80	238	297.50	267	267	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	311	554	300	287	95.67	10	10	100.00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	400	0	0	0	0.00	267	0	0.00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	311	311	311	311	100.00	311	311	100.00
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	5	0	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!
	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	400	166	280	0	0.00	311	311	100.00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan kelurahan	328	328	328	328	100.00	0	0	#DIV/0!
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	311	0	0	0	0.00	311	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Prosentase Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan**	20.90	17.68	18.50	16.19	87.51	20.09	0	0.00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase desa yang memiliki produk unggulan**	22.51	44.05	19.29	19.58	101.50	19.29	0	0.00
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19119	2002	3497	3007	85.99	3497	3245	92.79

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	522	60	100	100	100.00	50	0	0.00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	0	0	0.00	1	0	0.00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10	2	2	2	100.00	2	0	0.00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	311	311	311	311	100.00	311	0	0.00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	38	38	38	38	100.00	38	10	26.32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,008	0.04	0.010	0.080	800.00	0.01	0	0.00
		Indeks Pengausutamaan Gender	60	50.48	55.00	50.48	91.78	57.5	0	0.00
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	60	68.25	69	68.25	98.56	70.25	0	0.00
		Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA	Madya	Nindya	Nindya	100.00	Nindya	0	0.00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD**	18	48.92	50	50.01	100.02	52.5	0	0.00
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Program PUG pada Perangkat Daerah yang Dievaluasi di Tingkat Kabupaten/Kota**	54	62	54	61	112.96	54	0	0.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	240	30	137	137	100.00	42	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	46	84	42	42	100.00	6	0	0.00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Kader Perempuan Terlatih**	45	60	45	45	100.00	45	0	0.00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	4	2	2	100.00	3	3	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kader Lembaga Penyedia Layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0	70	0	0.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0	0	0	0	0	18	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	0	0	0	0	60	0	0.00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Terpilah**	85	100	100	100	100.00	100	0	0.00
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Profil Tersedia**	10	2	2	2	100.00	2	0	0.00
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	2	2	2	100.00	3	0	0.00
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	0	0	0	0	0.00	20	0	0.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Rasio kekerasaan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	0.004	0.01	0.005	0.07	1400.00	0.01	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar**	≤ 50	40	50	45	90.00	50	9	18.00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	≤ 50	40	50	45	90.00	50	9	18.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	5	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200	40	40	40	100.00	40	40	100.00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan sesuai standart	0	0	0	0	0.00	1	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0.00	1	0	0.00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase pengaduan pada Puspaga yang**	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Keluarga yang Dilayani**	≤ 100	444	≤ 50	301	602.00	50	6	12.00
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	≤ 180	444	≤ 50	301	602.00	50	9	18.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang aktif dalam pencegahan perkawinan usia anak	0	0	0	0	0	70	100	142.86
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	1	1	100.00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak**	25	36.89	43.6	43.9	100.69	43.6	0	0.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani (di Dalev Satuan Dokumen)**	≤ 50	47	≤ 50	61	#VALUE!	2	0	0.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300	4	60	60	100.00	4	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100.00	2	2	100.00
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	0	0	0	0	0	75	0	0.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	0	0	0	0	0	30	0	0.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan yang tersedia**	2	4	2	2	100.00	2	0	0.00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2	4	2	0	0.00	2	2	100.00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani**	≤ 50	97	≤ 50	27	54.00	50	9	18.00
	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan Pelayanan	50	95	50	61	122.00	0	0	0.00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	≤50	49	≤50	61	122.00	≤50	9	0.00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani	0	0	0	0	0	50	9	18.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	0	0	0	0	0	2	0	0.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	82	81.7	83	0	0.00	83	0	0.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun**	9	9	9	9	100.00	9	3	33.33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	3	3	3	100.00	3	2	66.67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2	1	1	1	100.00	2	2	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	6	5	5	100.00	4	2	50.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun**	9	9	9	9	100.00	9	3	33.33
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	52	47	45	95.74	50	34	68.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	6	6	6	100.00	6	2	33.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9	7	6	6	100.00	1	1	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9	3	3	3	100.00	4	0	0.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai**	2	2	2	2	100.00	2	0	0.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1	1	1	1	100.00	0	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56	74	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	68	68	100.00	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia**	8	8	8	8	100.00	8	8	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100.00	1	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100.00	1	0	0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	3	1	1	100.00	1	1	100.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	1	50.00	2	2	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	1	50.00	2	2	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	54	48	84	175.00	40	10	25.00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	60	60	60	60	100.00	60	0	0.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	1	1	1	1	100.00	0	0	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1	12	11	17	154.55	0	0	0.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0	0	1	0	0.00	0	0	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Junlah Jasa Penunjang yang Disediakan**	4	4	4	4	100.00	4	4	100.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD akhir tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	100.00	3	3	100.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	100.00	2	0	0.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100.00	2	2	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	4	4	4	4	100.00	4	4	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	36	36	235	652.78	40	9	22.50
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	118	4	118	118	100.00	118	0	0.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang Terpelihara	142	4	142	87	61.27	142	11	7.75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	4	4	4	4	100.00	4	4	100.00

Dari data Tabel 2.1 terlihat bahwa capaian kinerja pada program di bidang sosial pada tahun 2025 masih memerlukan percepatan, diantaranya melalui penyaluran Bantuan Sosial baik berupa uang tunai maupun pemberian bantuan pangan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Prioritas anggaran digunakan untuk pemenuhan beban pengeluaran yang berkelanjutan. Menyikapi hal ini, kinerja pada urusan sosial dioptimalkan dalam bentuk pemberian bantuan sosial bagi masyarakat dengan tetap memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimum bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyaluran bantuan sosial antara lain terkait data sasaran intervensi. Sehingga untuk mendukung tercapainya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dilaksanakan verifikasi dan validasi pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bersumber dari Kementerian Sosial serta data Registrasi Sosial Ekonomi Nasional (Regsosek) secara menyeluruh di seluruh desa pada 20 Kecamatan. Dari hasil verifikasi dan validasi, kondisi masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dapat terklasifikasikan sehingga bentuk intervensi dapat difokuskan sesuai tingkat produktivitasnya.

Pada urusan perlindungan perempuan dan anak, pengaduan tindak kekerasan yang dilaporkan menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mendapatkan perlindungan semakin meningkat. Pada tribulan kedua tahun 2025, kasus korban kekerasan yang melakukan pengaduan keseluruhannya telah tertangani dan terselesaikan pengaduannya. Upaya perlindungan perempuan dan anak juga telah didukung dengan keberadaan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya.

Sedangkan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam hal peningkatan tata kelola desa telah dilakukan pelatihan, bimbingan teknis sampai dengan pendampingan kepada aparat pemerintahan desa mulai penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa, sampai dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang kelembagaan adalah pendataan dan pendampingan kepada pengurus lembaga yang ada, baik kelembagaan ekonomi seperti BUMDes maupun

kelembagaan masyarakat seperti RT, RW, PKK, Karang taruna, posyandu dan LPMD. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Di tahun 2025 pelaksanaan urusan wajib bidang sosial di Kabupaten Tuban diarahkan untuk program Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Pengeloaan Taman Makam Pahlawan. Objek utama kinerja urusan sosial meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta pengelolaan dan penyediaan data sosial ekonomi. Sedangkan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diarahkan untuk program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Perempuan, anak, dan kelompok rentan khususnya PPKS merupakan sasaran pembangunan yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif. Keberadaan inklusivitas tersebut memerlukan dukungan dari masyarakat baik dari sisi tata kelola maupun peningkatan partisipasi masyarakat antara lain melalui urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan program Penataan Desa, Peningkatan Kerjasama Desa, Administrasi Desa, dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban pada tabel berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TUBAN

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	93	93	93	93	93.59	93.66	93.76	94	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	Tahun 2024 sampai dengan tribulan II Tahun 2025 tidak terjadi tanggap bencana daerah
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Tersedianya data fakir miskin	Persentase Pemutakhiran Data untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel	77.17	83.6	90.03	96.46	77.17	83.6	83.6	96.46	
		Berkembangnya status pembangunan desa	Prosentase desa yang statusnya meningkat	9.97	9.97	9.97	9.97	18	20	22	24	
		Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	300	311	311	311	300	311	311	311	
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD	16	17	18	20	50	52.5	55	60	
			Rasio kekerasaan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.01	0.009	0.008	0.003	
		Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	15	20	25	30	43.6	43.6	45	48	
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Melalui penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2024 sebesar 0,8274. Meningkat dibandingakan capaian tahun 2023 sebesar 0,7989. Peningkatan IDM didukung dengan peningkatan jumlah desa mandiri maupun peningkatan ketahanan sosial masyarakat. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala sebagai berikut:

- Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Tuban yaitu sebesar 14,36% (BPS, 2024) sehingga berkonsekuensi tingginya sasaran intervensi program pada urusan sosial.
- Belum optimalnya integrasi basis data kesejahteraan sosial pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Belum optimalnya pemberdayaan disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.
- Belum optimalnya linearitas program dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi desa untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
- Kesenjangan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia dalam tata kelola desa.
- Keberadaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terlaporkan secara menyeluruh.

Salah satu sumber permasalahan di atas antara lain belum optimalnya kualitas data kesejahteraan sosial sebagai penunjang terselenggaranya intervensi yang memadai. Permasalahan di atas, terkait angka kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga merupakan masalah yang menjadi perhatian global dan menjadi indikator dalam SDG's *(Sustainable Development Goals)*.

Tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tuban adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan bagi kelompok rentan. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan kualitas, validitas dan integrasi data kesejahteraan sosial dan kelompok rentan, sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran.

Potensi lokal desa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan kelompok rentan di tingkat desa perlu diarahkan selaras dengan potensi lokal. Demikian pula dengan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, perlu diarahkan dalam kerangka mengembangkan kegiatan

ekonomi produktif yang mengedepankan potensi di wilayahnya. Dengan adanya keselarasan arah pemberdayaan, potensi desa didorong untuk memberikan *multiplier effect* yang bukan hanya meningkatkan perekonomian namun juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan, demikian pula dengan kelompok rentan dan marjinal. Meningkatnya kualitas hidup perempuan di berbagai bidang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga meminimalisir konflik dalam keluarga yang menimbulkan kekerasan, eksploitasi dan perlakuan yang salah dalam rumah tangga.

Dari kompleksnya permasalahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Sosial bagi kelompok rentan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Penyediaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terverifikasi dan tervalidasi;
3. Pengembangan pemberdayaan untuk pembentukan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kelompok rentan lainnya;
4. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai aspek pembangunan.
5. Peningkatan pendampingan pengembangan potensi desa dari aspek ekonomi, tata kelola maupun kelembagaan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan rencana kerja OPD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2025
Kabupaten Tuban

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	93	283,599,186	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	93	283,599,186	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		*Jumlah PSKS yang Terbina*	*4*	275,748,586	*Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota*		*Jumlah PSKS yang Terbina*	*4*	275,748,586	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	656	15,403,240	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	656	15,403,240	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	159,684,006	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	159,684,006	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	30,649,476	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	30,649,476	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26	44,950,184	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26	44,950,184	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	25,061,680	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	25,061,680	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase pengajuan rekomendasi yang ditindaklanjuti*	*100*	*7,850,600*	*Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase pengajuan rekomendasi yang ditindaklanjuti*	*100*	*7,850,600*	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5	7,850,600	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5	7,850,600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar	99.2	6,063,748,335	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar	99.2	6,063,748,335	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		*Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya*	*100*	*5,896,894,496*	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*		*Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya*	*100*	*5,896,894,496*	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1195	4,161,826,380	Penyediaan Permakanan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1195	4,161,826,380	
	Penyediaan Sandang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250	38,291,100	Penyediaan Sandang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250	38,291,100	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	81,095,500	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	81,095,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	24,478,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	24,478,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 850	1,207,973,872	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 850	1,207,973,872	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang	100	25,243,220	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu	100	25,243,220	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	360	47,703,702	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	360	47,703,702	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	17,621,920	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	17,621,920	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	157,739,793	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	157,739,793	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	15,102,840	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	15,102,840	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	26,735,360	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	26,735,360	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25	93,082,809	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	25	93,082,809	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		*Persentase pengaduan PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial yang ditindaklanjuti*	*100*	*166,853,839*	*Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*		*Persentase pengaduan PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial yang ditindaklanjuti*	*100*	*166,853,839*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	2	*161,275,000*	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	2	*161,275,000*	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	150	5,578,839	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	150	5,578,839	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	93.66	17,106,182,098.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	93.66	17,106,182,098.20	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Persentase Pemutakhiran Data untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial*	*100*	17,106,182,098.20	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Persentase Pemutakhiran Data untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial*	*100*	17,106,182,098.20	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	498281	477,730,144.00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	498281	477,730,144.00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40209	236,056,016.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40209	236,056,016.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7837	16,246,703,933.20	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7837	16,246,703,933.20	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	145,692,005.00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	145,692,005.00	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota	100	160,774,901	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota	100	160,774,901	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		*Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pangan harian pasca bencana*	*100*	*36,388,451*	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*		*Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pangan harian pasca bencana*	*100*	*36,388,451*	
	Penyediaan Makanan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500	36,388,451.00	Penyediaan Makanan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500	36,388,451.00	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah Pilar Sosial yang Terlatih*	*2*	*124,386,450*	*Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*		*Jumlah Pilar Sosial yang Terlatih*	*2*	*124,386,450*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	68	124,386,450.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	68	124,386,450.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang Terpelihara	100	107,377,260	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang Terpelihara	100	107,377,260	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		*Besaran Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara*	*100*	*107,377,260*	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*		*Besaran Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara*	*100*	*107,377,260*	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	107,377,260	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	107,377,260	
	PROGRAM PENATAAN DESA		Prosentase desa yang statusnya meningkat	20	111,054,800	PROGRAM PENATAAN DESA		Prosentase desa yang statusnya meningkat	20	111,054,800	
	Penyelenggaraan Penataan Desa		*Jumlah desa maju*	*187*	*111,054,800*	*Penyelenggaraan Penataan Desa*		*Jumlah desa maju*	*187*	*111,054,800*	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	311	111,054,800.00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	311	111,054,800.00	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Peningkatan Kerjasama Desa	10	46,896,030	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Peningkatan Kerjasama Desa	10	46,896,030	
	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa		*Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa*	*20*	*46,896,030*	*Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa*		*Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa*	*20*	*46,896,030*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	46,896,030.00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	46,896,030.00	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel	83.60	6,029,077,524	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel	83.60	6,029,077,524	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		*Prosentase Desa dengan administrasi baik (%)*	*96.46*	*6,029,077,524*	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*		*Prosentase Desa dengan administrasi baik (%)*	*96.46*	*6,029,077,524*	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	311	538,045,000.00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	311	538,045,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	311	80,368,900.00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	311	80,368,900.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	311	5,042,061,024.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	311	5,042,061,024.00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	267	145,257,800.00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	267	145,257,800.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	10	62,677,000.00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	10	62,677,000.00	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	267	0	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	267	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	311	69,861,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	311	69,861,000.00	
	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	311	11,275,000.00	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	311	11,275,000.00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	311	79,531,800.00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	311	79,531,800.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Prosentase Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	20.09	1,197,341,787	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Prosentase Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	20.09	1,197,341,787	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Prosentase desa yang memiliki produk unggulan*	*19.29*	*1,197,341,787*	*Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*Prosentase desa yang memiliki produk unggulan*	*19.29*	*1,197,341,787*	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3497	14,395,300.00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3497	14,395,300.00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	89,828,280.00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	89,828,280.00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	52,667,400.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	52,667,400.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	19,169,688.00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	19,169,688.00	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	311	16,843,728.00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	311	16,843,728.00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	38	1,004,437,391.00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	38	1,004,437,391.00	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD	52.5	*171,273,300*	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD	52.5	*171,273,300*	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		*Jumlah Program PUG pada Perangkat Daerah yang Dievaluasi di Tingkat Kabupaten/Kota*	*54*	*97,130,500*	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*		*Jumlah Program PUG pada Perangkat Daerah yang Dievaluasi di Tingkat Kabupaten/Kota*	*54*	*97,130,500*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42	32,364,980.00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42	32,364,980.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	64,765,520.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	64,765,520.00	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		*Jumlah Kader Perempuan Terlatih*	*45*	*50,473,200*	*Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*		*Jumlah Kader Perempuan Terlatih*	*45*	*50,473,200*	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3	50,473,200.00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3	50,473,200.00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase Kader Lembaga Penyedia Layanan yang ditingkatkan kapasitasnya*	*70*	*23,669,600*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*		*Persentase Kader Lembaga Penyedia Layanan yang ditingkatkan kapasitasnya*	*70*	*23,669,600*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60	23,669,600.00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60	23,669,600.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Terpilah	100	*292,161,478*	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Terpilah	100	*292,161,478*	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Profil Tersedia*	*2*	*292,161,478*	*Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Profil Tersedia*	*2*	*292,161,478*	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	241,793,514.00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	3	241,793,514.00	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	20	50,367,964.00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	20	50,367,964.00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasaan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.01	131,013,352	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasaan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.01	131,013,352	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar*	*≤ 50*	*131,013,352*	*Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar*	*≤ 50*	*131,013,352*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	≤ 50	131,013,352.00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	≤ 50	131,013,352.00	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan sesuai standart*	*1*	*0*	*Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan sesuai standart*	*1*	*0*	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	*0*	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	1	*0*	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti	100	110,021,000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti	100	110,021,000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Keluarga yang Dilayani*	*≤ 50*	*98,931,000*	*Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Keluarga yang Dilayani*	*≤ 50*	*98,931,000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang	≤ 50	98,931,000.00	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah	≤ 50	98,931,000.00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Persentase lembaga penyedia layanan yang aktif dalam pencegahan perkawinan usia anak*	*70*	*11,090,000*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	*Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Persentase lembaga penyedia layanan yang aktif dalam pencegahan perkawinan usia anak*	*70*	*11,090,000*	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	11,090,000.00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	11,090,000.00	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	43.6	72,235,944	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	43.6	72,235,944	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	*Kab. Tuban, Tuban, Latsari*	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani (di Dalev Satuan Dokumen)*	*2*	*57,470,944*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kab. Tuban, Tuban, Latsari*	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani (di Dalev Satuan Dokumen)*	*2*	*57,470,944*	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	4	52,328,944.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	4	52,328,944.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	5,142,000.00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	5,142,000.00	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		*Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha*	*75*	*14,765,000*	*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*		*Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha*	*75*	*14,765,000*	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30	14,765,000.00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30	14,765,000.00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	138,927,078	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	138,927,078	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	*Kab. Tuban, Tuban, Latsari*	*Jumlah Layanan yang tersedia*	*2*	*5,417,000*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Tuban, Tuban, Latsari*	*Jumlah Layanan yang tersedia*	*2*	*5,417,000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2	5,417,000.00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2	5,417,000.00	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani*	*≤ 50*	*133,510,078*	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani*	*≤ 50*	*133,510,078*	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	≤50	133,510,078.00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	≤50	133,510,078.00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83	8,277,256,513	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83	8,277,256,513	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun*	*9*	*66,069,000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun*	*9*	*66,069,000*	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	40,577,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	40,577,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2	4,322,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2	4,322,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	21,169,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	21,169,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun*	*9*	*6,452,799,605*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun*	*9*	*6,452,799,605*	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	*6,377,106,355*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	*6,377,106,355*	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	50,917,250	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	50,917,250	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	11,900,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	11,900,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	11,900,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4	11,900,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai*	*2*	*976,000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai*	*2*	*976,000*	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	976,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	976,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia*	*8*	*326,257,239*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia*	*8*	*326,257,239*	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kab. Tuban, Tuban, Latsari*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	25,694,377	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kab. Tuban, Tuban, Latsari*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	25,694,377	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	78,854,466	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	78,854,466	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	118,741,906	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	118,741,906	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	41,305,250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	41,305,250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	8,770,740	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	8,770,740	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	48,365,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	48,365,500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	4,525,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	4,525,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*	*1*	*35,102,047*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*	*1*	*35,102,047*	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1	35,102,047	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1	35,102,047	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Junlah Jasa Penunjang yang Disediakan*	*4*	*864,103,800*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Junlah Jasa Penunjang yang Disediakan*	*4*	*864,103,800*	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	10,770,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	10,770,400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	201,967,250	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	201,967,250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	16,395,600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	16,395,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	634,970,550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	634,970,550	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*4*	*531,948,822*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*4*	*531,948,822*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	278,566,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	278,566,000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	118	7,291,822	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	118	7,291,822	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Peralatan yang Terpelihara	142	34,937,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Peralatan yang Terpelihara	142	34,937,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	4	211,154,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	4	211,154,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Adapun usulan dari masyarakat/lembaga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

Tabel 2.4
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	20 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	300	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 menjadi dokumen rencana tahunan yang memuat rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan tujuan dan indikator tujuan yang kemudian dilakukan penyesuaian sebagaimana transisi dari perencanaan jangka menengah tahun 2022-2026 menuju perencanaan jangka menengah 2025-2029 yang dituangkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan Tahun 2025
dalam Perencanaan Jangka Menengah 2022-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0.8086
2.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	67.47

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan Tahun 2025
dalam Perencanaan Jangka Menengah 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya perlindungan sosial inklusi, kemandirian desa, serta kesetaraan gender	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	0.575
		Persentase Desa Mandiri	%	46.95
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89.31

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan penyesuaian Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
dalam Perencanaan Jangka Menengah 2022-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0.84
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Desa Mandiri	%	50
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	Poin	0.009
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	%	70.25
		Indeks Pengarusutamaan Gender	%	57.5

Tabel 3.4
Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
dalam Perencanaan Jangka Menengah 2022-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Peranan Sosial Masyarakat Rentan	Indeks Peranan Sosial	Poin	0.178
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa	Poin	79.43
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	68.9
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0.193

Untuk pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan, perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban Tahun 2025 mencakup 16 (enam belas) program, 31 (tiga puluh satu) kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
1	6	URUSAN SOSIAL					
1	6	2			Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Fasilitasi PUB dan UGB	Persentase pengajuan rekomendasi yang ditindaklanjuti
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Meningkatnya Penyelenggaraan Sumbangan yang tertib sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya potensi PSKS	Jumlah PSKS yang Terbina
1	6	2	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas PSM untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas TKSK untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas keluarga untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	2	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya kapasitas LK3 untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4			Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS tuntas dan menyeluruh	Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM urusan sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
1	6	4	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya kebutuhan dasar permakanan bagi PMKS sesuai SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
1	6	4	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya kebutuhan dasar sandang bagi PMKS sesuai SPM	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya kebutuhan dasar alat bantu bagi PMKS sesuai SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	terpenuhinya kebutuhan dasar reunifikasi keluarga bagi PMKS sesuai SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	terpenuhinya kebutuhan dasar bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS sesuai SPM	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terselenggaranya bimbingan sosial kepada keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	terpenuhinya kebutuhan dasar dokumen kependudukan bagi PMKS sesuai SPM	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	terpenuhinya kebutuhan dasar untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	terpenuhinya kebutuhan dasar untuk mengakses layanan data dan pengaduan bagi PMKS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	terpenuhinya kebutuhan dasar layanan kedaruratan bagi PMKS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	terpenuhinya kebutuhan dasar penelusuran keluarga bagi PMKS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	terpenuhinya kebutuhan dasar layanan rujukan bagi PMKS	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	Persentase pengaduan PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial yang ditindaklanjuti

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
1	6	4	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar perbekalan kesehatan bagi klien Rumah Perlindungan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	4	2.02	0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kemitraan dan kolaborasi antar lembaga untuk pemenuhan hak PMKS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran	Persentase Pemutakhiran Data untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya basis data kesejahteraan sosial tingkat kabupaten	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial untuk penyaluran bantuan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya bantuan sosial bagi KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terselenggaranya bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar makan harian bagi korban bencana pada masa tanggap bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pangan harian pasca bencana
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya kebutuhan dasar makanan bagi korban bencana sesuai SPM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya relawan sosial untuk penanganan korban bencana sesuai SPM	Jumlah Pilar Sosial yang Terlatih
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya kapasitas relawan sosial untuk penanganan korban bencana sesuai SPM	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya kualitas taman makam pahlawan nasional kabupaten (TMP)	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang Terpelihara
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya sarana prasarana pelestarian kepahlawanan	Besaran Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Ronggolawe	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
2	08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya implementasi PUG	Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya PUG pada perangkat daerah	Jumlah Program PUG pada Perangkat Daerah yang Dievaluasi di Tingkat Kabupaten/Kota
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terselenggaranya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi perempuan pada organisasi kemasyarakatan	Jumlah Kader Perempuan Terlatih
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terselenggaranya Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kader Lembaga Penyedia Layanan yang ditingkatkan kapasitasnya
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasaan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Jenis Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan sesuai standar
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunya kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya peran Puspaga untuk peningkatan kualitas keluarga	Persentase pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya layanan peningkatan kualitas keluarga melalui puspaga	Jumlah Keluarga yang Dilayani Persentase pengaduan pada PUSPAGA yang ditindaklanjuti
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya unit layanan Puspaga	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersusunnya data terpilah tingkat kabupaten	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Terpilah
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen profil gender dan anak	Jumlah Dokumen Profil Tersedia
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen profil terkait gender dan anak untuk pemanfaatan kelembagaan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya wilayah yang memenuhi hak anak	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen profil terkait gender dan anak untuk pemanfaatan kelembagaan	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengembangan lembaga untuk pemenuhan hak anak	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi untuk peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengembangan KIE untuk peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap anak sesuai standar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Meningkatnya kerja sama dalam pencegahan KtA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pendampingan untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memperoleh KIE
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya KIE terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak
2	13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya status desa	Prosentase desa yang statusnya meningkat
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya jumlah desa maju	Jumlah desa maju
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terselenggaranya pengisian IDM desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya kerjasama pedesaan	Peningkatan Kerjasama Desa
2	13	03	2.01		Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terfasilitasinya kerjasama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terselenggaranya fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terbentuknya kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabilitas	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel
2	13	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa dengan administrasi baik	Prosentase Desa dengan administrasi baik (%)
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
2	13	04	2.01	0006	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Meningkatnya peran BUMDes dan Lembaga Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
2	13	04	2.01	0007	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggaranya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
2	13	04	2.01	0008	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Terfasilitasinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya peran serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat,dan masyarakat hukum adat	Prosentase Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan
2	13	05	2.01		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pengembangan produk unggulan	Prosentase desa yang memiliki produk unggulan
2	13	05	2.02	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya aktivitas pemberdayaan ekonomi produktif pada kelembagaan masyarakat desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2	13	05	2.02	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatn desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
2	13	05	2.02	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terfasilitasinya desa untuk mengakses program usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
2	13	05	2.02	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
2	13	05	2.02	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terfasilitasinya penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
2	13	05	2.02	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
1	06				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tersusun
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Junlah Jasa Penunjang yang Disediakan
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang Terpelihara
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TUBAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**46,180,581,457.00**	**53,229,925,889.00**	**40,297,964,585.77**	**-5,882,616,871.23**							**52,036,301,731.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**34,946,026,715.00**	**42,124,353,151.00**	**31,997,962,292.77**	**-2,948,064,422.23**							**39,787,801,731.00**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**34,946,026,715.00**	**42,124,353,151.00**	**31,997,962,292.77**	**-2,948,064,422.23**							**39,787,801,731.00**
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**				**83 Poin**	**83.1 Poin**	**8,363,407,954.00**	**9,299,657,454.00**	**8,276,280,512.57**	**1,121,787,477.00**							**9,485,195,431.00**
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun*				9 Dokumen	9 Dokumen	156,999,555.00	156,999,150.00	66,069,000.00	-90,930,555.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Aparatur Dinsos P3A PMD		145,000,000.00
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	89,999,925.00	89,999,925.00	40,577,500.00	-49,422,425.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			80,000,000.00
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9,499,750.00	9,499,525.00	4,322,000.00	-5,177,750.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			10,000,000.00
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	57,499,880.00	57,499,700.00	21,169,500.00	-36,330,380.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			55,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun*				9 Dokumen	9 Dokumen	6,548,067,798.00	7,484,317,703.00	6,451,823,605.00	-96,244,193.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Aparatur Dinsos P3A PMD		7,632,840,611.00
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6,443,900,548.00	7,385,550,453.00	6,377,106,355.00	-66,794,193.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			7,525,673,361.00
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	70,167,250.00	64,767,250.00	50,917,250.00	-19,250,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			70,167,250.00
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17,000,000.00	17,000,000.00	11,900,000.00	-5,100,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			18,500,000.00
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	17,000,000.00	17,000,000.00	11,900,000.00	-5,100,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			18,500,000.00
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai*				2 jenis	1 jenis	36,501,000.00	36,501,000.00	976,000.00	-35,525,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Aparatur Dinsos P3A PMD		0.00
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				69 Paket	1 Paket	36,501,000.00	36,501,000.00	976,000.00	-35,525,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			0.00
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia*				8 Layanan	8 Layanan	365,058,429.00	365,058,429.00	326,257,239.00	-38,801,190.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Aparatur Dinsos P3A PMD		422,423,420.00
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,057,479.00	15,057,479.00	25,694,377.00	10,636,898.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			15,861,200.00
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	77,412,354.00	77,412,354.00	78,854,466.00	1,442,112.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			77,914,740.00
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	122,816,906.00	122,816,906.00	118,741,906.00	-4,075,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			122,830,240.00
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41,463,250.00	41,463,250.00	41,305,250.00	-158,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			42,405,900.00
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8,770,740.00	8,770,740.00	8,770,740.00	0.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			8,886,240.00
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	95,012,700.00	95,012,700.00	48,365,500.00	-46,647,200.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			150,000,000.00
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	4,525,000.00	4,525,000.00	4,525,000.00	0.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			4,525,100.00
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 Jenis	4 Jenis	0.00	0.00	35,102,046.57	35,102,046.57			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Aparatur Dinsos P3A PMD		25,000,000.00
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0.00	0.00	35,102,046.57	35,102,046.57	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			25,000,000.00
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang yang Disediakan*				4 Jenis	4 Jenis	914,278,550.00	914,278,550.00	864,103,800.00	-50,174,750.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Aparatur Dinsos P3A PMD		800,250,400.00
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11,412,400.00	11,412,400.00	10,770,400.00	-642,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			14,935,000.00
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	261,965,750.00	261,965,750.00	201,967,250.00	-59,998,500.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			262,820,700.00
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12,594,600.00	12,594,600.00	16,395,600.00	3,801,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			12,684,700.00
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	628,305,800.00	628,305,800.00	634,970,550.00	6,664,750.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			509,810,000.00
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				4 Jenis	4 Jenis	342,502,622.00	342,502,622.00	531,948,822.00	189,446,200.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Aparatur Dinsos P3A PMD		459,681,000.00
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 Unit	40 Unit	244,966,000.00	244,966,000.00	278,566,000.00	33,600,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			275,000,000.00
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				118 Unit	118 Unit	2,251,822.00	2,251,822.00	7,291,822.00	5,040,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			6,750,000.00
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				142 Unit	142 Unit	20,330,800.00	20,330,800.00	34,937,000.00	14,606,200.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			27,931,000.00
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	3 Unit	74,954,000.00	74,954,000.00	211,154,000.00	136,200,000.00	Kab. Tuban, Tuban, Mondokan Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			150,000,000.00
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial**				**93 %**	**92.04 %**	**647,608,867.00**	**647,608,824.00**	**283,599,186.00**	**727,391,133.00**							**1,375,000,000.00**
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengajuan rekomendasi yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	13,418,000.00	13,418,000.00	7,850,600.00	-5,567,400.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		70,000,000.00
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET / PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 / 20
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				5 Dokumen	5 Dokumen	13,418,000.00	13,418,000.00	7,850,600.00	-5,567,400.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			70,000,000.00
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PSKS yang terbina*				4 Jenis	4 Jenis	634,190,867.00	634,190,824.00	275,748,586.00	-358,442,281.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		1,305,000,000.00
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				656 Orang	656 Orang	194,999,240.00	194,999,240.00	15,403,240.00	-179,596,000.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			600,000,000.00
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	243,517,670.00	243,517,658.00	159,684,006.00	-83,833,664.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			300,000,000.00
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Keluarga	15 Keluarga	46,081,817.00	46,081,786.00	30,649,476.00	-15,432,341.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			150,000,000.00
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Lembaga	26 Lembaga	113,723,860.00	113,723,860.00	44,950,184.00	-68,773,676.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			180,000,000.00
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																	
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Sertifikat	10 Sertifikat	35,868,280.00	35,868,280.00	25,061,680.00	-10,806,600.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			75,000,000.00
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar**				-	**50 %**	**10,986,009,649.00**	**10,973,896,128.00**	**6,063,748,335.00**	**2,056,596,651.00**							**13,042,606,300.00**
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti*				-	100 Persen	10,805,560,225.00	10,804,859,539.00	5,896,894,496.00	-4,908,665,729.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		12,860,606,300.00
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1195 Orang	550 Orang	9,286,140,757.00	9,286,140,520.00	4,161,826,380.00	-5,124,314,377.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			11,027,606,300.00
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	38,291,200.00	38,291,100.00	38,291,100.00	-100.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			40,000,000.00
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	81,095,500.00	81,095,500.00	81,095,500.00	0.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			85,000,000.00
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	24,478,000.00	24,478,000.00	24,478,000.00	0.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			30,000,000.00
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				850 Orang	600 Orang	1,121,349,888.00	1,120,650,288.00	1,207,973,872.00	86,623,984.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			1,400,000,000.00
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	94,888,310.00	94,888,309.00	93,082,809.00	-1,805,501.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			100,000,000.00
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	27,163,350.00	27,163,220.00	25,243,220.00	-1,920,130.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			30,000,000.00
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				360 Orang	360 Orang	47,703,920.00	47,703,702.00	47,703,702.00	-218.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	23,171,900.00	23,171,720.00	17,621,920.00	-5,549,980.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	19,041,900.00	19,041,730.00	157,739,793.00	138,697,893.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	15,237,100.00	15,237,090.00	15,102,840.00	-134,260.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	26,998,400.00	26,998,360.00	26,735,360.00	-263,040.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			30,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Pengaduan PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang Ditindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	180,449,424.00	169,036,589.00	166,853,839.00	-13,595,585.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat di Kabupaten Tuban		182,000,000.00
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	5,736,724.00	5,736,589.00	5,578,839.00	-157,885.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			7,000,000.00
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	174,712,700.00	163,300,000.00	161,275,000.00	-13,437,700.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			175,000,000.00
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan**				**93.66 %**	**1 %**	**14,617,956,162.00**	**20,854,597,862.00**	**17,106,182,098.20**	**857,043,838.00**							**15,475,000,000.00**
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemutakhiran Data untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial*				100 Persen	100 Persen	14,617,956,162.00	20,854,597,862.00	17,106,182,098.20	2,488,225,936.20			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		15,475,000,000.00
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				498281 Orang	164022 Orang	529,999,884.00	4,162,966,884.00	477,730,144.00	-52,269,740.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			625,000,000.00
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				40209 Keluarga	54674 Keluarga	302,499,834.00	302,499,834.00	236,056,016.00	-66,443,818.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			450,000,000.00
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7837 Keluarga	9125 Keluarga	13,635,456,566.00	16,239,131,266.00	16,246,703,933.20	2,611,247,367.20	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			14,000,000,000.00
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	19 Orang	149,999,878.00	149,999,878.00	145,692,005.00	-4,307,873.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			400,000,000.00
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota ; Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang memperoleh Pelayanan Kebutuhan Dasar**				**100 %**	**100 %**	**241,215,923.00**	**241,215,623.00**	**160,774,901.00**	**73,784,077.00**							**315,000,000.00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pangan harian pasca bencana*				100 Persen	100 Persen	62,492,623.00	62,492,623.00	36,388,451.00	-26,104,172.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat di Kabupaten Tuban		115,000,000.00
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Orang	1500 Orang	62,492,623.00	62,492,623.00	36,388,451.00	-26,104,172.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			115,000,000.00
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Pilar Sosial yang Terlatih*				2 Jenis	1 Jenis	178,723,300.00	178,723,000.00	124,386,450.00	-54,336,850.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		200,000,000.00
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	2 Kampung	31,576,000.00	31,576,000.00	0.00	-31,576,000.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			50,000,000.00
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				68 Orang	50 Orang	147,147,300.00	147,147,000.00	124,386,450.00	-22,760,850.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			150,000,000.00
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**89,828,160.00**	**107,377,260.00**	**107,377,260.00**	**5,171,840.00**							**95,000,000.00**
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Besaran Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara*				100 Persen	100 Persen	89,828,160.00	107,377,260.00	107,377,260.00	17,549,100.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		95,000,000.00
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	349 Makam	89,828,160.00	107,377,260.00	107,377,260.00	17,549,100.00	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			95,000,000.00
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11,234,554,742.00**	**11,105,572,738.00**	**8,300,002,293.00**	**-2,934,552,449.00**							**12,248,500,000.00**
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1,470,754,670.00**	**1,489,629,686.00**	**915,632,152.00**	**-555,122,518.00**							**1,918,500,000.00**
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD**				**52.5 %**	**52.5 %**	**393,818,670.00**	**393,818,670.00**	**171,273,300.00**	**101,181,330.00**							**495,000,000.00**
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Program PUG pada Perangkat Daerah yang Dievaluasi di Tingkat Kabupaten/Kota*				-	62 Program	188,424,170.00	188,424,170.00	97,130,500.00	-91,293,670.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban		230,000,000.00
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	111,986,220.00	111,986,220.00	64,765,520.00	-47,220,700.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			105,000,000.00
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																	
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				169 Orang	169 Orang	76,437,950.00	76,437,950.00	32,364,980.00	-44,072,970.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			125,000,000.00
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader Perempuan yang Terlatih*				45 Orang	45 Orang	86,545,400.00	86,545,400.00	50,473,200.00	-36,072,200.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		145,000,000.00
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	86,545,400.00	86,545,400.00	50,473,200.00	-36,072,200.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			145,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kader Lembaga Penyedia Layanan yang ditingkatkan kapasitasnya*				70 %	50 Orang	118,849,100.00	118,849,100.00	23,669,600.00	-95,179,500.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		120,000,000.00
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				18 Lembaga	18 Lembaga	67,164,350.00	67,164,350.00	0.00	-67,164,350.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			55,000,000.00
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				60 Orang	60 Orang	51,684,750.00	51,684,750.00	23,669,600.00	-28,015,150.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			65,000,000.00
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	-				-	-	**173,673,728.00**	**173,673,424.00**	**131,013,352.00**	**8,826,272.00**							**182,500,000.00**
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	32,698,936.00	32,698,632.00	0.00	-32,698,936.00			-	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		32,500,000.00
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	32,698,936.00	32,698,632.00	0.00	-32,698,936.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			32,500,000.00
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar*				-	50 orang/kurang	140,974,792.00	140,974,792.00	131,013,352.00	-9,961,440.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		150,000,000.00
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				50 Orang	50 Orang	140,974,792.00	140,974,792.00	131,013,352.00	-9,961,440.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			150,000,000.00
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Pengaduan pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Terselesaikan**				**5 %**	**100 %**	**206,496,300.00**	**206,496,300.00**	**110,021,000.00**	**168,503,700.00**							**375,000,000.00**
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pendampingan*				70 %	3 Lembaga	13,305,000.00	13,305,000.00	11,090,000.00	-2,215,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		25,000,000.00
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	13,305,000.00	13,305,000.00	11,090,000.00	-2,215,000.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			25,000,000.00
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan pada Puspaga*				100 % 50 keluarga /kurang	50 layanan	193,191,300.00	193,191,300.00	98,931,000.00	-94,260,300.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		350,000,000.00
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Layanan	50 Layanan	193,191,300.00	193,191,300.00	98,931,000.00	-94,260,300.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			350,000,000.00
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang memanfaatkan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, serta Penyusunan Kebijakan**				**100 %**	**70 %**	**357,056,600.00**	**376,206,920.00**	**292,161,478.00**	**92,943,400.00**							**450,000,000.00**
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Profil yang Tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	357,056,600.00	376,206,920.00	292,161,478.00	-64,895,122.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban		450,000,000.00
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	236,469,490.00	255,619,810.00	241,793,514.00	5,324,024.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			250,000,000.00
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	120,587,110.00	120,587,110.00	50,367,964.00	-70,219,146.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			200,000,000.00
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak**				**43.6 %**	**48.47 %**	**125,790,000.00**	**125,515,000.00**	**72,235,944.00**	**37,210,000.00**							**163,000,000.00**
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha*				75 %	75 %	22,315,000.00	22,315,000.00	14,765,000.00	-7,550,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		35,000,000.00
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				30 Organisasi	30 Organisasi	22,315,000.00	22,315,000.00	14,765,000.00	-7,550,000.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			35,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan pendampingan*				50 orang/kurang 75 %	10 Lembaga	103,475,000.00	103,200,000.00	57,470,944.00	-46,004,056.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		128,000,000.00
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	97,983,000.00	97,708,000.00	52,328,944.00	-45,654,056.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			120,000,000.00
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	5,492,000.00	5,492,000.00	5,142,000.00	-350,000.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			8,000,000.00
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**				**100 %**	**100 %**	**213,919,372.00**	**213,919,372.00**	**138,927,078.00**	**39,080,628.00**							**253,000,000.00**
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak*				10 % 50 orang/kurang	10 % 50 orang/kurang	84,150,864.00	84,150,864.00	0.00	-84,150,864.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		120,000,000.00
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				2 Kegiatan	2 Kegiatan	84,150,864.00	84,150,864.00	0.00	-84,150,864.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			120,000,000.00
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani*				50 orang/kurang	50 orang/kurang	124,001,508.00	124,001,508.00	133,510,078.00	9,508,570.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		125,000,000.00
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				50 Orang	50 Orang	124,001,508.00	124,001,508.00	133,510,078.00	9,508,570.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			125,000,000.00
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah jenis penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus*				75 %	2 jenis	5,767,000.00	5,767,000.00	5,417,000.00	-350,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		8,000,000.00
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				2 Dokumen	2 Dokumen	5,767,000.00	5,767,000.00	5,417,000.00	-350,000.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			8,000,000.00
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**9,763,800,072.00**	**9,615,943,052.00**	**7,384,370,141.00**	**-2,379,429,931.00**							**10,330,000,000.00**
1.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Prosentase desa yang statusnya meningkat**				**20 %**	**20.61 %**	**182,274,600.00**	**182,274,600.00**	**111,054,800.00**	**-32,274,600.00**							**150,000,000.00**
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah desa maju Persentase pemutakhiran data desa pada aplikasi*				187 Desa	100 % 187 Desa	182,274,600.00	182,274,600.00	111,054,800.00	-71,219,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		150,000,000.00
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																	
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				311 Desa	311 Desa	182,274,600.00	182,274,600.00	111,054,800.00	-71,219,800.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			150,000,000.00
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase desa yang melakukan kerjasama**				**10 %**	**5.5 %**	**94,050,000.00**	**94,050,000.00**	**46,896,030.00**	**50,950,000.00**							**145,000,000.00**
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa*				20 Desa	20 Desa	94,050,000.00	94,050,000.00	46,896,030.00	-47,153,970.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		145,000,000.00
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			20,000,000.00
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	94,050,000.00	94,050,000.00	46,896,030.00	-47,153,970.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			125,000,000.00
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik**				**83.60 %**	**73.94 %**	**8,188,408,835.00**	**8,040,551,815.00**	**6,029,077,524.00**	**261,591,165.00**							**8,450,000,000.00**
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Prosentase Desa dengan administrasi baik (%)*				96.46 %	96.46 %	8,188,408,835.00	8,040,551,815.00	6,029,077,524.00	-2,159,331,311.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		8,450,000,000.00
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				311 Dokumen	311 Dokumen	691,984,000.00	691,984,000.00	538,045,000.00	-153,939,000.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			150,000,000.00
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				311 Dokumen	311 Dokumen	144,420,705.00	136,798,825.00	80,368,900.00	-64,051,805.00	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			200,000,000.00
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				311 Dokumen	311 Dokumen	5,278,265,840.00	5,278,265,840.00	5,042,061,024.00	-236,204,816.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			6,300,000,000.00
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				267 Orang	267 Orang	346,649,990.00	206,414,850.00	145,257,800.00	-201,392,190.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			500,000,000.00
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	102,749,950.00	102,749,950.00	62,677,000.00	-40,072,950.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			200,000,000.00
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				267 Laporan	267 Laporan	1,085,478,950.00	1,085,478,950.00	0.00	-1,085,478,950.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			500,000,000.00
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				311 Laporan	311 Laporan	175,000,000.00	175,000,000.00	11,275,000.00	-163,725,000.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			175,000,000.00
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				311 Dokumen	311 Dokumen	99,999,800.00	99,999,800.00	69,861,000.00	-30,138,800.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			125,000,000.00
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				311 Orang	311 Orang	263,859,600.00	263,859,600.00	79,531,800.00	-184,327,800.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			300,000,000.00
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang melakukan pemberdayaan**				**19.29 %**	**20 %**	**1,299,066,637.00**	**1,299,066,637.00**	**1,197,341,787.00**	**285,933,363.00**							**1,585,000,000.00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang berperan aktif dalam pengembangan ekonomi desa Prosentase desa yang memiliki produk unggulan*				20.90 %	20.90 % 22.86 %	1,299,066,637.00	1,299,066,637.00	1,197,341,787.00	-101,724,850.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka	Masyarakat Kabupaten Tuban		1,585,000,000.00
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3497 Dokumen	3057 Dokumen	49,017,100.00	49,017,100.00	14,395,300.00	-34,621,800.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			65,000,000.00
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	311 Lembaga	53,305,810.00	53,305,810.00	89,828,280.00	36,522,470.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			100,000,000.00
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,800.00	9,999,800.00	52,667,400.00	42,667,600.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			80,000,000.00
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	73,666,680.00	73,666,680.00	19,169,688.00	-54,496,992.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			100,000,000.00
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				311 Laporan	311 Laporan	108,639,856.00	108,639,856.00	16,843,728.00	-91,796,128.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			120,000,000.00
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				38 Dokumen	38 Dokumen	1,004,437,391.00	1,004,437,391.00	1,004,437,391.00	0.00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka kemiskinan 1. Pemantapan pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang bertumpu pada Perdagangan, Pertanian dan industri didukung hilirisasi produk pertanian (Value Added) melalui penciptaan Sentra-sentra Agrobisnis, guna menekan angka			1,120,000,000.00
	J U M L A H								**46,180,581,457.00**	**53,229,925,889.00**	**40,297,964,585.77**	**162,354,614,856.37**							**52,036,301,731.00**

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban disusun sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025, yang merupakan langkah awal perencanaan jangka menengah 2025-2029, dimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban mempunyai tanggung jawab pokok mengemban misi yang kedua dan ketiga, yaitu:

Misi 2, “Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”.

Misi 3, “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal”

Dalam rangka menjamin pelaksanaanya serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
2. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan Perubahan Anggaran Tahun 2025, dimana Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan, seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.
4. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun tindak lanjut pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi serta efektivitas dan efesiensi secara transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

sinergitas, harmonisasi serta efektivitas dan efesiensi secara transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan untuk Tahun 2025.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TUBAN

ttd.

SUGENG PURNOMO, S.IP, MM.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026, sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026.
(2) Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2026.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renja Perangkat Daerah meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
b. bab II berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024.
c. bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menjelaskan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, tujuan, dan sasaran serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.
d. bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.
e. bab V berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan perkembangannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di tahun berjalan untuk lebih mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai sesuai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka perlu dilakukan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja yang telah disusun.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta prakiraan maju. Selain itu juga berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Perubahan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan tribulan II di tahun berjalan;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan PAPBD; dan
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban didasarkan pada berbagai landasan aturan dan kebijaksanaan yang mendukung antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2025 dimaksudkan untuk merumuskan kembali Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban untuk Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II Tahun 2025, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tuban secara umum serta tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban secara khusus dapat tercapai.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dalam menentukan prioritas pengelolaan dan pengembangan sumber daya pada tahun 2025;
2. Sebagai tolok ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian kegiatan pembangunan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban; dan
3. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi terkait Pemerintah Kabupaten Tuban, serta antar instansi/lembaga yang menangani pertanian, baik di pusat maupun Kabupaten/Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2025 memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2025, proses penyusunan serta keterkaitannya dengan dokumen Perubahan RKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisi uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD.
Mengemukakan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang uraian dari perubahan rencana kerja dan besaran pagu anggaran pada Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Berisi uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban mengampu 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian target Indikator Kinerja Utama keadaan sampai dengan triwulan II untuk produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) mencapai 100%. Jumlah produksi ungulan pertanian mencapai 54,93%. Jumlah populasi ternak mencapai 34,99%. Jumlah total produksi perikanan mencapai 60,16%. Nilai tambah produk perikanan, Skor PPH Ketersediaan maupun Skor PPH Konsumsi masih belum ada capaian atau masih 0%. Hal ini disebabkan analisa kegiatan tersebut dilaksanakan di triwulan 4 (empat).

Dari hasil kinerja sasaran strategis yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban pada tahun 2024, menunjukkan bahwa tidak semua indikator dapat mencapai target. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis, 4 (empat) indikator dapat mencapai bahkan melebihi target yaitu produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi), jumlah produksi unggulan pertanian, jumlah total produksi perikanan, dan nilai tambah produk perikanan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya program dari pemerintah pusat terkait dengan peningkatan target Luas Tambah Tanam (LTT) yang mampu mendorong peningkatan produktifitas padi. Selain itu peningkatan kapasitas kemampuan petani juga selalu diupayakan melalui pembelajaran sekolah lapang maupun agrobisnis. Bantuan pompanisasi dari Pemerintah Pusat juga mampu meningkatkan kemampuan produktifitas padi. Sementara itu untuk produksi total perikanan terutama untuk perikanan tangkap dapat terus ditingkatkan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk nelayan, pengerukan dermaga untuk bersandarnya kapal nelayan, pemberian BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk fasilitasi kepada nelayan.

Selain itu untuk perikanan budidaya juga diberikan bantuan berupa sarana prasarana perikanan budidaya sehingga dapat meningkatkan hasil produksi khususnya untuk perikanan budidaya.

Adapun nilai tambah produk perikanan juga tercapai atas upaya yang telah dilakukan melalui bantuan fasilitasi perijinan untuk pengolahan produk perikanan dan sosialisasi serta pelatihan pengolahan produk hasil perikanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Di samping peningkatan/keberhasilan yang telah dicapai, terdapat penurunan populasi ternak, hal ini dikarenakan mahalnya harga pakan ternak khususnya jagung untuk pakan unggas yang tidak sebanding dengan harga jual telur menyebabkan banyak peternak ungags mandiri yang terpaksa harus mengurangi jumlah populasi atau bahkan gulung tikar yang menyebabkan berkurangnya jumlah populasi ternak khususnya unggas. Selain itu adanya PMK (penyakit Mulut dan Kaki) yang kembali merebak pada ternak besar khususnya sapi juga turut berperan pada peningkatan populasi sapi yang tidak signifikan.

Sementara itu skor PPH baik ketersediaan maupun konsumsi masih belum dapat mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya penurunan populasi unggas.

Berbagai upaya telah dilakukan atas pencapaian kinerja, diantaranya dalam bidang perikanan berupa pemberian bantuan hibah perahu dan alat tangkap ikan ramah lingkungan, rehabilitasi TPI Karangagung berupa pengerukan dermaga, rehabilitasi kolam di BBI Singgahan dan Rengel, Pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan serta bantuan sarana prasarana untuk budidaya ikan. Bantuan hibah pengolahan pakan ternak untuk peternakan. Selain itu pemberian bantuan hibah berupa sarana dan prasarana pertanian juga terus ditingkatkan diantaranya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan sumur bor, pengembangan area tanam untuk bawang merah dan kacang tanah serta pemberian alsintan. Dalam rangka ketahanan pangan dan penurunan angka stunting diberikan bantuan kebun B2SA untuk 155 keluarga resiko stunting.

Guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan maka perlu diambil kebijakan yang nantinya lebih membawa dampak posif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Diantaranya agar produksi pertanian dapat lebih meningkat maka perlu diadakan penelitian terkait analisa tanah di masing-masing kecamatan sehingga nantinya akan dapat diketahui potensi yang dapat dimaksimalkan dan teknologi yang harus digunakan agar lebih tepat sasaran. Selain itu pengembangan korporasi petani juga harus lebih ditingkatkan lagi ke daerah-daerah lain sesuai dengan spesifik lokasi. Pemberian bantuan atau fasilitasi permodalan petani dengan pihak perbankan yang dapat membantu petani untuk lebih maju, fasilitasi pasar dan stabilisasi harga di tingkat petani dengan bekerja sama dengan pihak lain, baik itu sesama perangkat daerah maupun instansi di luar kedinasan.

Terkait dengan pelaksanaan kebun B2SA agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan maka selanjutnya diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti desa maupun Dinas Sosial P3A.

Begitupula dengan penguatan cadangan pangan dapat bekerjasama dengan pihak Bulog untuk penyerapan hasil panen petani terutama untuk padi dan jagung sehingga bisa meminimalir peran tengkulak.

Guna meningkatkan nilai tambah baik bidang pertanian, peternakan maupun perikanan selanjutnya dapat diperbanyak bentuk kegiatan yang memiliki daya ungkit yang besar untuk masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan peningkatan minat pemuda dalam dunia pertanian, peternakan maupun perikanan.

Selain beberapa Indikator Kinerja Utama, beberapa program dan kegiatan juga masih ada yang belum mempunyai capaian. Hal ini dikarenakan kegiatan baru dapat dilaksanakan di triwulan 3 (tiga) atau 4 (empat). Pelaksanaan kegiatan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) yang dimaksud bukan berarti pada triwulan 1 (satu) dan 2 (dua) tidak ada aktifitas kinerja, namun penghitungan kinerja atas indikator yang telah ditetapkan baru dapat dihitung pada triwulan 3 (tiga) atau 4 (empat).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2				URURSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan masyarakat (%)	0,09	0,09	0,09	0,08	150	0,09	0	0
2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari)	2.790	3.360	2.770	3.533	121,74	3.583	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
				dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									
2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah (kg)	827.84	24.625	795,68	15.300	3.156,79	5000	0	0
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi energi per kapita (kkal/kap/hari)	2100	2.165	1.975	2.165	112,47	2.100-2.200	0	0
2	09	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa tahan pangan (%)	100	92,99	96,95	100	98,07	100	0	0
2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta kerentanan pangan yang tersedia (dokumen)	5	1	1	1	100	1	2	40
2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	jumlah desa rentan	0	23	10	0	35,29	-	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
				Kabupaten/Kota	pangan (desa)								
2	09	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan (%)	100	100	100	100	104,69	100	100	100
2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel bahan makanan yang diuji (item)	250	82	50	102	136,67	80	10	12,5
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/ kota (Ton)	179.655,53	34.441,6	35.931,12	36.039,79	100,21	37.539,79	17.468,9	46,53
					Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat	50	10	10	10	100	10	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
					Pelelangan Ikan (%)								
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase nelayan kecil yang menggunakan sarpras penangkapan ikan sesuai standar (%)	50	17,87	10	14,35	178,7	16	0	0
3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	250	50	50	50	100	50	25	50
3	25	03	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang beroperasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	25	03	2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai,	Jumlah tanda daftar kapal perikanan yang di fasilitasi pengajuannya	350	250	300	300	100	250	125	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
				Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	(Dokumen)								
3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/ kota (Ton)	253.959,10	49.069,26	50.791,82	50.791,82	101	52.791,52	36.969,64	70,03
3	25	04	2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pembudidaya yang difasilitasi penerbitan izin usahanya (Pembudidaya)	50	10	10	10	100	10	0	0
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan/pelati	2.000	400	400	650	100	350	100	28,57

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
					han (Orang)								
3	25	04	2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan (Dokumen)	500	120	100	100	120	50	50	100
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi (ekor)	3.999.590.000	3.768.915.000	3.844.280.000	3.844.304.000	100	3.921.170.000	2.127.211.000	54,25
3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Kawasan yang Dipantau (kali)	60	10	12	12	100	14	4	28,57
3	25	05	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam	Jumlah RTP yang dipantau (RTP)	70	40	50	50	100	50	20	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
				Kabupaten/ Kota									
3	25	06		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	112.276,66	42.288,81	42.473,99	44.782,75	100,86	42.973	19.925	46,37
3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah UMK (skala mikro kecil) yang difasilitasi (UMK)	150	42	30	30	100	30	20	66,67
3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase unit usaha pengolah hasil perikanan yang produknya memenuhi standar mutu (%)	25	-	13,19	14,35	107,04	20	11	55
3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Tingkat ketersediaan bahan baku ikan olahan (Kg/kapita/tahun)	56,99	58,31	55,17	59,75	107,04	55,17	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
				Kabupaten/ Kota									
3	27			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	27	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)	83,8	83,50	83,6	83,85	100,18	84,35	0	0
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	360	60	60	60	100	60	40	66,67
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	65	13	13	13	100	13	11	84,62
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6	6	6	6	100	6	6	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
					(Layanan)								
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	94	16	56	56	100	1	1	100
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	5	5	5	5	100	5	5	100
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	2.609	2.609	2.609	2.609	100	2.609	1253	48,03
3	27	02		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan (%)	100	100	100	86,69	115,09	100	0	0
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang digunakan (unit)	1755	351	624	541	100	100	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sumber daya genetik hewan yang dikelola (jenis)	3	3	3	3	100	3	0	0
3	27	02	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelahiran ternak hasil IB (ekor)	555000	107.609	111.000	92.827	98,72	93.500	23.068	24,67
3	27	02	2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Petshop Yang Memenuhi Standar Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Yang Beredar (%)	25	12,5	15	15	125	46,67	0	0
3	27	03		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana	Persentase prasarana pertanian yang	90.49	73,13	76,23	74,05	108,13	79,74	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
				Pertanian	digunakan (%)								
					Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sebelum Dipotong (%)	10	10	10	22,59	100	10	0	0
					Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sesudah Dipotong (%)	10	10	10	-	100	-	0	0
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan pengembangan tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura (Ha)	182	143	156	156	100	156	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik (meter)	170.105,5	159.260,2	135.106	167.031,2	135,42	135.105,5	0	0
3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	18.53	24,22	21,25	22,58	106,55	19,85	0	0
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pelayanan hewan terpadu (%)	1,9	2,1	1,6	3,08	140	-	0	0
3	27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengawasan peredaran hewan (%)	85	50,65	55	66,21	101,3	70	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah produk yang memenuhi standar persyaratan teknis kesmavet (buah)	85,2	73,33	85	59,63	86,27	10	0	0
3	27	05		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Ha)	600	1.854	600	1.502,55	309	600	300	50
3	27	07		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani kelas utama (%)	10	8	8,6	8,79	102,04	9,79	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TW 2 tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi berdasarkan rekomendasi (orang)	18.2372	180.777	180.772	181.000	100,84	181.252	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban melaksanakan sebanyak 14 (empat belas) program, 40 (empat puluh) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan. Adapun capaian Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*)	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(13)
1	Produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi) (kuintal/ha)	-	-	62,192	62,199	62,205	62,211	62,192	62,199	62,205	62,211	Pada tahun 2024 tercapai 100%, untuk tahun 2024 keadaan sampai dengan Tribulan II angka produktivitas telah mencapai target
2	Jumlah produksi unggulan pertanian(ton)	-	-	1.683.365	1.704.695	1.726.024	1.747.353	1.607.764,38	1.713.645,61	948.129	1.747.353	Tahun 2024 melebihi target dengan capaian 100,53% sedangkan untuk tahun 2025 keadaan sampai dengan Tribulan II sdh tercapai sebesar 54,93%
3	Jumlah populasi ternak (ekor)	-	-	18.316.483	18.682.813	19.056.469	19.437.599	16.706.633	16.463.580	6.667.649	19.437.599	Tahun 2024 hanya tercapai 88,12%, dikarenakan mahalnya harga jagung untuk pakan ternak terutama unggas, sehingga banyak peternak unggas harus gulung

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*)	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(13)
												tikar yang berpengaruh pada penurunan jumlah populasi ungags di Kab. Tuban. Sedangkan untuk tahun 2025 keadaan sampai dengan Tribulan II baru mencapai 34,99%
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Ton)	-	-	82.952,36	86.722,93	90.493,49	94.264,05	83.510,86	86.831,61	54.438,54	94.264,05	Pada tahun 2024 tercapai 100,13%, untuk tahun 2025 keadaan sampai dengan Tribulan II target tercapai sebesar 60,16%
5	Nilai tambah produk perikanan (Rp/Kg)	-	-	22.000	24.000	26.000	28.000	22.150	24.050	0	28.000	Pada tahun 2024 tercapai 100,21%, untuk tahun 2025 keadaan sampai dengan Tribulan II masih belum ada realisasi karena perhitungan dilakukan di akhir tahun.

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*)	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(13)
6	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	-	-	97,6	97,7	97,8	97,9	95,1	95,5	0	97,9	Pada tahun 2024 tercapai 97,75%, karena adanya penurunan populasi ungags yang berpengaruh pada tingkat ketersediaan bahan pangan terutama sumber protein hewani. Untuk tahun 2025 keadaan sampai dengan Tribulan II masih belum ada realisasi karena penhitungan dilakukan di akhir tahun.
7	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	-	-	85,7	94,8	94,9	95	94,7	94,7	0	95	Pada tahun 2024 tercapai 99,89% yang dipengaruhi dari ketidaktercapaian tingkat ketersediaan pangan terutama sumber protein hewani.

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*)	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(13)
												Sedangkan tahun 2025 keadaan sampai dengan Tribulan II masih belum ada realisasi karena penhitungan dilakukan di akhir tahun.

*) Keadaan sampai dengan triwulan II

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Tingginya biaya produksi dan pasca panen di tingkat petani.
2. Ketersediaan infrastruktur pertanian masih belum memenuhi kebutuhan.
3. Ketergantungan petani pada pupuk kimia bersubsidi masih tinggi. sementara alokasi dari pusat tidak mencukupi kebutuhan.
4. Petani masih kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian.
5. Pengelolaan sistem pertanian dari hulu-hilir masih belum produktif.
6. Tingkat konsumsi masyarakat masih belum beragam.
7. Masih terdapat desa rentan pangan.
8. Rendahnya sumber pangan alternatif berbasis pangan lokal.
9. Tingginya harga pakan ikan.
10. Tingginya harga ikan, daging, telur dan susu sebagai penyedia sumber protein hewani.
11. Semaraknya pemakaian bahan kimia berbahaya sebagai pengawet.
12. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha perikanan dan peternakan agar memiliki daya saing kokoh dan berkelanjutan.

Dari isu-isu tersebut akan berdampak pada pencapaian produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan masyarakat, yang pada akhirnya juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani maupun nelayan. Pada puncaknya, permasalahan tersebut akan menjadi penyumbang angka kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Guna mengatasi isu-isu dan permasalahan tersebut, maka diperlukan kinerja sasaran agar lebih baik, melalui:

1. Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan dengan upaya:
   a. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pupuk sesuai rekomendasi teknis;
   b. memfasilitasi ketersediaan benih unggul bermutu/ bersertifikat melalui program pemerintah/kemitraan usaha;
   c. melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok tani/gapoktan;

d. peningkatan SDM dan kelembagaan perikanan dan peternakan; dan
e. fasilitasi sarana dan prasarana perikanan dan peternakan.

2. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui kajian akademik pembangunan tambat labuh di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Glondonggede Kecamatan Tambakboyo dan di TPI Palang yang direncanakan akan mulai dibangun pada tahun 2026.
3. Mengurangi/meminimalkan kehilangan hasil panen *(yield loss)* akibat penanganan pasca panen melalui bantuan sarana alat panen dan pasca panen bagi petani.
4. Penerapan teknologi perikanan dan peternakan.
5. Mengendalikan hama penyakit melalui:
   a. menggalakkan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara terpadu dan terorganisir ditingkat petani;
   b. mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian hama/penyakit tanaman;
   c. pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan; dan
   d. pengawasan kesehatan masyarakat *veteriner*.
6. Mengembangkan kawasan GAP (*Good Agriculture Practicess*).
7. Peningkatan pendapatan petani melalui kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan nilai tambah.
8. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.
9. Pemberdayaan petani melalui studi lapang, pembuatan demplot/percontohan, peningkatan penyuluhan dan bimbingan teknis.
10. Penerapan teknologi budidaya, pasca panen dan sarana prasarana pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui kajian akademik *Integrated Farming* yang direncanakan akan mulai dibangun tahun 2026.
11. Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
12. Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.
13. Stabilisasi pasokan pangan dan harga pangan, serta pengelolaan cadangan pangan.
14. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
15. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

16. Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas perangkat daerah dan *stakeholder* dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga, dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban melakukan review terhadap rancangan awal P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025. Rancangan Awal P-RKPD dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada.

Dari hasil membandingkan antara rancangan awal P-RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah, tidak terdapat perbedaan antara Perubahan RKPD tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.900.487.505	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.900.487.505	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		- Skor PPH Konsumsi Pangan - Skor PPH Ketersediaan Pangan	95,2 poin 92,78 poin	4.708.913.406	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		- Skor PPH Konsumsi Pangan - Skor PPH Ketersediaan Pangan	95,2 poin 92,78 poin	4.708.913.406	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		- ketersediaan energi per kapita - ketersediaan protein per kapita	3583 kkal/ kap/ hari 108,2 gram/ kap/ hari	243.601.544	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		- ketersediaan energi per kapita - ketersediaan protein per kapita	3583 kkal/ kap/ hari 108,2 gram/kap/ hari	243.601.544	
	Peningkatan Ketahanan	Kab. Tuban	Jumlah Keluarga yang	200	56.715.700	Peningkatan Ketahanan	Kab. Tuban	Jumlah Keluarga yang	200 keluarga	56.715.700	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pangan Keluarga		Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga		Pangan Keluarga		Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	3 Laporan	108.368.844	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3 Laporan	108.368.844	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kab. Tuban	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 unit	0	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kab. Tuban	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 unit	0	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Tuban	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokume n	78.517.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Tuban	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	78.517.000	
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota		Jumlah Total Cadangan Pangan Kab/Kota yang dikelola	5 Ton	366.160.420	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota		Jumlah Total Cadangan Pangan Kab/Kota yang dikelola	5 Ton	366.160.420	
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Ds. Kaligede Kec. Senori, Ds. Tlogoagung Kec. Bancar	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko	5 Ton	366.160.420	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Ds. Kaligede Kec. Senori, Ds. Tlogoagung Kec. Bancar	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	366.160.420	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ta								
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		konsumsi energi per kapita konsumsi protein per kapita	2100-2200 kkal/ kap/ hari 55-60 gram/kap/hari	4.099.151.442	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		konsumsi energi per kapita konsumsi protein per kapita	2100-2200 kkal/kap/ hari 55-60 gram/kap/ hari	4.099.151.442	
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Kab. Tuban	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	95.914.442	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Kab. Tuban	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	95.914.442	
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kec. Bangilan, Kec. Jatirogo, Kec. Tuban, Kec. Soko, Semua Kel/Desa Kec. Jenu, Kec. Semanding, Kec. Plumpang, Kec. Singgahan, Kec. Widang, Kec. Tambakboyo, Kec. Parengan, Kec. Merakurak, Kec. Kerek, Kec. Rengel	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	106 laporan	4.003.237.000	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kec. Bangilan, Kec. Jatirogo, Kec. Tuban, Kec. Soko, Semua Kel/Desa Kec. Jenu, Kec. Semanding, Kec. Plumpang, Kec. Singgahan, Kec. Widang, Kec. Tambakboyo, Kec. Parengan, Kec. Merakurak, Kec. Kerek, Kec. Rengel	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	106 laporan	4.003.237.000	
	Program Penanganan		Persentase desa tahan	100%	105.986.242	Program Penanganan		Persentase desa tahan pangan	100%	105.986.242	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerawanan Pangan		pangan (kategori 5 dan 6)			Kerawanan Pangan		(kategori 5 dan 6)			
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan	1 dokumen	88.837.492	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan	1 dokumen	88.837.492	
	Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	88.837.492	Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	88.837.492	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan yang mendukung penanganan kerawanan pangan yang menjadi kewenangan kab/kota	1 Kegiatan	17.148.750	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan yang mendukung penanganan kerawanan pangan yang menjadi kewenangan kab/kota	1 Kegiatan	17.148.750	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota	1 Laporan	17.148.750	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	17.148.750	
	Program		Persentase	100%	85.587.857	Program		Persentase	100%	85.587.857	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Keamanan Pangan		Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan			Pengawasan Keamanan Pangan		Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan			
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sampel pangan segar yang diuji	80 sampel	85.587.857	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sampel pangan segar yang diuji	80 sampel	85.587.857	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	1 dokumen	70.555.357	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	70.555.357	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Tuban	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	15.032.500	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Tuban	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	15.032.500	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.989.947.515	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.989.947.515	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/ kota	37.539, 79 ton	2.313.818.989	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota	37.539,79 ton	2.313.818.989	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sarana prasarana usaha perikanan tangkap ramah lingkungan	4.093 Unit	1.237.466.750	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sarana prasarana usaha perikanan tangkap ramah lingkungan	4.093 Unit	1.237.466.750	
	Penyediaan Data Informasi Sumber Daya Ikan	Kec. Widang, Kec. Jenu, Kec. Rengel, Kec. Bancar, Kec. Plumpang, Kec. Soko, Kec. Tambakboyo, Kec. Palang	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	16.405.000	Penyediaan Data Informasi Sumber Daya Ikan	Kec. Widang, Kec. Jenu, Kec. Rengel, Kec. Bancar, Kec. Plumpang, Kec. Soko, Kec. Tambakboyo, Kec. Palang	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	16.405.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec. Jenu, Kec. Rengel, Kec. Soko, Kec. Plumpang, Kec. Bancar, Kec. Tuban, Kec. Palang, Kec.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	704 unit	1.221.061.750	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec. Jenu, Kec. Rengel, Kec. Soko, Kec. Plumpang, Kec. Bancar, Kec. Tuban, Kec.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	704 unit	1.221.061.750	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Widang, Kec. Tambakboyo					Palang, Kec. Widang, Kec. Tambakboyo				
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	50 RTP	796.508.600	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	50 RTP	796.508.600	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec. Palang, Kec. Rengel, Kec. Bancar, Kec. Tuban, Kec. Widang, Kec. Tambakboyo, Kec. Plumpang, Kec. Jenu, Kec. Soko	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	5419 Orang	746.856.600	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec. Palang, Kec. Rengel, Kec. Bancar, Kec. Tuban, Kec. Widang, Kec. Tambakboyo, Kec. Plumpang, Kec. Jenu, Kec. Soko	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	5419 Orang	746.856.600	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Palang, Kec. Tambakboyo, Kec. Jenu, Kec. Widang, Kec. Tuban, Kec. Bancar, Kec. Soko, Kec. Plumpang	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 kelompok	49.652.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Palang, Kec. Tambakboyo, Kec. Jenu, Kec. Widang, Kec. Tuban, Kec. Bancar, Kec. Soko, Kec. Plumpang	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 kelompok	49.652.000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan	750.000.000 Rupiah	267.259.639	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan	750.000.000 Rupiah	267.259.639	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Kel. Karangsari Kec. Tuban, Ds. Glodonggede Kec. Tambakboyo, Ds. Karangagung Kec. Palang, Ds. Palang Kec. Palang, Ds. Bulumeduro Kec. Bancar	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	267.259.639	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Kel. Karangsari Kec. Tuban, Ds. Glodonggede Kec. Tambakboyo, Ds. Karangagung Kec. Palang, Ds. Palang Kec. Palang, Ds. Bulumeduro Kec. Bancar	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	267.259.639	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tanda daftar kapal perikanan yang di fasilitasi pengajuannya	250 dokumen	12.584.000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tanda daftar kapal perikanan yang di fasilitasi pengajuannya	250 dokumen	12.584.000	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Kec. Palang, Kec. Plumpang, Kec. Tambakboyo, Kec. Soko, Kec. Widang, Kec. Tuban, Kec.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan	1 dokumen	12.584.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Kec. Palang, Kec. Plumpang, Kec. Tambakboyo, Kec. Soko, Kec. Widang, Kec.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan	1 dokumen	12.584.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Rengel, Kec. Bancar, Kec. Jenu	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota			Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Tuban, Kec. Rengel, Kec. Bancar, Kec. Jenu	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/ kota	52.791, 52 ton	2.461.207.475	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota	52.791,52 ton	2.461.207.475	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pembudidaya yang difasilitasi penerbitan izin usahanya	0 pembudi daya	0	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pembudidaya yang difasilitasi penerbitan izin usahanya	0 pembudidaya	0	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang	Kab. Tuban	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang	10 rekomen dasi	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	Kab. Tuban	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang	10 rekomendasi	0	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan / pelatihan	350 orang	69.655.950	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan/ pelatihan	350 orang	69.655.950	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kab. Tuban	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang	35 kelompok	26.748.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	Kab. Tuban	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti	35 kelompok	26.748.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembudi Daya Ikan Kecil		Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan			Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan			
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tuban	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 kelompok	42.907.950	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tuban	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 kelompok	42.907.950	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan	50 dokumen	12.255.250	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan	50 dokumen	12.255.250	
	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	Kec. Plumpang, Kec. Montong, Kec. Jenu, Kec. Rengel, Kec. Soko, Kec. Widang, Kec. Palang, Kec. Tambakboyo	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang	50 rekomendasi	12.255.250	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu)	Kec. Plumpang, Kec. Montong, Kec. Jenu, Kec. Rengel, Kec. Soko, Kec. Widang, Kec. Palang, Kec.	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang	50 rekomendasi	12.255.250	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota		Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota	Tambakboyo	Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	3.921.170.000 ekor	2.379.296.275	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	3.921.170.000 ekor	2.379.296.275	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	14.504.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	14.504.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3 unit	2.243.475.400	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	2.243.475.400	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Jenu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30 unit	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Jenu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 unit	0	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1	Kab. Tuban	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya	30 dokumen	81.546.875	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam	Kab. Tuban	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam	30 dokumen	81.546.875	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Tuban	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 orang	0	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Tuban	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 orang	0	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kec. Palang, Kec. Widang	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	11.960.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kec. Palang, Kec. Widang	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	11.960.000	
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Tuban	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	3 unit	27.810.000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Tuban	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	3 unit	27.810.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	100%	11.586.975	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	100%	11.586.975	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Jumlah RTP yang dipantau	50 RTP	11.586.975	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Jumlah RTP yang dipantau	50 RTP	11.586.975	
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Tuban	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelaku Usaha	11.586.975	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Tuban	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelaku Usaha	11.586.975	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah total produksi hasil perikanan Nilai tambah produk perikanan	47.282 26.000 Ton Rp/Kg	203.334.076	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah total produksi hasil perikanan Nilai tambah produk perikanan	47.282 26.000 Ton Rp/Kg	203.334.076	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki tanda daftar usaha	235 unit	27.614.164	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki tanda daftar usaha	235 unit	27.614.164	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Kab. Tuban	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen	27.614.164	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Kab. Tuban	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen	27.614.164	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah total Produksi Olahan Hasil Perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersertifikasi	45.000 ton 20 unit usaha	14.660.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah total Produksi Olahan Hasil Perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersertifikasi	45.000 ton 20 unit usaha	14.660.000	
	Pembinaan	Ds. Bulumeduro	Jumlah Unit	20 unit	14.660.000	Pembinaan	Ds. Bulumeduro	Jumlah Unit	20 unit	14.660.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kec. Bancar, Ds. Glodonggede Kec. Tambakboyo, Ds. Palang, Ds. Karangagung Kec. Palang, Kel. Karangsari Kec. Tuban	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	usaha		terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kec. Bancar, Ds. Glodonggede Kec. Tambakboyo, Ds. Palang, Ds. Karangagung Kec. Palang, Kel. Karangsari Kec. Tuban	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	usaha		
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		ketersediaan bahan baku ikan olahan	45.001 Ton	161.059.912	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		ketersediaan bahan baku ikan olahan	45.001 Ton	161.059.912	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan	Kec. Rengel, Kec. Merakurak, Kec.	Jumlah Peningkatan	1.261 Ton	145.527.912	Peningkatan Ketersediaan	Kec. Rengel, Kec. Merakurak,	Jumlah Peningkatan	1.261 Ton	145.527.912	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Widang, Kec. Semanding, Kec. Grabagan, Kec. Singgahan, Kec. Plumpang, Kec. Kerek, Kec. Soko, Kec. Parengan, Kec. Bancar, Kec. Montong, Kec. Bangilan, Kec. Palang	Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Widang, Kec. Semanding, Kec. Grabagan, Kec. Singgahan, Kec. Plumpang, Kec. Kerek, Kec. Soko, Kec. Parengan, Kec. Bancar, Kec. Montong, Kec. Bangilan, Kec. Palang	Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tuban	Kel. Kingking, Kel. Sidomulyo, Kel. Karangsari Kec. Tuban, Ds. Glodonggede, Ds. Kaliuntu, Ds. Pabeyan Kec. Tambakboyo, Ds. Bulujowo, Ds. Bulumeduro Kec. Bancar, Ds. Glodog, Ds. Karangagung Kec. Palang, Ds. Sumurcinde, Ds. Simo Kec. Soko, Ds. Beji Kec. Jenu	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 pelaku usaha	15.532.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tuban	Kel. Kingking, Kel. Sidomulyo, Kel. Karangsari Kec. Tuban, Ds. Glodonggede, Ds. Kaliuntu, Ds. Pabeyan Kec. Tambakboyo, Ds. Bulujowo, Ds. Bulumeduro Kec. Bancar, Ds. Glodog, Ds. Karangagung Kec. Palang, Ds. Sumurcinde, Ds. Simo Kec. Soko, Ds. Beji Kec. Jenu	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 pelaku usaha	15.532.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				54.235.366.941	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				54.235.366.941	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,35 poin	34.958.182.145	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,35 poin	34.958.182.145	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 dokumen	286.019.764	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 dokumen	286.019.764	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	207.497.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	207.497.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 laporan	25.122.564	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	25.122.564	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	53.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	53.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	13 dokumen 9 jenis	27.041.961.313	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	13 dokumen 9 jenis	27.041.961.313	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	283 orang /bulan	26.938.628.813	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	283 orang /bulan	26.938.628.813	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	85.480.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	85.480.500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	3.700.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	3.700.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan	4 laporan	5.225.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Dinas Ketahanan Pangan,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	5.225.500	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	5.225.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	5.225.500	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3.700.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3.700.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan	335 orang	976.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan	335 orang	976.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan Kompetensi Pegawai					dan Kompetensi Pegawai			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	976.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	976.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 layanan	593.327.888	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 layanan	593.327.888	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	34.997.946	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	34.997.946	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	124.978.972	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	124.978.972	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	171.208.310	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	171.208.310	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	117.030.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	117.030.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	32.612.660	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	32.612.660	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	112.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	112.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BMD	53 unit	67.867.612	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BMD	53 unit	67.867.612	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53 unit	67.867.612	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53 unit	67.867.612	
	Penyediaan Jasa		Jumlah	5 jasa	3.593.022.380	Penyediaan Jasa		Jumlah	5 jasa	3.593.022.380	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Jasa Penunjang			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Jasa Penunjang			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	735.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	735.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.858.022.380	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.858.022.380	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD	2.609 unit	3.375.007.188	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD	2.609 unit	3.375.007.188	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	88 unit	365.074.954	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	88 unit	365.074.954	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	95.020.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	95.020.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit	2.904.912.234	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 unit	2.904.912.234	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah total produksi produk peternakan (daging)	21.829 Ton	5.351.614.91	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah total produksi produk peternakan (daging)	21.829 Ton	5.351.614.91	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan nilai tambah	2 laporan	3.417.343.009	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan nilai tambah	2 laporan	3.417.343.009	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sektor pertanian					sektor pertanian			
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 laporan	3.336.849.165	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 laporan	3.336.849.165	
	Pendampingan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian	Kab. Tuban	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	80.493.844	Pendampingan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian	Kab. Tuban	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	80.493.844	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah jenis sumber daya genetik hewan yang dikelola	3 jenis	51.649.600	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah jenis sumber daya genetik hewan yang dikelola	3 jenis	51.649.600	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Tuban	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 Laporan	51.649.600	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Tuban	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 Laporan	51.649.600	
	Peningkatan Mutu dan		Jumlah produksi	60 Ton	1.836.446.025	Peningkatan Mutu dan		Jumlah produksi pakan	60 Ton	1.836.446.025	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		pakan ternak			Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		ternak			
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	25 laporan	1.726.871.625	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	25 laporan	1.726.871.625	
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 laporan	109.574.400	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 laporan	109.574.400	
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase Toko Obat hewan Yang Memenuhi Standar Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Yang Beredar	46,67%	9.695.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase Toko Obat hewan Yang Memenuhi Standar Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Yang Beredar	46,67%	9.695.000	
	Pemeriksaan	Kab. Tuban	Jumlah	4	9.695.000	Pemeriksaan	Kab. Tuban	Jumlah	4 laporan	9.695.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	laporan		Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar			
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kelahiran ternak hasil IB	93.500 Ekor	36.481.277	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kelahiran ternak hasil IB	93.500 Ekor	36.481.277	
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 laporan	36.481.277	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 laporan	36.481.277	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah produksi unggulan pertanian Produktivitas padi per hektar/tahun	1.708.134 ton 62,209 kuintal /hektar	6.986.105.628	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah produksi unggulan pertanian Produktivitas padi per hektar/tahun	1.708.134 ton 62,209 kuintal /hektar	6.986.105.628	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Luas Tambah Tanam (LTT) Jagung Luas Tambah	105.562 hektar 130.788 hektar	2.135.855.188	Pengembangan Prasarana Pertanian		Luas Tambah Tanam (LTT) Jagung Luas Tambah	105.562 hektar 130.788 hektar	2.135.855.188	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tanam (LTT) Padi					Tanam (LTT) Padi			
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Ds. Penidon Kec. Plumping, Ds. Purworejo Kec. Jenu, Ds. Punggulrejo Kec. Rengel, Ds. Semanding Kec. Semanding, Ds. Sidoharjo Kec. Senori, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan, Ds. Paseyan Kec. Jatirogo	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang Dikelola	1 dokumen	396.099.158	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Ds. Penidon Kec. Plumping, Ds. Purworejo Kec. Jenu, Ds. Punggulrejo Kec. Rengel, Ds. Semanding Kec. Semanding, Ds. Sidoharjo Kec. Senori, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan, Ds. Paseyan Ke. Jatirogo	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 dokumen	396.099.158	
	Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Ds. Brangkal, Ds. Sukorejo, Ds. Sembung Kec. Parengan, Ds. Besowo Kec. Jatirogo, Ds. Ngandong Kec. Grabagan, Ds. Mentoro Kec. Soko, Ds. Saringembat Kec. Singgahan, Ds. Leran Kec. Senori, Ds. Sidomulyo Kec. Jatirogo, Ds.	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 laporan	1.739.756.030	Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Ds. Brangkal, Ds. Sukorejo, Ds. Sembung Kec. Parengan, Ds. Besowo Kec. Jatirogo, Ds. Ngandong Kec. Grabagan, Ds. Mentoro Kec. Soko, Ds. Saringembat Kec. Singgahan, Ds. Leran Kec. Senori, Ds. Sidomulyo Kec.	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 laporan	1.739.756.030	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sidotentrem Kec. Bangilan, Ds. Sendang Kec. Senori					Jatirogo, Ds. Sidotentrem Kec. Bangilan, Ds. Sendang Kec. Senori				
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah pembangunan prasarana pertanian	11 Unit	4.850.250.440	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah pembangunan prasarana pertanian	11 Unit	4.850.250.440	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Ds. Paseyan Kec. Jatirogo, Ds. Sidomukti Kec. Kenduruan, Ds. Katerban Kec. Senori, Ds. Gesing Kec. Semanding, Ds. Binangun Kec. Singgahan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	1.238.750.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Ds. Paseyan Kec. Jatirogo, Ds. Sidomukti Kec. Kenduruan, Ds. Katerban Kec. Senori, Ds. Gesing Kec. Semanding, Ds. Binangun Kec. Singgahan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	1.238.750.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 unit	3.130.244.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 unit	3.130.244.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Tuban	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Tuban	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 unit	0	
	Pembangunan, Rehabilitasi,	Ds. Sukolilo Kec. Bancar, Kel.	Jumlah rumah potong hewan	2 unit	481.256.440	Pembangunan, Rehabilitasi,	Ds. Sukolilo Kec. Bancar,	Jumlah rumah potong hewan	2 unit	481.256.440	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Mondokan Kec. Tuban	yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kel. Mondokan Kec. Tuban	yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100%	2.641.421.931	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100%	2.641.421.931	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Ternak yang dilayani	6000 ekor	407.138.731	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Ternak yang dilayani	6000 ekor	407.138.731	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah	20 laporan	407.138.731	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah	20 laporan	407.138.731	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kabupaten/kota					Kabupaten/kota			
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase cakupan pengawasan peredaran hewan	70%	22.364.360	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase cakupan pengawasan peredaran hewan	70%	22.364.360	
	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Tuban	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	4 laporan	22.364.360	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Tuban	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	4 laporan	22.364.360	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner	2 Laporan	1.816.540.825	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner	2 Laporan	1.816.540.825	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikaann Kab. Tuban	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 laporan	66.940.825	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikaann Kab. Tuban	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 laporan	66.940.825	
	Penyediaan	Kab. Tuban	Jumlah	2	1.749.600.000	Penyediaan	Kab. Tuban	Jumlah	2 Laporan	1.749.600.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan		Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Pelayanan Jasa Medik Veteriner			
	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner		Jumlah produk yang memenuhi standar persyaratan teknis kesmavet	10 unit	307.448.733	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner		Jumlah produk yang memenuhi standar persyaratan teknis kesmavet	10 unit	307.448.733	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	20 Laporan	290.117.856	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Tuban	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	20 Laporan	290.117.856	
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikaann Kab. Tuban	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	30 Orang	7.019.063	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikaann Kab. Tuban	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	30 Orang	7.019.063	
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Tuban	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang	220 unit usaha	10.311.814	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Tuban	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang	220 unit usaha	10.311.814	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			baik					baik			
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pelaku Usaha/peternak yang menerapkan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	35 orang	87.929.282	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pelaku Usaha/peternak yang menerapkan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	35 orang	87.929.282	
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kab. Tuban	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	35 unit	87.929.282	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kab. Tuban	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	35 unit	87.929.282	
	Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase penanganan bencana pertanian	100%	204.231.314	Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase penanganan bencana pertanian	100%	204.231.314	
	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Luas area penanganan bencana pertanian	600 Ha	204.231.314	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Luas area penanganan bencana pertanian	600 Ha	204.231.314	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Kab. Tuban	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	600 Ha	187.045.064	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Pangan,	Kab. Tuban	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	600 Ha	187.045.064	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perkebunan		Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			Hortikultura, dan Perkebunan		Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Tuban	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 laporan	17.186.250	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Tuban	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 laporan	17.186.250	
	Program Perizinan Usaha Pertanian		Persentase usaha pertanian yang berizin	100%	7.937.500	Program Perizinan Usaha Pertanian		Persentase usaha pertanian yang berizin	100%	7.937.500	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang dikeluarkan	4 Laporan	7.937.500	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang dikeluarkan	4 Laporan	7.937.500	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha	Kab. Tuban	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan	0 dokumen	0	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin	Kab. Tuban	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan	0 dokumen	0	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pertanian		Teknis Izin Usaha Pertanian			Usaha Pertanian		Teknis Izin Usaha Pertanian			
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Tuban	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	4 laporan	7.937.500	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Tuban	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	4 laporan	7.937.500	
	Program Penyuluhan Pertanian		Persentase kelompok tani kelas utama	9.79%	4.085.873.512	Program Penyuluhan Pertanian		Persentase kelompok tani kelas utama	9.79%	4.085.873.512	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi berdasarkan rekomendasi	100%	4.085.873.512	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi berdasarkan rekomendasi	100%	4.085.873.512	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Ds. Jenggolo Kec. Jenu, Ds. Cendoro Kec. Palang, Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan, Kel. Latsari Kec. Tuban, Ds. Sokosari Kec. Soko, Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Ds. Ngadirejo Kec. Widang, Ds. Sumberarum Kec. Kerek, Ds.	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 unit	1.179.288.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Ds. Jenggolo Kec. Jenu, Ds. Cendoro Kec. Palang, Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan, Kel. Latsari Kec. Tuban, Ds. Sokosari Kec. Soko, Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Ds. Ngadirejo Kec. Widang, Ds. Sumberarum Kec. Kerek, Ds.	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 unit	1.179.288.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Banjarworo Kec. Bangilan, Ds. Punggulrejo Kec. Rengel, Ds. Bancar Kec. Bancar, Ds. Gadon Kec. Tambakboyo, Ds. Rayung Kec. Senori, Ds. Semanding Kec. Semanding, Ds. Penidon Kec. Plumping, Ds. Bogorejo Kec. Merakurak, Ds. Paseyan Kec. Jatirogo, Ds. Ngawun Kec. Parengan, Ds. Montongsekar Kec. Montong, Ds. Tawaran Kec. Kenduruan					Banjarworo Kec. Bangilan, Ds. Punggulrejo Kec. Rengel, Ds. Bancar Kec. Bancar, Ds. Gadon Kec. Tambakboyo, Ds. Rayung Kec. Senori, Ds. Semanding Kec. Semanding, Ds. Penidon Kec. Plumping, Ds. Bogorejo Kec. Merakurak, Ds. Paseyan Kec. Jatirogo, Ds. Ngawun Kec. Parengan, Ds. Montongsekar Kec. Montong, Ds. Tawaran Kec. Kenduruan				
	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamata dan desa	Kab. Tuban	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	400 unit	367.310.000	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamata dan desa	Kab. Tuban	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	400 unit	367.310.000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan	Ds. Bancar Kec. Bancar, Ds. Gadon Kec.	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 unit	329.353.512	Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan	Ds. Bancar Kec. Bancar, Ds. Gadon Kec.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan	5 unit	329.353.512	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	prasarana penyuluhan pertanian	Tambakboyo, Ds. Penidon Kec. Plumpang, Ds. Cendoro Kec. Palang, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan	Penyuluhan Pertanian			prasarana penyuluhan pertanian	Tambakboyo, Ds. Penidon Kec. Plumpang, Ds. Cendoro Kec. Palang, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan	Pertanian			
	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah Lapang kelompok Tani tingkat kabupaten/kota	Ds. Sokosari Kec. Soko, Ds. Rayung Kec. Senori, Ds. Punggulrejo Kec. Rengel, Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Ds. Semanding Kec. Semanding, Ds. Jenggolo Kec. Jenu, Ds. Cendoro Kec. Palang, Kel. Latsari Kec. Tuban, Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan, Ds. Bogorejo Kec. Merakurak, Ds. Gadon Kec. Tambakboyo, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan, Ds. Bancar Kec. Bancar, Ds. Ngawun Kec. Parengan, Ds.	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	31 unit	1.755.404.000	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah Lapang kelompok Tani tingkat kabupaten/kota	Ds. Sokosari Kec. Soko, Ds. Rayung Kec. Senori, Ds. Punggulrejo Kec. Rengel, Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Ds. Semanding Kec. Semanding, Ds. Jenggolo Kec. Jenu, Ds. Cendoro Kec. Palang, Kel. Latsari Kec. Tuban, Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan, Ds. Bogorejo Kec. Merakurak, Ds. Gadon Kec. Tambakboyo, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan, Ds. Bancar Kec. Bancar, Ds. Ngawun Kec.	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	31 unit	1.755.404.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Paseyan Kec. Jatirogo, Ds. Sumberarum Kec. Kerek, Ds. Montongsekar Kec. Montong, Ds. Penidon Kec. Plumpang, Ds. Tawaran Kec. Kenduruan, Ds. Ngadirejo Kec. Widang					Parengan, Ds. Paseyan Kec. Jatirogo, Ds. Sumberarum Kec. Kerek, Ds. Montongsekar Kec. Montong, Ds. Penidon Kec. Plumpang, Ds. Tawaran Kec. Kenduruan, Ds. Ngadirejo Kec. Widang				
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Kab. Tuban	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	90 orang	454.518.000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Kab. Tuban	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	90 orang	454.518.000	
	T O T A L				64.125.801.961	T O T A L				64.125.801.961	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Musrenbang yang telah dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Tuban, tidak didapati usulan dari masyarakat yang mengarah pada Program dan Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban. Dengan demikian hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah nihil.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				64.125.801.961				65.735.172.678
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.900.487.505				1.358.000.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.900.487.505				1.098.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi Pangan Skor PPH Ketersediaan Pangan		95,2 poin 92,78 poin	4.708.913.406				423.000.000
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Ketersediaan energi per kapita Ketersediaan protein per kapita		108,2 gram/kap/hari 3583 kkal/kap/hari	243.601.544				

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Tuban	200 keluarga	56.715.700	DAU			150.000.000
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	3 laporan	108.368.844	DAU			150.000.000
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Tuban	10 unit	0	PAD DAU			38.000.000
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Tuban	1 Dokumen	78.517.000	DAU			85.000.000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Total Cadangan Pangan Kab/Kota yang dikelola		5 Ton	366.160.420				225.000.000
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	5 Ton	366.160.420	DAU DAK NF- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian			225.000.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Konsumsi energi per kapita		2100-2200 kkal/kap/hari	4.099.151.442				450.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi protein per kapita		55-60 gram/kap/hari					
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		1 dokumen	95.914.442	DAU			100.000.000
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kec. Bangilan, Kec. Jatirogo, Kec. Tuban, Kec. Soko, Kec. Jenu, Kec. Semanding, Kec. Plumpang, Kec. Singgahan, Kec. Widang, Kec. Tambakboyo, Kec. Parengan, Kec. Merakurak, Kec. Kerek, Kec. Rengel	106 laporan	4.003.237.000	PAD DAU DAK NF Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian			350.000.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa tahan pangan (kategori 5 dan 6)		100%	105.986.242				125.000.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan		1 dokumen	88.837.492				100.000.000
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan	1 dokumen	88.837.492	DAU			100.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Perikanan Kab. Tuban						
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang mendukung penanganan kerawanan pangan yang menjadi kewenangan kab/kota		1 kegiatan	17.148.750				25.000.000
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Tuban	1 laporan	17.148.750	DAU			25.000.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan		100%	85.587.857				135.000.000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diuji		8 Sampel	85.587.857				135.000.000
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Tuban	1 dokumen	70.555.357	DAU		1 dokumen	90.000.000
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan	Jumlah dokumen penguatan	Kab. Tuban	1 dokumen	15.032.500	DAU		1 dokumen	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	mutu pangan segar asal tumbuhan	kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				59.225.314.456				64.377.172.678
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.989.947.515				7.275.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota		37.539,79 ton	2.313.818.989			3.950.000.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana prasarana usaha perikanan tangkap ramah lingkungan		4.093 Unit	1.237.466.750				2.050.000.000
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kec. Widang, Kec. Jenu, Kec. Rengel, Kec. Bancar, Kec. Plumpang, Kec. Soko, Kec. Tambakboyo, Kec. Palang	1 dokumen	16.405.000	DAU			50.000.000
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan	Kec. Jenu, Kec. Rengel, Kec.	704 unit	1.221.061.750	PAD SILPA			2.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tangkap	Tangkap yang Tersedia	Soko, Kec. Plumpang, Kec. Bancar, Kec. Tuban, Kec. Palang, Kec. Widang, Kec. Tambakboyo			DAU			
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha		50 RTP	796.508.600				350.000.000
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kec. Palang, Kec. Rengel, Kec. Bancar, Kec. Tuban, Kec. Widang, Kec. Tambakboyo, Kec. Plumpang, Kec. Jenu, Kec. Soko	5419 Orang	746.856.600	DAU			200.000.000
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kec. Palang, Kec. Tambakboyo, Kec. Jenu, Kec. Widang, Kec. Tuban, Kec. Bancar, Kec. Soko, Kec. Plumpang	10 Kelompok	49.652.000	DAU			100.000.000
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan	-	0 Unit usaha	0	-			50.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kemitraan Usaha	Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha							
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) \	Pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan		750.000.000 Rupiah	267.259.639				1.500.000.000
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kel. Karangsari Kec. Tuban, Ds. Glodonggede Kec. Tambakboyo, Ds. Karangagung Kec. Palang, Ds. Palang Kec. Palang, Ds. Bulumeduro Kec. Bancar	5 layanan	267.259.639	DAU			1.500.000.000
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan yang di fasilitasi pengajuannya		250 dokumen	12.584.000				50.000.000
3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan	Kec. Palang, Kec. Plumpang, Kec.	1 dokumen	12.584.000				50.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tambakboyo, Kec. Soko, Kec. Widang, Kec. Tuban, Kec. Rengel, Kec. Bancar, Kec. Jenu						
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota		52.791,52 ton	2.461.207.475				2.470.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan/pelatihan		350 orang	69.655.950				160.000.000
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kab. Tuban	20 kelompok	42.907.950	DAU			100.000.000
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan		50 dokumen	12.255.250				25.000.000
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi	Kec. Plumpang, Kec. Montong, Kec. Jenu, Kec. Rengel, Kec. Soko, Kec. Widang, Kec.	50 rekomendasi	12.255.250	DAU			25.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Palang, Kec. Tambakboyo						
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi		3.921.170.000 ekor	2.379.296.275				2.260.000.000
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	1 dokumen	14.504.000	DAU			30.000.000
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Tuban	3 unit	2.243.475.400	SILPA			1.100.000.000
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lingkugan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Tuban	30 dokumen	81.546.875	DAU			50.000.000
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Kab. Tuban	3 unit	27.810.000	DAU			25.000.000
3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan	Kec. Palang, Kec. Widang	1 dokumen	11.960.000	DAU			30.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembudidayaan Ikan							
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan		100%	11.586.975				25.000.000
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah RTP yang dipantau		50 RTP	11.586.975				25.000.000
3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Tuban	50 pelaku usaha	11.586.975	DAU			25.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah total produksi hasil perikanan Nilai tambah produk perikanan		47.282 Ton 26.000 Rp/Kg	203.334.076				830.000.000
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki tanda daftar usaha		235 unit	27.614.164				50.000.000
3.25.06.2.01.00	Penyediaan Data dan	Hasil Perikanan	Kab. Tuban	1 dokumen	27.614.164	DAU			50.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	berdasarkan skala usaha dan risiko							
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersertifikasi		20 unit usaha	14.660.000				30.000.000
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Ds. Bulumeduro Kec. Bancar, Ds. Glodonggede Kec. Tambakboyo, Ds. Palang, Ds. Karangagung Kec. Palang, Kel. Karangsari Kec. Tuban	20 unit usaha	14.660.000	DAU			30.000.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	ketersediaan bahan baku ikan olahan		45.001 Ton	161.059.912				750.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Rengel, Kec. Merakurak, Kec. Widang, Kec. Semanding, Kec. Grabagan, Kec. Singgahan, Kec. Plumpang, Kec. Kerek, Kec. Soko, Kec. Parengan, Kec. Bancar, Kec. Montong, Kec. Bangilan, Kec. Palang	1.261 Ton	145.527.912	DAU			400.000.000
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Terfasilitasi	Kel. Kingking, Kel. Sidomulyo, Kel. Karangsari Kec. Tuban, Ds. Glodonggede, Ds. Kaliuntu, Ds. Pabeyan Kec. Tambakboyo, Ds. Bulujowo, Ds. Bulumeduro Kec. Bancar, Ds. Glodog, Ds. Karangagung Kec. Palang, Ds. Sumurcinde,	100 Pelaku Usaha	15.532.000	DAU			350.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Ds. Simo Kec. Soko, Ds. Beji Kec. Jenu						
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				54.235.366.941				57.102.172.678
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah		84,35 Poin	34.958.182.145				29.893.422.678
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun		9 Dokumen	286.019.764				185.000.000
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	6 dokumen	207.497.200	SILPA			115.000.000
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	12 laporan	25.122.564	SILPA			25.000.000
2.09.01.2.01.00	Evaluasi Kinerja	Kinerja Perangkat	Dinas	7 laporan	53.400.000	SILPA			45.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07	Perangkat Daerah	Daerah	Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban						
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun		9 Jenis	27.041.961.313				24.645.422.678
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	283 orang/bulan	26.938.628.813	PAD DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja			24.461.422.678
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	2 dokumen	85.480.500	SILPA			150.000.000
2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab.	4 dokumen	3.700.500	SILPA			7.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Tuban						
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	4 laporan	5.225.500	SILPA			10.000.000
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	2 laporan	5.225.500	SILPA			10.000.000
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	1 dokumen	3.700.500	SILPA			7.000.000
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai		335 orang	976.000				200.000.000
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan	1 paket	976.000	SILPA			200.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Perikanan Kab. Tuban						
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum		6 Layanan	593.327.888				838.000.000
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	1 paket	34.997.946	SILPA			35.000.000
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	1 paket	124.978.972	SILPA			125,000,000
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	3 paket	171.208.310	SILPA			250.000.000
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	1 paket	117.030.000	SILPA			135.000.000
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dinas Ketahanan Pangan,	12 Dokumen	36.612.660	SILPA			43.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Undangan yang Disediakan	Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban						
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	12 Laporan	112.500.000	SILPA			250.000.000
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		53 unit	67.867.612				250.000.000
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		53 unit	67.867.612	SILPA			250.000.000
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang		5 jasa	3.593.022.380				810.000.000
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	735.000.000	SILPA			625.000.000
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	2.858.022.380	SILPA			185.000.000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD		2609 unit	3.375.007.188				2.965.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	88 unit	365.074.954	SILPA			350.000.000
2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	100 unit	10.000.000	SILPA			20.000.000
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	100 unit	95.020.000	SILPA			95.000.000
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	14 Unit	2.904.912.234	SILPA			2.500.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah total produksi produk peternakan (daging)		21.829 Ton	5.351.614.911				5.980.000.000
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan nilai tambah sektor		2 Laporan	3.417.343.009				5.200.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pertanian							
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Tuban	4 Laporan	3.336.849.165	PAD DAU DBHCHT			4.200.000.000
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Tuban	12 laporan	80.493.844	DAU			1.000.000.000
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sumber daya genetik hewan yang dikelola		3 jenis	51.649.600				80.000.000
3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		1 laporan	51.649.600				80.000.000
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah produksi pakan ternak		60 Ton	1.836.446.025				600.000.000
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan /Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih /Bibit Ternak, Bahan Pakan /Pakan Tanaman Skala Kecil	Kab. Tuban	25 Laporan	1.726.871.625	DAU			300.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Kab. Tuban	4 laporan	109.574.400	DAU			300.000.000
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Toko Obat hewan Yang Memenuhi Standar Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Yang Beredar		46,67%	9.695.000				25.000.000
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kab. Tuban	4 laporan	9.695.000,00	DAU			25.000.000
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih /Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kelahiran ternak hasil IB		93.500 ekor	36.481.277				75.000.000
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih /Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Tuban	4 Laporan	36.481.277	DAU			75.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Jumlah produksi unggulan pertanian Produktivitas padi per hektar/tahun		1.708.134 Ton 62,209 kuintal /hektar	6.986.105.628				16.438.750.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PERTANIAN								
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Tambah Tanam (LTT) Jagung Luas Tambah Tanam (LTT) Padi		105.562 hektar 130.788 hektar	2.135.855.188				3.100.000.000
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Ds. Brangkal, Ds. Sukorejo, Ds. Sembung Kec. Parengan, Ds. Besowo Kec. Jatirogo, Ds. Ngandong Kec. Grabagan, Ds. Mentoro Kec. Soko, Ds. Saringembat Kec. Singgahan, Ds. Leran Kec. Senori, Ds. Sidomulyo Kec. Jatirogo, Ds. Sidotentrem Kec. Bangilan, Ds. Sendang Kec. Senori	4 laporan	1.739.756.030	DAU DBHCHT			2.800.000.000
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian	Ds. Penidon Kec. Plumping, Ds. Purworejo Kec. Jenu, Ds. Punggulrejo Kec. Rengel, Ds. Semanding Kec.	1 Dokumen	396.099.158	DAU			300.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	/LCP2B di Kabupaten /Kota	Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola	Semanding, Ds. Sidoharjo Kec. Senori, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan, Ds. Paseyan Ke. Jatirogo						
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian		11 unit	4.850.250.440				13.338.750.000
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Ds. Paseyan Kec. Jatirogo, Ds. Sidomukti Kec. Kenduruan, Ds. Katerban Kec. Senori, Ds. Gesing Kec. Semanding, Ds. Binangun Kec. Singgahan	5 unit	1.238.750.000	DBHCHT			6.238.750.000
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Tuban	4 unit	3.130.244.000	SILPA DAU			1.500.000.000
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Ds. Sukolilo Kec. Bancar, Kel. Mondokan Kec. Tuban	2 unit	481.256.440	DAU			600.000.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan		100%	2.641.421.931				2.840.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menular Strategis (PHMS)							
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak yang dilayani		6.000 Ekor	407.138.731				500.000.000
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus Penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Tuban	20 laporan	407.138.731	DAU			500.000.000
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengawasan peredaran hewan		70%	22.364.360				30.000.000
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya		4 Laporan	22.364.360	DAU			30.000.000
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan		2 laporan	1.816.540.825				2.025.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dalam Daerah Kabupaten/Kota	medik veteriner							
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	2 laporan	66.940.825	DAU			100.000.000
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayana	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		2 laporan	1.749.600.000	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian			1.925.000.000
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah produk yang memenuhi standar persyaratan teknis kesmavet		10 unit	307.448.733				110.000.000
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Tuban	20 laporan	290.117.856	SILPA DAU			60.000.000
3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikaann Kab. Tuban	30 orang	7.019.063	DAU			25.000.000
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap	Kab. Tuban	220 unit usaha	10.311.814	DAU			25.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penerapan cara yang baik							
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pelaku Usaha/peternak yang menerapkan persyaratan teknis kesejahteraan hewan		35 Orang	87.929.282				175.000.000
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap Penerapan kesejahteraan hewan	Kab. Tuban	35 unit	87.929.282	DAU			175.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian		100%	204.231.314				300.000.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area penanganan bencana pertanian		600 Ha	204.231.314				300.000.000
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Tuban	600 Ha	187.045.064	DAU			250.000.000
3.27.05.2.01.00	Penanggulangan Pasca	Jumlah	Kab. Tuban	2 laporan	17.186.250	DAU			50.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06	Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan							
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang berizin		100%	7.937.500				50.000.000
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang dikeluarkan		4 laporan	7.937.500				50.000.000
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab. Tuban	4 laporan	7.937.500	DAU			50.000.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani kelas utama		9,79%	4.085.873.512				1.600.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi berdasarkan rekomendasi		100%	4.085.873.512				1.600.000.000
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Ds. Jenggolo Kec. Jenu, Ds. Cendoro Kec. Palang, Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan, Kel. Latsari Kec. Tuban, Ds.	20 unit	1.179.288.000	PAD DAK NF-Dana Keahanan Pangan dan Pertanian			500.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Sokosari Kec. Soko, Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Ds. Ngadirejo Kec. Widang, Ds. Sumberarum Kec. Kerek, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan, Ds. Punggulrejo Kec. Rengel, Ds. Bancar Kec. Bancar, Ds. Gadon Kec. Tambakboyo, Ds. Rayung Kec. Senori, Ds. Semanding Kec. Semanding, Ds. Penidon Kec. Plumping, Ds. Bogorejo Kec. Merakurak, Ds. Paseyan Kec. Jatirogo, Ds. Ngawun Kec. Parengan, Ds. Montongsekar Kec. Montong, Ds. Tawaran Kec. Kenduruan						

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Tuban	400 unit	367.310.000	PAD DBHCHT DAK NF-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian			300.000.000
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Ds. Bancar Kec. Bancar, Ds. Gadon Kec. Tambakboyo, Ds. Penidon Kec. Plumpang, Ds. Cendoro Kec. Palang, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan	5 unit	329.353.512	SILPA			500.000.000
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Ds. Sokosari Kec. Soko, Ds. Rayung Kec. Senori, Ds. Punggulrejo Kec. Rengel, Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Ds. Semanding Kec. Semanding, Ds. Jenggolo Kec. Jenu, Ds. Cendoro Kec. Palang, Kel. Latsari Kec. Tuban, Ds. Mulyoagung Kec.	31 Unit	1.755.404.000	PAD DAK NF-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian			300.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Singgahan, Ds. Bogorejo Kec. Merakurak, Ds. Gadon Kec. Tambakboyo, Ds. Banjarworo Kec. Bangilan, Ds. Bancar Kec. Bancar, Ds. Ngawun Kec. Parengan, Ds. Paseyan Kec. Jatirogo, Ds. Sumberarum Kec. Kerek, Ds. Montongsekar Kec. Montong, Ds. Penidon Kec. Plumpang, Ds. Tawaran Kec. Kenduruan, Ds. Ngadirejo Kec. Widang						
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Tuban	90 orang	454.518.000	DAK NF-Bantuan Operasioanl Penyuluh			0

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dan diupayakan lebih realistis dengan memperhatikan potensi dan peluang yang ada, permasalahan dan tantangan sesuai penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026.

Kaidah pelaksanaan yang perlu digarisbawahi sebagai acuan dalam pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini adalah:

1. Perubahan Renja ini menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) DKP2P Kabupaten Tuban Tahun 2025;
2. Perubahan Renja DKP2P Kabupaten Tuban tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen seluruh jajaran aparatur DKP2P dan stakeholders yang terlibat dalam membangun ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, serta mendorong tumbuhnya nilai tambah sektor unggulan daerah;
3. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar evaluasi dan pelaporan kinerja tahun 2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipantau, dinilai, dan diperbaiki secara sistematis guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
4. Pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan memerlukan sinergi dan integrasi lintas sektor, kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan, serta peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat untuk menciptakan daya ungkit yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan serta produktivitas pertanian-perikanan memerlukan penguatan tata kelola yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Prinsip ini harus menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar program tepat sasaran serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Tuban yang inklusif dan berkelanjutan.

Perubahan Renja ini diharapkan dapat merekam dan menyalurkan semua aspirasi baik dari pemerintah, masyarakat petani maupun swasta/pengusaha sebagai mitra pemerintah maupun petani.

Akan tetapi dokumen perencanaan yang telah disusun tidak akan dirasakan manfaatnya apabila tidak diimplementasikan dengan baik pula.

Oleh karenanya dibutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik segenap personil Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban maupun semua *stakeholders*.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN

ttd.

EKO JULIANTO

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

Dipindai dengan CamScanner

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dipindai dengan CamScanner

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dipindai dengan CamScanner

18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 28

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen awal yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dengan mengacu pada rancangan awal P-RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hasil evaluasi pelaksanan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan. Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pembangunan dibidang administrasi kependudukan bertujuan memberikan pelayanan administrsi kependudukan kepada masyarakat dalam hal ini pelayanan terhadap dokumen kependudukan. Saat ini hampir semua keperluan masyarakat membutuhkan dokumen kependudukan (KTP el, Kartu Keluarga, KIA, dan Akta Pencatatan Sipil). Selain itu, pembangunan dibidang administrasi kependudukan juga untuk membangun database kependudukan yang mana dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 49 Tahun 2022 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
    b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
    c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
e. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
f. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
g. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam tupoksi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 (empat) bidang, 1 (satu) sekretariat, yaitu:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
5. Sekretariat.

Masing–masing bidang membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, sedangkan Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional.

2. Landasan Hukum.

Dalam penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah ini, landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah:

a. Sebagai Pedoman Pelaksanaan.
   Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
b. Penetapan Prioritas.
   Perubahan Rencana Kerja (Renja) membantu menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
c. Pengalokasian Anggaran.
   Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), memastikan anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas
d. Sinergi dan Keterkaitan.
   Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjamin sinergi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

e. Akuntabilitas.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang jelas dan terstruktur mendorong akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

f. Evaluasi Kinerja.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah:

a. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) ke dalam Rencana Operasional.

Perubahan Renja menguraikan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Renstra.

b. Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan.

Perubahan Renja memberikan panduan bagi aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, memastikan bahwa semua kegiatan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas.

Dengan adanya Perubahan Renja, pelaksanaan program dan kegiatan dapat terencana dengan baik, sehingga dapat meminimalkan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

d. Memastikan Akuntabilitas.

Perubahan Renja membantu memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena adanya rencana yang jelas dan terukur.

e. Memudahkan Monitoring dan Evaluasi.

Perubahan Renja memuat target-target kinerja yang terukur, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

f. Menjadi Dasar Penyusunan Anggaran.

Perubahan Renja menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, yang berisi rincian biaya untuk setiap program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV PENUTUP.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025, perlu kiranya berpedoman pada penyelenggaraan bidang kependudukan dan catatan sipil pada Triwulan II Tahun 2025 yang secara umum dapat digambarkan dalam beberapa program dan kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Program ini meliputi 7 kegiatan yaitu:
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah diantaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (SAKIP, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas), dengan anggaran sebesar Rp. 162.500.000 dan terealisasi Rp. 8.980.500,-.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN meliputi Gaji dan Tunjangan ASN untuk 72 Orang (PNS 33 Orang dan PPPK 39 Orang), honorarium pengelola keuangan perangkat daerah serta untuk penyusunan laporan keuangan (9 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 9.189.659.241,- dan terealisasi Rp. 2.744.383.968,-.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, untuk perjalanan dinas keluar daerah dan belanja kontribusi peserta pelatihan dengan anggaran sebesar Rp. 62.662.400,- dan terealisasi Rp. 0,-.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, untuk belanja peralatan listrik (belanja peralatan lisrik, lampu, baterai, *fitting* lampu dan lain-lain), Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja ATK Kantor, *Ribbon* KTP, Film KTP, *Cleaning Kit* KTP, *Ribbon* KIA, *Cleaning Kit* KIA), Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Mamin harian pegawai, air mineral, mamin rapat, mamin tamu), Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (cetak amplop, map, buku SPPD, banner, fotocopy dan penjilidan, cetak formulir pelayanan adminduk, blangko KIA). Selain itu juga untuk Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (belanja koran dan majalah), Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD (perjalanan dinas luar daerah) dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.834.691.621,- dan terealisasi Rp. 1.061.261.126,-.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah, untuk pengadaan Meja Kantor 11 Unit, lemari 9 unit, Meja rapat 13 Kursi rapat 50 unit, PC 3 unit, Printer 5 unit, perangkat soundsistem 1 unit, soundsistem 1 unit, Pengadaan Gedung sederhana dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.587.021.945,- dan terealisasi Rp. 212.981.250,-.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, untuk jasa surat menyurat (BBM kurir surat, belanja paket/pengiriman), Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (tagihan telpon, tagihan air, tagihan listrik), Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pemeliharaan sarana kantor/printer/scanner, Pemeliharaan sarana kantor), Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, honor instruktur senam, lembur, honor Non PNS Tenaga Pelayanan Umum Kantor 6 orang, belanja Jaminan Kesehatan Non PNS, Belanja Jaminan Kematian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Non PNS), dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 480.775.810,- dan terealisasi Rp. 177.026,661- .

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BBM dan Pelumas, suku cadang kendaraan dinas roda 4, pajak dan STNK kendaraan dinas roda 4, ongkos balance, cuci dan pengecatan), untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2, suku cadang kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, pajak dan STNK kendaraan dinas roda 2, ongkos balance, servis, pengecatan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4), untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset, pemeliharaan CCTV, Pemeliharaan AC), untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (belanja pemeliharaan gedung kantor), dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 455.863.263,- dan terealisasi Rp. 69.514.381,-.

2. Program Pendaftaran Penduduk.

Pada Tahun Anggaran 2025 program ini meliputi 3 kegiatan yaitu:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk pelayanan dokumen pendaftaran penduduk, meliputi: pembayaran honorarium Non PNS (48 orang), makanan dan minuman rapat, banner dan fotocopy, perjalanan dinas dalam daerah untuk perekaman serta lembur pegawai untuk pelayanan, belanja suku cadang printer KTP dan KIA serta perjalanan dinas untuk pengambilan blangko KTP-el.

Penuntasan target/capaian dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

- Perekaman KTP sebesar 99,70%.
- KIA sebesar 60%

Serta Pendukung Pelayanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik atau MPP, dan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program “Cedak Mas” (Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat

Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Selain itu juga dilaksanakan program "KTP *In School*", dan program "Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) " serta program "Jemput Bola Sayang Anak", Kegiatan Perekaman dan Pelayanan Adminduk di Mobil Pelayanan Keliling.

Dukcapil memiliki 2 unit Mobile Enrollment Kit (Alat Perekaman portable yang mudah dibawa kemana saja) untuk mendukung program "Cedak Mas" (Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Dan mendukung program "KTP *In School*", dan program "Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, meliputi: alat kebersihan dan bahan pembersih gudang arsip, map odner untuk penyimpanan arsip, kertas HVS, fotovopy dan lembur PNS dan Non PNS serta untuk pengadaan alat penghancur kertas.

Dengan adanya map ordner untuk berkas KK dan KIA limpahan dari kecamatan yang di simpan di Dinas Dukcapi (1 dus isi 15 keping) sedangkan kita butuh 3 dus untuk 20 kecamatan (jadi map odner sangat prioritas dan masih kurang), ATK, bahan pembersih, lembur untuk pengarsipan dokumen adminduk.

dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.468.196.606,- dan realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp. 561.495.000,-.

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

   Dipergunakan untuk lebih memperkenalkan beragam pelayanan kependudukan kepada masyarakat melalui pameran kependudukan pada saat Hari Jadi Tuban. anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 98.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,-.

c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

   Untuk Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan dibidang administrasi kependudukan dilaksanakannya pendampingan dari konsultan serta audit ekstenal dari badan sertifikasi ISO 27001:2025 yang akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025 dengan belanja meliputi : honor PPTK, lembur, jasa pendampingan ISO, jasa re sertifikasi ISO, perjalanan dinas luar daerah pendampingan dan re-sertifikasi ISO, perjalanan dinas dalam kota untuk monitoring, penyelenggaraan ISO/Sistem/SIAK/infrastruktur/ sarana prasarana/SOP telah bersertifikat ISO 27001 Tahun 2025 tetapi masih terdapat catatan atas hasil rekomendasi ISO 27001 Tahun 2023 yang harus di tindaklanjuti yaitu pintu elektronik/sistem kartu untuk ruang server, CCTV untuk ruang server, alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan, APAR, Lemari Arsip Ruang Server, UPS, Penangkal Petir, Rehabilitasi ruang Server, Rumah Genset ukuran 4 x 6. Dari rekomendasi tersebut yang dilaksanakan di tahun 2025 yaitu pengadaan UPS 4 unit dan 1 unit Penangkal Petir. Dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 140.548.314 dan realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp 0,-.

3. Program Pencatatan Sipil.

   Pada Tahun Anggaran 2025 program ini meliputi 1 kegiatan yaitu :

   Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.

   Kegiatan ini ditujukan untuk Fumigasi Arsip di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, kegiatan ini sangat penting karena untuk arsip di pencatatan sipil karena arsip di pencatatan sipil adalah satu arsip untuk selamanya (arsip tidak boleh di musnahkan dan arsip ini adalah arsip abadi) jadi sangat penting untuk pemeliharaan arsip di pendatatan sipil, jadi untuk merawat arsip agar dijauhkan oleh hama yang terlihat (rayap) dan yang tidak terlihat (jamur, bakteri, amoeba dan lain2) selain itu kegiatan ini juga untuk berlanja alat tulis kantor untuk penyimpanan arsip, alat pembersih dan alat kebersihan, honorarium PPTK, Jasa Fumigasi, serta belanja lembur .

   Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

   Kegiatan ini ditujukan untuk belanja fotocopy, perjalanan dinas dalam daerah, lembur, makanan dan minuman koordinasi, banner

(Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara kolaborasi dengan bidang Pendaftaran Penduduk) serta pelaksanaannya dilakukan dengan cara kerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan hak anak, untuk pelayanan dokumen adminduk di bidang pelayanan pencatatan sipil dan utuk akte-akte capil yang ada di 20 kecamatan maka dilakukan keliling pengambilan berkas/arsip pengajuan pelayanan pencatatan sipil di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban secara terjadwal, dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 205.757.966,-. Untuk kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 22.611.500,-.

4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
   Program ini pada Tahun 2025 dilaksanakan meliputi 3 kegiatan:
   a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
      Untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan, terdapat belanja perjalanan dinas, mamin rapat, honor PPTK. Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari kementerian dalam negeri terkait Pemanfaatan Data Kependudukan, karena sekarang semua data Kependudukan menggunakan Data SIAK terpusat, jadi apabila ada lembaga-lembaga, atau OPD yang ingin memanfaatkan data Kependudukan harus kerja sama dulu dengan Dinas Dukcapil dan sampai saat ini Agustus tahun 2025 sudah ada 6 OPD/Lembaga yang sudah kerja sama terkait pemanfaat data kependudukan diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tuban dan 5 lainnya sudah verifikasi persetujuan perpanjangan jangka waktu oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil yaitu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teroadu Satu Pintu Kabupaten Tuban, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Koesma Kabupaten Tuban, dari kegiatan

diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 94.983.150,- dan terealisasi Rp. 6.555.000,-.

b. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
   Untuk Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, kegiatan ini ditujukan untuk pemeliharaan jaringan SIAK untuk pelayanan di Dinas Dukcapil dan 20 kecamatan, belanja VPN, lembur, pembayaran listrik tower banyu urip, pulsa paket data 23 kartu x 12 bulan x Rp.150.000,-, honorarium PPTK, pengandaan, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah, peralatan jaringan (ubiquiti rocket M5 radio wireless) 10 unit, dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 501.898.880,- dan terealisasi Rp. 124.578.984

c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
   Untuk Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas pelayanan/operator SIAK Kabupaten/operator SIAK kecamatan dengan belanja mamin rapat, honorarium pptk, sewa ruangan 3 hari x Rp. 5.000.000,-, belanja lembur, perjalanan dinas dalam daerah, kegiatan bimbingan teknis Full Board (6 kegiatan x Rp. 13.835.010,-), dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 159.999.900,- dan terealisasi Rp. 13.445.000,-

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
   Program ini pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 1 kegiatan:
   Untuk Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun buku data agregat kependudukan per semester (60 buku), dan dianggarkan cetak buku agregat kependudukan, fotocopy, honorarium pptk, lembur, mamin rapat, perjalanan dinas dalam daerah.
   Untuk Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain, kegiatan ini

dilaksanakan untuk menyusun buku profil perkembangan pendudukan (30 buku), dan dianggarkan belanja cetak buku profil kependudukan, fotocopy, mamin rapat, honorarium PPTK, lembur, perjalanan dinas dalam daerah.

dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 76.231.580,- terealisasi Rp. 14.769.400,-.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025
Triwulan II
Table 2.1

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
A	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**		Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	91.2 (Poin)	16.518.830.676	0 (Poin)	2.733.454.444	0 (Poin)	2.294.835.100	0 (Poin)	5.028.289.544	0 (Poin)	5.031.079.544	0%	0%	
1		**Program Pendaftaran Penduduk**	Perekaman KTP Elektronik	99.8 (%)	12.622.987.041	99.06 (%)	9.894.560.643	99.7 (%)	1.706.784.920	99.64 (%)	286.246.000	99.66 (%)	279.049.500	99.66 (%)	565.295.500	99.66 (%)	10.459.856.143	99.86 %	82.86 %	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65 (%)	0	48.26 (%)	0	60 (%)	0	49.52 (%)	0	51.03 (%)	0	51.03 (%)	0	51.03 (%)	0	78.51 %	0%	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	1350000 (Dokumen)	10.991.379.579	677490 (Dokumen)	6.088.601.486	270000 (Dokumen)	1.468.196.606	47415 (Dokumen)	286.246.000	48142 (Dokumen)	275.049.000	95557 (Dokumen)	561.295.000	95557 (Dokumen)	6.649.896.486	7.08 %	60.5 %	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	270000 (Dokumen)	1.396.051.831	47415 (Dokumen)	286.246.000	48142 (Dokumen)	267.966.000	95557 (Dokumen)	554.212.000	95557 (Dokumen)	554.212.000	0%	0%	
		2. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	150000 (Dokumen)	72.144.775	6132 (Dokumen)	0	7302 (Dokumen)	7.083.000	13434 (Dokumen)	7.083.000	13434 (Dokumen)	7.083.000	0%	0%	Keplaa Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**22.17**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																		14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		10		11		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk sesuai standar	20 (Kecamatan)	1.193.607.463	20 (Kecamatan)	3.548.110.703	20 (Kecamatan)	98.040.000	0 (Kecamatan)	0	0 (Kecamatan)	4.000.000	0 (Kecamatan)	4.000.000	0 (Kecamatan)	3.552.110.703	0%	297.59 %	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 (Dokumen)	183.500.000	1 (Dokumen)	143.531.000	1 (Dokumen)	98.040.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	4.000.000	0 (Dokumen)	4.000.000	0 (Dokumen)	147.531.000	0%	80.4 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										
		3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	1 (Kecamatan)	438.000.000	2 (Kecamatan)	257.848.454	20 (Kecamatan)	140.548.314	0 (Kecamatan)	0	0 (Kecamatan)	0	0 (Kecamatan)	0	0 (Kecamatan)	257.848.454	0%	58.87 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	5 (Laporan)	438.000.000	3 (Laporan)	257.848.454	1 (Laporan)	140.548.314	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	257.848.454	0%	58.87 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**11.8**										
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																		14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		10		11		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
2		**Program Pencatatan Sipil**	Kepemilikan akta kelahiran	100 (%)	1.530.300.993	96.55 (%)	1.051.683.770	100 (%)	205.757.966	96.05 (%)	5.022.500	96.96 (%)	17.589.000	96.96 (%)	22.611.500	96.96 (%)	1.074.295.270	96.96 %	70.2 %	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan , Penerbitan akta perkawinan, Penerbitan akta perceraian, Penerbitan Akta Kematian	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	26249 (Dokumen)	205.757.966	7390 (Dokumen)	4.342.500	7847 (Dokumen)	17.589.000	15237 (Dokumen)	21.931.500	15237 (Dokumen)	21.931.500	0%	0%	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	26249 (Dokumen)	115.830.430	7390 (Dokumen)	0	7847 (Dokumen)	9.490.000	15237 (Dokumen)	9.490.000	15237 (Dokumen)	9.490.000	0%	0%	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		2. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 (Layanan)	839.301.093	2 (Layanan)	785.797.570	2 (Layanan)	89.927.536	2 (Layanan)	4.342.500	2 (Layanan)	8.099.000	2 (Layanan)	12.441.500	2 (Layanan)	798.239.070	100%	95.11 %	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**79.02**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**58.05**										
Predikat kinerja kegiatan										**Rendah**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																		14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		10		11		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
3		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	21.43 (%)	0	14.29 (%)	0	19.05 (%)	756.881.930	14.29 (%)	54.717.364	14.29 (%)	90.511.620	14.29 (%)	145.228.984	14.29 (%)	145.228.984	66.68 %	0%	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik	100 (%)	3.320.754.006	100 (%)	1.919.873.918	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	1.919.873.918	100%	57.81 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		1. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	20 (Kecamatan)	2.491.254.056	20 (Kecamatan)	1.438.165.897	20 (Kecamatan)	501.898.880	20 (Kecamatan)	50.172.364	20 (Kecamatan)	74.406.620	20 (Kecamatan)	124.578.984	20 (Kecamatan)	1.562.744.881	100%	62.73 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	5 (Dokumen)	2.491.254.056	1 (Dokumen)	1.438.165.897	1 (Dokumen)	501.898.880	1 (Dokumen)	50.172.364	1 (Dokumen)	74.406.620	1 (Dokumen)	124.578.984	1 (Dokumen)	1.562.744.881	20%	62.73 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																		14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		2. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan	9 (Dokumen)	160.000.000	6 (Dokumen)	108.130.271	8 (Dokumen)	94.983.150	11 (Dokumen)	3.895.000	20 (Dokumen)	2.660.000	31 (Dokumen)	6.555.000	31 (Dokumen)	114.685.271	344.44 %	71.68 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		1. Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	9 (Dokumen)	160.000.000	6 (Dokumen)	108.130.271	8 (Dokumen)	94.983.150	4 (Dokumen)	3.895.000	8 (Dokumen)	2.660.000	8 (Dokumen)	6.555.000	8 (Dokumen)	114.685.271	88.89 %	71.68 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**100**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Tinggi**										
		3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**										
		4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 (Kali)	485.999.950	3 (Kali)	230.046.750	1 (Kali)	159.999.900	0 (Kali)	0	1 (Kali)	13.445.000	1 (Kali)	13.445.000	1 (Kali)	243.491.750	20%	50.1 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	159.999.900	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	13.445.000	1 (Dokumen)	13.445.000	1 (Dokumen)	13.445.000	0%	0%	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**100**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Tinggi**										
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**75**										
									Predikat kinerja kegiatan	**Sedang**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																		14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
4		**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100 (%)	265.252.261	100 (%)	148.583.250	100 (%)	76.231.580	150 (%)	0	150 (%)	14.769.400	150 (%)	14.769.400	150 (%)	166.142.650	150%	62.64 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan	2 (Jenis)	265.252.261	2 (Jenis)	148.583.250	2 (Jenis)	76.231.580	30 (Jenis)	0	2 (Jenis)	14.769.400	2 (Jenis)	14.769.400	2 (Jenis)	166.142.650	100%	62.64 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	300 (Dokumen)	194.052.261	180 (Dokumen)	107.819.250	60 (Dokumen)	40.991.420	60 (Dokumen)	0	180 (Dokumen)	12.164.401	240 (Dokumen)	12.164.401	240 (Dokumen)	122.773.651	80%	63.27 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	60 (Dokumen)	35.240.160	90 (Dokumen)	0	120 (Dokumen)	2.605.000	210 (Dokumen)	2.605.000	210 (Dokumen)	2.605.000	0%	0%	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**100**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Tinggi**										
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**100**										
									Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Tinggi**										
5		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83.1 (Poin)	32.067.956.138	82.85 (Poin)	24.841.873.921	81.5 (Poin)	13.773.174.280	0 (Poin)	2.387.468.580	0 (Poin)	1.886.679.305	0 (Poin)	4.274.147.885	0 (Poin)	29.116.021.806	0%	90.79 %	Sekretaris Dinas
		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	30 (Dokumen)	181.397.000	6 (Dokumen)	103.908.000	6 (Dokumen)	162.500.000	1 (Dokumen)	1.965.000	5 (Dokumen)	7.015.500	5 (Dokumen)	8.980.500	5 (Dokumen)	112.888.500	16.67 %	62.23 %	JF Perencana
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	103.098.300	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	7.015.500	2 (Dokumen)	7.015.500	2 (Dokumen)	7.015.500	0%	0%	JF Perencana
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 (Dokumen)	33.000.000	4 (Dokumen)	30.981.500	4 (Dokumen)	31.349.700	1 (Dokumen)	415.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	415.000	3 (Dokumen)	31.396.500	15%	95.14 %	JF Perencana
		3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	28.052.000	1 (Laporan)	1.550.000	3 (Laporan)	0	3 (Laporan)	1.550.000	3 (Laporan)	1.550.000	0%	0%	
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**91.67**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Tinggi**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																14 = (13/5) x				
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	50 (Dokumen)	18.134.569.172	10 (Dokumen)	16.244.793.609	10 (Dokumen)	9.189.659.241	7 (Dokumen)	1.329.176.352	7 (Dokumen)	1.415.207.616	7 (Dokumen)	2.744.383.968	7 (Dokumen)	18.989.177.577	14%	104.71 %	Kasubag Keuangan
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 (Orang/Bulan)	17.496.206.672	47 (Orang/Bulan)	15.986.246.109	51 (Orang/Bulan)	9.091.735.666	44 (Orang/Bulan)	1.319.295.352	43 (Orang/Bulan)	1.399.807.616	43 (Orang/Bulan)	2.719.102.968	43 (Orang/Bulan)	18.705.349.077	84.31 %	106.91 %	Kepala Sub Bagian Keuangan
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 (Dokumen)	599.030.000	6 (Dokumen)	232.501.500	6 (Dokumen)	87.159.925	2 (Dokumen)	7.325.000	4 (Dokumen)	15.400.000	4 (Dokumen)	22.725.000	4 (Dokumen)	255.226.500	13.33 %	42.61 %	Kasubag Keuangan
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 (Laporan)	39.332.500	9 (Laporan)	26.046.000	9 (Laporan)	10.763.650	4 (Laporan)	2.556.000	5 (Laporan)	0	5 (Laporan)	2.556.000	5 (Laporan)	28.602.000	11.11 %	72.72 %	Kasubag Keuangan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**68.85**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sedang**										
		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 (Orang)	173.635.000	0 (Orang)	89.800.000	80 (Orang)	62.662.400	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	89.800.000	0%	51.72 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80 (Orang)	91.135.000	0 (Orang)	9.695.000	1 (Orang)	12.407.400	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	9.695.000	0%	10.64 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	91 (Paket)	50.255.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	Kepala Sub Kegaitan Umum dan Kepegawaian
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																		14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
				(Dokumen)		(Dokumen)		(Dokumen)											%	
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 (Orang/Bulan)	17.496.206.672	47 (Orang/Bulan)	15.986.246.109	51 (Orang/Bulan)	9.091.735.666	44 (Orang/Bulan)	1.319.295.352	43 (Orang/Bulan)	1.399.807.616	43 (Orang/Bulan)	2.719.102.968	43 (Orang/Bulan)	18.705.349.077	84.31 %	106.91 %	Kepala Sub Bagian Keuangan
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 (Dokumen)	599.030.000	6 (Dokumen)	232.501.500	6 (Dokumen)	87.159.925	2 (Dokumen)	7.325.000	4 (Dokumen)	15.400.000	4 (Dokumen)	22.725.000	4 (Dokumen)	255.226.500	13.33 %	42.61 %	Kasubag Keuangan
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 (Laporan)	39.332.500	9 (Laporan)	26.046.000	9 (Laporan)	10.763.650	4 (Laporan)	2.556.000	5 (Laporan)	0	5 (Laporan)	2.556.000	5 (Laporan)	28.602.000	11.11 %	72.72 %	Kasubag Keuangan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**68.85**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sedang**										
		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 (Orang)	173.635.000	0 (Orang)	89.800.000	80 (Orang)	62.662.400	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	89.800.000	0%	51.72 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80 (Orang)	91.135.000	0 (Orang)	9.695.000	1 (Orang)	12.407.400	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	9.695.000	0%	10.64 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	91 (Paket)	50.255.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	Kepala Sub Kegaitan Umum dan Kepegawaian
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**										
		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 (Layanan)	9.726.054.619	5 (Layanan)	5.496.081.263	5 (Layanan)	1.834.691.621	5 (Layanan)	943.149.520	5 (Layanan)	118.111.606	5 (Layanan)	1.061.261.126	5 (Layanan)	6.557.342.389	100 %	67.42 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	53.011.500	1 (Paket)	25.974.000	1 (Paket)	8.018.582	1 (Paket)	0	1 (Paket)	1.730.800	1 (Paket)	1.730.800	1 (Paket)	27.704.800	100 %	52.26 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II						14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	1.288.934.752	1 (Paket)	904.541.220	1 (Paket)	36.292.285	1 (Paket)	940.833.505	1 (Paket)	940.833.505	0%	0%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	399.464.500	2 (Paket)	296.746.440	1 (Paket)	114.809.159	1 (Paket)	14.367.500	1 (Paket)	16.247.521	1 (Paket)	30.615.021	1 (Paket)	327.361.461	100%	81.95 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 (Paket)	171.713.650	2 (Paket)	413.630.235	2 (Paket)	172.433.471	2 (Paket)	5.956.300	2 (Paket)	59.926.000	2 (Paket)	65.882.300	2 (Paket)	479.512.535	100%	279.25 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 (Dokumen)	67.640.000	1 (Dokumen)	45.510.000	1 (Dokumen)	16.267.620	1 (Dokumen)	2.610.000	1 (Dokumen)	3.915.000	1 (Dokumen)	6.525.000	1 (Dokumen)	52.035.000	20%	76.93 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 (Laporan)	852.250.000	169 (Laporan)	592.891.958	30 (Laporan)	234.228.037	3 (Laporan)	13.886.000	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	13.886.000	3 (Laporan)	606.777.958	2%	71.2 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**85**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**										
		5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	18 (Unit)	300.000.000	88 (Unit)	934.013.440	5 (Unit)	1.587.021.945	0 (Unit)	0	5 (Unit)	212.981.250	5 (Unit)	212.981.250	5 (Unit)	1.146.994.690	27.78 %	382.33 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 (Unit)	10.000.000	19 (Unit)	59.800.000	83 (Unit)	95.487.000	0 (Unit)	0	83 (Unit)	94.932.750	83 (Unit)	94.932.750	83 (Unit)	154.732.750	1660 %	1547.33 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 (Unit)	60.000.000	69 (Unit)	815.212.500	16 (Unit)	161.534.945	0 (Unit)	0	9 (Unit)	118.048.500	9 (Unit)	118.048.500	9 (Unit)	933.261.000	112.5 %	1555.44 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.330.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**52.08**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																		14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	7 (Jasa)	2.048.834.590	7 (Jasa)	1.088.976.857	7 (Jasa)	480.775.810	7 (Jasa)	90.702.330	7 (Jasa)	86.324.331	7 (Jasa)	177.026.661	7 (Jasa)	1.266.003.518	100%	61.79 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 (Laporan)	52.529.650	1 (Laporan)	2.694.235	12 (Laporan)	8.516.500	3 (Laporan)	258.300	3 (Laporan)	150.900	6 (Laporan)	409.200	6 (Laporan)	3.103.435	10%	5.91 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 (Laporan)	1.035.338.440	27 (Laporan)	467.122.379	12 (Laporan)	187.497.600	3 (Laporan)	37.936.999	3 (Laporan)	34.569.900	6 (Laporan)	72.506.899	6 (Laporan)	539.629.278	10%	52.12 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Sb Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 (Laporan)	102.500.000	9 (Laporan)	93.495.000	4 (Laporan)	40.450.000	1 (Laporan)	3.910.000	1 (Laporan)	2.970.000	2 (Laporan)	6.880.000	2 (Laporan)	100.375.000	10%	97.93 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		4. Sb Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	244.311.710	3 (Laporan)	48.597.211	3 (Laporan)	48.633.531	6 (Laporan)	97.230.742	6 (Laporan)	97.230.742	0%	0%	
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**50**										
		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	82 (Dokumen)	1.503.465.756	78 (Dokumen)	884.300.752	82 (Dokumen)	455.863.263	21 (Dokumen)	22.475.378	42 (Dokumen)	47.039.003	42 (Dokumen)	69.514.381	42 (Dokumen)	953.815.133	51.22 %	63.44 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 (Unit)	302.644.400	1 (Unit)	167.984.010	1 (Unit)	84.517.500	1 (Unit)	14.938.000	1 (Unit)	6.049.403	1 (Unit)	20.987.403	1 (Unit)	188.971.413	100%	62.44 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 (Unit)	593.227.750	31 (Unit)	302.863.891	31 (Unit)	166.855.700	5 (Unit)	2.087.378	17 (Unit)	37.042.100	17 (Unit)	39.129.478	17 (Unit)	341.993.369	54.84 %	57.65 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 (Unit)	118.500.000	41 (Unit)	75.603.000	40 (Unit)	54.502.500	10 (Unit)	5.450.000	24 (Unit)	3.947.500	24 (Unit)	9.397.500	24 (Unit)	85.000.500	60%	71.73 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Rendah**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																		14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 (Unit)	469.093.606	5 (Unit)	337.849.851	5 (Unit)	149.987.563	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	337.849.851	0%	72.02 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		**53.71**								
										Predikat kinerja sub kegiatan		**Rendah**								
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)		**72.08**								
										Predikat kinerja kegiatan		**Sedang**								
										Rata-rata capaian kinerja program(%)		**100**								
										Predikat kinerja program		**Sangat Tinggi**								
										Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)		**0**								
										Predikat kinerja sasaran		**Sangat Rendah**								
										Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)		**0**								
										Predikat kinerja Sasaran		**Sangat Rendah**								
										Total Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**79.57**								
										Predikat kinerja Program		**Tinggi**								
										Total Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		**66.53**								
										Predikat kinerja Kegiatan		**Sedang**								
										Total Rata-rata capaian kinerja Sub kegiatan (%)		**62.92**								
										Predikat kinerja Sub kegiatan		**Rendah**								

2.1.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan:

1. Masih terdapat wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman KTP khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini terjadi karena kesempatan untuk melakukan perekaman waktunya bersamaan dengan jam pelajaran.
2. Masih adanya penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum paham tentang pentingnya dokumen kependudukan. Mereka beranggapan tidak membutuhkan dokumen kependudukan, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan diabaikan.
3. Banyaknya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
4. Masih adanya pasangan pengantin baru atau pasangan pengantin lama yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) menjadi satu dan belum mengupdate data status perkawinan dalam dokumen KTP elektroniknya.
5. Masih adanya para pensiunan atau purna tugas terutama yang dulunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektroniknya.
6. Banyak masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), meskipun IKD menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat IKD, serta kendala teknis seperti kurangnya literasi digital dan aksesibilitas perangka.
7. Rendahnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), karena lembaga atau instansi lain belum mewajibkan/mempersyaratkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
8. Belum diberlakukannya Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai persyaratan wajib dalam pelayanan publik, seperti pendaftaran sekolah.

9. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
10. Banyaknya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
11. Persepsi masyarakat pedesaan bahwa biaya pembuatan akta kelahiran mahal.
12. Persepsi masyarakat pedesaan bahwa prosedur pembuatan akta kelahiran rumit.
13. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
14. Terdapat beberapa permasalahan bagi anak yang lahir diluar negeri antara lain sebagai berikut:
    - Adanya anak yang lahir diluar negeri setelah kembali ke Indonesia tidak/belum melaporkan dan belum mengajukan permohonan akta kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    - Masih adanya anak yang mempunyai akta kelahiran terbitan luar negeri yang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Masih rendahnya perluasan perjanjian kerjasama pemanfataan data kependudukan dengan instansi lain.
16. Masih adanya orang yang meninggal dan belum diajukan akta kematiannya, sehingga data yang bersangkutan belum terhapus dari database kependudukan.

2.1.2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Telah dilaksanakannya kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, untuk dilaksanakan perekaman bagi pelajar SLTA yang belum melaksanakan perekaman dan belum memiliki KTP di beberapa sekolah;
2. Telah dilaksanakannya perekaman dan penerbitan KTP/Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penyandang disabilitas melalui

program Sayang Difabel di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan di beberapa desa/kelurahan.

3. Telah dilaksanakannya program “Cedak Mas” (Cepat Dekat Masyarakat) Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Sehingga masyarakat cukup mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan.
4. Telah dilaksanakannya Program Layanan “Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Program layanan *door to door* “Sayang Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” oleh Tim Garuda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kemisk inan, Kepemilikan dokumen kependudukan bagi Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat menunjang bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran.
5. Telah dilaksanakannya layanan “KTP *In School*” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman di Sekolah SMA/SMK sederajat. Layanan “KTP in School” permudah Pelajar mendapatkan KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban melaksanakan progam layanan pembuatan KTP baru bagi pelajar yang masih duduk di bangku SMA Sederajat sebagai implementasi dari program pemkab Tuban sebagai upaya mendekatkan masyarakat dengan layanan Administrasi Kependudukan.
6. Telah dilaksanakannya Program Layanan “Keliling Sayang Anak”. Sayang anak merupakan pelayanan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan hak anak-anak yang ada di Kabupaten Tuban.
7. Telah dilaksanakannya Program layanan mobil keliling yang secara resmi telah dilauching oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 di Desa

Margomulyo, Kecamatan Kerek. Layanan mobil keliling ini merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Mobil pelayanan ini digunakan untuk layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, dan sangat mendukung dalam pelayananan kepada masyarakat rentan seperti Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia karena Mobil ini dilengkapi lift untuk memudahkan lansia dan disabilitas saat perekaman e-KTP. Mobil Pelayanan Keliling ini di desain agar ramah disabilitas. Pelayanan Administrasi Kependudukan terutama jemput bola bisa selesai dalam 1x24 jam. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani dalam Pelayanan Mobil Pelayanan Keliling, seperti Perekaman e-KTP, Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian hingga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Mobil pelayanan keliling ini digunakan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Mobil Pelayanan bersama petugas dari Dinas Dukcapil akan jemput bola hingga ke rumah warga. Mobil pelayanan juga digunakan untuk pelayanan pada pusat keramaian public dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pada *event car free day*. Tujuannya menyasar masyarakat dan pelajar yang baru bisa mengurus data kependudukan diwaktu akhir pekan atau *weekend.*

8. Telah dilaksanakannya program “Bahtera Kita” (Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban menggagas program Bahtera Kita sebagai upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejak diluncurkan pada Mei 2024 lalu, program tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat dan rumah sakit. Program ini hadir sebagai terobosan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ibu melahirkan dan keluarganya, dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung dari rumah sakit. Disdukcapil

Tuban melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinkes P2KB Tuban, RSUD dr. R. Koesma, RSUD Ali Mansur, RS Medika Mulia, RS Nadlatul Ulama dan RS Graha Husada pada April 2024. Program ini kini telah diterapkan di seluruh Puskesmas, RSUD, dan rumah sakit swasta di Kabupaten Tuban. Pelayanan kependudukan melalui program Bahtera Kita sangat memudahkan pasien. Keluarga pasien tidak perlu datang ke kantor Dukcapil maupun kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan, cukup menyerahkan berkas ke petugas. Petugas memberi penjelasan dan petunjuk untuk mengisi formulir yang diperlukan. Jadi, begitu keluar dari rumah sakit, anak sudah memiliki dokumen Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) terbaru. Dengan adanya program ini menjadikan keluarga bisa fokus merawat anak dan ibu usai melahirkan tanpa perlu pusing mengurus dokumen kependudukan. Program Bahtera Kita merupakan komitmen Disdukcapil Tuban untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan Bahtera Kita, data kelahiran anak dapat langsung tercatat dan terintegrasi dalam sistem kependudukan. Serta memastikan setiap anak yang lahir segera memiliki identitas hukum yang sah.

9. Telah dilaksanakannya program “Pak Tama” (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama). Dinas Dukcapil Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) Kab. Tuban pada Bulan Februari Tahun 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi para purna tugas, sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi bagi mereka yang telah mengabdi.
10. Telah dilaksanakannya program “Pelangi Biru” (Pembaharuan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dan Kementerian Agama Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program Inovasi “Pelangi Biru” pada Tahun 2025. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan bagi

pasangan pengantin baru. Selain mendapatkan dokumen buku nika dan kartu nikah digital, pasangan pengantin baru juga mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara bersamaan setelah prosesi pernikahan selesai.

11. Telah dilaksanakannya program layanan “Mitra KIA” yaitu layanan memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di Kab. Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inovasi terbaru dengan berkolaborasi Bersama dengan pihak pelaku usaha yang berada di wilayah Kab. Tuban sebagai Mitra KIA. Setiap anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan potongan biaya layanan atau potongan harga, dengan rentang diskon mulai dari 5 hingga 30 persen. Pelaku usaha tersebut diantaranya: Laboratorium Klinik Populer, Manunggal Sport Center, Pahlawan Swimming Pool, dan Yenni’s Cake, Level Playground Tuban, Barudak Café, Rumah Sunnat Tuban.
12. Telah dilaksanakannya Program Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Aplikasi digital memungkinkan pengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran dari mana saja dan kapan saja. Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah digitalisasi data kependudukan yang diakses melalui aplikasi khusus di perangkat seluler. IKD mencakup data KTP-el, Kartu Keluarga (KK), biodata penduduk, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan. Dengan IKD, masyarakat tidak perlu membawa KTP fisik karena semua informasi kependudukan sudah tersedia secara digital. Dalam rangka pemenuhan target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inisiatif “Jemput Bola” baik dari sektor pemerintah atau swasta.

13. Telah dilaksanakannya Program layanan mobil keliling yang secara resmi telah dilauching Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek. Mobil layanan ini merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Mobil pelayanan ini digunakan untuk layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, dan sangat mendukung dalam pelayananan kepada masyarakat rentan seperti Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia karena Mobil ini dilengkapi lift untuk memudahkan lansia dan disabilitas saat perekaman e-KTP. Mobil Pelayanan Keliling ini di desain agar ramah disabilitas. Pelayanan Administrasi Kependudukan terutama jemput bola bisa selesai dalam 1x24 jam. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani dalam Pelayanan Mobil Pelayanan Keliling, seperti Perekaman e-KTP, Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian hingga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Mobil pelayanan keliling ini digunakan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Mobil Pelayanan bersama petugas dari Dinas Dukcapil akan jemput bola hingga ke rumah warga.
    Mobil pelayanan juga digunakan untuk pelayanan pada pusat keramaian public dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pada *event car free day*. Tujuannya menyasar masyarakat dan pelajar yang baru bisa mengurus data kependudukan diwaktu akhir pekan atau *weekend*.
14. Telah dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Lain; Sampai dengan bulan Agustus 2025 kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sudah realisasi dengan 6 OPD (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanca, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dr. R. Koesma, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian

dan Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari kementerian dalam negeri terkait Pemanfaatan Data Kependudukan, karena sekarang semua data Kependudukan menggunakan Data SIAK terpusat, jadi apabila ada lembaga-lembaga, atau OPD yang ingin memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melaksanakan MOU atau kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

15. Telah dilaksanakannya pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
16. Telah dilaksanakannya Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan melalui bimbingan teknis dan pengembangan lainnya melalui inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan.
17. Telah dilaksanakannya sosialisasi dan pemberian buku register laporan kematian untuk semua desa/kelurahan agar diisi oleh petugas registrasi desa/kelurahan dan sekaligus untuk diajukan permohonan akta kematian agar data yang bersangkutan terhapus dari database kependudukan.
18. Telah dilaksanakannya konsolidasi Nomor Induk Kependudukan KTP/KK yang belum ter-update secara realtime ke server pusat.
19. Telah dilaksanakannya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
20. Telah dilaksanakannya standar manajemen mutu melalui sertifikasi ISO bidang pelayanan secara rutin setiap tahun.
21. Telah dilaksanakannya peningkatan penyimpanan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik secara fisik maupun digitalisasi.
22. Telah dilaksanakannya peningkatan jaringan SIAK yang saat ini sudah sampai di kecamatan agar dalam kondisi baik dalam menunjang pelayanan.
23. Telah dilaksanakannya sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung serta melalui media cetak dan elektronik.

2.1.3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2024 adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan (Indeks Kepuasan Masyarakat). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 sebesar 91, dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 91,26.

Sedangkan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan (Indeks Kepuasan Masyarakat). Indikator Sasaran dan Tujuan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 sebesar 91, dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 91,26.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tuban telah mencapai hasil yang baik dan progres yang positif. Hal ini menunjukan bahwa capaian Program berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kepuasan terhadap masyakat.

2.1.4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan.

1. Kebijakan dan tindakan perencanaan.
    a. Analisis dan evaluasi kinerja sebelumny.
       Melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian target kinerja di masa lalu, baik itu karena faktor internal (misalnya perencanaan yang tidak realistis) atau eksternal (misalnya perubahan kondisi atau bencana alam).
    b. Penetapan target yang realistis.
       Menetapkan target kinerja yang lebih realistis dan terukur berdasarkan analisis tersebut, yang juga memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan kondisi aktual.

c. Perencanaan yang fleksibel.

Membuat perencanaan yang memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kondisi yang berubah, misalnya dengan memasukkan opsi-opsi alternatif. Ini dapat dilakukan melalui perubahan Rencana Kerja (Renja) jika diperlukan.

d. Penguatan koordinasi dan komunikasi.

Memastikan adanya komunikasi yang efektif antar unit pelaksana dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan langkah kerja.

2. Tindakan penganggaran.

a. Alokasi anggaran yang tepat sasaran.

Mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas program yang paling membutuhkan atau program yang memiliki potensi terbesar untuk mencapai target kinerja.

b. Revisi anggaran.

Melakukan penyesuaian anggaran jika diperlukan berdasarkan evaluasi kinerja. Jika target tidak tercapai, mungkin diperlukan pengalokasian anggaran tambahan atau realokasi dari program lain. Sebaliknya, jika target terlampaui, anggaran yang lebih efisien mungkin bisa dialihkan ke program lain.

c. Anggaran berbasis kinerja.

Menggunakan anggaran yang berbasis kinerja untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam mencapai target kinerja.

3. Tindakan pemantauan dan evaluasi

a. Pemantauan berkala.

Melakukan pemantauan kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih dini jika ada penyimpangan dari target yang sudah ditetapkan.

b. Mekanisme evaluasi.

Memperkuat mekanisme evaluasi kinerja secara periodik untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik. Adapun indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sedangkan Target Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan pada Tahun 2024 adalah sebesar 91, dan setelah dilaksanakan hasil survei independen yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tuban) dengan bekerja sama dengan lembaga mitra), capaian indikator kinerja indeks pelayanan administrasi kependudukan pada Tahun 2024 melebihi capaian target yang ditetapkan dengan nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 91,26** dengan **nilai mutu "A"** dan kategori kinerja pelayanan **"Sangat Baik".**

Dengan melihat capaian tersebut, dan sudah menjadi komitmen bersama dari pimpinan sampai segenap bawahan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ini akan terus dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dengan berbagai inovasi dan terobosan yang selalu akan dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Tuban.

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik dengan kondisi yang sangat representatif diharapkan akan semakin memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya. Selain pelayanan di Mal Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program "Layanan Cedak Mas/Cepat Dekat Masyarakat" yaitu (pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian). Selain itu juga dilaksanakan program "Layanan Keliling KTP *in school*", program "Layanan Keliling Sayang Difabel, Lansia, dan ODGJ" dan program "Layanan Keliling Jemput Bola Sayang Anak" serta program "Layanan Bahtera Kita" (Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA).

Selain Program Layanan Cedak Mas, Layanan Keliling KTP *in school*, Layanan Keliling Sayang Lansia Difabel dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dan Layanan Program Bahtera Kita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban juga mempunyai program untuk Pelayanan Peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu program Layanan Mitra KIA, Layanan Mobil Keliling, Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Layanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama (Layanan Pak Tama), dan Layanan Pembaruan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru (Pelangi Biru).

Gambar 3.1

Perkembangan Nilai Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2018-2024

Gambar 3.1 menunjukkan perkembangan nilai indeks pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Tahun 2018 adalah 77,45 pada Tahun 2019 turun menjadi 76,90, Tahun 2020 meningkat lagi menjadi 80,02, bahkan pada Tahun 2021 ini nilainya meningkat signifikan menjadi 90,56, Tahun 2022 naik menjadi 90,62. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi nilai 90,66 dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan kembali pada angka 91,26

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
1.	Tujuan OPD: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien Indikator Tujuan: Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	n/a	n/a	4,71	4,72	n/a	4,70	4,71	4,72	
2.	Sasaran OPD 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Indikator Sasaran 1: Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	n/a	n/a	4,71	4,72	n/a	4,70	4,71	4,72	
3.	Sasaran OPD 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Indikator Sasaran 2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	90,90	91,00	91,76	92,26	90,66	91,26	91,76	92,26	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1. Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarkan tupoksi PD terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Suistanable Development Goals) :

   Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tentunya tidak terlepas dari pencapaian visi dan misi kepala daerah. Visi Kepala Daerah adalah “Mbangun Desa Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.” serta mengacu pada Misi Ke-4 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif””.

   Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarkan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Pendaftaran Penduduk.

   - Wajib KTP belum semua melakukan perekaman dan memiliki KTP elektronik. Pada akhir tahun 2024 dari wajib KTP 985.991 orang, sejumlah 985.977 orang yang telah melakukan perekaman atau 99,99 %. Dan dari jumlah tersebut yang telah memiliki KTP elektronik baru 982.090 orang atau 99,60%.
   - Kepemilikan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0 sampai 17 tahun (kurang 1 hari) yaitu 48,40 % atau 135.732. Adapun jumlah anak usia 0 sampai 17 tahun (kurang 1 hari) sejumlah 280.415 anak.
   - Masih terdapat wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman KTP khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini terjadi karena kesempatan untuk melakukan perekaman waktunya bersamaan dengan jam pelajaran.
   - Masih adanya penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum paham tentang pentingnya dokumen kependudukan. Mereka beranggapan tidak membutuhkan dokumen kependudukan, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan diabaikan.
   - Banyaknya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat

kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.

- Masih adanya pasangan pengantin baru atau pasangan pengantin lama yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) menjadi satu dan belum mengupdate data status perkawinan dalam dokumen KTP elektroniknya.
- Masih adanya para pensiunan atau purna tugas terutama yang dulunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektroniknya.
- Rendahnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), karena lembaga atau instansi lain belum mewajibkan/mempersyaratkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Belum diberlakukannya Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai persyaratan wajib dalam pelayanan publik, seperti pendaftaran sekolah.
- Banyaknya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.

Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarkan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

- Kepemilikan akta capil belum optimal. Kepemilikan akta kelahiran usia 0 -18 tahun pada akhir tahun 2024 sekitar 96,34 % atau 280.265 orang dari sejumlah 290.923 orang.
- Perlu adanya penyimpanan dokumen yang baik sekaligus digitalisasinya.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
- Persepsi masyarakat pedesaan bahwa biaya pembuatan akta kelahiran mahal.

- Persepsi masyarakat pedesaan bahwa prosedur pembuatan akta kelahiran rumit.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
- Terdapat beberapa permasalahan bagi anak yang lahir diluar negeri antara lain sebagai berikut:
  - Adanya anak yang lahir diluar negeri setelah kembali ke Indonesia tidak/belum melaporkan dan belum mengajukan permohonan akta kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - Masih adanya anak yang mempunyai akta kelahiran terbitan luar negeri yang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Masih adanya orang yang meninggal dan belum diajukan akta kematiannya, sehingga data yang bersangkutan belum terhapus dari database kependudukan.

Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarkan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:

- Mulai Tahun 2022 mulai diberlakukan SIAK terpusat sehingga perlu waktu untuk penyesuaian.
- Jaringan SIAK yang ada memerlukan pemeliharaan yang intensif dan optimal karena apabila jaringan SIAK mengalami gangguan maka pelayanan terganggu.
- Terwujudnya data kependudukan yang valid dan up to date termasuk data penerima manfaat program di semua OPD Kab. Tuban.
- Banyak masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), meskipun IKD menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat IKD, serta kendala teknis seperti kurangnya literasi digital dan aksesibilitas perangkat.

Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarkan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan:

- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi untuk itu diperlukan inovasi pelayanan yang terus menerus.
- Diperlukan sinergitas dengan instansi/OPD yang memanfaatkan database kependudukan.
- Masih perlunya peningkatan perluasan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan instansi lain kartena sampai dengan bulan Agustus 2025 kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan baru realisasi dengan 6 OPD (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanca, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dr. R. Koesma, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan).
- Masih perlunya peningkatan program layanan “Mitra KIA” yaitu layanan memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di Kab. Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inovasi terbaru dengan berkolaborasi Bersama dengan pihak pelaku usaha yang berada di wilayah Kab. Tuban sebagai Mitra KIA. Sampai dengan saat ini pelaku usaha yang sudah melaksanakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: Laboratorium Klinik Populer, Manunggal Sport Center, Pahlawan Swimming Pool, dan Yenni’s Cake, Level Playground Tuban, Barudak Café, Rumah Sunnat Tuban.

2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:

   a. Peningkatan kualitas kelancaran percepatan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
   b. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan administasi kependudukan di semua tempat pelayanan sehingga terwujud pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

c. Terwujudnya data kependudukan yang valid dan *up to date* termasuk data penerima manfaat program di semua OPD Kab. Tuban.
d. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
e. Penuntasan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi semua penduduk/khususnya penduduk rentan administrasi kependudukan.
f. Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat.
g. Peningkatan Kerjasama dan Pelayanan dengan OPD/ Badan/Lembaga/Instansi lain.

3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
   a. Meningkatkan pelayanan administrasi dokumen kependudukan bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik dan kecamatan melalui program “Cedak Mas” (Cepat Dekat Masyarakat) Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Sehingga masyarakat cukup mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan.
   b. Meningkatkan pelaksanaan program “Bahtera Kita” (Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban menggagas program Bahtera Kita sebagai upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejak diluncurkan pada Mei 2024 lalu, program tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat dan rumah sakit. Program ini hadir sebagai terobosan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ibu melahirkan dan keluarganya, dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung dari rumah sakit.

Disdukcapil Tuban melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban, RSUD dr. R. Koesma, RSUD Ali Mansur, RS Medika Mulia, RS Nadlatul Ulama dan RS Graha Husada pada April 2024. Program ini kini telah diterapkan di seluruh Puskesmas, RSUD, dan Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Tuban. Pelayanan kependudukan melalui program Bahtera Kita sangat memudahkan pasien. Keluarga pasien tidak perlu datang ke kantor Dukcapil maupun kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan, cukup menyerahkan berkas ke petugas. Petugas memberi penjelasan dan petunjuk untuk mengisi formulir yang diperlukan. Jadi, begitu keluar dari rumah sakit, anak sudah memiliki dokumen Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) terbaru. Dengan adanya program ini menjadikan keluarga bisa fokus merawat anak dan ibu usai melahirkan tanpa perlu pusing mengurus dokumen kependudukan. Program Bahtera Kita merupakan komitmen Disdukcapil Tuban untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya program “Bahtera Kita”, data kelahiran anak dapat langsung tercatat dan terintegrasi dalam sistem kependudukan. Serta memastikan setiap anak yang lahir segera memiliki identitas hukum yang sah.

c. Meningkatkan pelaksanaan program “Pak Tama” (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama). Dinas Dukcapil Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) Kab. Tuban pada Bulan Februari Tahun 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi para purna tugas, sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi bagi mereka yang telah mengabdi.

d. Meningkatkan pelaksanaan program “Pelangi Biru” (Pembaharuan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dan Kementerian Agama Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program Inovasi “Pelangi Biru” pada Tahun 2025. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama

(PKS) ini adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan bagi pasangan pengantin baru. Selain mendapatkan dokumen buku nika dan kartu nikah digital, pasangan pengantin baru juga mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara bersamaan setelah prosesi pernikahan selesai.

e. Meningkatkan program layanan "Mitra KIA" yaitu layanan memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di Kab. Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inovasi terbaru dengan berkolaborasi Bersama dengan pihak pelaku usaha yang berada di wilayah Kab. Tuban sebagai Mitra KIA. Setiap anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan potongan biaya layanan atau potongan harga, dengan rentang diskon mulai dari 5 hingga 30 persen. Pelaku usaha tersebut diantaranya: Laboratorium Klinik Populer, Manunggal Sport Center, Pahlawan Swimming Pool, dan Yenni's Cake, Level Playground Tuban, Barudak Café, Rumah Sunnat Tuban.

f. Meningkatkan Program Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Aplikasi digital memungkinkan pengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran dari mana saja dan kapan saja. Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah digitalisasi data kependudukan yang diakses melalui aplikasi khusus di perangkat seluler. IKD mencakup data KTP-el, Kartu Keluarga (KK), biodata penduduk, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan. Dengan IKD, masyarakat tidak perlu membawa KTP fisik karena semua informasi kependudukan sudah tersedia secara digital. Dalam rangka pemenuhan target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inisiatif "Jemput Bola" baik dari sektor pemerintah atau swasta.

g. Meningkatkan Perluasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Lain; Sampai dengan bulan Agustus 2025 kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sudah realisasi dengan 6 OPD (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dr. R. Koesma, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari kementerian dalam negeri terkait Pemanfaatan Data Kependudukan, karena sekarang semua data Kependudukan menggunakan Data SIAK terpusat, jadi apabila ada lembaga-lembaga, atau OPD yang ingin memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melaksanakan MOU atau kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.
h. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan perekaman bagi pelajar SLTA yang belum melaksanakan perekaman dan belum memiliki KTP di beberapa sekolah;
i. Meningkatkan pelaksanaan perekaman dan penerbitan KTP/Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penyandang disabilitas melalui program Sayang Difabel di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan di beberapa desa/kelurahan.
j. Meningkatkan program layanan “KTP *In School*” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman di Sekolah SMA/SMK sederajat. Layanan “KTP in School” permudah Pelajar mendapatkan KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban melaksanakan progam layanan pembuatan KTP baru bagi pelajar yang masih duduk di bangku SMA Sederajat sebagai implementasi dari program pemkab Tuban sebagai upaya mendekatkan masyarakat dengan layanan Administrasi Kependudukan.
k. Meningkatkan Program Layanan “Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Program layanan *door to door* “Sayang

Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)" oleh Tim Garuda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, Kepemilikan dokumen kependudukan bagi Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat menunjang bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran.

l. Meningkatkan Program Layanan "Keliling Sayang Anak". Sayang anak merupakan pelayanan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan hak anak-anak yang ada di Kabupaten Tuban.

m. Meningkatkan Program layanan mobil keliling yang secara resmi telah dilauching oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek. Layanan mobil keliling ini merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Mobil pelayanan ini digunakan untuk layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, dan sangat mendukung dalam pelayananan kepada masyarakat rentan seperti Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia karena Mobil ini dilengkapi lift untuk memudahkan lansia dan disabilitas saat perekaman e-KTP. Mobil Pelayanan Keliling ini di desain agar ramah disabilitas. Pelayanan Administrasi Kependudukan terutama jemput bola bisa selesai dalam 1x24 jam. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani dalam Pelayanan Mobil Pelayanan Keliling, seperti Perekaman e-KTP, Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian hingga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Mobil pelayanan keliling ini digunakan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Mobil Pelayanan bersama petugas dari Dinas Dukcapil akan jemput bola hingga ke rumah warga.

Mobil pelayanan juga digunakan untuk pelayanan pada pusat keramaian public dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan

Republik Indonesia dan pada event car free day. Tujuannya menyasar masyarakat dan pelajar yang baru bisa mengurus data kependudukan diwaktu akhir pekan atau *weekend*.

n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan melalui bimbingan teknis dan pengembangan lainnya melalui inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan.
o. Meningkatkan konsolidasi Nomor Induk Kependudukan KTP/KK yang belum ter-update secara realtime ke server pusat.
p. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana.
q. Meningkatkan standar manajemen mutu melalui sertifikasi ISO bidang pelayanan secara rutin setiap tahun.
r. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sosialisasi dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
s. Meningkatkan penyimpanan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik secara fisik maupun digitalisasi.
t. Meningkatkan jaringan SIAK yang saat ini sudah sampai di kecamatan agar dalam kondisi baik dalam menunjang pelayanan.
u. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung serta melalui media cetak dan elektronik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan kegiatan yang bersifat prioritas serta terus menerus, baik yang bersifat rutin maupun teknis karena ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu untuk memenuhi dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tuban.

Beberapa hal yang menjadi alasan Analisis kebutuhan berbeda dengan P-RKPD 2025 adalah sebagai berikut :

a. Untuk menyesuaikan perencanaan dengan hasil analisis kebutuhan yang lebih realistis.

Setelah dilakukan analisis kebutuhan, ditemukan bahwa beberapa program atau kegiatan dalam rancangan awal RKPD memiliki cakupan yang terlalu luas atau belum menjadi prioritas mendesak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran.

b. Adanya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Penurunan nilai anggaran terjadi sebagai upaya efisiensi agar sumber daya keuangan daerah digunakan secara optimal hanya untuk kegiatan yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan.
c. Menjaga konsistensi dengan kemampuan keuangan daerah. Hasil analisis kebutuhan seringkali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana program awal dengan kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian besaran anggaran agar tetap seimbang dengan kondisi keuangan yang tersedia.
d. Sebagai bentuk prioritisasi program dan kegiatan. Melalui proses pembandingan, program yang dianggap kurang mendesak atau tidak sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat dapat ditunda atau dikurangi anggarannya, sementara program prioritas tetap dipertahankan dengan dukungan pendanaan yang memadai.
e. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

   Penurunan nilai anggaran bukan berarti mengurangi kinerja, tetapi sebagai langkah strategis agar perencanaan lebih fokus, efisien, dan mampu menghasilkan output serta outcome yang lebih berkualitas.

Berdasarkan Rancangan Awal P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 disajikan perbandingan antara Rancangan P-RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan OPD sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kabupaten Tuban	Nilai AKIP Perangkat Daerah (poin)	81,5	13.773.174.280	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kabupaten Tuban	Nilai AKIP Perangkat Daerah (poin)	83,35	12.937.872.462	Perubahan Target kinerja
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	6 dokumen	162.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi yang tersusun	6 dokumen	101.344.900	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	103.098.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	62.045.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	31.349.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	16.936.100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 laporan	28.052.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 laporan	22.363.000	

			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	10 dokumen	9.189.659.241	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	10 dokumen	7.864.360.392	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/ Bulan	9.091.735.666	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/ Bulan	7.775.413.942	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	87.159.925	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	81.238.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	9 laporan	10.637.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	9 laporan	8.707.800	

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
3.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	2 orang	62.662.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	51 orang	4.151.200	
	Pengadaan pakaian dinas	Kabupaten Tuban	Jumlah paket yang di terima	1	50.255.000	Pengadaan pakaian dinas	Kabupaten Tuban	Jumlah paket yang di terima	1	976.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Tuban	Jumlah Pegawai Berdasarkan	2 orang	12.407.400	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Tuban	Jumlah Pegawai Berdasarkan	2 orang	3.175.200	

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			
4.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	1.834.691.621	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	1.546.656.637	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.018.582	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.018.582	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	1.288.934.752	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	1.161.275.667	

			Kantor yang Disediakan					Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	114.809.159	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	114.364.159	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	172.433.471	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	146.207.481	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	16.267.620	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	16.267.620	
	Penyelenggaraan Rapat	Kabupaten	Jumlah Laporan	20	234.228.037	Penyelenggaraan Rapat	Kabupaten	Jumlah Laporan	20	100.523.128	

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tuban	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tuban	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	31 unit	1.587.021.945	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	36 unit	2.482.873.760	
	Pengadaan mebel	Kabupaten Tuban	jumlah paket mebel yang disediakan	19 unit	95.487.000	Pengadaan mebel	Kabupaten Tuban	jumlah paket mebel yang disediakan	19 unit	95.487.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	161.534.945	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	277.386.760	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Kabupaten Tuban	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	1.330.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Kabupaten Tuban	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	2.110.000.000	

	Lainnya		Lainnya yang disediakan			Lainnya		Lainnya yang disediakan			
6.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	7 jasa	480.775.810	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	7 jasa	481.622.310	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	8.516.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4.022.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	187.497.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	192.500.100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	40.450.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	40.450.000	

	Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	244.311.710	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	244.649.710	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	78 unit	455.863.263	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	78 unit	455.863.263	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kabupaten Tuban	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 unit	84.517.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kabupaten Tuban	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 unit	84.517.500	

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	166.855.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	166.855.700	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	54.502.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	54.502.500	

	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 unit	149.987.563	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 unit	149.987.563	
2	Program pendaftaran penduduk	Kabupaten Tuban	Perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	99,70% 60%	1.706.784.920	Program pendaftaran penduduk	Kabupaten Tuban	Kepemilikan KTP Elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	99,66% 60%	1.500.427.964	
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	270.000 dokumen	1.468.196.606	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	200.000 dokumen	1.312.046.007	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	270.000 dokumen	1.396.051.831	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000 dokumen	1.266.187.502	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	150.000 dokumen	72.144.775	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	150.000 dokumen	45.858.505	
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran	Kabupaten Tuban	Jumlah kecamatan yang	20 kec	98.040.000	Penyelenggaraan Pendaftaran	Kabupaten Tuban	Jumlah kecamatan yang	20 kec	59.078.150	

	Penduduk		menyelenggarakan pendaftaran penduduk sesuai standar			Penduduk		menyelenggarakan pendaftaran penduduk sesuai standar			
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	98.040.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	59.078.150	
2.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran	Kabupaten Tuban	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	1 jenis	140.548.314	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran	Kabupaten Tuban	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	1 jenis	129.303.807	

	Penduduk		Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan			Penduduk		Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan			
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	1 laporan	140.548.314	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	1 laporan	129.303.807	
3	Program pencatatan sipil	Kabupaten Tuban	Kepemilikan akta kelahiran	100%	205.757.966	Program pencatatan sipil	Kabupaten Tuban	Kepemilikan akta kelahiran Presentase Akta Kematian yang diterbitkan	96% 100%	151.003.498	
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Tuban	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan Penerbitan	26.249 24 akta perkawinan 9 akta	205.757.966	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Tuban	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan Penerbitan	26.249 24 akta perkawinan 9 akta	151.003.498	

			akta perkawinan Penerbitan akta perceraian Penerbitan Akta Kematian	cerai 2.448 akta kematian				akta perkawinan Penerbitan akta perceraian Penerbitan Akta Kematian	cerai 2.448 akta kematian		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	26.249 dokumen	115.830.430	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	26.249 dokumen	109.776.430	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	89.927.536	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	41.227.068	

4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	19,05%	756.881.930	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	21,43%	487.320.183	
			persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	100,00%	-			persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	100,00%	-	
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan	8 OPD	94.983.150	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan	9 OPD	65.975.796	

	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8 dokumen	94.983.150	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	9 dokumen	65.975.796	
4.2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	20 kec	501.898.880	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	20 kec	403.319.287	

	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dokumen	501.898.880	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dokumen	403.319.287	
4.4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Kabupaten Tuban	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	1 kali	159.999.900	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Kabupaten Tuban	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	1 kali	17.025.100	

	Kependudukan		Administrasi Kependudukan			Kependudukan		Administrasi Kependudukan			
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 laporan	159.999.900	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 laporan	17.025.100	
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kabupaten Tuban	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100	76.231.580	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kabupaten Tuban	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100	56.427.480	
5.1	Penyusunan Profil Kependuduka	Kabupaten Tuban	Jumlah penyajian data	2 jenis	76.231.580	Penyusunan Profil Kependuduka	Kabupaten Tuban	Jumlah penyajian data	2 jenis	56.427.480	

	n		kependudukan			n		kependudukan			
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	60 dokumen	40.991.420	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	60 dokumen	31.334.595	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	60 dokumen	35.240.160	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	60 dokumen	25.092.885	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan Musrenbang yang telah dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Tuban, tidak didapati usulan dari masyarakat yang mengarah pada Program dan Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Dengan demikian hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah nihil.

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan

Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Tuban

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		N I H I L			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka disusunlah Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025. Secara keseluruhan jumlah program pada P-RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 ada 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan serta 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu indikatif masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Rp. 12.937.872.462,-
   (7 kegiatan dan 24 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:
2. Program pendaftaran penduduk. Rp. 1.500.427.964,-
   (3 kegiatan dan 6 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:
3. Program pelayanan pencatatan sipil. Rp. 151.003.498,-
   (1 kegiatan dan 2 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:
4. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Rp. 486.320.183,-
   (4 kegiatan dan 4 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Rp. 56.427.480,-
   (1 kegiatan dan 2 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:

Tabel 3.4

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025

dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				15.132.051.587				13.071.001.257
2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (poin)	Kabupaten Tuban	83,35	12.937.872.462	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83,85	11.889.106.054
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Kabupaten Tuban	6 dokumen	101.344.900	Dana Transfer Umum-		6 dokumen	96.748.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perangkat Daerah	Evaluasi yang tersusun				Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	2 dokumen	62.045.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	20.000.000
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kabupaten Tuban	4 laporan	16.936.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						SKPD							
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	3 laporan	22.363.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 laporan	76.748.000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kabupaten Tuban	9 dokumen	7.865.360.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		9 dokumen	8.447.533.777

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Sebelumnya			
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tuban	72 orang/ Bulan	7.775.413.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		77 orang/ Bulan	8.377.795.177
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Tuban	12 dokumen	81.238.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	64.738.600
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kabupaten Tuban	23 laporan	8.707.800	Dana Transfer Umum-		23 laporan	5.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	Kabupaten Tuban	1 orang	4.151.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terbelinnya paket seragam dinas	Kabupaten Tuban	1 Paket	976.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Umum			
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Tuban	2 orang	3.175.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kabupaten Tuban	5 Layanan	1.546.656.637	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Layanan	1.505.125.700
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tuban	1 Paket	8.018.582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tuban	1 Paket	1.161.275.667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	1.181.000.000
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tuban	1 Paket	114.364.159	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	99.895.400
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Tuban	2 Paket	146.207.481	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	144.257.300
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen	Kabupaten	1	16.267.620	Dana		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tuban	Dokumen		Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tuban	30 laporan	100.523.128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 laporan	80.000.000
2	12	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tuban	3 Jenis	2.482.873.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Jenis	1.063.114.670

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Kabupaten Tuban	83 unit	95.487.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Tuban	16unit	277.986.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Tuban	1 unit	2.110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	1.063.114.670

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	Kabupaten Tuban	7 jasa	481.622.310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jasa	447.056.660
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tuban	1 laporan	4.022.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Tuban	12 laporan	192.500.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	182.542.500
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Kabupaten	1 laporan	40.450.000	Dana		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tuban			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tuban	12 laporan	244.649.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	264.514.160
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tuban	4 unit	455.863.263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	329.500.247
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Kabupaten Tuban	1 unit	84.517.500	Dana Transfer		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Tuban	32 unit	166.855.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 unit	175.125.463
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Tuban	47 unit	54.502.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		47 unit	74.375.700

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kabupaten Tuban	5 unit	149.987.563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	79.999.084
2	12	02			Program pendaftaran penduduk	Perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Kabupaten Tuban	99,66% 60%	1.500.427.964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		99,71% 65%	501.581.552
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Kabupaten Tuban	200.000 dokumen	1.312.046.007	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200.000 dokumen	352.046.002
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan,	Jumlah	Kabupaten	200.000	1.266.187.502	Dana		200.000 dokumen	306.187.502

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Tuban	dokumen		Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Tuban	150.000 dokumen	45.858.505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150.000 dokumen	45.858.500
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk sesuai	Kabupaten Tuban	20 kec	59.078.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		20 kec	34.535.550

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						standar				Umum			
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Edukasi	Kabupaten Tuban	1 Dokumen	59.078.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	34.535.550
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	Kabupaten Tuban	1 jenis	129.303.807	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 jenis	115.000.000
2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran	Kabupaten Tuban	1 laporan	129.303.807	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		1 laporan	115.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penduduk				Umum			
2	12	03			Program pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran Kepemilikan akta kematian	Kabupaten Tuban	96,00% 100%	151.003.498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96,50% 100%	151.003.568
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan Penerbitan akta perkawinan Penerbitan akta perceraian Penerbitan Akta Kematian	Kabupaten Tuban	26.249 24 akta perkawinan 9 akta cerai 2.448 akta kematian	151.003.498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34. 257 27akta perkawinan 11 akta cerai 100 akta kematian	151.003.568

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Tuban	26.249 dokumen	109.776.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35.000 dokumen	109.775.500
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kabupaten Tuban	2 layanan	41.227.068	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 layanan	41.227.068
2	12	04			Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	Kabupaten Tuban	16,67%	486.320.183	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28.57%	464.320.083

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)		100,00%	-	-		100,00%	-
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan	Kabupaten Tuban	7 OPD	65.975.796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10OPD	43.975.796
2	12	04	2.01	0002	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Tuban	7 dokumen	65.975.796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 dokumen	43.975.796
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	Kabupaten Tuban	20 kec	403.319.287	Dana Transfer Umum-		20 kec	403.319.287

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kependudukan					Dana Alokasi Umum			
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kabupaten Tuban	1 dokumen	403.319.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	403.319.287

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Tuban	1 kali	17.025.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	17.025.000
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kabupaten Tuban	1 laporan	17.025.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	17.025.000
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	Kabupaten Tuban	100	56.427.480	Dana Transfer Umum-		100	65.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Dana Alokasi Umum			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan	Kabupaten Tuban	2 jenis	56.427.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	65.000.000
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban	60 dokumen	31.334.595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 dokumen	35.000.000
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	Kabupaten Tuban	30 dokumen	25.092.885	Dana Transfer Umum-Dana		30 dokumen	30.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kebutuhan yang lain	Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				Alokasi Umum			

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen awal yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dengan mengacu pada rancangan awal P-RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hasil evaluasi pelaksanan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan. Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program/kegiatan/sub kegiatan ini merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Adapun program-programnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan/sub kegiatan yaitu:

   1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
      c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

         <u>Indikator Kinerja:</u>

         Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

         a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
         b. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
         c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

      Indikator Kinerja :

      Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun.

      a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
      b. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
      c. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

      Indikator Kinerja:

      Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai.

      a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
      b. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

      Indikator Kinerja:

      Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum.

      a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
      b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.

c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.
d. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.
e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.
f. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.Pengadaan Mebel.
   a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   b. Pengadaan Gedung Kantor atau Gedung Lainnya.

      Indikator Kinerja:

      Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah.
      a. Jumlah Paket Mebel yang disediakan.
      b. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.
      c. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

      Indikator Kinerja:

      Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang.
      a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
      b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
      c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
      d. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator Kinerja:

Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
d. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi.

B. Program Pendaftaran Penduduk.

Program ini diarahkan untuk melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dengan kegiatan/sub kegiatan:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
   a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.
   b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

   Indikator Kinerja:

   Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan.

   a. Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk.
   b. Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
   a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

   Indikator Kinerja:

   Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk sesuai standar.

   a. Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran.

a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk.

Indikator Kinerja:

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan.

a. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk.

C. Program Pencatatan Sipil.

Program ini diarahkan untuk melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kegiatan/sub kegiatan:

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
   a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.
   b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

      Indikator Kinerja :

      - Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan.
      - Penerbitan akta perkawinan.
      - Penerbitan Akta Kematian.

      a. Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting.
      b. Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program ini diarahkan untuk melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dengan kegiatan/sub kegiatan:

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
   a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

      Indikator Kinerja :

      Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan.

      a. Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
   a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

      Indikator Kinerja :

Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK.

a. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi.

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

a. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

Indikator Kinerja:

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

a. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Program ini diarahkan untuk melaksanakan pengelolaan profil kependudukan, yang dilakukan dengan kegiatan/sub kegiatan:

1. Penyusunan Profil Kependudukan.

a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.

b. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Indikator Kinerja :

Jumlah penyajian data kependudukan.

a. Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota.

b. Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Penetapan prioritas rencana pembangunan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban akan lebih terarah dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan berdasarkan perkiraan/asumsi;
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025;
3. Dokumen perubahan rencana kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan anggaran sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

4. Dengan berpedoman pada dokumen perubahan rencana kerja ini diharapkan dapat menentukan langkah berupa kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan secara lebih terarah dan teratur.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban akan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**.** Melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap dokumen Renja Perubahan agar sejalan dengan hasil evaluasi pelaksanaan program, perubahan arah kebijakan pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah. Menjamin keterpaduan antara Renja Perubahan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti RKPD Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah, serta dokumen RKA dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2025.
3. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Pelaksanaan Program. Meningkatkan koordinasi internal antar bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memperkuat sinergi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami perubahan, guna memastikan kesesuaian antara target, realisasi, dan capaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan.
5. Peningkatan Kualitas Layanan dan Kapasitas Aparatur. Menindaklanjuti hasil perubahan Renja dengan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan agar lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Perubahan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja dan dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Demikian penyusunan perubahan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan dalam dokumen perencanaan ini.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Drs. ROHMAN UBAID

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ARIYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WAYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja sangat penting bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban karena di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1 (satu) tahun. Selain itu, untuk menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban diperlukan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban memuat kebijakan, program, dan kegatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban, mengangkat permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan karena adanya isu penting dan masalah mendesak di tingkat Nasional dan Provinsi yaitu rendahnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta masih rendahnya keselamatan transportasi dan konektivitas transportasi di Kabupaten Tuban.

Sebagai pedoman perencanaan tahunan Renja menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Namun dalam perjalanannya mungkin saja terdapat perkembangan situasi dan kondisi atau kebijakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban yang tidak sama dengan awal tahun perencanaan. Oleh sebab itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Apabila berdasar hasil evaluasi tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan perubahan rencana kerja perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan dokumen Renja dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan karena disebabkan oleh:

(1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja program daerah berkenan;
(2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
(3) adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tersebut selanjutnya dituangkan dalam peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2025 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, dan sebagai tindak lanjut Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten melakukan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 dengan tahapan penyusunan Pra RKAP selanjutnya menginjak RKAP dan Dokumen Perubahan Anggaran di Tahun 2025 untuk selanjutnya dilakukan penetapan melalui Keputusan Bupati Tuban, sebagaimana terlampir.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20I7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 182;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23);
32. Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 tahun 2022 tentang Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban;
33. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
34. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 10);
35. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dibidang lingkungan hidup dan perhubungan.

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025 adalah untuk:

1. Melakukan penyesuaian perkembangan keadaan yang berjalan agar rumusan program dan kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban sesuai dengan pergeseran pagu anggaran di Tahun 2025;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan kepada Bupati Tuban; dan
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi:
- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
  - Analisis Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Perhubungan

- Catatan dan Analisis Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
- Catatan dan Analisis Kinerja Urusan Perhubungan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab IV Penutup.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan pada Tahun 2025 mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban dan juga pada isu strategis terkait urusan lingkungan hidup dan perhubungan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup dan bidang Perhubungan dengan beberapa program yang meliputi:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dioperasionalkan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan;
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dioperasionalkan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan;
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dioperasionalkan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan;
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dioperasionalkan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan;
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan;

8. Program Pengelolaan Persampahan, dioperasionalkan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan;
9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dioperasionalkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan; dan
10. Program Pengelolaan Pelayaran, dioperasionalkan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (dua) sub kegiatan.

Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang dengan program pendukung kesekretariatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dioperasionalkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Berdasarkan rencana kerja tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 khususnya mengenai pencapaian target kinerja dan keuangan. Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian target indikator karena perkembangan situasi dan kondisi saat ini beberapa di antaranya belum selaras dengan perencanaan yang telah disusun di awal tahun perencanaan.

Mengenai hasil evaluasi capaian target kinerja, secara umum dapat dijelaskan bahwa pencapaian target kegiatan pada triwulan II baru berkisar pada ketercapaian target pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pemenuhan belanja rutin/pokok Perangkat Daerah serta kegiatan yang bersifat koordinasi terutama dalam hal persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai 23.62% (dua puluh tiga koma enam dua persen). Adapun rincian realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing urusan disajikan dalam Tabel 2.1.

Dari evaluasi terhadap realisasi anggaran maupun evaluasi terhadap realisasi pencapaian target kinerja maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Tahun 2025. Selain berdasarkan hasil evaluasi, secara lebih rinci dapat disampaikan pula bahwa perubahan rencana kerja tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan alasan:

1. Rencana pelaksanaan di awal tahun perencanaan, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan utamanya terhadap asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran rekening belanja di dalam kegiatan antar kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan rekening belanja kegiatan; dan
3. Adanya penyesuaian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta pengalokasian kembali Silpa kegiatan dana-dana perimbangan antara lain DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, Dana BOS, JKN, DID, DAU dan sebagainya, dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Tahun 2025- 2029.

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan : 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 74.85 poin
   - Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan target 623.550,08 Ton CO2e
2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 85.35 poin

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{{ 2025 }}})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{{ 2025 }}})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
A	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	51.39 (Poin)	64556719.3	51.39 (Poin)	92219626.4	64.16 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	51.39 (Poin)	0	100 %	165 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala OPD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
			Indeks Kualitas Air (IKA)	54.19 (Poin)	0	58.72 (Poin)	0	75.29 (Poin)	58952131.4	0 (Poin)	6387705.452	0 (Poin)	7888129.702	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	14275835.2	58.72 (Poin)	106495462	108 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala OPD
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.1 (Poin)	0	89.89 (Poin)	0	80.23 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	89.89 (Poin)	0	112 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala OPD
1		**Program Pengelolaan Persampahan**	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	100 (%)	41530895.7	0 (%)	36950854.2	89 (%)	27465000	68.36 (%)	1257474.674	70.91 (%)	2047285.911	0 (%)	0	0 (%)	0	70.91 (%)	3304760.59	70.91 (%)	40255614.8	89%	97%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3
			Persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	10 (%)	0	167.61 (%)	0	10 (%)	0	30.78 (%)	0	69.15 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	69.15 (%)	0	69.15 (%)	0	692 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	Prosentase sampah yang ditangani	70 (%)	41530895.7	40.77 (%)	36950854.2	60 (%)	27465000	40.57 (%)	1257474.674	40.57 (%)	2047285.911	0 (%)	0	0 (%)	0	40.57 (%)	33047060.59	40.57 (%)	40255614.8	57.96 %	97%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
			Prosentase sampah yang dikurangi	30 (%)	0	29.14 (%)	0	29 (%)	0	27.79 (%)	0	28.12 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	28.12 (%)	0	28.12 (%)	0	93.73 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
		1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	40 (Kelompok)	0	0 (Kelompok)	0	20 (Kelompok)	190000	2 (Kelompok)	1025	7 (Kelompok)	0	0 (Kelompok)	0	0 (Kelompok)	0	9 (Kelompok)	1025	9 (Kelompok)	1025	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		2. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU,TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF,pusat pengomposan, biodigester, BankSampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	300 (Ton)	0	0 (Ton)	0	150 (Ton)	3375000	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/ JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	250 (Unit)	1000000	565 (Unit)	20940191.5	52 (Unit)	11625000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	1230	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	1230	0 (Unit)	20941421.5	0 %	2094%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		4. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	125962 (Ton)	24122831	73367.56 (Ton)	24396816.1	107967 (Ton)	12275000	54600 (Ton)	1256449.674	129500 (Ton)	2046055.911	0 (Ton)	0	0 (Ton)	0	184100 (Ton)	3302505.59	1841 00 (Ton)	27699321.7	0 %	115 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
2		**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 (%)	146363.647	100 (%)	80803.419	100 (%)	35000	30 (%)	1120	65 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	65 (%)	1120	65 (%)	81923.419	0 %	56%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3
		1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 sesuai ketentuan	100 (%)	146363.647	100 (%)	80803.419	100 (%)	35000	100 (%)	1120	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	1120	100 (%)	81923.419	100 %	56%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	100 (Laporan)	146363.647	87 (Laporan)	80803.419	20 (Laporan)	35000	6 (Laporan)	1120	7 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	13 (Laporan)	1120	100 (Laporan)	81923.419	100 %	56%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
3		**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	Persentase persetujuan lingkungan yang diselesaikan	100 (%)	923723.144	100 (%)	567697.25	100 (%)	176656.952	100 (%)	12363	100 (%)	19324.66	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	31687.66	100 (%)	599384.91	0 %	65%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25 (%)	923723.144	25.26 (%)	567697.25	25 (%)	0	40 (%)	0	21.43 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	21.43 (%)	0	21.43 (%)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
			Prosentase persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	176656.952	100 (%)	12363	100 (%)	1932 4.66	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	31687.66	100 (%)	31687.66	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
		1. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	300 (Badan Usaha)	318826.349	275 (Badan Usaha)	371881.15	90 (Badan Usaha)	101656.952	10 (Badan Usaha)	3800	18 (Badan Usaha)	1501.5	0 (Badan Usaha)	0	0 (Badan Usaha)	0	28 (Badan Usaha)	5301.5	28 (Badan Usaha)	377182.65	9.33 %	118 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
		2. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	50 (Dokumen)	270047.205	79 (Dokumen)	191316.1	10 (Dokumen)	75000	20 (Dokumen)	8563	43 (Dokumen)	17823.16	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	63 (Dokumen)	26386.16	63 (Dokumen)	217702.26	0 %	81%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
4		**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Prosentase penurunan emisi gas rumah kaca	25.3 (%)	1554 5023. 9	5 (%)	720116 0.02	24.6 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
			Prosentase badan air dalam kondisi baik	52 (%)	0	44.8 7 (%)	0	52.5 8 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
			Persentase penyelesaian dokumen lingkungan yang diamanatkan PUU LH	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	27224 74.15	0 (%)	1296 99.5	0 (%)	1445 02.79	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	27420 2.29	0 (%)	747536 2.31	0 %	48%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		1. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang Tertangani	4 (Hektar)	1335 039.72	9 (Hektar)	119634 6.51	1 (Hektar)	79785 1.224	0 (Hektar)	1168 0	0 (Hektar)	2174 0	0 (Hektar)	0	0 (Hektar)	0	0 (Hektar)	33420	9 (Hektar)	122976 6.51	225 %	92%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
		1. Pelaksanaan rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3 (Hektar)	1055 039.72	6 (Hektar)	119634 6.51	2 (Hektar)	79785 1.224	0 (Hektar)	1168 0	0 (Hektar)	2174 0	0 (Hektar)	0	0 (Hektar)	0	0 (Hektar)	33420	6 (Hektar)	122976 6.51	200 %	117 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		2. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian, Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup yang tersusun	17 (Dokumen)	14023335.5	11 (Dokumen)	5975586.51	3 (Dokumen)	1924622.93	0 (Dokumen)	118019.5	0 (Dokumen)	122762.79	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	240782.29	11 (Dokumen)	6216368.8	64.71 %	44%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
			Jumlah laboratorium lingkungan hidup pemerintah daerah dengan kondisi baik	1 (Laboratorium)	0	1 (Laboratorium)	0	1 (Laboratorium)	0	0 (Laboratorium)	0	0 (Laboratorium)	0	0 (Laboratorium)	0	0 (Laboratorium)	0	0 (Laboratorium)	0	0 (Laboratorium)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan
		1. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	342700	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1125	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1125	0 (Dokumen)	1125	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
		2. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap MediaTanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1 (lokasi)	0	0 (lokasi)	0	1 (lokasi)	86250.24	0 (lokasi)	3762	0 (lokasi)	4577	0 (lokasi)	0	0 (lokasi)	0	0 (lokasi)	8339	0 (lokasi)	8339	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
		3. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	111550	0 (Dokumen)	7830	0 (Dokumen)	8075	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	15905	0 (Dokumen)	15905	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
		4. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	500 (Dokumen)	6334331.26	349 (Dokumen)	3116484.67	110 (Dokumen)	769372.685	26 (Dokumen)	1064 27.5	33 (Dokumen)	1016 14.79	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	59 (Dokumen)	208042.29	59 (Dokumen)	3324526.96	11.8 %	52%	Ka. UPTD Laboratorium

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksnaakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	17 (Dokumen)	7541004.29	11 (Dokumen)	2856424.34	2 (Dokumen)	614750	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	7371	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	7371	11 (Dokumen)	2863795.34	64.71 %	38%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
5		**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100 (%)	468545.164	100 (%)	167775.968	100 (%)	73600	100 (%)	1590	100 (%)	2468	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	4058	100 (%)	171833.968	0 %	37%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan yang diselesaikan	115 (Pengaduan)	391545.493	58 (Pengaduan)	167775.968	25 (Pengaduan)	73600	6 (Pengaduan)	1590	3 (Pengaduan)	2468	0 (Pengaduan)	0	0 (Pengaduan)	0	9 (Pengaduan)	4058	9 (Pengaduan)	171833.968	7.83 %	44%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
		1. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	115 (Pengaduan)	391545.492	58 (Pengaduan)	142952.068	25 (Pengaduan)	73600	6 (Pengaduan)	1590	3 (Pengaduan)	2468	0 (Pengaduan)	0	0 (Pengaduan)	0	9 (Pengaduan)	4058	9 (Pengaduan)	147010.068	0 %	38%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
6		**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	Jumlah lembaga yang peduli dan berbudaya lingkungan	170 (Lembaga)	4257220.48	134 (Lembaga)	2212899.25	43 (Lembaga)	795000	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	66155	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	66155	0 (Lembaga)	2279054.25	0 %	54%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian kepedulian lembaga dalam berbudaya lingkungan	170 (Lembaga)	4257220.48	134 (Lembaga)	2212899.25	43 (Lembaga)	795000	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	66155	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	66155	134 (Lembaga)	2279054.25	78.82 %	54%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
		1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	170 (Entitas)	4257220.48	134 (Entitas)	2212899.25	43 (Entitas)	795000	0 (Entitas)	0	0 (Entitas)	66155	0 (Entitas)	0	0 (Entitas)	0	0 (Entitas)	66155	134 (Entitas)	2279054.25	78.82 %	54%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
7		**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	Luas kawasan KEHATI yang dikelola	7 (Hektar)	2126189.43	11.1 (Hektar)	15768581	6 (Hektar)	396719	0 (Hektar)	7400	0 (Hektar)	12800	0 (Hektar)	0	0 (Hektar)	0	0 (Hektar)	20200	0 (Hektar)	15788781	0 %	743 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Perluasan kawasan kehati	7 (Hektar)	2126189.43	6 (Hektar)	15768581	6 (Hektar)	396719	0 (Hektar)	7400	0 (Hektar)	12800	0 (Hektar)	0	0 (Hektar)	0	0 (Hektar)	20200	0 (Hektar)	15788781	0 %	743 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
		1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	396719	2 (Unit)	7400	2 (Unit)	12800	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	20200	2 (Unit)	20200	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Peyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
8		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82 (Poin)	1102026116	81.95 (Poin)	57313183.7	82.5 (Poin)	27176381.3	0 (Poin)	4978058.278	0 (Poin)	5594117.341	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	10572175.6	0 (Poin)	67885359.3	0 %	62%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	1 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	1 (Layanan)	171396	0 (Layanan)	0	0 (Layan an)	0	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	0 (Layan an)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	171396	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	30 (Dokumen)	443881.98	19 (Dokumen)	260537	6 (Dokumen)	163443.668	2 (Dokumen)	14498.5	1 (Dokumen)	46945.5	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	61444	22 (Dokumen)	321981	73.33 %	73%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Program dan Pelaporan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 (Dokumen)	145079.157	7 (Dokumen)	83140.5	2 (Dokumen)	84646.668	1 (Dokumen)	5753	0 (Dokumen)	35155	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	40908	8 (Dokumen)	124048.5	80 %	86%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Program dan Pelaporan
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 (Laporan)	298802.823	12 (Laporan)	177396.5	4 (Laporan)	78797	1 (Laporan)	8745.5	1 (Laporan)	9.325	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	9678	14 (Laporan)	187074.5	70 %	63%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Program dan Pelaporan
		3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	45 (Laporan)	95994889.5	27 (Laporan)	48581270.4	9 (Laporan)	24146346.9	3 (Laporan)	4434732.582	1 (Laporan)	4922004.239	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	9356736.82	31 (Laporan)	57938007.2	68.89 %	60%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Keuangan
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 (Orang/Bulan)	948349901.3	174 (Orang/Bulan)	48128041.9	183 (Orang/Bulan)	24025046.1	183 (Orang/Bulan)	4433732.582	183 (Orang/Bulan)	2458663.124	0 (Orang/Bulan)	0	0 (Orang/Bulan)	0	183 (Orang/Bulan)	6892395.71	183 (Orang/Bulan)	55020437.6	104.57 %	58%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Keuangan
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 (Dokumen)	1092217.64	21 (Dokumen)	409288.5	7 (Dokumen)	104877	2 (Dokumen)	1000	1 (Dokumen)	17500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	18500	24 (Dokumen)	427788.5	68.57 %	39%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Keuangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	450 (Dokumen)	11044.088	268 (Dokumen)	6136.5	90 (Dokumen)	2200	22 (Dokumen)	0	23 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	45 (Dokumen)	0	313 (Dokumen)	6136.5	69.56 %	56%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Keuangan
		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25 (Dokumen)	150600.12	15 (Dokumen)	10074.5	5 (Dokumen)	3734	1 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	10074.5	0 %	67%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Keuangan
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 (Laporan)	175700.14	15 (Laporan)	10891.5	5 (Laporan)	4147.5	2 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	0	3 (Laporan)	10891.5	0 %	62%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Keuangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70 (Laporan)	16566.132	42 (Laporan)	10850	14 (Laporan)	4142.25	3 (Laporan)	0	4 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	7 (Laporan)	0	49 (Laporan)	10850	70 %	65%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Keuangan
		7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 (Dokumen)	7530.059	9 (Dokumen)	5987.5	3 (Dokumen)	2200	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	11 (Dokumen)	5987.5	73.33 %	80%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Keuangan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 (Layanan)	2047898.48	6 (Layanan)	1231004.82	6 (Layanan)	386082.621	6 (Layanan)	35229.7	6 (Layanan)	55754.701	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	6 (Layanan)	90984.401	6 (Layanan)	132198.22	100 %	65%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 (Paket)	17064725	12 (Paket)	86005.175	12 (Paket)	34885.513	12 (Paket)	0	12 (Paket)	11794	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	12 (Paket)	11794	12 (Paket)	97799.175	100 %	57%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 (Paket)	574418.082	12 (Paket)	358470.822	12 (Paket)	109998.408	12 (Paket)	3948	12 (Paket)	25057.601	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	12 (Paket)	29005.601	12 (Paket)	387476.423	100 %	67%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 (Paket)	180927	3 (Paket)	271267	3 (Paket)	108018.2	3 (Paket)	8304	3 (Paket)	7428.5	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	15732.5	3 (Paket)	286999.5	100 %	159 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 (Paket)	286746.193	12 (Paket)	131556.9	12 (Paket)	50000	3 (Paket)	1781.4	6 (Paket)	3704.6	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	6 (Paket)	5486	6 (Paket)	137042.9	50 %	48%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 (Dokumen)	559483.46	102 (Dokumen)	31060	36 (Dokumen)	13180.5	9 (Dokumen)	2250	9 (Dokumen)	2250	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	18 (Dokumen)	4500	120 (Dokumen)	35560	66.67 %	64%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 (Laporan)	535637.77	232 (Laporan)	352644.922	60 (Laporan)	70000	15 (Laporan)	18946.3	15 (Laporan)	5520	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	30 (Laporan)	24466.3	262 (Laporan)	377111.222	87.33 %	70%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 (Jasa)	8854912.66	4 (Jasa)	4823241.7	4 (Jasa)	1726381.09	4 (Jasa)	409448.246	4 (Jasa)	418399.601	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	0	4 (Jasa)	827847.847	4 (Jasa)	5651089.54	100 %	64%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 (Laporan)	35039.879	90 (Laporan)	488.3	30 (Laporan)	6.399	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	90 (Laporan)	488.3	60 %	1%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 (Laporan)	1357795.95	108 (Laporan)	924405.685	36 (Laporan)	374000	9 (Laporan)	82029.966	9 (Laporan)	52598.411	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	18 (Laporan)	134628.377	18 (Laporan)	1059034.06	0 %	78%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{{ 2025 }}})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{{ 2025 }}})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 (Laporan)	153864.227	36 (Laporan)	97501.2	12 (Laporan)	30309.3	3 (Laporan)	6308	3 (Laporan)	8062	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	14370	42 (Laporan)	111871.2	70 %	73%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 (Laporan)	7308212.6	32 (Laporan)	3800846.51	12 (Laporan)	1321431.89	3 (Laporan)	321110.28	3 (Laporan)	329093.459	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	650203.739	38 (Laporan)	445105.25	76 %	61%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	100 (Unit)	2806033.08	90 (Unit)	1736999.84	100 (Unit)	582731	21 (Unit)	84149.25	76 (Unit)	148912.3	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	97 (Unit)	233061.55	97 (Unit)	197006.39	97 %	70%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 (Unit)	752272.36	68 (Unit)	110543.42	68 (Unit)	389651	17 (Unit)	55319.55	17 (Unit)	113921.5	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	34 (Unit)	169241.05	34 (Unit)	127467.47	50 %	169 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
		2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 (Unit)	150600.12	10 (Unit)	32922	10 (Unit)	20000	3 (Unit)	3875	2 (Unit)	1987.5	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	5 (Unit)	5862.5	5 (Unit)	38784.5	50 %	258 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 (Unit)	83834.669	10 (Unit)	73533.6	10 (Unit)	33080	2 (Unit)	3805	3 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	5 (Unit)	3805	5 (Unit)	77338.6	50 %	92%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 (Unit)	503821.258	8 (Unit)	525105.821	3 (Unit)	140000	1 (Unit)	21149.7	1 (Unit)	24303.3	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	45453	10 (Unit)	570558.821	333.33 %	113 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9		**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	Jumlah kader lingkungan hidup yang terbentuk	100 (Kader)	0	0 (Kader)	0	100 (Kader)	111300	0 (Kader)	0	0 (Kader)	1476	0 (Kader)	0	0 (Kader)	0	0 (Kader)	1476	0 (Kader)	1476	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina dalam peningkatan kapasitas lingkungan hidup	100 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	100 (Lembaga)	111300	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	1476	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	1476	0 (Lembaga)	1476	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
		1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	68600	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1476	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1476	0 (Dokumen)	1476	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
		2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	5 (Lembaga)	42700	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
B	**Meningkatnya infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah di kabupaten Tuban untuk mendukung One Village One Product dan pembangunan di wilayah Kabupaten/Kota**		Rasio Konektivitas Kab/Kota	77.73 (%)	0	0 (%)	0	74.55 (%)	76979947.8	0 (%)	8399472.529	0 (%)	9428179.723	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	17827652.3	0 (%)	301020862	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
			Rasio Jalan dengan standar APJ Lengkap	48 (%)	18121322 5	40.97 (%)	283193 209	44 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
			Tingkat pelayanan jalan (LoS)	95 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
1		**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/Umum (%)	10 (%)	0	0 (%)	0	10 (%)	0	-15.14 (%)	0	2.83 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	2.83 (%)	0	2.83 (%)	0	0 %	0%	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal-Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum (%)	10 (%)	0	-98.8 (%)	0	10 (%)	0	-100 (%)	0	-100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	-100 (%)	0	-100 (%)	0	-100 0 %	0%	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (%)	10 (%)	0	-100 (%)	0	10 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0%	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir (%)	10 (%)	0	98.52 (%)	0	10 (%)	0	-23.98 (%)	0	-19.43 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	-19.43 (%)	0	-19.43 (%)	0	-194.3 %	0%	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (Ratio/Ruas Jalan)	0.42 (Ratio/Ruas Jalan)	18096605	0.29 (Ratio/Ruas Jalan)	283170045	0.33 (Ratio/Ruas Jalan)	76930947.8	0 (Ratio/Ruas Jalan)	8399472.529	0 (Ratio/Ruas Jalan)	9426949.723	0 (Ratio/Ruas Jalan)	0	0 (Ratio/Ruas Jalan)	0	0 (Ratio/Ruas Jalan)	17826422.3	0 (Ratio/Ruas Jalan)	300996467	0 %	166 %	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan kabupaten yang memiliki sarana pelengkap jalan yang lengkap	48 (%)	144364262	46.39 (%)	221971122	44 (%)	58749967.7	49.4 (%)	6442828.931	49.4 (%)	6754689.695	0 (%)	0	0 (%)	0	49.4 (%)	13197518.6	49.4 (%)	235168641	102.92 %	163 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{{ 2025 }}})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{{ 2025 }}})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2030 (Unit)	24232565.1	10304 (Unit)	140961017	2000 (Unit)	26530000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	128239.75	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	128239.75	10304 (Unit)	141089256	507.59 %	582 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan
		2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16 (Unit)	249968.25	16 (Unit)	105733.9	16 (Unit)	44999.749	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	105733.9	0 %	42%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan
		3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7004 (Unit)	119881729	5720 (Unit)	80714046.5	7185 (Unit)	32174968	1650 (Unit)	6442828.931	1750 (Unit)	6626449.945	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3400 (Unit)	13069278.9	3400 (Unit)	93783325.4	48.54 %	78%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan
		2. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase angkutan umum yang laik jalan	80 (%)	5511083.5	80.26 (%)	41807709.6	80 (%)	10722414.2	81.25 (%)	613979.838	81.25 (%)	1379661.598	0 (%)	0	0 (%)	0	81.25 (%)	1993641.44	81.25 (%)	43801351.1	101.56 %	795 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Seksi Angkutan Dan Keselamatan Jalan Serta Pengelolaan Pelayaran

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
		1. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 (Unit)	5511 083.5	54 (Unit)	418077 09.6	50 (Unit)	10722 414.2	84 (Unit)	4472 56.78 8	84 (Unit)	1379 661.5 98	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	84 (Unit)	18269 18.39	84 (Unit)	436346 28	560 %	792 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Seksi Angkutan Dan Keselamatan Jalan Serta Pengelolaan Pelayaran
		3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	6.25 (%)	3754 752.5 8	7.08 (%)	405749 8.2	6.25 (%)	16276 85.9	0 (%)	3804 21.26	0 (%)	1348 65.63	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	51528 6.89	0 (%)	457278 5.09	0 %	122 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan
		1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	70853 9.9	3 (Laporan)	3773 21.26	3 (Laporan)	1412 25.08	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	51854 6.34	6 (Laporan)	518546. 34	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Seksi MRLL serta Keselamatan Jalan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		2. Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	2 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	500000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Seksi MRLL serta Keselamatan Jalan
		3. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	5 (Dokumen)	432445	7 (Dokumen)	1558803.11	5 (Dokumen)	351101	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	1558803.11	140 %	360 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Seksi MRLL serta Keselamatan Jalan
		4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60 (Laporan)	74365.5	38 (Laporan)	45934.3	12 (Laporan)	29988.25	8 (Laporan)	3100	10 (Laporan)	3900	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	18 (Laporan)	7000	56 (Laporan)	52934.3	93.33 %	71%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Seksi MRLL serta Keselamatan Jalan
		5. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	10 (Laporan)	3247942.08	16 (Laporan)	2425004.29	1 (Laporan)	38056.75	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	16 (Laporan)	2425004.29	160 %	75%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		4. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk yang Ditetapkan	100 (%)	1056501.8	100 (%)	886916.3	100 (%)	318425.136	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	886916.3	0 %	84%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan
		1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	199935.2	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Seksi MRLL serta Keselamatan Jalan
		2. Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	10 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	118489.936	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan
		5. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Fasilitas Parkir yang Tersedia dan Berfungsi dengan Baik	100 (%)	21009905.3	100 (%)	11893268.2	100 (%)	4744028.37	100 (%)	937224	100 (%)	1032691.3	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	1969915.3	100 (%)	13863183.5	100 %	66%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Seksi Angkutan Dan Keselamatan Jalan Serta Pengelolaan Pelayaran

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	60 (Laporan)	21009905.3	36 (Laporan)	11893268.2	12 (Laporan)	4744028.37	3 (Laporan)	937224	3 (Laporan)	1032691.3	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	1969915.3	42 (Laporan)	13863183.5	70 %	66%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan
		6. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lulus Uji	95 (%)	5012544.2	99.62 (%)	2478005.16	95 (%)	753413.91	99.23 (%)	25018.5	99.47 (%)	117491	0 (%)	0	0 (%)	0	99.47 (%)	142509.5	99.47 (%)	262051 4.66	104.71 %	52%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan
		1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	18 (Unit)	723255	18 (Unit)	814168.66	18 (Unit)	190000	18 (Unit)	12232	18 (Unit)	27415	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	18 (Unit)	39647	18 (Unit)	853815.66	100 %	118 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Ka. UPTD PKB
		2. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9000 (Unit)	748935.7	8160 (Unit)	333959	9000 (Unit)	105000	2101 (Unit)	0	1914 (Unit)	27062	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	4015 (Unit)	27062	4015 (Unit)	361021	44.61 %	48%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Ka. UPTD PKB

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		3. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000 (Dokumen)	1769900	1200 (Dokumen)	272523	1300 (Dokumen)	66999.91	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	12620	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	12620	0 (Dokumen)	285143	0 %	16%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Ka. UPTD PKB
		4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	18 (Unit)	1425396.3	18 (Unit)	844366.501	18 (Unit)	316414	18 (Unit)	14011.5	18 (Unit)	29754	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	18 (Unit)	43765.5	18 (Unit)	888132.001	100 %	62%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Ka. UPTD PKB
		5. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60 (Laporan)	345057.2	36 (Laporan)	212988	12 (Laporan)	75000	3 (Laporan)	0	3 (Laporan)	5070	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	5070	42 (Laporan)	218058	70 %	63%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Ka. UPTD PKB
		7. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Andalalin yang Terselesaikan	100 (%)	157006.021	100 (%)	38611	100 (%)	15012.5	50 (%)	0	50 (%)	1543	0 (%)	0	0 (%)	0	50 (%)	1543	50 (%)	40154	50 %	26%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	15012.5	3 (Laporan)	0	4 (Laporan)	1543	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	7 (Laporan)	1543	7 (Laporan)	1543	0 %	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kasi MRLL serta Keselamatan Jalan
2		**Program Pengelolaan Pelayaran**	Persentase Kapal yang Memiliki Pas Kapal (%)	70 (%)	247169.198	81.42 (%)	99204.3	78.79 (%)	49000	81.42 (%)	0	81.42 (%)	1230	0 (%)	0	0 (%)	0	81.42 (%)	1230	81.42 (%)	100434.3	116.31 %	41%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalamDaerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di DaerahKabupaten/Kota	Persentase Pas Kapal Yang Terbit	70 (%)	247169.198	81.42 (%)	99204.3	78.79 (%)	49000	244.26 (%)	0	81.42 (%)	1230	0 (%)	0	0 (%)	0	81.42 (%)	1230	81.42 (%)	100434.3	116.31 %	41%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Bidang LLAJ

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun {{ 2025 }} (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	
		1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500 (Dokumen)	247169.198	0 (Dokumen)	99204.3	100 (Dokumen)	49000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1230	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1230	0 (Dokumen)	100434.3	116.31 %	41%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan/Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Jalan serta Pengelolaan Pelayaran
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
	Kerjasama semua pihak pemangku kepentingan guna mewujudkan lingkungan hidup berkualitas dan juga meningkatkan infrastruktur perhubungan																						
	Adanya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup																						
	meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan																						
	Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
	Masih sering ditemukannya buangan sampah domestik pada badan air																						
	Kemarau panjang menyebabkan menurunnya debit air sehingga menurunkan kualitas air																						
	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan menjaga infrastruktur perhubungan yang terbangun																						
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																						
	Mengidentifikasi tingkat capaian yang kurang dan over dari target sebagai bahan acuan penetapan target tahun berikutnya																						
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD berikutnya:																						
	Melakukan evaluasi terhadap realisasi tahunan yang masih rendah dan merumuskan strategi untuk peningkatan realisasi kinerja pada tahun berikutnya																						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebagai pelaksana kewenangan bidang lingkungan hidup dan bidang perhubungan pada dasarnya berfungsi sebagai dinas pelaksana yang bertugas mempertahankan kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Tuban dalam keadaan baik dan aman bagi perikehidupan di dalamnya dan juga meningkatkan konektivitas antar wilayah serta kualitas pelayanan jalan di wilayah Kabupaten Tuban. Kondisi demikian dapat tercermin dari indikator kinerja yang diampu Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

- Analisis Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Perhubungan

  Indikator kinerja urusan lingkungan hidup dan perhubungan antara lain:

  1) Indeks Kualitas Air;
  2) Indeks Kualitas Udara;
  3) Indeks Kualitas Lahan;
  4) Rasio Konektivitas; dan
  5) Tingkat Pelayanan Jalan (LoS).

  Kelima indikator tersebut diatas dimaksudkan untuk dapat menjawab Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sebagaimana tergambarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)											
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		IKA IKU IKL	65.70*	69.03**	74.85	74.94	68.86	69.74	74.85	75.02	
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)			78.00	81.50**	85.35	86.35	81.06	84.35	85.35	86.35	
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif			n/a	24%	623550.08	723550.08	-	5%	623550.08	723550.08	
2.	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan											
1).	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 0 menunjukkan kualitas paling buruk (cemar berat), nilai	-	56.40*	59.86**	75.29	75.39	59.76	58.72	75.29	75.39	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		100 menunjukkan kualitas paling baik (memenuhi baku mutu)										
2).	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 0 sampai dengan 100 Nilai 0 menunjukkan kualitas udara melebihi baku mutu, nilai 100 menunjukkan kualitas absolut (udara tanpa gas pencemar)	-	82.40*	87.09**	80.23	80.33	86.99	89.89	80.23	80.33	
3).	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Skala nilai IKL mulai dari 0 sampai dengan	-	50.8	51.39**	64.16	64.19	50.92	51.39	64.16	64.19	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		100 Nilai 0 menunjukkan kualitas paling buruk (tanpa tutupan lahan), nilai 100 menunjukkan kualitas absolut (seluruh wilayah tertutup hutan)										
4).	Rasio Konektivitas	Nilai 100 menunjukkan seluruh kebutuhan layanan (darat/sungai) perhubungan terpenuhi		68.18	71.36	74.80	76.80	68.92	72.8	74.8	76.8	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5).	Tingkat pelayanan jalan (LoS)	Nilai 100 menunjukkan semua ruas jalan dalam kategori lancar		90%	100%**	100%	100%	100%**	100%	100%	100%	

* berdasarkan Perubahan Target Tahun 2023-2024

** berdasarkan Perubahan Target Tahun 2024-2025

Note: Target 2025-2026 disesuaikan dengan Renstra 2025-2029

- Catatan dan Analisis Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

  Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Tahun 2024, adalah 69,74 (enam puluh sembilan koma tujuh empat) angka ini di dapat dari akumulasi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

  Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

  1) Indeks Kualitas Air (IKA)

     Tidak tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh:

     a. Buangan limbah domestik yang langsung dibuang di sungai;
     b. Terjadi peningkatan timbulan sampah di badan sungai, baik sampah yang terbawa dari arus permukaan air maupun sampah rumah tangga yang dibuang ke badan air (sungai);
     c. Tingginya konsentrat pencemar pada badan air karena kurangnya debit pada badan air akibat kemarau panjang.

  2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

     Tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh:

     a. Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara;
     b. Ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi;
     c. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
     d. Penyediaan Transportasi Publik;
     e. Meningkatnya kegiatan gemar bersepeda (gowes) dan pelaksanaan Car Free.

  3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

     Tercapainya Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam urusan lingkungan hidup dipengaruhi oleh:

     a. Penanaman dan penghijauan yang dilahan terbuka di wilayah Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik swasta/perusahaan, kelompok masyarakat dan pemerintah;
     b. Ketaatan perusahaan dalam penyediaan Ruang terbuka Hijau

di masing-masing lokasi/tapak kegiatan sesuai yang diamanatkan dalam dokumen lingkungan;

c. Pembaruan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan melakukan deleniasi RTH dan update data pada website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

- Catatan dan Analisis Kinerja Urusan Perhubungan

1) Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas merupakan suatu perbandingan yang menunjukkan tercukupinya jumlah trayek yang dihitung berdasarkan kebutuhan trayek yang telah ditetapkan. Hal ini bisa diartikan adanya aksesibilitas antar wilayah di suatu daerah. Adapun capaian untuk rasio konektivitas di Tahun 2024 adalah 72.80 dari target 71.36 atau sekitar 102.02% dari target yang ditetapkan. Angka capaian rasio konektivitas ini menunjukkan bahwa dari 18 trayek angkutan darat yang telah ditetapkan telah terlayani sebanyak 11 trayek, sedangkan untuk trayek angkutan sungai/laut, dari 14 kebutuhan telah terlayani semua. Kerjasama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan Organda dan juga pengusaha angkutan untuk penyediaan angkutan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan sangat mendukung pencapaian kinerja ini. Disamping itu, Guna meningkatkan konektivitas transportasi di kabupaten Tuban, pemerintah kabupaten Tuban mencanangkan pembentukan BLUD Layanan Transportasi.

Rencana pembentukan BLUD Layanan Transportasi merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat penyediaan layanan angkutan umum yang aman, terjangkau, dan merata bagi masyarakat. Pembentukan BLUD ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola transportasi, mendukung pelaksanaan kebijakan subsidi secara efisien, serta memastikan layanan transportasi publik dapat berjalan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah kepada masyarakat. Adapun proses ini diawali dengan penyusunan kajian kelembagaan dan evaluasi jalur trayek untuk selanjutnya dapat

tersusun konsep pengelolaan dan penetapan tarif untuk masyarakat umum.

2) Rasio Jalan dengan Standar APJ Lengkap

Guna memastikan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, adanya alat perlengkapan jalan yang sesuai standar penting untuk dicukupi. Dari target sebesar 40% ketercukupan alat perlengkapan jalan, telah tercapai sebesar 40.96% atau sebesar 102.40% dari target. Tercapainya Ketersediaan Perlengkapan Jalan, hal ini didukung oleh adanya Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebagai bentuk peningkatkan infrastruktur urusan perhubungan.

3) Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan Jalan adalah ukuran kinerja suatu ruas jalan yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas, seperti kecepatan, kepadatan, dan hambatan, serta bagaimana pengemudi merasakan pengalaman berkendara di jalan tersebut. Tingkat Pelayanan Jalan (LoS) ditunjukkan dengan huruf A untuk Kategori Terbaik dan F untuk Kategori Terburuk dengan huruf C sebagai ambang batas ruas jalan dikategorikan lancar. Adapun capaian kinerja untuk Tahun 2024 adalah 100% atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari capaian ini, menunjukkan ruas jalan di Kabupaten Tuban masih dalam kategori lancar, tidak ada hambatan yang berarti bagi kendaraan yang melewati ruas jalan di Kabupaten Tuban. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung dengan adanya program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban, kerjasama dengan pihak yang berkepentingan antara lain dengan pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tuban, pelaku usaha dengan menyediakan area parkir dan pengaturan parkir yang dilakukan dan juga kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Sebagai pelaksana kewenangan bidang lingkungan hidup dan bidang perhubungan pada dasarnya berfungsi sebagai dinas pelaksana yang bertugas mempertahankan kualitas lingkungan di

wilayah Kabupaten Tuban dalam keadaan baik dan aman bagi perikehidupan di dalamnya dan juga meningkatkan konektivitas antar wilayah dam kinerja lalu lintas yang mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Tuban. Guna mendukung tercapainya visi-misi dari Kepala Daerah Kabupaten Tuban, kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tak terlepas dari Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur khususnya pada infrastruktur perhubungan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang berpengaruh dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

a. Urusan Lingkungan Hidup:
   - Terjadinya pencemaran air pada sungai akibat buangan limbah;
   - Terjadinya pencemaran udara akibat gas buang industri, kendaraan bermotor dan lainnya;
   - Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan pencemaran lingkungan;
   - Semakin menurunnya tutupan lahan dan kurangnya upaya konservasi terkait dengan masalah lingkungan hidup serta banyaknya tambang liar yang merusak lingkungan;
   - Masih rendahnya pengelolaan sampah dibandingkan dengan target nasional; dan
   - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

b. Urusan Perhubungan:
   1. Potensi kepadatan jalan raya seiring pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan kemacetan;
   2. Minimnya alat perlengkapan jalan dan penerangan jalan dibandingkan kebutuhan;
   3. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas;
   4. Banyaknya titik-titik parkir liar;
   5. Konektivitas transportasi yang belum memadai dan kurangnya angkutan publik.

Permasalahan dan hambatan diatas terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran penghasil polusi akan bahaya pencemaran lingkungan;
2. Keterbatasan pejabat yang berwenang dalam pengawasan lingkungan hidup daerah;
3. Alih fungsi lahan yang menyebabkan semakin berkurangnya tutupan lahan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah;
5. Kurangnya fasilitas angkutan publik yang nyaman sehingga membuat kendaraan pribadi lebih digemari;
6. Infrastruktur perhubungan yang ada belum merata ke semua wilayah
7. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu-lintas.
8. Kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya akan berdampak pada visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 apabila tidak dilakukan penanganan melalui program dan kegiatan yang akan diselenggarakan, diantara dampak yang mungkin timbul antara lain:

1. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dan capaian SPM yang tertuang didalamnya;
2. Terhambatnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing merata;
3. Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
4. Kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas, baik di level pemerintah maupun masyarakat, bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang memerlukan keahlian khusus atau partisipasi aktif masyarakat.
5. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam proses perencanaan

pembangunan (*bottom-up/top-down*) dalam musrenbang kecamatan belum mencantumkan target dan sasaran yang ingin dicapai dalam program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, oleh karena itu akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

Tantangan dan peluang dalam penanganan isu–isu strategis digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tuban, yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang partisipatif;
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan *bottom-up* sampai pada *top-down*, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
5. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala;
6. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan setiap tahunnya dan juga pembentukan UPTD Persampahan yang diharapkan mampu meningkatkan tata kelola dan pelayanan pada pengelolaan sampah;
8. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta berwawasan lingkungan; dan
9. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama yang menunjang sektor perhubungan.

2.4 *Review* terhadap rancangan P-RKPD

Dari gambaran kondisi makro Kabupaten Tuban saat ini maka

untuk mempercepat penanganan isu strategis diperlukan sebuah tema pembangunan yang fokus pada pencapaian sasaran isu strategis tersebut sehingga nantinya prioritas, arah kebijakan serta strategi pembangunan melalui program dan kegiatan dapat mengarah pada pencapaian sasaran yang tepat. Dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten Tuban yang berpijak pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangun tahun sebelumnya serta tema dan prioritas pembangunan baik Nasional maupun Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 maka Tema Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah: “Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Manusia Unggul serta Potensi Sektor Strategis”.

Melihat tema pembangunan tersebut di atas maka ketersediaan kualitas lingkungan hidup dan perhubungan di wilayah Kabupaten Tuban dalam kondisi yang layak menjadi sarana tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dan kualitas hidup manusia di Kabupaten Tuban akan menjadi lebih baik.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Lembar 1 dari 22

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				134.351.199 .364,21	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				134.351.199. 364,21	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		IKA IKU IKL	75.29 80.23 64.16	56.397.086. 243,71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		IKA IKU IKL	75.29 80.23 64.16	56.397.086.2 43,71	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Lahan Kritis Persentase pencemaran udara Persentase pencemaran air	27.94 59.50 54.00 % % %	2.306.704.3 59,81	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Lahan Kritis Persentase pencemaran udara Persentase pencemaran air	27.94 59.50 54.00 % % %	2.306.704.35 9,81	
2.11.03.2. 01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian, Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup yang tersusun	3 Dokumen	1.472.506.6 47,81	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian, Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup yang tersusun	3 Dokumen	1.472.506.64 7,81	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	575.719.016,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	575.719.016,00	
2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	163.560.000,00	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	163.560.000,00	
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Tuban, Rengel, Ngadirejo	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1 Lokasi	42.815.000,00	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Tuban, Rengel, Ngadirejo	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1 Lokasi	42.815.000,00	
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	71.661.196,00	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	71.661.196,00	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	110 Dokumen	618.751.435,81	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	110 Dokumen	618.751.435,81	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Luasan Lahan yang Tertangani	10 Ha	834.197.712,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Luasan Lahan yang Tertangani	10 Ha	834.197.712,00	
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Tuban, Rengel, Maibit Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Ha	834.197.712,00	Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Tuban, Rengel, Maibit Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Ha	834.197.712,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Luas kawasan KEHATI yang dikelola	9 Ha	127.551.600,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Luas kawasan KEHATI yang dikelola	9 Ha	127.551.600,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah Luas RTH Kabupaten (Ha)	3.1 Ha	127.551.600,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah Luas RTH Kabupaten (Ha)	3.1 Ha	127.551.600,00	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Tuban, Jatirogo, Jatiklabang Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2 Unit	127.551.600,00	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Tuban, Jatirogo, Jatiklabang Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2 Unit	127.551.600,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan	100 %	23.095.027,50	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan	100 %	23.095.027,50	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3		Persentase kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten yang memenuhi ketentuan Persentase kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan	100 %	23.095.027,50	Penyimpanan sementara Limbah B3		Persentase kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten yang memenuhi ketentuan Persentase kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan	100 %	23.095.027,50	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20 Laporan	23.095.027,50	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20 Laporan	23.095.027,50	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	29.23 %	113.198.158,40	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	29.23 %	113.198.158,40	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100 %	113.198.158,40	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100 %	113.198.158,40	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	55.927.697,60	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	55.927.697,60	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	130 Badan Usaha	57.270.460,80	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	130 Badan Usaha	57.270.460,80	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase relawan lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	4.17 %	91.706.250,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase relawan lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	4.17 %	91.706.250,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah relawan lingkungan hidup yang diberikan pembinaan	130 Relawan	91.706.250,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah relawan lingkungan hidup yang diberikan pembinaan	130 Relawan	91.706.250,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	58.249.950,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	58.249.950,00	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 Lembaga	33.456.300,00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 Lembaga	33.456.300,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48 Lembaga	700.324.165,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48 Lembaga	700.324.165,00	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48 Lembaga	700.324.165,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48 Lembaga	700.324.165,00	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48 Lembaga	700.324.165,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48 Lembaga	700.324.165,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100 %	44.227.910,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100 %	44.227.910,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 aduan	44.227.910,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 aduan	44.227.910,00	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	44.227.910,00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	44.227.910,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah - Proporsi Rumah Tanggga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	- 29.53% - 39.2%	27.964.193.600,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah - Proporsi Rumah Tanggga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	- 29.53% - 39.2%	27.964.193.600,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		Jumlah sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah	62106 Ton	27.964.193.600,00	Pengelolaan Sampah		Jumlah sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah	65623 Ton	27.964.193.600,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	8 Kelompok	59.110.000,00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	8 Kelompok	59.110.000,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	370 Unit	15.619.745.400,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	370 Unit	15.619.745.400,00	
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	54750 Ton	1.174.995.000,00	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	54750 Ton	1.174.995.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	71175 Ton	11.110.343.200,00	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	71175 Ton	11.110.343.200,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82.7 Poin	25.026.085.173,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82.7 Poin	25.026.085.173,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	6 Dokumen	107.212.168,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	6 Dokumen	107.212.168,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	72.926.168,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	72.926.168,00	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	34.286.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	34.286.000,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	21.696.493.672,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	21.696.493.672,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 Orang/bulan	21.601.333.672,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 Orang/bulan	21.601.333.672,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	82.248.500,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	82.248.500,00	
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90 Dokumen	2.195.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90 Dokumen	2.195.000,00	
2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	2.195.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	2.195.000,00	
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4.131.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4.131.500,00	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	2.195.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	2.195.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	2.195.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	2.195.000,00	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	1 Layanan	976.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	1 Layanan	976.000,00	
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Layanan	346.083.117,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Layanan	346.083.117,00	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.250.109,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.250.109,00	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	109.998.408,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	109.998.408,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	101.067.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	101.067.700,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.506.400,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.506.400,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	13.180.500,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	13.180.500,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	47.080.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	47.080.000,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jenis	509.836.671,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jenis	509.836.671,00	
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	383.324.320,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	383.324.320,00	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	126.512.351,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	126.512.351,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	1.706.966.944,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	1.706.966.944,00	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	0,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	0,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	363.997.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	363.997.000,00	
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39.524.300,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39.524.300,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.303.445.644,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.303.445.644,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	658.516.601,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	658.516.601,00	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 Unit	449.896.601,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 Unit	449.896.601,00	
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	18.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	18.000.000,00	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	24.530.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	24.530.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	166.090.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	166.090.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		- Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota - Tingkat Pelayanan Jalan (LoS)	74.8 100%	77.954.113.120,50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		- Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota - Tingkat Pelayanan Jalan (LoS)	74.8 100%	77.954.113.120,50	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		VC Ratio rata2	0.28	77.918.494.120,50	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		VC Ratio rata2	0.28	77.918.494.120,50	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	341.364.936,00	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	341.364.936,00	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	287.869.000,00	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	287.869.000,00	
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	53.495.936,00	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	53.495.936,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Rasio jalan dengan standar APJ lengkap	45 %	58.887.859.444,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Rasio jalan dengan standar APJ lengkap	45 %	58.887.859.444,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Kenduruan, Tawaran Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Bangilan, Banjarworo Kab. Tuban, Bancar, Tenggerkulon Kab. Tuban, Senori, Medalem Kab. Tuban, Tambakboyo, Belikanget Kab. Tuban, Singgahan, Mergosari Kab. Tuban, Kerek, Temayang Kab. Tuban, Parengan, Kumpulrejo Kab. Tuban, Montong, Nguluhan Kab. Tuban, Soko, Mojoagung Kab. Tuban, Jenu, Mentoso Kab. Tuban, Merakurak, Tegalrejo Kab. Tuban,	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2000 Unit	27.028.577.190,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Kenduruan, Tawaran Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Bangilan, Banjarworo Kab. Tuban, Bancar, Tenggerkulon Kab. Tuban, Senori, Medalem Kab. Tuban, Tambakboyo, Belikanget Kab. Tuban, Singgahan, Mergosari Kab. Tuban, Kerek, Temayang Kab. Tuban, Parengan, Kumpulrejo Kab. Tuban, Montong, Nguluhan Kab. Tuban, Soko, Mojoagung Kab. Tuban, Jenu, Mentoso Kab. Tuban, Merakurak, Tegalrejo Kab. Tuban, Rengel, Rengel Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2000 Unit	27.028.577.190,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
		Rengel, Rengel Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Palang, Cepokorejo Kab. Tuban, Widang, Minohorejo Kab. Tuban, Grabagan, Ngandong					Kab. Tuban, Palang, Cepokorejo Kab. Tuban, Widang, Minohorejo Kab. Tuban, Grabagan, Ngandong				
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16 Unit	42.136.924,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16 Unit	42.136.924,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7185 Unit	31.817.145.330,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7185 Unit	31.817.145.330,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase wilayah tertib parkir	85 %	5.330.823.464,50	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase wilayah tertib parkir	85 %	5.330.823.464,50	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari Kab. Tuban, Plumpang, Sumberagung	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	5.330.823.464,50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari Kab. Tuban, Plumpang, Sumberagung	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	5.330.823.464,50	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Laik Jalan	99.63 %	691.732.888,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Laik Jalan	99.63 %	691.732.888,00	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	18 Unit	185.609.920,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	18 Unit	185.609.920,00	
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9000 Unit	104.680.000,00	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9000 Unit	104.680.000,00	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1300 Dokumen	57.254.460,00	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1300 Dokumen	57.254.460,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	18 Unit	286.448.958,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	18 Unit	286.448.958,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	57.739.550,00	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	57.739.550,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		jumlah kendaraan yang terlibat laka lantas tahun N	1083	2.053.859.175,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		jumlah kendaraan yang terlibat laka lantas tahun N	1083	2.053.859.175,00	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.236.640.150,00	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.236.640.150,00	
2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	2 Unit	452.282.650,00	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	2 Unit	452.282.650,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	19.352.750,00	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	19.352.750,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	50 Dokumen	323.000.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	50 Dokumen	323.000.000,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	22.583.625,00	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	22.583.625,00	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Andalalin yang terselesaikan	100 %	8.410.000,00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Andalalin yang terselesaikan	100 %	8.410.000,00	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	8.410.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	8.410.000,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase trayek angkutan umum yang aktif (%)	78%	10.604.444.213,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase trayek angkutan umum yang aktif (%)	78%	10.604.444.213,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	10.604.444.213,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	10.604.444.213,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Kapal Yang Memiliki Pas Kapal	83.42 %	35.619.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Kapal Yang Memiliki Pas Kapal	83.42 %	35.619.000,00	
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pas Kapal yang Terbit tepat waktu	83.42 %	35.619.000,00	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pas Kapal yang Terbit tepat waktu	83.42 %	35.619.000,00	
2.15.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	35.619.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	35.619.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wadah untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wadah untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan lapisan masyarakat untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wadah untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dan/atau Gabungan Perangkat Daerah.

Tabel 2 . 3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (Ratio/Ruas Jalan)		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase jalan kabupaten yang memiliki sarana pelengkap jalan yang lengkap		
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia		
1		Kecamatan Grabagan, Kab. Tuban		30 Titik	
2		Kecamatan Widang, Kab. Tuban		1 Paket	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3		Kecamatan Plumpang, Kab. Tuban		30 Titik	
4		Kecamatan Singgahan, Kab. Tuban		30 Titik	
5		Kecamatan Soko, Kab. Tuban		30 Titik	
6		Kecamatan Bancar, Kab. Tuban		20 Titik	
7		Kecamatan Jatirogo, Kab. Tuban		20 Titik	
8		Kecamatan Semanding, Kab. Tuban		20 Titik	
9		Kecamatan Bancar, Kab. Tuban		30 Titik	
10		Kecamatan Palang, Kab. Tuban		30 Titik	
11		Kecamatan Tuban, Kab. Tuban		30 Titik	
12		Kecamatan Jenu, Kab. Tuban		30 Titik	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
13		Kecamatan Parengan, Kab. Tuban		35 Titik	
14		Kecamatan Parengan, Kab. Tuban		40 Titik	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sehingga disusunlah perubahan/penyesuaian pendanaan program sebagai arah dan gerak dalam melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan kondisi dan sumberdaya, serta konsisten mewujudkannya dalam kegiatan yang berkesinambungan.

Selaras dengan tujuan dan sasaran strategis daerah, tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1. Indeks Kualitas Air	75.29
			2. Indeks Kualitas Udara	80.23
			3. Indeks Kualitas lahan	64.16
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kualitas pelayanan jalan	4. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	74.80
			5. Tingkat pelayanan jalan (LoS)	100%

Rencana kerja perubahan yang terwujud dalam program dan kegiatan ini mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Program Daerah Kabupaten Tuban. Adapun program dan kegiatan ini mempunyai indikator kerja yang dapat diukur dan dapat dilaksanakan.

Adapun rumusan (matrik) secara lebih detail terhadap perubahan rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Perubahan Rencana Kerja Program Kegiatan Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					134.351.199.364,21				125.361.262.244,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	IKA IKU IKL		75.29 80.23 64.16	56.397.086.243,71			75.29 80.23 64.16	56.540.477.694,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase Lahan Kritis Persentase pencemaran udara Persentase pencemaran air		27.94 % 59.50 % 54.00 %	2.306.704.359,81			27.94 % 59.50 % 54.00 %	2.298.159.970,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian, Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup yang tersusun		3 Dokumen	1.472.506.647,81			3 Dokumen	1.998.159.970,00
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	575.719.016,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		2 Dokumen	625.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	163.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	350.000.000,00
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab. Tuban, Rengel, Ngadirejo	1 Lokasi	42.815.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Lokasi	98.159.970,00
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	71.661.196,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	125.000.000,00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	110 Dokumen	618.751.435,81	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		110 Dokumen	800.000.000,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup	Luasan Lahan yang Tertangani		10 Ha	834.197.712,00			10 Ha	300.000.000,00
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Terlaksananya rehabilitasi terhadap pencemaran lingkungan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Tuban, Rengel, Maibit Kab. Tuban, Grabagan, Ngrejeng	10 Ha	834.197.712,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Ha	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terkelolanya keanekaragaman hayati	Luas kawasan KEHATI yang dikelola		9 Ha	127.551.600,00			9 Ha	400.000.000,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau	Jumlah Luas RTH Kabupaten (Ha)		3.1 Ha	127.551.600,00			3.1 Ha	400.000.000,00
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kab. Tuban, Jatirogo, Jatiklabang Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	2 Unit	127.551.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Unit	400.000.000,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengelolaanLimbah B3 yang memenuhi ketentuan		100 %	23.095.027,50			100 %	35.000.000,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Meningkatnya Pengelolaan Penyimpanan Limbah B3	Persentase kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten yang memenuhi ketentuan Persentase kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan		100 %	23.095.027,50			100 %	35.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	23.095.027,50	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		20 Laporan	35.000.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH		29.23 %	113.198.158,40			29.23 %	200.000.000,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Persentase Persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		100 %	113.198.158,40			100 %	200.000.000,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	55.927.697,60	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Dokumen	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memenuhi kewajiban pelaporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Badan Usaha	57.270.460,80	Dana Alokasi Umum (DAU)		130 Badan Usaha	125.000.000,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase relawan lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya		4.17 %	91.706.250,00			4.17 %	130.000.000,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan ,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah relawan lingkungan hidup yang diberikan pembinaan		130 Relawan	91.706.250,00			130 Relawan	130.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	58.249.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	80.000.000,00
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Lembaga	33.456.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Lembaga	50.000.000,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		42 Lembaga	700.324.165,00			42 Lembaga	795.000.000,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya motivasi masyarakat dalam berbudaya lingkungan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		42 lembaga	700.324.165,00			42 lembaga	795.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Entitas	700.324.165,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		42 Entitas	795.000.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	terselesaikannya pengaduan lingkungan hidup yang masuk	Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti		100 %	44.227.910,00			100 %	85.000.000,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup yang masuk	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		25 aduan	44.227.910,00			25 aduan	85.000.000,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Pengaduan	44.227.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		25 Pengaduan	85.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	- Meningkatnya Tata Kelola Sampah	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah - Proporsi Rumah Tanggga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		- 29.53% - 39.2%	27.964.193.600,00			- 30.66% - 39.4%	27.465.000.000,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	meningkatnya kapasitas pengolahan sampah	Jumlah sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah		57322 Ton	27.964.193.600,00			62106 Ton	27.465.000.000,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Kelompok	59.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Kelompok	190.000.000,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370 Unit	15.619.745.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		370 Unit	11.625.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	54750 Ton	1.174.995.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		54750 Ton	3.375.000.000,00
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	71175 Ton	11.110.343.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah		71175 Ton	12.275.000.000,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		82.7 Poin	25.026.085.173,00			82.7 Poin	25.132.317.724,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun		6 Dokumen	107.212.168,00			6 Dokumen	159.397.000,00
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	2 Dokumen	72.926.168,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Dokumen	89.000.000,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TerlaksananyaEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	4 Laporan	34.286.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Laporan	70.397.000,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun		9 Laporan	21.696.493.672,00			9 Laporan	22.093.916.354,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	183 Orang/bulan	21.601.333.672,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah		183 Orang/bulan	21.915.503.924,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dengan Perjanjian Kerja			
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	7 Dokumen	82.248.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7 Dokumen	161.988.680,00
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	90 Dokumen	2.195.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		90 Dokumen	2.200.000,00
2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	5 Dokumen	2.195.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 Dokumen	3.734.000,00
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	5 Laporan	4.131.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 Laporan	4.147.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	14 Laporan	2.195.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		14 Laporan	4.142.250,00
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	3 Dokumen	2.195.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Dokumen	2.200.000,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai		1 Layanan	976.000,00			1 Layanan	171.396.000,00
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	1 Paket	976.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Paket	171.396.000,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum		4 Layanan	346.083.117,00			4 Layanan	382.069.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	12 Paket	29.250.109,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Paket	34.889.750,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	12 Paket	109.998.408,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Paket	110.000.000,00
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	3 Paket	101.067.700,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Paket	103.919.350,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	12 Paket	45.506.400,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Paket	50.000.000,00
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	36 Dokumen	13.180.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		36 Dokumen	13.260.000,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	60 Laporan	47.080.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		60 Laporan	70.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah		1 Jenis	509.836.671,00			1 Jenis	0,00
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	1 Unit	383.324.320,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Unit	0,00
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	1 Unit	126.512.351,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Unit	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang		2 Jenis	1.706.966.944,00			2 Jenis	1.742.808.270,00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	30 Laporan	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		30 Laporan	639.900,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	36 Laporan	363.997.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		36 Laporan	374.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	12 Laporan	39.524.300,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Laporan	30.309.300,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	12 Laporan	1.303.445.644,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Laporan	1.337.859.070,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah		3 Jenis	658.516.601,00			3 Jenis	582.731.000,00
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	68 Unit	449.896.601,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		68 Unit	389.651.000,00
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	10 Unit	18.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		10 Unit	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	10 Unit	24.530.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		10 Unit	33.080.000,00
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	3 Unit	166.090.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Unit	140.000.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Tingkat Pelayanan Jalan (LoS)		74.80 100%	77.954.113.120,50			74.80 100%	68.820.784.550,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas	VC Ratio rata2		0,28	77.918.494.120,50			0,28	68.771.784.550,00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan		1 Dokumen	341.364.936,00			1 Dokumen	319.913.136,00
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	287.869.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		2 Dokumen	199.935.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	53.495.936,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		3 Dokumen	119.977.936,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitasi perlengkapan jalan	Rasio jalan yang tercukupi APJ		45 %	58.887.859.444,00			45 %	58.369.499.749,00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Tuban, Kenduruan, Tawaran Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Bangilan, Banjarworo Kab. Tuban, Bancar, Tenggerkulon Kab. Tuban, Senori, Medalem Kab. Tuban, Tambakboyo, Belikanget Kab. Tuban, Singgahan, Mergosari Kab. Tuban, Kerek, Temayang Kab. Tuban, Parengan, Kumpulrejo	2000 Unit	27.028.577.190,00	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain		2000 Unit	26.488.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kab. Tuban, Montong, Nguluhan Kab. Tuban, Soko, Mojoagung Kab. Tuban, Jenu, Mentoso Kab. Tuban, Merakurak, Tegalrejo Kab. Tuban, Rengel, Rengel Kab. Tuban, Semanding, Penambangan Kab. Tuban, Tuban, Sumurgung Kab. Tuban, Plumpang, Bandungrejo Kab. Tuban, Palang, Cepokorejo Kab. Tuban, Widang, Minohorejo Kab. Tuban, Grabagan, Ngandong						
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	42.136.924,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Unit	44.999.749,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7185 Unit	31.817.145.330,00	Pendapatan Bagi Hasil PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain		7185 Unit	31.836.500.000,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Meningkatnya kawasan tertib parkir	Persentase wilayah tertib parkir		85 %	5.330.823.464,50			85 %	4.755.494.365,00
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kebonsari Kab. Tuban, Plumpang, Sumberagung	12 Laporan	5.330.823.464,50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	4.755.494.365,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji yang laik jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Laik Jalan		99.63 %	691.732.888,00			99.63 %	757.000.000,00
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	185.609.920,00	Pendapatan Bagi Hasil		18 Unit	190.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9000 Unit	104.680.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		9000 Unit	105.000.000,00
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1300 Dokumen	57.254.460,00	Pendapatan Bagi Hasil		1300 Dokumen	67.000.000,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	286.448.958,00	Pendapatan Bagi Hasil		18 Unit	320.000.000,00
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	57.739.550,00	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	75.000.000,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Menurunnya Kecelakaan Lalu Lintas	jumlah kendaraan yang terlibat laka lantas tahun N		1083	2.053.859.175,00			1083	1.692.881.900,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.236.640.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	711.839.900,00
2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	452.282.650,00	Pendapatan Bagi Hasil		2 Unit	500.000.000,00
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	19.352.750,00	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	29.988.250,00
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	323.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		50 Dokumen	351.101.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	22.583.625,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	99.952.750,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Andalalin	Persentase Dokumen Andalalin yang terselesaikan		100 %	8.410.000,00			100 %	29.950.000,00
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	8.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		4 Laporan	29.950.000,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah trayek angkutan umum yang aktif	prosentase angkutan umum yang laik jalan		80.26 %	10.604.444.213,00			80.26 %	2.847.045.400,00
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Tuban, Tuban, Sendangharjo	50 Unit	10.604.444.213,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		50 Unit	2.847.045.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pengajuan Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Rencana Pengajuan Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya ketertiban angkutan air yang sesuai standar	Persentase Kapal Yang Memiliki Pas Kapal		83.42 %	35.619.000,00			83.42 %	49.000.000,00
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angkutan sungai dan danau yang laik jalan	Persentase Pas Kapal yang Terbit tepat waktu		83.42 %	35.619.000,00			83.42 %	49.000.000,00
2.15.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan izin pas kapal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	35.619.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		50 Dokumen	49.000.000,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan rencana kerja Tahun 2025 merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang perhubungan dalam rangka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan anggaran tahun 2025 adalah merupakan bentuk operasional yang dapat diukur dengan tercapainya indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup. Dengan tersusunnya perubahan renja tahun 2025 ini dapat dijadikan pijakan dalam pelaksanaan pembangunan dan keberlanjutan pencapaian Indikator Kualitas Lingkungan Hidup dan Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Tuban.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan membawa kemajuan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban, sehingga tercipta Kabupaten Tuban yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, berdaya saing dan berbasis lingkungan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai pedoman masing-masing unit kerja perangkat daerah dan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
c. dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Perhutanan Kabupaten Tuban,

ttd.

ANTHON TRI LAKSONO

Ditetapkan di TUBAN.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan;
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan; dan
d. bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

[illegible]

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 dan PRKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matriks meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari PRKPD.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja, penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Penetapan Perubahan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan PRKPD, karena pada dasarnya PRKPD merupakan rangkuman dari Kumpulan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dikarenakan hal-hal sebagai

berikut:

1. Pergeseran, pengurangan dan penambahan terhadap program/ kegiatan yang mendukung kinerja Perangkat Daerah dan Program/ Kegiatan Kepala Daerah;
2. Sebagai bentuk upaya optimalisasi anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat ll Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Yndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban;
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10).
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 108 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri A Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik dan Persandian Kaupaten Tuban Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya akibat adanya berbagai perubahan kebijakan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kaupaten Tuban Tahun 2025 yaitu :

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKAP-DPPA Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen PRKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Adapun sistematika penulisan dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal PRKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

Untuk menentukan Perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan hasil evaluasi capaian triwulan II Tahun 2025 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2025. Adapun hasil pencapaian triwulan II Tahun 2025 dan perkiraan pencapaian Tahun 2025 akan diurutkan sesuai program.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan Tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian selama 5 tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika serta layanan publik (Urusan Komunikasi dan Informatika)		Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK	100 (%)	39.819.111.804	100 (%)	24.207.499.035	100 (%)	15.671.527.895	100 (%)	1.885.202.202	100 (%)	3.962.162.406					100 (%)	5.826.105.396	100 (%)	35.033.604.431	100 (%)	87.98%	Kepala OPD
			Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 (%)	0	95.24 (%)	5.097.151.725	100 (%)	0	52.38 (%)	0	52.38 (%)	0					52.38 (%)	0	52.38 (%)	5.097.151.725	52.38 %	0 %	Kepala OPD
			Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	75 (%)	0	92.59 (%)	0	85 (%)	0	0 (%)	0	75 (%)	0					75 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0 %	Kepala OPD
1		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20 (%)	6.138.888.386	39.39 (%)	6.916.751.010	20 (%)	5.348.201.616	25 (%)	57.834.286	37.5 (%)	1.996.978.140					37,5 (%)	2.054.812.426	25 (%)	8.971.563.430	125 %	146.14 %	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik**	**75 (%)**	**6.138.888.386**	**48.57 (%)**	**3.709.427.736**	**65 (%)**	**5.348.201.616**	**25 (%)**	**57.834.286**	100 (%)	1.996.978.140					125 (%)	2.054.812.426	25 (%)	5.764.240.162	33.33 %	93.9%	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
		1. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	**Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**0 (Perangkat Daerah)**	**0**	**0 (Perangkat Daerah)**	**0**	**42 (Perangkat Daerah)**	**3.848.200.000**	**0 (Perangkat Daerah)**	**24.468.000**	42 (Perangkat Daerah)	1.956.083.340					42 (Perangkat Daerah)	1.980.551.340	0	1.980.551.340	0 %	0 %	

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				9Perangkat Daerah)				
		2. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	0 (Layan)	0	0 (Layanan)	0	1 (Layanan)	87.920.601	0 (Layan)	7.950.000	1 (Layanan)	5.300.000					1 (Layanan)	13.250.000	0 (Layan)	13.250.000	0 %	0 %	
		3. Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	75.000.000	0 (Dokumen)	2.550.000	0 (Dokumen)	0					0 (Dokumen)	2.550.000	0 (Dokumen)	2.550.000	0 %	0 %	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
		4. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	105.381.870	0 (Dokumen)	2.352.500	1 (Dokumen)	18.000.000					1 (Dokumen)	20.352.500	0 (Dokumen)	20.352.500	0 %	0 %	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
		5. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	23.804.989	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0					1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	**Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE**	**0 (Dokumen)**	**0**	**0 (Dokumen)**	**0**	**1 (Dokumen)**	**75.000.000**	**0 (Dokumen)**	**13.760.500**	0 (Dokumen)	1.485.000					0 (Dokumen)	15.245.500	0 (Dokumen)	15.245.500	0 %	0 %	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
		7. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	**Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah**	**0 (Dokumen)**	**0**	**0 (Dokumen)**	**0**	**1 (Dokumen)**	**53.348.185**	**0 (Dokumen)**	**1.285.000**	0 (Dokumen)	0					0 (Dokumen)	1.285.000	0 (Dokumen)	1.285.000	0 %	0 %	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
		8. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	**Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas**	**0 (Unit)**	**0**	**0 (Unit)**	**0**	**4 (Unit)**	**42.272.985**	**0 (Unit)**	**0**	4 (Unit)	0					4 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
		9. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	**Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas**	**0 (Kegiatan)**	**0**	**0 (Kegiatan)**	**0**	**1 (Kegiatan)**	**42.272.986**	**0 (Kegiatan)**	**4.200.006**	0 (Kegiatan)	1.370.000					0 (Kegiatan)	5.570.006	0 (Kegiatan)	5.570.006	0 %	0 %	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
		10. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan	**Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah**	**0 (Aplikasi)**	**0**	**0 (Aplikasi)**	**0**	**4 (Aplikasi)**	**920.000.000**	**0 (Aplikasi)**	**1.268.280**	2 (Aplikasi)	12.089.800					2 (Aplikasi)	13.358.080	0 (Aplikasi)	13.358.080	0 %	0 %	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah																						
		11. Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	**0 (Laporan)**	**0**	**0 (Laporan)**	**0**	**1 (Laporan)**	**75.000.000**	**0 (Laporan)**	**0**	0 (Laporan)	0					0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
2		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	Persentase Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	**0 (%)**	**0**	**0 (%)**	**0**	**100 (%)**	**272.910.640**	**52.38 (%)**	**77.364.200**	52.38 (%)	18.716.000					52.38 %	96.080.200	52.38 (%)	96.080.200	0 %	0 %	KEPALA OPD
		1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kompilasi Statistik yang dilakukan	**75 (%)**	**3.207.594.842**	**85.71 (%)**	**912.770.943**	**50 (%)**	**272.910.640**	**16.67 (%)**	**77.364.200**	33.33 (%)	18.716.000					33.33 (%)	96.080.200	16.67 %	1.008.851.143	22.23 %	31.45 %	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
		1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Pegawai di Bidang Statistik	**0 (Orang)**	**0**	**0 (Orang)**	**0**	**328 (Orang)**	**53.183.000**	**0 (Orang)**	**825.000**	138 (Orang)	1.750.000					138 (Orang)	2.575.000	0 (Orang)	2.575.000	0 %	0 %	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	**0 (%)**	**0**	**0 (%)**	**0**	**50 (%)**	**43.291.820**	**0 (%)**	**0**	50 (%)	1.053.000					50 (%)	1.053.000	0(%)	1.053.000	0 %	0 %	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
		3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	**0 (Dokumen)**	**0**	**0 (Dokumen)**	**0**	**1 (Dokumen)**	**160.197.000**	**0 (Dokumen)**	**74.725.200**	0 (Dokumen)	15.913.000					0 (Dokumen)	90.638.200	0 (Dokumen)	90.638.200	0%	0 %	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSNDIAN
		4. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	**0 (Doku**	**0**	**0 (Dokumen)**	**0**	**1 (Dokumen)**	**16.238.820**	**0 (Doku**	**0**	3 (Dokumen)	0					3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sektoral Sesuai Standar		men)						men)														PERSANDIAN
3		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	Tingkat keamanan informasi pemerintah	**0 (%)**	**0**	**0 (%)**	**0**	**70 (%)**	**235.107.903**	**0 (%)**	**2.335.500**	0 (%)	0					0 (%)	2.335.500	0 %	2.335.500	0 %	0 %	KEPALA OPD
		1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	**75 (%)**	**651.224.906**	**100 (%)**	**413.390.730**	**70 (%)**	**235.107.903**	**25 (%)**	**2.335.500**	100 (%)	0					125 %	2.335.500	25 %	415.726.230	33.33 %	63.64 %	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
		1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	**0 (Dokumen)**	**0**	**0 (Dokumen)**	**0**	**1 (Dokumen)**	**184.986.378**	**0 (Dokumen)**	**825.000**	0 (Dokumen)	0					0 (Dokumen)	825.000	0 (Dokumen)	825.000	0 %	0 %	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	**0 (Laporan)**	**0**	**0 (Laporan)**	**0**	**1 (Laporan)**	**50.121.525**	**1 (Laporan)**	**1.510.500**	1 (Laporan)	0					1 (Laporan)	1.510.500	1 (Laporan)	1.510.500	0 %	0 %	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
E	Penunjang																							

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daeah	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	81.5 (Poin)	9.815.307.736	0 (Poin)	1.747.668.216	0 (Poin)	1.925.209.054					0 (Poin)	3.672.877.270	0 (Poin)	3.672.877.270	0 %	0 %	KEPALA OPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	25 (Akta)	144.454.581	1 (Akta)	492.907.440	0 (Akta)	266.395.639	0 (Akta)	0	0 (Akta)	0					0 (Akta)	0	0 (Akta)	492.907.440	0 %	341.22 %	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	10 (Unit)	266.395.639	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0					0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
		2. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	116.037.900	3 (Dokumen)	7.667.000	14 (Dokumen)	5.384.000					17 (Dokumen)	13.051.000	3 (Dokumen)	13.051.000	0 %	0 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 (Dokumen)	230.000.000	4 (Dokumen)	72.071.620	5 (Dokumen)	92.685.400	0 (Dokumen)	6.727.000	6 (Dokumen)	2.123.000					6 (Dokumen)	8.850.000	0 (Dokumen)	80.921.620	0 %	35.18 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 (Laporan)	226.160.999	7 (Laporan)	60.867.000	5 (Laporan)	23.352.500	0 (Laporan)	940.00	6 (Laporan)	3.261.000					6 (Laporan)	4.201.000	0 (Laporan)	65.068.000	0 %	28.77 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	45 (Dokumen)	19.603.281.970	4 (Dokumen)	9.637.031.630	9 (Dokumen)	7.656.797.967	3 (Dokumen)	1.438.243.062	9 (Dokumen)	1.602.051.455					12 (Dokumen)	3.040.294.517	3 (Dokumen)	12.677326.147	6.67 %	64.67 %	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**15 (Dokumen)**	**280.900.258**	**5 (Dokumen)**	**43.706.211**	**3 (Dokumen)**	**22.342.000**	**0 (Dokumen)**	**7.090.800**	0 (Dokumen)	2.018.300					0 (Dokumen)	9.109.100	0 (Dokumen)	52.815.311	0 %	18.8 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**0 (Orang/Bulan)**	**0**	**0 (Orang/Bulan)**	**0**	**31 (Orang/Bulan)**	**7.572.055.967**	**31 (Orang/Bulan)**	**1.420.577.262**	31 (Orang/Bulan)	795.597.420					31 (Orang/Bulan)	2.216.174.682	31 (Orang/Bulan)	2.216.174.682	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**0 (Dokumen)**	**0**	**0 (Dokumen)**	**0**	**12 (Dokumen)**	**62.400.000**	**3 (Dokumen)**	**10.575.000**	14 (Dokumen)	8.925.000					17 (Dokumen)	19.500.000	3 (Dokumen)	19.500.000	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai**	**400 (Orang)**	**11.579.490.815**	**16 (Orang)**	**168.716.436**	**80 (Orang)**	**80.502.905**	**20 (Orang)**	**0**	20 (Orang)	0					20 (Orang)	0	20 (Orang)	168.716.436	5 %	1,46 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	**0 (Paket)**	**0**	**0 (Paket)**	**0**	**80 (Paket)**	**42.320.000**	**0 (Paket)**	**0**	0 (Paket)	0					0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi**	**34 (Orang)**	**41.712.160**	**16 (Orang)**	**37.263.000**	**0 (Orang)**	**38.182.905**	**0 (Orang)**	**0**	0 (Paket)	0					0 (Paket)	0	0 (Paket)	37.263.000	0 %	89.33 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 (Layanan)	1.009.716.500	5 (Layanan)	807.211.483	5 (Layanan)	312.205.841	1 (Layanan)	23.369.000	4 (Layanan)	34.181.251					5 (Layanan)	57.550.251	1 (Layanan)	864.761.734	20 %	85.64 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	6 (Paket)	10.254.000	1 (Paket)	1.010.500	6 (Paket)	865.000					7 (Paket)	1.875.500	1 (Paket)	1.875.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	36.636.011	0 (Paket)	2.518.500	4 (Paket)	10.362.051					4 (Paket)	12.880.551	0 (Paket)	12.880.551	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	180 (Paket)	200.000.000	70 (Paket)	97.478.208	36 (Paket)	49.709.150	0 (Paket)	2.833.000	1 (Paket)	1.140.000					1 (Paket)	3.973.000	0 (Paket)	101.451.208	0 %	50.73 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 (Paket)	80.000.000	2 (Paket)	57.488.750	2 (Paket)	28.750.000	0 (Paket)	790.000	2 (Paket)	1.956.250					2 (Paket)	2.746.250	0 (Paket)	60.235.000	0 %	75.29 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	36 (Laporan)	174.025.800	2 (Laporan)	15.637.000	12 (Laporan)	12.463.200					14 (Laporan)	28.100.200	2 (Laporan)	28.100.200	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2160 (Dokumen)	12.830.880	96 (Dokumen)	580.000	127 (Dokumen)	2.146.000					223 (Dokumen)	2.726.000	96 (Dokumen)	2.726.000	0 %	0 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	**20 (Jasa)**	**1.605.296.245**	**4 (Jasa)**	**2.272.167.967**	**4 (Jasa)**	**1.117.966.123**	**1 (Jasa)**	**241.324.154**	4 (Jasa)	235.735.148					5 (Jasa)	477.059.302	1 (Jasa)	2.749.227.269	5 %	171.26 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**60 (Laporan)**	**100.000.000**	**12 (Laporan)**	**56.158.000**	**12 (Laporan)**	**41.324.400**	**1 (Laporan)**	**8.575.000**	13 (Laporan)	4.375.000					14 (Laporan)	12.950.000	1 (Laporan)	69.108.000	1.67 %	69.11%	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	**60 (Laporan)**	**113.556.335**	**12 (Laporan)**	**39.054.500**	**12 (Laporan)**	**3.270.400**	**0 (Laporan)**	**550.000**	11 (Laporan)	0					11 (Laporan)	550.000	0 (Laporan)	39.604.500	0 %	34.88 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**0 (Laporan)**	**0**	**0 (Laporan)**	**0**	**12 (Laporan)**	**311.054.133**	**3 (Laporan)**	**53.437.678**	15 (Laporan)	34.775.242					18 (Laporan)	88.212.920	3 (Laporan)	88.212.920	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**60 (Laporan)**	**256.750.500**	**12 (Laporan)**	**1.561.448.264**	**12 (Laporan)**	**762.317.190**	**3 (Laporan)**	**178.761.476**	15 (Laporan)	180.057.192					18 (Laporan)	358.818.668	3 (Laporan)	1.920.266.932	5 %	747.91 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	**250 (Unit)**	**1.089.483.250**	**49 (Unit)**	**565.788.660**	**50 (Unit)**	**265.401.361**	**10 (Unit)**	**37.065.000**	30 (Unit)	47.632.200					40 (Unit)	84.697.200	10 (Unit)	650.485.860	4 %	59.71 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya emeliharaan, pajak dan perizinan endaraa dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	26 (Unit)	92.422.495	2 (Unit)	19.875.000	15 (Unit)	21.265.000					15 (Unit)	41.140.000	2 (Unit)	41.140.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	25 (Unit)	50.000.000	7 (Unit)	29.945.000	5 (Unit)	14.960.000	0 (Unit)	1.950.000	2 (Unit)	0					2 (Unit)	1.950.000	0 (Unit)	31.895.000	0 %	63.79 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 (Unit)	300.000.000	11 (Unit)	147.372.300	1 (Unit)	66.213.566	1 (Unit)	7.125.000	1 (Unit)	19.367.200					1 (Unit)	26.492.200	1 (Unit)	173.864.500	20 %	57.95 %	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	56 (Unit)	314.703.750	1 (Unit)	187.245.300	56 (Unit)	91.805.300	8 (Unit)	8.115.000	24 (Uniy)	6.250.000					32(Unit)	14.365.000	8 (Unit)	201.610.300	14.29 %	64.06%	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	90.01 (Poin)	8.968.564.309	99.12 (Poin)	8.505.260.521	90.5 (Poin)	2.655.320.852	0 (Poin)	183.297.863	100 (%)	3.940.903.194					0 (Unit)	5.826.105.396	0 (%)	8.924.854.876	0 %	99.51 %	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATIS

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																								TIK PERSANDIAN
1		Program Pengelolaan Informsi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	100 (%)	8.968.554.309	99.12 %	8.505.260.521	95 %	2.655.320.852	0 (%)	183.297.863	33,33 (%)	236.296.492					33.33 (Poin)	419.594.355	0 %	8.924.854.876	0 %	99.51 %	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase desinitasi dan Layanan Informasi public yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100 %	8.968.564.309	76 (%)	8.505.260.521	80 (%)	2.658.320.852	33.33 (%)	183.297.863	33,33 (%)	236.296.492					33.33 (%)	419.594.355	33.33 (%)	8.924.854.876	33.33 %	99.51 %	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokuman Hasil Pelayanan Infornasi Publik	25 (Dokumen)	1.019.781.809	85 (Dokumen)	1.591.980.008	5 (Dokumen)	250.585.856	1 (Dokumen)	1.630.000	4 (Dokumen)	65.991.000					5 (Dokumen)	67.621.000	1 (Dokumen)	1.659.601.008	4 %	162.74 %	JF PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		Pengelola Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Penerbitan Informasi	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	0	0 (Unit)	o	3 (Unit)	0					3 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	JF PRANATA HUMAS AHLI MUDA
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4000 (Dokumen)	4.104.111.000	23998 (Dokumen)	2.007.831.721	24000 (Dokumen)	1.223.960.783	6000 (Dokumen)	43.019.000	7800 (Dokumen)	79.999.254					13800 (Dokumen)	123.018.254	6000 (Dokumen)	2.130.849.975	150 %	51.92%	JF PRANATA HUMAS AHLI MUDA
		Relasi Media	Jumlah aktifitas relasi media yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1. Terverivikasi dengan pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktid dalam kegiatan relasi media	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	160 (Laporan)	893.548.089	8 (Laporan)	123.420.863	80 (Laporan)	84.576.238					88 (Laporan)	207.997.101	8 (Laporan)	207.997.101	0 %	0 %	JF PRANATA HUMAS AHLI MUDA

Formulir E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN PERIODE PELAKSANAAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Terget Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025/		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6=12		14=(13/5) X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kemitraana Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Pembinaan kelompok informasi masyarakat	0 (Kelompok)	0	0 (Kelompok)	0	20 (Kelompok)	287.226.124	0 (Kelompok)	0	10 (Kelompok)	5.730.000					10 (Kelompok)	5.730.000	0 (Kelompok)	5.730.000	0 (Kelompok)	0 %	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										50														
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat rendah														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										33.33														
Predikat kinerja kegiatan										Sangat rendah														
Rata-rata capaian kinerja program(%)										0														
Predikat kinerja program										Sangat rendah														
Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)										100														
Predikat kinerja sasaran										Sangat tinggi														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
1. Tersedianya anggaran dan juga SDM yang memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1. Tersedianya anggaran dan juga SDM yang memadai
2. Tersedianya anggaran dan juga SDM yang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
1. Mengoptimalkan realisasi kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya
2. Melakukan percepatan pekerjaan yang terkait dengan target kinerja yang belum berjalan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban. Untuk melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban meliputi :

a. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK, merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan sistem informasi dan database dalam rangka mengimplementasikan *e-Government* dan layanan publik berbasis TIK yang diintegrasikan dengan aplikasi pelayanan publik berbasis *website*.

b. PENERAPAN TATA KELOLA TIK, dalam hal ini Pemeringkatan *e-Government* merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:
   1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.
   2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan objektif.
   3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.

c. FASILITASI *COLOCATION* DAN *HOSTING*, merupakan pelayanan teknis kepada Perangkat Daerah Kabupaten Tuban dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik.

d. SATU DATA INDONESIA adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

e. KEAMANAN INFORMASI, untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Kabupaten Tuban, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan.

f. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitar.

g. SEPASI (Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal) merupakan Aplikasi untuk mengelola arsip surat perkantoran secara elektronik melalui aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis *mobile android.*

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)	-	-	4,29	1,81	1,91	2,01	2,1	2,21	-	-	4,29	1,81	
2.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	66,99	68,08	70,81	80,07	81,7	87,15	-	-	66,99	68,08	
3.	Tingkat Pembangunan Statistik	-	-	2,45	2,65	2,85	3	3,1	3,2	-	-	2,45	2,65	
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	-	-	89,89	90,39	90,89	91,39	91,89	92,39	-	-	89,89	90,39	

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban telah melaksanakan Digitalisasi layanan publik dan integrasi aplikasi untuk mentransformasi pelayanan dari manual ke digital, serta menyatukan berbagai layanan dalam satu platform untuk kemudahan akses dan efisiensi diantaranya layanan Pengelolaan Data Kesehatan Pasien secara Elektronik, Layanan Pajak Terintegrasi, Tuban Satu Data (data.tubankab.go.id), Layanan Perizinan (Tuban *Online Single Submission*), Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi (SIMPATDA), Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan secara Online.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban juga telah melaksanakan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat baik melalui media cetak, media massa, media elektronik dan media sosial serta telah dilaksanakan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) guna mendukung penyebaran informasi.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola data statistik berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban telah melaksanakan program pendampingan Desa Cinta Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban telah membentuk tim tanggap insiden siber (CSIRT) dalam rangka mengoptimalkan keamanan jaringan TIK yang bertugas untuk mencegah, mendeteksi, menganalisis, dan merespons insiden keamanan siber di suatu organisasi atau wilayah tertentu.

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, isu strategis yang harus diperhatikan dalam Perencanaan Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya;

2. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri;
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional;
4. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database Perangkat Daerah;
5. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi Masyarakat; dan
6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK.

Pemecahan masalah yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah:

1. Meningkatkan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Tuban;
2. Meningkatkan penerbitan media informasi;
3. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi publik;
4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang;
5. Mengelola situs web Perangkat Daerah secara terpusat dan aplikasi layanan informasi publik; dan
6. Menyelenggarakan reportase dan relai pelaksanaan pemerintah dan Pembangunan dan acara khusus serta acara dialog interaktif dengan tema pembangunan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal P-RKPD

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melakukan reviu terhadap rancangan awal P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Rancangan Awal P-RKPD dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Reviu terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tuban

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	8.620.986.800	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	8.620.986.800,60	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	12 Dokumen	92.275.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	12 Dokumen	92.275.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	76.342.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	76.342.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.932.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.932.500	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	6.517.256.797	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	6.517.256.797	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6.434.514.797	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6.434.514.797	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	62.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	62.400.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20.342.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20.342.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 Orang	19.976.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 Orang	19.976.000	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	19.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	19.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribu Kelengkapannya	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	218.081.492	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Layanan Administrasi Umum	5 Layanan	218.081.492	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.254.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.254.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.415.511	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.415.511	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.709.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.709.150	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.125.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.125.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan yang disediakan	1476 Dokumen	12.830.880	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan yang disediakan	1476 Dokumen	12.830.880	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	79.746.951	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	79.746.951	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Pengadaan BMD	26 unit	379.107.975,58	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Pengadaan BMD	26 unit	379.107.975,58	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disedika	32 unit	379.107.975,58	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disedika	32 unit	379.107.975,58	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	1.128.887.975,02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	1.128.887.975,02	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.481.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.481.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	311.054.133	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	311.054.133	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.772.752,02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.772.752,02	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	757.579.590	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	757.579.590	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Pemeliharaan BMD	50 Unit	265.401.361	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Pemeliharaan BMD	50 Unit	265.401.361	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	66.213.566	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	66.213.566	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	20 Unit	92.422.495	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	20 Unit	92.422.495	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	14.960.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	14.960.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	91.805.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	91.805.300	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Tuban, Sidorejo	Nilai PPID	85,86 Poin	1.959.904.317,40	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Tuban, Sidorejo	Nilai PPID	85,86 Poin	1.959.904.317,40	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan	80 %	1.959.904.317,40	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan	80 %	1.959.904.317,40	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			SOP yang telah ditetapkan					SOP yang telah ditetapkan			
	Relasi Media	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi mediapenerbitan informasi	160 Laporan	490.574.904	Relasi Media	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi mediapenerbitan informasi	160 Laporan	490.574.904	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	162.775.604	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	162.775.604	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	156.955.218,40	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	156.955.218,40	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	1.149.598.591	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	1.149.598.591	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah yang Diselenggarakan secara Digital	48,39 %	7.910.822.798,50	Program Aplikasi Informatika	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah yang Diselenggarakan secara Digital	48,39 %	7.910.822.798,50	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektroni	65%	7.910.822.798,50	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektroni	65%	7.910.822.798,50	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	41.949.000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	41.949.000	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumer	22.934.354	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumer	22.934.35	
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE	1 Dokumer	91.776.875	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE	1 Dokumer	91.776.87	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pemerintah daerah					pemerintah daerah			
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	6 Dokumen	45.300.000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah dokume arsitektur SPB Pemerintah Daera yang memuat domain arsitektu dan peta rencan yang diusulkan	6 Dokume	45.300.00	
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	45.300.000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokume	45.300.00	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	4 Aplikasi	1.302.650.667,50	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	4 Aplikas	1.302.650.667,5	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	24.745.400	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah dokume usulan rencan dan anggara SPBE Pemerinta Daerah yang tela dikonsultasikan dengan seluru Perangkat Daera dan disampaika kepada Perangka Daerah yan membidangi perencanaan pembangunan daerah da Perangkat Daera yang membidan anggaran da keuangan daerah	1 Dokume	24.745.40	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota	4 Unit	20.574.992	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi progra Kabupaten/Kota Cerdas	4 Unit	20.574.99	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Cerdas								
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 Perangkat Daerah	6.233.200.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 Perangka Daerah	6.233.200.00	
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	58.246.617	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	58.246.61	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	24.144.893	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	24.144.89	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyusun Data Statistik Sektoral yang Sesuai Standar	16,67 %	188.516.570	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyusun Data Statistik Sektoral yang Sesuai Standar	16,67 %	188.516.57	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase Kompilasi Statistik yang dilakukan	50%	188.516.570	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase Kompilasi Statistik yang dilakukan	50%	188.516.57	
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di	328 Orang	27.441.500	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di	328 Orang	27.441.50	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			bidang statistic					bidang statistik			
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 %	19.547.500	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 %	19.547.50	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	133.104.410	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokume	133.104.41	
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	8.423.160	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	8.423.16	
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kab. Tuban, Sidorejo	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	615 Indeks	61.117.612,50	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kab. Tuban, Sidorejo	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	615 Indeks	61.117.612,50	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem	70%	61.117.612,50	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kab. Tuban, Sidorejo	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem	70%	61.117.612,5	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikas Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	52.872.500	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	52.872.50	
	Pelaksanaan Keamanan	Kab. Tuban,	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	50.121.525	Pelaksanaan Keamanan	Kab. Tuban,	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	50.121.52	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sidorejo	Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan No Elektronik			Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sidorejo	Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Musrenbang yang telah dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Tuban, tidak didapati usulan dari masyarakat yang mengarah pada Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban. Dengan demikian hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah nihil.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tuban

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Tuban

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Kab. Tuban, Sidorejo		18.491.713.916,5	Dana Alokasi Umum			18.491.713.916,5
2.16.01	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	81,35 Poin	8.620.986.800,6	Dana Alokasi Umum		81,35 Poin	8.620.986.800,6
2.16.01.2.01	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi yang tersusu	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Dokumen	92.275.200	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	92.275.200

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perangkat Daerah									
2.16.01.2.01.001	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	6 Dokumen	76.342.700	Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	76.342.700
2.16.01.2.01.007	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	6 Laporan	15.932.500	Dana Alokasi Umum		6 Laporan	15.932.500
2.16.01.2.02	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kab. Tuban, Sidorejo	9 Dokumen	6.517.256.797	Dana Alokasi Umum		9 Dokumen	6.517.256.797
2.16.01.2.	Terlaksananya	Penyediaan gaji	Jumlah	Kab. Tuban,	40	6.434.514.797	Dana		40	6.434.514.797

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidorejo	Orang/bulan		Alokasi Umum		Orang/bulan	
2.16.01.2.02.002	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	62.400.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	62.400.000
2.16.01.2.02.004	Terlaksananya Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	20.342.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.342.000
2.16.01.2.02.05	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan	Kab. Tuban, Sidorejo	80 Orang	19.976.000	Dana Alokasi Umum		80 Orang	19.976.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perangkat Daerah		Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai							
2.16.01.2.05.009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tuban, Sidorejo	40 Orang	19.000.000	Dana Alokasi Umum		40 Orang	19.000.000
2.16.01.2.05.002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Paket	976.000	Dana Alokasi Umum		1 Paket	976.000
2.16.01.2.06	Terlaksananya Administrasi	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Layanan	Kab. Tuban, Sidorejo	5 Layanan	218.081.492	Dana Alokasi		5 Laya	218.081.492

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Umum Perangkat Daerah	Daerah	Pengadaan Administrasi Umum				Umum		nan	
2.16.01.2.06.001	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Paket	10.254.000	Dana Alokasi Umum		12 Paket	10.254.000
2.16.01.2.06.002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Paket	45.415.511	Dana Alokasi Umum		12 Paket	45.415.511
2.16.01.2.06.004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Kab. Tuban, Sidorejo	3 Paket	49.709.150	Dana Alokasi Umum		3 Paket	49.709.150

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Disediakan							
2.16.01.2.06.005	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Paket	20.125.000	Dana Alokasi Umum		12 Paket	20.125.000
2.16.01.2.06.006	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan yang disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	1476 Dokumen	12.830.880	Dana Alokasi Umum		1476 Dokumen	12.830.880
2.16.01.2.06.009	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Tuban, Sidorejo	36 Laporan	79.746.951	Dana Alokasi Umum		36 Laporan	79.746.951

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Konsultasi SKPD							
2.16.01.2.07	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	Kab. Tuban, Sidorejo	26 unit	379.107.975,58	Dana Alokasi Umum		26 unit	379.107.975,58
2.16.01.2.07.006	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disedika	Kab. Tuban, Sidorejo	32 unit	379.107.975,58	Dana Alokasi Umum		32 unit	379.107.975,58
2.16.01.2.08	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Tuban, Sidorejo	4 Jasa	1.128.887.975,02	Dana Alokasi Umum		4 Jasa	1.128.887.975,02

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah									
2.16.01.2.08.001	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Laporan	1.481.500	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.481.500
2.16.01.2.08.002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Laporan	311.054.133	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	311.054.133
2.16.01.2.08.003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Laporan	58.772.752,02	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	58.772.752,02

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Disediakan							
2.16.01.2.08.004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Laporan	757.579.590	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	757.579.590
2.16.01.2.09	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	Kab. Tuban, Sidorejo	50 Unit	265.401.361	Dana Alokasi Umum		50 Unit	265.401.361
2.16.01.2.09.001	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Unit	66.213.566	Dana Alokasi Umum		1 Unit	66.213.566

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
2.16.01.2.09.002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tuban, Sidorejo	20 Unit	92.422.495	Dana Alokasi Umum		20 Unit	92.422.495
2.16.01.2.09.005	Terlaksananya Pemeliharaan	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	Kab. Tuban, Sidorejo	10 Unit	14.960.000	Dana Alokasi		10 Unit	14.960.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Mebel		Dipelihara				Umum			
2.16.01.2.09.006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Sidorejo	56 Unit	91.805.300	Dana Alokasi Umum		56 Unit	91.805.300
2.16.02	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai PPID	Kab. Tuban, Sidorejo	95,86 Poin	1.959.904.317,40	Dana Alokasi Umum		95,86 Poin	1.959.904.317,40
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi	Kab. Tuban, Sidorejo	80 %	1.959.904.317,40	Dana Alokasi Umum		80 %	1.959.904.317,40

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan							
2.16.02.2.01.014	Terlaksananya Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam	Kab. Tuban, Sidorejo	160 Laporan	490.574.904	Dana Alokasi Umum		160 Laporan	490.574.904

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			kegiatan relasi mediapenerbitan informasi							
2.16.02.2.01.015	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Tuban, Sidorejo	20 Komunitas	162.775.604	Dana Alokasi Umum		20 Komunitas	162.775.604
2.16.02.2.01.017	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai	Kab. Tuban, Sidorejo	12 Permohonan	156.955.218,40	Dana Alokasi Umum		12 Permohonan	156.955.218,40

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			peraturan perundangan							
2.16.02.2.01.021	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Tuban, Sidorejo	3 Media	1.149.598.591	Dana Alokasi Umum		3 Media	1.149.598.591
2.16.03	Meningkatnya Digitalisasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah	Kab. Tuban, Sidorejo	48,39 %	7.910.822.798,50	Dana Alokasi Umum		48,39 %	7.910.822.798,50

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintah Daerah		Daerah yang Diselenggarakan secara Digital							
2.16.03.2.02	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Kab. Tuban, Sidorejo	65%	7.910.822.798,50	Dana Alokasi Umum		65%	7.910.822.798,50
2.16.03.2.02.015	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Laporan	41.949.000	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	41.949.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			di lingkungan Pemda							
2.16.03.2.02.016	Tersedianya dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	22.934.354	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	22.934.354
2.16.03.2.02.017	Tersedianya data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	91.776.875	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	91.776.875

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.03.2.02.018	Tersedianya dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Kab. Tuban, Sidorejo	6 Dokumen	45.300.000	Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	45.300.000
2.16.03.2.02.019	Tersedianya Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	45.300.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	45.300.000
2.16.03.2.	Terlaksanya pembangunan	Pembangunan dan/atau	Jumlah aplikasi	Kab. Tuban, Sidorejo	4 Aplikasi	1.302.650.667,50	Dana Alokasi		4 Aplik	1.302.650.667,50

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.020	dan pengembangan aplikasi khusus yang sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				Umum		asi	
2.16.03.2.02.022	Tersedianya dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	24.745.400	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	24.745.400

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah							
2.16.03.2.02.023	Terlaksananya sosialisasi program	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah perangkat daerah yang	Kab. Tuban, Sidorejo	4 Unit	20.574.992	Dana Alokasi Umum		4 Unit	20.574.992

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kabupaten/Kota Cerdas di Perangkat Daerah	Kabupaten atau Kota Cerdas	mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas							
2.16.03.2.02.024	Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Tuban, Sidorejo	42 Perangkat Daerah	6.233.200.000	Dana Alokasi Umum		42 Perangkat Daerah	6.233.200.000
2.16.03.2.02.025	Layanan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatka	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Layanan	58.246.617	Dana Alokasi Umum		1 Layanan	58.246.617

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Daerah yang terintegrasi	n Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan dan/atau Portal Data Nasional							
2.16.03.2.02.027	Terlaksananya implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Ko	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Program	24.144.893	Dana Alokasi Umum		1 Program	24.144.893

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ta Cerdas		Kabupaten/ Kota Cerdas							
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				188.516.570				188.516.570
2.20.02	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyusun Data Statistik Sektoral yang Sesuai Standar	Kab. Tuban, Sidorejo	16,67 %	188.516.570	Dana Alokasi Umum		16,67 %	188.516.570
2.20.02.2.01	Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kompilasi Statistik yang dilakukan	Kab. Tuban, Sidorejo	50%	188.516.570	Dana Alokasi Umum		50%	188.516.570

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dari BPS									
2.20.02.2.01.0007	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan pegawai di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Tuban, Sidorejo	328 Orang	27.441.500	Dana Alokasi Umum		328 Orang	27.441.500
2.20.02.2.01.0009	Terlaksananya kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Tuban, Sidorejo	50 %	19.547.500	Dana Alokasi Umum		50 %	19.547.500
2.20.02.2.01.0010	Terlaksananya kegiatan statistik sektora yang telah dilengkapi metadata	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	133.104.410	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	133.104.410

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			metadata							
2.20.02.2.01.0011	Tersedianya Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	8.423.160	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.423.160
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				61.117.612,50				61.117.612,50
2.21.02	Meningkatnya Keamanan Sistem Informasi Pemerintah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Kab. Tuban, Sidorejo	615 Indeks	61.117.612,50	Dana Alokasi Umum		615 Indeks	61.117.612,50
2.21.02.2.01	Meningkatnya keamanan	Penyelenggaraan Persandian untuk	Persentase sistem	Kab. Tuban, Sidorejo	70%	61.117.612,50	Dana Alokasi		70%	61.117.612,50

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	data dan informasi	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada				Umum			

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pemerintah daerah							
2.21.02.2.01.0001	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	52.872.500	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	52.872.500
2.21.02.2.01.0003	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahar	Kab. Tuban, Sidorejo	1 Laporan	8.245.112,50	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.245.112,50

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ta Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) dan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 dalam mendukung tercapainya target RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi pedoman dan sarana untuk mewujudkan sasaran dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tuban.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini seluruh aparatur di Lingkungan Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya;

2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan; dan

3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu setiap Kepala Bidang dan Sekretaris

berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja yang menjadi tanggung jawabnya setiap triwulan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ARIF HANDOYO

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, maka perlu memastikan kesinambungan dan keselarasan arah pembangunan daerah agar visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat diakomodasi secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah agar dapat mencerminkan prioritas dan arah kebijakan pimpinan daerah yang baru. Selaras dengan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan jangka menengah daerah, maka diikuti dengan penyesuaian terhadap rencana kerja pembangunan daerah tahunan melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tuban merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih Aditya Halindra Faridzky, SE, sebagai Bupati dan Drs. Joko Sarwono sebagai Wakil Bupati.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban akibat berbagai perubahan kebijakan yang harus dilaksanakan, baik dari pusat maupun provinsi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi pada awal tahun perencanaan, sehingga perlu menuangkan kembali ke dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang secara simultan diikuti dengan tahapan KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan tahapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 menjadi dasar Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, diikuti dengan perubahan RKA dan DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020 – 2040;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 - 2045;

30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban;
31. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
32. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya akibat adanya berbagai perubahan kebutuhan sebagai tindaklanjut perubahan kebijakan dan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah:

1) Sebagai penjabaran dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
2) Sebagai pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang dimplementasikan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025; dan
3) Sebagai pedoman atas pelaksanaan, yang di dalamnya berisikan pagu indikatif pendanaan yang dituangkan ke dalam rekening-rekening belanja beserta indikator dan target kinerjanya yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban merupakan penjabaran pelaksanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk melihat hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dalam menangani 2 (dua) urusan yang menjadi tanggungjawabnya yakni : urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan, dapat digambarkan melalui anggaran yang dikelola pada tahun 2025 sejumlah Rp36.057.938.737,56 untuk menangani 2 urusan yang meliputi 11 program, 19 kegiatan dan 45 sub kegiatan.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dari sejumlah anggaran yang digunakan tersebut, dapat dilihat capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, yang merupakan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Anggaran	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	7,0	18,317,383,199	-18.22	6,583,375,225	-260.29	35.94
		Tingkat kenaikan usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha (%)	25	1,961,036,150	7.91	160,073,475	31.64	8.16
2.	Meningkatnya Produksi Dalam Negeri melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase peningkatan omset usaha perdagangan yang difasilitasi (%)	16	720,257,520	0	2,970,000	0	0.41
		Fluktuasi prosentase rata-rata harga bahan pokok dan barang penting lainnya (%)	12,13	593,554,162	-4.07	44,929,000	100	7.57
		Prosentase pertumbuhan nilai aset pasar daerah (%)	2,30	14,196,949,107	0	871,525,100	0	6.14
		Prosentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga (%)	2	268,758,600	0.42	39,520,000	21.00	14.70

Sumber : Laporan Dalev Dinas Kopumdag Triwulan II Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat atas evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025, faktor penyebab tidak tercapaianya target kinerja program/kegiatan beserta kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu dilaksanakan. Dari kedua sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kesatu : "Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang menjadi wirausaha", terkait penanganan koperasi dan usaha mikro, dengan dua indikator kinerja, yaitu indikator pertama terkait dengan koperasi adalah: "tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya" dengan tingkat capaiannya pada triwulan II tahun 2025 masih rendah yaitu -18,22% dari target 7%, hal ini disebabkan karena jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebanyak 184 koperasi lebih kecil dibandingkan dengan realisasi koperasi yang meningkat kualitasnya akhir tahun 2024 sebanyak 225 koperasi, jumlah ini masih terus berproses hingga akhir tahun seiring dengan jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi serta dilakukan pembinaan sehingga belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 7% yang mana kondisi ini masih jauh dari harapan dan akan ditingkatkan pencapaiannya pada dua triwulan berikutnya.

   Untuk indikator kinerja kedua yang terkait dengan penanganan usaha mikro yakni : "Tingkat kenaikan usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha", tingkat capaiannya sampai triwulan II tahun 2025 sebesar 7,91% dari target 25% dengan jumlah usaha mikro menjadi wirausaha sampai triwulan II tahun 2025 sebanyak 11.197 dibanding dengan jumlah usaha mikro menjadi wirausaha tahun 2024 sebanyak 10.376 usaha mikro, hal ini tentunya juga masih jauh dari harapan dan akan terus diupayakan peningkatannya pada dua tribulan berikutnya seiring dengan peningkatan penyerapan anggaran melalui kegiatan yang dilaksanakan.

2. Adapun sasaran kedua yang terkait dengan penanganan perdagangan, yakni : "Meningkatnya produksi dalam negeri melalui peningkatan daya saing perdagangan", yang didukung dengan empat indikator kinerja, masing-masing dapat dijelaskan bahwa, untuk indikator kinerja pertama (1) yakni : "Persentase peningkatan omset usaha perdagangan yang difasilitasi", belum ada realisasi kinerja atau 0% hal ini disebabkan karena perhitungan dilaksanakan pada tribulan III seiring dengan pelaksanaan kegiatannya. Untuk indikator kedua (2) yakni : "Fluktuasi persentase rata-rata harga bahan pokok dan barang penting lainnya",

dengan realisasi kinerja sebesar -4.07% yang mana persentase rata-rata harga bahan pokok dan penting pada tribulan II tahun 2025 sebesar -7,20% atau Rp28.029,00 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun 2024 dengan tingkat persentase rata-rata harga bahan pokok dan penting sebesar -3.13% atau Rp30.204,00. Kondisi tersebut merupakan pencapaian yang cukup bagus karena mampu mempertahankan kondisi kestabilan harga bahan pokok, hal ini tentunya akan terus dipertahankan agar tidak terjadi lonjakan harga pada komoditas bahan kebutuhan pokok. Selanjutnya, indikator ketiga (3) yakni : persentase pertumbuhan nilai aset pasar daerah dari target 2,30% pencapaiannya masih 0% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu karena belum adanya penghitungan perubahan aset dikarenakan masih dalam proses pengerjaan fisik konstruksi pemeliharaan dan rehabilitasi pasar daerah, sehingga akan terus diupayakan pencapaiannya pada dua tribulan berikutnya. Sedangkan indikator keempat yakni : persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga dari target 2% realisasi 0,42% atau 21%, hal ini tentunya juga akan lebih ditingkatkan lagi pencapaiannya mengingat waktu pelaksanaan kegiatan masih dua triwulan kedepan.

Dari pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan diatas, tentunya juga atas dukungan dari pencapaian program-program yang dilaksanakan pada kedua urusan tersebut, yakni:

1. Urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil pada indikator kinerja pertama yakni : “Tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya” didukung dengan tiga program urusan koperasi dan satu program rutin meliputi: 1) program pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta program pendidikan dan latihan perkoperasian; 2) program pemberdayaan dan perlindungan koperasi; dan 3) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pada indikator kinerja kedua yakni : “Tingkat kenaikan usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha”, didukung dengan dua program urusan usaha mikro kecil dan menengah, meliputi: 1)program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro; dan 2) program pengembangan umkm.
2. Urusan Perdagangan pada:
   - Indikator kinerja pertama yakni : Persentase peningkatan omset usaha perdagangan yang difasilitasi didukung pencapaiannya dengan dua program, meliputi: 1) program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan 2) program pengembangan ekspor.
   - Indikator kinerja kedua yakni : Fluktuasi persentase rata-rata harga bahan pokok dan barang penting lainnya didukung dengan satu program, yaitu program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

- Indikator kinerja ketiga yakni : Persentase pertumbuhan nilai aset pasar daerah didukung satu program, yaitu program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
- Indikator kinerja keempat yakni : Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga juga didukung satu program, yaitu program standarisasi dan perlindungan konsumen.

Adapun pencapaian masing-masing indikator kinerja program dengan tingkat penyerapan anggarannya pada triwulan II Tahun 2025 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Triwulan II Tahun 2025 per Program

No	Program	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio peningkatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi	60	69.999.700	-34,29	14.400.000	-57,16	20,57
		Prosentase Koperasi Sehat	30,5		0		0	
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase SDM koperasi yang berkualitas	0,4	1.199.591.808	0	9.428.322	0	0,79
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya	16,6	209.199.00	0	11.006.770	0	5,26
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	7,42	1.131.036.150	1.61	148.850.225	21,70	13,16
5.	Program Pengembangan UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha	19,95	830.000.000	0.61	11.223.250	3,06	1,35
6.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	88,50	14.196.949.106,56	85,12	871.525.100	96,18	6,14
		Persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar-Los	10		-45,75		-457,5	

No	Program	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar-Plataran/dasaran	10		-56,51		-565,1	
		Persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar-Kios	10		-52,67		526,7	
7.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perkembangan Rata rata harga komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting	12,13	593.554.162	-7,20	44.929.000	100	7,57
8.	Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan pelaku usaha ekspor	39,18	309.424.790	0	2,970,000	0	0,96
9.	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Presentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapan nya (UTTP) bertandatera sah yang berlaku	98	268.758.600	33,95	39.520.000	34,64	14,70
10.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Presentase kenaikan nilai produk lokal yang difasilitasi pemasarannya	19,38	410.832.730	0	0		0
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83.95 Poin	16.838.592.691	0	6.548.540.133	0	38,89
Jumlah				36.057.938.738		7.702.392.800		21,36

Sumber : Laporan Dalev Diskopumdag Tribulan II Tahun 2025

Untuk mengetahui lebih lengkap pencapaian indikator pada masing-masing Sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan pada kedua urusan yang ditangani, dapat digambarkan sebagaimana tabel II.3 berikut :

Tabel II.3 (E.81)
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya (Target: 7,0%);
2. Tingkat Kenaikan Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha (Target: 25%);
3. Prosentase peningkatan Omset Usaha Perdagangan Yang difasilitasi (Target: 16%);
4. Fluktuasi Prosentase Rata-rata harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya (Target: 12,13%);
5. Prosentase Pertumbuhan Nilai Aset Pasar Daerah (Target: 2,3%);
6. Prosentase Peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga (Target: 2%)

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
I.1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (%)	17,25	142.828.140	54,46	213.135.500	60	69.999.700	-85,58	14.400.000	-34,29	0	0	0	0	0	-34,29	14.400.000	121	227.535.500	702	159	KEPALA BIDANG KOPERASI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Prosentase Koperasi Sehat	34,38	0	23,55	0	30,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	68,50	0	KEPALA BIDANG KOPERASI
1.1		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	12.53	142.828.140	22,77	213.135.500	37,79	69.999.700	3,27	14.400.000	12,32	0	0	0	0	0	12,32	14.400.000	35,09	227.535.500	0	159	JF PENGAWAS KOPERASI
2		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase SDM Koperasi Yang Berkualitas (%)	0,11	2.192.830.217	0,34	1.218.954.332	0,4	1,199,591,808	0	5.393.000	0	4.035.322	0	0	0	0	0	9.428.322	0,34	1.228.382.654	309	56,02	KEPALA BIDANG KOPERASI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.1		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0,5	1.910.630.217	0,34	966.763.072	0,45	1.199.591.808	0	5.393.000	0	4.035.322	0	0	0	0	0	9.428.322	0,34	976.191.394	68,00	51,09	JF PENGAWAS KOPERASI
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya (%)	19,85	754.132.581	16,42	558.801.664	16,6	209.199.000	6,83	8.346.770	0	2.660.000	0	0	0	0	6,83	11.006.770	23,25	569.808.434	117	75	KEPALA BIDANG KOPERASI
3.1		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan (%)	6,81	754.132.581	6,86	558.801.664	3,95	209.199.920	0	8.346.770	0	2.660.000	0	0	0	0	0	11.006.770	6,86	569.808.434	100	75,56	JF PENGAWAS KOPERASI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Prosentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan (%)	4,1	0	6,13	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,13	0	149	0	JF PENGAWAS KOPERASI
4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	7,5	5.588.933.549	17,31	1.593.554.590	7,42	1.131.036.150	2,21	50.712.185	1,61	98.138.040	0	0	0	0	3,82	148.850.225	21,13	1.742.404.815	281	31,18	KEPALA BIDANG UMKM
4.1		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra (%)	0.42	5.588.933.549	1,94	1.593.554.590	0,38	1.131.036.150	0,44	50.712.185	0,32	98.138.040	0	0	0	0	0,32	148.850.225	2,26	1.742.404.815	0	31,18	JF PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha (%)	7,5	3.086.566.054	20,70	3.152.833.413	19,95	830.000.000	0,27	9.992.000	0,61	1.231.250	0	0	0	0	0,88	11.223.250	21,58	3.164.056.663	287	102	KEPALA BIDANG UMKM
5.1		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	2,1	0	1,94	0	1,71	830.000.000	0	9.992.000	0,19	1.231.250	0	0	0	0	0,19	11.223.250	2,13	11.223.250	101	0	JF PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN
6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)	82	72.144.315.912	83,90	36.836.715.848	83,95	16.838.592.691	0	3.159.252.362	0	3.389.287.771	0	0	0	0	0	6.548.540.133	83,9	43.385.255.981	102	60,14	SEKRETARIS DINAS

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	46	452.012.500	9	405.756.478	10	201.628.000	4	8.174.500	0	0	0	0	0	0	4	8.174.500	13	413.930.978	28,26	91,58	JF PERENCANA
6.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	100	64.903.889.330	17	31.851.474.563	20	15.057.818.178	1	2.871.627.244	0	0	0	0	0	0	1	2.871.627.244	18	34.723.101.807	18,00	53,50	KASUBAG KEUANGAN
6.3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	238	538.868.000	177	237.995.000	178	107.459.000	178	0	178	0	0	0	0	0	178	0	355	237.995.000	149	44,17	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6.4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7	1.833.995.495	7	1.165.561.129	7	392.403.970	6	36.162.559	6	45.183.510	0	0	0	0	6	81.346.069	13	1.246.907.198	185	67,99	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6.5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	21	170.000.000	8	135.185.000	19	146.785.899	7	34.965.000	12	72.145.000	0	0	0	0	19	107.110.000	27	242.295.000	128	142	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	1	3.181.180.587	4	2,129,719,951	4	716.097.644	1	180.443.059	2	172.638.718	0	0	0	0	3	353.081.777	7	0	700	0	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	115	1.284.370.000	103	778.696.417	245	216.400.000	30	27.880.000	56	39.688.200	0	0	0	0	86	67.568.200	189	846.264.617	164	65,89	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
7.	Meningkatnya produksi Dalam negeri melalui peningkatan daya saing sektor perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%)	40.63	2.513.573.779	35,29	530.568.407	39,18	309.424.790	0	2.970.000	0	0	0	0	0	0	0	2.970.000	35,29	533.538.407	0	21,23	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
7.1		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah transakasi Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang (Milyar)	12,21 (milyar)	2.513.573.779	21,43 (milyar)	530.568.407	22,3 (milyar)	309.424.790	0 (milyar)	2.970.000	0	0	0	0	0	0	0 (milyar)	2.970.000	21,43	533.538.407	175	21,23	JF PENGAWAS PERDAGANGAN
8.		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya (%)	5,43	3.376.329.101	15,9	1.444.338.271	19,38	410.832.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	1.444.338.271	292	42,78	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8.1		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah transakasi pada pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Milyar)	14 (miliyar)	3.376.329.101	12,58 (miliyar)	1.444.338.271	14,9 (miliyar)	410.832.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,58	1.444.338.271	89,86	42,78	JF PENGAWAS PERDAGANGAN
9		PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	12,01	2.774.406.630	-3,13	1.591.817.966	12,13	593.554.162	7,28	24.154.000	-3,65	20.775.000	0	0	0	0	7,28	44.929.000	4,15	1.636.746.966	34,55	58,99	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
9.1		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase Jenis Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya (%)	100	2.493.473.407	100	373.771.150	100	543.554.217	100	19.174.000	100	15.755.000	0	0	0	0	100	34.929.000	200	408.700.150	200	16,39	JF ANALIS PERDAGANGAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
9.2		Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi yang tepat sasaran (%) (Th 2023) Persentase kinerja realisasi pupuk (%) (Th. 2024)	65,51	280.933.223	92,98	163.659.850	65,5	49.999.945	25	4.980.000	25	2.900.000	0	0	0	0	25	7.880.000	117	171.539.850	180	61,06	JF ANALIS PERDAGANGAN
10		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi (%)	78,99	41.876.333.552	85,08	2.749.165.781	88,5	14.196.949.107	85,08	352.602.660	85,08	518.922.440	0	0	0	0	85,08	871.525.100	170	3.620.690.881	215	8,65	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
			Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios (%)	10,01	0	76,68	0	10	0	-76,49	0	0	0	0	0	0	0	-76,49	0	0,19	0	1,90	0	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los (%)	10	0	-22,71	0	10	5.879.140.770	-74,09	0	0	0	0	0	0	0	-74,09	0	-96,8	0	-968	0	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
			Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/ Dasaran (%)	10	0	12,21	0	10	0	-83,14	0	0	0	0	0	0	0	-83,14	0	-70,93	0	-709	0	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
10.1		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Daerah yang Terbangun dan Dikelola (Pasar)	9	35.262.965.593	7	12.218.479.960	9	12.033.628.509	8	5.785.000	8	3.970.000	0	0	0	0	8	9.755.000	150	12.228.234.960	166	34,68	JF ANALIS PERDAGANGAN
10.2		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	145	6.613.367.959	145	2.391.291.500	145	2.163.320.598	25	346.817.660	22	512.647.440	0	0	0	0	47	859.465.100	192	3.250.756.600	132	49,15	Kepala UPTD Pasar

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Jumlah pembinaan terhadap pedagang pasar daerah	872	-	325		180	-	40	0	40	0	0	0	0	0	80	0	405	0	46,44	0	Kepala UPTD Pasar
11		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	98	1.986.870.273	90	1.140.026.963	98	268.758.600	2,02	10.920.000	33,21	28.600.000	0	0	0	0	33,21	39.520.000	123	1.179.546.963	125	59,37	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
11.1		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	0	1.986.870.273	0	1.140.026.963	98	268.758.600	2,02	10.920.000	33,21	28.600.000	0	0	0	0	33,21	39.520.000	33,21	1.179.546.963	0	59,37	JF Penera

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(0utcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja (%): 32,03																								
Predikat kinerja: Sangat Rendah																								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
1. Adanya sinergi dengan stakeholder terkait sebagai mitra kerja dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat;
2. Komitmen aparatur dalam mengoptimalkan jejaring informasi dan potensi sumber daya yang ada;
3. Terjalinnya koordinasi internal bidang dalam pembagian pelaksanaan tugas fungai; dan
4. Adanya upaya perbaikan sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang dilaksanakan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1. Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menyesuaikan moment atau event nasional; dan
2. Adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami penundaan karena rescheduling.

Implikasi atas kondisi diatas yaitu:
1. Terhambatnya penyerapan realisasi anggaran pada perangkat daerah;
2. Dengan adanya efisiensi maka berdampak pada efisiensi intervensi kegiatan/penyesuaian jumlah kegiatan/peserta yang mempengaruhi capaian target; dan
3. Ketidakstabilan pada masa efisiensi berpotensi mengakibatkan penurunan kinerja.

Tindak lanjut/kebijakan yang diperlukan:
1. Percepatan untuk pelaksanaan kegiatan;
2. Optimalisasi sumberdaya dan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian target; dan
3. Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, memiliki tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro serta Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi yang diselenggarakan yakni:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan;
g. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Bidang Perdagangan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing unsur organisasi tersebut memiliki uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, memiliki tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan, dengan fungsi yang diselenggarakan yakni:

1) Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
2) Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
3) Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4) Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
5) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
6) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
7) Pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
8) Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
9) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
10) Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
11) Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi dan mengoordinasikan 2 (dua) Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, meliputi:

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis, pembinaan dibidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah; dan
2) Sub bagian Keuangan, dengan tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.

2. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dengan tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang koperasi, dengan fungsi yang diselenggarakan yakni:

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang koperasi;
c. Pelaksanaan pengawasan dan kelembagaan koperasi;
d. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi;
e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang koperasi;
f. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif dibidang usaha mikro, kecil dan menengah, dengan fungsi yang diselenggarakan yakni :

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
c. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;

d. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan;
e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
f. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas perumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program dan petunjuk teknis, serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan pelayanan administratif di bidang perdagangan, dengan fungsi yang diselenggarakan yakni:

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
d. Pelaksanaan pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri;
e. Pelaksanaan pengembangan perdagangan dan sarana distribusi perdagangan;
f. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perdagangan;
g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
h. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas, meliputi:

1) UPTD Metrologi Legal Kelas B, dan
2) UPTD Pasar Kelas B.

Masing-masing UPTD memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), pengawasan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas serta pelayanan kemetrologian legal lainnya, dengan fungsi yang diselennggarakan yakni:
   a. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan Unit Metrologi Legal;
   b. Pelaksanaan teknis operasional kemetrologian;
   c. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan rencana anggaran pada UPTD Metrologi Legal;
   d. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;
   e. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan, laboratorium dan perlengkapan alat-alat UTTP);
   f. Pengelolaan Cap Tanda Tera;
   g. Pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab UPTD Metrologi Legal;
   h. Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang, informasi pelayanan tera/tera ulang dan pelayanan pengaduan pemilik alat-alat UTTP;
   i. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera;
   j. Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan sebagai bahan laporan pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang;
   k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
   l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
2) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas di bidang pengelolaan pasar daerah. Dengan fungsi yang diselenggarakan :
   a. Penyiapan dan penyediaan bahan serta penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pasar daerah;
   b. Pelaksanaan peningkatan pengembangan manajemen mutu pasar daerah;
   c. Pelaksanaan pengelolaan pasar daerah;
   d. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;
   e. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar;
   f. Pelaksanaan pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar daerah;

g. Penyiapan dan penyediaan bahan serta pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lainnya;
h. Penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan buku register wajib bayar retribusi dan perizinan usaha, penerimaan dan penagihan retribusi pasar daerah;
i. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
j. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok terkait dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi Lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Sejalan dengan uraian tugas dan fungsi diatas, maka gambaran pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan pelayanan yang terkait dengan dua urusan pemerintahan yang ditangani, yakni urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan oleh bidang koperasi dan bidang usaha kecil dan menengah, serta urusan perdagangan yang dilaksanakan oleh bidang perdagangan dalam keterkaitannya mencapai visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Dokumen RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 yang memuat visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tuban, yaitu: “Tuban Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat 1 RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi pembangunan jangka panjang tersebut menjadi acuan pijakan awal dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah daerah melalui linierisasi visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban tahun 2025 - 2029, yaitu *“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”*. Dalam rangka mengimplementasikan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 secara nyata dan terarah, diperlukan langkah strategis yang dituangkan ke dalam bentuk misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tuban selama periode lima tahun mendatang sebagai berikut :

Misi 1: “Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan”.

Misi 2: “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif”.

Misi 3: “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal”.

Misi 4: “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap rumusan misi Kepala Daerah yang ditetapkan perlu dijabarkan secara lebih operasional kedalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagai tahapan strategis yang memberikan arah pencapaian misi secara sistematis dan terukur selama periode perencanaan lima tahunan sehingga setiap misi yang telah dirumuskan akan memiliki serangkaian tujuan sebagai capaian antara serta sasaran sebagai indikator spesifik yang ingin diwujudkan dalam pembangunan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.4
Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tuban
Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.	Mewujudkan Kabupaten Tuban layak huni.	✧ Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. ✧ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas - Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah serta percepatan pengentasan kemiskinan.	✧ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan. ✧ Meningkatnya kemandirian desa dan ketahanan pangan daerah. ✧ Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha. ✧ Meningkatnya kualitas perlindungan sosial.
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai - nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.	Mewujudkan sumber daya manusia unggul.	✧ Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. ✧ Terwujudnya kesehatan berkualitas yang merata. ✧ Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak. ✧ Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif.	Mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan melayani.	✧ Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. ✧ Meningkatnya kemandirian fiskal daerah. ✧ Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025

Berkaitan dengan penjelasan diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban mendukung pada pencapaian Misi 2 Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu : “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif”, dengan Tujuan Kabupaten Tuban yaitu: “Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan”, melalui sasaran : “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif , Stabil, dan Berkelanjutan, serta Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha”.

Setelah perumusan tujuan dan sasaran Kabupaten Tuban berdasarkan dokumen RPJMD periode 2025-2029, selanjutnya dilakukan linierisasi tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban guna mendukung ketercapaian visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyusunan dokumen renstra. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

Tabel II.5
Penyandingan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran berdasarkan Rencana Strategis
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban
Tahun 2025-2029

DOKUMEN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025	DOKUMEN PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025
VISI : Membangun serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan.	VISI : Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.
MISI 2 : Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.	MISI 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.

DOKUMEN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025			DOKUMEN PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025		
TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET RENJA 2025	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET P-RENJA 2025
Tujuan Kabupaten: Meningkatkan Daya Saing dan Daya Sanding Ekonomi Daerah Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata,Perindustria, Perdagangan Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87 - 5,01	**Tujuan Kabupaten:** Meningkatnya nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah serta percepatan pengentasan kemiskinan.	1. PDRB Per Kapita (Rp Juta)	72 - 75
				2. Tingkat Kemiskinan (%)	14,06 - 13,56
Sasaran Kabupaten: Meningkatnya Ketahanan dan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Daerah Berbasis Kemitraan Dunia Usaha, Koperasi, UMKM dan BUMDes.	Tingkat Inflasi Daerah (%)	1-2	**Sasaran Kabupaten (1):** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. Rasio Gini (Angka)	3,30 - 4,13 0,356 - 0,333

DOKUMEN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025			DOKUMEN PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025		
			Sasaran Kabupaten (2) : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	3. Rasio Kewirausahaan (%)	7,47
Tujuan PD : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah (%)	1-2	**Tujuan PD :** Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah	1. Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	14,32
				2. Rasio Kewirausahaan (%)	7,47

DOKUMEN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025			DOKUMEN PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025		
Sasaran PD (1) : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	1. Tingkat Kenaikan Koperasi yang Meningkat Kualitasnya (%)	7,00	**Sasaran PD (1) :** Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapan	1. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,54
	2. Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Mapan (%)	25,00		2. Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Mapan (%)	19,03
Sasaran PD (2) : Meningkatnya Produksi Dalam Negeri melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3. Fluktuasi Persentase Rata-rata Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya (%)	< 13	**Sasaran PD (2) :** Terkendalinya Stabilitas Harga	3. Tingkat Fluktuasi Harga Komoditas Bapokting (%)	0,90

DOKUMEN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025			DOKUMEN PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025		
	4. Prosentase Peningkatan Omset Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	10,00	**Sasaran PD (3) :** Meningkatnya Nilai Produk Ekspor	4. Nilai Ekspor Barang (Rp Miliar)	10,00
	5. Prosentase Pertumbuhan Nilai Asset Pasar Daerah (%)	2,30			
	6. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Tertib Niaga (%)	99,00			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tuban, secara simultan perangkat daerah menyusun linieritas tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan RPJMD melalui Renstra perangkat daerah, serta menetapkan strategi untuk menjamin keberhasilan atas pelaksanaan program pembangunan yang tercermin pada indikator kinerja kunci (IKK) perangkat daerah sebagaimana berikut :

Tabel II.6
Penyandingan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban
Tahun 2021-2026 dan 2025-2029

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022-2026			Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2025-2029		
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENJA 2025	INDIKATOR KINERJA	TARGET P-RENJA 2025
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio peningkatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi (%)	17,00	Persentase Koperasi Sehat (%)	13,14
		Prosentase koperasi sehat (%)	30,50		
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase SDM koperasi yang berkualitas (%)	0,10	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya (%)	8,81
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	16,60	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	35,10
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	6,14	Persentase usaha mikro yang terstandarisasi	22,02

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022-2026			Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2025-2029		
5	Program Pengembangan UMKM	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha (%)	6,14	-	-
6	Program Pengembangan Ekspor	Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor (%)	1,00	Persentase pelaku usaha ekspor (%)	32,43
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase kenaikan nilai produk lokal yang difasilitasi pemasarannya (%)	1,10	Persentase produk lokal yang dipromosikan (%)	26,40
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perkembangan rata-rata harga 21 komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	< 13	Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting (Rupiah)	30.300
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi (%)	75,98	Persentase prasarana distribusi perdagangan yang difungsikan (%)	58,33
		Prosentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar - pelataran/dasaran (%)	10,00		

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022-2026				Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2025-2029	
		Prosentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar - los (%)	10,00		
		Prosentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar - kios (%)	10,00		
10	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	98,00	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	91,00
		Prosentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang (%)	10,00		
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)	81,50	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Poin)	84,40

Sumber : Perubahan Renstra Diskopumdag Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

Perubahan rencana jangka menengah pemerintah daerah termasuk didalamnya RKPD Perubahan 2025 yang secara simultan diikuti dengan penyusunan dokumen renstra perangkat daerah serta Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mana tahun 2025 merupakan tahun peralihan antara Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, sehingga dalam penyajian tabel analisa kinerja pelayanan perangkat daerah capaian tahun 2023 hingga tribulan II tahun 2025 menggunakan target Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, sedangkan target tribulan III-IV tahun 2025 dan tahun 2026 menggunakan periode Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, sebagaimana Tabel II.6 (T-C.30) berikut:

Tabel II.6 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban sampai dengan Tribulan II Tahun 2025

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisa
				Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	
I.	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**													
	Indikator Sasaran													
1.	Tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya	-	√	6,11	6,50	7,0	-	-	6,06	7,14	-18,22	-	-	Target tahun 2025 pada tw 3 dan 4 serta tahun 2026 sesuai Berita Acara Kesepakatan penetapan tujuan, sasaran, program perangkat daerah beserta indikator dan targetnya pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tgl 7 Agustus 2025.
	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	√	-	-	-	-	0,54	0,56	-	-	-	0	0,56	
2.	Tingkat kenaikan usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	-	√	25	25	25	-	-	419,99	36,11	7,91	-	-	
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha mapan	-	-	-	-	-	19,03	19,79	-	-	-	0	19,79	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	88,29	88,99	-	-	-	0	88,99	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisa
				Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	
	Indikator Program													
1.	Prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	-	√	15,28	15,92	16,50	-	-	15,44	16,42	0	-	-	Target tahun 2025 pada tw 3 dan 4 serta tahun 2026 sesuai Berita Acara Kesepakatan penetapan tujuan, sasaran, program perangkat daerah beserta indikator dan targetnya pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tgl 7 Agustus 2025.
	Prosentase koperasi yang berkualitas (%)	-	√	-	-	-	35,10	36,65	-	-	-	0	36,65	
2.	Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (%)	-	√	16,50	58,91	60	-	-	15,25	54,46	65,71	-	-	
3.	Prosentase Koperasi Sehat (%)	-	√	25,32	27,54	30,50	13,14	16,79	21,58	23,55	0	0	16,79	Pada indikator ini target tw 3 dan 4 tahun 2025 serta target 2026 formulasi berbeda dengan sebelumnya, yang mana saat ini penyebutnya adalah jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Tuban.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisa
				Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	
4.	Prosentase SDM koperasi yang berkualitas (%)	-	√	0,2	0,3	0,4	-	-	0,24	0,34	0	-	-	Target tahun 2025 pada tw 3 dan 4 serta tahun 2026 sesuai Berita Acara Kesepakatan penetapan tujuan, sasaran, program perangkat daerah beserta indikator dan targetnya pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tgl 7 Agustus 2025.
	Prosentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya (%)	-	√	-	-	-	4,38	4,87	-	-	-	0	4,87	
5.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	-	√	3,02	6,68	7,42	-	-	24,95	17,31	7,42	-	-	Target tahun 2025 pada tw 3 dan 4 serta tahun 2026 sesuai Berita Acara Kesepakatan penetapan tujuan, sasaran, program perangkat daerah beserta indikator dan targetnya pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tgl 7 Agustus 2025.
	Prosentase usaha mikro yang terstandarisasi usaha	-	√	-	-	-	22,02	23,35	-	-	-	0	23,35	
6.	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha (%)	-	√	10	18,95	19,95	-	-	17,95	20,7	0,61	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisa
				Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	
7.	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)	-	√	80,01	83,85	83,95	84,40	84,9	83,90	83,90	83,95	0	84,9	
II.	**Urusan Perdagangan**													
	Indikator Sasaran													
1.	Prosentase peningkatan omset usaha perdagangan yang difasilitasi (%)	-	√	10,03	15	16	-	-	11,36	21,77	0	-	-	Target tahun 2025 pada tw 3 dan 4 serta tahun 2026 sesuai Berita Acara Kesepakatan penetapan tujuan, sasaran, program perangkat daerah beserta indikator dan targetnya pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tgl 7 Agustus 2025. Berdasarkan BA tersebut indikator sasaran urusan perdagangan yang semula 4 menjadi 2 indikator sasaran.
	Nilai ekspor barang (Rp Miliar)	-	√	-	-	-	10	11	-	-	-	0	11	
2.	Fluktuasi prosentase rata-rata harga bahan pokok dan barang penting lainnya	-	√	< 13	83,75	< 13 (12,11)	-	-	-5,44	-3,03	< 13 (-4,07)	-	-	
	Tingkat fluktuasi harga komoditas bapokting		√	-	-	-	0,9	0,9	-	-	-	(-4,07)	0,9	
3.	Prosentase pertumbuhan nilai aset pasar daerah	-	√	2,10	2,20	2,30	-	-	13,09	0,22	0	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisa
				Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	
4.	Prosentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	-	√	99	2	2	-	-	38,02	2,08	0,42	-	-	
	Indikator Program													
1.	Prosentase kenaikan nilai produk lokal yang difasilitasi pemasarannya (%)	-	√	1,10	15	19,38	-	-	71,4	15,9	0	-	-	Target tahun 2025 pada tw 3 dan 4 serta tahun 2026 sesuai Berita Acara Kesepakatan penetapan tujuan, sasaran, program perangkat daerah beserta indikator dan targetnya pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tgl 7 Agustus 2025.
	Prosentase produk lokal yang dipromosikan (%)			-	-	-	26,40	31,33	-	-	-	0	31,33	
2.	Persentase peningkatan pelaku usaha ekspor (%)	-	√	30,77	35,29	39,18	-	-	30,77	35,29	0	-	-	Target tahun 2025 pada tw 3 dan 4 serta tahun 2026 sesuai Berita Acara Kesepakatan penetapan tujuan, sasaran, program perangkat daerah beserta indikator dan targetnya pada dokumen RPJMD
	Persentase pelaku usaha ekspor (%)	-	√	-	-	-	32,43	35,14	-	-	-	0	35,14	
4.	Perkembangan rata-rata harga komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	-	√	< 13	< 13 (12,01)	< 13	-	-	-0,1	-3,13	-7,2	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisa
				Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	
	Rata-rata harga bahan pokok dan penting (Rupiah)	-	√	-	-	-	30.300	30.400	-	-	-	0	30.400	Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tgl 7 Agustus 2025.
5.	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi (%)	-	√	86,01	87,5	88,50	-	-	85,34	85,08	85,12	-	-	
	Persentase Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan (%)	-	√	-	-	-	58,33	75,00	50	50	50	0	75,00	
6.	Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/ Dasaran (%)	-	√	10,00	10,00	10	-	-	13,91	12,21	-56,51	-	-	
7.	Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los (%)	-	√	10	10	10	-	-	1,55	-22,71	-52,67	-	-	
8.	Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios (%)	-	√	10	10	10	-	-	-1,32	76,68	-45,75	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisa
				Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	Thn 2023 (n-2)	Thn 2024 (n-1)	Thn 2025 TW 2 (n)	Thn 2025 TW 4 (n)	Thn 2026 (n+1)	
9.	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	-	√	98	98	98	91	92	73,83	90	33,95	0	92	
10.	Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang (%)	-	√	10	-	-	-	-	42,98	-	-	-	-	Adanya perubahan Peraturan tentang penghapusan retribusi pelayanan tera/tera ulang sesuai UU No.1 Tahun 2022.

Sumber : Dokumen Dalev Tribulan II Diskopumdag Tahun 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisa isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas tertentu (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis hendaknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria berikut:1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; 2) Merupakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat; 4) Memiliki pengaruh besar terhadap daya ungkit pembangunan; 5) Kemungkinan terhadap kemudahannya untuk dikelola; serta 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan penelaahan terhadap hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan terhadap pelayanan dua urusan yang menjadi tanggungjawabnya, yang meliputi urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta urusan pilihan Perdagangan, masih dijumpai adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapai yang berpotensi menjadi isu-isu pelaksanaan pembangunan, diantaranya adalah:

1. Dalam penanganan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
   a. Masih banyaknya koperasi yang terkategori tidak aktif (diatas 50% dari total koperasi yang ada) hal ini sebagai akibat rendahnya kesadaran dan pemahaman pengelola terhadap ketentuan perkoperasian yang seharusnya dilaksanakan serta belum optimalnya pendampingan kelembagaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Tuban, hal ini berdampak pada tidak beroperasinya koperasi atau pasif yang mengakibatkan kerugian bagi anggota koperasi;
   b. Koperasi cenderung hanya menjalankan usaha simpan pinjam akibat kurangnya kemampuan SDM koperasi dalam mengelola unit usaha maupun manajemennya, hal ini berdampak pada kurangnya koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota dan peningkatan volume usaha;
   c. Adanya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih sebagai Koperasi yang dibentuk ditingkat desa atau kelurahan, masih belum terbentuk strukturisasi kelembagaan dan pendidikan SDM koperasi, hal ini berdampak pada manajemen dan tata kelola koperasi sesuai ketentuan;
   d. Kurangnya daya saing produk usaha mikro untuk dapat diterima di pasar nasional maupun internasional akibat kualitas produk yang dihasilkan cenderung masih di bawah standar pasar modern;
   e. Masih rendahnya jangkauan dan jaringan pemasaran produk Usaha Mikro akibat terbatasnya kemampuan untuk berjejaring usaha, akibatnya omset pelaku usaha mikro tidak meningkat dan tidak tercapainya jumlah pelaku usaha mikro mapan;

f. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang semakin bertambah tidak sebanding dengan ruang/tempat usaha yang terbatas dan belum adanya upaya penataan yang memadai, sangat berdampak pada ketertiban umum dan tata kota yang sesuai ketentuan;
g. Masih rendahnya akses permodalan dan pemasaran koperasi dan usaha kecil dan menengah, sangat berpengaruh terhadap peningkatan omset usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah.

2. Dalam penanganan Perdagangan:
   a. Kemampuan pelaku usaha dagang dalam manajemen usaha dan teknik-teknik serta jaringan pemasaran produk dan peluang pasar baik secara *online* maupun *offline* umumnya masih rendah sehingga kurang berkembang, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaku ekspor terhadap pengembangan produk ekspor;
   b. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana pada pasar daerah sebagai penunjang perdagangan yang nyaman dan representatif, yang berakibat tidak optimalnya penerimaan PAD atas retribusi pasar dan menurun pembeli pada pasar daerah;
   c. Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar daerah dalam efisiensi kesatuan harga barang serta memberikan daya tarik pembeli dari luar daerah, hal ini berdampak terhadap harga barang pokok dan penting lainnya tidak terkendali;
   d. Belum optimalnya pengendalian distribusi barang dan stabilitas ketersediaan barang pokok dan penting, yang sangat berdampak pada tidak terkendalinya harga dan distribusi barang pokok dan penting pada masyarakat yang sangat mengakibatkan inflasi;
   e. Pemahaman dan kesadaran masyarakat selaku konsumen terhadap upaya melindungi kepentingannya pada umumnya masih kurang, yang berakibat kerugian pada pembeli atas barang yang dibeli tidak sesuai ukuran atau takaran;
   f. Kesadaran pedagang terhadap pentingnya kalibrasi alat ukur yang dimiliki pada umumnya masih rendah, berakibat adanya kecenderungan ketidaktepatan ukuran/takaran yang merugikan konsumen.

Berdasarkan penelaahan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban maka tantangan dan peluang pada pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah:

1. Tantangan
    a. Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kualitas SDM pelaku usaha (pengelola koperasi, pelaku usaha mikro dan pedagang serta pengelola pasar daerah) yang belum profesional dan kurangnya keterampilan digital serta manajemen usaha pada pelaku usaha;
    b. Akses pembiayaan/permodalan, yaitu pelaku usaha (pelaku usaha mikro, pengelola koperasi, dan pedagang pasar) mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan;
    c. Standardisasi dan kualitas, yaitu keterbatasan dalam standardisasi produk yang berpotensi menghambat daya saing di pasar nasional/internasional;
    d. Persaingan, yaitu persaingan yang ketat di pasar domestik maupun global, terutama dengan produk-produk dari luar;
    e. Infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur yang dapat menghambat kelancaran distribusi arus barang dan jasa, serta perlindungan konsumen; dan
    f. Integrasi data, yaitu adanya perbedaan definisi UMKM antarlembaga dan belum adanya basis data yang terintegrasi dapat menyulitkan koordinasi dan penyusunan kebijakan.
2. Peluang
    a. Peluang kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan komunitas untuk pelatihan dan pendampingan;
    b. Kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga jasa keuangan/perbankan maupun stakeholder lain dalam penyediaan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha;
    c. Peningkatan standarisasi legalitas dan kualitas produk usaha mikro, khususnya bagi produk unggulan daerah agar lebih berdaya saing;
    d. Perluasan pasar, yaitu menggunakan berbagai strategi untuk memperluas akses pasar, baik di tingkat internasional maupun domestik;

e. Peningkatan kualitas infrastruktur melalui optimalisasi pengelolaan dengan kolaborasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan kelancaran distribusi arus barang; dan
f. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan daya saing UMKM akan berimplikasi pada peningkatan rasio kewirausahaan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Perlu adanya kolaborasi dalam perencanaan, perumusan kebijakan/regulasi, data teknis dalam pelaksanaan peningkatan daya saing usaha mikro.

Dari rangkuman beberapa permasalahan yang masih dihadapi tersebut, serta peluang dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan dapat ditentukan beberapa penanganan terhadap isu penting terkait penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, meliputi:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian;
2. Fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih di desa/kelurahan dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan cara pembentukan;
3. Peningkatan produktivitas koperasi dan UKM, baik melalui pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, maupun fasilitasi untuk standarisasi produk;
4. Pemberdayaan terhadap masyarakat melalui penumbuhan wirausaha baru sebagai upaya dalam penanganan kemiskinan;
5. Semakin bertambahnya jumlah toko modern saat ini, sehingga perlu adanya penataan mengenai ketentuan dalam pendirian berikut perizinannya, serta peningkatan peran toko modern sebagai mitra pelaku usaha dalam mengembangkan hasil produknya;
6. Peningkatan manajemen pengelolaan pasar untuk efektifitas kesatuan harga barang dan menambah daya tarik pembeli dari luar daerah Tuban;
7. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting menuntut perhatian yang serius untuk ditangani dengan senantiasa memantau perkembangannya, serta melakukan upaya intervensi apabila terjadi kelangkaan dan kenaikan harga komoditas bahan pokok dan penting;

8. Dalam hal perlindungan konsumen juga menuntut perhatian dengan memberikan penekanan kepada pelaku usaha dalam berproduksi agar menghindari penggunaan zat-zat berbahaya, disamping juga memperhatikan ketepatan takaran dan timbangan dengan senantiasa mengkalibrasi peralatan UTTP yang dimilikinya secara tepat waktu agar hak-hak konsumen dapat terlindungi;
9. Pengembangan informasi peluang pasar dan jaringan pemasaran baik secara *online* maupun *offline* sehingga mampu bersaing dan menjangkau sektor pasar yang lebih luas; dan
10. Adanya kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik produk unggulan daerah maupun produk hasil pembinaan *One Village One Product (OVOP).*

Dari beberapa isu-isu penting yang terkait dengan penanganan koperasi, usaha mikro serta perdagangan tersebut akan diupayakan untuk dapat dicarikan jalan keluar melalui beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan melalui perubahan Rencana Kerjanya Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.7
Program dan Kegiatan yang akan Dilaksanakan Tahun 2025
dalam rangka Penanganan Isu yang Berkembang

No.	Intervensi Kegiatan	Uraian yang dilaksanakan
Dalam Upaya Penanganan Koperasi (Terkait Isu 1, 2 dan 3)		
1.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi .	a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan permodalan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi sehingga meminimalisir penyimpangan pengelolaan koperasi; b. Melakukan penilaian kesehatan koperasi yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam baik berpola konvensional maupun syariah untuk melihat sejauh mana kualitas/tingkat kesehatan KSP/USP dan KSPPS/USPPS sehingga didapatkan data klasifikasi koperasi berdasarkan tingkat kesehatannya dan diberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi tersebut.

No.	Intervensi Kegiatan	Uraian yang dilaksanakan
2.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	a. Memberikan pembinaan kepada generasi milenial untuk gemar berkoperasi melalui *event* Galaksi (Gelar Kreasi Pemuda Koperasi); b. Memberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pelaku koperasi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi sehingga menjadi pengelola koperasi yang profesional dan bersertifikat SKKNI (Standar Kompetensi Koperasi Nasional Indonesia); c. Memberikan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih ditingkat desa/kelurahan sesuai Inpres Nomor 9 tahun 2025; d. Memberikan pendampingan kelembagaan koperasi untuk menjaga konsistensi kelembagaan koperasi agar sesuai dengan jatidiri koperasi dan bisa memberikan manfaat kepada lingkungan serta dalam perekonomian masyarakat; e. Memberikan apresiasi kepada Gerakan Koperasi dalam rangka Peringatan Hari Koperasi melalui acara Resepsi dan Gelar Produk Anggota Koperasi.
3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	a. Memfasilitasi pelaku koperasi untuk bermitra usaha dengan pihak ketiga baik Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas koperasi sehingga menambah peluang usaha baru baik berupa akses pasar maupun peningkatan kualitas produk koperasi dan anggota koperasi; b. Memfasilitasi dukungan pembiayaan bagi koperasi dengan pihak ketiga baik Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai program; c. Memberikan pendampingan kepada pelaku koperasi di sektor usaha, pembiayaan dan penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan produktivitas usaha koperasi sehingga program-program yang dapat diakses oleh koperasi dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

No.	Intervensi Kegiatan	Uraian yang dilaksanakan
Dalam Upaya Penanganan Usaha Mikro (Terkait Isu 3, dan 4)		
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	a. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro dengan pihak ketiga terkait akses permodalan dan pembiayaan; b. Memfasilitasi standarisasi usaha mikro melalui fasilitasi legalitas usaha (NIB) dan sertifikasi produk usaha (PIRT,SLHS,Halal); c. Memfasilitasi calon wirausaha baru guna menumbuhkan minat berwirausaha agar siap memasuki dunia usaha; d. Memfasilitasi usaha mikro meningkatkan kemampuan mengembangkan usaha dibidang manajemen; dan e. Memfasilitasi pembinaan pedagang kaki lima untuk meningkatkan usahanya.
2.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	a. Memfasilitasi para pelaku usaha mikro dengan pembinaan dan pendampingan pemasaran dengan mengikuti pameran tingkat kabupaten dan provinsi/pusat.
Dalam upaya penanganan Perdagangan (Terkait Isu 5 sampai 10)		
1.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan sarana distribusi perdagangan, diantaranya : a. Fasilitasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan pasar daerah yang nyaman dan representatif; b. Fasilitasi manajemen pengelolaan pasar daerah serta pembinaan terhadap pengelola dan pedagang pasar daerah untuk mencapai target retribusi yang ditetapkan, yaitu dengan menetapkan perjanjian kerja sama tentang kesepakatan sewa menyewa beserta sanksi.
2.	Pengendalian/stabilisasi Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	a. Monitoring dan sosialisasi terkait pendistribusian LPG 3 kg terhadap agen dan pangkalan guna optimalisasi pendistribusian dan penggunaan LPG 3 Kg. b. Monitoring dan pelaporan harga kebutuhan pokok, barang umum dan barang penting lainnya di pasar daerah serta pelaporannya melalui aplikasi siskaperbapo guna pengendalian harga kebutuhan pokok, barang umum dan barang penting di pasar daerah; c. Monitoring dan sosialisasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada distributor dan kios pupuk dalam rangka optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi.

No.	Intervensi Kegiatan	Uraian yang dilaksanakan
3.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. Fasilitasi keikutsertaan even pameran dagang skala nasional dan regional diantaranya : Pameran Hari Jadi Provinsi Jawa Timur; Trade Expo Internasional (TEI); b. Fasilitasi keikutsertaan Misi Dagang Antar Wilayah yang berkolaborasi dengan Kagiatan Disperindag Provinsi Jawa Timur yang jadwal dan pelaksanaan kegiatan mengikuti Disperindag Provinsi Jawa Timur. c. Bimbingan Teknis Bagi pelaku Usaha Ekspor di Kabupaten Tuban, meliputi: Tata Cara Ekspor, Bimbingan Pengisian Dokumen Ekspor, Pentingnya Surat Keterangan Asal (SKA) serta Evaluasi dan Monitoring Bagi pelaku usaha Ekspor.
4.	Pelaksanaan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	a. Pelaksanaan tera/tera ulang peralatan UTTP; b. Pemeliharaan peralatan Kemetrologian milik Dinas; c. Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP); d. Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
5.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	a. Pelaksanaan Pameran Dagang dan Pembangunan Dalam rangka Hari Jadi Tuban yang dikuti oleh pelaku usaha lokal, regional, Dinas/ perangkat daerah terkait, BUMN/BUMD, Perbankan, Perusahaan Swasta lokal dan Regional. dan Pemerintah Kabupaten lain yang tergabung dalam RATUBANGNEGORO; b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis pemasaran melalui media online bagi pelaku usaha.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada dasarnya merupakan rumusan prospektif dan direktif-indikatif bagi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas dan isu strategis pada tahun bersangkutan. Konstruksi permasalahan dan isu strategis sendiri merupakan hasil dari kajian atau evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, serta perkiraan kemampuan keuangan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Tuban pada tahun perencanaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Dalam perumusannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Tuban juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur demi terwujudnya keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat, provinsi dan daerah, yang dielaborasi melalui berbagai *environmental scanning* dari kebijakan dan *trend* dunia global. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan di daerah, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya pembangunan perekonomian secara nasional.

Dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan normatif dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru, sehingga saat ini merupakan masa peralihan periode RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 ke RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029, maka RKPD Tahun 2025 yang disusun pada dasarnya menjadi bagian dari desain dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah kabupaten Tuban yang bertujuan untuk mendapatkan dan menempatkan rencana pembangunan tahun 2025 dalam kerangka perspektif pembangunan jangka menengah yang utuh, sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut :

Tabel II.5
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran didalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

VISI : "Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan."								
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Target P-RKPD 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Target P-RKPD 2025
Pengembangan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan	Laju Pertumuhan Ekonomi	*4,87-5,01*	3,30 - 4,13%	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,85	1,85
		Tingkat Kemiskinan	13,5	14,06 - 13,56%		PDRB Sektor Industri Pengolahan	4.91	4.91
		Gini Rasio	0,310-0,342	0,356 - 0,335		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12	7,12
		Indeks Wiliamson	0,912-0,947	0,912-0,947	Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Tingkat Inflasi Daerah	1-2	1-2
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3	4,68 - 4,12%		Indeks Desa Membangun (IDM)	0.8086	0.8086
						PDRB Pekapita (dalam Juta)	58,3	58,3
						Persentase peningkatan nilai investasi	3,5	3,5

VISI : "Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan."								
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Target P-RKPD 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Target P-RKPD 2025
					(UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)			

Sumber : RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan nasional, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan. Prioritas dan program pembangunan tahun 2025 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Bahwasanya RKPD tahun 2025 ini merupakan periode tahun kelima dari masa pembangunan jangka menengah berdasarkan dokumen RPJMD 2021-2026 dan juga sebagai periode pertama dari masa pembangunan jangka menengah berdasarkan dokumen RPJMD 2025-2029. Dengan konstruksi yang demikian prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian sasaran dan prioritas strategis yang tercantum dalam arah kebijakan nasional, provinsi Jawa Timur, isu strategis dan prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban. Permasalahan pembangunan sering kali dihadapi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang menuntut setiap permasalahan tersebut dapat tertangani dan diantisipasi, sebagaimana permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tuban secara bertahap telah dapat diselesaikan dengan baik.

Prioritas pembangunan merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun perencanaan yang akan diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan jangka menengah tahun rencana, yang dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan jangka menengah pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya, yang berisi program-program unggulan Perangkat Daerah dan merupakan program pilihan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah, identifikasi semua faktor penyebab permasalahan baik internal maupun eksternal, selanjutnya disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Perlu dipahami bahwa tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran, demikian juga dengan prioritas pembangunan yang telah tercapai di masa lalu, tidak perlu diprioritaskan kembali, meskipun harus tetap dijaga kesinambungan dan keberlanjutannya sesuai dengan hasil evaluasi kinerja eksisting dan kebutuhannya berdasarkan hasil *environmental scanning* (proyeksi).

Idealnya perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui korelasi sekaligus daya dukung antara dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan perencanaan di tingkat atasnya baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang terkait dengan agenda-agenda prioritas.

Dengan menelaah permasalahan dan hasil evaluasi capaian RKPD tahun sebelumnya yang dikolaborasikan dengan RPJMN tahun 2025-2029, RKP tahun 2025, arah kebijakan dalam RKPD 2025 Provinsi Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045, serta RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029, maka terumuslah isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tuban tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fundamental ekonomi dengan transformasi strutural ekonomi, yaitu hilirisasi sektor pertanian (dalam arti luas) menuju sektor yang memberikan nilai tambah tinggi yang disertai dengan pengendalian penduduk.
2. Peningkatan produktifitas sektor ekonomi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah, khususnya yang berbasis potensi lokal/pertanian, baik *on farm* maupun *off farm*.
3. Peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi, khususnya yang berpendapatan rendah (petani, nelayan, pembudidaya).
4. Transformasi struktural perekonomian yang seimbang: pergeseran kontribusi produksi per sektor disertai/seiring dengan kontribusi tenaga kerja per sektor.
5. Pengembangan usaha bernilai tambah tinggi (industri, perdagangan dan jasa) berbasis sektor pertanian dan penyediaan infrastruktur wilayah pendukungnya; Percepatan pembangunan desa/implementasi pembangunan kewilayahan dengan prioritas wilayah "terbelakang".

6. Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan layanan sosial lainnya) dan penyediaan infrastruktur dasar pendukungnya.
7. Peningkatan ketahanan sosial (ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perlindungan anak, pembangunan kebudayaan).
8. Penguatan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk dengan melibatkan masyarakat.
9. Urgensi Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan aman bencana.
10. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan TIK kerjasama antar *stakeholder*.
11. Penguatan pengelolaan keuangan daerah: optimalisasi peningkatan PAD; kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK dan kerjasama antar stakeholder pembangunan.

Sasaran serta prioritas RKPD Tahun 2025 diharapkan dapat selaras dengan upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka ditetapkan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di semua produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,dan penyelundupan;dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari kedelapan agenda pembangunan tersebut selanjutnya dikaitkan dengan isu-isu strategis yang ada, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Agenda Pembangunan	Keterkaitan Isu Strategis
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Penguatan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk dengan melibatkan masyarakat.
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2. Penguatan fundamental ekonomi dengan transformasi strutural ekonomi, yaitu hilirisasi sektor pertanian (dalam arti luas) menuju sektor yang memberikan nilai tambah tinggi yang disertai dengan pengendalian penduduk. 3. Peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi, khususnya yang berpendapatan rendah (petani, nelayan, pembudidaya).
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di semua produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Transformasi struktural perekonomian yang seimbang: pergeseran kontribusi produksi per sektor disertai/seiring dengan kontribusi tenaga kerja per sektor. 5. Urgensi Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan aman bencana.

No	Agenda Pembangunan	Keterkaitan Isu Strategis
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan layanan sosial lainnya) dan penyediaan infrastruktur dasar pendukungnya.
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan produktifitas sektor ekonomi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah, khususnya yang berbasis potensilokal/pertanian, baik *on farm* maupun *off farm*.
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	8. Pengembangan usaha bernilai tambah tinggi (industri, perdagangan dan jasa) berbasis sektor pertanian dan penyediaan infrastruktur wilayah pendukungnya; Percepatan pembangunan desa/implementasi pembangunan kewilayahan dengan prioritas wilayah "terbelakang".
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,dan penyelundupan.	9. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan TIK kerjasama antar *stakeholder*.
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Peningkatan ketahanan sosial (ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perlindungan anak, pembangunan kebudayaan).

Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tuban tahun 2025, tema pembangunan ditentukan dengan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026, yang diselaraskan juga dengan Tema RKPD Jawa Timur Tahun 2025 dan Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2025. Dengan mengacu pada tema RPJMD Kabupaten Tuban yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 yakni **"Mewujudkan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan daya saing daerah berbasis sumber daya manusia unggul serta potensi sektor strategis"**, dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2025 maka ditetapkan beberapa arah kebijakan dalam Pemantapan perwujudan daya saing daerah berbasis potensi ekonomi dan sumber daya manusia unggul diantaranya akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan (daya saing) SDM, dan Pemenuhan (daya saing) infrastruktur pendukung investasi dan sektor strategis lainnya.

Sesuai dengan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban yang mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Timur dan selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tuban, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban untuk tahun 2025 dituangkan penyelarasannya dalam tabel sebagai berikut :

No	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
1.	Jatim Akses Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan (PP3).	1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik (PP1). 2. Program Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik (PP2).

No	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
2	Jatim Lestari Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan (PP9).	3. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana (PP3).
3	Jatim Sejahtera Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas Sektoral-Spasial berbasis Data Terpadu (PP1).	4. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha (PP4).
4	Jatim Kerja Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi (PP2).	5. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah (PP5).
5	Jatim Argo Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional (PP7).	6. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan (PP6).
6	Jatim Cerdas Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (*Education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan (PP4).	7. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan karakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat (PP7).

No	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
7	Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *universal health coverage* (UHC) (PP5).	8. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat (PP8).
8	Jatim Sejahtera Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas Sektoral-Spasial berbasis Data Terpadu (PP1).	9. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia (PP9).
9	Jatim Harmoni Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga (PP8).	10. Program Pemantapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (PP10).
10	Jatim Berkah – Amanah Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif (PP6).	11. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital (PP11). 12. Program peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan (PP12).

Dari kedua belas prioritas pembangunan tersebut, yang sejalan dengan tugas fungsi yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah pada Prioritas Pembangunan Pertama, yakni: 1) Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;dan 2) Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah, dengan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung prioritas ini adalah:

a. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya;
b. Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan intensifikasi produk unggulan;
c. Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban menjadi dokumen rencana tahunan yang memuat rancangan program dan kegiatan, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tuban 2025-2029 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2025, maka program kerja prioritas yang sejalan dengan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan prioritas pembangunan adalah pada Prioritas Pembangunan keempaat yakni: “Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesmpatan berusaha” dengan program kerja prioritas adalah :

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
e. Program Pengembangan UMKM; dan
f. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Program kerja prioritas yang sejalan dengan urusan perdagangan sesuai dengan Prioritas Pembangunan kelima yakni: “Optimalisasi pengelolaan potensi lokal (sektor primer pertanian) melalui hilirisasi komoditas unggul dengan program kerja prioritas adalah :

a. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan;
b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
c. Program Pengembangan Ekspor; dan
d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Sejalan dengan Program Kerja prioritas tersebut maka didalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 telah ditetapkan rincian program dan pendanaannya sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel II.9 (T-C.31) berikut :

Tabel II.9 (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,95 Poin	15.731.605.875	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	84,40 Poin	14.940.807.621	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	201.628.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	10 Dokumen	132.599.050	Berkurang 69.028.950
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	92.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.595.500	Berkurang 16.904.500

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	21.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.689.000	Berkurang 10.411.000
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	88.028.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	46.314.550	Berkurang 41.713.450
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	20 Dokumen	13.991.151.745	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	13.335.727.719	Berkurang 655.424.026
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bln	13.814.415.495	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/ bln	13.220.312.647	Berkurang 594.102.848
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	103.060.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	87.460.000,00	Berkurang 15.600.000

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.025.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4.946.000	Berkurang 5.079.000
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	54.128.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18.181.572	Berkurang 35.946.678,
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.523.000		Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.827.500	Berkurang 4.695.500
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Kepegawaian	178 Orang	107.459.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	2 Jenis	4.476.000	Berkurang 102.983.000

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	90.459.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	Berkurang 89.483.000,
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	7.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3.500.000	Berkurang 3.500.000
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Berkurang 10.000.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	7 Layanan	392.405.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Jenis	304.190.250	Berkurang 88.214.750
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	-

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	-
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	99.100.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.890.000	Berkurang 3.210.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	44.996.280	Berkurang 15.003.720,
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.305.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	425 Dokumen	13.303.970	Berkurang 1.030
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	140.000. 000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70.000.000	Berkurang 70.000.000
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah jenis pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	106.459.943	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jenis	193.655.820	Bertambah 87.195.877

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	106.459.943	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	193.655.820	Bertambah 87.195.877
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	716.102.187	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jenis	753.758.782	Bertambah 37.656.595
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	420.000	Berkurang 380.000
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	358.556.152	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	408.142.410	Bertambah 49.586.258
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	36.120.900	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.116.357	Berkurang 4.543

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	320.625.135	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	309.080.015	Berkurang 11.545.120,
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	245 Unit	216.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	216.400.000	Tetap
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	67.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	67.000.000,	Tetap

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	85.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	85.000.000	Tetap
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	24.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	24.400.000	Tetap
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	Tetap
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Prosentase Koperasi Sehat	60%	69.999.700	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Prosentase Koperasi Sehat	13,14%	42.424.610	Berkurang 27.575.090

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang Berkategori Sehat	37.79 Persen	69.999.700	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang Berkategori Sehat	180 unit usaha	42.424.610	Berkurang 27.575.090
2.17.03.2.01.0001	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	322 unit usaha	69.999.700	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	515 unit usaha	42.424.610	Berkurang 27.575.090
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya	0,4 %	259.996.908	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya	4,38 %	955.245.258	Bertambah 695.248.350

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Koperasi yang meningkat Kapasitasnya	0,45 %	259.996.908,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelola koperasi yang dibina	17,23%	955.245.258	Bertambah 695.248.350 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 orang	259.996.908,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	428 orang	955.245.258	Bertambah 695.248.350

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Prosentase Koperasi Produktif	16,60 %	209.199. 000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang berkualitas	35,10%	50.100.500	Berkurang 159.098.500 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	4,00 % 6,04 %	209.199. 000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Koperasi aktif	50,58%	50.100.500	Berkurang 159.098.500 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029.

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.06.2.01.0001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	65 Unit Usaha	209.199. 000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	92 Unit Usaha	50.100.500	Berkurang 159.098.500,
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	7,42 %	344.733.250	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro yang terstandarisasi	22.02 %	1.388.578.997	Bertambah 1.043.845.747. Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029.

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.38 %	344.733.250	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi standarisasi usaha	22,68%	1.388.578.997	Bertambah 1.043.845.747 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	70 Unit Usaha	40.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	70 Unit Usaha	23.605.175	Beerkurang 16.394.825

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Tuban Bancar, Bulumedur Kab. Tuban Soko, Jegulo Kab. Tuban Palang, Cendoro Kab. Tuban Palang, Pucangan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	35.000.000,00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Tuban Bancar, Bulumedur Kab. Tuban Soko, Jegulo Kab. Tuban Palang, Cendoro Kab. Tuban Palang, Pucangan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	78.223.450	Bertambah 43.223.450
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tuban Kenduruan Sokogunu Kab. Tuban Kenduruan Sidohasri Kab. Tuban	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	400 Orang	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tuban Kenduruan Sokogunu Kab. Tuban Kenduruan Sidohasri Kab. Tuban	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	400 Orang	590.139.832,00	Bertambah 490.139.832

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tuban, Lat Kab. Tuban Tuban, Sendangharjo					Tuban, Lat Kab. Tuban Tuban, Sendangharjo				
2.17.07.2.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	260 Orang	169.733.250	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	300 Orang	696.610.540	Bertambah 526.877.290 ,
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Prosentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Wirausaha	19,95%	830.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Prosentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Wirausaha	19,95 %	61.254.923	Berkurang 768.745.077
2.17.08. 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,71 % 24,53 %	830.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	24,53%	830.000.000	-Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.08. 2.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2069 Unit Usaha	830.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2 Unit Usaha	61.254.923	Berkurang 768.745.077
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/Dasaran; Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	10 % 88,50 %	11.108.332.485	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Prosentase prasarana distribusi perdagangan yang difungsikan	58,33%	14.023.720.610	Bertambah 6.561.277.625 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah yang Terbangun dan Dikelola	9 Pasar Daerah	8.945.011.884	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Pasar Daerah	Persentase sarana prasarana pasar daerah yang terpenuhi	2,47%	11.980.361.856	Bertambah 3.035.349.972 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 unit	8.945.011.884	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	11 unit	11.980.361.856	Bertambah 3.035.349.972

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	9 Pasar Daerah	Jumlah pembinaan terhadap pedagang pasar daerah Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan	145 Orang 180 Orang	2.163.320.601,00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	9 Pasar Daerah	Jumlah retribusi pasar daerah	Rp. 4.862.518.800,00	2.043.358.754,00	Berkurang 119.961.847 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	2.163.320.601,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	2.043.358.754,00	Berkurang 119.961.847
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<13 %	593.554.162	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting	Rp. 30,300	540.532.745	Berkurang 193.554.000 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029
3.30.04.2.01	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Data rata-rata harga bapokting per komoditas	100 % 1 Dokumen	543.554.217	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil catatan pemantauan harga bahan pokok	15 rekomendasi	497.564.282	Berkurang 45.989.935 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.04.2.01.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	45.000.033,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	24.229.240	Berkurang 20.770.793
3.30.04.2.01.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	498.554.184	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	473.335.042	Berkurang 7.031.482
3.30.04.2.02	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi yang tepat sasaran	65,50 %	49.999.945	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil catatan poemantauan distirbusi pupuk	2 rekomendasi	42.968.463	Berkurang 7.031.482 Ada perubahan indikator sesuai hasil BA RPJMD 2025-2029

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.04.2.02.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	49.999.945	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	42.968.463	Berkurang 7.031.482
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	39,18 %	309.424.790	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase pelaku usaha ekspor	32,43%	238.948.420	Berkurang 70.476.370 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah transakasi Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang	22.3 Milyar	309.424.790	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pengembangan ekspor	99 pelaku usaha	238.948.420	Berkurang 70.476.370 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	224.425.950	Pameran Dagang Nasional	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	195.915.220	Berkurang 28.510.730
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	59.999.800	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	29.619.680	Berkurang 30.380.120
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	40 produk	24.999.040	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 produk	13.413.520	Berkurang 11.585.520

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98 %	268.758.600	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	91 %	167.572.800	Berkurang 101.185.800
3.30.06 .2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	98 %	268.758.600	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	90.05 %	167.572.800	Berkurang 101.185.800
3.30.06. 2.01.00 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	17345 Unit	268.758.600	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12429 Unit	167.572.800	Berkurang 101.185.800
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya	19,38 %	410.832.730	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase Produk Lokal yang dipromosikan	26.40 %	344.067.940	Berkurang 66.764.790 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah transakasi pada pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	14,9 Milyar	410.832.730	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah pelaku usaha yang bermitra	12,70 Milyar	344.067.940	Berkurang 66.764.790 Ada perubahan pada indikator sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029
3.30.07.2.01.0001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	74 UMKM	382.287.950	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	74 UMKM	324.936.300	Berkurang 57.351.650

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.30.07.2.01.0002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	80 UMKM	28.544.780,00	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	80 UMKM	19.131.640,00	Berkurang 9.413.140
JUMLAH					**30.136.437.500**					**32.753.254.424**	**Bertambah 2.616.816.924**

Dari tabel diatas dapat diketahui perubahan target kinerja anggaran pada rancangan awal P-RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sesuai hasil BA penyelarasan RPJMD Kabupaten Tuban tanggal 19 Agustus 2025 tentang Penyepakatan indikator, target kinerja anggaran pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta adanya efisiensi anggaran pada level sub kegiatan yang ditekankan pada belanja perjalanan dinas dan lembur sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu pada:

1. Urusan Koperasi dan UMKM sebagai berikut:
    1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja nilai evaluasi AKIP perangkat daerah target kinerja 83,95 poin sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi target 84,40 dengan anggaran awal P-RKPD sebesar Rp15.731.605.875,00 menjadi Rp14.940.807.621,00 selisih berkurang sebesar Rp790.789.254,00 atau 5,03% ini terletak pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkurang sebesar Rp69.028.950,00, kegiatan administrasi keuangan Rp102.983.000,00, kegiatan administrasi umum perangkat daerah berkurang sebesar Rp88.214.750,00, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan bertambah sebesar Rp87.195.877,00 terletak pada belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah bertambah sebesar Rp37.656.595,00 terletak pada belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah anggaran tetap;
    2) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator persentase koperasi sehat dengan target kinerja awal P-RKPD 60% sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi target kinerja 13,14% dengan pagu anggaran awal P-RKPD sebesar Rp69.999.700,00 menjadi Rp42.424.610,00 selisih berkurang Rp27.575.090,00 atau 39,39% terdapat pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota berkurang sebesar Rp27.575.090,00;

3) Program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya dengan target kinerja awal P-RKPD 0,4% sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi target kinerja 4,38% dengan pagu anggaran awal P-RKPD sebesar Rp259.996.908,00 menjadi Rp955.245.258,00 selisih bertambah sebesar Rp695.248.350,00 atau 267,41% terletak pada belanja pendiudikan dan latihan perkoerasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan intervensi pemberian fasilitasi perijinan kelembagaan bagi koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan indikator awal P-RKPD adalah persentase koperasi produktif dengan target kinerja 16,60% sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi indikator Persentase koperasi yang berkualitas target kinerja 35,10 % dengan pagu anggaran awal P-RKPD sebesar Rp209.199.000,00 menjadi Rp50.100.500,00 selisih berkurang sebesar Rp159.098.500,00 atau 76,05%;
5) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator awal P-RKPD yaitu persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi standarisasi usaha dengan target kinerja 0,38% sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi persentase usaha mikro yang terstandarisasi target kinerja 22,02% dengan pagu anggaran awal P-RKPD sebesar Rp344.733.250,00 menjadi Rp1.388.578.997,00 selisih bertambah Rp1.043.845.747,00 atau 75,17% karena kegiatan pada program pengembangan UMKM karena adanya efisiensi kinrja maka intervensi kegiatan di pindah di program program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
6) Program pengembangan UMKM dengan indikator awal P-RKPD persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha target kinerja 19,95% sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi target kinerja 19,95% dengan pagu anggaran awal P-RKPD sebesar Rp830.000.000,00 menjadi Rp61.254.923,00 selisih berkurang sebesar Rp768.745.077,00 atau 92,62% karena intervensi fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi dipindah di program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM).

2. Urusan perdagangan sebagai berikut:
   1) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator awal P-RKPD persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi target kinerja 88,50% sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi indikator Prosentase prasarana distribusi perdagangan yang difungsikan target kinerja 58,33% dengan pagu anggaran awal P-RKPD sebesar Rp11.108.332.485,00 menjadi Rp14.023.720.610,00 selisih bertambah sebesar Rp6.561.277.625,00 atau 26,252% karena adanya penambahan pada penyediaan sarana distribusi perdagangan yaitu revitalisasi pasar karangagung palang;
   2) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator awal P-RKPD perkembangan rata-rata harga 21 komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting target kinerja <13% sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi indikator rata-rata harga bahan pokok dan penting target kinerja Rp30.300,00 dengan pagu anggaran awal P-RKPD sebesar Rp593.544.162,00 menjadi Rp540.532.745,00 selisih berkurang sebesar Rp193.554.000,00 atau 8,93% karena adanya pengurangan pada pemantauan harga bapokting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
   3) Program pengembangan ekspor dengan indikator awal P-RKPD persentase peningkatan pelaku usaha ekspor target kinerja 39,18% sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi indikator persentase pelaku usaha ekspor target 32,43% dengan pagu anggaran awal P-RKPD sebesar Rp309.424.790,00 menjadi Rp238.948.420,00 selisih berkurang sebesar Rp70.476.370,00 atau 22,78% karena adanya pengurangan pada kegiatan pameran dagang nasional, misi dagang bagi produk ekspor unggulan, dan peningkatan citra produk ekspor;
   4) Program standarisasi dan perlindungan konsumen dengan indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku target awal P-RKPD 98% sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi target 91% dengan pagu anggaran awal P-RKPD sebesar Rp268.758.600,00 menjadi Rp167.572.800,00 selisih berkurang sebesar Rp101.185.800,00 atau sebesar 37,65% hal ini karena adanya pengurangan pada pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang; dan

5) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan indikator awal P-RKPD persentase kenaikan nilai produk lokal yang difasilitasi pemasarannya dengan target sebesar 19,38% sesuai analisis kebutuhan menjadi indikator persentase produk lokal yang dipromosikan target 26,40% dengan anggaran awal P-RKPD sebesar Rp410.832.730,00 menjadi Rp344.067.940,00 atau selisih berkurang sebesar Rp66.764.790,00 atau 16,25% karena ada pengurangan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota dan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditingkat kabupaten/kota.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai rangkaian penyusunan perencanaan yang dimulai dari pemerintahan terendah di desa/kelurahan melalui musyawarah pembangunan tingkat desa yang menghasilkan keluaran berupa usulan program/kegiatan pada tingkat desa/kelurahan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan yang menghasilkan keluaran berupa usulan prioritas pembangunan pada tingkat kecamatan, yang mengakomodir berbagai usulan dari pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi yang ada di tingkat kecamatan, yang perlu disinkronisasi dengan usulan pada tingkat Perangkat Daerah selaku unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ditanganinya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya serta analisa kebutuhan prioritas program yang akan dilaksanakan mengacu pada prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat kecamatan (Musrenbangcam) yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya, terdapat beberapa usulan yang diajukan masyarakat dan terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dapat disajikan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel II.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban

No.	Kec	Pengusul	Profil	Usulan	Permasalahan
			NIHIL		

Sumber : Rekap Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025

Berdasarkan usulan dari masyarakat diatas yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagaimana terekap diatas adalah nihil.

Adapun hasil yang dapat direkomendasikan terhadap beberapa usulan dan permasalahan dari masyarakat diatas dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.11 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.		NIHIL			
2.					
3.					
4.					

Sumber : Rekap Hasil Usulan Musrenbangcam Tahun 2025

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan dalam perubahan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan formulasi dari rangkaian Pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang implementasinya selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini melalui matrik rencana program dan kegiatan pembangunan beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani, baik wajib maupun pilihan, yang dilaksanakan melalui masing-masing bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban.

Didalam merumuskan rencana kerja dan pendanaan dalam perubahan Rencana Kerja Tahun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan atau mendasari perlunya dilakukan Perubahan, diantaranya:

1. Adanya perubahan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan pada Renstra Tahun 2025-2029 yaitu 1)Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha; dan 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan.
2. Adanya beberapa kegiatan yang didalam rekening belanjanya perlu dilakukan penggeseran karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya;

3. Adanya beberapa kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan namun anggarannya tidak mencukupi sehingga memerlukan penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan yang mendesak;
4. Adanya beberapa kegiatan yang perlu pengurangan jumlah anggaran akibat penyesuaian dengan kebutuhan;
5. Adanya kegiatan yang dirasa tidak perlu dilaksanakan dengan mengalihkan anggarannya pada kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut maka pada Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian perubahan sesuai dengan kebutuhan diatas. Berdasarkan hasil penyesuaian yang telah dilakukan, maka pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami perubahan dari anggaran pada APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang semula sebesar Rp30.136.437.500,00 (tiga puluh milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berubah menjadi sebesar Rp32.753.254.424,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.1 (T.C-33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tuban

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN				32.753.254.424				37.167.268.993
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				17.438.411.909				19.132.276.575
		Tujuan PD 1: Meningkatnya kontribusi perdagangan, koperasi, dan UMKM terhadap perekonomian daerah	Rasio kewirausahaan		7,47					
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				17.438.411.909				19.132.276.575

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sasaran PD: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Indeks kepuasan masyarakat(IKM) Perangkat Daerah		88,29					
2.17.01	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		84,40 Poin	14.940.807.621			84,90 Poin	15.726.077.875
2.17.01.2.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	132.599.050			9 Dokumen	208.600.000
0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tuban Kel. Latsari	3 Dokumen	75.595.500	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Dokumen	92.500.000

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0006	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tuban Kel. Latsari	3 Laporan	10.689.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		3 Laporan	21.100.000
0007	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang Tersusun	Kec. Tuban Kel. Latsari	4 Laporan	46.314.550	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		4 Laporan	95.000.000
2.17.01.2.02	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	9 Jenis	13.335.727.719			9 Jenis	13.991.151.745
0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	114 Orang/ Bulan	13.220.312.647	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		128 Orang/ Bulan	13.814.415.495

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	12 Dokumen	87.460.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Dokumen	103.060.000
0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	4 Laporan	4.946.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		4 Laporan	10.025.000
0007	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	18 Laporan	18.181.572	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		18 Laporan	54.128.250

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0008	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	1 Dokumen	4.827.500	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Dokumen	9.523.000
2.17.01.2.05	Terlaksananya Fasilitasi Layanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan kepoegawaian	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	2 Jenis	4.476.000			2 Jenis	107.459.000
0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	1 Paket	976.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Paket	90.459.000
0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	4 Dokumen	3.500.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		4 Dokumen	7.000.000
2.17.01.2.06	Terlaksananya Fasilitasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	6 Jenis	304.190.250			5 Jenis	388.305.000

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	1 Paket	30.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Paket	30.000.000
0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	1 Paket	50.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Paket	50.000.000
0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	1 Paket	95.890.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Paket	95.000.000
0005	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	2 Paket	44.996.280	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Paket	60.000.000

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0006	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	425 Dokumen	13.303.970	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		425 Dokumen	13.305.000
0009	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	70 Laporan	70.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		90 Laporan	140.000.000
2.17.01.2.07	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	1 Jenis	193.655.820			1 Jenis	106.459.943
0006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	24 Unit	193.655.820	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Unit	106.459.943

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.08	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	4 Jenis	753.758.782			2 Jenis	1.945.290.685
0001	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	2 Laporan	420.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Laporan	800.000
0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	12 Laporan	408.142.410	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Laporan	358.556.152
0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	12 Laporan	36.116.357	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Laporan	36.120.900

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	12 Laporan	309.080.015	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Laporan	312.225.135
2.17.01.2.09	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	4 Jenis	216.400.000			3 Jenis	216.400.000
0001	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	2 Unit	67.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Unit	67.000.000
0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	28 Unit	85.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		28 Unit	85.000.000

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	40 Unit	24.400.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		40 Unit	24.400.000
0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	1 Unit	40.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Unit	40.000.000
		Sasaran PD: Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro mapan	**Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB**		**0,54%**					
2.17.03	Meningkatnya Koperasi Sehat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi Sehat		13,14%	42.424.610			16,79%	69.999.700
2.17.03.2.01	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perkoperasian	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang berkategori sehat		180 unit usaha	42.424.610			230 unit usaha	69.999.700

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0004	Melakukan Penilaian Kesehatan dan Akuntabilitas Koperasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	515 unit usaha	42.424.610	DANA BAGI HASIL (DBH)		557 unit usaha	69.999.700
2.17.05	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya		8,81 %	955.245.258			10,80%	1.200.000.000
2.17.05.2.01	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang dibina		17,23%	955.245.258			27,64%	1.200.000.000

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0001	Melakukan Pelatihan, Workshop dan Bimtek bagi Pengelola Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428 Orang	955.245.258	DANA BAGI HASIL (DBH)		428 Orang	1.200.000.000
2.17.06	Meningkatnya Produktifitas Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas		35,10%	50.100.500			36,65%	209.199.000
2.17.06.2.01	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi aktif		50,58%	50.100.500			52,04%	209.199.000
0005	Melakukan Fasilitasi Akses Pembiayaan, Kemitraan Sektor Riil, dan Perizinan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	92 Unit Usaha	50.100.500	DANA BAGI HASIL (DBH)		150 Unit Usaha	209.199.000

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sasaran PD: Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro mapan	**Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha mapan**		**19,03%**					
2.17.07	Meningkatnya Usaha Mikro yang Terstandarisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi		22,02%	1.388.578.997			23,35%	1.147.000.000
2.17.07.2.01	Meningkatnya Fasilitasi Standarisasi Usaha Mikro (Akses Perizinan, Sertifikasi dan Pemasaran serta Permodalan bagi Usaha Mikro)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi standarisasi usaha	Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	22,68%	1.388.578.997			25,04%	1.147.000.000

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0002	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	70 Unit Usaha	23.605.175	DANA BAGI HASIL (DBH)		240 Unit Usaha	40.000.000
0003	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	78.223.450	DANA BAGI HASIL (DBH)		80 Unit Usaha	50.000.000
0005	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	590.139.832	DANA BAGI HASIL (DBH)		250 Unit Usaha	100.000.000

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0015	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	696.610.540	DANA BAGI HASIL (DBH)		450 Unit Usaha	957.000.000
2.17.08	-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha		19,95 %	61.254.923		Sesuai hasil BA penyelaras an indikator RPJMD 2025-2029 Kab. Tuban	0%	00

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.08.2.01	-	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24,53% 1,71%	61.254.923		Kegiatan ini di hapus dan untuk pelaksanaan di alihkan ke kegiatan pemberdayaan UMKM	0%	0
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.314.842.515				5.936.071.142
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.314.842.515				5.936.071.142
		Tujuan PD 1: Meningkatnya kontribusi perdagangan, koperasi, dan UMKM terhadap perekonomian daerah	Persentase kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		14,32%					

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sasaran PD: Terkendalinya stabilitas harga	Tingkat fluktuasi harga komoditas bapokting		0,9%					
3.30.03	Meningkatnya Kualitas Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase prasarana distribusi perdagangan yang difungsikan		58,33%	14.023.720.610			75%	4.547.054.860
3.30.03.2.01	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana pasar daerah yang terpenuhi		2,47%	11.980.361.856			82,72%	2.137.243.759
0001	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	11.980.361.856	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Unit	2.137.243.759
3.30.03.2.02	Terselenggaranya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang Baik dan Tertib	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah retribusi pasar daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Rp4.862.518.800,00	2.043.358.754			Rp5.201.281.951,00	2.409.811.101

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0001	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.043.358.754	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Dokumen	2.409.811.101
3.30.04	Tersedianya Informasi Perkembangan Harga Komoditas Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata- rata harga bahan pokok dan penting		Rp. 30.300,00	540.532.745 ,			Rp. 30.400,00	400.000.162
3.30.04.2.02	Terpantaunya Harga Bahan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil catatan pemantauan harga bahan pokok		15 rekomendasi	497.564.282			15 rekomendasi	350.000.217

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0001	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	24.229.240	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	45.000.033
0002	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada sistem informasi perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	473.335.042	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pada periode selanjutnya sub kegiatan ini diefisiensi	1 Laporan	305.000.184
3.30.04.2.03	Terpantaunya Distribusi Pupuk Bersubsidi sesuai Ketentuan	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil catatan poemantauan distirbusi pupuk		2 rekomendasi	42.968.463			2 rekomendasi	49.999.945

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0003	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	42.968.463	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Laporan	49.999.945
3.30.06	Meningkatnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		91 %	167.572.800			92%	268.758.600
3.30.06.2.01	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Metrologi Legal	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat ukur, takar, imbang dan perlengkapannya (uttp) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		90,05%	167.572.800			91,05%	268.758.600

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0001	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terhadap Ketentuan yang Berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.429 Unit	167.572.800	DANA BAGI HASIL (DBH)		12.567 Unit	268.758.600
3.30.07	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Produk Lokal yang dipromosikan		26,40 %	344.067.940			31,33%	410.832.730
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang bermitra		136 Pelaku Usaha	344.067.940			146 pelaku usaha	410.832.730
0005	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 UMKM	324.936.300	DANA BAGI HASIL (DBH)		80 UMKM	382.287.950

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0006	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 UMKM	19.131.640	DANA BAGI HASIL (DBH)		80 UMKM	28.544.780
		Sasaran PD: Meningkatnya nilai produk ekspor	Nilai ekspor barang		53,32%					
3.30.05	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha ekspor		32,43%	238.948.420			35,14%	309.424.790
3.30.05.2.01	Meningkatnya Fasilitasi Perluasan Jaringan Pemasaran	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pengembangan ekspor		99 Pelaku Usaha	238.948.420			153 Pelaku Usaha	309.424.790

Kode	Outcome/Output	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp,)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0002	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Pelaku Usaha	195.915.220	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Pelaku Usaha	224.425.950
0004	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		2 Pelaku Usaha	29.619.680	DANA BAGI HASIL (DBH)	Sub kegiatan diefisiensi pada tahun 2026	0	0
0005	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		20 Produk	13.413.520	DANA BAGI HASIL (DBH)		50 Produk	24.999.040

Sumber : SIPD Renja Perubahan 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam perkembangan keadaan yakni perkembangan tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyemepurnaan kebijakan maupun rencana pelaksanaan program pembangunan sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS Perubahan untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk didalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, nantinya menjadi isntrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Pencapaian target rencana program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program/kegiata prioritas yang termuat dalam perubahan RKPD Tahun 2025, dalam pelaksanaannya mempertimbangan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh yang diharapkan mampu mendukung upaya mendukung pencapaian Visi, Misi serta target Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Tuban.

Adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dan yang harus ditindak lanjut kedepannya antara lain isu-isu strategis yang meliputi:

1. Pembentukan, pengesahan Badan Hukum dan Pembinaan Pengurus/Pengawas bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Inpres nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Pemberdayaan UMKM dan kemitraan dengan dunia usaha melalui pengembangan ekspor, kemitraan toko modern dan swalayan;
3. Meningkatkan pendapatan kepada pelaku usaha dengan mengikutsertakan pelaku usaha pada event dalam maupun luar daerah, serta memberi fasilitasi pembiayaan, perijinan, sertifikasi usaha dan sosialisasi keamanan pangan sehat, dan memberikan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha; dan
4. Penyediaan sarana prasarana pasar daerah yang layak fungsi yaitu revitalisasi pasar baru dan pasar karangagung dengan serta penguatan manajemen pasar yang baik.

Disamping isu-isu strategis diatas, yang perlu mendapat perhatian juga ketersediaan anggaran apabila tidak sesuai dengan kebutuhan dapat kita analisis dari program dan kegiatan yang strategis sehingga dapat diukur kebutuhan perencanaan yang akan datang.

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Drs. AGUS WIJAYA, M.AP.

BUPATI TUBAN,

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan periode tahunan yang juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan lain dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh melalui dorongan dan partisipasi dari masyarakat. Perubahan Renja Perangkat Daerah dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Keutamaan fungsi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan landasan fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan daerah pemerintah terendah yang dinaungi oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat terkait dengan

masyarakat dimana tujuan lainnya adalah mengutamakan berjalannya pelayanan publik demi mensejahterakan masyarakat daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja demi mewujudkan kesuksesan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tuban. Substansi yang menunjang tujuan tersebut termuat dalam tatanan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang dipilih merupakan program dan kegiatan berjalan satu tahun yang telah dirumuskan secara tepat untuk menunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban, dimana terkait langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban melaksanakan Misi 2 yang menyatakan: “Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergi daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”. Misi 2 merupakan prinsip yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pagu indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Sedangkan prakiraan maju merupakan prakiraan anggaran yang dibutuhkan pada tahun berikutnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Kabupaten Tuban mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam Rencana Kerja perencanaan strategis jangka menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban ke dalam rencana program, dan penganggaran tahunan. Selain itu Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi mendukung rencana pembangunan Kabupaten Tuban. Hal ini dilakukan dengan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.

Perbaikan pelayanan birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya adalah pelayanan publik pada Bidang Perizinan tidak bisa dipisahkan dari konteks reformasi birokrasi. Institusi birokrasi memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak bisa digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga lainnya. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Upaya reformasi birokrasi dan regulasi yang mengatur tentang kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya reformasi birokrasi tersebut dilakukan melalui reformasi birokrasi pelayanan perizinan. Upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi pelayanan perizinan adalah mengurangi dan mempersingkat jumlah maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena masih begitu banyak regulasi yang membebani pelaku usaha sehingga harus mengalokasikan waktu dan tenaga yang besar untuk mendapatkan formulir yang diminta. Banyak pihak yang menilai bahwa pelayanan publik yang terkait dengan perizinan yang ada saat ini prosedur dan mekanismenya berbelit-belit, tidak transparan,

kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya).

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun demikian transparansi dan akuntabilitas yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penjabaran secara lebih rinci mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, karena pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengawasan/pengendalian dan laporan hasil kinerjanya. Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik karena sangat berkaitan dengan kepastian berusaha bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.

Sebagai salah satu negara demokrasi dimana kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat, berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja birokrasi akan semakin kompleks, serta pada konteks negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui berbagai media baik secara formal maupun non formal. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membuat sebuah kebijakan guna mempermudah investasi di

Indonesia yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adanya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan setiap perizinan investasi memiliki mekanisme yang lebih mudah sehingga mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Adanya upaya reformasi birokrasi sebagai tindaklanjut peraturan tersebut, maka pada setiap daerah membentuk instansi pelayanan terpadu satu pintu yang melaksanakan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, serta fungsi penyelenggaraan penanaman modal. Dengan adanya kebijakan tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban telah mengupayakan pelayanan publik yang prima yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berlakunya pelayanan perizinan secara elektronik *Online Single Submission* secara signifikan telah mempermudah masyarakat Kabupaten Tuban untuk mengurus izin usaha secara mandiri. Adapun peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban adalah kesediaan dalam membantu dan membimbing masyarakat pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi *Online Single Submission*.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan organisasi serta pelayanan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tuban melaksanakan evaluasi dan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi (*right functioning*) dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Oleh sebab itu

maka Pemerintah Kabupaten Tuban memandang perlu untuk melakukan perubahan susunan organisasi pelaksana pelayanan terpadu satu pintu yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021, Perbup Tuban Nomor 181 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun berjalan. Fungsi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu sampai dengan triwulan II tahun berjalan, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Bupati Tuban Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban;
34. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan sebagai acuan kebijakan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 serta proyeksi di akhir Tahun 2025.
2. Sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja.
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diimplementasikan kedalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025.
5. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 Penulisan Sistematika

Penulisan Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD T

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2026)

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Realisasi target kinerja output kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa capaian yang telah sesuai dengan target terutama untuk kegiatan rutin dan ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan. Pada triwulan II tahun 2025 urusan Penanaman Modal yang meliputi 5 (lima) Program terlihat memang belum banyak mencapai target kinerja disebabkan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban tidak terlepas dari capaian indikator kinerja programnya, yang mana untuk mengetahui capaian indikator kinerja program yakni keterkaitan antara capaian indikator kinerja program dengan capaian indikator kinerja anggarannya sampai dengan akhir Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana diuraikan dalam Tabel E.81 sebagaimana target dan capaian realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Formulir E.81)

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Periode Pelaksanaan Tahun 2025 Sampai Triwulan II.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMA MODAL	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan	100%	1.100.452.563	100%	351.163.432	100%	466.350.000	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	100%	351.163.472	0	31,91 %	DPMPTSP
		1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman modal yang menajdi Kewenangan aderah Kabupaten /	Jumlah bahan rumusankebijakan Penanama modal (perbup,Sk Bupati)	5 Dokumen	316.990.063	2 Dokumen	59.719.432	1 Dokumen	60.000.000	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	2 Dokumen	59.719.432	40%	18.83 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tuban 1. . Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA / PMDN) dengan UMKM di Daerah	10 dokumen	165.000.000	3 dokumen	59.719.432	2 dok	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 dokumen	0	30%	36,19 %	DPMPTSP
		2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Potensi Investasi	9 (Dokumen)	783.462.500	2 (Dokumen)	291.444.000	2 (Dokumen)	406.350.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	291.444.000	22.2 %	38.68%	DPMPTSP
		1. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten /kota	9 dok	753.462.500	2 dok	291.444.000	2 dok	292.350.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	291.444.000	22.2 %	38.68%	DPMPTSP
		2. Sub kegiatan penyusunan rencana umum penanaman	Jumlah Peraturan Bupati (PERBUP) Rencana	1 dok	30.000.000	0 dok	0	1 dok	114.000.000	0 dok	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	114.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		modal daerah kabupaten / kota	Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota																					
2		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal	98,70%	1.481.433.875	98.50%	539.100.099	90%	540.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	539.100.099	0	36.39 %	DPMPTSP
		1.Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten /kota	Jumlah kegiatan promosi	24 dokumen	1.481.433.875	8 dok	539.100.099	5 dokumen	540.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	539.100.099	0%	36.39 %	DPMPTS
		1. Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	24 dokumen	1.481.433.875	1 kegiatan	539.100.099	5 kegiatan	540.000.000	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0	0	1	0	0	539.100.099	0	36.39 %	DPMPTS

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		modal daerah kabupaten / kota	kabupaten / kota																					
			Total dari jumlah kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan	0 keg	0	0 keg	0	5 keg	540.000.000	0	0	0 keg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP
			Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	5 kali	0	2 kali	0	0	0	0	0	0 keg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	DPMPTSP
3		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaku usaha	45.50%	2.666.422.844	47%	457.309.912	45%	327.258.000	0%	0	0%	6.872.500	0	0	0	0	0	0	0	457.309.912	0	17.15 %	DPMPTS
		1. Kegiatan pengendalian pelaksanan penanaman modal yang	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan	313 pelaku usaha	2.666.422.844	428 pelaku usaha	457.309.912	68 pelaku usaha	327.258.000	0 pelaku usaha	0	0 pelaku usaha	6.872.500	0	0	0	0	0 pelaku usaha	0	0 pelaku usaha	457.309.912	0%	17.15 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		menjadi kewenangan daerah kabupten /kota	kegiatan penanaman modal (LKPM)																					
		1. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi implementasi di peizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	732 pelaku usaha	669.720.000	400 pelaku usaha	223.240.000	244 pelaku usaha	133.000.000	0 pelaku usaha	0	0 pelaku usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	223.240.000	0	4.46%	DPMPTSP
		2. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan	24 keg	339.423.000	8 keg	112.883.868	8 keg	73.158.000	0	0	0	6.872.500	0	0	0	0	0	0	0	112.883.868	0	33,25 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	yang dihadapi pelakuusaha dalam merelaisasikan kegiatan usahanya																					
		3. Pengawasan penenaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data,profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan dilakukan inspeksi lapagan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan	45 keg	365.298.000	50 keg	121.086.044	15keg	121.100.000	0 keg	0	0 keg	0	0	0	0	0	0 keg	0	0 keg	121.086.044	0	33.14 %	dpmptsp

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			peizinan berusaha																					
4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat	100%	1.457.596.879	100%	447.132.277	90.04 poin	432.486.800	0 poin	27.075.000	0 poin	0	0	0	0	0	0	0	0	447.132.277	0	30.67 %	DPMPTSP
			Presentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkanse sesuai ketentuan teknis dan SOP	0%	0	0%	0	100%		100 %		0%	0	0	0	0	0	100%		0%		0%	0%	DPMPTS
		1. Kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi	Presentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani secara elektronik	80%	1.457.596.879	99%	447.132.277	76%	432.486.800	97.79 %	27.075.000	97,98 %	45.408.500	0	0	0	0	97.79 %	27.075.000	97.79%	474.207.277	122.24%	32.53 %	DPMPTS

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kewenangan daerah kabupaten / kota																						
		1. Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis resiko terintergasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelyanan perizinan berusaha melalui istem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	2000 pelaku usaha	296.718.379	12 Dokumen	202.318.957	450 pelaku usaha	257.249.800	342 pelaku usaha	0	2.790 pelaku usaha	14.673.500	0	0	0	0	342 pelaku usaha	0	342 pelaku usaha	202.318.957	0 %	68.18 %	DPMPTSP
		2. Pemantauan, analisis,evaluasi,dan pelaporan dibidang perizinan berusha berbasis	Jumlah kegiatan usaha yang mendaatkan pemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporan	425 pelaku usaha	651.076.000	125 pelaku usaha	244.813.320	140 kegiatan pelaku usaha	175.237.000	21 pelaku usaha	27.075.000	157 pelaaku usaha	30.735.000	0	0	0	0	21 pelaku usaha	18.050.000	21 pelaku usaha	262.863.320	0	40.37 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		resiko	dibidang oerizinan berusha berbasis resiko lintas daerah kabupaten / kota bagi kegiatan usha adari pelaku usaha																					
5.		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase jumlah pemohon ijin atau alon investor yang memanfaatkan data dan system informasi penanaman odal	97%	829.640.207	98%	251.406.381	93%	195.867.000	96.31 %	0	97,98 %	0	0	0	0	0	96.31 %	0	96.31%	251.406.381	0	25.14 %	DPMPTS
		1. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan	Presentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	80%	829.640.207	99%	251.406.381	76%	195.867.000	97,79 %	0	97,98 %	0	0	0	0	0	97,29 %	68.402.490	97.79%	319.808.871	0	38.54 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		non perizianan yang terintgrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	yang terdata disistem elektronik terintegrasi																					
		1. Pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan perizianan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah,dikaji dan dimanfaatkan	11.000 data	829.640.207	12 Dokumen	251.406.381	12 dok	195.867.000	3dokumen	0	3 dokumen	0	0	0	0	0	3 dok	0	3 dok	251.406.381	0%	30.30 %	DPMPTS
6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai AKIP perangkat Daerah	82,4 poin	31.597.491.695	83.80 poin	6.337.948.433	84,1 poin	9.059.178.340	0 poin	1.385.387.607	0 poin	2.264.328.673	0 poin	0	0	0 poin	0 poin	1.385.387.507	0	7.723.335.94	0%	24.44 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																			0			
		1.Kegiatan perencanaan, penganggaran ,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	100dok	350.119.750	25 dok	79.312.580	25dok	149.984.143	6dok	2.178.250	3 dok	8.783.750	0dok	0	0dok	0	6 dok	2.178.250	6 dok	81.490.830	6%	23.27 %	DPMPTSP
		1.Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	25 dok	225.120.000	10 dok	54.459.280	10 dok	124.990.450	3 dok	1.775.000	0 dok	3.594.500	0 dok	0	0 dok	0	3 dok	1.775.000	3 dok	56.234.280	12%	24.97 %	DPMPTSP
		2.Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	75 laporan	124.999.750	15 Dokumen	24.853.300	15 laporan	24.993.693	3 laporan	403.250	3 laporan	5.189.250	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	403.250	3 laporan	24.893.625	4%	19.91 %	DPMPTSP
		2.Kegiatan administrasi	Jumlah laporan	50 Dokum	18.080.196.845	10 Dokum	4.013.514.174	9 jenis	5.726.645.000	27 jeni	975.964.893	27 jeni	1.076.466.693	0 dok	0	0 dok	0	27 dok	975.964.893	27 dok	4.989.479.06	0%	27.59 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		keuangan perankat daerah	keuangan dan periksaan yang tersusun	en		en				s		s									7			
		1.Sub kegiatan penyedia gaji dan tunjagan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjagan ASN	125 orang/ bulan	16.108.722.045	29 orang/ bulan	3.562.074.007	25 orang/ bulan	5.319.175.340	25 orang/ bulan	898.122.909	25 orang/ bulan	988.156.209	0 orang /bulan	0	0 orang/ bulan	0	25 orang /bulan	898.122.909	25 orang/ bulan	4.460.196.916	0%	27.68 %	DPMPTSP
		2.Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	50 dok	1.935.854.800	10 dok	444.364.167	8 dok	400,345.660	16 dok	77.841.984	24 dok	86.841.984	0 dok	0	0 dok	0	16 dok	77.941.984	16 dok	522.306.151	0%	26.98 %	DPMPTSP
		3.Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	25 laporan	12.250.000	5 laporan	2.437.000	5 laporan	2.450.000	5 laporan	0	0 laporan	1.468.500	0 laporan	0	0 laporan	0	5 laporan	0	5 laporan	2.437.000	0%	19.89 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.Sub kegiatan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semeateran SKPD	25 laporan	23.370.000	5 laporan	4.639.000	5 laporan	4.674.000	0 laporan	0	2 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	4.639.000	0 %	19.85 %	DPMPTSP
		3.Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	52 orang	146.262.440	51 orang	32.850.000	50 orang	92.450.000	0 orang		50 orang	65.610.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	32.850.000	0%	22.45 %	DPMPTSP
		1.Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 paket	54 paket	90.000.000	0 paket		50 paket	26.450.000	0 paket	0 orang	0 paket	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	26.450.000	0 %	29.38 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	52 orang	56.242.440	51 orang	32.850.000	51 orang	66.000.000	0 orang	0	50 orang	65.610.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	32.850.000	0%	58.40 %	DPMPTSP
		4.kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum	6 jenis layanan	1.851.723.000	6 jenis layanan	65.158.213	6 jenis layanan	527.994.068	6 jenis layanan	92,485.850	6 jenis layanan	69.545.605	0 jenis layanan	0	0 jenis layanan	0	6 jenis layanan	97.486.850	6 jenis layanan	162.645.063	0%	8.78%	DPMPTSP
		1.Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	75.000.000	1 paket	39.904.850	1 paket	40.000.000	1 paket	9.998.600	1 paket	10.000.000	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	9.998.600	1 paket	49.903.450	0%	66.53 %	DPMPTSP
		2.Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	4 paket	450.015.000	3 paket	300.163.000	2 paket	199.650.580	2 paket	41.328.000	2 paket	24.434.105	0 paket	0	0 paket	0	2 paket	41.328.000	2 paket	341.491.000	0 %	75.88 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kantor	disediakan																					
		3.Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor uang disediakan	3 paket	344.015.000	3 paket	99.347.300	3 paket	101.988.488	3 paket	18.240.000	3 paket	21.581.500	0 paket	0	0 paket	0	3 paket	18.740.000	3 paket	118.087.300	%	34.32 %	DPMPTSP
		4.Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan disediakan	2 paket	474.993.000	1 paket	91.499.750	1 paket	92.000.000	1 paket	16.026.250	1 paket	12.630.000	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	16.026.250	1 paket	107.526.000	0%	22.63 %	DPMPTSP
		5.Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	57.700.000	3 Dokumen	10.359.000	3 dok	10.455.000	3 dok	2.610.000	3 dok	900.000	0 dok	0	0 dok	0	3 dok	2.610.000	3 dok	12.969.000	0%	22.47 %	DPMPTSP
		6.Sub kegiatan penyelengaraan rapat koordinasi dan konsutasi SKPD	Jumlah dokumen laporan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi	45 Dokumen	450.000.000	36 Dokumen	111.848.313	45 laporan	83.900.000	11 laporan	4.283.000	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	11 laporan	4.283.000	11 laporan	116.131.313	0%	25.80 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			SKPD																					
		5.Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang	4 jasa	9.863.839.910	4 jasa	721.690.581	4 jasa	1.407.626.500	4 jasa	172.869.639	4 jasa	507.593.913	0 jasa	0	0 jasan	0	4jasa	172.869.639	4 jasa	894.560.220	0%	9.06%	DPMPTSP
		1. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3 laporan	32.981.000	3 laporan	7.828.000	3 lap	5.120.000	3 lap	1.500.000	3 lap	1.500.000	0 lap	0	0	0	3 lap	1.500.000	3 lap	9.328.000	0	28.28 %	DPMPTSP
		2. Sub kegiatan penyediaa jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaa jasa ko air dan munikasi sumber daya air dan listrik	3 laporan	9.641.853.910	3 laporan	588.057.081	3 lap	618.000.000	3 lap	132.837.639	3	132.467.613	0	0	0	0	3 lap	132.837.639	3 lap	720.894.720	0	7.47%	DPMPTSP
		3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	179.005.000	4 laporan	125.805.500	5 lap	784.506.500	2 lap	38.532.000	2 lap	373.626.500	0	0	0	0	2	38.532.000	2 lap	164.337.500	0%	91.80 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6.Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang ursan pemerinathan daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	7 unit	1.275.349.750	5 unit	534.748.877	7 jenis	154.478.629	7 jenis	141.888.975	7 jenis	536.328.712	0	0	0	0	7 jenis	141.888.875	7 jenis	676.637.752	0 %	53.05 %	DPMPTSP
		1.Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29 unit	646.339.750	29 unit	150.247.179	29 unit	200.364.810	7 unit	30.103.975	34 unit	38.521.310	0	0	0	0	7 unit	30.108.875	7 unit	180.356.054	0%	27.90 %	DPMPTSP
		2.Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		55 unit	536.010.000	55 unit	364.501.700	5 unit	386.747.920	5 unit	36.935.250	5 unit	142.246.000	0	0	0	0	5 unit	36.935.250	5 unit	401.436.950	0%	74.89 %	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	5 unit	40.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	567.365.899	1 unit	74.849.750	3 unit	355.561.402	0	0	0	0	1 unit	74.849.750	1 unit	94.849.750	0%	23.71 %	DPMPTSP

Sumber: DPM PTSP Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal telah dilakukan secara berkala pada akhir periode tahun berjalan. Kajian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban berdasarkan tugas dan fungsi telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Tuban. Tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban dengan format sebagai berikut:

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban

(Tabel TC.30)

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Kinerja Sasaran		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 76,61–88,30 (Kategori Baik)		92,02	90,04	90,05	90.05	92.71	-	90,04	90,05	-
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Rp. Milyar		Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	-

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Kinerja Sasaran		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor		Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	Indikator tdk digunakan pada renstra 2021-2026	-
4	Presentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen		3,5%	3,5%	3.5%	3.5	291.69%	Realisasi Belum Dapat Dinilai	3.5%	3.5%	-

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Kinerja Sasaran		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Presentase Peningkatan Realisasi PMA	Persen		3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	115.60%	Realisasi Belum Dapat Dinilai	3,75%	3,75%	-
6	Presentase Penigkatan Realisasi PMDN	Persen		2%	2%	2%	2%	20.84%	Realisasi Belum Dapat Dinilai	2%	2%	-

Sumber : DPM dan PTSP Kab. Tuban Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijabarkan hasil kinerja pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan penting pemerintahan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase peningkatan realisasi PMA dan Persentase peningkatan realisasi PMDN, dimana pagu anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kabupaten Tuban sebesar Rp 8.608.957.783; (delapan milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 8.407.330.851; (delapan milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), dengan demikian serapan anggaran sebesar 97.66%.

Jika dikaitkan dengan realisasi kinerja sasaran dengan indikator realisasi PMA sebesar 116% dari target nilai sebesar 3.75%, atau dengan capaian kinerja sebesar 3.093%, dan indikator realisasi PMDN sebesar 21% dari target nilai sebesar 2%, atau dengan capaian kinerja sebesar 1.050% sementara serapan anggaran sebesar 97,66%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 4.045,34%. Peningkatan realisasi PMA sebesar 116% karena adanya beberapa perusahaan asing yang mulai sadar untuk menyampaikan LKPM dan perusahaan bidang migrasi (TPPI) melakukan penambahan kapasitas produksi melalui pembelian mesin dan perluasan lahan yang cukup signifikan.

Indikator pada sasaran kedua adalah realisasi PMDN sebesar 21% dari target nilai sebesar 2%, atau dengan capaian kinerja sebesar 1.050 % peningkatan yang sangat tinggi ini di peroleh dari banyaknya perusahaan menengah kecil PMDN yang sadar akan penyampaian LKPM karena sudah teredukasi dan terfasilitasi dengan baik serta Kegiatan Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan dengan PMA dan PMDN adalah “Meningkatnya Kemampuan Ekonomi dan Realisasi Investasi UMKM di Kabupaten Tuban”, dari kegiatan ini diharapkan kedepannya dapat meningkatkan nilai investasi dan perekonomian di Kabupaten Tuban melalui kegiatan UMKM yang

semakin berkembang dan maju dengan adanya kemitraan tersebut. Untuk hasil (*outcome*) dari Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kabupaten Tuban adalah "Informasi Peta Potensi Investasi untuk Mencapai Realisasi Investasi PMA/PMDN", dari kegiatan ini diharapkan untuk kedepannya akan banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya karena sudah tersedianya informasi potensi investasi di Kabupaten Tuban. Dari outcome dua kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses yang dibutuhkan tidak singkat dan masih banyaknya usaha yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk bisa melihat hasilnya (*outcome*) di masa yang akan datang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pertengahan Tahun 2025 ini, kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban, maka beberapa isu strategis antara lain:

a. Menurunnya minat investor.
b. Masih rendahnya penguasaan teknologi informasi dari Sumber Daya Aparatur Daerah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.
c. Dukungan dana dalam penerapan sistem teknologi informasi masih belum optimal.
d. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan sistem informasi pelayanan perizinan.
e. Sumber Daya Manusia yang menangani pengaduan masyarakat masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas.
f. Mekanisme pengaduan masyarakat masih belum sederhana dan cepat,
g. Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Tuban sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi,

h. Potensi investasi Kabupaten Tuban belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tuban masih relative sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dokumen rencana umum penanaman modal Kabupaten Tuban masih menunggu arahan lebih lanjut dari provinsi,
i. Keterbatasan SDM dibandingkan jumlah perusahaan yang harus di pantau,
j. Minimnya materi promosi investasi yang dimiliki sehingga strategi promosi yang dilaksanakan kurang berjalan efektif.
k. Informasi terkait potensi unggulan Tuban masih kurang terdigitalisasi dan belum tersaji secara komprehensif bagi calon investor.
l. Ketersediaan Infrastruktur yang belum memadai dapat mempersulit logistik dan operasional bisni.
m. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam Perizinan tertentu.

Tindak Lanjut kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024 sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pameran keikutsertaan dalam pameran investasi skala nasional, propinsi maupun daerah;
b. Mengikutsertakan bimbingan teknik OSS bagi petugas pelayanan;
c. Memberikan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha;
d. Penanganan pengaduan masyarakat melalui penerapan SOP Pengaduan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan isu penting yang dapat menjadi perhatian dalam perumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan pada Tahun 2025 berikut dilakukan perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun

2025 dengan analisis kebutuhan, proses perbandingan harus dilakukan untuk menyelaraskan antara Rencana Kerja Perubahan dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 terhadap RKPD Perubahan beserta kerangka pendanaanya dari hasil perbandingan tidak terdapat perbedaan antara perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, berikut Review terhadap Perubahan RKPD 2025 ditampilkan pada Tabel 2.4 (T- C.31).

Tabel II.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Tuban

(Tabel TC.31)

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT**	Kab. Tuban, Tuban,Latsari	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,3 poin	7.973.097.453,31	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,3 poin	7.973.097.453,31	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban,Latsari	jumlah dokumen perencanaan,Penganggaran dan evaluasi yang tersusun (dokumen)	9 dokumen	100.812.769,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang tersusun (dokumen)	9 dokumen	100.812.769,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan	Kab. Tuban, Tuban,Latsari	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	85.113.600,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	85.113.600,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	perangkat Daerah					dokumen perencanaan perangkat Daerah					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban,Latsari	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	15.699.169,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	15.699.169,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban,Latsari	jumlah jenis laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	9 jenis	4.885.383.739,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	jumlah jenis laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	9 jenis	4.885.383.739,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban,Latsari	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	36 orang / bulan	4.509.022.079,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	36 orang / bulan	4.509.022.079,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban,Latsari	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	372.269.660.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	372.269.660.00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban,Latsari	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	1.485.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	1.485.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulan /semesteran	23 Laporan	2.607.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulan	23 Laporan	2.607.000,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								/semesteran			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah jenis kepegawaian	2 layanan	66.976.000,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah jenis kepegawaian	2 layanan	66.976.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	976.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	976.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	66.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	66.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Layanan pengadaan administrasi umum	6 Jenis layanan	377.398.568,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Layanan pengadaan administrasi umum	6 Jenis layanan	377.398.568,00	
	Penyediaan	Kab.	Jumlah Paket	1 Paket	40,000,000,00	Penyediaan	Kab.	Jumlah	1 Paket	40,000,000,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tuban, Tuban, Latsari	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tuban, Tuban, Latsari	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	144.830.080,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	144.830.080,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	98.613.488,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	98.613.488,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 Paket	63.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket	63.500.000,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			disediakan					Pengganda an yang disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundang an	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	10.455.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangund angan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	10.455.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	20.000.000,00	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	20.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah pengadaan jasa penunjang	3 jenis jasa	1.375.185.500,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah pengadaan jasa penunjang	3 jenis jasa	1.375.185.500,0 0	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban,	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	5.120.000,00	Penyediaan Jasa Surat	Kab. Tuban, Tuban,	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	5.120.000,00	k

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Latsari	Jasa Surat Menyurat			Menyurat	Latsari	Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Latsar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	604.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Latsar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	604.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KAntor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	766.065.500,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KAntor	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	766.065.500,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 jenis	1.167.340.877.31	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 jenis	1.167.340.877.31	
	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah	29 unit	182.350.810,00	Penyediaan	Kab.	Jumlah	29 unit	182.350.810,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tuban, Tuban, Latsari	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tuban, Tuban, Latsari	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	386.747.920,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	386.747.920,00	
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir eha	1 unit	598.242.147,31	Pemeliharaan/ Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direha	1 unit	598.242.147,31	
	PROGRAM		Persentase	100 %	420.515.602,50	**PROGRAM**		Persentase	100 %	420.515.602,50	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Realisasi Total terhadap Tarjet Investasi			**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		Realisasi Total terhadap Tarjet Investasi			
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kebijakan kemudahan penanaman modal	2 dokumen	29.381.602,50	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah kebijakan kemudahan penanaman modal	2 dokumen	29.381.602,50	
	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oelh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah dokumen laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal Jumlah kegiatan	2 Dokumen	29,381.602,50	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oelh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah dokumen laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal Jumlah	2 Dokumen	29,381.602,50	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			usaha darai pelaku usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha di Daerah					kegiatan usaha darai pelaku usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha di Daerah			
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	jumlah peta potesi penanaman modal	2 dokumen	391.134.000,00	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	jumlah peta potesi penanaman modal	2 dokumen	391.134.000,00	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota.	1 Dokumen	102.574.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota.	1 Dokumen	102.574.000,00	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi	Kab. Tuban,	Jumlah dokumen peta	2 dokumen	288.560.000,00	Penyusunan Peta Potensi	Kab. Tuban,	Jumlah dokumen	2 dokumen	288.560.000,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/ Kota	Tuban, Latsari	potensi investasi kabupaten / kota			Investasi Kabupaten/ Kota	Tuban, Latsari	peta potensi investasi kabupaten / kota			
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Presentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal	10 %	473.145.000,00	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Presentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal	10 %	473.145.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah calon investor	20 pelaku usaha	473.145.000,00	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah calon investor	20 pelaku usaha	473.145.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Kergiatan Promosi Penanaman	5 dokumen	473.145.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Kergiatan Promosi Penanaman	5 dokumen	473.145.000,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Modal Kabupaten/ Kota Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Modal Kabupaten / Kota Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota			
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	335.413.880,00	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	335.413.880,00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Persentase Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan	98,1%	335,413.880,00	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Persentase Pelayanan perizinan berusaha dan non	98,1%	335,413.880,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		yang dilayani secara elektronil k			**Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		perizinan yang dilayani secara elektronil k			
	Penyediaan Pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	450 Pelaku Usaha	204.436.680,00	Penyediaan Pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatk an pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	450 Pelaku Usaha	204.436.680,00	
	Pemantauan	Kab.	Jumlah	140	130.977.200,00	Pemantauan	Kab.	Jumlah	140	130.977.200,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	analisis dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Tuban, Tuban, Latsari	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha		analisis dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Tuban, Tuban, Latsari	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Cakupan pengendalian pelaku usaha	52%	189.479.956,00	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Cakupan pengendalian pelaku usaha	52%	189.479.956,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan	220 pelaku usaha	189.479.956,00	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Laporan	220 pelaku usaha	189.479.956,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota		Penanaman Modal (LKPM)			**Kabupaten/Kota**		Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			
	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merelaisasikan kegiatan usahanya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah penyeleaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Peaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	8 kegiatan usaha	51.500.000,00	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merelaisasikan kegiatan usahanya	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah penyeleaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Peaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	8 kegiatan usaha	51.500.000,00	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	72.400.000,00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	400 Pelaku Usaha	72.400.000,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
	Pengawasan penanaman modal	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data,profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan	50 kegiatan usaha	65.579.956,00	Pengawasan penanaman modal	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data,profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan	50 kegiatan usaha	65.579.956,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Persentase data informasi perizinan,perizi	100 %	159.604.500,00	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA**	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Persentase data informasi	100 %	159.604.500,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		nan berusaha, dan nom perizinan yang dikelola dan dimanfaatkan			**DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		perizinan,perizinan berusaha, dan nom perizinan yang dikelola dan dimanfaatkan			
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi	74 %	159.604.500,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi	74 %	159.604.500,00	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	12 dokumen	159.604.500,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	12 dokumen	159.604.500,00	

No	Rancangan Awal P.RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elektronik		secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan–usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban pada tahun 2025, merupakan hasil dari proses perencanaan secara sistematis dan demokratis. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban pada tahun 2025 merupakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021 – 2026 serta target dan sasaran pembangunan nasional maupun provinsi, yang memuat tentang arah, kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Semua usulan program/ kegiatan hasil rapat koordinasi dengan bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban tersebut nantinya digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan rentang kendali di masing–masing bidang. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Tuban

(Tabel TC.32)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume / Besaran	Catatan
	NIHIL				

Pada prinsipnya setelah diadakan *"focus group discussion*" melalui forum SKPD oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban, tuntutan tentang peningkatan pelayanan dan optimalisasi perizinan online menjadi kebutuhan utama yang harus diperhatikan dan diberikan alokasi anggaran di tahun 2025.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, maka perlu dilakukan pergeseran output subkegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Penjabaran hal tersebut disajikan dalam bentuk Matriks Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani, baik wajib maupun pilihan, yang dilaksanakan melalui masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yang mendasari perlunya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang nantinya akan dilaksanakan, antara lain:

1. Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat Daerah karena terdapat efisiensi maka anggaran lembur dan anggaran perjalanan dinas dalam kota mengalami perubahan anggaran;
2. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada belanja bahan-bahan bakar dan pelumas mengalami perubahan P APBD, sedangkan untuk belanja mamin rapat, shooting video, lembur, perjalanan dinas dan jasa tenaga ahli mengalami efisiensi anggaran;
3. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan anggaran P APBD;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Belanja Lembur dan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan terdapat efisiensi anggaran. Sedangkan pada belanja Pengguna Barang Spesifikasi : OPD Kategori B, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi : OPD Kategori B, serta belanja Pembantu pengurus barang pengguna Spesifikasi: OPD Kategori B mengalami perubahan anggaran P APBD;

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terdapat efisiensi anggaran pada belanja lembur;
6. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD terdapat efisiensi anggaran pada belanja lembur;
7. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya terdapat efisiensi anggaran pada belanja Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, sedangkan pada belanja Seragam PSH eselon 2 mengalami perubahan anggaran P APBD;
8. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat efisiensi anggaran pada belanja Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
9. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami efisiensi anggaran pada belanja Makanan dan Minuman Rapat;
10. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mengalami efisiensi anggaran pada belanja Bahan Cetak, Foto Copy dan Jilid biasa;
11. Sub Kegaiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami efisiensi anggaran pada belanja Perjalanan Dinas biasa dan belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas terdapat perubahan P APBD;
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat efisiensi anggaran pada belanja tagihan telepon;
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami efisiensi anggaran pada belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4 Orang dan belanja Lembur;
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terdapat efisiensi anggaran pada belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dan belanja Pembayaran Pajak Mobil 2 unit, Sepeda Motor 16 unit;

15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami perubahan anggaran P APBD pada belanja Pemeliharaan taman;
16. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi anggaran di semua belanja meliputi: Fotocoy, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Makanan dan Minuman Rapat, serta Honorarium Narasumber/Pembahas;
17. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdapat efisiensi pada belanja Alat Tulis Kantor, Makanan dan Minuman Rapat dan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
18. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi pada belanja Makanan dan Minuman Rapat dan belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
19. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi pada Belanja : Brosur/Leaflet, Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), lembur serta Perjalanan Dinas Biasa;
20. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik mengalami perubahan anggaran P APBD pada belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dan Sewa Kendaraan Roda Empat. Sedangkan pada beberapa belanja seperti : belanja Bahan Cetak, Suvenir/Cendera Mata, Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Pekan Perizinan & Sosilaisasi, Honorarium Narasumber Pekan Perizina & Sosilaisasi, Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan MC & Sewa Group Band, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Penyelenggaraan Acara, Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, serta Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota terdapat efisiensi anggaran;

21. Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko pada Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas mengalami perubahan anggaran P APBD sedangkan pada beberapa belanja seperti : Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium PPTK, Perjalanan Dinas Biasa serta Perjalanan Dinas Dalam Kota terdapat efisiensi anggaran;
22. Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya terdapat beberapa belanja yang mengalami efisiensi seperti belanja Bahan Cetak, Suvenir/Cendera Mata, Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber dan Perjalanan Dinas Biasa;
23. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha terdapat beberapa belanja yang mengalami efisiensi anggaran meliputi belanja : Suvenir/Cendera Mata, Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber, Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Perjalanan Dinas Dalam Kota;
24. Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal terdapat beberapa belanja seperti : belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Foto Copy mengalami perubahan P APBD sedangkan belanja Foto Copy, Suvenir/Cendera Mata, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Narasumber, Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, dan Perjalanan Dinas Dalam Kota terdapat efisiensi anggaran;
25. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas mengalami perubahan P APBD, sedangkan pada belanja bahan cetak, Makanan dan Minuman Rapat, Jasa Konsultansi Penyusunan Perbup Pendelegasian Kewenangan / Perbup MPP, SK SOP, SK Standar Pelayanan, Lembur, dan belanja Perjalanan Dinas Biasa mengalami efisiensi anggaran.

Berkenaan dengan beberapa keadaan diatas maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tuban perlu dilakukan perubahan dengan melakukan penyesuaian anggaran, baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Sesuai dengan perhitungan yang dilakukan maka pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban mengalami penambahan dari anggaran sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Anggaran Tahun 2025

No.	Uraian Jenis Belanja	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(+) / (-)
1.	Belanja Operasi	10.428.619.340	8.783.256.492	1.645.362.848
2.	Belanja Modal	592.520.800	767.999.900	175.479.100
	Jumlah Anggaran	11.021.140.140	9.551.256.392	1.469.883.748

Sumber: Perubahan APBD DPMPTSP Tahun 2025

Untuk menggambarkan perubahan anggaran Belanja Operasi yang merupakan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Bantuan Sosial secara rinci dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Perubahan Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025

No.	Uraian Jenis Belanja	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(+) / (-)
1.	Belanja Pegawai	5.337.175.340	5.337.175.340	-
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.429.857.596	4.429.857.596	-
	Jumlah Anggaran	9.767.032.936	9.767.032.936	

Sumber: Perubahan APBD DPMPTSP Tahun 2025

Dari 2 (dua) jenis belanja, terlihat pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebelum perubahan dan sesudah perubahan mengalami penurunan. Hal ini tentunya dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi aparatur yang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.

Sementara itu untuk perubahan Belanja Modal yang merupakan belanja pada 2 (dua) bidang untuk menangani 1 (satu) urusan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban beserta kegiatan rutin kesekretariatan, secara keseluruhan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Perubahan Anggaran Belanja Modal Tahun 2025

No	Belanja Modal	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(+) / (-)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.363.000,00	376.363.000	-
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.157.800,00	216.157.800	-
	Jumlah Anggaran	592.520.800	592.520.800	

Sumber: Perubahan APBD DPM,PTSP, Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa anggaran Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 sebelum perubahan dan setelah perubahan tidak mengalami penurunan berjumlah Rp.592.520.800 (Lima ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah). Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan anggaran kegiatan pada tiap kegiatan.

Untuk melihat perkembangan perubahan anggaran pada masing-masing program pada masing-masing urusan yang ditangani, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahun 2025

Per Program per urusan

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+) / (-)
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi peizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan yang dikelola dan dimanfaatkan	195.867.000	159.604.500	-36.262.500
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatn ya integrasi data dan infor masi perizi nan dan non perizi nan yang terpublikasi	195.867.000	159.604.500	-36.262.500
Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	terla ksann aya Pengo lahan Penya jian dan Pemanfaatan Data dan Infor masi Perizi nan dan Non Perizi nan	195.867.000	159.604.500	-36.262.500
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	432.486.800	335.413.880	-473.435.920
Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase pelayanan perizinan,Perizina n berusha dan non perijinan yang dilayani secara elektronik	432.486.800	335.413.880	-473.435.920
Sub kegiatan penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui siistem perijinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Terlakannaya Pelayanan Terpa du Perizinan dan Non Perizi nan Berbasis Siste m Pelaya nan Perizinan Berusaha Terint egrasi Secara Elektronik	257.249.800	204.436.680	-429.176.120
Sub kegiatan Pemantauan, analisis,evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Terlaksanan aya Pemantauan, analisis, evalu asi, dan pelap oran di bidang perizi nan berus aha berba sis risiko	176.237.000	130.977.200	-44.259.800
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	466.350.000	420.515.602	-45.834.397,50

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+) / (-)
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan kemudahan penanaman modal	60.000.000	29.381.602,50	-30.618.397,50
Sub Kegiatan fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota	Jumlah kesepkatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	60.000.000	29.381.602,50	-30.618.397,50
Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah peta potensi penanaman modal	406.350.000	391.134.000	-15.216.000
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	114.000.000	102.574.000	-11.426.000
Sub Kegiatan penyusunan peta potensi investasi kabupaten /kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	292.350.000	288.560.000	-3.790.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal	540.000.000	473.145.000	-66.855.000
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon investor	540.000.000	473.145.000	-66.855.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	540.000.000	473.145.000	-66.855.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendlian pelaku usaha	327.258.000	189.479.956	-268.667.044
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	327.258.000	189.479.956	-268.667.044
Sub Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatanusahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	73.158.000	51.500.000	-61.641.000
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/	133.000.000	72.400.000	-150.840.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+) / (-)
	Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksanan ya Anali a dan Verifikasi Data, Profil dan Info masi Kegiatan Usaha dari Pela u Inspe ksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	121.100.000	65.579.956	-56.186.044
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	9.059.178.340	7.973.097.453	-356.445.778
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanan, Penganggar an, dan Evalu asi Kiner a Perangkat Daerah	149.984.143	100.812.769	-49.171.374
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.990.450	85.113.600	-39.876.850
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evalu asi Kinerja Perangkat Daerah	24.993.693	15.699.169	-9.294.524
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Admi nistrasi Keua ngan Perangkat Daerah	5.726.645.000	4.885.383.739	-487.989.153
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersediany a Gaji dan Tunja ngan ASN	5.319.175.340	4.509.022.079	-454.481.153
Sub Kegiatan Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Adm nistra si Pelaksanaan Tugas ASN	400.345.660	372.269.660	-30.476.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksana nya Koordinasi dan penyusunan Laporan Keua ngan akhir tahun SKPD	2.450.000	1.485.000	-965.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S	Terlaksanan ya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keua ngan Bulan an/	4.674.000	2.607.000	-2.067.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+) / (-)
emesteran SKPD	Triwulan/ Semesteran SKPD			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanan nya administrasi Kepe awaian Perangkat Daerah	92.450.000	66.976.000	-25.474.000
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Terlaksannya pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	26.450.000	976.000.00	-25.474.000
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksannn ya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berda sarkan Tugas dan Fungsi	66.000.000	66.000.000	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	527.994.068	377.398.568	-150.595.500
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	40.000.000	40.000.000	0
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	199.650.580	144.830.080	-54.820.500
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	101.988.488	98.613.488	-3.375.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	92.000.000	63.500.000	-28.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.455.000	10.455.000	0
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.900.000	20.000.000	-63.900.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	1.407.626.500	1.375.185.500	341.054.960
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.120.000	5.120.000	-2.867.040
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	618.000.000	604.000.000	-14.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+) / (-)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	784.506.500	766.065.500	357.922.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.154.478.629	1.167.340.877,31	15.729.288,31
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	200.364.810	182.350.810	-15.146.960
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	386.747.920	386.747.920	0
Sub Kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	567.365.899	598.242.147,31	30.876.248,31
JUMLAH		11.021.140.140	9.551.256.391,81	-1.247.500.640,19

Sumber: P.APBD DPMPTSP Tahun 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 11.021.140.140,00 (Sebelas milyar dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu seratus empat puluh rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 9.551.256.391,81 (Sembilan milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh satu delapan puluh satu rupiah) jadi anggaran selisih sebelum dan sesudah Rp. 1.247.500.640,19(Satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh Sembilan belas rupiah)

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya dijabarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban

ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas berdasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahunan. Program-program prioritas Tahun Anggaran 2025 yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*Outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan lainya (Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapat Belanja Daerah Jawa Timur, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Tahun Anggaran 2025 dan perkiraan maju Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban adalah sebagai sebagaimana Tabel T-C. 33 berikut:

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Tujuan PD: Meningkatnya Efektivitas Investasi Daerah	**ICOR**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**8,29**	**11.021.140.140**	**9.551.256.391,81**	**7,78**	**9.551.256.391,81**	
							Pembentukan Modal Tetap Bruto	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**36,63**			**36,64**		
						Sasaran PD: Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Kab. Tuban, Tuban latsari	5,3			5,3		
						Sasaran PD: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban latsari	4,71			4,72		
						Sasaran PD: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban latsari	93,02			93,22		
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN**				**11.021.140.140**	**9.551.256.391,81**		**9.551.256.391,81**	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	**18**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
2	**18**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban latsari	84,3 Point	7.973.097.453,31				7.973.097.453,31
2	**18**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun (dokumen)	Kab. Tuban, Tuban latsari	9 dokumen	100.812.769,00			9 Dokumen	100.1812.769,00
2	18	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban latsari	2 dokumen	85.113.600,00	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		2 Dokumen	85.113.600,00
2	18	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban latsari	7 laporan	15.699.169,00	Sisalebih perhitungan anggaran thn seblumnya		7 Dokumen	15.699.169,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**9 jenis**	**4.885.383.739,00**			**9 Dokumen**	**4.885.383.739,00**
2	18	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban latsari	36 Orang/bulan	4.509.022.079,00	Pendapatan asli daerah (PAD) dana alokasi umum (DAU)tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja		36 Orang/bulan	4.509.022.079,00
2	18	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban latsari	12 Dokumen	372.269.660,00	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		12 Dokumen	372.269.660,00
2	18	01	2	02	00	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan keuangan akhir	Kab. Tuban,	5 Laporan	1.485.000,0	Sisa lebih perhitunga			1.485.000,00

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					05	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tuban latsari		0	n anggaran tahun sebelumnya			
2	18	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulan/ semesteran	Kab. Tuban, Tuban latsari	23 Laporan	2.607.000,00	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		23 Laporan	2.607.000,00
	2	**18**	**01**	**2**	**05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis layanan kepegawaian**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**2 Layanan**	**66.976.000,00**			**1 layanan**	**66.976.000,00**
2	18	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban latsari	1 Paket	976.000,00	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			976.000,00

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Kab. Tuban, Tuban latsari	50 orang	66.000.000,00	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			66.000.000,00
2	**18**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan pengadaan administrasi umum**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**6 Jenis**	**377.398.568,00**			**4 jenis layanan**	**377.398.568,00**
2	18	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban latsari	1 Paket	40.000.000,00	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			40.000.000,00
2	18	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban latsari	2 Paket	144.830.080,00	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		2 Paket	144.830.080,00
2	18	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban latsari	3 Paket	98.613.488,00	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		3 Paket	98.613.488,00
2	18	01	2	06	00	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Kab. Tuban,	2 Paket	63.500.000,	Sisa lebih		2 Paket	63.500.000,00

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					05	dan Penggandaan	dan Penggandaan yang	Tuban latsari		00	perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
2	18	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban latsari	3 Dokumen	10.455.000,00	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			10.455.000,00
2	18	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban latsari	5 Laporan	20.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		10 Laporan	20.000.000,00
2	**18**	**01**	**2**	**06**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis pengadaan jasa penunjang**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**3 Jenis**	**1.375.185.500,00**			**2 Jenis Jasa**	**1.375.185.500,00**
2	18	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban latsari	12 Laporan	604.000.000,00	SISA LBH PERHITUNGAN ANGGARAN THN SEBELUMNYA		0	5.120.000,00

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban latsari	12 Laporan	604.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Laporan	604.000.000,00
2	18	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Kab. Tuban, Tuban latsari	12 Laporan	766.065.500,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	766.065.500,00
2	**18**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**3 Jenis**	**1.167.340.877,31**			**3 Jenis Barang**	**1.167.340.877,31**
2	18	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban, Tuban latsari	29 Unit	182.350.810,00	SISA LBH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		29 Unit	182.350.810,00

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Tuban latsari	211 Unit	366.747.920,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		211 Unit	386.747.920,00
2	18	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban, Tuban latsari	1 Unit	598.242.147,31	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Unit	598.242.147,31
2	**18**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi Total terhadap target Investasi**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**100 %**	**100 %**			**420.515.602,50**	**-45.834.397,50**
2	**18**	**02**	**2**	**01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kebijakan kemudahan penanaman modal..**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**2 Dokumen**	29.381.602,50			**2 Dokumen2**	29.381.602,50
2	1	0	2	0	00	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh	Jumlah kesepakatan	Kab. Tuban,	2 Dokumen	29.381.602,	Dana Bagi		2 Dokumen	29.381.602,50

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	2		1	03	pemerintah kabupaten / kota	Kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di DAerah	Tuban latsari		50	Hasil			
2	**18**	**02**	**2**	**02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah peta potensi penanaman modal**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**2 dokumen**	**391.134.000,00**			**2 Dokumen**	**391.134.000,00**
2	18	02	2	02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah KKabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Tuban, Tuban latsari	1 Dokumen	102.574.000,00			0	102.574.000,00
2	18	02	2	02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Peta Potesi Investasi Kabupaten /Kota	Kab. Tuban, Tuban latsari	2 Dokumen	288.560.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	288.560.000,00
2	**18**	**03**				**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase calon investor yang Merealisasikan penanaman modal**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**10%**	**473.145.000,00**			**10%**	**473.145.000,00**
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Calon Investor	Kab. Tuban, Tuban latsari	20 pelaku usah	473.145.000,00			20 pelaku usaha	473. 145.000,00

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	03	2	01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kergiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Kab. Tuban, Tuban latsari	5 dokumen	473.145.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 dokumen	473.145.000,00
2	**18**	**04**				**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Presntase pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**100%**	**335.413.880,00**			**100%**	**335.413.880,00**
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani secara elektronik	Kab. Tuban, Tuban latsari	98,1%	335.413.880,00			78%	335.413.880,00
2	18	04	2	01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan danNonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Tuban, Tuban latsari	450 Pelaku Usaha	204.436.680,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		450 pelaku usaha	204.436.680,00

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	04	2	01	0008	Pemantauan,analisis ,evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Tuban, Tuban latsari	140 Kegiatan Usaha	130.977.200 ,00	DANA ALOKASI UMUM		140 kegiatan usaha	130.977.200,00
2	**18**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan pengendalian pelaku Usaha**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**52%**	**189.479.956,00**				**189.479.956,00**
2	**18**	**05**	**2**	**01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**220 pelaku usaha**	**189.479.956,00**			**230 pelaku usaha**	**189.479.956,00**
2	18	05	2	01	0004	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dhadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Kab. Tuban, Tuban latsari	8 Kegiatan Usaha	51.500.000, 00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 kegiatan usaha	51.500.000,00

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kegiatan usahanya							
2	18	05	2	01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis / sosialisasi implementasi Perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perijinan berusaha berbasis resiko	Kab. Tuban, Tuban latsari	400 Pelaku Usaha	72.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		400 pelaku usaha	72.400.000,00
2	18	05	2	01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Tuban, Tuban latsari	50 Kegiatan Usaha	65.579.956,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-FASILITAS PENANAMAN MODAL		65.579.956	-56.186.044,00
2	**18**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM**	**Persentase data dan informasi peizinan,**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**100%**	**159.604.500,00**			**100%**	**159.604.500,00**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						INFORMASI PENANAMAN MODAL	**perizinan berusaha, dan nonperizinan yang dikelola dan dimanfaatkan**							
2	**18**	**06**	**2**	**01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah**	**Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi**	**Kab. Tuban, Tuban latsari**	**76%**	**159.604.500,00**			**78%**	**159.604.500,00**
2	18	06	2	01		Pengolahan,Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Tuban, Tuban latsari	12 dokumen	159.604.500,00	Dana bagi hasil (DBH)		12 Dokumen	159.604.500,00

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tuban.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah pelaksanaan dimana semua unsur Perangkat Daerah bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
c. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, maka akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Dra. ESTI SURAHMI, Apt.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pencapaian rencana panjang sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, dibutuhkan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan daerah selama lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, serta program-program Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan.

Hasil penjabaran dari RPJMD adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja tahunan dari Perangkat Daerah yang diharapkan dapat dicapai setiap tahunnya yang lebih terarah dan terintegrasi dalam rangka tercapainya program dan prioritas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

serta Pariwisata juga diharapkan dapat menjadi bahan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban secara umum.

Sejalan dengan perkembangannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di tahun berjalan untuk lebih mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai sesuai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil penjabaran evaluasi tersebut, maka perlu dilakukan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja yang telah disusun.

Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta prakiraan maju. Selain itu juga berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

A. Berpedoman pada Perubahan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II di tahun berjalan;
B. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
C. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan PAPBD ; dan
D. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040;
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya dampak adanya berbagai perubahan kebutuhan sebagai akibat adanya berbagai perubahan kebijakan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Adapun tujuan dari disusunnya perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

2. Sebagai pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang diimplementasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman atas pelaksanaannya, yang didalamnya berisikan pagu indikatif pendanaan yang dituangkan ke dalam rekening - rekening belanja beserta indikator dan target kinerjanya yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang didasarkan pada Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban 2025-2029 untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap laporan realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 khususnya mengenai pencapaian target kinerja dan keuangan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2025, perlu kiranya berpedoman pada penyelenggaraan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang secara umum dapat digambarkan/terbagi dalam beberapa program dan kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Program ini meliputi 7 (tujuh) kegiatan / 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.080.419.838,00 (Sebelas miliar delapan puluh juta empat ratus Sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.095.915.829,00 (Empat miliar Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) yang meliputi :
   A) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 9 (Sembilan) dokumen dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 6 (enam) dokumen.
   B) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 5 (lima) laporan dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 3 laporan.

C) Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai sebanyak 1 (satu) layanan dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 (satu) layanan.

D) Administrasi umum perangkat daerah dengan target layanan pengadaan administrasi umum sebanyak 1 (satu) layanan dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 (satu) layanan.

E) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 1 (satu) Tahun dengan 7 (tujuh) unit jenis pengadaan barang dan terealisasi 2 (dua) unit.

F) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target pengadaan jasa penunjang sebanyak 1 (satu) laporan dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 (satu) laporan.

G) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeritah daerah dengan target 1 (satu) kegiatan untuk pemeliharaan BMD sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 (satu) kegiatan untuk 43 (empat puluh tiga) unit.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan / 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 903.689.640,00 (sembilan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 80.104.140,00 (delapan puluh juta seratus empat ribu seratus empat puluh rupiah) dengan target tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sebesar 4,1% dan realisasi sampai dengan triwulan II belum ada. Namun demikian telah dilaksanakan kegiatan pada sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota berupa seleksi pemuda pelopor yang diikuti oleh 100 peserta dan terpilih 5 pemuda pelopor untuk diikutkan seleksi di tingkat provinsi.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini meliputi 5 (lima) kegiatan / 9 (sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.072.701.763,00 (sembilan miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.903.498.252,00 dengan rincian :

a) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan

Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota dengan target jumlah sarana dan prasarana olahraga sebanyak 4 (empat) unit dan realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 4 (empat) unit.

b) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target jumlah penyelenggaraan event kejuaraan olahraga prestasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) event dan realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 (satu) event yaitu BUPATI CUP.

c) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan target dokumen laporan hasil pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah provinsi sebanyak 1 (satu) dokumen dan sampai dengan triwulan II belum ada realisasi dikarenakan menyesuaikan jadwal event tingkat provinsi.

d) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan target jumlah organisasi keolahragaan sebanyak 52 (lima puluh dua) organisasi dan realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 52 (lima puluh dua) organisasi.

e) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan target Penyelenggaraan seleksi terpadu dan penyediaan sarana olahraga rekreasi sebanyak 1 (satu) event dan belum ada realisasi sampai dengan triwulan II dikarenakan event dilaksanakan pada triwulan IV.

4. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini mempunyai target Jumlah Kebudayaan Daerah yang dikelola sebanyak 11 (sebelas) obyek dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 3 (tiga) obyek. Program pengembangan kebudayaan meliputi 2 (dua) kegiatan / 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 802.165.853,00 (delapan ratus dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.136.300,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang meliputi :

A) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target persentase peningkatan pementasan kesenian sebesar 70% dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 20%.

B) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan sebanyak 48 kesenian dan belum ada realisasi sampai dengan triwulan II dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan ke 3 (tiga) menyesuaikan dengan *event* daerah.

5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   Program ini mempunyai target peningkatan jumlah pelaku kesenian daerah sebesar 10% dan belum ada realisasi sampai dengan triwulan II. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan konsep rencana aksi kegiatan pada P-APBD Tahun 2025. Program Pengembangan Kesenian Tradisional meliputi 1 (satu) kegiatan / 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.002.800,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ribu delapan ratus rupiah).
6. Program Pembinaan Sejarah
   Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan / 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.217.154,00 (enam puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan sampai dengan triwulan II belum ada realisasi. Kondisi ini disebabkan karena ada penyesuaian anggaran pada P-APBD Tahun 2025.
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.081.420,00 (empat puluh juta delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan belum ada realisasi sampai dengan triwulan II.
8. Program Pengelolaan Permuseuman
   Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 999.166.832,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 45.375.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan target dokumen laporan pengelolaan museum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) dokumen dan realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 (satu) dokumen.
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Program ini meliputi 2 (dua) kegiatan / 2 (dua) sub kegiatan dengan target peningkatan perjalan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota sebesar 1% dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0,92%. Adapun alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp. 956.562.500,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 351.865.150,00 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan dengan rincian :
   a) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan target jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi sebanyak 10 (sepuluh) usaha dan belum ada realisasi sampai dengan triwulan II.

b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan target jumlah destinasi pariwisata yang terkelola sesuai standar sebanyak 3 (tiga) destinasi dan realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 3(tiga) destinasi.

10. Program Pemasaran pariwisata

Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan / 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.420.260,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 9.571.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu). Pada program ini telah dilaksanakan kegiatan pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan target sebanyak 6 (enam) dokumen dan realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 (satu) dokumen.

11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan / 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.029.392.850,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 178.849.640,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah). Pada program ini telah dilaksanakan kegiatan pada sub Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata dengan target jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan sebanyak 4500 orang dan realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 350 orang.

12. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan / 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.086.500,00 (seratus lima puluh empat juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 (Tabel E.81)

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Lembar 1 dari 20

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda Kabupaten Tuban		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	83%	34.350.516.339	65,03 %	36.522.837.436	68%	13.055.902.109	0	293.689.140	0	1.689.913.252	0	0	0	0	0	1.983.602.392	0	40.053.935.441	0	116.6	Kabid Pariwisata
I	**Meningkatnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandir	4,1 %	5.616.206.516	4,99%	2.466.548.853	4,1%	2.298.000.000	0(%)	35.294.140	0(%)	19.810.000	0(%)	0	0	0	0 (%)	55.104.140	0 (%)	2.521.652.993	0(%)	44,9 %	Kabid Pariwisata
	Meningkatnya wirausaha muda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan	Prosentase Peningkatan Pemuda Yang Dibina	100 %	5.616.206.516	1,44%	2.466.548.853	100%	2.298.000.000	0(%)	35.294.140	0(%)	19.810.000	0(%)	0	0	0	0(%)	55.104.140	0(%)	2.521.652.993	0(%)	44,9%	Kabid Pariwisata

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemuda Kader Kabupaten/Kota																						
	Terlaksananya pemberian penghargaan Kepemudaan bagi Yang berprestasi Dan/atau berjasa Dalam memajukan Potensi pemuda	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi Yang berprestasi Dan/atau berjasa Dalam memajukan Potensi pemuda	Jumlah Yang menerima penghargaan pemuda	0 orang	0	0 orang	0	100 orang	2.000.000.000	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	JF Analis Kebijakan Ahli Muda
	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota Dengan Kepemimpinan Dan Kepelopo Ran dan Kesuka Relawanan Pemuda	0 Keg	0	0 Keg	0	1 Kegiatan	184.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	JF Analis Kebijakan Ahli Muda
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kab/ Kota dari seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi Dalam Pengem Bangan Kepeloporan Pemuda	0 orang	0	0 orang	0	100 orang	114.000.000	0	28.244.140	100 orang	19.810.000	0	0	0	0	100 orng	48.054.140,00	100 orang	48.054.140,00	0	0	JF Analis Kebijakan Ahli Muda
														0										

Lembar 3 dari 20

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		u																						
2	**Meningkatnya Kapasitas dan Daya saing Keolahragaan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Peningkatan pendapatan retribusi tempat olahraga	10%	0	161.73 (%	0	10 (%)	0	-100%		46,29%	0	0	0	0	0	-53,71%	0	-53,71 (%)	0	-53,71%	0	Kabid Kepemudaan Dan Olahraga
			Persentase Peningkatan Prestasi olahraga	90%	22.103.003.310	63,64 (%)	29.116.641.822	63.64 (%)	9.457.902.109,00	0	227.395.000,00	-44,44%	1.670.103.250	0	0	00		-44,44 %	1.807.408.252	-44,44%	32.561.365.687	-49,38%	147,32 %	
	Meningkatnya Sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dan prosentase pendapatan retribusi tempat olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	15 dokumen	2.245.608.926	10 dokumen	9.605.828.885	0 dokumen	1.147.000.000	0	104.654.500	0	175.328.568	0	0	0	0	0	279.983.06	10 dokumen	9.946.134.953	66,67%	442.91 %	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penye Diaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan,Peng Adaan,pemanfaata Pemeliharaan dan pe Ngawasan prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi,dan Sinkronisasi Penyediaan prasa Rana olahraga Melalui perencana An pengadaan , Pemanfaatn,peme Liharaan dan pe Ngawasan prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Tk. Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	0	0	4 unit	1.147.000.000	4 unit	104.654.500	4 unit	175.328.568	0	0	0	0	4 unit	279.983.068	4 unit	340.306.068	0	0	
	Terselenggaranya kejuaraan olahraga multi event dan single	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah penyelenggaran event kejuar An olahraga	0 kali	0	0 unit	0	3 event	5.429.902.613	0	103.323.000	1 event	1.481.702.800	0	0	0	0	1 kali	1.585.025.880	1 kali	3.054.633.893	0	0 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	event Tingkat Kab/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	prestasi tingkat daerah																					
	Terselenggarany a kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat Kab/Kota	Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olah Raga Multi even Dan Single Event tingkat Kab /Kota dan Single	0 0n	0	0		8 event	2.023.999.923	0	0	3 event	314.925.110	0	0	0	0	3 event	314.925.110	3 event	446.223.610	0	0	
	Menimgkatnya Keikutsertaan Anggota kontingen Kab/Kota dala m penyelenggaraan Pekan dan Keju araan Olahraga	Keikutsertaan Anggota kontingen Kabupateb/Kota Dalam Penyeleng Garaan Pekan dan Kjuaraan Olahraga	Jumlah Peserta dalam Penyelenggar aan kejuaraan Tingkat Kabupa ten /Kota	0	0	6		450 orang	3.405.902.690	0	101.973.00	282	1.156.953.770	0	0	0	0	282 orang	1.258.926.770	282 orang	2.706.127.28	40%	93.84 %	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengembanga n olahraga prestasi Tingkat Daerah	0 dokum en	0	0 dokum en	0	3 dokumen	127.999.830					0		0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksanya pembinaandan pengembangan Olahragawan Berpreastsi Kabupa Ten /Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berpresatsi Kabupaten/Kota	Jumlah olahraga Wan Berprestasi Kabupaten/Kota yang dibina Dan dilakukan Pengembangan	0 orang	0	0 orang		20 orang	122.999.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang Berprestasi dan/ Atau berjasa dalam Memajukan olahraga	Pemberian Penghargaan Olahraga bagi Yang berprestasi Dan/atau berjasa Dalam memajukan olahraga	Jumlah Peneriman Penghargaan Olahraga	0 orang	0	0 orang	0	100 orang	5.000.000,00	0	0	0	0	0t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahrag	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan	52 organi sasi	4.132.305.000	52 orgnisasi	2.663.745.000	52 organisasi	2.122.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	52 organisasi	2.663.745.000	100%	64,46 %		
	Terlaksananya Peningkatan kerja Sama organisasi Keolahragaan Kab/ Kota dengan Lembaga terkait	Peningkatan kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Orga Nisasi Keolahra Gaan Kab/Kota Dengan lembag terkait	0 dokum en	0	0 dokum en	0 0	1 dokumen	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0		
	terlaksananya Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Orga Nisasi Keolahraga An di Kab/KOta	Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Orga Nisasi Keolahraga An Di Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Kab/Kota se Suai standar Nasional	0	0	0		100 %	2.060.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Meningkatnya Penyelenggaraan seleksi terpadu dan penyediaan Sarana olaharga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekteasi	Penyelenggaraan seleksi terpadu dan penyediaan	5 event	1.239.229.65	4 event	767.838.000	1 event	630.999.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767.838.000	0	61.96 %		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	K	5 Rp	K	6 Rp	K	7 Rp	K	8 Rp	K	9 Rp	K	10 Rp	K	11 Rp	K	12 Rp	K	13=6+12 Rp	K	14=13/5x100% Rp	15
	Terlaksananya Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di masyarakat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 dokumen	100.000.000	1 dokumen	17.088.000	1 dokumen	105.999.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.088.000	0	17,09 %	
	Terlaksananya Pengembnagan OlahRaga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah dokumen Lembaga hasil penyelenggaraan olahraga Wisata,tantanga Dan petualanga	0	0	0	0	1 laporan	524.999.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	
3	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi kepramukaan (gugus depan)yang meningkat kapasitasnya	2%	6.631.306.513	77.52	4.939.646.761.	50%	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50%	4.939.646.761	2500%	74,49 %	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Jumlah Pemuda Yang mengikuti pembinaan kepramukaan	0 orang	0	0 orang	0	100 orang	1.300.000.000	0	0	0 -17,81	0	0	0	0	0	-17,81	0	-17,81	0	0	0 % %	
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan ingkat daerah yang ditingkatkan pasitasnya	1 organisai	6.631.305.513	1 organisasi	4.939.646.761	1 organisasi	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 organisasi	4.939.646.761	100%	74,49 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	**Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola (objek)	11 obyek	3.978.783.908	11 objek	4.086.496.010	11 obyek	1.416.155.000	0 objek	1.000.000	3 obyek	19.136.300	0	0	0	0	3 obyek	20.136.300	3 obyek	4.172.406.940	27,27%	104.87 %	
	Terlaksananya Pengelolaan ObyekPemajuan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Peningkatan Pementasan Kesenian	100%	1.892.510.939	70,21 %	2.679.085.000 860	70%	1.204.050.00	0	1.000.000	66,67%	19.136.300	0	0	0	0	66,67%	20.136.300	66,67%	2.764.355.930	66,67%	146.07 %	
	Terwujudnya Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	90 obyek	1.892.510.939	90%	2.994.315.150	60 obyek	969.050.000	0	0	22 objek	19.136.300	0	0	0	0	4 objek	19.136.300	4 objek	3.078.586.080	4.44 %	162.67 %	
	Terfasilitasinya Pembinaan SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaa	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	710 orang	1.086.272.969	665 orang	472.105.050	430 orang	235.000.000	0 orang	1.000.000	0 orang	0	0	0	0	0	0 orang	1.000.000,00	0	473.105.050	90,14 %	3.55%	
	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	48 kesenian	1.000.000.00	48 kesenian	620.075.800	48 kesenian	212.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.075.800	0	62.01 %	
	Terlaksananya Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	40 obyek	1.000.000.000	40 objek	21.681.400	14 obyek	212.105.000		40 obyek			0	0	0	0	0	0	0	521.681.400	0	52.17 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pengembangan dan Pemanfaatan																					
5	**Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Prosentase Peningkatan Jumlah Pelaku Kesenian Tradisional	10%	867.170.852	10,34 (%)	407.137.330	10%	430.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.137.330	-1000%	46.95 %	
	Terlaksananya Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kab/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sumber daya pelaku seni	1991 orang	867.170.852	5023 orang	407.137.330	1810 orang	430.000.000	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0 orang	0	5023 orang	407.137.330	252.29%	46,95 %	
	Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan(Ditingkatkan kompetensinya)	1991 orang	867.170.852	535 orang	407.137.330	220 orang	430.000.000	0	0	140 orang	12.000.000	0	0	0	0	140 oran	12.000.000	535 orang	407.137.330	26,87%	46.95 %	
6	**Meningkatnya Dokumen Sejarah Yang Terinventarisir**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Jumlah Dokumen Sejarah Yang Terinventarisir	30 dokumen	510.100.501	11 dokumen	216.346.000	7 dokumen	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 dokumen	216.346.000	36,67 %	42.41 %%	
	Terlaksananya pembinaan ejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sejarah Lokal dalam1 (satu) Daerah Kab/Kota	5 dokumen	510.100.501	5 dokumen	216.346.000	1 dokumen	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 dokumen	216.346.000	120 %	42.41 %%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya pemberdayaan SDM danLembaga Sejarah Lokal Kab/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	250 orang	510.100.501	100	216.346.000	50 orang	130.000.000	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	100 orang	216.346.000	40 %	42,41 %%	
7	**Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Dengan Baik	100 unit	456.284.898	251 unit	146.117.800	96 unit	89.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.117.800	0	32,02 %	
	Terlaksananya penetapan cagar budaya peringkat kab/kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	5 dokumen	456.284.898	3 dokumen	146.117.800	1 dokumen	89.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 dokumen	146.117.800	60%	32,02 %	
	Terlaksananya pendaftaranobyek diduga cagarbudaya	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Obyek di Duga Cagar Budaya Yang Dilestarikan	415 obyek	456.284.898	101 objek	71.063.400	83 obyek	89.450.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	71.063.400	0	15.57 %	
8	**Meningkatnya pengelolaan Museum Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Jumlah Museum Yang Dikelola dengan baik	1 unit	5.016.587.96	1 unit	2.632.539.897	1 unit	1.032.875.922	1 unit	23.625.000	1 unit	18.150.000	0	0	0	0	1 unit	41.775.000	1 unit	2.688.530.397	100 %	53,29 %	
	Terlaksananya pengelolaan Museum Daerah	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pengelolaan MuseumKab/Kota	3 dokumen	5.016.587.96	3 dokumen	2.632.539.897	3 dokumen	1.032.875.920	0	23.625.000	0 dokumen	18.150.000	0	0	0	0	1 dokumen	41.775.000	1 dokumen	2.688.530.397	0%	53,59 %	
	Terlaksananya pelindungan Pengembangan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Koleksi Museum Yang Dilakukan perlindungan,pen	5774 benda	3.539.545.3	5774 benda	1.875.483.761	5774 benda	799.465.000	0	0	5774 benda	32.282.00	0	0		0	5774 benda	0	5774 benda	1.875.483.761	100 %	52,99 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	koleksi secara terpadu	Koleksi secara terpadu	gembangan, dan pemanfaatan																					
	Meningkatnya pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	4 unit	784.859.20	4 unit	132.412.296	4 unit	64.858.500	1	0	1 unit	0	0		0	0	1	0	24 unit	132.412.296	25%	14.83 %	
	Tersedianya sarana dan prasarana museum yang terpelihara	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	115 unit	692.183.400	115 unit	624.643.840	115 unit	168.552.422	115	23.625.000	115unit	18.150.000	0 unit	0	0	0	115 unit	41.775.000	115 unit	677.114.840	100%	97,82%	
9	**Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 poin	46.402.310.580	80,15 poin	17.862.529.927	81 poin	11.539.062.295	0	2.002.328.754	0	2.093.587.075	0	0	0	0	0	4.095.915.829	0	22.620.042.585	0	48,75	
	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Perencanaanpenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	45 dokumen	956.374.75	9 dokumen	512.161.556	9 dokumen	293.061.472	0	14.720.250	3 dokumen	17.772.500	0	00	0	0	3 dokume	32.492.750	3 dokumen	672.715.030	26,67%	70.34 %	
	Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 dokumen	767.874.750	9 dokumen	512.161.556	9 dokumen	293.061.472	0 dokumen	7.691.251	3 dokumen	11.840.500	0	0	0	0	3 dokumen	19.531.750	12 dokumen	540.779.056	26.67%	70,43 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 laporan	188.500.000	9 dokumen	118.974.974	9 laporan	75.475.592	0	2.560.000	2 6laporan	2.609.000	0	0	0	0	2 laporan	5.169.000	11 laporan	124.143.974	24,44%	65,86 %	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	25 laporan	32.065.962.770	15 laporan	17.580.328.232	5 laporan	3.513.264.558	0 laporan	1.576.332.567	3 laporan	1.736.284.711	0		0	0	3 laporan	3.312.617.278	18 laporan	20.892.945.510	72%	65.16 %	
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	31.901.552.770	52 orang	4217.468.055.0	60 orang	3.433.733.218	51 orang	1.325.422.533	51 orang	1.297.335.922	0		0	0	51 orang	2.622.758.455	51 orang	20.090.813.49	92,73%	62,98 %	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 laporan	164.410.000	7 laporan	53.304.00	8 laporan	54.352.12	2 laporan	0	2 laporan	18.996.000	0		0	0	102 unit	18.996.000	4 laporan	72.300.000	57,14%	43.98 %	
	Terlaksananya Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Peningkatan Kedisiplinan Kompetensi Pegawai	102 orang	721.836.800	102 orang	252.759.631	92 orang	66.524.750			40 orang	50.800.000					40 orang	50.800.000		303.559.63	39,92%	42.05 %	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan	102 orang	50.000.000	0	0	57 orang	15.299.800	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Perundangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan-perundangani Kompetensi Pegawai	102 orang	30.718.400	0	0	25 orang	51.224.95	40 orang	0	0	50.800.000	0		0	0	40 orang	50.800.000	40 orang	50.800.000	39.22%	165.3	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkaoanya	0 paket	0	0	0	102 paket	48.139.000,00	0 paket	0	0	0	0		0	0	0 paket	0	0	0	0	0	
	Terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum(Layanan)	1 layanan	1.114.128.500	1 layanan	810.559.648	1 layanan	384.682.511,00	1 layanan	45.900.100,00	1 layanan	31.018.450,00	0	0	0	0	1 layanan	76.918.550,00	1 layanan	895.443.298,00	100%	80,37 %	
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	60.161.500	2 paket	35.683.300	2 paket	16.993.889,00	2 paket	3.300.000,00	1 paket	3.550.900,00	0	0	0	0	1 paket	3.300.000	2 paket	38.983.300,00	100%	64,08 %	
	Terlasananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	190.778.500	20 paket	146.951.744	20 paket	83.235.300	0 paket	0	6 paket	0	0	0	0	0	6 paket	0	6 paket	146.951.744	30%	77,03 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	287.988.500	11 paket	231.867.600	6 paket	110.357.322	3 paket	11.718.400,00	2 paket	8.124.600,00	0	0	0	0	5 paket	19.843.000	5 paket	257.802.700	83,33 %	59,52 %	
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	254.050.000	10 paket	147.357.750	10 paket	40.745.250,00	2 paket	14.394.000,00	0	0	0	0	0	0	4 paket	14.394.000	4 paket	161.751.750	40%	63,67 %	
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	18.312.750,00	5 dokumen	860.000,00	5dokumen	1.720.000,00	0	0	0	0	5 dokumen	2.580.000,00	5 dokumen	3.440.000	0%	0 %	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	264.420.000	20 laporan	212.139.254	25 laporan	115.038.000,00	3 laporan	0	3 laporan	0	0	0	0	0	3 laporan	0	26 laporan	213.152.254	26%	80,81 %	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	25 unit	209.977.600	0	0	5 unit	33.524.700	0	0	1 unit	2.400.000	0	0	0	0	5 unit	31.169.000	5 unit	31.169.000	20%	14.84 %	
	Terlaksanya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	129.977.600	0	0	1 paket	9.977.600	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	1 paket	9.800.00	1 paket	9.800.000	20%	7.54 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya Yang Disediakan	10 unit	90.000.000	0	0	2 unit	23.547.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 unit	21.369.000	2 unit	21.369.000	20 %	23.74 %	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (jasa)	1 laporan	7.475.667.910	1 laporan	4.201.515.020	1 laporan	1.565.594.248	1 laporan	324.627.737	1 laporan	388.383.612	0	0	0	0	1 laporan	662.636.464	1 laporan	3.396.240.684	100 %	45.43	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	2.841.497.160	3 laporan	1.015.975.020	3 laporan	568.292.844	3 laporan	121.346.250	3 laporan	106.558.904	0	0	0	0	3 laporan	227.905.16	3 laporan	1.243.880.180	100 %	43.78 %	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	95.250.000	1 laporan	53.828.000	1 laporan	37.792.300	1 laporan	7.374.500	1 laporan	3.225.000	0	0	0	0	1 laporan	10.599.500	1 laporan	64.427.50	100 %	67.6 %	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	4.521.525.00	2 laporan	1.663.801.200	2 laporan	853.722.650	0	166.233.500	0	181.350.900	0	0	0	0	0	0	2 laporan	1.663.801.200	0	36.8 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	1 kegiatan	2.729.977.600	1 kegiatan	250.374.016	1 kegiatan	331.824.210	1 kegiatan	19.098.000	1 kegiatan	24.799.440	0	0	0	0	1 kegiatan	43.897.440	1 kegiatan	294.271.456	100%	10.78	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 unit	656.048.250	44	303.994.776	38 unit	194.726.790	11 unit	17.548.000	12 unit	21.404.440	0	0	0	0	23 unit	38.952.440	23 unit	342.947.216	60,53%	52.27 %	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	50.000.000	50 unit	19.352.000	50 unit	9.957.420	0	0	30 unit	1.350.000	0	0	0	0	30 unit	1.350.000	30 unit	20.702.000	60%	41.4 %	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit	66.000.00	63 unit	36.362.000	28 unit	26.840.000	9 unit	1.550.000	2 unit	2.045.000	0	0	0	0	11 unit	3.595.000	11 unit	39.957.00	39,29 %	60.5 %	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	327.250.000	2 unit	240.325.500	1 unit	100.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	240.325.500	40%	73.44 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pengelolaan Pariwisata Daerah		Tingkat Hunian Akomodasi	37%	12.163.541.205	43,38 %	8.362.758. 655	43,5%	15.937.502.967	0	70.589.678.090	0	0	0	0	0	0	0	144.108.064.79	0	152.470.823.45 1	0	1253, 51%	
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	25%	0	7,86%	0	8,36%	0															
	Meningkatnya perjalanan wisatawan ating ra yang datang kekab/kota	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan ating ra yang ating ke kabupaten/kota (%)	1 %	4.410.013.690	13,8 2%	3.565.638. 415	1 %	2.037.772.610	-13,06	9.568.600	-9,39	219.226.850	0	0	0	0	-9,39	228.795.450	-9,39	3.794.433.865	-9,39%	86.04 %	
	Terlaksananya pengelolaan dayatarik wisata kab/kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kot a yang dikelola	3 lokasi	1.104.472.754	3 loka si	3.236.661. 972	3 lokasi	2.037.772.61	3 loka si	9.568.600	3 lokasi	219.226.850	0	0	0	0	3 lokasi	228.795.450	3 lokasi	3.465.457.42 2	100%	313.7 7 %	
	Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	- Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	25 dok ume n	1.023.819.154	10 dok umn	887.390.3 24	1 dokum en	250.000.000	0	2.000.00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.00	10dokum en	889.390.32 4	40 %	86.87 %	
	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang,	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	19 lokasi	124.990.300	0	0	1 lokasi	999.972.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemantapan, Revitalisasi)		(Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)																					
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan	3 unit	1.656.731.482	3 unit	1.933.647.050	3 unit	787.800.000	3 unit	9.568.600	3 unit	19.226.850	0	0	0	0	3 unit	228.795.450	3 lokasi	2.162.442.500	100 %	130.52%	
	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	5 %	2.091.412.054	13,82%	1.389.181.918	5 %	425.000.00	-13,06%	3.146.000	-9,39%	13.382.000	0	0	0	0	-9,39%	16.528.000	-9,39%	1.405.709.918	-187,8 %	67.21 %	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	30 dokumen	2.091.412.054	12 dokumen	1.389.181.918	6 dokumen	425.000.000	0	1.573.00	3 dokumen	13.382.000	0	0	0	0	3 dokumen	14.955.000	15dokumen	404.136.918	50%	67.14 %	
	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik,	20 dokumen	1.600.000.000	10 dokumen	891.101.914	4 dokumen	275.000.000	0	1.573.000	2 dokumen	13.382.000	0	0	0	0	2 dokumen	14.955.000	12 dokumen	906.056.914	60%	56.63 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Baik Dalam dan Luar Negeri	dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																					
	Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	8 dokumen	1.000.000.000	0	0	2 dokumen	150.000.0	0	0	3 dokumen	0	0	0	0	0	3 dokumen	0	3 dokumen	0	37.5%	0	
	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	2 %	510.100.401	2,79 %	393.960.371	2,89 %	225.000.000	0	0	0	37.700.000	0	0	0	0	0	37.700.000	0	431.660.371	0	84.62 %		
	Berkemangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	5 dokumen	430.100.401	2 dokumen	393.960.371	1 dokumen	225.000.000	0	0	1 dokumen	37.700.000	0	0	0	0	1 dokumen	37.700.000	3 dokumen	431.660.371	60%	100.36		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Pengembangan Sistem Pemasara	Pengembangan Sistem Pemasara	- Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pemasaran ekonomi kreatif	4 dokumen	800.000.000	3 dokumen	318.366.87	1 dokuen	225.000.00	0	0	2 dokumen	37.700.000	0	-	0	0	2 dokumen	37.700.000	5 dokumen	356.066.871	125%	44.51 %	
	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya manusia	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata	48%	5.152.015.060	96,23%	3.429.602.549	42%	2.707.686.220	0	49.004.000	-3,7%	335.561.200	0	-	0	0	-3,7%	384.565.200	-3,7%	3.814.167.749	-7,71%	74.03 %	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	25%	4.552.015.060	37,25%	3.429.602.549	5%	2.707.686.220	5 orang	12.251.000	-5,06%	335.561.200	0	-	0	0	240 oran	1.483.253.680	240 orang	1.483.253.680	16.67 %	89.35 %	
	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	- Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk	5000 orang	10.000.000.000	0	0	147 orang	1.882.686.220	0	0	675 orang	168.860.000	0	-	0	0	675 orang	168.860.000	675 orang	168.860.000	13,5%	1.69 %	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Masyarakat untuk Pengembangan	pengembangan pariwisata																					
	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata berbasis SKKNI	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata berbasis SKKNI	- Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	900 orang	. 1.000.000.00	0	0	300 orang	525.000.00	0	2.251.000	50 orang	78.451.200	0		0	0	50 orang	90.702.200	50 orang	90.702.200	5,56%	9.07 %	
	Terfasilitasinya Fasilitasi Serti}kasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Fasilitasi Serti}kasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	- Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Serti}kasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	460 orang	900.000.000	100 orang	237.364.000	100 orang	100.000.000	40 orang	0	0	80.000.00050 orang	0	0	0	0	90 orang	80.000.000	100 orang	135.039.000	13.04 %	14,21 %	
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	200 orang	200.000.000	190 orang	110.905.000	120 orang	200.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 orang	110.905.00	95%	55.45 %	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban, maka Dinas Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata merupakan Lembaga Teknis Daerah atau Unsur Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Adapun struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2022

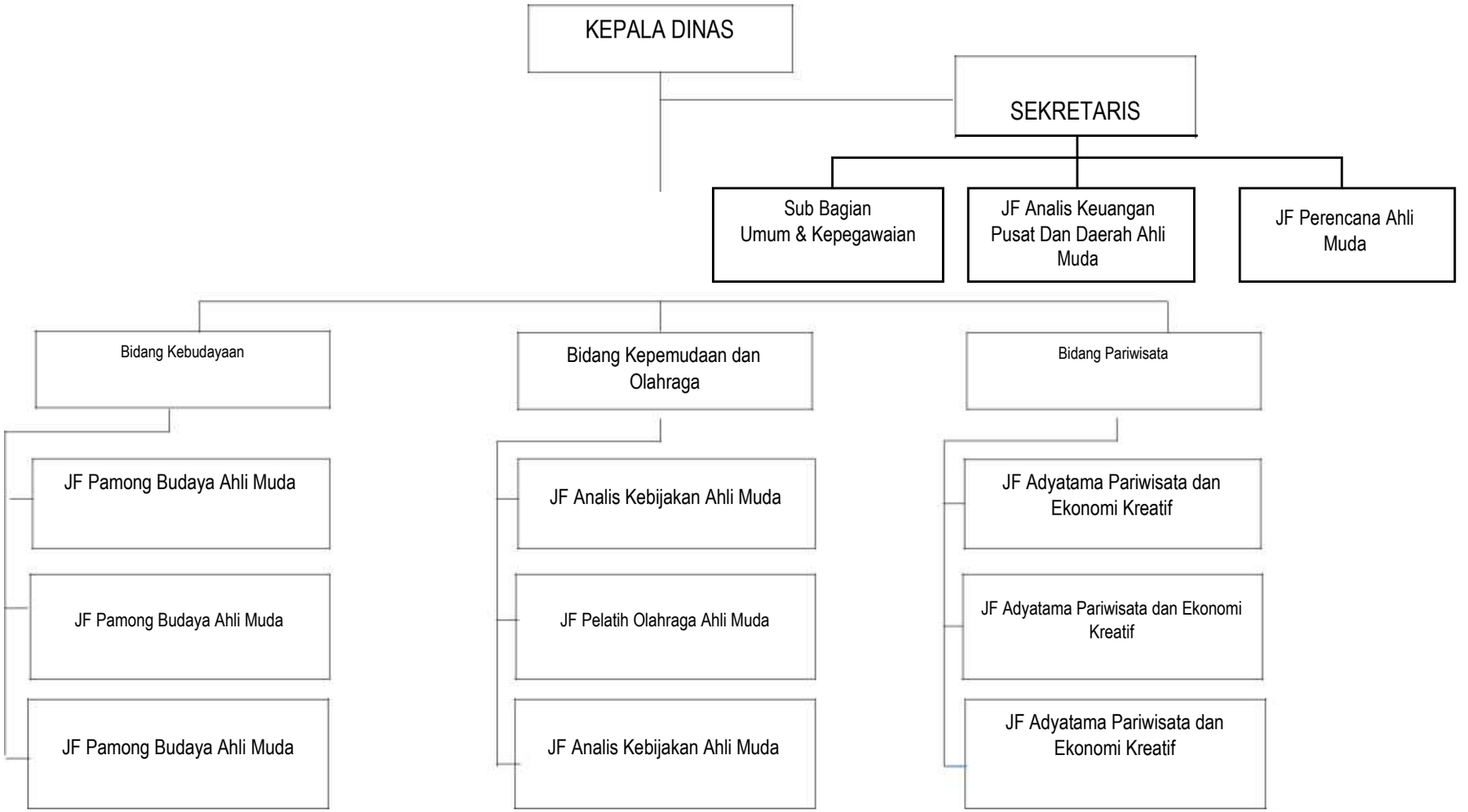

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas yang harus dilaksanakan yakni : melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
d. pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
e. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
f. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban terdiri atas Sekretariat dan 3 Bidang, serta kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

a. Sekretariat;
b. Bidang Kebudayaan;
c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
d. Bidang Pariwisata ;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban sebagaimana tersebut diatas dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi masing-masing Bidang yaitu :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dengan tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan pelaporan, serta menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
b. penyelenggaraan urusan Pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahkan dan mengkoordinasikan 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) kelompok jabatan fungsional sebagai berikut : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dan JF Analis Keuangan yang masing-masing bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dengan tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratife di bidang Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang kebudayaan;

c. pelaksanaan pembinaan bidang kebudayaan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang kebudayaan;
e. pelaksanaan pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan;
f. pelaksanaan pengelolaan pembinaan masyarakat adat, tenaga dan lembaga kebudayaan;
g. pelaksanaan pengelolaan sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang kebudayaan;
i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan pembinaan bidang kepemudaan dan olahraga;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang kepemudaan dan olahraga;
e. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan;
f. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
g. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang kepemudaan dan olahraga;
i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang kepemudaan dan olahraga membawahkan dan mengkoordinasikan 3 (tiga) kelompok jabatan fungsional yakni : JF Pelatih Olahraga Ahli Muda, JF Analis Kebijakan Ahli Muda yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pariwisata. Dalam melaksanakan tugas bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pariwisata;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang pariwisata;
c. pelaksanaan pembinaan bidang pariwisata;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pariwisata;
e. pelaksanaan pengelolaan peningkatan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata;
f. pelaksanaan pengelolaan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pariwisata;
h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
i. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pariwisata membawahkan dan mengkoordinasikan 3 (tiga) kelompok jabatan fungsional sebagai JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Saat ini Kantor Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata menempati gedung di Jalan Manunggal No. 21 Tuban, Telp. (0356) 323654 Tuban dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Disbudporapar mendapat dukungan sarana mobilitas roda 4 (empat) 6 buah, roda 3 (tiga) 1 buah dan roda 2 (dua) 24 buah serta 25 unit Komputer/PC, 17 unit lap top, 25 unit printer, 2 unit LCD proyektor, 3 unit mesin ketik manual, 2 unit mesin faximile, 3 buah kamera digital, 3 buah *handycam*, 1 buah kamera *handycam* , 28 unit AC, 14 unit kipas angin, 5 unit *sound system*, 6 unit televisi, serta prasarana kantor lainnya.

2.2.2. Sistem Informasi Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 127) untuk menjadi efisien, efektif, dan akurasi dalam acuan pengambilan data ASN diperlukan Sistem Informasi ASN yang diselenggarakan secara normatif dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Untuk mendukung program tersebut diperlukan adanya sistem administrasi berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dalam hal ini adalah SITEMAN.

Dengan SITEMAN dimaksudkan terciptanya sistem informasi yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna, sekaligus menentukan arah kebijakan tentang mekanisme koordinasi, kevalidan data dan informasi melalui teknologi, manfaat dari SITEMAN ini diharapkan mampu menyajikan data dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pimpinan.

2. 2.3.Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Rencana Kerja tahunan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata memperoleh dukungan penganggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban, APBD Provinsi Jawa Timur maupun dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana rincian dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Alokasi Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran P-APBD 2025
5	BELANJA DAERAH	27.883.267.048,00
5.1	BELANJA OPERASI	26.898.589.038,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.468.798.795,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.839.790.243,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.590.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	984.678.010,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.286.010,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	820.392.000,00

Sumber: Penghitungan P-APBD Disbudporapar Tahun 2025

Khusus untuk Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan Rencana Kerja yang menjadi prioritas untuk diusulkan pendanaannya yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata pada tiga urusan pemerintahan yang ditangani dengan total anggaran Perubahan sebesar Rp. 27.883.267.048,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) yang terinci ke dalam 13 (tiga belas) program dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan sebagaimana rincian dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	P Renja 2025
1.	Rutin	11.539.062.295,00	10.188.730.211,00
2.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	13.275.902.109,00	12.989.618.403,00
3.	Urusan Kebudayaan	3.098.480.922,00	2.138.634.059,00
4.	Urusan Pariwisata	3.286.938.000	2.566.284.375
	Jumlah	31.200.383.326,00	27.883.267.048,00

Sumber: Penghitungan P-APBD Disbudporapar Tahun 2025

Dari total Perubahan Anggaran Tahun 2025, pengalokasiannya pada masing-masing urusan terlihat bahwa yang mendapat porsi anggaran terbesar adalah urusan Kepemudaan dan Olahraga, hal ini sejalan dengan adanya kegiatan Kejuaraan Olahraga Tingat Kabupaten diantaranya Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota (PORKAB) , Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Olahraga Daerah yaitu PORPROV IX, penyelenggaraan *event* kejuaraan Tuban Beach Run 2025, memenuhi penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta kegiatan Peningkatan kapasitas daya saing pemuda melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan dan gelar kreativitas pemuda. Selanjutnya adalah porsi anggaran pada urusan Pariwisata, hal ini juga sejalan dengan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar serta Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota beserta pemasarannya. Berikutnya adalah porsi anggaran untuk urusan Kebudayaan dan yang terkecil porsi anggarannya untuk kegiatan rutin kesekretariatan hal ini karena hanya bersifat penunjang operasional dinas.

2.2.4. Administrasi Kepegawaian

Pelaksanaan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai salah satunya sumber daya manusia yang memadai, kompeten , profesional dan berintegritas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban. Saat ini, sumber daya manusia Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban berjumlah 150 orang orang, meliputi : 59 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 91 orang berstatus tenaga kontrak. Adapun rincian mengenai SDM berstatus ASN berdasarkan jenjang jabatan strukturak dan fungsional adalah sebagai berikut :

Pengelompokan berdasarkan kepangkatan/golongan:

1. Eselon IV/c sebanyak 1 orang
2. Eselon IV/b sebanyak 1 orang
3. Eselon IV/a sebanyak 4 orang
4. Eselon III/d sebanyak 6 orang
5. Eselon III/c sebanyak 2 orang
6. Eselon III/b sebanyak 7 orang
7. Eselon III/a sebanyak 9 orang
8. Eselon II/d sebanyak 8 orang
9. Eselon II/c sebanyak 8 orang
10 Eselon II/a sebanyak 1 orang
11 Eselon I/d sebanyak 1 orang
12 Eselon I/c sebanyak 1 orang
13 Eselon IX sebanyak 10 orang

Pengelompokan berdasarkan pendidikan :

1. Sarjana S-2 sebanyak 4 orang
2. Sarjana (S1) sebanyak 28 orang
3. Sarjana Muda /Diploma III sebanyak 12 orang
4. SMA Sederajat sebanyak 12 orang
5. Paket B sebanyak 3 orang

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban berada dalam kondisi ideal dan terlihat Sebagian besar pegawai memiliki latar belakang Pendidikan pada jenjang Sarjana S-1, yang mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban akan berupaya semaksimal mungkin untuk lebih mensukseskan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Tuban 2025-2029.

Tabel 2.4 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
I.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**											
	Indikator Sasaran											
1.	Tingkat Hunian Akomodasi	-	√	40 %	43,5%	44%	0	43,38%	43,5%	44%	0	
2.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku		√	8,11%	8,36%	8,37%	0	8,04%	8,34 %	8,37%	0	
3.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Penyedia An Akomodasi Makan Dan Minum			n/a	n/a	1,1%2	1,17%	1,03%	1,07 %	1,12%	1,17%	
4.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikelola			n/a	n/a	20%	40%	n/a	n/a	20%	40%	
5.	Nilai Akip OPD			80,5%	81%	80,90%	81,65%	80,1%	80,15%	80,90%	81,65%	
	Indikator Program											
1.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	-	√	1%	1%	0	0	13,82 %	-11,32%	0	0	
2.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	-	√	5%	5%	0	0	13,82%	-11,32%	0	0	
3.	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata	-	√	39%	42%	0	0	96,23%	43,78%%	0	0	
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	√	2,3%	2,4%	2,99%	%	2,79%	2,4%	2,99%		
5.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan wisatawan	-	√	n/a	n/a	1,0%	1,5%	n/a	n/a	1,0%	1,5%	
6.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	-		n/a	n/a	50%	50%	n/a	n/a	50%	50%	
7.	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	-		n/a	n/a	47,06%	52,94%	n/a	41,18%	47,06%	52,94%	
8.	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yg.Berkualitas	-		n/a	n/a	30%	30%	n/a	n/a	30%	30%	
1.	Jumlah Kesenian,Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	√	48519	7200	7500	7550	7105	7209	7500	7550	
	Indikator Program											
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Kesenian Daerah	-		10%	10%	0	0	21,68%	10,34%	0	0	
2.	Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola	-	√	11	11	0	0	11	11	0	0	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.	Jumlah Dokumen Sejarah yang terinventarisir	-		5	6	0	0	5	6	0	0	
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola dengan baik	-		87	91	0	0	87	91	0	0	
5.	Jumlah museum yang dikelola dengan baik	-		1	1	0	0	1	1	0	0	
6.	Persentase Kesenian Dan Kebudayaan Yang Dilestarikan	-		n/a	n/a	9,76%	17,07%	n/a	n/a	9,76%	17,07%	
7.	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-		n/a	n/a	29,41%	41,18%	n/a	n/a	29,41%	41,18%	
8.	Persentase Obyek Sejarah Lokal Yang Terpublikasi	-		n/a	n/a	10%	20%	n/a	n/a	10%	20%	
9.	Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Dengan Baik	-		n/a	n/a	23,73%	26,47%	n/a	n/a	23,73%	26,47%	
10.	Persentase Peningkatan Kunjungan Musium	-		n/a	n/a	5%	5%	n/a	n/a	5%	5%	
III	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**											
	Indikator Sasaran											
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-	√	60%	65%	0	0	64,14%		0	0	
	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi	-	√	50 orang	18 oang	95 orang	25 orang	89 orang	19 orang	95 orang	25 orang	
1..	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	-		80%	63,64%	0	0	175%	63,64%	0	0	
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-		3%	4%	0	0	3,12%	4,82%	0	0	
3.	Persentase Organisasi Kepramukaan (Gugus depan) yang Meningkat kapasitasnya	-		1,93	1,93%	80%	82%	40,55%	77,52%	80%	82%%	
4.	Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Provinsi/ Nasional /Internasional	-		n/a	n/a	10%	12%	n/a	n/a	10%	12%	
5.	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi	-		n/a	n/a	12%	12%	n/a	n/a	12%	12%	

Sumber Data : BA Penetapan Tujuan,Sasaran,Program Perangkat Daerah beserta Indikator Dan Target (Draft RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029)

Dari data yang tercantum dalam tabel 2.4 (Tabel TC-30), dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja di Tahun 2024 pada urusan Pariwisata menunjukkan penurunan capaian dari tahun sebelumnya yaitu pada indikator Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota. Dimana jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada tahun 2024 sejumlah 6.041.169 orang lebih rendah dibanding tahun 2023 yaitu sejumlah 6.812.648 orang sehingga realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar -11,32% dan tidak memenuhi target yaitu 1%.

Menurunnya kunjungan wisatawan memberikan dampak besar terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah /PAD. Target PAD retribusi tempat rekreasi pada tahun 2024 sebesar 10 % namun terealisasi -12,34%, angka ini menunjukkan bahwa pendapatan retribusi tempat rekreasi pada tahun 2024 lebih rendah dari pendapatan tahun 2023 yaitu pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 1.434.157.850,00 sedangkan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 1.257.212.200,00.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kebudayaan Pemerintah kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel 2.4 (TC.30). Berdasarkan data yang tertera dalam tabel, dapat diungkapkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran bidang Kebudayaan telah berhasil. Pelaku Seni dan Budaya diartikan sebagai kelompok individu yang aktif terlibat dalam kegiatan seni dan budaya , yang mengekspresikan sistem kepercayaan (termasuk unsur religi), sistem kesenian, mata pencaharian, teknologi, komunikasi, struktur sosial ,serta aspek lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan cara mengaktualisasikan potensi kekayaan mereka.

Perkembangan unsur pendukung kebudayaan di Kabupaten Tuban dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.5

Perkembangan Unsur Kebudayaan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024

	Urusan Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	Jumlah Group Kesenian	Group	50	51	51	51	52
2.	Jumlah Gedung Kesenian	buah	1	1	1	1	1
3.	Cakupan Fasilitas Seni	Fasilitas	12	15	15	17	18
4.	Cakupan Gelar Seni	Kegiatan	20	20	26-	47	75
5.	Cakupan Misi Kesenian	Kegiatan	20	20	8	6	6
6.	Cakupan SDM Kesenian	Orang	1.100	1.361	1.368	1.656	1.811

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Dalam konteks ini, terdapat satu gedung kesenian di Kabupaten Tuban, yaitu Gedung Budaya Loka, yang menjadi pusat kegiatan seni dan budaya. Dalam pencapaian cakupan gelar seni pada tahun 2024, terdapat peningkatan yang signifikan dengan mencapai 75 gelar seni, melebihi capaian tahun 2023. Gelar seni tahun 2024 adalah Kesenian Karawitan, Kesenian Kentrung Bathe, Kesenian Barongsai, Kesenian Thak-Thakan, Tari, Sandur, Jaranan, Reog, Campursari, Gendruwon, Ludruk, Siteran, Drama Tari Kolosal, Terbang Bancaan, Pencak Dor, Janggrung, Leang Leong, Tongklek, Gambus, Tari Sufi, Wayang Kulit, Gelut Patol, dan Kesenian Gemblak.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel 2.4 (TC.30). Melalui analisis tabel yang disajikan, terlihat bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tuban menunjukkan sejumlah hasil yang harus dicermati. Sebagai contoh, Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mencapai 4,82% mengindikasikan bahwa belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepeloporan dan kewirausahaan serta masih rendahnya Tingkat partisipasi dan kepedulian pemuda dalam organisasi kepemudaan yang berorientasi pada terbentuknya komunitas wira usaha muda. Hal ini menjadi tantangan besar dalam membangun potensi pemuda Indonesia.

Adapun pada aspek peningkatan prestasi olahraga, capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 63,64% tetapi lebih rendah dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 175%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 dilaksanakan event Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VIII (PORPROV VIII) dengan perolehan medali yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 70 medali untuk Kejuaraan Tingkat Provinsi dan 11 Medali untuk Kejuaraan Tingkat Nasional/Internasional, sedangkan di tahun 2024 *Event* PORPROV tidak ada .

Pada tahun 2025, Kabupaten Tuban berhasil meningkatkan jumlah lapangan olahraga menjadi sebanyak 586 unit, yang terdistribusi secara merata di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tuban. Lapangan-lapangan ini dirancang untuk mendukung berbagai cabang olahraga, mencakup : (a) Sepakbola (210 unit); (b) Bola Voli (277 unit); Bulu Tangkis (24 unit); (d) Tenis Meja (1 unit); (e) Sepak Takraw (3 unit); (f) Bola Basket (6 unit); (g) Tenis Lapangan (5 unit); (h) Renang (6 unit); (i) Bilyard (6 unit); (j) Panahan (1 unit); (k) Sepatu Roda (2 unit); (l) Gulat (1 unit); (m) Golf (2 unit); (n) Futsal (24 unit); (o) Badminton (10 unit); (p) Paralayang (1 unit); (q) Panjat Tebing (1 unit); ® *Jogging Track*(1 unit); (s) Padepokan Pencak Silat (6 unit).

Kenaikan signifikan ini mencerminkan komitmen Kabupaten Tuban dalam memajukan infrastruktur olahraga, menciptakan lebih banyak peluang partisipasi Masyarakat dalam kegiatan olahraga, serta mendukung pengembangan berbagai cabang olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan dan gaya hidup aktif di seluruh wilayah.

Sampai dengan akhir tahun 2024, organisasi kepemudaan yang berkembang di Kabupaten Tuban sejumlah 24 organisasi. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya pembentukan organisasi kepemudaan baru di Masyarakat yang didaftarkan secara ilegal di Pemerintah Kabupaten Tuban.

Tabel 2.6

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pariwisata Daerah	Tingkat Hunian Akomodasi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	44% 8,37%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Kesenian, Kebudayaan Dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	7550
3.	Meningkatnya Pembangunan Pemuda Dan Olahraga	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	68%

Sumber: Renstra Disbudporapar Tahun 2022-2026 dan BA Penyesuaian Target

Guna mencapai indikator Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban pada Tahun 2025 yang telah ditetapkan di atas, sebagai implementasinya diturunkan ke dalam Indikator Kinerja Program pada 3 (tiga) urusan yang ditangani dengan target kinerjanya masing-masing untuk Tahun 2025 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7

Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Indikator	Target	Anggaran
1.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	4,1%	903.689.640,00
2.	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan (Gugus Depan) yang Meningkat Kapasitasnya	80%	1.300.000.000,00

No	Sasaran	Program	Indikator	Target	Anggaran
3.	Meningkatnya Peningkatan Prestasi Olahraga	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	63,64%	9.072.701.763,00
			Persentase peningkatan pendapatan retribusi tempat olahraga	10%	
4.	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Kebudayaan Daerah Yang Dikelola	11	802.165.853,00
5.	Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Pelaku Kesenian Daerah Yang Dikelola	10%	231.002.800,00
6.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumen Sejarah Yang Terinventarisir	7	66.217.154,00
7.	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Dengan Baik	96	40.081.420,00
8.	Meningkatnya Kunjungan Musium Daerah	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Musium Yang Dikelola Dengan Baik	1	999.166.832,00
9.	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81	11.080.419.838,00
10.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang datang Ke Kab/Kota	1%	1.029.392.850,00
11.	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	1%	1.029.392.850,00

No	Sasaran	Program	Indikator	Target	Anggaran
12.	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	2,99%	802.165.853,00
13.	Meningkatnya Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	45%	231.002.800,00

Sumber: Renstra Disbudporapar Tahun 2022-2026 dan BA Penyesuaian Target

Adapun perkembangan penyerapan anggaran pada masing-masing urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8

Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun Anggaran 2025 Triwulan II

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	903.689.640,00	80.104.140,00	8,86%
Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	903.689.640,00	80.104.140,00	8,86%
Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	84.317.700,00	0,00	0%
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	537.144.100,00	7.050.000,00	1,31%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	184.000.000,00	0,00	0%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	98.227.840,00	73.054.140,00	74,37%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.072.701.763,00	1.903.498.252,00	20,98%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.146.860.000,00	312.472.372,00	27,25%
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.146.860.000,00	312.472.372,00	27,25%

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.234.546.113,00	1.591.025.880,00	30,39%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.019.874.923,00	316.275.110,00	15,66%
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	3.214.671.190,00	1.274.750.770,00	39,65%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	117.999.830,00	0,00	0%
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	5.000.000,00	0,00	0%
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	112.999.830,00	0,00	0%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.121.090.000,00	0,00	0%
Pelaksanaan Standar nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	2.060.000.000,00	0,00	0%
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	61.090.000,00	0,00	0%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	452.205.820,00	0,00	0%
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	395.333.000,00	0,00	0%
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	56.872.820,00	0,00	0%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.300.000.000,00	0,00	0%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.300.000.000,00	0,00	0%
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.300.000.000,00	0,00	0%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	802.165.853,00	20.136.300,00	2,51%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	802.165.853,00	20.136.300,00	2,51%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	698.229.758,00	20.136.300,00	2,88%
Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	564.302.923,00	19.136.300,00	3,39%
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	133.926.835,00	1.000.000,00	0,75%

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	103.936.095,00	0,00	0%
Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	103.936.095,00	0,00	0%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	231.002.800,00	0,00	0%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	231.002.800,00	0,00	0%
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	231.002.800,00	0,00	0%
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	66.217.154,00	0,00	0%
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.217.154,00	0,00	0%
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	66.217.154,00	0,00	0%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	40.081.420,00	0,00	0%
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	40.081.420,00	0,00	0%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	40.081.420,00	0,00	0%
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	999.166.832,00	45.375.000,00	4,54%
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	999.166.832,00	45.375.000,00	4,54%
Pelindungan Pengembangan dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	799.465.000,00	0,00	0%
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	31.149.410,00	0,00	0%
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	168.552.422,00	45.375.000,00	26,92%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.080.419.838,00	4.095.915.829,00	36,97%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.246.778,00	32.972.750,00	13,28%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	208.415.450,00	27.323.750,00	13,11%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.831.328,00	5.649.000,00	14,18%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.473.501.718,00	3.323.504.778,00	39,22%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.433.733.218,00	3.303.298.778,00	39,17%

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.768.500,00	20.206.000,00	50,81%
Perangkat Daerah	8.038.500,00	0,00	0%
Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	4.418.500,00	0,00	0%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.620.000,00	0,00	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.276.283,00	78.298.550,00	26,52%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.993.889,00	3.300.000,00	19,42%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.235.300,00	14.747.850,00	17,72%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.674.322,00	23.315.500,00	25,71%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.541.950,00	19.775.200,00	69,28%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.312.750,00	4.300.000,00	23,48%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.518.072,00	12.860.000,00	22,36%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.633.110,00	15.895.200,00	13,87%
Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.633.110,00	15.895.200,00	13,87%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.511.808.598,00	591.410.522,00	39,12%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	512.438.968,00	232.249.846,00	45,32%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.540.000,00	9.053.000,00	21,79%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	957.829.630,00	350.107.676,00	36,55%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.914.851,00	53.834.029,00	12,55%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.538.624,00	29.237.029,00	13,08%
Pemeliharaan Mebel	14.957.227,00	0,00	0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.130.000,00	3.160.000,00	15,70%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.289.000,00	21.437.000,00	12,59%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	956.562.500,00	351.865.150,00	36,78%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	906.562.500,00	351.865.150,00	38,81%

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	906.562.500,00	351.865.150,00	38,81%
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0%
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	50.000.000,00	0,00	0%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	280.420.260,00	9.571.000,00	3,41%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	280.420.260,00	9.571.000,00	3,41%
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	126.560.260,00	0,00	0%
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	153.860.000,00	9.571.000,00	6,22%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	154.086.500,00	4.850.000,00	3,15%
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	154.086.500,00	4.850.000,00	3,15%
Pengembangan Sistem Pemasaran	106.801.500,00	4.850.000,00	4,54%
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	47.285.000,00	0,00	0%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.029.392.850,00	178.849.640,00	17,37%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.029.392.850,00	178.849.640,00	17,37%
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	34.210.900,00	0,00	0%
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	202.512.300,00	26.000.000,00	12,84%
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	751.300.000,00	152.849.640,00	20,34%
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	41.369.650,00	0,00	0%
TOTAL	26.915.907.410,00	6.690.165.311,00	24,86%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Disbudporapar Kabupaten Tuban Tahun 2025

Dari hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban sampai dengan berakhirnya Triwulan II Tahun 2025, diketahui bahwa total anggaran APBD sebesar Rp. 26.915.907.410,00 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus lima belas juta Sembilan ratus tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah), dari hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp 6.690.165.311,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) atau sebesar 24,86% (dua puluh empat koma delapan puluh enam) dari total anggaran.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 masih belum optimal (serapan anggaran masih rendah), hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya menyesuaikan dengan *event* daerah, provinsi dan nasional.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu strategis Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah Tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta perekonomian wilayah Selatan dan kepulauan yang masih tertinggal. Salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui pengembangan pariwisata diantaranya memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan bimbingan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis), membangun Desa Wisata guna mendorong pemerataan ekonomi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, memfasilitasi pengembangan objek wisata dengan menyediakan sarana dan prasarana wisata untuk menarik pengunjung. Pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara tidak langsung, diantaranya :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah
3. Mendorong peningkatan invenstasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya
4. Membuka lapangan pekerjaan baru

Strategi pengentasan kemiskinan melalui pengembangan budaya lokal dengan berbagai cara seperti pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku seni dan budaya, menciptakan peluang ekonomi , dan memperkuat kapasitas sosial. Oleh karena itu , peran strategi berbasis budaya lokal perlu dioptimalkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha, akademisi, masyarakat dan media.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata meliputi :

1. Sinergitas program kegiatan antar stakeholder kepariwisataan yang belum optimal
2. Belum tersedianya sarana prasarana panggung (ampitheater) yang representatif untuk pertunjukan seni
3. Belum adanya Digitalisasi pemasaran yang berkolaborasi dengan menggandeng para pegiat media sosial untuk melakukan pelatihan dalam rangka promosi wisata
4. Masih belum memadainya data kepariwisataan secara komprehensif

5. Pengembangan dan Branding Wisata di Destinasi Wisata masih kurang
6. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang bersertifikasi dan berlisensi baik di bidang Kebudayaan, bidang Pariwisata maupun bidang Kepemudaan dan Olahraga
7. Masih kurangnya rasa memiliki akan seni dan budaya lokal
8. Minimnya regenerasi pelaku seni budaya akibat minat generasi muda untuk menekuni seni dan budaya yang menurun
9. Keterbatasan fasilitas dan Infrastruktur Kebudayaan di Kabupaten Tuban
10. Minimnya Kunjungan Museum
11. Masih minimnya jumlah pemuda berprestasi
12. Belum optimalnya pembinaan atlet menyebabkan minimnya atlet yang berprestasi
13. Belum meratanya sebaran sarana dan prasarana olahraga

Dari permasalahan dan isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan diantaranya :

1. Tingkat persaingan pengembangan kepariwisataan yang semakin maju dan beragam
2. Potensi wisata budaya dan alam yang belum tergarap secara optimal
3. Aksebilitas jalan menuju lokasi obyek wisata yang kurang memadai
4. Tingkat Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal pendukung kepariwisataan
5. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif
6. Kompetensi SDM yang terlibat dalam usaha jasa dan sarana bidang pariwisata dan pelaku kesenian masih kurang
7. Daya Tarik Wisata Tuban masih belum semua dikenal oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara
8. Kurangnya fasilitas infrastruktur yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif
9. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
10. Belum merata dan maksimalnya prestasi olahraga di semua cabang olahraga

Adapun peluang yang ada guna menyelesaikan isu penting serta menghadapi tantangan diantaranya :

1. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis
2. Potensi sumber daya alam pegunungan, pantai dan benda cagar budaya sebagai daya tarik wisata
3. Potensi seni budaya lokal yang adiluhung sebagai daya Tarik wisata seni budaya

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD Tahun 2025 yang disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata khususnya di dalam proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil Analisa kebutuhan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Reviu terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025 seperti terdapat dalam Tabel 2.9 (Tabel T-C.31)

Tabel 2.9 (Tabel T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Meningkatnya Produktifitasdan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pariwisata Dan Kebudayaan	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	10.847.893.720	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80 poin	11.539.062.295	
		Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	9 Dokumen	308.537.064,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	9 Dokumen	368.537.064,00	
		Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	233.061.472,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokume n Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	293.061.472,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	75.475.592,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	75.475.592,00	

Lembar 2 dari 21

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	5 Laporan	7.882.083.440	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	5 Laporan	8.513.264.558,00	
		Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	7.802.552.100	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	8.433.733.218,00	
		Terlaksananya Koordinasi an Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen	79.531.340,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen	79.531.340,00	
		Terselenggara kannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	92 orang	114.440.550,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	92 orang	114.440.500,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	15.279.750,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	15.279.750,00	
		Terlaksananya Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Sosialisasi	Dinas Kebudayaan	Jumlah Orang yang	25 orang	51.021.800,00	Terlaksanany a Sub	Dinas Kebudayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti	25 orang	51.021.750,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan	Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-v Undangan			Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	102 orang	48.139.000,00	Sub Kegiatan	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan olahraga Serta pariwisata	Jumlah Paket pakaian Dinas	102 paket	48.139.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daera	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum(Layanan)	1 Tahun	384.682.511,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum(Layanan)	1 Tahun	384.682.511,00	-
		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	16.993.889,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	16.993.889,00	
		Terlasananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	83.235.300,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	83.235.300,00	
		Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	110.357.322,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	110.357.322,00	
		Terlaksananya Penyediaan Barang	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	10 paket	40.745.250,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	40.745.250,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Cetakan dan Penggandaan		serta Pariwisata	yang Disediakan			Cetakan dan Penggandaan	serta Pariwisata				
		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	5 dokumen	18.312.750,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	18.312.750,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Dokumen	115.038.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Dokumen	115.038.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (jasa)	1 Tahun	1.565.594.248	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (jasa)	1 Tahun	1.565.594.248,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	512.438.968,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	512.438.968,00	-
		Terlaksananya Penyediaan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Dinas Kebudayaan	Jumlah Laporan	1 laporan	54.432.800,00	Sub Kegiatan Penyediaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	54.432.800,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	998.722.480,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	998.722.480,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD	1 Tahun	451.693.331,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Pemeliharaan BMD	1 Tahun	451.682.851,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 unit	234.716.624,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 unit	234.716.624,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.957.227,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.957.227,00	

Lembar 6 dari 21

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	31.720.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	31.720.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	170.299.480,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang Dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	170.299.480,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BMD	1 Tahun	140.862.576,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BMD	1 tahun	140.862.576,00	
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 unit	140.862.576,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kebudayaan Keemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 unit	140.860.563,00	

Lembar 7 dari 21

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola (objek)	11 obyek	1.416.155.000,	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola (objek)	11 obyek	1.416.155.000	
		Terlaksananya Pengelolaan ObyekPemajuan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		persentase Peningkatan Pementasan Kesenian	70%	1.204.050.000	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota		persentase Peningkatan Pementasan Kesenian	70%	1.204.050.000	
		Terwujudnya Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,pemanfaata	60 obyek	969.050.000,00	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	60 obyek	969.050.000,00	
		Terfasilitasinya Pembinaan SDM Lembaga dan	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya	430 orang	235.000.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusi Lembaga, dan	430 orang	235.000.000,00	

Lembar 8 dari 21

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Pranata Kebudayaan	Pranata Kebudayaan	Semua Kelurahan	Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Pranata Kebudayaan		Pranata Kebudayaan			
		Terlaksananya Pelestarian KesenianTradisional	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	48 Kesenian	212.105.000,00	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	48 Kesenian	212.105.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	14 obyek	212.105.000,00	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	14 obyek	212.105.000,00	
		Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase peningkatan Pelaku Kesenian Daerah Yang Dikelola	10%	430.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase peningkatan Pelaku Kesenian Daerah Yang Dikelola	10%	430.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kab/Kota	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Pelaku Kesenian Daerah yang Dikelola	1810 orang	430.000.000,00	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Pelaku Kesenian Daerah yang Dikelola	1810 orang	430.000.000,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional	Sub Kegiatan Penigkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)kompetensinya)	220 orang	430.000.000	Sub Kegiatan Penigkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan(Ditingatan kompetensinya)	220 orang	430.000.000	
		Meningkatnya Dokumen Sejarah Yang Terinventarisir	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Dokumen Sejarah Yang Terinventarisi	7 dokumen	130.000.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Dokumen Sejarah Yang Terinventarisir	7 dokumen	130.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sejarah Lokal dalam1(satu) Daerah Kab/Kota	1 dokumen	130.000.000	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sejarah Lokal dalam1(satu) Daerah Kab/Kota	1 dokumen	130.000.000	
		Terlaksananya pemberdayaan SDM danLembaga Sejarah Lokal Kab/Kota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SumberDaya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kab/Kota	50 orang	130.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah SumberDaya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kab/Kota	50 orang	130.000.000	
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Dengan Baik	96 CB	89.450.000,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Dengan Baik	96 CB	89.450.000,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Terlaksananya penetapan cagar budaya peringkat kab/kota	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	1 dokumen	89.450.000,00	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	1 dokumen	89.450.000,00	
		Terlaksananya pendaftaranobyek diduga cagarbudaya	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya Yang Didaftarkan	83 obyek	89.450.000,00	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya Yang Didaftarkan	83 obyek	89.450.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan Museum Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Jumlah Museum Yang terkelola dengan baik	1unit	983.430.922,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Jumlah Museum Yang terkelola dengan baik	1unit	1.032.875.922,00	
		Terlaksananya pengelolaan Museum Daerah	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Museum Kab/Kota	3 dokumen	1.351.718.150,00	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Museum Kab/Kota	3 dokumen	1.301.610.550,00	
		Terlaksananya pelindungan Pengembangan Pemanfaatn Koleksi Secara Terpadu	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Koleksi Museum Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	5774 benda	800.000.000	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu		Jumlah Koleksi Museum Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	5774 benda	799.465.000	
		Meningkatnya pelayanan dan akses masyarakat	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan	umlah Pelayanan dan Akses Masyarakat	4 unit	64.858.500,00	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat		jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat	4 unit	64.858.400,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		terhadap museum	Akses Masyarakat Terhadap Museum	Semua Kelurahan	Terhadap Museum			Terhadap Museum		Terhadap Museum			
		Tersedianya sarana dan prasarana museum yang terpelihara	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	115 unit	118.572.422,00	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	115 unit	168.552.422,00	
	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan untuk Ketahanan Sosial SDM dan Masyarakat melalui Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga Tuban	Meningkatnya tingkat partisipasi pemuda dalamkegiatan ekonomi mandiri	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	4,1%	2.518.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	4,1%	2.518.000.000	
		Meningkatnya wirausaha muda	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pemuda Yang Dibina	100%	2.518.000.000	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pemuda Yang Dibina	100%	2.518.000.000	

Lembar 12 dari 21

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi Dan penyelengga Raan pengemba Ngan Kepelporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kot	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Ko ta dari seluruh Kab/Kota yang Difasilitasi dala pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	114.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggar Aan Pengembang An Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kot		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Dari seluruh Kab/ Kota yang difasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	114.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wira Usaha Pemula Tingkat Kab/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewurausahaan Pemuda bagi Wira Usaha Pemula Tingkat Kab/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kab/Kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	210 orang	220.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggar aan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wira Usaha Pemula Tingkat Kab/Kota		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/Kota Yang difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	210 orang	220.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan Dan Kepeloporan Dan Kesukare Lawanan Pemuda	100 kegiatan	184.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggar aan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Kab/Kota Dengan Kepemimpi Nan dan Kepeloporan Dan Kesukarelawana Pemuda	100 kegiatan	184.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan	Tuban Semua Kecamatan	Jumlah Yang menerima penghargaan	200 Orang	2.000.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan		Jumlah Pemuda yang menerima penghargaan	100 Orang	2.000.000.000,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Penghargaan Kepemudaan Bagi yang berprestasi Dan/atau Berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kepemudaan Bagi yang Berprestasi dan/ Atau berjasa Dalam memajukan Potensi Pemuda	Semua Kelurahan	pemuda			Kepemudaan Bagi yang berprestasi Dan/atau Berjasa dalam memajukan Potensi pemuda		pemuda			
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Organisasi Kepramukaan (Gugus Depan) Yang Meningkat Kapasitasnya	2%	1.300.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Organisasi Kepramukaan (Gugus Depan) Yang Meningkat Kapasitasnya	45%	1.300.000.000	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Peningkatan jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan kepramukaan	100 orang	1.300.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Peningkatan jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan kepramukaan	100 orang	1.300.000.000	
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang ditingkatkan pasitasnya	1 organisasi	1.300.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang ditingkatkan pasitasnya	1 organisasi	1.300.000.000	
		Meningkatnya Kapasitas dan Daya saing Keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN		Persentase Pen ingkatan Prestasi Olahraga	63,64 %	9.282.902.109	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	63,64 %	9.457.902.109	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Meningkatnya Sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dan prosentase pendapatan retribusi tempat olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	3 dokumen	1.147.000.000,00	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Ko		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	3 dokumen	1.147.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi Dan penyediaan Prasarana olah Raga melalui Perencanaan, Pengadaan, pemanfaatan Pemeliharaan Dan pengawasan	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyediaan prasaran Olahraga melalui Perencanaan,Penga Daan,pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengawasan Prasaran Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Di Tingkat Kab Kota yang Tersedia	4 unit	1.147.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan penyediaan Prasarana olah Raga melalui perencanaan Pengadaan, pemanfaatn Pemeliharaan Dan pengawasan Prasarana olah Raga di tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	1.147.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Penyelenggaraan eventOlahraga Prestasi	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 event	5.254.902.613	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kot		Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 event	5.429.902.613,00	
		Terselenggaranya kejuaraan olahraga multi event dan single event	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kejuaraan olah Raga Multi Even Dan Single Event Tingkat Kab/ Kota	8 dokumen	1.848.999.923,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single		Jumlah Kejuaraan Multi Event dan Single Evnet Tingkat Kab /Kota	8 dokumen	2.023.999.923,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Tingkat Kab/Kota	Tingkat Kabupaten/Kota					Event Tingkat Kabupaten/Kota					
		Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Ko	3 dokumen	552.090.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 dokumen	552.089.950,00	
		Terlaksananya Keikutsertaan Anggota Kontingen Kab/ Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga	Sub Kegiatan Keikutsertaan Anggota Kontingen Kab /Kota Dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Peserta dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/ Kota	450 orang	3.405.902.690,00	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota Kontingen Kab/ Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga		Jumlah Peserta dalam penyelenggaraan Kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota	450 orang	3.405.902.690,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah provinsi	3 dokumen	127.999.830,00	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3 dokumen	127.999.830,00	
		Terlaksanya Pemberian Peng Hargaan olahrag Bagi yang ber Prestasi dan/ Atau berjasa	Sub Kegiatan Pemberian Penghar Gaan olahraga bagi Yang berprestasi dan Atau berjasa dalam Memajukan Ola raga	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Penerima Penghargaan Olahraga	100 orang	5.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga bagi Yang berprestasi Dan/atau		Jumlah Penerima Penghargaan Olahraga	100 orang	5.000.000,00	

Lembar 16 dari 21

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		dalam memajukan olahraga						Berjasa dalam Memajukan Olahraga					
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Yang dibina dan diberikan Pengembangan	20 orang	122.999.830,,00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang dibina dan Diberikan Pengembangan	20 orang	122.999.830,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi keolahragaan	52 organisasi	2.122.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi keolahragaan	52 organisasi	2.122.000.000,00	
		Terlaksananya Standar Nasional Pengelolaan Organisasi di Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi di Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Persentase Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten/ Kota sesuai Standar Nasiona	100%	2.060.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi di Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaen Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten/ Kota sesuai Standar Nasional	100%	2.060.000.000	
		terlaksananya Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pening Katan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/kota	1 dokumen	62.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait		Jumlah DokumenHasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 dokumen	62.000.000,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan seleksi terpadu dan penyediaan sarana olahraga rekreasi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Penyelenggaraan seleksi terpadu dan penyediaan sarana prasarana olahraga rekreasi	1 kali	630.999.666,00	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Penyelenggaraan seleksi terpadu dan penyediaan sarana prasarana olahraga rekreasi	1 kali	630.999.666,00	

Lembar 17 dari 21

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan	Sub Kegiatan Pengembangan Olah Raga Wisata, Tantangan dan Petualanagan	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata Tantangan dan Perualangan	1 laporan	524.999.870,00	Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 laporan	524.999.870,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Tradisional	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 dokumen	105.999.796,00	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa Olahraga Tradisional Di Masyarakat	1 dokumen	105.999.796,00	
	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara yang datang kekab/kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang Ke Kabupaten/ Kota (%)	1 %	975.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTIANSI PARIWISATA		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	1%	975.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan dayatarik wisata kab/kota	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikelola	3 Lokasi	925.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola	3 Lokasi	925.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan/pe Meliharaan/re Habilitasi sarana Dalam pengelola An destiansi Pariwisata	Sub Kegiatan Pengadaan/pemeliha Raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	- Jumlah Sarana dan Prasarana penge Lolaan destinasi Pariwisata yang Tersedia dan ter pelihara	3 unit	925.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan/pem Meliharaan/reha Bilitasi sarana Dan prasarana Dalam pengelo Laan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		- Jumlah Sarana dan prasaran Pengelolaan destinasi Pariwisata yang ter Sedia dan terpelihara	3 unit	925.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Tand Daftar Usaha Pariwisata daera Kabupate/Kota	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha PariwiSata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Pariwisa Ta yang telah tersertifikasi CHSE yang di Bina dan diawasi	10 usaha	50.000.000,00	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar UsahaPariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Pariwisata yang Telah tersertifikasi CHSE yang dibina Dan diawasi	10 usaha	50.000.000,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Terlaksananya fasili tasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten /Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	- Jumlah Usaha pariwisa Ta dan ekonomi Kreatif yang di Fasilitasi sertifi kasi SNI 9042:2021	5 usaha	50.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifi Kasi SNI-9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten/ Kota		- Jumlah Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021	5 usaha	50.000.000,00	
		Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan (%)	5%	400.000.000,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan (%)	5%	400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri ,Daya Tarik, Destinasi,dan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota	6 Dokumen	400.000.000,00	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta		Jumlah Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri ,Daya Tarik, Destinasi,dan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota	6 Dokumen	400.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegia Tan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kab/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasara Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban Semua Kecamat Semua Kelurah an	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisatafd Baik dalam dan Luar Negeri	1 kegiatan	150.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegia Tan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisa Ta Kab/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisa ta Baik Dalam Dan Luar Negeri	1 kegiatan	150.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Pro Mosi melalui Media cetak, Elektronik dan Medi lainya	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri		Jumlah Dokume Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya	4 Promosi	250.000.000,00	Sub Kegiatan Penguatan Pro Mosi Melalui Me Dia Cetak, Elek Tronik dan Medi Lainya Baik		Jumlah Dokumen Hasil penguatan Promosi Melalui Media Cetak,elektro Nik dan Media Lainya Baik Dalam dan	4 Promosi	250.000.000,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
					Baik Dalam Dan Luar			Dalam dan Luar Negeri		Luar Negeri			
		Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	2,89%	320.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAl		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	2,89%	320.000.000,00	
		Berkemangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen hasil pengembangan Ekosisem Ekonomi kreati	1 Dokumen	320.000.000,00	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen hasil pengembangan Ekosisem ekonomi kreatifTingkat dasar	1 Dokumen	320.000.000,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi kraetif	1 Dokumen	245.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem pemasaran ekonomi kreatif	1 Dokumen	245.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pendataran Kekayaan Intelektual	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendafta Ran Kekayaan Intelektual	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan	Jumlah Produk Hasil Hasil Pencatatan Atas Hak Cipta Dan hak terkait Pendaftaran hak Kekayaan Indust Kepada pelaku Ekonomi Kreatif Serta Pemanfaat An Kekayaan intelektual Kepada pelaku Ekonomi kreatif	50 Produk	75.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasin Pendaftaran Kekayaan Intelektual		Jumlah Produk Hasil Pencatatan Atas Hak Cipta dan Hak Terkait Pendaftara Hak Kekayaan Industri Kepada pelaku Ekonom Kreatif serta Pemanfaa Tan Kekayaan Intelek Tual kepada pelaku Ekonomi Kreatif	50 Produk	75.000.000,00	
		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata (%)	45%	1.491.938.000,	PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA PARIWISA TA DAN EKONO MI KREATIF		Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata (%)	45%	1.591.938.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Persentase peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	5%	1.491.938.000	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar		Persentase peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	5%	1.591.938.000,00	
		Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan	120 Orang	100.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembanga n Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	- - Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi SDM	120 Orang	100.000.000,00	

No	Tujuan	Sasaran	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Kreatif Tingkat Dasar	Kreatif Tingkat Dasar		kompetensi SDM ekonomi kreatif yang dikembangkan kompetensinya Dikembangkan Dikembangkan Kompetensinya			Ekonomi Kreatif Kreatif Tingkat Dasar		ekonomi kreatif yang dikembangkan kompetensinya Dikembangkan Kompetensinya			
		Meningkatnya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	- Jumlah SDM Pariwisata yang dikebangkan kapasitasnya berdasarkan SKKNI	300 Orang	336.938.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM Pariwisata yang dikebangkan kapasitasnya berdasarkan SKKNI	300 Orang	336.938.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	- Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	4500 Orang	955.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	- Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	4500 Orang	1.055.000.000,00	
		Terlaksanya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisat	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisat	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	100 orang	100.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisat	Kabupaten Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	100 Orang	100.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban terdapat program dan kegiatan yang merupakan usulan dari Masyarakat seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.10 (Tabel T- C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kel. Gedongombo Kec. Semanding	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang ke Kabupaten/Kota	4.115.717.513.613 M2	
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional Kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Klutuk Desa Belikanget Kec. Tambakboyo	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	2 paket	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yang mendasari perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2025 yang nantinya akan dilaksanakan, diantaranya :

1. Adanya beberapa kegiatan yang rekeningnya perlu dilakukan pergeseran karena kurang sesuai dengan peruntukannya;
2. Adanya beberapa anggaran kegiatan yang perlu dikurangi karena tidak bisa dilaksanakan secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala;
3. Adanya beberapa kegiatan yang perlu ditambahkan karena berbagai kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan.

Berkenaan dengan beberapa keadaan diatas maka pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian perubahan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk melihat perkembangan perubahan anggaran pada masing-masing program yang ada pada masing-masing urusan, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 (Tabel T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Lembar 1 dari 19

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2. 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi Dalam kegiatan Tingkat Provinsi/Nasional/Internasional		10 %	910.689.640,00			12 %	2.518.000.000,00
2.19.02.2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Yang Dibina		8 orang	910.689.640,00			8 orang	2.518.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.19.02.2.01.0011	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausa Haan Pemuda bagi Wira Usaha Pemul Tingkat Kab/Kota	Jumlah Wira Usaha Muda Tingkat Kab/Kota Yang Difasilitasi Pengem Bangan Kewirausahaan Pemuda	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	100 orang	87.117.700,00	Pendapatan Bagi Hasil		100 orang	220.000.000,00
2.19.02.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi Yang Berprestasi Dan/ Atau Berjasa Dalam Memajukan Potensi Pemuda	Jumlah Yang Menerima Penghargaan Pemuda	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	60 orang	537.144.100,00	Pendapatn Bagi Hasil		100 orang	2.000.000.000,00
2.19.02.2.01.0013	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengem bangan Kepemimpin An Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota denga Kepemimpinan dan Kepe Loporan Kesukarelawana Pemuda	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	188.200.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 Kegiatan	184.000.000,00
2.19.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyeleng Garaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Berjasa Tingkat Kab/Kota Yang Penerima Penghargaan Difasilita Si dalam Pengemba Ngan Ke Peloporan Pemuda	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	100 orang	98.227.840,00	Pendapatan Bagi Hasil		100 orang	114.000.000,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan (Gugus Depan) Yang Meningkat Kapasitasnya		80%	1.300.000.000,00			82%	1.300.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan kepramukaan		100 orang	1.300.000.000,00			100 orang	1.300.000.000,00
2.19.04.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang ditingkatkan pasitasnya	Kab. Tuban, Tuban Latsari	1 organisasi	1.300.000.000,00	DAU Yang Ditentukan Penggunaan Nya bidang Pendidikan		1 organisasi	1.300.000.000,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peringkat Pekan Olah Raga Provinsi (PORDA)		12 Peringkat	10.778.928.763,00			12 Peringkat	5.881.999.419,00
2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan		3 dokumen	1.905.577.000,00			3 Dokumen	1.147.000.000,00
2.19.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan PraSarana Olahraga melalui Perencanaa Pengadaan Pemanfaatan,pemeliharaan Dan pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Di Tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Tuban Perbon Tuban, Kab. Tuban Semanding Gedongombo, Kab. Tuban, Tuban Sidorejo	4 unit	1.905.577.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		4 unit	1.147.000.000,00
2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event kejuaraan olahraga		3 event	4.932.056.113,00			3 event	1.853.999.923,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	prestasi tingkat Daerah Kab/Kota							
2.19.03.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olah Raga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab /Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	8 Kegiatan	2.019.874.923,00	Pendapatan Bagi hasil		8 kegiatan	1.848.999.923,00
2.19.03.2.02.0006	Sub Kegiatan Keikutsertaan Anggota Kontingen Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	495 orang	2.912.181.190,00	Pendapatan Bagi Hasil		150 orang	5.000.000,00
2.19.03.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah		3 dokumen	1.317.999.830,00			3 dokumen	127.999.830,00
2.19.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pemberian PenghargaanOlahraga bagi Yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah Penerima Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	100 orang	1.205.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		100 orang	5.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				Alokasi Umum			
2.19.03.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembinaan Pengembangan Olahragawa Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kab/Kota Yang dibina dan diberik An pengembangan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	12 orang	112.999.830,00	Pendapatan Bagi Hasil		20 orang	122.999.830,00
2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan		52 organisasi	2.171.090.000,00			54 organisasi	2.122.000.000,00
2.19.03.2.04.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten/Kota	Persent Ase Pengelolaan Organis Asi Keolahraga An di Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	100%	2.110.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		100%	2.060.000.000,00
2.19.03.2.04.0007	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota	Kab. Tuban, Tuban Latsari	1 dokumen	61.090.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 dokumen	62.000.000,00
2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan seleksi terpadu dan penyediaan sarana olahraga rekreasi		1 kali	452.205.820,00			1 kali	630.999.666,00

Lembar 6 dari 20

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Taḥun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.19.03.2.05.0007	Sub Kegiatan Pengembanga Olahraga Wisata,Tanta Ngan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan olah raga Wisata, Tantangan Dan Petualangan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	1 laporan	395.333.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 laporan	524.999.870,00
2.19.03.2.05.0008	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradi sional Dalam Masya rakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olah Raga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Tuban Semua Kecamatan Semua Kelurahan/Desa	1 dokumen	56.872.820,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 dokumen	105.999.796,00
2. 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1.2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kesenian Dan Kebudayaan Yang Dilestarikan		9,76%	802.165.853,00			17,07%	1.447.105.000,00
2.2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pementasan Kesenian		20 kegiatan	698.229.758,00			30 kegiatan	1.235.000.000,00
2.22.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilakukan Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaatan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	10 obyek	564.302.923,00	Pendapatan Bagi hasil		30 obyek	1.000.000.000,00
2.22.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan SDM,Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	100 orang	133.926.835,00	Pendapatan Bagi Hasil		120 orang	235.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.22.02.2.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tradisi Budaya Yang Dilestarikan		2 Jenis	103.936.095,00			3 Jenis	212.105.000,00
2.22.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	5 obyek	103.936.095,00	Pendapatan Bagi hasil		7 obyek	212.105.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian Tradisinal yang dilestari Kan dan dikembangkan		29,41%	231.002.800,00			41,18%	350.000.000,00
2.22.03.2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang Mendapatkan pelatihan		1 jenis	231.002.800,00			2 Jenis	350.000.000,00
2.22.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Penigkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	40 orang	231.002.800,00	Pendapatan Bagi hasil		80 orang	350.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Obyek Sejarah Lokal Yang Terpublikasi		10 %	66.217.154,00			20 %	130.000.000,00
2.22.04.2.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sejarah Lokal dalam1(satu) Daerah Kab/Kota		6 dokumen	66.217.154,00			6 dokumen	130.000.000,00
2.22.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah SumberDaya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kab/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	50 orang	66.217.154,00	Pendapatan Bagi hasil		50 orang	130.000.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Dengan Baik		20,99%	40.081.420,00			23,73%	89.450.000,00
2.22.05.2.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya		1 dokumen	40.081.420,00			1 dokumen	89.450.000,00
2.22.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya Yang Didaftarkan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa	83 obyek	40.081.420,00	Pendapatan Bagi Hasil		20 obyek	89.450.000,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Musium		5 %	999.166.832,00			5 %	983.430.922,00

Lembar 9 dari 20

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.22.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Museum Kab/Kota		3 Dokumen	999.166.832,00			3 Dokumen	983.430.922,00
2.22.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu	Jumlah Koleksi Museum Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kab. Tuban, Tuban Kutorejo	5774 benda	799.465.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		5774 benda	800.000.000,00
2.22.06.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Tuban, Tuban Kutorejo	4 unit	31.149.410,00	Pendapatan Bagi Hasil		4 unit	64.858.500,00
2.22.06.02.1.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Tuban, Tuban Kutorejo	115 unit	168.552.422,00	Pendapatan Bagi Hasil		115 unit	118.572.422,00
3	URUSANPEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah		80,9 poin	10.188.730.211,00				10.959.998.040,00
3.26.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen Perencanaan,		9 Dokumen	270.971.278,00			9 Dokumen	308.061.230,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran dan evaluasi Yang ter susun							
3.26.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban Palang Panyuran	9 Dokumen	209.325.450,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		9 Dokumen	233.061.580,00
3.26.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban Palang Panyuran	9 Dokumen	75.475.592,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		9 Dokumen	74.999.650,00
3.26.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Lap oran Keuangan dan pemeriksaan yang tersusun		9 laporan	7.508.011.295,00			9 laporan	7.856.904.223,00
3.26.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban Palang Panyuran	60 orang	7.462.198.795,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		60 orang	7.802.552.103,00
3.26.01.2.02.0004	Sub Kegiatan Koordinasi an Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban Palang Panyuran	8 dokumen	45.812.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		8 dokumen	54.352.120,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.26.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Kepegawaian		1 Jenis	976.000,00			1 Jenis	112.143.050,00
3.26.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Tuban Palang Panyuran	102 paket	976.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		102 paket	45.618.300,00
3.26.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Kab. Tuban Palang Panyuran	20 orang	0	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		20 orang	15.299.800,00
3.26.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban Palang Panyuran	25 orang	0	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		25 orang	51.224.950,00
3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum(Layanan)		6 Layanan	285.157.211,00			6 Layanan	380.601.180,00
3.26.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban Palang Panyuran	2 paket	16.993.889,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		2 paket	16.998.400,00
3.26.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Kab. Tuban Palang Panyuran	20 paket	83.235.300,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		20 paket	83.235.720,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Olahraga serta Pariwisata						
3.26.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban Palang Panyuran	6 paket	90.674.322,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		6 paket	106.262.260,00
3.26.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban Palang Panyuran	10 paket	39.721.950,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya Umum		10 paket	40.745.250,00
3.26.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tuban Palang Panyuran	5 dokumen	18.312.750,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		5 dokumen	18.321.550,00
3.26.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban Palang Panyuran	25 dokumen	36.219.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		20 dokumen	115.038.000,00
3.26.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		2 jenis	105.806.010,00			2 jenis	176.765.261,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.26.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Tuban Palang Panyuran	1 Unit	35.810.561,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		1 Unit	35.810.561,00
3.26.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Tuban Palang Panyuran	1 unit	69.995.449,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		4 Unit	140.954.700,00
3.26.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (jasa)		3 Jenis	1.588.893.566,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		3 Jenis	1.673.698.886,00
3.26.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban Palang Panyuran	3 laporan	582.433.936,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		3 laporan	582.433.936,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.26.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban Palang Panyuran	1 laporan	41.540.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		1 laporan	54.442.300,00
3.26.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban Palang Panyuran	2 laporan	964.919.630,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		2 laporan	1.036.822.650,00
3.26.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD		4 Jenis	428.914.851,00			4 Jenis	451.824.210,00
3.26.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban Palang Panyuran	38 unit	223.538.624,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		38 unit	234.726.790,00
3.26.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Tuban Palang Panyuran	50 unit	14.957.227,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		50 unit	14.957.420,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.26.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban Palang Panyuran	28 unit	20.130.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		28 unit	31.840.000,00
3.26.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban Palang Panyuran	1 unit	170.289.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya		1 unit	170.300.000,00 65.450.000,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		1 %	941.393.165,00			1,5 %	875.000.000,00
3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikelola		3 lokasi	941.393.165,00			3 lokasi	825.000.000,00
3.26.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dala Pengelolaan Destiansi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariiwsata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	3 Unit	941.393.165,00	Pendapatan Bagi Hasil		3 Unit	825.000.000,00
3.26.02.2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata Yang Telah Tersertifikasi CHSE Yang Dibina dan Diawasi	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	10 Usaha	0			10 Usaha	50.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.26.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE di Kabupate /Kota	- Jumlah Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Difasi Litasi sertifikasi SNI 9042:2021	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	O Usaha	0	Pendapatan Bagi Hasil		10 Usaha	50.000.000,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwi sata		50%	396.415.260,00			50%	425.000.000,0
3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri ,Daya Tarik, Destinasi,dan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota		16 Dokumen	396.415.260,00			16 Dokumen	425.000.000,00
3.26.03.2.01.0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasa ran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri pariwisata Kab /Kota	- Jumlah Kegiatan Pema saran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	2 Kegiatan	126.560.260,00	Pendapatan Bagi Hasil		8 Kegiatan	150.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.26.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	14 Promosi	269.855.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		4 Promosi	275.000.000,00
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		47,06 %	177.326.100,00			52,94 %	320.000.000,00
3.26.04.2.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Berkembang		6 Komunitas	177.326.100,00			4 Komunitas	320.000.000,00
3.26.04.2.02.0005	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	4 Dokumen	130.041.100,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	245.000.000,00
3.26.04.2.02.0022	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Dan hak Terkait Pendaft Taran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan	25 Produk	47.285.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		25 Produk	75.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berkualitas		30%	1.051.149.850,00			30%	1.505.000.000,00
3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata Dengan kapasitas Tingkat Dasar		440 orang	1.051.149.850,00			240 orang	1.505.000.000,00
3.26.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	- Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan SDM ekonomi kreatif	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	120 Orang	34.210.900,00	Pendapatan Bagi Hasil		150 Orang	100.000.000,00
3.26.05.2.01.0008	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	- Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan SKKNI	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	300 Orang	199.280.300,00	Pendapatan Bagi Hasil		60 Orang	350.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.26.05.2.01.009	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	- jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	1500 Orang	775.289.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		1120 Orang	955.000.000,00
3.26.05.2.01.0010	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 orang	42.369.650,00	Pendapatan Bagi Hasil		60 orang	100.000.000,00

BAB IV
PENUTUP

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 di lingkup Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang memiliki tiga bidang beserta Sekretariat dalam menangani urusan Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang menjadi tanggungjawabnya, guna mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Dalam Upaya mencapai target yang telah ditetapkan selama Tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program maupun kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan-PD) pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban Tahun 2025 perlu perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, selaras dengan kebutuhan dan perkembangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban.

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan. Untuk itu setiap Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi tanggungjawabnya setiap Tribulan kepada Kepala Dinas.

Dengan demikian sangat diharapkan peran aktif dari seluruh aparatur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban agar mencermati isi dokumen Perubahan Rencana Kerja ini untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaannya guna dapat mewujudkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA
PARIWISATA KABUPATEN TUBAN,

ttd.

MOHAMMAD EMAWAN PUTRA, S.E., M.A.P.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 yang penyusunannya mengacu Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Dokumen Rencana Kerja ini memuat rancangan program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila pada pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang terus berjalan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tersebut sampai dengan Tribulan II. Selain itu, dalam perkembangannya terdapat pula beberapa hal yang mengharuskan untuk dilakukannya perubahan terhadap Rencana Kerja Tahun 2025, diantaranya pergeseran, pengurangan dan penambahan terhadap program/kegiatan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan perkembangan dan skala prioritas serta pergeseran dan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban disusun berpedoman pada:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
2. Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat ll Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20I7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTuban Nomor 185);

25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 lenlang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri E Nomor 67);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renja ini adalah:

a) Memberikan arahan kegiatan instansi pemerintah pada tahun 2025;
b) Dengan perencanaan kerja yang jelas dan sistematis, maka satuan kerja akan bergerak secara konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif serta memiliki arah dan fokus yang jelas yang akan mempermudah pencapaian tujuan satuan kerja;
c) Menjadi alat ukur yang pasti atas segala hasil pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam segala bentuk pelaporan;
d) Sebagai alat pacu peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah karena mempermudah pembinaan dan pendayagunaan aparatur; dan
e) Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksaanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
- 2.2. Anal isis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksaanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap laporan realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 khususnya mengenai pencapaian target kinerja dan keuangan. Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025, perlu kiranya berpedoman pada penyelenggaraan bidang perpustakaan dan kearsipan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang secara umum dapat digambarkan/terbagi dalam beberapa program dan kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Program ini meliputi 7 (tujuh) kegiatan / 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.711.027.813,00 (tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 2.673.143.505,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh tiga rupiah) yang meliputi:

   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 13 (tiga belas) dokumen dan terealisasi sampai triwulan II sebanyak 10 (sepuluh) dokumen.
   b) Administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 9 (sembilan) laporan dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 5 (lima) laporan.
   c) Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang.
   d) Administrasi umum perangkat daerah dengan target layanan pengadaan administrasi umum sebanyak 6 (enam) layanan dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 5 (lima) layanan.
   e) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 10 (sepuluh) unit belum ada realisasi sampai dengan triwulan II.

f) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target pengadaan jasa penunjang sebanyak 4 (empat) jasa dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 4 (empat) jasa.

g) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target pemeliharaan BMD sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit.

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini meliputi 2 (dua) kegiatan / 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.210.478.329,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 542.523.103,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) yang meliputi:

a) Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan target persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan atau yang terakreditasi sebesar 12,20% (dua belas koma dua puluh persen) dan sampai dengan triwulan II belum ada realisasi

b) Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan target jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 2 (dua) kegiatan.

3. Program Pelestaraian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini meliputi 2 (dua) kegiatan / 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.661.759,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 2.708.400,00 (dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) yang meliputi:

a) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target jumlah naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan sebesar 10 (sepuluh) eksemplar dan sampai dengan triwulan II terealisasi 31 (tiga puluh satu) eksemplar

b) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang yang ditemukan dan diolah sebanyak 5 (lima) eksemplar dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

4. Program Pengelolaan Arsip

Program ini meliputi 3 (tiga) kegiatan / 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 431.006.371,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 110.250.000,00 (seratus sepuluh juta dua raus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi:

a) Pengelolaan arsip dinamis kabupaten/kota yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebesar 100% (seratus persen) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 102,35% (sembilan puluh satu koma tiga puluh lima persen)

b) Pengelolaan arsip statis kabupaten/kota yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan target persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 56,58% (lima puluh enam koma lima puluh delapan persen) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 48,82% (empat puluh delapan koma delapan puluh dua persen).

c) Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebesar 27,89% (dua puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen) dan terealisasi sebesar 22,11% (dua puluh dua koma sebelas persen).

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini meliputi 5 (lima) kegiatan / 8 (delapan) sub kegiatan dengan alokasi sebesar Rp 83.031.344,00 (delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) akan tetapi kinerja sudah terealisasi sebagai berikut:

a) Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten / kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebesar 20% (dua puluh persen) dan belum terealisasi sampai dengan triwulan II karena pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan berikutnya.
b) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan sebesar 20% (dua puluh persen) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 27,40% (dua puluh tujuh koma empat puluh persen).
c) Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebesar 20% (dua puluh persen) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 5,97% (lima koma sembilan puluh tujuh persen).
d) Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan target tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebesar 20% (dua puluh persen) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen).
e) Pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan target tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebesar 20% (dua puluh persen) dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan rencana kerja tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 khususnya mengenai pencapian target kinerja dan keuangan. Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja

di bidang perpustakaan dan kearsipan terealisasi sesuai dengan target akan tetapi ada juga yang realisasi masih nol karena adanya beberapa kendala diantaranya pelaksanaan ada di triwulan berikutnya, adanya penyesuaian kebutuhan sehingga membutuhkan penambahan anggaran atau pergeseran antar sub kegiatan maupun antar rekening belanja sehigga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian target indikator karena perkembangan situasi dan kondisi saat ini beberapa di antaranya belum selaras dengan perencanaan yang telah disusun di awal tahun perencanaan.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Ruang Lingkup Kabupaten Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota Tuban
Periode Pelaksanaan: Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab nasional	70.52 (%)	2.990.651.140	67.11 (%)	1.490.254.000	70.52 (%)	773.433.190	45.76 (%)	55.125.000	58.63 (%)	55.125.000					58.63 (%)	110.250.000	58.63 (%)	1.653.695.065	83.14 %	55.3 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100 (%)	591.718.367	22.71 (%)	368.717.148	20 (%)	179.043.488	0.6 (%)	0	12.9 (%)	0					12.9 (%)	0	12.9 (%)	381.459.813	12.9 %	64.47 %	Bidang Konservasi Arsip
		1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun sesuai dengan NSPK	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 (%)	118.749.500	0 (%)	71.942.550	20 (%)	23.744.662	0 (%)	0	0 (%)	0					0 (%)	0	0 (%)	71.942.550	0 %	60.58 %	Bidang Konservasi Arsip
		1. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	16250 (Berkas)	47.500.000	0 (Berkas)	31.222.150	3250 (Berkas)	9.498.344	0 (Berkas)	0	0 (Berkas)	0					0 (Berkas)	0	0 (Berkas)	31.222.150	0 %	65.73 %	Bidang Konservasi Arsip
		2. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	16250 (Arsip)	71.249.500	13354 (Arsip)	40.720.400	3250 (Arsip)	14.246.318	450 (Arsip)	0	1239 (Arsip)	0					1689 (Arsip)	0	15043 (Arsip)	40.720.400	92.57 %	57.15 %	Bidang Konservasi Arsip
		2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	100 (%)	93.787.500	73.69 (%)	75.119.400	20 (%)	64.780.544	0 (%)	0	27.4 (%)	0					27.4 (%)	0	101.09 (%)	79.846.065	101.09 %	85.14 %	Bidang Konservasi Arsip
		1. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10000 (Arsip)	53.787.500	7009 (Arsip)	45.568.800	2000 (Arsip)	14.781.165	0 (Arsip)	0	2740 (Arsip)	0					2740 (Arsip)	0	9749 (Arsip)	50.295.465	97.49 %	93.51 %	Bidang Konservasi Arsip
		2. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 (Arsip)	40.000.000	360 (Arsip)	29.550.600	100 (Arsip)	49.999.379	0 (Arsip)	0	1079 (Arsip)	0					1079 (Arsip)	0	1439 (Arsip)	29.550.600	287.8 %	73.88 %	Bidang Konservasi Arsip

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	100 (%)	207.427.500	90.84 (%)	120.272.900	20 (%)	41.304.222	0 (%)	0	5.97 (%)	0					5.97 (%)	0	96.81 (%)	120.272.900	96.81 %	57.98 %	Bidang Konservasi Arsip
		1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	12500 (Daftar)	103.122.500	11405 (Daftar)	59.916.000	2500 (Daftar)	20.623.860	0 (Daftar)	0	895 (Daftar)	0					895 (Daftar)	0	12300 (Daftar)	59.916.000	98.4 %	58.1 %	Bidang Konservasi Arsip
		2. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2500 (Arsip)	104.305.000	2221 (Arsip)	60.356.900	500 (Arsip)	20.680.362	0 (Arsip)	0	0 (Arsip)	0					0 (Arsip)	0	2221 (Arsip)	60.356.900	88.84 %	57.87 %	Bidang Konservasi Arsip
		4. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	100 (%)	125.037.250	98.81 (%)	78.069.198	20 (%)	29.055.206	2.78 (%)	0	10.9 (%)	0					10.9 (%)	0	109.71 (%)	78.069.198	109.71 %	62.44 %	Bidang Konservasi Arsip
		1. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	12500 (Arsip)	125.037.250	12351 (Arsip)	78.069.198	2500 (Arsip)	29.055.206	347 (Arsip)	0	1015 (Arsip)	0					1362 (Arsip)	0	13713 (Arsip)	78.069.198	109.7 %	62.44 %	Bidang Konservasi Arsip
		5. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	100 (%)	46.716.617	42 (%)	23.313.100	20 (%)	20.158.854	0 (%)	0	20 (%)	0					20 (%)	0	62 (%)	31.329.100	62 %	67.06 %	Bidang Konservasi Arsip
		1. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	150 (Arsip)	46.716.617	63 (Arsip)	23.313.100	30 (Arsip)	20.158.854	0 (Arsip)	0	30 (Arsip)	0					30 (Arsip)	0	93 (Arsip)	31.329.100	62 %	67.06 %	Bidang Konservasi Arsip
2		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Arsip Inaktif dan Statis yang diolah	80 (%)	2.398.932.773	73 (%)	1.831.452.952	80 (%)	594.389.702	74.12 (%)	55.125.000	75.58 (%)	55.125.000					75.58 (%)	110.250.000	75.58 (%)	1.982.151.352	94.48 %	82.63 %	Bidang Pembinaan, Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan; Bidang Konservasi Arsip
		1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	85.43 (%)	1.623.962.895	98.01 (%)	1.029.875.565	100.39 (%)	328.551.619	100.25 (%)	55.125.000	102.35 (%)	55.125.000					102.35 (%)	110.250.000	102.35 (%)	1.173.998.465	119.81 %	72.29 %	Bidang Pembinaan, Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
		1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	125000 (Berkas)	1.514.875.145	129172 (Berkas)	934.644.715	25000 (Berkas)	282.986.825	4262 (Berkas)	55.125.000	3994 (Berkas)	55.125.000					8256 (Berkas)	110.250.000	137428 (Berkas)	1.066.767.615	109.94 %	70.42 %	Bidang Pembinaan, Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
		2. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	20 (Laporan)	45.564.794	0 (Laporan)	0	20 (Laporan)	0					20 (Laporan)	0	20 (Laporan)	12.000.000	0 %	0 %	Bidang Pembinaan, Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
		2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	51.37 (%)	190.682.378	47.99 (%)	154.516.900	49.35 (%)	74.225.380	47.99 (%)	0	48.82 (%)	0					48.82 (%)	0	48.82 (%)	161.092.400	95.04 %	84.48 %	Bidang Konservasi Arsip
		1. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	20 (Arsip)	190.682.378	12 (Arsip)	200.532.900	4 (Arsip)	74.225.380	0 (Arsip)	0	4 (Arsip)	0					4 (Arsip)	0	16 (Arsip)	207.108.400	80 %	108.61 %	Bidang Konservasi Arsip

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	29 (%)	209.287.500	21.81 (%)	601.044.487	22.35 (%)	191.612.703	21.97 (%)	0	22.11 (%)	0					22.11 (%)	0	22.11 (%)	601.044.487	76.24 %	287.19 %	Bidang Pembinaan, Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
		1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	6000 (Pengguna)	209.287.500	43153 (Pengguna)	349.004.087	1200 (Pengguna)	95.772.940	4550 (Pengguna)	0	3625 (Pengguna)	0					8175 (Pengguna)	0	51328 (Pengguna)	349.004.087	855.47 %	166.76 %	Bidang Pembinaan, Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
		2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	155 (Laporan)	375.000.000	91 (Laporan)	252.040.400	0 (Laporan)	95.839.763	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0					0 (Laporan)	0	91 (Laporan)	252.040.400	58.71 %	67.21 %	Bidang Pembinaan, Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
B	Meningkatnya Gemar Membaca		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66.8 (Poin)	6.919.805.961	76.65 (Poin)	11.509.387.227	66.8 (Poin)	10.907.204.494	0 (Poin)	1.551.381.888	0 (Poin)	1.667.003.120					0 (Poin)	1.667.003.120	0 (Poin)	15.409.934.137	0 %	222.69 %	Bidang Perpustakaan
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP perangkat daerah	82.15 (Poin)	24.848.728.493	81.75 (Poin)	16.144.878.354	82.15 (Poin)	8.705.831.161	0 (Poin)	1.315.534.888	0 (Poin)	1.357.608.617					0 (Poin)	1.357.608.617	0 (Poin)	19.289.185.890	0 %	77.63 %	Sekretariat
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	65 (Dokumen)	517.841.250	26 (Dokumen)	230.456.579	13 (Dokumen)	167.136.785	5 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	8.412.500					10 (Dokumen)	8.412.500	36 (Dokumen)	238.869.079	55.38 %	46.13 %	Sekretariat
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 (Dokumen)	302.128.500	18 (Dokumen)	139.153.120	6 (Dokumen)	105.286.080	1 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	7.462.500					4 (Dokumen)	7.462.500	4 (Dokumen)	146.615.620	13.33 %	48.53 %	Sekretariat
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 (Laporan)	215.712.750	21 (Laporan)	172.328.344	7 (Laporan)	61.850.705	4 (Laporan)	0	2 (Laporan)	950					6 (Laporan)	950.000	6 (Laporan)	173.278.344	17.14 %	80.33 %	Sekretariat
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	45 (Dokumen)	19.263.609.488	27 (Dokumen)	11.549.312.949	9 (Dokumen)	6.558.200.471	1 (Dokumen)	1.039.053.431	4 (Dokumen)	1.163.431.211					5 (Dokumen)	2.202.484.642	32 (Dokumen)	14.094.162.200	71.11 %	73.16 %	Sekretariat
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	40 (Orang)	18.328.214.488	35 (Orang)	11.175.568.549	35 (Orang)	6.456.226.021	34 (Orang)	1.039.053.431	34 (Orang)	1.163.431.211					34 (Orang)	2.202.484.642	34 (Orang)	13.694.196.800	85 %	74.72 %	Sekretariat
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 (Dokumen)	847.150.000	27 (Dokumen)	326.788.400	9 (Dokumen)	84.325.450	1 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	0					5 (Dokumen)	0	32 (Dokumen)	347.668.400	71.11 %	41.04 %	Sekretariat
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 (Dokumen)	33.830.000	12 (Dokumen)	19.633.000	4 (Dokumen)	6.766.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0					1 (Dokumen)	0	13 (Dokumen)	19.633.000	65 %	58.03 %	Sekretariat
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 (Laporan)	20.655.000	3 (Laporan)	11.492.000	1 (Laporan)	4.131.000	1 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0					1 (Laporan)	0	4 (Laporan)	11.492.000	80 %	55.64 %	Sekretariat
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 (Laporan)	20.655.000	9 (Laporan)	10.347.500	3 (Laporan)	4.131.000	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0					2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	10.347.500	13.33 %	50.1 %	Sekretariat
		6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 (Dokumen)	13.105.000	3 (Dokumen)	5.483.500	1 (Dokumen)	2.621.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0					0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	5.483.500	60 %	41.84 %	Sekretariat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	105 (Orang)	460.311.715	48 (Orang)	301.784.454	57 (Orang)	128.980.240	48 (Orang)	19.025.874	48 (Orang)	19.026.279					48 (Orang)	38.052.153	48 (Orang)	345.118.872	45.71 %	74.98 %	Sekretariat
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 (Unit)	428.011.200	48 (Unit)	231.459.448	57 (Unit)	85.602.240	48 (Unit)	19.025.874	48 (Unit)	19.026.279					48 (Unit)	38.052.153	48 (Unit)	274.793.866	16 %	64.2 %	Sekretariat
		2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	88 (Paket)	43.378.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0					0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Sekretariat
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	30 (Layanan)	1.324.250.250	12 (Layanan)	995.202.706	6 (Layanan)	308.715.976	3 (Layanan)	14.454.500	5 (Layanan)	44.058.121					5 (Layanan)	58.512.621	17 (Layanan)	1.053.715.327	56.67 %	79.57 %	Sekretariat
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 (Paket)	101.042.000	6 (Paket)	96.016.200	3 (Paket)	26.674.841	1 (Paket)	0	2 (Paket)	0					2 (Paket)	0	8 (Paket)	96.016.200	53.33 %	95.03 %	Sekretariat
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 (Paket)	260.299.500	11 (Paket)	204.351.100	5 (Paket)	64.510.644	0 (Paket)	0	3 (Paket)	31.111.621					3 (Paket)	31.111.621	14 (Paket)	235.462.721	56 %	90.46 %	Sekretariat
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 (Paket)	591.947.500	6 (Paket)	322.302.000	3 (Paket)	109.326.940	0 (Paket)	0	3 (Paket)	12.746.500					3 (Paket)	12.746.500	9 (Paket)	335.048.500	60 %	56.6 %	Sekretariat
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 (Paket)	100.482.250	6 (Paket)	82.207.400	2 (Paket)	23.598.325	1 (Paket)	0	2 (Paket)	0					2 (Paket)	0	8 (Paket)	82.207.400	80 %	81.81 %	Sekretariat
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 (Paket)	54.000.000	3 (Paket)	35.585.000	1 (Paket)	13.242.380	1 (Paket)	400	1 (Paket)	200					1 (Paket)	600.000	4 (Paket)	36.185.000	26.67 %	67.01 %	Sekretariat
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 (Laporan)	216.479.000	124 (Laporan)	254.741.006	30 (Laporan)	71.362.846	4 (Laporan)	14.054.500	0 (Laporan)	0					4 (Laporan)	14.054.500	128 (Laporan)	268.795.506	85.33 %	124.17 %	Sekretariat
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	0	4 (Jasa)	693.188.682	4 (Jasa)	147.343.453	4 (Jasa)	119.450.506					4 (Jasa)	266.793.959	4 (Jasa)	327.384.416	0 %	0 %	Sekretariat
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	15.352.100	1 (Laporan)	1.596.500	1 (Laporan)	3.097.000					2 (Laporan)	4.693.500	2 (Laporan)	4.693.500	0 %	0 %	Sekretariat
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 (Laporan)	1.087.818.040	24 (Laporan)	724.881.477	8 (Laporan)	373.543.675	2 (Laporan)	92.132.953	3 (Laporan)	44.285.781					5 (Laporan)	136.418.734	5 (Laporan)	878.862.968	12.5 %	80.79 %	Sekretariat
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 (Laporan)	96.000.000	18 (Laporan)	97.110.000	6 (Laporan)	29.975.000	3 (Laporan)	2.314.000	1 (Laporan)	1.345.500					4 (Laporan)	3.659.500	22 (Laporan)	119.952.000	73.33 %	124.95 %	Sekretariat
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	274.317.907	1 (Laporan)	51.300.000	1 (Laporan)	70.722.225					2 (Laporan)	122.022.225	2 (Laporan)	145.867.425	0 %	0 %	Sekretariat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	598 (Unit)	1.115.986.750	140 (Unit)	1.343.159.969	70 (Unit)	849.609.007	35 (Unit)	95.657.630	49 (Unit)	3.230.000					49 (Unit)	98.887.630	189 (Unit)	1.504.974.299	31.61 %	134.86 %	Sekretariat
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	125 (Unit)	651.136.750	50 (Unit)	355.860.340	25 (Unit)	181.627.003	25 (Unit)	23.437.630	25 (Unit)	3.230.000					25 (Unit)	26.667.630	75 (Unit)	398.292.970	60 %	61.17 %	Sekretariat
		2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 (Unit)	25.000.000	8 (Unit)	24.830.000	4 (Unit)	9.935.600	0 (Unit)	0	2 (Unit)	0					2 (Unit)	0	10 (Unit)	24.830.000	50 %	99.32 %	Sekretariat
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	15 (Unit)	29.160.700	4 (Unit)	1.980.000	8 (Unit)	0					8 (Unit)	1.980.000	8 (Unit)	5.508.000	0 %	0 %	Sekretariat
		4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110 (Unit)	315.850.000	44 (Unit)	727.060.900	22 (Unit)	618.895.704	6 (Unit)	70.240.000	12 (Unit)	0					12 (Unit)	70.240.000	56 (Unit)	839.836.600	50.91 %	265.9 %	Sekretariat
		5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 (Unit)	45.000.000	8 (Unit)	425.270.100	4 (Unit)	9.990.000	0 (Unit)	0	2 (Unit)	0					2 (Unit)	0	10 (Unit)	426.368.100	50 %	947.48 %	Sekretariat
2		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	0.12 (Rasio)	75.080.174	0.27 (Rasio)	0	0.27 (Rasio)	2.708.400					0.27 (Rasio)	2.708.400	0.27 (Rasio)	15.789.185	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
		1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan	40 (Eksemplar)	112.000.000	10 (Eksemplar)	22.678.850	10 (Eksemplar)	52.355.410	0 (Eksemplar)	0	31 (Eksemplar)	0					31 (Eksemplar)	0	41 (Eksemplar)	33.114.835	102.5 %	29.57 %	Bidang Perpustakaan
		1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	40 (Orang)	100.000.000	10 (Orang)	19.845.350	10 (Orang)	49.355.500	0 (Orang)	0	3 (Orang)	0					3 (Orang)	0	13 (Orang)	30.281.335	32.5 %	30.28 %	Bidang Perpustakaan
		2. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	40 (Eksemplar)	12.000.000	10 (Eksemplar)	2.833.500	10 (Eksemplar)	2.999.910	0 (Eksemplar)	0	31 (Eksemplar)	0					31 (Eksemplar)	0	41 (Eksemplar)	2.833.500	102.5 %	23.61 %	Bidang Perpustakaan
		2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan dan diolah	0 (Eksemplar)	0	0 (Eksemplar)	0	5 (Eksemplar)	22.724.764	0 (Eksemplar)	0	3 (Eksemplar)	2.708.400					3 (Eksemplar)	2.708.400	3 (Eksemplar)	5.353.200	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
		1. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	20 (Eksemplar)	80.000.000	5 (Eksemplar)	19.869.440	5 (Eksemplar)	19.724.900	0 (Eksemplar)	0	3 (Eksemplar)	0					3 (Eksemplar)	0	8 (Eksemplar)	22.514.240	40 %	28.14 %	Bidang Perpustakaan
		2. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	20 (Eksemplar)	12.000.000	5 (Eksemplar)	2.818.000	5 (Eksemplar)	2.999.864	0 (Eksemplar)	0	3 (Eksemplar)	2.708.400					3 (Eksemplar)	2.708.400	8 (Eksemplar)	5.526.400	40 %	46.05 %	Bidang Perpustakaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	38.96 (%)	7.243.805.961	41.97 (%)	5.560.068.585	38.96 (%)	2.126.293.159	6.95 (%)	235.847.000	16.18 (%)	306.686.103					16.18 (%)	542.533.103	16.18 (%)	971.549.725	41.53 %	86.98 %	Bidang Perpustakaan
		1. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	18 (Jenis)	405.204.500	8 (Jenis)	231.099.536	3 (Jenis)	407.058.761	0 (Jenis)	0	2 (Jenis)	49.597.910					2 (Jenis)	49.597.910	10 (Jenis)	307.756.802	55.56 %	75.95 %	Bidang Perpustakaan
		1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	50 (Lokus)	104.911.000	30 (Lokus)	53.396.100	10 (Lokus)	195.799.332	0 (Lokus)	0	4 (Lokus)	39.787.610					4 (Lokus)	39.787.610	34 (Lokus)	93.183.710	68 %	88.82 %	Bidang Perpustakaan
		2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	60 (Orang)	226.493.500	36 (Orang)	129.428.736	12 (Orang)	177.599.635	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0					0 (Orang)	0	36 (Orang)	156.488.092	60 %	69.09 %	Bidang Perpustakaan
		3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	12 (Perpustakaan)	73.800.000	7 (Perpustakaan)	48.274.700	3 (Perpustakaan)	28.597.079	0 (Perpustakaan)	0	3 (Perpustakaan)	9.810.300					3 (Perpustakaan)	9.810.300	10 (Perpustakaan)	58.085.000	83.33 %	78.71 %	Bidang Perpustakaan
		4. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0	3 (Perpustakaan)	5.062.715	0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0					0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
		2. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan atau yang terakreditasi	15.98 (%)	0	10.65 (%)	0	12.2 (%)	1.719.234.398	0 (%)	235.847.000	0 (%)	257.088.193					0 (%)	492.935.193	0 (%)	663.792.923	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	1 (Rasio)	6.634.601.461	0.74 (Rasio)	1.868.541.910	0.81 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0					0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	1.868.541.910	0 %	28.16 %	Bidang Perpustakaan
		1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIKBerbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0	3 (Perpustakaan)	85.280.672	3 (Perpustakaan)	0	3 (Perpustakaan)	2.743.175					3 (Perpustakaan)	2.743.175	3 (Perpustakaan)	14.371.605	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
		2. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	120 (Eksemplar)	25.000.000	60 (Eksemplar)	9.500.500	30 (Eksemplar)	112.849.039	0 (Eksemplar)	0	0 (Eksemplar)	8.465.600					0 (Eksemplar)	8.465.600	60 (Eksemplar)	70.322.400	50 %	281.29 %	Bidang Perpustakaan
		3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	250 (Perpustakaan)	410.500.000	150 (Perpustakaan)	171.606.120	50 (Perpustakaan)	49.329.625	0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0					0 (Perpustakaan)	0	150 (Perpustakaan)	183.246.120	60 %	44.64 %	Bidang Perpustakaan
		4. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	17 (Layanan)	5.119.203.025	16 (Layanan)	2.983.863.377	16 (Layanan)	1.199.572.957	16 (Layanan)	235.847.000	16 (Layanan)	221.977.000					16 (Layanan)	457.824.000	16 (Layanan)	3.536.507.377	94.12 %	69.08 %	Bidang Perpustakaan
		5. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	33.552.305	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	15.004.598					1 (Dokumen)	15.004.598	1 (Dokumen)	15.004.598	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
		6. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5700 (Eksemplar)	486.350.036	4564 (Eksemplar)	353.993.750	1550 (Eksemplar)	238.649.800	250 (Eksemplar)	0	340 (Eksemplar)	8.897.820					590 (Eksemplar)	8.897.820	5154 (Eksemplar)	363.304.570	90.42 %	74.7 %	Bidang Perpustakaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	38.96 (%)	7.243.805.961	41.97 (%)	5.560.068.585	38.96 (%)	2.126.293.159	6.95 (%)	235.847.000	16.18 (%)	306.686.103					16.18 (%)	542.533.103	16.18 (%)	971.549.725	41.53 %	86.98 %	Bidang Perpustakaan
		1. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	18 (Jenis)	405.204.500	8 (Jenis)	231.099.536	3 (Jenis)	407.058.761	0 (Jenis)	0	2 (Jenis)	49.597.910					2 (Jenis)	49.597.910	10 (Jenis)	307.756.802	55.56 %	75.95 %	Bidang Perpustakaan
		1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	50 (Lokus)	104.911.000	30 (Lokus)	53.396.100	10 (Lokus)	195.799.332	0 (Lokus)	0	4 (Lokus)	39.787.610					4 (Lokus)	39.787.610	34 (Lokus)	93.183.710	68 %	88.82 %	Bidang Perpustakaan
		2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	60 (Orang)	226.493.500	36 (Orang)	129.428.736	12 (Orang)	177.599.635	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0					0 (Orang)	0	36 (Orang)	156.488.092	60 %	69.09 %	Bidang Perpustakaan
		3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	12 (Perpustakaan)	73.800.000	7 (Perpustakaan)	48.274.700	3 (Perpustakaan)	28.597.079	0 (Perpustakaan)	0	3 (Perpustakaan)	9.810.300					3 (Perpustakaan)	9.810.300	10 (Perpustakaan)	58.085.000	83.33 %	78.71 %	Bidang Perpustakaan
		4. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0	3 (Perpustakaan)	5.062.715	0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0					0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
		2. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan atau yang terakreditasi	15.98 (%)	0	10.65 (%)	0	12.2 (%)	1.719.234.398	0 (%)	235.847.000	0 (%)	257.088.193					0 (%)	492.935.193	0 (%)	663.792.923	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	1 (Rasio)	6.634.601.461	0.74 (Rasio)	1.868.541.910	0.81 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0					0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	1.868.541.910	0 %	28.16 %	Bidang Perpustakaan
		1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIKBerbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0	3 (Perpustakaan)	85.280.672	3 (Perpustakaan)	0	3 (Perpustakaan)	2.743.175					3 (Perpustakaan)	2.743.175	3 (Perpustakaan)	14.371.605	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
		2. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	120 (Eksemplar)	25.000.000	60 (Eksemplar)	9.500.500	30 (Eksemplar)	112.849.039	0 (Eksemplar)	0	0 (Eksemplar)	8.465.600					0 (Eksemplar)	8.465.600	60 (Eksemplar)	70.322.400	50 %	281.29 %	Bidang Perpustakaan
		3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	250 (Perpustakaan)	410.500.000	150 (Perpustakaan)	171.606.120	50 (Perpustakaan)	49.329.625	0 (Perpustakaan)	0	0 (Perpustakaan)	0					0 (Perpustakaan)	0	150 (Perpustakaan)	183.246.120	60 %	44.64 %	Bidang Perpustakaan
		4. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	17 (Layanan)	5.119.203.025	16 (Layanan)	2.983.863.377	16 (Layanan)	1.199.572.957	16 (Layanan)	235.847.000	16 (Layanan)	221.977.000					16 (Layanan)	457.824.000	16 (Layanan)	3.536.507.377	94.12 %	69.08 %	Bidang Perpustakaan
		5. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	33.552.305	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	15.004.598					1 (Dokumen)	15.004.598	1 (Dokumen)	15.004.598	0 %	0 %	Bidang Perpustakaan
		6. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5700 (Eksemplar)	486.350.036	4564 (Eksemplar)	353.993.750	1550 (Eksemplar)	238.649.800	250 (Eksemplar)	0	340 (Eksemplar)	8.897.820					590 (Eksemplar)	8.897.820	5154 (Eksemplar)	363.304.570	90.42 %	74.7 %	Bidang Perpustakaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik. Adapun realisasi dari capaian indikator kinerja utama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada Tahun 2024 adalah 76,65 poin dari target yang ditetapkan 66,7 poin capaian ini tercapai melebihi target. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat merupakan hasil survey tingkat gemar membaca masyarakat Tahun 2024 yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukur indeks dan perilaku gemar membaca masyarakat Kabupaten Tuban. Adapun uraian penilaian tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah rata-rata frekuensi membaca per minggu yaitu 5-6 kali dengan nilai 77,39, rata-rata durasi membaca per hari yaitu 2 jam s.d 2 jam 59 menit dengan nilai 74,22, rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 5-6 bahan bacaan dengan nilai 77,40, rata-rata frekuensi akses internet untuk membaca/mencari informasi per minggu yaitu 5-6 kali frekuensi akses internet 5-6 kali dengan nilai 83,00, Rata-rata durasi akses internet untuk membaca/mencari informasi per hari yaitu 2 jam s.d 2 jam 59 menit dengan 75,98.

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab nasional tercapai melebihi target sebesar 67,11% dari target 66,75%. Capaian ini terdiri dari Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebesar 100% (95.596 berkas), Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebesar 98,01% (186.225 berkas), Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik sebesar 47,99% (42.444 berkas), Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebesar 21,81% (19,287 berkas).

Sedangkan capaian indikator kinerja daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024, capaian indikator nilai tingkat kegemaran membaca dengan target 66,7 (enam puluh enam koma tujuh) poin sampai dengan triwulan II belum ada capaian hal ini karena masih dalam proses penilaian oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Adapun Tabel Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	Tahun 2026 (Tahun n+2)	Tahun 2021	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n +1)	
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	Baik	-	-	-	-	-	Baik	-	-	-	-	Target dan hasil pada Renstra 2016-2021
2	Persentase kecamatan yang terdapat perpustakaan umum		Persentase kecamatan yang terdapat perpustakaan	100%	-	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	Target dan hasil pada Renstra 2016-2021
3	Prosentase Perpustakaan telah memiliki sistem automasi		Prosentase Perpustakaan telah memiliki sistem automasi	52%	-	-	-	-	-	52%	-	-	-	-	Target dan hasil pada Renstra 2016-2021
4	Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku		Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	Target dan hasil pada Renstra 2016-2021
5	Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku		Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	Target dan hasil pada Renstra 2016-2021
6	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan		Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	Target dan hasil pada Renstra 2016-2021
7	Indeks pembangunan literasi masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat	-	10,1 poin	11,64 poin	12 poin	12,1 poin	11 poin	-	11.32 poin	11,64 poin	56,24 poin	57,34 poin	
8	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-	60 poin	64,5 poin	65 poin	66,8 poin	60,50 poin	-	64 poin	66,6 poin	76,65 poin	79,25 poin	
9	Indeks Kearsipan Daerah		Indeks Kearsipan Daerah	-	77,63 poin	78 poin	88,21 poin	88,31 poin	79 poin	-	82,69 poin	88,11 poin	83,05 poin	85,05 poin	
10	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab nasional		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab nasional	-	49,11%	57,77%	66.75%	70,52%	66,45%	-	53,82%	63,02%	67,11%	71,12%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan antara lain perlunya peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan internet sebagai sarana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dialihkan secara online dan sarana penunjang lainnya seperti penambahan koleksi E-book menjadi prioritas.
2. Kualitas pengelolaan perpustakaan pada semua jenis perpustakaan belum sesuai standar nasional perpustakaan.
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola.
4. Arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja karena belum adanya tenaga fungsional arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan serta sarana prasarana kearsipan yang belum memadai.

Untuk bergerak menuju tujuan yang diharapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban perlu mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Berikut adalah identifikasi faktor-faktor lingkungan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Percepatan dan pemerataan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat yang dilakukan dengan pelayanan perpustakaan umum daerah dan 12 (dua belas) perpustakaan kecamatan, pelayanan mobil perpustakaan keliling, pelayanan perpustakaan program kemitraan dan pelayanan mobil dongeng keliling;
2. Pelayanan Perpustakaan melalui Aplikasi Perpustakaan Digital yang diberi nama TULIB (Tuban Digital Library), Perpustakaan berbasis Website, Tiba Di Tuban (Titik Baca Digital Tuban) di 8 (delapan) area Alon-alon, Abirama, Abipraya, GOR, Taman Seleko, RTH Jatirogo, RTH Singgahan Taman Kapur;
3. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat;

4. Peningkatan jumlah dan jenis koleksi perpustakaan akan dapat mendukung terwujudnya pengembangan minat dan budaya baca masyarakat serta pengembangan fasilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Pengembangan kualitas layanan perpustakaan dan peningkatan jumlah perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan melalui supervisi, pembinaan dan stimulus pada semua jenis perpustakaan;
6. Penyelenggaraan kearsipan secara digital di seluruh Perangkat Daerah melalui Silantip (Sistem Informasi Pengolahan Data Arsip) dan Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi);
7. Peningkatan penyelenggaraan kearsipan di seluruh Perangkat Daerah/Pemerintahan Desa melalui sosialisasi, supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi tata kearsipan, pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah serta peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis untuk meningkatkan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja;
8. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota dalam bentuk evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana melalui Penanggulangan arsip tanggap bencana (Penunggu Astana);
9. Peningkatan kualitas layanan pengelolaan kearsipan dengan kecepatan dan ketepatan temu balik arsip melalui inovasi silantip yaitu sistem pengolahan arsip aktif dan inaktif;
10. Pelaksanaan akuisisi dokumen/arsip perangkat daerah sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah serta penambahan khasanah arsip Lembaga Kearsipan Daerah;
11. Peningkatan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan akan dapat meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan;
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan) yang profesional dan terampil serta pemanfaatan sumber daya yang ada pada semua sektor dan lini akan mendukung terwujudnya pelayanan prima di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Adapun permasalahan yang menyebabkan adanya perubahan rencana kerja diantaranya:

1. Adanya penyesuaian kebutuhan yang menyebabkan adanya penambahan anggaran atau pergeseran antar sub kegiatan maupun antar rekening belanja.
2. Jumlah Koleksi Perpustakaan masih rendah sehingga perlu menambah jumlah koleksi bahan Pustaka baik cetak maupun digital.
3. Sarana prasarana perpustakaan yang kurang memadai sehingga ada penambahan anggaran.

2.4 Review terhadap Rancangan P-RKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban merupakan kegiatan yang bersifat prioritas serta terus menerus, baik yang bersifat rutin maupun teknis karena ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat dan meningkatkan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab nasional serta mewujudkan revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Rancangan Awal P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 disajikan perbandingan antara Rancangan awal P-RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.471.205.616	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.471.205.616	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				10.957.167.901	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				10.957.167.901	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82,5 Poin	7.711.027.813	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82,5 Poin	7.711.027.813	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	13 dokumen	123.552.999	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	13 dokumen	123.552.999	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	77.991.654,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	77.991.654,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	45.561.345,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	45.561.345,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 dokumen	5.644.540.017	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 dokumen	5.644.540.017	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang/bulan	5.565.963.067,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang/bulan	5.565.963.067,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	69.752.450,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	69.752.450,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	3.383.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	3.383.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.065.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.065.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.065.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.065.500,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.310.500,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.310.500,00	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	57 Orang	78.741.140	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	57 Orang	78.741.140	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	57 Unit	77.797.640,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	57 Unit	77.797.640,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	943.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	943.500,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 layanan	287.307.122	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 layanan	287.307.122	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.674.841,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.674.841,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	64.510.644,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	64.510.644,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	109.326.940,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	109.326.940,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.598.325,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.598.325,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.242.380,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.242.380,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	49.953.992,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	49.953.992,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	10 unit	55.503.625	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	10 unit	55.503.625	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	55.503.625	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	55.503.625	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	671.773.903	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	671.773.903	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	9.737.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	9.737.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	373.543.675,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	373.543.675,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	29.975.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	29.975.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	258.518.228,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	258.518.228,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD	70 unit	849.609.007	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD	70 unit	849.609.007	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	181.627.003,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	181.627.003,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	9.935.600,00	Pemeliharaan Mebel	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	9.935.600,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	29.160.700,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	29.160.700,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	618.895.704,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	618.895.704,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	9.990.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	9.990.000,00	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47%	3.210.478.329	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47%	3.210.478.329	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan atau yang terakreditasi	12,2%	2.326.563.779	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan atau yang terakreditasi	12,2%	2.326.563.779	
			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	0,81 rasio				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	0,81 rasio		
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	3 Layanan	305.493.076,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	3 Layanan	305.493.076,00	
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	30 Eksemplar	88.810.792,00	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa Kab. Tuban,	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	30 Eksemplar	88.810.792,00	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	24.444.000,00	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	24.444.000,00	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Plumpang, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	16 Layanan	1.130.486.180,50	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Plumpang,	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	16 Layanan	1.130.486.180,50	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	7800 Eksemplar	739.377.430,50	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	7800 Eksemplar	739.377.430,50	
	Penyusunan Data Informasi Perpustakaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	37.952.300,00	Penyusunan Data Informasi Perpustakaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	37.952.300,00	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	3 Jenis	883.914.550	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	3 Jenis	883.914.550	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Lor Kab. Tuban, Soko, Sokosari Kab. Tuban, Plumpang, Ngrayung Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Rengel, Tambakrejo Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Kedungharjo Kab. Tuban, Parengan, Sukorejo Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 Lokus	210.067.353,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Lor Kab. Tuban, Soko, Sokosari Kab. Tuban, Plumpang, Ngrayung Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Rengel, Tambakrejo Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Kedungharjo Kab. Tuban, Parengan, Sukorejo Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 Lokus	210.067.353,00	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	172.323.385,00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	172.323.385,00	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	21.460.652,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban, Semanding, Semanding	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	21.460.652,00	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15 perpustakaan	480.063.160,00	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15 perpustakaan	480.063.160,00	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	100%	35.661.759	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	100%	35.661.759	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan	10 eksemplar	30.177.145	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan	10 eksemplar	30.177.145	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo Kab. Tuban, Senori, Sendang Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10 Orang	28.632.610,00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo Kab. Tuban, Senori, Sendang Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10 Orang	28.632.610,00	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10 Eksemplar	1.544.535,00	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10 Eksemplar	1.544.535,00	
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang yang ditemukan dan diolah	5 eksemplar	5.484.614	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang yang ditemukan dan diolah	5 eksemplar	5.484.614	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	5 Eksemplar	2.644.800,00	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	5 Eksemplar	2.644.800,00	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	2.839.814,00	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	2.839.814,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				514.037.715	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				514.037.715	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Tingkat arsip inaktif dan statis yang diolah	78,29%	431.006.371	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Tingkat arsip inaktif dan statis yang diolah	78,29%	431.006.371	
			Tingkat Digitalisasi Arsip	90,82 poin				Tingkat Digitalisasi Arsip	90,82 poin		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	272.556.226	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	272.556.226	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	25000 Berkas	249.871.625,00	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	25000 Berkas	249.871.625,00	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota pada	20 Laporan	22.684.601,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota pada	20 Laporan	22.684.601,00	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	56,58%	39.226.532	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	56,58%	39.226.532	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Baturetno Kab. Tuban, Semanding, Karang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	4 Arsip	39.226.532,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Baturetno Kab. Tuban, Semanding, Karang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	4 Arsip	39.226.532,00	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN	27,89%	119.223.613	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN	27,89%	119.223.613	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1200 Pengguna	54.508.999,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1200 Pengguna	54.508.999,00	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo Kab. Tuban, Tambakboyo, Sobontoro Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Merakurak, Sendanghaji Kab. Tuban, Bancar, Bancar Kab. Tuban, Soko, Pandanwangi Kab. Tuban, Plumpang, Magersari Kab. Tuban, Widang, Simorejo Kab. Tuban, Singgahan, Binangun	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	64.714.614,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo Kab. Tuban, Tambakboyo, Sobontoro Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Merakurak, Sendanghaji Kab. Tuban, Bancar, Bancar Kab. Tuban, Soko, Pandanwangi Kab. Tuban, Plumpang, Magersari Kab. Tuban, Widang, Simorejo Kab. Tuban, Singgahan, Binangun	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	64.714.614,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100%	83.031.344	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100%	83.031.344	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100%	11.519.550	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100%	11.519.550	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun pada tahun n	3250 Arsip	9.504.550,00	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun pada tahun n	3250 Arsip	9.504.550,00	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan pada tahun n	3250 Berkas	2.015.000,00	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan pada tahun n	3250 Berkas	2.015.000,00	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	100%	33.644.194	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	100%	33.644.194	
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2000 Arsip	6.287.565,00	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2000 Arsip	6.287.565,00	
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	27.356.629,00	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	27.356.629,00	

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	100%	8.223.820	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	100%	8.223.820	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2500 Daftar	8.223.820,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2500 Daftar	8.223.820,00	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip	0,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip	0,00	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	100%	16.721.478	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	100%	16.721.478	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2500 Arsip	16.721.478,00	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2500 Arsip	16.721.478,00	
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	100%	12.922.302	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	100%	12.922.302	
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	30 Arsip	12.922.302,00	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	30 Arsip	12.922.302,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil telaahan kelayakan dan prioritas usulan pembangunan Tahun 2025 berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tuban tidak ada Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Adapun Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Nihil) sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipaan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	N	I	H	I	L

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN

Mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka disusunlah Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025. Secara keseluruhan Jumlah program pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ada 5 (lima) program 19 (sembilan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.471.205.616,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan pagu indikatif masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan sebanyak 2 (dua) kegiatan 10 (sepuluh) sub kegiatan sebesar Rp 3.210.478.329,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sebanyak 2 (dua) kegiatan 4 (empat) sub kegiatan sebesar Rp 35.661.759,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah)
3. Program Pengelolaan Arsip sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebesar Rp 431.006.371,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebanyak 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan sebesar Rp 83.031.344,00 (delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan sebesar Rp 7.711.027.813,00 (tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban ini disusun untuk program/kegiatan perubahan Tahun 2025 yang berasal dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Tuban. Program/kegiatan ini merupakan acuan dasar dalam melakukan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban. Adapun program-programnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca yang dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

   a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
   b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

   Program ini diarahkan untuk pelestarian dan pemeliharaan koleksi nasional, naskah kuno dan budaya etnis yang dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

   a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan.
   b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang yang ditemukan dan diolah.

3. Program Pengelolaan Arsip

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan arsip baik arsip dinamis sampai arsip statis yang dilaksanakan melalui kegiatan:

   a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip
   b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik.
   c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator persentase arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN.

4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

   Program ini diarahkan untuk perlindungan dan penyelamatan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan:

   a. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun dengan indikator kinerja tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK.

b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota dengan indikator tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK.
c. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan indikator Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK.
d. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota dengan indikator tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK.
e. Pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dengan indikator tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan untuk meningkatnya kinerja administrasi perkantoran yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu:
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun.
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai.
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal.
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pemeliharaan BMD.
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang.
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pemeliharaan BMD.

Adapun tabel Rumusan Rencana perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.471.205.616				9.615.255.048
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				10.957.167.901				8.816.920.547
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		82,5 Poin	7.711.027.813			82,5 Poin	6.836.508.787
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun		13 dokumen	123.552.999			13 dokumen	167.136.885
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	6 Dokumen	77.991.654	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		6 Dokumen	105.286.085
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	7 Laporan	45.561.345	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7 Laporan	61.850.800
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun		9 dokumen	5.644.540.017			9 dokumen	5.082.162.990
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	35 Orang/bulan	5.565.963.067	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		35 Orang/bulan	4.980.178.540
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	9 dokumen	69.752.450	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		9 dokumen	84.335.450
2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	4 Dokumen	3.383.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Dokumen	6.766.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Laporan	2.065.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Laporan	4.131.000
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	3 Laporan	2.065.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Laporan	4.131.000
2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Dokumen	1.310.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Dokumen	2.621.000
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai		57 Orang	78.741.140			57 Orang	128.980.240
2.23.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	57 Unit	77.797.640	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		57 Unit	85.602.240
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	1 paket	943.500			1 paket	43.378.000
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum		6 layanan	287.307.122			6 layanan	304.626.821
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	3 Paket	26.674.841	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Paket	26.674.841
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	5 Paket	64.510.644	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 Paket	64.510.874
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	3 Paket	109.326.940	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Paket	105.228.290
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	2 Paket	23.598.325	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Paket	23.598.545
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Dokumen	13.242.380	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Dokumen	13.251.425
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	30 Laporan	49.953.992	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		30 Laporan	71.362.846

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		10 unit	55.503.625			10 unit	48.950.000
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	10 Unit	55.503.625	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Unit	48.950.000
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang		4 Jasa	671.773.903	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Jasa	684.790.645
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	3 Laporan	9.737.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Laporan	15.354.000
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	8 Laporan	373.543.675	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		8 Laporan	373.543.738
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	6 Laporan	29.975.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		6 Laporan	29.975.000
2.23.01.2.0009	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	4 Laporan	258.518.228	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Laporan	265.917.907
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD		70 unit	849.609.007			70 unit	419.861.206
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	25 Unit	181.627.003	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		25 Unit	181.627.003
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	2 Unit	9.935.600	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Unit	9.998.653
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	15 Unit	29.160.700	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		15 Unit	29.349.846

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	22 Unit	618.895.704	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		22 Unit	188.895.704
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	4 Unit	9.990.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Unit	9.990.000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		43,47%	3.210.478.329			43,47%	1.933.162.000
2.23.02.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan atau yang terakreditasi		12,2%	2.326.563.779			12,2%	1.831.597.052
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan		0,81 rasio				0,81 rasio	
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kab Tuban, Tuban, Latsari	3 Layanan	305.493.076	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		3 Layanan	305.493.076
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang,	30 Eksemplar	88.810.792	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		30 Eksemplar	4.999.109
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	50 Perpustakaan	24.444.000	Pendapatan Bagi Hasil		50 Perpustakaan	49.329.625
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar,	16 Layanan	1.130.486.181	Pendapatan Bagi Hasil		16 Layanan	1.199.573.137

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	7800 Eksemplar	739.377.431	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		7800 Eksemplar	238.649.800
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	37.952.300	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		1 Dokumen	33.552.305
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		3 Jenis	883.914.550			3 Jenis	101.564.948
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Lor Kab. Tuban, Soko, Sokosari Kab. Tuban, Plumpang, Ngrayung Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Rengel, Tambakrejo Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Kedungharjo Kab. Tuban, Parengan, Sukorejo Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin	10 Lokus	210.067.353	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		10 Lokus	23.931.150
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	12 Orang	172.323.385	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		12 Orang	43.974.004
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban, Semanding, Semanding	3 Perpustakaan	21.460.652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Perpustakaan	28.597.079
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 perpustakaan	480.063.160	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		15 perpustakaan	5.062.715
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan		100%	35.661.759			100%	47.249.760
2.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan		10 eksemplar	30.177.145			10 eksemplar	24.249.860
2.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo Kab. Tuban, Senori, Sendang Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	10 Orang	28.632.610	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		10 Orang	21.249.860

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	10 Eksemplar	1.544.535	Pendapatan Bagi Hasil		10 Eksemplar	3.000.000
2.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang yang ditemukan dan diolah		5 eksemplar	5.484.614			5 eksemplar	22.999.900
2.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	5 Eksemplar	2.644.800	Pendapatan Bagi Hasil		5 Eksemplar	19.999.900
2.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	5 Eksemplar	2.839.814	Pendapatan Bagi Hasil		5 Eksemplar	3.000.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				514.037.715				798.334.501
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat arsip inaktif dan statis yang diolah		78,29%	431.006.371			78,29%	619.290.010
		Tingkat Digitalisasi Arsip		90,82 poin				90,82 poin	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		100%	272.556.226			100%	353.451.700
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	25000 Berkas	249.871.625	Pendapatan Bagi Hasil		25000 Berkas	307.886.900
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota pada	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	20 Laporan	22.684.601	Pendapatan Bagi Hasil		20 Laporan	45.564.800
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		56,58%	39.226.532			56,58%	74.225.510
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Baturetno Kab. Tuban, Semanding, Karang	4 Arsip	39.226.532	Pendapatan Bagi Hasil		4 Arsip	74.225.510
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN		27,89%	119.223.613			27,89%	191.612.800
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	1200 Pengguna	54.508.999	Pendapatan Bagi Hasil		1200 Pengguna	95.772.950
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo Kab. Tuban, Tambakboyo, Sobontoro Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Merakurak, Sendanghaji Kab. Tuban, Bancar, Bancar Kab. Tuban, Soko, Pandanwangi Kab. Tuban, Plumpang, Magersari Kab. Tuban, Widang, Simorejo Kab. Tuban, Singgahan, Binangun	31 Laporan	64.714.614	Pendapatan Bagi Hasil		31 Laporan	95.839.850

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		100%	83.031.344			100%	179.044.491
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		100%	11.519.550			100%	23.744.844
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun pada tahun n	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	3250 Arsip	9.504.550	Pendapatan Bagi Hasil		3250 Arsip	14.246.500
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan pada tahun n	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	3250 Berkas	2.015.000	Pendapatan Bagi Hasil		3250 Berkas	9.498.344
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK		100%	33.644.194			100%	64.780.983
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	2000 Arsip	6.287.565	Pendapatan Bagi Hasil		2000 Arsip	14.781.410
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	100 Arsip	27.356.629	Pendapatan Bagi Hasil		100 Arsip	49.999.573
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK		100%	8.223.820			100%	41.304.426
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	2500 Daftar	8.223.820	Pendapatan Bagi Hasil		2500 Daftar	20.623.990
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	0 Arsip	0	Pendapatan Bagi Hasil		0 Arsip	20.680.436
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK		100%	16.721.478			100%	29.055.234
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	2500 Arsip	16.721.478	Pendapatan Bagi Hasil		2500 Arsip	29.055.234
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK		100%	12.922.302			100%	20.159.004
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	30 Arsip	12.922.302	Pendapatan Bagi Hasil		30 Arsip	20.159.004

Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 telah didukung oleh sasaran program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki sasaran Meningkatnya gemar membaca dan Meningkatnya kualitas pengelolaan Kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dimana setiap sasaran kegiatan atau sub kegiatanya telah mendukung sasaran program.

Adapun tabel Rumusan Rencana perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Berserta Data Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban

Kode	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.471.205.616				9.615.255.048
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				10.957.167.901				8.816.920.547
2.23.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		82,5 Poin	7.711.027.813			82,5 Poin	6.836.508.787
2.23.01.2.01	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun		13 dokumen	123.552.999			13 dokumen	167.136.885
2.23.01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	6 Dokumen	77.991.654	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		6 Dokumen	105.286.085
2.23.01.2.01.0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	7 Laporan	45.561.345	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7 Laporan	61.850.800
2.23.01.2.02	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun		9 dokumen	5.644.540.017			9 dokumen	5.082.162.990
2.23.01.2.02.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	35 Orang/bulan	5.565.963.067	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		35 Orang/bulan	4.980.178.540
2.23.01.2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	9 dokumen	69.752.450	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		9 dokumen	84.335.450
2.23.01.2.02.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	4 Dokumen	3.383.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Dokumen	6.766.000

Kode	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.23.01.2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Laporan	2.065.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Laporan	4.131.000
2.23.01.2.02.0007	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	3 Laporan	2.065.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Laporan	4.131.000
2.23.01.2.02.0008	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Dokumen	1.310.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Dokumen	2.621.000
2.23.01.2.05	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai		57 Orang	78.741.140			57 Orang	128.980.240
2.23.01.2.05.0001	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	57 Unit	77.797.640	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		57 Unit	85.602.240
2.23.01.2.05.0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	1 paket	943.500			1 paket	43.378.000
2.23.01.2.06	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum		6 layanan	287.307.122			6 layanan	304.626.821
2.23.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	3 Paket	26.674.841	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Paket	26.674.841
2.23.01.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	5 Paket	64.510.644	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 Paket	64.510.874
2.23.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	3 Paket	109.326.940	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Paket	105.228.290
2.23.01.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	2 Paket	23.598.325	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Paket	23.598.545
2.23.01.2.06.0006	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	1 Dokumen	13.242.380	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Dokumen	13.251.425
2.23.01.2.06.0009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	30 Laporan	49.953.992	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		30 Laporan	71.362.846

Kode	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.23.01.2.07	Telaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		10 unit	55.503.625			10 unit	48.950.000
2.23.01.2.07.0006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	10 Unit	55.503.625	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Unit	48.950.000
2.23.01.2.08.0001	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang		4 Jasa	671.773.903	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Jasa	684.790.645
2.23.01.2.08.0002	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	3 Laporan	9.737.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Laporan	15.354.000
2.23.01.2.08.0003	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	8 Laporan	373.543.675	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		8 Laporan	373.543.738
2.23.01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	6 Laporan	29.975.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		6 Laporan	29.975.000
2.23.01.2.0009	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	4 Laporan	258.518.228	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Laporan	265.917.907
2.23.01.2.09	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD		70 unit	849.609.007			70 unit	419.861.206
2.23.01.2.09.0001	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	25 Unit	181.627.003	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		25 Unit	181.627.003
2.23.01.2.09.0005	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	2 Unit	9.935.600	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Unit	9.998.653
2.23.01.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	15 Unit	29.160.700	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		15 Unit	29.349.846
2.23.01.2.09.0009	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	22 Unit	618.895.704	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		22 Unit	188.895.704
2.23.01.2.09.0010	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tuban, Semanding, Gedongombo	4 Unit	9.990.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Unit	9.990.000

Kode	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.23.02	Meningkatnya Kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		43,47%	3.210.478.329			43,47%	1.933.162.000
2.23.02.01	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Tuban	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan atau yang terakreditasi		12,2%	2.326.563.779			12,2%	1.831.597.052
			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan		0,81 rasio				0,81 rasio	
2.23.02.2.01.0020	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis Jejaring Perpustakaan	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kab Tuban, Tuban, Latsari	3 Layanan	305.493.076	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		3 Layanan	305.493.076
2.23.02.2.01.0019	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang,	30 Eksemplar	88.810.792	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		30 Eksemplar	4.999.109
2.23.02.2.01.0004	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	50 Perpustakaan	24.444.000	Pendapatan Bagi Hasil		50 Perpustakaan	49.329.625
2.23.02.2.01.0012	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Tingkat Daerah	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Kab. Tuban, Rengel, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jatirogo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Soko, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Widang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tambakboyo, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Parengan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Kerek, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Palang, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bancar,	16 Layanan	1.130.486.181	Pendapatan Bagi Hasil		16 Layanan	1.199.573.137
2.23.02.2.01.0018	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	7800 Eksemplar	739.377.431	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		7800 Eksemplar	238.649.800
2.23.02.2.01.0017	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Penyusunan Data Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	37.952.300	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		1 Dokumen	33.552.305

Kode	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.23.02.2.02	Meningkatnya Masyarakat Gemar Membaca di wilayah kabupaten Tuban	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		3 Jenis	883.914.550			3 Jenis	101.564.948
2.23.02.2.02.0010	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Tuban, Tambakboyo, Plajan Kab. Tuban, Singgahan, Lajo Lor Kab. Tuban, Soko, Sokosari Kab. Tuban, Plumpang, Ngrayung Kab. Tuban, Jatirogo, Wotsogo Kab. Tuban, Rengel, Punggulrejo Kab. Tuban, Rengel, Tambakrejo Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Bangilan, Kedungharjo Kab. Tuban, Parengan, Sukorejo Kab. Tuban, Montong, Tanggulangin	10 Lokus	210.067.353	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		10 Lokus	23.931.150
2.23.02.2.02.0009	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Secara tepat sasaran	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	12 Orang	172.323.385	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		12 Orang	43.974.004
2.23.02.2.02.0007	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari Kab. Tuban, Senori, Rayung Kab. Tuban, Semanding, Semanding	3 Perpustakaan	21.460.652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Perpustakaan	28.597.079
2.23.02.2.02.0008	Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 perpustakaan	480.063.160	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		15 perpustakaan	5.062.715
2.23.03	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan		100%	35.661.759			100%	47.249.760
2.03.2.01	Meningkatnya Koleksi Naskah Kuno Diwilayah Kab Tuban	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan		10 eksemplar	30.177.145			10 eksemplar	24.249.860
2.03.2.01.0003	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Tuban, Widang, Ngadirejo Kab. Tuban, Senori, Sendang Kab. Tuban, Singgahan, Mulyoagung	10 Orang	28.632.610	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		10 Orang	21.249.860
2.03.2.01.0004	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	10 Eksemplar	1.544.535	Pendapatan Bagi Hasil		10 Eksemplar	3.000.000
2.03.2.02	Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara Di Wilayah Kab Tuban	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang yang ditemukan dan diolah		5 eksemplar	5.484.614			5 eksemplar	22.999.900
2.03.2.02.0003	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Kab. Tuban, Kerek, Margomulyo	5 Eksemplar	2.644.800	Pendapatan Bagi Hasil		5 Eksemplar	19.999.900
2.03.2.02.0004	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	5 Eksemplar	2.839.814	Pendapatan Bagi Hasil		5 Eksemplar	3.000.000

Kode	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				514.037.715				798.334.501
2.24.02	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis Baik Manual Maupun Digital	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat arsip inaktif dan statis yang diolah		78,29%	431.006.371			78,29%	619.290.010
			Tingkat Digitalisasi Arsip		90,82 poin				90,82 poin	
2.24.02.2.01	Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis Daerah	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		100%	272.556.226			100%	353.451.700
2.24.02.2.01.0002	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	25000 Berkas	249.871.625	Pendapatan Bagi Hasil		25000 Berkas	307.886.900
2.24.02.2.01.0003	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota pada	Kab. Tuban, Semanding, Gedongombo	20 Laporan	22.684.601	Pendapatan Bagi Hasil		20 Laporan	45.564.800
2.24.02.2.02	Meningkatnya Pengelolaan arsip statis daerah	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		56,58%	39.226.532			56,58%	74.225.510
2.24.02.2.02.0004	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Baturetno Kab. Tuban, Semanding, Karang	4 Arsip	39.226.532	Pendapatan Bagi Hasil		4 Arsip	74.225.510
2.24.02.2.03	Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN		27,89%	119.223.613			27,89%	191.612.800
2.24.02.2.03.0001	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	1200 Pengguna	54.508.999	Pendapatan Bagi Hasil		1200 Pengguna	95.772.950
2.24.02.2.03.0002	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Kenduruan, Sidohasri Kab. Tuban, Tuban, Ronggomulyo Kab. Tuban, Tambakboyo, Sobontoro Kab. Tuban, Jatirogo, Besowo Kab. Tuban, Merakurak, Sendanghaji Kab. Tuban, Bancar, Bancar Kab. Tuban, Soko, Pandanwangi Kab. Tuban, Plumpang, Magersari Kab. Tuban, Widang, Simorejo Kab. Tuban, Singgahan, Binangun	31 Laporan	64.714.614	Pendapatan Bagi Hasil		31 Laporan	95.839.850
2.24.03	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		100%	83.031.344			100%	179.044.491
2.24.03.2.01	Meningkatnya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun sesuai dengan NSPK	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		100%	11.519.550			100%	23.744.844

Kode	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.24.03.2.01.0004	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun pada tahun n	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	3250 Arsip	9.504.550	Pendapatan Bagi Hasil		3250 Arsip	14.246.500
2.24.03.2.01.0003	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan pada tahun n	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	3250 Berkas	2.015.000	Pendapatan Bagi Hasil		3250 Berkas	9.498.344
2.24.03.2.02	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota sesuai dengan NSPK	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK		100%	33.644.194			100%	64.780.983
2.24.03.2.02.0001	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	2000 Arsip	6.287.565	Pendapatan Bagi Hasil		2000 Arsip	14.781.410
2.24.03.2.02.0002	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	100 Arsip	27.356.629	Pendapatan Bagi Hasil		100 Arsip	49.999.573
2.24.03.2.03	Meningkatnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan NSPK	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK		100%	8.223.820			100%	41.304.426
2.24.03.2.03.0001	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	2500 Daftar	8.223.820	Pendapatan Bagi Hasil		2500 Daftar	20.623.990
2.24.03.2.03.0002	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	0 Arsip	0	Pendapatan Bagi Hasil		0 Arsip	20.680.436
2.24.03.2.04	Meningkatnya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota sesuai dengan NSPK	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK		100%	16.721.478			100%	29.055.234
2.24.03.2.04.0002	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Tuban, Merakurak, Semua Kel/Desa	2500 Arsip	16.721.478	Pendapatan Bagi Hasil		2500 Arsip	29.055.234
2.24.03.2.05	Meningkatnya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang sesuai dengan NSPK	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK		100%	12.922.302			100%	20.159.004
2.24.03.2.05.0003	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kab. Tuban, Tuban, Semua Kel/Desa	30 Arsip	12.922.302	Pendapatan Bagi Hasil		30 Arsip	20.159.004

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025 menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 pada Tahun pertama. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2025 mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban akan lebih terarah dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan berdasarkan Perkiraan/asumsi;
2. Perubahan Recana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Permasalahan yang menyebabkan adanya perubahan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya adanya penyesuaian kebutuhan yang menyebabkan adanya penambahan anggaran atau pergeseran antar sub kegiatan maupun antar rekening belanja, koleksi perpustakaan yang masih kurang sehingga mendapatkan tambahan anggaran untuk 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) eksemplar bahan pustaka serta penambahan sarana prasarana perpustakaan.

Demikian penyusunan perubahan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ABDUL RAKHMAT, S.T., M.T

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Namun demikian, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025 terdapat perkembangan situasi dan kondisi ataupun kebijakan-kebijakan Daerah, Provinsi atau Pusat yang berbeda dengan awal tahun perencanaan. Oleh sebab itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 361 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka perlu dilakukannya penyesuaian pada Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Untuk dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 serta rencana kerja dan pendanaan daerah. Rencana kerja dan pendanaan tersebut mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban ini dilakukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan anggaran pada alokasi dana DBHCHT Tahun 2025;
2. Pergeseran, pengurangan dan penambahan terhadap program/kegiatan untuk mendukung kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan program/kegiatan prioritas Kepala Daerah.

Selanjutnya, setelah Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban ditetapkan, dilanjutkan dengan tahapan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2025 dan tahapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri;

17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 lentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhi ran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten (RPIK) Tahun 2023-2043;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban;
37. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta ketepatan alokasi program/kegiatan dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah;
2. Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintah yaitu : Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi. Kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) program dengan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 20.052.506.089,00 (dua puluh milyar lima puluh dua juta lima ratus enam ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Adapun realisasi serapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 2.751.135.381,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 13,72 % dari total anggaran. Secara detail pencapain program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

   Pada tahun anggaran 2025, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.623.000.680,00 (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh rupiah) dengan target kinerja berupa Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi sebesar 69,92 %. Dalam evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, serapan anggaran sebesar Rp. 5.070.000,00 (lima juta tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan capaian kinerja triwulan II dapat terealisasi sebesar 62,96%. Adapun faktor penyebab belum tercapainya target adalah pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan pada triwulan III.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

   Program Penempatan Tenaga Kerja merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan penempatan bagi pencari kerja terdaftar dengan indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2025 target kinerja program ini ditetapkan sebesar 80,24 % dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.059.409.108,00 (dua milyar lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu seratus delapan rupiah).

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian serapan anggaran sebesar Rp. 30.067.000,00 (tiga puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan capaian kinerja dapat terealisasi sebesar 50,62%. Adapun faktor penyebab belum tercapainya target adalah pelaksanaan pelatihan berbasis komptensi dan *job fair* yang dilaksanakan pada triwulan III.

3. Program Hubungan Industrial

   Realisasi serapan anggaran Program Hubungan Industrial sebesar Rp. 43.962.425,00 (empat tuga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari total anggaran di tahun 2025 sebesar Rp. 2.646.175.800,- (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus. Sedangkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2025 adalah 59,62 %, yang melebihi target sebesar 59,5%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan program kegiatan di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban. Dengan pelaksanaan program ini diharapkan capaian Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban di Tahun 2025 sebesar 83,15 (delapan puluh tiga koma lima belas) poin.

   Adapun total anggaran sebesar Rp. 7.649.218.475,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) terserap sebesar Rp. 2.325.287.831,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan industri di Kabupaten Tuban, maka Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ini dilaksanakan dengan harapan terjadi peningkatan persentase unit usaha IKM yang meningkat skala usahanya.

   Pada tahun anggaran 2025, program ini didukung anggaran sebesar Rp. 5.610.379.676,00 (lima milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan target kinerja program sebesar 3,62 %, sedangkan capaian kinerja triwulan II adalah 0%, yang dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan pendukung peningkatan skala usaha IKM belum terlaksana pada triwulan II. Pada triwulan II tahun 2025 serapan anggaran dari program ini sebesar Rp. 339.757.825,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

   Pertumbuhan jumlah industri diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan di kawasan. Untuk itu perlu adanya kerjasama dari perusahanan dalam

menyedikan informasi industri secara lengkap dalam sebuah laporan sehingga Pemerintah Kabupaten bisa mengambil kebijakan dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional diselenggarakan dalam rangka menunjang tertib laporan industri sehingga didapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini (IKM). Pada tahun anggaran 2025, program ini dianggarkan sebesar Rp. 189.058.920,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu sembilan dua puluh rupiah) dengan target kinerja sebesar 12.500 (dua belas ribu) IKM. Sedangkan capaian kinerja pada triwulan II masih 0 % yang disebabkan karena kegiatan *updating* data IKM Tahun 2025 selesai pada triwulan IV.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 program ini terserap anggaran sebesar Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilah puluh ribu rupiah).

7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Dalam rangka pemerataan persebaran penduduk serta untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, maka Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi ini diselenggarakan. Diharapkan dengan penyelenggaraan program akan terjadi peningkatan calon transmigran yang berasal dari Kabupaten Tuban untuk ditempatkan di tempat tujuan transmigran.

Pada tahun 2025 target kinerja program ini sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 166.554.800,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Sampai dengan triwulan II tahun 2025 serapan anggaran sebesar Rp 5.800.300,00 (lima juta delapan ratus ribu tiga ratus rupiah). Sedangkan capaian kinerja pada triwulan II ini masih 0 % yang disebabkan oleh pemberangkatan calon transmigran akan selesai pada triwulan IV.

Secara keseluruhan pada triwulan II, pencapaian kinerja dari 7 (tujuh) program hanya 1 (satu) program yang mencapai target, yaitu Program Hubungan Industrial. Penyebab umum dari 6 (enam) program lainnya belum mencapai target disebabkan kegiatan dan sub kegiatan pendukung dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Secara keseluruhan serapan anggaran dan capain kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1 (Formulir E.81)

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
2.7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																		
2.7.3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	24 (%)	13.766.704.542	67.92 (%)	8.589.082.281	68.92 (%)	4.297.680.150	70.74 (%)	4.150.422.867	294.75 %	92.54 %	69.92 (%)	2.623.000.680	62.96 (%)	5.070.000	0 %	0 %	Kepala Bidang PPHI
2.7.3.2.01	**1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	24 (%)	12.537.859.357	67.92 (%)	8.521.962.781	22 (%)	4.197.980.000	23.4 (%)	4.058.107.337	97.5 %	100.34 %	23 (%)	2.523.463.300	62.96 (%)	4.770.000	262.33 %	100.53 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.7.3.2.01.1	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1715 (orang)	12.537.859.357	855 (Orang)	8.521.962.781	345 (Orang)	4.197.980.000	184 (Orang)	4.058.107.337	10.73 %	100.34 %	115 (Orang)	2.523.463.300	102 (Orang)	4.770.000	5.95 %	100.53 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.7.3.2.02	**2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase LPKS yang Terakreditasi	9 (%)	1.228.845.185	8.33 (%)	67.119.500	7 (%)	99.700.150	8.33 (%)	92.315.530	92.56 %	12.97 %	8 (%)	99.537.380	3.34 (%)	0	37.11 %	12.97 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.7.3.2.02.1	1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 (Lembaga)	1.228.845.185	5 (Lembaga)	67.119.500	10 (Lembaga)	99.700.150	24 (Lembaga)	92.315.530	290 %	12.97 %	10 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 %	12.97 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi	10 (Lembaga)	0	5 (Lembaga)	0	2 (Lembaga)	0	6 (Lembaga)	0	110 %	0 %	2 (Lembaga)	99.537.380	2 (Lembaga)	0	0 %	0 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.7.4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)	74 (%)	11.119.374.761	78.24 (%)	3.925.642.737	79.24 (%)	1.440.755.394	81.91 (%)	1.372.150.883	110.69 %	47.64 %	80.24 (%)	2.059.409.108	50.62 (%)	30.067.000	68.41 %	47.93 %	Kepala Bidang PPHI
2.7.4.2.01	**1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencari Kerja yang Difasilitasi Layanan Antar Kerja	75 (%)	6.687.593.291	93.52 (%)	2.442.239.896	73 (%)	889.204.854	94.41 (%)	865.933.990	125.88 %	49.47 %	34 (%)	181.165.540	153.7 (%)	7.537.000	204.93 %	49.58 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.7.4.2.01.05	1. Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1650 (Orang)	6.687.593.291	328 (Orang)	2.442.239.896	64 (Orang)	889.204.854	64 (Orang)	865.933.990	23.76 %	49.47 %	50 (Orang)	181.165.540	70 (Orang)	7.537.000	0 %	0 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.7.4.2.03	**2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Informasi Pasar Kerja yang Dapat diakses	54 (%)	2.650.081.484	191.47 (%)	590.848.455	52 (%)	370.385.000	270.92 (%)	332.759.175	501.7 %	34.85 %	53 (%)	552.345.568	149.99 (%)	18.880.000	277.76 %	35.63 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		oleh Pencari Kerja																	
2.7.4. 2.03.2	1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2200 (Orang)	1.336. 327.3 96	4052 (Orang)	258.462 .500	440 (Orang)	76.12 5.000	112 8 (Orang)	72.17 4.500	235.4 5 %	24.74 %	450 (Orang)	258.0 85.56 8	534 (Orang)	18.25 0.000	0 %	0 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.7.4. 2.03.3	2. Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1650 (Orang)	1.313. 754.0 87	706 (Orang)	332.385 .955	330 (Orang)	294.2 60.00 0	380 (Orang)	260.5 84.67 5	65.82 %	45.14 %	340 (Orang)	294.2 60.00 0	0 (Orang)	630	0 %	0 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.7.4. 2.04	**3. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kasus CPMI dan PMI yang diselesaikan	35 (%)	1.781. 699.9 86	100 (%)	892.554 .386	33 (%)	181.1 65.54 0	100 (%)	173.4 57.71 8	285.7 1 %	59.83 %	74 (%)	1.325. 898.0 00	100 (%)	0	285.71 %	59.83 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.7.4.2.04.2	1. Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	222 (Orang)	1.781.699.986	774 (Orang)	892.554.386	45 (Orang)	181.165.540	169 (Orang)	173.457.718	424.77 %	59.83 %	96 (Orang)	1.325.898.000	82 (Orang)	0	36.94 %	59.83 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	9 (%)	3.851.962.722	58.56 (%)	797.662.046	59.5 (%)	472.700.000	59.62 (%)	351.316.893	662.44 %	29.83 %	60.5 (%)	2.646.175.800	59.62 (%)	43.962.425	662.44 %	30.97 %	Kepala Bidang PPHI
2.07.05.2.01	**1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perusahaan yang telah memiliki PP	9 (%)	1.028.182.545	7.62 (%)	288.843.000	7 (%)	200.000.000	7.19 (%)	149.950.071	79.89 %	42.68 %	8 (%)	2.298.211.600	2.6 (%)	5.220.000	28.89 %	43.18 %	JF Mediator Hubungan Industrial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama	9 (%)	0	7.32 (%)	0	7 (%)	0	9.52 (%)	0	105.78 %	0 %	8 (%)	0	6.12 (%)	0	68 %	0 %	
2.07.05.2.01.01	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 (Perusahaan)	234.330.988	8 (Perusahaan)	73.628.400	4 (Perusahaan)	50.000.000	12 (Perusahaan)	36.182.000	240 %	46.86 %	2 (Dokumen)	0	1 (Pelaku Usaha)	0	20 %	46.86 %	JF Mediator Hubungan Industrial
		Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	2 (PKB)	0	3 (PKB)	0	2 (PKB)	0	2 (PKB)	0	100 %	0 %	4 (Pelaku Usaha)	30.075.000	1 (Dokumen)	0	50 %	0 %	
		Jumlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di catatkan	1400 (PKWT)	0	3123 (PKWT)	0	1200 (PKWT)	3.200.542.723	4428 (PKWT)	0	316.29 %	0 %	1300 (Dokumen)	0	2332 (Dokumen)	0	166.57 %	0 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.05.2.01.03	2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 (Laporan)	793.851.556	1 (Laporan)	215.214.800	1 (Laporan)	150.000.000	1 (Laporan)	113.768.071	100 %	41.44 %	1 (Dokumen)	2.268.136.600	0 (Dokumen)	5.220.000	0 %	42.1 %	JF Mediator Hubungan Industrial
		Jumlah Peserta Sosialisasi UMK	50 (Perusahaan)	0	27 (Perusahaan)	0	50 (Perusahaan)	0	31 (Perusahaan)	0	62 %	0 %	50 (Pelaku Usaha)	0	26 (Pelaku Usaha)	0	52 %	0 %	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis yang terfasilitasi dalam Pembuatan struktur dan skala upah	50 (Perusahaan)	0	37 (Perusahaan)	0	50 (Perusahaan)	0	50 (Perusahaan)	0	100 %	0 %	50 (Pelaku Usaha)	0	0 (Pelaku Usaha)	0	0 %	0 %	
		Jumlah peserta Sosialisasi tentang Jaminan Sosial	50 (Perusahaan)	0	35 (Perusahaan)	0	50 (Perusahaan)	0	37 (Perusahaan)	0	74 %	0 %	50 (Pelaku Usaha	0	0 (Pelaku Usaha	0	0 %	0 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													)		)				
2.07.05.2.02	**2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	95 (%)	2.823.780.177	91.67 (%)	283.125.982	85 (%)	272.700.000	100 (%)	201.366.822	105.26 %	17.16 %	90 (%)	347.964.200	100 (%)	38.742.425	105.26 %	18.53 %	JF Mediator Hubungan Industrial
2.07.05.2.02.02	1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 (Perkara)	2.064.285.420	6 (Perkara)	514.339.966	50 (Perkara)	152.700.000	6 (Perkara)	126.736.500	12 %	31.06 %	10 Kasus	183.533.400	100 (%)	38.742.425	105.26 %	18.53 %	JF Mediator Hubungan Industrial
		Jumlah Dokumen terkait data Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	40 (Dokumen)	0	54 (Dokumen)	0	40 (Dokumen)	0	20 (Dokumen)	0	185 %	0 %	4 Dokumen	0	0 (Dokumen)	36.487.425	0 %	0 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi berbagai peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	50 (Perusahaan)	0	38 (Perusahaan)	0	50 (Perusahaan)	0	41 (Perusahaan)	0	82 %	0 %	25 (Pelaku Usaha)	0	84 (Pelaku Usaha)	0	168 %	0 %	
		Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Layanan Konsultasi Terkait Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	25 (Perusahaan)	0	76 (Perusahaan)	0	25 (Perusahaan)	0	34 (Perusahaan)	0	440 %	0 %	50 (Pelaku Usaha)	0	74 (Pelaku Usaha)	0	296 %	0 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.05.2.02.03	2. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	567.671.464	45 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	116.602.680	25 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	70.000.000	37 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	39.767.000	148 %	27.55 %	`	114.430.800	0 (Kelompok)	0	0 %	27.55 %	JF Mediator Hubungan Industrial
		Jumlah SP/SB yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan keanggotaannya	25 (SP/SB)	0	34 (SP/SB)	0	25 (SP/SB)	0	37 (SP/SB)	0	148 %	0 %	25 (Kelompok)	0	0 (Kelompok)	0	0 %	0 %	
2.07.05.2.02.04	3. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 (Lembaga)	191.823.293	4 (Kali)	29.274.000	4 (Kali)	50.000.000	4 (Kali)	34.863.322	100 %	33.44 %	4 (Kali)	50.000.000	2 (Kali)	2.255.000	50 %	34.61 %	JF Mediator Hubungan Industrial
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Calon Transmigran yang ditempatkan (%)	24 (%)	1.607.836.779	16.67 (%)	299.008.064	30 (%)	166.554.800	20 (%)	132.159.517	83.33 %	26.82 %	30 (%)	166.554.800	0 (%)	5.800.300	0 %	27.18 %	Kepala Bidang PPHI
3.32.03.2.01	**1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan transmigrasi yang di fasilitasi penetapanya	5 (Lokasi)	1.607.836.779	2 (Lokasi)	299.008.064	1 (Lokasi)	166.554.800	1 (Lokasi)	132.159.517	60 %	26.82 %	1 (lokasi)	166.554.800	0 (lokasi)	5.800.300	0 %	27.18 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.32.03.2.01.04	1. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	20 (Kepala Keluarga)	1.082.769.591	1 (Kepala Keluarga)	144.737.964	1 (Kepala Keluarga)	96.648.700	1 (Kepala Keluarga)	68.780.017	5 %	19.72 %	1 (KK)	96.648.700	0 (KK)	4.760.300	0 %	0 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.32.03.2.01.05	2. Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	1000 (Kepala Keluarga)	525.067.188	300 (Kepala Keluarga)	154.270.100	200 (Kepala Keluarga)	69.906.100	300 (Kepala Keluarga)	63.379.500	60 %	41.45 %	200 (KK)	69.906.100	0 (KK)	1.040.000	0 %	0 %	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																		
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (poin)	16.671.822.203	82.9 (Angka)	4.466.068.541	83.1 (Angka)	5.415.014.139	83.05 (Angka)	4.865.922.885	101.28 %	55.97 %	83.15 (Angka)	7.649.218.475	0 (Angka)	2.101.929.685	0 %	70.87 %	Sekretaris Dinas
3.31.01.2.01	**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	45 (Dokumen)	567.662.247	20 (Dokumen)	110.841.000	9 (Dokumen)	97.414.050	9 (Dokumen)	85.986.000	64.44 %	34.67 %	10 (Dokumen)	225.478.166	2 (Dokumen)	28.539.000	4.44 %	39.7 %	JF Perencana
3.31.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 (Dokumen)	208.816.770	2 (Dokumen)	43.651.000	2 (Dokumen)	34.660.000	2 (Dokumen)	31.947.500	20 %	36.2 %	3 (Dokumen)	120.808.166	0 (Dokumen)	10.779.500	0 %	0 %	JF Perencana
3.31.01.2.01.07	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 (Laporan)	358.845.477	15 (Laporan)	67.190.000	7 (Laporan)	62.754.050	7 (Laporan)	54.038.500	62.86 %	33.78 %	7 (Dokumen)	104.670.000	2 (Dokumen)	17.759.500	0 %	0 %	JF Perencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.01.2.02	**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan dan dan pemeriksaan yang tersusun	65 (Dokumen)	10.929.604.311	23 (Dokumen)	5.835.341.847	13 (Dokumen)	3.931.543.475	13 (Dokumen)	3.608.909.522	55.38 %	86.41 %	13 (Dokumen)	6.212.267.238	7 (Dokumen)	1.785.268.881	10.77 %	105.6 %	Kasubag keuangan
3.31.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 (Orang/ Bulan)	10.342.837.205	26 (Orang/ Bulan)	5.658.828.847	26 (Orang/Bulan)	3.831.362.775	29 (Orang/Bulan)	3.516.670.522	111.54 %	88.71 %	29 (Orang/Bulan)	6.126.772.263	29 (Orang/Bulan)	1.753.970.881	0 %	0 %	Kasubag keuangan
3.31.01.2.02.02	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65 (Dokumen)	586.767.106	26 (Dokumen)	176.513.000	13 (Dokumen)	100.180.700	13 (Dokumen)	92.239.000	60 %	45.8 %	13 (Dokumen)	85.494.975	7 (Dokumen)	31.298.000	10.77 %	51.14 %	Kasubag keuangan
3.31.01.2.05	**3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	195 Orang	161.286.501	0	0	0	0	45 (Paket)	40.450.000	25,07 %	42,63%	45 (Orang)	91.305.000	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.05.02	1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	150 orang	66.412.088	0	0	0	0	0	0	0	0	35 (Orang)	67.500.000	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peraturan Perundang-Undangan																	
3.31.01.2.05.11	2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	195 (Paket)	94.874.413	45 (Paket)	40.450.000	0	0	45 (Paket)	40.450.000	23,07 %		45 (Paket)	23.805.000	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06	**4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 (Layanan)	1.664.388.258	6 (Layanan)	531.389.960	6 (Layanan)	254.180.104	6 (Layanan)	233.448.845	100 %	45.95 %	6 (Layanan)	350.410.291	4 (Layanan)	107.481.518	66.67 %	53.53 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 (Paket)	38.388.509	1 (Paket)	13.315.000	1 (Paket)	13.006.150	1 (Paket)	12.940.300	100 %	68.39 %	1 (Paket)	12.998.461	1 (Paket)	6.130.605	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.01	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkaan Kantor yang disediakan	3 (Paket)	417.241.851	1 (Paket)	127.338.700	1 (Paket)	49.998.030	1 (Paket)	49.898.325	33.33 %	42.48 %	1 (Paket)	70.100.405	1 (Paket)	27.194.038	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	3 (Paket)	451.630.638	3 (Paket)	146.197.200	3 (Paket)	85.659.200	3 (Paket)	75.197.500	100 %	49.02 %	3 (Paket)	134.358.700	2 (Paket)	40.466.500	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		disediakan																	
3.31.01.2.06.05	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 (Paket)	165.123.778	3 (Paket)	52.371.950	2 (Paket)	18.095.400	2 (Paket)	18.094.250	66.67 %	42.67 %	2 (Paket)	24.992.225	1 (Paket)	11.951.650	33.33 %	49.91 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.06	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 (Dokumen)	68.087.311	2 (Dokumen)	12.980.000	2 (Dokumen)	7.421.400	2 (Dokumen)	6.960.000	40 %	29.29 %	2 (Paket)	7.960.500	1 (Paket)	3.480.000	20 %	34.4 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.06.09	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	325 (Laporan)	523.916.171	127 (Laporan)	179.187.110	65 (Laporan)	79.999.924	41 (Laporan)	70.358.470	51.69 %	47.63 %	65 (Laporan)	100.000.000	14 (Laporan)	18.258.725	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.07	**4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	1 (Unit)	71.994.197	0 (Unit)	0	25 (Unit)	429.283.350	25 (Unit)	402.620.000	2500 %	559.24 %	16 (Unit)	161.008.700	0 (Unit)	0	0 %	559.24 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.07.06	1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 (Unit)	71.994.197	0 (Unit)	0	25 (Unit)	429.283.350	25 (Unit)	402.620.000	2500 %	559.24 %	16 (Unit)	161.008.700	0 (Unit)	0	0 %	559.24 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.01.2.08.	**5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	6 (jasa)	1.549.618.245	6 (Jasa)	482.602.573	6 (Jasa)	389.646.460	6 (Jasa)	230.467.996	100 %	46.02 %	6 (Jasa)	362.035.438	5 (Jasa)	109.696.356	83.33 %	54.36 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.08.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 (Laporan)	32.637.368	2 (Laporan)	9.303.000	1 (Laporan)	4.990.000	1 (Laporan)	4.740.000	60 %	43.03 %	1 (Laporan)	6.499.958	1 (Laporan)	2.250.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.08.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 (Laporan)	850.199.902	6 (Laporan)	208.290.812	2 (Laporan)	196.771.200	2 (Laporan)	90.261.144	53.33 %	35.12 %	2 (Laporan)	155.054.950	2 (Laporan)	40.613.801	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 (Laporan)	666.780.975	2 (Laporan)	9.303.000	1 (Laporan)	4.990.000	1 (Laporan)	4.740.000	60 %	43.03 %	2 (Laporan)	200.480.530	2 (Laporan)	66.832.555	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.09	**6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	82 (Unit)	1.727.268.444	84 (Unit)	653.793.161	69 (Unit)	312.946.700	69 (Unit)	304.490.522	84.15 %	55.48 %	69 (Unit)	246.713.642	17 (Unit)	70.943.930	20.73 %	61.42 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.01.2.09.01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	77 (Unit)	1.011.187.299	77 (Unit)	280.052.737	13 (Unit)	144.798.040	13 (Unit)	141.658.720	16.88 %	41.7 %	13 (Unit)	150.000.000	12 (Unit)	55.103.930	15.58 %	49.53 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.09.06	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 (Unit)	425.496.885	4 (Unit)	91.102.500	4 (Unit)	18.228.600	4 (Unit)	18.184.000	100 %	25.68 %	4 (Unit)	37.664.894	4 (Unit)	13.375.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.09.10	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 (Unit)	193.722.840	1 (Unit)	257.655.924	3 (Unit)	143.180.370	3 (Unit)	140.371.802	80 %	205.46 %	1 (Unit)	49.044.800	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.31.01.2.09.11	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 (Unit)	96.861.420	2 (Unit)	24.982.000	1 (Unit)	6.739.690	1 (Unit)	4.276.000	60 %	30.21 %	1 (Unit)	10.003.948	0 (Unit)	2.465.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%)	1.2 (%)	12.041.350.706	1.43 (%)	6.517.201.331	1.7 (%)	3.197.674.934	2.8 (%)	2.815.093.797	233.33 %	77.5 %	1.9 (%)	5.610.379.676	0 (%)	328.287.832	0 %	81.67 %	Kepala Bidang Perindustrian
3.31.02.2.01	**1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Prosentase pertumbuhan Industri kecil dan menengah	8.07 (%)	6.092.015.930	29.42 (%)	6.302.219.331	1.7 (%)	3.197.674.934	1.77 (%)	2.815.093.797	21.93 %	149.66 %	1.8 (%)	5.610.379.676	0 (%)	328.287.832	0 %	156.47 %	JF Pembina Industri
		Prosentase peningkatan IKM yang difasilitasi kegiatan Usahanya	2.8 (%)	5.451.574.746	8.38 (%)	0	2.7 (%)	0	4.13 (%)	0	147.5 %	0 %	2.8 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	
3.31.02.2.01.03	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 (Dokumen)	6.092.015.931	2 (Dokumen)	1.743.445.426	1 (Dokumen)	1.044.046.467	3 (Dokumen)	855.719.567	60 %	42.67 %	1 (Dokumen)	4.013.920.750	0 (Dokumen)	100.625.400	0 %	44.85 %	JF Pembina Industri

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Non Agro	115 (IKM)	0	0 (Orang)	0	100 (Orang)	0	100 (Orang)	0	50 %	0 %	40 (Kelompok)	0	0 (Kelompok)	0	0 %	0 %	
		Jumlah pameran Dekranasda yang diikuti	10 (Pameran)	0	4 (Kali)	0	2 (Kali)	0	4 (Kali)	0	80 %	0 %	2 (Kali)	0	1 (Kali)	0	10 %	0 %	
3.31.02.2.01.04	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 (Dokumen)	3.396.728.620	2 (Dokumen)	2.277.639.087	1 (Dokumen)	683.664.785	2 (Dokumen)	638.928.750	80 %	85.86 %	1 (Dokumen)	402.096.505	3 (Dokumen)	87.409.750	0 %	0 %	JF Pembina Industri
		Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Agro	115 (IKM)	0	340 (IKM)	0	160 (IKM)	0	180 (IKM)	0	452.17 %	0 %	100 (Kelompok)	0	60 (Kelompok)	0	52.17 %	85.86 %	
		Jumlah Pengelolaan Rumah Produksi	5 (Rumah produksi)	0	4 (Unit)	0	4 (Unit)	0	4 (Unit)	0	160 %	0 %	4 (Unit)	0	4 (Unit)	0	0 %	0 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.02.2.01.05	3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 (Dokumen)	2.054.846.156	2 (Dokumen)	2.281.134.820	1 (Dokumen)	1.469.963.682	1 (Dokumen)	1.320.445.480	60%	175.27 %	1 (Dokumen)	1.194.362.421	3 (Dokumen)	140.252.682	60 %	0 %	JF Pembina Industri
		Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitasi Legalitas Usaha	150 (IKM)	0	117 (Kelompok)	0	30 (Kelompok)	0	104 (Kelompok)	0	147.33 %	0 %	30 (Kelompok)	0	25 (Kelompok)	0	16.67 %	175.27 %	
		Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi Pelayanan Rumah Kemasan	1400 (IKM)	0	765 (Kelompok)	0	300 (Kelompok)	0	335 (Kelompok)	0	78.57 %	0 %	320 (Kelompok)	0	259 (Kelompok)	0	18.5 %	0 %	
		Jumlah IKM yang mengikuti Workshop pengembangan usaha	185 (IKM)	0	135 (Pelaku Usaha)	0	40 (Pelaku Usaha)	0	130 (Pelaku Usaha)	0	147.22 %	0 %	40 (Kelompok)	0	20 (Kelompok)	0	11.11 %	0 %	
		Jumlah Pendampingan IKM	900 (IKM)	0	376 (IKM)	0	180 (IKM)	0	260 (IKM)	0	70.67 %	0 %	180 (Kelompok)	0	74 (Kelompok)	0	8.22 %	0 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (industri kecil dan menengah)	13000 (IKM)	160.896.410	7820 (IKM)	164.635.000	12000 (IKM)	121.418.920	7567 (IKM)	104.305.500	58.21 %	167.15 %	12500 (Pelaku Usaha)	189.058.920	0 (Pelaku Usaha)	1.190.000	0 %	167.89 %	Kepala Bidang Perindustrian
3.31.04.2.01	**1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Prosentase data perusahaan Industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk ke SIINas	0.3 (%)	160.896.410	0.26 (%)	164.635.000	0.25 (%)	121.418.920	0.96 (%)	104.305.500	320 %	167.15 %	0.25 (%)	189.058.920	0 (%)	1.190.000	0 %	167.89 %	JF Pembina Industri
3.31.04.2.01.01	1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian	1 (Dokumen)	15.928.760	1 (Dokumen)	106.710.000	1 (Dokumen)	80.000.000	2 (Dokumen)	77.949.000	200 %	1159.28 %	1 (Dokumen)	113.280.000	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	JF Pembina Industri

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Data ke SIINas																	
3.31.04.2.01.03	2. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah peserta Workshop P3DN	5 (Dokumen)	144.967.650	2 (Dokumen)	57.925.000	1 (Dokumen)	41.418.920	3 (Dokumen)	26.356.500	100 %	58.14 %	30 (Orang)	75.778.920	0 (Orang)	1.190.000	0 %	0 %	JF Pembina Industri
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas											1 (Dokumen)	0	0 (Kelompok)	0	0 %	0 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisai Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan II (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6) x 100%		9		10-5+7+9		11 = 10 / 4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta Bimtek SIINas											30 (Kelompok)	0	0 (Kelompok)	0	0 %	0 %	

Sumber : e-monev Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kabupaten Tuban Tahun 2025 Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban dibentuk berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkendudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas yang diemban yaitu membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah, dengan fungsi yang diselenggarakan :

1) perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
5) penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
6) perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas;
7) perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8) pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
4. Bidang Perindustrian; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan, dengan fungsi yang dilaksanakan:

1) penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;

2) penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
3) pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
4) pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
5) pengelolaan administrasi kepegawaian;
6) penyelenggaraan administrasi keuangan;
7) pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
8) pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
9) penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
10) pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
11) pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi dan mengoordinasikan : Subbagian Umum Dan Kepegawaian; dan Subbagian Keuangan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.

2. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial, serta menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
2) pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
3) pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

4) pelaksanaan penempatan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi; dan
5) pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
6) pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
7) pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
8) pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial membawahkan dan mengoordinasikan Seksi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, dengan tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penempatan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi.

3. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang perindustrian, serta menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan dan penyusunan program, petunjuk teknis bidang Industri Agro, Industri Non Agro dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2) pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang perindustrian Industri Agro, Industri Non Agro dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
3) pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi industri agro;
4) pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi industri non agro;
5) pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah;
6) pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perindustrian;
7) pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
8) pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan

9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dapat digambarkan sebagaimana gambar, sebagai berikut:

Gambar II.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tuban

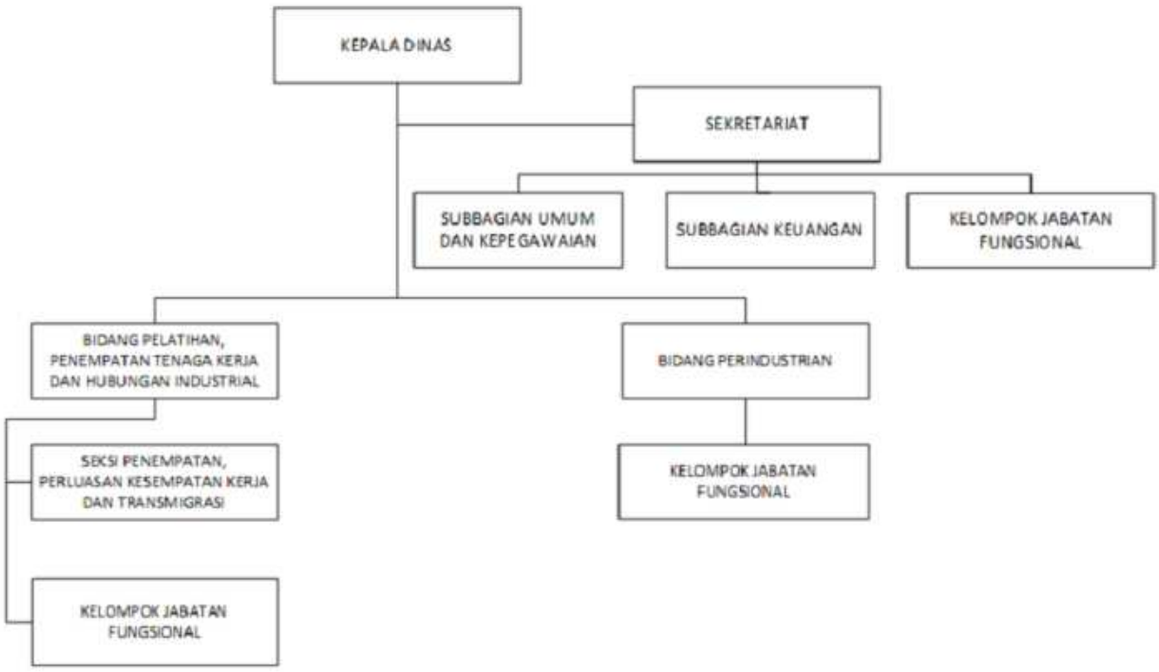

Dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis (Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Target Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
			1	2	3	4	5
Meningkatnya Produktivitas dan Nilai	Meningkatnya Daya Saing Industri (IKM)	Indikator Tujuan 1: Persentase Kontribusi Produk	30,4%	30,5%	30,6%	30,7%	30,8%

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
			1	2	3	4	5
Tambah Sektor Industri Pengolahan serta Partisipasi Angkatan Kerja Asas		Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Pengolahan					
		Indikator Sasaran 1: Persentase Peningkatan Omzet IKM	3,4%	3,8%	4,2%	4,6%	5,0%
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Indikator Tujuan 2: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,39 %	77,31 %	78,23 %	79,15 %	80,07 %
		Indikator Sasaran 2: Persentase Serapan Tenaga Kerja	17,5%	20%	22,5 %	25%	27,5 %

Sumber : RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029

Tabel II.3
Target Kinerja Sasaran Program 2025-2029

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya	3,68%	4,56%	5,44%	6,32%	7,2%	8,08%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pembaharuan Data Pelaku Usaha Industri	80%	82%	84%	86%	88%	90%

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	5%	7%	9%	11%	13%	15%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja Dapat Ditempatkan	83,91 %	85,91 %	87,91 %	89,91 %	91,91 %	93,91 %
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	60,62 %	61,62 %	62,62 %	63,62 %	64,62 %	65,62 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,55	84,05	84,55	85,05	85,55	86,05

Sumber :

1. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029
2. BA Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2030 (tanggal 14 Juli 2025)

Berikut uraian capaian kinerja program pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sampai dengan Tahun 2025 triwulan II:

1) Urusan Perindustrian

Dari tabel II.3 dapat dilihat bahwa Program Perencanaan dan Pembanguan Industri dengan indikator Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya pada tahun 2025 memiliki target sebesar 3,68%, capaian sampai dengan Tahun 2025 triwulan II masih 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan pelatihan produksi, pelayanan rumah kemasan dan standarisasi produk IKM belum seluruhnya terlaksana pada triwulan II. Sedangkan pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sampai dengan Tahun 2025 triwulan II juga belum bisa diukur capaian kinerjanya dikarenakan kegiatan *updating* data IKM dan verifikasi teknis perizinan usaha industri belum selesai dilaksanakan.

2) Urusan Tenaga Kerja

Pada Program Penempatan Tenaga Kerja dari target kinerja berupa Prosentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan sebesar 70%, sampai dengan Tahun 2025 triwulan II dapat terealisasi sebesar 50,62%. Angka ini setara dengan penempatan tenaga kerja sebanyak 82 orang sampai dengan bulan Juni 2025. Faktor pendukung capaian kinerja antara lain: peningkatan akses lowongan kerja melalui media sosial, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan penempatan pekerja migran.

Pada Program Hubungan Industrial dari target indikator program, yaitu Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 59,5%, dapat terealisasi sebesar 59,62%. Faktor pendukung capaian kinerja sesuai target dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran perusahaan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, antara lain: penerapan LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi oleh dinas.

Sedangkan pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sampai dengan Tahun 2025 triwulan II dapat terealisasi sebesar 62,96%. Angka ini setara dengan jumlah umlah pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 102 orang sampai dengan bulan Juni 2025.

3) Urusan Transmigrasi

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban juga melaksanakan program dan kegiatan urusan transmigrasi dengan penempatan di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian sampai dengan Tahun 2025 triwulan II belum bisa diukur capaian kinerjanya dikarenakan penempatan calon transmigran akan dilaksanakan pada bulan November 2025.

Gambaran kinerja pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan Tahun 2024, dapat dilihat dari analisa kinerja pelayanan pada Perangkat Daerah yang menangani kedua urusan yang saat ini menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sebagaimana indikator kinerja utama yang tertuang di dalam renstra dinas, sebagaimana tertuang dalam Tabel II.4.

Tabel II.4 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1.	Persentase Peningkatan Omzet IKM	-	-	n/a	3%	3,4%	3,8%	n/a	3%	3,62%	3,95	
2.	Persentase Serapan Tenaga Kerja	-	-	12,5%	15%	17,5%	20%	12,5%	16,65%	18,25%	22,75%	

Sumber :

1. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029
2. Hasil Analisis, 2025

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mengimplementasikan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 secara nyata dan terarah, diperlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan ke dalam bentuk misi pembangunan. Misi ini dirumuskan sebagai upaya sistematis untuk menjabarkan visi ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik, operasional, dan dapat diukur pencapaiannya.

Pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban mengemban Misi ke 2 (dua) yakni, **"Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan SeluasLuasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif"**. Guna membantu mencapai misi tersebut dalam pelaksanaan kegiatannya tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan, yang dapat ditarik rangkuman beberapa isu strategis yang menjadi fokus kegiatan pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban, antara lain :

1. Dalam upaya penanganan urusan perindustrian:
    a. Terbatasnya akses pemasaran, promosi dan permodalan bagi sebagian besar pelaku Industri Kecil dan Menengah;
    b. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan kurangnya inovasi dan kreatifitas produk Industri Kecil Menengah serta kurang optimalnya pengemasan hasil produk, hal ini akan berakibat pada kurangnya daya saing produk yang dihasilkan;
    c. Rendahnya pemahaman pelaku Industri Kecil Menengah tentang pentingnya usaha dalam bentuk kelompok dalam rangka peningkatan efisiensi dan peningkatan kualitas dalam berproduksi yang berdampak pada rendahnya kualitas produk yang dihasilkan;
    d. Kurangnya inisiatif pelaku usaha dalam mempromosikan produknya (masih mengandalkan fasilitasi pemerintah) serta kurangnya penguasaan Teknologi Informasi sehingga belum mampu menjual produk secara *online*;
    e. Kebanyakan peralatan produksi yang digunakan pelaku usaha masih tradisional serta kurang pemahaman akan pentingnya legalitas usaha serta faktor pencemaran lingkungan pada proses produksi;
    f. Masih kurangnya sertifikasi produk IKM yang berupa sertifikasi merk dan halal untuk meningkatkan daya saing IKM;
    g. Belum optimalnya pelayanan Rumah Kemasan dikarenakan terbatasnya peralatan cetak kemasan produk IKM;

h. Belum optimalnya Rumah Produksi dalam pengembangan produk unggulan lokal;
i. Belum optimalnya pengembangan sentra IKM, dan
j. Perkembangan usaha IKM yang dinamis tiap tahunnya sehingga memerlukan *updating* data IKM tiap tahunnya.

Adapun bila isu-isu urusan perindustrian tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada pencapaian Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029, terutama pada indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan target 4,06% dan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan sebesar 30,3% pada tahun 2025.

Dalam upaya penanganan urusan tenaga kerja:

a. Bertambahnya jumlah pengangguran dikarenakan jumlah angkatan kerja setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja;
b. Belum tersedianya BNBA data pengangguran;
c. Masih terjadinya perselisihan hubungan kerja/industrial karena pemutusan hubungan kerja;
d. Terbatasnya informasi pasar kerja yang tersedia baik ke luar negeri; maupun untuk pasar kerja yang ada di dalam negeri;
e. Kurang optimalnya kerjasama dengan lembaga pencari kerja;
f. Rendahnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
g. Adanya potensi perselisihan hubungan industrial, Pemutusan Hubungan Kerja yang dapat memicu terjadinya unjuk rasa pekerja/buruh;
h. Kurangnya kesadaran pengusaha dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penerapan syarat kerja dalam hubungan industrial;
i. Kurangnya pengetahuan pekerja dan pengusaha dalam prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
j. Kurang optimalnya kontribusi lembaga-lembaga ketenagakerjaan termasuk Lembaga Kerjasama Bipartit, yang merupakan forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan; dan
k. Perlunya peningkatan fungsi kelembagaan hubungan industrial diantaranya Lembaga Kerjasama Bipartit, Organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh melalui bimbingan teknik dan sosialisasi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Apabila isu-isu urusan tenaga kerja tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada pencapaian Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021, terutama pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 4,27 pada tahun 2025.

Sedangkan peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, antara lain:

a. Kemajuan informasi dan teknologi berdampak pada meningkatnya persaingan produk IKM di pasaran regional dan nasional, sehingga program di bidang industri berfokus pada peningkatan daya saing IKM. Strategi peningkatan daya saing IKM juga berperan dalam meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan sehingga berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap PDRB.
b. Perkembangan Kabupaten Tuban menjadi salah satu daerah industri di Jawa Timur (Gerbangkertosusila Plus) yang memerlukan dukungan tenaga kerja lokal yang berkompetensi. Sehingga salah satu program prioritas adalah untuk meningkatkan cakupan tenaga kerja yang berkompetensi.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah dengan berpedoman pada perencanaan ditingkat atasnya. Secara subtansi RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 selain berpedoman pada arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, secara teknokratik juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan rencana pembangunan antardokumen perencanaan serta memastikan keselarasan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2025 merupakan awal dari dimulainya Visi Indonesia Emas 2045, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun pertama (2025-2029).

Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2024

Berdasarkan gambar di atas maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tuban lima tahun ke-I adalah “Tuban Tumbuh”. Arah kebijakan “Tuban Tumbuh” bermakna bahwa pertumbuhan daerah memiliki peran yang penting dalam menciptakan fondasi transformasi (ekonomi, sosial dan tata kelola) yang berkelanjutan. Tuban melakukan “penguatan pondasi” yang mendukung “pertumbuhan (Growth)” dengan indikator pembangunan, antara lain kualitas SDM (IPM), lapangan kerja (penurunan TPT), penurunan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pendapatan dan pemenuhan daya dukung infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, baik pendidikan dan kesehatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas akan menciptakan lapangan kerja meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka ditargetkan kemiskinan akan berkurang menjadi 11%. Pengangguran (TPT) diharapkan turun menjadi 4,4%-3,7%.

Pada titik ini penguatan terhadap sektor pertanian dalam rangka mendukung ketersediaan pangan menemukan relevansinya. Integrasi lintas sektoral pada tahapan ini akan mendukung semua sektor strategis agar memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahapan Tuban Tumbuh akan didukung oleh Kawasan Ekonomi Khusus dan penguatan BUMD pendukung produksi pertanian dan nilai tambah sector pertanian. Dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, Kabupaten Tuban dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk investasi pada sektorsektor strategis. Hal tersebut mendorong inovasi dan pengembangan industri sehingga Kabupaten Tuban akan lebih berdaya saing.

Dengan mendasarkan pada isu strategis, yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, sasaran dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tuban Tahap I (2025-2029), serta memperhatikan visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka tema Perubahan RKPD Tahun 2025, **“Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Sumberdaya Manusia Unggul serta Potensi Sektor Strategis.”**

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabuapten Tuban Tahun 2025 - 2029 prioritas pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik.
2. Program Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik.
3. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana.
4. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
5. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah.
6. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan.
7. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan berkarakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat.
8. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat.
9. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia.

10. Program Pemantapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
11. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital.
12. Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan.

Dari Program Prioritas diatas, selanjutnya ditentukan rencana program dan target kinerja program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah yang terkait dengan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel II.6
Program Prioritas dan Pagu Indikatif P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025

boo	Urusan/Bidang /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja		Pagu Indikatif
		Indikator	Target	
I.	**Prioritas 5 :** **"Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah."**			
	Urusan Pemerintah Pilihan Bidang Perindustrian			
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%)	3,68%	5.436.839.129
II.	**Prioritas 6 :** **"Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan."**			
	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja			
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	5 %	2.616.849.115
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)	83,91%	2.585.305.764

boo	Urusan/Bidang /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja		Pagu Indikatif
		Indikator	Target	
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	60,62%	2.352.234.474

Sumber: 1. Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025
2. BA Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2030 (tanggal 14 Juli 2025)

Dari arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tuban di dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tersebut selanjutnya akan dituangkan ke dalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing urusan yang ditangani Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban. Pada Tabel II.7 terdapat kolom Rancangan Awal P-RKPD yang menunjukan besaran pagu dan target pada dokumen P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025. Sedangkan hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pada anggaran Perubahan APBD Tahun 2025.

Tabel II.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.554.389.353	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.554.389.353	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.554.389.353	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.554.389.353	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	5%	2.616.849.115	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	5%	2.616.849.115	
.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	200	2.523.463.300	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	200	2.523.463.300	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	153 Orang	2.523.463.300	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	153 Orang	2.523.463.300	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah LPKS yang Terakreditasi	6 Lembaga	93.385.815	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah LPKS yang Terakreditasi	6 Lembaga	93.385.815	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	93.385.815	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	93.385.815	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)	83,91%	2.585.305.764	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)	83,91%	2.585.305.764	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencari Kerja yang Difasilitasi Layanan Antar Kerja	94,5 %	1.325.898.000	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencari Kerja yang Difasilitasi Layanan Antar Kerja	94,5 %	1.325.898.000	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	330 Orang	1.900.919.600	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	330 Orang	2.900.919.600	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Informasi Pasar Kerja yang Dapat diakses oleh Pencari Kerja	3.100 lowongan	552.345.568	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Informasi Pasar Kerja yang Dapat diakses oleh Pencari Kerja	3.100 lowongan	552.345.568	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	450 Orang	238.612.644	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	450 Orang	238.612.644	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	340 Orang	281.554.500	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	340 Orang	281.554.500	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus CPMI dan PMI yang diselesaikan	7 kasus	164.219.020	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus CPMI dan PMI yang diselesaikan	7 kasus	164.219.020	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50 Orang	164.219.020	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50 Orang	164.219.020	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	60.62 %	2.352.234.474	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	60,62 %	2.352.234.474	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja		Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	15 perusahaan	2.298.211.600	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja		Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	15 perusahaan	2.298.211.600	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	4 Perusahaan	15.037.500	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan Jumlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dicatatkan Jumlah	4 Perusahaan	15.037.500	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Terdaftar di WLKP Online					Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	2.121.836.632	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	2.121.836.632	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100 %	347.964.200	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100 %	347.964.200	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	111.416.525	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	111.416.525	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan				Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan				
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Jumlah SP/SB yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan keanggotaannya	25 Asosiasi dan SP 25 SP/SB	68.789.680	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Jumlah SP/SB yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan keanggotaannya	25 Asosiasi dan SP 25 SP/SB	68.789.680	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga	35.154.137	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga	35.154.137	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				12.381.820.642	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				12.381.820.642	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				12.288.244.807	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				12.288.244.807	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,55	6.518.916.870	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,55	6.518.916.870	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	10 Dokumen	225.478.166	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	10 Dokumen	225.478.166	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	83.110.483	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	83.110.483	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	73.702.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	73.702.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	13 Dokumen	6.212.267.238	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	13 Dokumen	6.212.267.238	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bul	5.179.000.369	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bul	5.179.000.369	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	63.646.975	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	63.646.975	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	1 Layanan	91.305.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	1 Layanan	91.305.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	25.208.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	25.208.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	6 Layanan	350.410.291	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	6 Layanan	350.410.291	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	12.998.461	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	12.998.461	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kantor		Kantor yang Disediakan			Kantor	Semua Kelurahan	Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.050.105	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.050.105	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	128.222.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	128.222.700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22.929.725	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22.929.725	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.960.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.960.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	54.805.040	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	54.805.040	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BUMD	16 unit	161.008.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan BUMD	16 unit	161.008.700	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	16 unit	161.008.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	16 unit	161.008.700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	6 Jasa	362.035.438	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	6 Jasa	362.035.438	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	119.853.042	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	119.853.042	
	Penyediaan	Kelurah	Jumlah Laporan	2	206.309.030	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah Laporan	2	206.309.030	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Jasa Pelayanan Umum Kantor	an Sidorejo , Kec. Tuban	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Pelayanan Umum Kantor	Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	69 Unit	246.713.642	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	69 Unit	246.713.642	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kelurahan Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	13 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Tuban, Semua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	13 Unit	150.000.000	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	, Kec. Tuban	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan, Semua Kelurahan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	38.394.894	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	38.394.894	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.044.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.044.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.003.948	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.003.948	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%)	3,68 %	5.436.849.129	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%)	3,68 %	5.436.849.129	
			Jumlah IKM yang difasilitasi kegiatan usahanya	700 IKM	5.436.849.129			Jumlah IKM yang difasilitasi kegiatan usahanya	700 IKM	5.436.849.129	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	265.217.201	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	265.217.201	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.105.833.281	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.105.833.281	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	4.065.798.647	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	4.065.798.647	
6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Pembaharuan Data Pelaku Usaha Industri	80%	332.478.808	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Industri Kecil dan Menengah)	80%	332.478.808	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINas	25 data	332.478.808	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINas	25 data	332.478.808	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri	1 Dokumen	302.656.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri	1 Dokumen	302.656.000	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	1 Dokumen	29.822.808	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	1 Dokumen	29.822.808	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				166.554.800	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				166.554.800	
7	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Calon Transmigran yang ditempatkan (%)	30 %	93.575.835	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Calon Transmigran yang ditempatkan (%)	30%	93.575.835	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kawasan transmigrasi yang di fasilitasi penetapanya	1 lokasi	93.575.835	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kawasan transmigrasi yang di fasilitasi penetapanya	1 lokasi	93.575.835	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga	65.676.410	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga	65.676.410	
	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 Kepala Keluarga	27.899.425	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 Kepala Keluarga	27.899.425	

NO	Rancangan Awal P-RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					19.936.209.995					**19.936.209.995**	

Sumber : Perubahan RKPD Kab. Tuban Tahun 2025

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan progam dan kegiatan masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban pada urusan ketenagakerjaan berorientasi pada peningkatan pelatihan kerja untuk masyarakat dalam bentuk Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang dalam pelaksanaannya masuk ke dalam Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan dana khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan langsung ke Pemerintah Daerah, dengan alokasi penggunaan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024.

Tujuan yang diutamakan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat usia produktif (diatas 17 tahun), dimana prioritasnya berada pada masyarakat milenial serta fokus peserta pelatihan pada masyarakat kurang mampu sebagai bekal keterampilan guna meningkatkan kompetensinya agar memudahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau sebagai bekal ketrampilan apabila bekerja pada perusahaan, dengan target kinerjanya sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) orang, yang terbagi atas beberapa kelompok yaitu: Las 3G dan Las 6G.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa kegiatan pelatihan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tersebut telah disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029, dan teklah diakomodir dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel II.8.

Tabel II.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tuban

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran		Catatan
				Volume	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*
I	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				2.523.463.300	
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan,	Persentase Pencari Kerja Bersertifikat	23%	2.523.463.300	DBHCHT

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran		Catatan
				Volume	Anggaran	
	Unit Kompetensi	Semua Kelurahan	Kompetensi			
a.	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	153 Orang	2.523.463.300	DBHCHT

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 20.943.797.459,00 (dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). Dalam rancangan perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025 diusulkan penambahan anggaran menjadi Rp. 19.936.209.995,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Dari total anggaran tersebut terbagi dalam 3 (tiga) urusan yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.554.389.353,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang meliputi: 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan.
2. Urusan Perindustrian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.288.244.807,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang meliputi: 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.
3. Urusan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 93.575.835,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang meliputi: 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Adapun anggaran pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2024 secara detail dijabarkan pada tabel III.1.

Tabel III.1 (T-C.33)

Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN					20.943.797.459,00	19.936.209.995,00				15.232.510.327,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.328.585.588,00	7.554.389.353,00				6.592.448.090,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.328.585.588,00	7.554.389.353,00				6.592.448.090,00
					Sasaran Program: Meningkatnya kompetensi tenaga kerja										
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		69,92 %	5 %	2.623.000.680,00	2.616.849.115,00			7%	3.188.880.150,00
					Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan										
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi Tenaga Kerja Industri		23 %	200 orang	2.523.463.300,00	2.523.463.300,00			220 orang	3.089.180.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi										
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345 Orang	153 Orang	2.523.463.300,00	2.523.463.300,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		160 orang	3.089.180.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan	Jumlah LPKS yang Terakreditasi		8 %	6 Lembaga	99.537.380,00	99.537.380,00			7 Lembaga	99.700.150,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kerja Swasta										
					Sasaran Sub Kegiatan :Meningkatnya kualitas Lembaga Pelatihan Kerja										
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Lembaga	10 Lembaga	99.537.380,00	93.385.815,00	Pendapatan Bagi Hasil		10 Lembaga	99.700.150,00
					Sasaran Program: Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja										
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan		80,24 %	83,91 %	2.059.409.108,00	2.585.305.764,00			85,91%	1.763.125.540,00
					Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan antar kerja										
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang Difasilitasi Layanan Antar Kerja		74 %	94,5 %	1.325.898.000,00	1.325.898.000,00			94,75%	1.179.600.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan: Terlaksananya pelayanan antar kerja										
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja										
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330 Orang	330 Orang	1.325.898.000,00	1.900.919.600,00	Pendapatan Bagi Hasil		2.800 orang	1.179.600.000,00
					Sasaran Kegiatan : Meningkatnya informasi pasar kerja yang dapat diakses pencari kerja										
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang Dapat diakses oleh Pencari Kerja		82 %	3.100 lowongan	552.345.568,00	552.345.568,00			3.150 lowongan	402.360.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan :Perluasan Informasi Lowongan kerja dalam dan luar negeri										
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440 Orang	450 Orang	258.085.568,00	238.612.644,00	Pendapatan Bagi Hasil		700 orang	108.100.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan :Meningkatnya pencari kerja ditempatkan melalui Job Fair										
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja										
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330 Orang	340 Orang	294.260.000,00	281.554.500,00	Pendapatan Bagi Hasil		360 orang	294.260.000,00
					Sasaran Kegiatan : Meningkatnya perlindungan bagi pekerja migran										
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus CPMI dan PMI yang diselesaikan		34 %	7 kasus	181.165.540,00	181.165.540,00			7 kasus	181.165.540,00
					Sasaran Kegiatan : Meningkatnya perlindungan bagi pekerja migran										
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)										
						Jumlah CPMI/PMI yang terlayani sesuai prosedur	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	150 orang	181.165.540,00	164.219.020,00	Pendapatan Bagi Hasil		160 orang	181.165.540,00
					Sasaran: Terwujudnya Hubungan Industrial yang Kondusif										
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak		60,5 %	60,62 %	2.646.175.800,00	2.352.234.474,00			61,62%	1.640.442.400,00
					Sasaran Kegiatan : Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB		8 %	15 Perusahaan	2.298.211.600,00	2.298.211.600,00			16 Perusahaan	1.291.011.600,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki PP dan PKB										
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan										
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Perusahaan	4 Perusahaan	30.075.000,00	15.037.500,00	Pendapatan Bagi Hasil		11 Perusahaan	30.075.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatnya penerapan LKS Bipartit, Sturktur dan Skala Upah serta BPJS Tenaga Kerja										
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan										
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	2.268.136.600,00	2.121.836.632,00	Pendapatan Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1 Laporan	1.260.936.600,00
					Sasaran Kegiatan :Menurunnya perselisihan hubungan industrial										
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan		90 %	100 %	347.964.200,00	347.964.200,00			100%	349.430.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kabupaten/Kota										
					Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatnya kualitas Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial										
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Perkara	10 Perkara	183.533.400,00	111.416.525,00	Pendapatan Bagi Hasil		10 Perkara	185.000.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatnya organisasi perusahaan dan serikat pekerja										
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi										
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	114.430.800,00	68.789.680,00	Pendapatan Bagi Hasil		27 Asosiasi dan Serikat Pekerja	114.430.800,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatnya peran LKS Tripartit										
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Lembaga	4 Lembaga	50.000.000,00	35.154.137,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 Lembaga	50.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					13.615.211.871,00	12.381.820.642,00				8.640.062.237,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					13.448.657.071,00	12.288.244.807,00				8.473.507.437,00
					Sasaran Program: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah										
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah		83,15 (Angka)	83,55 (Angka)	7.649.218.475,00	6.518.916.870,00			84,05	5.641.940.895,00
					Sasaran Kegiatan :Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun		8 Dokumen	10 Dokumen	225.478.166,00	225.478.166,00			9 Dokumen	226.000.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	2 Dokumen	3 Dokumen	120.808.166,00	83.110.483,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Dokumen	130.000.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	6 Laporan	7 Laporan	104.670.000,00	73.702.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7 Laporan	96.000.000,00
					Sasaran Kegiatan :Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun		13 Dokumen	13 Dokumen	6.212.267.238,00	6.212.267.238,00			13 Dokumen	4.270.974.477,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN										
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	6.126.772.263,00	5.179.000.369,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		41 orang/ bulan	4.185.479.502,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
3	31	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	13 Dokumen	13 Dokumen	85.494.975,00	63.646.975,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		13 Dokumen	85.494.975,00
					Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Kepegawaian Perangkat Daerah										
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai		45 Orang	1 Layanan	91.305.000,00	91.305.000,00			2 Layanan	91.305.000,00
					Sasaran Sub Kegatan: Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	45 Paket	1 Paket	23.805.000,00	976.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		45 orang	23.805.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sasaran Sub Kegatan: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
3	31	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	28 Orang	35 Orang	67.500.000,00	25.208.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		35 orang	67.500.000,00
					Sasaran Kegiatan :Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum		6 Layanan	6 Layanan	350.410.291,00	350.410.291,00			6 Layanan	351.625.980,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Paket	1 Paket	12.998.461,00	12.998.461,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Paket	13.500.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Paket	1 Paket	70.100.405,00	61.050.105,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Paket	70.100.405,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Logistik Kantor										
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	3 Paket	3 Paket	134.358.700,00	128.222.700,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Paket	135.033.700,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan										
3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	3 Paket	2 Paket	24.992.225,00	22.929.725,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Paket	24.992.225,00
3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	7.960.500,00	7.960.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Paket	7.999.650,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	65 Laporan	65 Laporan	100.000.000,00	54.805.040,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		40 Laporan	100.000.000,00
					Sasaran Kegiatan :Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD		16 Unit	16 Unit	161.008.700,00	161.008.700,00			2 unit	80.000.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	16 Unit	18 Unit	161.008.700,00	225.700.598,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 unit	80.000.000,00
					Sasaran Kegiatan :Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang		6 Jasa	6 Jasa	362.035.438,00	362.035.438,00			6 Layanan	362.035.438,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Surat Menyurat										
3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Laporan	1 Laporan	6.499.958,00	6.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Laporan	6.499.958,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	2 Laporan	2 Laporan	155.054.950,00	119.853.042,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Laporan	155.054.950,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor										
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	2 Laporan	2 Laporan	200.480.530,00	206.309.030,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Laporan	200.480.530,00
					Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		82 Unit	69 Unit	246.713.642,00	246.713.642,00			69 unit	260.000.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	77 Unit	13 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		13 unit	150.000.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Unit	4 Unit	37.664.894,00	38.394.894,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		25 unit	40.000.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
3	31	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Unit	1 Unit	49.044.800,00	49.044.800,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 unit	50.000.000,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	1 Unit	1 Unit	10.003.948,00	10.003.948,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 unit	20.000.000,00
					Sasaran Program: Meningkatnya Skala Usaha IKM										
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya		1,20 %	3,68 %	5.610.379.676,00	5.436.849.129,00			4,56%	2.642.507.620,00
					Sasaran Kegiatan : Meningkatnya fasilitasi kegiatan usaha IKM										
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang difasilitasi kegiatan usahanya		2,70%	700 IKM	5.610.379.676,00	5.436.849.129,00			720 IKM	2.642.507.620,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Sumber Daya Industri										
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	1 Dokumen	402.096.505,00	265.217.201,00	Pendapatan Bagi Hasil		2 Dokumen	402.096.506,00
					Sasaran Sub Kegiatan :Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	1 Dokumen	1.194.362.421,00	1.105.833.281,00	Pendapatan Bagi Hasil		4 Dokumen	1.196.364.646,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1 Dokumen	4.013.920.750,00	4.065.798.647,00	Pendapatan Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		4 Dokumen	1.044.046.468,00
					Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Industri										
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pembaharuan Data Pelaku Usaha Industri		12500 IKM	80 %	189.058.920,00	332.478.808,00			82%	189.058.922,00
					Sasaran Kegiatan: Meningkatnya data industri yang masuk dalam SIINas										
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ata perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINas		0,25 Persen	25 data	189.058.920,00	189.058.920,00			30 data	189.058.922,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksanannya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri										
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)										
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	113.280.000,00	302.656.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	113.280.001,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksannya Pemantauan dan Evaluasi Industri										
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas										
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	75.778.920,00	29.822.808,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	75.778.921,00
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					166.554.800,00	93.575.835,00				166.554.800,00
					Sasaran Program : Meningkatnya calon transmigran yang ditempatkan										
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Calon Transmigran yang Ditempatkan		30 %	30 %	166.554.800,00	93.575.835,00			30%	166.554.800,00
					Sasaran Kegiatan : Meningkatnya fasilitasi penetapan calon transmigran										
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapanya		1 Lokasi	1 Lokasi	166.554.800,00	166.554.800,00			1 Lokasi	166.554.800,00
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran										
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	4 Kepala Keluarga	1 Kepala Keluarga	96.648.700,00	65.676.410,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 KK	96.648.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi										
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi										
						Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Kepala Keluarga	100 Kepala Keluarga	69.906.100,00	27.899.425,00	Pendapatan Bagi Hasil		200 KK	69.906.100,00
J U M L A H										**20.943.797.459,00**	**19.936.209.995,00**				**15.232.510.327,00**

Sumber : RKPD Tahun 2026 dan P-RKPD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Aplikasi SIPD - RI

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tuban.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan uraian yang berisikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta rencana program dan kegiatan dengan kebutuhan dan sumber pendanaannya, yang akan dilaksanakan selama tahun 2025, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya menangani dua urusan yang menjadi tanggunggjawabnya, yakni Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja, serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang mana didalam pelaksanaannya juga sebagai upaya mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun yang bersangkutan, sebagai dukungan atas tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Tuban

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan bahwa Sekretariat dan Bidang Teknis bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. menjaga konsistensi antara P-RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
c. dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KUPA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN TUBAN,

ttd

SUWITO, SH

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan;
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan; dan
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah.

Bagi Sekretariat Daerah, P-RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP-PD) Tahun 2025. Mengingat P-RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka P-RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban, RPJMD Kabupaten Tuban, dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.

Penyusunan P-RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan, Rancangan P-RKPD dan penetapan P-RKPD. Adapun tema pembangunan P-RKPD Kabupaten Tuban tahun 2025 adalah Pemantapan Perwujudan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Unggul.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diuah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

19. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Perubahan Rencana Kerja ini bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

1.3.1 Maksud :

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian hasil berjalan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKAP-PD Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan;
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya;
6. Untuk memberikan gambaran tentang beban tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 sehingga diharapkan hasilnya dapat terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
7. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Awal Perubahan Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen P-RKPD dan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Sekretariat serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Sampai dengan Tahun 2025

Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2025.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian renja triwulan II Tahun 2025 sebagai dasar Perubahan Renja. Pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 secara umum Sekretariat Daerah telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan pada organisasi.

Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Sekretariat Daerah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Tuban. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Sekretariat Daerah.

Atas dasar telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah, maka capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2025 Triwulan II (dua) dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Hal yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup Sekretariat Daerah dengan berbagai program dan kegiatan yang ada.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Nilai komponen pelaporan kinerja dalam Sakip Daerah	80.15		82,05	41.111.487.757	78.36	47.958.202.584	0	5.951.692.585	0	9.558.335.899	0	7.612.909,070	0	0	0	23.122.937.554	0	136.780.505.580	0	108.23%	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	85.000.000	438.139.494	9 (Dokumen)	117.620.750	9 (Dokumen)	174.999.675	133.33	0	83.33	13,07	88,89	59,91	0	0	8 (Dokumen)	360.855.785	8 (Dokumen)	360.855.785	17,78%	82,36%	Kepala Bagian organisasi
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	185.256.776	4 (Dokumen)	78.631.250	4 (Dokumen)	124.999.875	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	9.798.025	2 (Dokumen)	60.472.240	0	0	4 (Dokumen)	70.270.265	4 (Dokumen)	225.835.590	20 %	121,9 %	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bag.Organisasi
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	252.882.718	5 (Dokumen)	38.989.500	5 (Dokumen)	49.999.800	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	6.838.700	1 (Dokumen)	14.143.125	0	0	4 (Dokumen)	20.981.825	4 (Dokumen)	135.020.195	16%	59,77%	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bag.Organisasi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	umlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	4 (Dokumen)	78.888.634.143	4 (Dokumen)	23.725.359.749	9 (Dokumen)	16.606.079.464	1 (Dokumen)	4.274.378.907	1 (Dokumen	4.577.745.458	1 (Dokumen	3.737.419.420	0	0	3 (Dokumen	12.589.543.785	3 (Dokumen	58.884.305.888	6,67%	74,64%	Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1812 (Orang)	77.123.129.414	1668 (Orang)	15.657.558.496	141 (Orang)	23.480.395.299	286 (Orang)	4.274.378.907	139 (Orang	4.500.366.458	141 (Orang	3.686.952.420	0	0	0 (orang)	12.461.697.785	0 (orang)	58.083.236.588	0%	75,31%	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepegawaian dan Keuangan pada Bag.Umum
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 (Dokumen)	1.486.594.598	4 (Dokumen)	193.921.000	4 (Dokumen)	220.853.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	77.379.000	1 (Dokumen)	45.292.000	0	0	3 (Dokumen)	122.671.000	3 (Dokumen)	672.374.500	15%	45,23%	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepegawaian dan Keuangan pada Bag.Umum
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 (Dokumen)	214.492.902	4 (Dokumen)	38.653.000	4 (Dokumen)	15.801.450	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	5.175.000	0	0	2 (Dokumen)	5.175.000	2 (Dokumen)	99.393.100	10%	46,34%	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepegawaian dan Keuangan pada Bag.Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 (Dokumen)	36.396.614	1 (Laporan)	5.821.850	1 (Laporan)	4.742.250	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	0	0	0 (Laporan)	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepegawaian dan Keuangan pada Bag.Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	13.999.932	12 (Laporan)	2.092.250	12 (Laporan)	1.488.250	3 (Laporan)	0	3 (Laporan)	0	3 (Laporan)	0	0	0	9 (Laporan)	0	9 (Laporan)	0	0%	0%	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepegawaian dan Keuangan pada Bag.Umum
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 (Dokumen)	14.020.682	1 (Dokumen)	1.998.500	1 (Dokumen)	2.079.500	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	6.089.000	0%	43,43%	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepegawaian dan Keuangan pada Bag.Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	42	237.541.916	42 (Orang)	169.863.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepegawaian dan Keuangan pada Bag.Umum
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 stel	237.541.918	1 (Paket)	169.863.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepegawaian dan Keuangan pada Bag.Umum
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	8 (Layanan)	8.072.489.251	8 (Layanan)	3,795,745.909	8 (Layanan)	4.336.366.508	8 (Layanan)	248.200.600	8 (Layanan)	808.913.090	8 (Layanan)	864.964.008	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	1.922.077.758	0 (Layanan)	12.639.364.048	0%	156,57%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 (Jenis)	190.723.635	2 (Paket)	39.926.000	2 (Paket)	97.028.716	2 (Paket)	19.811.200	2 (Paket)	5.719.000	2 (Paket)	26.723.500	0 (Paket)	0	0 (Paket)	52.253.700	0 (Paket)	52.253.700	0%	0%	Bagian Umum
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 (Jenis)	619.479.238	4 (Paket)	124.609.200	41(Paket)	174.874.875	1 (Paket)	0	1 (Paket)	44.150.250	1 (Paket)	44.657.285	0 (Paket)	0	0 (Paket)	88.807.535	0 (Paket)	464.185.860	0%	74,93%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 (Jenis)	236.507.871	1 (Paket)	105.642.025	2 (Paket)	122.142.400	2 (Paket)	896.900	2 (Paket)	15.727.560	2 (Paket)	30.170.513	0 (Paket)	0	0 (Paket)	46.794.973	0 (Paket)	326.264.508	0%	137,95%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5500 Orang	2.761.761.978	1 (Paket)	1.871.814.500	1 (Paket)	21.963.850.500	1 (Paket)	123.242.500	1 (Paket)	636.581.000	1 (Paket)	563.847.500	0 (Paket)	0	0 (Paket)	1.323.671.000	0 (Paket)	6.428.862.500	0%	237.78%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 (jenis)	1.914.165.039	2 (Paket)	814.016.415	2 (Paket)	635.422.250	2 (Paket)	0	2 (Paket)	34.606.000	2 (Paket)	38.667.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	73.273.000	0 (Paket)	2.221.482.929	0%	116,05%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 (Jenis)	389.232.067	8 (Paket)	84.960.000	8 (Paket)	118.471.000	8 (Dokumen)	16.060.000	8 (Dokumen)	22.890.000	8 (Dokumen)	22.890.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	61.840.000	0 (Dokumen)	338.965.000	0%	17,71%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 (Jenis)	533.419.060	3 (Laporan)	191.352.600	2 (Laporan)	598.976.767	1 (Laporan)	27.590.500	5 (Laporan)	35.869.500	6 (Laporan)	69.302.800	0	0	12 (Laporan)	132.762.800	12 (Laporan	995.107.750	20%	186,55%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 (Perdin)	1.427.200.342	12 (Laporan)	563.425.169	12 (Laporan)	625.600.000	3 (Laporan)	60.599.560	3 (Laporan)	13.369.780	3 (Laporan)	56.348.410	0	0	9 (Laporan)	13.317.750	9 (Laporan)	1.617.284.726	15%	113,32%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	6	64.000.000	6 (unit)	4.306.606.394	1 (unit)	398.098.957	2 (unit)	28.638.000	7 (unit)	184.870.500	9 (unit)	129.571.241	0	0	18 (unit)	343.079.741	18 (unit)	343.079.741	0%	0%	Bagian Umum
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 (Unit)	20.000.000	0	0	0	0	0)	0	13 (Unit)	14.690.000	20 (unit)	40.340.000	0	0	59 (unit)	55.030.000	59 (unit)	565.786.900	50,43 %	79,12%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 (Jenis)	20.000.000	0	0	0	0	0)	0	15 (unit)	7.050.000	28 (unit)	47.830.500	0	0	45 (unit)	56.380.500	45 (unit)	164.596.550	90%	63,29%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1	8.000.000	0	0	1 (Laporan)	398.098.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bangunan Lainnya																						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	8.000.000	22 (unit)	4.306.606.394	1 (Laporan)	628.211.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	7	11.899.251.840	7 (jasa)	2.331.002.184	7 (jasa)	2.653.215.250	7 (jasa)	455.359.290	7 (jasa)	503.478.408	7 (jasa)	596.310.970	0	1.555.148.668	0	0	0	8.464.058.733	0	71,13%	Kepala Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	7248 surat	177.290.831	12 (laporan)	12.335.500	12 (laporan)	14.000.000	3 (laporan)	1.150.000	3 (laporan)	1.550.000	3 (laporan)	1.150.000	0	0	9 (laporan)	3.850.000	9 (laporan)	3.850.000	0	0	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan pada Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1308 rekening	6.083.273.290	12 (Laporan)	1.100.190.296	12 (Laporan)	1.229.905.000	3 (Laporan)	217.252.253	3 (Laporan)	252.569.392	3 (Laporan)	277.795.726	0	0	0	747.617.371	0	747.617.371	0	0	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan pada Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	6 (Jenis)	215.870.799	4 (Laporan)	44.862.000	4 (Laporan)	59.994.216	1 (Laporan)	13.235.000	1 (Laporan)	1.960.000	1 (Laporan)	22.457.200	0	0	3 (Laporan)	37.652.200	3 (Laporan)	170.925.080	79,18%	15%	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan pada Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	600 Orang	5.422.816.920	12 (Laporan)	1.173.614.388	12 (Laporan)	1.349.316.034	3 (Laporan)	223.722.037	3 (Laporan)	247.399.016	3 (Laporan)	292.508.044	0	0	9 (Laporan)	763.629.097	9 (Laporan)	763.629.097	0	0	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan pada Bagian Umum
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pemeliharaan BMD	238	9.370.693.251	242 (unit)	7.737.255.744	238 (unit)	6.184.374.283	39 (unit)	173.840.212	65 (unit)	2.384.109.271	79 (unit)	685.239.602	0	0	183 (unit)	3.243.189.085	183 (unit)	24.106.722.243	76,89%	257,26%	Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Daerah																						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatann	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	149	715.066.288	49 (unit)	205.673.000	149 (unit)	156.000.000	26 (unit)	0	13 (unit)	14.690.000	20 (unit)	40.340.000	0	0	59 (unit)	55.030.000	59 (unit)	565.786.900	50,43%	79,12%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipeliharaa	50	260.070.519	50 (unit)	33.944.000	50 (unit)	74.276.444	2 (unit)	1.500.000	15 (unit)	7.050.000	28 (unit)	47.830.500	0	0	45 (unit)	56.380.500	45 (unit)	164.596.500	90%	63,29%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55	3.665.308.609	55 (unit)	3.665.308.609	55 (unit)	1.361.333.899	7 (unit)	125.747.737	18 (unit)	148.799.969	20 (unit)	186.773.970	0	0	45 (unit)	461.321.676	45 (unit)	461.321.676	0	0	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	23	3.657.235.735	27 (unit)	5.829.643.820	23 (unit)	3.173.040.100	3 (unit)	36.786.175	12 (unit)	2.162.261.802	7 (unit)	298.101.724	0	0	22 (unit)	2.497.149.701	22 (unit)	18.683.182.434	91,67%	510,86%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	1.073.012.100	10 (unit)	417.644.530	10 (unit)	1.419.723.840	1 (unit)	9.806.300	7 (unit)	51.307.500	4 (unit)	45.082.895	0	0	12 (unit)	106.196.695	12 (unit)	106.196.695	0	0	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Administrasi Keuangan dan Operasional	Jumlah Dokumen administrasi Keuangan dan Operasional	4 (Jenis)	5.405.352.742	4 (dokumen)	1.506.237.781	4 (Jenis)	4.679.742.772	4 (Jenis)	303.581.911	4 (Jenis)	474.191.545	4 (Jenis)	881.271.835	0	0	0	1.659.045.291	0	6.640.932.889	0	122,86%	Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KDH/WKDH																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah	14 (kali)	853.855.847	2 (orang)	364.846.781	2 (orang)	3.475.954.572	2 (orang)	222.747.961	2 (orang)	47.954.965	2 (orang)	23.910.556	0	0	0	294.613.482	0	294.613.482	0	0	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan pada Bagian Umum
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah yang Disediakan	2 (paket)	306.721.269	2 (paket)	204.275.000	2 (paket)	204.588.200	2 (paket)	9.898.700	2 (paket)	90.387.300	2 (paket)	102.879.300	0	0	0	203.165.300	0	203.165.300	0	0	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan pada Bagian Umum
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check UpKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 (kali)	213.098.646	2 (orang)	53.216.000	2 (orang)	56.000.000	2 (orang)	9.935.250	2 (orang)	3.849.280	2 (orang)	16.702.000	0	0	0	30.486.530	0	190.717.780	0	89,5%	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan pada Bagian Umum
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	210 kali	4.031.676.980	2 (orang)	883.900.000	2 (orang)	943.200.000	1 (orang)	61.000.000	2 (orang)	332.000.000	2 (orang)	329.000.000	0	0	0	722.000.000	0	722.000.000	0	0	Bagian Umum
		Keg. Fasilitasi Kerumahtanggaan	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	48 orang	1.237.620.470	2 (orang)	464.737.800	48 (orang)	513.731.000	12 (orang)	43.489.500	12 (orang)	110.373.700	12 (orang)	150.608.400	0	0	36 (orang)	304.471.600	36 (orang)	1.597.059.900	1800%	129,04	Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sekretariat Daerah																						
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	2 (paket)	1.237.620.470	2 (paket)	464.737.800	2 (paket)	513.731.000	2 (paket)	43.489.500	2 (paket)	110.373.700	2 (paket)	148.998.400	0	0	0	302.861.600	0	1.595.449.900	0	128,91%	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum
		Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan keprotokoleran dan Pendampingan	150 Kegiatan	7.763.874.467	168 Kegiatan	2.651.411.016	150 Kegiatan	2.451.500.000	19 Kegiatan	370.793.485	39 Kegiatan	286.938.138	42 Kegiatan	111.884.864	0	0	100	769.616.487	100	8.009.534.924	66,67%	103,16%	Kepala Bagian Umum
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	2.156.622.703	4 Laporan	612.631.180	4 Laporan	478.100.000	1 Laporan	121.592.745	1 Laporan	242.755.258	1 Laporan	97.334.864	0	0	3 Laporan	178.500.625	1 Laporan	1.989.096.874	60%	92,23%	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada Bag.Umum
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi KomunikasiPimpinan	4 (Laporan)	5.195.451.507	4 (Laporan)	2.038.779.836	4 (Laporan)	1.973.400.000	1 (Laporan)	249.200.740	1 (Laporan)	242.755.258	1 (Laporan)	97.334.864	0	0	3 (Laporan)	589.290.862	3 (Laporan)	6.018.613.050	60%	279,08%	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada Bag.Umum
		Penataan Organisasi	Tingkat Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat	81 (nilai)	7.861.823.075	82,05 (point)	2.034.203.083	82,3 (point)	2.506.488.522	0	53.410.620	0	211.079.064	0	381.023.365	0	0	0	645.513.049	0	7.024.480.276	0	89,35%	Kepala Bagian Organisasi
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan danAnalisis Jabatan	6	2.605.105.031	6 Dokumen	525.907.177	6 Dokumen	560.099.100	3 Dokumen	3.090.000	1 Dokumen	26.681.000	1 Dokumen	134.924.980	0	0	5 Dokumen	164.695.980	5 Dokumen	1.806.469.951	16,67%	69,34%	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publikdan Tata Laksana	1	2.515.543.002	1 (Laporan)	592.911.906	1 (Dokumen)	836.265.639	0	22.237.620	0	160.358.564	0	21.778.500	0	0	0	204.374.684	0	2.074.873.910	0	82,48%	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	1.413.099.976	1 Dokumen	785.196.200	1 Dokumen	945.909.439	0	22.683.000	0	14.436.000	0	119.445.875	0	0	0	156.564.875	0	156.564.875	0	0	Bagian Organisasi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 (Dokumen)	1.413.099.976	1 (Dokumen)	130.187.800	1 (Dokumen)	164.214.344	0	5.400.000	1	9.603.500	0	104.248.500	0	0	1 (Dokumen)	119.252.000	1 (Dokumen)	119.252.000	0	0	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bag.Organisasi

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemerintah Daerah																						
	Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rancangan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	33	167.907.326.036	5 (Angka)	0	32 (Kebijakan)	39.866.332.920	6 (Kebijakan)	525.625.000	0 (Kebijakan)	10.656.721.909	0	13.971.540.709	0	0	6 (Kebijakan)	25.153.887.618	6 (Kebijakan)	25.153.887.618	18,18%	0%	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			prosentase rancangan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah (%)	88	11.070.236.016	96,43 %	37.964.763.627	96,6%	0	100%	0	90,91 %	0	100%	0	0	0	0	0	0	110.852.624.416	0	307,5%	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Rancangan kebijakan di bidang Kewilayahan otonomi daerah dan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah	90	8.187.446.984	64,29 %	1.186.512.519	90%	1.185.149.050	0	352.350.000	100%	143.131.479	100%	40.186.720	0	0	0	535.668.199	0	4.480.806.402	0	54,73%	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	740.920.435	1 (Dokumen)	99.597.250	1 (Dokumen)	100.000.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	9.360.000	1 (Dokumen)	21.249.000	0 (Dokumen)	0	0	30.609.000	0	348.935.160	0	47,09	Perencana Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKewilayahan	1	3.605.570.593	1 (Dokumen)	471.985.000	1 (Dokumen)	480.649.050	1 (Dokumen)	352.350.000	1 (Dokumen)	48.527.500	1 (Dokumen)	9.000.000	0	0	0	409.877.500	0	2.010.551.250	0	55,76%	kepala sub bagian administrasi kewilayahan pada bagian tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	3.840.955.956	3 (Dokumen)	614.930.269	3 (Dokumen)	604.500.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	85.243.979	3 (Dokumen)	9.937.720	0	0	0	95.181.699	0	2.121.319.992	0	55,23%	Perencana Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kegiatan keagamaan dan kesra yang terlaksana dengan baik	88	159.719.879.052	76,92 %	33.835.398.753	1 (Dokumen)	3.566.452.920	28,57 %	0	42,85 %	9.968.440.995	9,52%	13.365.275.000	0	0	80,94 %	23.333.715.995	80,94%	126.392.666.115	91,985	79,13%	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi Pengelolaan bina Mental Spiritual	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.750.000.000	23.427.417.528	1 (Dokumen)	8.088.663.130	1 (Dokumen)	22.919.600.000	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	6.446.263.495	0 (Dokumen)	30.600.000	0	0	1 (Dokumen)	6.476.863.495	1 (Dokumen)	33.357.451.269	20%	142,39%	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	9 (Lembaga)	23.745.984.816	1 (Dokumen)	159.164.000	1 (Dokumen)	3.566.452.920	1 (Dokumen)	0	0	3.520.000.000	0	6.075.000	0	0	1 (Dokumen)	3.526.075.000	1 (Dokumen)	12.753.867.846	20%	53,71%	Kepala Sub Bagian kesejahteraan Rakyat pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	9030 Guru	112.546.476.708	1 (Dokumen)	22.889.205.000	1 (Dokumen)	22.919.600.000	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.177.500	0	13.328.600.000	0	0	1 (Dokumen)	13.330.777.500	1 (Dokumen)	80.281.347.000	20%	71,33%	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah penyusunan produk hukum dan peningkatan kesadaran hukum melalui publikasi dan pelayanan hukum	339	11.070.236.016	406 (Dokumen)	2.942.852.355	339 (Dokumen)	3.324.475.000	78 (Dokumen	173.275.000	76 (Dokumen)	545.149.435	68 (Dokumen)	566.078.989	0	0	222 (Dokumen)	1.284.503.424	222 (Dokumen)	10.239.589.423	13.1 %	92.5 %	Kepala Bagian Hukum
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320	5.581.798.566	286 (Dokumen)	1.283.677.165	230 (Dokumen)	874.475.000	67 (Dokumen)	12.900.000	62 (Dokumen	448.519.935	64 (Dokumen)	138.172.519	0	0	193 (Dokumen)	599.592.454	193 (Dokumen)	4.235.917.243	12.06 %	75.89 %	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	2.130.537.497	7 (Kasus)	418.368.870	4 (Kasus)	950.000.000	4 (Kasus)	0	1 (Kasus)	71.384.000	1 (Kasus)	120.722.600	0	0	6 (Kasus)	192.106.600	6 (Kasus)	1.558.167.362	150 %	73.13 %	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	335	3.357.899.953	241 (Dokumen)	1.240.806.320	355 (Dokumen)	1.500.000.000	78 (Dokumen)	160.375.000	76 (Dokumen)	25.245.500	71 (Dokumen)	256.723.735	0	0	225 (Dokumen)	442.344.235	225 (Dokumen)	4.395.044.683	13.43 %	130.89 %	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD		Presentase Peningkatan Kontribusi BLUD dan BUMD Terhadap PAD	1,15	0	-11,02 %	1.634.198.574	1.05%	1.587.105.830	0	127.192.000	0	81.225.460	0	176.390.171	0	0	0	384.807.631	0	4.251.733.548	0	9,67%	Sekretaris Daerah
sE		**Perekonomian dan Pembangunan**	Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam	86,90	41.043.424.936	87,88 %	1.634.198.574	88.5 (%)	1.587.105.830	33.34 (%	127.192.000	33.34 (%)	81.225.460	16.67 (%)	176.390.171	0	0	83.35 (%	384.807.631	83.35 (%)	4.694.678.099	99.23 %	10.68 %	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
			Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan	92	0	95%	0	95%	0	24.99 (%)	0	24.99 (%)	0	24.99 (%)	20	0	0	74.97 (%)	0	74.97 (%)	0	81.49 %	0	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase paket pengadaan yang selesai diproses melalui UKPBJ	92	3.166.271.053	99,8%	932.845.500	92%	771.100.000	0,77%	97.750.000	0	37.955.460	20.33 (%)	57.411.759	0	0	0	193.117.219	0	2.523.337.925	0	79.69 %	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	1.690.200.691	4 (Dokumen)	225.057.769	4 (Dokumen)	271.100.000	1 (Dokumen)	51.128.500	1 (Dokumen)	25.928.856	1 (Dokumen)	22.420.500	0	0	3 (Dokumen)	99.477.856	3 (Dokumen)	1.007.258.814	15 %	59.59 %	Kepala sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada bagian pengadaan barang/jasa
		Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	1.186.865.214	1 (Dokumen)	509.094.141	1 (Dokumen)	250.000.000	0	26.570.000	0	10.526.604	0	22.178.500	0	0	0	59.275.104	0	1.121.509.622	0	94.49 %	Kepala sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada bagian pengadaan barang/jasa
		Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	289.205.148	220 (Orang)	198.693.590	50 (Orang)	250.000.000	0	20.051.500	50 (Orang)	1.500.000	50 (Orang)	10.156.759	0	0	0	31.708.259	0	391.913.489	0	518.25 %	Kepala sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada bagian pengadaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																								barang/jasa
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	jumlah koordinasi dan fasilitasi kebijakan perekonomian	289 kali	4.069.559.474	92 kali	372.492.754	63 kali	394.300.600	15 (Kali)	9.595.500	12 (kali)	21.528.000	18 (kali)	59.656.000	0	0	45 (kali)	90.779.500	45 (kali))	1.112.270.675	15,57 %	27.33 %	Kepala Bagian Perekonomian, SDA, dan AP
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	1.025.705.480	2 Dokumen	154.987.754	2 Dokumen	174.285.850	0 Dokumen	2.585.000	0 Dokumen	16.359.000	0 Dokumen	22.060.000	0	0	0	41.004.500	0	41.004.000	0	0	Bagian Perekonomian, SDA, dan AP
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	2.796.835.960	1 (Laporan)	181.626.000	1 (Laporan)	170.014.750	0	7.010.500	0	5.169.000	0	27.099.000	0	0	0	39.278.500	0	467.768.511	0	16,72%	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, SDA DAN AP
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 kali	247.018.034	1 (Dokumen)	35.879.000	1 (Dokumen)	50.000.000	0	0	0	0	0	10.497.000	0	0	0	10.497.000	0	93.338.500	0	146,53%	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, SDA DAN AP
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	umlah koordinasi dan fasilitasi kebijakan sumber daya alam	55 kali	36.973.865	71 kali	152.856.570	55 kali	261.132.730	13 (Kali)	10.945.000	15 (Kali)	19.632.000	19 (Kali)	41.881.652	0	0	47 (Kali)	72.458.652	47 (Kali)	573.084.958	85,45%	1,55%	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	30 kali	35.981.172.994	2 dokumen	87.103.250	2 dokumen	125.000.000	0	0	0	5.233.000	0	26.131.852	0	0	0	31.364.852	0	31.364.852	0	0	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan AP
		Koordinasi,	Jumlah Dokumen	20 kali	694.646.645	1	30.954.820	1	70.000.	0	10.945.000	0	3.073.000	0	4.124.125	0	0	0	18.142.125	0	195.912.425	0	0	Analis Kebijakan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			Dokumen		Dokumen	000															Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, SDA dan AP
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	75.000.000	1 (Dokumen)	34.798.500	1 (Dokumen)	66.132.730	0	0	0	11.326.000	0	11.625.675	0	0	0	22.951.675	0	22.951.675	0	0	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, SDA dan AP
		Pelaksanaan administrasi pembangunan	Persentase perangkat daerah yangmenyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap	92	700.451.697	95,24 %	176.003.750	92%	160.572.500	51,02 %	8.901.500	79,59 %	2.110.000	77,55 %	17.440.760	0	0	0	28.452.260	0	485.984.541	0	69,38%	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	105.924.284	1 Dokumen	31.588.250	1 (Dokumen)	31.682.000	0	8.901.500	0	0	1 (Dokumen)	1.979.750	0	0	1 (Dokumen)	10.881.250	1 (Dokumen)	72.099.250	100 %	239.12 %	Perencana Ahli Muda pada Bagian pengadaan Barang/ Jasa
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	375.096.794	4 Laporan	80.493.500	4 Laporan	70.467.500	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	2.110.000	1 (Laporan)	3.473.750	0	0	3 (Laporan)	5.583.750	3 (Laporan)	234.680.250	18,75%	62,57%	Perencana Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Pengelolaan Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	12	219.430.619	12 (Lapor	63.922.000	12 (Lapor	58.423.000	3 (Lapor	0	3 (Lapor	0	3 (Lapor	11.987.260	0	0	9 (Lapor	11.987.260	9 (Lapora	179.205.041	15%	81,67%	Perencana Ahli Muda pada Bagian

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			an)		an)		an)		an)		an)				an)		n)				Pengadaan Barang/Jasa
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) program dan 5 (lima) indikator program yang ditetapkan seluruhnya tercapai dan bahkan melampaui target kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah rancangan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (Angka)
   Target: 31 Realisasi: 59 (190,32%)
   Indikator ini diukur dari kebijakan yang dikeluarkan oleh bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah dengan serangkaian program, peraturan, dan tindakan yang dirumuskan serta dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai dua tujuan utama : meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperbaiki kondisi kehidupan Masyarakat.
2. Prosentase rancangan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah (%)
   Target: 100 Realisasi: 100 (100%)
   Dengan capaian 100% ini membuktikan komitmen kuat dari pemerintah daerah, yang tidak hanya sekadar mengesahkan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya, anggaran, dan personel yang diperlukan tersedia. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala adalah kunci untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mengambil langkah korektif dengan cepat. Pembangunan daerah yang efektif dimulai dari perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat. Di antara kedua tahap ini, terdapat proses krusial yang menentukan keberhasilan yaitu mengubah rancangan kebijakan menjadi kebijakan daerah yang sah dan berlaku.
3. Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam (%)
   Target: 86,8 Realisasi: 87,5 (100%)
   Perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam merupakan dua pilar dalam pembangunan suatu daerah. Keduanya saling terhubung erat; kebijakan yang memadukan keduanya secara harmonis dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mengukur keberhasilan dalam merumuskan dan memfasilitasi kebijakan ini tidaklah mudah. Dengan capaian

melebihi target yang telah ditetapkan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan inovasi dalam proses kerja. Tidak hanya fokus pada "apa yang harus dikerjakan," tetapi juga "bagaimana cara mengerjakannya dengan lebih baik."

4. Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan (%) Target: 95 Realisasi: 100 (105,26%)
   Administrasi pembangunan adalah Merencanakan, dan Melaksanakan Kebijakan Program Pembangunan, serta memberi petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, pembinaan SDM dan mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan Pembangunan, memastikan setiap kebijakan diambil secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Merumuskan dan memfasilitasi kebijakan dalam bidang ini menjadi tugas krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah proyek. Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan adalah indikator kunci yang menunjukkan seberapa produktif dan responsif sebuah instansi dalam menciptakan landasan kerja yang kuat. Capaian dengan persentase melebihi target yang ditentukan adalah cerminan dalam rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan berdampak langsung pada kecepatan dan efektivitas proyek-proyek pembangunan. Kebijakan yang jelas dan terfasilitasi dengan baik akan mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko kesalahan. Pada akhirnya, ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
5. Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)
   Target: 82,25 Realisasi: 82,3 (100,06%).
   Penilaian AKIP dilakukan secara berkala dan mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, perencanaan kinerja instansi dinilai dari seberapa jelas target dan indikator yang ditetapkan. Apakah target tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah? Apakah indikatornya dapat diukur dengan baik? Kedua, pengukuran kinerja mengevaluasi bagaimana instansi memantau kemajuan pencapaian target. Apakah data yang dikumpulkan akurat dan valid? Ketiga, pelaporan kinerja menilai seberapa transparan dan akuntabel laporan yang

dibuat. Apakah laporan tersebut mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan? Terakhir, evaluasi internal melihat seberapa jauh instansi melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk capaian Sekretariat Daerah adalah 82,3 atau berkatagori A (Sangat Baik) Menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah memiliki sistem akuntabilitas yang solid, mampu merencanakan, melaksanakan dan melaporkan program dengan efektif. Ini mencerminkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.1 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN.

Pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah dapat merealisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1

No	Program/Kegiatan	Kinerja Porgram dan Kegiatan			
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rancangan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (Angka)	31	59	190,32
		Prosentase rancangan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah (%)	100	100	100
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam (%)	86,8	87,5	100,8
		Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan (%)	95	100	105,26
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)	82,25	82,3	100,06

2.1.2 IMPLIKASI YANG TIMBUL TERHADAP CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

1) Target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dengan 2 (dua) indikator yaitu Jumlah rancangan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat target pada akhir renstra sebesar 33 kebijakan dengan realisasi di tahun 2024 yaitu 59 kebijakan, sedangakan Prosentase rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah dengan target akhir renstra sebesar 88% dengan realisasi di tahun 2024 yaitu 100% kebijakan.
2) Target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan yang direncanakan dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam target pada akhir renstra sebesar 86,10 dengan realisasi di tahun 2024 yaitu 87,5 sedangkan indikator Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan target pada akhir renstra sebesar 92 dengan realisasi di tahun 2024 yaitu 100.
3) Target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah target pada akhir renstra sebesar 81,45 dengan realisasi di tahun 2024 yaitu 82,3.

2.1.3 KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERSEBUT

a. Kebijakan/Tindakan Perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor program/kegiatan yang tidak mencapai target:
   1. Menganalisa secara seksama target kinerja yang ingin dicapai, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, berdasarkan analisa kebutuhan prioritas sehingga dapat terukur.
   2. Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, di masa pandemi ini capaian target kinerja dapat terealisasikan dengan menerapkan protokol kesehatan.
   3. Meningkatkan disiplin kinerja aparatur sehingga kinerja dapat terealisasi.

b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
   1. Tetap konsistensi terhadap perencanaan dalam memenuhi target kinerja dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban.
   2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak lain, sebagai bahan analisa dalam menentukan target kinerja yang akan dicapai, sehingga disesuaikan dengan analisa kebutuhan di lapangan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Fungsi Bagian yang terdapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban:

a) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta fasilitasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama serta Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Bagian Tata Pemerintahan diwujudkan dengan kegiatan berupa penyusunan LKPJ Bupati, LPPD SPM, Pelaksanaan Rapat koordinasi dan Evaluasi Pejabat Daerah serta dialog audiens, Fasilitasi rapat eksekutif dan legislatif DPRD, Penyusunan jawaban Pemerintahan pada rapat paripurna DPRD, Kerjasama antar pemerintah daerah, ketuntasan batas kewilayahan, fasilitasi dan monev hibah, Pelaksanaan Hari besar Islam, Bantuan Insentif guru TPQ, Bantuan Hibah kepada Badan, Lembaga, Masjid, Mushola, Ponpes, TPQ, RA, Madin, MA/MI/MTs, dan Yayasan.

b) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum.

Harmonisasi peraturan merupakan proses penyesuaian dan sinkronisasi rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, yang bersifat khusus dan dengan peraturan per undang-undangan yang lebih tinggi. Proses ini dilakukan agar peraturan yang dibentuk tidak bertentangan, tumpang tindih, atau menimbulkan kesenjangan, demi terciptanya suatu sistem hukum yang terintegrasi, konsisten, dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Di Tahun 2025 sudah ada tiga produk hukum yang dilakukan pengharmonisasian dan empat produk hukum sudah pengajuan harmonis ke Kementrian hukum namun masih menunggu jadwal pengharmonisasian dari Kementrian Hukum.

c) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro serta sumber daya alam.

Berbagai penanganan/capaian yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam menunjang fungsi bagian. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pengendalian inflasi daerah dan telah membentuk Tim Pengendali inflasi Daerah (TRIPD) Kabupaten Tuban dengan tugas menajga angka inflasi atau ahrga barang/jasa di Kabupaten Tuban tetap terkendali, Pembinaan

terhadap BUMD dan BLUD dalam tata kelola BUMD termasuk dalam perbaikan manajemen, organisasi dan monitoring evaluasi secara berkala, Melaksanakan fasilitasi dan monitoring pada pertambangan/eksploitasi sumber daya alam/ kekayaan alam khususnya pada penambangan tanpa izin (PETI), melaksanakan koordinasi kendala dan realisasi kegiatan fisik non fisik , melakukan monitoring antara progres dan waktu dalam kontrak, melaksanakan fasilitasi dan desk laporan RFK.

d) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta fasilitasi di bidang pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah memfasilitasi pendaftaran pelaku usaha pada Ssitem Pengadaan Secara Elektronik, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terkait Katalog Elektronik versi 6, melaksanakan bimbingan teknis terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan untuk semua OPD, memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan melakukan pendampingan dan konsultasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

e) Bagian Umum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan program, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang tata usaha, kepegawaian Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol pimpinan serta keuangan, lingkup Sekretariat Daerah.

f) Bagian Organisasi mempunyai tugas perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tata Laksana dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Dalam capaian kinerja bagian organisasi menyelenggarakan penyesuaian Pemetaan Jabatan dengan melaksanakan evaluasi Jabatan dan Analisis Jabatan, melakukan kajian-kajian dan koordinasi dalam penyelesaian tumpang tindih kewenangan antar

perangkat daerah, dan penyesuain terhadap Peraturan Bupati terkait Tugas Pokok Fungsi perangkat daerah. Dalam pencapaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi juga Bagian Organisasi terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua perangkat daerah.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD dan P-RKPD sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan konsisten untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026 adalah seperti pada Tabel 2.2. dan pada 2025 Capaian kinerja pelayanan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 terdapat Indikator Kinerja Utama terbaru. Yaitu Indeks Akses Daerah (IKAD) dengan targetsebesar 4,08 (Empat koma Nol Delapan), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan target sebesar 67,5 (Enam puluh tujuh koma lima), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah dengan target sebesar 88,7 (Delapan puluh delapan koma Tujuh).

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1.	Jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan hidup antar umat beragama	-	-	30	31	32	33	5	0	33	-	Perhitungan capaian Tahun 2024 dilakuka di akhir tahun
2.	Persentase kebijakan yang selaras	-	-	100	100	100	100	100	0	100	-	Perhitungan capaian Tahun 2024 dilakuka di akhir tahun
3.	Persentase Peningkatan Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	-	-	0,85	0,95	1,05	1,15	4,76	0	1,11	1,16	Perhitungan capaian Tahun 2024 dilakuka di akhir tahun
4.	Nilai AKIP	-	-	72,24	76,28	78,36	80,15	80,13	0	83,8	84,55	Perhitungan capaian Tahun 2024 dilakuka di akhir tahun

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban P-APBD 2025

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	-	-	4,08	4,11	4,14	4,17	0	0	4,19	4,21	Perhitungan capaian Tahun 2025 dilakukan di Akhir Tahun
2.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	-	-	67,5	70	72,5	75	0	0	77,5	80	Perhitungan capaian Tahun 2025 dilakukan di Akhir Tahun
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	88,7	89,4	90,1	90,8	0	0	91,3	9,8	Perhitungan capaian Tahun 2025 dilakukan di Akhir Tahun

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku institusi yang memberikan supporting system kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Untuk itu Sekretariat Daerah harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dikategorikan baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II (dua) menunjukkan program kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan.
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Pengertian masalah/hambatan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Permasalahan/hambatan yang terdapat di Sekretariat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
    1. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:
        a. Belum optimalnya manajemen Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas; dan;
        b. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.
    2. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah perlu ditingkatkan;
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah belum optimal;
c. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah perlu ditingkatkan;
d. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan belum optimal;
e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat masih perlu ditingkatkan;
f. Penataan Administrasi Pemerintahan belum optimal;
g. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan perlu ditingkatkan;
h. Penataan Organisasi perlu ditingkatkan;
i. Fasilitasi Bantuan Hukum belum optimal;
j. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian perlu ditingkatkan;
k. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam perlu ditingkatkan.

3. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:
   a. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya;
   b. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   c. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah;
   d. Masih terbatas kepada penyajian laporan kinerja ruang lingkup administrasi kegiatan dan anggaran;
   e. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal;
   f. Belum semua Perangkat Daerah memahami mekanisme kerjasama daerah;
   g. Informasi yang diberitakan oleh media masa kurang berimbang;
   h. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal;
   i. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia;
   j. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
   k. Perlunya sistem pelaporan keuangan dan kinerja yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah; dan

l. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal.

4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
   - Visi Kepala Daerah: Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya dan Berkelanjutan;
   - Misi Kepala Daerah:
     - Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan;
     - Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas Peternakan, Perkebunan), (Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
     - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal;
     - Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif.
     - Mengacu pada misi ke 4 (empat) tersebut diatas, maka ada beberapa faktor pendorong yang sangat dimungkinkan untuk pencapaian misi tersebut melalui visi dan misi yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah yaitu :
       1. Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik;
       2. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
       3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
       4. Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis.

5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga daerah adalah faktor internal dan eksternal

Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban antara lain:

1. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien;
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; dan
4. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban adalah:

1. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;
3. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral pemerintah pusat sehingga berdampak ke pemerintah daerah.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 2025 – 2029, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Restrukturisasi organisasi dan manajemen publik;
3. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah;
5. Manajemen keuangan dan aset daerah.
6. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah; dan
7. Penataan pedagang kaki lima (PKL) pada ruang publik.

Adapun penjabaran secara umum 7 (tujuh) isu-isu strategi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

   Birokrasi pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, system pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang "ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

   Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

   Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana prasarana, mekanisme/prosedur, Sumber Daya Manusia, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

4. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

   Tuntutan warga Kabupaten terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

5. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

   Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

   Sistem manajemen keuangan daerah merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

   Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lingkup Sekretariat Daerah (Setda) merupakan salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini dikarenakan Setda memiliki peran sentral dalam koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program lintas perangkat daerah, termasuk dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan PAD bukan hanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan Setda ke depan, dengan mengedepankan inovasi, efisiensi, serta sinergi antarunit kerja dan instansi terkait.

6. Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruang publik menjadi salah satu isu strategis penting yang memerlukan perhatian khusus dari Sekretariat Daerah (Setda). Aktivitas PKL, meskipun memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat,seringkali menimbulkan permasalahan tata ruang, kebersihan, ketertban umum, dan estetika kota. Olah karena itu, peran setda sebagai coordinator lintas perangkat daerah sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara pemberdayaan ekonomi Masyarakat kecil dan penataan ruang public yang tertib dan berkelanjutan. Upaya penanganan PKL tidak hanya berorientasi pada penertiban, ettapi juga harus mengedepankan pendekatan humanis, kolaboratif, serta berbasis data dan peta zonasi yang jelas. Dengan

demikian, ruang publik dapat difungsikan secara optimal sesuai peruntukannya, tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi para pelaku usaha informal.

6. Formulasi Isu-Isu Penting

Formulasi isu-isu penting dalan hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025. Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah antara lain:

1) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* dan otonomi daerah yang bertanggung jawab;
2) Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas;
3) Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4) Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan efisiensi dan efektifitas kinerja serta peningkatan pendapatan daerah.

2.4 *REVIEW* TERHADAP RANCANGAN AWAL P – RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. P- RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan Tahunan Daerah dengan berpedoman pada perencanaan ditingkat atas. Secara subtansi P-RKPD digunakan kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ditetapkan berpijak pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun sebelumnya serta memperhatikan isu strategis yang mendesak untuk segera dilaksanakan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk masa lima Tahun.

Peran strategis Kabupaten Tuban, menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun

nasional. untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Program-program yang tercantum dalam P-RKPD ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode Tahun 2025. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana kerja Perangkat Daerah oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada Tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review RKPD menunjukan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) program, 18 (Delapan belas) kegiatan dan 60 (Enam puluh) sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Adapun tabel review terhadap rancangan awal RKPD Sekretariat Daerah Tuban Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.

Table 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Kab Tuban, Kutorejo**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**83,05**	**47.544.849.346**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Kab Tuban, Kutorejo**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**83,05**	**47.544.849.346**	
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	9 Dokumen	122.043.559	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	9 Dokumen	122.043.559	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	94.953.634	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	94.953.634	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	27.089.925	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	27.089.925	
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	20.901.260.161	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	20.901.260.161	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 orang/bulan	20.690.437.161	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 orang/bulan	20.690.437.161	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	205.612.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	205.612.500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	5.210.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	5.210.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	23 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	23 Laporan	0	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD			Semesteran SKPD		SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	1 Layanan	12.688.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	1 Layanan	12.688.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	12.688.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	12.688.000	
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	8 Jenis	4.385.405.358	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Layanan Administrasi Umum	8 Jenis	4.385.405.358	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	97.028.716	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	97.028.716	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.874.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.874.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	122.142.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	122.142.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.764.586.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.764.586.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	529.417.075	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	529.417.075	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	8 Dokumen	92.469.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	8 Dokumen	92.469.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	276.087.567	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	276.087.567	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	352.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	352.800.000	
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	2 Jenis	1.131.740.135	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	2 Jenis	1.131.740.135	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	59.994.216	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	59.994.216	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.339.231.416	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.339.231.416	
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	5 Jenis	8.720.558.306	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	5 Jenis	8.720.558.306	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	149 Unit	184.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	149 Unit	184.000.000	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan dibayarkan Pajaknya								
	Pemeliharaan Mebel	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	274.276.444	Pemeliharaan Mebel	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	274.276.444	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	205 Unit	1.311.333.899	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	205 Unit	1.311.333.899	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	5.539.624.123	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	5.539.624.123	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.411.323.840	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.411.323.840	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	4 jenis	4.886.542.772	Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	4 jenis	4.886.542.772	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	3.475.954.572	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	3.475.954.572	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	204.588.200	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	204.588.200	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	56.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	56.000.000	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	1.150.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.150.000.000	
	Keg. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan fasilitasi kerumahtangga n sekretariat daerah	12 Laporan	513.731.000	Keg. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan fasilitasi kerumahtangga n sekretariat daerah	12 Laporan	513.731.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	513.731.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	513.731.000	
	Keg. Penataan Organisasi	Kab Tuban, Kutorejo	Nilai Kematangan organisasi (Versi Menpan) % OPD yang menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan persentase OPD yang memenuhi	100% 93,33% 99,1 Nilai	1.854.812.885	Keg. Penataan Organisasi	Kab Tuban, Kutorejo	Tingkat Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat	100% 93,33% 99,1 Nilai	1.854.812.885	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kepatuhan dalam persyaratan penilaian IPP								
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	409.336.300	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	409.336.300	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	777.194.635	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	777.194.635	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	522.522.675	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	522.522.675	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Kab Tuban, Kutorejo	Persentase Rancangan kebijakan di bidang Kewilayahan otonomi daerah dan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah	91%	1.194.050.693	Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Kab Tuban, Kutorejo	Persentase Rancangan kebijakan di bidang Kewilayahan otonomi daerah dan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah	91%	1.194.050.693	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	91.714.812	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	91.714.812	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	533.832.225	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	533.832.225	
	Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab Tuban, Kutorejo	Prosentase kegiatan keagamaan dan kesra yang	86,96%	34.821.115.514	Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab Tuban, Kutorejo	Prosentase kegiatan keagamaan dan kesra yang	86,96%	34.821.115.514	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			terlaksana dengan baik					terlaksana dengan baik			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina mental spritual	12 Dokumen	8.388.136.470	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina mental spritual	12 Dokumen	8.388.136.470	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	7 Dokumen	3.542.625.004	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	7 Dokumen	3.542.625.004	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian Penduduk dan KB					Penduduk dan KB			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,	14 Dokumen	22.890.354.040	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,	14 Dokumen	22.890.354.040	
			Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
	Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Presentase kebijakan yang terbit sesuai dengan perencanaan	100%	2.429.481.308	Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Presentase kebijakan yang terbit sesuai dengan perencanaan	100%	2.429.481.308	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	230 Dokumen	837.277.204	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	230 Dokumen	837.277.204	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	798.280.184	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	798.280.184	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	226 Dokumen	793.923.920	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	226 Dokumen	793.923.920	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Kab Tuban, Kutorejo**	**Presentase realisasi kontribusi BUMD terhadap PAD Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)**	**1,06 89,01% angka**	**1.238.722.417**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kab Tuban, Kutorejo**	**Presentase realisasi kontribusi BUMD terhadap PAD Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)**	**1,06 89,01% angka**	**1.238.722.417**	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Rumusan Kebijakan	3 Kebijakan	412.848.300	Keg. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Rumusan Kebijakan	63 kali	412.848.300	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	186.070.925	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	186.070.925	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	189.660.375	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	189.660.375	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	37.117.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	37.117.000	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan administrasi pembangunan yang tersusun sesuai dengan ketentuan	1 Laporan	85.408.837	Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab Tuban, Kutorejo	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap	1 Laporan	85.408.837	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	22.443.950	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	22.443.950	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	40.041.262	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	40.041.262	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	12 Laporan	22.923.625	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	22.923.625	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Pembangunan								
4	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Tuban, Kutorejo	Level/Tingkat kematangan UKPBJ	40 Level	548.622.500	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Tuban, Kutorejo	Level/Tingkat kematangan UKPBJ	40 Level	548.622.500	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	185.300.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	185.300.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	186.585.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	186.585.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	176.737.500	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	176.737.500	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Rumusan kebijakan bidang sumber daya alam	3 Kebijakan	191.842.780	Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Rumusan kebijakan bidang sumber daya alam	3 Kebijakan	191.842.780	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab Tuban, Kutorejo	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	85.238.140	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan dan Perikanan	Kab Tuban, Kutorejo	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	85.238.140	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	64.269.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	64.269.000	

No	Rancangan P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	42.335.640	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	42.335.640	
TOTAL					**83.531.942.970**	**TOTAL**				**83.531.942.970**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan Sumber Daya Manusia (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap Tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapainnya dalam tahun tertentu.

Tabel 2.5.1

Usulan Program & Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	N	**I**	**H**	**I**	**L**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya pencapaian kinerja Tahun 2025 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, maka operasionalisasi pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang akan diuraikan penjelasannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SEKRETARIAT DAERAH				**86.894.766.379**	**89.411.641.334**	**87.228.219.278,00**	**333.452.899,00**				**79.028.204.020,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**86.894.766.379**	**89.411.641.334**	**87.228.219.278,00**	**333.452.899,00**				**79.028.204.020,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**86.894.766.379**	**89.411.641.334**	**87.228.219.278,00**	**333.452.899,00**				**79.028.204.020,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	82.50 Poin	83,05 11,72 Poin Angka	45.441.302.629,00	47.958.202.584,00	47.544.849.346,00	- 2.199.126.439,00				**43.242.176.190,00**
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun*	9 Dokumen	9 Dokumen	175.000.000,00	174.999.675,00	122.043.559,00	-52.956.441,00				175.000.000
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	124.999.875,00	94.953.634,00	-30.046.366,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		125.000.000,00
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	49.999.800,00	27.089.925,00	-22.910.075,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		50.000.000,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun*	4 Dokumen	9 Laporan	22.184.541.987,00	23.725.359.749,00	20.901.260.161,00	-1.283.281.826,00				22.188.442.987,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	141 Orang/ bulan	135 Orang/ bulan	21.939.577.537,00	23.480.395.299,00	20.690.437.161,00	-1.249.140.376,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21.939.577.537,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	4 Dokumen	12 Dokumen	220.853.000,00	220.853.000,00	205.612.500,00	-15.240.500,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		224.754.000,00
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	4 Dokumen	4 Dokumen	15.801.450,00	15.801.450,00	5.210.500,00	-10.590.950,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		15.801.450,00
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	4.742.250,00	4.742.250,00	0,00	-4.742.250,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		4.742.250,00
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	12 Laporan	23 Laporan	1.488.250,00	1.488.250,00	0,00	-1.488.250,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1.488.250,00
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.079.500,00	2.079.500,00	0,00	-2.079.500,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2.079.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi Pegawai*	42 Orang	1 Layanan	104.235.828,00	104.213.000,00	12.688.000,00	-91.547.828,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		104.235.828,00
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang disediakan*	1 Paket	13 Paket	104.235.828,00	104.213.000,00	12.688.000,00	-91.547.828,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		104.235.828,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum*	8 Layanan	8 Jenis	4.286.495.617,00	4.336.366.508,00	4.385.405.358,00	98.909.741,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		4.258.995.617,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	97.033.700,00	97.028.716,00	97.028.716,00	-4.984,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		97.033.700,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	2 Paket	124.999.000,00	174.874.875,00	150.874.100,00	25.875.100,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		124.999.000,00
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	122.142.400,00	122.142.400,00	122.142.400,00	0,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		122.142.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.963.850.500,00	1.963.850.500,00	2.764.586.500,00	800.736.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1.959.750.500,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	635.422.250,00	635.422.250,00	529.417.075,00	-106.005.175,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		635.422.250,00
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	8 Dokumen	8 Dokumen	118.471.000,00	118.471.000,00	92.469.000,00	-26.002.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		95.071.000,00
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	2 Laporan	2 Laporan	598.976.767,00	598.976.767,00	276.087.567,00	-322.889.200,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		598.976.767,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	625.600.000,00	625.600.000,00	352.800.000,00	-272.800.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		625.600.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	6 Unit	2 Jenis	528.234.000,00	628.211.825,00	1.131.740.135,00	603.506.135,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		780.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	-	3 Unit	0,00	0,00	191.850.000,00	191.850.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		200.000.000,00
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Laporan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	1 Unit	1 Unit	528.234.000,00	628.211.825,00	939.890.135,00	411.656.135,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		580.000.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang*	7 Jasa	4 Jenis	2.653.221.284,00	2.653.215.250,00	2.641.130.632,00	-12.090.652,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.676.621.284,00
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		14.000.000,00
4.011.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	1.229.905.000,00	1.229.905.000,00	1.227.905.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1.253.305.000,00
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	59.994.216,00	59.994.216,00	-5.784,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		60.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	1.349.316.284,00	1.349.316.034,00	1.339.231.416,00	-10.084.868,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1.349.316.284,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan BMD*	238 Unit	5 Jenis	4.984.397.239,00	6.184.374.283,00	8.720.558.306,00	3.736.161.067,00				2.496.356.239,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	149 Unit	149 Unit	156.000.000,00	156.000.000,00	184.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		156.000.000,00
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	50 Unit	50 Unit	74.299.400,00	74.276.444,00	274.276.444,00	199.977.044,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		34.299.400,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	55 Unit	205 Unit	1.361.333.899,00	1.361.333.899,00	1.311.333.899,00	-50.000.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1.361.333.899,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	23 Unit	24 Unit	3.173.040.100,00	3.173.040.100,00	5.539.624.123,00	2.366.584.023,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		724.999.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	10 Unit	10 Unit	219.723.840,00	1.419.723.840,00	1.411.323.840,00	1.191.600.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		219.723.840,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH*	4 Jenis	4 Jenis	5.318.555.683,00	4.679.742.772,00	4.886.542.772,00	-432.012.911,00				5.318.555.683,00
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	4.114.767.483,00	3.475.954.572,00	3.475.954.572,00	-638.812.911,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.114.767.483,00
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	204.588.200,00	204.588.200,00	204.588.200,00	0,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		204.588.200,00
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang	2 Orang	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	943.200.000,00	943.200.000,00	1.150.000.000,00	206.800.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		943.200.000,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH*	48 Orang	12 Laporan	513.731.000,00	513.731.000,00	513.731.000,00	0,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		513.731.000,00
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala*	2 Paket	2 Paket	513.731.000,00	513.731.000,00	513.731.000,00	0,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		513.731.000,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Tingkat Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat*	82.50 Nilai	100 % 93,33 % 99,1 Nilai	2.331.389.991,00	2.506.488.522,00	1.854.812.885,00	-476.577.106,00	Penataan Organisasi	*Tingkat Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat*		2.355.237.552,00
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	6 Dokumen	2 Dokumen	535.000.000,00	560.099.100,00	409.336.300,00	-125.663.700,00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)		540.000.000,00
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Laporan	1 Laporan	761.265.639,00	836.265.639,00	777.194.635,00	15.928.996,00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		765.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	1 Dokumen	2 Dokumen	870.909.552,00	945.909.439,00	522.522.675,00	-348.386.877,00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		800.237.552,00
4.01.01.2.13.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	0 Dokumen	1 Dokumen	264.654.350	223.108.550	221.981.880	-1.126.670	Kab. Tuban, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		221.981.880
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	4 Laporan	12 Laporan	478.100.000,00	478.100.000,00	462.020.000,00	-16.080.000,00	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		500.000.000,00
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	4 Laporan	12 Laporan	1.883.400.000,00	1.973.400.000,00	1.912.916.538,00	29.516.538,00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.875.000.000,00
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**prosentase rancangan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah (%)**	-	**100 %**	**39.866.357.920,00**	**39.866.332.920,00**	**38.444.647.515,00**	**- 5.674.588.920,00**				**34.191.769.000,00**
		Jumlah rancangan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat										
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Rancangan kebijakan di bidang Kewilayahan otonomi daerah dan kerjasama daerah*	-	91 %	1.185.149.050,00	1.185.149.050,00	1.194.050.693,00	8.901.643,00				1.185.149.050,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah										
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	91.714.812,00	-8.285.188,00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000,00
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKewilayahan*	1 Dokumen	5 Dokumen	480.649.050,00	480.649.050,00	533.832.225,00	53.183.175,00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		480.649.050,00
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	3 Dokumen	4 Dokumen	604.500.000,00	604.500.000,00	568.503.656,00	-35.996.344,00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		604.500.000,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Prosentase kegiatan keagamaan dan kesra yang terlaksana dengan baik*	87 %	86,96 %	35.356.708.870,00	35.356.708.870,00	34.821.115.514,00	-535.593.356,00				29.656.619.950,00
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	1 Dokumen	12 Dokumen	8.827.019.950,00	8.870.655.950,00	8.388.136.470,00	-438.883.480,00	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.137.019.950,00

BAB IV
PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERAHATIAN

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban sebagai Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 tergantung dari besarnya komitmen dan peran aktif aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah itu sendiri. Oleh karena itu segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor pembuat regulasi kebijakan Pemerintahan Daerah maupun dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada bagiannya diharapkan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Begitu pula dalam rangka menjabarkan visi misi Bupati serta tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban yang akan dicapai perlu adanya dukungan, dedikasi, semangat, loyalitas dan kerja yang maksimal dari seluruh aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan nantinya Rencana Kerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025 ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam menciptakan berbagai peluang dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin timbul. Karena itu diperlukan dukungan penuh dari semua pihak terutama seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Melakukan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Renja ini diharapkan agar Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban beserta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan

berkesinambungan dengan tetap mengedepankan koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mewujudkan pelayanan prima yang bersifat cepat, akurat, akuntabel, transparan dan adil.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan dengan berpedoman pada Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban mempunyai arti yang strategis karena memuat kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan. Penyusunan Renja SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Capaian Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam penyusunan renja SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan merupakan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2025. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD guna mengetahui sejauh mana rencana kerja tahunan sebagai wujud kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dtetapkan dalam perencanaan strategis/renstra SKPD Tahun 2021 – 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan Renstra Tahun 2021 - 2026.
5. Rencana Program dan Indikator Kinerja Program SKPD bersifat outcome (bermanfaat/berfungsinya output) dan SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Relevance dan Time Bound)* dengan terget kinerja berdasarkan hasil identifikasi dan gambaran kinerja pelayanan SKPD tahun sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat ll Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Perubahan Renja adalah sebagai tindak lanjut dalam perencanaan strategis (renstra) selama periode Tahun 2021 – 2026 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban dan merupakan panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Adapun tujuan Perubahan Renja adalah untuk menyempurnakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja sesuai dengan renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021–2026 dalam melaksanakan program/kegiatan yang ada di Renstra ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ;

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.6. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : PENUTUP

- LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Cara Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban sebagai berikut :

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

(5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e. fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD
g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayan publik;
h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD
b. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD
c. Penyelenggara Rapat-rapat DPRD
d. Penyediaan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD.

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 30 Tahun 2022 Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, yang terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban, membawahi Kepala Bagian – Kepala Bagian.
2. Kepala Bagian terdiri :
   (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan serta perencanaan dan pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
      a. perumusan dan penyusunan petunjuk teknis bidang tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
      b. pelaksanaan koordinasi bidang tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
      c. pelaksanaan tata usaha dan keuangan;
      d. pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
      e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bagian Umum;
      f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
      g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris DPRD; dan
      h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

      Bagian Umum membawahi dan mengkoordinasikan :
      a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
      b. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Umum

   (2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi dibidang kehumasan, keprotokolan dan hubungan antar lembaga dan menyelenggarakan fungsi:
      a. perumusan pemberitaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan;

b. perumusan naskah sambutan pimpinan DPRD;
c. pengoordinasian pelaksanaan acara yang dilaksanakan di DPRD;
d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;
e. pengaturan penerimaan tamu-tamu DPRD;
f. fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
g. penyusunan data dan informasi secara berkala melalui website;
h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
i. perencanaan kebutuhan tenaga ahli;
j. penyiapan administrasi perekrutan dan pengangkatan tenaga ahli;
k. pemantauan dan penyiapan laporan tenaga ahli;
l. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
m. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris Dewan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga membawahi dan mengkoordinasikan :
a. Jabatan Fungsional bagian Hubungan Antar Lembaga

(3) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan pembuatan rísalah rapat dan menyiapkan penyelenggaraan rapat/persidangan DPRD dan serta menfasilitasi penyusunan dan pembentukan perundang-undangan daerah dan menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyelenggaraan rapat-rapat yang dilakukan oleh DPRD;
b. penyusunan risalah rapat/sidang DPRD dan penghimpun seluruh rapat/sidang;
c. perumusan pencatatan/notulen seluruh jalannya rapat/sidang DPRD;
d. fasilitasi penyusunan peraturan Perundang-Undangan daerah (raperda inisiatif);
e. fasilitasi penyusunan Perundang-Undangan daerah yang diajukan oleh eksekutif;
f. pelaksanaan pengelolaan dokumen persidangan dan perundang-undangan;

g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
h. pengelolaan kepustakaan sekretariat DPRD;
i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris Dewan; dan
k. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi dan mengkoordinasikan :
a. Jabatan Fungsional Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

3. Jabatan Fungsional :
Tugas dan fungsi kelompok Jabatan Fungsional membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melayani administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan keahliannya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan dan pencapaian Renstra Sekretariat DPRD dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya**		Indeks Pelayanan Publik (DPRD) atas pelayanan Sekretariat DPRD	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	83 (Poin)	92.811.995.385	0 (Poin)	18.591.879.011	0 (Poin)	16.769.294.675	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	35.361.173.686	0 (Poin)	44.660.152.071	0 %	0 %	Sekretaris DPRD
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (Poin)	191.916.077.753	80.4 (Poin)	117.930.099.689	81.5 (Poin)	40.631.044.716	0 (Poin)	9.030.847.547	0 (Poin)	8.336.358.031	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	17.367.205.578	0 (Poin)	139.216.770.968	0 %	72.54 %	BAGIAN UMUM
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian	45 (Dokumen)	446.546.500	27 (Dokumen)	180.655.560	9 (Dokumen)	150.044.990	3 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.686.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	3.686.500	31 (Dokumen)	189.672.060	68.89 %	42.48 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 (Dokumen)	403.499.000	20 (Dokumen)	91.402.861	3 (Dokumen)	125.497.740	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	3.686.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	3.686.500	22 (Dokumen)	95.089.361	48.89 %	23.57 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahDaerah	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	24.547.250	3 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	0	4 (Laporan)	5.330.000	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**66.67**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sedang**														
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	45 (Dokumen)	23.629.321.055	27 (Dokumen)	12.105.919.060	9 (Dokumen)	5.307.437.321	1 (Dokumen)	1.070.426.697	2 (Dokumen)	1.134.693.844	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	2.205.120.541	30 (Dokumen)	14.602.165.614	66.67 %	61.8 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	30 (Orang)	4.488.333.576	30 (Orang)	899.615.771	29 (Orang)	952.325.012	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	29 (Orang)	1.851.940.783	29 (Orang)	2.090.140.825	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 (Dokumen)	3.442.100.000	27 (Dokumen)	1.989.270.043	9 (Dokumen)	790.759.895	1 (Dokumen)	170.810.926	2 (Dokumen)	180.251.832	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	351.062.758	30 (Dokumen)	2.391.102.272	66.67 %	69.47 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	9 (Dokumen)	28.343.850	1 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	2.117.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	2.117.000	3 (Dokumen)	4.273.500	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**54.44**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Rendah**														
		3. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																						
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**														

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi sumber daya aparatur	72 (Orang)	117.805.200	63 (Orang)	549.107.212	63 (Orang)	154.301.824	63 (Orang)	0	63 (Orang)	20.487.850	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	63 (Orang)	20.487.850	63 (Orang)	569.595.062	87.5 %	483.51 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 (Orang)	85.805.200	42 (Orang)	456.427.212	15 (Orang)	120.974.824	1 (Orang)	0	2 (Orang)	20.487.850	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3 (Orang)	20.487.850	45 (Orang)	476.915.062	562.5 %	555.81 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	71 (Paket)	33.327.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**10**													
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**													
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis adminitrasi perkantoran yang disediakan	5 (Jenis)	828.945.296	10 (Jenis)	2.432.065.833	6 (Jenis)	4.252.278.284	6 (Jenis)	643.310.657	6 (Jenis)	493.262.322	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	6 (Jenis)	1.136.572.979	6 (Jenis)	3.957.096.601	120 %	477.37 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	6 (Paket)	34.696.738	6 (Paket)	0	6 (Paket)	9.318.020	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	6 (Paket)	9.318.020	6 (Paket)	9.318.020	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	119.999.630	2 (Paket)	16.153.185	2 (Paket)	17.403.690	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	33.556.875	2 (Paket)	52.351.290	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	6 (Paket)	10.000.000	6 (Paket)	0	6 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	6 (Paket)	0	6 (Paket)	290.000	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	45.192.700	3 (Paket)	0	3 (Paket)	9.575.500	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	9.575.500	3 (Paket)	25.518.000	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 (Paket)	156.000.000	6 (Paket)	326.834.693	6 (Paket)	160.997.900	6 (Paket)	13.031.000	6 (Paket)	16.438.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	6 (Paket)	29.469.000	6 (Paket)	366.943.693	100 %	235.22 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6625 (Orang)	297.750.000	3872 (Orang)	116.069.395	1325 (Orang)	54.994.500	85 (Orang)	0	105 (Orang)	5.415.500	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	190 (Orang)	5.415.500	4062 (Orang)	140.067.395	61.31 %	47.04 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600 (Laporan)	17.919.932.500	338 (Laporan)	9.725.312.789	120 (Laporan)	3.796.397.656	30 (Laporan)	611.891.472	30 (Laporan)	428.406.612	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	60 (Laporan)	1.040.298.084	398 (Laporan)	11.087.584.247	66.33 %	61.87 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	600 (Dokumen)	17.919.932.500	248 (Dokumen)	7.124.818.257	6 (Dokumen)	29.999.160	6 (Dokumen)	2.235.000	6 (Dokumen)	6.705.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	8.940.000	6 (Dokumen)	7.135.993.257	1 %	39.82 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**83.04**													
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Tinggi**													

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis adminitrasi perkantoran yang disediakan	5 (Jenis)	828.945.296	10 (Jenis)	2.432.065.833	5 (Jenis)	731.488.650	5 (Jenis)	125.820.537	5 (Jenis)	82.797.847	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	5 (Jenis)	208.618.384	5 (Jenis)	2.714.201.502	100 %	327.43 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	5 (Laporan)	494.450	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	52.200	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	52.200	1 (Laporan)	52.200	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	243.670.400	3 (Laporan)	52.543.633	3 (Laporan)	14.670.952	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	67.214.585	6 (Laporan)	100.999.568	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	25 (Laporan)	432.800.000	16 (Laporan)	387.862.300	12 (Laporan)	58.098.800	3 (Laporan)	11.000.000	3 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	11.000.000	22 (Laporan)	410.862.300	88 %	94.93 %	kepala sub bagian tata
		Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																					usaha dan keuangan
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	15 (Laporan)	429.225.000	3 (Laporan)	62.276.904	3 (Laporan)	68.074.695	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	130.351.599	6 (Laporan)	158.083.901	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**40**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**														

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis adminitrasi perkantoran yang disediakan	5 (Jenis)	828.945.296	10 (Jenis)	2.432.065.833	19 (Jenis)	1.005.432.500	19 (Jenis)	57.309.500	19 (Jenis)	197.827.960	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	19 (Jenis)	255.137.460	19 (Jenis)	2.694.417.993	380 %	325.04 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 (Unit)	715.010.700	90 (Unit)	919.036.112	21 (Unit)	135.000.000	21 (Unit)	1.890.000	21 (Unit)	35.962.100	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	21 (Unit)	37.852.100	21 (Unit)	958.485.712	110.53 %	134.05 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 (Unit)	1.499.998.800	18 (Unit)	790.635.050	18 (Unit)	430.000.000	18 (Unit)	4.812.500	18 (Unit)	103.909.660	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	18 (Unit)	108.722.160	18 (Unit)	904.974.410	112.5 %	60.33 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	19 (Unit)	90.432.500	19 (Unit)	6.000.000	19 (Unit)	13.540.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	19 (Unit)	19.540.000	19 (Unit)	19.540.000	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 (Unit)	152.512.000	19 (Unit)	5.016.023.692	3 (Unit)	330.000.000	3 (Unit)	44.607.000	3 (Unit)	44.416.200	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	89.023.200	3 (Unit)	5.105.046.892	100 %	3347.31 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		5. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	24 (Unit)	20.000.000	24 (Unit)	0	24 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	24 (Unit)	0	24 (Unit)	0	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**100**													

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat kinerja sub kegiatan	Sangat Tinggi														
		8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota dewan dalam layanan keuangan dan kesejahteraan	50 (Orang)	28.055.024.396	50 (Orang)	82.199.582.517	50 (Orang)	28.524.566.357	50 (Orang)	7.105.747.656	50 (Orang)	6.386.341.708	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	50 (Orang)	13.492.089.364	50 (Orang)	98.788.054.795	100 %	352.12 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	50 (Orang)	28.119.656.757	50 (Orang)	7.105.747.656	50 (Orang)	6.367.377.808	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	50 (Orang)	13.473.125.464	50 (Orang)	16.263.842.128	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
		2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 (Orang)	156.862.500	12 (Orang)	13.694.140	50 (Orang)	29.909.600	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	12 (Orang)	13.694.140	24 %	8.73 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
		3. Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	200 (Paket)	1.478.418.000	50 (Paket)	1.132.763.974	200 (Paket)	375.000.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	18.963.900	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	18.963.900	0 (Paket)	1.457.394.124	0 %	98.58 %	kepala sub bagian tata usaha dan keuangan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	33.33														
									Predikat kinerja sub kegiatan	Sangat Rendah														
		9. Layanan Administrasi DPRD	Jumlah fasilitasi administrasi DPRD	300 (Kali)	713.102.500	187 (Kali)	718.753.540	60 (Kali)	505.494.790	6 (Kali)	28.232.500	10 (Kali)	17.260.000	0 (Kali)	0	0 (Kali)	0	16 (Kali)	45.492.500	203 (Kali)	821.683.040	67.67 %	115.23 %	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
		1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	100.494.790	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	60 (Laporan)	405.000.000	6 (Laporan)	28.232.500	10 (Laporan)	17.260.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	16 (Laporan)	45.492.500	16 (Laporan)	102.929.500	0 %	0 %	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**13.33**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**														
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**67.16**														
									Predikat kinerja kegiatan	**Sedang**														
2		**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti telah dituangkan menjadi pokok pikiran DPRD	85 (%)	0	77.42 (%)	0	84.5 (%)	0	81.93 (%)	0	81.93 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	81.93 (%)	0	81.93 (%)	0	96.39 %	0 %	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
			Persentase informasi kegiatan DPRD dengan media masa	90 (%)	196.931.709.661	150.59 (%)	124.503.877.166	89 (%)	0	92.16 (%)	0	95.45 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	95.45 (%)	0	95.45 (%)	124.503.877.166	106.06 %	63.22 %	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
			Persentase fasilitasi Rancangan Perda yang disetujui sesuai SOP	90 (%)	0	100 (%)	9.917.790.860	100 (%)	52.180.950.669	0 (%)	9.561.031.464	100 (%)	8.432.936.644	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	17.993.968.108	100 (%)	33.291.271.652	111.11 %	0 %	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
		1. Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	0 (Kali)	0	0 (Kali)	0	50 (Kali)	119.000.000	0 (Kali)	0	19 (Kali)	0	0 (Kali)	0	0 (Kali)	0	19 (Kali)	0	19 (Kali)	10.559.000	0 %	0 %	kabag persidangan dan
														0 (Dokumen)		0 (Dokume								perundang-undangan

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	50 (Dokumen)	76.990.500	8 (Dokumen)	17.264.000	10 (Dokumen)	16.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0		0	n)	0	0 (Dokumen)	0	8 (Dokumen)	17.264.000	16 %	22.42 %	kabag persidangan dan perundang-undangan
		2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50 (Dokumen)	76.990.500	11 (Dokumen)	14.189.225	10 (Dokumen)	16.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	11 (Dokumen)	14.189.225	22 %	18.43 %	kabag persidangan dan perundang-undangan
		3. Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	10 (Dokumen)	141.994.500	26 (Dokumen)	94.637.000	10 (Dokumen)	29.000.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	27 (Dokumen)	94.637.000	270 %	66.65 %	JF Perisalah Legeslatif
		4. Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	50 (Dokumen)	141.994.500	21 (Dokumen)	36.010.500	10 (Dokumen)	29.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	21 (Dokumen)	36.010.500	42 %	25.36 %	kabag persidangan dan perundang-undangan
		5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	50 (Dokumen)	141.994.500	24 (Dokumen)	76.463.500	10 (Dokumen)	29.000.000	0 (Dokumen)	0	10 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	10 (Dokumen)	0	34 (Dokumen)	87.022.500	68 %	61.29 %	kabag persidangan dan perundang-undangan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**22**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**														
		2. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui	75 (Dokumen)	32.879.547.500	44 (Dokumen)	38.278.728.133	15 (Dokumen)	18.291.019.769	0 (Dokumen)	3.012.619.000	5 (Dokumen)	3.325.132.100	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	6.337.751.100	49 (Dokumen)	46.922.351.778	65.33 %	142.71 %	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
		1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50 (Dokumen)	129.972.500	18 (Dokumen)	52.246.000	15 (Dokumen)	25.994.500	19 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	19 (Dokumen)	0	37 (Dokumen)	52.246.000	74 %	40.2 %	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	5 (Dokumen)	17.500.000	2 (Dokumen)	19.512.500	1 (Dokumen)	3.490.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	19.512.500	40 %	111.5 %	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan
		3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	15 (Dokumen)	2.078.571.039	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	43.713.100	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	43.713.100	5 (Dokumen)	532.838.745	0 %	0 %	kabag persidangan dan perundang-undangan
		4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	40 (Dokumen)	2.368.299.875	19 (Dokumen)	33.514.504.388	8 (Dokumen)	16.182.964.230	0 (Dokumen)	3.012.619.000	0 (Dokumen)	3.281.419.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	6.294.038.000	19 (Dokumen)	41.625.289.288	47.5 %	1757.6 %	kabag persidangan dan perundang-undangan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**33.33**													
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**													
		3. Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	60 (Dokumen)	3.238.953.822	20 (Dokumen)	471.638.820	16 (Dokumen)	175.902.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	36 (Dokumen)	647.541.320	36 (Dokumen)	772.234.752	0 %	0 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
		1. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	6 (Orang)	936.000.000	6 (Orang)	561.600.000	6 (Orang)	187.200.000	6 (Orang)	46.800.000	6 (Orang)	46.800.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	6 (Orang)	93.600.000	6 (Orang)	670.800.000	100 %	71.67 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
		2. Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD peningkatan kapasitas	110 (Dokumen)	5.626.770.000	58 (Dokumen)	4.980.838.994	21 (Dokumen)	2.378.282.592	6 (Dokumen)	267.838.820	1 (Dokumen)	85.572.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	353.411.320	65 (Dokumen)	5.416.677.546	59.09 %	96.27 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	300 (Dokumen)	2.617.183.750	248 (Dokumen)	2.210.898.895	268 (Dokumen)	673.471.230	63 (Dokumen)	157.000.000	57 (Dokumen)	43.530.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	120 (Dokumen)	200.530.000	368 (Dokumen)	2.438.095.095	122.67 %	93.16 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**59.37**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Rendah**														
		4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah fasilitasi penyerapan pokok pikiran DPRD	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	600 (Dokumen)	6.572.375.150	476 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.925.400.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	476 (Dokumen)	1.925.400.000	476 (Dokumen)	1.925.400.000	0 %	0 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
		1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	600 (Dokumen)	10.000.000	476 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	476 (Dokumen)	0	476 (Dokumen)	0	0 %	0 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
		2. Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	13 (Laporan)	324.342.950	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 %	0 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
		3. Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	750 (Dokumen)	18.620.970.361	400 (Dokumen)	16.963.599.870	150 (Dokumen)	6.238.032.200	0 (Dokumen)	0	50 (Dokumen)	1.925.400.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	50 (Dokumen)	1.925.400.000	450 (Dokumen)	18.888.999.870	60 %	101.44 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**37.56**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**														
		5. Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	116 (Kegiatan)	23.959.601.928	15 (Kegiatan)	6.076.773.644	22 (Kegiatan)	3.006.502.044	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	37 (Kegiatan)	9.083.275.688	37 (Kegiatan)	12.021.663.395	0 %	0 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	480 (Dokumen)	131.895.476.300	269 (Dokumen)	69.960.270.112	84 (Dokumen)	23.348.409.928	15 (Dokumen)	5.946.114.944	18 (Dokumen)	2.890.868.444	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	33 (Dokumen)	8.836.983.388	302 (Dokumen)	81.735.641.207	62.92 %	61.97 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
		2. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 (Dokumen)	1.153.007.750	30 (Dokumen)	881.318.229	10 (Dokumen)	611.192.000	3 (Dokumen)	130.658.700	4 (Dokumen)	115.633.600	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	246.292.300	37 (Dokumen)	1.127.610.529	74 %	97.8 %	KABAG HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**54.64**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Rendah**														
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**48.51**														
									Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**														
									Rata-rata capaian kinerja program(%)	**100**														
									Predikat kinerja program	**Sangat Tinggi**														
									Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)	**0**														
									Predikat kinerja sasaran	**Sangat Rendah**														
									Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)	**0**														
									Predikat kinerja Sasaran	**Sangat Rendah**														
									Total Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**74.24**														
									Predikat kinerja Program	**Sedang**														

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Total Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**65.15**													
										Predikat kinerja Kegiatan	**Sedang**													
										Total Rata-rata capaian kinerja Sub kegiatan (%)	**52.41**													
										Predikat kinerja Sub kegiatan	**Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1. Adanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah daerah Kab. Tuban dan DPRD Kab. Tuban.
2. Peningkatan penyebarluasan informasi di media massa dan pembuatan papan bertiang (billboard) dikecamatan-kecamatan.
3. Adanya wadah dari Assosiasi Sekretariat DPRD se Indonesia (ASDEKSI) untuk peningkatan kompetensi para karywan dan karyawati Sekretariat DPRD

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Perubahan jadwal yang telah ditetapkan dalam banmus karena kepentingan golongan dari anggota DPRD,
2. Perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terjadi tidak atas kepentingan organisasi,
3. perbedaan kebijakan para anggota legislatif .

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Mengoptimalkan realisasi kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya

1. Melakukan percepatan pekerjaan yang terkait dengan target kinerja yang belum berjalan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD berikutnya:

Pada realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025, untuk capaian indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik (DPRD) atas pelayanan Sekretariat DPRD belum dilakukan perhitungan, rencana dilakukan survey dan perhitungan pada triwulan IV. Terdapat beberapa sub kegiatan yang capaian sampai dengan triwulan II masih rendah. Hal tersebut dikarenakan beberapa sub kegiatan rencana pelaksanaannya pada triwulan IV. Untuk sub kegiatan yang direncanakan realisasi pada triwulan II akan tetapi belum terealisasi, akan dilakukan percepatan pada triwulan selanjutnya.

➢ **Realisasi Program dan Kegiatan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan kegiatan :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan :
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 125.497.740, untuk penyusunan 9 dokumen perencanaan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.686.500 atau 2,94%;
        2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.547.250, untuk evaluasi 7 dokumen perencanaan. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada realisasi dan rencana realisasi di triwulan IV.
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan:
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.488.333.576, untuk belanja Gaji dan tunjangan ASN. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.851.940.783 atau 41,26%;
        2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 790.759.895, untuk belanja honorarium pejabat pengelola keuangan dan honor non PNS. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 351.062.758 atau 44,40%;
        3) Koordinasi dan pelaksanaan Akuntasi SKPD , dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.343.850 untuk penyusunan 9 dokumen penatausahaan keuangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.117.000 atau 7,47%;
    c. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan :

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 33.327.000 untuk belanja pakaian PDH PNS dan non PNS. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada realisasi dan rencana realisasi di triwulan IV.
2) Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 120.974.824 untuk kepentingan bimbingan teknis 15 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.487.850 atau 16,94%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan :
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 34.696.738 digunakan untuk belanja bahan komponen listrik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.318.020 atau 26,86%;
2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 119.999.630 untuk belanja 2 jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 33.556.875 atau 27,96%;
3) Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 untuk belanja peralatan rumah tangga. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada realisasi dan rencana realisasi di triwulan III.
4) Penyediaan bahan logistik kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.192.700 untuk belanja makanan dan minuman 65 karyawan karyawati. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.575.500 atau 21,19%;
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 160.997.900 untuk belanja 3 jenis barang cetakan dan 250 vandel untuk tamu DPRD Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.469.000 atau 18,30%;
6) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.999.160 untuk belanja 4 jenis bahan bacaan/koran Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.940.000 atau 29,80%;
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi dana sebesar Rp. 54.994.500 untuk belanja makanan dan minuman 1325 tamu

DPRD Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.415.500 atau 9,85%;

8) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.796.397.656 untuk 96 kali pendampingan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD serta konsultasi keluar daerah Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.040.298.084 atau 27,40%.

e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan :

1) Penyediaan jasa surat menyurat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 494.450 untuk fasilitasi surat keluar 1666 dan surat masuk 1438. Rendahnya realisasi dikarenakan sistem surat menyurat lebih banyak melalui aplikasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 52.200 atau 10,56%;

2) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 243.670.400 untuk langganan listrik, telp dan air. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 67.214.585 atau 27,58%;

3) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 58.098.800 untuk penyediaan 5 jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 11.000.000 atau 18,93%;

4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 429.225.000 untuk penyediaan 5 jenis pelayanan umum kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 130.351.599 atau 30,37%.

f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan :

1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 135.000.000 untuk pemeliharaan 21 Kendaraan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 37.852.100 atau 28,04%;

2) Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 430.000.000 untuk pemeliharaan 18

Kendaraan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 108.722.160 atau 25,28%;

3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.432.500 untuk 19 jenis pemeliharaan. Adapun realisasi keuangan sebesar 19.540.000 atau 21,61%;
4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 330.000.000 untuk 4 jenis pemeliharaan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 89.023.200 atau 26,98%;
5) Pemeliharaan Mebel dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000 untuk 24 unit yang dipelihara, Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada dan rencana realisasi pada triwulan IV.

g. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, sub kegiatan :
   1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.119.656.757. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.473.125.464 atau 47,91%.
   2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 375.000.000 untuk pengadaan pakaian PDH, PDL, PSL dan PSR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.963.900 atau 5,06%.
   3) Pelaksanaan medical check up DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.909.600 untuk pelaksanaan medical check up 50 orang pimpinan dan anggota DPRD. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada dan rencana realisasi di triwulan IV.
h. Layanan administrasi DPRD, sub kegiatan:
   1) Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.494.790 untuk penyusunan 1 dokumen appraisal. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada dan rencana realisasi di triwulan IV.
   2) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp. 405.000.000 untuk fasilitasi rapat-rapat DPRD diantaranya rapat Komisi, rapat fraksi, Banmus, rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi, Rapat Pansus, Rapat Gabungan, Rapat Bapemperda, Rapat BK, Rapat Banggar, Audiensi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 45.492.500 atau 11,23%.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan :

a. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, sub kegiatan:

1) Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.994.500 untuk untuk fasilitasi rapat DPRD dalam pembentukan peraturan daerah sebanyak 5 kali. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada;

2) Pembahasan Rancangan Perda dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.078.571.039 untuk fasililitasi pembahasan 15 perda. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 43.713.100 atau 2,10%;

3) Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.182.964.230 untuk fasililitasi 8 draf NA Raperda inisiatif DPRD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.294.038.000 atau 38,89%;

4) Penyusunan Tata tertib DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.490.000 untuk fasilitasi pembahasan 1 dokumen tata tertib DPRD. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada, realisasi menunggu dijadwalkan untuk pembahasan tata tertib DPRD oleh Badan Musyawarah.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran, sub kegiatan:

1) Pembahasan KUA dan PPAS dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.000.000 untuk fasilitasi rapat DPRD dalam pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 7 kali. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada, rencana realisasi di triwulan III;

2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.000.000 untuk fasilitasi rapat DPRD untuk pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 7 kali. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada, rencana realisasi di triwulan III;

3) Pembahasan APBD dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.000.000 untuk fasilitasi rapat DPRD dalam pembahasan APBD sebanyak 10 kali. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada, rencana realisasi di triwulan III;

4) Pembahasan APBD Perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.000.000 untuk fasilitasi rapat DPRD untuk pembahasan APBD perubahan sebanyak 10 kali. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada, rencana realisasi di triwulan III;
5) Pembahasan pertanggungjawaban APBD dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.000.000 untuk fasilitasi rapat DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD sebanyak 10 kali. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada, rencana realisasi di triwulan III.

c. Peningkatan Kapasitas DPRD, sub kegiatan :
1) Pendalaman Tugas DPRD dengan Alokasi dana sebesar Rp. 2.378.282.592 untuk fasilitasi bimbingan teknis DPRD sebanyak 21 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 353.411.320 atau 14,86%;
2) Publikasi dan dokumentasi dewan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 673.471.230 untuk publikasi kegiatan dewan sebanyak 268 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 200.530.000 atau 29,78%;
3) Penyediaan tenaga ahli fraksi dengan Alokasi dana sebesar Rp. 187.200.000 untuk pembayaran honorarium tenaga ahli fraksi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 93.600.000 atau 50,00%.

d. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, sub kegiatan:
1) Kunjungan Kerja dalam Daerah dengan Alokasi dana sebesar Rp. 324.342.950 belum ada realisasi dikarenakan Anggota DPRD tidak menjadwalkan untuk kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah.
2) Penyusunan pokok pokok pikiran DPRD dengan Alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 untuk fasilitasi rapat penyusunan 600 pokok pokok pikiran DPRD. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II belum ada;
3) Pelaksanaan reses dengan Alokasi dana sebesar Rp. 6.238.032.200 untuk fasilitasi kegiatan 3 kali pelaksanaan reses. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.925.400.000 atau 30,87%.

e. Fasilitasi tugas DPRD, sub kegiatan:
   - Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dengan Alokasi dana sebesar Rp. 23.348.409.928 untuk fasilitasi kunjungan kerja 84 kegiatan masing-masing komisi dan masing-masing AKD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.836.983.388 atau 37,85%;
   - Fasilitasi tugas pimpinan DPRD dengan Alokasi dana sebesar Rp. 611.192.000 untuk fasilitasi kunjungan kerja 10 kegiatan untuk pimpinan DPRD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 246.292.300 atau 40,30%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Tuban Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan indikator sasaran : Indeks Pelayanan Publik (DPRD) atas pelayanan Sekretariat DPRD

TABEL 2.2
ANALISIS KINERJA SEKRETARIAT DPRD

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	TH 2026	TH 2023	TH 2024	TH 2025	TH 2026	
1	Indeks Pelayanan Publik (DPRD) atas pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	81	81	82,5	83	83	82	82,5	89,89	90,93	Nilainya didasarkan kuesioner pada anggota DPRD

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2024 target indikator kinerja Sekretariat DPRD adalah dengan kategori BAIK dengan nilai 82,5. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target Interval nilai sampai dengan Nilai 82,5 pada tahun 2024 dan mampu tercapai nilai 82,5 dengan prosentase 100% atau kategori baik. Karena Target Sekretariat DPRD untuk indikator Kinerja adalah dengan Kategori BAIK maka dengan realisasi interval nilai 82,5 dengan kategori BAIK capaian Sekretariat DPRD dapat dikatakan telah tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya jumlah pegawai yang cukup;
- Tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
- Adanya dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dari angka indeks tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD ditahun 2024 telah terpenuhi. Perolehan angka indeks 82 tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Umum Sekretariat DPRD sebesar 82,5 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
b. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD sebesar 82,5 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
c. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat DPRD sebesar 82,5 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya

Standart Penilaian.

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	**25,00 – 43,75**	**D**	**Tidak Baik**
1,76 – 2,50	**43,76 – 62,50**	**C**	**Kurang Baik**
2,51 – 3,25	**62,51 – 81,25**	**B**	**Baik**
3,26 – 4,00	**81,26 – 100,00**	**A**	**Sangat Baik**

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tidak terlepas dari pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dan untuk mewujudkan hasil yang optimal perlu didukung sarana dan sumber daya aparatur yang profesional, sehingga program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam DPA dapat berjalan dengan baik.

Sesuai tugas pokok dan fungsi seperti yang dijelaskan diatas, bahwa Sekretariat DPRD sangat membutuh sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan personal yang mumpuni agar target pelayanan yakni ketepatan, kecepatan dan kemudahan dapat terpenuhi. Selain itu dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung. Dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan yang diberikan secara umum telah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya perencanaan program secara umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yakni Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu kebijakan pelaksanaan optimalisasi pelayanan publik dengan kebijakan Pelaksanaan pemerntah yang bersih dan bebas KKN dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Lingkungan strategis sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi, begitu juga tentunya dengan pada Sekretariat DPRD Kab. Tuban, yang jika di analisa secara SWOT dapat berupa faktor internal dan ekternal, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat diidentifikasikan :

1. Faktor Internal
   a. Strenght/Kekuatan :
      - Adanya jumlah pegawai yang cukup;
      - Tersedianya anggaran yang cukup memadai;
      - Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
      - Adanya dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD.
   b. Weakness/Kelemahan :
      - Masih belum maksimalnya motivasi kerja aparatur;

- Masih belum optimalnya koordinasi internal pada aparatur sekretariat.

2. Faktor Eksternal

a. Oppurtunities/Peluang :

- Adanya hubungan kerja yang harmonis antara instansi terkait;
- Adanya kesempatan mengikuti Diklat/bimtek bagi pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Adanya wadah Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi);
- Adanya rapat koordinasi secara periodik antar pimpinan SKPD dengan Pimpinan Daerah.

b. Threats/Ancaman :

- Adanya tuntutan kinerja diluar tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab. Tuban
- Adanya perbedaan kebijakan para anggota legislatif
- Adanya tuntutan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap peranan Lembaga Legislatif.

Dari analisis perkembangan dan masalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban serta memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu Strategis yang di hadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban adalah:

1. Belum optimalnya kinerja pegawai.
2. Anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana belum memadai.
3. Kebijakan mutasi sumber daya aparatur yang tidak didukung dengan kemampuan manajerial menjadi penyebab tidak meningkatnya program-program organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga cenderung stagnan.
4. Cepatnya perubahan regulasi-regulasi atau peraturan perundang-undangan seringkali menjadi sumber permasalahan, hal ini disebabkan perubahan regulasi yang terjadi tidak atas kepentingan organisasi dan lainnya tetapi lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik atau golongan dan tidak atas kepentingan umum.
5. Setiap anggota dewan memiliki latar belakang, pengalaman, pendidikan, keyakinan, dan pandangan yang berbeda. Karena sering kali berafiliasi dengan partai politik yang berbeda, sehingga

mempengaruhi pandangan mereka terhadap isu-isu kebijakan, seperti ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial.

6. Belum tersusunnya struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban yang menggambarkan arah strategis organisasi yang memberikan pelayanan secara optimal.
7. Sinergitas program/kegiatan antara usulan anggota DPRD dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Tuban.
8. Kondusivitas hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan isu-isu strategis dan penting diatas, beberapa hal yang masih perlu direkomendasikan untuk dilakukan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban dalam pemahaman ASN mengenai target dan realisasi indikator kinerja.
2. Mengoptimalkan pencapaian indikator outcome program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Strategis yang telah disusun dan disepakati
3. Meningkatkan koordinasi antar bagian di intern Sekretariat DPRD

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di buat berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 yang demikian disesuiakan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam tahun 2025 rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 telah dilakukan review terhadap rancangan perubahan sebagaimana disajikan seperti tabel dibawah ini :

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL P-RKPD TAHUN 2025

No	Rancangan Perbuahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab Tuban	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui	15	18.291.019.769	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab Tuban	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui	15	17.383.901.488	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab Tuban	Jumlah rapat paripurna DPRD	50	119.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab Tuban	Jumlah rapat paripurna DPRD	50	89.224.500	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab Tuban	Jumlah Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan DPRD	60	3.238.953.822	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab Tuban	Jumlah Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan DPRD	60	2.175.932.230	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab Tuban	Jumlah pokok pikiran anggota dewan	600	6.572.375.150	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab Tuban	Jumlah pokok pikiran anggota dewan	600	5.892.979.390	

No	Rancangan Perbuahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab Tuban	Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk	116	23.959.601.928	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab Tuban	Jumlah aspirasi masyarakat yang masuk	116	16.067.917.456	

Telaahan terhadap rancangan perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan kinerja pencapaian target Rensra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan perubahan RKPD. Berdasarkan lampiran tabel diatas, secara garis besar perbandingan antara rancangan perubahan RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2025 baik dari segi rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, maupun nilai pagu anggaran. Sedangkan untuk target disesuaikan dengan pendampingan dari menpan.

Perbedaan antara Hasil Analisa Kebutuhan dengan rancangan awal RKPD pada pagu anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan rapat dan perjalanan dinas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kab Tuban tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Tuban.

Tabel 2.4

Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- TUJUAN

Memperhatikan Visi Pemerintah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

" Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan".

Serta khususnya Misi ke empat yaitu:

" Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif", maka dalam Rangka mencapai Visi dan Misi tersebut di atas, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan terukur dalam Rumusan Strategi Organisasi.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi pada pencapaian Misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : "Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD".

- SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal- hal yang ingin di capai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional rumusan sasaran yang ditetapkan dengan harapan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah : **"**Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya". Adapun faktor tercapainya fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban yang efektif adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas pengelolaan tata usaha
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan perkembangan kelembagaan.
- Peningkatan kualitas/kuantitas sarana dan prasarana kantor
- Peningkatan penyiapan Rapat- Rapat yang dilakukan oleh DPRD.

- Peningkatan tertib pencatatan/notulen/dokumentasi Rapat- Rapat yang dilaksanakan DPRD.
- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- Peningkatan pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
- Peningkatan Manajemen akutansi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Sasaran program Sekretariat DPRD

Sasaran program	Program
Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban

NO	TUJUAN	INDIKATOR TARGET	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN	
							2024	2025
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks pelayanan publik (kebijakan pelayanan, profesional ASN, sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi dan penagduan, inovasi)	B	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1	Indeks Pelayanan Publik (DPRD) atas pelayanan Sekretariat DPRD	82,5 (BAIK)	83 (BAIK)

- PROGRAM DAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   c. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
      2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
      6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      7) Fasilitasi kunjungan tamu
      8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Mebel
      2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
   f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
      1) Penyediaan jasa surat menyurat
      2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
      3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
      4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
      2) Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan

3) Pemeliharaan mebel
4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
5) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
1) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
2) Penyediaan pakaian dinas dan artibut DPRD
3) Pelaksanaan medical check up DPRD

i. Layanan Administrasi DPRD
1) Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD
2) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
3) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
4) Penyusunan Tata Tertib DPRD

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
1) Pembahasan KUA dan PPAS
2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3) Pembahasan APBD
4) Pembahasan APBD Perubahan
5) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

c. Peningkatan Kapasitas DPRD
1) Pendalaman Tugas DPRD
2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1) Kunjungan Kerja dalam Daerah
2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3) Pelaksanaan Reses

e. Fasilitasi Tugas DPRD
1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
2) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan tersebut diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- Strategi

Strategi adalah pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berisi Rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya- upaya yang

akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan Sumber Daya Organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan sekretariat DPRD Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas/kualitas sarana dan prasarana
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata usaha
3. Meningkatkan SDM dan kinerja aparatur
4. Meningkatkan Manajemen akuntansi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah .

- Kebijakan

Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban dalam mewujudkan tujuan sasaran dan strategis yang akan dicapai sampai dengan akhir Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
2. Peningkatan pelayanan kegiatan DPRD
3. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional
4. Peningkatan penyelenggaraan Rapat- Rapat DPRD dengan lancar dan tertib.
5. Penyiapan Risalah dan Pencatatan Notulen/Dokumentasi yang baik dan tertib.
6. Peningkatan pengelolaan Keuangan yang tertib berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Dari penetapan Visi, Misi tujuan, Strategi kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal sekretariat DPRD Kab. Tuban menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif

Tujuan : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima

Sasaran :Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah		81,5 Poin	41.509.050.906			81,9 poin	37.365.296.172
4.02.01.2.01	Meningkatnya Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian	Kab. tuban	9 dokumen	112.076.695	APBD		9 dokumen	89.899.900
4.02.01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	2 dokumen	94.379.620	APBD		2 dokumen	65.400.000
4.02.01.2.01.0007	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	7 dokumen	17.697.075	APBD		7 laporan	24.499.900
4.02.01.2.02	Meningkatnya administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	Kab. tuban	9 dokumen	4.687.071.959	APBD		9 jenis	4.487.115.063

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.02.0001	Terlaksananya penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	30 Orang	3.897.048.234	APBD		30 orang /bulan	4.337.539.763
4.02.01.2.02.0002	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban	9 dokumen	774.253.775	APBD		12 dokumen	121.075.300
4.02.01.2.02.0004	Tersusunnya laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban	9 dokumen	15.769.950	APBD		#N/A	0
4.02.01.2.05	Meningkatnya kualitas SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	Kab. tuban	72 orang	36.464.000	APBD		2 jenis	95.332.824
4.02.01.2.05.0002	Terpenuhinya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Kab. Tuban	69 Paket	976.000	APBD		0 paket	0

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Peraturan Perundang-Undangan							
4.02.01.2.05.0011	Teraksananya SDM yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban	15 orang	35.488.000	APBD		#N/A	0
4.02.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. tuban	6 jenis	2.346.246.443	APBD		6 jenis	2.327.719.702

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.0001	Terpenuhinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. tuban	6 Paket	52.821.738	APBD		#N/A	0
4.02.01.2.06.0002	Terpenuhinya Paket Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. tuban	6 Paket	95.077.050	APBD		2 paket	164.600.000
4.02.01.2.06.0003	Terpenuhinya Paket Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. tuban	6 Paket	10.000.000	APBD		#N/A	0
4.02.01.2.06.0004	Terpeuhinya Paket Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan disediakan	Kab. tuban	3 Paket	45.192.700	APBD		1 paket	100.093.500
4.02.01.2.06.0005	Terpenuhinya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. tuban	6 Paket	112.698.275	APBD		2 paket	160.906.500

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.0006	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. tuban	6 Dokumen	29.999.160	APBD		#N/A	0
4.02.01.2.06.0008	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. tuban	1325 laporan	49.486.500	APBD		#N/A	0
4.02.01.2.06.0009	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. tuban	120 laporan	1.950.971.020	APBD		60 laporan	1.879.111.902
4.02.01.2.07	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kab. tuban	3	3.839.788.950	APBD		4 jenis	0
4.02.01.2.07.0001	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. tuban	4	3.056.084.000	APBD		#N/A	0

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. tuban	50	54.000.000	APBD		0 paket	0
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. tuban	10	729.704.950	APBD		0 unit	0
4.02.01.2.08	Meningkatnya kulaitas jasa pelayanan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang	Kab. tuban	5 jenis	649.698.994	APBD		2 jenis	566.217.430
4.02.01.2.08.0001	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. tuban	5 laporan	494.450	APBD		#N/A	0
4.02.01.2.08.0002	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban	12 laporan	243.670.400	APBD		12 laporan	251.496.000
4.02.01.2.08.0003	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. tuban	12 laporan	58.098.800	APBD		#N/A	0

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Disediakan									
4.02.01.2.08.0004	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban	15 laporan	347.435.344	APBD		12 laporan	314.721.430
4.02.01.2.09	Meningkatnya kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemelharaan BMD	Kab. tuban	19 jenis	1.084.881.832	APBD		3 jenis	729.837.984
4.02.01.2.09.0001	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. tuban	21 unit	135.000.000	APBD		#N/A	0

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.09.0002	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. tuban	18 unit	408.874.332	APBD		41 unit	356.050.000
4.02.01.2.09.0005	Terlaksananya Mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. tuban	24 unit	20.000.000	APBD		#N/A	0
4.02.01.2.09.0006	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. tuban	19 jenis	90.432.500	APBD		19 unit	75.040.700
4.02.01.2.09.0009	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. tuban	3 unit	430.575.000	APBD		3 unit	298.747.284
4.02.01.2.15	Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota dewan dalam layanan keuangan dan kesejahteraan	Kab. tuban	50 orang	28.419.434.693	APBD		3 jenis	28.808.016.369

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.15.0001	Tersedianya Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jummlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. tuban	50 orang	28.037.674.143	APBD		50 orang /bulan	28.109.479.069
4.02.01.2.15.0002	Tersedianya Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. tuban	200 paket	351.850.950	APBD		50 paket	668.627.700
4.02.01.2.15.0003	Terlaksananya Anggota DPRD yang Mengikuti Medical Check Up	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. tuban	50 orang	29.909.600	APBD		50 orang	29.909.600
4.02.01.2.16	Meningkatnya Layanan administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah fasilitasi administrasi DPRD	Kab. tuban	60 kali	333.387.340	APBD		12 laporan	261.156.900
4.02.01.2.16.0001	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. tuban	1 dokumen	84.772.340	APBD		1 dokumen	50.999.900
4.02.01.2.16.0003	Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. tuban	60 rapat	248.615.000	APBD		60 laporan	210.157.000

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02	Sasaran Program: Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase Fasilitasi rancangan Perda yang disetujui sesuai SOP		100%	41.609.955.064			100 persen	37.229.518.660
			2. Persentase Informasi kegiatan DPRD dengan Media Masa		89%					
			3. Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti telah dituangkan menjadi pokok pokok pikiran DPRD		84,50%					
4.02.02.2.01	Meningkatnya fasilitasi pembahasan Raperda	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui	Kab. tuban	15 raperda	17.383.901.488	APBD		15 dokumen	15.925.402.100
4.02.02.2.01.0001	Tersusunnya dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. tuban	15 Dokumen	18.194.500	APBD		15 dokumen	16.400.000

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.01.0002	Tersusunnya dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. tuban	15 Dokumen	1.115.641.740	APBD		15 dokumen	1.011.088.550
4.02.02.2.01.0004	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. tuban	8 Dokumen	16.247.447.748	APBD		8 dokumen	14.895.330.550
4.02.02.2.01.0005	Tersusunnya Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Kab. tuban	1 Dokumen	2.617.500	APBD		1 dokumen	2.583.000
4.02.02.2.02	Meningkatnya fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat paripurna DPRD yang terfasilitasi	Kab. tuban	50 rapat	89.224.500	APBD		44 kali	82.013.000
4.02.02.2.02.0001	Tersusunnya Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. tuban	10 Dokumen	11.997.000	APBD		7 dokumen	11.767.000

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.02.0002	Tersusunnya Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. tuban	10 Dokumen	11.997.000	APBD		7 dokumen	11.767.000
4.02.02.2.02.0003	Tersusunnya Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. tuban	10 Dokumen	21.743.500	APBD		10 dokumen	18.368.000
4.02.02.2.02.0004	Tersusunnya Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. tuban	10 Dokumen	21.743.500	APBD		10 dokumen	18.368.000
4.02.02.2.02.0006	Tersusunnya Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. tuban	10 Dokumen	21.743.500	APBD		10 dokumen	21.743.000
4.02.02.2.04	meningkatnya kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	Kab. tuban	60 kegiatan	2.175.932.230	APBD		18 kegiatan	2.241.566.480

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.04.0002	Tersusunnya Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD peningkatan kapasitas	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD peningkatan kapasitas	Kab. tuban	21 dokumen	1.470.911.320	APBD		18 dokumen	1.594.571.200
4.02.02.2.04.0005	Meningkatnya kapasitas fraksi DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	Kab. tuban	6 orang	187.200.000	APBD		6 orang	187.200.000
4.02.02.2.04.0008	Tersusunnya Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. tuban	268 dokumen	517.820.910	APBD		180 dokumen	459.795.280
4.02.02.2.05	Meningkatnya fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah fasilitasi pokok pikiran DPRD	Kab. tuban	600 pokir	5.892.979.390	APBD		463 dokumen	4.375.540.920
4.02.02.2.05.0001	Tersusunnya Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. tuban	13 laporan	98.134.040	APBD		13 laporan	238.874.320
4.02.02.2.05.0002	Tersusunnya Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kab. tuban	600 dokumen	9.695.500	APBD		300 dokumen	9.695.500

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.02.2.05.0003	Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. tuban	150 dokumen	5.785.149.850	APBD		150 dokumen	4.126.971.100
4.02.02.2.08	Meningkatnya fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi aspirasi	Kab. tuban	106 kegiatan	16.067.917.456	APBD		82 kegiatan	14.604.996.160
4.02.02.2.08.0001	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. tuban	84 Dokumen	15.456.725.456	APBD		72 dokumen	13.919.944.160
4.02.02.2.08.0004	Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. tuban	10 Dokumen	611.192.000	APBD		10 dokumen	685.052.000
JUMLAH						83.119.005.970				74.594.814.832

- RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima

Sasaran :Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah		81,5 Poin	41.509.050.906		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian	Kab. tuban	9 dokumen	112.076.695	APBD	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	2 dokumen	94.379.620	APBD	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	7 dokumen	17.697.075	APBD	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	Kab. tuban	9 dokumen	4.687.071.959	APBD	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	30 Orang	3.897.048.234	APBD	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban	9 dokumen	774.253.775	APBD	
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban	9 dokumen	15.769.950	APBD	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Jumah layanan	Kab. tuban	72 orang	36.464.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Perangkat Daerah	peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai					
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban	69 Paket	976.000	APBD	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban	15 orang	35.488.000	APBD	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. tuban	6 jenis	2.346.246.443	APBD	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. tuban	6 Paket	52.821.738	APBD	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. tuban	6 Paket	95.077.050	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. tuban	6 Paket	10.000.000	APBD	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan disediakan	Kab. tuban	3 Paket	45.192.700	APBD	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. tuban	6 Paket	112.698.275	APBD	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. tuban	6 Dokumen	29.999.160	APBD	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. tuban	1325 laporan	49.486.500	APBD	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. tuban	120 laporan	1.950.971.020	APBD	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kab. tuban	3	3.839.788.950	APBD	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. tuban	4	3.056.084.000	APBD	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. tuban	50	54.000.000	APBD	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Kab. tuban	10	729.704.950	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Lainnya yang Disediakan					
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang	Kab. tuban	5 jenis	649.698.994	APBD	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. tuban	5 laporan	494.450	APBD	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban	12 laporan	243.670.400	APBD	
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. tuban	12 laporan	58.098.800	APBD	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban	15 laporan	347.435.344	APBD	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemelharaan BMD	Kab. tuban	19 jenis	1.084.881.832	APBD	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. tuban	21 unit	135.000.000	APBD	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kab. tuban	18 unit	408.874.332	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. tuban	24 unit	20.000.000	APBD	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. tuban	19 jenis	90.432.500	APBD	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. tuban	3 unit	430.575.000	APBD	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota dewan dalam layanan keuangan dan kesejahteraan	Kab. tuban	50 orang	28.419.434.693	APBD	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jummlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. tuban	50 orang	28.037.674.143	APBD	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. tuban	200 paket	351.850.950	APBD	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. tuban	50 orang	29.909.600	APBD	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah fasilitasi administrasi DPRD	Kab. tuban	60 kali	333.387.340	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. tuban	1 dokumen	84.772.340	APBD	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. tuban	60 rapat	248.615.000	APBD	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase Fasilitasi rancangan Perda yang disetujui sesuai SOP		100%	41.609.955.064		
		2. Persentase Informasi kegiatan DPRD dengan Media Masa		89%			
		3. Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti telah dituangkan menjadi pokok pokok pikiran DPRD		84,50%			
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui	Kab. tuban	15 raperda	17.383.901.488	APBD	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. tuban	15 Dokumen	18.194.500	APBD	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	Kab. tuban	15 Dokumen	1.115.641.740	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Peraturan Daerah					
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. tuban	8 Dokumen	16.247.447.748	APBD	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Kab. tuban	1 Dokumen	2.617.500	APBD	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat paripurna DPRD yang terfasilitasi	Kab. tuban	50 rapat	89.224.500	APBD	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. tuban	10 Dokumen	11.997.000	APBD	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. tuban	10 Dokumen	11.997.000	APBD	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. tuban	10 Dokumen	21.743.500	APBD	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. tuban	10 Dokumen	21.743.500	APBD	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. tuban	10 Dokumen	21.743.500	APBD	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Publikasi dan	Kab. tuban	60 kegiatan	2.175.932.230	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD					
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD peningkatan kapasitas	Kab. tuban	21 dokumen	1.470.911.320	APBD	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	Kab. tuban	6 orang	187.200.000	APBD	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. tuban	268 dokumen	517.820.910	APBD	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah fasilitasi pokok pikiran DPRD	Kab. tuban	600 pokir	5.892.979.390	APBD	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. tuban	13 laporan	98.134.040	APBD	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kab. tuban	600 dokumen	9.695.500	APBD	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. tuban	150 dokumen	5.785.149.850	APBD	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi aspirasi	Kab. tuban	106 kegiatan	16.067.917.456	APBD	

BAB IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan nantinya, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah mensyaratkan terbangunnya kerja sama yang strategis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Begitu pula dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi tersebut, serta tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban yang akan dicapai perlu adanya dukungan, dedikasi, semangat, loyalitas dan kerja yang maksimal dari seluruh aparatur yang ada di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban.

Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta kerja sama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif pada dasarnya merupakan jalinan interaksi yang melibatkan banyak komponen. Terbangunnya kerja sama konstruktif, keterbukaan dan saling menghargai proses pemerintahan dan pembangunan serta kerja sama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif bukan hanya akan berjalan efektif dan efisien tetapi sekaligus berpotensi akan mendekatkan dari Visi dan Misi yang hendak dicapai.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban beserta seluruh jajarannya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengedepankan koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mewujudkan pelayanan prima yang bersifat cepat, akurat, akuntabel, transparan dan adil.

Rencana tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban di masa mendatang antara lain:

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban dalam pemahaman ASN mengenai target dan realisasi indikator kinerja.
2. Mengoptimalkan pencapaian indikator outcome program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Strategis yang telah disusun dan disepakati
3. Meningkatkan koordinasi antar bagian di intern Sekretariat DPRD

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini untuk menjadi pedoman operasional guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas serta mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang ada.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN,

ttd.

SRI HIDAJATI, S.Sos, M.Ikom.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Renja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk

menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Sejalan dengan perkembangannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di tahun berjalan untuk lebih mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai sesuai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka perlu dilakukan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja yang telah disusun.

Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta prakiraan maju. Selain itu juga berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Perangkat Daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Perubahan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II di tahun berjalan;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan PAPBD; dan
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

a. Penambahan sub kegiatan baru untuk program riset dan inovasi daerah;
b. Pergeseran, pengurangan dan penambahan terhadap program/kegiatan untuk mendukung kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan program/kegiatan prioritas kepala daerah;

c. Sebagai bentuk upaya optimalisasi anggaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029; dan
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya akibat adanya berbagai perubahan kebijakan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Adapun tujuannya dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah :

1) Sebagai penjabaran dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
2) Sebagai pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dimplementasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025;
3) Sebagai pedoman atas pelaksanaannya, yang didalamnya berisikan pagu indikatif pendanaan yang dituangkan kedalam rekening-rekening belanja beserta indikator dan target kinerjanya yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025

sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan penjabaran pelaksanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tuban
Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Periode Pelaksanaan 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sasaran Pembangunan Daerah**		Persentase capaian sasaran RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	100 (%)	18.028.303.217	144 (%)	20.672.767.903	94 (%)	17.949.689.543	0 (%)	2.147.750.398	0 (%)	2.438.367.960	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	4.586.118.358	0 (%)	27.271.173.871	0 %	151.27 %	Kepala Badan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1		**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD	90 (%)	18.028.303.217	91.61 (%)	11.089.108.660	97.7 (%)	4.443.430.306	0 (%)	239.908.270	95.1 (%)	197.670.450	0 (%)	0	0 (%)	0	95.1 (%)	437.578.720	95.1 (%)	12.210.508.156	105.67 %	67.73 %	Kepala Bidang Rendalev
		1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan	30 (Dokumen)	7.539.509.048	22 (Dokumen)	4.301.722.583	4 (Dokumen)	1.730.575.850	0 (Dokumen)	150.639.270	1 (Dokumen)	152.710.200	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	303.349.470	23 (Dokumen)	4.984.460.553	76.67 %	66.11 %	JF Perencana Ahli Muda
		1. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 (Berita Acara)	271.222.460	4 (Berita Acara)	48.242.000	2 (Berita Acara)	63.999.000	2 (Berita Acara)	22.512.500	0 (Berita Acara)	23.037.500	0 (Berita Acara)	0	0 (Berita Acara)	0	2 (Berita Acara)	45.550.000	6 (Berita Acara)	93.792.000	600 %	34.58 %	JF Perencana Ahli Muda
		2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 (Berita Acara)	268.305.008	3 (Berita Acara)	18.020.000	2 (Berita Acara)	40.260.000	2 (Berita Acara)	27.872.500	0 (Berita Acara)	0	0 (Berita Acara)	0	0 (Berita Acara)	0	2 (Berita Acara)	27.872.500	5 (Berita Acara)	45.892.500	100 %	17,1 %	JF Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 (Berita Acara)	932.276.906	3 (Berita Acara)	322.757.250	2 (Berita Acara)	333.129.500	1 (Berita Acara)	0	1 (Berita Acara)	82.445.000	0 (Berita Acara)	0	0 (Berita Acara)	0	2 (Berita Acara)	82.445.000	5 (Berita Acara)	405.202.250	100 %	43.46 %	JF Perencana Ahli Muda
		4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2675 (Usulan)	890.406.435	3005 (Usulan)	269.066.088	1000 (Usulan)	129.056.500	930 (Usulan)	69.620.950	0 (Usulan)	0	0 (Usulan)	0	0 (Usulan)	0	930 (Usulan)	69.620.950	3935 (Usulan)	338.687.038	147.1 %	38.04 %	JF Perencana Ahli Muda
		5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 (Dokumen)	5.177.298.238	14 (Dokumen)	3.643.637.245	4 (Dokumen)	1.164.130.850	0 (Dokumen)	30.633.320	1 (Dokumen)	47.227.700	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	77.861.020	15 (Dokumen)	4.100.886.765	150 %	79.21 %	JF Perencana Ahli Muda
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**83,6**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen analisis dan profil pembangunan daerah	2 (Dokumen)	1.467.234.189	2 (Dokumen)	1.328.039.399	2 (Dokumen)	366.499.956	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.522.250	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.522.250	3 (Dokumen)	1.350.964.425	150 %	92.08 %	JF Perencana Ahli Muda
		1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	40 (Dokumen)	416.945.427	19 (Dokumen)	512.562.422	1 (Dokumen)	93.000.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	4.575.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	4.575.500	20 (Dokumen)	524.013.422	50 %	125.68 %	JF Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	42 (Orang)	664.541.962	42 (Orang)	596.001.537	42 (Orang)	207.999.956	42 (Orang)	0	42 (Orang)	576,750	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	42 (Orang)	576,750	42 (Orang)	605.105.563	100 %	91.06 %	JF Perencana Ahli Muda
		3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5 (Buku)	385.746.800	3 (Buku)	219.475.440	1 (Buku)	65.500.000	0 (Buku)	0	0 (Buku)	2.370.000	0 (Buku)	0	0 (Buku)	0	0 (Buku)	2.370.000	0 (Buku)	221.845.440	0 %	57.51 %	JF Perencana Ahli Muda
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**66,67**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sedang**														
		3. Implementasi Sistem Informasi Pemerinta	Jumlah Aplikasi SIPD Terimplementasi	1 (Aplikasi)	244.479.865	1 (Aplikasi)	124.051.760	1 (Aplikasi)	119.670.000	1 (Aplikasi)	74.257.000	1 (Aplikasi)	0	0 (Aplikasi)	0	0 (Aplikasi)	0	1 (Aplikasi)	74.257.000	1 (Aplikasi)	199.663.760	100 %	81.67 %	JF Perencana Ahli

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		han Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																						Muda
		1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	4 (Dokumen)	173.665.642	1 (Dokumen)	124.051.760	1 (Dokumen)	119.670.000	1 (Dokumen)	74.257.000	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	74.257.000	1 (Dokumen)	199.663.760	25 %	114.97 %	JF Perencana Ahli Muda
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pendukungnya	65 (Dokumen)	8.777.080.114	38 (Dokumen)	5.335.294.918	11 (Dokumen)	2.226.684.500	1 (Dokumen)	15.012.000	1 (Dokumen)	37.438.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	52.450.000	40 (Dokumen)	5.675.419.418	61.54 %	64.66 %	JF Perencana Ahli Muda
		1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	65 (Laporan)	8.777.080.114	38 (Laporan)	5.335.294.918	11 (Laporan)	2.226.684.500	1 (Laporan)	15.012.000	1 (Laporan)	37.438.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	52.450.000	2 (Laporan)	5.675.419.418	3,08 %	64.66 %	JF Perencana Ahli Muda
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**18,18**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**48,3**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**														
2		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (Poin)	27.510.368.677	165.15 (Poin)	23.181.334.810	83 (Poin)	13.506.259.237	0 (Poin)	1.907.842.128	0 (Poin)	2.240.697.510	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	4.148.539.638	0 (Poin)	28.658.341.282	0 %	104.17 %	Kepala Badan
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah hasil perencanaan perangkat daerah	9 (Jenis)	798.910.000	9 (Jenis)	390.237.745	10 (Jenis)	272.499.950	3 (Jenis)	8.238.500	1 (Jenis)	1.871.500	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	4 (Jenis)	10.110.000	4 (Jenis)	440.000.955	44.44 %	55.08 %	JF Perencana Ahli Muda
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 (Dokumen)	215.550.000	6 (Dokumen)	78.074.100	3 (Dokumen)	110.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.871.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.871.500	6 (Dokumen)	85.740.100	60 %	39.78 %	JF Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 (Laporan)	139.330.000	12 (Laporan)	41.169.500	4 (Laporan)	17.999.950	0 (Laporan)	945,000	1 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	945,000	13 (Laporan)	42.114.500	65 %	30.23 %	JF Perencana Ahli Muda
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15 (Laporan)	444.030.000	9 (Laporan)	270.994.145	3 (Laporan)	144.500.000	3 (Laporan)	7.293.500	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	7.293.500	12 (Laporan)	312.146.355	80 %	70,3 %	JF Perencana Ahli Muda
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**41,67**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi sumber daya aparatur	60 (Orang)	526.270.652	227 (Orang)	657.539.525	70 (Orang)	250.945.200	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	657.539.525	0 %	124.94 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	71 (Paket)	37.559.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	70 (Orang)	213.386.200	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah hasil administrasi keuangan	27 (Jenis)	19.685.271.087	27 (Jenis)	15.818.270.215	27 (Jenis)	10.407.943.370	27 (Jenis)	1.723.112.695	27 (Jenis)	2.007.278.739	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	27 (Jenis)	3.730.391.434	27 (Jenis)	20.659.699.445	100 %	104.95 %	Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 (Orang/Bulan)	19.017.219.475	57 (Orang/Bulan)	15.413.434.515	70 (Orang/Bulan)	10.291.785.870	58 (Orang/Bulan)	1.722.028.195	59 (Orang/Bulan)	1.993.638.239	0 (Orang/Bulan)	0	0 (Orang/Bulan)	0	59 (Orang/Bulan)	3.715.666.434	59 (Orang/Bulan)	20.227.697.445	173.53 %	106.37 %	Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 (Dokumen)	558.230.000	9 (Dokumen)	359.121.100	9 (Dokumen)	90.380.000	9 (Dokumen)	1.084.500	9 (Dokumen)	13.640.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	9 (Dokumen)	14.725.000	9 (Dokumen)	384.247.100	20 %	68.83 %	Analis Keuangan Pusat dan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 (Dokumen)	69.493.577	2 (Dokumen)	23.441.000	1 (Dokumen)	10.905.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	23.441.000	50 %	33.73 %	Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 (Dokumen)	15.299.000	2 (Dokumen)	4.540.500	1 (Dokumen)	2.750.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	4.540.500	0 %	29.68 %	Analis Keuangan Pusat dan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	14 (Dokumen)	9.950.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	2.040.300	0 %	0 %	Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 (Dokumen)	10.521.035	5 (Dokumen)	971,000	2 (Dokumen)	2.172.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	971,000	62,5 %	9,23 %	Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**37,86**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis adminitrasi perkantoran yang disediakan	7 (Jenis)	2.236.141.293	7 (Jenis)	3.023.013.459	6 (Jenis)	963.635.779	6 (Jenis)	51.712.660	6 (Jenis)	68.173.280	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	6 (Jenis)	119.885.940	6 (Jenis)	3.267.933.073	85.71 %	146.14 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	4.517.800	1 (Paket)	19.346.600	4 (Paket)	7.903.945	1 (Paket)	1.080.000	3 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	4 (Paket)	1.080.000	5 (Paket)	23.434.600	500 %	518.72 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 (Paket)	630.386.543	3 (Paket)	1.737.953.687	4 (Paket)	308.927.614	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	1.772.962.225	100 %	281.25 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	555.466.000	1 (Paket)	602.853.300	12 (Paket)	376.064.140	3 (Paket)	37.673.000	3 (Paket)	31.597.200	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	6 (Paket)	69.270.200	7 (Paket)	715.897.200	700 %	128.88 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 (Paket)	339.998.750	2 (Paket)	187.134.650	4 (Paket)	79.647.600	0 (Paket)	0	0 (Paket)	18.000.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	18.000.000	2 (Paket)	222.878.850	100 %	65.55 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	11.802.480	5 (Dokumen)	1.768.000	5 (Dokumen)	2.952.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	4.720.000	5 (Dokumen)	6.488.000	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 (Laporan)	629.500.000	185 (Laporan)	441.261.222	30 (Laporan)	179.290.000	8 (Laporan)	11.191.660	12 (Laporan)	15.624.080	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	20 (Laporan)	26.815.740	205 (Laporan)	491.808.198	136.67 %	78.13 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**52,78**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	13 (Unit)	402.124.624	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	13 (Unit)	402.124.624	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
			Predikat kinerja sub kegiatan							Sangat Rendah														
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	25 (Laporan)	2.873.305.550	5 (Laporan)	1.553.009.214	40 (Laporan)	602.382.944	20 (Laporan)	105.020.173	15 (Laporan)	112.285.419	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	35 (Laporan)	217.305.592	40 (Laporan)	1.809.176.960	160 %	62.97 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	449,500	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	166.020.084	3 (Laporan)	26.846.927	3 (Laporan)	26.459.524	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	53.306.451	6 (Laporan)	73.399.989	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 (Laporan)	184.000.000	3 (Laporan)	128.554.550	12 (Laporan)	46.769.100	3 (Laporan)	0	3 (Laporan)	1.820.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	1.820.000	9 (Laporan)	134.544.550	90 %	73.12 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 (Laporan)	2.635.613.050	3 (Laporan)	1.371.696.841	12 (Laporan)	389.144.260	3 (Laporan)	78.173.246	3 (Laporan)	84.005.895	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	6 (Laporan)	162.179.141	9 (Laporan)	1.548.474.598	60 %	58.75 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**37,5**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**														
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30 (Unit)	1.342.984.250	60 (Unit)	1.371.132.728	30 (Unit)	606.727.370	3 (Unit)	19.758.100	8 (Unit)	51.088.572	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	11 (Unit)	70.846.672	71 (Unit)	1.455.859.400	236.67 %	108.4 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 (Unit)	808.734.250	3 (Unit)	552.237.876	30 (Unit)	266.888.104	3 (Unit)	16.920.600	8 (Unit)	17.362.900	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	11 (Unit)	34.283.500	14 (Unit)	599.023.876	46 6.67 %	74 .07 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	20 (Unit)	6.400.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 (Unit)	119.000.000	2 (Unit)	95.717.000	2 (Unit)	47.952.000	2 (Unit)	2.107.500	2 (Unit)	7.263.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	9.370.500	2 (Unit)	106.465.000	10 0 %	89 .47 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 (Unit)	268.750.000	1 (Unit)	668.665.152	1 (Unit)	281.709.366	0 (Unit)	379,000	0 (Unit)	26.462.672	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	26.841.672	1 (Unit)	695.506.824	100 %	258.79 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	10 (Unit)	3.777.900	1 (Unit)	351,000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	351,000	1 (Unit)	351,000	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**29,33**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**52,02**														
Predikat kinerja kegiatan										**Rendah**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**48,67**														
Predikat kinerja program										**Sangat Rendah**														
B	**Meningkatnya kualitas Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi	10 (%)	11.566.708.671	59.25 (%)	6.004.400.529	10 (%)	4.008.854.600	-100 (%)	2.280.000	-100 (%)	149.201.600	0 (%)	0	0 (%)	0	-100 (%)	151.481.600	-100 (%)	6.781.311.629	-1000 %	58.63 %	Kepala Badan
1		**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	Jumlah inovasi yang dihasilkan	5 (Inovasi)	11.566.708.671	6 (Inovasi)	6.004.400.529	7 (Inovasi)	4.008.854.600	0 (Inovasi)	2.280.000	5 (Inovasi)	149.201.600	0 (Inovasi)	0	0 (Inovasi)	0	5 (Inovasi)	151.481.600	5 (Inovasi)	6.781.311.629	100 %	58.63 %	Kepala Badan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	2.334.386.600	0 (Laporan)	2.280.000	0 (Laporan)	2.475.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	4.755.000	0 (Laporan)	20.585.000	0 %	0 %	Kepala Bidang Ridat
		1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5 (Laporan)	862.452.423	4 (Laporan)	518.825.183	1 (Laporan)	2.169.026.100	0 (Laporan)	2.280.000	0 (Laporan)	2.475.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	4.755.000	4 (Laporan)	539.410.183	80 %	62.54 %	JF Perekayasa Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	165.360.500	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Ridata
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang sosial dan kependudukan	10 (Dokumen)	1.732.831.806	6 (Dokumen)	960.034.080	2 (Dokumen)	326.136.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.630.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.630.000	7 (Dokumen)	1.111.664.080	70 %	64.15 %	JF Perekayasa Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	160.770.500	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.630.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.630.000	1 (Dokumen)	151.630.000	0 %	0 %	JF Perekayasa Ahli Muda
		2. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	165.365.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	JF Perekayasa Ahli Muda
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	19 (Dokumen)	2.973.718.864	11 (Dokumen)	1.628.465.480	4 (Dokumen)	705.442.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	3.962.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	3.962.000	11 (Dokumen)	1.988.580.480	57.89 %	66.87 %	JF Perekayasa Ahli Muda
		1. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 (Dokumen)	289.317.486	3 (Dokumen)	468.491.800	1 (Dokumen)	163.860.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	474.644.800	150 %	164.06 %	JF Perekayasa Ahli Muda
		2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	163.860.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	JF Perekayasa Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	168.860.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.233.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.233.000	0 (Dokumen)	157.233.000	0 %	0 %	JF Perekayasa Ahli Muda
		4. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	208.860.500	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.729.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.729.000	1 (Dokumen)	196.729.000	0 %	0 %	JF Perekayasa Ahli Muda
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**25**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														
		4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	25 (Jenis)	5.131.289.676	15 (Jenis)	2.611.802.686	5 (Jenis)	642.890.000	1 (Jenis)	0	1 (Jenis)	141.134.600	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	2 (Jenis)	141.134.600	17 (Jenis)	2.856.383.786	68 %	55.67 %	JF Perekayasa Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	380.000.000	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	61.207.100	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	61.207.100	1 (Dokumen)	149.932.100	0 %	0 %	JF Perekayasa Ahli Muda
		2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	95.990.000	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	77.027.500	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	77.027.500	1 (Laporan)	77.027.500	0 %	0 %	JF Perekayasa Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5 (Laporan)	196.309.627	3 (Laporan)	67.835.430	1 (Laporan)	55.000.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	82.556.930	60 %	42.05 %	JF Perekayasa Ahli Muda
		4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 (Laporan)	617.201.202	3 (Laporan)	106.297.000	1 (Laporan)	22.900.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	2.900.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	2.900.000	3 (Laporan)	109.197.000	60 %	17.69 %	JF Perekayasa Ahli Muda
		5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	89.000.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 %	0 %	JF Perekayasa Ahli Muda
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**40**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II		III		IV									
						Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**															
						Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**22,5**															
						Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**															
						Rata-rata capaian kinerja program(%)	**71,43**															
						Predikat kinerja program	**Sedang**															
C	**Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan**		Persentase Capaian Program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	100 (%)	13.462.390.826	100 (%)	7.907.867.198	92.5 (%)	2.772.328.912	0 (%)	94.755.350	0 (%)	117.748.740	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	212.504.090	0 (%)	8.591.820.351	0 %	63.82 %	Kepala Badan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1		**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Penjabaran Program RPJMD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	90 (%)	0	93.22 (%)	0	100 (%)	2.772.328.912	95.89 (%)	94.755.350	95.89 (%)	117.748.740	0 (%)	0	0 (%)	0	95.89 (%)	212.504.090	95.89 (%)	683.953.153	106.54 %	0 %	Kepala Bidang PSDAIK
			Persentase Penjabaran Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	90 (%)	13.462.390.826	100.46 (%)	7.907.867.198	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	7.907.867.198	0 %	58.74 %	Kepala Bidang PPM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	15 (Dokumen)	4.226.799.872	9 (Dokumen)	2.896.854.543	3 (Dokumen)	891.026.412	0 (Dokumen)	26.492.000	0 (Dokumen)	46.605.580	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	73.097.580	9 (Dokumen)	3.095.736.623	60 %	73.24 %	Kepala Bidang PPM
		1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 (Dokumen)	966.371.710	6 (Dokumen)	995.626.889	2 (Dokumen)	306.950.195	0 (Dokumen)	14.345.000	0 (Dokumen)	9.060.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	23.405.000	6 (Dokumen)	1.023.807.889	60 %	105.94 %	JF Perencana Ahli Muda
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)																						

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 (Laporan)	212.873.335	5 (Laporan)	61.718.000	2 (Laporan)	27.549.887	0 (Laporan)	1.560.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	1.560.000	5 (Laporan)	64.018.000	50 %	30.07 %	JF Perencana Ahli Muda
		3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 (Laporan)	644.300.282	5 (Laporan)	782.632.850	3 (Laporan)	344.424.000	0 (Laporan)	2.730.500	0 (Laporan)	10.471.580	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	13.202.080	5 (Laporan)	888.863.430	125 %	137.96 %	JF Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Pemerintahan																						
		4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 (Dokumen)	817.293.045	5 (Dokumen)	832.595.854	3 (Dokumen)	160.994.055	0 (Dokumen)	7.856.500	0 (Dokumen)	18.614.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	26.470.500	5 (Dokumen)	868.543.354	100 %	106.27 %	JF Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	51.108.275	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	8.460.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	8.460.000	0 (Laporan)	26.223.000	0 %	0 %	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	10 (Dokumen)	4.751.074.954	5 (Dokumen)	2.430.102.480	2 (Dokumen)	1.306.396.000	0 (Dokumen)	36.936.600	0 (Dokumen)	51.565.160	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	88.501.760	5 (Dokumen)	2.566.851.826	50 %	54.03 %	JF Perencana Ahli Muda
		1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 (Dokumen)	81.084.500	3 (Dokumen)	290.121.860	1 (Dokumen)	300.950.500	0 (Dokumen)	17.489.600	0 (Dokumen)	8.465.300	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	25.954.900	3 (Dokumen)	324.889.785	60 %	400.68 %	JF Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	27.916.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	6.817.500	0 %	0 %	
		3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 (Laporan)	230.823.200	6 (Laporan)	744.256.000	1 (Laporan)	160.425.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	39.338.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	39.338.000	6 (Laporan)	796.926.500	120 %	345.25 %	JF Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Perekonomian																						
		4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 (Dokumen)	235.423.000	3 (Dokumen)	931.097.854	1 (Dokumen)	747.845.500	0 (Dokumen)	11.637.000	1 (Dokumen)	3.761.860	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	15.398.860	4 (Dokumen)	965.781.275	80%	410.23%	JF Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	69.259.000	0 (Dokumen)	7.810.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	7.810.000	0 (Dokumen)	7.810.000	0 %	0 %	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**20**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	10 (Dokumen)	690.987.000	6 (Dokumen)	2.580.910.175	2 (Dokumen)	574.906.500	0 (Dokumen)	31.326.750	0 (Dokumen)	19.578.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	50.904.750	6 (Dokumen)	2.929.231.902	60 %	423.92 %	JF Perencana Ahli Muda
		1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	110.000.000	0 (Dokumen)	18.967.750	0 (Dokumen)	2.917.750	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	21.885.500	0 (Dokumen)	42.881.977	0 %	0 %	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		2. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	48.024.500	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	11.872.000	0 %	0 %	
		3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 (Dokumen)	1.977.767.000	3 (Dokumen)	1.710.518.930	1 (Dokumen)	380.597.000	0 (Dokumen)	12.359.000	0 (Dokumen)	9.407.750	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	21.766.750	3 (Dokumen)	1.990.391.680	60 %	100.64 %	JF Perencana Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		RPJMD dan RKPD)																						
		4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	36.285.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	7.252.500	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	7.252.500	0 (Laporan)	13.695.000	0 %	0 %	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban merupakan perangkat daerah pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi yang menjadi keweanangan daerah. Adapun penjabaran dari fungsi tugas pokok ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 66 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Bupati Nomor Tuban 41 Tahun 2018, kemudian telah diubah lagi ke dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 177 Tahun 2021 kemudian diubah lagi ke dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2022 dan terakhir diubah lagi ke dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2024

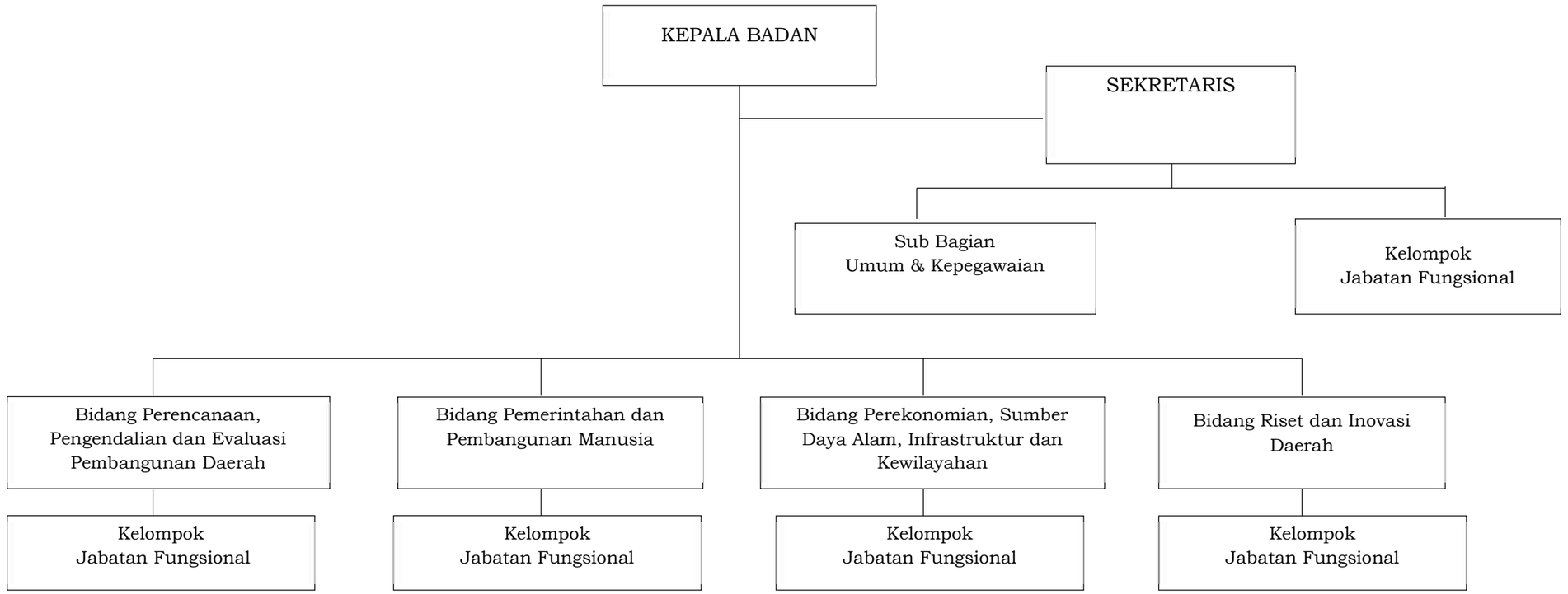

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan daerah yang dijabarkan dalam fungsi sebagi berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
d. pembinaan teknis penyelenggaran fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban terdiri atas sekretariat dan 4 bidang, serta kelompok jabatan fungsional, yaitu :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana tersebut diatas dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Bidang-bidang :

1. Bidang Sekretariat
   a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
   b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
   c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
   d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
   e. pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
   c. pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
   d. pelaksanaan pengawasan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ;
   e. pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan pendanaan;
   f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
   g. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
   h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
   i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
   j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
   b. pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
   c. pelaksanaan pembinaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
   d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
   e. pelaksanaan pengawasan pemerintahan;

f. pelaksanaan pengawasan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
g. pelaksanaan pembinaan pembangunan manusia;
h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
   b. pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
   c. pelaksanaan pembinaan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
   d. pelaksanaan pengawasan pengendalian bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
   e. pelaksanaan pembinaan ekonomi;
   f. pelaksanaan pengawasan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   g. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
   h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
   i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
   j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pembinaan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
   b. penyusunan rencana induk dan peta jalanan pemajuan ilmu pengetahuan di daerah;

c. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
f. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
g. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
h. pelaksanaan dan fasilitasi uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
i. pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
j. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
k. koordinasi dan fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual dan indikasi geografis;
l. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
m. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
n. pelayanan administrasi dan pelaporan; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban menempati gedung perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. Jumlah ruang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban terdiri dari 7 ruang kerja, 4 ruang rapat, 1 gudang, 8 kamar mandi, 1 ruang lobby, dan 1 mushola. Luasan gedung yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah seluruhnya seluas ± 946 m2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran

dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Selain bangunan gedung tersebut, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daera, didukung pula dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
I	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
	Alat-Alat Angkutan	37	
	- *Station Wagon*	3	
	- *Mini Bus* (Penumpang 14 Orang ke bawah)	3	
	- Sepeda Motor	31	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	17	
	- *Global Positioning System* (GPS)	13	
	- *Laser Ace*	4	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	378	
	- Mesin Ketik Manual Standart (14-16)	7	
	- Lemari Besi	4	
	- Rak Besi/Metal	5	
	- Rak Kayu	21	
	- Filling Besi/Metal	44	
	- Brandkas	1	
	- Peta	1	
	- Mesin Absensi	3	
	- LCD Proyektor/*Infocus*	3	
	- Alat Kantor Lainnya	3	
	- Kursi Kayu	5	
	- Meja Rapat	18	
	- Meja Resepsionis	2	

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
	- Meja ½ Biro	51	
	- Kursi Rapat	10	
	- Kursi Tamu	3	
	- Kursi Putar	11	
	- Mesin Penghisap Debu	1	
	- Mesin Pemotong Rumput	1	
	- Lemari Es	1	
	- AC Window	30	
	- Televisi	4	
	- Wireless	3	
	- Unit Power Supply	2	
	- Stabilisator	1	
	- Camera Video	5	
	- Lambang Garuda Pancasila	1	
	- Dispenser	5	
	- Handy Cam	2	
	- Gordyin/Kray	1	
	- Alat Rumah Tangga Lain-Lain	6	
	- Alat Pembantu Kebakaran	2	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	60	
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	5	

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
	- Lemari Arsip	1	
	- Buffet Kayu	4	
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	13	
	- Microphone/Wireless MIC	2	
	- Power Supply Microphone	1	
	- Professional Sound System	4	
	- Video Monitor	1	
	- Tripod Camera	1	
	- Layar Film/Projector	1	
	- Camera Digital	1	
	- Video Conference	1	
	- *Faximile*	1	
	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	3	
	- Alat Keamanan lain-lain	1	
	- Target Drone	1	
	- Kamera Digital	1	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.

2.2.2 Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan rencana kerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Tuban, khusus untuk Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban pada perubahan APBD Tahun 2025 mengalami pengurangan dalam rangka efisiensi anggaran sebesar Rp 2.263.751.503,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah). Dari anggaran semula berjumlah Rp 21.566.889.896,00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp 19.303.138.393,00 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

2.2.3 Administrasi Kepegawaian

Sedangkan personil yang menangani Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 sebanyak 69 orang.

Pengelompokan berdasarkan kepangkatan/golongan :

1. Golongan IV sebanyak 4 orang
2. Golongan III sebanyak 22 orang
3. Golongan II sebanyak 6 orang
4. PPPK 25 orang

Pengelompokan berdasarkan pendidikan :

1. Magister (S2) sebanyak 10 orang
2. Sarjana (S1) sebanyak 40 orang
3. Sarjana Muda/Diploma III sebanyak 6 orang
4. SLTA sebanyak 1 orang

2.2.4 Analisis Capaian Kinerja

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah seperti pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah			92,3	93	94	100	96	148	94	100	
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan			92	92,4	92,5	100	90,4	100	92,4	100	
3.	Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah			10	10	10	10	42,86	16,39	10	10	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembagunan, Riset dan Inovasi Daerah

Dalam mewujudkan misi Kepala Daerah yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif” maka dalam masa pembangunan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dijumpai adanya isu penting yaitu : “Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan”.

Bapperida Kabupaten Tuban sebagai institusi strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun secara kelembagaan telah menjalankan peran perencanaan sesuai dengan siklus tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa kualitas perencanaan belum optimal.

Portal Satu Data merupakan aplikasi yang memusatkan data statistik yang ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk disatukan dalam satu portal yang terpusat. Dengan pengelolaan data terpusat kita dapat mencentralisasi data dengan baik , dan mengurangi kemungkinan data ganda. Dengan demikian proses pemetaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

Dalam rangka memastikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dikembangkan aplikasi pengukuran kinerja perangkat daerah berupa aplikasi e-Monev. Aplikasi ini mengintegrasikan komponen perencanaan dalam aplikasi Simanisku, pengadaan melalui Sirup, pengukuran kinerja individu pada aplikasi Siteman dan pelaporan kinerja perangkat daerah melalui e-Dalev. Integrasi berbagai aplikasi dalam e-Monev, memudahkan dalam memonitor capaian kinerja organisasi sekaligus dapat secara cepat mengambil langkah yang diperlukan guna perbaikan kebijakan atau strategi pencapaian target kinerja.

Kedepan, salah satu tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perencanaan adalah lingkungan eksternal yang dinamis. Dimana target capaian kinerja yang berupa *outcome* maupun dampak atau *impact* dari sebuah kebijakan perencanaan daerah berpotensi tidak dapat dicapai karena ada perubahan kebijakan nasional, kondisi geopolitik global maupun hambatan yang bersifat *force majore*. Adapun tantangan internal yang paling mendasar dalam upaya pencapaian akuntabilitas perencanaan adalah validitas data perencanaan yang merupakan kunci apakah sebuah kebijakan dapat dicapai dan tepat sasaran.

Berbagai grafik indikator makro pembangunan yang bergerak positif menjadikan keuntungan tersendiri yang memperbesar peluang tercapaiannya target pembangunan kedepan. Berbagai grafik indikator yang positif juga didukung dengan potensi daerah baik itu sumber daya alam, SDM maupun ekonomi yang baik. Komitmen pimpinan yang mendorong seluruh *stakeholder* untuk melakukan lompatan-lompatan dan berlomba-lomba untuk menampilkan inovasi diberbagai bidang juga merupakan salah satu faktor yang menjadi katalisator pencapaian target kinerja. Monitor dan evaluasi yang dilakukan sebagai bentuk deteksi dini akan capaian kinerja serta sebagai bagian perbaikan dimasa yang akan datang.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah dengan berpedoman pada perencanaan ditingkat atasnya. Secara subtansi RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan RKPD Tahun 2025 dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja 2025 pada Triwulan 2 tahun 2025. Hasil evaluasi dan *review* kinerja menunjukan perlunya penyesuaian dalam pencapaian target kinerja tahun 2025. Secara garis besar *review* kinerja terhadap rancangan awal RKPD dapat digambarkan melalui tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.843.093.217	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				16.293.818.926,99	
	PERENCANAAN				17.834.238.617	PERENCANAAN				14.789.837.569,99	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83 Poin	11.218.463.405	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,15 Poin	10.349.775.315	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah hasil perencanaan perangkat daerah	9 Jenis	272.499.950	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah hasil perencanaan perangkat daerah	10 Jenis	183.296.656	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	110.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.073.900	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	17.999.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.694.500	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	144.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	88.528.256	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah hasil administrasi keuangan	27 Jenis	8.141.747.538	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah hasil administrasi keuangan	27 Jenis	8.431.810.887	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.019.590.038	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	8.353.180.387	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana	9 Dokumen	96.380.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana	9 Dokumen	68.680.500	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			an Tugas ASN					an Tugas ASN			
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.905.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	9.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	9.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.172.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi sumber daya aparatur	64 Orang	250.945.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi sumber daya aparatur	62 Orang	29.066.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	37.559.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 Paket	976.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis mplementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	213.386.200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis mplementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	28.090.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah jenis adminitrasi perkantora	7 Jenis	963.635.779	Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah jenis adminitrasi perkantora	7 Jenis	696.555.718	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			n yang disediakan					n yang disediakan			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.903.945	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.595.725	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	308.927.614	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	255.004.873	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	376.064.140	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	273.540.140	
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	79.647.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58.543.000	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Dokumen	11.802.480	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Dokumen	11.802.480	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Disediakan					yang Disediakan			
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	179.290.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	91.069.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	402.124.624	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	402.124.624	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	40 Laporan	580.782.944	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5 Laporan	592.651.444	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	449.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	166.020.084	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	166.020.084	
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.769.100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	46.769.100	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	367.544.260	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	379.862.260	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30 Unit	606.727.370	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30 Unit	416.394.610	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	266.888.104	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	266.888.104	
23	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	6.400.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	6.400.000	
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	47.952.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	33.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	281.709.366	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105.060.000	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	3.777.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.146.506	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD	97,70 %	3.943.446.300	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD	80,00 %	2.599.929.423	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan	4 Dokumen	1.730.591.800	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan	4 Dokumen	1.184.851.800	
27	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	63.999.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	45.570.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	40.260.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	28.075.500	
29	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	333.129.500	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	83.007.500	
30	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	1000 Usulan	109.072.450	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	1000 Usulan	70.006.440	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	1.184.130.850	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	958.192.360	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen analisis dan profil pembangunan daerah	2 Dokumen	266.500.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen analisis dan profil pembangunan daerah	2 Dokumen	209.871.163	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	93.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	36.375.772	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	42 Orang	108.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	42 Orang	151.017.185	
34	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	65.500.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	22.478.206	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pendukungnya	11 Dokumen	1.826.684.500	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pendukungnya	8 Dokumen	1.111.982.960	
35	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0	0	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	550.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	11 Laporan	1.826.684.500	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	561.982.960	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Aplikasi SIPD Terimplementasi	1 Aplikasi	119.670.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Aplikasi SIPD Terimplementasi	1 Aplikasi	93.223.500	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	119.670.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	93.223.500	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	891.026.412	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renja Perangkat Daerah Persentase Capaian Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	100%	382.967.289,99	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dengan Tingkat Capaian Sekurang-kurangnya 76%			

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen	891.026.412	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen	382.967.289,99	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	306.950.195	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	117.660.900	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	27.549.887	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	10.937.758,49	
40	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJ	3 Laporan	344.424.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJ	3 Laporan	151.629.780	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			MD pada Bidang Pemerintahan					MD pada Bidang Pemerintahan			
41	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	3 Dokumen	160.994.055	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	3 Dokumen	69.718.259	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			RPJMD dan RKPD)					RPJMD dan RKPD)			

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	51.108.275	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	33.020.592,50	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	1.781.302.500	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	1.457.165.542	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	1.206.396.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	768.985.798	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	300.950.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	317.655.905	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	27.916.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	8.323.128	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	160.425.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	137.824.300	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	647.845.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	279.207.775	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	69.259.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan	25.974.690	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	574.906.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	688.179.744	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	110.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	69.181.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	48.024.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Laporan	23.596.672	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	380.597.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	569.833.600	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	36.285.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan	25.568.472	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4.008.854.600	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.503.981.357	
	PROGRAM PENELITIAN DAN		Jumlah Inovasi	7 Inovasi	4.008.854.600	PROGRAM PENELITIAN DAN		Jumlah Inovasi	7 Inovasi	1.434.706.757	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENGEMBANGAN DAERAH		yang Dihasilkan			PENGEMBANGAN DAERAH		yang Dihasilkan			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	2.334.386.600	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	68.401.675	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	2.169.026.100	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	68.401.675	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan HasilPelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan EvaluasiPenelitian danPengembangan BidangKetatalaksanaan Desa	1 Laporan	165.360.500	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan HasilPelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan EvaluasiPenelitian danPengembangan BidangPenataan Kelembagaan Desa	0 Laporan	0	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang sosial dan kependudukan	2 Dokumen	326.136.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang sosial dan kependudukan	2 Dokumen	314.165.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	160.770.500	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	154.515.000	
59	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan	1 Dokumen	165.365.500	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	159.650.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Keluarga Berencana								
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Dokumen	705.442.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Dokumen	676.446.496	
60	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustr	1 Dokumen	163.860.500	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustr	1 Dokumen	157.773.248	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ian dan Perdagangan					ian dan Perdagangan			
61	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	208.860.500	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	200.450.000	
62	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	168.860.500	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	160.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	163.860.500	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	157.773.248	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Dokumen/ Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5 Jenis	642.890.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Dokumen/ Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5 Jenis	375.693.586	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	380.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	207.983.586	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	95.990.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	77.027.500	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	55.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	23.775.000	
66	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi	1 Laporan	22.900.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi	1 Laporan	2.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Hasil-Hasil Kelitbangan					Hasil-Hasil Kelitbangan			
67	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	89.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	64.007.500	
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase Inovasi yang Terimplementasi	0%	0	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase Inovasi yang Terimplementasi	30%	69.274.600	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Invensi dan Inovasi		Jumlah Laporan Hasil Invensi dan Inovasi	0	0	Invensi dan Inovasi		Jumlah Laporan Hasil Invensi dan Inovasi	4 Laporan	69.274.600	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada	0	0	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada	1 Laporan	18.655.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pelaku inovasi					pelaku inovasi			
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	0	0	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	50.619.600	
Jumlah					21.843.093.217	Jumlah				16.293.818.927	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban tidak terdapat program dan kegiatan yang merupakan usulan dari Masyarakat seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
				Volume	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*
	----------NIHIL ----------					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yang mendasari perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2025 yang nantinya akan dilaksanakan, diantaranya :

1. Adanya beberapa kegiatan yang rekeningnya perlu dilakukan penggeseran karena kurang sesuai dengan peruntukannya;
2. Adanya beberapa anggaran kegiatan yang perlu dikurangi karena tidak bisa dilaksanakan secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala;
3. Adanya beberapa kegiatan yang perlu ditambahkan karena berbagai kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan.

Berkenaan dengan beberapa keadaan diatas maka pada APBD Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+ / -)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	24.730.873.055,-	16.293.818.927,-	8.437.054.128,-

Sumber : PAPBD Bapperida Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban pada perubahan APBD Tahun 2025 mengalami pengurangan dalam rangka efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.437.054.128 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Dari anggaran semula berjumlah Rp. 24.730.873.055 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp. 16.293.818.927 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Untuk melihat perkembangan

perubahan anggaran pada masing-masing program yang ada pada masing-masing urusan, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Rincian Perubahan APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2025

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					24.730.873.055	16.293.818.927				21.690.813.876
5	1					PERENCANAAN					20.722.018.455	14.789.837.570				19.660.813.876
					Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai komponen perencanaan pada SAKIP Daerah									
					Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan daerah		Persentase capaian sasaran RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%									

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		83 Poin	83,15 Poin	13.506.259.237	10.349.775.315			82.75 Poin	11.629.858.091
5	1	1	02.		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah hasil perencanaan perangkat daerah		9 Jenis	10 Jenis	272.499.950	183.296.656			9 Jenis	198.000.000
5	1	1	02. 01	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	2 Dokumen	3 Dokumen	110.000.000	90.073.900	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Dokumen	33.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.01	6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	4 Laporan	4 Laporan	17.999.950	4.694.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Laporan	19.800.000
5	1	1	02.01	7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	3 Laporan	3 Laporan	144.500.000	88.528.256	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Laporan	145.200.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.02		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah hasil administrasi keuangan		27 Jenis	27 Jenis	10.407.943.370	8.431.810.887			27 Jenis	8.797.509.991
5	1	1	02.02	1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	60 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan	10.291.785.870	8.353.180.387	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		59 Orang/bulan	8.661.157.241
5	1	1	02.02	2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	9 Dokumen	9 Dokumen	90.380.000	68.680.500	Sisa Lebih Perhitungan		9 Dokumen	107.998.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Anggaran Tahun Sebelumnya			
5	1	1	02.02	4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	10.905.000	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Dokumen	11.995.000
5	1	1	02.02	5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	2.750.000	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		1 Laporan	3.025.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Keuangan Akhir Tahun SKPD						Tahun Sebelumnya			
5	1	1	02.02	7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	12 Laporan	9.950.000	9.950.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Laporan	10.945.000
5	1	1	02.02	8	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	2 Dokumen	2 Dokumen	2.172.500	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		2 Dokumen	2.389.750

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Tahun Sebelumnya			
5	1	1	02.		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi sumber daya aparatur		0 Orang	70 Orang	250.945.200	29.066.000			62 Orang	322.639.200
5	1	1	02. 05	2	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	64 Paket	72 Paket	37.559.000	976.000	-		74 Paket	35.000.000
5	1	1	02. 05	11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis mplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	64 Orang	70 Orang	213.386.200	28.090.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		62 Orang	287.639.200

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Sebelumnya			
5	1	1	02.06		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis adminitrasi perkantoran yang disediakan		0 Jenis	7 Jenis	963.635.779	696.555.718			6 Jenis	785.908.900
5	1	1	02.06	1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	4 Paket	4 Paket	7.903.945	6.595.725	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Paket	7.908.900

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.06	2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	4 Paket	2 Paket	308.927.614	255.004.873	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Paket	125.000.000
5	1	1	02.06	4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	12 Paket	1 Paket	376.064.140	273.540.140	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Paket	380.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.06	5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	4 Paket	2 Paket	79.647.600	58.543.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Paket	80.000.000
5	1	1	02.06	6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	5 Dokumen	5 Dokumen	11.802.480	11.802.480	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 Dokumen	13.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.06	9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	30 Laporan	25 Laporan	179.290.000	91.069.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		25 Laporan	180.000.000
5	1	1	02.07		Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		13 unit	0 unit	402.124.624	0			0 unit	450.000.000
5	1	1	02.07	6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	13 unit	0 unit	402.124.624	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		0 unit	450.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Tahun Sebelumnya			
5	1	1	02.08		Meningkatnya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		40 Laporan	40 Laporan	602.382.944	592.651.444			5 Laporan	720.500.000
5	1	1	02.08	1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	4 Laporan	4 Laporan	449.500	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 Laporan	500.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.08	2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	12 Laporan	2 Laporan	166.020.084	166.020.084	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Laporan	170.000.000
5	1	1	02.08	3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	12 Laporan	12 Laporan	46.769.100	46.769.100	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Laporan	50.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.08	4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	12 Laporan	3 Laporan	389.144.260	379.862.260	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	500.000.000
5	1	1	02.09		Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		30 Unit	30 Unit	606.727.370	416.394.610			30 Unit	355.300.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.09	1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	3 Unit	30 Unit	266.888.104	266.888.104	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		30 Unit	250.000.000
5	1	1	02.09	5	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	20 Unit	20 Unit	6.400.000	6.400.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 Unit	6.500.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.09	6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	2 Unit	30 Unit	47.952.000	33.900.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		30 Unit	30.000.000
5	1	1	02.09	9	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Unit	1 Unit	281.709.366	105.060.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Unit	65.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.09	10	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Unit	10 Unit	3.777.900	4.146.506	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Unit	3.800.000
5	1	2			Meningkatnya konsistensi program prioritas pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah			70,00%	4.443.430.306	2.599.929.423			97,50%	5.191.509.142
5	1	2	02.01		Tersusunnya dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan tahunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan		4 Dokumen	4 Dokumen	1.730.575.850	1.184.851.800			4 Dokumen	1.821.643.142

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	2	02.01	3	Terlaksananya Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Berita Acara	1 Berita Acara	63.999.000	45.570.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Berita Acara	48.213.542
5	1	2	02.01	4	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Berita Acara	1 Berita Acara	40.260.000	28.075.500	Pendapatan Bagi Hasil		1 Berita Acara	40.551.000
5	1	2	02.01	5	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Berita Acara	1 Berita Acara	333.129.500	83.007.500	Pendapatan Bagi Hasil		1 Berita Acara	389.050.000
5	1	2	02.01	6	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1000 Usulan	1000 Usulan	129.056.500	70.006.440	Pendapatan Bagi Hasil		1000 Usulan	136.942.500

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	2	02.01	7	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	5 Dokumen	5 Dokumen	1.164.130.850	958.192.360	Pendapatan Bagi Hasil		5 Dokumen	1.206.886.100
5	1	2	02.02		Tersusunnya Analisis data dan informasi hasil pembangunan daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen analisis dan profil pembangunan daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	366.499.956	209.871.163			2 Dokumen	333.500.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	2	02.02	1	Terpenuhinya Dokumen Analisis dan informasi	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	93.000.000	36.375.772	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	133.500.000
5	1	2	02.02	2	Terfasilitasinya perangkat daerah dalam pemanfaatan data untuk penyusunan dokumen perencanaan	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	42 Orang	42 Orang	207.999.956	151.017.185	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		42 Orang	130.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	2	02.02	3	Terpenuhinya Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Buku	1 Buku	65.500.000	22.478.206	Pendapatan Bagi Hasil		1 Buku	70.000.000
5	1	2	02.03		Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pendukungnya		11 Dokumen	8 Dokumen	2.226.684.500	1.111.982.960			11 Dokumen	2.916.366.000
5	1	2	02.03	1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	-	3 Laporan	0	550.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		3 Laporan	1.062.993.500

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	2	02.03	3	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	11 Laporan	5 Laporan	2.226.684.500	561.982.960	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)		11 Laporan	1.853.372.500
5	1	2	02.04		Terimplementasinya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi SIPD Terimplementasi		1 Aplikasi	1 Aplikasi	119.670.000	93.223.500			1 Aplikasi	120.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	2	02.04	1	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	119.670.000	93.223.500	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	120.000.000
					Sasaran : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan		Persentase Capaian Program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%									

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3			Meningkatnya konsistensi program daerah dengan Perangkat Daerah pada mitra bidang Ekonomi, Infrastruktur, SDA dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)			70,18%	891.026.412	382.967.290			100 %	958.144.143
							Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renja Perangkat Daerah		100 %	100 %						

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.01		Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah mitra bidang pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		3 Dokumen	3 Dokumen	891.026.412	382.967.290			3 Dokumen	958.144.143
5	1	3	02.01	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	2 Dokumen	2 Dokumen	306.950.195	117.660.900	Pendapatan Bagi Hasil		2 Dokumen	315.659.740

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.01	3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	2 Laporan	2 Laporan	27.549.887	10.937.758	Pendapatan Bagi Hasil		2 Laporan	30.305.000
5	1	3	02.01	4	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	3 Laporan	3 Laporan	344.424.000	151.629.780	Pendapatan Bagi Hasil		3 Laporan	378.866.400

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.01	5	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	3 Dokumen	3 Dokumen	160.994.055	69.718.259	Pendapatan Bagi Hasil		3 Dokumen	177.093.620
5	1	3	02.01	7	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	51.108.275	33.020.593	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	56.219.383

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3			Meningkatnya konsistensi program daerah dengan Perangkat Daerah pada mitra bidang Ekonomi, Infrastruktur, SDA dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK)			71,15%	1.881.302.500	1.457.165.542			100 %	1.881.302.500
							Persentase Penjabaran Program RKPD Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renja Perangkat Daerah		100 %	100 %						

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.02		Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah mitra bidang ekonomi dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renstra/Renja mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		2 Dokumen	2 Dokumen	1.306.396.000	768.985.798			2 Dokumen	1.306.396.000
5	1	3	02.02	1	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	300.950.500	317.655.905	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	300.950.500

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.02	3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	4 Laporan	1 Laporan	27.916.000	8.323.128	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	27.916.000
5	1	3	02.02	4	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	160.425.000	137.824.300	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	160.425.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.02	5	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	747.845.500	279.207.775	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	747.845.500
5	1	3	02.02	7	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	2 Laporan	1 Laporan	69.259.000	25.974.690	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	69.259.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.03		Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah mitra bidang infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra/Renja mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		2 Dokumen	2 Dokumen	574.906.500	688.179.744			2 Dokumen	574.906.500
5	1	3	02.03	1	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	69.181.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	110.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.03	3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	48.024.500	23.596.672	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	48.024.500
5	1	3	02.03	5	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	380.597.000	569.833.600	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	380.597.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.03	7	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	36.285.000	25.568.472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	36.285.000
					Tujuan : Birokrasi yang kapabel		Indeks Inovasi Daerah									
					Sasaran : Meningkatnya kualitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi									
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					4.008.854.600	1.503.981.357				2.030.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	2			Meningkatnya hasil kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan daerah dan perangkat daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan		7 Inovasi	7 Inovasi	4.008.854.600	1.434.706.757			7 Inovasi	2.030.000.000
5	5	2	02. 01		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		2 Laporan	2 Laporan	2.334.386.600	68.401.675			2 Laporan	285.532.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	2	02.01	2	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	2.169.026.100	68.401.675	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	115.171.500
5	5	2	02.01	7	Terlaksannya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ketatalaksanaan Desa	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	-	165.360.500	0	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	170.360.500

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	2	02.02		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang bias menjadi inovasi penyelenggaraan sosial dan kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan bidang sosial dan kependudukan		2 Dokumen	2 Dokumen	326.136.000	314.165.000			2 Dokumen	336.136.000
5	5	2	02.02	2	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	160.770.500	154.515.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	165.770.500
5	5	2	02.02	9	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	165.365.500	159.650.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	170.365.500

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	2	02.02		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang bias menjadi inovasi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		4 Dokumen	4 Dokumen	705.442.000	676.446.496			4 Dokumen	725.442.000
5	5	2	02.03	2	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	163.860.500	157.773.248	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	168.860.500
5	5	2	02.03	4	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	208.860.500	200.450.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	213.860.500

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	2	02.03	6	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	168.860.500	160.450.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	173.860.500
5	5	2	02.03	11	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	163.860.500	157.773.248	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	168.860.500
5	5	2	02.04		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		5 Jenis	5 Jenis	642.890.000	375.693.586			5 Jenis	682.890.000
5	5	2	02.04	1	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Dokumen	1 Dokumen	380.000.000	207.983.586	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	400.000.000

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Teknologi dan Inovasi									
5	5	2	02.	2	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	95.990.000	77.027.500	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	100.990.000
5	5	2	02.04	2												

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	2	02.04	3	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	55.000.000	23.775.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	60.000.000
5	5	2	02.04	4	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	22.900.000	2.900.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	27.900.000
5	5	2	02.04	5	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	1 Laporan	1 Laporan	89.000.000	64.007.500	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	94.000.000
5	5	3			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Dipergunakan		-	88,28%	0	69.274.600			-	0

Kode					Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Daerah									
5	5	3	02. 02		Berkembangnya invensi dan inovasi	Invensi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Invensi dan Inovasi		-	4 Laporan	0	69.274.600			-	0
5	5	3	02. 02	11	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	-	1 Laporan	0	18.655.000	Pendapatan Bagi Hasil		-	0
5	5	3	02. 02	12	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kab. Tuban, Tuban, Kutorejo	-	1 Laporan	0	50.619.600	Pendapatan Bagi Hasil		-	0

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL							24.730.873.055	16.293.818.927				21.690.813.876

Sumber : Perubahan APBD Bapperida Kabupaten Tuban TA 2025

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester berikutnya di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang memiliki empat bidang beserta Sekretariat dalam menangani urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawabnya, guna mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun berbasis kinerja berdasarkan upaya penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program maupun kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 serta dilakukan guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian kebijakan pemerintah. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Upaya monitoring pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan dan menjadi perhatian lebih. Dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, baik itu personil aparatur maupun ketersedian anggaran maka pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
2. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) secara berkala.

Dengan akuntabilitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 diharapkan tidak hanya dapat mencapai *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan tetapi juga dapat menghasilkan *impact* atau dampak yang positif bagi kemajuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BPKPAD

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

(0356) 321020 bpkpad.tubankba.go.id Jln. KArtini No. 2 Tuban

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan;
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan; dan
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban menyusun Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban disusun dengan mengacu pada P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari P-RKPD dan Renstra Perangkat Daerah disertai dengan pagu pendanaannya. Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Acuan Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2025 adalah Renstra BPKPAD Tahun

2025-2029 dan P-RKPD Tahun 2025. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pedoman bagi BPKPAD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalamn Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban;
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupater Tuban 2022 Seri E Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 10); dan
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Perubahan Tahun 2025;

2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen P-RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SK Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 2025

Memuat uraian penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangkaian pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD periode Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
		Persentase Alokasi Belanja Modal Infrastruktur Pelayanan Publik
		Persentase Realisasi Belanja APBD
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Meningkatnya Sertifikasi Tanah Milik Daerah	Persentase Luas Tanah Milik Daerah yang Bersertifikat
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
A	**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		Rasio PAD	0 (%)	0	0 (%)	0	25.19 (%)	30.759.731.092	35.52 (%)	4.890.155.009	29.19 (%)	1.831.498.028	0 (%)	0	0 (%)	0	29.19 (%)	6.721.653.037	29.19 (%)	7.202.517.189	0 %	0 %	Kepala BPKPAD
1		**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	5.872.205.710	25.86 (%)	217.125.730	26.14 (%)	158.699.839	0 (%)	0	0 (%)	0	52 (%)	375.825.569	52 (%)	377.285.569	0 %	0 %	Kepala Bidang Pendapatan Daerah
		1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak	95 (%)	6.001.876.223	95.4 (%)	14.708.119.446	98.36 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	14.708.119.446	0 %	245.06 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
			Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah	10 (%)	0	78.44 (%)	0	6.76 (%)	5.872.205.710	0 (%)	217.125.730	0 (%)	158.699.839	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	375.825.569	0 (%)	377.285.569	0 %	0 %	Kepala Sub Bidang Pemungutan Pendapatan Daerah
		1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Derah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	55 (Laporan)	79.768.957	33 (Laporan)	215.836.300	11 (Laporan)	156.187.540	11 (Laporan)	0	11 (Laporan)	25.050.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	11 (Laporan)	25.050.000	11 (Laporan)	240.886.300	20 %	301.98 %	Kepala Sub Bidang Pemungutan Pendapatan Daerah
		2. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1000 (Laporan)	288.750.131	3000 (Laporan)	535.798.789	1000 (Laporan)	236.473.240	280 (Laporan)	16.321.000	280 (Laporan)	41.864.175	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	560 (Laporan)	58.185.175	3560 (Laporan)	593.983.964	356 %	205.71 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		3. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1000 (Laporan)	180.364.563	3124 (Laporan)	447.706.729	1000 (Laporan)	180.040.000	280 (Laporan)	1.090.000	280 (Laporan)	1.740.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	560 (Laporan)	2.830.000	3684 (Laporan)	450.536.729	368.4 %	249.79 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	55 (Dokumen)	933.185.476	33 (Dokumen)	2.250.380.600	11 (Dokumen)	818.040.000	11 (Dokumen)	35.579.500	11 (Dokumen)	11.520.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	11 (Dokumen)	47.099.500	11 (Dokumen)	2.297.480.100	20 %	246.2 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	25125 (Layanan)	452.762.746	38128 (Layanan)	910.942.020	25125 (Layanan)	368.560.000	1632 (Layanan)	30.225.000	5671 (Layanan)	30.225.000	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	7303 (Layanan)	60.450.000	7303 (Layanan)	971.392.020	29.07 %	214.55 %	Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah
		6. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	55 (Dokumen)	2.280.513.116	11 (Dokumen)	6.483.902.268	11 (Dokumen)	2.437.434.000	11 (Dokumen)	11.917.000	11 (Dokumen)	36.191.664	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	11 (Dokumen)	48.108.664	11 (Dokumen)	6.532.010.932	20 %	286.43 %	Kepala Sub Bidang Pemungutan Pendapatan Daerah
		7. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	55 (Dokumen)	241.156.649	11 (Dokumen)	663.604.749	11 (Dokumen)	271.000.000	11 (Dokumen)	118.033.230	11 (Dokumen)	1.171.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	11 (Dokumen)	119.204.230	11 (Dokumen)	784.268.979	20 %	325.21 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		8. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 (Dokumen)	1.545.374.584	11 (Dokumen)	3.200.272.991	11 (Dokumen)	1.354.470.930	11 (Dokumen)	3.960.000	11 (Dokumen)	4.869.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	11 (Dokumen)	8.829.000	11 (Dokumen)	3.209.101.991	100 %	207.66 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan,
																								Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		9. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	50.000.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	6.069.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	6.069.000	0 (Laporan)	6.069.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
2		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82 (%)	113.577.665.434	165.2 (%)	65.708.526.421	81.5 (%)	24.887.525.382	0 (%)	4.673.029.279	0 (%)	1.672.798.189	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	6.345.827.468	0 (%)	72.533.758.041	0 %	63.86 %	Sekretaris BPKPAD
		1. Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 (Dokumen)	682.651.820	24 (Dokumen)	391.045.301	8 (Dokumen)	215.467.364	1 (Dokumen)	14.854.000	2 (Dokumen)	9.648.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	24.502.000	27 (Dokumen)	417.968.801	67.5 %	61.23 %	JF Perencana Ahli Muda
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	20 (Dokumen)	565.413.855	12 (Dokumen)	321.717.901	4 (Dokumen)	191.807.364	0 (Dokumen)	13.629.000	1 (Dokumen)	9.337.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	22.966.500	13 (Dokumen)	344.684.401	65 %	60.96 %	JF Analisi Perencana Muda
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 (Laporan)	117.237.965	4 (Laporan)	69.327.400	4 (Laporan)	23.660.000	1 (Laporan)	1.225.000	1 (Laporan)	310.500	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	1.535.500	6 (Laporan)	70.862.900	30 %	60.44 %	JF Analis Perencana Muda
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	50 (Laporan)	104.470.994.981	32 (Laporan)	57.612.667.200	10 (Laporan)	22.337.619.169	5 (Laporan)	4.390.200.873	0 (Laporan)	1.415.906.167	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	5 (Laporan)	5.806.107.040	5 (Laporan)	63.831.402.963	10 %	61.1 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 (Orang/Bulan)	103.086.671.184	75 (Orang/Bulan)	56.791.495.300	75 (Orang/Bulan)	22.067.987.169	75 (Orang/Bulan)	4.357.540.373	75 (Orang/Bulan)	1.402.716.167	0 (Orang/Bulan)	0	0 (Orang/Bulan)	0	75 (Orang/Bulan)	5.760.256.540	75 (Orang/Bulan)	62.958.325.563	100 %	61.07 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 (Dokumen)	1.323.182.725	51 (Dokumen)	773.951.000	17 (Dokumen)	256.892.000	17 (Dokumen)	31.656.500	17 (Dokumen)	13.190.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	17 (Dokumen)	44.846.500	68 (Dokumen)	824.852.500	80 %	62.34 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 (Dokumen)	26.984.283	46 (Dokumen)	20.966.500	10 (Dokumen)	5.620.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	48 (Dokumen)	20.966.500	96 %	77.7 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						14 = (13/5) x 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12				15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 (Laporan)	8.542.289	31 (Laporan)	5.074.500	5 (Laporan)	1.780.000	0 (Laporan)	1.004.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	1.004.000	31 (Laporan)	6.078.500	124 %	71.16 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	26 (Laporan)	5.340.000	4 (Laporan)	0	9 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	13 (Laporan)	0	13 (Laporan)	0	0 %	0 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	120 (Orang)	309.211.636	720 (Orang)	157.662.253	120 (Orang)	75.826.616	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	157.662.253	0 %	50.99 %	Kasubbag Umum dan
																								Kepegawaian
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120 (Paket)	147.721.587	240 (Paket)	138.342.000	120 (Paket)	54.487.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	138.342.000	0 %	93.65 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur OPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 (Orang)	161.490.050	20 (Orang)	19.320.253	10 (Orang)	21.339.616	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	19.320.253	0 %	11.96 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	120 (Layanan)	309.211.636	720 (Layanan)	157.662.253	6 (Layanan)	676.026.444	1 (Layanan)	58.944.750	2 (Layanan)	58.223.306	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	3 (Layanan)	117.168.056	3 (Layanan)	291.740.309	2.5 %	94.35 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 (Paket)	27.004.224	10 (Paket)	15.968.300	5 (Paket)	5.674.716	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	15.968.300	0 %	59.13 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	163 (Paket)	1.103.182.459	326 (Paket)	819.678.346	163 (Paket)	257.308.378	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	819.678.346	0 %	74.3 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	2 (Paket)	662.869.870	4 (Paket)	581.862.700	2 (Paket)	198.754.100	2 (Paket)	38.160.500	2 (Paket)	29.913.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	68.073.500	2 (Paket)	664.895.200	100 %	100.31 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 (Paket)	111.696.394	4 (Paket)	72.477.465	2 (Paket)	24.449.950	2 (Paket)	1.720.750	2 (Paket)	2.052.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	3.772.750	2 (Paket)	76.731.215	100 %	68.7 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	18.400.500	3 (Dokumen)	3.270.000	3 (Dokumen)	3.270.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	6.540.000	3 (Dokumen)	6.800.000	0 %	0 %	
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2000 (Laporan)	681.419.865	1931 (Laporan)	434.114.547	400 (Laporan)	171.438.800	99 (Laporan)	15.793.500	1 (Laporan)	22.988.306	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	100 (Laporan)	38.781.806	100 (Laporan)	473.790.353	5 %	69.53 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53 (Unit)	460.309.630	164 (Unit)	1.941.061.520	53 (Unit)	149.533.809	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	1.941.061.520	0 %	421.69 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 (Unit)	460.309.630	10 (Unit)	1.941.061.520	5 (Unit)	149.533.809	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	1.941.061.520	0 %	421.69 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 (Jasa)	3.677.077.426	8 (Jasa)	2.692.529.687	4 (Jasa)	1.015.209.460	1 (Jasa)	181.398.956	1 (Jasa)	143.873.716	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	0	2 (Jasa)	325.272.672	2 (Jasa)	3.050.788.488	50 %	82.97 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	500 (Laporan)	487.950	82 (Laporan)	25.000	42 (Laporan)	409.500	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	124 (Laporan)	434.500	124 (Laporan)	454.500	0 %	0 %	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	389.999.750	2 (Laporan)	71.145.004	2 (Laporan)	42.489.830	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	113.634.834	2 (Laporan)	126.940.254	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	95.664.500	2 (Laporan)	16.067.700	2 (Laporan)	4.861.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	20.928.700	2 (Laporan)	26.413.450	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	0	3 (Jasa)	529.057.260	3 (Jasa)	94.161.252	3 (Jasa)	96.113.386	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	0	3 (Jasa)	190.274.638	3 (Jasa)	204.450.597	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	258 (Unit)	957.538.881	516 (Unit)	938.033.102	258 (Unit)	417.842.520	43 (Unit)	27.630.700	69 (Unit)	45.147.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	112 (Unit)	72.777.700	112 (Unit)	1.025.268.602	43.41 %	107.07 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69 (Unit)	509.790.146	135 (Unit)	558.869.664	69 (Unit)	155.998.500	6 (Unit)	25.610.700	8 (Unit)	31.335.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	14 (Unit)	56.945.700	14 (Unit)	628.848.164	20.29 %	123.35 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 (Unit)	25.640.400	23 (Unit)	5.965.000	10 (Unit)	3.200.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	5.965.000	0 %	23.26 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	2 (Unit)	62.283.984	4 (Unit)	63.661.650	2 (Unit)	29.448.900	2 (Unit)	2.020.000	2 (Unit)	6.140.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	8.160.000	2 (Unit)	73.246.650	100 %	117.6 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 (Unit)	359.824.350	10 (Unit)	299.767.338	4 (Unit)	229.195.120	1 (Unit)	0	1 (Unit)	7.672.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	7.672.000	2 (Unit)	307.439.338	50 %	85.44 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
B	**Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah**		Opini BPK atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	100 (WTP)	467.948.203.613	200 (WTP)	1.012.658.816.502	100 (WTP)	538.144.058.768	0 (WTP)	57.653.687.708	100 (WTP)	33.773.957.642	0 (WTP)	0	0 (WTP)	0	100 (WTP)	91.427.645.350	100 (WTP)	1.104.086.461.852	100 %	235.94 %	Kepala BPKPAD
1		**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Tingkat konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran daerah	100 (%)	0	200 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Anggaran
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (Rasio)	3.17 (%)	0	2.08 (%)	0	3.24 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Perbendaharaan
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	96.83 (%)	0	191.41 (%)	0	96.83 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Perbendaharaan
			Opini Laporan Keuangan	100 (%)	3.869.706.995	100 (%)	1.456.102.337.666	100 (%)	535.497.936.944	0 (%)	57.480.319.208	100 (%)	33.486.024.234	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	90.966.343.442	100 (%)	1.547.068.681.108	100 %	39978.96 %	Kepala Bidang Akuntansi

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Peningkatan Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	505.317.654	100 (%)	97.823.320	100 (%)	25.958.000	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	123.781.320	100 (%)	123.781.320	0 %	0 %	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
			Prosentase SDM yang menguasai pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan	100 (%)	0	200 (%)	0	100 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Sub Bidang
		1. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah DaerahPenyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	10 (Dokumen)	675.171.454	7 (Dokumen)	240.454.941	2 (Dokumen)	98.199.972	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	240.454.941	0 %	35.61 %	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
		2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 (Dokumen)	741.965.831	8 (Dokumen)	358.113.023	2 (Dokumen)	123.414.060	2 (Dokumen)	10.751.000	0 (Dokumen)	23.362.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	34.113.000	2 (Dokumen)	392.226.023	20 %	52.86 %	Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset
		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	20 (Dokumen)	458.931.271	1 (Dokumen)	4.400.000	4 (Dokumen)	2.325.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	4.400.000	0 %	0.96 %	Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset
		4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	356 (Orang)	1.208.735.911	792 (Orang)	432.158.030	356 (Orang)	170.233.772	133 (Orang)	71.846.600	132 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	265 (Orang)	71.846.600	265 (Orang)	504.004.630	74.44 %	41.7 %	Kepala Sub Bidang Akuntasi Penerimaan
		5. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	504 (Dokumen)	131.714.530	966 (Dokumen)	172.735.998	504 (Dokumen)	57.981.500	42 (Dokumen)	15.225.720	126 (Dokumen)	2.596.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	168 (Dokumen)	17.821.720	168 (Dokumen)	190.557.718	33.33 %	144.67 %	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
		6. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	70 (Laporan)	417.507.599	31 (Laporan)	136.407.499	12 (Laporan)	53.163.350	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	136.407.499	0 %	32.67 %	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
		2. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase SKPD dengan tingkat kesesuaian Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	100 (%)	7.168.881.747	200 (%)	2.856.783.783	100 (%)	909.994.000	0 (%)	97.910.750	0 (%)	42.716.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	140.626.750	0 (%)	2.997.410.533	0 %	41.81 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	83,18 (%)	0	171.88 (%)	0	82.94 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
		1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	43 (Dokumen)	645.704.448	113 (Dokumen)	57.192.000	44 (Dokumen)	12.081.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	57.192.000	0 %	8.86 %	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
		2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	44 (Dokumen)	6.628.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran
		3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	164.784.255	0 (Dokumen)	9.977.000	0 (Dokumen)	42.041.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	52.018.000	0 (Dokumen)	52.018.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
		4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Penrubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	10 (Dokumen)	674.228.684	7 (Dokumen)	441.119.985	2 (Dokumen)	127.789.483	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	441.119.985	70 %	65.43 %	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
		5. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanaj Daerah	50 (Dokumen)	1.878.466.581	56 (Dokumen)	1.446.043.000	12 (Dokumen)	460.931.482	3 (Dokumen)	87.063.500	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	87.063.500	62 (Dokumen)	1.533.106.500	124 %	81.61 %	Kepala Sub Bidang
		6. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD yang disusun	25 (Dokumen)	341.505.794	15 (Dokumen)	170.080.825	5 (Dokumen)	57.939.880	0 (Dokumen)	135.000	0 (Dokumen)	675.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	810.000	15 (Dokumen)	170.890.825	60 %	50.04 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran
		7. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD yang disusun	25 (Dokumen)	342.496.067	15 (Dokumen)	184.585.475	5 (Dokumen)	60.095.900	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	184.585.475	0 %	53.89 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran
		8. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	43 (Dokumen)	867.618.051	164 (Dokumen)	45.528.500	44 (Dokumen)	5.193.500	0 (Dokumen)	656.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	656.000	0 (Dokumen)	46.184.500	0 %	5.32 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran
		9. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD diverifikasi	43 (Dokumen)	692.062.584	43 (Dokumen)	12.523.000	44 (Dokumen)	4.988.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	12.523.000	0 %	1.81 %	Kasubid Penyusunan Anggaran
		10. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 (Dokumen)	162.094.418	8 (Dokumen)	27.569.000	3 (Dokumen)	9.561.000	0 (Dokumen)	79.250	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	79.250	0 (Dokumen)	27.648.250	0 %	17.06 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran
		3. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang online melaksanakan penatausahaan keuangan daerah	43 (OPD)	1.081.132.288	87 (OPD)	515.376.770	43 (OPD)	129.998.500	0 (OPD)	0	0 (OPD)	0	0 (OPD)	0	0 (OPD)	0	0 (OPD)	0	0 (OPD)	515.376.770	0 %	47.67 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	172 (Orang)	305.917.522	348 (Orang)	136.848.780	174 (Orang)	30.750.500	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	136.848.780	0 %	44.73 %	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	44 (OPD)	775.214.766	44 (OPD)	378.527.990	64 (OPD)	99.248.000	15 (OPD)	0	17 (OPD)	0	0 (OPD)	0	0 (OPD)	0	32 (OPD)	0	32 (OPD)	378.527.990	72.73 %	48.83 %	Kasubid Perencanaan dan Kebijakan Anggaran
		4. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD dengan tingkat kesesuaian perencanaan anggaran kas dan realisasi penyerapan	100 (%)	2.323.847.526	938.32 (%)	1.130.001.799	97 (%)	528.660.000	85.71 (%)	96.044.250	83.33 (%)	42.286.530	0 (%)	0	0 (%)	0	83.33 (%)	138.330.780	83.33 (%)	1.268.332.579	83.33 %	54.58 %	Kepala Bidang Perbendaharaan
		1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	376 (Dokumen)	150.814.443	846 (Dokumen)	64.783.099	376 (Dokumen)	21.580.000	93 (Dokumen)	4.363.000	94 (Dokumen)	1.077.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	187 (Dokumen)	5.440.500	187 (Dokumen)	70.223.599	49.73 %	46.56 %	Kepala Sub Bidang Kas Daerah
		2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	368 (Dokumen)	150.814.443	795 (Dokumen)	30.053.500	368 (Dokumen)	10.280.000	82 (Dokumen)	2.428.000	85 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	167 (Dokumen)	2.428.000	167 (Dokumen)	32.481.500	45.38 %	21.54 %	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
		3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	20 (Dokumen)	153.447.682	5 (Dokumen)	163.417.750	1 (Dokumen)	19.600.000	1 (Dokumen)	2.876.500	0 (Dokumen)	1.401.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	4.278.000	6 (Dokumen)	167.695.750	30 %	109.29 %	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan
		4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi , Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	224 (Dokumen)	640.305.464	378 (Dokumen)	95.714.750	224 (Dokumen)	35.420.000	6 (Dokumen)	5.925.500	29 (Dokumen)	3.424.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	35 (Dokumen)	9.349.500	35 (Dokumen)	105.064.250	15.63 %	16.41 %	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	30 (Laporan)	21.260.000	4 (Laporan)	0	0 (Laporan)	1.402.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	1.402.000	4 (Laporan)	1.402.000	0 %	0 %	Kasubbid. Pelayanan Perbendaharaan
		6. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	20 (Dokumen)	146.945.777	12 (Dokumen)	56.329.500	4 (Dokumen)	21.640.000	1 (Dokumen)	1.978.500	1 (Dokumen)	2.560.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	4.538.500	14 (Dokumen)	60.868.000	70 %	41.42 %	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan
		7. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2500 (Dokumen)	133.884.500	93 (Dokumen)	286.886.930	50 (Dokumen)	133.880.000	43 (Dokumen)	7.860.500	44 (Dokumen)	9.479.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	44 (Dokumen)	17.340.000	137 (Dokumen)	304.226.930	5.48%	227.23 %	KEpala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan
		8. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	50 (Dokumen)	325.127.718	32 (Dokumen)	122.186.000	10 (Dokumen)	41.820.000	2 (Dokumen)	1.150.750	1 (Dokumen)	21.354.030	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	22.504.780	3 (Dokumen)	144.690.780	6 %	44.5 %	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan
		9. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	264 (Orang)	249.708.817	760 (Orang)	255.326.270	264 (Orang)	223.180.000	127 (Orang)	69.461.500	0 (Orang)	1.178.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	127 (Orang)	70.639.500	127 (Orang)	325.965.770	48.11%	130.54 %	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan
		5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Penyerapan anggaran	90 (%)	2.376.011.707.622	702.03 (%)	1.450.256.905.818	89 (%)	533.423.966.790	0 (%)	57.188.540.888	0 (%)	33.375.063.704	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	90.563.604.592	0 (%)	1.540.820.510.410	0 %	64.85 %	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
		1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	622 (Laporan)	2.035.734.378.254	2177 (Laporan)	1.337.779.179.842	622 (Laporan)	469.078.355.000	186 (Laporan)	57.188.540.888	30 (Laporan)	32.559.400.512	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	30 (Laporan)	89.747.941.400	30 (Laporan)	1.427.527.121.242	4.82%	70.12 %	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
		2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20 (Laporan)	172.655.329.509	9 (Laporan)	2.234.511.268	20 (Laporan)	23.461.611.790	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	815.663.192	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	815.663.192	1 (Laporan)	3.050.174.460	5 %	1.77 %	Kepal Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
		3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	622 (Laporan)	37.196.013.316	1244 (Laporan)	110.243.214.078	622 (Laporan)	40.884.000.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	110.243.214.078	0 %	296.38 %	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
2		**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah ruangan	50 (%)	0	-212.39 (%)	0	10 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Pengelolaan BMD
			Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan	50 (%)	0	-165.76 (%)	0	10 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Bidang Pengelolaan BMD
			presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	100 (%)	30.373.554.308	168.76 (%)	11.529.563.716	10 (%)	2.646.121.824	0 (%)	173.368.500	7.78 (%)	287.933.408	0 (%)	0	0 (%)	0	7.78 (%)	461.301.908	7.78 (%)	11.990.865.624	7.78%	39.48 %	Kepala Bidang Pengelolaan BMD
			Manajemen Aset	4 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	6 (Dokumen)	0	150%	0 %	Kepala Bidang Pengelolaan BMD
		1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah yang diamankan	100 (%)	30.373.554.308	124.78 (%)	5.950.129.006	80.18 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	5.950.129.006	0 %	19.59 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Prosentase OPD yang melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD	100 (%)	0	200 (%)	0	100 (%)	2.646.121.824	100 (%)	173.368.500	100 (%)	287.933.408	0 (%)	0	0 (%)	0	200 (%)	461.301.908	200 (%)	461.301.908	200%	0 %	Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Penatausahaan
		1. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang tersusun	1 (Dokumen)	2.300.000.000	1 (Dokumen)	381.084.244	1 (Dokumen)	425.000.000	0 (Dokumen)	1.341.500	0 (Dokumen)	6.170.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	7.512.000	1 (Dokumen)	388.596.244	100%	16.9 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
		2. Penatusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	10 (Laporan)	1.398.129.197	6 (Laporan)	915.184.498	2 (Laporan)	300.000.000	0 (Laporan)	44.707.000	1 (Laporan)	42.320.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	87.027.000	7 (Laporan)	1.002.211.498	70 %	71.68 %	Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Penatausahaan
		3. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	42 (Dokumen)	228.123.966	84 (Dokumen)	381.072.000	42 (Dokumen)	75.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	381.072.000	0 %	167.05 %	Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Penatausahaan
		4. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10 (Dokumen)	194.627.580	4 (Dokumen)	109.040.605	4 (Dokumen)	50.000.000	1 (Dokumen)	5.873.500	1 (Dokumen)	5.100.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	10.973.500	2 (Dokumen)	120.014.105	20 %	61.66 %	Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Penatausahaan
		5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 (Dokumen)	494.521.942	3 (Dokumen)	146.297.195	1 (Dokumen)	450.000.000	0 (Dokumen)	15.500.000	0 (Dokumen)	2.377.908	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	17.877.908	3 (Dokumen)	164.175.103	60 %	33.2 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfataan
		6. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 (Dokumen)	432.955.749	6 (Dokumen)	78.294.950	2 (Dokumen)	85.000.000	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	8.200.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	8.200.000	8 (Dokumen)	86.494.950	80 %	19.98 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfataan
		7. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 (Laporan)	26.027.395.169	46 (Laporan)	75.359.190.903	2 (Laporan)	1.261.121.824	0 (Laporan)	105.946.500	1 (Laporan)	223.765.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	329.711.500	47 (Laporan)	75.688.902.403	470%	290.8 %	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfataan

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
- Komunikasi yang baik antar OPD maupun Pihak Lainnya Suasana Organisasi yang kondusif

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
- masih belum maksimal penyerapan dibeberapa Sub kegiatan beberapa dokumen masih dalam proses revisi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Mengoptimalkan realisasi kinerja dan anggaran pada
- triwulan berikutnya
- Melakukan percepatan pekerjaan yang terkait dengan target kinerja yang belum berjalan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD berikutnya:

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran / target rencana kerja periode sebelumnya yakni untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat sebagaimana dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	Tahun 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	-	83 poin	83,3 poin	81,50 poin	82,00 poin	82,6 poin	-	81,50 poin	82,00 poin	
36	Opini Laporan Keuangan	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
37	Tingkat konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran daerah	-	-	100	100	100	100	100	80,59	100	100	
38	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-	-	97,02%	97,02%	96,83%	96,83%	97,02%	-	96,83%	96,83%	
39	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (Rasio)	-	-	2,77	2,77	3,24	3,17	3,17	-	3,24	3,17	
40	Presentase SKPD dengan tingkat kesesuaian Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
41	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)			82,44	82,66	82,94	83,18	82,44	-	82,94	83,18	
81	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	-	-	10%	n/a	174 Orang	174 Orang	100,00	2,71%	10%	50%	
82	Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah ruangan	-	-	10%	10%	10%	50%	40,09	-	10%	50%	
83	Manajemen Aset	-	-	4	10%	10%	50%	1 dokumen	1	4	4	
84	Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan	-	-	10%	4	4	4	2 dokumen	-	10%	10%	
85	Prosentase OPD yang melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD	-	-	100,00	10%	10%	10%	1 dokumen	100	100,00	100,00	
86	Persentase tanah yang diamankan	-	-	40,09	100,00	100,00	100,00	2 Laporan	77,72	80,18	100,00	
98	Devisiasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD			100	100	96,83	6,76%	1.000 Laporan	52,46	100	6,76%	
22	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah			1,6	1,7	1,453	1,473	1,413	1,387	1,453	1,473	
23	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10	10	5	6	18,7	7,6	5	6	

2.3 PENENTUAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKPAD

Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara keseluruhan telah dilaksanakan. Berikut ini adalah permasalahan–permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban beserta faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan pada masing-masing bidang dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Legalitas Aset Daerah yang Belum Lengkap;
2. Pengawasan dan Penjagaan Fisik Aset yang Tidak Optimal;
3. Rendahnya Tingkat Pemanfaatan Aset Daerah;
4. Pemanfaatan Aset oleh Pihak Ketiga yang Tidak Maksimal;
5. Informasi Aset yang Tidak Akurat dan Tidak Terkini;
6. Belum Optimalnya Pengelolaan PAD;
7. Inkonsistensi antara Rencana dan Realisasi Anggaran Kas;
8. Minimnya Supporting System dalam Proses Pendampingan dan Pengawasan Anggaran; dan
9. Kurangnya Kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan.

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran BPKPAD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KENDALA	SOLUSI	PERENCANAAN 2025
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Telah Didayagunakan	1. Legalitas Aset Daerah yang Belum Lengkap 2. Pengawasan dan Penjagaan Fisik Aset yang Tidak Optimal 3. Rendahnya Tingkat Pemanfaatan Aset Daerah; 4. Pemanfaatan Aset oleh Pihak Ketiga yang Tidak Maksimal; 5. Informasi Aset yang Tidak Akurat dan Tidak Terkini;	1. Inovasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Secara Optimal melalui Kerjasama dengan Pihak Strategis; 2. Optimalisasi Pengamanan BMD melalui Kerjasama dengan Instansi Vertikal dan Horizontal; dan 3. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Percepatan Pengamanan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset	1. Penatausahaan data aset melalui aplikasi e-BMD, penertiban dokumen kepemilikan aset, dan koordinasi rutin dengan BPN; 2. Penggalian Potensi Pemanfaatan BMD melalui kerja sama pemanfaatan (KSP), Sewa, atau Hibah Terarah; 3. Digitalisasi Pengelolaan Aset Daerah Secara Komprehensif
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belum Optimalnya Pengelolaan PAD;	Inovasi Berbasis TIK untuk Mendukung Kemudahan Pendaftaran, Pelaporan, dan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak (WP); Sinergi Pendanaan Melalui Mekanisme Blended Finance Atau Creative Local Finance	1. Digitalisasi Sistem Pemungutan Dan Pengawasan Pajak Serta Retribusi Daerah; 2. Penguatan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Penghasil; 3. Implementasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; 4. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi dengan sistem pembayaran perbankan dan kanal pembayaran; 5. Kolaborasi multi sektor dalam rangka menggali potensi baru sumber Pendapatan Asli Daerah

3	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Belanja APBD	Inkonsistensi antara Rencana dan Realisasi Anggaran Kas;	Peningkatan Konsistensi Perencanaan dan Realisasi Anggaran melalui Implementasi SOP serta Daya Dukung Lainnya	Penguatan Koordinasi dengan Bapperida untuk Penerapan Efisiensi Belanja melalui Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja
4	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD; 2. Persentase Alokasi Belanja Modal Infrastruktur Pelayanan Publik	Minimnya Supporting System dalam Proses Pendampingan dan Pengawasan Anggaran; dan	Peningkatan Supporting System dalam Pendampingan dan Pengawasan Proses Penganggaran Perangkat Daerah	Penyusunan dan Implementasi Anggaran Berbasis Analisis Standar Belanja (ASB);
5	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	Kurangnya Kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan.	Peningkatan Kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan	Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas teknis SDM penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Rencana Kinerja dibuat berdasarkan RKPD dan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan. Berikut review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang					Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,1 poin	19.580.422.780,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,1poin	19.847.696.810,00	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	138.870.107,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	146.470.107,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	126.251.357,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	126.251.357,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.618.750,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.218.750,00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	10 Laporan	17.369.061.055,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	12 Laporan	17.554.777.135,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang	17.361.797.135,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang	17.361.797.135,00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 dokumen	1.864.860,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 dokumen	186.486.000,00	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 dokumen	2.750.500,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 dokumen	2.750.500,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.106.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.106.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	26 Laporan	2.637.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	26 Laporan	2.637.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			teran SKPD					teran SKPD			
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	120 orang	15.895.128,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	120 orang	15.895.128,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban	Presentase Aparatur OPD yang memenuhi Peraturan Kedinasan	120 paket	976.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban	Presentase Aparatur OPD yang memenuhi Peraturan Kedinasan	1 paket	976.000,00	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban	Jumlah Aparatur OPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 aparatur	14.919.128,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban	Jumlah Aparatur OPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 aparatur	14.919.128,00	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 layanan	759.863.251,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 layanan	733.480.251,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	5.674.716,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	5.674.716,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	163 paket	437.794.056,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	163 paket	411.411.056,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	2 paket	206.364.600,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	2 paket	206.364.600,00	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 paket	17.114.875,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 paket	17.114.875,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	3 dokumen	18.400.500,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	3 dokumen	18.400.500,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	400 Laporan	74.514.504,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	400 Laporan	74.514.504,00	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	53 unit	164.548.809,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	53 unit	164.548.809,00	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	164.548.809,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	164.548.809,00	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 jasa	737.245.910,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 jasa	808.759.960,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	937.350,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	937.350,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	2 Laporan	251.998.250,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	2 Laporan	252.722.350,00	
3	Penyediaan Jasa Peralatan `dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	715.050,00	Penyediaan Jasa Peralatan `dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	71.505.000,00	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 Laporan	483.595.260,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 Laporan	483.595.260,00	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pemeliharaan BMD	258 unit	394.938.520,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Pemeliharaan BMD	258 unit	423.765.420,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 R2 dan 10 R4	158.998.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tuban	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	(69 R2 dan 10 R4)	158.998.500,00	
2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	3.200.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	3.200.000,00	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	2 unit	29.448.900,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	2 unit	55.107.800,00	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	206.459.120,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	206.459.120,00	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Tuban	Opini laporan keuangan	WTP	472.836.950.139,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Tuban	Opini laporan keuangan	WTP	519.599.115.708	
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	96,83				Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	96,83		Indikator APBD
			Tingkat konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran daerah	100				Tingkat konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran daerah	100		Indikator APBD
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,24				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,24		Indikator APBD
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%		P-APBD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Alokasi Belanja Modal Infrastruktur Pelayanan Publik	40%				Persentase Alokasi Belanja Modal Infrastruktur Pelayanan Publik	40%		P-APBD
			Realisasi Belanja APBD	94,97%				Realisasi Belanja APBD	94,97%		P-APBD
			Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	100%				Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	100%		P-APBD
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tuban	Presentase SKPD dengan tingkat kesesuaian Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	100%	710.368.652,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tuban	Presentase SKPD dengan tingkat kesesuaian Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	100%	762.595.092,00	
			Jumlah SKPD dengan tingkat kesesuaian Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	-				Jumlah SKPD dengan tingkat kesesuaian Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	44 SKPD		
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD yang disusun	5 dokumen	39.665.450,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD yang disusun	5 dokumen	45.665.450,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD yang disusun	5 dokumen	39.430.250,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD yang disusun	5 dokumen	33.430.250,00	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Tuban	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	43 dokumen	90.610,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Tuban	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 dokumen	9.061.000,00	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	43 dokumen	4.974.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 dokumen	4.974.500,00	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Tuban	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	43 dokumen	38.950,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Tuban	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	44 dokumen	3.895.000,00	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Perubahan DPA SKPD diverifikasi	43 dokumen	3.744.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tuban	Jumlah Perubahan DPA SKPD diverifikasi	44 dokumen	3.744.500,00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Tuban	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	137.210.280,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Tuban	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	137.210.280,00	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Tuban	Jumlah Peraturan Daerah tentang Penrubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 dokumen	94.019.812,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Tuban	Jumlah Peraturan Daerah tentang Penrubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 dokumen	90.499.812,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dokumen	7.540.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dokumen	7.540.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Anggaran					Anggaran					
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 dokumen	383.653.500,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 dokumen	426.573.500,00	
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Tuban	Persentase OPD dengan tingkat kesesuaian perencanaan anggaran kas dan realisasi penyerapan	97%	245.808.884,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Tuban	Persentase OPD dengan tingkat kesesuaian perencanaan anggaran kas dan realisasi penyerapan	97%	314.127.496,00	
			Jumlah perangkat daerah yang serapan anggarannya diatas 95%	14				Jumlah perangkat daerah yang serapan anggarannya diatas 95%	14 OPD		
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	376 dokumen	134.940,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	376 dokumen	13.494.000,00	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	368 dokumen	53.230,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	168 dokumen	5.323.000,00	
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	65 dokumen	10.059.100,00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 dokumen	10.059.100,00	
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi , Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	224 dokumen	20.886.800,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi , Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	130 dokumen	20.886.800,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30 Laporan	208.990,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30 Laporan	20.899.000,00	
6	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 dokumen	13.319.500,00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 dokumen	13.319.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	264 orang	29.332.500,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 dokumen	75.083.240,00	
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 dokumen	96.730.584,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 dokumen	29.332.500,00	
9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50 dokumen	75.083.240,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	264 orang	125.730.356,00	
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Tuban	Prosentase PeningkatanJumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	100%	277.061.832,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Tuban	Prosentase Peningkatan Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	100%	312.426.612,00	
		Kab. Tuban	Prosentase SDM yang menguasai pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan	100%			Kab. Tuban	Prosentase SDM yang menguasai pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan	-		
			Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	-				Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	42 OPD		
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	356 orang	357.220,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	440 orang	35.722.000,00	
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	504 dokumen	-	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban	12 Laporan	92.688.880,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban	2 Dokumen	92.688.880,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	-	
5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah DaerahPenyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 dokumen	76.790.180,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah DaerahPenyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	76.790.180,00	
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	2 dokumen	107.225.552,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	308 Orang	107.225.552,00	
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Tuban	Prosentase Penyerapan anggaran	89	507.704.501.708,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Tuban	Prosentase Penyerapan anggaran	98,16	518.173.397.908,00	
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Bantuan Keuangan	622 dokumen	471.584.463.211,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Bantuan Keuangan	622 dokumen	470.458.489.211,00	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	471.148.489.211,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	4.085.408.697,00	
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	622 Laporan	28.028.504.863.74	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	622 Laporan	43.629.500.000,00	
V	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah SKPD yang online melaksanakan penatausahaan keuangan daerah	43 skpd	435.974.000,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah SKPD yang online melaksanakan penatausahaan keuangan daerah	43 OPD	36.568.600,00	
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	44 Dokumen	19.247.560,00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	64 Dokumen	19.072.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah		Daerah Bidang Keuangan Daerah			Daerah		Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
2	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	176 Orang	19.072.600,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	176 Orang	17.496.000,00	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Tuban	Manajemen Aset	4	2.296.833.519,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Manajemen Aset	4	2.921.054.699,00	
			Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakain kekayaan daerah ruanagn	10				Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakain kekayaan daerah ruanagn	10		
			Presentase peningkatan pendapatan retibusi pemakain kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan	10				Presentase peningkatan pendapatan retibusi pemakain kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan	10		
			Presentase Aset daerah yang dikelola dengan baik	100%				Presentase Aset daerah yang dikelola dengan baik	100%		
			Persentase Luas Tanah Milik Daerah yang Bersertifikat	65,85 %				Persentase Luas Tanah Milik Daerah yang Bersertifikat	65,85 %		
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah OPD yang melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD dengan baik dan benar	43 Dokumen	2.296.833.519,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah OPD yang melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD dengan baik dan benar	43 Dokumen	2.664.039.699,00	
			Prosentase BMD yang dimanfaatkan	62.5%				Prosentase BMD yang dimanfaatkan	62.5%		
1	Penyusunan Standar Harga	Kab. Tuban	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	377.813.500,00	Penyusunan Standar Harga	Kab. Tuban	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	377.813.500,00	
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	19.567.500,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	19.567.500,00	
3	Penatusahaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	280.509.500,00	Penatusahaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	280.509.500,00	
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	42 dokumen	395.500,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	42 dokumen	39.550.000,00	
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.192.952.669,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.494.952.699,00	
6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Kab. Tuban	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan,	1 dokumen	425.311.500,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Kab. Tuban	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan,	1 dokumen	425.311.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
10	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 dokumen	283.350,00	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 dokumen	28.335.000,00	
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Tuban	Devisiasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	100%	4.841.498.686,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Tuban	Devisiasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	100	5.659.731.508,00	
			Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	767,62 Milyar				Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	767,62 Milyar		
I	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Tuban	Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah	10%	4.841.498.686,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Tuban	Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah	10%	3.472.571.116,00	
			Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak	94,37%				Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak	94,37%		
			Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	413 Milyar				Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	413 Milyar		
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	94,13%	235.892.800,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 dokumen	235.892.800,00	
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Derah	Kab. Tuban	Jumlah dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 dokumen	166.297.770,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Derah	Kab. Tuban	Jumlah dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 dokumen	166.297.770,00	
3	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah data objek pajak dan subjek pajak yang dapat ditingkatkan	9 dokumen	201.269.460,00	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah data objek pajak dan subjek pajak yang dapat ditingkatkan	1000 laporan	201.269.460,00	
4	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	1000 laporan	162.963.826,00	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	1000 laporan	162.963.826,00	
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.000 Laporan	771.232.822.40	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 Dokumen	771.232.822,00	
6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Dokumen	286.588.500,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	18000 Layanan	286.588.500,00	
7	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	18000 Layanan	2.392.031.260,00	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9 dokumen	2.392.031.260,00	
8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 dokumen	1.368.927.570,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Dokumen	1.415.927.570,00	
9	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	27.527.500,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	27.527.500,00	
					550.493.583.695,66					550.493.583.695,66	

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban sebagai unsur penunjang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan BPKPAD Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025
dan Prakiraan maju Tahun 2026 Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tuban

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang								
Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kab. Tuban	83,1 poin	19.847.696.810,00	PAPBD		83,6 poin	18.125.459.832,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	8 dokumen	146.470.107,00	PAPBD		9 dokumen	93.217.385
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Tuban	4 Dokumen	126.251.357,00	PAPBD		4 Dokumen	73.229.885
Tercapainya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	4 Laporan	20.218.750,00	PAPBD		4 Laporan	19.987.500
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kab. Tuban	12 Laporan	17.554.777.135,00	PAPBD		10 Laporan	16.404.400.346
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	75 orang	17.361.797.135,00	PAPBD		75 orang	16.097.963.096
Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban	17 dokumen	186.486.000,00	PAPBD		12 dokumen	303.209.750
Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tuban	10 dokumen	2.750.500,00	PAPBD		-	-
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban	5 Laporan	1.106.000,00	PAPBD		-	-

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tuban	26 Laporan	2.637.500,00	PAPBD		23 Laporan	3.227.500,00
Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kab. Tuban	120 orang	15.895.128,00	PAPBD		1 orang	77.160.000,00
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Aparatur OPD yang memenuhi Peraturan Kedinasan	Kab. Tuban	1 paket	976.000,00	PAPBD		-	-
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	-		97 Dokumen	77.160.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur OPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban	10 aparatur	14.919.128,00	PAPBD		-	-
Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kab. Tuban	6 layanan	733.480.251,00	PAPBD		6 layanan	644.272.821,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tuban	5 paket	5.674.716,00	PAPBD		-	-
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban	163 paket	411.411.056,00	PAPBD		2 paket	247.007.471,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban	2 paket	206.364.600,00	PAPBD		1 paket	218.610.000,00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Tuban	2 paket	17.114.875,00	PAPBD		2 paket	21.275.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Tuban	3 dokumen	18.400.500,00	PAPBD		-	-
Terselenggaranya RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Tuban	400 Laporan	74.514.504,00	PAPBD		1131 Laporan	157.380.350,00

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kab. Tuban	53 unit	164.548.809,00	PAPBD		106 unit	145.612.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuabn	5 unit	164.548.809,00	PAPBD		-	-
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	-		3 unit	81.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	-			8 unit	64.612.000,00
Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Tuban	4 jasa	808.759.960,00	PAPBD		4 jasa	419.515.780,00
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban	500 Laporan	937.350,00	PAPBD		-	-
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	Kab. Tuban	2 Laporan	252.722.350,00	PAPBD		12 Laporan	385.249.500,00
Tersedianya Jasa Peralatan `dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan `dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Tuban	2 Laporan	71.505.000,00	PAPBD		-	-
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Tuban	3 Laporan	483.595.260,00	PAPBD		3 Laporan	34.266.280,00
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	Kab. Tuban	258 unit	423.765.420,00	PAPBD		258 unit	341.281.500,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban	59 R2 dan 10 R4	158.998.500,00	PAPBD		-	-
Terpeliharanya Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Tuban	10 unit	3.200.000,00	PAPBD		-	-
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Kab. Tuban	2 unit	55.107.800,00	PAPBD		118 unit	125.931.500,00
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tuban	4 Unit	206.459.120,00	PAPBD		4 Unit	50.350.000,00

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-			116 unit	165.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Laporan Keuangan	Kab. Tuban	WTP	519.599.115.708,00			-	527.536.444.749,00
		Tingkat konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran daerah	Kab. Tuban	96,83				-	
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Kab. Tuban	100				-	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (Rasio)	Kab. Tuban	3,24				-	
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Kab. Tuban	30%				30%	
		Persentase Alokasi Belanja Modal Infrastruktur Pelayanan Publik	Kab. Tuban	40%				40%	
		Persentase Realisasi Belanja APBD	Kab. Tuban	94,97%				95,47%	
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	Kab. Tuban	100%				100%	
Tersusunnya Dokumen Penganggaran yang berkualitas	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase SKPD dengan tingkat kesesuaian Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	Kab. Tuban	100%	762.595.092,00	PAPBD		100%	902.546.037,00
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Kab. Tuban	85,5		PAPBD		85,5	
		Jumlah Dokumen SKPD yang memiliki tingkat keseuaian Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan		44 dokumen				44 dokumen	
Tersusunya Dokumen KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD yang disusun	Kab. Tuban	5 dokumen	45.665.450,00	PAPBD		5 Dokumen	54.358.880,00
Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD yang disusun	Kab. Tuban	5 dokumen	33.430.250,00	PAPBD		5 Dokumen	55.095.400,00
Tersusunnya Dokumen RKA SKPD yang Terverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Kab. Tuban	44 dokumen	9.061.000,00	PAPBD		44 Dokumen	12.081.500,00

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Terverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Kab. Tuban	44 dokumen	4.974.500,00	PAPBD		44 Dokumen	6.628.500,00
Tersusunnya Dokumen DPA SKPD yang Terverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Kab. Tuban	44 dokumen	3.895.000,00	PAPBD		44 Dokumen	5.193.500,00
Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Terverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD diverifikasi	Kab. Tuban	44 dokumen	3.744.500,00	PAPBD		44 Dokumen	4.988.500,00
Tersusunnya Dokumen Perda APBD dan Perbup APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Tuban	2 dokumen	137.210.280,00	PAPBD		2 Dokumen	130.146.725,00
Tersusunnya Dokumen Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Penrubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Kab. Tuban	2 dokumen	90.499.812,00	PAPBD		2 Dokumen	114.632.983,00
Tersusunnya Dokumen Pedoman Pengelolaan Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Tuban	3 dokumen	7.540.800,00	PAPBD		3 Dokumen	9.561.000,00
Tersusunya Dokumen / Laporan Hasil Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Tuban	12 dokumen	426.573.500,00	PAPBD		12 Dokumen	509.859.049,00
Meningkatnya kualitas realisasi sesuai anggaran kas	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD dengan tingkat kesesuaian perencanaan anggaran kas dan realisasi penyerapan	Kab. Tuban	97%	-	PAPBD		-	-
		Jumlah perangkat daerah yang serapan anggarannya diatas 95%	Kab. Tuban	14	314.127.496,00			19	293.779.873,00
Terwujudnya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Tuban	376 dokumen	13.494.000,00	PAPBD		376 dokumen	35.507.000,00
Terwujudnya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Tuban	168 dokumen	5.323.000,00	PAPBD		168 dokumen	11.000.000,00
Terwujudnya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Tuban	1 dokumen	10.059.100,00	PAPBD		1 dokumen	27.054.000,00

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi , Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi , Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Tuban	130 dokumen	20.886.800,00	PAPBD		224 dokumen	34.273.147,00
Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Tuban	30 Laporan	20.899.000,00	PAPBD		30 Laporan	-
Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Tuban	4 dokumen	13.319.500,00	PAPBD		4 dokumen	-
Terwujudnya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Tuban	50 dokumen	75.083.240,00	PAPBD		180 dokumen	75.383.500,00
Terwujudnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Tuban	10 dokumen	29.332.500,00	PAPBD		7 dokumen	27.055.000,00
Terwujudnya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	264 orang	125.730.356,00	PAPBD		169 orang	77.600.000,00

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Jumlah OPD dengan kualitas laporan keuangan di atas 100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase Peningkatan Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	Kab. Tuban	100	312.426.612,00	PAPBD		100	395.294.800,00
		Prosentase SDM yang menguasai pelaksanaan akuntansi dan pelaporan akuntansi	Kab. Tuban	100		PAPBD		100	
		Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP							
Tercukupinya pengungkapan LKD	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Tuban	440 orang	35.722.000,00	PAPBD		440 orang	43.320.500,00
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Tuban	504 dokumen	-	PAPBD		-	-
Tersedianya LKD sesuai SAP	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	2 Laporan	92.688.880,00	PAPBD		2 Laporan	113.089.100,00
Terlaksananya MekanismeKoordinasi, Penelitian, Dan Verifikasi Kasus, Penatausahaan Serta Pelaporan Penyelesaian Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Tuban	2 dokumen	-	PAPBD		-	-
Terwujudnya SDM yang handal di bidang Akuntansi	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah DaerahPenyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	2 dokumen	76.790.180,00	PAPBD		2 dokumen	96.883.450,00
Terwujudnya ASN pengelola Keuangan Daerah yang kompeten	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	308 dokumen	107.225.552,00	PAPBD		308 dokumen	142.001.750,00

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas penyerapan dana penunjang	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Penyerapan anggaran	Kab. Tuban	89%	520.878.397.908,26	PAPBD		-	525.814.831.539,00
		Prosentase Penyerapan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-				98,16%	
Terwujudnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Bantuan Keuangan	Kab. Tuban	622 dokumen	470.458.489.211,00	PAPBD		622 dokumen	469.048.105.000,00
Terwujudnya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Tuban	2 Laporan	4.085.408.697	PAPBD		2 Laporan	10.842.499.539,00
Terwujudnya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	622 Laporan	43.629.500.000,00	PAPBD		622 Laporan	45.924.227.000,00
Terwujudnya pengelolan data dan implementasi sistem Informasi pemerintah daerah lingkup keuangan	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang online melaksanakan penatausahaan keuangan daerah	Kab. Tuban	43 skpd	36.568.600,00	PAPBD		43 skpd	129.992.500,00
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Tuban	64 SKPD	19.072.600,00	PAPBD		64 SKPD	99.248.000,00
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	176 Orang	17.496.000,00	PAPBD		176 Orang	30.744.500,00
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	Kab. Tuban	10%	2.921.054.699,00	PAPBD		-	1.278.475.536,00
		Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah ruangan		10%				-	
		Manajemen Aset		4				-	
		Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan		10%				-	
		presentase tanah milik daerah yang bersertifikat		10%				-	
		Persentase Luas Tanah Milik Daerah yang Bersertifikat		65,85				70,85	

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MeningkatnyaJumlah kualitas pengelolaan BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD dengan baik dan benar	Kab. Tuban	43 Dokumen	2.664.039.669,00	PAPBD		43 Dokumen	1.278.475.536,00
		Prosentase BMD yang dimanfaatkan	Kab. Tuban	62,5		PAPBD		62,5	
Tercapainya taegetJumlah dokumen standar satuan harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Tuban	1 dokumen	377.813.500,00	PAPBD		1 dokumen	380.000.000,00
Tercapainya targetJumlah buku aturan / pedoman pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	2 dokumen	19.567.500,00	PAPBD		2 dokumen	35.000.000,00
Tercapainya targetJumlah OPD yang diinventarisir	Penatusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	2 Laporan	280.509.500,00	PAPBD		2 Laporan	300.000.000,00
Tercapainya targetJumlah bidang tanah yang mengalami peningkatan status	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	42 dokumen	39.550.000,00	PAPBD		7 dokumen	75.000.000,00
Tercapainya targetJumlah dokumen pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	2 Laporan	1.494.952.699,00	PAPBD		2 Laporan	368.475.536,00
Tercapainya targetJumlah OPD yang mengikuti pendampingan OPD dalam penyusunan sistem pengelolaan barang milik daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	1 dokumen	425.311.500,00	PAPBD		1 dokumen	70.000.000,00
meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban	2 dokumen	283.350.000,00	PAPBD		2 dokumen	50.000.000,00
meningkatnya Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Devisiasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Kab. Tuban	100	5.659.731.508,00	PAPBD		-	5.104.694.942,00
		Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		767,62 Milyar				813,07 Milyar	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah	Kab. Tuban	10	5.659.731.508,00			-	5.104.694.942,00
		Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak	Kab. Tuban	94,37%				95%	

Sasaran Prgram/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Kab. Tuban	413 Milyar				435 Milyar	
Tersusunya Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Tuban	9 dokumen	235.892.800,00	PAPBD		9 dokumen	148.133.200,00
Tersusunya dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Derah	Jumlah dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Tuban	9 dokumen	166.297.770,00	PAPBD		9 laporan	140.308.804,00
Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah data objek pajak dan subjek pajak yang dapat ditingkatkan	Kab. Tuban	1000 laporan	201.269.460,00	PAPBD		1000 laporan	104.308.804,00
Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Kab. Tuban	1.000 Laporan	162.963.826,00	PAPBD		1.000 Laporan	106.068.512,00
Tesusunnya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Tuban	9 Dokumen	771.232.822,00	PAPBD		9 Dokumen	839.863.720,00
Telaksananya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Tuban	1800 Layanan	286.588.500,00	PAPBD		18000 Layanan	165.479.640,00
Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Tuban	9 dokumen	2.392.031.260,00	PAPBD		9 dokumen	2.283.702.582,00
Tersusunnya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Tuban	9 dokumen	1.431.927.570,00	PAPBD		9 dokumen	1.292.448.460,00
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Tuban	3 Laporan	27.527.500,00	PAPBD		3 Laporan	24.603.184,00
					550.493.583.695,66				**552.039.167.833.00**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam mendukung Terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi pedoman dan sarana untuk mewujudkan sasaran dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tuban.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini akan dapat berjalan efektif dan efisien apabila didukung oleh semua pihak, baik internal yakni seluruh komponen dalam Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban itu sendiri dalam bentuk kerjasama yang solid, maupun pihak eksternal.

Dengan Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 diharapkan dapat dilaksanakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran yang hasilnya dapat meningkatkan tata kelola pe/merintahan yang baik yang pada akhirnya mampu bermanfaat bagi masyarakat.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN

ttd.

AGUNG TRIWIBOWO

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan;
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan; dan
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 JUli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yaitu Tahun 2025 yang penjabarannya merupakan implementasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dilaksanakan dalam Kegiatan setiap Tahun Anggaran.

Secara hirarki penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Oleh karena itu, sebagai dokumen perencanaan daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis dengan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025, merupakan perubahan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tuban yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 serta tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

Adapun penjelasan makna dari Visi Bupati Tuban tersebut adalah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban merupakan perangkat daerah yang mempunyai peran sentral di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban yang berdasarkan pada prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan mutu Aparatur Sipil Negara dengan menyelenggarakan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Goverment*) agar terwujudnya pelayanan kepegawaian yang prima melalui Aparatur Sipil Negara yang profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, profesional dan handal.

Pembenahan tersebut hendaknya di lakukan secara simultan di segala bidang secara berkesinambungan dan terintegrasi satu sama lain. Pembenahan di bidang pemerintahan dan pembangunan dimotori dengan kebijakan desentralisasi yang dilandasi pergeseran konsentrasi kegiatan dari Pusat ke Daerah khususnya Kabupaten/Kota, maka konsekuensi logis tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah akan semakin meningkat tajam dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat yang selama ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang Pertangungjawaban Instansi Pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja P-PD) yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

Kedudukan :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamananan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Badan;
7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kepegawaian sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban;
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 3); dan
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 14);
28. Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/139/KPTS/414.012/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
29. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 100.3.4.2/4000/414.201.2/2024 tentang Persiapan Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
30. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Tuban Nomor 700.1.2/102/414.060/2025 tanggal 07 Juli 2025, perihal Reviu Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2025;
2. Sebagai dasar penyusunan Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama 1 (satu) tahun;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD ditahun selanjutnya.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban;
2. Terlaksananya Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban di Tahun 2025;
3. Meningkatnya capaian target Program dan Kegiatan Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-P OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban merupakan penjabaran pelaksanaan tahunan dan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah (LkjIP) dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dimana Pelaksanaan Perubahan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan teknis terkait kompetensi dan kualifikasi pendidikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada triwulan II belum mencapai target dikarenakan pelaksanaan kegiatan tekhnis ada pada tribulan III dan IV, selain itu pelaksanaan juga menyesuaikan kebijakan dari pusat contohnya adalah pelaksanaan Seleksi ASN dan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Administrator.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Perubahan Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja dan Pencapaian Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025 pada Formulir E.81 :

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025
Triwulan II

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**Meningkatnya ASN yang profesional**		Angka Indeks Sistem Merit	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	305 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 %	0 %	Kepala Badan
			Prosentase ASN dengan Kinerja dan Disiplin yang baik (%)	0 (%)	0	0 (%)	0	86 (%)	0	0.15 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0.15 (%)	0	0.15 (%)	0	0 %	0 %	Kepala Badan
			Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi (%)	89.58 (%)	0	84.09 (%)	0	87 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	84.09 (%)	0	93.87 %	0 %	Kepala Bidang Pengadaan, Perencanaan, Pemberhentian dan Informasi
			Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan (%)	98.1 (%)	1.709.443.340	94.04 (%)	16.659.580.765	95 (%)	21.554.349.007	0 (%)	1.929.948.946	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	1.929.948.946	94.04 (%)	18.589.529.711	95.87 %	1087.46 %	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
1		**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Kesehatan)	52 (%)	18.449.946.401	83 (%)	2.240.172.383	51 (%)	1.409.046.000	0 (%)	4.132.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	4.132.000	83 (%)	2.244.304.383	159.62 %	12.16 %	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
		1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Dan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	Jumlah ASN yang telah mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan dan kompetensi manajerial dan fungsional	125 (Orang)	1.251.769.619	35 (Orang)	2.240.172.383	125 (Orang)	1.409.046.000	0 (Orang)	4.132.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	4.132.000	35 (Orang)	2.244.304.383	28 %	179.29 %	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
		1. Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Dserah, Jabatan Pimpinan Tinggi , Jabatan Fungsional Kepemimpinan Dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (laporan)	20 (Laporan)	1.251.769.619	35 (Laporan)	2.240.172.383	50 (Laporan)	1.409.046.000	0 (Laporan)	4.132.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	4.132.000	35 (Laporan)	2.244.304.383	175 %	179.29 %	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**														
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**0**														

										Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**															
2		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Nilai AKIP Perangkat Daerah (poin)	83.7 (Angka)	18.449.946.401	83.95 (Angka)	15.320.845.989	0 (Angka)	16.209.453.283	0 (Angka)	1.825.167.946	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 (Angka)	0	0 (Angka)	1.825.167.946	0 (Angka)	17.146.013.935	0 %	92.93 %	Sekretaris Badan				
		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	50 (Dokumen)	86.680.797	10 (Dokumen)	190.426.000	10 (Dokumen)	198.952.488	3 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	13 (Dokumen)	190.426.000	26 %	219.69 %	Sekretaris Badan				
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	15 (Dokumen)	39.658.417	3 (Dokumen)	85.785.500	3 (Dokumen)	110.995.808	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	85.785.500	26.67 %	216.31 %	Sekretaris Badan				
		2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	15 (Dokumen)	47.022.380	7 (Dokumen)	104.640.500	7 (Dokumen)	87.956.680	2 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	9 (Dokumen)	104.640.500	60 %	222.53 %	Sekretaris Badan				
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**30.95**															
										Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**															
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	240 (Dokumen)	17.524.000.000	48 (Dokumen)	13.294.345.672	48 (Dokumen)	9.699.165.244	12 (Dokumen)	1.735.072.761	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	1.735.072.761	60 (Dokumen)	15.029.418.433	25 %	85.76 %	Sekretaris Badan				
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (orang/bulan)	992 (Orang/Bulan)	17.350.000.000	53 (Orang/Bulan)	13.101.801.172	53 (Orang/Bulan)	9.593.503.244	53 (Orang/Bulan)	1.735.072.761	0 (Orang/Bulan)	0	0 (Orang/Bulan)	0	0 (Orang/Bulan)	0	53 (Orang/Bulan)	1.735.072.761	53 (Orang/Bulan)	14.836.873.933	5.34 %	85.52 %	Sekretaris Badan				
		2. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (dokumen)	45 (Dokumen)	174.000.000	9 (Dokumen)	192.544.500	9 (Dokumen)	105.662.000	1 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	192.544.500	2.22 %	110.66 %	Sekretaris Badan				
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**55.56**															
										Predikat kinerja sub kegiatan	**Rendah**															
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	400 (Layanan)	109.275.934	80 (Layanan)	457.937.498	6 (Layanan)	256.210.599	2 (Layanan)	13.136.000	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	2 (Layanan)	13.136.000	82 (Layanan)	471.073.498	20.5 %	431.09 %	Sekretaris Badan				

		1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	25 (Dokumen)	3.658.054	4 (Dokumen)	10.637.000	5 (Dokumen)	4.397.646	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0	4 (Dokumen)	10.637.000	16 %	290.78 %	Sekretaris Badan
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	25 (Laporan)	25.181.648	10 (Laporan)	95.003.300	12 (Laporan)	57.267.434	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0	10 (Laporan)	95.003.300	40 %	377.27 %	Sekretaris Badan
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	25 (Paket)	31.329.244	11 (Paket)	131.696.000	11 (Paket)	71.497.769	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0	11 (Paket)	131.696.000	44 %	420.36 %	Sekretaris Badan
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	25 (Paket)	10.377.980	12 (Paket)	25.793.000	12 (Paket)	16.578.250	1 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	0	13 (Paket)	25.793.000	52 %	248.54 %	Sekretaris Badan
		5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (dokumen)	25 (Dokumen)	9.251.941	280 (Dokumen)	12.492.000	4 (Dokumen)	8.221.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	280 (Dokumen)	12.492.000	1120 %	135.02 %	Sekretaris Badan
		6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	275 (Unit)	29.477.067	60 (Unit)	182.316.198	25 (Unit)	98.248.000	2 (Unit)	13.136.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	13.136.000	2 (Unit)	195.452.198	0.73 %	663.07 %	Sekretaris Badan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**2.72**													
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**													
		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	95 (Jasa)	113.379.320	4 (Jasa)	727.891.652	0 (Jasa)	572.510.687	0 (Jasa)	72.108.465	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	72.108.465	4 (Jasa)	800.000.117	4.21 %	705.6 %	Sekretaris Badan
		1. Sub Kegiatan Penunjang Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	10 (Unit)	2.928.200	4 (Unit)	4.740.000	30 (Unit)	3.850.000	3 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	0	7 (Unit)	4.740.000	70 %	161.87 %	Sekretaris Badan
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	25 (Laporan)	91.921.950	12 (Laporan)	308.877.073	12 (Laporan)	336.413.517	0 (Laporan)	59.751.607	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	59.751.607	12 (Laporan)	368.628.680	48 %	401.02 %	Sekretaris Badan

		3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	10 (Laporan)	7.480.456	12 (Laporan)	38.263.500	4 (Laporan)	25.299.450	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	38.263.500	120 %	511.51 %	Sekretaris Badan
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	50 (Laporan)	11.048.714	12 (Laporan)	376.011.079	62 (Laporan)	206.947.720	11 (Laporan)	37.901.808	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	11 (Laporan)	37.901.808	23 (Laporan)	413.912.887	46 %	3746.25 %	Sekretaris Badan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**6.94**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**													
		5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	150 ()	109.745.000	3 ()	369.835.217	0 ()	263.634.904	0 ()	4.850.720	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	0	0 ()	4.850.720	3 ()	374.685.937	2 %	341.42 %	Sekretaris Badan
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	50 (Unit)	93.535.198	25 (Unit)	233.290.574	25 (Unit)	140.600.000	2 (Unit)	4.850.720	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	4.850.720	27 (Unit)	238.141.294	54 %	254.6 %	Sekretaris Badan
		2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	50 (Unit)	8.503.347	30 (Unit)	34.905.352	30 (Unit)	68.409.146	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	30 (Unit)	34.905.352	60 %	410.49 %	Sekretaris Badan
		3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	50 (Unit)	7.706.455	14 (Unit)	101.639.291	14 (Unit)	54.625.758	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	14 (Unit)	101.639.291	28 %	1318.89 %	Sekretaris Badan
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**2.67**														
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**													
		6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	154 (%)	456.595.350	3 (%)	230.249.950	0 (%)	5.187.239.361	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	3 (%)	230.249.950	1.95 %	50.43 %	Sekretaris Badan
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	513.056.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	KASUBAG UMUM

		2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	25 (Unit)	119.177.279	3 (Unit)	60.150.071	15 (Unit)	214.446.306	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	60.150.071	12 %	50.47 %	Sekretaris Badan
		3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	3.499.999.800	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	KASUBAG UMUM
		4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	10 (Unit)	959.737.255	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	KASUBAG UMUM
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**												
										Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**												
		7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	31.740.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	62 (Paket)	31.740.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Sekretaris Badan
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**												
										Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**												
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**12.62**												
										Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**												
3		**Program Kepegawaian Daerah**																						
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**0**												
										Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**												
4		**Program Kepegawaian Daerah**																						
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**0**												
										Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**												
5		**Program Kepegawaian Daerah**																						
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**0**												
										Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**												

6		**Program Kepegawaian Daerah**	Persentase ASN dengan Evaluasi Kinerja Optimal (%)	90.1 (%)	349.143.457	99.95 (%)	330.120.659	88.5 (%)	0	0.13 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0.13 (%)	0	0.13 (%)	330.120.659	0.14 %	94.55 %	Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
			Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (%)	87.88 (%)	873.581.343	90.2 (%)	2.697.933.526	0 (%)	3.935.849.724	0 (%)	100.649.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	100.649.000	90.2 (%)	2.798.582.526	102.64 %	320.36 %	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan)(%)	19 (Rasio)	165.500.495	13.38 (Rasio)	672.091.691	18 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	13.38 (Rasio)	672.091.691	70.42 %	406.1 %	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar % (PNS tidak termasuk Guru dan Kesehatan)	99 (Rasio)	13.656.365.611	90 (Rasio)	10.097.251.437	97 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	0 (Rasio)	0	90 (Rasio)	10.097.251.437	90.91 %	73.94 %	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		1. Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi ASN (%)	87.88 (%)	873.581.343	90.2 (%)	2.697.933.526	87 (%)	1.981.061.125	0 (%)	2.560.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	2.560.000	0 (%)	2.700.493.526	0 %	309.13 %	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

		1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (orang)	500 (Orang)	160.072.018	100 (Orang)	221.627.912	500 (Orang)	1.381.086.125	0 (Orang)	2.560.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	2.560.000	0 (Orang)	224.187.912	0 %	140.05 %	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
		2. Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (dokumen)	525 (Dokumen)	238.867.329	45 (Dokumen)	1.448.339.503	500 (Dokumen)	599.975.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.448.339.503	0 %	606.34 %	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**											
										Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**											
		2. Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu (%)	94.94 (%)	835.861.997	100 (%)	866.645.193	93 (%)	893.044.600	36.4 (%)	55.710.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	36.4 (%)	55.710.000	136.4 (%)	922.355.193	143.67 %	110.35 %	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
		1. Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (dokumen)	276 (Dokumen)	505.361.502	45 (Dokumen)	571.928.198	50 (Dokumen)	725.855.240	0 (Dokumen)	43.735.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	43.735.000	45 (Dokumen)	615.663.198	16.3 %	121.83 %	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
		2. Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (dokumen)	1810 (Dokumen)	165.500.495	688 (Dokumen)	93.283.695	400 (Dokumen)	41.162.000	7 (Dokumen)	270.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	270.000	695 (Dokumen)	93.553.695	38.4 %	56.53 %	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
		3. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (dokumen)	4700 (Dokumen)	165.000.000	995 (Dokumen)	201.433.300	900 (Dokumen)	126.027.360	156 (Dokumen)	3.775.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	156 (Dokumen)	3.775.000	1151 (Dokumen)	205.208.300	24.49 %	124.37 %	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**6.36**											
										Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**											
		3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN dengan Nilai Prestasi Kerja minimal 90	12500 (Orang)	349.143.457	9444 (Orang)	526.455.472	9233 (Orang)	269.106.412	1098 (Orang)	2.251.500	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1098 (Orang)	2.251.500	10542 (Orang)	528.706.972	84.34 %	151.43 %	Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
		1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	15 (Dokumen)	128.453.743	3996 (Dokumen)	326.062.327	9233 (Dokumen)	122.165.860	4700 (Dokumen)	2.251.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4700 (Dokumen)	2.251.500	8696 (Dokumen)	328.313.827	57973.33 %	255.59 %	Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
		2. Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (orang)	7081 (Orang)	158.631.508	5 (Orang)	156.488.645	7081 (Orang)	101.247.384	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	5 (Orang)	156.488.645	0.07 %	98.65 %	Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
		3. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (orang)	180 (Dokumen)	62.058.206	3 (Dokumen)	43.904.500	50 (Dokumen)	45.693.168	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	43.904.500	1.67 %	70.75 %	Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**16.97**											
										Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**											

		4. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Persentase data formasi CPNS , ASN dan Purna tugas ASN yang sudah terinput	95.08 (%)	1.506.657.247	94.78 (%)	1.729.389.275	93 (%)	792.637.587	8.2 (%)	40.127.500	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	0	8.2 (%)	40.127.500	102.98 (%)	1.769.516.775	108.31 %	117.45 %	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
		Kepegawaian ASN	pada sistem informasi kepegawaian																				Kepegawaian ASN
		1. Koordinasid dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	1810 (Dokumen)	1.004.463.445	826 (Dokumen)	848.059.189	500 (Dokumen)	400.000.000	0 (Dokumen)	30.676.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	30.676.500	826 (Dokumen)	878.735.689	45.64 %	87.48 %	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		2. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	5 (Dokumen)	110.000.000	1 (Dokumen)	150.179.889	1 (Dokumen)	59.163.700	0 (Dokumen)	2.097.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	2.097.000	1 (Dokumen)	152.276.889	20 %	138.43 %	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (dokumen)	2500 (Dokumen)	62.958.404	557 (Dokumen)	184.257.320	500 (Dokumen)	99.693.562	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	557 (Dokumen)	184.257.320	22.28 %	292.67 %	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (lembaga)	10 (Lembaga)	65.650.915	1 (Lembaga)	163.736.500	1 (Lembaga)	97.739.325	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	0	0 (Lembaga)	163.736.500	0 %	249.4 %	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	21500 (Dokumen)	187.081.932	12 (Dokumen)	383.156.377	12 (Dokumen)	136.041.000	3 (Dokumen)	1.488.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	1.488.000	15 (Dokumen)	384.644.377	0.07 %	205.6 %	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**5**												
										Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**												
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**14.96**												
										Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**												
										Rata-rata capaian kinerja program(%)	**0.02**												
										Predikat kinerja program	**Sangat Rendah**												
										Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)	**0.17**												
										Predikat kinerja sasaran	**Sangat Rendah**												
										Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)	**0.04**												
										Predikat kinerja Sasaran	**Sangat Rendah**												

Total Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**0.02**																				
Predikat kinerja Program	**Sangat Rendah**																				
Total Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**12.35**																				
Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Rendah**																				

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-rata capaian kinerja Sub kegiatan (%)				**8.89**																				
Predikat kinerja Sub kegiatan				**Sangat Rendah**																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Peningkatan sosialisasi aturan kepegawaian kepada seluruh ASN di Lingkungan Pmerintah Kabupaten Tuban Implementasi Aplikasi E Kinerja dan Si Jempol
Sosialisasi dan Rekonsiliasi data secara berkala
Penyusunan SOP layanan kepegawaian Peningkatan Kompetensi PNS sesuai Jabatannya
Penerapan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian perlu ditingkatkan Motivasi dan Kinerja PNS perlu ditingkatkan
Kepedulian aparatur terhadap validasi data pribadi pada SIMITA masih rendah Belum tervisualisasinya prosedur pelayanan kepegawaian
Masih adanya ASN yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki Tambahan penghasilan PNS yang diberikan belum proporsional
Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Melakukan evaluasi terhadap realisasi yang masih rendah kinerja maupun anggarannya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD berikutnya:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Sarana dan Prasarana

Saat ini Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menempati gedung di Jalan Patimura No. 23 Tuban, Telp. (0356) 321240 – 321733 dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas mendapat dukungan sarana mobilitas roda 4 (empat) 6 buah dan roda 2 (dua) 19 buah, 23 unit komputer, 20 unit laptop, 21 unit printer, 3 unit proyektor, 1 buah kamera digital, 1 unit wireless, serta prasarana kantor lainnya, sedangkan kondisi dari sarana dan prasarana semua baik.

2. Sistem Informasi Kepegawaian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 127) untuk menjadi efisien, efektif, dan akurasi dalam acuan pengambilan data ASN diperlukan Sistem Informasi ASN yang diselenggarakan secara normatif dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Untuk mendukung program tersebut di perlukan adanya sistem administrasi berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dalam hal ini adalah SITEMAN.

Sistem Informasi Terpadu Manajemen ASN (SITEMAN) di Tuban adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tuban, di mana para ASN dapat mengelola data kepegawaian dan mengajukan layanan kepegawaian secara digital. Manfaatnya meliputi penyimpanan dokumen kepegawaian pribadi, pengajuan pensiun, dan usulan diklat, serta mengupdate riwayat kompetensi secara terpusat.

Fungsi utama SITEMAN:

1. Manajemen data kepegawaian: Menyimpan dokumen kepegawaian pribadi ASN.
2. Pengajuan layanan kepegawaian: Memfasilitasi pengajuan layanan seperti pensiun dan diklat.
3. Pengelolaan kompetensi: Memungkinkan ASN untuk memperbarui riwayat pengembangan kompetensi mereka secara online.
4. Integrasi data: Berfungsi untuk integrasi data kepegawaian dengan sistem lain, seperti SiASN.

5. Pelaporan dan pemantauan: Menyediakan data untuk analisis dan pelaporan terkait manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan SITEMAN dimaksudkan terciptanya sistem informasi yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, berdaya guna dan berhasilguna, sekaligus menentukan arah kebijakan tentang mekanisme koordinasi, kevalidan data dan informasi melalui teknologi, Manfaat dari SITEMAN ini diharapkan mampu menyajikan data dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pimpinan.

3. Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perubahan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Tuban, untuk Tahun Anggaran 2025 Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 20.003.156.938,00 (Dua puluh milyar tiga juta seratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2025 disajikan dalam Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tuban Tahun 2025 s/d Tribulan II (Tabel T-C 30)

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan (%)	-	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90 %	93 %	95%	95%	95%	-	95%	-	
2	Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin yang baik (%)	-	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80 %	83 %	85%	86%	85%	-	85%	-	
3	Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi (%)	-	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80 %	82 %	84%	87%	84%	-	84%	-	

Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan diperoleh dari jumlah ASN yang yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya dibandingkan dengan jumlah ASN yang memenuhi kompetensi dengan target 94% tercapai 94%. Capaian kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target 35 orang tercapai 34 orang, berupa pelatihan Kepemimpinan Pengawas tingkat II sebanyak 30 orang, pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) sebanyak 4 orang dan Orientasi PPPK sebanyak 725 orang.

Persentase ASN dengan kinerja dan disiplin yang baik adalah penggabungan dari dua indikator pada tahun 2024 yakni persentase ASN dengan disiplin yang baik dan persentase ASN dengan kinerja yang baik. Pada tahun 2024 kedua indikator tersebut dijadikan satu karena antara kinerja dan disiplin adalah bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Selain itu dalam sistem penilaian kinerja ASN melalui E-Kinerja sudah mencakup penilaian tentang kinerja dan juga disiplin. Sehingga untuk tahun 2024 kedua indikator tersebut digabungkan dengan target 85% tercapai 85% dikarenakan ASN yang telah mencapai target sangat memuaskan di uraian tugas sudah cukup banyak. Hasil tersebut dapat tercapai karena semakin tingginya kesadaran ASN untuk meningkatkan kinerja dan disiplin berkaitan dengan penentuan reward and punishment serta didukung dengan capaian berupa terselesaikannya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sejumlah 4000 dokumen dan pengisian LHKPN sebanyak 227 orang yang terdiri dari 176 orang eksekutif, 50 orang legislatif dan 1 lembaga BUMD yang sudah terinput pada aplikasi LHKPN, pelaksanaan ujian dinas dengan target 200 orang peserta tercapai sebanyak 173 orang (terdiri dari 163 orang lulus ujian dinas kenaikan pangkat golongan Tingkat I dan 10 orang ujian dinas penyesuaian ijazah), pelaksanaan asessment dengan target 45 dokumen tercapai sebanyak 774 dokumen terdiri dari guru, sebagian tenaga kesehatan dan sebagian tenaga pelaksana tekhnis serta tersusunnya dokumen Analisis Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat sejumlah 2 dokumen, Pengelolaan Administrasi Diklat dan sertifikasi ASN dengan target sebanyak 102 dokumen terealisasi sebanyak 182 dokumen (terdiri dari 132 dokumen diklat fungsional, 50 dokumen diklat tekhnis), Pengelolaan Kenaikan Pangkat dengan target 950 dokumen tercapai 993 dokumen, Pengelolaan Mutasi dengan target 500 dokumen tercapai 534 dokumen (terdiri dari Kenaikan Jenjang 532 lembar SK, SK Mutasi dalam daerah (guru) 1 Lembar SK, Mutasi keluar daerah 1 Lembar

SK) dan promosi dengan target 45 lembar SK tercapai 45 lembar SK (terdiri dari Pengangkatan SK-SPP-SPMT sejumlah 34 Lembar SK, Surat Perintah Pindah 10 Lembar SK dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural sejumlah 1 Lembar SK. Sedangkan terkait pembinaan dan sosialisasi telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban. Meningkatnya ASN yang profesional didukung oleh Kebijakan/tindakan yang perlu diambil dalam peningkatan kinerja perangkat daerah adalah :

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan pelayanan prima sebagai salah satu upaya standarisasi komitmen dalam pelayanan kepegawaian;
3. Peningkatan kultur budaya kerja publik; dan
4. Peningkatan kedisiplinan pegawai melalui penerapan Reward and Punishment.

Persentase ASN yang sesuai dengan syarat kualifikasi diperoleh dari jumlah ASN yang memenuhi syarat kualifikasi sesuai dengan jabatannya dibandingkan jumlah seluruh ASN dengan target 84 % tercapai 84% dikarenakan sudah semakin banyak ASN yang memiliki keinginan untuk mengembangkan dan menyesuaikan kemampuan teknis nya sesuai bidang pekerjaannya. Selain tingkat kesesuaian pendidikan dengan bidang pekerjaan juga dipertimbangkan pengalaman kerja di bidang terkait. Hasil tersebut didukung juga dengan capaian berupa penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan ASN sejumlah 1 dokumen, fasilitasi pengadaan ASN dan PPPK dengan target sebanyak 500 dokumen tercapai 826 dokumen (terdiri dari 51 formasi CPNS dan 775 Formasi PPPK), administrasi pemberhentian ASN dengan target 500 dokumen penyelesaian administrasi pemberhentian tercapai sebanyak 414 dokumen terdiri dari BUP PNS sebanyak 407 orang dan BUP PPPK sebanyak 7 orang, fasilitasi lembaga profesi ASN dengan target 2 lembaga profesi ASN terlaksana berupa pelaksanaan sosialisasi manajemen ASN dalam rangka Pembekalan dan Pembinaan Mental bagi PNS yang akan Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 1.010 peserta dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan target 12 dokumen tercapai sebanyak

12 dokumen yang sudah terinput pada aplikasi sistem informasi kepegawaian selama 1 tahun.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan dikarenakan kebutuhan, usulan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga diperlukan penyesuaian terhadap realisasi pada sub kegiatan sedangkan Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah penyesuaian target Renstra Perangkat Daerah melalui proses Reviu Renstra dan Reviu RPJMD Kabupaten Tuban.

Sesuai PAPBD tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengelola anggaran sebesar 12.547.940.537,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Untuk mengetahui perkembangan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban dalam tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Realiasasi Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.547940.537	9.523.183.295	75,89	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.414.100.059	7.916.580.264	94	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.695.660	89.462.500	75,37	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.995.700	45.109.000	88,46	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah tersusun selama 1 tahun sebanyak 3 dokumen antara lain dokumen

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
					rencana kerja tahunan, dokumen perubahan rencana kerja tahun 2024 dan dokumen reviu rencana strategis 2021-2026.
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.699.960	44.353.500	65,51	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah tersusun sebanyak 7 dokumen antara lain dokumen laporan pengendalian yang disusun setiap tribulan, dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban perangkat daerah, dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.272.747.234	6.893.100.138	94,78	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.167.085.234	6.809.936.638	95,02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan selama 12 bulan telah bagi 53 orang ASN sedangkan sisanya akan diterimakan selambatnya sesuai tanggal penerimaan.
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	105.662.000	83.163.500	78,71	Selama satu tahun telah tersusun dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD sejumlah 9 dokumen antara lain dokumen neraca SKPD, dokumen catatan atas

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
					laporan keuangan (CALK), laporan realisasi anggaran, laporan penjabaran anggaran, laporan fungsional, dokumen laporan operasional (LO) dan laporan - laporan terkait penyerapan anggaran SKPD selama 1 tahun
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.932.500	218.474.114	95,43	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.986.500	99,66	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sejumlah 3 paket terdiri dari Alat/Bahan Listrik untuk Kegiatan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor serta jasa Servis terkait instalasi listrik.
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.000.000	50.031.000	96,21	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli atau diservis sejumlah 14 paket terdiri dari alat tulis kantor dan alat-alat yang dibutuhkan rutin untuk computer atau PC seperti tinta dan sebagainya.

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.999.900	64.461.500	99,17	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sejumlah 4 paket untuk makan dan minum harianm Rapat Internal, jamuan tamu dan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut selama 12 bulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	12.530.000	83,53	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sejumlah 5 paket untuk keperluan fotocopy, cetak banner sebanyak 2 buah, cetak sppd sebanyak 5 Rim dan lain sebagainya.
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	7.500.000	7.140.000	95,20	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sejumlah 4 dokumen
	Sub Kegiatan Penyelanggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.432.600	80.325.114	94,02	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sejumlah 50 laporan
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.305.502	159.100.950	88,24	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.305.502	60.150.000	92,11	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sejumlah 14 unit antara lain pengadaan mebel berupa kursi, pengadaan printer laserjet, notebook, scanner, PC unit office dan printer multifunction inkjet

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.000.000	98.950.950	92,11	Dokumen perencanaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 1 unit gedung assessment center
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.290.483	355.406.041	87,05	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator jumlah pengadaan jasa penunjang dengan target sebanyak 5 jasa berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.000.000	85,71	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu 2 laporan yang terdiri pembelian benda pos seperti materai dan beban pengiriman paket selama satu tahun
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.019.343	159.760.908	96,23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan selama satu tahun
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.999.700	19.533.900	84,93	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sejumlah 12 laporan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.771.440	173.111.233	80,23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sejumlah 12 laporan untuk honorarium non PNS, premi asuransi, dan iuran-iuran lainnya yang dibayarkan setiap bulan selama satu tahun.
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.128.680	201.036.521	98,01	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.000.000	106.608.230	99,63	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sejumlah 25 unit kendaraan bermotor, pembelian bahan bakar, dan perlengkapan untuk operasional kendaraan serta jasa servis kendaraan bermotor selama satu tahun
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.480.000	17.070.000	87,63	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sejumlah 5 unit yang berfungsi untuk menunjang kelancaran peralatan dan mesin selama satu tahun
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.648.680	77.358.291	98,36	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sejumlah 4 unit gedung berupa pengecatan,

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
					pemelihraan AC, umbul – umbul dan bendera
B.	Program Kepagawaian Daerah	3.305.834.950	2.486.354.510	75,21	
1.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian DaerahS	910.603.500	796.507.193	87,47	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	81.212.000	66.659.360	82,08	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN sejumlah 1 dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	404.553.000	394.364.908	97,48	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sejumlah 500 dokumen. digunakan untuk melaksanakan konsultasi, koordinasi, persiapan serta pelaksanaan seleksi PNS dan PPPK mulai dari sosialisasi, verifikasi berkas pendafataran, pelaksanaan seleksi, pemberkasan, pengangkatan PNS dan PPPK, pengambilan sumpah janji serta penyerahan SK PNS dan PPPK. Untuk tahun 2024 target sebanyak 500 dokumen tercapai sebanyak 826 dokumen terdiri dari 51 Formasi CPNS dan 775 Formasi PPPK

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	106.406.000	84.955.600	79,84	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan target 500 penyelesaian administrasi pemberhentian tercapai sebanyak 414 dokumen penyelesaian administrasi pemberhentian.
	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	88.853.500	88.736.500	99,87	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi dengan target 2 lembaga profesi ASN digunakan untuk pelaksanaan Pembekalan dan Pembinaan Mental bagi PNS yang akan Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 1.010 peserta
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	229.579.000	161.790.825	70,47	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target 12 Laporan digunakan untuk koordinasi data kepegawaian dan pemeliharaan jaringan atau server yang berkaitan dengan aplikasi kepegawaian dengan target 12 dokumen tercapai sebanyak 12 dokumen yang sudah terupdate pada aplikasi sistem informasi kepegawaian

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
2.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	935.670.000	392.874.904	41,99	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	37.420.000	30.479.695	81,45	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah digunakan untuk koordinasi dan penyelesaian pengajuan dokumen Mutasi Kepegawaian baik itu structural, fungsional maupun pelaksana. Untuk tahun 2024 sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan target 400 dokumen tercapai 532 dokumen (terdiri dari SK kenaikan jenjang sebanyak 532 lembar SK, Mutasi dalam daerah (guru) 1 Lembar SK dan Mutasi keluar daerah sebanyak 1 lembar SK)
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat	121.404.700	121.104.000	99,75	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN untuk administrasi usulan Kenaikan Pangkat ASN dengan target 950 dokumen tercapai sebanyak 993 lembar SK Kenaikan Pangkat dan 2.547 Lembar SK Kenaikan Gaji Berkala.

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	295.000.000	289.862.089	98,26	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN digunakan untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, evaluasi jabatan struktural / pengembangan karier dan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama. Untuk tahun 2024 sub kegiatan pengelolaan promosi ASN dengan target 45 lembar SK tercapai 45 lembar SK (terdiri dari pengangkatan SK-SPP-SPMT sebanyak 34 orang, Surat Perintah Pindah sebanyak 10 orang dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural sebanyak 1 orang)
3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1.190.462.840	1.083.975.211	91,05	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	183.417.270	149.997.590	81,78	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya dengan target 200 orang digunakan untuk pelaksanaan ujian dinas tingkat I yang direncanakan diikuti oleh 200 dengan realisasi 163 orang yang lulus dan 10 orang yang lulus ujian penyesuaian ijazah

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	257.676.000	241.751.196	93,82	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center dengan target 45 orang digunakan untuk pelaksanaan asesment pada 774 orang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan pelaksana tenaga tekhnis
	Sub Kegiatan Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	694.004.550	649.818.060	93,63	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN dengan target 115 digunakan untuk pendidikan atau pelatihan selama satu tahun yang diikuti oleh 182 orang terdiri dari 132 orang yang mengikuti diklat fungsional dan 50 orang yang mengikuti diklat tekhnis
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	55.365.020	42.408.365	76,60	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat dengan target 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen Analisis Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat
4.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	269.004.550	649.818.060	93,63	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125.899.610	111.929.557	95,33	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan capaian berupa terselesaikannya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sejumlah 4000 dokumen
	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	45.571.000	24.506.500	53,78	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan digunakan untuk sosialisasi dengan target sejumlah 5 orang telah terealisasi melalui pembinaan dan sosialisasi Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban dan pengisian LHKPN sebanyak 227 orang yang sudah terinput seluruhnya pada aplikasi pelaporan LHKPN

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Hasil Yang Dicapai
		Pagu	Realisasi	%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	97.628.000	76.561.145	78,42	Jumlah dokumen pengelolaan pemberian penghargaan digunakan untuk Penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Pemberian Reward and Punishment ASN.
C.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	828.005.528	803.215.781	97,01	
1.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	828.005.528	803.215.781	97,01	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	828.005.528	803.215.781	97,01	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target 35 orang tercapai 34 orang, berupa pelatihan Kepemimpinan Pengawas tingkat II sebanyak 30 orang, pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) sebanyak 4 orang dan Orientasi PPPK sebanyak 725 orang

4. Administrasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2019 tentang uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban yang diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Lembaga Teknis Daerah atau Unsur Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, yang dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Administrasi Kepegawaian dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Di samping itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian dukungan akan penyelenggarakan Pemerintahan Daerah serta Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
2. Pelaksana operasional dan pelayanan umum serta pengelola ketatausahan kepegawaian

Sedangkan personil yang menangani Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban terdiri dari 7 (Tujuh) orang PPPK dan 5 (lima) orang Non PNS adapun 35 (Tiga Puluh Lima) Orang PNS dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah PNS sesuai gender:

Pria : 27 orang

Wanita : 20 orang

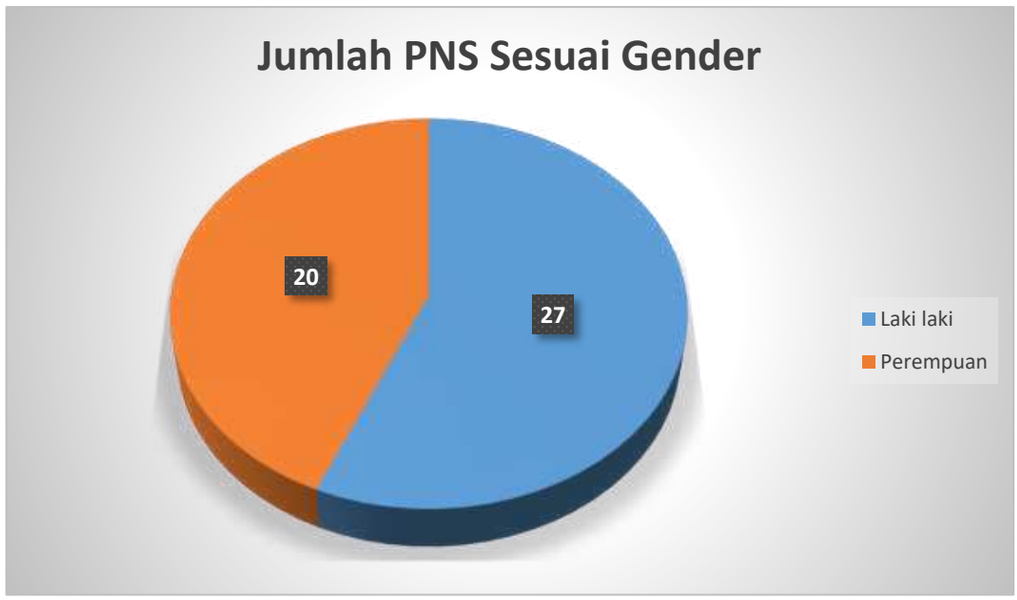

b. Jumlah PNS berdasarkan golongan berikut :
   Golongan IV : 5 orang
   Golongan III : 29 orang
   Golongan II : 13 orang

c. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan :
   S2 (Magister) : 3 orang
   S1 : 21 orang
   Diploma-3 : 9 orang
   Diploma-4 : 2 orang
   SMA : 12 orang

BIDANG	GENDER		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S2	S1	D3	D4	SMA
Seketariat	4	8	2	4	6	1	5	2	-	2
Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	9	3	-	3	9	-	4	3	-	1
Pengembangan Kompetensi Aparatur	4	2	1	4	1	-	3	1	4	2
Mutasi dan Promosi	7	2	2	5	2	1	7	-	-	1
Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	3	5	1	5	2	1	3	-	3	3
Jumlah	27	20	6	21	20	3	22	6	7	9

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pengembangan kompetensi merupakan hak setiap ASN yang dilindungi oleh undang-undang, dimana setiap PNS berhak untuk mengembangkan kompetensinya dalam setiap tahun. Regulasi tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap ASN untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang dimilikinya bahwa untuk melaksanakan manajement Pegawai Negeri sipil Daerah yang bersih, inovatif, kreatif dan efisien perlu dilakukan Pembinaan kepegawaian secara rutin, terarah dan berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan pengadaan ASN juga harus menyesuaikan kebijakan pusat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025 sampai dengan TW II dan adanya perubahan kebutuhan Perangkat Daerah, maka pada Renja Perubahan 2025 ini dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran, beserta indikator dan target sub kegiatan, kegiatan maupun pada program.

Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi pelayanan kepegawaian
2. Profesionalitas ASN
3. Manajemen pola karier
4. Pemerataan distribusi ASN (jumlah dan talent)
5. Optimalisasi pengisian Jabatan fungsional
6. Penuntasan status kepegawaian non ASN

Dampak dari permasalahan kepegawaian dapat menimbulkan dampak negatif seperti penurunan kinerja, motivasi, dan produktivitas karyawan akibat sistem yang tidak adil, serta meningkatkan kinerja organisasi. Dampak lainnya bisa berupa sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar aturan, bahkan pemecatan, serta masalah hukum dan rusaknya citra instansi atau perusahaan.

Dampak negatif bagi organisasi dan pegawai seperti :

1. Penurunan kinerja dan produktivitas: Sistem yang buruk, seperti rekrutmen yang tidak efektif, evaluasi tidak adil, atau kurangnya pengembangan karir, menurunkan motivasi karyawan sehingga produktivitas menurun secara keseluruhan;
2. Meningkatnya turnover dimana pegawai yang merasa tidak puas dan tidak mendapatkan dukungan cenderung keluar dari perusahaan, sehingga tingkat pergantian karyawan tinggi;
3. Beban kerja berlebih dimana Moratorium kepegawaian dapat menyebabkan regenerasi yang lambat, mengakibatkan beban kerja yang tidak seimbang dan pegawai yang tidak sesuai jumlahnya;
4. Kerugian finansial dapat mengakibatkan Kinerja yang buruk sehingga dapat menyebabkan kerugian, dan masalah disiplin seperti korupsi juga dapat menimbulkan kerugian finansial dan hukum yang besar;
5. Masalah psikologis: Sistem yang buruk dan beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan stres dan dampak psikologis negatif pada pegawai.

Dampak bagi pegawai yang melanggar aturan seperti :

1. Sanksi disiplin: Pelanggaran dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga skorsing.
2. Penurunan jabatan: Karyawan yang melanggar aturan, seperti sering tidak masuk kerja, dapat mengalami penurunan jabatan.
3. Pemberhentian: Pelanggaran berat, seperti mangkir kerja terus-menerus atau tindak pidana (termasuk korupsi), dapat berujung pada pemecatan.

Dampak bagi organisasi dari permasalahan kepegawaian antara lain :

1. Rusaknya citra instansi/perusahaan: Pelanggaran disiplin dan hukum oleh pegawai dapat merusak reputasi dan citra lembaga atau perusahaan di mata publik;
2. Hambatan operasional: Masalah seperti human error atau kurangnya kejelasan deskripsi pekerjaan dapat mengganggu kelancaran operasional;
3. Tidak optimalnya pelayanan publik: Khususnya di sektor pemerintahan, masalah kepegawaian seperti kekurangan staf atau moratarium bisa membuat pelayanan publik kurang optimal.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian di Perangkat Daerah meliputi pemanfaatan teknologi untuk sistem yang terintegrasi digital untuk memantau riwayat kepegawaian dan memudahkan pengajuan layanan. Peluang lain adalah peningkatan profesionalisme melalui uji kompetensi dan optimalisasi mutasi berdasarkan kompetensi yang terukur. Selain itu, ada peluang dalam memperkuat akuntabilitas, menerapkan penilaian kinerja yang transparan, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi antara lain :

1. Pemanfaatan teknologi
    a. Sistem terintegrasi: mengembangkan dan mengimplementasikan sistem administrasi kepegawaian yang terintegrasi untuk memudahkan proses seperti pengangkatan, kenaikan pangkat, dan mutasi jabatan.
    b. Kemudahan akses: menciptakan layanan digital yang mudah diakses agar pegawai dapat dengan mudah mengakses layanan kepegawaian dan memantau riwayat kepegawaian mereka sendiri.
    c. Fungsi pemantauan: menyediakan platform yang dapat memantau riwayat kepegawaian secara langsung dan menyediakan data kinerja pegawai untuk mendukung keputusan promosi dan mutasi.
2. Peningkatan profesionalisme dan manajemen SDM
    a. Optimalisasi kompetensi: menerapkan assessment center dan mengoptimalkan pengukuran kompetensi pegawai untuk memastikan penempatan.
    b. Manajemen kinerja: menggunakan data dan laporan kinerja pegawai sebagai bahan pertimbangan yang objektif untuk promosi dan mutasi, serta memastikan pencapaian tujuan organisasi.
    c. Pengembangan karir: meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan yang terarah, pengembangan karir, serta penilaian kinerja yang adil dan transparan.
3. Peningkatan akuntabilitas dan tata kelola
    a. Menerapkan pelayanan publik berbasis prinsip pemerintahan yang baik dalam seluruh aspek kepegawaian.
    b. Memperkuat akuntabilitas dan audit kinerja dengan penilaian kinerja yang jelas untuk mendorong akselerasi penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kolaborasi dan partisipasi
   a. Kerjasama multipihak: Membangun kerjasama dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi, untuk saling mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.
   b. Ruang aspirasi: Memberikan ruang yang lebih besar bagi pegawai untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan pendapat mereka, misalnya melalui forum koordinasi rutin, untuk bersama-sama memajukan pelayanan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dalam Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas, pokok dan fungsi Badan Kepegewaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban.

Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan melibatkan penelaahan dan pencocokan program serta kegiatan yang diusulkan. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi program prioritas di rancangan awal, membandingkannya dengan daftar program dari analisis kebutuhan, menyajikan hasilnya dalam tabel, serta mencatat perbedaan dan kesesuaiannya. (Tabel T-C 31)

Tabel T.C 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,65 Poin	8.754.314.735	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	84,95 Poin	15.397.247.571	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	10 Dokumen	118.695.660	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	10 Dokumen	117.197.256	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	83.503.952	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	83.503.952	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	25.268.272	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	33.693.304	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	21 dokumen	8.338.054.145	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	48 dokumen	8.338.054.145	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	62 orang/ bulan	8.258.042.145	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	64 orang/ bulan	8.258.042.145	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD	9 Dokumen	80.012.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD	9 Dokumen	80.012.000	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	1 layanan	976.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	1 layanan	976.000	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 paket	976.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 paket	976.000	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Atribut Kelengkapannya	Daya Manusia	Atribut Kelengkapan			Kelengkapannya	Sumber Daya Manusia	Atribut Kelengkapan			
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 layanan	191.923.318	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 layanan	191.921.318	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	4 paket	4.397.646	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	5 paket	4.397.646	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bangunan Kantor	Daya Manusia	kantor yang disediakan			Bangunan Kantor		kantor yang disediakan			
2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	51.540.673	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	51.540.673	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Badan Kepegawaian dan	Jumlah paket bahan logistic	11 paket	68.610.269	Sub Kegiatan Penyediaan	Badan Kepegawaian dan	Jumlah paket bahan	12 paket	68.610.269	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Logistik Kantor	Pengembangan Sumber Daya Manusia	kantor yang disediakan			Bahan Logistik Kantor	Pengembangan Sumber Daya Manusia	logistic kantor yang disediakan			
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	11.604.750	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	11.604.750	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	280 dokumen	8.221.500	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	8.221.500	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	60 laporan	47.548.480	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	40 laporan	47.546.480	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daya Manusia	konsultasi SKPD					dan konsultasi SKPD			
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pengadaan BMD	3 unit	5.187.239.361	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pengadaan BMD	10 unit	6.142.214.261	
1	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Badan Kepegawaian dan Pengembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	3 unit	513.056.000	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasion	3 unit	513.056.000	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Operasional atau Lapangan	an Sumber Daya Manusia	atau Lapangan yang disediakan			Operasional atau Lapangan	Sumber Daya Manusia	al atau Lapangan yang disediakan			
2	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	214.446.306	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	214.446.306	
2	Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau	Badan Kepegawaian dan Pengembang	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	3.499.999.800	Sub kegiatan Pengadaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Jumlah unit peralatan dan mesin	1 unit	4.454.974.700	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bangunan Lainnya	an Sumber Daya Manusia	L:ainnya yang disediakan			Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumber Daya Manusia	lainnya yang disediakan			
2	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	959.737.255	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	959.737.255	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	2 jasa	532.249.687	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 jasa	532.249.687	
1	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	2.300.000	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2.300.000	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	336.413.517	Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	336.413.517	
3	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan	12 laporan	23.673.450	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan	12 laporan	23.673.450	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	perlengkapan kantor	Daya Manusia	perlengkapan kantor					perlengkapan kantor			
4	Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	169.862.720	Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	169.862.720	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Jumlah Pemeliharaan BMD	3 unit	263.634.904	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pemeliharaan BMD	3 unit	263.634.904	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah	Daya Manusia				Pemerintahan Daerah					
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	140.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	140.600.000	
2	Sub kegiatan pemeliharaan	Badan Kepegawaian	Jumlah peralatan	30 unit	68.409.146	Sub kegiatan pemeliharaan	Badan Kepegawaian	Jumlah peralatan	30 unit	68.409.146	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	peralatan dan mesin lainnya	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	dan mesin lainnya yang dipelihara			peralatan dan mesin lainnya	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	dan mesin lainnya yang dipelihara			
3	Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 unit	54.625.758	Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	14 unit	54.625.758	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi syarat pengembangan kompetensi 20JP	100 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksanaanya Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi syarat pengembangan kompetensi 20JP	60 %	
				Persentase ASN yang telah	83 %			Persentase ASN yang telah Mendudu	83 %		

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Mendu duki jabatan sesuai dengan pemeta an manaje men talenta				ki jabatan sesuai dengan pemetaan manajeme n talenta			
				Persent ase kinerja ASN minima l baik	86 %			Persentase kinerja ASN minimal baik	86 %		

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase Data Base kepegawaian yang lengkap dan update	39,55 %			Persentase Data Base kepegawaian yang lengkap dan update	39,55 %		
1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase data formasi CPNS , ASN dan Purna tugas ASN	90 %	537.426.831	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase data formasi CPNS , ASN	80 %	537.426.831	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang sudah terinput pada sistem informasi kepegawaian					dan Purna tugas ASN yang sudah terinput pada sistem informasi kepegawaian			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencama Kebutuhan,Jenis dan Jumlah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan,	1 Dokumen	41.289.149	Sub Kegiatan Penyusunan Rencama Kebutuhan,Jenis dan Jumlah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana	1 Dokumen	41.289.149	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Peningatan Kesejahteraan ASN	Daya Manusia	jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN			Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Peningatan Kesejahteraan ASN		kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN			
2	Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan	500 dokumen	298.114.300	Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaa	500 dokumen	298.114.300	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			PNS dan PPPK					n PNS dan PPPK			
3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	500 dokumen	63.293.722	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	500 dokumen	63.293.722	
4	Sub kegiatan Fasilitasi	Badan Kepegawaian dan Pengembang	Jumlah lembaga profesi ASN	1 lembaga	38.287.750	Sub kegiatan Fasilitasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Jumlah lembaga profesi	1 lembaga	38.287.750	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lembaga Profesi ASN	an Sumber Daya Manusia	yang difasilitasi			Lembaga Profesi ASN	Sumber Daya Manusia	ASN yang difasilitasi			
5	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	96.441.910	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	96.441.910	
2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat	90 %	774.068.960	Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Persentase pelayanan administrasi	80 %	774.068.960	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daya Manusia	waktu				Sumber Daya Manusia	kepegawaian tepat waktu			
1	Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi	400 dokumen	33.662.000	Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan	400 dokumen	33.662.000	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ASN antar daerah					mutasi ASN antar daerah			
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	950 dokumen	63.864.544	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	900 dokumen	63.864.544	
3	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	45 dokumen	676.542.416	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	50 dokumen	676.542.416	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daya Manusia									
3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi ASN	85,5 %	1.579.717.787	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi ASN	87 %	1.835.717.787	
1	Sub kegiatan Peningkatan	Badan Kepegawaian dan	Jumlah ASN yang	100 orang	1.015.633.287	Sub kegiatan Peningkatan	Badan Kepegawaian dan	Jumlah ASN yang meningkat	500 orang	1.271.633.287	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kapasitas Kinerja ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	meningkat kapasitasnya			Kapasitas Kinerja ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	kapasitasnya			
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	45 dokumen	564.084.500	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	500 dokumen	564.084.500	
4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Jumlah ASN dengan nilai prestasi kerja minimal 90	9449 orang	128.471.290	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Jumlah ASN dengan nilai prestasi kerja	9233 orang	128.471.290	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daya Manusia					Sumber Daya Manusia	minimal 90			
1	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluais kinerja aparatur	4000 dokumen	53.791.727	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluais kinerja aparatur	3996 dokumen	53.791.727	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	5 orang	52.888.084	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	3 orang	52.888.084	
3	Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	3 orang	21.791.479	Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	3 orang	21.791.479	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, manajerial dan fungsional	65 %	1.141.224.500	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, manajerial dan fungsional)	65 %	1.141.224.500	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang telah mengikuti sertifikasi, kelembagaan , pengembangan dan kompetensi manajerial dan fungsional	50 orang	1.141.224.500	Kegiatan Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang telah mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan dan kompetensi manajerial dan fungsional	50 orang	1.141.224.500	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimipinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan	50 laporan	1.141.224.500	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimipinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan ,dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi,	50 laporan	1.141.224.500	

No	Rancangan Awal P - RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kepemimpinan,dan Prajabatan		fungsional, kepemimpinan dan prajabatan					jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban pelaku, masyarakat serta organisasi lainnya dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya mendapatkan usulan dan saran program atau kegiatan dari para Stakeholder.

Proses penyusunan anggaran dan penganggaran kinerja melalui sub bagian program yang kemudian dikonsultasikan kepada setiap bidang yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban dan diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya, urgensi dan ketersediaan dana diakomodasikan dalam PAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. PAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 dan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban. Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh staf, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai Permendagri No. 59 tahun 2007 (Tabel T.C. 32)

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tuban yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yaitu " Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan " serta tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025 juga telah disesuaikan dengan misi Bupati Tuban yang keempat yaitu "Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Profesional, Transparan, Akuntabel dan Sistem Pengawasan yang Efektif". Misi keempat Bupati Tuban tersebut memiliki beberpa sasaran, sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk dalam sasaran kedua yaitu terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan indikator indeks profesionalitas ASN yang mana indikator tersebut kemudian digunakan sebagai tujuan dari perangkat daerah, sedangkan indiktornya menjadi sasaran perangkat daerah. Untuk tahun 2025 total anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.20.003.156.939,00 yang terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang semuanya merupakan kegiatan yang didanai oleh APBD II yang terutama digunakan untuk penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan ASN. Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sebagaimana pada (Tabel T.C 33)

Tabel T.C 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	TUBAN	84,45 Poin	15.397.247.571	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84,95 Poin	9.771.683.901
05.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen	TUBAN	10 Dokumen	117.197.256	Dana Transfer Umum-Dana		10 Dokumen	46.924.185

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun				Alokasi Umum			
5.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TUBAN	3 Dokumen	83.503.952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	33.239.185
5.03.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja	TUBAN	7 laporan	33.693.304	Dana Transfer		7 laporan	13.685.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Perangkat Daerah	perangkat daerah				Umum-Dana Alokasi Umum			
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	TUBAN	48 dokumen	8.149.054.145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 dokumen	8.640.360.741
5.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji	TUBAN	64 orang/ bulan	8.069.042.145	Dana Transfer		64 orang/ bulan	8.579.015.741

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan Tunjangan ASN		dan tunjangan ASN				Umum-Dana Alokasi Umum			
5.03.01.2.02.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD	TUBAN	9 Dokumen	80.012.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Dokumen	61.345.000
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan	TUBAN	1 layanan	976.000	Dana Transfer Umum-Dana		1 layanan	976.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Perangkat Daerah	Kompetensi Pegawai				Alokasi Umum			
5.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	TUBAN	1 paket	976.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	976.000
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	TUBAN	80 layanan	191.921.318	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 jenis	185.103.110

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	TUBAN	5 paket	4.397.646				
5.03.01.2.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	TUBAN	10 paket	51.540.673	Umum-Dana Alokasi Umum		10 paket	51.540.650

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	TUBAN	12 paket	68.610.269	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 paket	66.841.200
5.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	TUBAN	12 paket	11.604.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 paket	9.808.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	TUBAN	5 dokumen	8.221.500				
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	TUBAN	40 laporan	47.546.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 laporan	59.912.510

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.37	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	TUBAN	3 unit	6.142.214.261				
5.03.01.2.07.0006	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	TUBAN	1 unit	513.056.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.07.0006	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	TUBAN	3 unit	214.446.306				
5.03.01.2.07.0006	Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TUBAN	1 unit	4.454.974.700				
5.03.01.2.07.0006	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	TUBAN	10 unit	959.737.255				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	atau Bangunan Lainnya	dan bangunan lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan							
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	TUBAN	4 jasa	532.249.687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 jasa	615.100.865
5.03.01.2.08.0001	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	TUBAN	2 laporan	2.300.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	TUBAN	12 laporan	336.413.517	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	375.658.495
5.03.01.2.08.0003	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan	Tersedianya jasa peralatan dan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan	TUBAN	12 laporan	23.673.450				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	perlengkapan kantor	perlengkapan kantor	dan perlengkapan kantor							
5.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	TUBAN	12 laporan	169.862.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	239.442.370
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pemeliharaan BMD	TUBAN	3 unit	263.634.904	Dana Transfer Umum-Dana		50 unit	284.195.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah					Alokasi Umum			
5.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	TUBAN	25 unit	140.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 unit	124.857.000
5.03.01.2.09.0006	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan	Terpeliharanya peralatan dan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	TUBAN	30 unit	68.409.146	Dana Transfer		15 unit	58.971.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	perlengkapan mesin lainnya	perlengkapan mesin lainnya	yang dipelihara				Umum-Dana Alokasi Umum			
5.03.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	TUBAN	14 unit	54.625.758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	100.366.700
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terlaksananya program kepegawaian daerah	Prosentase ASN yang memenuhi syarat pengembanga	TUBAN	100 %	3.275.684.868	Dana Transfer Umum-Dana		97 rasio	2.622.943.510

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			n kompetensi 20JP				Alokasi Umum			
			Persentase ASN yang telah Menduduki jabatan sesuai dengan pemetaan manajemen talenta	TUBAN	83 %					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase kinerja ASN minimal baik	TUBAN	86 %					
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TUBAN	90 %	537.426.831	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		93 %	439.253.650
5.03.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Tersusunnya Rencana Kebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan,	TUBAN	1 Dokumen	41.289.149	Dana Transfer Umum-Dana		1 Dokumen	39.784.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelaksanaan Pengadaan ASN Peningatan Kesejahteraan ASN	Pengadaan ASN Peningatan Kesejahteraan ASN	jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN				Alokasi Umum			
5.03.02.2.01.000003	Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	TUBAN	500 dokumen	298.114.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 dokumen	235.957.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	TUBAN	500 dokumen	63.293.722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 dokumen	71.502.100
5.03.02.2.01.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	TUBAN	1 lembaga	38.287.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 lembaga	23.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.01.00010	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	TUBAN	12 dokumen	96.441.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	68.450.200
5.03.02.2.02	Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	TUBAN	90 %	963.068.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		93 %	878.739.460

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.02.0001	Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	TUBAN	400 dokumen	33.662.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 dokumen	54.854.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	TUBAN	950 dokumen	63.864.544	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		950 dokumen	64.644.544
5.03.02.2.02.0003	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	TUBAN	45 dokumen	865.542.416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 dokumen	759.240.916

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi ASN	TUBAN	85,5 %	1.835.717.787	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		86 %	1.122.253.800
5.03.02.2.03.0001	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	TUBAN	100 orang	1.271.633.287	Dana Transfer Umum-Dana		100 orang	660.447.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Alokasi Umum			
5.03.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	TUBAN	45 dokumen	564.084.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 dokumen	461.806.200
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Knerja aparatur	Jumlah ASN dengan nilai prestasi kerja minimal 90	TUBAN	9449 orang	128.471.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10890 orang	182.696.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.04.0001	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluais kinerja aparatur	TUBAN	4000 dokumen	53.791.727	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4000 dokumen	65.005.150
5.03.02.2.04.0007	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	TUBAN	5 orang	52.888.084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 orang	54.386.450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.04.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	SN yang Diberikan Penghargaan	TUBAN	3 orang	21.791.479	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 orang	63.305.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			TUBAN						
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya Program Pengembangan Sumbe r Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan	TUBAN	65 %	1.141.224.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 rasio	770.081.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kompetensi Dasar, manajerial dan fungsional							
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang telah mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan dan	TUBAN	125 orang	1.141.224.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		125 orang	770.081.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			kompetensi manajerial dan fungsional							
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	TUBAN	35 laporan	1.141.224.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 laporan	770.081.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							

BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan – PD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan – PD) Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan untuk dapat dijabarkan dalam kegiatan serta dapat memberikan kontribusi sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja serta sebagai pendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan – PD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2025 perlu perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, selaras dengan kebutuhan dan perkembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah dan sebagai bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini, maka semua pihak dan kelompok pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah harus menjadikan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Tindaklajut dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan. Untuk itu setiap Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi tanggungjawabnya setiap Tribulan kepada Kepala Badan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN TUBAN

ttd.

FIEN ROEKMINI KOESNAWANGSIH

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran yang harus disusun oleh setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, merupakan dokumen perencanan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2025. Perubahan Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Perubahan) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah 2021-2026 dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan pagu indikator kinerja program dan kegiatan, perubahan Renja didasarkan pada evaluasi Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Daerah *"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah"*

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri A Nomor 01);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri E Nomor 67);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri D Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023); dan
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaan perubahan program dan kegiatan, sub kegiatan, sasaran dan target sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah:

1. sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan pengawasan agar terarah sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
2. dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi, dan tugas Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik;
3. sebagai evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

B A B II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2025.

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan perkiraan capaian Renstra Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan : 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program Kegiatan (sasaran)	Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (sd Triwulan 2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 2025 (sd Triwulan 2)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	RP.
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Intern Pemerintah		Level Maturitas SPIP	Level 3	49.123.514.771	Level 3	41.135.701.254	3 Level	28.601.552.833	0	2.640.043.779	0	3.885.812.869	0	6.525.856.648	0	49.531.258.131	0	100.83 %
			Presentase SAKIP OPD tuntas BB	100%		100%		100%		0		0		0		0%		0%	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin	B2	32.136.164.210	84,05	33.430.928.236	84,15	20.916.607.784	0	2.317.915.209	0	3.510.435.729	0 (Nilai)	5.834.350.938	0 (Nilai)	40.897.317.885	0 %	127.26 %
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	36	283.820.000	18	92.186.500	9	207.689.000	3	0	1	11.099.500	2 (Dokumen)	16.699.500	22 (Dokumen)	108.886.500	61.1 1 %	38.25 %
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	149.800.000	9	48.162.500	3	93.939.000	2	0	0	5.108.500	2 (Dokumen)	5.108.500	11 (Dokumen)	55.857.000	73.3 3 %	37.36 %

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program Kegiatan (outcome)	Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (sd Triwulan 2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 2025 (sd Triwulan 2)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	RP.
		Koordinasi,dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	149,500,000	9	30,319,500	3	24,940,000	1	0	1	6,591,000	2 (Laporan)	6,591,000	11 (Laporan)	38,994,000	73.33 %	26.08 %
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	55,775,000	9	13,704,500	3	88,810,000	0	0	0	0	0 (Laporan)	0	9 (Laporan)	13,704,500	60 %	24.57 %
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	28	20,735,199,608	15	20,991,435,256	7	11,596,223,381	2	1,971,437,410	1	2,277,642,550	56 (Dokumen)	4,249,079,960	18 (Dokumen)	25,889,139,395	64.29 %	124.74 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	320	24,646,522,085	163	20,314,025,024	48	11,447,808,381	50	1,970,912,410	56	2,274,594,740	56 (Orang/Bulan)	4,245,507,150	219 (Orang/Bulan)	25,164,094,650	68.44 %	102.1 %
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	257,495,500	12	255,197,749	2	291,400,160	3 (Dokumen)	21,801,009	3 (Dokumen)	26,604,907	6 (Dokumen)	48,406,416	30 (Dokumen)	309,479,026	50 %	41.9 %
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	256	1,540,474,200	112	1,769,668,109	53	2,351,124,000	50 (Orang)	181,483,995	56 (Orang)	185,056,820	56 (Orang)	366,540,815	168 (Orang)	2,187,827,110	65.63 %	142.02 %
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	0	62	29,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	>100%

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program Kegiatan (outcome)	Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (sd Triwulan 2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 2025 (sd Triwulan 2)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	RP.
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsinya	375	1,840,592,750	200	1,720,363,109	80	2,321,500,000	25 (Orang)	191,483,995	14 (Orang)	185,056,820	39 (Orang)	366,540,815	239 (Orang)	2,138,524,110	63,7 3 %	116,19 %
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	20 layanan	1,004,906,600	5	347,267,974	5	658,329,709	4 (Layanan)	39,339,390	5 (Layanan)	19,070,950	9 (Layanan)	58,410,340	10 (Layanan)	1,073,103,250	50 %	106,79 %
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	77,790,000	6	52,198,800	3	20,710,800	0 (Paket)	288,5	0 (Paket)	0,000	0 (Paket)	285,5	6 (Paket)	52,487,300	40 %	67,47 %
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 Paket	403,134,000	44	289,838,130	15	177,496,400	2 (Paket)	3,587,000	0 (Paket)	0	2 (Paket)	2,521,000	16 (Paket)	299,780,130	61,3 3 %	74,36 %
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	122,000,000	21	94,942,217	7	43,957,600	1 (Paket)	448,6	2 (Paket)	3,280,000	3 (Paket)	3,728,800	24 (Paket)	98,671,017	68,5 7 %	80,88 %
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	35,910,000	600	37,286,000	240	12,280,400	40 (Dokumen)	1,080,000	80 (Dokumen)	1,860,000	120 (Dokumen)	2,940,000	720 (Dokumen)	41,646,000	60 %	115,69 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	617,299,250	252	503,627,463	80	254,920,000	5 (Laporan)	10,655,150	18 (Laporan)	3,610,000	23 (Laporan)	13,265,450	275 (Laporan)	530,096,413	68,7 5%	86,87%

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program Kegiatan (outcome)	Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (sd Triwulan 2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 2025 (sd Triwulan 2)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	56 unit	51,212,604	35	7,541,238,350	26	4,018,099,681	0 (Unit)	0	4 (Unit)	893,931,220	4 (Unit)	893,931,220	40 (Unit)	9,242,454,770	71,43 %	1804723 %
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan.	0 Unit	0	2	696,000,000	22	2,453,381,060	0 (Unit)	0	20 (Unit)	477,416,720	20 (Unit)	477,416,720	20 (Unit)	1,891,056,720	0 %	0 %
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	48 unit	30,287,825	41	289,966,200	4	641,266,425	0	0	0	0	0 (Unit)	0	41 (Unit)	289,966,200	85,42 %	957,37 %
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	53,000,000	20	1,706,257,000	158	955,152,196	0	0	29 (Unit)	416,514,500	29 (Unit)	416,514,500	49 (Unit)	2,212,416,700	196 %	2767,61 %
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	1	4,995,000	1	4,834,769,447	0	0	0	2,378,000	0 (Unit)	2,378,000	2 (Unit)	65,929,000	40 %	4174,37 %
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 (Jasa)	939,456,940	14	668,691,654	7	626,591,500	4 (Jasa)	61,515,197	7 (Jasa)	73,022,251	7 (Jasa)	134,537,448	21 (Jasa)	838,848,248	75 %	87,43 %

No	Susunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program Kegiatan (satuan)	Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sd RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (sd Triwulan 2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 2025 (sd Triwulan 2)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	RP.
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	480.000.000	3	279.907.000	1	36.672.500	1 (Laporan)	691	1 (Laporan)	71	1 (Laporan)	765	1 (Laporan)	280.672.000	20 %	58,47 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	701.194.800	9	383.885.654	3	258.000.000	3 (Laporan)	33.888.669	3 (Laporan)	32.608.906	3 (Laporan)	66.497.575	3 (Laporan)	462.300.278	20 %	65,93 %
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	18.125.000	9	4.899.000	3	1.261.000	1 (Laporan)	62	1 (Laporan)	63	1 (Laporan)	125	1 (Laporan)	5.015.000	6,67 %	27,83 %
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	140 (Unit)	1.062.444.800	70	1.389.815.747	35	1.428.550.519	7 (Unit)	64.139.017	14 (Unit)	56.012.438	14 (Unit)	120.151.455	14 (Unit)	1.557.389.612	10 %	146,59 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dn Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	130 Unit	985.076.000	78	571.971.939	26	210.239.989	7 (Unit)	56.786.517	3 (Unit)	44.942.058	10 (Unit)	101.728.575	88 (Unit)	688.909.514	67,69 %	67,69%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	168.000.000	21	97.394.644	7	81.126.620	1 (Unit)	7.352.500	2 (Unit)	8.203.380	2 (Unit)	15.555.880	2 (Unit)	113.005.524	5,71 %	68,46%

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program Kegiatan (satuan)	Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sd RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (sd Triwulan 2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 2025 (sd Triwulan 2)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	RP
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	174.980.000	6	720.449.164	2	1.137.183.910	0 (Unit)	0	0 (Unit)	2.867.000	0 (Unit)	2.867.000	0 (Unit)	753.424.574	0 %	430.61 %
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang di Tindak Lanjuti (%)	95 (%)	11.824.258.669	100 (%)	2.813.792.082	100%	2.861.460.318	38.7 (%)	105.771.050	69.23 (%)	245.863.140	69.23 (%)	351.634.190	69.23 (%)	3.344.299.772	72.11 %	28.28 %
5		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 (%)	9.608.484.112	200 (%)	2.370.164.607	100 (%)	2.161.460.398	7.5 (%)	71.634.550	33.33 (%)	212.181.640	33.33 (%)	283.816.190	33.33 (%)	2.795.670.297	33.33 %	29.1 %
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24 (Laporan)	978.158.519	13 (Laporan)	458.954.658	5 (Laporan)	337.020.900	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	13 (Laporan)	461.854.658	54.17 %	47.22 %
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	200 (Laporan)	3.342.082.191	122 (Laporan)	439.694.500	40 (Laporan)	569.989.998	4 (Laporan)	28.932.500	8 (Laporan)	0	12 (Laporan)	28.932.500	134 (Laporan)	478.527.500	67 %	14.32 %
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	285 (Laporan)	2.759.597.801	172 (Laporan)	271.903.927	57 (Laporan)	218.374.000	3 (Laporan)	0	1 (Laporan)	2.586.000	4 (Laporan)	2.586.000	176 (Laporan)	285.076.427	61.75 %	10.33 %
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10 (Laporan)	322.421.774	7 (Laporan)	48.854.500	2 (Laporan)	200.000.000	2 (Laporan)	18.941.000	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	18.941.000	9 (Laporan)	67.795.500	90 %	21.03 %
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100 (Laporan)	1.195.019.467	60 (Laporan)	704.830.580	20 (Laporan)	560.714.500	0 (Laporan)	3.740.000	20 (Laporan)	186.575.140	20 (Laporan)	190.315.140	80 (Laporan)	1.004.063.720	80 %	84.02 %

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program Kegiatan (satuan)	Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (sd Triwulan 2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 2025 (sd Triwulan 2)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	RP.
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksannya Kerja Sama Pengawasan Internal	10 (Kesepakatan)	49.811.311	6 (Kesepakatan)	103,981,840	2 (Kesepakatan)	110.578.000	0 (Kesepakatan)	2.521.550	2 (Kesepakatan)	0	2 (Kesepakatan)	2.521.550	8 (Kesepakatan)	108.192.390	80 %	217.2 %
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 (Laporan)	961.393.046	12 (Laporan)	341.914.602	4 (Laporan)	134.773.000	0 (Laporan)	17.499.500	0 (Laporan)	23.020.500	0 (Laporan)	40.520.000	12 (Laporan)	390.160.102	60 %	40.58 %
9		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Lap Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 (%)	2.215.774,557	100 (%)	443.627.475	100 (%)	699.999.920	100 (%)	34.136.500	100 (%)	33.681.500	100 (%)	67.818.000	100 (%)	548.629.475	100 %	24.76 %
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	30 (Laporan)	481.509.369	8 (Laporan)	58.[illegible]19.500	6 (Laporan)	200.000.000	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	1.373.000	2 (Laporan)	1.373.000	10 (Laporan)	69.315.000	33.33 %	14.4 %
		Pengawasan Dengan Tujuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	60 (Laporan)	1.734.265.188	103 (Laporan)	380.514.975	12 (Laporan)	499.999.920	16 (Laporan)	34.136.500	3 (Laporan)	32.308.500	19 (Laporan)	66.445.000	19 (Laporan)	479.314.475	31.67 %	27.64 %
3	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi Melalui Peningkatan Kapabilitas APIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah (%)	100 (%)	5.163.091.892	100 (%)	4.890.980.936	100 (%)	4.823.484.731	36.84 (%)	216.357.520	68.42 (%)	123.514.000	68.42 (%)	339.871.520	68.42 (%)	5.289.640.474	68.42 %	102.45 %
10		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	100 (%)	202.867.374	100 (%)	31.057.500	100 (%)	10.115.000	25 (%)	0	75 (%)	0	75 (%)	0	75 (%)	31.057.500	75 %	15.31 %

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program Kegiatan (outcome)	Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2025		Realisasa Capaian Kinerja Renstra sd RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (sd Triwulan 2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 2025 (sd Triwulan 2)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.
		dan Fasilitasi Pengawasan	Fasilitasi Pengawasan																
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10 (Rekomendasi)	110.108.638.436	6 (Rekomendasi)	14.716.500	2 (Rekomendasi)	4.920.000	2 (Rekomendasi)	0	0 (Rekomendasi)	0	2 (Rekomendasi)	0	8 (Rekomendasi)	14.716.500	80 %	14,69 %
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	10 (Rekomendasi)	102.718.938	6 (Rekomendasi)	16.341.000	2 (Rekomendasi)	5.195.000	0 (Rekomendasi)	0	1 (Rekomendasi)	0	1 (Rekomendasi)	0	7 (Rekomendasi)	16.341.000	70 %	15,91 %
11		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan	100 (%)	4.960.204.518	100 (%)	4.859.923.136	100 (%)	4.813.369.731	40 (%)	216.057.520	66,67 (%)	123.814.000	66,67 (%)	339.871.520	66,67 (%)	5.258.552.974	66,67 %	106,02 %
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 (Perangkat Daerah)	1.803.781.684	42 (Perangkat Daerah)	2.373.847.035	42 (Perangkat Daerah)	2.284.033.932	42 (Perangkat Daerah)	205.837.520	42 (Perangkat Daerah)	21.720.000	42 (Perangkat Daerah)	227.557.520	42 (Perangkat Daerah)	2.807.724.555	100 %	118,60 %
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 (Perangkat Daerah)	425.286.090	42 (Perangkat Daerah)	883.598.898	42 (Perangkat Daerah)	938.739.499	42 (Perangkat Daerah)	10.539.000	42 (Perangkat Daerah)	38.364.000	42 (Perangkat Daerah)	48.884.000	42 (Perangkat Daerah)	852.482.898	100 %	207,5 %
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	20 (Kegiatan)	137.191.530	12 (Kegiatan)	509.777.935	4 (Kegiatan)	992.920.300	1 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	1 (Kegiatan)	0	13 (Kegiatan)	562.195.953	65 %	109,79 %

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program Kegiatan (sasaran)	Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (sd Triwulan 2)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 2025 (sd Triwulan 2)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	%	RP
			Korupsi																
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 (Perangkat Daerah)	2.593.945.214	49 (Perangkat Daerah)	942.699.568	42 (Perangkat Daerah)	597.676.000	42 (Perangkat Daerah)	0	42 (Perangkat Daerah)	63.430.000	42 (Perangkat Daerah)	63.430.000	42 (Perangkat Daerah)	1.006.129.568	100 %	38,79 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah pada indikator pertama, yaitu: level maturitas SPIP, realisasi sampai dengan triwulan II masih 0 (nol). Hal ini dikarenakan masih dalam proses penilaian, yang mana akan dihitung pada triwulan ke IV seiring dengan pelaksanaan kegiatannya. Sedangkan pada indikator kinerja kedua, yaitu: Presentase SAKIP OPD minimal BB, realisasi sampai dengan triwulan II juga masih 0 (nol). Hal ini dikarenakan masih dalam proses penilaian.

Dari pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan diatas, tentunya juga atas dukungan dari pencapaian program-program yang dilaksanakan pada urusan tersebut. Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, capaian realisasinya sampai triwulan II masih 0 (nol) poin jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yakni 84,05 poin. Hal ini dikarenakan masih dalam proses penilaian. Sedangkan pada program penyelenggaraan pengawasan, realisasi sampai dengan triwulan II yaitu 69.23%. Hal ini dikarenakan terbentur dengan penugasan khusus Kepala Daerah. Hal ini tentunya juga akan lebih ditingkatkan lagi pencapaiannya mengingat waktu pelaksanaan kegiatan masih dua triwulan kedepan. Adapun program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, realisasi capaian sampai dengan triwulan II, yaitu 68,42%. Hal ini dikarenakan tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal tidak dapat dilaksanakan. Persentase ini masih terus berproses hingga akhir tahun seiring dengan dua triwulan yang masih berlangsung.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam mencapai target kinerja yang di tetapkan adalah :

- optimalisasi terhadap sumber daya yang ada khususnya Sumber Daya Manusia, serta waktu dalam pelaksanaan kegiatan;
- meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan yang targetnya belum terpenuhi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026, serta untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka dapat diketahui dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2025.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2023 (n – 2)	Tahun 2024 (n – 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n) Smt 1	Tahun 2025 (n)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Evaluasi Internal dalam SAKIP Daerah	17	18	20	20,5	19,5	0	20	Belum Tercapai
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	0	3	Belum Tercapai
		Presentase SAKIP OPD minimal BB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0%	100 %	Belum Tercapai

Capaian kinerja indikator sasaran pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah" untuk masing-masing target dan realisasinya sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Indikator Sasaran "Level Maturitas SPIP", target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 sesuai dokumen Berita Acara Perubahan Target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026, sebesar 3 (Tiga), Akan tetapi penilaiannya masih dalam proses pelaksanakan sehingga capaian realisasinya masih 0 (nol)
b. Indikator Sasaran "Presentase SAKIP OPD minimal BB (Sangat Baik)", target kinerja yang ditetapkan dalam Tahun 2025 sesuai

dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 sebesar 100% (seratus persen), Akan tetapi penilaiannya masih dalam proses pelaksanakan sehingga capaian realisasinya masih 0 (nol).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2023 (n – 2)	Tahun 2024 (n – 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n) Smt 1	Tahun 2025 (n)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.
Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel		Nilai Komponen Evaluasi Internal dalam SAKIP Daerah	17	18	20	20,5	19,5	0	20	Belum Tercapai
Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	-	-	3,32	3,38	3,26	0	3,32	Belum Tercapai
		Presentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A	-	-	66,67%	73,8%	61,9%	0	66,67%	Belum Tercapai

Capaian kinerja indikator sasaran pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" untuk masing-masing target dan realisasinya sebagaimana tabel di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Indikator Sasaran "Nilai Maturitas SPIP", target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 sesuai reviu dokumen Berita Acara Perubahan Target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, dengan nilai 3,32 , sesuai BA perubahan target dan capaian realisasinya masih dalam Proses.
b. Indikator Sasaran "Presentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A", target kinerja yang ditetapkan dalam Tahun 2025 sesuai dengan reviu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 sebesar 66,67% dan capaian realisasinya masih dalam Proses.

Kegiatan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 diikuti sebanyak 42 OPD.Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Tuban melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan terdiri dari:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
        a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
        b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
        c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
        b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya
    4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
        a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor
        b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
        e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD
    5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        a. Penyediaan Jasa Surat menyurat.
        b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik
        c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
        a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
        b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   d. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
   1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
      a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
      b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
      c. Reviu Laporan Kinerja
      d. Reviu Laporan Keuangan
      e. Pengawasan Desa
      f. Kerjasama Pengawasan Internal
      g. Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP

   2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
      a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Dacrah
      b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
   1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
      a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
      b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
   2. Pendampingan dan Asistensi
      a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
      b. Pendampingan, Asistensi,verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
      c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
      d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep efisiensi anggaran atau *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan *(Input)*, untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran *(Output)*, merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil *(Outcome)*, merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tuban, Inspektorat Kabupaten Tuban telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi, dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut, Inspektorat mendukung pencapaian misi ke-4 dengan Tujuan "*Mewujudkan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik*" dengan sasaran nomor 1 yaitu "*Birokrasi yang bersih dan akuntabel*".

Kinerja Inspektorat Daerah secara kelembagaan dapat dinilai dari tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kapabilitas APIP merupakan penilaian kemampuan APIP berdasarkan kriteria *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang mengelompokkan kapabilitas APIP ke dalam lima Level, yaitu Level 1 *(Initial)*, Level 2 *(Infrastructure)*, Level 3 *(Integrated)*, Level 4 *(Managed)*, dan Level 5

(Optimizing). Untuk itu Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan upaya-upaya meningkatkan kapabilitas dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban mencapai Level 3, dan telah sesuai dengan target pada Tahun 2024.

Untuk mencapai misi ke-4 dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026, fungsi pengawasan Aparatur Pengawas dilakukan secara profesional, dinamis dan bertanggung jawab sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku melalui pembinaan dan pengawasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, menuju tata pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk merealisasikan misi tersebut, disadari adanya beberapa permasalahan yang dihadapi baik permasalahan dari dalam/internal berupa kekuatan/*strenghts* dan kelemahan/*weakness* maupun dari luar/*eksternal* berupa peluang/*opportunities* dan hambatan/*threats*.

Dari hasil analisis atas lingkungan strategis Inspektorat Kabupaten Tuban, baik aspek internal dan eksternal, maka prediksi 5 (lima) tahun ke depan dapat diketahui sebagai berikut :

1. Pengaruh Lingkungan Internal
   a. Kekuatan/*Strengths*
      - Adanya Struktur Organisasi yang jelas;
      - Tersedianya anggaran yang cukup;
      - Adanya Aturan terkait kode etik APIP;
      - Adanya PKPT yang jelas.
   b. Kelemahan/*Weakness*
      - Jumlah Aparat Pengawas belum memadai;
      - Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai;
      - Kompetensi aparatur pengawas kurang memadai.
2. Pengaruh Lingkungan Eksternal
   a. Peluang/*Opportunities*
      - Besarnya jumlah obrik yang harus diperiksa;

- Dukungan pimpinan/Bupati terhadap pelaksanaan pengawasan;
- Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari KKN;

b. Ancaman/*Threats*
- Rendahnya kesadaran obrik menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- Terbatasnya penyelenggaraan bimtek dan diklat terkait dengan pengawasan;
- Aturan Perundang-undangan sering berubah.

Pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah sebagai salah satu fungsi manajemen organisasi pemerintahan memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)*. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah akan berdampak langsung pada kinerja reformasi birokrasi dan upaya pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, kinerja Inspektorat Daerah berdampak pada pencapaian misi "*Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif*".

Terkait dengan pencapaian sasaran Rencana Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024, kinerja Inspektorat Daerah berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, yang salah satu sasarannya adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta agenda pembangunan dalam memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, melalui peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan.

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah mewujudkan "*Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik,*

profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif", pencapaian sasaran "*Birokrasi yang bersih dan Akuntabel*", maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal, perumusan isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL

1. Sosialisasi Pencegahan Korupsi
2. Pembinaan Terhadap Penegakan Integritas
3. Pembinaan terhadap kepatuhan LHKASN

ISU STRATEGIS LEVEL DAERAH/REGIONAL

1. Pendampingan terhadap Implementasi SIPD

   Pendampingan terhadap implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah proses pembimbingan, pelatihan, dan dukungan teknis yang diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) dalam rangka memastikan keberhasilan penerapan dan penggunaan SIPD di seluruh aspek pemerintahan daerah. SIPD sendiri merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola informasi terkait dengan administrasi keuangan, perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaporan keuangan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa SIPD diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah.
2. Audit Forensik

   Audit forensik adalah proses pemeriksaan atas catatan keuangan perangkat daerah untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran/penyalahgunaan kuasa. Proses ini penting dilakukan untuk menemukan bukti yang bisa digunakan dalam proses hukum serta menjaga reputasi baik perangkat daerah. Audit forensik pada inspektorat adalah jenis audit yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menganalisis adanya tindakan yang mencurigakan atau tidak sah, seperti penyelewengan, korupsi, atau fraud dalam suatu instansi

pemerintah atau organisasi. Audit ini memiliki fokus utama pada pengumpulan bukti dan informasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi serta membuktikan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan negara atau lembaga.

3. Pengawasan terhadap perencanaan penganggaran berbasis Gender
   Penganggaran responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki kemampuan beda (diffable) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Pengawasan terhadap perencanaan penganggaran berbasis Gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
4. Pengawasan Mandatori/Non PKPT
   Pengawasan mandatori adalah pengawasan yang diberikan langsung oleh kepala daerah yang tidak masuk ke dalam program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT). Pengawasan mandatori pada inspektorat merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dalam suatu organisasi pemerintah atau instansi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan operasional di dalam instansi tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan, regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, serta untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Adapun evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, sebagaimana tabel 2.4. berikut

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin)	84,15		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin)	84,15		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9	145.887.600	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9	145.887.600	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	84.099.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	84.099.000	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi,dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4	30.990.000	Koordinasi,dan Penyusunan Laporan Capaian		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4	30.990.000	

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	30.798.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	30.798.600	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	7	10.256.882.072	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	7	10.256.882.072	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	10.108.467.072	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	10.108.467.072	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	148.415.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	148.415.000	

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	53	1.680.162.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	53	1.680.162.600	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1	976.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1	976.000	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsinya	80	1.679.186.600	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsinya	80	1.679.186.600	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5	481.365.694	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5	481.365.694	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	20.710.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	20.710.800	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	147.476.064	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	147.476.064	

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	39.227.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	39.227.600	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	134.201.830	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	134.201.830	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	12.289.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	12.289.400	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	127.460.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	127.460.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	26	3.453.831.964	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	26	3.453.831.964	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	62	558.802.500	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	62	558.802.500	

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	117	900.615.464	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	117	900.615.464	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23	1.994.414.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23	1.994.414.000	
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	510.379.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	510.379.400	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	6.673.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	6.673.000	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	3	197.537.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	3	197.537.400	

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan					Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan			
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1.261.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1.261.000	7
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	304.908.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	304.908.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	35	1.217.820.880	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	35	1.217.820.880	14
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan da Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26	233.358.211	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan da Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26	233.358.211	3

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	72.983.782	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	72.983.782	
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	911.478.887	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	911.478.887	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang di Tindak Lanjuti (%)	100	2.026.903.392	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang di Tindak Lanjuti (%)	100	2.026.903.392	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	1.604.567.492	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	1.604.567.492	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	302.913.062	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	302.913.062	

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	370.005.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	370.005.000	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	57	181.341.830	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	57	181.341.830	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	79.282.000	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	79.282.000	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20	458.630.000	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20	458.630.000	

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	67.904.600	Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	67.904.600	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	144.491.000	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	144.491.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Prosentase Lap Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	422.335.900	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Prosentase Lap Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	422.335.900	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6	89.269.700	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6	89.269.700	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	333.066.200	Pengawasan Dengan Tujuan		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	333.066.200	

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah (%)	100	2.567.462.150	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah [%]	100	2.567.462.150	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	5.195.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	5.195.000	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	2.460.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	2.460.000	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	2.735.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	2.735.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan	100	2.562.267.150	Pendampingan dan Asistensi		Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan	100	2.562.267.150	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42	1.245.268.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42	1.245.268.000	

No	Rancangan Awal RKPD P					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan,Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42	472.355.570	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42	472.355.570	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	494.430.780	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	494.430.780	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42	350.212.800	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42	350.212.800	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Tuban tidak didapati program/kegiatan mengarah kepada program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat pada program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah nihil.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Tuban

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N I H I L			

B A B III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Tuban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Program kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban yaitu "Program Penyelenggaraan Pengawasan".

Dalam Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam Rancangan Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perubahan RKPD 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE					Sasaran	Perubahan RKPD pada APBD					Perkiraan Maju tahun 2025		
						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	9
6	01					URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN							
6	01	01			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	84,15		DAU	Kab. Tuban	84,15	
6	01	01	2.01		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dok.	145.887.600	DAU	Kab. Tuban	9 Dok.	145.887.600
6	01	01	2.01	01	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok.	84.099.000	DAU	Kab. Tuban	3 Dok.	84.099.000
6	01	01	2.01	06	Terlaksananya Koordinasi, dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap.	30.990.000	DAU	Kab. Tuban	4 Lap.	30.990.000
6	01	01	2.01	07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap.	30.798.600	DAU	Kab. Tuban	2 Lap.	30.798.600
6	01	01	2.02		Terlaksananya Administrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	7 Lap	10.256.882.072		Kab. Tuban	7 Lap	10.256.882.072

KODE					Sasaran	Perubahan RKPD pada APBD					Perkiraan Maju tahun 2025		
						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	9
					Keuangan Perangkat Daerah		dan Pemeriksaan yang tersusun						
6	01	01	2.02	01	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	10.108.467.072	DAU	Kab. Tuban	48 Orang	10.108.467.072
6	01	01	2.02	02	Terlaksananya Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok.	148.415.000	DAU	Kab. Tuban	12 Dok.	148.415.000
6	01	01	2.05		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	53	1.680.162.600		Kab. Tuban	53	1.680.162.600
6	01	01	2.05	02	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1	976.000		Kab. Tuban	1	976.000
6	01	01	2.05	09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	1.679.186.600	DAU	Kab. Tuban	80	1.679.186.600
6	01	01	2.06		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	481.365.694		Kab. Tuban	5 Layanan	481.365.694

KODE					Sasaran	Perubahan RKPD pada APBD					Perkiraan Maju tahun 2025		
						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	9
6	01	01	2.06	01	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.710.800	DAU	Kab. Tuban	3 Paket	20.710.800
6	01	01	2.06	02	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	147.476.064	DAU		15 Paket	147.476.064
6	01	01	2.06	05	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	39.227.600	DAU		7 Paket	39.227.600
6	01	01	2.06	04	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	134.201.830			3	134.201.830
6	01	01	2.06	06	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	12.289.400	DAU		240 Dokumen	12.289.400
6	01	01	2.06	09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	127.460.000	DAU		80 Laporan	127.460.000
6	01	01	2.07		Terlaksananya Pengadaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pengadaan	26 (Unit)	3.453.831.964			26 (Unit)	3.453.831.964

KODE					Sasaran	Perubahan RKPD pada APBD					Perkiraan Maju tahun 2025		
						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	9
					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan						
					Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23 Unit	1.994.414.000			23 Unit	1.994.414.000
6	01	01	2.07	06	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	117	900.615.464	DAU	Kab. Tuban	117	900.615.464
6	01	01	2.07	05	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62	558.802.500	DAU	Kab. Tuban	62	558.802.500
6	01	01	2.07	09	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		Kab. Tuban	0	0
6	01	01	2.08		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Jasa	510.379.400			7 Jasa	510.379.400
6	01	01	2.08	01	Terlaksananya Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Lap	6.673.000	DAU	Kab. Tuban	1 Lap	6.673.000

KODE					Sasaran	Perubahan RKPD pada APBD					Perkiraan Maju tahun 2025		
						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	9
					Surat Menyurat		Surat Menyurat						
6	01	01	2.08	02	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	197.537.400	DAU	Kab. Tuban	3 Lap	197.537.400
6	01	01	2.08	03	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Lap	1.261.000	DAU	Kab. Tuban	3 Lap	1.261.000
6	01	01	2.09		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	35	1.217.820.880		Kab. Tuban	35	1.217.820.880
6	01	01	2.09	02	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	233.358.211	DAU	Kab. Tuban	26 Unit	233.358.211
6	01	01	2.09	06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	7 Unit	72.983.782	DAU	Kab. Tuban	7 Unit	72.983.782

KODE					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan RKPD pada APBD				Perkiraan Maju tahun 2025		
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pegu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	9
					Mesin Lainnya		Dipelihara						
6	01	01	2.09	10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	911.478.887	DAU	Kab. Tuban	2 Unit	911.478.887
6	01	02			Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang di tindaklanjuti	100%	2.026.903.392		Kab. Tuban	100%	2.026.903.392
6	01	02	2.01		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	1.604.567.492		Kab. Tuban	100%	1.604.567.492
6	01	02	2.01	01	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4Lap	302.913.062	DAU	Kab. Tuban	4Lap	302.913.062
6	01	02	2.01	02	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 lap.	370.005.000	DAU	Kab. Tuban	40 lap.	370.005.000
6	01	02	2.01	03	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	57 Lap	181.341.830	DAU	Kab. Tuban	57 Lap	181.341.830
6	01	02	2.01	04	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	2 Lap	79.282.000	DAU	Kab. Tuban	2 Lap	79.282.000

KODE					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan RKPD pada APBD				Perkiraan Maju tahun 2025		
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	9
							Keuangan						
6	01	02	2.01	05	Terlaksananya Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 lap	458.630.000	DAU	Kab. Tuban	20 lap	458.630.000
6	01	02	2.01	06	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	67.904.600	DAU	Kab. Tuban	2 Kesepakatan	67.904.600
6	01	02	2.01	07	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dok.	144.491.000	DAU	Kab. Tuban	4 Dok.	144.491.000
6	01	02	2.02		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	422.335.900		Kab. Tuban	100%	422.335.900
6	01	02	2.02	01	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	6 lap.	89.269.700	DAU	Kab. Tuban	6 lap.	89.269.700
6	01	02	2.02	02	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Lap.	333.066.200	DAU	Kab. Tuban	12 Lap.	333.066.200
6	01	03			Terlaksananya	PROGRAM PERUMUSAN	Persentase	100%	2.567.462.150		Kab.	100%	2.567.462.150

KODE					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan RKPD pada APBD				Perkiraan Maju tahun 2025		
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	9
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah				Tuban		
6	01	03	2.01		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	5.195.000		Kab. Tuban	100%	5.195.000
6	01	03	2.01	01	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	2.460.000	DAU	Kab. Tuban	2	2.460.000
6	01	03	2.01	02	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	2.735.000	DAU	Kab. Tuban	2	2.735.000
6	01	03	2.02		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan	100%	2.562.267.150		Kab. Tuban	100%	2.562.267.150
6	01	03	2.02	01	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	42	1.245.268.000	DAU	Kab. Tuban	42	1.245.268.000

KODE					Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan RKPD pada APBD				Perkiraan Maju tahun 2025		
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	9
					Urusan Pemerintahan Daerah		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						
6	01	03	2.02	02	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42	472.355.570	DAU	Kab. Tuban	42	472.355.570
6	01	03	2.02	03	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Keg	494.430.780	DAU	Kab. Tuban	4 Keg	494.430.780
6	01	03	2.02	04	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42	350.212.800	DAU	Kab. Tuban	42	350.212.800

B A B IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2025. Karena Perubahan Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Perubahan Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Tuban tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tuban, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami agar dokumen Perubahan Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja ke depan.

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN,

ttd.

AGUK WALUYO RAHARJO

BUPATI TUBAN,

ADNYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025;

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan;
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan; dan
d. bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 ini berupa perencanaan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021-2026, sebagai periodesasi lanjutan pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban selama 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang ditetapkan berkala setiap tahun melalui Peraturan Bupati, dan berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 ini berupa perencanaan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021-2026, sebagai periodesasi lanjutan pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban selama 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang ditetapkan berkala setiap tahun melalui Peraturan Bupati, dan berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih spesifik lagi. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD akan diuraikan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan, kemudian Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perubahan yang berisi Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Ketatalaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri E Nomor 67);

24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini adalah:

a) Memberikan arahan kegiatan instansi pemerintah pada tahun 2025;
b) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
c) Dengan perencanaan kerja yang jelas dan sistematis, maka satuan kerja akan bergerak secara konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif serta memiliki arah dan fokus yang jelas yang akan mempermudah pencapaian tujuan satuan kerja;
d) Menjadi alat ukur yang pasti atas kinerja penyelenggaraan fungsi satuan kerja perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah;
e) Menjadi acuan penyusunan laporan dan evaluasi Perangkat Daerah;
f) Sebagai alat pacu peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah karena mempermudah pembinaan dan pendayagunaan aparatur; dan
g) Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban

1.4. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan dari Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV PENUTUP.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2025 ini telah memasuki Tahun keempat pada perencanaan pembangunan Kabupaten Tuban, adapun evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra berjalan adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tuban
Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
A	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis		Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	75	43.971.587.616	100	2.779.416.912	100	10.016.047.936	133.33	1.015.399.800	100	990.155.887	0	0	0	0	100	2.005.555.687	100	105.941.557.695	108 %	240.93 %	Kepala Bakesbangpol
1		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	4.120.388.317	100.37	601.813.377	100	1.483.197.578	0	195.833.500	0	76.032.500	0	0	0	0	0	271.866.000	0	3.028.334.980	0 %	73.5 %	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
		1.Kegiatan	Jumlah	3	4.120.38	3	601.813.	3	1.483.19	0	195.83	1	76.032.5	0	0	0	0	1	271.86	4	3.028.3	26	90.37	JF

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	dokumen perumusann kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi wawasan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan		8.317		377		7.578		3.500		00						6.000		34.980	.67%	%	Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan, bela negara, karkater	3	840.558.399	3	584.965.637	1	899.708.577	0	31.811.000	0	30.230.000	0	0	0	0	0	62.041.000	3	954.318.235	300%	132.06%	JF Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan																					
		2.Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan, bela negara, karkater bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	6790	3.973.537.139	3764	584.965.637	1	153.617.456	1	89.000.000	0	24.600.000	0	0	0	0	0	113.600.000	0	113.600.000	0 %	0%	JF Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan	5	146.851.178	1	16.847.740	1398	429.871.545	0	34.831.500	1070	21.202.500	0	0	0	0	1070	56.034.000	1070	56.034.000	0 %	0%	JF Kesatuan Bangsa dan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka																					Politik
2		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	100	1.902.273.930	100	121.558.234	0	85.688.176	100	0	100	7.600.500	0	0	0	0	100	7.600.500	100	508.415.808	100 %	26.73 %	Bidang Poldagri dan Ormas
		1.Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan	3	1.902.273.930	3	121.558.234	3	85.688.176	0	0	1	7.600.500	0	0	0	0	1	7.600.500	4	508.415.808	133.33 %	26.73 %	Bidang Poldagri dan Ormas

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Organisasi Kemasyarakatan	pengawasan organisasi kemasyarakatan																					
		1.Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	280	1.902.273.930	205	121.558.234	100	85.688.176	0	0	0	7.600.500	0	0	0	0	0	7.600.500	0	7.600.500	0 %	0 %	Bidang Poldagri dan Ormas
03		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100	2.410.927.786	100	301.512.886	100	180.998.924	100	17.445.000	100	33.315.000	0	0	0	0	100	50.760.000	100	1.167.645.522	100 %	48.43 %	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																						
		1.Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4	2.410.927.786	4	301.512.886	4	180.998.924	1	16.215.000	1	33.315.000	0	0	0	0	1	49.530.000	1	1.166.415.522	25 %	48.38 %	JF Bidang Kesatuan Bangsa
		1.Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen,	1000	2.410.927.786	400	301.512.886	0	180.998.924	0	16.215.000	0	33.315.000	0	0	0	0	0	49.530.000	200	1.124.924.022	5 %	46.66 %	Bidang Kesatuan Bangsa

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Asing dan Lembaga Asing	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing																					
4		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik	100	9.498.688.040	100	1.746.322.415	65	3.556.824.124	0	5.400.000		13.200.500	0	0	0	0	0	18.600.500	0	95.468.100.912	0 %	1005.07 %	Kepala Bidang Poldagri dan Ormas
		1.Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang politik	3	9.496.688.040	3	1.746.322.415	3	3.556.824.124	0	5.400.000	0	13.200.500	0	0	0	0	0	18.600.500	0	18.600.500	0 %	0%	Bidang Poldagri dan Ormas

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																						
		1.Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	5	75.293.294	1	13.446.900	1	37.477.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	948.962.600	20 %	1260.35 %	Bidang Poldagri dan Ormas

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																					
		2.Pelaksanaan Koordiniasi Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah orang yang mengikuti Koordiniasi Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	666724	8.534.136.543	666924	1.704.135.015	0	3.458.521.180	0	5.400.000	0	9.276.000	0	0	0	0	0	14.676.000	0	14.676.000	0 %	0 %	Bidang Poldagri dan Ormas

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																					
		3.Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Politik, Etika	6	889.258.203	6	28.740.500	6	60.825.224	1	0	1	3.924.500	0	0	0	0	1	3.924.500	1	3.924.500	0 %	0 %	Bidang Poldagri dan Ormas

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																					
5		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82	19.585.199.177	83.87	2.889.218.243	0	4.709.339.134	0	796.411.300	0	860.007.387	0	0	0	0	0	1.656.418.687	0	12.135.603.500	0 %	61.96 %	Sekretaris Badan
		1.Kegiatan	Jumlah	7	637.411.	7	108.380.	9	144.710.	4	4.813.5	3	4.684.00	0	0	0	0	7	9.497.5	7	500.99	10	78.6 %	JF

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun		337		431		845		00		0						00		3.972	0 %		Perencana pada Sekretariat
		1.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	445.579.575	2	64.854.782	2	123.247.420	0	2.444.000	2	3.005.000	0	0	0	0	2	5.449.000	6	373.575.073	300 %	83.84 %	JF Perencana pada Sekretariat
		2.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	3	12.665.440	3	9.801.500	0	1.805.925	1	1.153.000	0	0	0	0	0	0	0	1.153.000	0	1.153.000	0 %	0 %	JF Perencana pada Sekretariat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD																					
		3.Sub Kegiatan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	179.166.322	4	33.724.149	4	19.657.500	1	1.216.500	1	1.043.500	0	0	0	0	2	2.260.000	6	112.296.649	150 %	62.68 %	JF Perencana pada Sekretariat
		1.Kegiatan Administrasi Keuagan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan keuangan yang tersusun	8	160.828.493.579	8	2.370.725.617	8	3.926.852.579	7	694.095.522	3	776.142.577	0	0	0	0	10	1.470.238.099	10	1.470.238.099	0 %	0%	JF Keuangan pada Sekretariat
		1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	15.609.890.237	27	2.341.977.117	21	3.837.318.579	19	684.986.522	19	763.780.577	0	0	0	0	19	1.448.767.099	19	9.240.845.547	54.29 %	59.2 %	JF Keuangan pada Sekretariat
		2.Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil	9	422.297.360	9	28.748.500	9	84.194.000	1	8.877.000	3	11.912.500	0	0	0	0	4	20.789.500	15	203.983.500	166.67	48.3 %	JF Keuangan pada

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			%		Sekretariat
		3.Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	2	12.665.440	2	0	9	1.335.000	1	0	3	449.500	0	0	0	0	4	449.500	13	2.796.500	144.44 %	22.08 %	JF Keuangan pada Sekretariat
		4.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	3	12.665.440	3	0	2	1.335.000	2	232.000	0	0	0	0	0	0	2	232.000	4	3.110.000	200 %	24.56 %	JF Keuangan pada Sekretariat
		5.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Tri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran OPD dan	3	12.665.440	3	0	4	1.335.000	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0 %	0 %	JF Keuangan pada Sekretariat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		wulan/Semesteran OPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran OPD																					
		6.Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	12.665.440	1	0	2	1.335.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2.279.000	300 %	17.99 %	JF Keuangan pada Sekretariat
		3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	35	15.636.954	0	0	11	193.446.687	0	29.393.500	11	18.318.450	0	0	0	0	11	47.711.950	11	848.245.480	100 %	64.42 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		1.Sub	Jumlah	35	15.636.9	0	0	5	14.438.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubb

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		54				15															ag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum	11	1.316.829.016	11	177.813.556	11	193.446.687	0	29.393.500	11	18.318.450	0	0	0	0	11	47.711.950	11	848.245.480	100 %	64.42 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		1.Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	72.249.000	5	2.550.000	5	14.438.615	0	246.500	5	0	0	0	0	0	5	246.500	10	21.305.731	200 %	29.49 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		2.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatn dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	136.248.827	5	15.578.100	5	34.952.450	1	165.000	5	1.545.950	0	0	0	0	5	1.710.950	10	78.550.075	200 %	57.65 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		3.Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	389.797.755	27	39.368.371	35	66.656.613	5	3.881.000	10	9.210.000	0	0	0	0	10	13.091.000	45	171.503.313	128.57 %	44 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		4.Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	139.963.500	5	10.043.560	5	22.766.050	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	60.046.410	0 %	42.9 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		5.Sub	Jumlah	5	20.020.4	5	2.805.00	5	3.428.40	5	565.00	1	270.000	0	0	0	0	1	835.00	1	835.00	0	0 %	Kasubb

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan		34		0		0		0								0		0	%		ag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		6.Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	60	558.549.500	40	107.468.525	50	51.204.559	5	24.536.000	50	1.353.500	0	0	0	0	50	25.889.500	359	501.960.951	598.33 %	89.87 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		5.Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan BMD	4	113.523.478	4	19.730.929	4	211.544.001	1	46.188.678	1	38.131.950	0	0	0	0	1	84.320.628	1	84.320.628	0 %	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		1.Sub Kegiatan	Jumlah Unit Aset Tetap	4	113.523.478	4	19.730.929	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Lainnya yang																					Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang	4	704.818.405	4	110.705.860	4	211.544.001	1	46.188.678	1	38.131.950	0	0	0	0	1	84.320.628	1	84.320.628	0 %	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		1.Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	27.465.750	6	0	6	1.032.470	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	26	1.060.000	433.33 %	3.86 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		2.Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan	6	251.088.400	6	41.761.860	6	68.888.750	1	7.926.010	1	19.352.910	0	0	0	0	1	27.278.920	14	36.480.550	233.33	48.1 %	Kasubbag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		jasa komunikasi, submer daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																			%		dan Kepegawaian pada Sekretariat
		3.Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	75.850.897	6	6.665.000	6	14.183.221	1	3.275.000	1	3.000.000	0	0	0	0	1	6.275.000	14	36.480.550	23 3.33 %	48.1 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		4.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	350.414.250	6	62.279.000	6	127.439.560	1	34.987.668	1	15.639.000	0	0	0	0	1	50.626.668	16	245.550.716	26 6.67 %	70.07 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		7.Kegiatan Pemeliharaan Barang	Jumlah pemeliharaan BMD	12	714.130.630	12	101.861.850	12	232.785.022	1	11.195.100	12	19.276.410	0	0	0	0	12	30.471.510	12	30.471.510	0 %	0 %	Kasubbag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						dan Kepegawaian pada Sekretariat
		1.Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	395.956.466	12	53.955.850	12	173.540.672	1	8.494.100	2	16.621.410	0	0	0	0	2	25.115.510	2	25.115.510	0 %	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		2.Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5	25.055.648	5	4.350.000	5	4.960.000	0	0	5	420.000	0	0	0	0	5	420.000	10	16.775.000	200 %	66.95 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Tribulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	
																								Sekretariat
		3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	85.309.847	5	5.772.000	5	10.783.600	5	1.095.000	5	2.075.000	0	0	0	0	5	3.170.000	10	47.824.500	200 %	56.06 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		4.Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara / rehabilitasi	5	207.808.669	5	37.784.000	5	43.500.750	5	1.359.000	5	0	0	0	0	0	5	1.359.000	5	1.359.000	0 %	0%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Berdasarkan hasil realisasi capaian pada tabel diatas, bahwa pada indikator Persentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan tidak memenuhi target karena disebabkan kesalahan dalam perumusan formulasi. Sedangkan pada indikator Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, dan budya politik pada tahun 2023 telah melebihi target dan pada tahun 2024 kurang dari target, hal tersebut juga dikarenakan kesalahan dalam formulasi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program tersebut tidak mempengaruhi anggaran, hanya saja target tidak terpenuhi dengan baik.

Kebijakan/Tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengubah formulasi perhitungan pada program, agar kelak nantinya target program bisa tercapai dengan baik.

Secara umum untuk permasalahan/kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan antara lain:

1. Kurangnya monitoring dan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat di daerah karena keterbatasan anggaran;
2. Bakesbangpol bukan *stakeholder* utama dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di daerah;
3. Adanya potensi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban umum di tengah kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat yang semakin terbuka, dinamis dan juga meningkatnya ketidakpastian;
4. Masih banyak organisasi masyarakat yang belum melaporkan identitas/keberadaannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2022 tentang tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, kedudukan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
   b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di pemerintahan;
   c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemerintahan;
   d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di pemerintahan umum;
   e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;

f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mencermati rumusan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mempunyai tanggung jawab pokok mengemban misi yang keempat, yaitu:
Misi 4, "Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Profesional, Transparan, Akuntabel dan Sistem Pengawasan yang Efektif".

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi bidang tugasnya. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana organisasi berjalan sesuai pada relnya.

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan, serta hasil laporan kinerja sampai dengan tribulan II tahun 2025. Adapun evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagaimana tertera pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan II	Proyeksi Tingkat Capaian 2025	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Persentase Potensi Konflik Sosial dan Politik yang terselesaikan	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan II	Proyeksi Tingkat Capaian 2025	Target Akhir Renstra
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Sasaran Program : 1. Meningkatnya Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Presentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	0	100	100
2. Meningkatnya pemberdayaan Ormas	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	100	0	100	100
3. Meningkatnya kualitas mediasi dalam pencegahan potensi konflik sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
4. Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, dan budya politik	65	0	100	65

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai pada triwulan II adalah sebagaimana berikut :

1. Kinerja pelayanan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan :
   - Pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa di kecamatan Kerek tanggal 19 Februari – 20 Maret 2025;
   - Pelaksanaan kegiatan pemilihan peserta Paskibraka seleksi zona pada tanggal 24 – 27 Februari 2025;
   - Pelaksanaan kegiatan Paskibraka pada tanggal 17 Agustus 2025;
   - Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama sedang dalam proses kepada Bupati Tuban.
2. Kinerja pelayanan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi Masyarakat :
   - Monitoring/updating data status organisasi Masyarakat yang aktif atau sudah tidak aktif.
3. Kinerja pelayanan bidang kewapadaan nasional dan konflik sosial :
   - Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sedang dalam proses kepada Bupati Tuban;
   - Aksi Unjuk Rasa Kelompok Tani Mlangi Bersatu di Gedung Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kecamatan Widang, Kantor Badan Pertanahan Negara, Polres dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban tentang Upah Atas Penggarap Tanah Negara;
   - Pengamanan Pasca Kerusuhan Suporter Sepakbola LA Mania (Supporter Pendukung Persela Lamongan) di Stadion Tuban Sport Center;
   - Aksi Unjuk Rasa oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Tuban di Depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban dan Kantor DPRD Kabupaten Tuban tentang Indonesia Gelap dan Catatan Hitam Pemerintah Kabupaten Tuban;
   - Aksi Unjuk Rasa oleh Pimpinan Unit Kerja Warga Ring 1 di PT United Tractors Semen Gresik Desa Sumberarum Kecamatan Kerek terkait Hasil Lelang Barang Afal (barang sisa atau limbah);
   - Koordinasi terkait Laporan dari Aplikasi SP4N Lapor tentang Aduan Kristenisasi di Dusun Krajan Desa Montongsekar Kecamatan Montong;
   - Aksi Unjuk Rasa oleh Cipayung Plus Tuban (Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Dewan Perwakilan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ronggolawe dan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama di Kantor DPRD Kabupaten Tuban tentang Rencana Undang-undang Tanah Negara;
   - Koordinasi terkait Penolakan Pembangunan Pondok Pesantren oleh Kepala Desa Bringin Montong dan Persaudaraan Setia Hati Terate setempat di Desa Bringin, Kecamatan Montong;

- Pembinaan Siswa Tingkat Putih Calon Warga Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Tuban di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Tuban Kabupaten Tuban;
- Pengerusakan Lampion di Depan Kantor Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban oleh Oknum Komunitas Terjal (Terate Jalanan, yang merupakan sebuah komunitas atau wadah yang didirikan oleh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate);
- Aksi Unjuk Rasa oleh Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Warga Ring 1 di PT UTSG di PT United Tractors Semen Gresik Desa Sumberarum Kecamatan Kerek terkait Hak Driver Jasa Pengoperasian Alat (JPA);
- Monitoring dan Pengamanan Mediasi terkait Penolakan Warga Desa Paseyan terhadap Pengajian yang dilaksanakan oleh Jemaat Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jatirogo di Mushola Al-Hidayah Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo (26 April 2025);
- Dialog Pekerja Dan Pengusaha Tuban Bersama Forkopimda Kabupaten Tuban Dalam Rangka Sinergitas Pekerja Buruh, Pengusaha dan Forkopimda;
- Monitoring Penolakan terhadap Pengajian yang akan dilaksanakan oleh Jemaat Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jatirogo di Mushola Al-Hidayah Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo (30 April 2025);
- Mediasi Jemaat Majelis Tafsir Al-Quran dengan Warga Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo (5 Mei 2025);
- Pemantauan Kegiatan Kajian Jemaat Majelis Tafsir Al-Quran di Mushola Al–Hidayah Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo (7 Mei 2025) ;
- Rapat Koordinasi dan Mediasi Konflik antara Pihak Jemaat Majlis Tafsir Al-Quran dengan Masyarakat Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban (16 Mei 2025);
- Aksi Penolakan Warga Terhadap Jemaat Majelis Tafsir Al-Quran di Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban (24 Mei 2025) .

Pada pembahasan sub bab ini disajikan juga tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah mulai dari target awal sampai target akhir beserta realisasi capaian dan juga proyeksi capaian seperti pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3.
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban

Indikator	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian	Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
Perangkat Daerah : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Prosentase Potensi Konflik Sosial dan Politik yang terselesaikan	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran Program : 1. Meningkatnya Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Presentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80	100	100	100	100	100,37	32,52	19,05	-	100	100

Indikator	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian	Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
2. Meningkatnya pemberdayaan Ormas	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
3. Meningkatnya kualitas mediasi dalam pencegahan potensi konflik sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100

Indikator	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian	Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
4. Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, dan budya politik	100	100	64	65	66	100	900	50	-	65	66

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting dalam pelaksanaan program/kegiatan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan generasi muda tentang pengetahuan/wawasan kebangsaan;
2. Meningkatkan harmonisasi antar Organasasi Masyarakat;
3. Adanya potensi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban umum di tengah kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat yaitu belum tuntasnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada ruang publik;
4. Perlu penguatan kapasitas partai dalam upaya meningkatkan kehidupan berpolitik pada masyarakat (usaha budaya melek politik bagi masyarakat)

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi isu -isu penting pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya adalah:

1. Melakukan pembinaan pada generasi muda tentang pengetahuan/wawasan kebangsaan ;
2. Melakukan dialog interaktif dengan seluruh Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tuban;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya deteksi dini dan penanganan konflik di Kabupaten Tuban;
4. Melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah diciptakannya aplikasi SILADENI (Sistem Pelaporan Deteksi Dini) untuk pelaporan konflik sosial dan politik, dan aplikasi SIPOLMAS (Sistem Pelaporan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan) untuk pelaporan partai politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Adapun Review Terhadap Rancangan RKPD adalah sebagaimana pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Pemerintahan Umum				10.121.967.883	Unsur Pemerintahan Umum				10.121.967.883	
	Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik			83,51	4.357.325.651	Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik			83,51	4.357.325.651	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tuban	Nilai AKIP Perangkat Daerah	9	268.399.340	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tuban	Nilai AKIP Perangkat Daerah	9	268.399.340	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tuban	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	2	226.694.840	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	Tuban	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	2	226.694.840	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2.389.500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2.389.500	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Perangkat Daerah					Daerah					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tuban	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3	39.315.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tuban	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3	39.315.000	
	Sub Kegiatan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	3.349.532.139	Sub Kegiatan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	3.349.532.139	
	Kegiatan Administrasi Keuagan Perangkat Daerah	Tuban	Jumlah laporan keuangan dan keuangan yang tersusun	21	3.244.928.139	*Kegiatan Administrasi Keuagan Perangkat Daerah*	Tuban	Jumlah laporan keuangan dan keuangan yang tersusun	21	3.244.928.139	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan	Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12	94.504.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan	Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12	94.504.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tunjangan ASN		Tunjangan ASN			Tunjangan ASN		Tunjangan ASN			
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	2.525.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	2.525.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	Tuban	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	2	2.525.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	Tuban	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	2	2.525.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Tuban	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	4	2.525.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Tuban	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	4	2.525.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/S	Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran OPD dan Laporan	2	2.525.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Sem	Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran OPD dan Laporan	2	2.525.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	emesteran OPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran OPD			esteran OPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran OPD			
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tuban	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	27	13.754.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tuban	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	27	13.754.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tuban	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	26	13.754.000	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Tuban	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	26	13.754.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tuban	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	11	259.723.160	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tuban	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	11	259.723.160	
	Kegiatan Administrasi Umum	Tuban	Jumlah layanan pengadaan administrasi	5	14.440.573	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat*	Tuban	Jumlah layanan pengadaan administrasi	5	14.440.573	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah		umum			*Daerah*		umum			
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tuban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	39.893.950	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tuban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	39.893.950	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatn dan Perlengkapan Kantor	Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	70.942.969	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatn dan Perlengkapan Kantor	Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	70.942.969	
	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	27.991.050	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	27.991.050	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	4.045.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	4.045.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	45	102.409.118	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	45	102.409.118	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan			Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan			
	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Tuban	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	0	0	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Tuban	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	0	0	
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah pennunjang urusan pemerintah daerah	Tuban	Jumlah pengadaan BMD	0	0	*Kegiatan pengadaan barang milik daerah pennunjang urusan pemerintah daerah*	Tuban	Jumlah pengadaan BMD	0	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tuban	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	4	227.040.640	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tuban	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	4	227.040.640	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tuban	Jumlah pengadaan jasa penunjang	6	2.549.250	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Tuban	Jumlah pengadaan jasa penunjang	6	2.549.250	
	Sub KegiatanPenyediaan	Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	6	68.888.750	Sub KegiatanPenyediaan	Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	6	68.888.750	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	jasa surat menyurat		Menyurat			jasa surat menyurat		Menyurat			
	Sub KegiatanPenyediaan jasa komunikasi, submer daya air dan listrik	Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	14.988.180	Sub KegiatanPenyediaan jasa komunikasi, submer daya air dan listrik	Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	14.988.180	
	Sub KegiatanPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	140.614.460	Sub KegiatanPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	140.614.460	
	Sub KegiatanPenyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	238.876.372	Sub KegiatanPenyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	238.876.372	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tuban	Jumlah pemeliharaan BMD	14	173.540.672	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Tuban	Jumlah pemeliharaan BMD	14	173.540.672	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tuban	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tuban	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5.000.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	Tuban	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	16.828.200	Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	Tuban	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	16.828.200	
	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	43.507.500	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	43.507.500	
	Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Tuban	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100	1.617.468.264	Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Tuban	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100	1.617.468.264	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tuban	Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	3	1.617.468.264	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tuban	Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	3	1.617.468.264	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideology Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tuban	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	3	891.958.277	*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideology Pancasila Dan Karakter Kebangsaan*	Tuban	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	3	891.958.277	
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan Bela	Tuban	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	1.398	571.892.531	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter	Tuban	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	1.398	571.892.531	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	153.617.456	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	153.617.456	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideology	Tuban	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	64	3.721.811.236	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideology Wawsan Kebangsaan,	Tuban	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	64	3.721.811.236	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wawsan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan		Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan		Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	Program Peningkataan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tuban	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik	3	3.721.811.236	Program Peningkataan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tuban	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik	3	3.721.811.236	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Pollitik, Etika Budaya Politik,	Tuban	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang politik	1	111.347.000	*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Pollitik, Etika Budaya Politik,*	Tuban	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang politik	1	111.347.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik					*Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik*					
	Sub Kegiatan penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Tuban	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	666.724	3.474.133.340	Sub Kegiatan penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Tuban	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	666.724	3.474.133.340	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah		Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah		Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			
	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik,	Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	6	136.330.896	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum	Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	6	136.330.896	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan	Tuban	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	165.483.656	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi	Tuban	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	165.483.656	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah					Politik di daerah					
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tuban	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	3	165.483.656	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tuban	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	3	165.483.656	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tuban	*Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan*	200	165.483.656	*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	Tuban	*Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan*	200	165.483.656	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang	Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	100	259.879.076	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran	Tuban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	100	259.879.076	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah		Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah		Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tuban	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	3	259.879.076	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tuban	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	3	259.879.076	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan	Tuban	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penangan konflik social	200	259.879.076	*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik*	Tuban	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penangan konflik social	200	259.879.076	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanganan Konflik Sosial					*Sosial*					
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Tuban	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	200	259.879.076	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Tuban	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	200	259.879.076	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

- NIHIL -

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yang mendasari perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2025 yang nantinya akan dilaksanakan, diantaranya :

1. Adanya beberapa kegiatan yang rekeningnya perlu dilakukan penggeseran karena kurang sesuai dengan peruntukannya;
2. Adanya beberapa anggaran kegiatan yang perlu dikurangi karena tidak bisa dilaksanakan secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala;
3. Adanya beberapa anggaran kegiatan yang perlu ditambahkan karena berbagai kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan.

Berkenaan dengan beberapa keadaan diatas maka pada APBD Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+ / -)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.121.967.883	9.593.329.330	528.638.553

Sumber : PAPBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada perubahan APBD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 528.638.553,00 yakni dari anggaran semula berjumlah Rp 10.121.967.883,00 menjadi Rp 9.593.329.330,00. Untuk melihat perkembangan perubahan anggaran pada masing-masing program yang ada pada masing-masing urusan, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Perubahan RKPD 2025

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01					Unsur Pemerintahan Umum				10.121.967.883				9.593.329.330
8.01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83,51	4.357.325.651	APBD		83,51	4.201.620.528
8.01	01	2.01		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	268.399.340	APBD		9	153.110.845
8.01	01	2.01	01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	226.694.840	APBD		2	123.247.420
8.01	01	2.01	06	Tersusunnya laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	2.389.500,	APBD		4	1.805.925

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
8.01	01	2.01	07	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	39.315.000	APBD		3	28.057.500
8.01	01	2.02		Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan keuangan yang tersusun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	3.349.532.139	APBD		8	3.400.757.974
8.01	01	2.02	01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21	3.244.928.139	APBD		22	3.320.223.974
8.01	01	2.02	02	Tersusunnya dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	94.504.000	APBD		12	75.876.000

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	01	2.02	04	Tersusunnya dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	2.525.000	APBD		12	1.164.500
8.01	01	2.02	05	Tersusunnya laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2.525.000	APBD		2	1.164.500
8.01	01	2.02	07	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	2.525.000	APBD		4	1.164.500
8.01	01	2.02	08	Tersusunnya dokumen Pelaporan dan Analisis	Sub Kegiatan Penyusunan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	Badan Kesatuan Bangsa dan	2	2.525.000	APBD		2	1.164.500

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Politik						
8.01	01	2.05		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27	13.754.000	APBD		27	976.000
8.01	01	2.05	02	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26	13.754.000	APBD		26	976.000
8.01	01	2.05		Terlaksananya Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	259.723.160	APBD		11	197.476.687
8.01	01	2.05	01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	14.440.573	APBD		5	14.438.615

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	01	2.05	02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	39.893.950	APBD		5	38.982.450
8.01	01	2.05	04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35	70.942.969	APBD		35	66.656.613
8.01	01	2.06	05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	27.991.050	APBD		5	22.766.050
8.01	01	2.06	06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	4.045.500	APBD		5	3.428.400
8.01	01	2.06	09	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45	102.409.118	APBD		45	51.204.559

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	01	2.07		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan BMD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	APBD		4	8.098.595
8.01	01	2.07	07	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	APBD		2	8.098.595
8.01	01	2.08		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	227.040.640	APBD		4	208.415.405
8.01	01	2.08	01	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	2.549.250	APBD		6	1.032.469
8.01	01	2.08	02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub KegiatanPenyediaan jasa komunikasi, submer daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	68.888.750	APBD		6	68.975.155
8.01	01	2.08	03	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub KegiatanPenyediaan jasa peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	14.988.180	APBD		6	15.868.221

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					perlengkapan kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
8.01	01	2.08	04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub KegiatanPenyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	140.614.460	APBD		6	122.539.560
8.01	01	2.09		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	238.876.372	APBD		12	232.785.022
8.01	01	2.09	01	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	173.540.672	APBD		14	173.540.672
8.01	01	2.09	05	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Badan Kesatuan Bangsa dan	5	5.000.000	APBD		5	4.960.000

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Politik						
8.01	01	2.09	06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	16.828.200	APBD		5	10.783.600
8.01	01	2.09	09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	43.507.500	APBD		5	43.500.750
8.01	02			Meningkatnya Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	1.617.468.264	APBD		95	1.568.197.578
8.01	02	2.01		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideology Pancasila	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	1.617.468.264	APBD		3	1.568.197.578

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dan Karakter Kebangsaan	ideologi pancasila dan karakter kebangsaan							
8.01	02	2.01	02	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	891.958.277	APBD		3	984.708.577
8.01	02	2.01	04	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.398	571.892.531	APBD		1.398	429.871.545

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	02	2.01	05	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideology Wawsan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	153.617.456	APBD		1	153.617.456
8.01	03			Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat	Program Peningkataan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64	3.721.811.236	APBD		100	3.556.824.124
8.01	03	2.01		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Pollitik,	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	3.721.811.236	APBD		3	3.556.824.124

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	politik							
8.01	03	2.01	01	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	Sub Kegiatan penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	111.347.000	APBD		1	37.477.720

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				, serta Pemantauan Situasi Politik.di Daerah	Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun							
8.01	03	2.01	03	Terlaksananya Koordinasi Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik.di Daerah	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	666.724	3.474.133.340	APBD		666.724	3.458.521.180

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	03	2.01	05		Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	136.330.896	APBD		6	60.825.224
8.01	04			Meningkatnya pemberdayaan Ormas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	165.483.656	APBD		60	85.688.176

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	04	2.01		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	165.483.656	APBD		3	85.688.176
8.01	04	2.01	03	Terlaksananya Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200	165.483.656	APBD		200	85.688.176

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	06			Meningkatnya kualitas mediasi dalam pencgahan potensi konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	259.879.076	APBD		100	180.998.924
8.01	06	2.01		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penangan konflik social	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	259.879.076	APBD		3	180.998.924
8.01	06	2.01	03	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Sub Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200	259.879.076	APBD		200	180.998.924

Kode				Sasaran	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. ,00)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. ,00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada peraturan Perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, diharapkan Pimpinan Perangkat Daerah dapat menentukan langkah berupa kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban akan berjalan secara lebih terarah dan teratur.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan anggaran sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Demikian penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini dibuat untuk dijadikan pedoman operasional guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas, serta mengantisipasinya potensi perubahan dan perkembangan yang ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan dan perubahan terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

YUDI IRWANTO

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada peraturan Perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, diharapkan Pimpinan Perangkat Daerah dapat menentukan langkah berupa kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban akan berjalan secara lebih terarah dan teratur.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan anggaran sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Demikian penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini dibuat untuk dijadikan pedoman operasional guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas, serta mengantisipasinya potensi perubahan dan perkembangan yang ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan dan perubahan terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

YUDI IRWANTO

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KENDURUAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal
BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kenduruan Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah draft Renstra Kecamatan Kenduruan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenduruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan Rencana Strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja;

3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dan;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kenduruan Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Surat Keputusan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang menggambarkan alur atau urutan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan terdapat beberapa subbab yakni Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025, dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Daerah Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2025

Menguraikan tentang penjabaran evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Daerah Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Daerah Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2024.

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang penjabaran sistem pelayanan pada Kecamatan Kenduruan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Kenduruan.

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguaraikan tentang Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisi tentang isu penting yang terjadi di wilayah Kecamatan Kenduruan.

3.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Menguaraikan tentang Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2024 berisi tentang uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah porses tersebut.

3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisi tentang usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Kenduruan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kenduruan berisi tentang uraian program sampai dengan sub bagian kegiatan pada Kecamatan Kenduruan beserta sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Penutup merupakan Kesimpulan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kenduruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kewilayahan, pada tahun 2025 Kecamatan Kenduruan melaksanakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang diturunkan dari Misi 2 dan Misi 4 Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Adapun Analisis kinerja Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada Triwulan II Tahun 2025 berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 (Formulir E.81)

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks ketahanan ekonominya	0,15 %	505,025,063	-11.11 %	234.112.800	0,14 %	57.911.665	0%	10.445.000	0%	13.373.000					0%	23.818.000	0 (%)	257.930.800	0 %	51,07 %	CAMAT
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	505,025,063	100%	234.112.800	100%	57.911.665	0%	10.445.000	0%	13.373.000					0%	23.818.000	0 (%)	257.930.800	0 %	51,07 %	CAMAT
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	100%	505,025,063	100%	234.112.800	100%	57.911.665	100%	10.445.000	100%	13.373.000					100%	23.818.000	100 (%)	257.930.800	100 %	51,07 %	KASI PMD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	505,025,063	9 Laporan	234.112.800	9 Laporan	57.911.665	9 Laporan	10.445.000	9 Laporan	13.373.000					9 Laporan	23.818.000	27 (Laporan)	257.930.800	60 %	51,07 %	KASI PMD
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																100								
Predikat kinerja sub kegiatan																Sangat Tinggi								
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																100								
Predikat kinerja kegiatan																Sangat Tinggi								
Rata-rata kinerja program (%)																0								
Predikat kinerja program																Sangat Rendah								
B	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,04 Poin	869,082,987	87.35 (Poin)	3.304.922.213	84.36 (Poin)	4.353.239.979	0 (Poin)	811.218.441	0 (Poin)	656.694.042					0	0 (Poin)	1.467.912.483	0 (Poin)	4.772.834.696	0 %	549.18 %	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 (%)	60.603.008	100 (%)	62.885.000	100 (%)	14.520.000	100 (%)	3.630.000	100 (%)	3.015.000					100 (%)	6.645.000	100 (%)	69.530.000	100 %	114.73 %	CAMAT
	Terlaksanaya Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.04 (Poin)	60.603.008	87.35 (Poin)	62.885.000	84.36 (Poin)	14.520.000	0 (Poin)	3.630.000	0 (Poin)	3.015.000					0 (Poin)	6.645.000	0 (Poin)	69.530.000	0 %	114.73 %	KASI YANUM
	Terlaksanaya Urusan Pemerintahaan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 (Dokumen)	60.603.008	9 (Dokumen)	62.885.000	3 (Dokumen)	14.520.000	2 (Dokumen)	3.630.000	3 (Dokumen)	3.015.000					3 (Dokumen)	6.645.000	12 (Dokumen)	69.530.000	80 %	114.73 %	KASI YANUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																100								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja sub kegiatan																Sangat Tinggi								
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																0								
Predikat kinerja kegiatan																Sangat Rendah								
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 (%)	254.441.475	100 (%)	168.450.250	100 (%)	14.110.000	100 (%)	3.507.000	100 (%)	3.507.000					100 (%)	7.014.000	100 (%)	175.464.250	100 %	68,96 %	CAMAT
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	60 (Kali)	254.441.475	36 (Kali)	168.450.250	12 (Kali)	14.110.000	3 (Kali)	3.507.000	3 (Kali)	3.507.000					6 (Kali)	7.014.000	42 (Kali)	175.464.250	70 %	68,96 %	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	5 (Laporan)	254.441.475	3 (Laporan)	168.450.250	1 (Laporan)	14.110.000	1 (Laporan)	3.507.000	1 (Laporan)	3.507.000					1 (Laporan)	7.014.000	4 (Laporan)	175.464.250	80 %	68,96 %	KASI TRANTIB

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																100								
Predikat kinerja sub kegiatan																Sangat Tinggi								
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																50								
Predikat kinerja kegiatan																Sangat Rendah								
3	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 (%)	115.752.503	100 (%)	205.488.000	97 (%)	42.365.000	100 (%)	3.520.000	100 (%)	12.830.000					100 (%)	16.350.000	100 (%)	221.838.000	100 %	191.65 %	CAMAT
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	5 (Laporan)	115.752.503	1 (Laporan)	205.488.000	1 (Laporan)	42.365.000	1 (Laporan)	3.520.000	1 (Laporan)	12.830.000					1 (Laporan)	16.350.000	1 (Laporan)	221.838.000	20 %	191.65 %	KASI KESRA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsuttasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 (Orang)	115.752.503	25 (Orang)	205.488.000	25 (Orang)	42.365.000	5 (Orang)	3.520.000	25 (Orang)	12.830.000					25 (Orang)	16.350.000	25 (Orang)	221.838.000	100 %	191.65 %	KASI KESRA
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																100								
Predikat kinerja sub kegiatan																Sangat Tinggi								
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																100								
Predikat kinerja kegiatan																Sangat Tinggi								
4	Meninykatnya Pembinaan Dan Pengawasan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	483.488.269	200 (%)	242.767.000	100 (%)	41.655.000	0 (%)	16.300.000	0 (%)	4.450.000					0 (%)	20.750.000	200 (%)	263.517.000	200 %	54,5 %	CAMAT

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Desa																							
	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	45 (Desa)	483.488.269	27 (Desa)	242.767.000	9 (Desa)	41.655.000	9 (Desa)	16.300.000	9 (Desa)	4.450.000					9 (Desa)	20.750.000	36 (Desa)	263.517.000	80 %	54,5 %	KASI PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45 (Dokumen)	89.818.701	27 (Dokumen)	242.767.000	9 (Dokumen)	41.655.000	9 (Dokumen)	16.300.000	9 (Dokumen)	4.450.000					9 (Dokumen)	20.750.000	36 (Dokumen)	263.517.000	80 %	293.39 %	KASI PEMERINTAHAN
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																100								
Predikat kinerja sub kegiatan																Sangat Tinggi								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																100								
Predikat kinerja kegiatan																Sangat Tinggi								
C	Penunjang										-		-						-					CAMAT
	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,04 Poin	869,082,987	84,31 Poin	419.782.050	84,34 Poin	3.114.866.649	0 Poin	558.288.343							0 Poin	1.408.874.514	0 Poin	1.828.656.564	0%	210.41 %	CAMAT
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74.25 (Poin)	7.254.599.590	81.5 (Poin)	4.240.589.979	0 (Poin)	784.261.441	0 (Poin)	632.892.042	0	0 (Poin)					1.417.153.483	0 (Poin)	8.671.753.073	0 %	60,37 %	SEKCAM	74.25 (Poin)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	29 (Dokumen)	81.654.500	9 (Dokumen)	30.025.000	8 (Dokumen)	6.972.000	9 (Dokumen)	7.680.000	0	9 (Dokumen)					14.652.000	38 (Dokumen)	96.306.500	84.44 %	92,08 %	KASUBAG PROLAP	29 (Dokumen)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahRealisasi Kinerja SKPD	9 (Dokumen)	22.208.000	9 (Dokumen)	30.025.000	8 (Dokumen)	6.972.000	9 (Dokumen)	7.680.000	0	9 (Dokumen)					14.652.000	9 (Dokumen)	36.860.000	100 %	73 1.33 %	KASUBAG PROLAP	9 (Dokumen)
	Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)															100								
	Predikat kinerja sub kegiatan															Sangat Tinggi								
2	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	45 (Laporan)	12.709.251.884	27 (Laporan)	5.662.638.391	9 (Laporan)	3.188.931.744	9 (Laporan)	520.896.882	9 (Laporan)	525.707.997					9 (Laporan)	1.046.604.879	36 (Laporan)	6.709.243.270	80 %	52,79 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 (Orang)	12.007.397.733	15 (Orang)	5.497.741.391	21 (Orang)	3.141.531.744	15 (Orang)	507.969.382	15 (Orang)	463.497.219					15 (Orang)	971.466.601	15 (Orang)	6.469.207.992	78,95 %	53,88 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksanaanya Koordinasi dan Pelaksanaan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	47.400.000	1 (Dokumen)	12.927.500	1 (Dokumen)	7.425.000					1 (Dokumen)	20.352.500	1 (Dokumen)	20.352.500	0 %	0 %	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Akuntansi SKPD		n Akuntansi SKPD																					
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																85,71								
Predikat kinerja sub kegiatan																Tinggi								
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	3 (Paket)	75.216.749	3 (Paket)	41.638.000	3 (Paket)	38.494.360	3 (Paket)	9.778.000	3 (Paket)	9.484.000					3 (Paket)	19.262.000	6 (Paket)	60.900.000	200 %	80,97 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 (Paket)	30.619.296	3 (Paket)	27.370.000	3 (Paket)	7.782.725	3 (Paket)	1.950.000	3 (Paket)	1.950.000					3 (Paket)	3.900.000	3 (Paket)	31.270.000	100 %	102.13 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	2.754.020	0 (Paket)	0	1 (Paket)	1.375.000					1 (Paket)	1.375.000	1 (Paket)	1.375.000	0 %	0 %	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	3 (Paket)	30.619. 296	3 (Paket)	27.370 .000	3 (Paket)	7.782. 725	3 (Paket)	1.950. 000	3 (Paket)	1.950. 000					3 (Paket)	3.900. 000	3 (Paket)	31.270.000	10 0 %	102.13 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	10 (Dokumen)	22.332. 578	6 (Dokumen)	10.612 .000	1 (Dokumen)	3.132. 000	1 (Dokumen)	780,00 0	1 (Dokumen)	780,00 0					1 (Dokumen)	1.560. 000	7 (Dokumen)	12.172.000	70 %	54,5 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksanan ya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 (Laporan)	25.075. 175	28 (Laporan)	151.93 5.300	24 (Laporan)	90.765 .998	6 (Laporan)	15.270 .000	6 (Laporan)	11.350 .000					12 (Laporan)	26.620 .000	40 (Laporan)	178.555.300	40 0 %	712.08 %	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																90								
Predikat kinerja sub kegiatan																Tinggi								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	3 (Unit)	188.063.814	7 (Unit)	147.115.000	8 (Unit)	48.545.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0					0 (Unit)	0	0 (Unit)	147.115.000	0 %	78,23 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 (Unit)	10.000.000	7 (Unit)	147.115.000	8 (Unit)	48.545.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0					0 (Unit)	0	0 (Unit)	147.115.000	0 %	1471.15 %	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																0								
Predikat kinerja sub kegiatan																Sangat Rendah								
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 (Jasa)	907.831.100	2 (Jasa)	675.824.158	2 (Jasa)	270.717.400	2 (Jasa)	63.995.559	2 (Jasa)	63.244.445					2 (Jasa)	127.240.004	2 (Jasa)	803.064.162	50 %	88,46 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 (Laporan)	166.104.912	4 (Laporan)	143.171.956	2 (Laporan)	57.601.000	2 (Laporan)	11.036.502	2 (Laporan)	10.258.118					2 (Laporan)	21.294.620	6 (Laporan)	164.466.576	120 %	99,01 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 (Laporan)	677.533.739	3 (Laporan)	506.118.702	1 (Laporan)	213.116.400	1 (Laporan)	52.959.057	1 (Laporan)	52.986.327					1 (Laporan)	105.945.384	4 (Laporan)	612.064.086	80 %	90,34 %	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																**100**								
Predikat kinerja sub kegiatan																Sangat Tinggi								
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	30 (Unit)	120.873.024	24 (Unit)	392.577.970	29 (Unit)	545.158.732	10 (Unit)	164.619.000	11 (Unit)	13.400.600					21 (Unit)	178.019.600	21 (Unit)	570.597.570	70 %	472.06 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 (Unit)	43.452.771	12 (Unit)	118.946.970	12 (Unit)	36.404.232	6 (Unit)	7.890.000	6 (Unit)	11.210.600					12 (Unit)	19.100.600	12 (Unit)	138.047.570	100 %	317,7 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 (Unit)	30.930.229	10 (Unit)	39.850.000	15 (Unit)	8.754.500	3 (Unit)	2.190.000	5 (Unit)	2.190.000					8 (Unit)	4.380.000	8 (Unit)	44.230.000	160 %	143 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 (Unit)	15.146.056	2 (Unit)	228.781.000	2 (Unit)	500.000.000	1 (Unit)	154.539.000	1 (Unit)	0					1 (Unit)	154.539.000	1 (Unit)	383.320.000	33.33 %	2530.82 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																0								
Predikat kinerja sub kegiatan																Sangat Rendah								
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																67,49								
Predikat kinerja kegiatan																Sedang								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	:	Pembinaan kepada pegawai terjalin secara hirarkis dan rutin Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah sesuai rencana
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	:	Kurangnya sumber daya manusia terutama bidang ITE Jaringan Internet yang kurang memadai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih nol di karena nilai hasil survei baru keluar pada saat TW 4 Indeks Desa Membangun (IDM) masih nol di karena nilai hasil survei baru keluar pada saat TW 3 Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah masih nol di karena nilai hasil Review baru keluar pada saat TW 3 Pengadaan BMD (Unit) masih nol karena akan ada pengadaan pada saat TW 2 karena menyesuaikan anggaran kas Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya masih nol karena akan ada pengadaan pada saat TW 2 karena menyesuaikan anggaran kas Desa yang menetapkan Perubahan APBDes tepat waktu pada TW 2 dan Desa yang menetapkan APBDes 2025 tepat waktu pada TW

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trisvulan berikutnya•): :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota ber ikutnya*): :																								

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kantor Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.240.589.979,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.417.153.483,00 dengan output dari rencana jumlah 81,5 poin terealisasi 0 poin, output belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi AKIP baru akan ada jadwal reviu AKIP pada triwulan III, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan AKIP, pada program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.025.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 14.652.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 dokumen terealisasi 5 dokumen, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.025.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 14.652.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 dokumen terealisasi 9 dokumen.
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.188.931.744,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.046.604.879,00 dengan output dari rencana jumlah 9 laporan terealisasi 9 laporan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.141.531.744,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.026.252.379,00 dengan output dari rencana jumlah 21 Orang/bulan terealisasi 15 Orang/bulan, output tidak tercapai dikarenan ada PNS yang pensiun dan PPPK belum penerimaan SK sehingga belum ada realisasinya.
        2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 47.400.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.352.500,00 dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 0 paket terealisasi 0 paket, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
        1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dari rencana anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah

0 orang dokumen terealisasi 0 orang, di karenakan terkena efisiensi anggaran pada tahap 1.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 142.929.103,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 52.717.000,00 dengan output dari rencana jumlah dengan output dari rencana jumlah 5 layanan terealisasi 5 layanan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.494.360,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 19.262.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 paket terealisasi 3 paket.
   2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.754.020,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.375.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi 1 paket.
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.782.725,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.900.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 paket terealisasi 3 paket.
   4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.132.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.560.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.
   5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 90.765.998,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 26.620.000,00 dengan output dari rencana jumlah 24 laporan terealisasi 12 laporan, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 50% dari target tahunan.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.545.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 8 unit terealisasi 0 unit, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.545.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 8 Unit terealisasi 0 unit, tidak tercapai outputnya di karenakan ketidak sesuaian standar satuan harga dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga target output tidak tercapai, akan melakukan perubahan penyesuaian

standar satuan harga dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada saat pelaksanaan usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 270.717.400,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 127.240.004,00 dengan output dari rencana jumlah 2 Jasa terealisasi 2 Jasa, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikdari rencana anggaran sebesar Rp. 57.601.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 21.294.620,00 dengan output dari rencana jumlah 2 laporan terealisasi 2 laporan.
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 213.116.400,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 105.945.384,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 1 laporan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran anggaran sebesar Rp. 545.158.732,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 175.939.600,00 dengan output dari rencana jumlah 29 unit terealisasi 21 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 70% dari target tahunan, percapaian yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 36.404.232,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 17.020.600,00 dengan output dari rencana jumlah 12 unit terealisasi 7 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 58.33% dari target tahunan.
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.754.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.380.000,00 dengan output dari rencana jumlah 15 Unit terealisasi 8 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 53.33% dari target tahunan.
   3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 154.539.000,00 dengan output dari rencana jumlah 2 unit terealisasi 1 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 50% dari target

tahunan, akan melaksanakan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung yang telah diusulkan mempercepat rehab Gedung yang mengalami kerusakan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.520.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.645.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.520.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.645.000,00 dengan output dari rencana jumlah 84.36 poin terealisasi 0 poin, output belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru akan ada jadwal evaluasi pada triwulan IV, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat, memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan, dalam kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.520.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.645.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 dokumen terealisasi 3 dokumen.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.911.665,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 23.818.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 0%, output belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi baru akan ada jadwal evaluasi pada triwulan III, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, memberikan fasilitasi dan pemdampingan kepada petugas desa dalam penyusunan dokumen kelengkapan Indek Desa Membangun (IDM), pada program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.911.665,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 23.818.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.911.665,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.

23.818.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 laporan terealisasi 9 laporan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.110.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.014.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.110.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.014.000,00 dengan output dari rencana jumlah 12 kali terealisasi 6 kali, , pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 50% dari target tahunan, pada kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.110.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.014.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 1 Laporan.
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 42.365.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.350.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 42.365.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.350.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 1 Laporan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaldari rencana anggaran sebesar Rp. 42.365.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.350.000,00 dengan output dari rencana jumlah 25 orang terealisasi 25 0rang.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.655.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.750.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 0%, output belum tercapai karena Desa yang menetapkan APBDes baru akan ada jadwalkan pada triwulan III, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, memfasilitasi dan memberikan pendampingan Desa-Desa dalam penyusunan APBDes sesuai jadwal agar penetapannya tepat waktu pada triwulan III, pada program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.655.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.750.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 Desa terealisasi 9 Desa, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.655.00000 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.750.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 dokumen terealisasi 17 dokumen.

Adapun untuk target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum realisasi atau tercapai dikarenakan masih proses pelaksanaan dan menunggu release dari pihak terkait.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenduruan dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenduruan
Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya	-	-	0,10%	0,13%	-	-	-11,11 %	-	-	-	
	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya	-	-	-	-	44,44 %	55,56 %	-		44,44 %	55,56 %	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	84,33 Poin	84,34 Poin	87,85 Poin	88,35 Poin	87,35 Poin		87,85 Poin	88,35 Poin	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	71,00 Poin	81,00 Poin	75,25 Poin	76,25 Poin	74,25 Poin		75,25 Poin	76,25 Poin	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Kenduruan adalah sebagai berikut :

1. Pada capaian kinerja poin 1 (satu) meningkatnya tingkat kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya dengan capaian -11,11% meski tidak mencapai target dan mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman petugas Desa pada saat penginputan IDM;
2. Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Nilai Baik (B/87,35 Poin) kategori baik dan mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh Kepuasan Masyarakat atau pelayanan umum yang diberikan Kecamatan. Kepuasan masyarakat sendiri dinilai dari beberapa unsur pelayanan antara lain Persyaratan, Prosedur, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifik, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan;
3. Pada capain nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kenduruan masih mendapat nilai BB (74,25 Poin).

2.3 Penentuan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kenduruan

Adapun isu penting dan hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kenduruan sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan umum yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi untuk menjawab tantangan/ isu penting tersebut antara lain:
   - Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki;
   - Kompetensi dan kapasitas ASN di Kecamatan
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

   Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain:
   - Kompetensi ASN dalam urusan perencanaan dan pelaporan keuangan;
   - Sarana dan prasarana pendukung tekhnologi informasi kounikasi (TIK/ ICT);
   - Tingkat pengetahuan dan ketrampilan ASN dalam menggunakan tekhnologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI).

3. Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Kenduruan
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran yang menunjang pembiayaan;
   - Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Kenduruan;
   - Ketersediaan ASN sebagai SDM pengelola TIK.
4. Pendampingan Desa Menuju Desa Mandiri
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lalin :
   - Tingkat pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaporan keuangan;
   - Ketersediaan tenaga pendamping Desa.
5. Kompetensi dan kapasitas tenaga pendamping desa. Sinergitas Forkopimka, Dinas/ Instansi Vertikal bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran;
   - Intensitas koordiansi antar lintas sektor.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah aspek krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan publik yang prima. Kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan, memiliki posisi strategis untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berikut adalah rincian tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kecamatan Kenduruan:

✓ Tantangan dalam Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kenduruan:
   1. Proses administrasi yang panjang, kurang efisien, dan membutuhkan banyak tahapan persetujuan masih menjadi keluhan utama Masyarakat;
   2. Keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama dalam pengadaan teknologi modern dan pelaksanaan inovasi pelayanan;
   3. Tidak semua pegawai kecamatan memiliki keterampilan dan penguasaan teknologi digital yang cukup untuk menjalankan sistem pelayanan modern secara efektif;
   4. Pelatihan yang kurang memadai atau tidak berkelanjutan membuat adopsi teknologi dan peningkatan kualitas layanan berjalan lambat.

- ✓ Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Kecamatan
  1. Pengembangan portal, website, atau media sosial yang mudah diakses dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, data pembangunan, dan dokumen-dokumen pelayanan secara transparan kepada Masyarakat;
  2. Tersedianya kesempatan untuk pelatihan dan pendidikan formal bagi pegawai dapat meningkatkan kualitas SDM, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan keterampilan manajerial;
  3. Dengan perbaikan sistem dan dukungan teknologi, fokus kerja dapat bergeser ke pelayanan prima dan orientasi pada hasil yang terukur (berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM yang tinggi).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan Renja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

Penelaahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban yang tercantum di dalam Rancangan Perubahan RKPD 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan análisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban hasil review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi,indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;

7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Dalam proses rancangan Perubahan RKPD 2025, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban membandingkan rancangan awal RKPD tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Hal ini dimaksud untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas guna mencapai target renstra tahun berjalan. Adapun review Perubahan rencana kerja terhadap rancangan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 (T-C 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kenduruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Kenduruan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,25 poin	3.883.401.849	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Kenduruan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,25 poin	4.135.080.324	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	30.025.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	30.025.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.025.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.025.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	3.188.931.744	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	2.819.221.294	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenduruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	3.141.531.744	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenduruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	2.771.821.294	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen	47.400.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen	47.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	SKPD		Pelaksanaan Akuntansi SKPD			SKPD		Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	1 Paket	976.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kenduruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kenduruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	93.706.104	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	93.706.104	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenduruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	35.494.360	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenduruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	38.626.360	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kenduruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2.754.020		Kec. Kenduruan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	2.754.020	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kenduruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	6.942.725	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kenduruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6.942.725	
	Penyediaan Bahan Bacaan	Kec. Ken	Jumlah Dokumen	2 dokumen	3.132.000,	Penyediaan Bahan Bacaan	Kec. Ken	Jumlah Dokumen	2 dokumen	3.132.000,	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	dan Peraturan Perundang-undangan	duru an	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang			dan Peraturan Perundang-undangan	duru an	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ken duru an	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	45.382.999	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ken duru an	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	45.382.999	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Ken duru an	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	6 unit	48.545.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Ken duru an	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jenis	130,810,713	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kenduruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	48.545.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kenduruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	130,810,713	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	2 jasa	270.717.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	264.986.150	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kenduruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	57.601.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kenduruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	51.869.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kenduruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	213.116.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kenduruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	213.116.400	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Pemeliharaan BMD	29 unit	545.217.838	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	795.355.063	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kenduruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	36.404.232	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kenduruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	36,600.563	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kenduruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	8.754.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kenduruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	8.754.500	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kec. Kenduruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	500.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kec. Kenduruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	750,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Lainnya		yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Lainnya		Dipelihara/ Direhabilitasi			
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Kenduruan	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	9.180.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Kenduruan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100%	9.180.000	
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kenduruan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	84,34 poin	9.180.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kenduruan	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 jenis	9.180.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 dokumen	9.180.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	600 dokumen	9.180.000	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Kenduruan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	44.428.615	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Kenduruan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	57,14 %	67.915.390	
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kenduruan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam	100%	44.428.615	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kenduruan	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa pemberdayaan	7 Jenis	67.915.390	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			pemberdayaan								
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenduruan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	44.428.615	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenduruan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	67.915.390	
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kenduruan	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	10.575.500	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kenduruan	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	10.575.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
10	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Kenduruan	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	12 kali	10.575.500	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Kenduruan	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	12 kali	10.575.500	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenduruan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 laporan	10.575.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenduruan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 laporan	10.575.500	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Kecamatan					Kecamatan			
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Kenduruan	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	39.965.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Kenduruan	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	21.247.280	
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	39.965.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kenduruan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	21.247.280	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kenduruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 Orang	39.965.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kenduruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 Orang	21.247.280	
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kenduruan	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	32.838.500	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kenduruan	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	32.838.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kenduruan	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	9 desa	32.838.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kenduruan	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	9 desa	32.838.500	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	9 Dokumen	32.838.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kenduruan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	32.838.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025:

Tabel 2.5

Usulan Kegiatan Prioritas dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan Kenduruan Tahun 2025

Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Rencana Program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, yang menjadi pedoman penyusunan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rancangan Awal Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2030, dimana di dalamnya telah termuat pokok-pokok Program dan Kegiatan berikut indikatornya yang menjadi tugas pokok Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

Selain hal-hal prioritas, terdapat pula Program kegiatan rutin pelayanan administrasi. Adapun rincian Perubahan Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Rincian Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PAPBD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	81,00 poin	2.826.171.709		75,25 poin	4.135.080.324
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Kec. Kenduruan	9 Dokumen	24.640.000		8 Dokumen	30.025.000

7.01.01.2.01.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenduruan	9 Dokumen	24.640.000		2 Dokumen	30.025.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kec. Kenduruan	9 Laporan	2.316.078.080		9 Jenis	2.819.221.294
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenduruan	21 orang	2.283.858.080		21 orang	2.771.821.294
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kenduruan	1 Dokumen	32.220.000		4 Dokumen	47.400.000

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Kec. Kenduruan	0	0		2 Jenis	976.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Kenduruan	0	0		1 Paket	976.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kec. Kenduruan	6 Layanan	123.582.069		4 Jenis	93.706.104
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Kenduruan	3 paket	41.644.410		2 paket	35.494.360

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kenduruan	1 paket	2.754.020		1 paket	2.754.020
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kenduruan	3 paket	5.146.300		2 paket	6.942.725
7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Kenduruan	2 dokumen	4.080.480		1 dokumen	3.132.000,
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kenduruan	2 laporan	72.710.879		24 laporan	45.382.999

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Kenduruan	2 unit	17.472.340		1 Jenis	130,810,713
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Kenduruan	2 unit	17.472.340		28 unit	130,810,713
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kec. Kenduruan	4 jasa	279.286.800		2 Jenis	264.986.150
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kenduruan	1 laporan	49.500.000		12 laporan	51.869.750

7.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kenduruan	1 laporan	229.786.800		12 laporan	213.116.400
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Kenduruan	30 unit	65.112.420		3 Jenis	795.355.063
7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Kenduruan	12 unit	39.332.420		12 unit	36,600.563
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharan	Kec. Kenduruan	10 unit	9.460.000		15 unit	8.754.500

7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Kenduruan	2 unit	16.320.000		3 unit	750,000,000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	Kec. Kenduruan	100%	16.700.000		100%	9.180.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	Kec. Kenduruan	84,34 poin	16.700.000		1 jenis	9.180.000
7.01.02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Kenduruan	3 dokumen	16.700.000		600 dokumen	9.180.000

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Kec. Kenduruan	100%	80.032.440		100 %	67.915.390
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Kenduruan	100%	80.032.440		7 Jenis	67.915.390
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenduruan	9 Laporan	80.032.440		9 Laporan	67.915.390
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Kec. Kenduruan	100%	26.020.000		100%	10.575.500

7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Kenduruan	12 kali	26.020.000		12 laporan	10.575.500
7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenduruan	1 laporan	26.020.000		12 laporan	10.575.500
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Kec. Kenduruan	94%	207.319.940		100%	21.247.280

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kenduruan	1 Laporan	207.319.940		12 Laporan	21.247.280
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kenduruan	25 Orang	207.319.940		30 Orang	21.247.280
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	Kec. Kenduruan	100%	38.655.000		57,14%	32.838.500

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kenduruan	9 desa	38.655.000		12 laporan	32.838.500
7.01.06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kenduruan	9 Dokumen	38.655.000		9 Dokumen	32.838.500

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Kecamatan Kenduruan Daerah Kabupaten Tuban dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2025. Karena Perubahan Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Perubahan Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami agar dokumen Perubahan Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja ke depan.

Plt. CAMAT KENDURUAN
KABUPATEN TUBAN

ttd.

CAHYADI WIBOWO, SH

BUPATI TUBAN,

ANNA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JATIROGO
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
Kedudukan

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan;
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan; dan
d. bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 56

Scanned with OKEN Scanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Draft Renstra Kecamatan Jatirogo Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala

perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 67);
24. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 3)
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
4. Merumuskan kembali perubahan rencana kerja Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban untuk Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II Tahun 2025, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tuban secara umum serta tujuan dan sasaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban secara khusus dapat tercapai.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dan;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Kecamatan Jatirogo dalam jangka 1 tahun;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Surat Keputusan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang menggambarkan alur atau urutan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan terdapat beberapa subbab yakni Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025, dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Tahun 2025 sampai dengan Tribulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang penjabaran sistem pelayanan pada Kecamatan Jatirogo kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Jatirogo.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguaraikan tentang Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisi tentang isu penting yang terjadi di wilayah Kecamatan Jatirogo.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Menguaraikan tentang Reviu terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025 berisi tentang uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah porses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisi tentang usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatirogo.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jatirogo berisi tentang uraian program sampai dengan sub bagian kegiatan pada Kecamatan Jatirogo beserta sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP
Penutup merupakan Kesimpulan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tibulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatirogo sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kewilayahan, pada Tahun 2025 Kecamatan Jatirogo melaksanakan 6 (enam) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan, 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
      1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
      4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:
   a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
      1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan:
   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum:
   a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
      1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah.
      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
    a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
        1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;

Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep efisiensi anggaran atau Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.Adapun

Analisis Kinerja Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Renja Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Tahun 2025 :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jatirogo
Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks ketahanan ekonominya	5,56%	505,025,063	-66,67 %	313.902.550	5,56%	117.678.123	0%	13.400.000	0%	10.840.000	0%	24.240.000	0 (%)	360.857.550	0 %	71,45 %	CAMAT
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	505,025,063	16,67%	313.902.550	100%	117.678.123	0%	13.400.000	8,33%	10.840.000	8,33%	24.240.000	8,33 (%)	360.857.550	8,33 %	71,45 %	Kasi PMD
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	0 (Desa)	0	0 (Desa)	0	18 (Desa)	117.678.123	18 (Desa)	13.400.000	18 (Desa)	10.840.000	18 (Desa)	24.240.000	18 (Desa)	46.955.000	0 %	0 %	KASI PMD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	18 (Laporan)	117.678.123	18 (Laporan)	13.400.000	18 (Laporan)	10.840.000	18 (Laporan)	24.240.000	18 (Laporan)	46.955.000	0 %	0 %	KASI PMD
										Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)		100								
										Predikat kinerja sub kegiatan		Sangat Tinggi								
										Rata-rata kinerja kegiatan (%)		100								
										Predikat kinerja kegiatan		Sangat Tinggi								
										Rata-rata kinerja program (%)		8,33								
										Predikat kinerja program		Sangat Rendah								
B	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 (Nilai)	0	0 (Nilai)	0	91,25 (Nilai)	5.074.159.485	0 (Nilai)	759.601.861	91,25 (Nilai)	795.526.267	91,25 (Nilai)	1.555.128.128	91,25 (Nilai)	1.807.608.619	0 %	0 %	CAMAT
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 (%)	2.817.507.088	100 (%)	98.578.775	100 (%)	15.031.500	96,42(%)	0	98,35(%)	6.259.000	98,35 (%)	6.259.000	98,35 (%)	104.838.775	98,35 %	3,72 %	SEKCAM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen layanan yang diterbitkan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	15.031.500	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	6.259.000	3 (Dokumen)	6.259.000	3 (Dokumen)	6.259.000	0 %	0 %	KASI YANUM
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	15.031.500	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	6.259.000	3 (Dokumen)	6.259.000	3 (Dokumen)	6.259.000	0 %	0 %	KASI YANUM
											Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)		100							
											Predikat kinerja sub kegiatan		Sangat Tinggi							
											Rata-rata kinerja kegiatan (%)		8,33							
											Predikat kinerja kegiatan		Sangat Rendah							
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 (%)	2.637.678	100 (%)	184.690.900	100 (%)	25.142.000	100 (%)	0	100 (%)	5.341.000	100 %	5.341.000	100 (%)	191.969.900	100 %	7277,99 %	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi dan pengendalian yang dilaksanakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	25.142.000	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	5.341.000	1 (Laporan)	5.341.000	1 (Laporan)	7.279.000	0 %	0 %	KASI TRANTIB

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Umum																			
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	25.142.000	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	5.341.000	0 (Laporan)	5.341.000	1 (Laporan)	5.341.000	0 %	0 %	KASI TRANTIB

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsuttasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	40 (Orang)	89.763.300	0 (Orang)	796.000	0 (Orang)	3.676.000	0 (Orang)	4.472.000	0 (Orang)	8.823.000	0 %	0 %	KASI KESRA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 (Dokumen)	49.135.807	18 (Dokumen)	134.873.300	18 (Dokumen)	39.646.000	18 (Dokumen)	1.165.000	18 (Dokumen)	5.200.000	18 (Dokumen)	6.365.000	18 (Dokumen)	152.559.300	100 %	310.48 %	KASI PEMERINTAHAN
											Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)		100								
											Predikat kinerja sub kegiatan		Sangat Tinggi								
											Rata-rata kinerja kegiatan (%)		100								
											Predikat kinerja kegiatan		Sangat Tinggi								
C	Penunjang										-		-		-					CAMAT
	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 (Nilai)	0	0 (Nilai)	0	91,25 (Nilai)	5.074.159.485	0 (Nilai)	759.601.861	91,25 (Nilai)	795.526.267	91,25 (Nilai)	1.555.128.128	91,25 (Nilai)	1.807.608.619	0%	0 %	CAMAT
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	81,5 (Poin)	4.904.576.685	0 (Poin)	757.640.861	0 (Poin)	775.050.267	0 (Poin)	1.532.691.128	0 (Poin)	1.767.561.619	0 %	0 %	SEKCAM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kabupaten/ Kota																		
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	6 (Dokumen)	16.444.900	6 (Dokumen)	91.324.500	14 (Dokumen)	46.153.036	2 (Dokumen)	3.000.000	1 (Dokumen)	12.697.000	1 (Dokumen)	15.697.000	1 (Dokumen)	111.760.500	16,67 %	679,61 %	KASUBAG PLOGLAP
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	(Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	14 (Dokumen)	29.733.000	2 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.120.000	1 (Dokumen)	5.120.000	1 (Dokumen)	9.859.000	0 %	0 %	KASUBAG PLOGLAP
	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	9 (Laporan)	16.420.036	1 (Laporan)	3.000.000	1 (Laporan)	7.577.000	1 (Laporan)	10.577.000	1 (Laporan)	10.577.000	0 %	0%	KASUBAG PLOGLAP
										Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)		9,13								
										Predikat kinerja sub kegiatan		Sangat Rendah								
2	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 (Dokumen)	2.322.684.280	35 (Dokumen)	6.413.266.182	14 (Dokumen)	3.357.394.663	2 (Dokumen)	640.846.948	1 (Dokumen)	711.045.937	1 (Dokumen)	1.351.892.885	1 (Dokumen)	7.963.821.841	11,11 %	34,87 %	SEKCAM
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 (Orang/bulan)	11.364.200.989	20 (Orang/ bulan)	6.820.541.266	20 (Orang/bulan	3.269.759.663	20 (Orang/ bulan)	624.148.948	20 (Orang/ bulan)	463.497.219694.445.937	20 (Orang/ bulan)	1.318.594.885	20 (Orang/ bulan)	6.8.334.098.925	90,91 %	73,34 %	SEKCAM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	87.635.000	1 (Dokumen)	16.698.000	1 (Dokumen)	16.600.000	1 (Dokumen)	33.298.000	1 (Dokumen)	36.998.000	0 %	0 %	
											Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)		66,67								
											Predikat kinerja sub kegiatan		Sedang								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawain yang Dilaksanakan	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	1 (Jenis)	12.696.000	1 (Jenis)	0	1 (Jenis)	0	1 (Jenis)	0	1 (Jenis)	0	0 %	0 %	
	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pekat Pakaian DInas beserta Atribut Kelengkapannya	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	24 (Paket)	12.696.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	6 (Layanan)	351.504.752	6 (Layanan)	62. 440.750	6 (Layanan)	18.961.000	6 (Layanan)	81.401.750	6 (Layanan)	97.432.250	0 %	0 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	255.800.000	1 (Paket)	48.360.750	1 (Paket)	10.571.000	1 (Paket)	58.931.750	1 (Paket)	72.722.250	0 %	0 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 (Paket)	16.683.400	1 (Paket)	28.112.200	1 (Paket)	6.725.000	1 (Paket)	2.050.000	1 (Paket)	4.264.000	1 (Paket)	6.314.000	1 (Paket)	34.426.200	100 %	206,35 %	SEKCAM
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	3.132.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.566.000	1 (Dokumen)	1.566.000	1 (Dokumen)	1.566.000	0 %	0 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 (Laporan)	6.880.000	5 (Laporan)	110.318.000	15 (Laporan)	85.847.752	1 (Laporan)	12.030.000	1 (Laporan)	2560.000	1 (Laporan)	14.590.000	1 (Laporan)	127.148.000	20 %	1848,08 %	SEKCAM
											Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)						90			
											Predikat kinerja sub kegiatan						Tinggi			
6	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	408.341.867	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	408.341.867	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	KASUBAG UMUM
											Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)						0			
											Predikat kinerja sub kegiatan						Sangat Rendah			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	0 (Jasa)	0	0 (Jasa)	0	6 (Jasa)	219.587.500	6 (Jasa)	41.836.163	6 (Jasa)	30.906.330	6 (Jasa)	72.742.493	6 (Jasa)	86.965.710	0 %	0 %	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	45.119.500	3 (Laporan)	6.930.923	3 (Laporan)	7.256.170	3 (Laporan)	14.187.093	3 (Laporan)	16.594.262	0 %	0 %	
	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 (Laporan)	35.993.000	6 (Laporan)	342.564.752	2 (Laporan)	174.468.000	2 (Laporan)	34.905.240	2 (Laporan)	23.650.160	2 (Laporan)	58.55.400	2 (Laporan)	412.9367.200	100 %	1147,27 %	SEKCAM
											Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)		100								
											Predikat kinerja sub kegiatan		Sangat Tinggi								
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	508.898.867	5 (Unit)	9.517.000	3 (Unit)	0	3 (Unit)	9.517.000	3 (Unit)	10.732.000	0 %	0 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	9 (Unit)	19.395.981	2 (Unit)	7.215.000	1 (Unit)	0	1 (Unit)	9.517.000	1 (Unit)	8.430.000	0 %	0 %	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	13 (Unit)	11.633.100	1 (Unit)	2.302.000	1 (Unit)	0	1 (Unit)	2.302.000	1 (Unit)	2.302.000	0 %	0 %	
	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	477.868.786	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)											6,27									
Predikat kinerja sub kegiatan											Sangat Rendah									
Rata-rata kinerja kegiatan (%)											44,9									

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran s/d Tahun (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja kegiatan				Sangat Rendah																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	:	Pembinaan kepada pegawai terjalin secara hirarkis dan rutin Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah sesuai rencana
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	:	Kurangnya sumber daya manusia terutama bidang ITE Jaringan Internet yang kurang memadai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih nol di karena nilai hasil survei baru keluar pada saat TW 4 Indeks Desa Membangun (IDM) masih nol di karena nilai hasil survei baru keluar pada saat TW 3 Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah masih nol di karena nilai hasil reviu baru keluar pada saat TW 3 Pengadaan BMD (Unit) masih nol karena akan ada pengadaan pada saat TW 2 karena menyesuaikan anggaran kas Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya masih nol karena akan ada pengadaan pada saat TW 2 karena menyesuaikan anggaran kas Desa yang menetapkan Perubahan APBDes tepat waktu pada TW 2 dan Desa yang menetapkan APBDes 2025 tepat waktu pada TW
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trisvulan berikutnya•):	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):	:	

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Sasaran Kinerja Kecamatan Jatirogo pada Semester 1 tahun 2025 masih sangat rendah hal dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa dengan indikator Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya dengan target 5,56% belum ada realisasi;
   b. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 91,25 Poin sampai dengan laporan ini dibuat belum ada realisasi terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan tetapi telah dilakukan berbagai upaya untuk perbaikan pelayanan di Kecamatan Jatirogo.
2. Capaian Program sampai dengan Triwulan II dapat disampaian sebagai berikiut:
   a. Program yang mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Indikator Persentase penyelesaian atas perrmohonan pelayanan publik Kecamatan dengan target 100% (Seratus Persen) tercapai 100% (seratus persen) dan indikator Persentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu dengan target 100% (Seratus Persen) dengan capaian 100% (seratus persen); selanjutnya indikator Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti dengan target 100% (seratus persen) tercapai 100% (seratus persen)
   b. Program yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu indikator Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi dengan target 100% (Seratus Persen) tetapi hal ini dikarenakan dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Jatirogo belum ada realis dari Kementrian Desa tentang jumlah Desa yang meningkat nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya. Program selanjutnya yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu indikator Program penunjang Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target 81,5 Poin belum ada realisasi atau 0 Poin dikarenaka belum ada evaluasi SAKIP di Internal Kabupaten Tuban.

3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatirogo Tahun 2025, target kinerja masing-masing kegiatan pada semua program, belum semua kegiatan bisa mencapai dengan hasil/keluaran yang direncanakan, adapun capaian kinerja kegiatan yaitu:
   a. Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen), dengan target kinerja sebanyak 14 Dokumen terealisasi 7 Dokumen;
   b. Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen), dengan target kinerja sebanyak 14 Dokumen terealisasi 4 Dokumen;
   c. Indikator Kegiatan Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang), dengan target kinerja sebanyak 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 Pegawai Non PNS atau 20 Orang terealisasi 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS;
   d. Indikator Kegiatan Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan), dengan target kinerja sebanyak 7 Layanan terealisasi 7 Layanan;
   e. Indikator Kegiatan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) (Unit), dengan target 3 Unit yang terdiri dari 2 unit peralatan dan mesin dan 1 unit bangunan gedung akan tetapi belum ada realisasi atau 0 dikarenakan adanya perubahan regulasi proses pengadaan ;
   f. Indikator Kegiatan Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa), dengan target kinerja 6 Jenis Jasa terealisasi 6 Jenis Jasa ;
   g. Indikator Kegiatan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) (Unit), dengan target kinerja 25 Unit terealisasi 25 Unit;
   h. Indikator Kegitan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan, dengan target kinerja sebanyak 100 Dokumen Perijinan Non Usaha terealisasi 100 Dokumen;
   i. Indikator Kegiatan Jumlah laporan pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti, dengan target kinerja sebanyak 14 laporan teralisasi 14 Laporan;
   j. Indikator Kegiatan Tingkat Kenaikan Desa yang Telah menangani potensi konflik sosial dengan target kinerja 96% tercapai 100%;
   k. Indikator Kegiatan Jumlah Desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu, dengan target kinerja sebanyak 18 Dokumen terealisasi 18 Dokumen;

l. Indikator Kegiatan Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan target kinerja 18 Desa tercapai 18 Desa.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:

1. Koordinasi Internal yang lebih Intensif
2. Sinergitas dengan Instansi dan Desa Se-Kecamatan Jatirogo yang lebih Intensif
3. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Membantu Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:

1. Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dikarenakan belum ada realisasi
2. Nilai Indeks Desa Membangun (IDMI belum ada realisasi
3. Adanya Efisiensi Anggaran sehingga ada sub kegiatan yang belum bisa direalisasikan
4. Adanya Regulasi baru sehingga pengadaan Gedung belum bisa direalisasikan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban pada Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatirogo dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatirogo
Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks ketahanan ekonominya	-	-	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	-66,67	n/a	5,56%	5,56%	
2	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	-	-	n/a	n/a	27,78%	44,4%	16,67%	27,7%	27,78%	44,4%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	90,45 Poin	90 Poin	89,82 Poin	90,37 Poin	89,13 Poin	89,42 Poin	89,82 Poin	90,37 Poin	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	80,50 Poin	82,00 Poin	80,65 Poin	81,16 Poin	80,15 Poin	80,65 Poin	82,00 Poin	80,65 Poin	
5	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	-	-	n/a	4,07 Poin	4,02 Poin	4,11 Poin	4,47 Poin	3,65 Poin	4,02 Poin	4,11 Poin	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Jatirogo adalah sebagai berikut :

1. Pada capaian kinerja poin 1 (satu) meningkatnya tingkat kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya dengan capaian -66,67% meski tidak mencapai target, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman petugas Desa pada saat penginputan IDM;
2. Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Nilai Baik (B/89,42 Poin) kategori baik;
3. Pada capain nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatirogo masih mendapat nilai BB (80,65 Poin);
4. Tercapainya Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Jatirogo dengan nilai (3,65 Poin) mengalami penurunan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jatirogo, menghadapi beberapa isu-isu Masih penting diantaranya sebagai berikut:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik Kecamatan yang lebih baik yaitu masih ada gangguan jaringan Aplikasi Adminduk dan Alat Pelayanan pada Operator Adminduk sehingga menghambat percepatan pelayanan;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana bagi pemohon pelayanan Lansia dan disabilitas (kursi roda, jalan dan kamar mandi yang layak bagi lansia dan disabilitas};
4. Belum adanya wadah yang tetap bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pemasaran Produk Unggulan Desa dan masih terbatasnya Iven-Iven bagi UMKM di Kecamatan Jatirogo;
5. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja, judi, dll) yang belum optimal;
6. Percepatan penurunan angka stunting belum signifikan karena masih kurangnya penerapan pemanfaatan lahan halaman rumah warga sebagai sumber pangan tambahan dengan penanaman sayur-sayuran dan peternakan;
7. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan karena masih kurangnya penerapan pemanfaatan lahan halaman rumah warga sebagai sumber penghasilan tambahan dengan penanaman sayur-sayuran dan peternakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review rancangan awal perubahan RKPD berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, dapat dilihat pada Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban pada lampiran ini.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jatirogo

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Jatirogo	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,5 poin	4.904.576.685	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Jatirogo	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.65 poin	4.747.864.801	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	14 Dokumen	46.153.036	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	41.387.259	-

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	29.733.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.733.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	14 Dokumen	3.357.394.663	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	2.936.548.450	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jatirogo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	3.269.759.663	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jatirogo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ bulan	2.860.113.450	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Koordinasi	3 Dokumen	87.635.000	Koordinasi dan Pelaksanaan	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	4 Dokumen	76.435.000	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Akuntansi SKPD		dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Akuntansi SKPD		Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	1 Jenis	12.696.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	1 Jenis	976.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Jatirogo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	12.696.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Jatirogo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 layanan	351.504.752	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	313.408.008	-

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jatirogo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	255.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jatirogo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	253.785.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jatirogo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.725.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jatirogo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.725.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12 Dokumen	3.132.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12 Dokumen	3.132.000	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	85.847.752	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	49.766.008	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	0 unit	408.341.867	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jenis	486.358.717	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jatirogo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jatirogo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	78.016.850	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Jatirogo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	408.341.867	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Jatirogo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	408.341.867	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	6 jasa	219.587.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	210.287.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	45.119.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	45.119.500	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	174.468.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	165.168.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Pemeliharaan BMD	26 unit	508.898.867	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	758.898.867	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jatirogo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	19.395.981	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jatirogo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	19.395.981	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jatirogo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 unit	11.633.100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jatirogo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	11.633.100	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kec. Jatirogo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	477.869.786	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kec. Jatirogo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	5 unit	727.869.786	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Lainnya		yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Lainnya		Direhabilitasi			
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Jatirogo	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	15.031.500	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Jatirogo	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100%	13.361.500	
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Jatirogo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91,25 Poin	15.031.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Jatirogo	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 jenis	13.361.500	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 dokumen	15.031.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1800 dokumen	13.361.500	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Jatirogo	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	117.678.123	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Jatirogo	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	100 %	113.046.731	
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jatirogo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	100%	117.678.123	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jatirogo	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa pemberdayaan	7 Jenis	113.046.731	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	117.678.123	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	113.046.731	
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatirogo	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	25.142.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatirogo	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	23.012.500	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
10	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Jatirogo	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	12 laporan	25.142.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Jatirogo	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	12 laporan	23.012.500	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	1 laporan	25.142.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jatirogo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	23.012.500	-

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Wilayah Kecamatan								
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Jatirogo	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	97 %	89.763.300	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Jatirogo	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	24.128.340	
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	89.763.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Jatirogo	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Laporan	24.128.340	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jatirogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	89.763.300	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jatirogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	177 Orang	24.128.340	
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jatirogo	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	-%	39.646.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jatirogo	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	57,14 %	38.526.000	

No	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jatirogo	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	- desa	39.646.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jatirogo	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	12 desa	38.526.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	18 Dokumen	39.646.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jatirogo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	38.526.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Jatirogo

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat Kecamatan kemudian ditingkat Kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatirogo akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025:

Tabel 2.4

Usulan Kegiatan Prioritas dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan Jatirogo Tahun 2025

Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, disebutkan bahwa Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdautrat dan berperan penting di dunia Intemasional, Negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun Visi Presiden adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang teruang dalam 8 Misi atau lebih dikenal dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Menetapkan Sitem Perhanan Keamanan Negara yang mendorong kemendirian bangsa, melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra industri melalui koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi melenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat, pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selaras dengan itu Visi Pembangunan PRJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Jawa Timur Maju Yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045" dengan 9 Misi atau Nawa Bhakti Satya yaitu :

1. Jatim Sejatera

   Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu

2. Jatim Kerja

   Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi

3. Jatim Akses

   Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi dengan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan

4. Jatim Cerdas

   Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Pelayanan dan Akses Pendidikan untuk Semua (Education for All) yang Berkualitas, Merata dan Berkeadilan

5. Jatim Sehat

   Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan untuk Semua (Health for All) yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan, serta Sinergis dengan Perwujudan Universal Health Coverage (UHC)

6. Jatim Berkah Amanah

   Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif

7. Jatim Agro

   Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional

8. Jatim Harmoni

Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga

9. Jatim Lestari

Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam RPJMD Kabupaten Tuban mempunyai Visi adalah Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya dan Berkelanjutan. Dengan 4 Misi yaitu :

Misi 1

Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan

Misi 2

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Misi 3

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal

Misi 4

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif

RPJMD Kabupaten Tuban memuat gambaran umum serta evaluasi kinerja layanan pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah (PD). Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan daerah, termasuk tantangan spesifik dalam setiap urusan pemerintahan yang dikelola oleh PD. Renstra PD sendiri berperan sebagai penjabaran teknis dari RPJMD dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan

operasional dalam menetapkan arah kebijakan, program, serta kegiatan di setiap bidang atau fungsi pemerintahan dalam periode perencanaan yang telah ditetapkan. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja dalam satu tahun. Berikut korelasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tuban yang diampu Kecamatan Jatirogo sebagai Perangkat Daerah pada Diagram 3.1 sebagai berikut:

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel berikut.Selain hal-hal prioritas, terdapat pula Program kegiatan rutin pelayanan administrasi. Adapun rincian Perubahan Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Rincian Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	81,5 poin	4.904.576.685		80.65 poin	4.747.864.801
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Kec. Jatirogo	14 Dokumen	46.153.036		8 Dokumen	41.387.259

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.01.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	9 Dokumen	29.733.000		2 Dokumen	29.733.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jatirogo	9 Laporan	16.420.036		6 Laporan	11.654.259
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kec. Jatirogo	14 Dokumen	3.357.394.663		9 Jenis	2.936.548.450

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jatirogo	20 Orang/ bulan	3.269.759.663		18 Orang/ bulan	2.860.113.450
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Jatirogo	3 Dokumen	87.635.000		4 Dokumen	76.435.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Kec. Jatirogo	1 Jenis	12.696.000		1 Jenis	976.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Jatirogo	24 Paket	12.696.000		1 Paket	976.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kec. Jatirogo	6 Layanan	351.504.752		4 Jenis	313.408.008
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Jatirogo	1 paket	255.800.000,		2 paket	253.785.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Jatirogo	1 paket	6.725.000		2 paket	6.725.000
7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Jatirogo	12 dokumen	3.132.000		12 dokumen	3.132.000,
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jatirogo	15 laporan	85.847.752		50 laporan	49.766.008

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	Kec. Jatirogo	-	408.341.867		1 Jenis	486.358.717
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Jatirogo	-	0		23 unit	78.016.850
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Jatirogo	10	408.341.867		10	408.341.867

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	Kec. Jatirogo	6 jasa	219.587.500		2 Jenis	219.587.500
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Jatirogo	3 laporan	45.119.500		12 laporan	45.119.500
7.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Jatirogo	2 laporan	174.468.000		12 laporan	174.468.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	Kec. Jatirogo	26 unit	531.029.067		3 Jenis	508.898.867
7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Jatirogo	9 unit	19.395.981		14 unit	19.395.981
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Jatirogo	13 unit	11.633.100		9 unit	11.633.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Jatirogo	4 unit	499.999.986		5 unit	477.869.786
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	Kec. Jatirogo	100%	15.031.500		100%	15.031.500
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	Kec. Jatirogo	91,25 Poin	15.031.500		1 jenis	15.031.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Jatirogo	3 dokumen	15.031.500		1800 dokumen	15.031.500
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Kec. Jatirogo	100%	117.968.123		100 %	117.678.123
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Jatirogo	100%	117.968.123		7 Jenis	117.678.123

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jatirogo	18 Laporan	117.968.123		18 Laporan	117.678.123
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Kec. Jatirogo	100%	25.142.000		100%	25.142.000
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Jatirogo	12 laporan	25.142.000		12 laporan	25.142.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jatirogo	1 laporan	25.142.000		12 laporan	25.142.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Kec. Jatirogo	97%	89.763.300		100%	89.763.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatirogo	1 Laporan	89.763.300		12 Laporan	89.763.300
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jatirogo	40 Orang	89.763.300		177 Orang	89.763.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	Kec. Jatirogo	-	39.646.000		57,14%	39.646.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jatirogo	-	39.646.000		12 laporan	39.646.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Kerja APBD Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Kerja PRKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jatirogo	18 Dokumen	39.646.000		18 Dokumen	39.646.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 merupakan dokumen perencaan yang berisi penyesuaian target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan dan merupakan bagian dari proses yang tidak dapat dipisahkan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatirogo ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan sarana untuk mewujudkan sasaran dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tuban. Adapun kaidah pelaksanaan Perubahan Renja 2025 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025 sehingga bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran (DPPA).
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatirogo Tahun 2025 ini untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen untuk untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dibangun komitmen bersama dan didukung oleh seluruh pihak, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah, serta komponen masyarakat agar lebih konsisten dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Untuk itu setiap Kepala Seksi dan Sekretaris berkewajiban menyampaikan laporan

kinerja pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi tanggungjawabnya setiap Triwulan kepada Camat.

Besar harapan kami agar dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pihak terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Jatirogo. Perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menjalan kinerja yang lebih baik.

CAMAT JATIROGO
KABUPATEN TUBAN

ttd

SUHERMAN

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Scanned with OKEN Scanner

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 JUli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN BANGILAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangilan Tahun 2025 dengan acuan dalam penyusunannya adalah draft Renstra Kecamatan Bangilan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Adanya kebijakan-kebijakan Pusat/Provinsi yang tidak sama dengan awal tahun perencanaan serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Perubahan RKPD yang tertuang dalam Peraturan Bupati.

Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalu asi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 Perangkat Daerah harus segera menindaklanjutinya dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk proses penganggaran dan pelaksanan kegiatan pembangunan berikutnya. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD. Dokumen Perubahan RKPD paling sedikit memuat analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah. Rencana kerja dan pendanaan tersebut mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan. Lokasi kegiatan, kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

Perubahan yang dilakukan di Kecamatan Bangilan dilakukan karena adanya dana *Top Down*, pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran kegiatan pada kegiatan yang estimasinya tidak optimal dalam penyerapan pada akhir tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud:

1. Merumuskan kembali perubahan rencana kerja Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban untuk Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II Tahun 2025, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tuban secara umum serta tujuan dan sasaran Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban secara khusus dapat tercapai.
2. Memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
3. Merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bangilan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA)-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Kecamatan Bangilan dalam jangka 1 tahun;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangilan Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Surat Keputusan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang menggambarkan alur atau urutan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan terdapat beberapa subbab yakni Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025, dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ll Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menguraikan tentang penjabaran evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Daerah Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Daerah Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang penjabaran sistem pelayanan pada Kecamatan Bangilan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Bangilan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan tentang Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisi tentang isu penting yang terjadi di wilayah Kecamatan Bangilan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan tentang Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2024 berisi tentang uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah porses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisi tentang usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Bangilan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bangilan berisi tentang uraian program sampai dengan sub bagian kegiatan pada Kecamatan Bangilan beserta sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Penutup merupakan Kesimpulan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKANAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bangilan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kewilayahan, pada Tahun 2025 Kecamatan Bangilan melaksanakan 6 (enam) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan, 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
      1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
      2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
      3) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
      4) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2) Saub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:
a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan:
a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum:
a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah.
      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
   a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
      2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
      3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bangilan Tahun Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tuban
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bangilan Kabupaten/Kota Tuban
Periode Pelaksanaan: Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	96,88 Poin	14.030.197.743	88,55 Poin	8.256.560.602	94,17 Poin	4.212.913.325	0 Poin	718.669.946	0 Poin	786.470.281	0 Poin	1.505.140.227	0 Poin	9.987.820.30	0%	71.19 %	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 Poin	12.758.011.680	76.1 Poin	7.389.636.062	81.5 Poin	4.024.130.725	0 Poin	697.816.946	0 Poin	751.197.281	0 Poin	1.449.014.227	0 Poin	9.053.349.764	0%	70.96 %	Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengangaraan, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	90.981.500	9 Dokumen	89.544.500	9 Dokumen	41.621.000	5 Dokumen	3.827.000	7 Dokumen	10.093.000	7 Dokumen	13.920.00	7 Dokumen	106.971.500	77.78 %	117.58 %	Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	2 Dokumen	60.981.500	2 Dokumen	49.850.000	2 Dokumen	29.996.000	2 Dokumen	2.707.000	2 Dokumen	9.068.000	2 Dokumen	11.775.000	2 Dokumen	62.732.000	100 %	102.87 %	Ka Subag Program dan Pelaporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun (Dokumen)	7 Dokumen	30.000.000	7 Dokumen	39.694.500	7 Dokumen	11.625.000	3 Dokumen	1.120.000	5 Dokumen	1.025.000	5 Dokumen	2.145.000	5 Dokumen	44.239.500	71,42 %	147.47 %	Ka Subag Program dan Pelaporan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								85,71												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Tinggi												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	11.293.119.680	9 Dokumen	6.835.816.037	9 Dokumen	3.269.977.115	9 Dokumen	607.363.803	9 Dokumen	664.354.113	9 Dokumen	1.271.717.916	9 Dokumen	8.299.296.316	100 %	73.49%	Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	20 orang	10.987.319.680	18 orang	6.652.501.537	22 orang	3.195.997.115	18 orang	596.823.803	18 orang	655.971.613	18 orang	1.252.795.416	18 orang	8.079.748.816	90 %	73.54%	Ka Subag Umum
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	9 Dokumen	38.000.000	9 Dokumen	13.317.000	9 Dokumen	3.780.000	9 Dokumen	0	9 Dokumen	1.822.500	9 Dokumen	1.822.500	9 Dokumen	15.139.500	100 %	39.84%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Dokumen	267.800.000	9 Dokumen	169.997.500	9 Dokumen	70.200.000	9 Dokumen	10.540.000	9 Dokumen	6.560.000	9 Dokumen	17.100.000	9 Dokumen	204.408.000	100 %	76,33%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								93,94												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Sangat Tinggi												
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	25 Orang	217.275.000	23 Orang	86.576.170	23 Orang	33.982.000	23 Orang	2.240.000	23 Orang	4.161.500	23 Orang	6.401.500	23 Orang	92.977.670	92 %	42.79%	Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	19.250.000	23 Orang	11.025.000	23 Orang	4.960.000	23 Orang	0	23 Orang	0	23 Orang	0	23 Orang	11.025.000	92 %	57.27%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Bimbing-an Teknis Implementasi Peraturan Perun-dang-Undang-an			Sosialisa-si Peraturan Perun-dang-Undang-an	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisa-si	25 Orang	41,500	25 Orang	19.653	25 Orang	7.915	23 Orang	2.240	23 Orang	729	23 Orang	2.969	23 Orang	22.622	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	40.000	25 Paket	20.400	23 Paket	12.167	23 Paket	0	23 Paket	0	23 Paket	0	23 Paket	20.400	92 %	51%	Ka Subag Umum
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								75												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Sedang												

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 layanan	223,730	7 layanan	332.579	7 layanan	154.926	7 layanan	33.840	7 layanan	26.556	7 layanan	60.397	7 layanan	406.052	100 %	181.49%	Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.000.000	1 paket	8.985.000	1 paket	2.996.796	1 paket	1.204.000	1 paket	0	1 paket	1.204.000	1 paket	10.985.000	25 %	73,23%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	33.000.000	3 paket	136.745.373	3 paket	32.182.415	3 paket	15.481.000	3 paket	2.035.000	3 paket	17.516.000	3 paket	160.741.373	100	487,1%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	123.805.500	2 paket	73.812.000	2 paket	25.294.610	2 paket	6.211.500	2 paket	10.093.500	2 paket	16.305.000	2 paket	90.117.000	100 %	72,79%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	21.000.000	2 paket	12.598.000	2 paket	38.529.275	2 paket	960.000	2 paket	9.085.000	2 paket	10.045.000	2 paket	27.443.000	100 %	130.68%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.100.000	2 Dokumen	4.410.000	1 Dokumen	1.566.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	783.000	1 Dokumen	783.000	1 Dokumen	5.193.000	50 %	64.11%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	22.825.000	6 laporan	96.029.000	10 laporan	54.357.845	2 laporan	9.984.000	54 laporan	4.560.000	54 laporan	14.544.000	54 laporan	111.573.000	270 %	488,82%	Ka Subag Umum
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Sangat Tinggi												

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	1 Unit	75.069.250	9 Unit	70.390.000	3 Unit	318.600.679	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	70.390.000	0%	93.77 %	Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.069.250	9 Unit	70.390.000	2 Unit	18.645.679	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	70.390.000	0%	93,77%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	299.955.000	0 Unit	0	1 Unit	299.955.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0%	0%	Ka Subag Umum
Rata- rata capaian kinerja Sub Kegiatan								0												
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								Sangat Tendah												

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jasa	715.585.000	4 Jasa	420.505.881	4 Jasa	172.674.896	4 Jasa	39.535.643	4 Jasa	41.113.168	4 Jasa	80.648.811	4 Jasa	506.508.804	100 %	70,78%	Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	14.100.000	1 laporan	6.313.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	0	1 laporan	1.080.000	1 laporan	1.080.000	1 laporan	7.393.000	20 %	52,43%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	194.985.000	3 laporan	98.650.181	3 laporann	42.091.696	3 laporan	8.030.403	3 laporan	8.822.008	3 laporan	16.852.411	3 laporan	115.502.592	100 %	59,23%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	506.500.000	3 laporan	315.542.700	2 laporan	128.583.200	2 laporan	31.505.240	2 laporan	31.211.160	2 laporan	62.716.400	2 laporan	383.613.212	66.67 %	75,74%	Ka Subag Umum
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Tinggi												

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Pemeliha-raan Barang Milik Daerah Penun-jang Urusan Pemerin-tahan Daerah	Jumlah Pemeliha-raan BMD (Unit)	24 Unit	142.250.750	25 Unit	96.780.000	25 Unit	32.348.094	25 Unit	11.010.000	25 Unit	4.919.000	25 Unit	15.929.000	25 Unit	113.709.000	104.17 %	79.94%	Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	77.675.000	12 Unit	60.248.800	12 Unit	20.592.952	12 Unit	6.000.000	12 Unit	3.115.000	12 Unit	9.115.000	12 Unit	70.363.800	109.09 %	90.59%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Pemeliha-raan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliha-ra (Unit)	9 Unit	38.175.750	9 Unit	29.068.000	9 Unit	6.859.602	9 Unit	2.490.000	9 Unit	1.804.000	9 Unit	4.294.000	9 Unit	33.362.000	100 %	87,39%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	26.400.000	4 Unit	51.517.500	4 Unit	4.895.540	4 Unit	2.520.000	4 Unit	0	4 Unit	2.520.000	4 Unit	54.037.500	100 %	204.69%	Ka Subag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Sangat Tinggi												
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)								82,54												
Predikat kinerja Kegiatan								Tinggi												
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas permohonan Pelayanan Publik Kecamatan	100 %	93.934.661	100 %	93.022.500	100 %	19.041.200	100 %	2.113.000	100 %	5.120.000	100 %	7.233.000	100 %	102.125.500	100 %	108.72 %	Camat Bangilan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerin-tahan yang Dilimpah kan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksana -kan	20 Do-ku-men	93.934.661	4 Do-ku-men	93.022.500	100 Do-ku-men	19.041.200	785 Do-ku-men	2.113.000	562 Do-ku-men	5.120.000	562 Do-ku-men	7.233.000	562 Do-ku-men	102.125.500	2.8 100 %	107,7%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Pelaksanaan Urusan Pemerin-tahan yang Terkait dengan Pelayan-an Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksana-kan	20 Do-ku-men	93.934.661	4 Do-ku-men	93.022.500	100 Do-ku-men	19.041.200	785 Do-ku-men	2.113.000	562 Do-ku-men	5.120.000	562 Do-ku-men	7.233.000	566 Do-ku-men	102.125.500	2.8 100 %	107,7%	Kasi Pelayanan Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Sangat Tinggi												
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Kegiatan								Sangat Tinggi												

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	523.912.495	100 %	121.313.000	100 %	23.156.400	100 %	4.320.000	100 %	4.511.400	100 %	8.831.400	100 %	134.344.400	100 %	25.64%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	14 laporan	523.912.495	14 laporan	121.313.000	14 laporan	23.156.400	14 laporan	4.320.000	14 laporan	4.511.400	14 laporan	8.831.400	28 laporan	134.344.400	100 %	25.64%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Sinergitas dengan Kepolisi-an Negara Republik Indonesi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama-tan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama-tan	14 la-po-ran	523. 912. 495	14 la-po-ran	121. 313. 000	14 la-po-ran	23.1 56.4 00	14 la-po-ran	4.32 0.00 0	14 la-po-ran	4.51 1.40 0	14 la-po-ran	8.83 1.40 0	28 la-po-ran	134. 344. 400	100 %	25.6 4%	Kasi Keten-traman dan Keterti-ban

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Sangat Tinggi												
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Kegiatan								Sangat Tinggi												

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah ditangani	100 %	115.752.503	100 %	316.073.990	100 %	23.094.800	100 %	0	100 %	3.570.000	100 %	3.570.000	100 %	322.543.990	100 %	278.65%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerin-tahan Umum Sesuai Penugas-an Kepala Daerah	Tingkat Kenaikan Desa yang Telah menangani potensi konflik sosial	100 %	115.752.503	366.67 %	316.073.990	98 %	23.094.800	20%	0	20 %	3.570.000	100 %	3.570.000	100 %	322.543.990	100 %	278.65%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Faslitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Faslitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15 Orang	115.752.503	300 Orang	316.073.990	3 Orang	23.094.800	80 Orang	0	120 Orang	3.570.000	120 Orang	3.570.000	120 Orang	322.543.990	400 0%	278.65%	Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Sangat Tinggi												
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)								20,41%												
Predikat kinerja Kegiatan								Sangat Rendah												

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	553.911.489	100 %	336.515.050	100 %	123.490.200	100 %	14.420.000	100 %	22.071.600	100 %	36.491.600	100 %	375.456.650	100 %	67.78%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	14 Desa	553.911.489	14 Desa	336.515.050	14 Desa	123.490.200	14 Desa	14.420.000	14 Desa	22.071.600	14 Desa	36.491.600	14 Desa	375.456.650	100 %	67.78%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaya-gunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilita-si dalam rangka Pengelola an Keuangan Desa dan Pendaya-gunaan Aset Desa	14 La-po-ran	215. 511. 489	14 La-po-ran	113. 831. 000	14 La-po-ran	39.3 41.4 00	14 La-po-ran	5.91 0.00 0	14 La-po-ran	9.75 7.00 0	14 La-po-ran	15.6 67.0 00	14 La-po-ran	131. 548. 000	100 %	61.0 4%	Kasi Peme-rinta-han

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	14 Laporan	62.400.000	14 Laporan	31.539.300	14 Laporan	15.546.400	14 Laporan	2.310.000	14 Laporan	4.791.600	14 Laporan	7.101.600	14 Laporan	39.040.900	100 %	62.57%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteram-an dan Ketertib-an Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelengga-raan Ketenteraman dan Ketertib-an umum	12 Do-ku-men	276.000.000	12 Do-ku-men	191.144.750	12 Do-ku-men	68.602.400	12 Do-ku-men	6.200.000	12 Do-ku-men	7.523.000	12 Do-ku-men	13.723.000	12 Do-ku-men	204.867.750	100 %	74.23%	Kasi Kesejahteraan Masya-rakat
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Sub Kegiatan								Sangat Tinggi												

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)								100												
Predikat kinerja Kegiatan								Sangat Tinggi												
Rata-rata capaian kinerja Program (%)								0												
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah												
1	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa		Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya	7,14%	505.025.063	-50%	339.480.600	7,14%	108.171.690	0%	37.350.000	0%	16.962.500	0%	54.312.500	0%	393.793.100	0%	77.97%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurah-an	Persenta-se desa dengan Peningkatan Nilai Ketahan-an Ekonomi	100 %	505.025.063	57,14 %	339.480.600	100 %	108.171.690	0%	37.350.000	0%	16.962.500	0%	54.312.500	0%	393.793.100	0%	77.97%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 Desa	505.025.063	14 Desa	339.480.600	14 Desa	108.171.690	14 Desa	37.350.000	14 Desa	16.962.500	14 Desa	54.312.500	14 Desa	393.793.100	100 %	77.97%	Camat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	K	Rp.)	K	Rp.	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	505.025.063	14 Laporan	339.480.600	14 Laporan	108.171.690	14 Laporan	37.350	14 Laporan	16.962.500	14 Laporan	54.312.500	14 Laporan	393.793.100	100 %	77.97%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)	100										
Predikat kinerja Sub Kegiatan	Sangat Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100										
Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja Program (%)	0										
Predikat kinerja Program	Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)	0										
Predikat kinerja Sasaran	Sangat Rendah										
Total Rata-rata capaian kinerja tujuan (%)	0										
Predikat kinerja tujuan	Sangat Rendah										
Total Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	0										
Predikat kinerja sasaran	Sangat Rendah										
Total Rata-rata capaian kinerja Program (%)	66,67										
Predikat kinerja Program	Sedang										
Total Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	83,18										
Predikat kinerja Kegiatan	Tinggi										
Total Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)	88,44										
Predikat kinerja Sub Kegiatan	Tinggi										

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:

1. Koordinasi Internal yang lebih Intensif
2. Sinergitas dengan Instansi dan Desa Se-Kecamatan Bangilan yang lebih Intensif
3. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Membantu Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:

1. Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dikarenakan belum ada realisasi
2. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) belum ada realisasi
3. Adanya Efisiensi Anggaran sehingga ada sub kegiatan yang belum bisa direalisasikan
4. Adanya Regulasi baru sehingga pengadaan Gedung belum bisa direalisasikan

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bangilan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Sasaran Kinerja Kecamatan Bangilan pada Semester 1 tahun 2025 masih sangat rendah hal dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa dengan indikator Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya dengan target 7,14% belum ada realisasi;
   b. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 94,17 Poin sampai dengan laporan ini dibuat belum ada realisasi terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan tetapi telah dilakukan berbagai upaya untuk perbaikan pelayanan di Kecamatan Bangilan.
2. Capaian Program sampai dengan Triwulan II dapat disampaian sebagai berikiut:
   a. Program yang mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Indikator Persentase penyelesaian atas perrmohonan pelayanan publik Kecamatan dengan target 100% (Seratus Persen) tercapai 100% (seratus persen) dan indikator Persentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu dengan target 100% (Seratus Persen) dengan capaian 100% (seratus persen); selanjutnya indikator Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti dengan target 100% (seratus persen) tercapai 100% (seratus persen)

b. Program yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu indikator Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi dengan target 100% (Seratus Persen) tetapi hal ini dikarenakan dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Bangilan belum ada realis dari Kementrian Desa tentang jumlah Desa yang meningkat nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya. Program selanjutnya yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu indikator Program penunjang Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target 81,5 Poin belum ada realisasi atau 0 Poin dikarenaka belum ada evaluasi SAKIP di Internal Kabupaten Tuban.

3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bangilan Tahun 2025, target kinerja masing-masing kegiatan pada semua program, belum semua kegiatan bisa mencapai dengan hasil/keluaran yang direncanakan, adapun capaian kinerja kegiatan yaitu:
   a. Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen), dengan target kinerja sebanyak 9 Dokumen terealisasi 7 Dokumen;
   b. Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen), dengan target kinerja sebanyak 9 Dokumen terealisasi 9 Dokumen;
   c. Indikator Kegiatan Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang), dengan target kinerja sebanyak 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 Pegawai Non PNS atau 23 Orang terealisasi 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS;
   d. Indikator Kegiatan Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan), dengan target kinerja sebanyak 7 Layanan terealisasi 7 Layanan;
   e. Indikator Kegiatan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) (Unit), dengan target 3 Unit yang terdiri dari 2 unit peralatan dan mesin dan 1 unit bangunan gedung akan tetapi belum ada realisasi atau 0 dikarenakan adanya perubahan regulasi proses pengadaan ;
   f. Indikator Kegiatan Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa), dengan target kinerja 4 Jenis Jasa terealisasi 4 Jenis Jasa ;
   g. Indikator Kegiatan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) (Unit), dengan target kinerja 25 Unit terealisasi 25 Unit;
   h. Indikator Kegitan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan, dengan target kinerja sebanyak 100 Dokumen Perijinan Non Usaha terealisasi 100 Dokumen;

i. Indikator Kegiatan Jumlah laporan pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti, dengan target kinerja sebanyak 14 laporan teralisasi 14 Laporan;
j. Indikator Kegiatan Tingkat Kenaikan Desa yang Telah menangani potensi konflik sosial dengan target kinerja 96% tercapai 100%;
k. Indikator Kegiatan Jumlah Desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu, dengan target kinerja sebanyak 14 Dokumen terealisasi 14 Dokumen;
l. Indikator Kegiatan Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan target kinerja 14 Desa tercapai 14 Desa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan Fungsi Penunjang Daerah bidang Pemerintahan dan menjalankan Visi dan Misi Kabupaten Tuban Kecamatan Bangilan mempunyai peran strategis dalam pelayanan publik khususnya di tingkat wilayah. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dan perbaikan pelayanan kedepan dilakukan analisis terhadap capaian indikator pelayanan.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan *(Input)*, Keluaran *(output)*, Hasil *(outcomes)*, manfaat *(benefit),* dan dampak *(impact).* Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi	-	-	100%	100%	100%	100%	57,14%	28,57%	100%	100%	
2.	Persentase penyelesaian atas perrmohonan pelaayaanan publik Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	-	-	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	-	-	90%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	80,50 Poin	81,00 Poin	76,80 Poin	77,50 Poin	75,6 Poin	76,1 Poin	76,80 Poin	77,50 Poin	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 6 indikator kinerja program yang dilaksanakan, 4 indikator sudah mencapai target 100% dan ada 2 indikator yang belum dapat mencapai target adapun indikator tersebut adalah:

1. Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi dengan target 100% tetapi capaian pada tahun 2024 adalah 28,57% hal ini merpakan tantangan yang berat karena dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Bangilan 4 Desa yang meningkat Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya sedang 10 Desa lainnya dengan nilai tetap. Kedepan sangat diperlukan stimulus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat malalui keragaman produksi masyarakat di budang UMKM, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, keterbukaan wilayah.
2. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah capaiannya adalah 76,10 Poin sedang targetnya adala 81,00 Poin belum melampaui target yang ditetapkan hal ini yang belum terpenuhi dan untuk dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan, penambahan sasaran pada level kegiatan, pembenahan dokumen kinerja dan evaluasi dan laporan kinerja seluruh pegawai pada Kecamatan Bangilan

Adapun reviu terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bangilan tahun 2024 telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangilan Tahun 2021–2026. Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, Kecamatan Bangilan melaksanakan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 91,37%, menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan yang relatif efisien dan akuntabel.

Secara umum, pelaksanaan Renja Tahun 2024 difokuskan pada dua sasaran strategis utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat desa.

1. Sasaran I – Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa
   Indikator: Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya (IKE)
   - Target Tahun 2024: 7,14%
   - Realisasi: -50% (atau setara -700,28% terhadap target)

- Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah desa yang mengalami peningkatan IKE dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023 terdapat 8 desa yang mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2024 hanya 4 desa yang menunjukkan kemajuan.
- Faktor penghambat antara lain keterbatasan infrastruktur ekonomi, belum optimalnya peran BUMDes, minimnya inovasi potensi lokal, serta masih terbatasnya akses pemasaran produk unggulan desa.

2. Sasaran II – Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat
   Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   - Target Tahun 2024: 91,46 poin
   - Realisasi: 88,55 poin (96,82% capaian)
   - Capaian IKM menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 (87,33 poin) dan berada pada kategori 'Sangat Baik (Nilai Mutu A)'. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bangilan telah meningkat walaupun belum mencapai target yang ditetapkan.
   - Faktor pendukung keberhasilan meliputi peningkatan koordinasi antar-unit pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Adapun kendala utama mencakup keterbatasan sarana prasarana pelayanan, gangguan jaringan SIPD, dan masih terbatasnya ruang pelayanan yang representatif.

Berdasarkan hasil reviu terhadap pelaksanaan Renja 2024, beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi koordinasi dan sinergi antara kecamatan dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik untuk mendukung peningkatan IKM;
- Penguatan tata kelola data dan pelaporan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD;
- Pengembangan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan;
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan intensif;

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Kecamatan Bangilan menargetkan peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik melalui 6 (enam) program dan 30 (tiga puluh) subkegiatan. Fokus pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperluas pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi lokal.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun 2025 Kecamatan Bangilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Analisis Singkat 2024	Perkiraan Capaian 2025	Keterangan/Upaya Tindak Lanjut 2025
1	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Meningkat IKE	7,14%	-50%	-700,28%	Penurunan desa yang meningkat IKE, BUMDes belum optimal	+1,5%	Penguatan BUMDes dan ekonomi lokal
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,46	88,55	96,82%	Kualitas pelayanan meningkat, namun target belum tercapai	94,17	Peningkatan sarpras dan layanan digital
3	Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai AKIP Kecamatan	82	76,1	92,8%	Kinerja cukup baik, perlu peningkatan evaluasi	83	Penguatan sistem pelaporan dan monev
4	Efisiensi Pelaksanaan Program	Realisasi Anggaran	100%	91,37%	91,37%	Serapan cukup baik, dominan di Triwulan IV	≥92%	Perataan serapan anggaran per triwulan

Tabel 2.4
Ringkasan Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Evaluasi Renja 2024

Aspek yang Dievaluasi	Permasalahan yang Ditemui Tahun 2024	Rekomendasi Perbaikan / Arah Kebijakan Tahun 2025
Perencanaan dan Penganggaran	Sinkronisasi usulan masyarakat dengan prioritas daerah masih terbatas	Peningkatan koordinasi musrenbang dan sinkronisasi dengan RKPD
Pelayanan Publik	Sarana dan prasarana layanan belum memadai	Pengadaan sarana pendukung layanan dan penguatan inovasi digital
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peran BUMDes belum optimal	Pelatihan pengelolaan BUMDes dan fasilitasi kerja sama antar-desa
Akuntabilitas dan Pelaporan	Kendala penggunaan aplikasi SIPD	Pelatihan SDM dan monitoring pelaporan berkala
Sumber Daya Aparatur	Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai	Pelatihan pelayanan publik dan rotasi berbasis kompetensi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangilan Tahun 2025, terdapat beberapa isu penting yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Isu-isu ini menjadi perhatian strategis karena memberikan dampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tuban, serta berpengaruh terhadap sinkronisasi pelaksanaan program nasional dan internasional seperti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Adapun isu-isu penting dimaksud serta dampaknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

   Jumlah dan kompetensi aparatur Kecamatan Bangilan saat ini belum sebanding dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, terutama dalam pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan, pembinaan desa, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Keterbatasan ini menyebabkan pelaksanaan tugas pemerintahan belum optimal dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Dari sisi SPM kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang administrasi pemerintahan. Sedangkan terhadap SDGs, isu ini berdampak pada pencapaian Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Tujuan 16 Institusi yang Kuat, Damai, dan Inklusif.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan

   Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Bangilan masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas secara efisien. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan masih rendah.

   Dampaknya terhadap visi dan misi Kepala Daerah adalah terhambatnya pencapaian misi peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini memengaruhi pemenuhan standar minimal pelayanan pemerintahan dan ketenteraman umum. Sementara terhadap SDGs, isu ini berkaitan dengan Tujuan 9 Infrastruktur, Inovasi, dan Teknologi.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

   Pemanfaatan sistem informasi pemerintahan seperti SIPD, aplikasi digital pelayanan publik, dan sistem pelaporan berbasis daring belum berjalan optimal karena masih terbatasnya kemampuan aparatur dalam mengelola teknologi informasi. Hal ini menyebabkan proses administrasi dan pelaporan belum efisien serta menghambat inovasi pelayanan publik. Hal ini berdampak terhambatnya pencapaian tata kelola pemerintahan berbasis digital dan transparan. kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam penerapan e-Government. Sementara terhadap SDGs, isu ini berhubungan dengan Tujuan 9 Infrastruktur, Inovasi, dan Teknologi.

4. Koordinasi dan Sinergitas Antar Lembaga yang Belum Optimal

   Koordinasi antara kecamatan dengan perangkat daerah lain, pemerintah desa, dan lembaga vertikal belum berjalan secara maksimal. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah juga masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini belum optimalnya misi pembangunan yang bersifat kolaboratif dan partisipatif. Lemahnya sinergitas antar lembaga berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan dasar. Sedangkan terhadap SDGs, isu ini berpengaruh pada Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, dan Tujuan 17 Kemitraan untuk Tujuan.

5. Keterbatasan Kapasitas Fiskal dan Anggaran Kecamatan
   Sebagian besar alokasi anggaran Kecamatan Bangilan masih digunakan untuk kegiatan rutin sehingga ruang fiskal untuk inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan strategis lainnya masih terbatas. Hal ini menyebabkan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dampaknya terhadap pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah adalah belum optimalnya pelaksanaan misi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
   Keterbatasan anggaran berpengaruh pada kemampuan daerah dalam memenuhi standar pelayanan dasar secara menyeluruh. Sementara terhadap SDGs, isu ini berkaitan dengan Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan dan Tujuan 16 Institusi yang Kuat dan Efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bangilan perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut strategis, terutama melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penataan prioritas anggaran yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyelesaian terhadap isu-isu tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi Kecamatan Bangilan dalam pencapaian **visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah serta mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat lokal.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan Bangilan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Jumlah pegawai Kecamatan Bangilan hanya 17 orang dari kebutuhan 26 pegawai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan. Kompetensi dan pemahaman terhadap teknologi informasi juga belum merata.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan
   Fasilitas ruang pelayanan belum representatif, sarana pendukung seperti sistem antrian, arsip, dan jaringan internet masih terbatas sehingga pelayanan belum optimal.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pelaksanaan sistem pelaporan berbasis web sering terkendala jaringan dan keterampilan SDM, menyebabkan keterlambatan pelaporan serta belum efisiennya layanan digital.

4. Koordinasi dan Sinergitas yang Masih Lemah
   Koordinasi antar unit pelayanan serta antara kecamatan dengan pemerintah desa belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan dan penanganan masalah desa belum maksimal.
5. Keterbatasan Anggaran
   Sebagian besar anggaran masih terserap pada kegiatan rutin, sementara anggaran inovasi pelayanan dan penguatan kapasitas aparatur masih terbatas.
6. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
   Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dan dukungan terhadap inovasi layanan masih rendah, sehingga pelayanan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan Bangilan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Nasional
   Adanya kebijakan Bupati Tuban yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pemerintahan berbasis teknologi menjadi peluang strategis untuk percepatan peningkatan kinerja pelayanan di tingkat kecamatan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan
   Kemajuan teknologi informasi dan dukungan sistem seperti SIPD, Tuban Satu Data, serta potensi pengembangan smart service membuka peluang transformasi layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
3. Sinergitas Program Pemberdayaan Desa
   Program pemberdayaan desa dan penguatan BUMDes di tingkat kabupaten membuka ruang sinergi antara kecamatan dan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pelayanan publik.
4. Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis
   Program peningkatan kapasitas ASN melalui diklat, pelatihan, dan bimtek menjadi peluang memperbaiki kinerja aparatur serta meningkatkan profesionalitas pelayanan.

5. Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat

Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana, serta partisipasi dalam inovasi pelayanan, menjadi peluang untuk memperluas jangkauan layanan dengan pembiayaan yang lebih efisien.

6. Pengembangan Inovasi Pelayanan Jemput Bola
   Program pelayanan keliling ke desa-desa (jemput bola) yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut evaluasi Renja 2024 menjadi peluang mempercepat akses pelayanan masyarakat bagi masyarakat yang terkendala mobilisasi seperti lansia, difabel dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Sebagai tindak lanjut atas tantangan dan peluang tersebut, Kecamatan Bangilan menetapkan arah kebijakan strategis pelayanan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan publik.
3. Penguatan tata kelola data dan pelaporan berbasis sistem digital (SIPD, Tuban Satu Data, Simanisku, Siteman).
4. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.
5. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencangkup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

Isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan. Dimana, isu strategis terkait dengan kristalisasi permasalahan masalah di Kabupaten Tuban diperoleh sejumlah kluster atau klasifikasi maka permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bangilan tidak lepas dari permasalahan makro daerah Kabupaten Tuban yaitu:

1. Sumber Daya Manusia :
   Kulitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan

2. Kemiskinan:

Kemiskinan relatif tinggi meski telah menurun, namunkemiskinan di Kabupaten Tuban masih berada di atas angka kemiskinan Jawa Timur dan Nasional

3. Ekonomi:
   Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban berfruktuatif dan cenderung lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun Nasional
4. Ketimpangan:
   Ketimpangan pendapatan berkategori “Sedang”
5. Pengangguran:
   Pengangguran masih menjadi masalah di Kabupaten Tuban meskipun angkanya lebih rendah dari Jawa Timur dan Nasional
6. Lingkungan:
   Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tuban masih berada di bawah Jawa Timur dan Nasional
7. Tata Kelola:
   Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang inovatif perlu ditingkatkan
8. Kebencanaan
   Indeks Risiko Bencana yang lebih tinggi dari Jawa Timur meskipun telah menurun

Dari persalahan di atas dirangkum menjadi isu – isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi inklusif
2. Peningkatan perlindungan sosial untuk percepatan penurunan tingkat kemiskinan
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui perbaikan Infrastruktur dan perluasan akses pendidikan dan kesehatan
4. Penikatan kualitas dan konektivitas infrastruktur kewilayahan
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berbasis ICT

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. Program Makanan Gizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi Daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perkonomian daerah;
6. Dukungan Swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM.

Sehingga tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tuban di tahun 2025 sebagai berikut: “Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Inklusif Berkelanjutan Melalui Pemantapan Daya Saing Daerah Berbsis Sumber Daya Manusia Unggul Serta Potensi Sektor Strategis".

2.4 Review terhadap rancangan RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan. Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Kecamatan Bangilan selalu melakukan analisis kebutuhan yang meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Kecamatan Bangilan. Untuk lebih jelasnya tentang reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan analisa kebutuhan pada Kecamatan Bangilan dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Bangilan	Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi	100%	123.490.200	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	57,14%	65.749.000
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bangilan	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi Pemberdaya-an Desa	14 Desa	123.490.200	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Laporan	65.749.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bangilan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya-an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Lapor-an	123.490.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Lapor-an	65.749.000
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Bangilan	Persentase penyelesaian atas perrmohonan pelayanan publik Kecamatan	100%	19.041.200	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100%	14.126.700

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bangilan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Doku-men	19.041.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan	1 Jenis	14.126.700
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bangilan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Doku-men	19.041.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksana-kan	4000 Doku-men	14.126.700

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bangilan	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	23.156.400	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	100%	17.876.400
3.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bangilan	Jumlah laporan pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	14 laporan	23.156.400	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelengga-raan ketentraman dan ketertiban umum	12 lapo-ran	17.876.400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bangilan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 laporan	23.156.400	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 lapo-ran	17.876.400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Bangilan	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	23.094.800	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintah-an umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	15.414.800
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bangilan	Tingkat Kenaikan Desa yang telah menangani potensi konflik sosial	98%	23.094.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelengga-raan Urusan Pemerintah-an Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	12 Lapor-an	15.414.800

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bangilan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 orang	23.094.800	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	15.414.800

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bangilan	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	123.490.200	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100%	65.749.000
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bangilan	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	14 Desa	123.490.200	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah-an Desa	12 Laporam	65.749.000
5.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bangilan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Doku-men	39.341.400	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Doku-men	28.217.900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bangilan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	14 laporan	15.546.400	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	14 lapo-ran	11.586.900
5.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bangilan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelengga-raan Ketentraman dan Ketertiban umum	12 Doku-men	68.602.400	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelengga-raan Ketentraman dan Ketertiban umum	12 Dokum en	25.944.200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	Program Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bangilan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,00 Poin	4.024.130.725	Program Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	76,90 Poin	3.945.216.702
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bangilan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggar-an, dan Evaluasi yang tersusun	9 Doku-men	41.621.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8 Doku-men	38.241.500
6.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bangilan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	2 Doku-men	29.996.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	2 Doku-men	29.996.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bangilan	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	7 Dokumen	11.625.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.245.500
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bangilan	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	3.269.977.115	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	2.899.789.167
7.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bangilan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	20 orang	3.195.997.115	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	21 orang	2.841.664.167

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Bangilan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	9 Doku-men	3.780.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	9 Doku-men	2.835.000
7.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Bangilan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Doku-men	70.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23 Laporan	55.380.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bangilan	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	18 PNS dan 5 Non PNS	33.982.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	4 Jenis	15.539.000
8.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Bangilan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23 Paket	12.167.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	976.000
8.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Bangilan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	4.960.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	2.400.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bangilan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	7.915.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	5.603.000
8.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bangilan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	8.940.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	6.560.000
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bangilan	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	7 Jenis Layanan	154.926.941	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Jenis	125.942.016

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bangilan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.996.796	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.996.796
9.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bangilan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	32.182.415	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	32.182.415
9.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bangilan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	25.294.610	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	25.294.610

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Bangilan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	38.529.275	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	30.823.350
9.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bangilan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.566.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.566.000
9.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bangilan	Jumlah Laporan Penyelengga-raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	54.357.845	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga-raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lapor-an	33.078.845

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bangilan	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	3 Unit	318.600.679	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah)	2 Jenis	396.617.529
10.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bangilan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.465.679	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	96.662.529
10.2	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bangilan	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disdiakan	1 Unit	299.955.000	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disdiakan	1 Unit	299.955.000
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bangilan	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jenis Jasa	172.674.896	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	3 Jenis	176.583.200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bangilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lapor-an	2.000.000
11.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bangilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	42.091.696	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapor-an	46.000.000
11.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bangilan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	128.583.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lapor-an	128.583.200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bangilan	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	24 Unit	32.048.094	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	292.414.290
12.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bangilan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	20.592.952	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	20.592.952

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bangilan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6.859.602	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	11.997.302
12.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bangilan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4.895.540	Pemeliharaan/Re-habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	259.824.036

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun usulan-usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Bangilan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Kegiatan Prioritas dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan Bangilan Tahun 2025

Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Rencana Program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, yang menjadi pedoman penyusunan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rancangan Awal Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2030, dimana di dalamnya telah termuat pokok-pokok Program dan Kegiatan berikut indikatornya yang menjadi tugas pokok Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

Selain hal-hal prioritas, terdapat pula Program kegiatan rutin pelayanan administrasi. Adapun rincian Perubahan Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja
Kecamatan Bangilan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan / Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	14,29 %
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	Jumlah Desa Yang Naik Nilai Indeks Desanya pada Kecamatan / Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	28,57%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3,72 poin
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3,72 poin
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	'Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89,05 Poin

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025, Program dan Kegiatan Kecamatan Bangilan yang ingin dicapai sesuai sesuai P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan 6 Program, 12 Kegiatan 30 Sub Kegiatan yang ingin dicapai dengan 2 (dua) tujuan dan 3 sasaran sebagai berikut:

1) Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa
   Indikator Tujuan : Presentase Desa Mandiri
   Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa
   Indikator Sasaran : Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya
   Untuk mencapai sasaran tersebut maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah
   Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Kegiatan : Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pemberdayaan desa
   Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   Jumlah Dana : Rp. 91.652.510,00

2) Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat
   Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
   Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat
   Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
   Untuk mencapai sasaran tersebut maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah
   1. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
      Sasaran Program : Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
      Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pelayanan pada masyarakat

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Jumlah Dana : Rp. 14.126.700,00

2. Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Program : Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Dana : Rp. 17.876.400,00

3. Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran Program : Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah Dana : Rp. 15.414.800,00

4. Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan

Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan

:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   Jumlah Dana : Rp. 28.217.900,00
2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
   Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi dalam Rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
   Jumlah Dana : Rp. 11.586.900,00
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum
   Jumlah Dana : Rp. 25.944.200,00

3) Penunjang

1. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

I. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Jumlah Dana : Rp. 29.996.000,00
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Jumlah Dana : Rp. 8.245.500,00

II. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
   Jumlah Dana : Rp. 2.841.664.167,00
2) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
   Jumlah Dana : Rp. 2.835.000,00
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
   Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
   Jumlah Dana : Rp. 55.380.000,00

III. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
   Jumlah Dana : Rp 976.000,00
2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   Jumlah Dana : Rp 2.400.000,00
3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   Jumlah Dana : Rp. 5.603.000,00
4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   Jumlah Dana : Rp. 6.560.000,00

IV. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan Pengadaan Administrasi Umum
   Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Dana : Rp. 2.996.796,00

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Dana : Rp. 32.182.415,00

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Jumlah Dana : Rp. 25.294.610,00

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Dana : Rp. 30.823.350,00

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dana : Rp. 1.566.000,00

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Dana : Rp. 33.078.845,00

V. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Dana : Rp. 96.662.529,00

2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Dana : Rp. 299.955.000,00

VI. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang
Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Dana : Rp 2.000.000,00

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Dana : Rp. 46.000.000,00

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Dana : Rp. 128.583.200,00

VII. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Dana : Rp. 20.592.952,00

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Dana : Rp. 11.979.302,00

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Dana : Rp. 259.824.036,00

Adapun Rencana Kerja dan Rincian Anggaran Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bangilan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah APBD 2025 DAN PAPBD 2025
Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				4.321.085.015				4.150.036.112
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	81,50 Poin	4.024.130.725	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		76,80 Poin	3.945.216.702
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	9 Dokumen	41.621.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		8 Dokumen	38.241.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	2 Dokumen	29.996.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		2 Dokumen	29.996.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	7 Laporan	11.625.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		6 Laporan	8.245.500
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	9 Dokumen	3.269.977.115	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		9 Laporan	2.899.879.167

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD))				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	20 orang/ Bulan	3.195.997.115	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		21 orang/ Bulan	2.841.664.167
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	9 Doku-men	3.780.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		9 Doku-men	2.835.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD))				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan-an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	9 Laporan	70.200.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelum-nya (SILPA)		23 laporan	55.380.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD))				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	18 PNS dan 5 Non PNS	33.982.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		4 Jenis	15.539.000
7.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	23 Paket	12.167.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		1 Paket	976.000
7.01.01.2.02.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	23 Orang	4.960.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		23 Orang	2.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD))				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	23 Orang	7.915.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		23 Orang	5.603.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	23 Orang	8.940.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		23 Orang	6.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	7 Jenis Layanan	154.926.941	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		6 Jenis	125.942.016
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	1 paket	2.996.796	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		1 paket	2.996.796

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	3 paket	32.182.415	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		2 paket	32.182.415
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	2 Paket	25.294.610	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		1 Paket	25.294.610
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	2 Paket	38.529.275	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		2 Paket	30.823.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	1 Doku-men	1.566.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		1 Doku-men	1.566.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	10 laporan	54.357.845	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		50 laporan	33.078.845

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	3 Unit	318.600.679	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		2 Jenis	396.617.529
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	2 Unit	18.645.679	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		25 Unit	96.662.529
7.01.01.2.07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	1 Unit	299.955.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		1 Unit	299.955.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	4 Jenis Jasa	172.674.896	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		3 Jenis	176.583.200
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	1 laporan	2.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		1 laporan	2.000.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	2 laporan	42.091.696	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		12 laporan	46.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	2 laporan	128.583.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		12 laporan	128.583.200
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah)	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	24 Unit	32.348.094	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		3 Jenis	292.414.290

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	12 Unit	20.592.952	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		12 Unit	20.592.952
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	9 Unit	6.859.602	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		10 Unit	11.997.302

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	4 Unit	4.895.540	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		4 Unit	259.824.036
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	100 %	19.041.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		100%	14.126.700
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	100 Doku-men	19.041.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		1 Jenis	14.126.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	100 Doku-men	19.041.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		4000 Doku-men	14.126.700
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	100%	108.171.690	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		100%	91.652.510
7. 01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	14 Desa	108.171.690	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		7 Jenis	91.652.510

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7. 01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	14 Laporan	108.171.690	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		14 Laporan	91.652.510
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	100 %	23.156.400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		100 %	17.876.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	14 laporan	23.156.400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		12 laporan	17.876.400
7.01.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	14 laporan	23.156.400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		12 laporan	17.876.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	100%	23.094.800	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		100%	15.414.800
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	93%	23.094.800	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		12 Laporan	15.414.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	3 Orang	23.094.800	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		200 orang	15.414.800
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	100%	123.490.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		57,14%	65.749.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	14 Desa	123.490.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		14 Laporan	65.749.000
7.01.06.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna-an Aset Desa	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	14 Doku-men	39.341.400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		14 Doku-men	28.217.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 (APBD)				Catatan Penting	Perubahan Rencana Kerja 2025 (PAPBD)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penegakan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	14 laporan	15.546.400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		14 laporan	11.586.900
7.01.06.2.01.0011	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tuban, Bangilan, Bangilan	12 Doku-men	68.602.400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		12 Doku-men	25.944.200

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangilan Tahun 2025 merupakan upaya penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, serta kondisi faktual sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Namun demikian, dalam implementasinya perlu memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, maka perlu dilakukan penyusunan prioritas kegiatan yang mengutamakan pelayanan dasar dan urusan wajib pemerintahan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Kegiatan yang bersifat administratif atau penunjang dapat dilakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
3. Setiap pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan pagu indikatif perubahan APBD Tahun 2025, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap sasaran kinerja perangkat daerah dan capaian indikator Renstra Kecamatan Bangilan.
4. Penyesuaian kegiatan perlu memperhatikan prinsip money follow program, yaitu penganggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
5. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, Kecamatan Bangilan perlu memperkuat **sinergitas dan kolaborasi** dengan perangkat daerah lain, pemerintah desa, dan pihak swasta guna mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan.

Agar pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Bangilan Tahun 2025 dapat berjalan sesuai arah kebijakan daerah dan nasional, maka pelaksanaannya berpedoman pada kaidah-kaidah berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Terpadu

   Pelaksanaan program dan kegiatan harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, yaitu Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Bangilan Tahun 2025–2029.
2. Efisiensi dan Efektivitas

   Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta diarahkan untuk memberikan hasil nyata terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dan kinerja pemerintahan.

3. Partisipatif dan Kolaboratif
   Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan partisipasi masyarakat, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta kerja sama dengan pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Adaptif terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Daerah
   Pelaksanaan kegiatan perlu responsif terhadap perubahan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Bangilan.
5. Kaidah Pengawasan dan Evaluasi Berkala**
   Setiap program dan kegiatan wajib dievaluasi secara periodik guna mengidentifikasi capaian, kendala, serta upaya perbaikan berkelanjutan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan ketentuan teknis lainnya.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan maupun tahun berikutnya, Kecamatan Bangilan menetapkan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2024 dan capaian kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025 sebagai dasar perencanaan Tahun Anggaran 2026.
2. Mengoptimalkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemerintah desa untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas di wilayah Kecamatan Bangilan.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam bidang perencanaan, pelaporan, serta pengelolaan keuangan daerah.
4. Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan informasi, dan kepuasan masyarakat.
5. Melakukan pengawasan internal dan pelaporan kinerja secara berkala, baik secara triwulanan maupun tahunan, sesuai ketentuan.
6. Menyesuaikan prioritas kegiatan pada tahun berikutnya berdasarkan evaluasi capaian dan kondisi keuangan daerah, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangilan Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, efektif, serta adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Seluruh pihak diharapkan berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dengan semangat kolaborasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas, guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tuban serta mendukung pelaksanaan program nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

Besar harapan kami agar dokumen Perubahan Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja ke depan.

CAMAT BANGILAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

SUWANTO

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANCAR
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbnga : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.

b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.

d. bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANCAR
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Kerja (Renja) Kecamatan Bancar Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Rancangan Kecamatan Bancar Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Rencana Kerja (Renja) Perubahan perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari P-RKPD.

Sejalan dengan perkembangannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di tahun berjalan untuk lebih mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai sesuai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka perlu dilakukan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja yang telah disusun.

Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dari pengumpulan dan pengelolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta prakiraan maju. Selain itu juga berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Perangkat Daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Perubahan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II di tahun berjalan;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

c. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan PAPBD; dan
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bancar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya akibat adanya berbagai perubahan kebijakan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Adapun tujuannya dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bancar Tahun 2025 adalah :

1) Sebagai penjabaran dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
2) Sebagai pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dimplementasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025;
3) Sebagai pedoman atas pelaksanaannya, yang didalamnya berisikan pagu indikatif pendanaan yang dituangkan kedalam rekening-rekening belanja beserta indikator dan target kinerjanya yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen perubahan Renja Kecamatan Bancar Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2025

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, merupakan kajian terhadap capaian kinerja program kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2021-2026, adapun hasil evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bancar sampai dengan Triwulan II tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Periode Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Bancar
Kabuapten Tuban

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa (Bancar)		Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks ketahanan ekonominya	4,2 %	505.025.063	-14,29%	2.571.049.375	25.00%	107.957.200	0%	8.992.850	0%	10.337.550	0%	19.330.400	0%	2.590.379.775	0%	5,129%	CAMAT
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 %	505.025.063	45.83%	253.215.200	100 %	107.957.200	0 %	8.992.850	0%	10.337.550	0%	19.330.400	0%	272.545.600	0%	53,96 %	CAMAT
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang	100 %	505.025.063	100 %	253.215.200	100 %	107.957.200	100 %	8.992.850.	100 %	10.337.550	100%	19.330.400	100%	272.545.600	100%	53,96%	KASI PMD

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	n Desa		berpartisipasi dalam pembangunan																	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120 lap	505.025.063	24 lap	253.215.200	24 lap	107.957.200	24 lap	8.992.850	24 laporan	10.337.550	24 lap	19.330.400	48 lap	272.545.600	40%	53,96%	KASI PMD
Rata-rata kinerja kegiatan (%)										100										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Tinggi										
Rata-rata kinerja program (%)										100										
Predikat kinerja program										Sangat Tinggi										

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
B	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,37 (Poin)	1.142.708.343	91.03 (poin)	92.817.790	91.28(Poin)	60.415.750	0 (poin)	18.962.000	0 (poin)	11.052.000	0 (poin)	30.014.000	0 %	1.012.831.790	0%	88,63%	CAMAT
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4.07 poin	60.603.008	3,01 poin	3.728000	3,20 poin	6.592.000	0	0	0	0	0	0	3,01 poin	3.728000	0%	0%	CAMAT
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100(%)	60.603.008	100(%)	3.728000	100(%)	6.592.000	100(%)	2.884.000	100(%)	0	100(%)	2.884.000	100(%)	6.612.000	100%	10,91%	Kasi Yanmum
	Terlaksananya Urusan Pemerintahaan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 dok	60.603.008	750 dok	3.728000	5600 dok	6.592.000	650 dok	2.884.000	1395 dok	0	3205 dok	2.884.000	3205 dok	6.612.000	53,41%	10,91%	Kasi Yanmum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian kinerja sub kegiatan (%)				100																
Predikat kinerja sub kegiatan				Sangat Tinggi																
Rata-rata Capaian kinerja kegiatan (%)				100																
Predikat kinerja kegiatan				Sangat Tinggi																
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang Terselesaikan	100 %	478.849.614	100 %	373.260.000	100 %	10.222.000	100 %	4.605.000	100 %	0	100%	4.605.000	100 %	377.865.000	100%	78,91%	Camat

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksanaan ya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan: Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 lap	478.849.614	1 lap	167.582.740	12 lap	10.222.000	1 laporan	4.605.000	1 laporan	0	2 lap	4.605.000	2 lap	172.187.740	100 %	35,95%	Kasi Trantib
	Terlaksanaan ya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	49 lap	478.849.614	24 lap	167.582.740	12 lap	10.222.000	3 laporan	4.605.000	3 laporan	0	6 lap	4.605.000	30 laporan	172.187.740	12,24%	35,95%	Kasi Trantib
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										50										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	100									
									Predikat kinerja kegiatan	Sangat Tinggi									
	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	115.752.503	100 %	373.260.000	100 %	5.571.500	100 %	0	100 %	1.969.000	100 %	1.969.000	100 %	375.229.000	100%	322,46 %	Camat
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegaitan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	5 Laporan	115.752.503	1 Laporan	373.260.000	12 laporan	5.571.500	3 laporan	0	3 laporan	1.969.000	6 laporan	1.969.000	4 lap	375.229.000	80%	322,46 %	Kasi Trantib
	Terlaksananya Fasilitasi,	Sub Kegiatan:	Jumlah Orang yang	250 orang	115.752.503	50 orang	373.260.000	400 orang	5.571.500	0 orang	0	50 orang	1.969.000	50 orang	1.969.000	100 org	375.229.000	100%	322,46 %	Kasi Trantib

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsuttasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Tinggi										
4	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	487.503.218	100 %	353.822.050	100 %	38.030.250	100 %	11.473.000	100 %	9.083.000	100%	20.556.000	100 %	374.378.050	100%	76,79%	Camat
	Terlaksananya kegiatan	Kegiatan:	Jumlah fasilitasi dan	24 desa	487.503.218	24 desa	353.822.050	12 lap	38.030.250	24 Desa	11.473.000	24 Desa	9.083.000	24 Desa	20.556.000	48 Desa	374.378.050	100%	76,79%	Kasi Pemerintahan

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	120 dok	28.136.500	24 dok	54.527.500	24 dok	21.841.000	24 dok	8.443.000	24 dok	5.483.000	24 dok	13.926.000	24 dok	68.453.500	20%	243,29 %	Kasi Pemerintahan

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan: Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 lap	77.100.000	12 lap	10.667.500	12 lap	8.960.000	3 lap	3.030.000	3 lap	0	6 lap	3.030.000	6 lap	13.697.500	50%	17,76%	Kasi Trantib
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegitan: Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dok	255.120.718	12 dok	23.710.050	12 dok	7.229.250	3 dok	0	3 dok	3.600.000	6 dok	3.600.000	6 dok	27.310.050	50%	10,70%	Kasi Kesra
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										66.67										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sedang										

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja program (%)										100										
Predikat kinerja program										Sangat Tinggi										
C	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah (KECAMATAN BANCAR)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82,00 (poin)	12.666.415.969	80,30 (poin)	2.317.834.175	81.50 poin	3.451.216.223	0 poin	494.565.305	0 poin	568.275.668	0 poin	1.062.840.973	0 poin	3.380.675.148	0%	26,69%	Sekcam

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(KECAMATAN BANCAR)																		
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 dok	91.400.000	9 dok	18.878.000	8 dok	41.087.190	3 dok	12.485.000.	2 dok	6.158.000	5 dok	18.643.000	14 dok	37.521.000	11,11%	41,05 %	Kasubag Prolap
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dok	67.250.000	3 dok	12.081.000	2 dok	31.207.840	1 dok	10.600.000	1 dok	4.473.000	2 dok	15.073.000	5 dok	27.154.000	33,33%	40,37%	Kasubag Prolap
	Terlaksananya evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (KECAMATA	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 lap	24.150.000	6 lap	6.797.000	6 lap	9.879.350	6 lap	1.885.000	6 lap	1.685.000	6 lap	1.685.000	12 lap	8.482.000	40 %	35,12 %	Kasubag Prolap

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	N BANCAR)	Daerah (KECAMATAN BANCAR)																		
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	45 dok	11.619.425.839	9 dok	2.011.610.516	9 jenis	2.274.915.247	9 jenis	426.847.901	9 jenis	485.517.070	9 jenis	912.364.971	18 jenis	2.923.975.487	40 %	25,16 %	Kasubag Umum
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 org	11.037.252.839	17 org	1.904.009.516	12 org	2.238.901.247	12 org	419.586.901	12 org	474.270.070	12 org	893.856.071	29 org	2.797.865.587	29%	25,34 %	Kasubag Umum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		ASN (KECAMATAN BANCAR)																		
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dok	288.000.000	1 dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kasubag Umum
	Terlaksananya Jumlah Laporan Keuagan Akir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuagan Akir Tahun SKPD (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Keuagan Akir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuagan Akir Tahun SKPD (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Laporan Keuagan Akir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuagan Akir Tahun SKPD	20 lap	275.100.000	4 lap	37.370.000	23 lap	32.700.000	23 lap	6.700.000	23 lap	10.400.000	23 lap	17.100.000	8 lap	54.470.000	40 %	19,80%	Kasubag Umum
		Sub Kegiatan: Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan	20 lap	19.070.000	4 lap	3.331.000	12 lap	3.314.000	3 lap	561.000	3 lap	847.000	6 lap	1.408.000	10 lap	4.739.000	50%	24,85%	Kasubag Umum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (KECAMATAN BANCAR)	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										86,67										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
3	Terlaksanaanya Layanan Kepegawaian (KECAMATA	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan	5 jenis	83.575.400	1 jenis	2.880.000	1 jenis	976.000	0	0	0	0	0	0	1 jenis	2.880.000	20%	3,44%	Kasubag Umum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	N BANCAR)	daerah (KECAMATAN BANCAR)	dan Kompetensi Pegawai (Orang																	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KECAMATAN BANCAR)	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 paket	22.280.000	22 paket	n/a	1 paket	976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	Kasubag Umum
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 orang	61.295.400	60 orang	2.880.000	20 org	2.132.000	0	0	20 orang	1.968.000	20 org	1.968.000	80 org	4.848.000	72,72%	7,90%	Kasubag Umum
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										45.45										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
4	Terlaksanan	Kegiatan:	Jumlah	35 jenis	102.108.000	7 jenis	47.574.750	4 jenis	48.956.357	5 jenis	3.948.000	6 jenis	3.299.250	6 jenis	7.247.250	13 jenis	54.822.000	45%	53,69%	Kasubag

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	ya Administrasi Umum Perangkat Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Administrasi Umum Perangkat Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)																	Umum
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5.997.500	1 paket	1.192.000	1 paket	2.293.735	1 paket	768.000	1 paket	0	1 paket	768.000	2 paket	1.960.000	40 %	32,68%	Kasubag Umum
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan	5 paket	59.905.000	1 paket	7.973.000	2 paket	15.666.350	0	0	1 paket	3.299.250	1 paket	3.299.250	2 paket	11.236.250	40%	18,75%	Kasubag Umum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	n Kantor (KECAMATAN BANCAR)	dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN BANCAR)	Perlengkapan Kantor yang Disediakan																	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	18.355.500	1 paket	3.594.250	2 paket	3.971.000	1 paket	1.950.000	1 paket	0	1 paket	1.950.000	2 paket	5.544.250	40 %	30,20%	Kasubag Umum
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5 Dok	8.100.000	1 dok	0	1 dok	1.299.300	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	0	20%	0	Kasubag Umum
	Terlaksanannya Penyelenggaraan Rapat	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	15 lap	9.750.000	3 lap	33.084.000	12 lap	27.025.272	3 lap	1.230.000	3 lap	0	6 lap	1.230.000	9 lap	34.314.000	60%	3,51%	Kasubag Umum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)							100											
			Predikat kinerja sub kegiatan							Sangat Tinggi											
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	7 Unit	52.550.000	11 Unit	65.025.000	4 jenis	605.129.234	0	0	1 jenis	20.200.000	1 jenis	20.200.000	12 jenis	85.225.000	171, 4%	162,17 %	Kasubag Umum	
	Tersedianya Peralatan	Sub Kegiatan:	Jumlah Unit Peralatan	7 unit	52.550.000	11 Unit	65.025.000	5 unit	105.135.350	0	0	4 unit	20.200.000	4 Unit	20.200.000	15 unit	85.225.000	214, 2%	162,17 %	Kasubag Umum	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan																	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediankan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	499.993.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Kasubag Umum
			Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)							50										
			Predikat kinerja sub kegiatan							Sangat Rendah										
6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	20 Jenis	489.557.730	4 Jenis	103.938.836	2 Jenis	194.277.587	1 jenis	43.634.404	1 jenis	44.409.348	2 jenis	88.103.752	6 jenis	192.042.588	20%	39,22%	Kasubag Umum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Jasa surat Menyurat	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 lap	8.800.000	1 lap	1.760.000	1 lap	1.920.000	1 lap	0	1 lap	960.000	1 lap	0	2 lap	2.720.000	40%	30,90%	Kasubag Umum
	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 lap	153.030.730	1 lap	20.481.788	12 lap	37.718.950	3 lap	3.680.496	3 lap	6,497.540	6 lap	10.178.036	7 lap	30.659.824	140%	20,03%	Kasubag Umum
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATA	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa	5 laporan	32.250.000	1 laporan	6.424.000	1 laporan	6.559.800	1 laporan	3.270.000	1 laporan	0	1 laporan	3.270.000	2 laporan	9.694.000	40%	30,05%	Kasubag Umum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	N BANCAR)	n Kantor (KECAMATAN BANCAR)	n Kantor yang Disediakan																	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	295.477.000	3 lap	75.273.048	12 lap	148.078.837	3 lap	36.743.908	3 lap	36.951.808	6 lap	73.695.776	9 lap	148.968.824	180%	50,41%	Kasubag Umum
										Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)		100								
										Predikat kinerja sub kegiatan		Sangat Tinggi								
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	71 unit	227.299.000	15 unit	67.927.073	3 jenis	283.742.608	2 Unit	7.590.000	11 Unit	6.724.000	13 unit	14. 314.000	20	82.241.073	28,16%	36,18%	Kasubag Umum
	Tersedianya Jasa Pemeliharaa	Sub Kegiatan: Penyediaan	Jumlah Kendaraan Perorangan	45 unit	120.359.000	9 unit	22.497.870	9 unit	22.563.805	1 unit	7.590.000	1 Unit	3.674.000	2	11.264.000	11	33.761.870	24,44%	28,05%	Kasubag Umum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	n, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN BANCAR)	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN BANCAR)	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																	
	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN BANCAR)	Pemeliharaan Sub Kegaitan: Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	15.250.000	5 unit	3.050.000	5 unit	3.050.000	0 unit	0	5 unit	3.050.000	5 unit	3.050.000	10 unit	6.100.000	41,6 %	40%	Kasubag Umum

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BANCAR)																		
	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN BANCAR)	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN BANCAR)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	92.190.000	1 unit	33.440.300	1 unit	258.128.803	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	33.440.300	20 unit	36,27%	Kasubag Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										31.48										
Predikat kinerja sub kegiat										Sangat rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										71.85										
Predikat kinerja kegiatan										Sedang										
Rata-rata capaian kinerja Program (%)										0										
Predikat kinerja Program										Sangat rendah										
Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)										0										
Predikat kinerja Sasaran										Sangat rendah										
Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)										0										

NO	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11= 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja Sasaran										Sangat rendah										
Total Rata-rata capaian kinerja Program										66.67										
Predikat kinerja Program										Sedang										
Total Rata-rata capaian kinerja kegiatan										83.58										
Predikat kinerja kegiatan										Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan										78.41										
Predikat kinerja sub kegiat										Tinggi										
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan triwulan berikutnya):																				

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kantor Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.451.216.223,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.062.840.973,00 dengan output dari rencana jumlah 80.80 poin terealisasi 0 poin, output belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi AKIP baru akan ada jadwal reviu AKIP pada triwulan III, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan AKIP, pada program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.087.190,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 18.643.000,00 dengan output dari rencana jumlah 8 dokumen terealisasi 5 dokumen, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 31.207.840,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 15.073.000,00 dengan output dari rencana jumlah 2 dokumen terealisasi 2 dokumen

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.274.915.247,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 912.364.971,00 dengan output dari rencana jumlah 9 laporan terealisasi 9 laporan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.238.901.247,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.797.865.587,00 dengan output dari rencana jumlah 20 Orang/bulan terealisasi 12 Orang/bulan, output tidak tercapai dikarenakan ada PNS yang pensiun dan PPPK belum penerimaan SK sehingga belum ada realisasinya

      2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 37.200.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 17.100.000,00 dengan output dari rencana jumlah 4 dokumen terealisasi 4 dokumen

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.976.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi 0 paket, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dari rencana anggaran sebesar Rp. 976.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket 20 orang dokumen terealisasi 0 orang, di karenakan terkena efisiensi anggaran pada tahap 1.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.159.357,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.247.250,00 dengan output dari rencana jumlah dengan output dari rencana jumlah 4 layanan terealisasi 6 layanan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.960.085,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.299.250,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi 1 paket

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.971.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.950.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi 1 paket

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.132.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.560.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi 1 dokumen

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.025.272,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.230.000,00 dengan output dari rencana jumlah 12 laporan terealisasi 4 laporan, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 50% dari target tahunan

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 605.129.234,00 terealisasi sampai

dengan triwulan II sebesar Rp. 20.200.000,00 dengan output dari rencana jumlah 0 unit terealisasi 1 unit, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 499.993.884,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Unit terealisasi 0 unit, tidak tercapai outputnya di karenakan ketidak sesuaian standar satuan harga dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga target output tidak tercapai, akan melakukan perubahan penyesuaian standar satuan harga dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada saat pelaksanaan usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 194.117.587,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 88.103.752,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Jasa terealisasi 4 Jasa, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikdari rencana anggaran sebesar Rp. 37.718.950,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 10.178.036,00 dengan output dari rencana jumlah 12 laporan terealisasi 6 laporan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 148.078.837,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 73.695.776,00 dengan output dari rencana jumlah 12 Laporan terealisasi 6 laporan

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran anggaran sebesar Rp. 283.742.608,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 82.241.073,00 dengan output dari rencana jumlah 3 unit terealisasi 20 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 70% dari target tahunan, percapaian yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 22.563.805,00 terealisasi sampai

dengan triwulan II sebesar Rp. 11.264.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 unit terealisasi 2 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 22,22% dari target tahunan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.050.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.050.000,00 dengan output dari rencana jumlah 5 Unit terealisasi 5 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 100% dari target tahunan

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 258.128.803,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 unit terealisasi 1 unit, pencapaian target output belum sesuai pada target pertriwulan II masih tercapai 0% dari target tahunan, akan melaksanakan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung yang telah diusulkan mempercepat rehab Gedung yang mengalami kerusakan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.592.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.884.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.592.,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.884.000,00 dengan output dari rencana jumlah 91,34 poin terealisasi 0 poin, output belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru akan ada jadwal evaluasi pada triwulan IV, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat, memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan, dalam kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.592.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.884.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 dokumen terealisasi 3 dokumen

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 107.957.200,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 19.330.400,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 0%, output belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi baru akan ada jadwal evaluasi pada triwulan III, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, memberikan fasilitasi dan pemdampingan kepada petugas desa dalam penyusunan dokumen kelengkapan Indek Desa Membangun (IDM), pada program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 107.957.200,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 19.330.400,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

      1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 107.957.200,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 19.330.400,00 dengan output dari rencana jumlah 7 laporan terealisasi 7 laporan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.222.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.605.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;

   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.222.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.605.000,00 dengan output dari rencana jumlah 12 kali terealisasi 6 kali, , pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 50% dari target tahunan, pada kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut :

      1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.222.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.605.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 1 Laporan

5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.111.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.

1.969.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.111.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.969.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 1 Laporan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaldari rencana anggaran sebesar Rp. 6.111.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.969.000,00 dengan output dari rencana jumlah 25 orang terealisasi 25 0rang

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.030.250,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.556.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 0%, output belum tercapai karena Desa yang menetapkan APBDes baru akan ada jadwalkan pada triwulan III, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, memfasilitasi dan memberikan pendampingan Desa-Desa dalam penyusunan APBDes sesuai jadwal agar penetapannya tepat waktu pada triwulan III, pada program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.030.250,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20. 556.000,00 dengan output dari rencana jumlah 24 Desa terealisasi 24 Desa, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.030.250,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.556.000,00 dengan output dari rencana jumlah 24 dokumen terealisasi 24 dokumen

Adapun untuk target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum realisasi atau tercapai dikarenakan masih proses pelaksanaan dan menunggu release dari pihak terkait.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangung jawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

No	Indikator/Sasaran	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	-	-	4,2 %	4,2 %	25.00 %	71,43 %	- 14.29 %	-			
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	-	3,79 poin	3,03 poin	3,20 poin	3,37 poin	3,20 poin	-			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	92,33 poin	92,35 poin	91,28 poin	91,53 poin	91,36 poin	-			
3	Nilia AKIP Perangkat Daerah	-	-	80.50 poin	81 poin	80.80 poin	81.30 poin	80.30 poin	-			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada kecamatan Bancar adalah sebagai berikut:

1. Pada capaian kinerja poin 1 (satu) Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya dengan capaian -14,29% meski tidak mencapai target dan mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oeleh kurangnya pemahaman petugas Desa pada saat penginputan IDM;
2. Tercapainya nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah Kecamatan Bancar dengan Nilai Baik (B/ 3,20 Poin) kategori baik dan mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh Pelayanan Publik di pelayanan Umum yang diberikan Kecamatan. Pelayanan Publik sendiri dinilai dari beberapa unusr pelayanan antara lain Persyaratan, Prosedur, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Prilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan;
3. Pada capian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Bancar dengan Nilai Sangat Baik (A/ 91,36 Poin) kategori Sangat Baik dan mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh Pelayanan Publik di pelayanan Umum yang diberikan Kecamatan. Pelayanan Publik sendiri dinilai dari beberapa unusr pelayanan antara lain Persyaratan, Prosedur, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Prilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan;
4. Pada capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bancar dengan Nilai Sangat Baik (A/80.30 Poin).

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bancar menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, masih adanya tantangan terkait pemahaman regulasi, komitmen pimpinan, dan ketersedian standar pelayanan yang jelas;
2. Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih baik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan;
3. Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, Profesional dan integritas sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan Bancar masih perlu ditingkatkan ;

4. Belum Optimal pengelolaan data Kualitas basis data pemerintahan, baik dari sisi pemutakhiran data maupun akses publik, masih terbatas;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana, Infrastruktur pemerintah di tingkat kecamatan Bancar seringkali belum memadai;
6. Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah ditingkat kecamatan untuk memastikan program-program pemerintah dapat berjalan secara efektif;
7. Belum adanya Pelaksanaan fungsi pengawasan, Penegakan peraturan daerah dan pengawasan terhadap kegiatan di wilayah Kecamatan Bancar, termasuk pengawasan tambang ilegal, masih menjadi tantangan;
8. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja, judi dll) yang belum optimal;
9. Percepatan penurunan angka stunting belum signifikan karena masih kurangnya penerapan pemanfaatan lahan halaman rumah warga sebagai sumber pangan taambahan dengan penanaman sayur-sayuran dan peternakan; dan
10. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan karena masih kurangnya peningkatan pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan yang mempengaruhi angka kemiskinan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bancar Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 6 program 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Bancar Tahun 2025 dapat dilihat pada

TABEL 2.4 (T-C.31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Bancar	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,80 poin	3.680.216.223,00	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Bancar	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,80 poin	3.451.216.223,00	-
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 dokumen	46.597.190,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 dokumen	41.087.190,00	-
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	37.357.840,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	31.207.840,00	
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	6 laporan	9.239.350,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	6 laporan	9.879.350,00	
2	Kegiatan: Administrasi	Kec. Bancar	Jumlah Laporan	9 dokumen	2.815.115.181,00	Administrasi Keuangan	Kec. Bancar	Jumlah Laporan	9 dokumen	2.274.915.247,00	-

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Perangkat Daerah		Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun			Perangkat Daerah		Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun			
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bancar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	2.774.101.181,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bancar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji ada Tunjangan ASN	20 orang	2.238.901.247,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bancar	JumlahLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	37.200.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bancar	JumlahLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	37.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	23 laporan	3.314.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	23 laporan	36.014.000,00	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			anan/Semesteran SKPD					wulanan/Semesteran SKPD			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	2 jenis	13.770.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	2 jenis	3.108.000,00	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Bancar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	11.638.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Bancar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	976.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bancar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	2.132.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bancar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	2.132.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 jenis	56.311.157,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 jenis	48.956.357,00	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bancar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.293.735,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bancar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 paket	2.293.735,00	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bancar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.546.850,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bancar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	17.960.085,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Bancar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	3.971.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Bancar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	3.971.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	33.200.272,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	27.025.272,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	520.993.884,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	605.129.234,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bancar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4 Unit	21.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bancar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	37 Unit	105.135.350,00	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan					Disediakan			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bancar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	499.993.884,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bancar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	499.993.884,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4 jenis	194.117.587,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 jenis	194.277.587,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.760.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.760.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	37.718.950,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	37.718.950,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 laporan	6.559.800,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 laporan	6.559.800,00	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kantor yang Disediakan					Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	103.078.837,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	156.558.637,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 Unit	33.744.803,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bancar	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	3 Jenis	283.742.608,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bancar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	22.563.805,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bancar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	22.563.805,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bancar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	5 unit	3.050.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bancar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	3.050.000,00	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								yang Dipelihara			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bancar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	8.130.998,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bancar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	258.128.803,00	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Bancar	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai ketentuan	92.35 Poin	5.952.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Bancar	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	6.592.000,00	-
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bancar	Jumlah Jenis Dokumen pelayanan	60 Dokumen	5.952.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bancar	Jumlah Jenis Dokumen pelayanan	1 Dokumen	6.592.000,00	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	5.952.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4800 dokumen	6.592.000,00	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan	Kec. Bancar	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa	100 %	105.348.758,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan	Kec. Bancar	Persentase Rata-rata Komponen Rapor	57,14 %	107.787.733,00	-

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelurahan		yang Meningkat Nilainya			Kelurahan		Desa yang Meningkat Nilainya			
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bancar	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	100%	105.348.758,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bancar	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Jenis	107.787.733,00	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 laporan	105.348.758,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 laporan	107.787.733,00	
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bancar	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	100%	13.930.000,00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bancar	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	10.222.000,00	-
9	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Bancar	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan	13.930.000,00	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Bancar	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan	10.222.000,00	-
	Sinergitas dengan	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Hasil	12 laporan	13.930.000,00	Sinergitas dengan	Kec. Bancar	Jumlah Laporan	12 laporan	4.605.000,00	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan			Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Bancar	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	100 %	6.111.500,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Bancar	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	100 %	6.111.500,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bancar	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	6.111.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bancar	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	6.111.500,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kec. Bancar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan	50 orang	6.111.500,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Kec. Bancar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	50 Orang	6.111.500,00	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiasan Ketahanan Nasional		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bancar	Persentase desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100%	64.547.650,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bancar	Persentase desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	54,14%	38.030.250,00	-

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bancar	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 laporan	64.547.650,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bancar	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Laporan	38.030.250,00	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 dokumen	29.175.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 dokumen	21.841.000,00	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	8.960.000,00	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bancar	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	8.960.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraa	12 dokumen	26.412.650,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Kec. Bancar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	12 dokumen	7.229.250,00	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ketertiban Umum		n Ketenteraman dan KetertibanUmum			Ketertiban Umum		Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil Musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bancar akan diakomodasi dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bancar Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dilihat pada *Tabel 2.5:*

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**NIHIL**				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan tujuan dan sasaran Kecamatan Bancar, program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Didalam menentukan tujuan dan sasaran dimulai dari permaslahan layanan perangkat daerah, isu lingkungan dinamis, isu strategis, dan potensi yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan haruslah mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran Visi dan Misi agar lebih terarah, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan ini menjadi arah Perangkat Daerah dalam melaksankan fungsi pelayanannya.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabuapten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Mbangun Desa Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.”

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Kecamatan Bancar berperan dalam mendukung misi ke-2, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu *"Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan"* dan sasaran *"Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan"* dan misi ke-4, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu *"Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani"* dan sasaran *"Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital".* Dari sasaran RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Bancar Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa".

Tujuan ini memiliki 2 indikator untuk mengukur ketercapainnya. Indikator tersebut terdiri dari Presentase Desa Mandiri dan Ikndeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan serangkaian kinerja yang dapat diwujudkan dalam bentuk tahapan, fokus, ataupun aspek prioritas dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan renstra. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
Berdasarkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bancar Tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yakni:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat

Masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan ketercapaiannya melalui indikator yang terukur. Indikator yang dijadikan acuan sasaran terdiri dari:

1. Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Adapun rincian Perubahan Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bancar Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2030 yang akan dicapai adalah sebagimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bancar

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tujuan: Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan			Tingkat Kemiskinan	13,54 %
Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan			Persentase Desa Mandiri	46,95 %
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	50,00 %
		Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	25,00 %
Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	93,28 poin
Sasaran: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,47 poin
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82 poin
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan KemandirianDesa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,20 poin

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,20 poin
		Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,28 poin

TABEL.3.2

Rincian Perubahan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
		KECAMATAN BANCAR			3.876.539.710,00			3.619.959.706,00	165.387.260,00
		UNSUR KEWILAYAHAN			3.876.539.710,00			3.619.959.706,00	165.387.260,00
		KECAMATAN			3.876.539.710,00			3.619.959.706,00	165.387.260,00
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,50 poin	3.680.649.802,00	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.80 poin	3.451.216.223,00	253.142.869,00
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	46.597.190,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	41.087.190,00	-5.510.000,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	37.357.840,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.207.840,00	-6.150.000,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	9.239.350,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	9.879.350,00	640.000,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	20 Orang/bulan	2.815.115.181,00	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	2.274.915.247,00	-163.221.999,00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.774.101.181,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.238.901.247,00	-113.221.999,00
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	37.200.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23 Laporan	32.700.000,00	-4.500.000,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n n/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.814.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n n/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.314.000,00	-500.000,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pegawai	1 Jenis	13.770.000,00	Jumlah jenis Layanan Pegawai	2 Jenis	3.108.000,00	-10.662.000,00
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	11.638.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000,00	-10.662.000,00
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	2.132.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	2.132.000,00	0,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi	7 Jenis	56.311.157,00	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi	4 Jenis	48.956.357,00	-7.354.800,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
			Umum			Umum			
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.293.735,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.293.735,00	0,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.546.850,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.666.350,00	119.500,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.971.000,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.971.000,00	0,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.299.300,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	-1.299.300,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	33.200.272,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	27.025.272,00	-6.175.000,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	520.999.841,00	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	605.129.234,00	84.129.393,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	21.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	105.135.350,00	84.129.393,00
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	499.993.884,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	499.993.884,00	0,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jenis	194.277.587,00	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	2 Jenis	194.277.587,00	0,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.760.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.920.000,00	160.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37.718.950,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	37.718.950,00	0,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
						yang Disediakan			
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	6.559.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	6.559.800,00	0,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	148.078.837,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	148.078.837,00	45.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 Unit	33.744.803,00	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	283.742.608,00	249.993.091,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	22.563.805,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	22.563.805,00	-4.714,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.050.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	15 Unit	3.050.000,00	0,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
						Dipelihara			
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.130.998,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	258.128.803,00	249.997.805,00
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelesaian pelayanan Kecamatan sesuai ketentuan	92.35 poin	5.952.000,00	Persentase penyelesaian pelayanan Kecamatan sesuai ketentuan	100 %	6.592.000,00	548.000,00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	60 Dokumen	5.952.000,00	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 Dokumen	6.592.000,00	640.000,00
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	5.952.000,00	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4800 Dokumen	6.592.000,00	640.000,00
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	105.348.758,00	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100 %	107.787.733,00	3.120.192,00
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan	100 %	105.348.758,00	Jumlah jenis dokumen kegiatan	7 Jenis	107.787.733,00	2.438.975,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
			pemberdayaan desa			pemberdayaan desa			
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	105.348.758,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	107.787.733,00	2.438.975,00
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	13.930.000,00	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	10.222.000,00	-3.708.000,00
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	13.930.000,00	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	10.222.000,00	-3.708.000,00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	12 Laporan	13.930.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	10.222.000,00	-3.708.000,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
			di Wilayah Kecamatan			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	6.111.500,00	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100 %	6.111.500,00	0,00
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	6.111.500,00	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	6.111.500,00	0,00
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	6.111.500,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	6.111.500,00	0,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	100 %	64.547.650,00	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	57,14 %	38.030.250,00	8.952.350,00
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24 Dokumen	64.547.650,00	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 laporan	38.030.250,00	-26.517.400,00
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	29.175.000,00	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	21.841.000,00	-7.334.000,00
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8.960.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8.960.000,00	0,00

No	Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan RKPD 2025			Setelah Perubahan P-RKPD 2025			Selisih dengan Pagu Anggaran
			Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	26.412.650	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24 Dokumen	7.229.250,00	-19.183.400,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester berikutnya di lingkup Kecamatan Bancar yang memiliki lima seksi beserta Sekretariat dalam menangani urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawabnya, guna mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bancar sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun berbasis kinerja berdasarkan upaya penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program maupun kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2025 serta dilakukan guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian kebijakan pemerintah.

Upaya monitoring pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan dan menjadi perhatian lebih. Dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, baik itu personil aparatur maupun ketersedian anggaran maka pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja), Camat Bancar Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) secara berkala.Dengan akuntabilitas pelaksanaan Perubahan Rencana

Kerja(Renja) Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2025 diharapkan tidak hanya dapat mencapai *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan tetapi juga dapat

menghasilkan *impact* atau dampak yang positif bagi kemajuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban.

CAMAT BANCAR

ttd.

MASTAR

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TAMBAKBOYO
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 58

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambakboyo Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Rancangan Renstra Kecamatan Tambakboyo Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (P-RKPD) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tambakboyo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
2. Menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Kecamatan Tambakboyo.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Tahun 2025;

2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 ;dan
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambakboyo Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Tambakboyo agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tambakboyo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Kecamatan Tambakboyo sampai dengan Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Penentuan isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAMBAKBOYO

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tambakboyo sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kewilayahan, pada tahun 2024 Kecamatan Tambakboyo melaksanakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang diturunkan dari Misi 2 dan Misi 4 Pemerintah Kabupaten Tuban.

Adapun Analisis kinerja Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Tambakboyo

Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban pada Triwulan II Tahun 2025 berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.1 (Formulir E.81)
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks ketahanan ekonominya	4,7	505,025,063	66,67	134.083.400	4,7	107.999.894	0	27.634.000	0	20.988.750					100	48.622.750	0	396.272.700	2127.66	78.47	CAMAT
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 %	505,025,063	100	134.083.400	100	107.999.894	0	27.634.000	0	20.988.750					100	48.622.750	0	396.272.700	100	78.47	CAMAT
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	100 %	505,025,063	100	134.083.400	100	107.999.894	100	27.634.000	100	20.988.750					100	48.622.750	100	58.632.000	0	0	KASI PMD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18	505,025,063	18	134.083.400	18	107.999.894	18	27.634.000	18	20.988.750					10	48.622.750	36	396.272.700	11.11	11.11	KASI PMD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**55.56**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**100**														
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Tinggi**														
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**100**														
Predikat kinerja program										**Sangat Tinggi**														
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)										**50**														
Predikat kinerja sasaran										**Sangat Rendah**														
B	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,12	871.514.600	90,72	3.512.810.452	90,92	3.786.283.587	0	629.149.316	0	679.133.256					0	1.308.282.572	0	4.992.922.786	0	572.9	CAMAT

	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesai an atas pemohona n pelayanan publik kecamatan	100	65.148.233	100	41.960.200	100	16.000.000	100	7.957.000	100	3.490.000					100	11.447.000	100	53.407.200	100	81.98	CAMAT
	Terlaksaan ya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahka n kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM) Kecamatan	91,12	65.148.233	90,72	41.960.200	90,92	16.000.000	0	0	0	3.325.600					0	11.447.000	0	11.447.000	0	0	KASI YANUM
	Terlaksanan ya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15	65.148.233	3	41.960.200	3	16.000.000	1	0	1	3.325.600					1	11.447.000	1	11.447.000	80	0	KASI YANUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										33.33														
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										0														
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya Ketentrama n danKetertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRA MAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindakla njuti	100	258.067. 050	100	39.404.2 50	100	39.999. 999	100	6.275.00	100	3.792.00 0					100	10.067.0 00	100	11.133.000	0	0	CAMAT
	Terlaksanan ya Koordinasi Upaya Penyelengga raan Ketentrama n dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi penyelengg araan ketentram an dan ketertiban umum	60	258.067. 050	1	39.404.2 50	1	39.999. 999	1	6.275.00	0	3.792.00 0					1	10.067.0 00	1	11.133.000	0	0	KASI TRANTIB
	Terlaksanan ya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Te ntara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	5	258.067. 050	3	39.404.2 50	1	39.999. 999	1	6.275.00	1	3.792.00 0					1	10.067.0 00	1	372.965.250	20	144.52	KASI TRANTIB
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										100														
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat baik														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										100														
Predikat kinerja kegiatan										Sangat baik														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100	115.752.503	100	345.929.500	100	40.000.000	100	9.064.000	100	13.797.500					100	22.861.500	100	439.482.625	100	843.06	CAMAT
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	5	115.752.503	1	205.488.000	1	40.000.000	1	9.064.000	1	13.797.500					1	22.861.500	1	439.482.625	20	379.67	KASI KESRA
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsuttasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Ketahanan Nasional	250	115.752.503	250	205.488.000	250	40.000.000	128	9.064.000	0	960.000					128	10.024.000	128	10.984.000	20	0	KASI KESRA
	Pembinaan Kerukunan AntarSuku dan Intra Suku, UmatBeragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna MewujudkanStabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan AntarSuku dan Intra Suku, UmatBeragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna MewujudkanStabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan AntarSuku dan Intra Suku , UmatBeragama ,Ras,danGolonganLainnya Guna MewujudkanStabilitas Keamanan Lokal,	250	115.752.503	250	205.488.000	250	40.000.000	0)	0	150	12.837.500					150	12.837.500	150	12.837.500	60	0	KASI KESRA
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										55.6														
Predikat kinerja sub kegiatan										Rendah														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										100														
Predikat kinerja kegiatan										Sangat baik														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Meninykatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100	422.367.611	200	161.400.050	100	57.000.000	88.89	18.285.000	100	14.190.000					100	32.475.000	100	195.802.050	100	46.36	CAMAT
	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	45	432.546.817 1	27	161.400.050	9	57.000.000	18	18.285.000	18	14.190.000					18	32.475.000	18	195.802.050	20	46.36	KASI PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45)	941.885.134	27	133.247.800	9	38.750.000	18	13.002.000	18	11.630.000					18	24.632.000	18	157.879.800	100	16.76	KASI PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan danPenegakan PeraturanPerundang-Undangan	Fasilitasi Penerapan danPenegakan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalamrangka Penerapan danPenegakan PeraturanPerundang-Undangan	0	0	0	0	1	18.250.000	1	5.283.000	1	2.560.000					1	7.843.000	1	9.770.000	0	0	KASI PEMERINTAHAN
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										100														
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat tinggi														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										100														
Predikat kinerja kegiatan										Sangat baik														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
C	Penunjang										-		-						-					CAMAT
	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,04	869,082,987	90,72,31	419.782.050	84,34	3.114.866.649	0	558.288.343							0	1.408.874.514	0 Poin	1.828.656.564	0%	210.41%	CAMAT
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82	12.254.402.337	81,15	7.122.677.364	81.6	3.633.283.588	0 (Poin)	587.568.316	0	643.863.75					0	1.231.432.072		8.521.986.198	60,37 %	69.54	Sekcam
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	45	149.100.000	27	1.898.962.700	9	62.000.000	1)	12.724.40	0	5.120.000					0	17.844.400		1.918.407.100	2.22 %	1286.66	KASUBAG PROLAP
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahRealisasi Kinerja SKPD	9	85.313.000	6 (Dokumen)	48.065.050	2	45.000.00	1	12.724.40	0	4.160.000)					1	16.884.400		66.549.450	0	78.01	KASUBAG PROLAP
	Tersusunnya Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kegiatan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah			2		7	17.000.000		2		960.000					2	960.000		960.000	0	0	KASUBAG PROLAP
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										14.29														
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat rendah														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
C	Penunjang										-		-						-					CAMAT
	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,04	869,082,987	90,72	419.782.050	90,92	3.114.866.649	0	558.288.343							0	1.408.874.514	0	1.828.656.564	0	210.41	CAMAT
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82	12.254.402.337	81,15	7.122.677.364	81.6	3.633.283.588	0	587.568.316	0	643.863.75					0	1.231.432.072		8.521.986.198	60,37	69.54	Sekcam
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	45	149.100.000	27	1.898.962.700	9	62.000.000	1	12.724.40	0	5.120.000					0	17.844.400		1.918.407.100	2.22	1286.66	KASUBAG PROLAP
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahRealisasi Kinerja SKPD	9	85.313.000	6	48.065.050	2	45.000.00	1	12.724.40	0	4.160.000					1	16.884.400		66.549.450	0	78.01	KASUBAG PROLAP
	Tersusunnya Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kegiatan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah			2		7	17.000.000		2		960.000					2	960.000		960.000	0	0	KASUBAG PROLAP
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										14.29														
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat rendah														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	45	11.044.696.924	27	6.114.463.676	9	2.785.736.681	2	530.877.672	14)	592.366.397					14)	1.123.244.069	41	7.391.075.350	91.11	66.92	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	10.722.059.000	16	5.966.734.576	18	2.733.736.681	16	522.047.672	16	592.366.397					16	1.104.624.069	16	7.223.766.250	80	67.37	KASU BAG UMUM
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	29.193.700	3)	127.391.500	1	40.000.000	1	6.750.000	1	8.510.000					1	15.260.000	1	1 43.611.500	20	491.93	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi PenyusunanLaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	20	30.700.000	12	20.337.600	4	12.000.000	1	2.080.000	1	1.280.000					2	3.360.000	14	23.697.600	70	77.19	KASUBAG PROLAP
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										79.63														
Predikat kinerja sub kegiatan										Tinggi														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Tersusunnya Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis AdministrasiKepegawaian yangDilaksanakan	1	125.092.221	1	233.804.525	1	10.580.000	0	0	0	0					0	0	0	233.804.525	0 %	186.91	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	20	10.580.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	KASUB BAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										0														
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat rendah														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5	261.601.850	5	177.654.250	5	47.990.056	1	3.678.000	5	6.259.000					5	9.937.000	5	188.731.250	100	72.14	KASUBAG UMUM
	Tersedianya KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	.Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor	Jumlah Paket KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan	1	34.753.100	1	12.967.600	1	1.999.060	1	1.088.000	1	0					1	1.088.000	1	14.055.600	100	40.44	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan	1	65.049.500	1	27.129.800	1	8.000.000	0	0	1	4.425.000					1	4.425.000	2	31.554.800	200	48.51	
	Tersedianya Bahan LogistikKantor	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan	1	65.049.500	1	27.129.800	1	3.990.996	1	1.000.000	1	580.000					1	1.580.000	1	29.849.800	100	45.89	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yangDisediakan	1	29.499.250	1	11.639.500	1	3.000.000	1	630.000	1	504.000					1)	1.134.000	1	12.773.500	100	43.3	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undanga	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undanga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	8.100.000	3	5.389.450	1	2.000.000	0	0	1	750.000					1	750.000	1)	6.139.450	20%	75.8	KASUBAG UMUM
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	5	34.900.000	3	99.123.000	12	29.000.000	3	960.000	0	0					3	960.000	3	100.083.000	60%	286.77	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										79.63														
Predikat kinerja sub kegiatan										Tinggi														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	**Tersedianya Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**5. Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	5	17.898.118	10	140.286.650	6	60.876.848	1	3.678.000	5	6.259.000					5	9.937.000	5	188.731.250	100	72.14	KASUBAG UMUM
	Tersediaanya Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	5	17.898.116	16	140.286.650	6	60.876.848	1	1.088.000	1	0					1	1.088.000	1	14.055.600	100	40.44	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																		0						
Predikat kinerja sub kegiatan																		Sangat rendah						
	Penyediaan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pengadaan JasaPenunjang (Jasa)	7	455.499.224	7	178.664.663	7	134.100.003	1	31.953.954	7	29.860.359	0	0	0	0	7	61.814.313	7	248.548.133	100 %	54.57	
	Penyediaan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	1. Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat	5	21.100.000	3	7.933.750	1	3.410.408	1 (	100.000	1	800.000	0	0	0	0	1	900.000	1	8.833.750	20 %	41.87	KASUBAG UMUM
	Penyediaan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	5	153.030.730	3	75.995.913	1	39.746.000	1	9.727.130	1	6.933.535	0	0	0	0	1	16.660.665	1	95.280.783	20 %	62.26	KASUBAG UMUM
	Penyediaan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan	5	305.450.000	3	89.072.500	1	90.943.595	1	22.126.824	1	22.126.824	0	0	0	0	1	44.253.648	1	138.771.100	20 %	45.43	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										100														
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**7. Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan BMD(Unit)	9	200.514.000	12	168.440.900	12	532.000.000	1	3.678.000	5	6.259.000					5	9.937.000	5	188.731.250	100%	72.14 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan DinasJabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	9	200.514.000	9	94.618.800	9	32.000.000	1	1.088.000	1	0					1	1.088.000	1	14.055.600	100	40.44 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/ Direhabilitasi	1	47.602.000	1	50.695.600	3	500.000.000	0	0	1	4.425.000					1	4.425.000	2	31.554.800	200	48.51	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**11.11**														
Predikat kinerja sub kegiatan										**SangatRendah**														
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**49.21**														
Predikat kinerja kegiatan										**SangatRendah**														
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**80**														
Predikat kinerja program										**Tinggi**														

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TahunBerjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)										50														
Predikat kinerja Sasaran										SangatRendah														
Total Rata-rata capaian kinerja Program (%)										83.33														
Predikat kinerja Program										Tinggi														
Total Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)										62.04														
Predikat kinerja Kegiatan										Rendah														

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kantor Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.786.283.587 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 1.308.282.572 pada program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 62.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 17.844.400,00, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.785.736.681,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.123.244.069,00 yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.580.000 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan target 0 paket terealisasi 0 paket, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 47.990.056,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 9.937.000,00 yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari anggaran sebesar Rp. 60.876.848,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan target 6 unit terealisasi 0 unit, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

   f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari anggaran Rp. 60.876.848,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan target 6 Unit terealisasi 0 unit,

   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari anggaran Rp. 134.100.003,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 61.814.313,00 dengan target 7 Jasa terealisasi 7 Jasa, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran anggaran sebesar Rp. 532.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 18.592.290,00 dengan output dari rencana jumlah 12 unit terealisa 4 unit, pencapaian target pada triwulan II baru tercapai

44.44 % dari target tahunan, percapaian yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari rencana anggaran sebesar Rp. 16.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 11.447.000,00 dengan target 100%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 107.999.894,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 48.622.750,00 pada program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 39.999.999,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 10.067.000,00 yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 22.861.500,00, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 32.475.000,00 dengan target 100% terealisasi 100%, pada program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

Adapun untuk target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum realisasi atau belum tercapai masih proses pelaksanaan di triwulan selanjutnya.

1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan pada Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja layanan yang telah dilaksanakan.

Berikut Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tambakboyo sebagai berikut;

Tabel 2.2 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Desa yang Naik Nilai Indek Desanya											
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)Perangkat Daerah	-	-	n/a	n.a	3,92	4,03	2,90	3,81			
3.	Indeks Kepuasan Maskarakat (IKM)	-	-	90,05	91,08	90,92	91,12	90,66	90,72			
4	Indeks Desa Membangun	-	-	0,7652	0,7859	0,8086		0,77012	0,8027			
5	Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	-	-	n/a	16,67	27,78	44,44	n/a	66,67			
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	81	81,5	81,65	81,6	81,05	81,15			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Tambakboyo adalah sebagai berikut :

1. Pada capaian kinerja poin 2 (satu) Indeks Pelayanan Publik (IPP)Perangkat Daerah dengan capaian 3,81;
2. Tercapainya nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Nilai Sangat Baik (A/90,72 Poin) kategori sangat baik meski tidak mencapai target, hal ini di pengaruhi oleh kurangnya atusias masyarakat dalam pengisian kuisioner IKM dan kurangnya pendampingan petugas pada saat pengisian kuisioner IKM
3. Pada capaian kinerja poin 5 (lima) meningkatnya tingkat kenaikan Desa yang Indeks Ketahanan Ekonominya dengan capaian 66,67 %;

1.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Adapun isu penting dan hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tambakboyo sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan umum yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi untuk menjawab tantangan/ isu penting tersebut antara lain:
   - Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.
   - Kompetensi dan kapasitas ASN di Kecamatan
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
   Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain:
   - Kompetensi ASN dalam urusan perencanaan dan pelaporan keuangan.
   - Sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
   - Tingkat pengetahuan dan ketrampilan ASN dalam menggunakan tekhnologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI).
3. Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Tambakboyo
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran yang menunjang pembiayaan.
   - Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Tambakboyo
   - Ketersediaan ASN sebagai SDM pengelola TIK.

4. Pendampingan Desa Menuju Desa Mandiri
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lalin :
   - Tingkat pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaporan keuangan.
   - Ketersediaan tenaga pendamping Desa.
5. Kompetensi dan kapasitas tenaga pendamping desa. Sinergitas Forkopimka, Dinas/ Instansi Vertikal bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran.
   - Intensitas koordiansi antar lintas sektor.

Analisis Kinerja Pelayanan di pengaruhi oleh factor keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
3. Pelaksanaan inovasi “MBAKBOYO MANGGUNG MBAKBOYO MBENDE” adalah Mbakboyo Manggung bisa diartikan melayani tamu agung sedang Mbakboyo Bende adalah bendino sobo ning deso;
4. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut;
5. Penyelenggaraan pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan publik.

1.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambakboyo Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 6 Program dan 12 kegiatan dan 29 Sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dan hasil penyelarasan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Adapun review Perubahan rencana kerja terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4.

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tambak boyo	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,60 poin	3.633.283.588	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tambak boyo	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,65 poin	3.555.515.352	-
1	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	6 dokumen	62.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8 dokumen	41.313.250	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	30.177.250	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	17.OOO.OOO	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	6 dokumen	11.136.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 dokumen	2.785.736.681	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 dokumen	2.424.225.096	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambak boyo	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	2.733.736.681	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambak boyo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/Jenis	2.378.825.096	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	1 dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	37.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tambak boyo	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Se mesteran SKPD	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	23 laporan	7.800.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	umlah jenis Layanan Kepegawaian Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai(orang)	20 Orang	10.580.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai(orang)	1 Jenis 20 Orang	976.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tambak boyo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	10.580.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tambak boyo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Layanan Penigadaanan Administrasi Umum (Layanan	5 Layanan	47.990.056	Administrasi Umum erangkat Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Layanan Pengadaanan Administrasi Umum (Layanan)	4 Layanan	51.208.158	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tambak boyo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.999.060	Penyediaan Komponen Instalas Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tambak boyo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.999.060	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambak boyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambak boyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.832.950	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tambak boyo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	3.990.996	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tambak boyo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.426.148	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tambak boyo	umlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.585.000,	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.827.000,	
	Penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Tambak boyo	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	29.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	22.538.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	6 Unit	60.876.848	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	6 Unit	125.386.769	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambak boyo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lain nya yang Disediakan	6 Unit	60.876.848	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambak boyo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	125.386.769	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	7 Jasa	134.100.003	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	2 Jenis	130.539.851	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.410.408	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tambak boyo	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.227.571	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.746.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.746.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tambakboyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	90.943.595	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tambak boyo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.566.280,	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	532.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tambak boyo	Jenis Jumlah Pemeliharaan Barag Milik Daerah	2 Unit	781.866.228	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	32.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	31.866.228	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	750.000.000	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Tambak boyo	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	100 %	16.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Tambak boyo	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	100%	14.540.000	
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Tambak boyo	Jumlah jenis dokumen pelayanan	3 jenis	16.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Tambak boyo	Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan	1 jenis	14.540.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	16.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Tambak boyo	Jumlah Perijinan/ Rekomendasi yang diterbitkan	2400 Dokumen	14.540.000	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tambak boyo	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100 %	107.999.894	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tambak boyo	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100 %	106.682.910	
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tambak boyo	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	100 Poin	107.999.894	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tambak boyo	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Dokumen	106.682.910	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	107.999.894	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambak boyo	umlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	106.682.910	
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tambak boyo	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	39.999.999	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tambak boyo	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	35.791.999	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
10	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Tambak boyo	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	39.999.999	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Tambak boyo	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan	35.791.999	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	1 laporan	39.999.999	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	35.791.999	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tambak boyo	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	40.000.000	PROGRAM PENYELENGGA-RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tambak boyo	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	28.794.000	
11	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah dokumen Laporan Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	40.000.000	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tambak boyo	Jumlah dokumen Laporan	12 Laporan 1 Laporan	28.794.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Sub Kegiatan: Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tambak boyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	20.000.000	Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tambak boyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,SosialisasiKonsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	14.150.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tambak boyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	20.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tambak boyo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 orang	14.644.000	
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tambak boyo	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	100%	57.00.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tambak boyo	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	57,14%	52.190.000	
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tambak boyo	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	57.00.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tambak boyo	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	52.190.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	38.750.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tambak boyo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	38.750.000	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	18.250.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tambak boyo	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	13.440.000,	

1.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil Musrenbang ditingkat Kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tambakboyo akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambakboyo Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatanyang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025:

Tabel 2.5 (TC.32)
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kecamatan Tambakboyo
Kabupaten Tuban Tahun 2025

KECAMATAN

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL	-	-	-	-

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya pencapaian Rencana Kegiatan Kecamatan Tambakboyo, disampaikan pula Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan Targetnya, sebagaimana dibawah ini.

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran Visi dan Misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja, Tujuan ini menjadi arah perangkat daerah dalam meaksanakan fungsi pelayanannya.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukan hasil-hasilyang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan Visi dan Misi kepala Daerah

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Mbangun Desa Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, yang berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan

Ekonomi Kreatif.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Kecamatan Tambakboyo berperan dalam mendukung misi ke-2 dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu “Meningkatkan Nilai Tambah dan daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentaskan Kemiskinan” dan sasaran “Meningkatkan Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan” dabn Misi ke-4 dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu “Mewujutkan Pemerintah yang Adaptif dan Melayani” dan sasaran “Terwujudnya Kualitas Publik Berbasis Digital”. Dari sasaran RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambakboyo Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa”

Tujuan ini memiliki 2 indikator untuk mengukur ketercapaian. Indikator tersebut terdiri dari presentase Desa Mandiri dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

3.1 Sasaran

Sasaran Merupakan serangkaian kinerja yang dapat diwujutkan dalam bentuk tahapan, Fokus, ataupun aspek prioritas dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan renstra. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Berdasarkan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambakboyo tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yakni :

1. Meningkatkan Kemandirian Desa

2. Meningkatkan Pelayanan Publik Perangkat Daerah
3. Meninglkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat

Masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan ketercapaiannya melalui indikator yang terukur. Indikator yang dijadikan acuan sasaran terdiri dari :

1. Persentasi Desa yang Naik Indeks Desanya
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IMK) Perangkat Daerah

Adapun Perincian dari rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Tambakboyo Tahun 2025-2029 beserta target, adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambakboyo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	44,44
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya	27,78
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,92
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,92
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,92

Bedasarkan tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambakboyo diatas, maka dalam upaya untuk mencapai target Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berikut ini adalah Program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban sebagaimana tabelberikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabel 3.2 (T-C.33)
Rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Tambakboyo
Kabupaten Tuban

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,60 Poin	3.633.283.588	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,65 Poin	3.555.515.352	(77.768.236)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	62.000.000	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen	41.313.250	(20.686.750)
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	45.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	30.177.250	(14.822.750)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen	17.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	11.136.000	(5.864.000)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9 Dokumen	2.785.736.681	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	2.424.225.096	(361.551.585)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima gaji dan Tunjangan	18 orang/bulan	2.733.736.681	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	18 Orang	2.378.825.096	354.911.585

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
					Tunjangan ASN Daerah			
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	40.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	37.600.000	(2.400.000)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	23 Laporan	7.800.000	(4.200.000)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	20 Orang	10.580.000	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	1Jenis 20 Orang	976.000	(9.604.000)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 paket	10,580,000	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	976,000	(9.604.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	5 Layanan	47.990.056	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	4 Jenis	51.208.158	3.218.102
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.999.060	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.999.060	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.832.950	6.832.950
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.990.996	Jumlah jenis Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.426.148	2.435.152
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang	Jumlah Paket	1	3.000.000	Jumlah Paket	2 Paket	3.585.000	585.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
	cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 Paket	1.827.000	(173.000)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.538.000	(6.462.000)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	6 Unit	60.876.848	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	6 Jenis	125.386.769	64.509.921
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	60.876.848	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	125.386.769	64.509.921
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	7 Jenis	134.100.003	Jumlah pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	2Jenis	130.539.851	(3.560.152)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.410.408	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.227.571	(2.182.837)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.746.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.746.000	0
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	90.943.595	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.566.280	(1.377.315)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	12 Unit	532.000.000	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	2Unit	781.866.228	249.866.228
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	32.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	31.866.228	(133.772)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	500,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Jenis	750.000.000	250.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%	100 %	16.000.000	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)	100%	14.540.000	(1.460.000)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Jenis	16.000.000	Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan	1 Jenis	14.540.000	(1.460.000)
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	16.000.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	2400 Dokumen	14.540.000	(1.460.000)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100 %	107.999.894	Persentas Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	106.682.910	(1.316.984)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	100 poin	107.999.894	Jumlah jenis Dokumen Keguatan Pemberdayaan Desa	7Dokumen	106.682.910	(1.316.984)
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	107.999.894	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	106.682.910	(1.316.984)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	0 %	39.999.999	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang terselesaikan	100 %	35.791.999	(4.208.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	39.999.999	Jumlah Laporan koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	35.791.999	(4.208.000)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	39.999.999	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.791.999	(4.208.000)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	40.000.000	Persentase Pelayan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	28.794.000	(11.206.000)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	40.000.000	Jumlah Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Laporan	28.794.000	(11.206.000)
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	250 Orang	20.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	250 Orang	14.150.000	(5.850.000)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	20.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	14.644.000	(5.356.000)
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	57.000.000	Persentase desa dengan tatakelola Pemerintahan Desa yang Baik	57,14 %	52.190.000	(4.810.000)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	57.000.000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	52.190.000	(4.810.000)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	18 Laporan	38.750.000	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	18 Dokumen	38.750.000	0
7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	18.250.000	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	13.440.000	(4.810.000)
Total				**3.894.283.481**			**3.793.514.261**	(100.769.220)

BAB IV

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2025 akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-Perubahan sebagai bahan Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Tuban, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA);
3. Dengan ditetapkannya perubahan Renja ini, maka semua pihak dan pengampu kepentingan (*stakeholders*) yang lain agar menjadikan dokumen ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
5. Diharapkan dengan tersusunnya perubahan Renja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi, baik di sekretariat dan seksi-seksi, agar konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)) ini diharapkan dapat menjadi acuan yang lebih relevan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan yang terus berkembang Perubahan Renja ini juga menjadi acuan serta mampu meningkatkan kinerja serta efektivitas setiap perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak

sangat kami harapkan dan Komitmen bersama untuk melaksanakan perubahan untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja ke depan pada Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban.

CAMAT TAMBAKBOYO
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ARI WIBOWO WASPODO

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendananannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singgahan Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah draft Renstra Kecamatan Singgahan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singgahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singgahan Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan Rencana Strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam

bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja; dan

3. Merumuskan kembali perubahan rencana kerja Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban untuk Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II Tahun 2025, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tuban secara umum serta tujuan dan sasaran Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban secara khusus dapat tercapai.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singgahan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dan;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singgahan Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal dari penyusunan dokumen Renja yang terdiri dari beberapa subbab yaitu Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang pada dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pada dokumen perencanaan merupakan payung hukum, regulasi, Undang-Undang, aturan atau kebijakan yang digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini menjabarkan maksud dari disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja dan menjabarkan hasil atau pencapaian yang diinginkan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan subbab yang menggambarkan alur atau urutan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Dalam Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan terdapat beberapa subbab yakni Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025, dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Bub Bab ini berisi tentang penjabaran evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang penjabaran sistem pelayanan pada Kecamatan Singgahan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Singgahan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Sub Bab Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisi tentang isu penting yang terjadi di wilayah Kecamatan Singgahan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Sub bab Reviu terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025 berisi tentang uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah porses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Sub bab Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisi tentang usulan program dan kegiatan Masyarakat di wilayah Kecamatan Singgahan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Singgahan berisi tentang uraian program sampai dengan sub kegiatan pada Kecamatan Singgahan beserta sumber pendanaannya.

Bab IV Penutup

Pada Bab IV Penutup merupakan Kesimpulan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban. Sesuai draft Renstra 2025-2029 Kecamatan Singgahan Tujuan Strategis Kecamatan dalam RPJMD Kabupaten Tuban adalah : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2025 adalah perencanaan yang kurang tepat sehingga harus mengikuti pergeseran dan mengakibatkan terlambatnya proses pencapaian target, dan tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah mengoptimalkan realiasi kinerja dan anggaran serta melakukan percepatan pekerjaan yang terkait dengan target kinerja yang belum berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

NAMA OPD : KECAMATAN SINGGAHAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa**		Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	2.5	505.025.063	-16.67 %	295.947.188	2.5 %	98.000.000	0 %	8.885.000	0 %	26.879.000	0 %	35.764.000	0 %	340.936.188	0 %	67.51 %	Camat
1		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100	505.025.063	41.67 %	295.947.188	100 %	98.000.000	0 %	8.885.000	0 %	26.879.000	0 %	35.764.000	0 %	340.936.188	0 %	67.51 %	Camat
		1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi penataan kelembagaan	60 Kegiatan	505.025.063	94 Kegiatan	295.947.188	12 Kegiatan	98.000.000	3 Kegiatan	8.885.000	3 Kegiatan	26.879.000	6 Kegiatan	35.764.000	6 Kegiatan	340.936.188	10 %	67.51 %	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	98.000.000	3 (Laporan)	8.885.000	3 (Laporan)	26.879.000	6 (Laporan)	35.764.000	6 (Laporan)	44.989.000	0 %	0 %	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**50**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**										
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**0**										
Predikat kinerja program										**Sangat Rendah**										
B	**Meningkatnya pelayanan pada Masyarakat**		Indeks kepuasan maskarakat (IKM)	88.63 Poin	1.174.335.541	87.45 Poin	3.334.528.540	87.02 Poin	4.045.056.564	0 Poin	631.905.732	0 Poin	687.685.739	0 Poin	1.319.591.471	0 Poin	4.859.677.304	0 %	413.82 %	Camat
1		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 %	75.758.759	100 %	104.102.100	100 %	30.000.000	100 %	0	100 %	2.226.000	100 %	2.226.000	100 %	108.698.100	100 %	143.48 %	Camat
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perijinan/rekomendasi yang diterbitkan	0 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang	30.000.000	1096 Orang	0	1295 Orang	2.226.000	2391 Orang	2.226.000	2391 Orang	4.596.000	0 %	0 %	Kepala Seksi Pelayanan Umum
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	125 Dokumen	75.758.759	12436 Dokumen	104.102.100	30 Dokumen	30.000.000	1096 Dokumen	0	1295 Dokumen	2.226.000	2391 Dokumen	2.226.000	2391 Dokumen	108.698.100	1912.8 %	143.48 %	Kepala Seksi Pelayanan Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Tinggi**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	583.758.470	100 %	257.323.180	100 %	60.000.000	100 %	7.710.000	100 %	4.310.000	100 %	12.020.000	100 %	273.223.180	100 %	46.8 %	Camat
		1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	240 Kali	583.758.470	274 Kali	257.323.180	48 Kali	60.000.000	38 Kali	7.710.000	31 Kali	4.310.000	69 Kali	12.020.000	343 Kali	273.223.180	142.92 %	46.8 %	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
		1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	48 Laporan	60.000.000	38 Laporan	7.710.000	31 Laporan	4.310.000	69 Laporan	12.020.000	69 Laporan	15.900.000	0 %	0 %	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Tinggi**										
3		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	115.752.503	100 %	233.018.690	97 %	10.000.000	100 %	0	100 %	4.050.000	100 %	4.050.000	100 %	237.068.690	100 %	204.81 %	Camat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	240 Kali	115.752.503	105 Kali	233.018.690	48 Kali	10.000.000	42 Kali	0	50 Kali	4.050.000	92 Kali	4.050.000	92 Kali	237.068.690	38.33 %	204.81 %	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
		1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	240 Orang	115.752.503	1200 Orang	328.771.203	48 Orang	10.000.000	42 Orang	0	50 Orang	4.050.000	92 Orang	4.050.000	92 Orang	332.821.203	38.33 %	287.53 %	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Tinggi**										
4		**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	399.070.808	100 %	297.814.326	100 %	84.110.000	100 %	15.515.000	100 %	21.619.000	100 %	37.134.000	100 %	348.758.326	100 %	87.39 %	Camat
		1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Desa	240 Kali	399.070.808	48 Kali	297.814.326	48 Kali	84.110.000	12 Kali	15.515.000	12 Kali	21.619.000	24 Kali	37.134.000	24 Kali	348.758.326	10 %	87.39 %	Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	240 Dokumen	99.970.808	48 Dokumen	119.271.600	48 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	14.835.000	12 Dokumen	11.589.000	24 Dokumen	26.424.000	24 Dokumen	155.945.600	10 %	155.99 %	Kepala Seksi Pemerintahan
		2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	240 Laporan	40.800.000	76 Laporan	56.746.000	48 Laporan	10.000.000	7 Laporan	0	21 Laporan	9.390.000	28 Laporan	9.390.000	28 Laporan	66.136.000	11.67 %	162.1 %	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
		3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	240 Dokumen	258.300.000	76 Dokumen	121.796.726	48 Dokumen	14.110.000	11 Dokumen	680	40 Dokumen	640	51 Dokumen	1.320.000	51 Dokumen	126.676.726	21.25 %	49.04 %	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**69,44**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**50**										
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**										
5		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82 Poin	10.814.258.276	76.35 Poin	7.107.319.317	81.5 Poin	3.860.946.564	0 Poin	608.680.732	0 Poin	655.480.739	0 Poin	1.264.161.471	0 Poin	8.554.445.337	0 %	79.1 %	Camat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	45 Dokumen	130.300.000	27 Dokumen	101.496.500	9 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	2.880.000	1 Dokumen	1.770.000	5 Dokumen	4.650.000	5 Dokumen	106.146.500	11.11 %	81.46 %	Sekretaris Camat
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Dokumen	130.300.000	27 Dokumen	101.496.500	9 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	2.880.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.880.000	28 Dokumen	104.376.500	62.22 %	80.1 %	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	9 Laporan	15.000.000	3 Laporan	0	1 Laporan	1.770.000	4 Laporan	1.770.000	4 Laporan	1.770.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**27,78**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	0 Paket	0	0 Paket	0	19 Paket	10.051.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 %	0 %	Sekcam
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Orang	0	0 Orang	0	19 Orang	10.051.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										
		3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	60 Laporan	9.082.453.325	36 Laporan	5.772.575.372	12 Laporan	2.997.712.564	3 Laporan	512.316.243	3 Laporan	564.392.928	6 Laporan	1.076.709.171	6 Laporan	7.001.504.707	10 %	77.09 %	Sekretaris Camat
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	8.979.362.825	14 Orang	5.620.706.122	14 Orang	2.937.712.564	13 Orang	509.436.243	13 Orang	543.832.928	13 Orang	1.053.269.171	13 Orang	6.824.755.457	76.47 %	76 %	Kepala Sub Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	103.090.500	36 Dokumen	151.869.250	12 Dokumen	52.000.000	3 Dokumen	2.880.000	3 Dokumen	15.600.000	6 Dokumen	18.480.000	6 Dokumen	170.349.250	10 %	165.24 %	Kepala Sub Bagian Umum
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	0	3 Dokumen	4.960.000	6 Dokumen	4.960.000	6 Dokumen	6.400.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**64,29**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**										
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	10 Layanan	355.300.000	10 Layanan	261.077.177	10 Layanan	92.764.000	1 Layanan	29.498.850	6 Layanan	8.464.750	6 Layanan	37.963.600	6 Layanan	311.352.277	60 %	87.63 %	Sekretaris Camat
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	186.000.000	6 Paket	88.536.705	3 Paket	25.000.000	1 Paket	10.149.000	2 Paket	2.049.750	2 Paket	12.198.750	8 Paket	109.198.955	266.67 %	58.71 %	Kepala Sub Bagian Umum
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	31.000.000	6 Paket	36.481.000	12 Paket	15.000.000	3 Paket	966	3 Paket	5.425.000	6 Paket	6.391.000	12 Paket	42.872.000	400 %	138.3 %	Kepala Sub Bagian Umum
		3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	31.000.000	6 Paket	14.499.000	3 Paket	7.000.000	1 Paket	2.810.000	1 Paket	990	1 Paket	3.800.000	7 Paket	20.059.000	233.33 %	64.71 %	Kepala Sub Bagian Umum
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	25.300.000	4 Dokumen	7.920.000	2 Dokumen	4.176.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	6 Dokumen	10.008.000	60 %	39.56 %	Kepala Sub Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	51.000.000	29 Laporan	94.242.702	7 Laporan	39.300.000	3 Laporan	14.423.850	3 Laporan	0	3 Laporan	14.423.850	32 Laporan	108.666.552	91.43 %	213.07 %	Kepala Sub Bagian Umum
		6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	10 Paket	2.288.000	5 Paket	1.150.000	5 Paket	0	5 Paket	1.150.000	5 Paket	1.150.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**57,14**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**										
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana yang tercukupi	0 Jenis	0	0 Jenis	0	4 Jenis	275.700.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum
		1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Jenis	0	0 Jenis	0	4 Jenis	275.700.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	5 Jasa	705.300.000	5 Jasa	522.151.459	5 Jasa	200.612.700	2 Jasa	47.970.639	2 Jasa	42.409.711	2 Jasa	90.380.350	2 Jasa	622.714.694	40 %	88.29 %	Sekretaris Camat
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	60 Laporan	102.000.000	36 Laporan	93.192.136	12 Laporan	42.612.700	3 Laporan	5.208.031	3 Laporan	4.783.603	6 Laporan	9.991.634	6 Laporan	104.770.502	10 %	102.72 %	Kepala Sub Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Air dan Listrik yang Disediakan																	
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	587.000.000	36 Laporan	388.779.295	12 Laporan	158.000.000	3 Laporan	42.762.608	3 Laporan	37.626.108	6 Laporan	80.388.716	6 Laporan	477.764.164	10 %	81.39 %	Kepala Sub Bagian Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	5 Unit	254.300.000	5 Unit	300.367.765	5 (Unit)	239.106.300	2 (Unit)	16.015.000	3 Unit	38.443.350	3 Unit	54.458.350	3 Unit	363.076.115	60 %	142.77 %	Sekretaris Camat
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	75.800.000	24 Unit	81.154.436	12 Unit	43.763.600	2 Unit	3.856.000	4 Unit	11.744.350	6 Unit	15.600.350	6 Unit	96.754.786	50 %	127.64 %	Kepala Sub Bagian Umum
		2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	163.342.700	1 Unit	7.278.000	3 Unit	13.919.000	3 Unit	21.197.000	3 Unit	21.197.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	30.000.000	1 Unit	2.886.000	2 Unit	12.780.000	2 Unit	15.666.000	2 Unit	23.916.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	2.000.000	10 Unit	1.995.000	10 Unit	0	10 Unit	1.995.000	10 Unit	1.995.000	0 %	0 %	Kepala Sub Bagian Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**72,5**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**37,94**										
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**										
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**80**										
Predikat kinerja program										**Tinggi**										
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)										**0**										
Predikat kinerja sasaran										**Sangat Rendah**										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
• Kerjasama dan koordinasi yang baik, baik secara internal maupun eksternal

Implikasi positif :
• Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program karena adanya sinergi antar bidang dan antar instansi
• Permasalahan dapat diselesaikan lebih cepat melalui komunikasi lintas sektor
• Target kinerja yang telah ditetapkan lebih mudah tercapai karena dukungan dan kesamaan tujuan

Faktor penghambat pencapaian kinerja :
• Perencanaan anggaran kurang tepat sehingga harus mengikuti pergeseran dan mengakibatkan terhambatnya proses pencapaian

Implikasi negatif :
• Penundaan atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat pencapaian indicator kinerja Renstra PD
• Capaian kinerja program pada tahun berlajan menjadi tidak optimal atau di bawah target yang direncanakan
• Efisiensi penggunaan anggaran menurun karena adanya proses revisi atau penyesuaian yang memakan waktu
• Dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara target output dan outcome dengan hasil realisasi yang dicapai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
• Mengoptimalkan realisasi kinerja dan anggaran pada tahun berikutnya
• Melakukan percepatan pekerjaan yang terkait dengan target kinerja yang belum berjalan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Kecamatan Singgahan) sampai dengan tahun 2025 :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Singgahan menunjukan tren yang positif dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, meskipun ada target yang belum tercapai sepenuhnya pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 target IKM ditetapkan 84,23 poin dengan capaian aktual 83,73 poin, tahun 2023 target IKM ditetapkan 85,45 poin dengan capaian aktual 84,69 poin. Sementara itu, pada tahun 2024 target IKM 86,12 poin dan capaian yang berhasil diraih sebesar 87,45 poin. Dari data tersebut, terlihat bahwa capaian IKM meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Ke depan, Kecamatan Singgahan diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan guna memenuhi dan melampaui target IKM yang telah ditetapkan.
2. Selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2024, Kecamatan Singgahan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan terkait indikator persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti. Capaian ini mencakup berbagai bidang strategis antara lain pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social. Konsistensi capaian ini mencerminkan efektivitas komunikasi antar-stakeholder serta keseriusan perangkat kecamatan dalam menindaklanjuti hasil-hasil koordinasi lintas sektor. Keberhasilan ini juga menjadi indikator positif terhadap sinergi antar lembaga dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif.
3. Pada tingkat Kecamatan Singgahan, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selama periode tahun 2022 hingga tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kesadaran dan komitmen pemerintah desa dalam mendorong kemandirian ekonomi serta pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan. Capaian ini menjadi indikator positif terhadap perkembangan kelembagaan ekonomi desa di wilayah Kecamatan Singgahan. Untuk tahun 2025, diharapkan target jumlah BUMDes tetap dapat dipertahankan, melalui pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan dan

perluasan bidang usaha yang dikelola secara professional dan akuntabel.

4. Selama periode tahun 2022 hingga tahun 2024, capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singgahan belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam hal perencanaan kinerja, pelaporan serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan. Meskipun demikian, upaya perbiakan terus dilakukan, baik melalui peningkatan pemahaman aparatur terhadap system akuntabilitas kinerja, penyusunan dokumen perencanaan yang lebih tepat sasaran, maupun peningkatan kualitas pelaporan. Diharapkan tahun 2025, Kecamatan Singgahan mampu mencapai target nilai AKIP yang ditetapkan, sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk lebih jelas target dan capaian indikator kinerja utama Kecamatan Singgahan untuk Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	84,23	85,45	86,12	87,02	83,73	84,69	87,45	87,02	
2.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonimian ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social	-	-	90	100	100	100	90	100	100	100	
3.	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	
4.	Nilai AKIP Kecamatan Singgahan	-	-	A	A	A	A	BB	BB	BB	A	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masing-masing desa yang belum maksimal;
2. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja, judi dan lain-lain) yang belum optimal;
3. Angka *stunting* masih tinggi;

Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Tertundanya pembangunan infrastruktur, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan peningkatan ketimbangan pembangunan;
2. Meningkatnya kriminalisasi dan ketidakamanan, pelemahan solidaritas sosial dan kerugian ekonomi di tingkat masyarakat;
3. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, peningkatan beban kesehatan masyarakat dan ketidaksetaraan sosial.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Perencanaan yang tidak tepat dan pengawasan yang lemah;
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, minimnya sumber daya, penegakkan hukum yang lemah dan kemajuan teknologi yang tidak terkontrol;
4. Ketidakseimbangan akses terhadap nutrisi, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat dan koordinasi yang belum optimal.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa, optimalisasi peran pendamping desa, dan peningkatan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi dan penegakkan hukum dan pemberdayaan masyarakat;
3. Edukasi dan kesadaran masyarakat, peningkatan akses gizi dan kesehatan dan penguatan sistem pemantauan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses

tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, dapat dilihat pada Tabel 2.4, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singgahan

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN SINGGAHAN	Presentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	100%	30.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN SINGGAHAN	Presentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	100%	6.312	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah jenis dokumen pelayanan	30 Ijin	30.000	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 Ijin	6.312	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	30.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1200 Dokumen	6.312	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SINGGAHAN	Presentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	98.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SINGGAHAN	Presentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	71.905,46	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	12 Kegiatan	98.000	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	12 Kegiatan	71.905,46	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	98.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	71.905,46	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN SINGGAHAN	Presentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	60.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN SINGGAHAN	Presentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	37.993	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah laporan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	48 Kali	60.000	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah laporan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	48 Kali	37.993	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	60.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37.993	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN SINGGAHAN	Persentase pelayanan Pemerintahanu mum yang sesuai ketentuan	97%	10.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN SINGGAHAN	Persentase pelayanan Pemerintahanu mum yang sesuai ketentuan	100%	4.050	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48 Kali	10.000	*Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48 Kali	4.050	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Orang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	48 Orang	10.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Orang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	48 Orang	4.050	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN SINGGAHAN	Prosentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	100 %	84.110	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN SINGGAHAN	Prosentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	57 %	65.038,63	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Desa	48 Kali	84.110	*Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Desa	12 Kali	65.038,63	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen yang Difsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguaan Aset Desa	48 Dokumen	60.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen yang Difsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguaan Aset Desa	48 Dokumen	47.925	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Pegekan Perundang-undangan	48 Laporan	10.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Pegekan Perundang-undangan	48 Laporan	9.803,63	
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	48 Dokumen	14.110	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	48 Dokumen	7.310	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN SINGGAHAN	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,5 Poin	3.182.095,525	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN SINGGAHAN	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77,05 Poin	3.820.719,64	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	45.000	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	11.851,165	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	30.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.121,165	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	15.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6.730	
	Administrasi Keuangan	KECAMATAN	Jumlah Laporan	12 Laporan	2.318.861,525	*Administrasi Keuangan*	KECAMATAN	Jumlah Laporan	9 Laporan	2.606.722,575	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Daerah	SINGGAHAN	Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun			*Perangkat Daerah*	SINGGAHAN	Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/ bulan	2.258.861,525	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	2.563.127,575	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	37.515	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	8.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	6.080	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	19 Orang	10.051	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	19 Orang	976	
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	19 Paket	10.051	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	976	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kelengkapannya			Kelengkapannya		Kelengkapannya			
	Administrasi Umum *Perangkat Daerah*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	10 Layanan	92.764	*Administrasi Umum* *Perangkat Daerah*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	10 Layanan	67.887.85	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.288	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.288	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Barang	2 Paket	7.000	Penyediaan Barang Cetakan dan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Barang	2 Paket	7.000	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Penggandaan		Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahab Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.176	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahab Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.176	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	39.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	14.423,85	
	Pengadaan Barang Milik Daeraah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	275.700	*Pengadaan Barang Milik Daeraah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	462.139,566	
	Pengadaan Mebel	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	KECAMATAN	Jumlah Unit Peralatan	-	-	Pengadaan Peralatan dan	KECAMATAN	Jumlah Unit Peralatan dan	7 Unit	106.439,566	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lainnya	SINGGAHAN	dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Mesin Lainnya	SINGGAHAN	Mesin Lainnya yang Disediakan			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	275.700	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	355.700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	5 Jasa	200.612,7	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jasa	162.779,401	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.612,7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.407,241	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	158.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.372,16	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	46 Unit	239.106,3	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit	508.363,083	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	43.763,6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	43.763,6	
	Pemeliharaan Mebel	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	2.000	Pemeliharaan Mebel	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	2.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Pemeliharaan Peralatan yang Dipelihara	33 Unit	30.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Pemeliharaan Peralatan yang Dipelihara	33 Unit	30.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	3 Unit	163.342,7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN SINGGAHAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	3 Unit	432.599,483	

No.	APBD 2025					RANWAL P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Direhabilitasi					Direhabilitasi			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025, tidak ada tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Adapun usulan-usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dilihat pada Tabel 2.5, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Kecamatan : SINGGAHAN
Tahun : 2025

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Singgahan Tahun 2025 juga telah disesuaikan dengan misi Bupati Tuban yang kedua yaitu “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan, serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memampatkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif” dan misi Bupati Tuban yang keempat yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Profesional, Transparan, Akuntabel dan Sistem Pengawasan yang Efektif”. Untuk Tahun 2025 total anggaran Kecamatan Singgahan sebesar Rp4.006.018.730,00 yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan yang semuanya merupakan kegiatan yang didanai oleh P-APBD. Rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 3.1, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Singgahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Singgahan	81,5 Poin	3.182.095,525	-	77,05 Poin	3.820.719,64
7	01	01	2.01		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Jumlah Dokumen	Kecamatan Singgahan	9 Dokumen	45.000	-	8 Dokumen	11.851,165
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kecamatan Singgahan	9 Dokumen	30.000	-	2 Dokumen	5.121,165
7	01	01	2.01	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kecamatan Singgahan	7 Laporan	15.000	-	6 Laporan	6.730

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Jumlah Dokumen	Kecamatan Singgahan	12 Dokumen	2.318.861,525	-	9 Dokumen	2.606.722,575
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Singgahan	13 Orang/Bulan	2.258.861,525	-	17 Orang/Bulan	2.563.127,575
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singgahan	12 Dokumen	52.000	-	12 Dokumen	37.515
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Singgahan	12 Dokumen	8.000	-	12 Dokumen	6.080
7	01	01	2.05		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Kecamatan Singgahan	19 Orang	10.051	-	19 Orang	976

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkepannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Singgahan	19 Paket	10.051	-	1 Paket	976
7	01	01	2.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kecamatan Singgahan	10 Layanan	92.764	-	10 Layanan	67.887,85
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singgahan	1 Paket	2.288	-	1 Paket	2.288
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singgahan	1 Paket	25.000	-	1 Paket	25.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga Yang Disediakan	Kecamatan Singgahan	3 Paket	5.263,8	-	3 Paket	5.263,8

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singgahan	2 Paket	15.000	-	2 Paket	15.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Singgahan	2 Paket	7.000	-	2 Paket	7.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Singgahan	1 Dokumen	4.176	-	1 Dokumen	4.176
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Singgahan	7 Laporan	39.300	-	7 Laporan	14.423,85

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.07		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Singgahan	4 Jenis	275.700	-	4 Jenis	462.139,566
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Singgahan	-	-	-	15 Unit	-
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Singgahan	-	-	-	7 Unit	106.439,566
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Singgahan	1 Unit	275.700	-	2 Unit	355.700

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kecamatan Singgahan	5 Jasa	200.612,7	-	2 Jasa	162.779,401
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Singgahan	12 Laporan	42.612,7	-	12 Laporan	22.407,241
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Kecamatan Singgahan	12 Laporan	158.000	-	12 Laporan	149.372,16

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Singgahan	46 Unit	239.106,3	-	2 Unit	508.363,083
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peroangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Singgahan	12 Unit	43.763,6	-	12 Unit	43.763,6
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Singgahan	18 Unit	2.000	-	18 Unit	2.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Singgahan	33 Unit	30.000	-	33 Unit	30.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Singgahan	3 Unit	163.342,7	-	3 Unit	432.599,483
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Presentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik	Kecamatan Singgahan	100 %	30.000	-	100 %	6.312
7	01	02	2.04		***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan	Kecamatan Singgahan	30 Ijin	30.000	-	1 Ijin	6.312

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Singgahan	30 Dokumen	30.000	-	1200 Dokumen	6.312
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa dengan peningkatan nilai indek ketahan ekonomi	Kecamatan Singgahan	100%	98.000	-	100%	71.905,46
7	01	03	2.01		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Singgahan	12 Kegiatan	98.000	-	12 Kegiatan	71.905,46

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singgahan	12 Laporan	98.000	-	12 Laporan	71.905,46
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban yang Ditindaklanjuti	Kecamatan Singgahan	100 %	60.000	-	100 %	37.993
7	01	04	2.01		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singgahan	48 Kali	60.000	-	48 Kali	37.993

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singgahan	48 Laporan	60.000	-	48 Laporan	37.993
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Kecamatan Singgahan	97 %	10.000	-	100 %	4.050

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	05	2.01		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singgahan	48 Kali	10.000	-	48 Kali	4.050
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasiliasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Singgahan	48 Orang	10.000	-	12 Orang	4.050

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	Kecamatan Singgahan	100 %	84.110	-	57 %	65.038,63
7	01	06	2.01		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	Jumlah laporan Fasilirasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Desa	Kecamatan Singgahan	48 Kali	84.110	-	12 Kali	65.038,63
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Singgahan	48 Dokumen	60.000	-	48 Dokumen	47.925

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD (sebelum perubahan)			Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 PAPBD (setelah perubahan)	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu IndikatIf (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Singgahan	48 Laporan	10.000	-	48 Laporan	9.803,63
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singgahan	48 Dokumen	14.110	-	48 Dokumen	7.310

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendananannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singgahan Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Singgahan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Singgahan dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Sebagai uraian akhir pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagai bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini, maka semua pihak dan kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah harus menjadikan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Singgahan dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025; dan
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di

sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam pelaksanaan pembangunan.

Rencana Tindak Lanjut untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan, perlu disusun langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih tertunda atau belum terealisasi pada triwulan sebelumnya;
2. Melakukan optimalisasi capaian kinerja dan serapan anggaran dengan memperkuat koordinasi antar-seksi dan dengan perangkat daerah terkait;
3. Melakukan evaluasi dan penyesuaian rencana kerja tahunan secara berkala untuk menjamin keselarasan dengan perubahan kebijakan atau kondisi lapangan;
4. Menyusun laporan evaluasi kinerja triwulanan dan tahunan sebagai bahan penyusunan LKjIP Kecamatan Singgahan serta dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Singgahan Tahun 2025 ini disampaikan. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

CAMAT SINGGAHAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

CAHYADI WIBOWO

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KEREK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Awal, penyusunan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Kecamatan Kerek merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kerek dilaksanakan setelah adanya Surat Bupati Tuban Nomor : 050/4407/414.201.2/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang pengumpulan dokumen renja perangkat Daerah Tahun 2025,

Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan penajaman penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Tahun 2025 tingkat Kecamatan, penyelarasan indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan.

Dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kerek Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategi Kecamatan Kerek Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran, Rencana Kerja Pendanaan dan Penutup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Kecamatan Kerek selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kerek.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

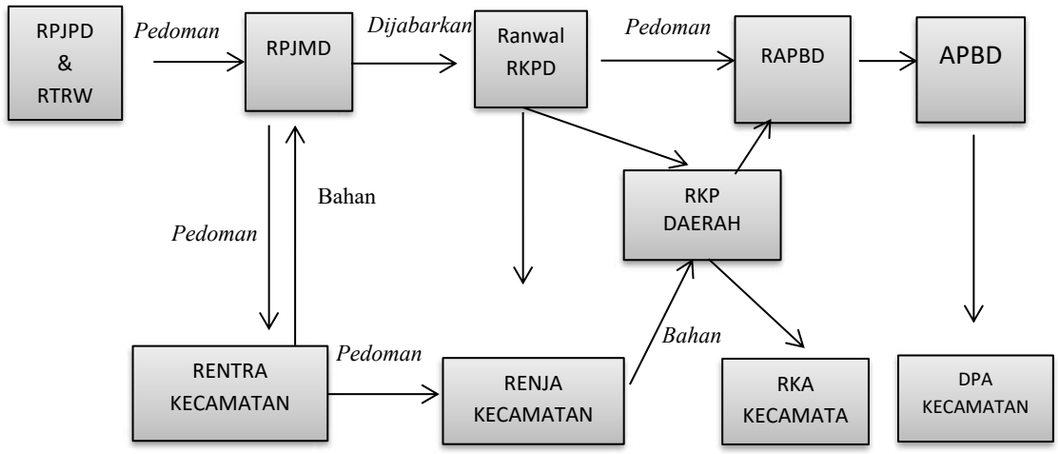

Rencana Kerja Kecamatan Kerek Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kerek Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Tuban sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Kerek berperan dalam mendukung Misi ke-4 Bupati Tuban yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Profesional, Transparan, Akuntabel dan Sistem Pengawasan yang Efektif”.

Rencana Kerja Kecamatan Kerek Tahun 2025 berisi Program dan Kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu,analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Kerek Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kerek Tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025 dan selanjutnya akan di evaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kerek untuk mengetahui realisasi pencapaian target Indikator Kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singgahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerek Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerek Tahun 2025 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kerek Tahun 2025 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerek Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEREK TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KEREK.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini. Turunan Renja OPD Tahun 2025 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan Kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung			Anggaran	Realisasi	**%**
I	Pendapatan Daerah				
	1	Hasil Retribusi Daerah	453.600	453.600	100 %
	2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	20.000	13.400	67,00 %
II	Belanja				
	I	Belanja Tidak Langsung	2.104.00.284	1.407.122.796	66,88 %
	1	Gaji dan Tunjangan PNS	1.301.911.027	808.054.709	62,08 %
	2	Tambahan Penghasilan PNS	704.340.000	518.318.444	73,23 %
	II	Belanja Langsung	448.443.220	432.097.680	88,46 %

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2025 terdiri atas Program dan Kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1(T-C. 29)

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

NAMA OPD : Kecamatan Kerek

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggng Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
A	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks ketahanan ekonomi nya	4.2 (%)	505.025.063	42.86 (%)	208.923.100	4.2 (%)	100.390.718	0 (%)	13.339.800	0 (%)	16.880.250	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	30.220.050	CAMAT
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDA-YAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 (%)	505.025.063	58.82 (%)	208.923.100	100 (%)	100.390.718	0 (%)	13.339.800	29.41 (%)	16.880.250	0 (%)	0	0 (%)	0	29.41 (%)	30.220.050	CAMAT
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyaraka-tan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	100 (%)	505.025.063	100 (%)	113.878.000	100 (%)	100.390.718	11.76 (%)	13.339.800	23.52 (%)	16.880.250	0 (%)	0	0 (%)	0	35.28 (%)	30.220.050	KASI PMD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggng Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.2 (%)	505.025.063	42.86 (%)	208.923.100	4.2 (%)	100.390.718	0 (%)	13.339.800	0 (%)	16.880.250	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	30.220.050	KASI PMD

Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)	
Predikat kinerja sub kegiatan	
Rata-rata kinerja kegiatan (%)	
Predikat kinerja kegiatan	
Rata-rata kinerja program (%)	
Predikat kinerja program	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
B	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.45 (Poin)	920.039.257	87.48 (Poin)	2.825.525.931	85.34 (Poin)	3.351.343.270	0 (Poin)	527.233.927	0 (Poin)	558.250.892	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	1.085.484.819	CAMAT
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik Kecamatan	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	9.950.000	0 (%)	0	0 (%)	4.594.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	4.594.000	CAMAT
	Terlaksanya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85.45 (Poin)	50.249.994	87.48 (Poin)	160.278.000	85.34 (Poin)	9.950.000	0 (Poin)	0	0 (Poin)	4.594.000	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	0 (Poin)	4.594.000	KASI YANUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Terlaksanakan nya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	25 (Dokumen)	50.249.994	10 (Dokumen)	160.278.000	5 (Dokumen)	9.950.000	2 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	4.594.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	4.594.000	KASI YANUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																				
Predikat kinerja kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	10.000.000	5.88 (%)	0	35.29 (%)	2.288.000	0 (%)	0	0 (%)	0	41.17 (%)	2.288.000	CAMAT
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentram an dan ketertiban umum	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	10.000.000	0 (%)	0	0 (%)	2.288.000	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	2.288.000	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVerti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	4 (Laporan)	10.000.000	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	2.288.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	2.288.000	KASI TRANTIB

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
3	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 (%)	115.752.503	100 (%)	25.125.000	97 (%)	45.894.575	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	336.517.028	100 %	191.65 %	CAMAT
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	5 (Laporan)	115.752.503	1 (Laporan)	25.125.000	1 (Laporan)	45.894.575	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	336.517.028	20 %	191.65 %	KASI KESRA
	Terlaksana nya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsuttasi)	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaa	22 (Orang)	115.752.503	22 (Orang)	25.125.000	250 (Orang)	45.894.575	5 (Orang)	0	25 (Orang)	0	250 (Orang)	0	250 (Orang)	336.517.028	100 %	191.65 %	KASI KESRA

	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Ketahanan Nasional	n (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																

Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)	
Predikat kinerja sub kegiatan	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)	
Predikat kinerja kegiatan	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
4	Meninykatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	477.688.056	100 (%)	379.050.100	100 (%)	90.031.382	0 (%)	13.960.000	23.53 (%)	22.498.000	0 (%)	0	0 (%)	0	23.53 (%)	36.458.000	CAMAT
	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	Jumlah desa yang mendapatk an fasilitasi keuangan, kemasyara katan dan ketertiban umum	0 (Desa)	0	0 (Desa)	0	17 (Desa)	90.031.382	0 (Desa)	13.960.000	5 (Desa)	22.498.000	0 (Desa)	0	0 (Desa)	0	5 (Desa)	36.458.000	KASI PEMERI NTAHAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	85 (Dokumen)	157.574.000	17 (Dokumen)	88.497.100	17 (Dokumen)	30.000.000	0 (Dokumen)	7.940.000	1 (Dokumen)	11.743.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	19.683.000	KASI PEMERINTAHAN
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																				
Predikat kinerja kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
C	Penunjang										-		-		-					CAMAT
	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM)	89,26 Poin	42.270. 598	84,3 1 Poin	419.78 2.050	84,3 4 Poin	3.114. 866.64 9	0 Poin	381.408.84 7			0 Poin	956.519.92 0	0 Poin	1.467.903.1 13	0%	210.41 %	CAMAT
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82.00 (Poin)	2.542.80 0.381	81.00 (Poin)	2.552.291. 754	0 (Poin)	784.26 1.441	0 (Poi n)	381.408.84 7	0	0 (Poin)	0 Poin	945.139.32 0)	0 Poin	7.706.441.7 57	60, 37 %	74.25 (Poin)	SEKCAM
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi yang tersusun	18 (Paket)	15.000.000	0 (Paket)	0	18 (Paket)	9.522.000	0 (Pak et)	0	0 (Pake t)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	KASUBAG PROLAP

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencana an Perangkat DaerahRea lisasi Kinerja SKPD	45 (Doku men)	313.750.000	9 (Dokumen)	141.815.500	3 (Doku men)	39.374.979	0 (Dok ume n)	13.045.000	1 (Doku men)	9.280.000	0 (Dok ume n)	0	0 (Doku men)	0	1 (Doku men)	22.325.000	KASUBAG PROLAP
3	Tersusunny a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksa an yang tersusun	45 (Lapor an)	11.553. 221.146	27 (Lapora n)	2.285.459. 303	9 (Lapo ran)	2.235.206.4 62	9 (Lap oran)	355.056.76	9 (Lapo ran)	525.707.99 7	9 (Lap oran)	667.642.14 7	36 (Lapo ran)	1.107.821 .023	80 %	52,79 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 (Oran g)	11198.0 17.655	15 (Orang)	2.239.003. 531	21 (Oran g)	2.235.206.4 62	15 (Ora ng)	355.056.76 6	15 (Ora ng)	463.497.21 9	15 (Ora ng)	667.642.14 7 1	15 (Oran g)	1.107.821 .023	78.9 5 %	53,88 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Terlaksanaan ya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 (Dokumen)	319.416.175	12 (Dokume n)	0	1 (Dokumen)	52.044.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.425.000	1 (Dokumen)	12.183.000	1 (Dokumen)	14.743.000	0 %	0 %	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
4	Terlaksanan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	3 (Pake t)	164.566. 676	3 (Pake t)	32.870 .950	3 (Pake t)	76.030.1 30	3 (Pake t)	2.550. 000	3 (Pake t)	13.280. 000	3 (Pake t)	19.262 .000	6 (Pake t)	17.203.0 00	20 0 %	203.430.5 33	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	3 (Pake t)	56.613. 176	3 (Pake t)	10.961.9 00	3 (Pake t)	10.958. 750	3 (Pake t)	0	3 (Pake t)	5.350.0 00	3 (Pake t)	3.900. 000	3 (Pake t)	5.350.00 0	10 0 %	5.350.000	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 (Pake t)	0	0 (Pake t)	0	1 (Pake t)	9.996.390	0 (Pake t)	0	1 (Pake t)	1.375. 000	1 (Pake t)	1.375. 000	1 (Pake t)	1.375.000	0 %	0 %	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaa n	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	3 (Pake t)	29.962. 500	3 (Pake t)	5.992.500	3 (Pake t)	5.997.47 5	3 (Pake t)	0	3 (Pake t)	2.500.000	3 (Pake t)	2.500.00 0	3 (Pake t)	4.410.000	10 0 %	4.410.000	KASUBA G UMUM
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	10 (Dok ume n)	21.500.0 00	6 (Dok ume n)	4.510. .000	1 (Dok ume n)	3.393.00 0	1 (Dok ume n)	0	1 (Do k um e n)	1.080.000	1 (Dok ume n)	1.080.000	7 (Dok ume n)	11.990.000	70 %	54,5 %	KASUBA G UMUM
	Terlaksanan ya Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 (Lapo ran)	30.000. 250	28 (Lapo ran)	6.402 000	24 (Lapo ran)	41.684.5 04	6 (Lapo ran)	2.550.0 00	6 (Lapo ran)	0	12 (Lapo ran)	3.923.000	40 (Lapo ran)	7.203.000	40 0 %	712.08 %	KASUBA G UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
6	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	40 (Unit)	97.400.000	4 (Unit)	25.000.000	8 (Unit)	95.166.204	0 (Unit)	0	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	53.021.000	4 (Unit)	212.756.713	0 %	78,23 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 (Unit)	97.400.000	4 (Unit)	25.000.000	8 (Unit)	95.166.204	0 (Unit)	0	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	194.536.713	0 %	1471.15 %	KASUBAG UMUM
7	Terlaksananya Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	35 (Jasa)	624.032.500	7 (Jasa)	124.406.500	2 (Jasa)	118.014.500	2 (Jasa)	7.737.982	2 (Jasa)	63.244.445	2 (Jasa)	36.260.515	2 (Jasa)	361.742.326	50 %	88,46 %	KASUBAGUMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 (Laporan)	131.400.000	4 (Laporan)	26.280.000	2 (Laporan)	34.331.000	2 (Laporan)	11.036.502	2 (Laporan)	10.328.955	2 (Laporan)	10.328.955	6 (Laporan)	14.075.648	120 %	99,01 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 (Laporan)	203.533.000	3 (Laporan)	38.400.000	1 (Laporan)	27.325.000	1 (Laporan)	3.650.000	1 (Laporan)	7.400.000	1 (Laporan)	11.050.000	4 (Laporan)	17.575.000	80 %	90,34 %	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
6	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	40 (Unit)	97.400.000	4 (Unit)	25.000.000	8 (Unit)	95.166.204	0 (Unit)	0	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	53.021.000	4 (Unit)	212.756.713	0 %	78,23 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 (Unit)	97.400.000	4 (Unit)	25.000.000	8 (Unit)	95.166.204	0 (Unit)	0	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	194.536.713	0 %	1471.15 %	KASUBAG UMUM
7	Terlaksananya Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	35 (Jasa)	624.032.500	7 (Jasa)	124.406.500	2 (Jasa)	118.014.500	2 (Jasa)	7.737.982	2 (Jasa)	63.244.445	2 (Jasa)	36.260.515	2 (Jasa)	361.742.326	50 %	88,46 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
6	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	40 (Unit)	97.400.000	4 (Unit)	25.000.000	8 (Unit)	95.166.204	0 (Unit)	0	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	53.021.000	4 (Unit)	212.756.713	0 %	78,23 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 (Unit)	97.400.000	4 (Unit)	25.000.000	8 (Unit)	95.166.204	0 (Unit)	0	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	194.536.713	0 %	1471.15 %	KASUBAG UMUM
7	Terlaksananya Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	35 (Jasa)	624.032.500	7 (Jasa)	124.406.500	2 (Jasa)	118.014.500	2 (Jasa)	7.737.982	2 (Jasa)	63.244.445	2 (Jasa)	36.260.515	2 (Jasa)	361.742.326	50 %	88,46 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 (Laporan)	131.400.000	4 (Laporan)	26.280.000	2 (Laporan)	34.331.000	2 (Laporan)	11.036.502	2 (Laporan)	10.328.955	2 (Laporan)	10.328.955	6 (Laporan)	14.075.648	120 %	99,01 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 (Laporan)	203.533.000	3 (Laporan)	38.400.000	1 (Laporan)	27.325.000	1 (Laporan)	3.650.000	1 (Laporan)	7.400.000	1 (Laporan)	11.050.000	4 (Laporan)	17.575.000	80 %	90,34 %	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
7	Terlaksanaan ya Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Jumlah Pemeliharaa an BMD	40 (Unit)	262.727.000	24 (Unit)	54.145.351	29 (Unit)	206.867.93 8	10 (Unit)	0	11 (Unit)	156.279.65 8	21 (Unit)	156.279.6 58	21 (Unit)	181.984.658	70 %	472.06 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Penyediaa n Jasa Pemeliharaa a n, Biaya Pemeliharaa a n danPajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan	12 (Unit)	136.971. 000	12 (Unit)	27.979.75 0	12 (Unit)	33.188.31 5	6 (Unit)	0	6 (Unit)	12.683.000	6 (Unit)	12.683.0 00	6 (Unit)	100.968.5 00	10 0 %	317,7 %	KASUBA G UMUM
	Terlaksana n ya Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemelihara a n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a	11 (Unit)	52.870. 000	10 (Unit)	10.750.00 0	15 (Unit)	10.479.80 0	3 (Unit)	0	5 (Unit)	2.000.000	8 (Unit)	2.000.00 0	8 (Unit)	2.000.000	160 %	143 %	KASUBA G UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Terlaksana n ya Pemelihara a n/rehabilit a si Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemelihar aa n/Rehabili ta si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit as i	3 (Unit)	42.650. 000	1 (Unit)	8.330.000	1 (Unit)	156.120.4 40	1 (Unit)	0	1 (Unit)	136.371.65 8	1 (Unit)	136.371. 658	1 (Unit)	155.891.6 58	33. 33 %	2530.8 2 %	KASUBA G UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																				
Predikat kinerja kegiatan																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	:	Pembinaan kepada pegawai terjalin secara hirarkis dan rutin Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah sesuai rencana
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih nol di karena nilai hasil survei baru keluar pada saat TW 4 Indeks Desa Membangun (IDM) masih nol di karena nilai hasil survei baru keluar pada saat TW 3 Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah masih nol di karena nilai hasil Review baru keluar pada saat TW 3 Pengadaan BMD (Unit) masih nol karena akan ada pengadaan pada saat TW 2 karena menyesuaikan anggaran kas Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya masih nol karena akan ada pengadaan pada saat TW 2 karena menyesuaikan anggaran kas Desa yang menetapkan Perubahan APBDes tepat waktu pada TW 2 dan Desa yang menetapkan APBDes 2025 tepat waktu pada TW
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trisvulan berikutnya•):	:	
Melakukan evaluasi terhadap realisasi yang masih rendah kinerja maupun anggarannya Perangkat Daerah kabupaten/kota ber ikutnya*):		

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Cukup Baik. Titik Realisasi terendah adalah pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu sebesar 61,74% hal ini disebabkan karena Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapanya tidak terealisasi pada tahun 2024 dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 68,12 % karena adanya efisiensi penggunaan anggaran Dan untuk serapan anggaran tertinggi adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 99,95 % dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan serapan anggaran tertinggi yaitu 99,95 %. Sedang realisasi atau serapan anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yaitu mencapai 92,54%. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum sebesar 74,03 %, dan untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 95,07%, Sedang untuk capaian kinerja /output yang dihasilkan dari masing-masing Program bisa dilihat ditabel atas.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan progam :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
  1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan *good governance* dengan cara SOP.
  2. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
  3. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan publik.

  Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang Pelayanan Publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan capaian 83,92 Poin dari target 83,50 di Kecamatan Kerek yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya:
  1. Terbatasnya dana dalam penyenggaraan pelayanan terutama dalam pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai.
  2. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga kurang optimal.

  Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :
  1. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang standar.
  2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program tersebut antara lain:

1. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
2. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang Pelayanan Publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 terealisasi 83,92 Poin dari target 83,50 Poin di Kecamatan Kerek yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan terutama dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.
2. Terbatasnya jumlah aparatur dalam Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.
3. Terbatasnya pengetahuan perangkat desa dalam menggali potensi desa yang dimiliki dalam pembentukan BUMDes.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.
3. Pelaksanaan Sosialisasi dari tingkat kecamatan maupun stekholder terkait dalam upaya penggalian potensi desa sesuai sumber daya yang dimiliki.
4. Dilakukan pendampingan dengan intensif dalam pembentukan BUMDes pada masing-masing desa.

- Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program tersebut antara lain:

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan *good governance* dengan cara SOP.
2. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
3. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai.
4. Tertibnya administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kinerja Kecamatan sesuai waktu yang ditetapkan.

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 di Kecamatan Kerek terealisasi 83,92 Poin dari target 83,50 Poin yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah.
2. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang standar yang sesuai.
3. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga kurang optimal.
4. Terbatasnya akuntabilitas kinerja Kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1. Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah.
2. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang sesuai.
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan dalam pemberian pelayanan.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara umum upaya pencapaian sasaran strategis organisasi dapat dikatakan efisien.

Hal ini dikarenakan rata-rata realisasi fisik dapat mencapai 92.61 % atau bahkan lebih, dengan realisasi anggaran lebih rendah atau maksimal sebesar 61,74%,Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berlangsung secara efisien.

Untuk efisiensi pada Kegiatan Pelayanan Perijinan disebabkan adanya ketidak sinkronan aturan dengan kondisi riil di lapangan. Sehingga tidak terdapat realisasi penerbitan IMB yang merupakan output kegiatan tersebut. Namun demikian fungsi pelayanan lainnya yang berupa sosialisasi ataupun konsultasi warga tetap terlaksana dengan baik.

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada sebagian besar kegiatan lainnya secara umum disebabkan adanya komitmen bersama antara pimpinan dan juga pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, disertai dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2. :

Tabel 2.2 (T.C 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Utama												
1	Indeks Desa membangun (IDM) skala kecamatan			0,7517	0,7823	0,8473	0,8473	0,7550	0,7718	0,8141	0,8473	
2	Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya			4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	11,11	4,2 %	4,2 %	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyara kat (IKM) Kecamatan Kerek	-	-	83,50 Poin	84,00 Poin	3,70 Poin	85,00 Poin	3,70 Poin	84,76	84,45 Poin	3,70 Poin	
4	Indek Pelayanan publik (kebija kan pelayan,professional ASN, sarana prasarana,sistem infor masi,konsultasi dan pengadu an,inovasi)	-	-	3,7 Poin	3,79 Poin	3,70 Poin	3,97 Poin	3,70 Poin	-	3,88 Poin	3,70 Poin	
5	Nilai AKIP Kecamatan Kerek	-	-	80,01 Poin	80,50 Poin	76,60 Poin	81,50 Poin	76,60 Poin	74,3	81,00 Poin	76,60 Poin	

Pada pencapaian 5 Indikator Kecamatan Kerek, pada Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada Tahun 2013. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk menentukan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2025. Adapun hasil pencapaian Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian tahun 2025 akan diurutkan sesuai program.

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kerek, menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan masih tinggi dengan laju penurunan yang cenderung melandai atau melambat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, dibawah rata-rata provinsi dan nasional, dan ada kecenderungan tidak merepresentasikan pertumbuhan yang inklusif.
3. Belum kokoh terbangun struktur ekonomi yang harmonis-inklusif.
4. Instabilitas (rendahnya) penurunan angka pengangguran dan ancaman kenaikan akibat pelambatan ekonomi, perubahan struktur permintaan pasar akibat pandemic dan transformasi pasar.
5. Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi infrastruktur yang belum maksimal.
6. Kualitas penyelenggaraan layanan dasar belum merata dan belum menghasilkan pembangunan manusia sebagai basis keunggulan.
7. Reformasi birokrasi yang belum memberi dampak signifikan terhadap dampak eksternal berbasis sasaran prioritas

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan

usulan Program dan Kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kerek Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2025 yang terdiri dari 6 Program 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Usulan Program dan Kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Tabel 2.4 (T.C. 31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Kecamatan Kerek	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,5 Poin	3.241.361.888	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kerek	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,60 Poin	3.302.014.959	
	Perencanaan,Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen))	3 Dokumen	39.374.979	Perencanaan,Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen))	3 Dokumen	23.287.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rentra, Renja,LKPJ,LPPD, LKJIP, SAKIP)	3 Dokumen	39.374.979	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rentra, Renja,LKPJ, LPPD, LKJIP, SAKIP)	3 Dokumen	23.287.500	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	2.642.938.578	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	2.402.982.410	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kerek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang /bulan	2.569.111.078	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kerek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	12 Orang/ bulan	2.336.128.910	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	73.827.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	66.853.500	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan (Orang)	20 Orang	9.522.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan (Orang)	20 Orang	976.000	
	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	9.522.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah PNS yang menerima Pakaian Dinas	1 Paket	976.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumalah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai (orang)	-	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumalah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai (orang)	-	0	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kerek	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 Layanan	81.842.035	ngan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD.	Kecamatan Kerek	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	4 Layanan	55.063.783	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.991.385	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.823.733	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	1 Paket	31.938.500	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	2 Paket	32.676.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.912.400	Penyediaan Bahan LogistikKantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.764.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.999.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.799.550	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kerek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kerek	Jumlah Laporan Pe yelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	-	74.237.593	Jumlah Pengadaan BarangMilik Daerah (BMD)		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	2 Unit	154.281.945	
	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	11 Unit	74.237.593	Jumlah Pengadaan BarangMilik Daerah (BMD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	154.281.945	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jenis Jasa	163.532.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jenis Jasa	163.782.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	32.040.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.040.000	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kerek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	4 Laporan	131.492.200	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Kecamatan Kerek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	131.742.200	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	11 unit	229.985.275	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	3 unit	501.641.121	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharа dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	6.100.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	24.455.147	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharа dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	27.030.501	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	7.050.128	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	6.979.356	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kerek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	194.880.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kerek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	461.531.264	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan public Kecamatan	100 %	9,950,000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyele saian atas permohonan pelayanan public Kecamatan	100 %	9,950,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	84,45 Poin	9,950,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	84,45 Poin	9,950,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan PerizinanNon Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	9.950.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1200 Dokumen	7.690.000	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kerek	Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonominya	100 %	100.390.718	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kerek	Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonominya	100 %	74.322.850	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan (%)	100 %	100.390.718	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan (%)	7 laporan	74.322.850	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	100.390.718	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	74.322.850	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Kecamatan Kerek	Persentase Penga duan gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	10.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Kecamatan Kerek	Persentase Penga duan gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	8.200.000,00	
	Koordinasi Upaya Pen yelenggaraan Ketentra man dan Ketertiban Umum		Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ke tertiban umum	24 kali	10.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ke tertiban umum	12 Kali	8.200.000	
	Sinergitas dengan Kepo lisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasi onal Indonesia dan Ins tansi Vertikal di Wila yah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas de nganKepolisian Ne gara Republik Indo nesia,Tentara Nasi onal Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamat an	4 Lapora n	10.000.000	Sinergitas dengan Ke polisian Negara Repu blik Indonesia, Tenta ra Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamat an		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas de nganKepolisian Ne gara Republik Indo nesia,Tentara Nasi onal Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamat an	12 Lapor an	8.200.000	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kerek	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	0	0	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kerek	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	0	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	-	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	10.664.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek , Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	Fasilitasi, Koordinasi danPembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kerek	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	89.996.300,	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kerek	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	89.996.300,	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17 Desa	90.031.400	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17 Desa	50.258.500	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa	17 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa	17 Dokumen	26.395.000	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	9.996.500	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang –Undangan	1 laporani	8.848.500	

NO	RENCANA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATATAN PENTING
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Kerek	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	50.034.900	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Kerek	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	15.015.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat Kabupaten kemudian disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Program dan Kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kerek akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kerek Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun Usulan-usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentinga (*stakeholder*) dapat dilihat pada TABEL 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5 (T.C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

No	Program / Kegiatan / Uraian	Lokasi	Indokator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, yang menjadi pedoman penyusunan Program dan Kegiatan SKPD adalah Rancangan Awal Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana di dalamnya telah termuat pokok-pokok Program dan Kegiatan berikut indikatornya yang menjadi tugas pokok Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dan sasaran Kecamatan Kerek Tahun 2025 dirumuskan untuk memberikan arah pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Tuban, serta menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan mencerminkan arah pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi terukur yang diharapkan terwujud sebagai penjabaran dari tujuan.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kerek Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		Selisih Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana	Target Capai Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Kerek	81,5 Poin	3.241.361.888	PAPBD	75,60 Poin	3.302.014.959	(134.295.459)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengang garan dan Evaluasi Ki nerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pe rencanaan, Pengang garan, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)		3 Dokumen	39.374.979	PAPBD	3 Dokumen	23.287.500	(16.087.479)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pe rencanaan Perangkat Daerah (Rentra, Renja , LKPJ, LPPD, LKJIP, SAKIP)		3 Dokumen	39.374.979	PAPBD	3 Dokumen	23.287.500	(16.087.479)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keua ngan dan Pemeriksa an yang tersusun (Dokumen)		81,5 Poin	2.642.938.578	PAPBD	75,60 Poin	2.402.982.410	146.079.261
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		13 orang	2.569.111.078	PAPBD	12 Orng	2.336.128.910	153.053.261

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		Selisih Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana	Target Capai Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administra si Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen HasilPenyediaan Administrasi Pelak sanaan Tugas ASN	Kecamatan Kerek	1 Dokumen	73.827.500	PAPBD	12 Dokumen	66.853.500	(6.974.000)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Jumlah adminis trasi kepegawaian yang dilaksanakan (Orang)		20 orang	9.522.000	PAPBD	20 orang	976.000	(8.546.000)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paka ian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		18 Paket	9.522.000	PAPBD	1 Paket	976.000	(8.546.000)
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatih an Pegawai berdasar kan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi		-	0	PAPBD	-	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan adminis trasi umum (layan an)		7 Layanan	81.842.035	PAPBD	4 Jenis	55.063.783	(26.778.252)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penera ngan Bangunan Kantor	Juml Paket Kompon en Instalasi Listrik/ Penerangan Bangu nan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3.991.385	PAPBD	1 Paket	5.823.733	1.832.348

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		Selisih Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana	Target Capai Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kerek	1 Paket	31.938.500	PAPBD	2 Paket	32.676.000	737.500
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Kerek)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.912.400	PAPBD	1 Paket	9.764.500	1.852.100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Di sediakan		1 Paket	7.999.750	PAPBD	2 Paket	6.799.550	(1.200.200)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 Laporan	30.000.000	PAPBD	0 Laporan	0	(30.000.000)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)		0 Unit	74.237.593	PAPBD	2 Unit	154.281.945	80.044.352
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		11 Unit	74.237.593	PAPBD	11 Unit	154.281.945	80.044.352

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		Selisih Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana	Target Capai Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penun jang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	Kecamatan Kerek	4 jasa	163.532.200	PAPBD	2 Jenis	163.782.200	250.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	32.040.000	PAPBD	12 Laporan	32.040.000,	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		4 Laporan	131.492.200	PAPBD	12 Laporan	131.742.200	250.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)		11 unit	229.914.503	PAPBD	3 Jenis	501.641.121	271.655.846
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan Pajaknya		1 Unit	3.600.000	PAPBD	1 Unit	6.100.000	2.500.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		Selisih Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capai Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan n Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara Pajak dan perijinannya	Kecamatan Kerek	8 Unit	24.455.147	PAPBD	11 Unit	27.030.501	2.575.354
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	6.979.356	PAPBD	4 Unit	6.979.356	(70.772)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	194.880.000	PAPBD	1 Unit	461.531.264	266.651.264
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PersentasePenyelesaian atas permohonan pelayanan public Kecamatan		100 %	9,950,000	PAPBD	100 %	7.690.000	(2.260.000)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		81,5 Poin	9,950,000	PAPBD	1 Jenis	7.690.000	(2.260.000)
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		5 Dokumen	9,950,000	PAPBD	1200 Dokumen	7.690.000	(2.260.000)

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		Selisih Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capai Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase desa dengan peningkat an nilai indeks ke tahanan ekonomi	Kecamatan Kerek	100 %	100.390.718	PAPBD	100 %	74.322.850	(26.067.868)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan De sa yang berpartisipa si dalam pemberda yaan		7 Jenis	100.390.718	PAPBD	7 Jenis	74.322.850	(26.067.868)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pe ningkatan Efektivi tas Kegiatan Pember dayaan Masyarakat di Wilayah Kecamat an		17 Laporan	100.390.718	PAPBD	17 Laporan	74.322.850	(26.067.868)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penga duan gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti		100 %	10.000.000	PAPBD	100 %	8.200.000	(1.800.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penye lenggaraan Ketentram an dan Ketertiban umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ke tertiban umum		24 Kali	10.000.000	PAPBD	12 Kali	8.200.000	(1.800.000)

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Setelah Perubahan		Selisih Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana	Target Capai Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepo lisian Republik Indons eia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamtan Kerek	4 Laporan	10.000.000	PAPBD	12 Laporan	8.200.000	(1.800.000)
7.01.05	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintah an Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani		-	0	PAPBD	100 %	10.664.000	10.664.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urus an Pemerintahan Umum sesuai penugas an Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah		-	0	PAPBD	12 Bulan	10.664.000	10.664.000
7.01.05.2.01.02	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasioanl dalam rangka Memantapkan Pengamalahn Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemeliharaan Keutuhan Negara KEsatuan Republik Indonesia		-	0	PAPBD	100 Orang	10.664.000	10.664.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		Selisih Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capai Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	Kecamatan Kerek	100 %	90.031.382	PAPBD	100 %	50.258.500	(39.772.900)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pem binaan dan Pengawas an Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		17 Desa	90.031.382	PAPBD	17 Desa	50.258.500	(39.772.900)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen ya ng Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		17 dokumen	30.000.000	PAPBD	17 dokumen	26.395.000	(3.605.000)
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peratur an Perundang-Undang an	Jumlah Laporan Fasili tasi dalam rangka Pe nerapan dan Penegak an Peraturan Perunda ng- Undangan		1 Laporan	9.996.500	PAPBD	1 Laporan	8.848.500	(1.148.000)
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelengga raan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyeleng garaan Ketentra man dan Ketertib an Umum		1 Dokumen	50.034.882	PAPBD	1 Dokumen	15.015.000	(35.019.900)

BAB IV
P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kerek Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadi bahan untuk menyusun RKPD Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka Perubahan Renja Tahun 2025 juga sebagai Pedoman dalam Penyusunan RKA Tahun 2025 dan sebagai bahan Penyusunan PAPBD Kabupaten sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
4. Harapan dengan tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja), Camat Kerek, Kabupaten Tuban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Untuk itu setiap Kepala Seksi dan Sekretaris berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi tanggungjawabnya setiap Tribulan kepada Camat.

Demikian penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini dibuat untuk dijadikan pedoman operasional guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi, baik di sekretariat dan seksi-seksi, serta mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan dan perubahan terhadap Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

CAMAT KEREK
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

NANANG WAHYUDI

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parengan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Parengan, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka tujuan perencanaan di Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parengan Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parengan serta kerangka pendanaan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan PRKPD, karena pada dasarnya PRKPD merupakan rangkuman dari Kumpulan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Parengan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tuban. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum PAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum PAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Tuban dengan Bupati Tuban yang

selanjutnya akan digunakan untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Tuban Tahun 2025;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja;
4. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada Kepala Daerah.

7. Merumuskan kembali perubahan rencana kerja Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II Tahun 2025, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tuban secara umum serta tujuan dan sasaran Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban secara khusus dapat tercapai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Renja Kecamatan Parengan Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang uraian, tugas pokok dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Surat Keputusan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan terdapat beberapa subbab yakni Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025, dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu sampai dengan triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Sub Bab ini berisi tentang penjabaran evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang penjabaran sistem pelayanan pada Kecamatan Parengan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Parengan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Bab Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisi tentang isu penting yang terjadi di wilayah Kecamatan Parengan Reviu Terhadap Rancangan RKPD

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal PRKPD

Pada Sub bab Reviu terhadap Rancangan PRKPD 2025 berisi tentang uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal PRKPD dengan hasil

analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah porses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Sub Bab Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisi tentang usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Parengan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban pada triwulan II Tahun 2025 berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat		Indeks kepuasan maskarakat (IKM)	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	84.05 (Poin)	4.302.079.108	0 (Poin)	642.989.389	0 (Poin)	734.950.165	0 (Poin)	2.002.146.180	0 (Poin)	2.002.146.180	0%	0%	Kec. Parengan
1.	Menigkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	64.643.208	100%	92.142.350	100%	13.327.992	100%	1.025.000	100%	4.820.000	100%	1.435.000	100%	80.485.600	100%	124.51 %	Kec. Parengan
	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Non Perijin yang dikeluarkan	2 (Dokumen)	64.643.208	2 (Dokumen)	79.050.600	2 (Dokumen)	13.328.000	1 (Dokumen)	1.435.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.435.000	0 (Dokumen)	80.485.600	0%	124.51 %	Kec. Parengan
	Meningkatnya Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	umlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 (Dokumen)	64.643.208	2 (Dokumen)	79.050.600	2 (Dokumen)	13.328.000	1 (Dokumen)	1.435.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	1.435.000	0 (Dokumen)	80.485.600	0%	124.51 %	Kec. Parengan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										0										

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										
2.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	252.512.578	100%	153.191.800	100%	41.996.400	100%	2.715.000	100%	4.534.000	100%	7.249.000	100%	160.440.800	100%	63.54%	Kec. Parengan
	Meningkatnya Koordinasi upaya penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18 (Laporan)	252.512.578	18 (Laporan)	153.191.800	1 (Laporan)	41.996.400	1 (Laporan)	2.715.000	1 (Laporan)	4.534.000	1 (Laporan)	7.249.000	1 (Laporan)	160.440.800	5.56 %	63.54%	Kec. Parengan
	Meningkatnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	1 (Laporan)	252.512.578	1 (Laporan)	153.191.800	1 (Laporan)	41.996.400	1 (Laporan)	2.715.000	1 (Laporan)	4.534.000	1 (Laporan)	7.249.000	1 (Laporan)	160.440.800	100%	63.54%	Kec. Parengan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Tinggi										

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	115.752.503	0%	0	94%	301.089.600	0%	0	100%	20.528.500	100%	20.528.500	100%	20.528.500	100%	17.73%	Kec. Parengan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 (Laporan)	115.752.503	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	301.089.600	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	20.528.500	1 (Laporan)	20.528.500	1 (Laporan)	20.528.500	100%	17.73%	Kec. Parengan
	Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 (Orang)	115.752.503	0 (Orang)	0	50 (Orang)	301.089.600	0 (Orang)	0	0 (Orang)	20.528.500	0 (Orang)	20.528.500	0 (Orang)	20.528.500	0%	17.73%	Kec. Parengan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Tinggi										

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (Poin)	14.657.510.213	76 (Poin)	5.159.706.177	81 (Poin)	3.390.182.997	0 (Poin)	491.124.733	0 (Poin)	909.884.630	0 (Poin)	1.401.009.363	0 (Poin)	6.560.715.540	0%	44.76%	Kec. Parengan
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	45 (Dokumen)	90.737.200	9 (Dokumm)	56.514.000	9 (Dokumm)	27.490.900	3 (Dokumen)	5.034.000	2 (Dokumen)	5.320.000	2 (Dokumen)	10.354.000	2 (Dokumen)	66.868.000	4.44 %	73.69%	Kec. Parengan
	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaaan Perangkat Daerah	9 (Dokumen)	90.737.200	9 (Dokumm)	49.918.000	9 (Dokumm)	27.490.900	3 (Dokumen)	5.034.000	2 (Dokumen)	5.320.000	5 (Dokumen)	10.354.000	14 (Dokumen)	59.272.000	155.56%	65.32%	Kec. Parengan
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				55.56						
										Predikat kinerja sub kegiatan				Rendah						
	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 (Dokumen)	13.016.094.565	9 (Dokumen)	4.365.395.714	9 (Dokumen)	3.025.297.017	3 (Dokumen)	434.075.445	2 (Dokumen)	817.421.394	2 (Dokumen)	1.251.496.839	2 (Dokumen)	5.616.892.553	22.22 %	43.15%	Kec. Parengan
	Terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	20 (Orang)	12.716.869.565	20 (Orang)	4.249.310.714	20 (Orang)	2.966.159.517	20 (Orang)	420.854.445	20 (Orang)	804.540.894	20 (Orang)	1.225.395.339	20 (Orang)	5.474.706.053	100%	43.05%	Kec. Parengan
	Tersedianya administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 (Dokumen)	299.225.000	9 (Dokumen)	107.085.000	9 (Dokumen)	59.137.500	3 (Dokumen)	10.181.000	2 (Dokumen)	12.880.500	2 (Dokumen)	23.061.500	2 (Dokumen)	130.146.500	4.44 %	43.49%	Kec. Parengan
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				61.11						
										Predikat kinerja sub kegiatan				Rendah						

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpenuhinya Layanan Pengadaan Administrasi Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Kantor	8 (Layanan)	473.793.300	8 (Layanan)	239.040.710	8 (Layanan)	115.531.060	8 (Layanan)	18.618.000	8 (Layanan)	23.634.300	8 (Layanan)	42.252.300	8 (Layanan)	281.293.010	100%	59.37%	Kec. Parengan
	Tercukupinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	9.415.800	1 (Paket)	6.101.110	1 (Paket)	2.271.650	0 (Paket)	0	1 (Paket)	564.900	1 (Paket)	564.900	1 (Paket)	6.666.010	100%	70.8%	Kec. Parengan
	Tercukupinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	82.817.050	1 (Paket)	43.338.100	1 (Paket)	15.612.800	1 (Paket)	0	1 (Paket)	2.290.500	1 (Paket)	2.290.500	1 (Paket)	45.628.600	100%	55.1%	Kec. Parengan
	Tercukupinya Paket Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 (Paket)	45.056.000	1 (Paket)	21.545.600	1 (Paket)	8.749.060	1 (Paket)	707.900	1 (Paket)	701.400	1 (Paket)	1.409.300	1 (Paket)	22.954.900	100%	50.95%	Kec. Parengan
	Tercukupinya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	242.533.000	1 (Paket)	88.435.000	1 (Paket)	39.387.350	1 (Paket)	9.490.000	1 (Paket)	4.355.500	1 (Paket)	13.845.500	1 (Paket)	102.280.500	100%	42.17%	Kec. Parengan
	Tercukupinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 (Paket)	36.884.700	1 (Paket)	24.552.900	1 (Paket)	16.585.400	1 (Paket)	2.503.000	1 (Paket)	2.787.000	1 (Paket)	5.290.000	1 (Paket)	29.842.900	100%	80.91%	Kec. Parengan
	Tercukupinya Jenis Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 (Dokumen)	16.200.000	1 (Dokumen)	6.480.000	1 (Dokumen)	3.124.800	1 (Dokumen)	720.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	720.000	1 (Dokumen)	7.200.000	100%	44.44%	Kec. Parengan
	Terpenuhinya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 (Laporan)	40.886.750	1 (Laporan)	48.858.000	1 (Laporan)	29.800.000	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	9.950.000	1 (Laporan)	9.950.000	1 (Laporan)	58.808.000	100%	143.83 %	Kec. Parengan

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	12 (Unit)	68.694.914	5 (Unit)	91.730.000	1 (Unit)	15.039.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	91.730.000	0%	133.53 %	Kec. Parengan
	Tercukupinya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 (Unit)	46.756.000	2 (Unit)	15.180.000	1 (Unit)	15.039.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	15.180.000	0%	32.47%	Kec. Parengan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
	Terpenuhinya Pengadaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	5 (Jasa)	724.311.149	5 (Jasa)	292.394.179	5 (Jasa)	157.969.150	1 (Jasa)	10.179.788	5 (Jasa)	25.709.792	5 (Jasa)	35.889.580	5 (Jasa)	328.283.759	100%	45.32%	Kec. Parengan
	Tercukupinya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 (Laporan)	12.100.000	1 (Laporan)	18.240.000	1 (Laporan)	12.000.000	1 (Laporan)	2.400.000	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	2.400.000	1 (Laporan)	20.640.000	100%	170.58 %	Kec. Parengan
	Tercukupinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 (Laporan)	149.995.500	1 (Laporan)	52.299.420	1 (Laporan)	29.197.750	1 (Laporan)	600.060	1 (Laporan)	469.000	1 (Laporan)	1.069.060	1 (Laporan)	53.368.480	100%	35.58%	Kec. Parengan
	Tercukupinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 (Laporan)	524.729.000	1 (Laporan)	205.839.759	1 (Laporan)	116.498.400	1 (Laporan)	1.275.290	1 (Laporan)	20.589.180	1 (Laporan)	21.864.470	1 (Laporan)	227.704.229	100%	43.39%	Kec. Parengan

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 (Unit)	240.199.085	11 (Unit)	93.731.574	11 (Unit)	49.128.870	0 (Unit)	5.065.500	1 (Unit)	18.689.144	1 (Unit)	23.756.544	1 (Unit)	117.488.218	9.09 %	48.49%	Kec. Parengan
	Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 (Unit)	172.595.000	11 (Unit)	62.863.574	11 (Unit)	33.345.670	2 (Unit)	3.287.000	1 (Unit)	7.183.644	1 (Unit)	10.470.644	1 (Unit)	73.334.218	9.09 %	42.49%	Kec. Parengan
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 (Unit)	21.626.500	6 (Unit)	9.918.000	9 (Unit)	5.583.200	2 (Unit)	747.500	1 (Unit)	1.305.500	1 (Unit)	2.053.000	1 (Unit)	11.971.000	16.67 %	55.35%	Kec. Parengan
	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 (Unit)	45.977.758	1 (Unit)	20.950.000	1 (Unit)	10.200.000	0 (Unit)	0	1 (Unit)	10.200.000	1 (Unit)	10.200.000	1 (Unit)	31.150.000	100%	67.75%	Kec. Parengan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										40.07										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										42.26										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	279.783.632	100%	240.229.450	100%	79.397.080	0%	10.017.750	0%	18.301.200	0%	28.318.950	0%	268.548.400	0%	95.98%	Kec. Parengan
	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 (Dokumen)	279.783.632	18 (Dokumen)	240.229.450	18 (Dokumen)	79.379.080	18 (Dokumen)	10.017.750	18 (Dokumen)	18.301.200	18 (Dokumen)	28.318.950	18 (Dokumen)	268.548.400	100%	95.98%	Kec. Parengan
	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 (Dokumen)	125.142.300	18 (Dokumen)	68.531.250	18 (Dokumen)	48.574.380	18 (Dokumen)	5.095.750	18 (Dokumen)	9.271.200	18 (Dokumen)	14.366.950	18 (Dokumen)	82.898.200	100%	66.24%	Kec. Parengan
	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 (Dokumen)	154.641.332	1 (Dokumen)	142.727.900	1 (Dokumen)	30.822.700	1 (Dokumen)	1.722.000	1 (Dokumen)	7.590.000	1 (Dokumen)	9.312.000	1 (Dokumen)	152.039.900	100%	98.32%	Kec. Parengan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				100																
Predikat kinerja sub kegiatan				Sangat Tinggi																
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)				100																
Predikat kinerja kegiatan				Sangat Tinggi																
Rata-rata capaian kinerja program(%)				60																
Predikat Kinerja Program				Rendah																

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
B.	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	1.25 %	505.025.063	11.11 %	54.888.850	1.25 %	90.499.890	0%	224.000	0%	1.698.000	0%	1.992.000	0%	56.810.850	0%	11.25%	Kec. Parengan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	505.025.063	11.11 %	165.090.150	100%	90.499.890	0%	224.000	0%	1.698.000	0%	1.992.000	0%	56.810.850	0%	33.07%	Kec. Parengan
	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan	18 (Desa)	505.025.063	18 (Desa)	165.090.150	18 (Desa)	90.499.890	18 (Desa)	224.000	18 (Desa)	1.698.000	18 (Desa)	1.992.000	18 (Desa)	56.810.850	18 (Desa)	33.07%	Kec. Parengan
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	18 (Laporan)	505.025.063	18 (Laporan)	165.090.150	18 (Laporan)	90.499.890	18 (Laporan)	224.000	18 (Laporan)	1.698.000	18 (Laporan)	1.992.000	18 (Laporan)	56.810.850	18 (Laporan)	33.07%	Kec. Parengan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				100																
Predikat kinerja sub kegiatan				Sangat Tinggi																
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)				100																
Predikat kinerja kegiatan				Sangat Tinggi																
Rata-rata capaian kinerja program(%)				0																
Predikat Kinerja Program				Sangat Rendah																
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)				0																
Predikat kinerja sasaran				Sangat Rendah																
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)				0																

No	Sasaran	Proram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* /Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Predikat kinerja sasaran	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja program(%)	50
Predikat Kinerja Program	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	59.41
Predikat kinerja kegiatan	Rendah
Total rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	73.83
Predikat kinerja sub kegiatan	Sedang

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

· Perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut perangkat daerah untuk bisa beradaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

· Kurangnya SDM Kecamatan Parengan yang memahami Teknologi Informasi

· Lemahnya sistem pengawasan terhadap bawahan,karena belum diciptakan suatu alat yang efisien,baik terhadap kemampuan dan keterampilan pegawai maupun atas sikap pegawai sendiri.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

· Mengoptimalkan realisasi kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya

· Melakukan percepatan pekerjaan yang terkait dengan target kinerja yang belum berjalan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten kerja kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD dan RKPD sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan konsisten untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapain visi dan misi Kepala Daerah.

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

No	Indikator	Standart Pelayanan Minimal (SPM) / Standart nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)
1.	Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	-	-	1,25 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %	0,40	0	1,25 %	1,25 %	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	82,50	83,01	83,50	84,05	82,64	0	83,01	84,05	

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Parengan, menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut:

1. Kualitas penyelenggaraan layanan dasar belum merata dan belum menghasilkan pembangunan manusia sebagai basis keunggulan;
2. Komplain pelayanan adminduk;
3. Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masing-masing desa yang belum maksimal.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL PRKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parengan Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 6 program, 11 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

Adapun tabel reviu terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Parengan Tahun 2025 dapat dilihat pada TABEL 2.4

TABEL 2.4

REVIU TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN TUBAN

Perangkat Daerah : Kecamatan Parengan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Parengan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	4.173.672	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Parengan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	4.173.672	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	9 Dokumen	52.496	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	9 Dokumen	52.496	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	3.225.741	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	3.225.741	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	20 Pegawai	17.425	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	20 Pegawai	17.425	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Kantor	8 Layanan	121.436	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Kantor	8 Layanan	121.436	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kec. Parengan	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	6 Unit	14.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kec. Parengan	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	6 Unit	14.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Dearah					Urusan Pemerintahan Dearah					
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	5 Jasa	161.825	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	5 Jasa	161.825	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Unit	550.546	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Parengan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Unit	550.546	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Parengan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	76.085	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Parengan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	76.085	
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Parengan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan desa	18 Desa	76.085	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Parengan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan desa	18 Desa	76.085	
III	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Parengan	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	13.327	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Parengan	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	13.327	
9	Kegiatan	Kec. Parengan	Jumlah Rekomendasi	2	13.327	Kegiatan	Kec.	Jumlah	2	13.327	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Non Perijin yang dikeluarkan	Dokumen		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Parengan	Rekomendasi Non Perijin yang dikeluarkan	Dokumen		
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Parengan	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	41.996	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Parengan	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	41.996	
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Parengan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	41.996	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Parengan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	41.996	
V	Program Pembinaan dan	Kec. Parengan	Persentase desa yang menetapkan APBDes	100%	73.082	Program Pembinaan dan	Kec. Parengan	Persentase desa yang menetapkan	100%	73.082	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Pemerintahan Desa		tepat waktu			Pengawasan Pemerintahan Desa		APBDes tepat waktu			
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Parengan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	73.082	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Parengan	73.082	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Parengan akan diakomodir dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parengan Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum Perangkat Daerah, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada: *TABEL USULAN MUSRENBANG.*

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Tuban Kecamatan Parengan

Perangkat Daerah : Kecamatan Parengan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PARENGAN

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun tabel program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN TUBAN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Parengan

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kec. Parengan	81,50 Poin	4.082.295.219,99	Silpa dan DAU		81,50 Poin	4.082.295.219,99
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	Kec. Parengan	9 Dokumen	40.650.275	Silpa		9 Dokumen	40.650.275
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Terpenuhinya Dokumen	Jumlah dokumen perencaaan	Kec. Parengan	9 Dokumen	30.475.275	Silpa		9 Dokumen	30.475.275

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah							
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Parengan	3 Laporan	10.175.000	Silpa		3 Laporan	10.175.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kec. Parengan	9 Dokumen	2.881.996.929	Silpa dan DAU		9 Dokumen	2.881.996.929
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Parengan	20 Orang	2.824.376.929	DAU		20 Orang	2.824.376.929
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kec. Parengan	9 Dokumen	57.620.000	Silpa		9 Dokumen	57.620.000

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ASN	ASN							
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	Kec. Parengan	20 Pegawai	4.826.000	Silpa		20 Pegawai	4.826.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Parengan	1 Stel	976.000	Silpa		1 Stel	976.000
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Parengan	25 Orang	3.850.000	Silpa		25 Orang	3.850.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Pengadaan Administrasi Kantor	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi	Kec. Parengan	8 Layanan	97.997.133	Silpa		8 Layanan	97.997.133

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kantor							
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Parengan	1 Paket	2.272.766	Silpa		1 Paket	2.272.766
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Parengan	1 Paket	16.984.708	Silpa		1 Paket	16.984.708
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tercukupinya Paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kec. Parengan	1 Paket	8.748.588	Silpa		1 Paket	8.748.588
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Parengan	1 Paket	31.956.800	Silpa		1 Paket	31.956.800

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Parengan	1 Paket	14.972.500	Silpa		1 Paket	14.972.500
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercukupinya Jenis Bahan Bacaan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Parengan	2 Dokumen	3.132.000	Silpa		2 Dokumen	3.132.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Parengan	1 Laporan	19.929.771	Silpa		1 Laporan	19.929.771
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	Kec. Parengan	25 Unit	92.216.850	Silpa		25 Unit	92.216.850

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Parengan	25 Unit	92.216.850	Silpa		25 Unit	92.216.850
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Jasa Penunjang	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	Kec. Parengan	5 Jasa	161.733.100	Silpa		1 Jenis	161.733.100
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercukupinya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Parengan	1 Laporan	10.880.000	Silpa		1 Laporan	10.880.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Parengan	1 Laporan	34.310.900	Silpa		1 Laporan	34.310.900
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercukupinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Parengan	1 Laporan	116.542.219	Silpa		1 Laporan	116.542.219

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kantor	Kantor yang Disediakan							
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Parengan	11 Unit	803.074.932,99	Silpa		11 Unit	803.074.932,99
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Parengan	11 Unit	33.158.433	Silpa		11 Unit	33.158.433
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Parengan	9 Unit	6.826.500	Silpa		9 Unit	6.826.500

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Lainnya								
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Parengan	2 Unit	763.089.999,99	Silpa		2 Unit	763.089.999,99
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	Kec. Parengan	100%	13.327.992	Silpa		100%	13.327.992
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Non Perijin yang dikeluarkan	Kec. Parengan	2 Dokumen	13.327.992	Silpa		2 Dokumen	13.327.992

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Meningkatnya Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Parengan	2 Dokumen	13.327.992	Silpa		2 Dokumen	13.327.992
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	Kec. Parengan	100 %	90.499.890	Silpa		100 %	81.064.890
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan desa	Kec. Parengan	18 Desa	64.486.351			18 Desa	64.486.351
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan	Kec. Parengan	18 Desa	64.486.351	Silpa		18 Desa	64.486.351

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Kec. Parengan	100 %	18.169.472	Silpa		100 %	18.169.472
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi upaya penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Parengan	1 Laporan	18.169.472	Silpa		1 Laporan	18.169.472
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Meningkatnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Kec. Parengan	1 Laporan	18.169.472	Silpa		1 Laporan	18.169.472

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan							
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	Kec. Parengan	100%	6.400.000	Silpa		100%	6.400.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Parengan	4 Kegiatan	6.400.000	Silpa	6.400.000	4 Kegiatan	6.400.000

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Terlaksanya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Kec. Parengan	50 Orang	6.400.000	Silpa		50 Orang	6.400.000

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan							
7	01	06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Kec. Parengan	100 %	55.695.000	Silpa		100 %	55.695.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Parengan	18 Dokumen	79.397.080	Silpa		18 Dokumen	76.481.080

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja tahun 2025 PAPBD				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Parengan	18 Dokumen	37.421.800	Silpa		18 Dokumen	37.421.800
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Parengan	12 Kali	18.273.200	Silpa		12 Kali	18.273.200

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendananannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parengan Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah draft Renstra Kecamatan Parengan Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matriks meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Kecamatan Parengan dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun Perubahan Program dan Kegiatan di Kecamatan;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPA Kecamatan Parengan sebagai bahan Penyusunan PAPBD sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Parengan;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini, maka semua pihak dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan harus menjadikan

Perubahan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;

4. Perubahan Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Kecamatan Parengan dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

CAMAT PARENGAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

DHARMADIN NOOR, S.P, M.Agr

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MONTONG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. Bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
c. Bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Montong Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah draft Renstra Kecamatan Montong Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Montong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
2. Menjabarkan Rencana Strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

3. Merumuskan kembali perubahan rencana kerja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II Tahun 2025, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tuban secara umum serta tujuan dan sasaran Kecamatan Montong Kabupaten Tuban secara khusus dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025; dan
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Montong Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Montong
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal P RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV Penutup

Bab II
Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai Triwulan II tahun 2025 pada Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Selanjutnya pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Montong Kabupaten Tuban bisa dilihat pada tabel E-81 berikut:

Tabel E 81
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecaman Montong Kabupaten Tuban

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	96.5 (Poin)	3.455.974.762	0 (Poin)	530.427.094	0 (Poin)	573.986.760	0 (Poin)	1.104.413.854	0 (Poin)	1.281.318.578	0 %	0 %	CAMAT
1		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	429.902.585	100 (%)	495.652.750	100 (%)	168.381.600	30.77 (%)	21.578.000	61.54 (%)	36.710.000	61.54 (%)	58.288.000	61.54 (%)	572.748.750	61.54 %	133.23 %	CAMAT
		1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 (Desa)	0	0 (Desa)	0	13 (Desa)	168.381.600	3 (Desa)	21.578.000	5 (Desa)	36.710.000	5 (Desa)	58.288.000	5 (Desa)	77.096.000	0 %	0 %	Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Trantib

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	65 (Dokumen)	19.548.632	38 (Dokumen)	117.380.000	13 (Dokumen)	49.535.500	13 (Dokumen)	12.260.000	13 (Dokumen)	5.840.000	13 (Dokumen)	18.100.000	13 (Dokumen)	142.062.000	20 %	726.71 %	Kasi Pemerintahan
		2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	13 (Laporan)	67.999.800	2 (Laporan)	5.618.000	2 (Laporan)	22.050.000	2 (Laporan)	27.668.000	2 (Laporan)	31.794.000	0 %	0 %	Kasi Kesejahteraan Masyarakat
		3. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	50.846.300	1 (Dokumen)	3.700.000	1 (Dokumen)	8.820.000	1 (Dokumen)	12.520.000	1 (Dokumen)	20.620.000	0 %	0 %	Kasi Ketentraan dan Ketertiban Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**71.79**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**38.46**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Predikat kinerja kegiatan							Sangat Rendah										
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	16.868.200	100 (%)	3.260.000	100 (%)	4.356.000	100 (%)	7.616.000	100 (%)	9.781.000	0 %	0 %	CAMAT
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	96.88 (Poin)	20.676.790	88.87 (Poin)	94.344.000	96.5 (Poin)	16.868.200	0 (Poin)	3.260.000	0 (Poin)	4.356.000	0 (Poin)	7.616.000	0 (Poin)	104.125.000	0 %	503.58 %	Kasi Yanmum
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	16.868.200	1 (Dokumen)	3.260.000	3 (Dokumen)	4.356.000	3 (Dokumen)	7.616.000	3 (Dokumen)	9.781.000	0 %	0 %	Kasi Yanmun

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										
3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	15.030.750	100 (%)	0	100 (%)	10.020.000	100 (%)	10.020.000	100 (%)	10.020.000	0 %	0 %	Kasi Trantib
		1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	15.030.750	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	10.020.000	1 (Laporan)	10.020.000	1 (Laporan)	10.020.000	0 %	0 %	Kasi Trantib

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	15.030.750	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	10.020.000	1 (Laporan)	10.020.000	1 (Laporan)	10.020.000	0 %	0 %	Kasi Trantib
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Tinggi**										
4		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 (%)	429.902.585	100 (%)	325.441.621	100 (%)	10.017.750	100 (%)	0	100 (%)	5.800.000	100 (%)	5.800.000	100 (%)	331.241.621	100 %	77.05 %	Camat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	10.017.750	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	5.800.000	1 (Laporan)	5.800.000	1 (Laporan)	5.800.000	0 %	0 %	Kasi Trantib
		1. Fasilitasi, Kordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nsional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	1 (Orang)	10.017.750	1 (Orang)	0	1 (Orang)	5.800.000	1 (Orang)	5.800.000	1 (Orang)	5.800.000	0 %	0 %	Kasi Trantib
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**100**										
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Tinggi**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (Poin)	10.820.220.582	71.04 (Poin)	5.703.055.926	81.5 (Poin)	3.245.676.462	0 (Poin)	505.589.094	0 (Poin)	517.100.760	0 (Poin)	1.022.689.854	0 (Poin)	6.881.677.504	0 %	63.6 %	Camat
		1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	20 (Orang)	13.177.000	3 (Orang)	875.000	7 (Orang)	0	7 (Orang)	875.000	7 (Orang)	875.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi	20 (Orang)	13.570.140	20 (Orang)	10.650.000	20 (Orang)	3.655.000	2 (Orang)	875.000	7 (Orang)	0	7 (Orang)	875.000	7 (Orang)	11.525.000	35 %	84.93 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	9.522.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**17.5**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	9 (Dokumen)	2.695.427.883	1 (Dokumen)	405.448.490	2 (Dokumen)	462.598.208	2 (Dokumen)	868.046.698	2 (Dokumen)	998.611.198	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	20 (Orang)	2.652.933.633	12 (Orang)	397.339.490	12 (Orang)	454.423.208	12 (Orang)	851.762.698	12 (Orang)	980.567.198	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	9 (Dokumen)	42.494.250	1 (Dokumen)	8.109.000	1 (Dokumen)	8.175.000	1 (Dokumen)	16.284.000	1 (Dokumen)	18.044.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**35.56**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	7 (Layanan)	72.737.723	2 (Layanan)	22.324.000	3 (Layanan)	5.600.000	5 (Layanan)	27.924.000	5 (Layanan)	37.424.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	9.643.260	1 (Paket)	2.000.000	1 (Paket)	2.500.000	1 (Paket)	4.500.000	1 (Paket)	6.000.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	26.532.261	1 (Paket)	40.047.500	1 (Paket)	16.351.300	1 (Paket)	6.600.000	1 (Paket)	1.500.000	1 (Paket)	8.100.000	1 (Paket)	51.047.500	100 %	192.4 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	6.728.663	1 (Paket)	2.714.000	1 (Paket)	0	1 (Paket)	2.714.000	1 (Paket)	5.814.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	5.003.500	1 (Paket)	2.500.000	1 (Paket)	0	1 (Paket)	2.500.000	1 (Paket)	4.500.000	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	3.132.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 (Laporan)	54.351.973	66 (Laporan)	98.990.877	4 (Laporan)	31.879.000	1 (Laporan)	8.510.000	2 (Laporan)	1.600.000	2 (Laporan)	10.110.000	2 (Laporan)	109.100.877	10 %	200.73 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**66.67**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**										
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan aerah	Jumlah pemeliharaan BMD	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	26 (Unit)	251.258.576	6 (Unit)	27.700.000	4 (Unit)	1.250.000	10 (Unit)	28.950.000	10 (Unit)	36.691.000	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	16 (Unit)	29.844.259	7 (Unit)	10.200.000	3 (Unit)	0	10 (Unit)	10.200.000	10 (Unit)	15.963.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyedian Jasa Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	16 (Unit)	5.376.980	5 (Unit)	2.500.000	6 (Unit)	1.250.000	11 (Unit)	3.750.000	11 (Unit)	3.750.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	4 (Unit)	212.057.671	0 (Unit)	13.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	13.000.000	0 (Unit)	13.000.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	9 (Unit)	3.979.666	1 (Unit)	2.000.000	4 (Unit)	0	5 (Unit)	2.000.000	5 (Unit)	3.978.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										46.7										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	0 (Jasa pengadaan yang disediakan)	0	0 (Jasa pengadaan yang disediakan)	0	6 (Jasa pengadaan yang disediakan)	183.037.256	1 (Jasa pengadaan yang disediakan)	46.281.604	6 (Jasa pengadaan yang disediakan)	42.932.552	6 (Jasa pengadaan yang disediakan)	89.214.156	6 (Jasa pengadaan yang disediakan)	94.670.380	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	1 (Laporan)	6.169.792	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	2.540.000	1 (Laporan)	2.540.000	1 (Laporan)	2.540.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	22.706.334	1 (Laporan)	5.656.636	1 (Laporan)	3.463.904	1 (Laporan)	9.120.540	1 (Laporan)	12.054.140	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	154.161.130	2 (Laporan)	40.624.968	2 (Laporan)	36.928.648	2 (Laporan)	77.553.616	2 (Laporan)	80.076.240	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**70.83**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**										
		7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	9 (Dokumen)	30.038.024	3 (Dokumen)	2.960.000	3 (Dokumen)	4.720.000	6 (Dokumen)	7.680.000	6 (Dokumen)	10.350.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 (Dokumen)	37.650.300	10 (Dokumen)	72.028.500	5 (Dokumen)	24.008.024	1 (Dokumen)	2.960.000	3 (Dokumen)	4.720.000	4 (Dokumen)	7.680.000	14 (Dokumen)	82.378.500	56 %	218.8 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	4 (Dokumen)	6.030.000	1 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Predikat kinerja sub kegiatan										**Tinggi**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**47.68**										
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**72.31**										
Predikat kinerja program										**Sedang**										
B	**Meningkatnya ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa**		Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	4.2 (%)	505.025.063	22.22 (%)	341.826.400	4.2 (%)	129.999.680	0 (%)	8.815.000	0 (%)	19.250.000	0 (%)	28.065.000	0 (%)	374.751.400	0 %	74.2 %	camat
1		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 (%)	102.015.050	84.62 (%)	341.826.400	100 (%)	129.999.680	0 (%)	8.815.000	30.77 (%)	19.250.000	30.77 (%)	28.065.000	30.77 (%)	374.751.400	30.77 %	367.35 %	CAMAT
		1. Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	129.999.680	100 (%)	8.815.000	100 (%)	19.250.000	100 (%)	28.065.000	100 (%)	32.925.000	0 %	0 %	Kasi PMD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Sub Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	13 (Laporan)	129.999.680	13 (Laporan)	8.815.000	13 (Laporan)	19.250.000	13 (Laporan)	28.065.000	13 (Laporan)	32.925.000	0 %	0 %	Kasi PMD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**100**									
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Tinggi**									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**100**									
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Tinggi**									
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**30.77**									
Predikat kinerja program										**Sangat Rendah**									
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)										**0**									

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja sasaran										**Sangat Rendah**										
Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)										**0**										
Predikat kinerja Sasaran										**Sangat Rendah**										
Total Rata-rata capaian kinerja Program (%)										**65.39**										
Predikat kinerja Program										**Sedang**										
Total Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)										**61.11**										
Predikat kinerja Kegiatan										**Rendah**										
Total Rata-rata capaian kinerja Sub kegiatan (%)										**64.69**										
Predikat kinerja Sub kegiatan										**Rendah**										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Cukup baiknya perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2025

- Masih adanya Formasi Jabatan yang kosong pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Ketentraman Ketertiban
- Untuk Indek Ketahanan Ekonomi tidak meningkat dikarenakan kurang optimalnya bumdes di masing masing Desa

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
• Melakukan evaluasi terhadap realisasi yang masih rendah kinerja maupun anggarannya																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD berikutnya:																				

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kantor Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

- Sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 27 sub kegiatan, Persentase capaian kinerja sudah cukup baik ditunjukkan dengan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap realisasi yang masih rendah kinerja maupun anggarannya.
- Semua sub kegiatan yang telah direncanakan, akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangung jawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2018, maka ditetapkan Indikator Kinerja Kecamatan sebagai berikut:

1. Tingkat Kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya;
2. Nilai AKIP Kecamatan;
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan;

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan konsisten untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapain Visi dan Misi Kepala Daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel TC-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Pelayanan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai AKIP Kecamatan Montong	-	-	80.01 Poin	80.50 Poin	81.00 Poin	81.50 Poin	66.95 Poin	70.95 Poin	81.00 Poin	72,90 poin	
2.	Tingkat Kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya	-	-	4.2%	4.2%	4.2%	4.2%	0%	0%	4.2%	4.2%	
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	86.04 Poin	93.54 Poin	96.25 Poin	96.50 Poin	86.04 Poin	88.75 Poin	96.25 Poin	96.25 (Poin)	

Pada pencapaian 3 (tiga) Indikator Kecamatan Montong, pada Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yang ditetapkan pada Tahun 2013. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai pijakan dalam penjabaran Isu-isu penting Perangkat Daerah terlebih dahulu disampaikan rancangan Isu Strategis Kabupaten Tuban yang tercantum dalam dokumen Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 berikut ini;

1. Penguatan fundamental ekonomi dengan transformasi structural ekonomi, yaitu hilirisasi sektor pertanian (dalam arti luas) menuju sektor yang memberikan nilai tambah tinggi yang disertai denganpengendalian penduduk;
2. Peningkatan produktifitas sektor ekonomi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah, khususnya yang berbasis potensi lokal/pertanian, baik on farm maupun off farm;
3. Peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi, khususnya yang berpendapatan rendah - petani, nelayan, pembudidaya;
4. Transformasi struktural perekonomian yang seimbang: pergeseran kontribusi produksi per sektor disertai/seiring dengan kontribusi tenaga kerja per sector;
5. Pengembangan usaha bernilai tambah tinggi (industri, perdagangan dan jasa) berbasis sektor pertanian dan penyediaan infrastruktur wilayah pendukungnya; Percepatan pembangunan desa / implementasi pembangunan kewilayahan dengan prioritas wilayah "terbelakang".
6. Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan layanan sosial lainnya) dan penyediaan infrastruktur dasar pendukungnya.

7. Peningkatan ketahanan sosial (ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perlindungan anak, pembangunan kebudayaan).
8. Penguatan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk dengan melibatkan masyarakat.
9. Urgensi Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan aman bencana.
10. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan TIK kerjasama antar stakeholder.
11. Penguatan pengelolaan keuangan daerah: optimalisasi peningkatan PAD.
12. Kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK dan kerjasama antar stakeholder pembangunan.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Montong dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Montong, sebagai berikut :

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Montong yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
2. Masih rendahnya nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Montong dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Montong, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktivitas dan nilai tambahnya sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah;
2. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
4. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
5. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Montong sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan atas program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten;
3. Belum optimalnya SDM yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh guna membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Montong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Montong, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Montong Kabupaten Tuban antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat sehingga dapat menghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

Adapun dampak atas permasalahan dan hambatan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah di tingkat kantor Kecamatan akan sangat terasa, karena kecamatan merupakan garda terdepan pemerintahan daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan :

1. Terhambatnya pelayanan publik pada masyarakat yang mengakibatnya menurunnya kepercayaan kepada Pemerintah Daerah;
2. Program-program prioritas Kepala Daerah tidak berjalan secara maksimal;
3. Kegiatan pembinaan UMKM, pertanian, koperasi, dan Desa tidak berjalan optimal;
4. Pelayanan menjadi terhambat dan kurang cepat dikarenakan Belum optimalnya SDM yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal P-RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebujakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Montong Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 6 program 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Adapun tabel reviu terhadap rancangan awal Renja Perubahan Kecamatan Montong Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut:

Tabel T-C.31
Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

Kecamatan Montong

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
I	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kecamatan Montong	Nilai AKIP perangkat daerah	81.50 Poin	3.245.676.462	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Kecamatan Montong	Nilai AKIP perangkat daerah	72,90 Poin	3.218.210.974	
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangakat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	30.038.024	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangakat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	30.038.024	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu	5 Dokumen	24.008.024	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu	2 Dokumen	24.008.024	
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Montong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.030.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Montong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6.030.000	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaaan yang tersusun	9 Dokumen	2.695.427.883	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaaan yang tersusun	9 Jenis	2.695.427.883	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
a	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Kecamatan Montong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang	2.652.933.633	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Montong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 Orang	2.321.290.956	
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	9 Dokumen	42.494.250	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	42.494.250	
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah aparatur yang Dilayani peningkatan Kedisiplinan dan potensi Pegawai	18 Orang	13.177.000,00	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah aparatur yang Dilayani peningkatan Kedisiplinan dan potensi Pegawai	2 Jenis	13.177.000,00	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Montong	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18 Paket	9.522.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Montong	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	976.000	
b	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kecamatan Montong	Jumlah pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	18 Orang	3.655.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kecamatan Montong	Jumlah pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	18 Orang	3.655.000	
4	Administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah Jenis layanan pengadaan Administrasi umum	7 Layanan	72.737.723	Administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Montong	Jumlah jenis layanan pengadaan Administrasi umum	6 Jenis layanan	72.737.723	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Montong	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	1 Paket	9.643.260	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Montong	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	1 Paket	9.643.260	
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Montong	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	16.351.300	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Montong	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	15.345.550	
c	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Montong	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	6.728.663	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Montong	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	6.728.663	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Montong	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	5.003.600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Montong	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	4.862.500	
e	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.132.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.132.000	
f	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kecamatan Montong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	10 Laporan	31.879.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kecamatan Montong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	50 Laporan	22.303.576	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
5	Pengadaan brang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Montong	Jumlah jenis pengadaan bmd	0 Unit	0	Pengadaan brang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Montong	Jumlah pengadaan bmd	23 Unit	78.016.850	
a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Montong	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Montong	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	23 Unit	78.016.850	
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Montong	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	6 Jasa	183.037.256	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Montong	Jumlah jenis Pengadaan Jasa Penunjang	3 Jenis	179.952.360	
a	Penyedia jasa surat menyurat	Kecamatan Montong	Jumlah laporan penyedia jasa surat menyurat	1 Laporan	6.169.792	Penyedia jasa surat menyurat	Kecamatan Montong	Jumlah laporan penyedia jasa surat menyurat	12 Laporan	3.084.896	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
b	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Montong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	22.706.334	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Montong	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	22.706.334	
c	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Montong	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	154.161.130	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Montong	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 Laporan	154.161.130	
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Montong	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25 Unit	251.258.576	Pemeliharaan brang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Montong	Jumlah pemeliharaan bmd	4 Jenis	499.771.986	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
a	Penyediaan jasa pemliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Montong	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajakanya	16 Unit	29.844.259	Penyediaan jasa pemliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Montong	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajakanya	16 Unit	29.974.579	
b	Pemeliharaan mebel	Kecamatan Montong	Jumlah meubel yang dipelihara	16 Unit	5.376.980	Pemeliharaan mebel	Kecamatan Montong	Jumlah meubel yang dipelihara	16 Unit	3.760.253	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Montong	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 Unit	3.979.666	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Montong	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 Unit	3.979.666	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
d	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kecamatan Montong	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	4 Unit	212.057.671	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kecamatan Montong	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	4 Unit	462.057.488	
II	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Montong	Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	100 %	16.868.200	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Montong	Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	100 %	11.548.250	
1	Pelaksaaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kecamatan Montong	Nilai indek kepuasan masyarakat (ikm)	96.50 Poin	16.868.200	Pelaksaaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kecamatan Montong	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 Jenis	11.548.250	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
a	Pelaksaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	16.868.200	Pelaksaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1200 Dokumen	11.548.250	
II	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Montong	Presentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekinomi	100 %	129.999.680	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Montong	Presentase desa yang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat	100 %	86.687.950	
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Montong	Presentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	100 %	129.999.680	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Montong	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	100 %	86.687.950	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
a	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Montong	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 Laporan	129.999.880	peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Montong	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 Laporan	86.687.950	
III	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Montong	Jumlah Presentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	15.030.000	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Montong	Jumlah Presentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	11.400.750	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Montong	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	15.030.750	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Montong	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	11.400.750	
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Montong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.030.750	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Montong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.400.750	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
IV	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Montong	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	10.017.750	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Montong	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	7.097.750	
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan Montong	Jumlah laporan koordinasi dan pembinaan Jumlah Persentase masyarakat yang ditindaklanjuti	1 Laporan	15.030.000	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan Montong	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	7.097.750	
a	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan	Kecamatan Montong	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang diyindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan	13 Orang	10.017.750	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan	Kecamatan Montong	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	300 Orang	7.097.750	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	kebangsaan dan ketahanan nasional		pembangunan perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial			kebangsaan dan ketahanan nasional		Konsultasi) Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional			
IV	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Montong	Presentase desa yang menetapkan apbdesa tepat waktu	100 %	168.381.600	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Montong	Presentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	57,14 %	100.960.100	
1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Montong	Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	13 Desa	168.381.600	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Montong	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	100.960.100	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
a	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan keuangan desa Dan pendayagunaan aset Desa	13 Dokumen	49.535.500	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan keuangan desa Dan pendayagunaan aset Desa	13 Dokumen	33.634.750	
b	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Montong	Jumlah laporan fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan	12 Laporan	67.999.800	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Montong	Jumlah laporan fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan	12 Laporan	33.509.550	

No	(APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
c	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Montong	Jumlah dokumen fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	1 Dokumen	50.846.300	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Montong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	13 Dokumen	33.815.800	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Montong dalam melaksanakaan tugas, pokok dan fungsinya mendapatkan usulan dan saran program atau kegiatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terdapat pada tabel T-C. 32;

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Bab III
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tuban yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 yaitu “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan“ serta tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) pada Kantor Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Adapun Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Montong juga telah disesuaikan dengan misi Bupati Tuban yang tertuang pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Montong

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Skala Kecamatan	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya	4,2 Poin
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional ASN, Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	96,88 Poin

Selanjutnya untuk mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Montong Kabupaten Tuban maka diperlukan adanya perubahan yang memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan yang sudah berjalan. Pada dasarnya, dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan Rencana Kerja Induk Kecamatan Montong Kabupaten Tahun 2025 dari segi jumlah 6 Program, 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut tertuang pada tabel T-C. 33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

Kecamatan Montong

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kec. Montong	81.50 Poin	3.245.676.462	Tiap bulan	72,90 Poin	3.218.210.974
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	Kec. Montong	9 Dokumen	30.038.024	Tiap bulan	8 Dokumen	30.038.024

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Montong	5 Dokumen	24.008.024	Awal Tahun	2 Dokumen	24.008.024
7	01	01	2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Montong	4 Laporan	6.030.000	Tiap tribulan	6 Laporan	6.030.000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	Kec. Montong	9 Dokumen	2.695.427.883	Tiap tribulan	9 Jenis	2.695.427.883

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanaanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Montong	18 Orang/bulan	2.652.933.633	Tiap bulan	11 Orang/ bulan	2.321.290.956
7	01	01	2.02.02	Penyedia Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksanaanya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Montong	9 Dokumen	42.494.250	Tiap Bulan	12 Dokumen	42.494.250
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	Kec. Montong	18 Orang	13.177.000	Tiap bulan	2 Jenis	13.177.000

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Montong	18 paket	9.522.000		1 paket	976.000
7	01	01	2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsuinya	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan funsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Kec. Montong	18 Paket	3.655.000	Tiap tahun	18 Paket	3.655.000
7	01	01	2.05.10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kec. Montong	18 Orang	72.737.723	Tiap bulan	18 Orang	72.737.723

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Montong	7 layanan	9.643.260	Tiap bulan	1 paket	9.643.260
7	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Montong	1 Paket	16.351.300		2 Paket	15.345.550
7	01	01	2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Montong	2 Paket	6.728.663	Tiap bulan	1 Paket	6.728.663
7	01	01	2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Montong	2 Paket	5.003.500	Tiap bulan	2 Paket	4.862.500

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang diseskan	Kec. Montong	2 Dokumen	3.132.000	Tiap bulan	2 Dokumen	3.132.000
7	01	01	2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Montong	10 Laporan	31.879.000	Tiap bulan	50 Laporan	22.303.576
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan pengadaan milik Daerah	Kec. Montong	- Unit	-		1 Unit	78.016.850

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Montong	0 Unit	-		23 Unit	78.016.850
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pengadaan jasa penunjang	Kec. Montong	6 Jasa	183.037.256	Tiap bulan	3 Jenis	183.037.256
7	01	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Montong	1 Laporan	6.169.792	Tiap bulan	12 Laporan	3.084.896

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Montong	3 Laporan	22.706.334	Tiap Bulan	12 Laporan	22.706.334
7	01	01	2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Montong	2 Laporan	154.161.130	Tiap Bulan	12 laporan	154.161.130
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Montong	25 Unit	251.258.567		4 jenis	251.258.576

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Montong	16 Unit	29.844.259	Tribulan III	16 unit	29.974.579
7	01	01	2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Jasa Pemiliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kec. Montong	16 Unit	5.376.980	Tribulan III	16 Unit	3.760.253
7	01	01	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Montong	9 Unit	3.997.680	Tribulan III	9 Unit	3.979.666

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.08.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara	Kec. Montong	4 Unit	212.057.671	Tiap Tahun	4 Unit	462.057.487
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas Pemohonan pelayanan publik kecamatan	Kec. Montong	100%	16.868.200	Tiap bulan	100%	11.548.250
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis dokumen pelayanan	Kec. Montong	96.50 Poin	16.868.200		1 jenis`	16.868.200

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	02	2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	Kec. Montong	3 Dokumen	16.868.200	Tiap bulan	1200 Dokumen	11.548.250
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	Kec. Montong	-	129.999.880	Tiap bulan	100 %	129.999.880

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Montong	-	129.999.880	Tribulan IV	7 Jenis	129.999.880
7	01	03	2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Montong	13 Laporan	129.999.880	Tribulan III	13 Laporan	129.999.880

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Jumlah Presentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Kec. Montong	100%	15.030.000	Tiap bulan	100%	11.400.750
7	1	4	2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Montong	1 Laporan	15.030.000	Tiap bulan	12 Laporan	11.400.750
7	1	4	2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian republik	Kec. Montong	1 Laporan	15.030.000	Tiap bulan	12 Laporan	11.400.750

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
				Instansi vertikal diwilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal diwilayah Kecamatan						
7	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang efektif	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	Kec. Montong	1 Laporan	10.017.750	Tribulan III	12 Laporan	7.097.750
7	01	04	2.01	Fasilitasi Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	Kec. Montong	13 Orang	10.017.750	Tiap bulan	300 Orang	7.097.750

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
				Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Penugasan Kepala Daerah	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Kec. Montong	100%	168.381.600	Tiap bulan	57.14%	100.960.100
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Meningkatnya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kec. Montong	13 Desa	168.381.600	Tiap bulan	12 laporan	100.960.100

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
				Pengawasan Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa						
7	01	06	2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Fasilitasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Per Undang - Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Montong	12 Laporan	67.999.800		12 Laporan	33.509.550
7	01	06	2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Kec. Montong	13 Dokumen	49.535.500	Tiap bulan	13 Dokumen	33.634.750

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	APBD 2025			Catatan Penting	P - RKPD 2025	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Anggaran sebelum perubahan		Target Capaian Kinerja	Anggaran setelah perubahan
1				2		3	4	5	6	7	8	9
						Pendayagunaan Aset Desa						
7	01	06	2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Fasilitasi Peneyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Kec. Montong	1 Dokumen	50.846.300	Tribulan III	13 Dokumen	33.815.800

Bab IV
Penutup

Demikian penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) pada Kecamatan Montong Tahun 2025.

Adapun sebagai uraian akhir Rencana Kerja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
2. Dengan ditetapkannya Renja ini, maka semua pihak dan kelompok pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang berkaitan, harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKJiP) Kecamatan Montong dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tahun 2025;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi, untuk mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;

Semoga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Montong Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kewilayahan yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sehingga bisa memberikan kontribusi dan alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja serta sebagai pendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kantor Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2025 masih perlu perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, selaras dengan kebutuhan dan perkembangan Kantor Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

CAMAT MONTONG

KABUPATEN TUBAN,

ttd.

AGUS SUSENO

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soko Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Draft Renstra Kecamatan Soko Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen

perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang pada akhirnya akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
29. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Merumuskan kembali perubahan rencana kerja Kecamatan Soko Kabupaten Tuban untuk Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II Tahun 2025, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tuban secara umum serta tujuan dan sasaran Kecamatan Soko Kabupaten Tuban secara khusus dapat tercapai.
2. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.
3. Memberikan informasi pencapaian hasil tribulan II tahun 2025 serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Renja Kecamatan Soko Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Kecamatan Soko agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Soko, proses penyusunan Renja Kecamatan Soko, keterkaitan antara Perubahan Renja Kecamatan Soko dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Soko.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Surat Keputusan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Soko.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Soko sampai Tahun 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja pada Tahun lalu yang kemudian disandingkan dengan capaian Renstra pada sampai Tahun terakhir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sub Bab ini juga memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun-Tahun sebelumnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan lainnya;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal P RKPD

Berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan apakah sudah sesuai serta menjelaskan catatan penting dari proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian tentang hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang menjelaskan antara lain tentang proses bagaimana usulan tersebut diperoleh, menjelaskan kesesuaian usulan tersebut dengan isu penting tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Soko sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dari rencana 48 dokumen, terealisasi sebanyak 48 dokumen atau 100 %;

2. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dari rencana 12 dokumen, terealisasi sebanyak 12 dokumen atau 100.%;

3. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum dari rencana 48 dokumen, terealisasi sebanyak 48 dokumen atau 100%;
4. Tersedianya laporan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dari rencana 23 laporan, terealisasi sebanyak 23 laporan atau 100%;
5. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan dari rencana 10 dokumen, terealisasi sebanyak 10 dokumen atau 100 %;
6. Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja perangakat daerah dari rencana 9 dokumen, terealisasi sebanyak 9 dokumen atau 100 %;

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD dan RKPD sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan konsisten untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapain visi dan misi kepala daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Kecamatan Soko Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tuban

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan Tahun 2025

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi ({{ 2025 }})		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun {{ 2025 }} (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun {{ 2025 }})		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				5		6		7		8		9		10		11 = 6+10		12 = (11/5) x 100%		13
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa**		Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	8.7 (Poin)	505.025.063	-70 (Poin)	319.223.590	8.7 (Poin)	78.499.850	0 (Poin)	10.339.750	0 (Poin)	25.539.000	0 (Poin)	35.878.750	0 (Poin)	367.138.840	0 %	72.7 %	Camat Soko
1		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi(%)	65.22 (%)	505.025.063	13.04 (%)	319.223.590	100 (%)	78.499.850	8.7 (%)	10.339.750	0 (%)	25.539.000	0 (%)	35.878.750	0 (%)	367.138.840	0 %	72.7 %	Kecamatan Soko
		1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan desa	23 (Desa)	505.025.063	23 (Desa)	319.223.590	23 (Desa)	78.499.850	3 (Desa)	10.339.750	8 (Desa)	25.539.000	11 (Desa)	35.878.750	11 (Desa)	367.138.840	47.83 %	72.7 %	kasi PMD

		1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	115 (Laporan)	505.025.063	46 (Laporan)	319.223.590	23 (Laporan)	78.499.850	6 (Laporan)	10.339.750	5 (Laporan)	25.539.000	11 (Laporan)	35.878.750	57 (Laporan)	367.138.840	49.57 %	72.7 %	kasi PMD
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**47,83**									
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**47,83**									
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**									
Rata-rata capaian kinerja program(%)										**0**									
Predikat kinerja program										**Sangat Rendah**									
B	**Meningkatnya pelayanan pada masyarakat**		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.58 (%)	17.125.428.628	90.06 (%)	8.996.453.774	90.58 (%)	3.800.066.632	0 (%)	596.102.909	0 (%)	628.757.481	0 (%)	1.224.860.390	0 (%)	10.395.438.409	0 %	60.7 %	Camat
1		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)	100 (%)	848.442.211	100 (%)	127.093.615	100 (%)	17.999.966	100 (%)	4.189.000	100 (%)	2.125.000	100 (%)	6.314.000	100 (%)	133.407.615	100 %	15.72 %	Kasi Pelayanan Umum
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Layanan Umum yang diterbitkan di tingkat Kecamatan	55 (Dokumen)	84.844.210	33 (Dokumen)	127.093.615	24 (Dokumen)	17.999.966	6 (Dokumen)	4.189.000	6 (Dokumen)	2.125.000	12 (Dokumen)	6.314.000	45 (Dokumen)	133.407.615	81.82 %	157.24 %	Kasi Pelayanan Umum
		1. Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	24 (Dokumen)	17.999.966	6 (Dokumen)	4.189.000	6 (Dokumen)	2.125.000	12 (Dokumen)	6.314.000	12 (Dokumen)	6.314.000	0 %	0 %	Kasi Pelayanan Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50**									
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**									

Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**50**									
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**									
2		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	100 (%)	252.511.773	100 (%)	256.569.100	100 (%)	39.999.800	100 (%)	4.795.000	100 (%)	8.928.000	100 (%)	13.723.000	100 (%)	270.292.100	100 %	107.04 %	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	240 (Kali)	252.511.773	108 (Kali)	256.569.100	48 (Kali)	39.999.800	10 (Kali)	4.795.000	12 (Kali)	8.928.000	22 (Kali)	13.723.000	22 (Kali)	270.292.100	9.17 %	107.04 %	Kasi Trantib
		1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	39.999.800	2 (Laporan)	4.795.000	3 (Laporan)	8.928.000	5 (Laporan)	13.723.000	5 (Laporan)	13.723.000	0 %	0 %	Kasi Trantib
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**41,67**									
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**45,83**									
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**									
3		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	360.650.013	100 (%)	363.864.290	100 (%)	42.499.824	0 (%)	4.451.000	0 (%)	7.305.000	0 (%)	11.756.000	0 (%)	375.620.290	0 %	104.15 %	Camat
		1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan	240 (Kali)	360.650.013	191 (Kali)	363.864.290	48 (Kali)	42.499.824	12 (Kali)	4.451.000	12 (Kali)	7.305.000	24 (Kali)	11.756.000	24 (Kali)	375.620.290	10 %	104.15 %	Kasi Pemerintahan

		Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan Desa																
		1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	240 (Dokumen)	125.651.013	167 (Dokumen)	104.465.630	48 (Dokumen)	42.499.824	12 (Dokumen)	4.451.000	12 (Dokumen)	7.305.000	24 (Dokumen)	11.756.000	191 (Dokumen)	116.221.630	79.58 %	92.5 %	Kasi Pemerintahan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**50**									
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**50**									
Predikat kinerja kegiatan										**Sangat Rendah**									
4		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)	82 (%)	15.471.434.058	75.9 (%)	7.875.316.569	81.5 (%)	3.641.867.142	0 (%)	574.417.909	0 (%)	601.698.481	0 (%)	1.176.116.390	0 (%)	9.225.557.204	0 %	59.63 %	Sekretaris Kecamatan
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	45 (Dokumen)	419.323.155	22 (Dokumen)	171.988.975	9 (Dokumen)	67.600.000	2 (Dokumen)	11.675.000	2 (Dokumen)	17.049.150	4 (Dokumen)	28.724.150	4 (Dokumen)	200.713.125	8.89 %	47.87 %	Kasubbag Program dan Pelaporan
		1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaaan Perangkat Daerah	20 (Dokumen)	301.500.000	12 (Dokumen)	95.569.675	4 (Dokumen)	67.600.000	2 (Dokumen)	11.675.000	1 (Dokumen)	17.049.150	3 (Dokumen)	28.724.150	3 (Dokumen)	124.293.825	15 %	41.23 %	Kasubbag Program dan Pelaporan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**75**									
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sedang**									
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	60 (Dokumen)	14.216.538.153	36 (Dokumen)	6.968.029.313	12 (Dokumen)	2.966.727.982	3 (Dokumen)	510.227.841	3 (Dokumen)	542.666.199	6 (Dokumen)	1.052.894.040	6 (Dokumen)	8.170.429.682	10 %	57.47 %	Kasubbag Umum
		1. Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 (Orang/Bulan)	13.744.714.985	19 (Orang/Bulan)	6.707.264.672	19 (Orang/Bulan)	2.928.027.982	19 (Orang/Bulan)	500.552.841	17 (Orang/Bulan)	542.666.199	17 (Orang/Bulan)	1.043.219.040	17 (Orang/Bulan)	7.892.565.041	68 %	57.42 %	Kasubbag Umum
		2. Kegiatan	Jumlah	60	413.001	36	229.035	12	38.70	3	9.675.0	0	0	3	9.675.0	3	246.135	5 %	59.6 %	Kasubb

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Dokumen)	.500	(Dokumen)	.841	(Dokumen)	0.000	(Dokumen)	00	(Dokumen)		(Dokumen)	00	(Dokumen)	.841			ag Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**57,24**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**										
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	30 (Orang)	77.783.169	18 (Orang)	54.245.000	23 (Orang)	28.470.500	23 (Orang)	1.359.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	1.359.000	0 (Orang)	57.733.500	0 %	74.22 %	Kasubbag Umum
		1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	29 (Orang)	25.000.000	30 (Orang)	26.775.000	23 (Orang)	16.303.500	23 (Orang)	1.359.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	1.359.000	0 (Orang)	30.263.500	0 %	121.05 %	Kasubbag Umum
		2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	23 (Paket)	12.167.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**0**										
Predikat kinerja sub kegiatan										**Sangat Rendah**										
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum	5 (Paket)	242.863.149	5 (Paket)	149.010.175	5 (Paket)	83.172.577	5 (Paket)	5.281.500	5 (Paket)	2.435.000	5 (Paket)	7.716.500	5 (Paket)	164.726.675	100 %	67.83 %	Kasubbag Umum
		1. :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	7.997.019	1 (Paket)	1.077.500	0 (Paket)	0	0 (Paket)	1.077.500	0 (Paket)	1.077.500	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		2. :Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 (Paket)	49.999.500	1 (Paket)	25.615.300	1 (Paket)	14.043.026	1 (Paket)	704	1 (Paket)	2.435.000	1 (Paket)	3.139.000	1 (Paket)	28.754.300	100 %	57.51 %	Kasubbag Umum
		3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	15 (Dokumen)	34.995.000	7 (Dokumen)	14.400.000	1 (Dokumen)	6.003.000	1 (Dokumen)	1.040.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.040.000	1 (Dokumen)	16.520.000	6.67 %	47.21 %	Kasubbag Umum

		undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 (Laporan)	35.011.000	36 (Laporan)	100.202.050	12 (Laporan)	55.129.532	2 (Laporan)	2.460.000	2 (Laporan)	0	4 (Laporan)	2.460.000	4 (Laporan)	109.582.050	6.67 %	312.99 %	Kasubbag Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**58,33**									
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**									
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 (Jasa)	244.323.149	4 (Jasa)	213.000.481	5 (Jasa)	131.795.950	5 (Jasa)	31.114.568	5 (Jasa)	27.063.132	5 (Jasa)	58.177.700	5 (Jasa)	281.186.597	25 %	115.09 %	Kasubbag Umum
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	48 (Laporan)	113.003.000	36 (Laporan)	50.101.337	12 (Laporan)	24.200.000	3 (Laporan)	4.028.736	3 (Laporan)	3.870.364	6 (Laporan)	7.899.100	6 (Laporan)	59.793.845	12.5 %	52.91 %	Kasubbag Umum
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	5 (Laporan)	10.195.000	2 (Laporan)	2.542.000	1 (Laporan)	500	3 (Laporan)	3.042.000	3 (Laporan)	3.042.000	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 (Laporan)	49.999.500	29 (Laporan)	106.140.119	12 (Laporan)	97.400.950	3 (Laporan)	24.543.832	3 (Laporan)	22.692.768	6 (Laporan)	47.236.600	6 (Laporan)	161.591.727	12.5 %	323.19 %	Kasubbag Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**53,33**									
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**									
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	85 (Unit)	206.780.134	28 (Unit)	109.146.785	28 (Unit)	364.100.133	11 (Unit)	14.760.000	8 (Unit)	12.485.000	19 (Unit)	27.245.000	19 (Unit)	140.871.785	22.35 %	68.13 %	Kasubbag Umum

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 (Unit)	125.462.985	11 (Unit)	66.435.905	11 (Unit)	23.998.196	6 (Unit)	8.880.000	1 (Unit)	1.795.000	7 (Unit)	10.675.000	7 (Unit)	77.110.905	12.73 %	61.46 %	Kasubbag Umum
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 (Unit)	35.000.000	15 (Unit)	10.755.000	15 (Unit)	22.600.100	4 (Unit)	5.880.000	5 (Unit)	7.270.000	9 (Unit)	13.150.000	9 (Unit)	26.705.000	34.62 %	76.3 %	Kasubbag Umum
		3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	2 (Unit)	317.501.837	0 (Unit)	0	1 (Unit)	3.420.000	1 (Unit)	3.420.000	1 (Unit)	5.100.000	0 %	0 %	Kasubbag Umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										**57,88**									
Predikat kinerja sub kegiatan										**Rendah**									
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										**60,38**									
Predikat kinerja kegiatan										**Rendah**									
5		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 (%)	192.390.573	100 (%)	373.610.200	100 (%)	57.699.900	100 (%)	8.250.000	100 (%)	8.701.000	100 (%)	16.951.000	100 (%)	390.561.200	100 %	203 %	Kasi Kesra
		1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	240 (Kali)	192.390.573	23 (Kali)	373.610.200	48 (Kali)	57.699.900	12 (Kali)	8.250.000	12 (Kali)	8.701.000	24 (Kali)	16.951.000	24 (Kali)	390.561.200	10 %	203 %	Kasi Kesra
		1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Fasilitasi, Koordinasi	1500 (Orang)	192.390.573	2300 (Orang)	373.610.200	100 (Orang)	57.699.900	15 (Orang)	8.250.000	25 (Orang)	8.701.000	40 (Orang)	16.951.000	2340 (Orang)	390.561.200	156 %	203 %	Kasi Kesra

		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)									**40**										
Predikat kinerja sub kegiatan									**Sangat Rendah**										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)									**50**										
Predikat kinerja kegiatan									**Sangat Rendah**										
Rata-rata capaian kinerja program(%)									**60**										
Predikat kinerja program									**Rendah**										
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)									**0**										
Predikat kinerja sasaran									**Sangat Rendah**										

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Soko Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Sasaran Kinerja Kecamatan Soko pada Semester 1 tahun 2025 masih sangat rendah hal dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa dengan indikator Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya dengan target 8,7% belum ada realisasi;
   b. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 90,26 Poin sampai dengan laporan ini dibuat belum ada realisasi terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan tetapi telah dilakukan berbagai upaya untuk perbaikan pelayanan di Kecamatan Soko.
2. Capaian Program sampai dengan Triwulan II dapat disampaikan sebagai berikiut:
   a. Program yang mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Indikator Persentase penyelesaian atas perrmohonan pelayanan publik Kecamatan dengan target 100% (Seratus Persen) tercapai 100% (seratus persen) dan indikator Persentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu dengan target 100% (Seratus Persen) dengan capaian 100% (seratus persen); selanjutnya indikator Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti dengan target 100% (seratus persen) tercapai 100% (seratus persen)
   b. Program yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu indikator Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi dengan target 100% (Seratus Persen) tetapi hal ini dikarenakan dari 23 Desa yang ada di Kecamatan Soko belum ada realisasi dari Kementerian Desa tentang jumlah Desa yang meningkat nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya. Program selanjutnya yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu indikator Program penunjang Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target 76,65 Poin belum ada realisasi atau 0 Poin dikarenakan belum ada evaluasi SAKIP di Internal Kabupaten Tuban.
3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Soko Tahun 2025, target kinerja masing-masing kegiatan pada semua program, belum

semua kegiatan bisa mencapai dengan hasil/keluaran yang direncanakan, adapun capaian kinerja kegiatan yaitu:

a. Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen), dengan target kinerja sebanyak 9 Dokumen terealisasi 7 Dokumen;
b. Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen), dengan target kinerja sebanyak 12 Dokumen terealisasi 6 Dokumen;
c. Indikator Kegiatan Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang), dengan target kinerja sebanyak 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 Pegawai Non PNS atau 19 Orang terealisasi 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS);
d. Indikator Kegiatan Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan), dengan target kinerja sebanyak 7 Layanan terealisasi 7 Layanan;
e. Indikator Kegiatan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) (Unit), dengan target 3 Unit yang terdiri dari 2 unit peralatan dan mesin dan 1 unit bangunan gedung akan tetapi belum ada realisasi atau 0 dikarenakan adanya perubahan regulasi proses pengadaan ;
f. Indikator Kegiatan Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa), dengan target kinerja 4 Jenis Jasa terealisasi 4 Jenis Jasa ;
g. Indikator Kegiatan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) (Unit), dengan target kinerja 28 Unit terealisasi 19 Unit;
h. Indikator Kegitan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan, dengan target kinerja sebanyak 24 Dokumen Perijinan Non Usaha terealisasi 12 Dokumen;
i. Indikator Kegiatan Jumlah laporan pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti, dengan target kinerja sebanyak 15 laporan teralisasi 15 Laporan;
j. Indikator Kegiatan Jumlah Desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu, dengan target kinerja sebanyak 23 Dokumen terealisasi 23 Dokumen;
k. Indikator Kegiatan Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan target kinerja 23 Desa tercapai 11 Desa.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:

1. Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dikarenakan belum ada realisasi
2. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) belum ada realisasi
3. Adanya Efisiensi Anggaran sehingga ada sub kegiatan yang belum bisa direalisasikan
4. Adanya Regulasi baru sehingga pengadaan Gedung belum bisa direalisasikan

Kebijakan yang diambil sebagai pendorong keberhasilan kinerja:

1. Koordinasi Internal yang lebih Intensif
2. Sinergitas dengan Instansi dan Desa Se-Kecamatan Soko yang lebih Intensif
3. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Membantu Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada pencapaian 2 (dua) indikator Kecamatan Soko, pada Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun Tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada Tahun 2014. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima Tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Soko
Kabupaten Tuban

No	indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya					26,09	43,48			26,09	43,48	
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah			3,79 Poin	3,88 Poin	3,97 Poin	4,07 Poin	2.90	3.55	3.68	3.81	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	84.50 Poin	90.08 Poin	90,26 Poin	90,46 Poin	89,58 Poin	90.06 Poin	90,26 Poin	90,46 Poin	
4.	Nilai AKIP OPD			80.5	81	76,65	77,4	75	75,90	76,65	77,4	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Soko adalah sebagai berikut :

1. Pada capaian kinerja poin 2 (dua) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dengan capaian 91,5 %;
2. Tercapainya nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Nilai Sangat Baik (A/90,06 Poin) kategori sangat baik meski tidak mencapai target, hal ini di pengaruhi oleh kurangnya atusias masyarakat dalam pengisian kuisioner IKM dan kurangnya pendampingan petugas pada saat pengisian kuisioner IKM
3. Pada capaian kinerja poin 4 (satu) Nilai AKIP OPD dengan capaian 93,7 %;

2.3 PENENTUAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Soko sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan atas program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten;
3. Belum optimalkannya SDM yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh guna membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Soko sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Soko, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa yang lebih baik;
3. Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masing-masing desa yang belum maksimal;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja, judi,antar perguruan dan lain-lain) yang belum optimal;
5. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;
6. Keberadaan tambang pasir kuarsa illegal Desa Wadung
7. KIS banyak yang tidak bisa diaktifkan
8. Banyak KPM BPNT dan PKH yang tidak cair
9. Komplain Pelayanan Adminduk
10. Tanah longsor BBWS di desa Kenongosari sampai saat ini belum Tertangani.
11. Sebagian jalan Kabupaten dan poros desa belum ada PJU

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan. Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Kecamatan selalu melakukan analisis kebutuhan yang meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD).

Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Kecamatan. Untuk lebih jelasnya tentang reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan analisa kebutuhan pada Kecamatan Soko dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TUBAN

Perangkat Daerah : Kecamatan Soko

No	Rancangan Awal (APBD 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Soko	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 poin	3.405.257.545	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 poin	3.651.000.246	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Soko	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	67.600.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi yang	9 Dokumen	52.949.000	

No	Rancangan Awal (APBD 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
						Daerah	tersusun			
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Soko	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	12 Dokumen	2.730.118.385	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	12 Dokumen	2.710.294.666	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Soko	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	6 Dokumen	28.470.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	6 Dokumen	10.404.500	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Soko	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	83.172.577	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	59.964.577	

No	Rancangan Awal (APBD 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Soko	Jumlah dokumen Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	141.835.550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	130.895.950	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Soko	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	6 Jenis	78.016.850	
8	Pemeliharaan	Kec.		28	354.060.53		Jumlah	28	608.474.70	

No	Rancangan Awal (APBD 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Soko	Jumlah Pemeliharaan BMD	Unit	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD	Unit	39	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Soko	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)	100 %	17.999.966	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)	100 %	15.454.966	
9	Kegiatan	Kec.	Jumlah	11	17.999.966	Kegiatan	Jumlah	11	15.454.966	

No	Rancangan Awal (APBD 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Soko	Dokumen Layanan Umum yang diterbitkan di tingkat Kecamatan	Dokumen		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen Layanan Umum yang diterbitkan di tingkat Kecamatan	Dokumen		
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Soko	persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100%	78.499.850	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100%	75.565.850	
10	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Soko	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan	23 Desa	78.499.850	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdaya	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatka	23 Desa	75.565.850	

No	Rancangan Awal (APBD 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Desa		fasilitasi pemberdayaan desa			an Desa	n fasilitasi pemberdayaan desa			
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Soko	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	100%	39.999.800	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	100%	32.250.000	
11	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Soko	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	48 Kali	39.999.800	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	48 Kali	32.250.000	

No	Rancangan Awal (APBD 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
						Ketertiban Umum	umum)			
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Soko	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%)	100%	57.699.900	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%)	100%	30.522.900	
12	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Soko	Jumlah Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48 Kali	57.699.900	Kegiatan Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48 Kali	30.522.900	
VI	Program	Kec.	Persentase	100%	42.499.824	Program	Persentase	100%	35.207.824	

No	Rancangan Awal (APBD 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Soko	desa yang menetapkan APBDes tepat waktu			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	desa yang menetapkan APBDes tepat			
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Soko	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Desa	48 Kali	42.499.824	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Desa	48 Kali	35.207.824	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SOKO

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Pada P-APBD Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Perangkat Daerah : Kecamatan Soko

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II tersebut memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambilkan dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program / kegiatan yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 ini meliputi:

Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya semua program dan kegiatan merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan pada tahun 2025 yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025.

Adapun tabel Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Tahun 2025

Kecamatan Soko

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Presentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan /Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	21,74
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya	Jumlah Desa Yang Naik Nilai Indeks Desanya pada Kecamatan /Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	26,09
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,07 Poin
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,26 Poin

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kecamatan Soko

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	KECAMATAN SOKO	76,65 Poin	3.641.867.142	APBD		76,65 Poin	3.651.000.246
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	KECAMATAN SOKO	9 Dokumen	67.600.000	APBD		9 Dokumen	52.949.000
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN SOKO	4 Dokumen	67.600.000	APBD		4 Dokumen	52.949.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
		Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	KECAMATAN SOKO	12 Dokumen	2.966.727.982	APBD		12 Dokumen	2.710.294.666
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN SOKO	19 orang	2.928.027.982	APBD		19 orang	2.671.594.666
7.01.01.2.02.005	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	KECAMATAN SOKO	12 Dokumen	38.700.000	APBD		12 Dokumen	38.700.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Kepegawaian	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	KECAMATAN SOKO	23 Orang	28.470.500	APBD		23 Orang	33.871.500
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KECAMATAN SOKO	23 Paket	12.167.000	APBD		23 Paket	976.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KECAMATAN SOKO	23 Orang	16.303.500	APBD		23 Orang	9.428.500
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	KECAMATAN SOKO	5 Layanan	83.172.577	APBD		5 Layanan	59.964.577
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KECAMATAN SOKO	1 Paket	7.997.019	APBD		1 Paket	7.997.019
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KECAMATAN SOKO	1 Paket	14.043.026	APBD		1 Paket	11.324.026
7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	KECAMATAN SOKO	1 Dokume	6.003.000	APBD		1 Dokum	4.698.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
	dan Peraturan Perundang undangan	dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan		n				en	
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN SOKO	12 Laporan	55.129.532	APBD		12 Laporan	35.945.532
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Jasa Penunjang	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN SOKO	4 Dokumen	131.795.950	APBD		4 Dokumen	130.895.950
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KECAMATAN SOKO	12 Laporan	24.200.000	APBD		12 Laporan	26.200.000
7.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan	Tersedianya Jasa Peralatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	KECAMATAN SOKO	12 Laporan	10.195.000	APBD		12 Laporan	9.295.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
	dan Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KECAMATAN SOKO	12 Laporan	97.400.950	APBD		12 Laporan	97.400.950
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	KECAMATAN SOKO	28 Unit	364.100.133	APBD		28 Unit	608.474.703
7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KECAMATAN SOKO	11 Unit	23.998.196	APBD		11 Unit	22.680.266

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
		Lapangan								
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KECAMATAN SOKO	15 Unit	22.600.100	APBD		15 Unit	19.456.900
7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	KECAMATAN SOKO	2 Unit	317.501.837	APBD		2 Unit	566.337.537
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)	KECAMATAN SOKO	100%	17.999.966	APBD		100%	15.454.966
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Terlaksananya pelayanan pada	Jumlah Dokumen Layanan Umum yang diterbitkan di	KECAMATAN SOKO	24 Ijin	17.999.966	APBD		24 Ijin	15.454.966

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
	Camat	masyarakat	tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	KECAMATAN SOKO	24 Dokumen	17.999.966	APBD		24 Dokumen	15.454.966
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi	KECAMATAN SOKO	100 %	78.499.850	APBD		100 %	75.565.850
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya pemberdayaan desa	Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan	KECAMATAN SOKO	12 Kegiatan	78.499.850	APBD		12 Kegiatan	75.565.850
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Meningkatnya Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan	KECAMATAN SOKO	23 Laporan	78.499.850	APBD		23 Laporan	75.565.850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	KECAMATAN SOKO	100 %	39.999.800	APBD		100 %	32.250.000
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN SOKO	48 kali	39.999.800	APBD		48 kali	32.250.000
7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	KECAMATAN SOKO	12 Laporan	39.999.800	APBD		12 Laporan	32.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%)	KECAMATAN SOKO	100 %	57.699.900	APBD		100 %	30.522.900
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	KECAMATAN SOKO	48 Kali	57.699.900	APBD		48 Kali	30.522.900
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Terlaksananya Pembinaan Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	KECAMATAN SOKO	100 orang	57.699.900	APBD		100 orang	30.522.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Prosentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	KECAMATAN SOKO	100 %	42.499.824	APBD		100 %	35.207.824
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Desa	KECAMATAN SOKO	48 kali	42.499.824	APBD		48 kali	35.207.824

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025 APBD				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2025 P-RKPD	
				Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator
		Desa								
7.01.06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN SOKO	23 Dokumen	42.499.824			23 Dokumen	42.499.824

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban. Perubahan Renja ini disusun dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program/kegiatan Tahun 2025.

Sebagai uraian akhir Perubahan Renja Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun Perubahan program dan kegiatan OPD;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-Perubahan sebagai bahan Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Tuban, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA);
3. Dengan ditetapkannya perubahan Renja ini, maka semua pihak dan pengampu kepentingan (*stakeholders*) yang lain agar menjadikan dokumen ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
5. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Diharapkan dengan tersusunnya perubahan Renja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi, baik di sekretariat dan seksi-seksi, agar konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rancangan Rencana Kerja ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan dan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja ke depan.

CAMAT SOKO
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

SUCIPTO, S.Sos, MM

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan;
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan; dan
d. bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 104

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu Tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jenu Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Jenu Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Renstra perangkat daerah yang telah

ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja, penyusunan Rancangan Perubahan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Renja bersinergi dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
   Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun 2025 serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
2. Menjabarkan perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perubahan Rencana Kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025; dan
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Renja Kecamatan Jenu Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan Capain Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Penentuan isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Jenu
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayananmasyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapatdilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2018 ditetapkan Indikator Kinerja Kecamatan Jenu sebagai berikut:

a. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
b. Fungsi :
    1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;
9. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
10. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
11. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

c. Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

d. Indikator Tujuan : Nilai IKM;

e. Target 2025 : 91,35

f. Kinerja Sasaran :

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Independen acak penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Seksi Pemerintahan	Camat

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan konsisten untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapain Visi dan Misi kepala daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Kecamatan Jenu Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TUBAN
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2025

KECAMATAN JENU

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Perangkat Daerah Penang gung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		1
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp	K
A	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.23 (Poin)	800.923.687	89.27 (Poin)	375.828.310	91.35 (Poin)	3.729.072.042	0 (Poin)	490.304.492		521.100.801	0 (Poin)	1.011.405.293	0 (Poin)	1.557.056.268	0 %	194.41 %	Sekretaris Kecamatan
1		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelesaian atas Permohonan Pelayanan Publik Kecamatan	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	5.000.000	0 (%)	0			0 (%)	0	100 (%)	0	0 %	0 %	CAMAT
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85.23 (Poin)	800.923.687	92 (Poin)	392.592.009	91.35 (Poin)	5.000.000	0 (Poin)	0			0 (Poin)	0	0 (Poin)	392.592.009	0 %	49.02 %	Kepala Seksi Pelayanan Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	5.000.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	7 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Kepala Seksi Pelayanan Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	
2																				
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Konflik Sosial yang telah Ditangani	0(%))	0	0 (%)	0	100 (%)	46.476.000	0 (%)	1.150.000	100 (%)	3.035.500	100 (%)	4.185.500	100 (%))	6.400.500	0 %	0 %	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
		1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	80 (Kali)	215.465.200	248 (Kali)	64.341.000	100 (Kali)	46.476.000	0 (Kali)	1.150.000	50 (Kali)	3.035.500	50 (Kali)	4.185.500	50 (Kali)	70.741.500	62.5 %	32.83 %	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	50 (Orang)	46.476.000	25 (Orang)	1.150.000	50 (Orang)	3.035.500	50 (Orang)	4.185.500	50 (Orang)	6.400.500	0 %	0 %	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
3		**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	42.269.500	0 (%)	700.000	100 (%)	1.917.500	100 (%)	2.617.500	100 (%)	2.617.500	0 %	0 %	Kasi Pemerintahan
		1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintaha n desa	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	42.269.500	0 (%)	700.000	100 (%)	1.917.500	100 (%)	2.617.500	100 (%)	2.617.500	0 %	0 %	Kepala Seksi Pemerintahan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapatkan asistensi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	29.269.500	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	1.040.000	3 (Dokumen)	1.040.000	3 (Dokumen)	1.040.000	0 %	0 %	Kasi Pemerintahan
		3. Sub Kegiatan FasilitasiPenyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	13.000.000	0 (Dokumen)	700.000	3 (Dokumen)	877.500	3 (Dokumen)	1.577.500	3 (Dokumen)	1.577.500	0 %	0 %	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
4		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	81.5 (Poin)	3.635.326.542	0 (Poin)	488.454.492	0 (Poin)	516.147.801	0 (Poin)	1.004.602.293	0 (Poin)	1.172.209.958	0 %	0 %	Sekretaris Kecamatan
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	52.004.500	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Kasubag Program dan Pelaporan
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 (Dokumen)	495.524.000	6 (Dokumen)	88.237.240	3 (Dokumen)	47.440.000	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	350.000	3 (Dokumen)	350.000	3 (Dokumen)	94.308.490	20 %	19.03 %	Kasubbag Prolap

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 (Dokumen)	170.951.415	6 (Dokumen)	71.620.800	3 (Dokumen)	4.564.500	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	71.620.800	20 %	41.9 %	Kasubbag Prolap

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	3 (Orang)	2.719.922.859	3 (Orang)	429.663.204	3 (Orang)	460.737.569	3 (Orang)	890.400.773	3 (Orang)	1.017.390.797	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 (Orang)	2.211.229.135	15 (Orang)	4.046.862.384	12 (Orang)	2.680.997.859	12 (Orang)	429.403.204	12 (Orang)	446.037.569	12 (Orang)	875.440.773	12 (Orang)	5.049.293.181	70.59 %	228.35 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 (Dokumen)	167.800.000	3 (Dokumen)	110.178.947	3 (Dokumen)	38.925.000	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	14.700.000	3 (Dokumen)	14.960.000	3 (Dokumen)	125.138.947	100 %	74.58 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.ITahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	1 (Jenis)	11.638.000	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	21 (Paket)	11.638.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawian

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pengadaan administrasi umum	1 (Paket)	26.745.500	2 (Paket)	233.105.898	2 (Paket)	96.181.183	0 (Paket)	15.222.089	2 (Paket)	5.690.500	2 (Paket)	20.912.589	2 (Paket)	262.011.992	200 %	979.65 %	Kasubbag Umum

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.II Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2		4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 (Paket)	8.379.000	2 (Paket)	3.350.700	3 (Paket)	2.000.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	0	3 (Paket)	4.550.700	60 %	54.31 %	Kasubbag Umum
		2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	26.745.500	2 (Paket)	233.105.898	2 (Paket)	18.889.773	1 (Paket)	3.413.200	2 (Paket)	2.112.000	2 (Paket)	5.525.200	2 (Paket)	241.345.603	200 %	0 %	Kasubbag Umum
		3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	5 (Paket)	21.499.410	1 (Paket)	5.750.000	5 (Paket)	1.278.500	5 (Paket)	7.028.500	5 (Paket)	7.028.500	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		4.Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	10.290.500	1 (Paket)	78.889	2 (Paket)	1.100.000	2 (Paket)	1.178.889	2 (Paket)	1.982.889	0 %	0 %	Kasubbag Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 (Paket)	18.000.000	2 (Paket)	7.200.000	1 (Paket)	3.523.500	1 (Paket)	600.000	1 (Paket)	1.200.000	1 (Paket)	1.800.000	1 (Paket)	9.600.000	50 %	53.33 %	Kasubbag Umum
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 (Laporan)	10.000.000	8 (Laporan)	100.171.000	2 (Laporan)	39.978.000	1 (Laporan)	5.380.000	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	5.380.000	2 (Laporan)	106.781.000	13.33 %	1067.81 %	Kasubbag Umum
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	2 (Laporan)	633.369.000	2 (Laporan)	427.222.162	2 (Laporan)	183.080.000	1 (Laporan)	39.652.929	2 (Laporan)	40.034.267	2 (Laporan)	79.687.196	2 (Laporan)	528.900.624	100 %	83.51 %	Kasubbag Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	21.000.000	1 (Laporan)	2.718.773	2 (Laporan)	4.853.915	2 (Laporan)	7.572.688	2 (Laporan)	11.545.110	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 (Laporan)	633.369.000	2 (Laporan)	427.222.162	0 (Laporan)	162.080.000	2 (Laporan)	36.934.156	2 (Laporan)	35.180.352	2 (Laporan)	72.114.508	2 (Laporan)	517.355.514	100 %	81.68 %	Kasubbag Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	5 (Unit)	572.500.000	0 (Unit)	3.916.270	5 (Unit)	9.335.465	5 (Unit)	13.251.735	5 (Unit)	18.163.355	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	10 (Unit)	65.000.000	1 (Unit)	3.916.270	10 (Unit)	8.319.060	10 (Unit)	12.235.330	10 (Unit)	17.146.950	0 %	0 %	Kasubbag Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																	
		3. Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	5 (Unit)	7.500.000	0 (Unit)	0	3 (Unit)	1.016.405	3 (Unit)	1.016.405	3 (Unit)	1.016.405	0 %	0 %	Kassubag Umum dan Kepegawaian
		4. Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	500.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum
B	**Meningkatnya ketahanan ekonomi**		Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks	100 (%)	505.025.063	20 (%)	164.594.500	20 (%)	80.000.000	0 (%)	3.770.000	20 (%)	4.187.000	20 (%)	7.957.000	20 (%)	2.950.116.431	20 %	584.15 %	Kasi PMD

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Trib.I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	100 (%)	505.025.063	-40 (%)	2.939.399.431	20 (%)	85.842.418	0 (%)	3.770.000	20 (%)	4.187.000	20 (%)	7.957.000	20 (%)	2.950.116.431	20 %	584.15 %	Sekretaris Kecamatan
5		**Program Pemberday aan Masyaraka t Desa Dan Kelurahan**	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	0 (%)	0	0 (%)	0	20 (%)	85.842.418	0 (%)	3.770.000	100 (%)	4.187.000	0 (%)	3.770.000	100 (%)	7.957.000	100 (%)	10.717.000	Kasi Seksi Pemeberdayaan Masyarakat Desa
		1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	0 (%)	0	0 (%)	0	0 (%)	85.842.418	0 (%)	3.770.000	100 (%)	4.187.000	100 (%)	7.957.000	100 (%)	10.717.000	0 %	0 %	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		1. Peningkata n Efektitas Kegiatan Pemberday aan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	7 (Laporan)	85.842.418	2 (Laporan)	3.770.000	17 (Laporan)	4.187.000	2 (Laporan)	3.770.000	2 (Laporan)	3.770.000	0 %	0 %	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jenu Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Sasaran Kinerja Kecamatan Jenu pada Semester 1 tahun 2025 masih sangat rendah hal dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa dengan indikator Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya dengan target 20% belum ada realisasi;
   b. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 91,35 Poin sampai dengan laporan ini dibuat belum ada realisasi terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan tetapi telah dilakukan berbagai upaya untuk perbaikan pelayanan di Kecamatan Jenu.
2. Capaian Program sampai dengan Triwulan II dapat disampaikan sebagai berikiut:
   a. Program yang mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, indikator Persentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu dengan target 100% (Seratus Persen) dengan capaian 100% (seratus persen); selanjutnya indikator Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti dengan target 100% (seratus persen) tercapai 100% (seratus persen)
   b. Program yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu indikator Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi dengan target 100% (Seratus Persen) tetapi hal ini dikarenakan dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Jenu belum ada realisasi dari Kementerian Desa tentang jumlah Desa yang meningkat nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya. Program selanjutnya yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu indikator Program penunjang Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target 75,80 Poin belum ada realisasi atau 0 Poin dikarenakan belum ada evaluasi SAKIP di Internal Kabupaten Tuban.
3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jenu Tahun 2025, target kinerja masing-masing kegiatan pada semua program, belum semua kegiatan bisa mencapai dengan hasil/keluaran yang direncanakan, adapun capaian kinerja kegiatan yaitu:

a. Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen), dengan target kinerja sebanyak 3 Dokumen terealisasi 3 Dokumen;
b. Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen), dengan target kinerja sebanyak 12Oramg terealisasi 12 Orang;
c. Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target kinerja sebanyak 3 Dokumen terealisasi 3 Dokumen;
d. Indikator Kegiatan Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan), dengan target kinerja sebanyak 7 Layanan terealisasi 7 Layanan;
e. Indikator Kegiatan Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa), dengan target kinerja 2 Laporan Jasa terealisasi 1 Laporan Jasa ;
f. Indikator Kegiatan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) (Unit), dengan target kinerja 5 Unit terealisasi 0 Unit;
g. Indikator Kegitan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan, dengan target kinerja sebanyak 7 Dokumen Perijinan Non Usaha terealisasi 0 Dokumen;
h. Indikator Kegiatan Jumlah laporan pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti, dengan target kinerja sebanyak 3 Dokumen teralisasi 0 Dokumen;
i. Indikator Kegiatan Jumlah Desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu, dengan target kinerja sebanyak 100 % terealisasi 0 %;
j. Indikator Kegiatan Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan target kinerja 17 Laporan tercapai 2 Laporan.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:

1. Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dikarenakan belum ada realisasi
2. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) belum ada realisasi
3. Adanya Efisiensi Anggaran sehingga ada sub kegiatan yang belum bisa direalisasikan

Kebijakan yang diambil sebagai pendorong keberhasilan kinerja:

1. Koordinasi Internal yang lebih Intensif
2. Sinergitas dengan Instansi dan Desa Se-Kecamatan Jenu yang lebih Intensif
3. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Membantu Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada pencapaian 2 (dua) indikator Kecamatan Jenu, pada Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun Tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada Tahun 2014. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima Tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persetanse Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	-	-	n/a	n/a	23,53	41,18	n/a	n/a	23,53	41,18	
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah			3,79	3,88	4,47	4,48	n/a	n/a	4,47	4,48	
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	92,31	91,33	89,77	90,27	88,30	89,27	89,77	90,27	
4.	Indeks Desa Membangun	-	-	80,50	81,00	81,50	82,00	74,90	78,35	75,80	76,70	

2.3 PENENTUAN ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis terklait pelayanan Kecamatan Jenu yang berhasil diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas dan sarana prasana pelayanan publik kecamatan dan Desa yang lebih baik dan memadai memudahkan Masyarakat untuk mengakses pelayanan;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan penyakit masyarakat, narkoba, judi dll) yang belum optimal;
5. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;
6. Potensi wilayah belum tergarap dengan baik

Adapun isu penting dan hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jenu sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan umum yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi untuk menjawab tantangan/ isu penting tersebut antara lain:
   - Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.
   - Kompetensi dan kapasitas ASN di Kecamatan
2. Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Jenu
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Jenu
   - Ketersediaan ASN sebagai SDM pengelola TIK.
3. Pendampingan Potensi Ekonomi Desa
   Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain:
   - Pendampingan BUMDes dan BUMDesma serta Koperasi Desa Merah Putih
   - Pengembangan potensi unggulan Desa
   - Pemeliharaan Jaringan Irigasi
   - Pembangunan jalan Usaha tani
4. Pendampingan Desa Menuju Desa Mandiri
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lalin :
   - Tingkat pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaporan keuangan.
   - Ketersediaan tenaga pendamping Desa.

- Sinergitas Forkopimka, Dinas/ Instansi Vertikal bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
- Intensitas koordinasi antar lintas sektor.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jenu Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 5 program 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Jenu Tahun 2025 dapat dilihat pada *TABEL 2.4*

TABEL 2.4 (T-C.31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN JENU

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Jenu	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,00 poin	2.670.227	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Jenu	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,80 poin	2.670.227	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	6 dokumen	36.802.250	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	6 dokumen	36.802.250	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	35.277.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	35.277.250	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jenu	Jumlah dokumen koordinasi dan laporan capaian kinerja	3 laporan	4.525.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jenu	Jumlah dokumen koordinasi dan laporan capaian kinerja	3 laporan	4.525.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	12 orang/ bulan	2.304.015	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	12 orang/ bulan	2.304.015	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jenu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	16 Orang/ bulan	2.088.511.736	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jenu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	16 Orang/ bulan	2.088.511.736	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	38.920.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	38.920.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	21 orang	11.638.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	21 orang	11.638.000	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.978	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.978	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jenu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jenu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jenu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	18.894.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jenu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	18.894.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Jenu	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	21.499.410	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Jenu	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	21.499.410	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jenu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	9.300.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jenu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	9.300.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2 dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2 dokumen	3.600.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	32.378.000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	32.378.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.515	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.515	
	Pengadaan Mebel	Kec. Jenu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kec. Jenu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jenu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	14.515	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jenu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	14.515	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	182.031	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	5 Laporan	182.031	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	21.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	21.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	162.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	162.500.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	20 unit	62.210	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	20 unit	62.210	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jenu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jenu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	`12 unit	65.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Jenu	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	500.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Jenu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	821.308.219	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Jenu	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	5.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Jenu	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	5.000.000	-
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 dokumen	5.000.000	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 dokumen	5.000.000	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Jenu	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 %	78.189.918	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Jenu	persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 %	78.189.918	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jenu	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musayawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 laporan	78.189.918	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jenu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	4 laporan	78.189.918	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	78.189.918	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	78.189.918	
IV	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Kec. Jenu	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	94%	341.585	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Kec. Jenu	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	94%	341.585	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	45.676.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Jenu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	45.676.000	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jenu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	45.676.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Jenu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	100 Orang	45.676.000	
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jenu	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	41.748	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jenu	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	41.748	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	40.349.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jenu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Dokumen	40.349.500	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	27.349.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	27.349.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	3 dokumen	13.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jenu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	3 dokumen	13.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat Kecamatan kemudian ditingkat Kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jenu akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jenu Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025:

Tabel 2.5

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Jenu Tahun 2025

Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Kecamatan Jenu, maka perlu dilampirkan hal-hal sebagai berikut :

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan ini menjadi arah Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Kecamatan Jenu berperan dalam mendukung misi ke-2, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu “Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan” dan sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah” dan misi ke-4, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani” dan sasaran “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”. Dari sasaran RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenu Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa”.

Tujuan ini memiliki 2 indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Indikator tersebut terdiri dari Presentase Desa Mandiri dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan serangkaian kinerja yang dapat diwujudkan dalam bentuk tahapan, fokus, ataupun aspek prioritas dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan renstra. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenu Tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yakni:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat

Masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan ketercapaiannya melalui indikator yang terukur. Indikator yang dijadikan acuan sasaran terdiri dari:

1. Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Adapun perincian dari rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Jenu Tahun 2025-2029 beserta target, adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jenu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3	4
		Tingkat Kemiskinan	13,54
		Persentase Desa Mandiri	46,95
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	41,18
	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	23,53
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	93,28
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,51
	Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,51
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,77

Tabel 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81 poin	3.635.326.542	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,80 Poin	3.694.398.027	59.071.485
7 01 01 2.01	**Perencanaan, penganggangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	6 dokumen	52.004.500	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	8 dokumen	34.522.250	(17.482.250)
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	47.440.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	29.997.250	(17.442.750)
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3 Laporan	4.564.500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3 Laporan	4.525.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			(39.500)
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	12 Orang/ Bulan	2.719.922.859	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	12 Orang/ Bulan	2.398.034.277	(321.888.582)
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	2.680.997.859	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	2.359.114.277	(321.883.582)
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	38.925.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	38.920.000	(5.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	12 PNS dan 6 Non PNS	11.638.000	Jumlah layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	12 PNS dan 6 Non PNS	976,000	(10.662.000)
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 PNS dan 6 Non PNS	11.638.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 PNS dan 6 Non PNS	976,000	(10.662.000)
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	96.181.180	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	84.051.951	(12.129.229)
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	2.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	4.000.000	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	18.889.773	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	18.889.773	-
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	21.499.410	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	25.960.178	4.460.768
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	5 paket	10.290.500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	5 paket	9.300.500	(990.000)
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.523.500	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.523.500	-
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	39.978.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	22.378.000	(17.600.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan BMD	1 Jenis	0	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 jenis	93.548.050	93.548.050
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	29 unit	93.548.050	93.548.050
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	5 Laporan	183.080.000	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	5 Laporan	183.540.000	460.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	21.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	21.000.000	-
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	8 laporan	162.080.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	8 laporan	160.540.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			(1.960.000)
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan BMD	20 Unit	572.500.000	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	20 Unit	899.725.499	327.225.499
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	65.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	64.167.280	(832.720)
7 01 01 2.04. 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	821.308.219	321.308.219

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 %	5.000.000	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	100 %	5.000.000	-
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah dokumen layanan yang diterbitkan	7 Dokumen	5.000.000	Jumlah jenis dokumen pelayanan	7 Dokumen	5.000.000	-
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7 Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7 Dokumen	5.000.000	-
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 %	85.842.418	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	100%	67.021.450	(18.820.968)
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musayawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Laporan	85.842.418	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musayawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Laporan	67.021.450	(18.820.968)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 laporan	85.842.418	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 laporan	67.021.450	(18.820.968
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	0	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	5.614.000	5.614.000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 laporan	0	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	17 laporan	5.614.000	5.614.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	17 laporan	0	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	17 laporan	5.614.000	5.614.000
7.01.05	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	-	46.476.500	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	26.833.000	(976.000)
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50 Orang	46.476.500	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50 Orang	26.833.000	(976.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	46.476.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	26.833.000	(976.000)
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	42.269.500	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	100%	38.589.500	(3.680.000)
7 01 06 2.01	**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	42.269.500	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	38.589.500	(3.680.000)
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	8 Dokumen	29.269.500	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	8 Dokumen	27.349.500	(1.920.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban	5 Dokumen	13.000.000	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban	5 Dokumen	11.240.000	(1.760.000)

BAB IV

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan rincianpenjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen
   Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Jenu;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan *(stakeholders*) yang berkaitan, harus menjadikan Perubahan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jenu, dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025; dan
5. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam melaksanakan Program dan Pembangunan.

Demikian penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini dibuat untuk dijadikan pedoman operasional guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas, serta mengantisipasinya potensi perubahan dan perkembangan yang ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan dan perubahan terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

CAMAT JENU
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

YOELIANI ENDANG POERWATI

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

No	Paraf Koordinasi
6.	Sekretaris Daerah
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tuban
4.	Inspektur Inspektorat Daerah
3.	Kabag.Hukum Setda
2.	Kepala Bappeda Litbang
1.	Camat Jenu

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MERAKURAK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan : di Tuban
pada tanggal : 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan : di Tuban
pada tanggal : 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merakurak Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah draft Renstra Kecamatan Merakurak Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singgahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
2. Menjabarkan Rencana Strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dan;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Merakurak Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2025

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Merakurak sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kewilayahan, pada tahun 2025 Kecamatan Merakurak melaksanakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang diturunkan dari Misi 2 dan Misi 4 Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Adapun Analisis kinerja Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada Triwulan II Tahun 2025 berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 (T-C. 29)
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
Tahun berkenaan di capaian Renstra

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggng Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
A	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks ketahanan ekonomi nya	2,5 %	505.025.063	- 0.22 %	101.002.500	0,14 %	63.615.377	0%	6.700.000	0%	6.365.000	0%	13.065.000	0 (%)	20.600.000	0 %	51,07 %	CAMAT
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDA-YAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	505,02 5,063	100%	101.002.500	100%	63.615.377	0%	6.700.000	0%	6.365.000	0%	13.065.000	0 (%)	20.600.000	0 %	51,07 %	CAMAT
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyaraka-tan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	100%	505,02 5,063	100%	101.002.500	100%	63.615.377	100 %	6.700.000	100%	6.365.000	100 %	13.065.000	100 (%)	20.600.000	100 %	51,07 %	KASI PMD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggng Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	505,025,063	9 Laporan	101.002.500	9 Laporan	63.615.377	9 Laporan	6.700.000	9 Laporan	6.365.000	9 Laporan	13.065.000	27 (Laporan)	20.600.000	60 %	51,07 %	KASI PMD

Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)	
Predikat kinerja sub kegiatan	
Rata-rata kinerja kegiatan (%)	
Predikat kinerja kegiatan	
Rata-rata kinerja program (%)	
Predikat kinerja program	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
B	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,04 Poin	869,082,987	87.35 (Poin)	3.304.922.213	84.36 (Poin)	4.353.239.979	0 (Poin)	811.218.441	0 (Poin)	656.694.042	0 (Poin)	1.467.912.483	0 (Poin)	4.772.834.696	0 %	549.18 %	CAMAT
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik Kecamatan	100 (%)	42.270.598	100 (%)	8.453.909	100 (%)	21.895.250	100 (%)	0	100 (%)	3.325.600	100 (%)	3.800.000	100 (%)	69.530.000	100 %	114.73 %	CAMAT
	Terlaksanaya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	84.26 Poin	42.270.598	87.28 (Poin)	8.453.909	89.82 (Poin)	21.895.250	0 (Poin)	0	0 (Poin)	3.325.600	0 (Poin)	3.800.000	0 (Poin)	69.530.000	0 %	114.73 %	KASI YANUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 (Dokumen)	42.270.598	9 (Dokumen)	8.453.909	3 (Dokumen)	14.520.000	2 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	3.325.600	3 (Dokumen)	3.800.000	12 (Dokumen)	69.530.000	80 %	114.73 %	KASI YANUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																				
Predikat kinerja kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 (%)	400.909.853	100 (%)	80.179.976	100 (%)	19.305.200	100 (%)	0	100 (%)	3.800.000	100 (%)	3.800.000	100 (%)	3.800.000	100 %	68,96 %	CAMAT
	Terlaksanany a Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentram an dan ketertiban umum	60 (Kali)	400.909.853	36 (Kali)	80.179.976	12 (Kali)	19.305.200	3 (Kali)	0	3 (Kali)	3.800.000	6 (Kali)	3.800.000	42 (Kali)	3.800.000	70 %	68,96 %	KASI TRANTIB
	Terlaksanany a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	5 (Laporan)	400.909.853	3 (Laporan)	80.179.976	1 (Laporan)	19.305.200	1 (Lapo ran)	0	1 (Laporan)	3.800.000	1 (Lapo ran)	3.800.000	4 (Laporan)	3.800.000	80 %	68,96 %	KASI TRANTIB

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
3	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 (%)	115.752.503	100 (%)	25.125.000	97 (%)	45.894.575	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	336.517.028	100 %	191.65 %	CAMAT
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	5 (Laporan)	115.752.503	1 (Laporan)	25.125.000	1 (Laporan)	45.894.575	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	336.517.028	20 %	191.65 %	KASI KESRA
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsuttasi) Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	22 (Orang)	115.752.503	22 (Orang)	25.125.000	250 (Orang)	45.894.575	5 (Orang)	0	25 (Orang)	0	250 (Orang)	0	250 (Orang)	336.517.028	100 %	191.65 %	KASI KESRA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	dan Ketahanan Nasional	Ketahanan Nasional	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
4	Meninykatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	483.488.269	200 (%)	90.855.536	100 (%)	14.999.750	0 (%)	0	0 (%)	4.255.000	0 (%)	4.255.000	200 (%)	4.255.000	200 %	54,5 %	CAMAT
	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	95 (Desa)	454.288.982	19 (Desa)	90.855.536	19 (Desa)	14.999.750	19 (Desa)	0	19 (Desa)	4.255.000	19 (Desa)	4.255.000	19 (Desa)	342.168.950	80 %	54,5 %	KASI PEMERINTAHAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa	95 (Doku men)	169.904. 082	19 (Doku men)	90.855.536	19 (Doku men)	14.999.750	19 (Dok umen)	0	19 (Doku men)	4.255.000	19 (Dok u men)	4.255.000	19 (Dok ume n)	4.255.000	80 %	293.39 %	KASI PEMERI NTAHAN
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																				
Predikat kinerja kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
C	Penunjang										-		-		-					CAMAT
	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM)	89,26 Poin	42.270.598	84,31 Poin	419.782.050	84,34 Poin	3.114.866.649	0 Poin	381.408.847			0 Poin	956.519.920	0 Poin	1.467.903.113	0%	210.41 %	CAMAT
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82.00 (Poin)	2.542.800.381	81.00 (Poin)	2.552.291.754	0 (Poin)	784.261.441	0 (Poin)	381.408.847	0	0 (Poin)	0 Poin	945.139.320)	0 Poin	7.706.441.757	60,37 %	74.25 (Poin)	SEKCAM
2	Terlaksanaanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	30 (Dokume n)	154.498.250	6 (Dokumen)	31.099.650	6 (Dokumen)	15.182.500	9 (Dokumen)	2.550.00	0	9 (Dokumen)	4 Dokumen	2.550.000	4 Dokumen	5.270.000	92,08 %	29 (Dokumen)	KASUBAG PROLA P

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencana an Perangkat DaerahRea lisasi Kinerja SKPD	3 (Do k um e n)	75.999. 000	3 (Dok ume n)	15.199.800	8 (Do k ume n)	6.972. 000	9 (Do k um e n)	2.550.00	0	9 (Doku men)	Do ku me n	2.550.000	Dok ume n	2.550.000	1.3 3 %	Dokume n	KASUBAG PROLAP
3	Tersusunny a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksa an yang tersusun	45 (Lapo ran)	11.553.221. 146	27 (Lapo ran)	2.285.459.30 3	9 (Lapo ran)	2.235.206.4 62	9 (Lap oran)	355.056.76	9 (Lapo ran)	525.707.99 7	9 (Lap oran)	667.642.14 7	36 (Lapo ran)	1.107.821 .023	80 %	52,79 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 (Ora ng)	11198.017.6 55	15 (Oran g)	2.239.003.53 1	21 (Oran g)	2.235.206.4 62	15 (Ora ng)	355.056.76 6	15 (Ora ng)	463.497.21 9	15 (Ora ng)	667.642.14 7 1	15 (Oran g)	1.107.821 .023	78.9 5 %	53,88 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Terlaksanaanya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 (Dokumen)	319.416.175	12 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	52.044.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	7.425.000	1 (Dokumen)	12.183.000	1 (Dokumen)	14.743.000	0 %	0 %	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
4	Terlaksanaan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administra si Umum	3 (Paket)	164.566. 676	3 (Paket)	32.870 .950	3 (Paket)	76.030.130	3 (Pak e t)	2.550.00 0	3 (Paket)	13.280.00 0	3 (Paket)	19.262 .000	6 (Paket)	17.203.000	20 0 %	203.430. 533	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	3 (Paket)	56.613. 176	3 (Paket)	10.961.900	3 (Paket)	10.958.750	3 (Pak e t)	0	3 (Paket)	5.350.000	3 (Paket)	3.900. 000	3 (Paket)	5.350.000	10 0 %	5.350.00 0	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	9.996.390	0 (Pak e t)	0	1 (Paket)	1.375. 000	1 (Paket)	1.375. 000	1 (Paket)	1.375.000	0 %	0 %	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	3 (Paket)	29.962. 500	3 (Paket)	5.992.500	3 (Paket)	5.997.475	3 (Paket)	0	3 (Paket)	2.500.000	3 (Paket)	2.500.000	3 (Paket)	4.410.000	10 0 %	4.410.000	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	10 (Dok ume n)	21.500.000	6 (Dokumen)	4.510. .000	1 (Dokumen)	3.393.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dok ume n)	1.080.000	1 (Dokumen)	1.080.000	7 (Dokumen)	11.990.000	70 %	54,5 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 (Laporan)	30.000. 250	28 (Laporan)	6.402 000	24 (Laporan)	41.684.504	6 (Laporan)	2.550.000	6 (Laporan)	0	12 (Laporan)	3.923.000	40 (Laporan)	7.203.000	40 0 %	712.08 %	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
6	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	40 (Unit)	97.400.000	4 (Unit)	25.000.000	8 (Unit)	95.166.204	0 (Unit)	0	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	53.021.000	4 (Unit)	212.756.713	0 %	78,23 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 (Unit)	97.400.000	4 (Unit)	25.000.000	8 (Unit)	95.166.204	0 (Unit)	0	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	53.021.000	0 (Unit)	194.536.713	0 %	1471.15 %	KASUBAG UMUM
7	Terlaksanaanya Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	35 (Jasa)	624.032.500	7 (Jasa)	124.406.500	2 (Jasa)	118.014.500	2 (Jasa)	7.737.982	2 (Jasa)	63.244.445	2 (Jasa)	36.260.515	2 (Jasa)	361.742.326	50 %	88,46 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 (Laporan)	131.400.000	4 (Laporan)	26.280.000	2 (Laporan)	34.331.000	2 (Laporan)	11.036.502	2 (Laporan)	10.328.955	2 (Laporan)	10.328.955	6 (Laporan)	14.075.648	120 %	99,01 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 (Laporan)	203.533.000	3 (Laporan)	38.400.000	1 (Laporan)	27.325.000	1 (Laporan)	3.650.000	1 (Laporan)	7.400.000	1 (Laporan)	11.050.000	4 (Laporan)	17.575.000	80 %	90,34 %	KASUBAG UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	40 (Unit)	262.727.000	24 (Unit)	54.145.351	29 (Unit)	206.867.938	10 (Unit)	0	11 (Unit)	156.279.658	21 (Unit)	156.279.658	21 (Unit)	181.984.658	70 %	472.06 %	KASUBAG UMUM
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n danPajak Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharа dan	12 (Unit)	136.971.000	12 (Unit)	27.979.750	12 (Unit)	33.188.315	6 (Unit)	0	6 (Unit)	12.683.000	6 (Unit)	12.683.000	6 (Unit)	100.968.500	100 %	317,7 %	KASUBAG UMUM
	Terlaksanan ya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharа	11 (Unit)	52.870.000	10 (Unit)	10.750.000	15 (Unit)	10.479.800	3 (Unit)	0	5 (Unit)	2.000.000	8 (Unit)	2.000.000	8 (Unit)	2.000.000	160 %	143 %	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perang-kat Daerah Penangg ung Jawab
										I		II								
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11 =6+10**		**12 =11/5x100%**		**13**
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	
	Terlaksana n ya Pemelihara a n/rehabilit a si Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemelihar aa n/Rehabili ta si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit as i	3 (Unit)	42.650. 000	1 (Unit)	8.330.000	1 (Unit)	156.120.4 40	1 (Unit)	0	1 (Unit)	136.371.65 8	1 (Unit)	136.371. 658	1 (Unit)	155.891.6 58	33. 33 %	2530.8 2 %	KASUBA G UMUM
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)																				
Predikat kinerja sub kegiatan																				
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																				
Predikat kinerja kegiatan																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	:	Pembinaan kepada pegawai terjalin secara hirarkis dan rutin Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah sesuai rencana
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih nol di karena nilai hasil survei baru keluar pada saat TW 4 Indeks Desa Membangun (IDM) masih nol di karena nilai hasil survei baru keluar pada saat TW 3 Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah masih nol di karena nilai hasil Review baru keluar pada saat TW 3 Pengadaan BMD (Unit) masih nol karena akan ada pengadaan pada saat TW 2 karena menyesuaikan anggaran kas Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya masih nol karena akan ada pengadaan pada saat TW 2 karena menyesuaikan anggaran kas Desa yang menetapkan Perubahan APBDes tepat waktu pada TW 2 dan Desa yang menetapkan APBDes 2025 tepat waktu pada TW
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trisvulan berikutnya•):	:	
Melakukan evaluasi terhadap realisasi yang masih rendah kinerja maupun anggarannya Perangkat Daerah kabupaten/kota ber ikutnya*):		

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kantor Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.887.755.481,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.064.677.368,00 dengan output dari rencana jumlah 73,80 poin terealisasi 0 poin, output belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi AKIP baru akan ada jadwal reviu AKIP pada triwulan III, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan AKIP, pada program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.558.525,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.550.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 dokumen terealisasi 5 dokumen, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

      Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.558.525,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.550.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 dokumen terealisasi 9 dokumen.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.345.975.452,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.046.604.879,00 dengan output dari rencana jumlah 9 laporan terealisasi 9 laporan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.141.531.744,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 777.540.195,00 dengan output dari rencana jumlah 21 Orang/bulan terealisasi 15 Orang/bulan, output tidak tercapai dikarenan ada PNS yang pensiun dan PPPK belum penerimaan SK sehingga belum ada realisasinya
      2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 46.996.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 12.183.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi 1 dokumen

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 0 paket terealisasi 0 paket, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dari rencana anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 0 orang dokumen terealisasi 0 orang, di karenakan terkena efisiensi anggaran pada tahap 1.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 55.397.767,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 18.843.000,00 dengan output dari rencana jumlah dengan output dari rencana jumlah 5 layanan terealisasi 5 layanan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 11.159.155,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 5.350.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 paket terealisasi 3 paket
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.996.390,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.350.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi 1 paket
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.782.725,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.900.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 paket terealisasi 3 paket
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.393.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.080.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi 1 dokumen
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.684.504,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.

5.563.000,00 dengan output dari rencana jumlah 24 laporan terealisasi 12 laporan, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 0,13% dari target tahunan

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 95.166.204,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 61.021.000,00 dengan output dari rencana jumlah 8 unit terealisasi 0 unit, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1) Pengadaan Mebel dari rencana anggaran sebesar Rp. 18.232.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 8.000.000,00 dengan output dari rencana jumlah 8 Unit terealisasi 0 unit, , sehingga target output tidak tercapai, akan melakukan perubahan penyesuaian pada saat pelaksanaan usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 54.134.204,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 53.021.000,00 dengan output dari rencana jumlah 6 Unit terealisasi 0 unit, akan melakukan perubahan penyesuaian

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 270.717.400,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 127.240.004,00 dengan output dari rencana jumlah 2 Jasa terealisasi 2 Jasa, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikdari rencana anggaran sebesar Rp. 57.601.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 21.294.620,00 dengan output dari rencana jumlah 2 laporan terealisasi 2 laporan
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 213.116.400,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 105.945.384,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 1 laporan

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran anggaran sebesar Rp. 545.158.732,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 175.939.600,00 dengan output dari rencana jumlah 29 unit terealisasi 21 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 70% dari target tahunan, percapaian yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 36.404.232,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 17.020.600,00 dengan output dari rencana jumlah 12 unit terealisasi 7 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 58.33% dari target tahunan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.754.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.380.000,00 dengan output dari rencana jumlah 15 Unit terealisasi 8 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 53.33% dari target tahunan
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 154.539.000,00 dengan output dari rencana jumlah 2 unit terealisasi 1 unit, pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 50% dari target tahunan, akan melaksanakan berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung yang telah diusulkan mempercepat rehab Gedung yang mengalami kerusakan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.520.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.645.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.520.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.645.000,00 dengan output dari rencana jumlah 84.36 poin terealisasi 0 poin, output belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru akan ada jadwal evaluasi pada triwulan IV, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat, memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan, dalam kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.520.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.645.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 dokumen terealisasi 3 dokumen.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.911.665,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 23.818.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 0%, output belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi baru akan ada jadwal evaluasi pada triwulan III, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, memberikan fasilitasi dan pemdampingan kepada petugas desa dalam penyusunan dokumen kelengkapan Indek Desa Membangun (IDM), pada program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.911.665,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 23.818.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.911.665,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 23.818.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 laporan terealisasi 9 laporan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.110.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.014.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.110.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.014.000,00 dengan output dari rencana jumlah 12 kali terealisasi 6 kali, , pencapaian target output sudah sesuai pada target pertriwulan II walau baru tercapai 50% dari target tahunan, pada kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut :
      1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.110.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.014.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 1 Laporan

5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 42.365.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.350.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 42.365.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.350.000,00 dengan output dari rencana jumlah 1 Laporan terealisasi 1 Laporan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaldari rencana anggaran sebesar Rp. 42.365.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.350.000,00 dengan output dari rencana jumlah 25 orang terealisasi 25 0rang

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.655.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.750.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 0%, output belum tercapai karena Desa yang menetapkan APBDes baru akan ada jadwalkan pada triwulan III, menyebabkan capaian target output tidak tercapai, memfasilitasi dan memberikan pendampingan Desa-Desa dalam penyusunan APBDes sesuai jadwal agar penetapannya tepat waktu pada triwulan III, pada program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.655.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.750.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 Desa terealisasi 9 Desa, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

      1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 41.655.00000 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 20.750.000,00 dengan output dari rencana jumlah 9 dokumen terealisasi 17 dokumen.

Adapun untuk target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum realisasi atau tercapai dikarenakan masih proses pelaksanaan dan menunggu release dari pihak terkait.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Merakurak dibawah ini :

Tabel 2.2 (T-C. 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	-	-	-	-	26,32	42,11	15,79	-	26,32	42,11	
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	3,26	3,43	3,09	-	3,26	3,43	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	84,33	84,34	89,82	90,37	87,28		89,82	90,37	
4	Indeks Desa Membangun								-			
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	71,00	81,5	73,80	75,10	72,50		73,80	75,10	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Merakurak adalah sebagai berikut :

1. Pada capaian kinerja poin 1 (satu) meningkatnya tingkat kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya dengan capaian -11,11% meski tidak mencapai target dan mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman petugas Desa pada saat penginputan IDM;
2. Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Nilai Baik (B/87,28 Poin) kategori baik dan mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh Kepuasan Masyarakat atau pelayanan umum yang diberikan Kecamatan. Kepuasan masyarakat sendiri dinilai dari beberapa unsur pelayanan antara lain Persyaratan, Prosedur, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifik, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan.
3. Pada capain nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Merakurak masih mendapat nilai BB (72,50 Poin).

2.3 Penentuan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Merakurak

Adapun isu penting dan hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Merakurak sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan umum yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi untuk menjawab tantangan/ isu penting tersebut antara lain:
   - Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.
   - Kompetensi dan kapasitas ASN di Kecamatan
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

   Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain:
   - Kompetensi ASN dalam urusan perencanaan dan pelaporan keuangan.
   - Sarana dan prasarana pendukung tekhnologi informasi kounikasi (TIK/ ICT).
   - Tingkat pengetahuan dan ketrampilan ASN dalam menggunakan tekhnologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI).

3. Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Merakurak Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran yang menunjang pembiayaan.
   - Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Merakurak
   - Ketersediaan ASN sebagai SDM pengelola TIK.
4. Pendampingan Desa Menuju Desa Mandiri Hal-hal yang mempengaruhi antara lalin :
   - Tingkat pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaporan keuangan.
   - Ketersediaan tenaga pendamping Desa.
5. Kompetensi dan kapasitas tenaga pendamping desa. Sinergitas Forkopimka, Dinas/ Instansi Vertikal bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran.
   - Intensitas koordiansi antar lintas sektor.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah aspek krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan publik yang prima. Kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan, memiliki posisi strategis untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berikut adalah rincian tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kecamatan Merakurak:

Tantangan dalam Peningkatan Pelayanan Kecamatan Merakurak:

1) Proses administrasi yang panjang, kurang efisien, dan membutuhkan banyak tahapan persetujuan masih menjadi keluhan utama masyarakat.
2) Keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama dalam pengadaan teknologi modern dan pelaksanaan inovasi pelayanan.
3) Tidak semua pegawai kecamatan memiliki keterampilan dan penguasaan teknologi digital yang cukup untuk menjalankan sistem pelayanan modern secara efektif.
4) Pelatihan yang kurang memadai atau tidak berkelanjutan membuat adopsi teknologi dan peningkatan kualitas layanan berjalan lambat.

Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Kecamatan

1) Pengembangan portal, website, atau media sosial yang mudah diakses dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, data pembangunan, dan dokumen-dokumen pelayanan secara transparan kepada masyarakat.
2) Tersedianya kesempatan untuk pelatihan dan pendidikan formal bagi pegawai dapat meningkatkan kualitas SDM, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan keterampilan manajerial.
3) Dengan perbaikan sistem dan dukungan teknologi, fokus kerja dapat bergeser ke pelayanan prima dan orientasi pada hasil yang terukur (berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM yang tinggi).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan Renja Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

Penelaahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban yang tercantum di dalam Rancangan Perubahan RKPD 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan análisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban yang sesuai dan yang tidak sesuai antara

arahan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan;

6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban hasil review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi,indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Dalam proses rancangan Perubahan RKPD 2025, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban membandingkan rancangan awal RKPD tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Hal ini dimaksud untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas guna mencapai target renstra tahun berjalan. Adapun review Perubahan rencana kerja terhadap rancangan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 (T-C 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Merakurak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Merakurak	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,80 poin	2.949.270.287	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Merakurak	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,80 poin	2.949.270.287	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	27.558.525	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	27.558.525	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.182.500	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.182.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	2.130.673.037	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	2.130.673.037	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Merakurak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.078.497.537	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Merakurak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.078.497.537	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	46.996.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	46.996.500	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	1 Paket	976.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	55.397.767	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	55.397.767	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.000.011	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.000.011	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	11.159.155	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	11.159.155	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	9.996.390		Kec. Merakurak	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	9.996.390	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	5.997.475	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.997.475	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2 dokumen	3.393.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2 dokumen	3.393.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	20.851.736	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	20.851.736	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	1 jenis	150.182.649	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jenis	150.182.649	
	Pengadaan Mebel	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	18.232.000	Pengadaan Mebel	Kec. Merakurak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	18.232.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Merakurak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	131.950.649	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Merakurak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	131.950.649	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	2 jenis	104.814.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	104.814.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	27.228.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	27.228.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	40.331.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40.331.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	9.930.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.930.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	27.325.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	27.325.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Pemeliharaan BMD	3 Jenis	479.667.809	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	479.667.809	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Merakurak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	33.188.315	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Merakurak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	33.188.186	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Merakurak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	7.079.383	Pemeliharaan Mebel	Kec. Merakurak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7.079.383	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Merakurak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	10.479.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Merakurak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	10.479.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Merakurak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	428.920.440	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Merakurak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	428.920.440	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Merakurak	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	8.899.350	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Merakurak	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100%	8.899.350	
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Merakurak	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	1 jenis	8.899.350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Merakurak	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 jenis	8.899.350	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	920 dokumen	8.899.350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	920 dokumen	8.899.350	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pelayanan Perizinan Non Usaha					Pelayanan Perizinan Non Usaha					
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Merakurak	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	57,14%	57.603.427	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Merakurak	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	57,14 %	57.603.427	
	Koordinasi Kegiatan	Kec. Merakurak	Persentase Lembaga	7 jenis	57.603.427	Koordinasi Kegiatan	Kec. Merakurak	Jumlah jenis dokumen	7 Jenis	57.603.427	
9	Pemberdayaan Desa		Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi Dalam pemberdayaan			Pemberdayaan Desa		kegiatan pemberdayaan desa pemberdayaan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	19 Laporan	57.603.427	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	19 Laporan	57.603.427	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Wilayah Kecamatan		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Wilayah Kecamatan		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Merakurak	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	10.212.225	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Merakurak	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	10.212.225	
10	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Merakurak	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	100%	10.212.225	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Merakurak	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	100%	10.212.225	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	10.212.225	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Merakurak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	10.212.225	-
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Merakurak	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	21.179.325	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Merakurak	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	21.179.325	
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	21.179.325	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	21.179.325	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kec. Merakurak	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	520 Orang	21.179.325	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kec. Merakurak	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	520 Orang	21.179.325	
	Nasional		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Nasional		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Merakurak	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	57,14%	11.469.750	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Merakurak	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	57,14%	11.469.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kesihatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Merakurak	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	19 desa	11.469.750	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Merakurak	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	19 desa	11.469.750	
	Fasilitasi Pemanfaatan dan Pendayaan	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	11.469.750	Fasilitasi Pengelolaan	Kec. Merakurak	Jumlah Dokumen yang	19 Dokumen	11.469.750	
	Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025:

Tabel 2.5

Usulan Kegiatan Prioritas dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan Merakurak

Tahun 2025

Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menentukan tujuan dan sasaran dimulai dari permasalahan layanan perangkat daerah, isu lingkungan dinamis, isu strategis, dan potensi yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan haruslah mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan ini menjadi arah Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu

pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.

4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Kecamatan Merakurak berperan dalam mendukung misi ke-2, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu "Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan" dan sasaran "Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan" dan misi ke-4, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani" dan sasaran "Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital". Dari sasaran RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Merakurak Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa".

Tujuan ini memiliki 2 indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Indikator tersebut terdiri dari Presentase Desa Mandiri dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan serangkaian kinerja yang dapat diwujudkan dalam bentuk tahapan, fokus, ataupun aspek prioritas dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan renstra. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Merakurak Tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yakni:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat
4. Masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan ketercapaiannya melalui

indikator yang terukur. Indikator yang dijadikan acuan sasaran terdiri dari:

1. Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya

2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Adapun perincian dari rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Merakurak Tahun 2025-2029 beserta target, adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Merakurak

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KET.
1	2	3	4	5
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	52,63	
	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	26,32	
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,26	
	Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,26	
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,78	

	Masyarakat	Kecamatan		

Rencana program dan kegiatan pada Tahun anggaran 2025 ini meliputi:

semua program dan kegiatan merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelengaaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025, Program dan Kegiatan Kecamatan Merakurak yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Tuban sesuai P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan 6 Program, 11 Kegiatan 26 Sub kegiatan yang ingin dicapai dengan 1 (dua) tujuan dan 3 sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,80 poin	2.927.890.249	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,80 poin	2.949.270.287	21.380.038
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	29.948.525	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun		27.558.525	(2.390.000)
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.182.500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.182.500	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.799.525	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3 Laporan	4.289.525	(510.000)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	9.966.500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	8.086.500	(1.880.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	2.406.598.952	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	2.130.673.037	(275.925.915)
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.345.975.452	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.078.497.537	(267.477.915)
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	52.044.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	46.996.500	(5.047.500)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	23 laporan	8.579.500	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	23 laporan	5.179.000	(3.400.500)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
		Tahun SKPD			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1 Paket	8.464.000	Jumlah jenis layanan kepegawaian	1 paket	976.000	(7.488.000)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8.464.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	976.000	(7.488.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	76.230.535	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	55.397.767	(20.832.768)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.011	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.011	0
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	11.159.155	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	11.159.155	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	9.996.390	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	9.996.390	0
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.997.475	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.997.475	0
7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.393.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.393.000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	41.684.504	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	20.851.736	(20.832.768)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jenis	72.165.799	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 jenis	150.182.649	78.016.850
7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	18.232.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		18.232.000	0
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	53.933.799	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	131.950.649	78.016.850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	104.814.500	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang		104.814.500	0
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	27.228.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	27.228.000	0
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40.331.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40.331.000	0
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	9.930.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	1 laporan	9.930.500	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
					dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	27.325.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	27.325.000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	229.667.938	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 jenis	479.667.809	249.999.871
7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	33.188.315,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	11 unit	3.188.186,	30.000.129

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
	Dinas Jabatan				Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	7.079.383	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	7.079.383	0
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	10.479.800	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	10.479.800	0
7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	178.920.440	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 unit	428.920.440	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
					Dipelihara / Direhabilitasi			
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100%	21.895.250	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100%	8.899.350	(12.995.900)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 jenis	21.895.250	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 jenis	8.899.350	(12.995.900)
7.01.02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	920 Dokumen	21.895.250	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	920 dokumen	8.899.350	(12.995.900)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	57,14 %	63.615.377	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	57,14 %	57.603.427	(6.011.950)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Jenis	63.615.377	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 jenis	57.603.427	(6.011.950)
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Laporan	63.615.377	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 laporan	57.603.427	(6.011.950)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	19.305.200	Persentase pengaduan gangguan		10.212.225	(9.092.975)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
		yang terselesaikan			ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan			
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	19.305.200	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	10.212.225	(9.092.975)
7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	19.305.200	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	1 laporan	10.212.225	(9.092.975)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	45.894.575	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	21.179.325	(24.715.250)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	45.894.575	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 laporan	21.179.325	(24.715.250)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520 Orang	45.894.575	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520 orang	21.179.325	(24.715.250)
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	100%	14.999.750	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	100%	11.469.750	(3.530.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	7	8	9	9
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19 desa	14.999.750	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19 desa	11.469.750	(3.530.000)
7.01.06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Dokumen	14.999.750	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 dokumen	11.469.750	(3.530.000)

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Kecamatan Merakurak Daerah Kabupaten Tuban dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2025. Karena Perubahan Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Perubahan Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tuban, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami agar dokumen Perubahan Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja ke depan.

CAMAT MERAKURAK
KABUPATEN TUBAN

ttd

Drs. MUHAMMAD MUSTAKIM, MM.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RENGEL
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 46

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Perubahan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan di tingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
2. Menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Kecamatan Rengel.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025; dan
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rengel Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rengel Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Kecamatan Rengel sampai dengan Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Penentuan isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal P RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rengel sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kewilayahan, pada tahun 2024 Kecamatan Rengel melaksanakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang diturunkan dari Misi 2 dan Misi 4 Pemerintah Kabupaten Tuban.

Adapun Analisis kinerja Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban pada Triwulan II Tahun 2025 berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 2.1 Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan 2025

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+10		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa**		Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya	4.14 (%)	505.025.063	- 18.75 (%)	299.002.020	4.14 (%)	136.810.049	0 (%)	9.606.500	0 (%)	20.048.500	0 (%)	29.655.000	0 (%)	330.322.020	0 %	65.41 %	Kecamatan Rengel (Camat)
1		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 (%)	505.025.063	81.25 (%)	299.002.020	100 (%)	136.810.049	100 (%)	9.606.500	18.75 (%)	20.048.500	18.75 (%)	29.655.000	18.75 (%)	330.322.020	18.75 %	65.41 %	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan BUMDes/ Kelembagaan Desa dan pendampingan Musrenbang Desa	16 (Desa)	505.025.063	16 (Desa)	299.002.020	16 (Desa)	136.810.049	16 (Desa)	9.606.500	16 (Desa)	20.048.500	16 (Desa)	29.655.000	16 (Desa)	330.322.020	100 %	65.41 %	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	16 (Laporan)	136.810.049	16 (Laporan)	9.606.500	16 (Laporan)	20.048.500	16 (Laporan)	29.655.000	16 (Laporan)	31.320.000	0 %	0 %	Kasi Pemberdayaan Masyar

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	akat Desa
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	100										
									Predikat kinerja sub kegiatan	Sangat Tinggi										
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	100										
									Predikat kinerja kegiatan	Sangat Tinggi										
									Rata-rata capaian kinerja program(%)	18.75										
									Predikat kinerja program	Sangat Rendah										
B	**Meningkatnya pelayanan pada masyarakat**		Indeks kepuasan maskarakat (IKM)	92.27 (Poin)	54.635.784	89.31 (Poin)	3.136.106.005	92.19 (Poin)	3.985.402.557	0 (Poin)	581.136.908	0 (Poin)	657.217.969	0 (Poin)	1.238.354.877	0 (Poin)	4.573.219.168	0 %	8370.37 %	kasi pelayanan umum
1		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)	100 (%)	66.635.784	100 (%)	88.064.950	100 (%)	15.783.250	100 (%)	1.696.125	100 (%)	0	100 (%)	1.696.125	100 (%)	89.761.075	100 %	134.7 %	kasi pelayanan umum
		1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	3 (Jenis)	15.783.250	3 (Jenis)	1.696.125	3 (Jenis)	0	3 (Jenis)	1.696.125	3 (Jenis)	1.696.125	0 %	0 %	Kasi Pelayanan Umum

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	500 (Dokumen)	15.783.250	1295 (Dokumen)	1.696.125	1561 (Dokumen)	0	2856 (Dokumen)	1.696.125	2856 (Dokumen)	1.696.125	0 %	0 %	kasi pelayanan umum
			Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)							100										
			Predikat kinerja sub kegiatan							Sangat Tinggi										
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)							100										
			Predikat kinerja kegiatan							Sangat Tinggi										
2		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan	82 (Poin)	12.774.928.422	77.95 (Poin)	6.488.360.644	81.5 (Poin)	3.802.695.935	0 (Poin)	564.412.783	0 (Poin)	627.256.469	0 (Poin)	1.191.669.252	0 (Poin)	7.861.391.682	0 %	61.54 %	Kasubbag Umum
		1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	45 (Laporan)	11.204.254.385	9 (Laporan)	5.005.205.427	9 (Laporan)	2.850.912.617	9 (Laporan)	490.617.243	9 (Laporan)	546.811.885	9 (Laporan)	1.037.429.128	9 (Laporan)	6.193.696.048	20 %	55.28 %	Kasubbag Umum
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 (Orang)	10.800.431.885	14 (Orang)	4.849.160.840	15 (Orang)	2.817.461.117	15 (Orang)	484.053.243	15 (Orang)	540.226.885	15 (Orang)	1.024.280.128	15 (Orang)	6.024.502.461	78.95 %	55.78 %	Kasubbag Umum
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 (Dokumen)	352.470.000	3 (Dokumen)	137.842.587	12 (Dokumen)	26.550.000	3 (Dokumen)	6.225.000	3 (Dokumen)	6.225.000	6 (Dokumen)	12.450.000	6 (Dokumen)	150.292.587	40 %	42.64 %	Kasubbag Umum
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	0 (Dok	0	0 (Dok	0	2 (Dok	4.276.000	2 (Dok	339.000	2 (Dok	360.000	2 (Dok	699.000	2 (Dok	699.000	0 %	0 %	Kasubbag Umum

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
			Pelaksanaan Akuntansi SKPD	umen)		umen)		umen)		umen)		umen)		umen)		umen)				
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	1.035.500	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	1.590.000	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum
								Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		90										
								Predikat kinerja sub kegiatan		Tinggi										
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	1 (Jenis)	10.580.000	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	21 (Orang)	10.580.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum
								Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		**0**										

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										Predikat kinerja sub kegiatan										
										Sangat Rendah										
		3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	45 (Dokumen)	75.357.500	9 (Dokumen)	105.497.208	6 (Dokumen)	69.814.590	1 (Dokumen)	9.220.000	1 (Dokumen)	9.739.000	2 (Dokumen)	18.959.000	2 (Dokumen)	127.326.208	4.44 %	168.96 %	kasubbag program dan Pelaporan
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 (Dokumen)	46.987.500	4 (Dokumen)	80.416.708	3 (Dokumen)	59.120.640	0 (Dokumen)	9.220.000	1 (Dokumen)	8.167.000	1 (Dokumen)	17.387.000	1 (Dokumen)	100.673.708	6.67 %	214.26 %	kasubbag program dan Pelaporan
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 (Laporan)	28.370.000	5 (Laporan)	25.080.500	6 (Laporan)	10.693.950	6 (Laporan)	0	6 (Laporan)	1.572.000	6 (Laporan)	1.572.000	6 (Laporan)	26.652.500	20 %	93.95 %	kasubbag program dan Pelaporan
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				66.67						
										Predikat kinerja sub kegiatan				Sedang						
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 (Jenis)	436.058.500	7 (Jenis)	327.085.108	7 (Jenis)	115.310.146	7 (Jenis)	16.155.050	7 (Jenis)	19.263.100	7 (Jenis)	35.418.150	7 (Jenis)	367.504.258	100 %	84.28 %	Kasubbag Umum
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	3 (Paket)	2.398.000	3 (Paket)	0	3 (Paket)	1.040.000	3 (Paket)	1.040.000	3 (Paket)	1.040.000	0 %	0 %	Kasubbag Umum

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	2 (Paket)	16.524.250	2 (Paket)	4.166.300	2 (Paket)	2.454.850	2 (Paket)	6.621.150	2 (Paket)	6.621.150	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 (Paket)	259.988.500	2 (Paket)	142.947.720	2 (Paket)	46.534.040	2 (Paket)	8.491.000	2 (Paket)	9.871.000	2 (Paket)	18.362.000	2 (Paket)	166.310.720	66.67 %	63.97 %	Kasubbag Umum
		4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 (Paket)	34.800.000	2 (Paket)	20.862.800	2 (Paket)	7.400.000	2 (Paket)	925.250	2 (Paket)	2.322.750	2 (Paket)	3.248.000	2 (Paket)	24.110.800	100 %	69.28 %	Kasubbag Umum
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 (Laporan)	27.000.000	33 (Laporan)	80.736.148	12 (Laporan)	38.799.856	3 (Laporan)	1.920.000	3 (Laporan)	2.400.000	6 (Laporan)	4.320.000	6 (Laporan)	85.056.148	3.64 %	315.02 %	Kasubbag Umum
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 (Dokumen)	19.100.000	2 (Dokumen)	11.205.600	1 (Dokumen)	3.654.000	1 (Dokumen)	652.500	1 (Dokumen)	1.174.500	1 (Dokumen)	1.827.000	1 (Dokumen)	13.032.600	10 %	68.23 %	Kasubbag Umum
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	91.67										
									Predikat kinerja sub kegiatan	Sangat Tinggi										
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 (Jenis)	732.754.597	4 (Jenis)	465.834.573	4 (Jenis)	197.949.806	4 (Jenis)	43.460.490	4 (Jenis)	40.585.484	4 (Jenis)	84.045.974	4 (Jenis)	568.939.840	100 %	77.64 %	Kasubbag Umum
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 (Lap	232.591.600	1 (Lap	258.061.895	3 (Lap	159.579.360	3 (Lap	36.439.968	3 (Lap	35.125.473	3 (Lap	71.565.441	3 (Lap	340.223.575	60 %	146.28 %	Kasubbag Umum

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				oran)		oran)		oran)		oran)		oran)		oran)		oran)				
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 (Lap oran)	0	0 (Lap oran)	0	3 (Lap oran)	28.206.500	3 (Lap oran)	5.171.022	3 (Lap oran)	4.310.911	3 (Lap oran)	9.481.933	3 (Lap oran)	13.011.787	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		3. Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 (Lap oran)	0	0 (Lap oran)	0	1 (Lap oran)	5.928.000	1 (Lap oran)	1.026.900	1 (Lap oran)	1.149.100	1 (Lap oran)	2.176.000	1 (Lap oran)	3.695.900	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 (Lap oran)	121.503.625	1 (Lap oran)	29.668.488	1 (Lap oran)	4.235.946	1 (Lap oran)	822.600	1 (Lap oran)	0	1 (Lap oran)	822.600	1 (Lap oran)	33.904.388	20 %	27.9 %	Kasubbag Umum
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**100**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Tinggi**										
		6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	5 (Jenis)	317.914.558	5 (Jenis)	417.038.528	5 (Jenis)	541.628.776	5 (Jenis)	4.960.000	5 (Jenis)	10.857.000	5 (Jenis)	15.817.000	5 (Jenis)	436.225.528	100 %	137.21 %	Kasubbag Umum
		Urusan Pemerintahan Daerah																		
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	4 (Unit)	167.762.086	1 (Unit)	119.789.897	6 (Unit)	41.628.776	6 (Unit)	4.960.000	6 (Unit)	10.857.000	6 (Unit)	15.817.000	6 (Unit)	138.976.897	150 %	82.84 %	Kasubbag Umum

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Dibayarkan Pajaknya																	
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	500.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**50**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**										
		7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang pemerintah daerah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	5 (Jenis)	40.000.000	5 (Jenis)	151.049.800	5 (Jenis)	16.500.000	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	151.049.800	0 %	377.62 %	Kasubbag Umum
		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	16.500.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	0										
									Predikat kinerja sub kegiatan	Sangat Rendah										
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	61.9										
									Predikat kinerja kegiatan	Rendah										

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
3		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 (%)	407.568.862	100 (%)	204.599.950	100 (%)	35.237.012	100 (%)	5.703.000	100 (%)	5.744.000	100 (%)	11.447.000	100 (%)	224.125.950	100 %	54.99 %	kasi ketentraman dan ketertiban umum
		1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	60 (Desa)	407.568.862	12 (Desa)	204.599.950	16 (Desa)	35.237.012	5 (Desa)	5.703.000	4 (Desa)	5.744.000	9 (Desa)	11.447.000	9 (Desa)	224.125.950	15 %	54.99 %	kasi ketentraman dan ketertiban umum
		1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 (Laporan)	407.568.862	1 (Laporan)	204.599.950	16 (Laporan)	35.237.012	8 (Laporan)	5.703.000	6 (Laporan)	5.744.000	14 (Laporan)	11.447.000	14 (Laporan)	224.125.950	280 %	54.99 %	kasi ketentraman dan ketertiban umum
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	87.5										
									Predikat kinerja sub kegiatan	Tinggi										
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	56.25										
									Predikat kinerja kegiatan	Rendah										
4		**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	511.188.915	100 (%)	446.817.500	100 (%)	131.686.360	100 (%)	9.325.000	100 (%)	24.217.500	100 (%)	33.542.500	100 (%)	489.677.500	100 %	95.79 %	kasi kesra

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
		1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	80 (Desa)	511.188.915	16 (Desa)	446.817.500	16 (Desa)	131.686.360	16 (Desa)	9.325.000	16 (Desa)	24.217.500	16 (Desa)	33.542.500	16 (Desa)	489.677.500	20 %	95.79 %	kasi kesra
		1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	30 (Dokumen)	181.352.500	6 (Dokumen)	113.235.500	6 (Dokumen)	38.934.000	6 (Dokumen)	5.060.000	6 (Dokumen)	4.000.000	6 (Dokumen)	9.060.000	6 (Dokumen)	130.668.000	20 %	72.05 %	kasi kesra
		2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	30 (Laporan)	93.488.412	6 (Laporan)	96.609.000	6 (Laporan)	17.512.500	6 (Laporan)	2.115.000	6 (Laporan)	1.280.000	6 (Laporan)	3.395.000	6 (Laporan)	100.004.000	20 %	106.97 %	kasi kesra
		3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30 (Dokumen)	236.448.003	6 (Dokumen)	236.973.000	6 (Dokumen)	75.239.860	6 (Dokumen)	2.150.000	6 (Dokumen)	18.937.500	6 (Dokumen)	21.087.500	6 (Dokumen)	259.005.500	20 %	109.54 %	kasi ketentraman dan ketertiban umum
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat										

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II								
							Tinggi										
							Rata-rata capaian kinerja program(%)	75									
							Predikat kinerja program	Sedang									
							Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)	0									
							Predikat kinerja sasaran	Sangat Rendah									
							Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)	0									
							Predikat kinerja Sasaran	Sangat Rendah									
							Total Rata-rata capaian kinerja Program (%)	53.13									
							Predikat kinerja Program	Rendah									
							Total Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	71.78									
							Predikat kinerja Kegiatan	Sedang									
							Total Rata-rata capaian kinerja Sub kegiatan (%)	82.25									
							Predikat kinerja Sub kegiatan	Tinggi									

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan pada Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja layanan yang telah dilaksanakan.

Berikut Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rengel:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rengel
Kabupaten Tuban

No	indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya											
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah			3,79 Poin	3,88 Poin	3,97 Poin	4,07 Poin	2.90	3.55	3.68	3.81	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	91,97	92,07	92,17	92,27	88,61	89,31	92,18	92,27	
4	Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	-	-	4.14(%)	4.14(%)	4.14(%)	4.14(%)	23,08%	-18,75%	4.14(%)	4.14(%)	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Rengel adalah sebagai berikut :

1. Pada capaian kinerja poin 1 (satu) meningkatnya tingkat kenaikan Desa yang Indeks Ketahanan Ekonominya dengan capaian -18,75 %;
2. Tercapainya nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Nilai Sangat Baik (A/89,31 Poin) kategori sangat baik meski tidak mencapai target, hal ini di pengaruhi oleh kurangnya atusias masyarakat dalam pengisian kuisioner IKM dan kurangnya pendampingan petugas pada saat pengisian kuisioner IKM
3. Pada capaian kinerja poin 4 (satu) meningkatnya tingkat kenaikan Desa yang Indeks Ketahanan Ekonominya dengan capaian -18,75 %;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rengel memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta mendukung keberhasilan program nasional yang relevan. Upaya peningkatan penyediaan layanan umum yang berkualitas menjadi kunci untuk mewujudkan misi peningkatan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ketika kualitas layanan meningkat, maka tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah juga ikut naik, yang pada akhirnya memperkuat posisi daerah dalam mencapai target pelayanan dasar sesuai arah pembangunan nasional. Berikut merupakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah :

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   Isu ini muncul dari kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tantangan dalam penerapan SPBE berdampak pada misi Kepala Daerah mengenai peningkatan akuntabilitas dan modernisasi pelayanan pemerintah. Isu ini juga terkait erat dengan program nasional transformasi digital pemerintahan yang menuntut percepatan digitalisasi layanan publik dan integrasi data.
2. Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Rengel
   Isu penting dalam inovasi layanan muncul dari perlunya menciptakan terobosan pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Kurangnya inovasi berpengaruh pada kemampuan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan

publik sebagai bagian dari visi Kepala Daerah. Secara nasional, isu ini selaras dengan kebijakan penguatan inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendekatan kreatif dan adaptif.

3. Pendampingan desa menuju desa mandiri
   Isu ini berhubungan dengan masih perlunya penguatan kapasitas desa agar mampu mencapai status desa mandiri. Ketidaksiapan desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdampak pada misi Kepala Daerah untuk meningkatkan kemandirian desa. Secara nasional, isu ini berkontribusi terhadap program penguatan pembangunan desa dan percepatan peningkatan desa mandiri sebagai bagian dari agenda pembangunan wilayah.
4. Penguatan sinergi Forkopimka, dinas/instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Merupakan fondasi penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan umum. Sinergi ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas wilayah, tetapi juga mendukung misi kepala daerah terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum. Kolaborasi lintas sektor tersebut juga selaras dengan pendekatan program nasional yang menekankan kerja sama multipihak dalam menyelesaikan isu strategis di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, kelima isu strategis ini saling terkait dan berperan penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rengel mampu memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi daerah serta mendukung agenda prioritas pembangunan nasional.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rengel Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan dan 29 Sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dan hasil penyelarasan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Adapun review Perubahan rencana kerja terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Rengel

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kec. Rengel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,50 Poin	3,802,695,935	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,50 Poin	3,802,695,935	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah			jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	69,814,590	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	69,814,590	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	59,120,640		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	59,120,640	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	10,693,950		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	10,693,950	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	9 Dokumen	2,850,912,617	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	2,850,912,617	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.817.461.117		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.817.461.117	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	26,550,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	26,550,000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	4,276,000		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	4,276,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,035,500		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,035,500	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	2 Laporan	1,590,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan	2 Laporan	1,590,000	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Semesteran SKPD		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi penyusunan laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	21 paket	10.580.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	-	10.580.000	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		umlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	10.580.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	10.580.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 Jenis Layanan	115.310.146	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 Jenis Layanan	115.310.146	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3 Paket	2,398,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3 Paket	2,398,000	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Bangunan Kantor		Kantor yang Disediakan				Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16,524,250		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	16,524,250	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	46,534,040		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	46,534,040	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,400,000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,400,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,645,600		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,645,600	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	35 Laporan	38.799.856		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	35 Laporan	38.799.856	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Konsultasi SKPD				SKPD	Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Jenis Pengadaan BMD	2 Jenis	16.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan BMD	3 Jenis	16.500.000	
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	16.500.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	16.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jenis	197.949.806	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jenis	197.949.806	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Daerah						Daerah					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	159.579.360		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	159.579.360	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1 Laporan	28.206.500		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	28.206.500	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Laporan	4,235,946		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Laporan	4,235,946	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1 Laporan	5,928,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	5,928,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	5 Jenis	541.628.776	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan BMD (Unit)	27 unit	541.628.776	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan	4 unit	41.628.776		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan	6 unit	41.628.776	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		0		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	500.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	500.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)	100 %	15,783,250	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelesaian atas Pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)	100 %	15,783,250	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	15,783,250	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	15,783,250	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	15,783,250		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	15,783,250	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100 %	136.810.049	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100 %	136.810.049	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan BUMDes / Kelembagaan Desa dan pendampingan Musrenbang Desa	16 Desa	136.810.049	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan BUMDes / Kelembagaan Desa dan pendampingan Musrenbang Desa	16 Desa	136.810.049	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	7 Laporan	136.810.049		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	7 Laporan	136.810.049	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Wilayah Kecamatan				Wilayah kecamatan	Wilayah Kecamatan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	94 %	35.237.012	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	94 %	35.237.012	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Kali	35.237.012	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		umlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Kali	35.237.012	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instans	1 Laporan	35.237.012		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	35.237.012	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Vertikal di Wilayah Kecamatan				Wilayah Kecamatan				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	131.686.360	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	131.686.360	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16 Kali	131.686.360	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16 Kali	131.686.360	
		Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	38,934,000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	38,934,000	
		Fasilitasi Penerapan Dan Penegakan		umlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan	6 Laporan	17,512,500		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan	umlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan	6 Laporan	17,512,500	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Peraturan Perundang Undangan		Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				Peraturan Perundang Undangan	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	75.239.860		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	75.239.860	
Jumlah						**4.122.212.606**					**4.122.212.606**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil Musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rengel Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4 (T-C.32)

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Kecamatan: Rengel

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, yang menjadi pedoman penyusunan Program dan Kegiatan SKPD adalah Rancangan Awal Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana di dalamnya telah termuat pokok-pokok Program dan Kegiatan berikut indikatornya yang menjadi tugas pokok Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dan sasaran Kecamatan Rengel Tahun 2025 dirumuskan untuk memberikan arah pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Tuban, serta menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan mencerminkan arah pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi terukur yang diharapkan terwujud sebagai penjabaran dari tujuan.

Berikut tabel tujuan dan sasaran Kecamatan Rengel Tahun 2025:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rengel

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	*2*	*3*	*4*
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	43,75
	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	25,00
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,68
	Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,68
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,81

Dalam upaya untuk mencapai target Tujuan Sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 (T-C.33)
Rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Rengel
Kabupaten Tuban

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	3,802,695,935	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	3,580,462,086	(222.233.849)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9 Dokumen	69,814,590	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9 Dokumen	61,081,220	(8.733.370)
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	59,120,640	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50,783,995	(8.336.645)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	10,693,950	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	10,297,225	(396.725)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	2,850,912,617	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	2,498,745,920	(352.166.697)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang /bulan	2,817,461,117	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	2,465,294,420	(352.166.697)
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	26,550,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	26,550,000	0
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	4,276,000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	4,276,000	0
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,035,500	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,035,500	0
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	2 Laporan	1,590,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	2 Laporan	1,590,000	0

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD			Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (orang)	21 paket	10,580,000	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (orang)	22 Orang	976,000	(9.604.000)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21 paket	10,580,000	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21 Paket	976,000	(9.604.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 Jenis Layanan	115,310,146	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 Jenis Layanan	89,272,290	(26.037.856)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3 Paket	16,524,250	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3 Paket	16,524,250	0

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
		Kantor yang Disediakan			Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2,398,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,398,000	0
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2 Paket	3,654,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2 Paket	3,654,000	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	46,534,040	Jumlah jenis Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	46,534,040	0
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	7,400,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,400,000	0

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	38,799,856	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	12,762,000	(26.037.856)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	2 Jenis	16,500,000	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	3 jenis	94,514,279	78.014.279
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	78,016,850	78.016.850
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	16,500,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	16,497,429	(2.571)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jenis	197,949,806	Jumlah pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jenis	198,074,877	125.071

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	159,579,360	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Jenis	159,559,360	(20.000)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28,206,500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Jenis	28,351,571	145.071
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,235,946	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Jenis	4,235,946	0
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,928,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	5,928,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	5 Jenis	541,628,776	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	5 jenis	637.797.500	96.168.724
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	4 unit	41,628,776	Jumlah Kendaraan Perorangan	6 unit	41,784,700	155.924

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
	pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
7.01.01.2.09.000	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	0	0
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	500,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	596,012,800	96.012.800
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%	100 %	15,783,250	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%	100%	15,783,100	(150)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	15,783,250	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	92,08 Poin	15,783,100	(150)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	15,783,250	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	15,783,100	(150)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100 %	136,810,049	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100 %	146,808,799	9.998.750
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	16 Desa	136,810,049	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	16 Desa	146,808,799	9.998.750
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	136,810,049	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	146,808,799	9.998.750

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	131,686,360	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	110,241,060	(21.445.300)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Kali	131,686,360	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16 Desa,	110,241,060	(21.445.300)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah rapat koordinasi, sosialisi dan peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	1 Laporan	38,934,000	Jumlah rapat koordinasi, sosialisi dan peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	16 Desa	38,934,000	0
7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah intensitas kegiatan fasilitasi penyuluhan dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun	100 %	17,512,500	Jumlah intensitas kegiatan fasilitasi penyuluhan dan penegakan peraturan perundang-	16 desa	17,512,500	0

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
					undangan dalam 1 (satu) tahun			
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa sasaran pendampingan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	16 Desa,	75,239,860	Jumlah desa sasaran pendampingan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	16 Desa,	53,794,560	(21.445.300)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	35,237,012	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	35,234,734	(2.278)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	16 desa	35,237,012	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	16 desa	35,234,734	(2.278)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Desa	35,237,012	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	16 Desa	35,234,734	(2.278)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
					di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	0	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	3,040,000	3.040.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	6 Laporan	0	Jumlah Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	6 Laporan	3,040,000	3.040.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	0	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	3,040,000	3.040.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
Total				4,122,212,606			3,891,569,779	(230.642.827)

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan perencanaan tahunan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan terbaru. Melalui perubahan ini, perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan program dan kegiatan secara lebih tepat sasaran, efisien, dan mampu menjawab tantangan yang muncul selama pelaksanaan.

Perubahan Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, perkembangan kebijakan, serta isu-isu penting yang memengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah.

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2025. Sebagai uraian akhir, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKAP Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dan sebagai bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tuban, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, harus menjadikan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tahun 2025;
3. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2025

dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025; dan

4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja tersebut dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan membantu semua pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi, serta mendorong pencapaian target kinerja tahun 2025 secara lebih optimal. Dukungan dan kerja sama semua pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renja di tahun berjalan.

CAMAT RENGEL
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Drs. EKO WARDONO, M.KP

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025; dan

4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja tersebut dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan membantu semua pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi, serta mendorong pencapaian target kinerja tahun 2025 secara lebih optimal. Dukungan dan kerja sama semua pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renja di tahun berjalan.

CAMAT RENGEL
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Drs. EKO WARDONO, M.KP

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SEMANDING
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dipindai dengan CamScanner

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dipindai dengan CamScanner

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 43

NO.	PARAF KOORDINASI
6.	Sekretaris Daerah
5.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tuban
4.	Inspektur Inspektorat Daerah
3.	Kabag. Hukum Setda
2.	Plt. Kepala Bapperida
1.	Camat Semanding

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Semanding Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Rancangan Renstra Kecamatan Semanding Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta

Dipindai dengan CamScanner

sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Menjabarkan Rencana Strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.
3. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Semanding Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Surat Keputusan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semanding Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Semanding sampai dengan Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Semanding.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMANDING

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Semanding sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kewilayahan, pada tahun 2025 Kecamatan Semanding melaksanakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang diturunkan dari Misi 2 dan Misi 4 Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Adapun Analisis kinerja Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban pada Triwulan II Tahun 2025 berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 (Formulir E.81)
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang mengacu pada sasaran RKPD tahun 2025 sebagai berikut:

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa**		Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks ketahanan ekonominya	0.46 (%)	12.391.924.166	9.09 (%)	6.125.948.780	0.4 (%)	1.730.267.000	0 (%)	16.476.500	0 (%)	54.815.950	0 (%)	71.292.450	0 (%)	6.197.241.230	0 %	50.01 %	Camat Semanding
1		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 (%)	11.886.899.103	100 (%)	5.779.633.140	100 (%)	1.730.267.000	100 (%)	16.476.500	100 (%)	54.815.950	100 (%)	71.292.450	100 (%)	5.850.925.590	100 %	49.22 %	Lurah
		1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan desa	17 (Desa)	505.025.063	17 (Desa)	346.315.640	17 (Desa)	98.000.000	17 (Desa)	16.476.500	17 (Desa)	15.631.450	17 (Desa)	32.107.950	34 (Desa)	378.423.590	200 %	74.93 %	Kasi PMD
		1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5 (Laporan)	505.025.063	5 (Laporan)	346.315.640	17 (Laporan)	98.000.000	4 (Laporan)	16.476.500	4 (Laporan)	15.631.450	8 (Laporan)	32.107.950	13 (Laporan)	378.423.590	260 %	74.93 %	Kasi PMD

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)							**47.06**										
			Predikat kinerja sub kegiatan							**Sangat Rendah**										
		2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan sarana dan prasarana kelurahan yang terlaksana	20 (Kegiatan)	11.886.899.103	31 (Kegiatan)	5.779.633.140	40 (Kegiatan)	1.632.267.000	10 (Kegiatan)	0	10 (Kegiatan)	39.184.500	20 (Kegiatan)	39.184.500	51 (Kegiatan)	5.818.817.640	255 %	48.95 %	Lurah
		1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dari hasil musyawarah kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	50 (Unit)	9.510.122.378	12 (Unit)	4.731.825.290	14 (Unit)	1.387.426.950	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	12 (Unit)	4.731.825.290	24 %	49.76 %	Lurah
		2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	58 (Kelompok)	2.376.776.725	4 (Kelompok)	1.047.807.450	2 (Kelompok)	244.840.050	0 (Kelompok)	0	1 (Kelompok)	39.184.500	1 (Kelompok)	39.184.500	5 (Kelompok)	1.086.991.950	8.62 %	45.73 %	Lurah
			Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)							**25**										
			Predikat kinerja sub kegiatan							**Sangat Rendah**										
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)							**75**										
			Predikat kinerja kegiatan							**Sedang**										
			Rata-rata capaian kinerja program(%)							**100**										
			Predikat kinerja program							**Sangat**										

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Tinggi										
B	Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 (Poin)	25.361.855.249	88.55 (Poin)	14.425.757.848	86 (Poin)	6.711.474.617	0 (Poin)	1.119.974.008	0 (Poin)	1.080.069.234	0 (Poin)	2.200.043.242	0 (Poin)	16.971.024.705	0 %	66.92 %	Camat Semanding
1		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	125.542.750	100 (%)	26.473.129	100 (%)	1.120.000	100 (%)	27.593.129	100 (%)	44.507.808	0 %	0 %	Kasi Pelayanan Umum
		1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1000 (Dokumen)	767.739.401	600 (Dokumen)	350.868.742	400 (Dokumen)	107.542.750	100 (Dokumen)	22.018.129	100 (Dokumen)	0	200 (Dokumen)	22.018.129	800 (Dokumen)	389.801.550	80 %	50.77 %	Lurah
		1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1000 (Dokumen)	767.739.401	400 (Dokumen)	350.868.742	400 (Dokumen)	107.542.750	100 (Dokumen)	22.018.129	100 (Dokumen)	0	200 (Dokumen)	22.018.129	600 (Dokumen)	389.801.550	60 %	50.77 %	Lurah
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										
										Predikat kinerja sub kegiatan										
										Sangat Rendah										
		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai IKM terhadap Pelayanan dan Perijinan di Kecamatan	89 (Poin)	85.470.383	88.55 (Poin)	97.134.500	86 (Poin)	18.000.000	0 (Poin)	4.455.000	0 (Poin)	1.120.000	0 (Poin)	5.575.000	0 (Poin)	102.709.500	0 %	120.17 %	Kasi Pelayanan Umum
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	18.000.000	5 (Dokumen)	4.455.000	5 (Dokumen)	1.120.000	5 (Dokumen)	5.575.000	5 (Dokumen)	5.575.000	0 %	0 %	Kasi Pelayanan Umum

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**100**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Tinggi**										
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**25**										
									Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**										
2		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	945.775.585	100 (%)	844.924.340	100 (%)	168.107.250	0 (%)	23.185.000	0 (%)	18.830.250	0 (%)	42.015.250	0 (%)	889.439.590	0 %	94.04 %	Camat Semanding
		1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	65 (Dokumen)	945.775.585	32 (Dokumen)	844.924.340	15 (Dokumen)	168.107.250	15 (Dokumen)	23.185.000	15 (Dokumen)	18.830.250	15 (Dokumen)	42.015.250	47 (Dokumen)	889.439.590	72.31 %	94.04 %	Camat Semanding
		1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	85 (Dokumen)	500.000.000	20 (Dokumen)	311.317.000	17 (Dokumen)	97.244.000	17 (Dokumen)	13.380.000	17 (Dokumen)	16.270.250	17 (Dokumen)	29.650.250	37 (Dokumen)	343.467.250	43.53 %	68.69 %	Kasi Pemerintahan
		2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	85 (Laporan)	80.000.000	24 (Laporan)	115.307.590	17 (Laporan)	23.213.250	4 (Laporan)	7.670.000	4 (Laporan)	2.560.000	8 (Laporan)	10.230.000	32 (Laporan)	125.537.590	37.65 %	156.92 %	Kasi Trantip

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	25 (Dokumen)	365.775.586	10 (Dokumen)	418.299.750	5 (Dokumen)	47.650.000	5 (Dokumen)	2.135.000	5 (Dokumen)	0	5 (Dokumen)	2.135.000	15 (Dokumen)	420.434.750	60 %	114.94 %	Kasi Kesra
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**82.35**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Tinggi**										
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**100**										
									Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Tinggi**										
3		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindak lanjuti	0 (%)	0	0 (%)	0	100 (%)	5.760.000	100 (%)	0	100 (%)	3.840.000	100 (%)	3.840.000	100 (%)	3.840.000	0 %	0 %	Camat
		1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan yang berpotensi mendapat ancaman trantibum	17 (Desa)	100.752.503	17 (Desa)	143.700.000	17 (Desa)	5.760.000	4 (Desa)	0	4 (Desa)	3.840.000	8 (Desa)	3.840.000	8 (Desa)	147.540.000	47.06 %	146.44 %	Kasi Trantib
		1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,\nTentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	10 (Laporan)	100.752.503	5 (Laporan)	143.700.000	3 (Laporan)	5.760.000	3 (Laporan)	0	3 (Laporan)	3.840.000	3 (Laporan)	3.840.000	8 (Laporan)	147.540.000	80 %	146.44 %	Kasi Trantib
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**100**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Tinggi**										

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	**47.06**										
									Predikat kinerja kegiatan	**Sangat Rendah**										
4		**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / Kota**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (Poin)	25.361.855.249	78.2 (Poin)	14.425.757.848	81.5 (Poin)	6.412.064.617	0 (Poin)	1.070.315.879	0 (Poin)	1.056.278.984	0 (Poin)	2.126.594.863	0 (Poin)	16.878.161.647	0 %	66.55 %	Sekretaris Kecamatan
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	45 (Dokumen)	152.877.011	18 (Dokumen)	113.813.584	9 (Dokumen)	54.326.100	2 (Dokumen)	2.375.000	3 (Dokumen)	2.696.500	5 (Dokumen)	5.071.500	23 (Dokumen)	118.885.084	51.11 %	77.77 %	Kasubag Proglap
		1. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	45 (Laporan)	68.211.011	18 (Laporan)	30.465.200	4 (Laporan)	7.850.000	1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	0	2 (Laporan)	0	20 (Laporan)	30.465.200	44.44 %	44.66 %	Kasubag Proglap
		2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 (Dokumen)	84.666.000	18 (Dokumen)	83.348.384	5 (Dokumen)	46.476.100	0 (Dokumen)	2.375.000	2 (Dokumen)	2.696.500	2 (Dokumen)	5.071.500	20 (Dokumen)	88.419.884	44.44 %	104.43 %	Kasubag Proglap
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**45**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**										
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	38 (Paket)	20.102.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubag Umpeg
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	38 (Orang)	20.102.000	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Kasubag Umpeg
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**										

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat Rendah**										
		3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Yang Tersusun	45 (Laporan)	23.438.628.970	21 (Laporan)	12.539.651.589	9 (Laporan)	5.364.580.647	2 (Laporan)	923.980.542	2 (Laporan)	1.005.340.441	4 (Laporan)	1.929.320.983	25 (Laporan)	14.746.455.992	55.56 %	62.92 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 (Orang/Bulan)	21.837.958.397	32 (Orang/Bulan)	11.883.368.088	31 (Orang/Bulan)	5.141.785.672	31 (Orang/Bulan)	886.005.517	31 (Orang/Bulan)	958.838.441	31 (Orang/Bulan)	1.844.843.958	31 (Orang/Bulan)	13.980.919.966	68.89 %	64.02 %	Kasubag Umpeg
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 (Dokumen)	1.600.670.573	18 (Dokumen)	645.780.501	9 (Dokumen)	222.794.975	2 (Dokumen)	37.975.025	2 (Dokumen)	46.502.000	4 (Dokumen)	84.477.025	22 (Dokumen)	755.033.026	48.89 %	47.17 %	Kasubag Umpeg
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**72.22**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sedang**										
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	194.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	3 (Unit)	194.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**0**										
									Predikat kinerja sub kegiatan	**Sangat**										

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Rendah										
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	17 (Layanan)	295.726.225	13 (Layanan)	343.769.665	15 (Layanan)	153.645.810	3 (Layanan)	15.083.500	4 (Layanan)	8.197.870	7 (Layanan)	23.281.370	20 (Layanan)	382.194.035	117.65 %	129.24 %	Kasubag Umpeg
		1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 (Paket)	151.279.752	13 (Paket)	78.077.000	3 (Paket)	31.998.150	3 (Paket)	3.690.500	3 (Paket)	472.500	3 (Paket)	4.163.000	16 (Paket)	93.236.500	94.12 %	61.63 %	Kasubag Umpeg
		2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 (Paket)	41.293.627	13 (Paket)	36.273.500	3 (Paket)	3.172.500	3 (Paket)	0	3 (Paket)	0	3 (Paket)	0	16 (Paket)	37.711.500	94.12 %	91.33 %	Kasubag Umpeg
		3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	17 (Dokumen)	32.119.594	13 (Dokumen)	13.155.000	24 (Dokumen)	3.480.480	6 (Dokumen)	920.000	6 (Dokumen)	0	12 (Dokumen)	920.000	25 (Dokumen)	15.335.000	147.06 %	47.74 %	Kasubag Umpeg
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 (Laporan)	71.033.252	26 (Laporan)	140.361.127	12 (Laporan)	24.738.600	3 (Laporan)	10.473.000	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	10.473.000	29 (Laporan)	150.834.127	48.33 %	212.34 %	Kasubag Umpeg
		5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 (Paket)	9.000.000	12 (Paket)	9.487.000	1 (Paket)	5.434.250	1 (Paket)	0	1 (Paket)	0	1 (Paket)	0	13 (Paket)	10.935.500	108.33 %	121.51 %	Kasubag Umpeg
		6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 (Paket)	21.000.000	12 (Paket)	28.001.540	4 (Paket)	84.821.830	2 (Paket)	0	2 (Paket)	8.197.870	2 (Paket)	8.197.870	14 (Paket)	36.199.410	116.67 %	172.38 %	Kasubag Umpeg
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	**70.83**										

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat kinerja sub kegiatan	Sedang										
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	20 (Jasa)	871.397.611	17 (Jasa)	503.711.729	20 (Jasa)	188.278.850	5 (Jasa)	42.324.857	5 (Jasa)	40.044.173	10 (Jasa)	82.369.030	27 (Jasa)	610.953.170	135 %	70.11 %	Kasubag Umpeg
		1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 (Laporan)	12.024.331	24 (Laporan)	357.538.267	12 (Laporan)	136.233.350	3 (Laporan)	31.247.583	3 (Laporan)	29.905.407	6 (Laporan)	61.152.990	30 (Laporan)	437.469.712	50 %	3638.2 %	Kasubag Umpeg
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 (Laporan)	298.998.046	24 (Laporan)	132.731.462	12 (Laporan)	52.045.500	3 (Laporan)	11.077.274	3 (Laporan)	10.138.766	6 (Laporan)	21.216.040	30 (Laporan)	160.041.458	50 %	53.53 %	Kasubag Umpeg
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	50										
									Predikat kinerja sub kegiatan	Sangat Rendah										
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	45 (Unit)	476.338.427	40 (Unit)	647.465.972	42 (Unit)	437.131.210	10 (Unit)	86.551.980	10 (Unit)	0	20 (Unit)	86.551.980	60 (Unit)	742.328.057	133.33 %	155.84 %	Kasubag Umpeg
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 (Unit)	203.318.918	15 (Unit)	125.068.203	17 (Unit)	34.871.610	4 (Unit)	8.826.980	4 (Unit)	0	8 (Unit)	8.826.980	23 (Unit)	142.205.288	135.29 %	69.94 %	Kasubag Umpeg
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 (Unit)	76.311.035	30 (Unit)	33.316.350	18 (Unit)	11.259.600	4 (Unit)	2.725.000	4 (Unit)	0	8 (Unit)	2.725.000	38 (Unit)	36.041.350	126.67 %	47.23 %	Kasubag Umpeg

no	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 (Unit)	180.385.258	4 (Unit)	477.581.419	3 (Unit)	391.000.000	3 (Unit)	75.000.000	1 (Unit)	0	1 (Unit)	75.000.000	5 (Unit)	552.581.419	166.67 %	306.33 %	Kasubag Umpeg
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				**41.61**						
										Predikat kinerja sub kegiatan				**Sangat Rendah**						
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)				**34.9**						
										Predikat kinerja kegiatan				**Sangat Rendah**						
										Rata-rata capaian kinerja program(%)				**50**						
										Predikat kinerja program				**Sangat Rendah**						
										Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)				**0**						
										Predikat kinerja sasaran				**Sangat Rendah**						
										Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)				**0**						
										Predikat kinerja Sasaran				**Sangat Rendah**						

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kantor Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.412.064.617,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.126.594.863,00 dengan output dari rencana jumlah 81,5 poin terealisasi 0 poin, yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 54.326.100,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 5.071.500,00 dengan output dari rencana jumlah 9 dokumen terealisasi 5 dokumen, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 46.476.100,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 5.071.500,00 dengan output dari rencana jumlah 5 dokumen terealisasi 2 dokumen
      2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.850.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 4 Laporan terealisasi 2 Laporan
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.364.580.647,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.929.320.983,00 dengan output dari rencana jumlah 9 laporan terealisasi 4 laporan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.141.785.672,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.844.843.958,00 dengan output dari rencana jumlah 31 Orang/bulan terealisasi 31 Orang/bulan
      2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 222.794.975,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 84.477.025,00 dengan output dari rencana jumlah 9 dokumen terealisasi 4 dokumen
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.102.00,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 38 paket terealisasi 0 paket, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.102.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 38 orang dokumen terealisasi 0 orang

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 153.645.810,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 23.281.370,00 dengan output dari rencana jumlah dengan output dari rencana jumlah 15 layanan terealisasi 7 layanan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.434.250,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi 0 paket
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 84.821.830,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 2 paket terealisasi 0 paket
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 31.998.150,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.163.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 paket terealisasi 3 paket
   4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.172.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 3 paket terealisasi 0 paket
   5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.480.480,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 920.000,00 dengan output dari rencana jumlah 24 dokumen terealisasi 12 dokumen
   6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 24.738.600,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 10.473.000,00 dengan output dari rencana jumlah 12 laporan terealisasi 3 laporan

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 194.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 3 unit terealisasi 0 unit, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 194.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 3 Unit terealisasi 0 unit

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 188.278.850,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 82.369.030,00 dengan output dari

rencana jumlah 20 Jasa terealisasi 10 Jasa, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikdari rencana anggaran sebesar Rp. 52.045.500,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 21.216.040,00 dengan output dari rencana jumlah 12 laporan terealisasi 6 laporan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 136.233.350,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 61.152.990,00 dengan output dari rencana jumlah 12 Laporan terealisasi 6 laporan

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran anggaran sebesar Rp. 437.131.210,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 86.551.980,00 dengan output dari rencana jumlah 42 unit terealisasi 20 unit, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.871.610,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 8.826.980,00 dengan output dari rencana jumlah 17 unit terealisasi 8 unit
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 11.259.600,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.725.000,00 dengan output dari rencana jumlah 18 Unit terealisasi 8 unit
   3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 391.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 Unit terealisasi 1 unit

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari rencana anggaran sebesar Rp. 125.542750,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 27.593.129,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 107.542.750,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 22.018.129,00 dengan output dari rencana jumlah 400 dokumen terealisasi 200 dokumen, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 107.542.750,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 22.018.129,00

dengan output dari rencana jumlah 400 dokumen terealisasi 200 dokumen

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari rencana anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 5.575.000,00 dengan output dari rencana jumlah 86 poin terealisasi 0 poin, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari rencana anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 5.575.000,00 dengan output dari rencana jumlah 5 dokumen terealisasi 5 dokumen

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.730.267.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 71.292.450,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 98.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 15.631.450,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 98.000.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 15.631.450,00 dengan output dari rencana jumlah 17 desa terealisasi 17 desa
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.632.267.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 39.184.500,00 dengan output dari rencana jumlah 40 kegiatan terealisasi 20 kegiatan, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
      1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.387.426.950,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 14 unit terealisasi 0 unit
      2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 244.840.050,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 39.184.500,00 dengan output dari rencana jumlah 2 pokmas terealisasi 1 pokmas

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 168.107.250,00 terealisasi sampai dengan

triwulan II sebesar Rp. 42.015.250,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 0%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 168.107.250,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 42.015.250,00 dengan output dari rencana jumlah 15 Dokumen terealisasi 15 Dokumen, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
    1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 97.244.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 29.650.250,00 dengan output dari rencana jumlah 17 dokumen terealisasi 17 dokumen
    2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 23.213.250,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 10.230.000,00 dengan output dari rencana jumlah 17 laporan terealisasi 8 laporan
    3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 47.650.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.135.000,00 dengan output dari rencana jumlah 5 dokumen terealisasi 5 dokumen

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.760.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.480.000,00 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
    a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.760.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.480.000,00 dengan output dari rencana jumlah 17 Desa terealisasi 8 Desa, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
        1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.760.000,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.480.000,00 dengan output dari rencana jumlah 3 Laporan terealisasi 3 Laporan

Adapun untuk target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum realisasi atau tercapai dikarenakan masih proses pelaksanaan dan menunggu release dari pihak terkait.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Semanding Memiliki tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan sesuai ketentuan dan pearturan perundang undangan yang berlaku.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk mengetahui sejauh mana Tingkat keberhasilan pelayanan pada Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja layanan yang telah dilaksanakan.

Berikut Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Semanding:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya	-		n/a	n/a	26,67 (%)	40 (%)	n/a	n/a	26,67 (%)	40 (%)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-		84,80	85,80	89,05	89,55	82,78	88,55	89,05	89,55	

Berdasarkan Tabel diatas bahwa indikator Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2025 sehingga belum ada capaian untuk tahun 2023 dan 2024. Sedangkan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semanding (IKM) target tahun 2023 sebesar 84,80 dan tahun 2024 sebesar 85,80. Penilaian IKM kecamatan Semanding dilaksanakan oleh Tim survey Pemerintahan Kabupaten Tuban yang bekerjasama dengan CV Gamatim Konsultan, dari hasil yang diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Semanding 2024 (88,55) meningkat dibanding Tahun 2023 (82,78). Hal ini dipengaruhi oleh Kepuasan Masyarakat atau pelayanan umum yang diberikan Kecamatan. Kepuasan masyarakat sendiri dinilai dari beberapa unsur pelayanan antara lain Persyaratan, Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifik, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, dan Sarana dan Prasarana.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu penting dan hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semanding sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan umum yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi untuk menjawab tantangan/ isu penting tersebut antara lain:
   - Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.
   - Kompetensi dan kapasitas ASN di Kecamatan
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

   Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain:
   - Kompetensi ASN dalam urusan perencanaan dan pelaporan keuangan.
   - Sarana dan prasarana pendukung tekhnologi informasi kounikasi (TIK/ ICT).
   - Tingkat pengetahuan dan ketrampilan ASN dalam menggunakan tekhnologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI).

3. Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Semanding
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran yang menunjang pembiayaan.
   - Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Semanding
   - Ketersediaan ASN sebagai SDM pengelola TIK.
4. Pendampingan Desa Menuju Desa Mandiri
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lalin :
   - Tingkat pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaporan keuangan.
   - Ketersediaan tenaga pendamping Desa.
5. Kompetensi dan kapasitas tenaga pendamping desa. Sinergitas Forkopimka, Dinas/ Instansi Vertikal bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran.
   - Intensitas koordiansi antar lintas sektor.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah aspek krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan publik yang prima. Kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan, memiliki posisi strategis untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berikut adalah rincian tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kecamatan Semanding:

✓ Tantangan dalam Peningkatan Pelayanan Kecamatan Semanding:
   1. Proses administrasi yang panjang, kurang efisien, dan membutuhkan banyak tahapan persetujuan masih menjadi keluhan utama masyarakat.
   2. Keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama dalam pengadaan teknologi modern dan pelaksanaan inovasi pelayanan.
   3. Tidak semua pegawai kecamatan memiliki keterampilan dan penguasaan teknologi digital yang cukup untuk menjalankan sistem pelayanan modern secara efektif.
   4. Pelatihan yang kurang memadai atau tidak berkelanjutan membuat adopsi teknologi dan peningkatan kualitas layanan berjalan lambat.

✓ Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Kecamatan
   1. Pengembangan portal, website, atau media sosial yang mudah diakses dapat digunakan untuk menyampaikan informasi,

data pembangunan, dan dokumen-dokumen pelayanan secara transparan kepada masyarakat.

2. Tersedianya kesempatan untuk pelatihan dan pendidikan formal bagi pegawai dapat meningkatkan kualitas SDM, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan keterampilan manajerial.
3. Dengan perbaikan sistem dan dukungan teknologi, fokus kerja dapat bergeser ke pelayanan prima dan orientasi pada hasil yang terukur (berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM yang tinggi).

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan Renja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Penelaahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang tercantum di dalam Rancangan Perubahan RKPD 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan análisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban hasil review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi,indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan

7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Dalam proses rancangan Perubahan RKPD 2025, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban membandingkan rancangan awal RKPD tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Hal ini dimaksud untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas guna mencapai target renstra tahun berjalan, poin-poin dasar perubahan renja 2025 antara lain:

1. Penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2025–2029
2. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari tahun berjalan
3. Adanya perubahan alokasi APBD, baik penambahan maupun pengurangan

Adapun review Perubahan rencana kerja terhadap rancangan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. (T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Semanding

lembar 1 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Semanding	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	1.730.267.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Semanding	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	1.911.813.321	
7.01.03.201	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Semanding	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Jenis	98.000.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Semanding	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Jenis	78.078.257	

lembar 2 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	78.078.257	
7.01.03.202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dari hasil musyawarah kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	40 Kegiatan	1.632.267.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dari hasil musyawarah kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	16 Usulan	1.833.735.064	

lembar 3 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.202.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	1.387.426.950	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terbangun	6 Unit	1.613.813.539	
7.01.03.202.03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2 pokmas	244.840.050	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2 pokmas	219.921.525	

lembar 4 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pulik	Kec. Semanding	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	100%	125.542.750	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pulik	Kec. Semanding	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	100%	128.838.068	
7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Semanding	Nilai IKM terhadap pelayanan dan perijinan kecamatan	86 poin	18.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Semanding	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 Jenis	21.295.318	
7.01.02.204.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	18.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5.800 Dokumen	21.295.318	

lembar 5 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.201	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan di tingkat kecamatan	400 dokumen	107.542.750	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Laporan	107.542.750	
7.01.02.201.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	400 dokumen	107.542.750	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kel Karang dan Kel Gedongombo	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 dokumen	107.542.750	
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Semanding	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	5.760.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Semanding	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	5.760.000	

Lembar 6 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Semanding	Jumlah laporan pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	17 laporan	5.760.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Semanding	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan	5.760.000	
7.01.04.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17 laporan	5.760.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	5.760.000	

Lembar 7 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Semanding	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	0	0	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Semanding	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	10.628.800	
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Semanding	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	0	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Semanding	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	10.628.800	

Lembar 8 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Semanding	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Semanding	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	10.628.800	

Lembar 9 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.010.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Semanding	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	168.107.250	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Semanding	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	100%	83.421.934	
7.010.6.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Semanding	Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	15 Dokumen	168.107.250	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Semanding	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	83.421.934	
7.010.6.201.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	97.244.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	57.879.775	

Lembar 10 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.010.6.201.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	17 Laporan	23.213.250	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	17 Laporan	16.883.472	
7.010.6.201.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	5 Dokumen	47.650.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	15 Dokumen	8.658.687	

Lembar 11 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Semanding	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	5.766.133.074	Program Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Semanding	Nilai AKIP Perangkat Daerah	78,70 Poin	5.878.358.583	
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	54.326.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	34.074.600	
7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	9 Dokumen	46.476.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	2 Dokumen	29.385.100	

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	9 Laporan	7.850.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	6 Laporan	4.689.500	
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	4.790.646.474	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	4.763.908.623	
7.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semanding	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	31 Orang	4.567.851.274	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semanding	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan tunjangan	31 orang	4.541.182.648	

Lembar 13 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.202.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Semanding	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	9 dokumen	222.795.200	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Semanding	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	222.725.975	
7.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	38 orang	20.102.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1 jenis	976.000	
7.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Semanding	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38 paket	20.102.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Semanding	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	976.000	

Lembar 14 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	15 Layanan	153.648.440	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Semanding	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Jenis	152.604.570	
7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Semanding	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.434.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Semanding	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.434.250	
7.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semanding	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	84.821.830	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semanding	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	87.779.330	

Lembar 15 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Semanding	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	32.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Semanding	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	29.973.150	
7.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Semanding	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3.172.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Semanding	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2.652.500	
7.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	3.480.480	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Semanding	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	4.500.600	

Lembar 16 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.738.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	22.264.740	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	20 unit	194.000.000	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	2 Jenis	290.324.850	
7.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Semanding	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Semanding	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 unit	96.324.850	

Lembar 17 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semanding	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	194.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semanding	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	194.000.000	
7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	20 Jasa	188.278.850	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	188.278.850	
7.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.045.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	52.045.500	

Lembar 18 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	136.233.350	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Semanding	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	136.233.350	
7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	42 Unit	437.131.210	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Semanding	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	442.065.090	

Lembar 19 dari 19

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Semanding	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	34.871.610	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Semanding	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	48.391.490	
7.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Semanding	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18 Unit	11.259.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Semanding	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30 Unit	15.799.600	
7.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Semanding	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	391.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Semanding	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	384.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil Musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semanding Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		NIHIL			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, yang menjadi pedoman penyusunan Program dan Kegiatan SKPD adalah Rancangan Awal Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana di dalamnya telah termuat pokok-pokok Program dan Kegiatan berikut indikatornya yang menjadi tugas pokok Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Taget
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan /Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	40%
	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	Jumlah Desa Yang Naik Nilai Indeks Desanya pada Kecamatan /Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	26,67%
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3,86
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89,05

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	1.730.267.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	1.911.813.321	181.546.321
7. 01.03.201	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Jenis	98.000.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 Jenis	78.078.257	(19.921.743)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	78.078.257	(19.921.743)
7. 01.03.202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan pemberda yaan dari hasil musyawarah kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	40 Kegiatan	1.632.267.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16 Usulan	1.833.735.064	201.468.064

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.202.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terbangun	45 Unit	1.387.426.950	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	1.613.813.539	226.386.589
7.01.03.202.03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2 pokmas	244.840.050	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2 pokmas	219.921.525	(24.918.525)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pulik	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	100%	125.542.750	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pulik	100%	128.838.068	3.295.318
7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	86 poin	18.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Jenis	21.295.318	3.295.318

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2 04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	18.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.800 Dokumen	21.295.318	3.295.318
7.01.02.2 01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	400 dokumen	107.542.75 0	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Laporan	107.542.75 0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2 01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	400 dokumen	107.542.75 0	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 dokumen	107.542.75 0	0
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	5.760.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	5.760.000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	17 laporan	5.760.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	5.760.000	0
7.01.04.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17 laporan	5.760.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	5.760.000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	0	0	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	10.628.800	10.628.800
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	10.628.800	10.628.800
7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	200 orang	10.628.800	10.628.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.010.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	100%	168.107.250	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	83.421.934	(84.685.316)
7.010.6.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Dokumen	168.107.250	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	83.421.934	(84.685.316)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.010.6.2 01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	97.244.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	57.879.775	(39.364.225)
7.010.6.2 01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	17 Laporan	23.213.250	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	17 Laporan	16.883.472	(6.329.778)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.010.6.201.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	5 Dokumen	47.650.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Dokumen	8.658.687	(38.991.313)
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	5.766.133.074	Program Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota	78,70 Poin	6.128.358.583	362.225.509

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	54.326.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	34.074.600	1.500.000
7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	9 Dokumen	46.476.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.385.100	(17.091.000)
7.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	9 Laporan	7.850.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.689.500	(3.160.500)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	4.790.646.474	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Jenis	4.763.908.623	(26.737.851)
7.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan tunjangan	31 Orang	4.567.851.274	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	4.541.182.648	(26.668.626)
7.01.01.202.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	9 dokumen	222.795.200	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	222.725.975	(69.225)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	38 orang	20.102.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 jenis	976.000	(19.126.00 0)
7.01.01.2 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38 paket	20.102.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	976.000	(19.126.00 0)
7.01.01.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	15 Layanan	153.648.44 0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	152.604.57 0	(1.043.870)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.434.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	5.434.250	0
7.01.01.2 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	84.821.830	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	87.779.330	2.957.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	32.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	29.973.150	(2.026.850)
7.01.01.2 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3.172.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	2.652.500	(520.000)
7.01.01.2 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	3.480.480	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 dokumen	4.500.600	1.020.120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.738.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	22.264.740	(2.473.860)
7.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	20 unit	194.000.00 0	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	290.324.85 0	96.324.85 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 unit	96.324.850	96.324.85 0
7.01.01.2 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	194.000.00 0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	194.000.00 0	0
7.01.01.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	20 Jasa	188.278.85 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	188.278.85 0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.045.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	52.045.500	0
7.01.01.2 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	136.233.35 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	136.233.35 0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	42 Unit	437.131.210	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	698.191.090	261.059.880
7.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	34.871.610	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit	48.391.490	13.519.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD 2025)			Sesudah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	11.259.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	15.799.600	4.540.000
7.01.01.2 09.09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	391.000.00 0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	634.000.00 0	(243.000.0 00)

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam Satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendanaannya.

Sebagai uraian akhir pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan sebagai bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2025, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Semanding;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) harus menjadikan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Semanding, dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025; dan
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam melaksanakan Program dan Pembangunan.

Demikian penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini dibuat untuk dijadikan pedoman operasional guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas, serta mengantisipasinya potensi perubahan dan perkembangan yang ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan dan perubahan terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

CAMAT SEMANDING
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

drh. R. CIPTA DWIPRIYATA

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TUBAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 87

Dipindai dengan CamScanner

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR

NO.	PARAF KOORDINASI
6.	Sekretaris Daerah
5.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tuban
4.	Inspektur Inspektorat Daerah
3.	Kabag. Hukum Setda
2.	Plt. Kepala Bapperida
1.	Camat Tuban

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 3 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Perubahan Kecamatan Tuban Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan tema Pembangunan “Tuban Tumbuh”.

Penyelarasan dengan Visi–Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029

Perubahan Renja dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan RPJMD 2025-2029 dan renstra perangkat daerah 2025-2029 yang sedang disusun dan RPJPD 2025-2045 yang telah disahkan/ditetapkan serta penyelarasan dengan visi misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 harus mendukung peningkatan kinerja perekonomian yang resilien

dan berdaya saing melalui optimalisai kontribusi sektor strategis dengan memperhatikan penguatan SDM dan penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan di tingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Selanjutnya renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program dan kegiatan tidak lagi relevan atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan atau kondisi aktual Masyarakat. Perubahan perencanaan pembangunan dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat bisa melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing suatu wilayah atau daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tuban selanjutnya ada beberapa faktor yang meliputi hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program dan kegiatan tidak lagi relevan atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan atau kondisi aktual masyarakat, serta perubahan Renja dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan RPJMD 2025-2029 dan renstra perangkat daerah 2025-2029 yang sedang disusun dan RPJPD 2025-2045 yang telah disahkan/ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 sebenarnya bukan tentang pelaporan, melainkan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 adalah peraturan tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 adalah tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 mengatur tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 adalah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerinah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024;
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 100.3.4.2/4000/414.201.2/2024 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perngkat Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi;
2. Mengakomodasi dan menyesuaikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya, termasuk capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, agar tetap relevan dan berdampak langsung;
3. Menjabarkan rencana strategis perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang terlah ditetapkan pagu dana indikatifnya;

1.3.2 Tujuan

1. Memastikan program dan kegiatan kecamatan tetap selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD kabupaten Tuban Tahun 2025;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan Tuban, melalui penyesuaian program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan informasi pencapaian hasil Tribulan II tahun berjalan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal dari penyusunan dokumen Renja yang terdiri dari beberapa subbab yaitu Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

1.1. Latar Belakang

Latar Belakang pada dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum pada dokumen perencanaan merupakan payung hukum, regulasi, Undang-Undang, aturan atau kebijakan yang digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada subbab ini menjabarkan maksud dari disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja dan menjabarkan hasil atau pencapaian yang diinginkan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan subbab yang menggambarkan alur atau urutan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan terdapat beberapa subbab yakni Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025, dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ll Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada subbab ini berisi tentang penjabaran evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang penjabaran sistem pelayanan pada Kecamatan Tuban kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Tuban.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada subbab Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisi tentang isu penting yang terjadi di wilayah Kecamatan Tuban.

2.4. Reviu terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025

Pada Subbab Reviu terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2025 berisi tentang uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah porses tersebut.

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada subbab Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisi tentang usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Tuban.

BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUBAN

Pada Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tuban berisi tentang uraian program sampai dengan sub kegiatan pada Kecamatan Tuban beserta sumber pendanaannya.

BAB. IV. PENUTUP

Pada Bab IV Penutup merupakan Kesimpulan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ll Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tuban Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tuban Tahun 2021–2026, meskipun belum seluruhnya mencapai target secara optimal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi kinerja sebesar 117%, melampaui target Renstra sebesar 100%. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) pada dua dari tiga desa, yaitu Sumurgung dan Kembangbilo, meskipun satu desa mengalami penurunan. Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang mencapai serapan anggaran 96,97% dengan efisiensi kinerja yang dinilai baik.

Sementara itu, untuk sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,96 poin atau 96% dari target 94,44 poin, menunjukkan bahwa meskipun pelayanan publik telah berjalan baik, masih terdapat kekurangan terutama pada aspek sarana dan prasarana pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Program pelayanan publik lainnya seperti Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Desa masing-masing menunjukkan capaian kinerja hampir sempurna dengan realisasi 99,73%, 98,58%, dan 90,06%, disertai serapan anggaran yang efisien.

Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran, Kecamatan Tuban menunjukkan kinerja yang cukup efektif dengan rata-rata realisasi di atas 90%, yang menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana meskipun masih terdapat kegiatan yang belum maksimal akibat keterlambatan pelaksanaan dan beberapa kegiatan yang dialihkan antar-sub kegiatan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi Renja Tahun 2024 menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya dalam misi meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dan mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Hasil kajian ini menjadi dasar penting bagi penyusunan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sinergi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan administratif. Diharapkan, langkah-langkah strategis tersebut akan memperkuat pencapaian target Renstra Kecamatan Tuban Tahun 2021–2026, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah di tahun berikutnya.

Ada beberapa program/kegiatan yang belum terlaksana sampai pada Triwulan II ini, sehingga perlu diadakan perubahan rencana kerja untuk menyesuaikan program/kegiatan dan perencanaan awal rencana kerja Tahun 2025. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian program dan kegiatan kerja pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Table 2.1 (formulir E.81) Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tuban

Periode Pelaksanaan : s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
A	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa		Tingkat Kenaikan Desa yang meningkat indeks Ketahanan Ekonominya	100%	51.075.280.241	100%	32.750.911.592	100%		0	2.778.999.256	0	3.427.798.058	0		0	6.206.797.314		0 %	38.957.708.906	0 %	76.28 %	Camat Tuban
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	50.570.255.178	200%	19.397.746.092	100	36.874.280	100	571.352.270	100	8.512.955.000	28	419.561.377		0%	2.530.000	100%	9.578.781.550	100%	18.94%	Camat Tuban
			Presentase usulan hasil musrenbang kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	100 %																			Camat Tuban
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan desa	3 desa	505.025.063	3 desa	63.252.900	3 desa	75.000.000	0 desa	-	1 desa	2.530.000				1 desa	2.530.000	3 desa	65.782.900	133.33%	13.03%	Kasi PMD

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70 Pokmas/Ormas	10.522.506.412	14 pok	2.393.053.600	14 pok/orm	2.313.755.298	0 pok/orm	-	0 pok/orm	59.651.500				0 pok	59.651.500	14 pok/	2.452.705.100	100%	23.31%	Lurah
B	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Poin		90.52 Poin		94.44 Poin											90.52 Poin		95.28 Poin		Camat Tuban
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	4.946.894	100%	1.691.412.400	100 %	842.135.499	100 %	36.716.607	100 %	139.980.678				100 %	173.697.285	100 %	1.865.109.685	100%	37.7 %	Camat Tuban
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	840 dok	4.872.393.575	1249 dok	1.644.585.150	168 dok	831.463.949	42 dok	36.716.607	42 dok	136.980.509				84 dok	173.697.116	1.333 dok	1.818.282.266	158.69%	231.26%	Lurah

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	840 dok	4.872.393.575	580dok	1.644.585.150	168 dok	831.463.949	42 dok	36.716.607	42dok	136.980.509				84 dok	173.697.116	664 dok	1.818.282.266	79.05 %	37.32%	Lurah
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis Pelayanan Perijinan di Kecamatan	10 jenis	74.500.000	10 jenis	46.827.250	10 jenis	10.671.550	0 jenis	-	0jenis	1.640.000				0 jenis	-	10 jenis	46.827.250	100%	62.86%	Kasi Pelayanan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perijinan Usaha yang dilaksanakan	6000 dok	74.500.000	307 dok	46.827.250	40 dok	10.671.550	0 dok	-	0 dok	1.640.000				0dok	-	307Dok	46.827.250	5.12%	62.86%	Kasi Pelayanan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	505.099.301	100%	244.401.700	97 %	59.992.500	0 %	-	0 %	15.680.000				0 %	15.680.000	100 %	260.081.700	100 %	312.42%	Camat Tuban

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurhan yang berpotensi mendapat ancaman trantibum	8 desa kelurahan	505.099.301	6 desa	244.401.700	12 desa kelurahan	59.992.500	0 desa	-	0 desa	15.680.000				0 desa	15.680.000	9 desa	260.081.700	112.5 %	51.49%	Kasi Trantib
		Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	62 laporan	505.099.301	24 laporan	244.401.700	12 lap	59.992.500	0 lap	-	3 lap	15.680.000				3 lap	15.680.000	27 lap	260.081.700	43.55 %	51.49%	Kasi Trantib
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	241.305.769	100%	83.246.700	94 %	336.585.000	0 %	-	25 %	4.780.000				25%	4.780.000	125 %	88.026.700	125 %	36.48%	Camat Tuban

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10 keg	241.305.769	2 keg	19.887.800	2 keg	336.585.000	0 keg	-	1 keg	4.780.000				1 keg	4.780.000	11 keg	24.667.800	110%	10.22%	Kasi Kesra
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 0rang	86.055.769	20	19.877.800	20 orang	286.585.000	0 orang	-	0 orang					0 orang	-	20 orang	19.877.800	8%	23.1%	Kasi Kesra

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pembinaan kerukunan Antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional	Pembinaan kerukunan Antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional	500 Orang	155.250.000	0 Orang	0	100 Orang	50.000.000	0 orang	-	25 orang	4.780.000				25 orang	4.780.000	25 orang	4.780.000	5%	3.08 %	Kasi Kesra
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	1.900.517.893	100 %	809.747.250	100 %	259.999.000	33.33 %	50.000.000	33.33 %	50.000.000				66.66%	100.000.000	133.33 %	909.747.250	133.33%	47.87%	Camat Tuban
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	150 desa	1.258.956.841	70dok	809.747.250	30 dok	259.999.000	3 dok	50.000.000	5 dok	50.000.000				12 dok	100.000.000	82 dok	909.747.250	54.67 %	72.26%	Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	1.258.956.841	4 dok	252.361.250	3 dok	250.000.000	3 dok	50.000.000	3 Dok	50.000.000				3 Dok	100.000.000	7 Dok	352.361.250	46.67%	27.99%	Kasi Pemerintahan
		Sub Kegiatan Fasilitasi pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah dokumen Fasilitasi pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	15 Dokumen	271.883.567	0 dok	-	3 dok	9.999.000	0 dok	-	0 dok	-				0 dok	-	0 dok	-	0%	0%	Kasi Pemerintahan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 Poin	75.429.573.884	81 poin	25.593.079.183	81 Poin	15.220.525.343	0 Poin	2.748.950.291	0 Poin	3.932.503.566				0 Poin	6.681.453.857	81 Poin	32.274.533.040	203.66%	42.79%	Sekretaris Camat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	45Dokumen	285.844.000	21 dok	67.222.514	9 Dokumen	41.002.000	4 Dokumen	-	3 Dokumen	18.972.650				7 Dokumen	18.972.650	28 Dokumen	86.195.164	62.22%	30.15%	Kassubag Program dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	20 Dokumen	124.372.940	9 dok	48.243.014	4 Dokumen	36.002.000	4 Dokumen	-	3 Dokumen	18.972.650				7 Dokumen	18.972.650	16 Dokumen	67.215.664	80%	54.04%	Kassubag Program dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	65.602.241	11 dok	7.004.500	5 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	-	3 Dokumen	-				3 Dokumen	-	14 Dokumen	7.004.500	93.33%	10.68%	Kassubag Program dan Pelaporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	60 dokumen	72.980.940.009	24 dok	23.371.462.573	12 dokumen	15.763.303.256	3 dokumen	2.743.493.756	3 dokumen	3.911.608.909				6 dokumen	6.655.102.665	30 dokumen	30.026.565.238	50%	41.14%	Kassubag Umum dan Keuangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan	82 Orang	68.309.089	90 orang	21.439.100.985	82 orang	14.711.210.776	87 orang	2.553.018.569	78 orang	3.722.100.482				78 orang	6.275.119.051	168 orang	27.714.220.036	204.88%	40.57%	Kassubag Umum dan Keuangan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	60 dokumen	4.671.850.110	24 dok	1.932.361.588	12 Dokumen	1.052.092.480	3 Dokumen	190.475.187	3 Dokumen	189.508.427				6 Dokumen	379.983.614	30 Dokumen	2.312.345.202	50%	49.5%	Kassubag Umum dan Keuangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	60 dok	780.798.000	29 dok	297.206.597	12 dokumen	140.166.417	3 dok	-	3 dok	43.469.400				6 dok	43.469.400	35 dok	340.675.997	58.33%	43.63%	Kassubag Umum dan Keuangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Peneerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan perkantoran	15 Paket	41.324.324	3 paket	262.257.600	3 paket	2.660.200	0 Jenis	-	1 paket	1.505.405.400				1 paket	1.505.400	4 paket	263.763.000	26.67%	638.28%	Kassubag Umum dan Keuangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan perkantoran	7 paket	122.947.047	7 pkt	53.279.400	7 pkt	26.998.720	0 Paket	-	1 Paket	7.604.000				1 paket	7.604.000	8 paket	60.883.400	114.29%	49.52%	Kassubag Umum dan Keuangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aparatur dalam peningkatan kompetensi	150 paket	366.872.515	150 pkt	117.677.500	150 paket	52.451.930	0 Jenis	-	45 paket	11.631.000				45 paket	11.631.000	195 paket	129.308.500	130%	35.25%	Kassubag Umum dan Keuangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan	15 paket	119.560.999	6 paket	26.200.250	3 paket	14.999.780	0 paket	-	1 paket	2.675.000				1 paket	2.675.000	7 paket	28.875.250	46.67%	24.15%	Kassubag Umum dan Keuangan
		Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	10 dok	41.515.623	3 dok	5.580.000	2 dok	2.994.500	0 dok	-	2 dok	980.000				2 dok	980.000	5 dok	6.560.000	50%	15.8%	Kassubag Umum dan Keuangan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	75 kali	88.577.489	33 lap	87.470.847	15 laporan	40.061.187	0 Laporan	-	2 lap	19.074.000				2 Lap	19.074.000	35 lap	106.544.847	46.67%	120.28%	Kassubag Umum dan Keuangan

		Rata-rata capaian kinerja															
		Predikat kinerja															
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan anggaran																	
Faktor Penghambat Pencapaian kinerja : Kurang Optimalnya pelaksanaan kegiatan di kecamatan dikarenakan terlambatnya penyusunan APBDP																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : • Mengoptimalkan realisasi kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya • Melakukan percepatan pekerjaan yang terkait dengan target kinerja yang belum berjalan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya *):																	

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Hasil evaluasi kinerja Kecamatan Tuban Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Pada sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa, capaian kinerja mencapai 69,05% realisasi anggaran sebesar 29,84%, di mana kegiatan pemberdayaan masyarakat telah terlaksana namun masih perlu percepatan pada tahap pelaksanaan dan penyerapan dana kelurahan. Pada sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, capaian kinerja sebesar 75% menunjukkan pelayanan publik berjalan cukup baik, meskipun terdapat kendala keterlambatan administrasi dan APBD-P. Sementara itu, pada sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, capaian hanya 20% (rendah) karena keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal. Adapun sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencapai 66,67%, namun masih terdapat kendala keterlambatan laporan dan kegiatan penataan ruang desa. Secara keseluruhan, capaian rata-rata program dan kegiatan berada pada kategori rendah, dengan faktor pendorong berupa koordinasi antar seksi yang cukup baik dan pelaksanaan sesuai pagu, sementara faktor penghambat utama meliputi keterlambatan APBD-P, kendala administrasi, dan belum optimalnya pelaksanaan di awal tahun. Untuk itu, tindak lanjut yang direkomendasikan meliputi percepatan realisasi kegiatan, optimalisasi kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan antar unit kerja guna mencapai target renstra tahun 2026.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TUBAN

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan di masyarakat baik tingkat kelurahan dan desa dengan mengadakan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

Selain pemberdayaan dilakukan juga perbaikan infrastuktur kelurahan meliputi drainase, jalan lingkungan dan penerangan jalan;

2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan ini dilakukan dengan pengamanan lingkungan, ketertiban umum termasuk penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Serta sosialisasi wawasan kebangsaan dan pengamanan persiapan pemilu.
3. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan ini termasuk pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, penerapan perundang-undangan ditingkat desa, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di tingkat desa dan penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
6. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
7. Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Secara garis besar capaian pelayanan dapat digambarkan pada tabel berikut 2.2 :

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangakat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya			67,17 (Rp. Juta)	71,09 (Rp. Juta)	72 – 75 (Rp. Juta)	75 – 78 (Rp. Juta)	62,16(Rp. Juta)	67,17(Rp. Juta)	71,09 (Rp. Juta)	72 – 75 (Rp. Juta)	
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)			90,52 Poin	90,96 Poin	91,16 Poin	91,36 Poin	92,44 Poin	90,52 Poin	90,96 Poin	91,16 Poin	

Kendala yang dihadapi Selama periode 2023–2025, kinerja pelayanan di Kecamatan Tuban menunjukkan arah perbaikan yang positif, meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala utama seperti keterbatasan SDM, anggaran, serta sarana pendukung pelayanan publik.

Ke depan, diperlukan penguatan aspek perencanaan berbasis data, peningkatan kompetensi aparatur, dan pengembangan inovasi pelayanan digital agar target indikator kinerja dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2.3 ISU– ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tuban, menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut:

a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan yang sangat berpengaruh langsung karena menyangkut perencanaan dan penyusunan target kinerja tahunan maupun jangka menengah. Perubahan data, kebijakan daerah, atau hasil evaluasi dapat langsung mengubah arah dan prioritas rencana kinerja Kecamatan.
b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan karena kebijakan teknis operasional adalah turunan dari rencana strategis. Bila ditemukan hambatan teknis di lapangan, Camat dapat melakukan penyesuaian target dan metode pelaksanaan, yang berarti terjadi perubahan pada rencana kinerja tahunan.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, yang berpotensi tinggi jika terjadi pelimpahan kewenangan baru dari perangkat daerah ke kecamatan, otomatis rencana kinerja harus diperbarui untuk menyesuaikan beban kerja dan indikator.
d. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat berpengaruh misalnya pada digitalisasi pelayanan, sistem monitoring baru, atau model pemberdayaan masyarakat) dapat mengubah arah strategi dan indikator kinerja kecamatan, bahkan menjadi dasar revisi Renja Kecamatan.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya yang merupakan instruksi langsung dari Bupati, terutama jika terkait kebijakan prioritas daerah (misalnya pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, atau pelayanan publik digital), dapat mengubah fokus dan target kinerja kecamatan secara signifikan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, poin-poin yang memerlukan perubahan dalam Renja selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan dengan Tingkat Capaian Renstra (s/d 2024) terendah, yang harus diprioritaskan untuk diakselerasi, baik melalui penyesuaian target maupun penambahan alokasi anggaran (penajaman program dan kegiatan).

- Peningkatan Anggaran dan Program Aksi untuk Sasaran Ketahanan Ekonomi Desa:

Program yang berkaitan dengan peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa harus menjadi prioritas utama dengan penambahan anggaran untuk mengejar ketertinggalan capaian (hanya 33.33% s/d 2023).

- Perbaikan Kinerja Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian:

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kode 7.01.01.2.05) dengan capaian 0% s/d 2024, harus segera dialokasikan anggaran dan dibuat rencana aksi yang jelas agar dokumen administrasi kepegawaian dapat terlaksana sesuai target Renstra.

Akselerasi Program Penunjang (Sarana dan Prasarana):

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah (20%) dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (30%) memerlukan penambahan alokasi dana atau peninjauan ulang prioritas untuk memastikan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Kecamatan terpenuhi sesuai target.
- Akselerasi Kualitas Dokumen Perencanaan dan Keuangan:

Kegiatan yang terkait dengan penyusunan dokumen (Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Administrasi Umum) yang memiliki capaian antara 26.67% hingga 30%, harus ditingkatkan alokasi sumber daya dan pengawasannya agar mampu menyelesaikan tumpukan target Renstra di sisa periode.

- Peningkatan Koordinasi Kewilayahan:

Peningkatan efektivitas dan anggaran pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (25%) dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (20%)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tuban Tahun 2024 hingga triwulan II, teridentifikasi bahwa kinerja pelaksanaan kegiatan belum optimal. Sejumlah program dan kegiatan tertunda pelaksanaannya, sehingga diperlukan penyesuaian target dan jadwal agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sebelum akhir tahun. Selain itu, capaian terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026 masih rendah. Beberapa indikator kinerja utama, seperti peningkatan indeks ketahanan ekonomi desa dan penyelesaian pelayanan publik, masih jauh dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya percepatan dan realokasi sumber daya agar tujuan jangka menengah dapat terpenuhi. Di sisi lain, penyerapan anggaran belum merata dan cenderung rendah pada beberapa kegiatan prioritas. Sebagian program, seperti fasilitasi pengelolaan keuangan desa, bahkan sama sekali belum menyerap anggaran. Kondisi ini mengindikasikan perlunya langkah efisiensi dan realokasi dana agar anggaran dapat digunakan secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Di samping itu, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi penghambat, seperti kualitas pelayanan publik yang belum optimal, pengembangan sektor unggulan yang belum maksimal, serta permasalahan infrastruktur dan sosial yang memerlukan penanganan lebih serius.

Evaluasi ini juga mengungkap adanya kesenjangan antara perencanaan dengan realita di lapangan. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa rancangan awal RKPD tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual, baik dari segi target kinerja maupun besaran anggaran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, revisi terhadap target dan pagu anggaran diperlukan agar Renja menjadi lebih realistis dan terukur. Beberapa kegiatan memerlukan penambahan anggaran, seperti pemeliharaan barang milik daerah dan rehabilitasi gedung kantor, sementara yang lain justru mengalami pengurangan, misalnya pada belanja honorarium dan pelayanan perizinan yang dialihkan ke Mall Pelayanan Publik. Dengan demikian, perubahan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2024 menjadi suatu keharusan agar dokumen perencanaan ini tidak hanya lebih adaptif terhadap dinamika yang ada, tetapi juga mampu menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program, penganggaran, dan evaluasi kinerja hingga akhir tahun anggaran. Untuk memastikan tugas-tugas kewilayahan terlaksana secara optimal dan mencapai target Renstra dapat dilihat pada Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban pada lampiran ini.

TABEL TC-31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025

KABUPATEN TUBAN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tuban

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Sumber Dana	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tuban	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.50 Poin	14.987.084.888	APBD	Kecamatan Tuban	Nilai AKIP Perangkat daerah	81.65 Poin	19.460.909.480	
A	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	56.850.000	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	36.186.500	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Sumber Dana	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Ket
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	12 Dokumen	15.208.860.109	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	12 Dokumen	14.156.720.890	
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	140.166.417	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	114.272.810	
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Dokumen	82.328.340	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Dokumen	85.604.120	
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Pemelihraan BMD	40 Unit	59.879.600	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah Pemelihraan BMD	40 Unit	560.036.200	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Sumber Dana	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Ket
F	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 Dokumen	5.395.000	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 Dokumen	66.500.000	
G	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Peninjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tuban	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	586.000	APBD	Kecamatan Tuban	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	444.588.960	
2	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tuban	Presentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	100%	974.361.168	APBD	Kecamatan Tuban	Presentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	100%	974.361.168	
A	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	168 Dokumen	962.972.618	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	168 Dokumen	962.972.618	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Sumber Dana	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Ket
B	Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Tuban	Jumlah jenis pelayanan perijinan di Kecamatan	10 Jenis	10.671.550	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah jenis pelayanan perijinan di Kecamatan	10 Jenis	11.388.550	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tuban	Persentase Desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi Persentase Usulan hasil Musrenbang kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	100% 80%	10.214.801.947	APBD	Kecamatan Tuban	Persentase Desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi Persentase Usulan hasil Musrenbang kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	100% 80%	9.795.818.201	
A	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kecamatan Tuban	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan desa	3 Desa	101.002.500	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan desa	3 Desa	90.816.800	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Sumber Dana	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Ket
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tuban	Jumlah Pemberdayaan, Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terlaksanan	42 Kegiatan	10.113.799.447	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah Pemberdayaan, Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terlaksanan	42 Kegiatan	9.705.001.401	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tuban	Persentase Desa Yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	380.094.123	APBD	Kecamatan Tuban	Persentase Desa Yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	479.050.900	
A	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30 Dokumen	479.050.900	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30 Dokumen	479.050.900	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Sumber Dana	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Ket
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tuban	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	97%	101.017.347	APBD	Kecamatan Tuban	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	97%	117.093.800	
A	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tuban	Jumlah Desa/Kelurahan yang berpotensi mendapat ancaman trantibum	12 Desa	117.093.800	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah Desa/Kelurahan yang berpotensi mendapat ancaman trantibum	12 Desa	117.093.800	
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tuban	Presentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	94%	25.125.000	APBD	Kecamatan Tuban	Presentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	94%	13.718.000	
A	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tuban	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	25.125.000	APBD	Kecamatan Tuban	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	13.718.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT KECAMATAN TUBAN

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tuban Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2025 yang terdiri dari 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Tabel TC-32

Usulan Kegiatan Prioritas dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan Tuban Tahun 2025

Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUBAN

Program dan kegiatan pada Tahun anggaran 2025 ini meliputi:

1. Program Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tuban

Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tuban tahun 2025 sesuai dengan Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perubahan Kecamatan Tuban Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan /Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	33,33%
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	Jumlah Desa Yang Naik Nilai Indeks Desanya pada Kecamatan /Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	33,33 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	4,22 Angka
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	4,22 Angka
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91,16 Angka

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan program dan kegiatan yang direncanakan

adanya perubahan pada Tahun Anggaran 2025 secara garis besar sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.017.212.805;
2. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mengalami pengurangan sebesar Rp. 59.859.000;
3. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya mengalami penambahan sebesar Rp. 78.016.850;
4. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertambah sebesar Rp. 250.000.000 dengan rincian pekerjaan rehabilitasi ruang pelayanan kecamatan, pemeliharaan gedung kantor kecamatan tuban, rehabilitasi gedung kelurahan kebonsari, rehabilitasi gedung kelurahan karangsari, rehabilitasi gedung kelurahan sendangharjo;
5. Pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.112.110;
6. Pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional mengalami pengurangan sebesar Rp. 27.694.000;
7. Pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.005.000;

Perubahan rencana kerja dilaksanakan untuk menyesuaikan efisiensi dan pendanaan top down dari Pemerintah Kabupaten Tuban, Perubahan rencana kerja dan pendanaan secara keseluruhan pada Kecamatan Tuban dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

TABEL 3.2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01	Meningkatnya kinerja akuntabilitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban	81.50 Poin	81,65 Poin	20.387.786.980	18.699.567.025	PAPBD			
7.01.01.2.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun	Kecamatan Tuban	7 Dokumen	8 Dokumen	56.285.250	56.285.250	PAPBD			

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.02	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	Kecamatan Tuban	12 Laporan	9 Laporan	18.336.368.682	16.319.155.877	PAPBD			
7.01.01.2.05	Terlaksananya Layanan Kepegawaian	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Kecamatan Tuban	1 Dokumen	1 Dokumen	0	976.000	PAPBD			
7.01.01.2.06	Terlaksananya Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kecamatan Tuban	12 Dokumen	12 Dokumen	186.174.444	186.174.444	PAPBD			
7.01.01.2.07	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Tuban	422 Unit	422 Unit	394.000.000	472.016.850	PAPBD			

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08	Terlaksananya Pengadaan Jasa Penunjang	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan jasa penunjang	Kecamatan Tuban	36 Dokumen	36 Dokumen	99.218.796	99.218.796	PAPBD			
7.01.01.2.09	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Tuban	67 Unit	23 Unit	1.315.739.808	1.565.739.808	PAPBD			

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Kecamatan Tuban	4,22 Poin	4,22 Poin						
	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Tuban	91,16 Poin	91,16 Poin						
7.01.02	Terlaksananya pelayanan publik sesuai ketentuan	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	Kecamatan Tuban	100%	100%	852.119.853	852.119.853	PAPBD			

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.01	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Tuban	168 Dokumen	168 Dokumen	845.166.078	845.166.078	PAPBD			
7.01.01.2.04	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah jenis pelayanan perijinan di Kecamatan	Kecamatan Tuban	100%	100%	6.953.775	6.953.775	PAPBD			

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	Terlaksananya pelayanan pemerintahan umum sesuai ketentuan	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Kecamatan Tuban	97%	90%	54.283.000	34.283.000	PAPBD			
7.01.05.2.01	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tuban	5 jenis	2 Kegiatan	54.283.000	34.283.000	PAPBD			

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Kecamatan Tuban	100%	100%	35.995.000	35.995.000	PAPBD			
7.01.06.2.01	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Tuban	10 Laporan	10 Laporan	35.995.000	35.995.000	PAPBD			

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	Kecamatan Tuban	100%	57,14 %	241.200.000	241.200.000	PAPBD			
7.01.06.2.01	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tuban	30 Dokumen	12 Laporan	241.200.000	241.200.000	PAPBD			

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Desa (Skala Kecamatan)	Kecamatan Tuban	0.8745 Poin	0.8745 Poin						
	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase desa mandiri	Kecamatan Tuban	100%	100%						
7.01.03	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa yang naik nilai indeks desanya	Kecamatan Tuban	100%	100%	9.376.500.132	9.386.500.132	PAPBD			

Kode	Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi Output Kagiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesduah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Presentase usulan hasil musrenbang kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan		100%	100%						
7.01.03.2.01	Terlaksananya pemberdayaan desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Tuban	3 Desa	2 Jenis 61 Usulan	65.887.890	75.887.890	PAPBD			
7.01.03.2.02	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayan, sarana dan Prasarana Kelurahan yang terlaksanan	Kecamatan Tuban	42 Kegiatan	42 Kegiatan	9.310.612.242	9.310.612.242	PAPBD			
							30.947.884.965	29.249.665.010				

BAB IV
P E N U T U P

Sebagai Uraian akhir pada dokumen perubahan rencana kerja Kecamatan Tuban ini, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan perubahan Rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya perubahan Rencana kerja Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan RKA Tahun 2025 yang nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya perubahan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan, harus menjadikan perubahan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Perubahan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Tuban Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
4. Dengan ditetapkannya perubahan Rencana kerja Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2025 pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan publik bisa dioptimalkan dengan perubahan prioritas anggaran daerah untuk penanganan keadaan darurat;
5. Diharapkan dengan tersusunnya perubahan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025 ini Indikator atau target perlu disesuaikan dengan kapasitas aktual sesuai dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
6. Diharapkan dengan tersusunnya perubahan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025 ini jika ada indikator yang terlalu tinggi atau tidak realistis perlu dibandingkan kemampuan anggaran;
7. Diharapkan dengan tersusunnya perubahan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;

8. Perubahan Renja Kecamatan Tuban Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar integrasi dengan kaidah-kaidah yang mencakup integrasi dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, akuntabilitas dan transparansi , pelaksanaan rencana kinerja juga harus bersifat partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menjaga konsistensi antara output dan outcome yang dihasilkan;
9. Rencana tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kinerja Kecamatan diarahkan untuk memperkuat efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan melalui langkah-langkah strategis penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kapasitas dan koordinasi aparatur, optimalisasi pengelolaan anggaran, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat;

CAMAT TUBAN
KABUPATEN TUBAN,

R. [illegible] DANI RAMDHANI,

BUPATI TUBAN,

[illegible] ALINDRA FARIDZKY

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PLUMPANG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Lembaran *Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor* 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Plumpang Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Plumpang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan

Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja, penyusunan Rancangan Perubahan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Renja bersinergi dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang -undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
29. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun 2025 serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perubahan Rencana Kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025; dan
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Renja Kecamatan Plumpang Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Plumpang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Kecamatan Plumpang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat terlaksana sesuai target , namun beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan ;
2. Namun ada beberapa tambahan usulan dan pagu anggaran disebabkan dana yang tersedia kurang mencukupi dan beberapa anggaran pada satu rekening perlu dikurangi ataupun dialokasikan ke kebutuhan lainnya; dan
3. Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada pagu anggaran dan tolak ukur serta target kinerja, maka perlu disesuaikan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.
4. Selanjutnya dapat di tetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Plumpang adalah pada tabel 2.1 tujuan dan sasaran tahun 2025 sesuai hasil berita acara penyesuaian target Renstra dan Renja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Plumpang Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	55,56%
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya	27,78%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,98 Poin

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,50 Poin

Hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Plumpang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tertera dalam tabel 2.2

TABEL 2.2 (T-C29)
EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

KECAMATAN PLUMPANG

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	**Meningkatkan pelayanan pada masyarakat**		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	91.4 (Poin)	95.954.762	91.3 (Poin)	4.059.775.788	91.38 (Poin)	4.331.007.345	0 (Poin)	714.801.976	0 (Poin)	792.663.337	0 (Poin)	1.507.465.313	0 (Poin)	5.784.826.539	0 %	6028.7 %	Kasi Pelayanan Umum
1		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 (%)	95.954.762	100 (%)	117.675.000	100 (%)	21.450.000	100 (%)	0	100 (%)	7.568.000	100 (%)	7.568.000	100 (%)	127.265.000	100 %	132.63 %	Kasi Pelayanan Umum
		1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen layanan yang diterbitkan	10 (Dokumen)	9.595.462	8 (Dokumen)	117.675.000	9 (Dokumen)	21.450.000	9 (Dokumen)	0	9 (Dokumen)	7.568.000	9 (Dokumen)	7.568.000	9 (Dokumen)	127.265.000	90 %	1326.3 %	Kasi Pelayanan Umum
		1. Sub Kegiatan Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 (Dokumen)	95.954.762	8 (Dokumen)	117.675.000	9 (Dokumen)	21.450.000	9 (Dokumen)	0	9 (Dokumen)	7.568.000	9 (Dokumen)	7.568.000	9 (Dokumen)	127.265.000	90 %	132.63 %	Kasi Pelayanan Umum
2		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 (%)	430.369.732	100 (%)	213.847.500	100 (%)	41.800.000	100 (%)	0	100 (%)	5.680.000	100 (%)	5.680.000	100 (%)	224.007.500	100 %	52.05 %	Kasi Trantibum

1	2	3	4	5	6

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 (Kali)	0	0 (Kali)	0	18 (Kali)	41.800.000	18 (Kali)	0	18 (Kali)	5.680.000	18 (Kali)	5.680.000	18 (Kali)	10.160.000	0 %	0 %	Kasi Trantibum
		1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	90 (Laporan)	430.369.732	18 (Laporan)	213.847.500	18 (Laporan)	41.800.000	18 (Laporan)	0	18 (Laporan)	5.680.000	18 (Laporan)	5.680.000	18 (Laporan)	224.007.500	20 %	52.05 %	Kasi Trantibum
3		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	567.395.658	100 (%)	447.392.140	100 (%)	160.199.800	0 (%)	9.296.500	0 (%)	22.489.250	0 (%)	31.785.750	0 (%)	488.247.890	0 %	86.05 %	Kasi Pemerintahan, Kasi Trantibum, Kasi Kesra
		1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 (Kali)	567.395.658	18 (Kali)	446.023.500	18 (Kali)	160.199.800	18 (Kali)	9.296.500	18 (Kali)	22.489.250	18 (Kali)	31.785.750	18 (Kali)	486.879.250	20 %	85.81 %	Kasi Pemerintahan, Kasi Trantibum, Kasi Kesra
		1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	90 (Dokumen)	231.734.000	18 (Dokumen)	137.226.000	18 (Dokumen)	47.500.000	18 (Dokumen)	0	18 (Dokumen)	10.481.750	18 (Dokumen)	10.481.750	18 (Dokumen)	147.707.750	20 %	63.74 %	Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pendayagunaan Aset Desa																	
		2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	90 (Laporan	0	0 (Laporan)	0	18 (Laporan)	21.400.000	18 (Laporan)	3.090.000	18 (Laporan)	0	18 (Laporan)	3.090.000	18 (Laporan)	5.970.000	0 %	0 %	Kasi Trantibum
		3. Sub Kegiatan FasilitasiPenyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	18 (Dokumen)	91.299.800	18 (Dokumen)	6.206.500	18 (Dokumen)	12.007.500	18 (Dokumen)	18.214.000	18 (Dokumen)	24.404.000	0 %	0 %	Kasi Kesra
4		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	2 (Poin)	13.732.671.363	76.55 (Poin)	8.622.243.851	81.5 (Poin)	4.107.557.545	0 (Poin)	705.505.476	0 (Poin)	756.926.087	0 (Poin)	1.462.431.563	0 (Poin)	10.286.688.852	0 %	74.91 %	Sekretaris Camat
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	5 (Dokumen)	249.255.000	19 (Dokumen)	153.169.500	15 (Dokumen)	40.000.000	3 (Dokumen)	12.767.000	3 (Dokumen)	5.243.000	6 (Dokumen)	18.010.000	25 (Dokumen)	172.779.500	26.32 %	69.32 %	Kasubbag Prolap
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 (Dokumen)	156.050.000	3 (Dokumen)	89.640.500	3 (Dokumen)	30.000.000	0 (Dokumen)	10.553.000	0 (Dokumen)	5.243.000	0 (Dokumen)	15.796.000	3 (Dokumen)	105.436.500	20 %	67.57 %	Kasubbag Prolap

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 (Laporan)	43.205.000	4 (Laporan)	33.850.000	12 (Laporan)	10.000.000	3 (Laporan)	2.214.000	3 (Laporan)	0	6 (Laporan)	2.214.000	10 (Laporan)	37.664.000	50 %	87.18 %	Kasubbag Prolap
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	20 (Laporan)	12.528.115.711	4 (Laporan)	7.689.834.141	4 (Laporan)	3.582.049.135	4 (Laporan)	670.677.511	4 (Laporan)	724.626.217	4 (Laporan)	1.395.303.728	4 (Laporan)	9.276.000.206	20 %	74.04 %	Kasubbag Umpeg
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan)	11.916.115.711	24 (Orang/Bulan)	7.409.015.141	25 (Orang/Bulan)	3.458.049.595	25 (Orang/ Bulan)	640.512.655	25 (Orang/Bulan)	706.278.073	25 (Orang/Bulan)	1.346.790.728	25 (Orang/Bulan)	8.942.799.174	83.33 %	75.05 %	Kasubbag Umpeg
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 (Dokumen)	588.000.000	4 (Dokumen)	268.823.000	4 (Dokumen)	119.999.540	4 (Dokumen)	30.164.856	4 (Dokumen)	18.348.144	4 (Dokumen)	48.513.000	4 (Dokumen)	321.205.032	20 %	54.63 %	Kasubbag Umpeg
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 (Dokumen)	6.000.000	1 (Dokumen)	3.600.000	1 (Dokumen)	2.000.000	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	3.600.000	20 %	60 %	Kasubbag Umpeg
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	5 (Laporan)	6.000.000	1 (Laporan)	3.596.000	1 (Laporan)	2.000.000	1 (Laporan)	0			1 (Laporan)	0	1 (Laporan)	3.596.000	20 %	59.93 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			wulanan/Semesteran SKPD																	
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang dilaksanakan	2 (Dokumen)	49.052.640	2 (Dokumen)	43.244.910	2 (Dokumen)	18.224.800	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	43.244.910	0 %	88.16 %	Kasubbag Umpeg
		1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelatihan pegawai	30 (Orang)	42.565.800	28 (Orang)	26.344.910	27 (Orang)	4.999.800	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	26.344.910	0 %	61.89 %	Kasubbag Umpeg
		2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	(Paket)	0	0 (Paket)	0	25 (Paket)	13.225.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pengadaan administrasi umum	6 (Dokumen)	199.239.500	6 (Dokumen)	200.710.678	6 (Dokumen)	81.797.154	6 (Dokumen)	8.545.000	6 (Dokumen)	9.344.000	6 (Dokumen)	17.889.000	6 (Dokumen)	225.784.678	100 %	113.32 %	Kasubbag Umpeg
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Paket)	20.000.000	1 (Paket)	11.928.000	1 (Paket)	4.985.624	1 (Paket)	0	1 (Paket)	1.950.000	1 (Paket)	1.950.000	1 (Paket)	13.878.000	100 %	69.39 %	Kasubbag Umpeg
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Paket)	59.997.000	1 (Paket)	33.983.400	1 (Paket)	15.000.000	1 (Paket)	3.770.000	1 (Paket)	3.687.000	1 (Paket)	7.457.000	1 (Paket)	45.530.400	100 %	75.89 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	9.990.650	1 (Paket)	3.590.000	1 (Paket)	1.282.000	1 (Paket)	4.872.000	1 (Paket)	6.842.000	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	1 (Paket)	14.927.500	1 (Paket)	8.928.000	1 (Paket)	5.047.500	1 (Paket)	1.185.000	1 (Paket)	1.300.000	1 (Paket)	2.485.000	1 (Paket)	11.413.000	100 %	76.46 %	Kasubbag Umpeg
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 (Dokumen)	20.925.000	1 (Dokumen)	11.385.000	1 (Dokumen)	4.730.480	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	1.125.000	1 (Dokumen)	1.125.000	1 (Dokumen)	13.635.000	20 %	65.16 %	Kasubbag Umpeg
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan)	33.390.000	10 (Laporan)	105.537.778	12 (Laporan)	42.042.900	12 (Laporan)	0			12 (Laporan)	0	12 (Laporan)	105.537.778	240 %	316.08 %	Kasubbag Umpeg
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang	2 (Jasa)	348.442.803	4 (Jasa)	133.376.736	4 (Jasa)	41.500.000	4 (Jasa)	9.759.060	4 (Jasa)	10.035.922	4 (Jasa)	19.794.982	4 (Jasa)	155.537.819	20 %	44.64 %	Kasubbag Umpeg
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan)	199.994.105	3 (Laporan)	94.719.042	3 (Laporan)	33.000.000	3 (Laporan)	7.790.060	3 (Laporan)	7.095.922	3 (Laporan)	14.885.982	3 (Laporan)	111.971.125	20 %	55.99 %	Kasubbag Umpeg
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	5 (Laporan)	17.496.500	1 (Laporan)	14.654.500	1 (Laporan)	8.500.000	1 (Laporan)	1.969.000	1 (Laporan)	2.940.000	1 (Laporan)	4.909.000	1 (Laporan)	19.563.500	20 %	111.81 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan																	
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	5 (Unit)	64.093.549	11 (Unit)	173.522.000	9 (Unit)	44.000.000	0 (Unit)	0			0 (Unit)	0	0 (Unit)	173.522.000	0 %	270.73 %	Kasubbag Umpeg
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 (Unit)	64.093.549	11 (Unit)	173.522.000	8 (Unit)	21.195.633	0 (Unit)	0			0 (Unit)	0	0 (Unit)	173.522.000	0 %	270.73 %	Kasubbag Umpeg
		2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan Yang disediakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	22.804.367	0 (Unit)	0			0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	14 (Unit)	289.959.000	17 (Unit)	209.997.878	29 (Unit)	299.986.456	5 (Unit)	3.756.905	4 (Unit)	7.676.948	9 (Unit)	11.433.853	9 (Unit)	221.431.731	64.29 %	76.37 %	Kasubbag Umpeg
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 (Unit)	164.966.500	8 (Unit)	91.637.238	8 (Unit)	34.043.522	3 (Unit)	3.756.905	3 (Unit)	5.336.948	6 (Unit)	9.093.853	14 (Unit)	100.731.091	175 %	61.06 %	Kasubbag Umpeg
		2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 (Unit)	15.000.000	3 (Unit)	13.152.000	15 (Unit)	4.000.000	0 (Unit)	0			0 (Unit)	0	0 (Unit)	13.152.000	0 %	87.68 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 (Unit)	35.000.000	5 (Unit)	23.815.000	5 (Unit)	6.942.934	2 (Unit)	0	1 (Unit)	2.340.000	3 (Unit)	2.340.000	3 (Unit)	26.155.000	150 %	74.73 %	Kasubbag Umpeg
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 (Unit)	74.992.500	1 (Unit)	81.393.640	1 (Unit)	255.000.000	0 (Unit)	0			0 (Unit)	0	0 (Unit)	81.393.640	0 %	108.54 %	Kasubbag Umpeg
B	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	100 (%)	505.025.063	-33.33 (%)	244.523.000	20 (%)	76.000.000	0 (%)	4.715.000	0 (%)	11.470.000	0 (%)	16.185.000	0 (%)	271.660.500	0 %	53.79 %	Kasi PMD
1		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 (%)	505.025.063	44.44 (%)	244.523.000	100 (%)	76.000.000	0 (%)	4.715.000	0 (%)	11.470.000	0 (%)	16.185.000	0 (%)	271.660.500	0 %	53.79 %	Kasi PMD
		1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	90 (Kali)	505.025.063	18 (Kali)	244.523.000	18 (Kali)	76.000.000	18 (Kali)	4.715.000	18 (Kali)	11.470.000	18 (Kali)	16.185.000	18 (Kali)	271.660.500	20 %	53.79 %	Kasi PMD
		1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90 (Laporan)	505.025.063	18 (Laporan)	244.523.000	18 (Laporan)	76.000.000	18 (Laporan)	4.715.000	18 (Laporan)	11.470.000	18 (Laporan)	16.185.000	18 (Laporan)	271.660.500	20 %	53.79 %	Kasi PMD

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan konsisten untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapain Visi dan Misi Kepala Daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TabeL T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

No	indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya			n/a	n/a	27,78%	44,44%	20%	-33,33%	27,78%	44,44%	
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah			4,34	4,43	3,98	4,08	4,03	3,88	3,98	4,08	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			91,32	91,37	91,50	91,70	88,69	91,30	91,50	91,70	
4	Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya			66,66%	20%	n/a	n/a	20%	-33,33%	n/a	n/a	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Plumpang, berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Plumpang :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas dan sarana prasana pelayanan publik kecamatan dan Desa yang lebih baik dan memadai memudahkan Masyarakat untuk mengakses pelayanan;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan penyakit masyarakat, narkoba, judi dll) yang belum optimal;
5. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;
6. Potensi wilayah belum tergarap dengan baik

Adapun isu penting dan hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Plumpang sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan umum yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi untuk menjawab tantangan/ isu penting tersebut antara lain:
   - Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.
   - Kompetensi dan kapasitas ASN di Kecamatan
2. Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Plumpang
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Plumpang
   - Ketersediaan ASN sebagai SDM pengelola TIK.
3. Pendampingan Potensi Ekonomi Desa
   Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain:
   - Pendampingan BUMDes dan BUMDesma serta Koperasi Desa Merah Putih
   - Pengembangan potensi unggulan Desa
   - Pemeliharaan Jaringan Irigasi
   - Pembangunan jalan Usaha tani
4. Pendampingan Desa Menuju Desa Mandiri
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lalin :
   - Tingkat pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaporan keuangan.
   - Ketersediaan tenaga pendamping Desa.

5. Sinergitas Forkopimka, Dinas/ Instansi Vertikal bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Intensitas koordinasi antar lintas sektor.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plumpang Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 6 program 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

TABEL 2.4 (TC-31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

KECAMATAN PLUMPANG

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.) 000	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.) 000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	15 Dokumen	**36.800**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	**36.800**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	6,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6,800	
2			Jumlah Laporan Keuangan dan	4 Laporan		Jumlah ASN yang		Jumlah Laporan Keuangan dan	4 Laporan		

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.) 000	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.) 000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pemeriksaan yang tersusun		**3,249,458**	menerima gaji dan tunjangan		Pemeriksaan yang tersusun		**3,249,458**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	25 org	3,127,106	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	24 org	3,127,106	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	119,024	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	119,024,	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,664	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,664	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1,664	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1,664	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.) 000	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.) 000	
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah jenis Layanan Kepegawaian		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1	976	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	976	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Dokumen	64,142	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen pengadaan administrasi umum	6 Dokumen	64,142	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.985	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.985	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	15.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	15.000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.) 000	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.) 000	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,990	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,990	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	1 paket	5,161	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	1 paket	5,161	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4,680	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4,680	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24,324	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24,324	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4 jasa	49,839	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4 jasa	49,839	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.) 000	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.) 000	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	41,893	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	41,893	
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	7,946	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	7,946	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan BMD	29 unit	520,978	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan BMD	29 unit	520,978	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	34.043	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	34.043	
6.2	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebelair yang dipelihara	15 Unit	4.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebelair yang dipelihara	15 Unit	4.000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.) 000	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.) 000	
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	8,162	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	8,162	
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	474,772	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	474,772	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan BMD	4 unit	98.672	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan BMD	4 unit	98.672	
7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	96,990	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	98,672	
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		jumlah dokumen layanan yang diterbitkan	9 dokumen	21.450	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		jumlah dokumen layanan yang diterbitkan	9 dokumen	21.450	
8.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha	9 dokumen	21.450	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha	9 dokumen	21.450	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.) 000	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.) 000	
	Pelayanan Perizinan Non Usaha		yang Dilaksanakan			dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		yang Dilaksanakan			
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	18 laporan	76.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	18 laporan	76.000	
8.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 laporan	76.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 laporan	76.000	
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 laporan	41.800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 laporan	41.800	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.) 000	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.) 000	
9.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	18 laporan	41.800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	18 laporan	41.800	
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	160.199	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	160.199	
10.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumnen	47.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	47.500	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.) 000	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.) 000	
10.2	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	18 laporan	21.400	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	18 laporan	21.400	
10.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban	18 Dokumen	91.299	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban	18 Dokumen	91.299	
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	5.145.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil Musrenbang ditingkat Kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Plumpang akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plumpang Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dilihat pada *TABEL* 2.5 *:*

Tabel 2.5 (T-C.32)

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Plumpang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
	N I H I L				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Didalam menentukan tujuan dan sasaran dimulai dari permasalahan layanan perangkat daerah, isu lingkungan dinamis, isu strategis, dan potensi yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan haruslah mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan ini menjadi arah Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Kecamatan Plumpang berperan dalam mendukung misi ke-2, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu “**Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan**

Kemiskinan” dan sasaran “**Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan”** dan misi ke-4, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani”** dan sasaran **“Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”.** Dari sasaran RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plumpang Tahun 2025-2029 adalah “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa”**.

Tujuan ini memiliki 2 indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Indikator tersebut terdiri dari Presentase Desa Mandiri dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan serangkaian kinerja yang dapat diwujudkan dalam bentuk tahapan, fokus, ataupun aspek prioritas dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan renstra. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plumpang Tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yakni:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat

Masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan ketercapaiannya melalui indikator yang terukur. Indikator yang dijadikan acuan sasaran terdiri dari:

1. Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Adapun perincian dari rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Plumpang Tahun 2025-2029 beserta target, adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Plumpang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KET.
2	*3*	*4*	*5*	*6*
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	55,56	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KET.
2	*3*	*4*	*5*	*6*
	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	27,78	
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,98	
	Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,98	
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,50	

Rencana program dan kegiatan pada Tahun anggaran 2025 ini meliputi: semua program dan kegiatan merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelengaaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025, Program dan Kegiatan Kecamatan Plumpang yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Tuban sesuai P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan 6 Program, 11 Kegiatan 26 Sub kegiatan yang ingin dicapai dengan 1 (dua) tujuan dan 3 sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

KECAMATAN PLUMPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,5 poin	3.545.224.686	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77,15 Poin	4,020,868,648	475.643.692
7 01 01 2.01	**Perencanaan, penganggangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	19 dokumen	36,800,000	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	8 dokumen	36,800,000	-
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	30,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	30,000,000	-
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6,800,000	1.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	4 laporan	3,580,402,135	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	3,249,458,955	330,943,180
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	3,458,049,595	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	3,127,106,415	330,943,180
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	119,024,540	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	119,024,540	-
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,664,000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,664,000	-
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1,664,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23 Dokumen	1,664,000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang dilaksanakan	0 Dokumen	0	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1 jenis	976,000	976,000
7 01 01 2.05 09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Orang	0	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Orang	976,000	976,000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	Jumlah Dokumen pengadaan administrasi umum	6 Dokumen	64,028,954	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	64,142,954	114.000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	4,985,624	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	4,985,624	-
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	15,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15,000,000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	9,990,650	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	9,990,650	-
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	1 paket	5,047,500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	2 paket	5,161,500	114.000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4,680,480	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4,680,480	-
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	24,324,700	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	24,324,700	-
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan BMD	1 Unit	20,655,633	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 jenis	98,672,483	78.016.850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	20,655,633	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24 unit	98,672,483	78.016.850
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jasa	40,946,000	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 jenis	49,839,450	8.893.450
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	33,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	41,893,450	8.893.450
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	7,946,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,946,000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan BMD	14 Unit	264,986,456	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	520,978,806	255.992.350
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	34,043,522	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	34,043,522	-
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	3 Unit	4,000,000	Jumlah mebelair yang dipelihara	3 Unit	4,000,000	-
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	6,942,934	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	8,162,934	1.220.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 02 2.04 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	220,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	474,772,350	254.772.350
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 %	12,630,000	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	100 %	12,630,000	-
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah dokumen layanan yang diterbitkan	9 Dokumen	12,630,000	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1 Jenis	12,630,000	-
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	9 Dokumen	12,630,000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1,200 Dokumen	12,630,000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 %	55,867,500	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	42,86%	65,867,500	10.000.000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	18 kali	55,867,500	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 Jenis	65,867,500	10.000.000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 laporan	55,867,500	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 laporan	65,867,500	10.000.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	23,281,000	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	23,281,000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 laporan	23,281,000	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan	23,281,000	-
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	18 laporan	23,281,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	12 laporan	23,281,000	-
7.01.05	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	-	-	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	5.145.000	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	5.145.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	5.145.000	5.145.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	81,029,000	Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	57,14%	75,884,000	5.145.000
7 01 06 2.01	**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	81,029,000	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 laporan	75,884,000	5.145.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	23,035,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	23,035,000	-
7 01 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	18 laporan	15,911,500	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	18 laporan	15,911,500	-
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban	18 Dokumen	42,082,500	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban	18 Dokumen	36,937,500	5.145.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Plumpang dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi pedoman dan sarana untuk mewujudkan sasaran dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tuban Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Perubahan Renja Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Plumpang ;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan *(stakeholders*) yang berkaitan, harus menjadikan Perubahan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Perubahan Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja OPD dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tahun 2025;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja), Camat Plumpang Kabupaten Tuban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Untuk itu setiap Kepala Seksi dan Sekretaris berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi tanggungjawabnya setiap Tribulan kepada Camat.

Demikian penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini dibuat untuk dijadikan pedoman operasional guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi, baik di sekretariat dan seksi-seksi, serta mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan dan perubahan terhadap Renja Perangkat Daerah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

CAMAT PLUMPANG
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

SAEFIYUDIN

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PALANG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 40

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
PALANG KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palang Tahun 2025 yang digunakan sebagai sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Rancangan Renstra Kecamatan Palang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta

sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan di tingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
2. Menjabarkan Rencana Strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan peruabhan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;

2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dan;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan pendanaan dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palang Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Surat Keputusan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah samapi dengan Triwuulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dann Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah samapi dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Palang sebagai berikut:

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
12. Pelaksanaan pelaporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dapat konsisten, untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapain visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Palang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Palang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Kabupaten;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan;

Analisis Kinerja Pelayanan di pengaruhi oleh faktor keberhasilan /kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima pada masyarakat guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Goverment.*

2. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
3. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
4. Penyelenggaraan pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Dan upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif. Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas yaitu Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang standar.

Adapun Analisis kinerja Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Renja Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2025 :

Tabel 2.1 (Formulir E.81)

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan : s/d Triwualan II Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang mengacu pada sasaran RKPD tahun 2025 sebagai berikut:

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
A	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	100 %	553.100.000	38,89	831.547.300	6,9	819.697.000	0 (%)	7.380.000	0 %	28.927.000	0 (%)	36.307.000	0 (%)	45.124.150	0 %	0 %	CAMAT
I		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100 %	553.100.00	38.89 %	831.547.300	100 %	819.697.000	0%	7.380.000	0 %	28.927.000	0 (%)	36.307.000	0 (%)	45.124.150	0 %	0 %	PMD
		1. Kegiatan Koordinasi kegiatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan	18 (Desa)	553.100.000	0 Desa	95.703.500	18 Desa	110.620.000	18 Desa	7.380.000	18 Desa	15.535.000	18 Desa	22.915.000	18 Desa	31.732.150	0 %	0 %	Kasi PMD

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemberdayaan desa	fasilitas pemberdayaan desa																	
		2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporaan Peningkatan Efektifitas kegiata Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90 (Laporan)	553.100.000	18 Lapran	95.703.500	18 Laporan	110.620.000	3 Laporan	7.380.000	6 laporan	15.535..000	9 Laporan	22.915.000	9 Laporan	338.460.850	10 %	67.02 %	Kasi PMD
Rata-rata Kinerja sub kegiatan (%)										50										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan pemberdayaan dari hasil musyawarah kelurahan	20 Usulan	4.037.700.359	3 Usulan	735.753.800	4 Usulan	709.077.000	0 Usulan	0	1 usulan	13.392.000	1 Usulan	13.392.000	1 Usulan	13.392.000	0 %	0 %	Lurah

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			yang terealisasi melalui dana kelurarahan																	
		1. Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	3.527.504.947	3 unit	572.695.500	3 unit	602.715.450	0 unit	0	0 unit		0 unit	0	0 unit	0	0%	0%	Lurah
		2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 organisasi	510.195.413	6 organisasi	163.058.300	1 organisasi	106.361.550	0 organisasi	0	1 organisasi	13.392.000	1 organisasi	013.392.000	1 organisasi	388.878.601	10%	76,22 %	Lurah
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				50																
Predikat kinerja sub kegiatan				Sangat Rendah																
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				62,5																
Predikat kinerja kegiatan				Sangat Rendah																
Rata-rata kinerja program (%)				50																
Predikat kinerja program				Sangat Rendah																
B	Meningkatnya Pelayana		Indeks Kepuasan	92,33 poin	20.322.183.469	91,33	3.938.848.820	92.66 Poin	5.321.210.645	0 poin	804.347.209	0	836.402.129	0 poin	1.640.749.338	0 poin	6.416.446.761	0 %	31,57 %	Kasi Yanmum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	n pada Masyarakat		Masyarakat (IKM)			poin														
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 %	450.014.602	100%	62.575.455	100 %	65.000.000	0%	7.204.428	0 %	7.204.428	0%	9.679.892	100 %	304.159.936	0 %	67,59 %	Kasi Yanmum
		1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0 poin		0 poin		92,56 poin	65.000.000	0 poin	7.204.428	0 poin	2.475.464	0 poin	9.679.892	0 poin	21.563.437	0 %	0 %	Kasi Yanmum
		2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah dokumne non perizinan non usaha yang dilaksanakan	7500 dokumne	325.000.000	10.420 dokumen	282.596.499	3000 dokumen	65.000.000	855 dokumen	7.204.428	450 dokumen	2.475.464	1305 dokumen	9.679.892	1305 dokumen	304.159.936	174 %	203,44%	Kasi Yanmum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										43,5										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										0										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										
2		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	353.479.668	100%	22.399.000	100 %	25.000.000	100 %	4.960.000	100%		100%	4.960.000	0 %	4.960.000	0 %	0 %	Kasi Trantib
		1. Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	19 desa/kelurahan	353.479.668	19 desa/kelurahan	22.399.000	19 desa/kelurahan	25.000.000	6 desa/kelurahan	4.960.000	4 desa		10 desa/kelurahan	4.960.000	19 desa/kelurahan	4.960.000	0 %	0 %	Kasi Trantib
		2. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	95 laporan	353.479.668	19 laporan	22.399.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	4.960.000	1 laporan		1 laporan	4.960.000	1 laporan	156.143.050	1,05 %	44,17 %	Kasi Trantib

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				100																
Predikat kinerja sub kegiatan				Sangat Tinggi																
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				52,63																
Predikat kinerja kegiatan				Sangat Tinggi																
3		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	115.752.503	100%	312.249.800	100 %	19.999.500	0%	0			0%	0	0%	0	0%	0	Kasi Pemerintahan
		1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah potensi/masalah kemasyarakatan yang dikoordinasikan	95 kali	115.752.503	19 kali	312.249.800	19 kali	19.999.500	0 kali	0			0 kali	0	19 kali	312.249.800	20 %	269,76 %	Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		sesuai Penugasan Kepala Daerah																		
		2. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19 orang	115.752.503	25 orang	312.249.800	25 orang	314.595.000	29 orag	19.999.500			29 orang	0	29 orang	0	0 %	0 %	Kasi Pemerintahan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										0										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										
4		**Program Pembinaan dan**	Persentase desa yang menetapkan	100 %	701.984.837	100%	128.448.750	100 %	99.723.200	100%	16.810.000	100%	10.695.000	100%	27.505.000	100 %	30.165.000	0 %	0 %	Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengawasan Pemerintahan Desa	APBDes tepat waktu																	
		1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasn pemerintah daerah	18 desa	701.984.837	17 desa	128.448.750	18 desa	99.723.200	8 desa	16.810.000	4 desa	10.695.000	12 desa	27.505.000	12 desa	30.165.000	0 %	0 %	Kasi Pemerintahan
		1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	90 dokumen	302.150.000	36 dokumen	51.676.000	18 dokumen	54.723.200	6 dokumen	10.410.000	4 dokumen	7.500.000	10 dokumen	17.910.000	10 dokumen	20.410.000	0 %	0 %	Kasi Pemerintahan
		2. Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	95 Dok	97.684.837	36 Do	17.919.250	19 Dok	20.000.000	5 Do	3.840.000	0 Do	0	5 Do	3.840.000	19 Dok	3.840.000	0 %	0 %	Kasi Trantib

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Fadilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi dalam rangka penerapan penegakan peraturan perundang-undangan	umen		kumen		umen		kumen		kumen		kumen		umen				
		3. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	19 dokumen	302.150.000	36 dokumen	58.853.500	19 dokumen	25.000.000	4 dokumen	2.560.000	6 dokumen	3.195.000	10 dokumen	5.755.000	10 dokumen	5.915.000	0 %	0 %	Kasi Kesra
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										44,83										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										66,67										
Predikat kinerja kegiatan										Sedang										
5		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82 poin	18.700.951.860	74,1 poin	3.413.175.815	81 poin	5.111.487.945	0 poin	775.372.781	0 poin	823.231.665	0 poin	1.598.604.446	0 poin	11.253.909.624	0 %	60,18 %	Kasubbag prolap

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kabupaten / Kota																		
		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	45 dokumen	115.248.000	9 dokumen	21.939.750	9 dokumen	29.999.950	1 dokumen	2.880.000	1 dokumen	2.099.250	3 dokumen	4.979.250	3 dokumen	78.475.749	6,67 %	68,09 %	Kasubbag prolap
		2. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 dokumen	115.248.000	9 dokumen	21.939.750	9 dokumen	29.999.950	2 dokumen	2.880.000	1 dokumen	2.099.250	3 dokumen	4.979.250	3 dokumen	78.475.749	6,67 %	68,09 %	Kasubbag prolap
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										33,33										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	60 laporan	17.457.182.590	9 laporan	3.014.008.380	12 laporan	4.198.786.468	3 laporan	704.363.523	3 laporan	771.413.958	6 laporan	1.475.777.481	6 laporan	9.911.459.314	10 %	56,78 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	16.777.182.590	20 orang	2.932.035.880	30 orang	4.139.881.007	21 orang	693.938.523	21 orang	759.594.458	21 orang	1.453.532.981	21 orang	1.667.981.879	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
		2. Sub Kegiata Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 laporan	17.457.182.590	12 laporan	81.972.500	12 laporan	58.905.461	1 laporan	10.425.000	3 laporan	11.798.500	4 laporan	22.244.500	4 laporan	23.429.500	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										51,67										
Predikat kinerja sub kegiatan										Rendah										
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	31 orang	111.884.000	26 orang	8.512.500	2 Jenis	30.340.750	2 Jenis	1.404.000	2 jenis	414.250	2 Jenis	1.818.250	2 Jenis	4.734.250	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
		1. Sub kegiatan Sosialisasi peraturan perundan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	31 orang	51.384.000	31 orang	8.512.500	29 orang	14.999.750	29 orang	1.404.000	29 orang	414.250	29 orang	1.818.250	29 orang	4.734.250	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		g-undangan	perundang-undangan																	
		2. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	29 paket	15.341.000	0	0	29 paket	15.341.000	0 paket	0	0	0	29 paket	0	29 paket	0	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										50										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum	5 layanan	157.714.800	3 layanan	81.253.450	7 layanan	111.349.897	7 layanan	15.443.400	7 layanan	10.083.700	7 layanan	25.527.100	7 layanan	32.474.300	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
		1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen intalasi Listrik/penerangan	Jumlah paket kompoen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	32.253.890	1 paket	3.373.000	1 paket	9.992.735	1 paket	2.710.000	1 paket	2.287.000	1 paket	4.997.000	1 paket	7.288.200	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		bangunan kantor																		
		2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	54.368.000	1 paket	21.838.918	1 paket	7.073.660	1 paket	2.574.150	1 paket	2.889.200	1 paket	5.463.350	1 paket	7.326.850	0%	0%	Kasubbag Umpeg
		3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	28.150.000	1 paket	8.500.000	1 paket	10.000.000	1 paket	2.060.250	1 paket	1.927.500	1 paket	3.987.750	1 paket	5.680.250	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	18.000.000	2 dokumen	3.300.000	1 dokumen	3.523.500	1 dokumen	600.000	1 dokumen	900.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.800.000	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	24.943.000	3 laporan	44.422.000	12 laporan	49.261.184	3 laporan	7.499.000	3 laporan	2.080.000	6 laporan	9.579.000	6 laporan	10.379.000	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)				90																
Predikat kinerja sub kegiatan				Tinggi																
6		**5. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	15 unit	533.340.880	3 unit	160.718.478	4 Jenis	206.010.880	4 Jenis	48.667.858	4 jenis	36.257.507	4 jenis	84.925.365	4 jenis	496.800.777	26,67%	92,96 %	Kasubbag Umpeg
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disedikan	15 laporan	33.000.000	6 laporan	29.849.908	12 laporan	26.287.700	3 laporan	6.650.853	3 laporan	7.531.037	6 laporan	14.181.890	6 laporan	89.429.470	40%	271 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diseiakan	5 laporan	22.300.000	2 laporan	3.787.700	3 laporan	10.000.000	1 laporan	1.610.000	1 laporan	730.000	2 laporan	2.340.000	2 laporan	2.340.000	0 %	0 %	Kasubbag Umpeg
		3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	343.370.500	2 laporan	127.080.870	1 laporan	169.723.180	3 laporan	40.407.005	3 laporan	27.996.470	6 laporan	68.403.475	6 laporan	391.583.607	120 %	114,04%	Kasubbag Umpeg
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)										55,56										
Predikat kinerja sub kegiatan										Rendah										
7		**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan BMD	4 unit	235.581.500	14 unit	91.541.757	17 unit	535.000.000	4 unit	2.614.000	5 unit	2.963.000	9 unit	5.577.000	9 unit	194.686.757	2,25 %	82,64 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan. Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharadan dibayarkan pajaknya	13 unit	141.110.500	11 unit	42.541.757	15 unit	35.000.000	4 unit	2.614.000	4 unit	2.963.000	8 unit	5.577.000	8 unit	48.764.445	61,45 %	34,56 %	Kasubbag Umpeg
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 gedung	72.471.000	2 gedung	49.000.000	2 gedung	500.000.000	0 gedung	0 gedung	0	0	2 gedung	0	0 gedung	98.331.400	0 %	135,68 %	Kasubbag Umpeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan (Satuan)	Target RPJMD sampai pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2025 TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5x100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Rata-rata kinerja sub kegiatan (%)										26,67										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										72,71										
Predikat kinerja kegiatan										Sedang										
Rata-rata capaian kinerja program (%)										40										
Predikat kinerja program										Sangat Rendah										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	•	Kerjasama dan kebersamaan antar semua pegawai yang ada di kantor Kecamatan Palang
Factor penghambat pencapaian kinerja	•	Kurangnya pegawai dan SDM serta sarana prasarana sebagai pendukung dalam peningkatan kinerja ASN
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *)	•	Melakukan evaluasi terhadap realisasi yang masih rendah kinerja maupun anggarannya
Tindak lanjut yang diperlukan dalan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutny *)	•	Selalu melakukan evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut yang lebih baik lagi

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kantor Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.065.052.679,68 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.598.604.446 dengan output dari rencana jumlah 81,5 poin terealisasi 0 poin,
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.054.125 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.818.250 dengan output dari rencana jumlah 2 jemis terealisasi 2 jenis
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 97.331.632,20 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 25.527.100 dengan output dari rencana jumlah dengan output dari rencana jumlah 7 layanan terealisasi 7 layanan
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00 dengan output dari rencana jumlah 8 unit terealisasi 0 unit
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 197.818.330,48 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 84.925.365 dengan output dari rencana jumlah 4 jenis jasa terealisasi 4 jenis jasa
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran anggaran sebesar Rp. 527.062.174 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 5.577.000 dengan output dari rencana jumlah 17 unit terealisasi 9 unit
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari rencana anggaran sebesar Rp. 65.000.000 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 9.679.892 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 819.697.000 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 36.307.000 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%
9. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.960.000 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%,
10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari rencana anggaran sebesar Rp. 19.999.500 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 0%
11. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari rencana anggaran sebesar Rp. 99.723.200 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.810.000 dengan output dari rencana jumlah 100% terealisasi 100%, output belum tercapai karena Desa yang menetapkan

Adapun untuk target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum realisasi atau tercapai dikarenakan masih proses pelaksanaan dan menunggu release dari pihak terkait.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Palang Kabupaten Tuban pada Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palang dibawah ini :

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palang
Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	-	-	6,9	6,9	6,9	6,9	0.02	-12,5	1,00	1,00	
2.	Indeks kepuasan maskarakat (IKM)	-	-	91,8	91,85	91,90	91,95	91,22	91,33	92,56	92,57	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	80,5	81	81,50	82	74,10	74,45	81,50	81,51	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Palang adalah sebagai berikut :

1. Pada capaian kinerja poin 1 (satu) meningkatnya tingkat kenaikan Desa yang Indeks Ketahanan Ekonominya dengan capaian -12,5 %;
2. Tercapainya nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Nilai Sangat Baik (A/91,233 Poin) kategori sangat baik meski tidak mencapai target, hal ini di pengaruhi oleh kurangnya atusias masyarakat dalam pengisian kuisioner IKM dan kurangnya pendampingan petugas pada saat pengisian kuisioner IKM
3. Pada capain nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Palang masih mendapat nilai BB (74,45 Poin)

Analisa Kinerja diperlukan penguatan aspek perencanaan berbasis data, peningkatan kompetensi aparatur, dan pengembangan inovasi pelayanan digital agar target indikator kinerja dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu penting dan hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palang sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan umum yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi untuk menjawab tantangan/ isu penting tersebut antara lain:
   - Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki;
   - Kompetensi dan kapasitas ASN di Kecamatan
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

   Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain:
   - Kompetensi ASN dalam urusan perencanaan dan pelaporan keuangan;
   - Sarana dan prasarana pendukung tekhnologi informasi kounikasi (TIK/ ICT);
   - Tingkat pengetahuan dan ketrampilan ASN dalam menggunakan tekhnologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI).
3. Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Palang

   Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran yang menunjang pembiayaan;

- Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Palang;
- Ketersediaan ASN sebagai SDM pengelola TIK.

4. Pendampingan Desa Menuju Desa Mandiri
   Hal-hal yang mempengaruhi antara lalin :
   - Tingkat pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaporan keuangan;
   - Ketersediaan tenaga pendamping Desa.
5. Kompetensi dan kapasitas tenaga pendamping desa. Sinergitas Forkopimka, Dinas/ Instansi Vertikal bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
   - Ketersediaan anggaran;
   - Intensitas koordiansi antar lintas sektor.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah aspek krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan publik yang prima. Kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan, memiliki posisi strategis untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berikut adalah rincian tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kecamatan Palang:

✓ Tantangan dalam Peningkatan Pelayanan Kecamatan Palang:

1. Proses administrasi yang panjang, kurang efisien, dan membutuhkan banyak tahapan persetujuan masih menjadi keluhan utama Masyarakat;
2. Keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama dalam pengadaan teknologi modern dan pelaksanaan inovasi pelayanan;
3. Tidak semua pegawai kecamatan memiliki keterampilan dan penguasaan teknologi digital yang cukup untuk menjalankan sistem pelayanan modern secara efektif;
4. Pelatihan yang kurang memadai atau tidak berkelanjutan membuat adopsi teknologi dan peningkatan kualitas layanan berjalan lambat.

✓ Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Kecamatan

1. Pengembangan portal, website, atau media sosial yang mudah diakses dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, data pembangunan, dan dokumen-dokumen pelayanan secara transparan kepada Masyarakat;

2. Tersedianya kesempatan untuk pelatihan dan pendidikan formal bagi pegawai dapat meningkatkan kualitas SDM, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan keterampilan manajerial;
3. Dengan perbaikan sistem dan dukungan teknologi, fokus kerja dapat bergeser ke pelayanan prima dan orientasi pada hasil yang terukur (berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM yang tinggi).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Perubahan RKPD berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, dapat dilihat pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Palang Kabupaten Tuban pada lampiran ini.

Tabel 2.3

Tujuan, sasaran, dan target Renja Kecamatan Palang Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima	Indek Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, professional ASN, Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan)	Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat	91,53
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Skala Kecamatan	Meningkatnya ketahanan ekonomi Masyarakat desa	Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya	100

TABEL 2.4 T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Palang	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,10 poin	4.369.805.380	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,10 poin	5.111.487.945	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75.35 poin	4.150.485.993
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Palang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	29.999.950	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	21.620.950

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Palang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	29.99.950	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	29.999.950	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi yang tersusun	2 Dokumen	21.620.950
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Palang	IKM	92,66	3.484.027	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM	92,66	4.198.786.468	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	91,53	3.720.683.931
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Palang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	3.425.121.680	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	4.139.881.007	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	3.661.778.470

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Palang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	58.905.461	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	58.905.461	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan / Semesteran SKPD	23 Laporan	58.905.461
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Palang	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	30 orang	30.341.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	30 orang	30.340.750	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	2 Jenis	2.934.125

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Palang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 paket	15.341.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 paket	15.341.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	976.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Palang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 orang	15.000.0000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 orang	14.999.750	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 orang	1.958.125
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Palang	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	7 Layanan	82.849.539	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	7 Layanan	111.349.897	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Jenis	70.806.633
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Palang	Jumlah Paket Komponen Instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.992.735	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.992.735

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Palang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	38.572.478	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.469.950
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Palang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	7.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Palang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.523.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.132.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Palang	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	-	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	-	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1 Paket	12.096.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Palang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	49.249.539	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	49.261.184	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	28.115.948
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Palang	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	-	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM	-	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 jenis	109.559.850
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Palang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 unit	78.016.850 0

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Pengadaan Mebel	Kec. Palang	Jumlah Paket mebel yang disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	2 unit	31.543.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Palang	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4 jenis	207.587.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4 jenis	206.010.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pengadaan Jasa Penunjang	3 jenis	197.818.330
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Palang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26.287.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26.287.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26.287.700

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Palang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 laporan	6.333.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Palang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	171.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	169.723.180	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	165.197.630
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Palang	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	14 unit	535.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	14 unit	535.000.000	Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	2 Jenis	27.062.174

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Palang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	27.062.174
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Palang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	500.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	500.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	0
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Palang	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	65.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	65.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	56.097.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Palang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	92,66 poin	65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	92,66 poin	65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91,53 poin	56.097.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Palang	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3000 Dokumen	65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	300 0 Dokumen	65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3000 dokumen	56.097.000
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Palang	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	819.697.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	819.697.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	773.623.731

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Palang	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan desa	18 desa	110.620.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan desa	18 desa	110.620.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7 jenis	80.810.231
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Palang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 laporan	110.620.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 laporan	110.620.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	80.810.231
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Panyuran	Jumlah Usulan Musyawarah Kelurahan Yang Terealisasi melalui Dana kelurahan	4 usulan	709.077.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Musyawarah Kelurahan Yang Terealisasi melalui Dana kelurahan	4 usulan	709.077.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Musyawarah Kelurahan Yang Terrealisasi melalui Dana kelurahan	4 usulan	692.803.500

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Panyuran	Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	3 unit	602.715.450	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	3 unit	602.715.450	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	3 unit	602.715.450
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panyuran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	106.361.550	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	106.361.550	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	90.088.050
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Palang	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	97%	25.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	97%	25.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	19.788.790

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
10	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Palang	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	12 kali	25.000.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	12 kali	25.000.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Lapora Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	12 laporan	19.788.790
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Palang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	19.788.790
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Palang	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	97%	20.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	97%	19.999.500	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	11.618.100

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Palang	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Laporan	20.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Laporan	19.999.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Laporan	11.618.100

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Palang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	300 Orang	20.000.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	19.999.500	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	300 Orang	11.168.100

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
			Kesatuan Republik Indonesia								Republik Indonesia		
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Palang	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	99.723.200	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	99.723.200	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	57,14%	78.616.675
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Palang	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	18 desa	99.723.200	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	18 desa	99.723.200	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	12 Laporan	78.616.675

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					PAGU APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025 (P-APBD)			
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Palang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	54.723.200	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	54.723.200	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	48.820.000
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Palang	Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	19 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	19 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	19 Laporan	15.363.375
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Kec. Palang	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	14.678.300

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil Musrenbang ditingkat Kecamatan kemudian ditingkat Kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palang akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palang Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Palang Tahun 2025:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Rencana Program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, yang menjadi pedoman penyusunan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rancangan Awal Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana di dalamnya telah termuat pokok-pokok Program dan Kegiatan berikut indikatornya yang menjadi tugas pokok Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Selain hal-hal prioritas, terdapat pula Program kegiatan rutin pelayanan administrasi. Adapun Rincian Perubahan Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,00 poin	5.111.487.945	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75.35 poin	4.150.485.993	961.001.952
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	29.999.950	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	21.620.950	8.379.000

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	29.999.950	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	21.620.950	8.379.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan	4.198.786.468	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	3.720.683.931	478.102.538
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	4.139.881.007	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	3.661.778.470	478.102.538

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	58.905.461	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23 Laporan	58.905.461	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	30 Laporan	30.340.750	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	2 Jenis	2.934.125	27.406.625
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	29 orang	14.999.750	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	1.958.125	13.041.625

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	29 Paket	15.431.000	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	976.000	14.455.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Daerah	7 Layanan	111.349.897	Jumlah Layanan Administrasi Umum Daerah	4 Jenis	70.806.633	40.543264
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Lsitrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	9.992.735	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	9.992.735	0

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	38.572.478	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.469.950	28.102.528
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 paket	7.000.000	3.000.000
7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.523.500	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	1 dokumen	3.132.000	391.500

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-Undangan yang Disediakan			
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	49.261.184	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	28.115.948	21.145.236
7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	12.096.000	12.096.000

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	0 unit	0	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	25 unit	109.599.850	109.599.850
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	78.016.850	78.016.850
7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang disediakan	0	0	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang disediakan	2 Unit	31.543.000	31.543.000

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 jenis	206.010.880	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	3 Jenis	197.813.330	8.197.550
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26.287.700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	28.287.700	2.000.000
7.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	3 laporan	6.333.000	3.667.000

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	169.723.180	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	165.197.630	4.525.550
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	14 unit	535.000.000	Jumlah Pemeliharaan BMD	2 Jenis	27.062.174	507.937.826

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	35.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	27.062.174	7.937.826
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	500.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0 unit	0	500.000.000

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	65.000.000	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	56.097.000	8.903.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	92,66 poin	65.000.000	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89,82 poin	56.097.000	8.903.000
7.01.02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1500 dokumen	65.000.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1500 dokumen	56.097.000	8.903.000

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	944.225.550	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	773.523.731	170.701.819
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah pokmas/Ormas Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	1 pokmas	106.361.550	Jumlah pokmas/Ormas Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	1 pokmas	90.088.050	16.273.500
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 unit	602.715.450	Jumlah unit Pembangunan Sarana	3 unit	602.715.450	0

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Prasarana Kelurahan			
7.01.03.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	110.620.000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	80.810.231	29.809.769
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	97%	25.000.000	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	19.788.790	5.211.210

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	12 kali	25.000.000	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	12 kali	19.788.790	5.211.210
7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	25.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	12 laporan	19.788.790	5.211.210

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Wilayah Kecamatan			
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	11.618.100	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100%	11.618.100	0

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	11.618.100	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	11.618.100	0
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	29 Orang	11.618.100	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	300 Orang	11.618.100	0

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan			

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	99.723.200	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	78.616.675	21.106.525
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	18 desa	54.723.200	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	12 laporan	48.820.000	5.903.200

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	54.723.200	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	48.820.000	5.903.200
7.01.06.2.01.004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan yang Difasilitasi dalam Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	19 Laporan	20.000.000	Jumlah Laporan yang Difasilitasi dalam Penerapan dan Penegakan Peraturan	19 Laporan	15.363.375	4.636.625

No. Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Sebleum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perundang-Undangan			
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	14.678.350	10.321.650

BAB IV
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah Kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan sebagai bahan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini, menjadi acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palang, dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025; dan
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam melaksanakan Program dan Pembangunan.

Plt. CAMAT PALANG
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Drs. EKO WARDONO, M.KP

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WIDANG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 41

BAB V
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Widang Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Widang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung

pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Widang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instransi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal;
24. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
25. Peraturan Gubenrnur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045;
28. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
2. Menjabarkan Rencana Strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dan;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Widang Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika dokumen Perubahan RKPD

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertangungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Widang sebagai berikut:

1. Menyelenggaran urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Menggkordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan;
9. Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
11. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
12. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
13. Pelaksanaan pelaporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam Formulir 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Renja Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun2025:

Tabel. 2.1 Formulir E.81
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
Periode Pelaksanaan Tahun 2024

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II							
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11 = 6+12		12 = (13/5) x 100%		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	100 (%)	505.025.063	-33.33(%)	259.829.244	20 (%)	67.580.660	0 (%)	8.440.000	0 (%)	13.660.500	0 (%)	22.100.500	0 (%)	281.929.744	0 %	55.82 %	Camat
1		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 (%)	505.025.063	62.5 (%)	259.829.244	100 (%)	67.680.660	0 (%)	8.440.000	0 (%)	13.660.500	0(%)	22.100.500	0 (%)	281.929.744	0 %	55.82 %	Camat
		1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti Musrenbang	0(%)	0	0(%)	0	90 (%)	67.580.660	100 (%)	8.440.000	100 (%)	13.660.500	100 (%)	22.100.500	100 (%)	22.100.500	0 %	0 %	Camat
		1. Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga	3 (Le	30.450.000	3 (Le	190.934.550	3 (Le	67.580.660	3 (Le	8.440.000	3 (Le	13.660.500	3 (Le	22.100.5	3 (Le	213.035.	100	699.62 %	Kasi Pemberda

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	mbaga)		mbaga)		mbaga)		mbaga)		mbaga)		mbaga)	00	mbaga)	050	%		yaan Masyarakat
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)						100										
				Predikat kinerja sub kegiatan						Sangat Tinggi										
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)						100										
				Predikat kinerja kegiatan						Sangat Tinggi										
				Rata-rata capaian kinerja program(%)						0										
				Predikat kinerja program						Sangat Rendah										
B	Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat		Indeks Kepuasan Masarakat (IKM)	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	91.15 (Poin)	4.268.114.213	0 (Poin)	606.574.589	0 (Poin)	630.721.536	0 (Poin)	1.237.296.125	0 (Poin)	1.427.923.753	0 %	0 %	Camat

1		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 (%)	61.108.033	100 (%)	35.314.108	100 (%)	15.498.180	100 (%)	5.280.000	100 (%)	1.864.000	100 (%)	7.144.000	100 (%)	44.898.108	100 %	73.47 %	Camat
		1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Non Perijin yang dikeluarkan	15 (Laporan)	61.108.033	3 (Laporan)	35.314.108	3 (Laporan)	15.498.180	3 (Laporan)	5.280.000	3 (Laporan)	1.864.000	3 (Laporan)	7.144.000	3 (Laporan)	44.898.108	20 %	73.47 %	Kasi Pelayanan Umum
		1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	15.498.180	3 (Dokumen)	5.280.000	3 (Dokumen)	1.864.000	3 (Dokumen)	7.144.000	3 (Dokumen)	9.584.000	0 %	0 %	Kasi Pelayanan Umum
									Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)	100									
									Predikat kinerja sub kegiatan	Sangat Tinggi									
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)	100									
									Predikat kinerja kegiatan	Sangat Ting									

										gi										
2		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 (%)	202.906.445	100 (%)	546.284.564	100 (%)	51.348.000	100 (%)	7.515.000	100 (%)	4.965.000	100 (%)	12.480.000	100 (%)	558.764.564	100 %	275.38 %	Camat
		1. Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 (%)	202.906.445	100 (%)	546.284.564	100 (%)	51.348.000	0 (%)	7.515.000	0(%)	4.965.000	0 (%)	12.480.000	0 (%)	558.764.564	0 %	275.38 %	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil inergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 (Laporan)	202.906.445	1 (Laporan)	546.284.564	1 (Laporan)	51.348.000	1 (Laporan)	7.515.000	1 (Laporan)	4.965.000	1 (Laporan)	12.480.000	1 (Laporan)	558.764.564	20 %	275.38 %	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
						Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				100										
						Predikat kinerja sub kegiatan				Sangat Tinggi										

						Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)			0											
						Predikat kinerja kegiatan			Sangat Rendah											
3		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konik sosial yang telah ditangani	100 (%)	81.770.000	100 (%)	86.528.850	97(%)	44.200.400	0(%)	6.153.000	0 (%)	1.600.000	0(%)	7.753.000	0 (%)	94.281.850	0 %	115.3 %	Camat
		1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan	Jumlah penyelenggaraan urusan	5 (Kegiatan)	81.677.000	1 (Kegiatan)	86.528.850	1 (Kegiatan)	44.200.400	1 (Kegiatan)	6.153.000	1 (Kegiatn)	1.600.000	1 (Kegiatan)	7.753.000	1 (Kegiatn)	94.281.850	20 %	115.43 %	Kasi Kesejahteraan Masyarakat
		PemerintahanUmum sesuai PenugasanKepalaDaerah	pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah																	
		1. Sub KegiatanPembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan	0 (Kegiatan)	0	0 (Kegiatan)	0	1 (Kegiatan)	44.200.400	0 (Kegiatan)	6.153.000	0 (Kegiatan)	1.600.000	0 (Kegiatan)	7.753.000	0 (Kegiatan)	7.753.000	0 %	0 %	Kasi Kesejahteraan Masyarakat

		UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945,Pelestarian BhinnekaTunggal Ika serta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	UndangUndangDasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945,PelestarianBhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)						0										
				Predikat kinerja sub kegiatan						Sangat Rendah										
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)						100										
				Predikat kinerja kegiatan						Sangat Tinggi										
4		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	615.372.000	100 (%)	250.250.779	100 (%)	77.638.500	0(%)	4.095.000	0 (%)	7.568.000	0(%)	11.663.000	0 (%)	273.723.779	0 %	44.48 %	Kasi Pemerintahan

		1. KegiatanFasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertibanumum	16 (Desa)	615.372.000	16 (Desa)	250.250.779	16 (Desa)	77.638.500	16 (Desa)	4.095.000	16 (Desa)	7.568.000	16 (Desa)	11.663.000	16 (Desa)	273.723.779	100 %	44.48 %	Kasi Pemerintahan
		1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	20 (Dokumen)	220.750.000	4 (Dokumen)	72.640.350	4 (Dokumen)	77.638.500	4 (Dokumen)	4.095.000	4 (Dokumen)	7.568.00	4 (Dokumen)	11.663.000	4 (Dokumen)	96.113.350	20 %	43.54 %	Kasi Pemerintahan
			Pendayagunaan Aset Desa																
		2. Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	0 %	0 %	Kasi Pemerintahan
					Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)					100										
					Predikat kinerja sub kegiatan					Sang										

									at Tinggi										
						Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)			100										
						Predikat kinerja kegiatan			Sangat Tinggi										
5		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	0 (%)	0	0 (%)	0	81.5%	4.079.429.133	0 (%)	583.531.589	0 (%)	614.724.536	0 (%)	1.198.256.125	0 (%)	1.374.633.753	0 %	0 %	Sekretaris Camat
		1. KegiatanPerencanaan, Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi	9 (Dokumen)	183.157.900	9 (Dokumen)	95.624.647	9 (Dokumen)	38.930.000	1 (Dokumen)	7.690.000	1 (Dokumen)	2.240.000	1 (Dokumen)	9.930.000	1 (Dokumen)	113.840.147	11.11 %	62.15 %	Sekretaris Camat
		1. PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 (Dokumen)	69.958.000	2 (Dokumen)	48.319.647	2 (Dokumen)	35.730.000	0 (Dokumen)	7.690.000	1 (Dokumen)	2.240.000	1 (Dokumen)	9.930.000	1 (Dokumen)	64.169.647	50 %	91.73 %	Kasubbag Prolap
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitsar realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPe	4 (Dokumen)	72.499.900	4 (Dokumen)	3.200.000	4 (Dokumen)	3.200.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	5.565.500	25 %	7.68 %	Kasubbag Prolap

		SKPD	nyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				37.5										
						Predikat kinerja sub kegiatan				Sangat Rendah										
		2. KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	9 (Dokumen)	11.203.942.477	9 (Dokumen)	6.065.114.304	9 (Dokumen)	3.144.686.073	1 (Dokumen)	526.277.475	1 (Dokumen)	561.654.445	1 (Dokumen)	1.087.931.920	1 (Dokumen)	7.315.770.894	11.11 %	65.3 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 (Orang)	11.068.034.615	25 (Orang)	6.065.114.304	25 (Orang)	3.145.586.073	25 (Orang)	519.002.475	15 (Orang)	561.654.445	15 (Orang)	1.080.656.920	15 (Orang)	7.301.220.894	12 %	65.97 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Yang Tersusun	9 (Dokumen)	11.203.942.477	9 (Dokumen)	6.065.114.304	0 (Dokumen)	29.100.000	0 (Dokumen)	7.275.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	7.275.000	0 (Dokumen)	6.079.664.304	0%	54.26 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

						Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)			30									
						Predikat kinerja sub kegiatan			Sangat Rendah									
		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	3 (Jenis)	86.710.000	3 (Jenis)	26.235.000	3 (Jenis)	12.464.950	3 (Jenis)	0	3 (Jenis)	0	3 (Jenis)	0	3 (Jenis)	26.235.000	100 %	30.26 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Sosialosasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah sosialisasi yang terlaksana	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	25 (Orang)	1.355.950	0 (Orang)	0	0(Orang)	0	0(Orang)	0	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	11.109.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	
						Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)			0									
						Predikat kinerja sub kegiatan			Sangat Rendah									
		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Kantor	7 (Layanan)	235.515.400	7 (Layanan)	166.994.563	7 (Layanan)	69.551.570	7 (Layanan)	16.629.542	7 (Layanan)	12.883.926	7 (Layanan)	29.513.468	7 (Layanan)	200.243.721	100 %	85.02 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyedian peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket peralatan	11 (Unit)	41.000.00	11 (Unit)	21.162.800	11 (Unit)	19.997.08	11 (Unit)	4.213.000	11 (Unit)	4.646.000	11 (Unit)	8.859.00	11 (Unit)	30.021.80	100 %	73.22 %	Kasubbag Umum

		Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0				1						0		0			dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga	0(Paket)	0	0(Paket)	0	0(Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0(Paket)	0	0 (Paket)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 (Paket)	109.574.500	25 (Paket)	59.752.350	25 (Paket)	20.324.934	25 (Paket)	5.079.737	25 (Paket)	4.793.926	25 (Paket)	9.873.663	25 (Paket)	72.553.703	100 %	66.21 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	2 (Jenis)	12.500.000	2 (Jenis)	5.554.000	2 (Jenis)	918.250	2 (Jenis)	0	2 (Jenis)	0	2 (Jenis)	0	2 (Jenis)	5.554.000	100 %	44.43 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 (Jenis)	17.492.000	2 (Jenis)	7.790.000	2 (Jenis)	1.618.500	2 (Jenis)	404.000	2 (Jenis)	404.000	2 (Jenis)	808.000	2 (Jenis)	9.406.000	100 %	53.77 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	24 (Laporan)	26.850.000	24 (Laporan)	62.739.463	24 (Laporan)	26.692.805	24 (Laporan)	6.932.805	24 (Laporan)	3.040.000	24 (Laporan)	9.972.805	24 (Laporan)	72.712.268	100 %	270.81 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				100										
						Predikat kinerja sub kegiatan				Sangat										

									Tinggi										
		5. Kegiatan Pengadaan Barang	Jumlah Barang Milik Daerah	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	2 (Jenis)	145.377.948	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	0 %	0 %	Kasubbag Umum

		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	7 (Unit)	88.990.962	2 (Unit)	135.676.000	2 (Unit)	145.377.948	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	135.676.000	0 %	152.46 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				0									
						Predikat kinerja sub kegiatan				Sangat Rendah									
		6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 (Jasa)	578.207.836	4 (Jasa)	487.001.020	4 (Jasa)	156.421.907	4 (Jasa)	31.934.572	4 (Jasa)	36.881.165	4 (Jasa)	68.815.737	4 (Jasa)	557.448.525	100 %	96.41 %	Sekretaris Camat
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	30.419.900	3 (Laporan)	5.704.568	3 (Laporan)	5.325.422	3 (Laporan)	11.029.990	3 (Laporan)	12.661.758	0 %	0 %	Kasubbag Umum
		2. Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	1 (Lap	45.000.000	1 (Lapor	22.486.400	1 (Lapor	6.399.900	1 (Laporan)	2.074.000	1 (Laporan)	1.125.000	1 (Laporan	3.199.000	1 (Laporan	25.685.400	100 %	57.08 %	Kasubbag Umum

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	or a n)		an)		an)						)		)				dan Kepegawaian
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 (J as a)	414.207.836	4 (Ja sa)	400.140.952	4 (Ja sa)	119.602.107	4 (Jasa)	24.156.004	4 (Jasa)	30.430.743	4 (Jas a)	54.586.747	4 (Jas a)	454.727.699	100 %	109.78 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
							Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		100											
							Predikat kinerja sub kegiatan		Sangat Tinggi											
		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 (U nit)	0	0(U nit)	0	12 (Un it)	511.996.685	0(Unit)	1.000.000	0(Unit)	1.065.000	0 (Unit)	2.065.000	0 (Unit)	2.065.000	0 %	0 %	Sekretaris Camat
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 5 (U nit)	37.500.000	22 (Un it)	34.372.000	11 (Un it)	11.996.685	0 (Unit)	1.000.000	0(Unit)	1.065.000	0 (Unit)	2.065.000	0 (Unit)	36.437.000	0 %	97.17 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	500.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0%	0%	Camat
						Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)				0										
						Predikat Kinerja sub kegiatan				Sangat Rendah										
						Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				46.03										
						Predikat kinerja kegiatan				Sangat Rendah										
						Rata-rata capaian kinerja program (%)				40										
						Predikat kinerja program				Sangat Rendah										

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kantor Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

- Sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 27 sub kegiatan, Persentase capaian kinerja sudah cukup baik ditunjukkan dengan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap realisasi yang masih rendah kinerja maupun anggarannya.
- Semua sub kegiatan yang telah direncanakan, akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan pada Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja layanan yang telah dilaksanakan.

Berikut Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Widang:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tuban

Kecamatan: Widang

No	indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai AKIP Kecamatan Widang	-	-	80.50 Poin	81.00 Poin	81.00 Poin	82.00 Poin	73,01 Poin	73,55 Poin	73,01 Poin	73,55 Poin	
2.	Tingkat Kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya	-	-	90%	20%	20%	20%	-40%	-0,33%	-40%	-0,33%	
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	91.01 Poin	91.11 Poin	91.15 Poin	91.25 Poin	88,2 Poin	89,96 Poin	88,2 Poin	89,96 Poin	
4.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	-	-	3,60 Angka	3,56 Angka	4,03 Angka	4,11 Angka	4,00 Angka	4,54 Angka	4,00 Angka	4,54 Angka	

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Widang adalah sebagai berikut :

1. Pada capaian poin 1 (satu) nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Widang mendapatkan nilai 73,55 Poin;
2. Pada capaian kinerja poin 2 (dua) menurunnya tingkat kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya dengan capaian -0,33%;
3. Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Nilai 89,96 (A) kategori sangat baik, hal ini di pengaruhi oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik;
4. Tercapainya Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dengan nilai dengan Nilai 4,54 Angka, dikarenakan Unit Penyelenggara Layanan yang mendapat nilai A (Pelayanan Prima) merupakan Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dapat konsisten, untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapain Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yang ditetapkan pada Tahun 2014. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Widang, namun secara umum,

pelayanan di Kecamatan Widang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Kabupaten;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan.

Analisis Kinerja Pelayanan di pengaruhi oleh faktor keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun;
3. Pelaksanaan inovasi "*LANSIA CERIA*" yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat terutama yang usia lanjut dan disabilitas agar nyaman dalam menerima pelayanan;
4. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut;
5. Penyelenggaraan pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Widang Tahun 2025 cukup baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Pelayanan Kecamatan Widang yang mendapat nilai Sangat Baik (A/88,95) dari target (A/90,57) yang telah ditentukan di Tahun 2025. Namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian dikarenakan kebutuhan pegawai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang sehingga pencapaian masih kurang maksimal.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Dan upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas yaitu Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang standar.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Widang, menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik Kecamatan yang lebih baik;
3. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja, judi, dan lain-lain) yang belum optimal;
4. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan.

Adapun dampak atas permasalahan dan hambatan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah di tingkat kantor Kecamatan akan sangat terasa, karena kecamatan merupakan garda terdepan pemerintahan daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan :

1. Terhambatnya pelayanan publik pada masyarakat yang mengakibatnya menurunnya kepercayaan kepada Pemerintah Daerah;
2. Program-program prioritas Kepala Daerah tidak berjalan secara maksimal;
3. Kegiatan pembinaan UMKM, pertanian, koperasi, dan Desa tidak berjalan optimal;
4. Pelayanan menjadi terhambat dan kurang cepat dikarenakan Belum optimalnya SDM yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Widang Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan dan 29 Sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dan hasil penyelarasan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Adapun review Perubahan rencana kerja terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. (T-C 31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN TUBAN

Kecamatan: Widang

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kec. Widang	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,50 Poin	4.079.429.133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,50 Poin	4.079.429.133	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah			jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	38.930.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	38.930.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.730.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.730.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitsar realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	3.200.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.200.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	9 Dokumen	3.144.686.073	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	3.144.686.073	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan		umlah Orang yang Menerima	20 Orang/bulan	3.115.586.073		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	umlah Orang yang Menerima	20 Orang/b	3.115.586.073	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		ASN		Gaji dan Tunjangan ASN				ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	ulan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	29.100.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	29.100.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	3 Jenis	12.464.950	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	3 Jenis	12.464.950	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		umlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	11.109.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	11.109.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	25 Orang	1.355.950				25 Orang	1.355.950	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 Jenis Layanan	69.551.570	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 Jenis Layanan	69.551.570	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.997.081		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	19.997.081	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.324.934		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.324.934	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	918.250		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	918.250	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	23 Dokumen	1.618.500		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang Undangan yang Disediakan	23 Dokumen	1.618.500	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	26.692.805		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	26.692.805	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Jenis Pengadaan BMD	2 Jenis	145.377.948	Pengadaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan BMD	2 Jenis	145.377.948	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	134 Unit	145.377.948		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	134 Unit	145.377.948	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jasa	156.421.907	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jasa	156.421.907	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya			12 Laporan	30.419.900		Penyediaan Jasa Komunikasi,		12 Laporan	30.419.900	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Air dan Listrik						Sumber Daya Air dan Listrik				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Laporan	6.399.900		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Laporan	6.399.900	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4 Laporan	119.602.107		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4 Laporan	119.602.107	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	12 Unit	511.996.685	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan BMD (Unit)	12 Unit	511.996.685	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11.996.685		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11.996.685	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	500.000.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	500.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGA		Kec. Wida	Persentase Penyelesaian atas	100 %	15.498.180	PROGRAM PENYELENGGA		Persentase Penyelesaian atas	100 %	15.498.180	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		ng	pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)			RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	15.498.180	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	15.498.180	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	15.498.180		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	15.498.180	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Widang	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat (%)	100 %	67.580.660	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100 %	67.580.660	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	67.580.660	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan BUMDes / Kelembagaan Desa dan pendampingan Musrenbang Desa	16 Laporan	67.580.660	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga	67.580.660		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lembaga	67.580.660	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec. Widang	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	51.348.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	51.348.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	51.348.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		umlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	51.348.000	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instans Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	51.348.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	51.348.000	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Widang	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	97%	44.200.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			97%	44.200.400	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	44.200.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	44.200.400	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125 Orang	44.200.400		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125 Orang	44.200.400	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	100 %	77.638.500	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rata-rata komponen rapor desa yang meningkat nilainya	100 %	77.638.500	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Desa	77.638.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16 Desa	77.638.500	
		Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	77.638.500		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	77.638.500	
Jumlah						**4.335.694.873**					**4.335.694.873**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil Musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Widangakan diakomodir dalam Rancangan Perubahan Rencana KerjaKecamatan Widang Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatanyang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagaipemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada tabel 2.5:

Tabel 2.5 T-C 32
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2025 Kabupaten Tuban

Kecamatan: Widang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi (Desa/ Kelurahan)	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Rencana Program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, yang menjadi pedoman penyusunan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rancanagan Awal Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 202-2029, dimana di dalamnya telah termuat pokok-pokok Program dan Kegiatan berikut indikatornya yang menjadi tugas pokok Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dan sasaran Kecamatan Widang Tahun 2025 dirumuskan untuk memberikan arah pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Tuban, serta menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan mencerminkan arah pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi terukur yang diharapkan terwujud sebagai penjabaran dari tujuan.

Berikut tabel tujuan dan sasaran Kecamatan Widang Tahun 2025:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Widang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	*2*	*3*	*4*
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	31,25
	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	25,00
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,03
	Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,03
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,46

Dalam upaya untuk mencapai target Tujuan Sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.1

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	4.079.429.133	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74,65 Poin	4.032.846.145	(-590.512.109)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9 Dokumen	38.930.000	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen	25.280.000	(-13.650.000)
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.730.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.080.000	(-13.650.000,)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	4 Laporan	3.200.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.200.000	(0)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	3.144.686.073	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	2.789.963.344	157.361.410
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang /bulan	3.115.586.073	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.760.863.344	157.361.410
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	29.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	29.100.000	(0)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	3 Jenis	12.464.950	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (orang)	2 Jenis	2.331.950	(-10.133.000)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21 paket	11.109.000	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	976.000	(-10.133.000)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	1.355.950	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	1.355.950	(0)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7 Jenis Layanan	69.551.570	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	4 Jenis Layanan	64.287.461	(-5.264.109)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.997.081	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.997.081	(0)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.324.934	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.324.934	(0)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	23 Dokumen	1.618.500	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang	2 Dokumen	1.618.500	(0)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
					Disediakan			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	918.250	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	918.250	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	26.692.805	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	21.428.696	(-5.264.109)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	134 Unit	145.377.948	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	2 jenis	237.044.798	91.666.850
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	134 Unit	145.377.948	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	155 Unit	237.044.798	78.016.850
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	156.421.907	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Jasa	151.941.907	(-4.480.000)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	1 Laporan	30.419.900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	30.419.900	(0)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	119.602.107	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Jenis	115.122.107	(-4.480.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD (Unit)	12 Unit	511.996.685	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	3 jenis	761.996.685	250.000.000
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11.996.685	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11.996.685	(0)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	500,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	750.000.000	250.000.000,

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%	100 %	15.498.180	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%	100%	12.988.178	(-3.154.359)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	3 Dokumen	15,783,250	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	92,08 Poin	12.988.178	(-2.510.001)
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 Dokumen	15,783,250	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	1300 Dokumen	12.988.178	(-2.510.001)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100 %	67.580.660	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)	100 %	48.567.604	(-61.380.660)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90%	67.580.660	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	16 Laporan	48.567.604	(-19.013.056)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga	67.580.660	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lembaga	48.567.604	(-19.013.056)
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	77.638.500	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	57,14 %	46.878.474	(-52.263.500)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Desa	77.638.500	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Dokumen	46.878.474	(-30.760.025)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah rapat koordinasi, sosialisi dan peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	77.638.500	Jumlah rapat koordinasi, sosialisi dan peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	46.878.474	(-30.760.025)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	51.348.000	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	29.207.950	(-10.360.903)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	51.348.000	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	29.207.950	(-22.140.049)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 Laporan	51.348.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	12 Laporan	29.207.950	(-22.140.049)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
		Kecamatan			Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	97 %	44.200.400	Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %	9.199.359	(-31.511.961)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	6 Laporan	44.200.400	Jumlah Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	6 Laporan	9.199.359	(-35.001.040)
7.01.05.2.01.0002	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	125 Orang	44.200.400	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	9.199.359	(-35.001.040)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran
1	2	3	5	6	7	8	9	
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Total				4.335.694.873			4.179.687.713	356.076.979

BAB IV
PENUTUP

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun 2025. Sebagai uraian akhir, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKAP Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan sebagai bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tuban, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, harus menjadikan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Widang Kabupaten Tuban tahun 2025;
3. Perubahan Rencana Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025; dan
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja tersebut dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Sebagai penutup, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini diharapkan dapat menjadi acuan yang lebih relevan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan yang terus berkembang, perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta efektivitas setiap perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi mereka.

Komitmen bersama untuk melaksanakan perubahan ini akan memastikan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan.

CAMAT WIDANG
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

SUWARSONO, S.STP

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Komitmen bersama untuk melaksanakan perubahan ini akan memastikan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan.

CAMAT WIDANG
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

SUWARSONO, S.STP

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GRABAGAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (impact).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2025 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b. bab II berisi evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.
d. Bab IV berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah Daerah, Perubahan dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya Renstra Perubahan Kecamatan Grabagan Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dengan tema Pembangunan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan

maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rangkuman dari Perubahan Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun berkenaan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Grabagan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil Triwulan II Tahun berkenaan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Kecamatan Grabagan.

1.3.1 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;

2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dan;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabagan Tahun 2025 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Grabagan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kewilayahan, pada tahun 2024 Kecamatan Grabagan melaksanakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang diturunkan dari Misi 2 dan Misi 4 Pemerintah Kabupaten Tuban.

Adapun Analisis kinerja Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dalam Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban pada Triwulan II Tahun 2025 berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Tabel. 2.1 Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban

Periode Pelaksanaan 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.08 (Poin)	953.013.174	89.82 (Poin)	2.816.449.398	91.98 (Poin)	3.932.984.506	0 (Poin)	586,797,298	0 (Poin)	987.015.942	0 (Poin)	1.044.606.692	0 (Poin)	4.457.648.058	0 %	467.74 %	Camat Grabagan
1		Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Prosentase penyelesaian atas pemohon pelayanan publik kecamatan	100 (%)	50.043.943	100 (%)	3.360.000	100 (%)	8.780.000	100 (%)	0	100 (%)	2.195.000	100 (%)	0	100 (%)	3.840.000	0 %	0 %	Camat Grabagan
		1. kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Prosentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	100 (%)	50.043.943	100 (%)	3.360.000	100 (%)	8.780.000	100 (%)	0	100 (%)	2.195.000	100 (%)	2.195.000	100 (%)	60.736.000	100 %	121.37 %	Kasi Pelayanan Publik

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kepada Camat																		
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	45 (Dokumen)	50.043.943	9 (Dokumen)	3.360.000	100 (Dokumen)	8.780.000	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	2,195.000	1 (Dokumen)	2.195.000	20 (Dokumen)	60.736.000	44,44 %	121,37 %	kasi pelayanan umum
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		11,11								
										Predikat kinerja sub kegiatan		Sangat Rendah								
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)		100								
										Predikat kinerja kegiatan		Sangat Tinggi								
2		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Trantibum yang	100 (%)	284.403.349	100 (%)	44.260.000	100 (%)	50.478.750	0 (%)	0	100 (%)	16.405.594	100 (%)	10.880.000	100 (%)	158.731.400	100 %	55.81 %	Camat Grabagan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Ditindaklanjuti																	
		1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah intensitas koordinasi forkopimka dan instansi vertikal tindaklanjut penyelesaian terhadap masalah trantibum dan pengaudan masyarakat	100 (Kali)	284.403.349	97 (Kali)	44.260.000	100 (%)	50.478.750	0 (Kali)	0	10 (Kali)	16.405.594	10 (Kali)	10.880.000	40 (%)	25.090.000	0 %	0 %	Kasi Trantib
		1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55 (Laporan)	284.403.349	12 (Laporan)	44.260.000	11 (Laporan)	50.478.750	0 (Laporan)	0	2 (Laporan)	13.410.000	2 (Laporan)	13.410.000	1 (Laporan)	158.731.400	1.82 %	55.81 %	Kasi Trantib

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										
										Predikat kinerja sub kegiatan										
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										
										Predikat kinerja kegiatan										
										18,18										
										Sangat										
										Rendah										
										10,31										
										Sangat Rendah										
3		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi kon~ik sosial yang telah ditangani	100 (%)	104.627.127	100 (%)	197.627.400	100 (%)	46,407,090	0 (%)	0	0 (%)	11.601.771	0 (%)	0	100 (%)	0	0 %	0 %	Camat Grabagan
		1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Organisasi Keagamaan dan Elemen Masyarakatr yang Mendapatkan Pembinaan	94 (Organisasi)	115.752.503	94 (Organisasi)	197.627.400	100 (%))	46,407,090	0 (Organisasi)	0	31 (Organisasi)	11.601.771	0 (%)	0	0%	0	0%	0 %	Kasi Kesra

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penugasan Kepala Daerah	Kehidupan Rukun dan Bermasyarakat																	
		1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 (Orang)	115.752.503	200 (Orang)	197.627.400	200 (Orang)	46,407,090	0 (Orang)	0	2 (Orang)	11.601.771	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 %	0 %	Kasi Kesra
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										1										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										32,98										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi [2025]		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi [2025]		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025]		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 (%)	102.785.194	100 (%)	60.000.000	11 Desa	40,945,000	0 (%)	2.550.000	0 (%)	10.236.246	1 (Desa)	9.938.000	1 (Desa)	229.157.000	1 %	222.95 %	Kasi Pemerintahan
		1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa sasaran pendampingan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, aset desa vasilitasi penyuluhan dan penegakan peraturan perundang undangan pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi dan peringatan hari	11 (Desa)	513.938.755	11 (Desa)	60.000.000	100 %	40,945,000	0 (Desa)	6,738,000	3 (Desa)	10.236.246	3 (%)	9.938.000	3 (%)	229.157.000	27.27 %	44.59 %	Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			besar nasional																	
		1. Sub.kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	55 (Dokumen)	513.938.755	11 (Dokumen)	29.921.000	6 (Dokumen)	17,895,000	1 (Dokumen)	5,680,000	3 (Dokumen)	4.473.750	3 (Dokumen)	8.880.000	3 (Dokumen)	72.475.000	5.45 %	14.1 %	Kasi Pemerintahan
		2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka	30 (Laporan)	93.388.412	6 (Laporan)	9.020.000	6 (Laporan)	11.075.960	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	2.768.748	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	59.340.000	6.67 %	63.54 %	Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perundang-Undangan	Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																	
		3. Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30 (Dokumen)	240.402.030	6 (Dokumen)	17.057.000	6 (Dokumen)	11,975,000	1 (Dokumen)	1,058,000	0 (Dokumen)	2.993.748	2 (Dokumen)	1.058.000	2 (Dokumen)	97.339.000	6.67 %	40.49 %	Kasi Kesra
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										15,15										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										45,45										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		I4 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)	82 (Poin)	11.797.044.525	73.05 (Poin)	2.510.793.998	81 (Poin)	2.743.010.131	0 (Poin)	539.829.220	0 (Poin)	946.577.331	0 (Poin)	1.021.258.692	0 (Poin)	6.049.431.323	0 %	51.28 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang tersusun	45 (Dokumen)	65.682.203	9 (Dokumen)	60.079.000	9 (Dokumen)	47.483.792	1 (Dokumen)	4.430.000	0 (Dokumen)	11.870.948	3 (Dokumen)	7.202.000	3 (Dokumen)	67.281.000	6.67 %	102.43 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 (Dokumen)	65.682.203	3 (Dokumen)	29.524.000	3 (Dokumen)	42.007.792	1 (Dokumen)	4.430.000	0 (Dokumen)	10.501.948	1 (Dokumen)	7.202.000	1 (Dokumen)	36.726.000	6.67 %	55.91 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	30 (Laporan)	20.501.843	6 (Laporan)	4.000.000	6 (Laporan)	5.476.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	1.369.000	2 (Laporan)	0	2 (Laporan)	18.902.000	6.67 %	92.2 %	Kasubbag Program dan Pelaporan
			Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)							0										
			Predikat kinerja sub kegiatan							Sangat Rendah										
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan dan pemeriksaan yang tersusun	54 (Laporan)	10.429.730.998	9 (Laporan)	2.147.995.480	9 (Dokumen	2.880.708.506	2 (Dokumen	519.871.640	0 (Laporan)	720.177.126	0 (Laporan)	1.183.887.354	2 (Dokumen))	6.969.051.062	3.7 %	66.8 2 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 (Orang)	10.103.327.997	15 (Orang)	2.120.770.480	16 (Orang)	2.847.953.506	16 (Orang)	518.363.440	15 (Orang)	711.988.376	15 (Orang)	1.183.887.354	15 (Orang)	4.913.830.117	100 %	68.0 6 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 (Laporan)	326.403.004	10 (Laporan)	27.225.000	1 (Laporan)	32.755.000	0 (Laporan)	1.508.200	0 (Laporan)	8.188.750	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	48.078.500	0 %	0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)		50								
										Predikat kinerja sub kegiatan		Sangat Rendah								
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Pengadaan administrasi umum	11 (Layanan)	398.003.834	11 (Layanan)	107.739.500	11 (Layanan)	114.648.640	0 (Layanan)	17.453.000	0 (Layanan)	32.378.201	0 (Layanan)	33.280.500	0 (Layanan)	233.428.594	54.55 %	90.27 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 (Paket)	10.946.197	3 (Paket)	2.101.000	3 (Paket)	2.138.950	0 (Paket)	0	0 (Paket)	530.117	0 (Paket)	0	0 (Paket)	4.361.000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegaw

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	yang Disediakan																	aian
		2. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 (Paket)	60.180.740	12 (Paket)	9.691.000	12 (Paket)	12.224.340	3 (Paket)	2.523.000	3 (Paket)	6.152.250	3 (Paket)	4.020.500	3 (Paket)	28.003.800	8.33 %	88.89 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		3. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 (Paket)	265.983.811	3 (Paket)	38.339.500	3 (Paket)	39.264.450	1 (Paket)	4.266.000	1 (Paket)	9.815.442	1 (Paket)	6.236.000	1 (Paket)	112.074.390	66.67 %	61.65 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		4. Sub. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 (Paket)	23.142.383	2 (Paket)	1.875.000	2 (Paket)	4.964.300	0 (Paket)	0	0 (Paket)	1.866.312	0 (Paket)	1.400.000	0 (Paket)	11.003.000	50 %	69.25 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		penggandaan																		
		5. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 (Laporan)	29.618.237	33 (Laporan)	55.733.000	33 (Laporan)	56.056.600	8 (Laporan)	10.664.000	8 (Laporan)	14.014.080	8 (Laporan)	21.624.000	8 (Laporan)	74.746.404	1.82 %	384.75 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										
										Predikat kinerja sub kegiatan										
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD yang diadakan	5 (Unit)	40.000.000	5 (Unit)	64.650.000	5 (Unit)	31.173.400	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	23.665.000	20 %	223.54 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dacrah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 (Unit)	2.000.000	1 (Unit)	4.000.000	1 (Unit)	4.090.100	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	100 %	255 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 (Unit)	8.000.000	6 (Unit)	60.650.000	1 (Unit)	27.083.300	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	23.665.000	0 %	295.81 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)							100%										
			Predikat kinerja sub kegiatan							Sangat Baik										
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (jasa)	10 (Jasa)	670.973.531	10 (Jasa)	118.933.718	10 (Jasa)	143.638.150	0 (Jasa)	27.370.367	0 (Jasa)	34.988.910	0 (Jasa)	53.924.319	0 (Jasa)	297.102.032	70 %	64.22 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub. Kegiatan Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	5 (Lapor	19.276.953	1 (Laporan)	1.440.000	1 (Lapor	2.400.000	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	2.599.998	0 (Laporan)	0	0 (Lapor	7.680.000	0 %	39.84 %	Kasubbag Umum dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Dnerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jasa Surat Menyurat	Menyurat	an)				an)								an)				Kepegawaian
		2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 (Laporan)	153.633.304	3 (Laporan)	27.928.651	3 (Laporan)	25.819.750	0 (Laporan)	4.979.273	0 (Laporan)	9.009.312	0 (Laporan)	9.080.001	0 (Laporan)	47.744.818	0 %	31.08 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 (Laporan)	498.063.274	1 (Laporan)	89.565.067	1 (Laporan)	115.418.400	0 (Laporan)	22.391.094	0 (Laporan)	23.379.600	0 (Laporan)	44.844.318	0 (Laporan)	241.677.214	0 %	48.52 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)							0										
			Predikat kinerja sub kegiatan							Sangat Rendah										
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD (unit)	35 (Unit)	155.010.402	35 (Unit)	56.727.300	35 (Unit)	574.015.470	2 (Unit)	6.887.000	8 (Unit)	144.252.646	8 (Unit)	7.336.100	8 (Unit)	50.944.380	22.86 %	32.87 %	Kasubag Umum dan Kepegaw

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		aian
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 (Unit)	11.923.810	14 (Unit)	30.986.300	14 (Unit)	43.118.073	0 (Unit)	2.387.000	3 (Unit)	10.779.516	3 (Unit)	4.530.100	3 (Unit)	38.509.900	21.43 %	322.97 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dilakukan pemeliharaan	10 (Unit)	18.498.347	10 (Unit)	7.598.800	10 (Unit)	2.894.400	10 (Unit)	2.995.143	0 (Unit)	1.497.571	2 (Unit)	145,800	2 (Unit)	7.597.800	20 %	41.07 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		3. Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan mesin yang dilakukan	6 (Unit)	8.102.343	6 (Unit)	5.595.200	6 (Unit)	14.695.100	1 (Unit)	4.500.000	1 (Unit)	3.673.773	1 (Unit)	2.660.200	1 (Unit)	8.517.700	16.67 %	105.13	Kasubag Umum dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = [13/5] x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan																%	Kepegawaian
		4. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 (Unit)	9.171.613	5 (Unit)	20.000.000	5 (Unit)	513.207.154	0 (Unit)	0	1 (Unit)	0	1 (Unit)	0	1 (Unit)	3.627.000	20 %	39.55 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										19,52										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										3,81										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja program(%)										40										
Predikat kinerja program										Sangat Rendah										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
B	Meningkatnya Ketahanan ekonomi masyarakat desa		Tingkat Kenaikan desa yang meingkat indeks ketahanan ekonominnya	33 (%)	101.002.500	- 66.67 (%)	67.059.650	0.4 (%)	65.845.600	0 (%)	7.998.000	0 (%)	16.461.400	0 (%)	5.461.000	0 (%)	215.326.250	0 %	213.19 %	Camat Grabagan
1		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 (%)	101.002.500	18.18 (%)	67.059.650	40 (%)	65.845.600	0 (%)	7.998.000	0 (%)	16.461.400	0 (%)	5.461.000	0 (%)	215.326.250	0 %	213.19 %	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan	11 (Desa)	101.002.500	11 (Desa)	67.059.650	11 (Desa)	65.845.600	0 (Desa)	7.998.000	0 (Desa)	16.461.400	0 (Desa)	5.461.000	0 (Desa)	215.326.250	0 %	213.19 %	Kasi Pemberdayaan
			pembinaan BUMDes/ kelembagaan desa																	Masyarakat Desa
		1. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	11 (Laporan)	101.002.500	11 (Laporan)	67.059.650	11 (Laporan)	65.845.600	0 (Laporan)	7.998.000	0 (Laporan)	16.461.400	0 (Laporan)	5.461.000	0 (Laporan)	215.326.250	0 %	213.19 %	Kasi Pemberdayaan Masyara

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = [13/5] x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	kat Desa
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja program(%)										0										
Predikat kinerja program										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)										0										
Predikat kinerja sasaran										Sangat Rendah										
Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)										0										
Predikat kinerja Sasaran										Sangat Rendah										
Total Rata-rata capaian kinerja Program (%)										33,33										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025]		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dtahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = (13/5) x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah										
Total Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)										19,24										
Predikat kinerja Kegiatan										Sangat Rendah										
Total Rata-rata capaian kinerja Sub kegiatan (%)										13,46										
Predikat kinerja Sub kegiatan										Sangat Rendah										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
kesolitantim dalam menjalankan pekerjaan

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
kurangnya koordinasi antara kecamatan dan desa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan pada Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja layanan yang telah dilaksanakan.

Berikut Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Grabagan :

Tabel 2.2 (T-C 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Grabagan
Kabupaten Tuban

No	Indicator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(12)	(13)
1.	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	-	-	n/a	9,09%	27,27	45,45	n/a	9,09%	27,27	45,45	
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Prerangkat Daerah	-	-	2,28%	3,85%	3,96	4,07	2,80	3,97	3,96	4,07	
3.	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	88,20 Poin	89,39 Poin	89,82 Poin	90,37 Poin	89,43 Poin	89,82 Poin	89,82	90,37	
4.	Nilai AKIP Kecamatan Grabagan	-	-	A ((81,00)	A (81,50)	A (82.00)	BB (75,45)	BB (72,10)	BB (73,05)	A (81,50)	BB (75,45)	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Grabagan adalah sebagai berikut :

1. Pada capaian kinerja poin 1 (satu) meningkatnya tingkat kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya dengan capaian -66.67%;
2. Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Nilai Baik (A/(90,37) Poin) kategori baik, hal ini di pengaruhi oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Pada capain nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Grabagan masih mendapat nilai BB (72,10 Poin)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Grabagan memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta mendukung keberhasilan program nasional yang relevan. Upaya peningkatan penyediaan layanan umum yang berkualitas menjadi kunci untuk mewujudkan misi peningkatan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ketika kualitas layanan meningkat, maka tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah juga ikut naik, yang pada akhirnya memperkuat posisi daerah dalam mencapai target pelayanan dasar sesuai arah pembangunan nasional.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Grabagan Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan dan 29 Sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dan hasil penyelarasan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Adapun review Perubahan rencana kerja terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4.

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PRKPD TAHUN 2025

KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN TUBAN

Kecamatan Grabagan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Grabagan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 Poin	3.786.373.666,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Grabagan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74,25 poin	3.722.130.133,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	47.483.792,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	45.994.792,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	42.007.792,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	42.007.792,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.476.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.987.000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	2..880.708.506,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec, Grabagan	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	9 Jenis	2.528.159.783,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Grabagan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	2.847.953.506,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Grabagan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	2.847.953.506,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir tahun SKPD	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	32.755.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir tahun SKPD	Kec, Grabagan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23 Laporan	32.755.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Dacrah	Kec, Grabagan	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	11 Layanan	129.513.048,00	Administrasi Umum Perangkat Dacrah	Kec, Grabagan	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Jenis	90.891.388,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Grabagan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	2.120.710,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Grabagan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	2,120,710,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Grabagan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.609.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Grabagan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24,609,000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Grabagan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	39.261.768,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Grabagan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30,186,768,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Grabagan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.465.250,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Grabagan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,946,750,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	56.056.320,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	28.028.160,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Grabagan	jumlah BMD yang diadakan	5 unit	3.059.200,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	Kec. Grabagan	jumlah BMD yang diadakan	2 Jenis	81.076.050,00	
	Pengadaan Mebel	Kec. Grabagan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	3.059.200,00	Pengadaan Mebel	Kec. Grabagan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	3,059,200,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Grabagan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Grabagan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	78,016,850,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	10 jasa	139.955.650,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	3 jasa	150,875,650,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	8.320.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	36.037.250	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	49.037.250	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	93.518.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	93.518.400	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah BMD (unit)	35 unit	574.015.470,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Grabagan	Jumlah Pemeliharaan BMD	4 Jenis	824,156,470,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Grabagan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	43.118.073,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Grabagan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	43.259.073,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Grabagan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	2.995.143,00	Pemeliharaan Mebel	Kec. Grabagan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	2.995.143,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Grabagan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	14.695.100,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Grabagan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	14.695.100,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Grabagan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	513.207.154,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Grabagan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	763.207.154,00	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Grabagan	Persentase penyelesaian pelayanan kecamatan sesuai ketentuan	100%	8.780.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Grabagan	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	6.622.500,00	
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Grabagan	Presentase penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 %	8.780.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec, Grabagan	Presentase penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100 %	6.622.500,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec, Grabagan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	9 Dokumen	8.780.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Grabagan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1200 Dokumen	6.622.500,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Grabagan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	65.845.600,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Grabagan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	62.513.350,00	
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Grabagan	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan BUMDes/ kelembegaan desa	11 Desa	65.845.600,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Grabagan	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan BUMDes/ kelembagaan desa	11 Desa	62.513.350,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	65.845.600,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	62.513.350,00	
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Grabagan	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	50.478.750,00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Grabagan	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	48.174.750,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
10	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Grabagan	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	50.478.750,00	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Grabagan	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan	48.174.750,00	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 laporan	50.478.750,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Grabagan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	48.174.750,00	-
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Grabagan	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	40.945.000,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Grabagan	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	28,983,000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Grabagan	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	11 desa	40.945.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Grabagan	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	11 desa	28,983,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Grabagan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	17.895.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Grabagan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	11.620.000	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undanga	Kec. Grabagan	jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	11.075.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undanga	Kec. Grabagan	jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	8.820.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Grabagan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditindaklanjuti	6 Dokumen	11.975.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Grabagan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditindaklanjuti	6 Dokumen	8.543.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Grabagan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 orang	46.407.090,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Grabagan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	15.356.150,00	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Grabagan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 orang	46.407.090,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Grabagan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	15.356.150,00	-

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil Musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Grabagan Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Kecamatan : Grabagan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
N I H I L					

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya pencapaian Rencana Kerja Kecamatan Grabagan, disampaikan pula Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan targetnya sebagaimana di bawah ini :

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan ini menjadi arah Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan"

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Kecamatan Grabagan berperan dalam mendukung misi ke-2, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu

"Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan" dan sasaran **"Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah"** dan misi ke-4, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu **"Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani"** dan sasaran **"Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital".** Dari sasaran RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Grabagan Tahun 2025-2029 adalah **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa".**

Tujuan ini memiliki 2 indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Indikator tersebut terdiri dari Presentase Desa Mandiri dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan serangkaian kinerja yang dapat diwujudkan dalam bentuk tahapan, fokus, ataupun aspek prioritas dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan renstra. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Grabagan Tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yakni:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat

Masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan ketercapaiannya melalui indikator yang terukur. Indikator yang dijadikan acuan sasaran terdiri dari:

1. Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Grabagan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3	4
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	45,45
	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	27,27
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,96
	Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,96
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,98

Dalam upaya untuk mencapai target Tujuan Sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan, Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban sebagaimana tabel berikut.

TABEL 3.2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

KECAMATAN GRABAGAN

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,50 poin	3.786.373.666,00	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74,25 poin	3.722.130.133,00	(64.243.533,00)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	47.483.792,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	8 Dokumen	45.994.792,00	(1.489.000,00)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	42.007.792,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	42.007.792,00	0,00
7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.476.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.987.000,00	(1.489.000,00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Dokumen	2.880.708.506,00	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	2.528.159.783,00	(352.548.723,00)
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	2.847.953.506,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	2.847.953.506,00	0,00
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	32.755.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23 Laporan	32.755.000,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	11 Layanan	129.513.048,00	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 jenis	90.891.388,00	(38.621.660,00)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	2.120.710,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	2.120.710,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.609.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.609.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	39.261.768,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.186.768,00	(-9.075.000,00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.465.250,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.946.750,00	(1.518.500,00)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	56.056.320,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	28.028.160,00	(28.028.160)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Unit	3.059.200,00	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 jenis	81.076.050,00	78.016.850,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3.059.200,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	3.059.200,00	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	78.016.850,00	78.016.850,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	10 jasa	139.955.650,00	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	3 jasa	150.875.650,00	10.920.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.400.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	8.320.000,00	(2.080.000,00)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.037,250,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49,037,250,00	13.000.000,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	93.518.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	93.518.400,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD (unit)	35 unit	574.015.470,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 jenis	824.156.470,00	250.141.000,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	43.118.073,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	43.259.073,00	141.000,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	2.995.143,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	2.995.143,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	14.695.100,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14.695.100,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	513.207.154,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	763.207.154,00	250.000.000,00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	8.780.000,00	Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	6.622.500,00	(2.157.500,00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	8.780.000,00	Presentase penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	1 Jenis	6.622.500,00	(2.157.500,00)
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	9 dokumen	8.780.000,00	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1200 dokumen	6.622.500,00	(2.157.500,00)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	8.780.000,00	Presentase penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan	100%	6.622.500,00	(2.157.500,00)
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	9 dokumen	8.780.000,00	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1200 dokumen	6.622.500,00	(2.157.500,00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	65.845.600,00	Persentase Desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	62.513.350,00	(3.332.250,00)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan BUMDes/ kelembagaan desa	11 Desa	65.845.600,00	Jumlah desa yang Mendapatkan pembinaan BUMDes/ kelembagaan desa	7 desa	62.513.350,00	(3.332.250,00)
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	65.845.600,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	62.513.350,00	(3.332.250,00)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	50.478.750,00	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	48.174.750,00	(2.304.000,00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah intensitas koordinasi forkopimka dan instansi vertikal tindak lanjut penyelesaaian terhadap masalah trantibum dan pengaduan masyarakat	100%	50.478.750,00	Jumlah intensitas koordinasi forkopimka dan instansi vertikal tindak lanjut penyelesaaian terhadap masalah trantibum dan pengaduan masyarakat	100%	48.174.750,00	(2.304.000,00)
7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	11 laporan	50.478.750,00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	12 laporan	48.174.750,00	(2.304.000,00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih dengan Pagu Anggaran
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.05	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	97%	46.407.090,00	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	15.356.150,00	(-31.050.940,00)
7.01.06.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	97%	46.407.090,00	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi keuangan, kemasyarakatan dan ketertiban umum	100%	15.356.150,00	(-31.050.940,00)
7.01.05.2.01.00 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	46.407.090,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	15.356.150,00	(-31.050.940,00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			**Selisih dengan Pagu Anggaran**
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7.01.06.2.01.004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undanga	jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	11.075.000,00	jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	8.820.000,00	(2.255.000,00)
7.01.06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	11.975.000,00	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	8.543.000,00	(3.432.000,00)

BAB IV
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan sebagai bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2025, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Grabagan;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus menjadikan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Grabagan, dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025; dan
4. Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan Seluruh Kasi dan Kasubag Berkewajiban Untuk Melaksanakan Program yang Terdapat Pada Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Grabagan Dengan Berkolaberasi Dengan Pemerintah Kabupaten Tuban dan Seluruh Masyarakat Kecamatan Grabagan.
5. Kecamatan Grabagan dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan Pelaku dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
6. Sebagai Umpan Balik yang diperoleh dari evaluasi atau analisis terhadap tindakan, keputusan, atau hasil yang telah dicapai sebelumnya, umpan balik ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa mendatang Sehingga Capaian Kinerja Semakin Baik, hal ini memungkinkan untuk menghindari kesalahan yang sama dan mengptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

7. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan seksi-seksi agar konsisten dalam melaksanakan Program dan Pembangunan.

Plt. CAMAT GRABAGAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

SUCIPTO,S.Sos.MM

BUPATI TUBAN,

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY